

OVERCOMING CHANGE TO GROW HEALTHIER AND MORE COMPETITIVE

Mengatasi Tantangan Perubahan untuk
Tumbuh Semakin Kuat dan Berdaya Saing



SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

Laporan Tahunan 2025 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ini disusun untuk mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu POJK No. 29/POJK.04/2016 dan SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 mengenai Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Dokumen ini mencakup evaluasi keuangan, kinerja operasional, rencana masa depan, strategi, kebijakan, dan tujuan perusahaan. Kami ingin menyampaikan bahwa proyeksi dan pernyataan yang terkandung di dalamnya memperhitungkan risiko dan ketidakpastian, yang dapat menyebabkan perbedaan signifikan dalam perkembangan sebenarnya dibandingkan dengan apa yang dilaporkan. Semua pernyataan tentang masa depan didasarkan pada asumsi tentang kondisi saat ini dan masa depan perusahaan, serta lingkungan bisnis yang mempengaruhi operasi PUSRI.

Pernyataan-pernyataan prospektif tersebut dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan prediksi kondisi yang akan datang di lingkungan bisnis di mana PUSRI menjalankan kegiatan usaha. Kami tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan rujukan dan telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan ini memuat kata "Pupuk Sriwidjaja Palembang", "Pupuk Sriwidjaja", "Perusahaan", "Perseroan" dan PUSRI yang didefinisikan sebagai PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang menjalankan kegiatan usaha dibidang produksi pupuk Urea, pupuk NPK dan produk sampingan lainnya.

This 2025 Annual Report of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang has been prepared to comply with regulations issued by the Financial Services Authority, namely POJK No. 29/POJK.04/2016 and SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 concerning the Annual Report of Issuers or Public Companies. This document includes financial evaluations, operational performance, future plans, strategies, policies, and the Company's objectives. We would like to state that the projections and statements contained herein take into account risks and uncertainties, which may cause significant differences in actual developments compared to what is reported. All forward-looking statements are based on assumptions regarding the Company's current and future conditions, as well as the business environment that affects PUSRI's operations.

These forward-looking statements are made based on various assumptions regarding current conditions and predictions of future conditions in the business environment in which PUSRI conducts its business activities. We do not guarantee that the documents used as references and whose validity has been verified will produce certain results as expected.

This Annual Report contains the terms "Pupuk Sriwidjaja Palembang", "Pupuk Sriwidjaja", "Company", "Perseroan," and PUSRI, which are defined as PT Pupuk Sriwidjaja Palembang that conducts business activities in the production of Urea fertilizer, NPK fertilizer, and other by-products.

TEMA DAN ARTI TEMA

THEME AND THE MEANING OF A THEME



OVERCOMING CHANGE TO GROW HEALTHIER AND MORE COMPETITIVE

**Mengatasi Tantangan Perubahan untuk
Tumbuh Semakin Kuat dan Berdaya Saing**

Tema ini menggambarkan berbagai upaya yang dijalankan PUSRI untuk mengatasi beragam perubahan lingkungan industri, termasuk perubahan penetapan harga jual tertinggi dan perubahan kebijakan perhitungan alokasi besaran penggantian subsidi menjadi disesuaikan dengan fluktuasi harga pupuk di pasar internasional yang ditetapkan Pemerintah.

PUSRI merespons perubahan kebijakan tersebut dengan semakin mengintensifkan implementasi strategi 4C, yang terdiri dari cost leadership, competitive to market, competency of employee dan sustainability & clean industry dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing produk di pasar lokal maupun Asia. PUSRI meyakini seluruh upaya yang dijalankan tersebut akan membuat kinerja Perusahaan di masa mendatang semakin membaik seiring dengan meningkatnya efisiensi operasional.

This theme reflects the various efforts undertaken by PUSRI to overcome changes in the industry landscape, including changes to government-set highest retail prices and shifts in fertilizer pricing policies in the international market.

PUSRI has responded to these policy changes by further intensifying the implementation of its 4C strategy, comprising cost leadership, competitive to market, competency of employee, and sustainability & clean industry. Through this strategy, the Company aims to enhance efficiency and strengthen the competitiveness of its products in both domestic and Asian markets. PUSRI believes these initiatives will support stronger future performance alongside improving operational efficiency.

KESINAMBUNGAN TEMA

CONTINUITY OF THE THEME

2024



Berkomitmen pada Industri Hijau dan Berkelanjutan, untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional *Committing to Green Sustainability Industry, Supporting National Food Security*

Tema ini menggarisbawahi strategis dan vitalnya peran industri pupuk dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang lestari, berkualitas dan berkesinambungan. Oleh karenanya sejak beberapa tahun terakhir PUSRI mengembangkan dan memperkuat pilar-pilar kinerja yang dimiliki, baik dari sisi operasional, rancang bangun, jaringan distribusi maupun kesatuan tata kelola dalam satu ekosistem terintegrasi berbasis teknologi digital terkini agar dapat mendukung pembangunan ketahanan pangan nasional yang selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang.

This theme underscores the strategic and vital role of the fertilizer industry in supporting the achievement of sustainable, high-quality, and continuous national development goals. Therefore, in recent years PUSRI has developed and strengthened its performance pillars, both in terms of operations, engineering design, distribution networks, as well as unified governance within a single integrated ecosystem based on the latest digital technology, in order to support the development of national food security in alignment with long-term development objectives.

2023



BERKELANJUTAN KE TINGKAT SELANJUTNYA *Sustain to The Next Level*

Berbagai inisiatif yang dilakukan PUSRI sepanjang tahun 2023 merupakan langkah-langkah strategis dan sistemik untuk memperkuat fundamental bisnis Perusahaan dalam jangka panjang serta selaras dengan bisnis berkelanjutan.

PUSRI optimis bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan dapat membawa Perusahaan menuju pertumbuhan yang kuat serta memberikan manfaat optimum bagi seluruh pemangku kepentingan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia

The various initiatives undertaken by PUSRI throughout 2023 are strategic and systemic steps to strengthen the Company's business fundamentals in the long term, while aligning with sustainable business practices.

PUSRI is optimistic that these efforts will lead the Company toward robust growth and provide optimal benefits for all stakeholders, in line with Indonesia's sustainable development goals

2022

Inovasi dan Digitalisasi untuk Memperkuat Daya Saing

Innovation and Digitalization to Strengthen Competitiveness

Dalam rangka mewujudkan visi perusahaan menjadi perusahaan Agro industri unggul di Asia, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) menumbuhkan semangat inovasi untuk menciptakan proses kerja yang lebih efektif dan efisien, serta solusi kreatif dalam pengendalian biaya yang baik. Upaya ini membuahkan hasil dengan pencapaian kinerja PUSRI yang terus bertumbuh dari masa ke masa.

Pada tahun 2022 PUSRI terus mengintensifkan langkah-langkah efisiensi operasional dan optimalisasi sumber daya dari tahun sebelumnya dengan memperkuat digitalisasi yang telah berhasil mengangkat kinerja PUSRI menjadi lebih baik, serta berhasil mendapatkan penghargaan bidang Inovasi baik dari tingkat Nasional maupun Internasional.

In order to realize its vision of becoming a leading agro-industrial company in Asia, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) fosters an innovation spirit to create more effective and efficient work processes, as well as creative solutions in cost control. These efforts have borne fruit, as PUSRI's performance continues to grow over time.

In 2022, PUSRI intensified operational efficiency measures and optimized resources from the previous year by strengthening digitalization, which successfully improved PUSRI's performance and earned recognition in the field of Innovation at both the national and international levels.



2021

Transformasi Bisnis & Digitalisasi Menuju PUSRI Maju 2025

Business Transformation & Digitalization Towards Pusri Maju 2025

Tema ini menunjukkan fokus PUSRI pada upaya-upaya transformasi bisnis serta penguatan basis digital dalam upaya memperkuat bisnis. Sebagai salah satu langkah strategis untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan agroindustri unggul di Asia, PUSRI yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), senantiasa melaksanakan perubahan dan layanan terbaik bagi stakeholders. Untuk itu PUSRI melaksanakan serangkaian tahapan transformasi bisnis, salah satunya melalui Program Agrosolution bersama PT Pupuk Indonesia (Persero). Dalam Program Agrosolution, petani yang terlibat diberikan pendampingan intensif mengenai budidaya tanaman, aplikasi teknologi pertanian mutakhir, akses permodalan dan offtake hasil panen yang dilakukan oleh stakeholder. Program ini dapat membantu petani mencapai hasil yang optimal serta meningkatkan kesejahteraan petani.

This theme highlights PUSRI's focus on business transformation efforts and strengthening the digital foundation to enhance its business. As one of the strategic steps to achieve its vision of becoming a leading agro-industrial company in Asia, PUSRI a subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero), consistently implements changes and delivers the best services to its stakeholders. To this end, PUSRI is undertaking a series of business transformation phases, one of which is the Agrosolution Program in collaboration with PT Pupuk Indonesia (Persero). In the Agrosolution Program, participating farmers receive intensive guidance on crop cultivation, the application of advanced agricultural technology, access to capital, and harvest offtake facilitated by stakeholders. This program helps farmers achieve optimal yields and improve their welfare.



2020

Akselerasi Transformasi Bisnis menuju Perusahaan Agro Industri Unggul di Asia Accelerating Business Transformation to be Asia's Leading Agro Industry Company

Tema ini menunjukkan upaya PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mempertahankan bisnis yang berkesinambungan, di puncak mewabahnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Komitmen ini sejalan dengan upaya mewujudkan transformasi bisnis dan peningkatan daya saing Perusahaan agar terus mampu memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lain.

Ikhtisar tersebut diterjemahkan menjadi akselerasi transformasi bisnis melalui beragam kebijakan strategis, baik dari segi operasional hingga penunjang bisnis. Selain itu, optimalisasi dalam bidang produksi agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi dan harga yang kompetitif, sehingga mampu bersaing di pasar. Peningkatan kualitas produksi tersebut, antara lain dilakukan melalui revitalisasi pabrik P-III dan P-IV menjadi pabrik P-IIIB.

This theme reflects PT Pupuk Sriwidjaja Palembang's efforts to maintain a sustainable business during the peak of the COVID-19 pandemic in 2020. This commitment aligns with the company's goal of achieving business transformation and enhancing its competitiveness to continue delivering added value to shareholders and other stakeholders.

This overview is translated into accelerated business transformation through various strategic policies, from operational to business support. Moreover, production optimization is being implemented to ensure high-quality products at competitive prices, allowing them to compete in the market. This improvement in production quality is achieved, among other things, through the revitalization of P-III and P-IV plants into P-IIIB plant.



2019

Meningkatkan Komitmen kepada Pelanggan melalui Inovasi Berkelanjutan dan Solusi Agro Bisnis Terintegrasi Increasing Commitment to Customers Through Sustainable Innovation and Integrated Agro Business Solutions

Tema "Meningkatkan Komitmen kepada Pelanggan melalui Inovasi Berkelanjutan dan Solusi Agro Bisnis Terintegrasi" menggambarkan mata rantai dalam proses bisnis PUSRI dengan strategi memperkuat relasi PUSRI dengan pasar dan pelanggan. Dengan berbagai inovasi yang telah dilakukan, PUSRI akan berupaya membangun Integrated Agro Industri dan menciptakan nilai tambah bagi kesinambungan bisnisnya hingga masa-masa yang akan datang.

Berbagai inovasi yang telah diinisiasi di tahun-tahun sebelumnya, seperti solusi digital e-Pas dan penjualan ritel melalui PUSRI Mart menjadi fondasi bagi PUSRI untuk mewujudkan transformasi tersebut. PUSRI juga mampu mendorong proses produksi dengan rasio konsumsi Gas Bumi yang lebih efisien, yang menandakan bahwa PUSRI telah siap membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

The theme "Increasing Commitment to Customers through Sustainable Innovation and Integrated Agro Business Solutions" illustrates the chain of processes within PUSRI's business, with a strategy focused on strengthening relationships with the market and customers. Through various innovations, PUSRI strives to build an Integrated Agro Industry and create added value for the sustainability of its business in the years to come.

The innovations initiated in previous years, such as the e-Pas digital solution and retail sales through PUSRI Mart, serve as the foundation for PUSRI in realizing this transformation. PUSRI has also successfully driven production processes with a more efficient natural gas consumption ratio, signaling that PUSRI is prepared to build a sustainable business ecosystem.



KILAS KINERJA UTAMA 2025

KEY PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2025

PENCAPAIAN KINERJA OPERASIONAL UTAMA

ACHIEVEMENT OF MAIN OPERATIONAL PERFORMANCE

Volume Produksi Urea 2025

Urea Production Volume in 2025

ton | tons

1.780.349

Total Produksi Urea 2025 : 1.780.349 Ton
Total Urea Production in 2025 1,780,349 Tons

Volume Penjualan Urea 2025

Urea Sales Volume in 2025

ton | tons

1.763.533

Penjualan Urea 2025: 1.763.533 Ton > Naik 6,38 %
Urea Sales in 2025: 1,763,533 Tons > Increased by 6,38%

Volume Produksi Amoniak 2025

Amoniaa Production Volume in 2025

ton | tons

1.211.032

Total Produksi Amoniak 2025: 1.211.032 Ton
Total Ammonia Production in 2025: 1,211,032 Tons

Volume Penjualan Amoniak 2025

Ammonia Sales Volume in 2025

ton | tons

105.277

Total Penjualan Amoniak 2025: 105.277 Ton
Total Ammonia Sales in 2025: 105,277 Tons

Volume Produksi NPK 2025

NPK Production Volume in 2025

ton | tons

373.919

Total Produksi NPK 2025: 373.919 Ton > Naik 2,90%
Total NPK Production in 2025: 373,919 Tons > Increased by 2,90%

Volume Penjualan NPK 2025

NPK Sales Volume in 2025

ton | tons

387.445

Total Penjualan NPK 2025: 387.445 Ton > Naik 3,43%
Total NPK Sales in 2025: 387,445 Tons > Increased by 3,43%

PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN UTAMA

KEY FINANCIAL PERFORMANCE ACHIEVEMENTS

Nilai Pendapatan

Revenue

triliun | trillion

13,87

Total Pendapatan 2025 Rp13,87 triliun > Naik 2,52%
Total Revenue in 2025: IDR 13.87 trillion > Increased by 2.52%

Laba Bersih

Net Profit

miliar | billion

Rp613,53

Laba Bersih 2025: Rp613,53 Miliar
Net Profit in 2025: IDR 613.53 Billion

PENCAPAIAN PENTING LAINNYA

OTHER NOTABLE ACHIEVEMENTS

Aspek Environment, Social, Governance (ESG)

S&P Global ESG Score :

67

> Naik 26 Poin dari Tahun 2024
> Increased 26 Point from 2024

Aspek Lingkungan

Environmental Aspect

PROPER PERINGKAT HIJAU 2025

KONSISTENSI PUSRI DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN

PUSRI'S CONSISTENCY IN SUPPORTING FOOD SECURITY

Sebagai salah satu produsen pupuk Nasional dalam Pupuk Indonesia Grup (PI Grup), PUSRI memegang teguh visi dan misinya dalam mendukung tercapainya ketahanan pangan sesuai Asta Cita Kedua Presiden Prabowo Subianto, dengan senantiasa memenuhi kewajiban penjualan + 75% produksi Urea dan + 100% produksi NPK nya ke Sektor Subsidi, sekalipun dihadapkan pada kondisi fasilitas produksi yang telah menua.

As one of the national fertilizer producers within the Pupuk Indonesia Group (PI Group), PUSRI firmly upholds its vision and mission to support food security, in accordance with its Second Asta Cita by President Prabowo Subianto, with consistently fulfilling its obligation to sell 75% of its urea production and 100% of its NPK production to the subsidized sector, even in the face of aging production facilities.

PUSRI MENDOMINASI PASOKAN PUPUK UREA SUBSIDI

Pada distribusi Urea bersubsidi, konsistensi ini membuat kontribusi pasokan pupuk urea dari PUSRI mendominasi di kisaran lebih dari 35% dari 5 produsen pupuk urea PI Grup, seperti tampak pada tabel dan grafik berikut.

PUSRI DOMINATES SUBSIDIZED UREA FERTILIZER SUPPLY

In the distribution of subsidized urea, this consistency has led to PUSRI's dominant contribution to urea fertilizer supply, accounting for over 35% of the five PI Group urea fertilizer producers, as shown in the following table and graph.

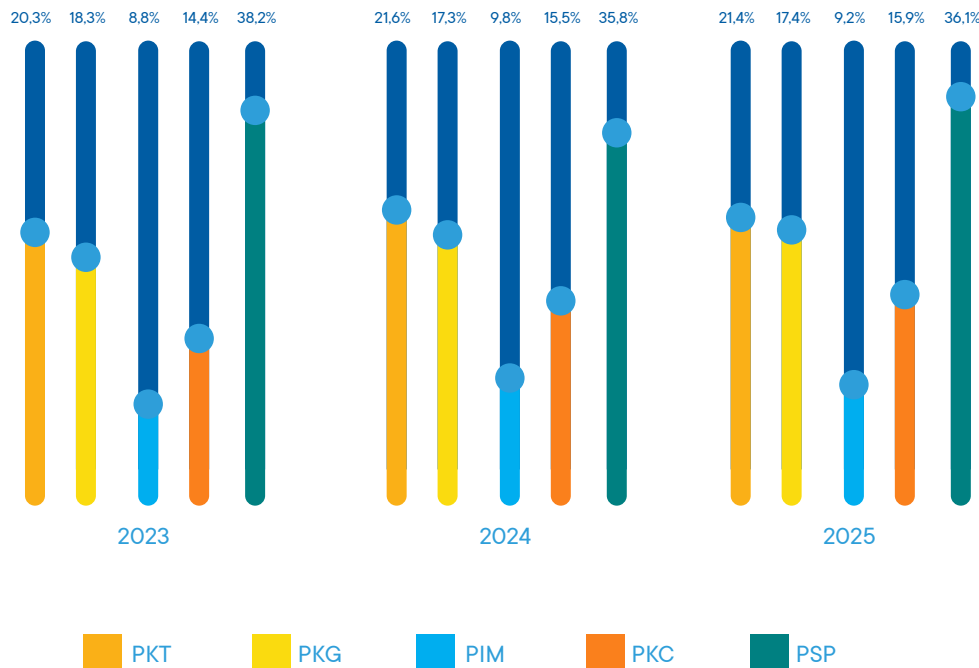
Pasokan Pupuk Urea Subsidi PI Grup menurut produsen (ton)

PI Group Subsidized Urea Fertilizer Supply by Producer (tons)

Tahun	PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)	PT Petrokimia Gresik (PKG)	PT Pupuk Iskandar Muda (PIM)	PT Pupuk Kujang (PKC)	Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP)	Total Pupuk Indonesia (Persero) Group
2025	813.438	660.169	347.712	605.412	1.371.989	3.798.720
2024	809.628	647.754	368.733	579.233	1.340.556	3.745.904
2023	737.204	664.214	319.116	521.870	1.384.540	3.626.944

Persentase Kontribusi Pupuk Urea Subsidi PI Grup (%)

Percentage of Subsidized Urea Fertilizer Contribution of PI Group



PUSRI MEMENUHI KEWAJIBAN PASOKAN PUPUK NPK SUBSIDI SESUAI KAPASITASNYA

Pada distribusi Pupuk NPK bersubsidi, konsistensi ini membuat kontribusi pasokan pupuk NPK dari PUSRI berfluktuasi di kisaran 8 s.d. 12% dari 5 produsen pupuk NPK PI Grup sesuai kapasitasnya, seperti tampak pada tabel dan grafik berikut.

PUSRI FULFILLS ITS OBLIGATION TO SUPPLY SUBSIDIZED NPK FERTILIZER ACCORDING TO ITS CAPACITY

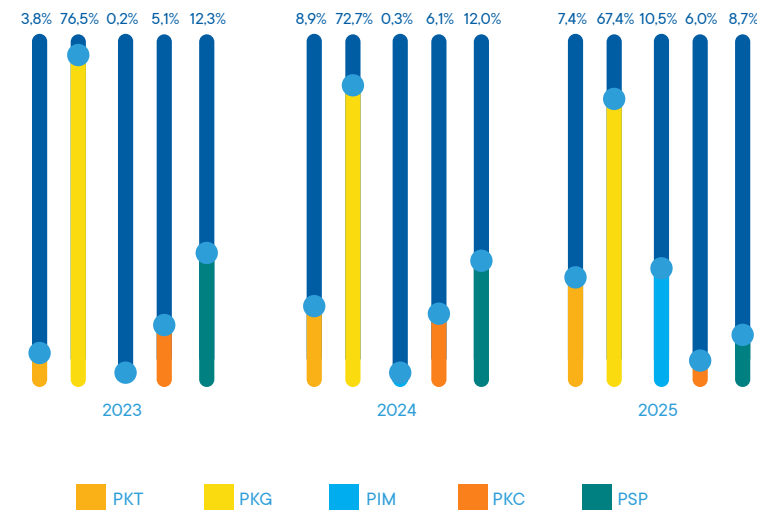
In the distribution of subsidized NPK fertilizer, this consistency causes PUSRI's NPK fertilizer supply contribution to fluctuate between 8 and 12% of the five PI Group NPK fertilizer producers' capacity, as shown in the following table and graph.

Pasokan Pupuk NPK Subsidi PI Grup menurut produsen (Ton)

PI Group Subsidized NPK Fertilizer Supply by Producer (Tons)

Tahun	PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)	PT Petrokimia Gresik (PKG)	PT Pupuk Iskandar Muda (PIM)	PT Pupuk Kujang (PKC)	Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP)	Total Pupuk Indonesia (Persero) Group
2025	303,019	2,745,029	429,238	242,460	355,126	4,074,872
2024	294,933	2,398,517	8,627	200,007	395,142	3,297,226
2023	97,286	1,972,381	6,321	131,584	310,498	2,518,070

Persentase Kontribusi Pupuk NPK Subsidi PI Grup (%)



PUSRI KONSISTEN MEMASOK PUPUK SUBSIDI

Dalam dua tahun terakhir pasar pupuk global mengalami beberapa guncangan, meliputi: gangguan rantai pasok, keterbatasan bahan baku gas alam dan pembatasan pasokan dari produsen utama, yang membuat harga urea meningkat tajam. Untuk tahun 2025, rata-rata harga pupuk urea global meningkat sebesar 24,9% (Pink Sheet World Bank), sementara harga NPK global rata-rata meningkat 20–21% (World Bank).

PUSRI tetap memenuhi kewajibannya dengan mengalokasikan 70–77% produksi pupuk urea untuk pasar subsidi dan rata-rata 100% produksi pupuk NPK untuk pasar subsidi seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

PUSRI CONSISTENTLY SUPPLIES SUBSIDIZED FERTILIZER

Over the past two years, the global fertilizer market has experienced several shocks, including supply chain disruptions, limited natural gas feedstock, and supply restrictions from major producers, which have led to a soaring urea prices. By 2025, the average global urea fertilizer price is projected to increase by 24.9% (World Bank Pink Sheet), while the average global NPK price is projected to increase by 20–21% (World Bank).

PUSRI continues to fulfill its obligations by allocating 70–77% of urea fertilizer production to the subsidized market and an average of 100% of NPK fertilizer production to the subsidized market, as shown in the following table.

Produksi serta Persentase Penjualan Subsidi Pupuk Urea dan NPK PUSRI (ton)

Production and Percentage of Subsidized Urea and NPK Fertilizer Sales from PUSRI (tons)

Tahun Year	Urea			NPK		
	Produksi Production	Volume Penjualan Subsidi Subsidized Sales Volume	% Penjualan Subsidi Subsidized Sales	Produksi Production	Volume Penjualan Subsidi Subsidized Sales Volume	% Penjualan Subsidi Subsidized Sales
2025	1.780.349	1.371.989	77.1%	373.919	355.126	95.0%
2024	1.857.832	1.340.556	72.2%	363.384	395.142	108.7%
2023	2.010.279	1.384.540	68.9%	328.349	310.498	94.6%

PUSRI TETAP MENCATATKAN SEJUMLAH KINERJA SESUAI TARGET DITENGAH KETERBATASAN

Di tahun pelaporan kondisi beberapa unit produksi Perusahaan yang sudah semakin menua membuat Perusahaan harus mengatasi kendala yang berat, namun PUSRI tetap berhasil mencapai beberapa target kinerja seperti tampak pada tabel berikut.

PUSRI CONTINUES TO ACHIEVE TARGETED PERFORMANCE DESPITE LIMITATIONS

In the reporting year, the aging condition of several of the Company's production units required the Company to overcome significant challenges. However, PUSRI still managed to achieve several performance targets, as shown in the following table.

Tabel Pencapaian Target RKAP 2025

Table of 2025 RKAP Target Achievement

Uraian Description	Realisasi 2025 Realization 2025	Target 2025 Target 2025	Pencapaian (%) Achievement (%)
Tonase Produksi Pupuk Fertilizer Production Tonnage	2.154.268	2.350.000	91,67
Tonase Penjualan Pupuk Fertilizer Sales Tonnage	2.150.978	2.250.240	95,59
Nilai Penjualan Pupuk Fertilizer Sales Value	13.033.450	13.797.155	94,46
Pendapatan (Rp juta) Revenue	13.874.322	14.684.797	94,48
Laba Bersih Tahun Berjalan (Rp juta) Profit for the Year	613.527	610.444	100,51
Aset Assets	32.198.389	31.638.816	101,77
Liabilitas Liabilities	12.914.281	12.424.613	103,94
Ekuitas Equity	19.284.108	19.214.203	100,36

PUSRI Bersiap Menyambut Peluang

Pada akhir tahun 2025 Pemerintah Indonesia telah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi, ini membuka peluang peningkatan permintaan. Pada awal tahun 2026 Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengubah skema penggantian subsidi, dari BPP + margin, menjadi *marked to market*, ini membuka peluang produsen pupuk untuk meningkatkan kinerja keuangan, dengan syarat mampu meningkatkan efisiensi operasional.

PUSRI siap meraih peluang tersebut, dengan berupaya keras menyelesaikan pembangunan Pabrik Pusri IIIB yang saat ini telah mencapai progress sekitar 92,6%, agar di tahun buku 2027 dapat beroperasi.

KONTRIBUSI PUSRI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NEGERI

Selain mendukung tercapainya ketahanan pangan melalui pemenuhan kewajiban penyediaan pupuk bersubsidi, PUSRI juga konsisten berperan dan melaksanakan program tanggung jawab sosial lingkungan melalui Program-program Prioritas (Bidang Pendidikan, Lingkungan dan Pengembangan UMK), Program Community Involve Development (CID) serta Program Creating Share Value.

PUSRI juga secara konsisten menjaga lingkungan melalui program dekarbonisasi dan saat ini fokus penyelesaian pembangunan Pabrik baru yaitu Pabrik P IIIB dimana nantinya akan lebih efisien penggunaan bahan baku, hemat energi dan ramah lingkungan. Pada aspek lingkungan ini PUSRI mendapatkan PROPER Hijau. Selain itu, PUSRI memperoleh S&P Global ESG Score sebesar 67/100.

PUSRI PREPARES TO SEIZE OPPORTUNITIES

At the end of 2025, the Indonesian government lowered the highest retail price (HET) for subsidized fertilizer, creating an opportunity for increased demand. In early 2026, the Indonesian government officially changed the subsidy replacement scheme from BPP + margin to marked-to-market. This provides an opportunity for fertilizer producers to improve their financial performance, provided they can increase operational efficiency.

PUSRI is ready to seize these opportunities by working diligently to complete the construction of the Pusri IIIB Plant, which is currently at approximately 92.6% progress, with the goal of operational completion in fiscal year 2027.

PUSRI'S CONTRIBUTION TO SUPPORT NATIONAL DEVELOPMENT

Besides supporting food security by fulfilling its obligation to provide subsidized fertilizer, PUSRI also consistently plays a role in implementing environmental social responsibility programs through Priority Programs (Education, Environment, and MSE Development), the Community Involved Development (CID) Program, and the Creating Shared Value Program.

PUSRI also consistently protects the environment through its decarbonization program and is currently focused on completing the construction of its new plant, namely Plant P IIIB. These initiatives are expected to improve raw material utilization, enhance energy efficiency, and promote environmentally responsible operations. In this environmental category, PUSRI was awarded a Green PROPER rating. In addition, PUSRI achieved an S&P Global ESG Score of 67 out of 100.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARDS AND CERTIFICATIONS

PENGHARGAAN

Pada tahun 2025 PUSRI mendapatkan 20 (dua puluh) penghargaan dari pihak ketiga, baik berskala internasional, nasional maupun regional atas berbagai prestasinya dalam menjalankan kegiatan usaha dengan tetap memperhatikan kaidah penyelenggaraan kegiatan yang terbaik, baik pada aspek ekonomi, lingkungan, sosial maupun tata kelola, sebagai berikut.

Skala Internasional | International Scale

- 1 **Nama Penghargaan | Name of Award**
2024/25 Vision AWARDS
Annual Report Competition

Nama Ajang | Name of Event
League of American Communications Professionals (LACP) Award - 2025

Kategori | Category
• **Gold Award Kategori Agribusiness dan Chemicals**
• **Top 100 Report Worldwide**

Penyelenggara | Organizer
League of American Communications Professionals (LACP) LLC

Tanggal | Date
31 Desember 2025 | Desember 31, 2025
- 2 **Nama Penghargaan | Name of Award**
2024/25 Vision AWARDS
Sustainability Report Competition

Nama Ajang | Name of Event
League of American Communications Professionals (LACP) Award - 2025

Kategori | Category
• **Platinum Award Kategori Chemicals**
• **Top 100 Report Worldwide**

Penyelenggara | Organizer
League of American Communications Professionals (LACP) LLC

Tanggal | Date
31 Desember 2025 | Desember 31, 2025

AWARDS

In 2025, PUSRI received 20 (twenty) awards from third parties, across international, national, and regional levels, for its various achievements in conducting business activities while adhering to the best business principles, including economic, environmental, social, and governance aspects, as follows.

- 3 **Nama Penghargaan | Name of Award**
Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)
2025

Nama Ajang | Name of Event
Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) Award - 2025

Kategori | Category
Predikat Gold Rank
Atas Komitmen Pusri Dalam Praktik Berkelanjutan yang Transparan, Bertanggung Jawab, dan Berdampak bagi Masyarakat dan Lingkungan

Penyelenggara | Organizer
National Center for Corporate Reporting (NCCR)

Tanggal | Date
28 November 2025 | November 28, 2025
- 4 **Nama Penghargaan | Name of Award**
Asia Responsible Enterprise Awards 2025

Nama Ajang | Name of Event
Asia Responsible Enterprise Awards 2025

Kategori | Category
Social Empowerment Category

Penyelenggara | Organizer
Asia Responsible Enterprise Awards

Tanggal | Date
31 Desember 2025 | December 31, 2025



Skala Nasional | National Scale

5 Nama Penghargaan | Name of Award
PROPER Peringkat EMAS – 2024
PROPER GOLD RATING – 2024

Nama Ajang | Name of Event
PROPER – 2024

Kategori | Category
Proper Peringkat EMAS | PROPER GOLD Rating

Penyelenggara | Organizer
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Ministry of Environment and Forestry

Tanggal | Date
24 Februari 2025 | February 24, 2025

6 Nama Penghargaan | Name of Award
Anugerah BUMN 2025

Nama Ajang | Name of Event
Anugerah BUMN 2025

Kategori | Category
• **Inovasi Bisnis Terbaik, | Best Business Innovation**
• **The Best CEO Leading Change & Innovation untuk Dirut Pusri, Daconi Khotob**
The Best CEO Leading Change & Innovation for Pusri President Director, Daconi Khotob

Penyelenggara | Organizer
BUMN Track

Tanggal | Date
20 Maret 2025 | March 20, 2025

7 Nama Penghargaan | Name of Award
UMKM BUMN AWARD

Nama Ajang | Name of Event
UMKM BUMN Award 2025

Kategori | Category
• **Platinum untuk Pilar Sosial**
Platinum for the Social Pillar
• **Gold untuk Bidang Lingkungan**
Gold for the Environmental Sector
• **Gold untuk Bidang Ekonomi**
Gold for the Economic Sector

Penyelenggara | Organizer
BUMN Track

Tanggal | Date
22 Juli 2025 | July 20, 2025

8 Nama Penghargaan | Name of Award
UMKM dan TJSL Award

Nama Ajang | Name of Event
TJSL & CSR AWARD 2025

Kategori | Category
• **Predikat Platinum (5 Star) pada Pilar Sosial**
Platinum Predicate (5 Stars) for the Social Pillar
• **Predikat Gold (4 Star) pada Pilar Ekonomi dan Lingkungan.**
Gold Predicates (4 Stars) for Economy and Environment Pillar.

Penyelenggara | Organizer
BUMN Track

Tanggal | Date
25 Juni 2025 | June 25, 2025

9 Nama Penghargaan | Name of Award
Rintisan Teknologi Industri (Rintek) 2025

Nama Ajang | Name of Event
Rintisan Teknologi Industri (Rintek)

Kategori | Category
Inovasi Pengembangan Produk Diesel Exhaust Fluid (DEF) dari Bahan Baku Urea
Innovation in the Development of Diesel Exhaust Fluid (DEF) Products from Urea Raw Materials

Penyelenggara | Organizer
Kementerian Perindustrian RI
Ministry of Industry of the Republic of Indonesia

Tanggal | Date
17 September 2025 | September 17, 2025

10 Nama Penghargaan | Name of Award
Penghargaan Subroto | Subroto Award

Nama Ajang | Name of Event
Penghargaan Subroto 2025 | 2025 Subroto Award

Kategori | Category
Bidang Efisiensi Energi Kategori Manajemen Energi di Industri
Energy Efficiency Field Energy Management Category in Industry

Penyelenggara | Organizer
Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral RI
Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia

Tanggal | Date
24 Oktober 2025 | October 24, 2025



11

Nama Penghargaan | Name of Award
Indonesian Circular Economy Awards

Nama Ajang | Name of Event
Indonesian Circular Economy Awards - 2025

Kategori | Category

- **Predikat Platinum untuk Fly Ash Utilization Program pada Pabrik NPK**
Platinum Award for the Fly Ash Utilization Program at the NPK Plant
- **Predikat Gold untuk Implementation of the Circular Economy**
Gold Award for the Implementation of the Circular Economy
- **Predikat Gold untuk Integrated Waste Recycling Program**
Gold Award for the Integrated Waste Recycling Program

Penyelenggara | Organizer
ICEST (Indonesia Circular Economy Sustainability and Transformation) Institute

Tanggal | Date
18 November 2025 | November 18, 2025

12

Nama Penghargaan | Name of Award
Most Trusted Company GCG Award 2025

Nama Ajang | Name of Event
Good Corporate Governance Award 2025

Kategori | Category

- **Most Trusted Company**
- **Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)**

Penyelenggara | Organizer
The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan Majalah Swa | Swa Magazine

Tanggal | Date
25 November 2025 | November 25, 2025

13

Nama Penghargaan | Name of Award
TKMPN XXIX

Nama Ajang | Name of Event
TKMPN XXIX - 2025

Kategori | Category

Predikat Platinum
Platinum Award

Penyelenggara | Organizer
Wahana Kendali Mutu (WKM) bekerja sama dengan Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia (AMMPI)
The Quality Control Forum (WKM) in collaboration with the Indonesian Quality Management and Productivity Association (AMMPI).

Tanggal | Date
24 - 28 November 2025 | November 24 - 25, 2025

Skala Regional | Regional Scale

14

Nama Penghargaan | Name of Award
Indonesian Conference & Competition Occupational Safety and Health (ICC-OSH)

Nama Ajang | Name of Event
Indonesian Conference & Competition Occupational Safety and Health (ICC-OSH)

Kategori | Category

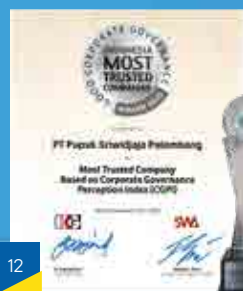
- **5 Stars oleh PKM Antivirus dan PKM KATIGA**
5 Stars by PKM Antivirus and PKM KATIGA
- **4 Stars oleh PKM Biocoal**
4 Stars by PKM Biocoal
- **3 Stars oleh PKM Kita Bisa Reborn**
3 Stars by PKM Kita Bisa Reborn

Penyelenggara | Organizer
Wahana Kendali Mutu (WKM) bekerja sama dengan LPSDM Prima Karya
The Quality Control Vehicle (WKM) in collaboration with the Prima Karya Human Resources Development Agency (LPSDM)

Tanggal | Date
4 Juni 2025 | June 4, 2025



11



12



13



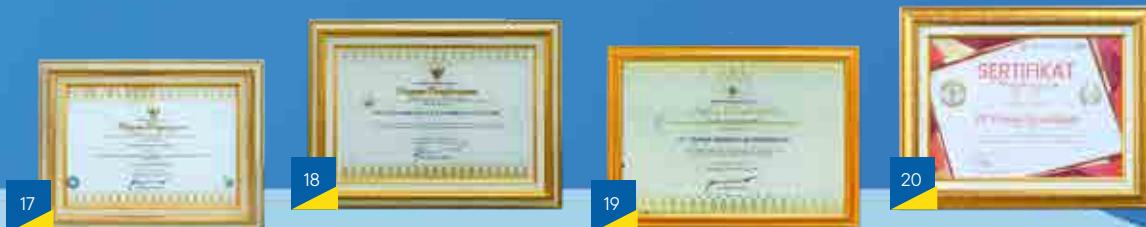
14



15

- 15** **Nama Penghargaan | Name of Award**
Pokja Perpajakan
Tax Working Group
- Nama Ajang | Name of Event**
Pokja Perpajakan Grup PT Pupuk Indonesia 2025
PT Pupuk Indonesia Group Tax Working Group 2025
- Kategori | Category**
KPP Wajib Pajak Besar Tiga
Three Large Taxpayer KPPs
- Penyelenggara | Organizer**
Pokja Perpajakan Grup PT Pupuk Indonesia (Persero)
Group Tax Working Group PT Pupuk Indonesia (Persero)
- Tanggal | Date**
3 - 4 Juli 2025 | July 3 - 4, 2025
- 16** **Nama Penghargaan | Name of Award**
Temu Responden | Respondent Gathering
- Nama Ajang | Name of Event**
Temu Responden 2025 | 2025 Respondent Gathering
- Kategori | Category**
Responden Terbaik Kategori Penyedia Data Liaison | Best Respondent in the Data Liaison Provider Category
- Penyelenggara | Organizer**
Kantor Perwakilan Bank Indonesia – Sumatera Selatan
Bank Indonesia Representative Office – South Sumatra
- Tanggal | Date**
14 Oktober 2025 | October 14, 2025
- 17** **Nama Penghargaan | Name of Award**
Penghargaan ProKlim
ProKlim Award
- Nama Ajang | Name of Event**
Penghargaan ProKlim 2025
2025 ProKlim Award
- Penyelenggara | Organizer**
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
South Sumatra Provincial Government
- Tanggal | Date**
22 Agustus 2025 | August 22, 2025

- 18** **Nama Penghargaan | Name of Award**
Penghargaan Atas Partisipasi Penanaman Bibit Pohon
- Nama Ajang | Name of Event**
Penghargaan Atas Partisipasi Penanaman 41.690 Pohon pada Ruang Terbuka Hijau dan 30.000 Pohon pada Ekosistem Mangrove di Pelabuhan Tanjung Api-api dari Desa Sungsang IV Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
- Penyelenggara | Organizer**
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- Tanggal | Date**
25 November 2025 | November 25, 2025
- 19** **Nama Penghargaan | Name of Award**
Penghargaan Partisipasi Aktif Mudik Gratis 2025
- Nama Ajang | Name of Event**
Penghargaan atas Sumbangsih dan Partisipasi Aktif pada Kegiatan Angkutan Lebaran Mudik Gratis Tahun 2025
- Penyelenggara | Organizer**
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- Tanggal | Date**
27 Maret 2025 | March 27, 2025
- 20** **Nama Penghargaan | Name of Award**
Responden Terbaik dalam Kegiatan Survei Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025
- Nama Ajang | Name of Event**
Responden Terbaik dalam Kegiatan Survei Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025
- Penyelenggara | Organizer**
Responden Terbaik
- Tanggal | Date**
6 November 2025 | November 6, 2025



SERTIFIKASI

PUSRI menjalankan kegiatan operasional dengan mengacu pada Standar Operasional Tersertifikasi yang ditinjau dan dievaluasi oleh pihak ketiga independen, sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut.

CERTIFICATIONS

PUSRI carries out its operational activities in accordance with Certified Operational Standards that are reviewed and evaluated by independent third parties, as presented in the following table.



ISO 9001:2015 Quality Management System Standards

TUV Rheinland Indonesia

10 Oktober 2024 - 09 Oktober 2027
October 10, 2024 - October 09, 2027



ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System

Sucofindo Internasional

17 Februari 2025 - 16 Februari 2028
February 17, 2025 - February 16, 2028



ISO 14001:2015 Environmental Management System

TUV Rheinland Indonesia

10 Oktober 2024 - 09 Oktober 2027
October 10, 2024 - October 09, 2027



ISO/IEC 17025:2017 Laboratorium Kalibrasi Calibration Laboratory

Komite Akreditasi Nasional (KAN)

National Accreditation Committee (KAN)

21 September 2025 - 20 September 2030
September 21, 2025 - September 20, 2030



ISO/IEC 17025:2017 Laboratorium Penguji Calibration Laboratory

Komite Akreditasi Nasional (KAN)
National Accreditation Committee (KAN)

29 Juli 2024 - 28 Juli 2029
July 29, 2024 - July 28, 2029



ISO/IEC 17043:2023 Penyelenggara Uji Profisiensi Proficiency Test Organizer

Komite Akreditasi Nasional (KAN)
National Accreditation Committee (KAN)

20 April 2022 - 19 April 2027
April 20, 2022 - April 19, 2027



Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PP No. 50 Tahun 2012 (Management System Occupational Health and Safety)

Kementerian Ketenagakerjaan
Minister of Employment of the Republic of Indonesia

13 Mei 2025 - 13 Mei 2028
May 13, 2025 - May 13, 2028



Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Security Management System (SMP)

Kepolisian Negara Republik Indonesia
National Police of Republic of Indonesia

31 Mei 2023 - 31 Mei 2026
May 31, 2023 - May 31, 2026



**Sertifikat Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri
(DUKS)**
Dock Certificate for Self-Use (DUKS)

Dirjen Perhubungan Laut (HUBLA)

Director General of Sea Transportation (HUBLA)

19 September 2024 – 18 Oktober 2029
September 19, 2024 – October 18, 2029



ISO 50001:2018
Sistem Manajemen Energi
Energy Management System

British Standard Institution

15 Mei 2025 – 15 Mei 2028
May 15, 2025 – May 15, 2028



ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
Anti-Bribery Management System (SMAP)

TUV Nord Indonesia

26 Oktober 2023 – 25 Oktober 2026
October 26, 2023 – October 25, 2026



ISO 27001:2022
Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
Information Security Management System (ISMS)

TUV Sud Indonesia

22 Maret 2024 – 21 Maret 2027
March 22, 2024 – March 21, 2027



SPPT SNI Pupuk Urea
SPPT SNI Urea Fertilizer

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Jakarta
Jakarta Center for Standardization and Industrial Services (BSPJI)

5 Februari 2025 - 4 Februari 2029
February 5, 2025 - February 4, 2029



SPPT SNI Pupuk NPK Padat
SPPT SNI Solid NPK Fertilizer

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Jakarta
Jakarta Center for Standardization and Industrial Services (BSPJI)

5 Februari 2025 - 4 Februari 2029
February 5, 2025 - February 4, 2029



SPPT SNI Amoniak Cair
SPPT SNI Liquid Ammonia

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Jakarta
Jakarta Center for Standardization and Industrial Services (BSPJI)

5 Februari 2025 - 4 Februari 2029
February 5, 2025 - February 4, 2029

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

3	Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limitation of Liability	8	Kilas Kinerja Utama 2025 2025 Key Performance Highlights
4	Tema dan Arti Tema Theme and Meaning of the Theme	14	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications
5	Kesinambungan Tema Continuity of the Theme	22	Daftar Isi Table of Contents

IKHTISAR KINERJA

Performance Highlights

28	Ikhtisar Data Keuangan Penting Important Financial Highlights	40	Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi Information on Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds
36	Ikhtisar Operasional Operational Overview	40	Informasi Sumber Pendanaan Lainnya Other Funding Source Information
38	Penilaian Tingkat Kesehatan, Asesmen Penerapan GCG, Skor Asesmen Kinerja Unggul Berbasis BEF dan Rating Perusahaan Assessment of Health Level, GCG Implementation Assessment, BEF-Based Excellent Performance Assessment Score, and Company Rating	40	Aksi Korporasi Corporate Action
39	Informasi Saham Share Information	40	Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (<i>Suspension</i>) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (<i>Delisting</i>) Temporary Suspension and/or Delisting of Shares
		41	Peristiwa Penting Key Events

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

50	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report
66	Laporan Direksi Board of Directors Report
80	Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Statement by the Members of the Board of Commissioners concerning Responsibility for the 2025 Annual Report of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
81	Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Statement by the Members of the Board of Directors concerning Responsibility for the 2025 Annual Report of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang





PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

- 84** Identitas Perusahaan
Corporate Identity
- 86** Riwayat Singkat Perusahaan
Brief Company History
- 88** Jejak Langkah
Milestones
- 90** Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Values
- 93** Brand/Logo Perusahaan
Company's Brand/Logo
- 94** Kegiatan Usaha
Business Activities
- 98** Produk dan Jasa
Products and Services
- 108** Wilayah Operasi dan Pasar yang Dilayani
Areas of Operations and Markets Served
- 114** Daftar Alamat Entitas Anak, Kantor Cabang, serta Kantor Perwakilan
Address List of Subsidiaries, Branch Offices, and Representative Offices
- 116** Struktur Organisasi
Organizational Structure
- 118** Struktur Grup Perusahaan
Corporate Group Structure
- 119** Daftar Keanggotaan Asosiasi
List of Membership In Association
- 119** Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile
- 129** Profil Direksi
Board OF Directors Profile
- 134** Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, Tata Kelola dan Manajemen Risiko
Education and/or Training of The Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, Internal Audit, Governance and Risk Management
- 145** Profil Karyawan
Employee Profile
- 150** Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition
- 152** Daftar Entitas Anak dan Asosiasi
List of Subsidiaries and Associate Entities
- 153** Sekilas Kinerja Entitas Anak dan Entitas Asosiasi
Performance of Subsidiaries and Associated Entities at a Glance
- 158** Kronologis Pencatatan Saham
Chronology Of Share Listing
- 158** Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Listing
- 159** Nama Dan Alamat Lembaga Penunjang Pasar Modal
Names and Addresses of Capital Market Supporting Institutions
- 160** Informasi Pada Website Perusahaan
Information on The Company's Website



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

- 164** Tinjauan Makro Ekonomi
Macro Economic Overview
- 174** Strategi Perseroan
Company Strategy
- 177** Aspek Pemasaran
Marketing Aspects
- 187** Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan
Business Outlook and Forward Strategy
- 190** Tinjauan Operasional Per Segmen Usaha
Business Segment Operational Review
- 196** Tinjauan Kinerja Per Segmen Usaha
Business Segment Performance Review
- 213** Tinjauan Kinerja Keuangan
Financial Performance Review
- 242** Kemampuan Membayar Utang
Debt Repayment Capacity
- 244** Struktur Modal
Capital Structure
- 245** Ikatan Yang Material Untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments For Capital Investment
- 251** Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Serta Proyeksi 1 (Satu) Tahun Mendatang
Comparison Between Targets And Realization As Well As Projections For The Next 1 (One) Year Capital Structure
- 253** Proyeksi Tahun Buku 2026
Projection For The 2026 Financial Year
- 255** Kebijakan Dividen
Dividend Policy
- 259** Program Kepemilikan Saham Karyawan Dan/Atau Manajemen (Esop/Msop)
Employee And/Or Management Stock Ownership Program (Esop/Msop)
- 259** Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization Of The Use Of Public Offering Proceeds

259 Informasi Material Terkait Dengan Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, Dan Restrukturisasi Utang/Modal, Transaksi Material, Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan Tahun 2025 Material Information Related To Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, And Debt/Capital Restructuring, Material Transactions, Affiliated Transactions, And Conflict Of Interest Transactions In 2025 260 Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan Atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi Dan/Atau Berelasi Material Transactions Containing Conflicts Of Interest And/Or Transactions With Affiliated And/Or Related Parties 260 Transaksi Afiliasi Affiliated Transactions	260 Transaksi Pihak Berelasi Related Party Transactions 264 Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Terhadap Perusahaan Changes In Laws And Regulations Affecting The Company 269 Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes In Accounting Policies 269 Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Health Level 269 Informasi Kelangsungan Usaha Business Continuity Information 270 Strategi Perbaikan Perusahaan Company Improvement Strategy



Fungsi Penunjang Bisnis

Business Support Functions

274 Sumber Daya Manusia Human Capital 275 Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDM Human Capital Management Policies and Strategies 277 Pengelolaan SDM Human Capital Management 293 Teknologi Informasi Information Technology 295 Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Policies and Governance 297 Tata kelola IT PUSRI IT Governance of Pusri	299 Program Pengembangan Teknologi Informasi 2025 Information Technology Development Program 2025 300 Sertifikasi Teknologi Informasi Information Technology Certification 300 Investasi Teknologi Informasi Information Technology Investment 301 Rencana Kerja Departemen Teknologi Informasi PSP Tahun 2025 Work Plan Of The Psp Information Technology Department For 2025

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

304 Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance 306 Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Objectives of Good Corporate Governance Implementation 306 Dasar Hukum, Landasan, dan Ruang Lingkup Kebijakan GCG Dasar Hukum Legal Basis, Foundation, and Scope Of Gcg Policy 309 Struktur Tata Kelola Governance Structure 310 Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan di Tahun 2025 Dissemination Of Corporate Governance Policies In 2025	311 Penerapan Prinsip GCG Secara Berkelanjutan Sustainable Implementation of GCG Principles 312 Peningkatan Kualitas Penerapan GCG Improvement in the Quality of GCG Implementation 313 Peningkatan Kualitas Penerapan Praktik Terbaik GCG Enhancing the Quality of GCG Best Practices Implementation 316 Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders 351 Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Board of Commissioners and Independent Commissioners 372 Direksi Board of Directors

401 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi Diversity In The Composition Of The Board Of Commissioners And Board Of Directors 406 Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and Directors 418 Organ dan Komite Di bawah Dewan Komisaris Organs and Committees Under the Board of Commissioners 418 Komite Audit Audit Committee 430 Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee 445 Komite Investasi dan Manajemen Risiko Investment and Risk Management Committee 456 Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Secretary 460 Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary 471 Satuan Pengawasan Intern Internal Audit Unit 482 Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Company Internal Control System 487 Audit Eksternal External Audit 493 Tata Kelola & Manajemen Risiko Governance & Risk Management 512 Kepatuhan dan Perkara Hukum yang Dihadapi Kepatuhan pada Hukum Opliance and Legal Cases Faced Legal Compliance 513 Kebijakan Insider Trading Insider Trading Policy	513 Keterbukaan Informasi Dan Akses Data Perusahaan Komunikasi Internal Disclosure Of Information And Access To Company Data Internal Communication 516 Kode Etik dan Pakta Integritas Code Of Conduct And Integrity Pact 530 Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Serta Pelaksanaan Policy On Disclosure Of Share Ownership by The Board of Commissioners and The Board of Directors and Its Implementation 530 Sistem Pelaporan Pelanggaran Violation Reporting System 540 Pengendalian Gratifikasi Gratification Control 542 Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy 543 Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services 543 Pemenuhan Hak-Hak Politik Karyawan Dan Keterlibatan Perusahaan Dalam Kegiatan Politik Fulfillment Of Employee Politicalrights And Company Involvement In Political Activities 544 Pelaporan Kekayaan Pejabat State Official Asset Declaration Report 547 Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia Indonesian Corporate Governance General Guidelines 548 Adopsi PUGKI 2021 Oleh Pusri Adoption Of PUGKI 2021 By Pusri 548 Kesesuaian Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) Conformity With The Implementation Of The Indonesian Corporate Governance General Guidelines (Pugki) 592 Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility

- 606** Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia
Indonesian Corporate Governance General Guidelines
- 607** Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan
Sustainability Performance Summary



REFERENSI SILANG SE-OJK 16-21 – AR PUSRI 2025

CROSS REFERENCE TO OJK CIRCULAR LETTER NO. 16-21 – PUSRI ANNUAL REPORT 2025

LAPORAN KEUANGAN

Financial Reports







01

IKHTISAR KINERJA

Performance Highlights

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

SUMMARY OF KEY FINANCIAL DATA

TABEL LAPORAN LABA/(RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
STATEMENT OF PROFIT/(LOSS) AND COMPREHENSIVE INCOME TABLE

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

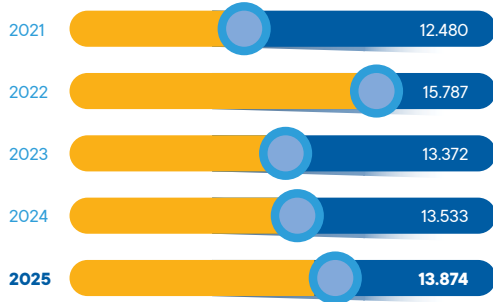
Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024- 2025 %	CAGR2021- 2025 %
PENDAPATAN PENJUALAN							
Sales Revenue							
Penjualan Produk Pupuk Fertilizer Sales							
Pupuk Subsidi Subsidized Fertilizer	10.424.100	9.646.292	9.660.934	9.830.670	7.485.951	8,06	6,85
Pupuk Nonsubsidi Non-subsidized Fertilizer	2.609.350	2.964.312	2.883.218	4.019.756	3.922.092	(11,97)	(7,83)
Subtotal Penjualan Pupuk Subtotal Fertilizer Sales	13.033.450	12.610.604	12.544.152	13.850.426	11.408.043	3,35	2,70
Penjualan Produk Non Pupuk Non-fertilizer Sales							
Penjualan Amonia Ammonia Sales	673.035	784.773	689.041	1.810.086	989.363	(14,24)	(7,42)
Lain-lain Others	167.837	137.488	138.483	126.980	83.169	22,07	15,08
Subtotal Penjualan Non Pupuk Subtotal Non-fertilizer Sales	840.872	922.261	827.524	1.937.066	1.072.532	(8,82)	(4,75)
JUMLAH PENDAPATAN PENJUALAN Total Sales Revenue	13.874.322	13.532.865	13.371.676	15.787.492	12.480.575	2,52	2,14
Beban Pokok Pendapatan Cost of Goods Sold	(12.113.387)	(11.686.789)	(11.017.724)	(11.193.632)	(10.227.254)	3,65	3,44
Laba Bruto Gross Profit	1.760.935	1.846.076	2.353.952	4.593.860	2.253.321	(4,61)	(4,81)
Beban Penjualan Selling Expenses	(300.217)	(321.732)	(376.411)	(399.509)	(315.126)	(6,69)	(0,96)
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(459.353)	(299.305)	(463.318)	(458.608)	(344.339)	53,47	5,93
Subtotal Beban Usaha Subtotal Operating Expenses	(759.570)	(621.037)	(839.729)	(858.117)	(659.465)	22,31	2,87
Laba Usaha Operating Profit	1.001.365	1.225.039	1.514.223	3.735.743	1.593.856	(18,26)	(8,88)
Pendapatan (Beban) Keuangan Finance Income (Expenses)	(115.823)	(208.619)	(349.738)	(377.840)	(494.125)	(44,48)	(25,18)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024- 2025 %	CAGR2021- 2025 %
Pendapatan (Beban) Lainnya, Neto Other Income (Expenses), Net	(49.933)	423.475	373.496	97.038	56.721	(111,79)	(197,48)
Bagian Laba dari Entitas Asosiasi Share of Profit from Associates	(11.186)	(40.226)	(5.307)	7.463	(6.892)	(72,19)	10,17
Laba Sebelum Pajak Profit before Tax	824.423	1.399.669	1.532.674	3.462.404	1.149.560	(41,10)	(6,43)
Beban Pajak Tax Expense	(210.896)	(331.134)	(332.815)	(807.762)	(237.228)	(36,31)	(2,33)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	613.527	1.068.535	1.199.859	2.654.642	912.332	(42,58)	(7,63)
Penghasilan Komprehensif Lain, Tahun Berjalan Other Comprehensive Income, Current Year	183.934	(356.810)	(50.036)	268.790	(91.998)	(151,55)	(214,86)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Total Other Comprehensive Income for the Current Year	797.461	711.725	1.149.823	2.923.432	820.334	12,05	(0,56)
LABA RUGI TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Net Profit (Loss) for the Current Year Attributable to:							
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	629.696	1.068.450	1.199.016	2.655.533	912.664	41,06	(7,15)
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	(16.169)	85	843	(891)	(332)	(19.122,35)	117,52
Jumlah Total	613.527	1.068.535	1.199.859	2.654.642	912.332	42,58	(7,63)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA : Total Comprehensive Income for the Current Year Attributable to:							
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	813.630	711.640	1.148.980	2.924.323	820.666	14,33	(0,17)
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interests	(16.169)	85	843	(891)	(332)	(19.122,35)	117,52
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Current Year	797.461	711.725	1.149.823	2.923.432	820.334	12,05	(0,56)
Laba (Rugi) per Saham Earnings (Loss) per Share	108.568	184.216	206.727	457.850	157.356	(41,06)	(7,15)

Pendapatan

Revenue

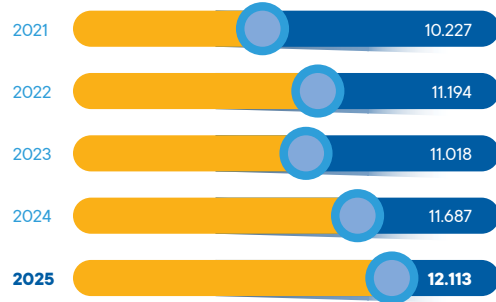
Rp miliar | Rp billion



Beban Pokok Pendapatan

Cost of Revenue

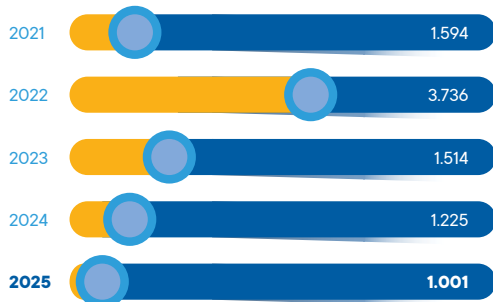
Rp miliar | Rp billion



Laba Usaha

Business Profit

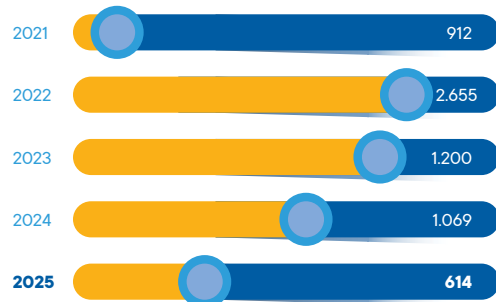
Rp miliar | Rp billion



Laba Bersih Tahun Berjalan

Net Profit for the Year

Rp miliar | Rp billion



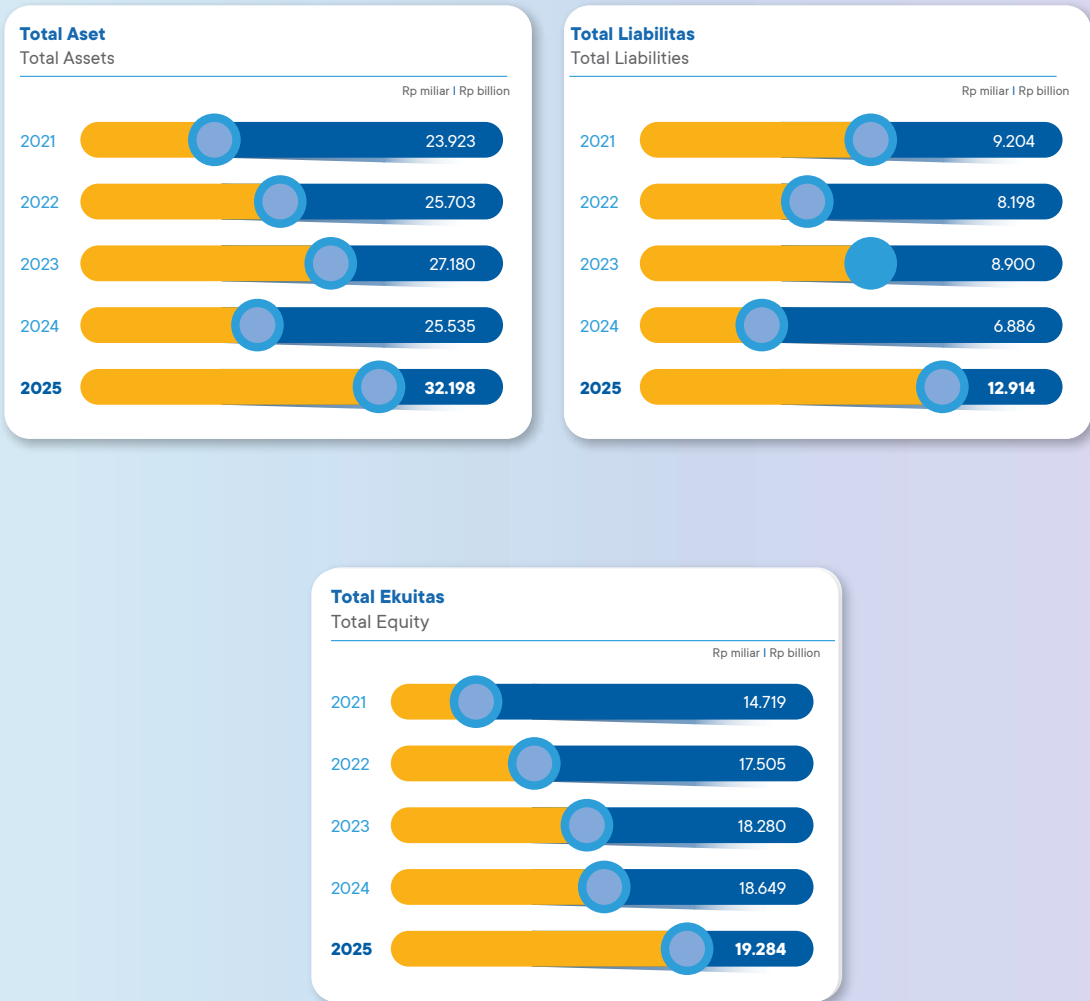
TABEL PERUBAHAN POSISI KEUANGAN

Table of Changes in Financial Position

(Dalam Rp. Juta) | (In Rp. Million)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024- 2025 %	CAGR 2021-2025 %
ASET Assets							
Aset Lancar Current Assets							
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	305.988	703.733	1.454.006	2.123.658	1.431.017	(56,52)	(26,55)
Piutang Usaha Account Receivable	200.100	198.067	218.764	263.777	96.641	1,03%	15,67
Persediaan Inventories	1.418.503	1.507.888	2.129.087	2.666.359	1.737.222	(5,93)	(3,97)
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	3.417.896	550.918	3.241.176	1.827.111	1.134.675	520,40	24,67
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	5.342.487	2.960.606	7.043.033	6.880.905	4.399.555	80,45	3,96
Aset Tidak Lancar Non-current Assets							
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associate Entities and Joint Ventures	90.753	101.939	142.165	147.471	140.008	(10,97)	(8,31)
Aset Tetap Fixed Assets	25.290.060	20.780.186	17.944.706	17.649.160	18.788.017	21,70	6,12
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-current Assets	1.475.089	1.692.589	2.050.326	1.025.418	595.176	(12,85)	19,90
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-current Assets	26.855.902	22.574.714	20.137.197	18.822.049	19.523.201	18,96	6,59
JUMLAH ASET Total Assets	32.198.389	25.535.320	27.180.230	25.702.954	23.922.756	26,09	6,12
LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilities and Equity							
LIABILITAS Liabilities							
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities							
Pinjaman Jangka Pendek Short-term Loans	-	-	600.000	625.000	395.000	0,00	(100,00)
Utang Usaha Trade Payables	282.247	134.726	135.078	117.756	93.393	109,50	24,76
Utang Jangka Panjang - Bagian Lancar Current Portion of Long- term Debt	7.194	2.804	2.935.644	300.000	831.832	156,56	(61,33)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024- 2025 %	CAGR 2021-2025 %
Utang Sewa - Bagian Lancar Current Portion of Lease Liabilities	24.338	7.529	22.505	7.270	2.760	223,26	54,55
Utang jangka pendek lainnya Other Short-term Deb	3.202.316	2.651.769	2.444.415	2.325.969	1.539.046	20,76	15,78
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	3.516.095	2.796.828	6.137.642	3.375.995	2.862.031	25,72	4,20
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities							
Utang Jangka Panjang - Dikurangi Bagian Lancar Long-term Debt, Net of Current Portion	8.134.677	3.168.146	1.864.271	4.027.072	5.225.163	156,76	9,26
Utang Sewa - Bagian Tidak Lancar Non-current Lease Liabilities	5.293	3.559	4.358	5.112	3.428	48,72	9,08
Liabilitas jangka panjang lainnya Other Non-current Liabilities	1.258.216	918.100	893.858	789.497	1.113.388	37,05	2,48
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-current Liabilities	9.398.186	4.089.805	2.762.487	4.821.681	6.341.979	129,80	8,18
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	12.914.281	6.886.633	8.900.129	8.197.676	9.204.010	87,53	7,01
EKUITAS Equity							
Modal Saham Share Capital	5.466.124	5.466.124	5.466.124	5.466.124	5.466.124	0,00	0,00
Saldo Laba & Penghasilan Komprehensif Lainnya Retained Earnings and Other Comprehensive Income	13.812.350	13.160.760	12.792.259	12.018.279	9.230.856	4,95	8,39
Pemilik Entitas Induk Owner Of The Parents Entity	19.278.474	18.626.884	18.258.383	17.484.403	14.696.980	3,50	5,58
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interests	5.634	21.803	21.718	20.875	21.766	(74,16)	(23,69)
Jumlah Ekuitas Total Equity	19.284.108	18.648.687	18.280.101	17.505.278	14.718.746	3,41	5,55
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas							
Total Liabilities And Equity	32.198.389	25.535.320	27.180.230	25.702.954	23.922.756	26,09	6,12



TABEL ARUS KAS
CASH FLOW TABLE

(Dalam Rp. Juta) / (In Rp. Million)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024- 2025 %	CAGR 2021-2025 %
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Net cash flows generated from operating activities	(720.557)	3.350.505	2.130.382	2.590.561	2.442.729	(121,51)	(178,34)
Arus kas netto yang digunakan untuk aktivitas investasi Net cash flows used in investing activities	(4.215.448)	(1.383.270)	(2.798.786)	(277.411)	(129.325)	204,75	100,74
Arus kas netto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Net cash flows used in financing activities	4.536.353	(2.712.289)	2.738	(1.645.598)	(1.889.515)	(267,25)	(219,14)
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(399.652)	(745.054)	(665.666)	667.552	423.889	(46,36)	(198,83)
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents	1.907	(5.219)	(3.986)	25.089	1.426	(136,54)	5,99
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN Cash and cash equivalents at the beginning of the year	703.733	1.454.006	2.123.658	1.431.017	1.005.702	(51,60)	(6,89)
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN Cash and cash equivalents at the end of the year	305.988	703.733	1.454.006	2.123.658	1.431.017	(56,52)	(26,55)

INFORMASI KEUANGAN LAINNYA
OTHER FINANCIAL INFORMATION

(Dalam Rp. Juta) / (In Rp. Million)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024- 2025 %	CAGR 2021-2025 %
Belanja Modal Capital Expenditure	4.774.537	3.490.351	1.051.991	167.060	88.253	36,79	122,15
Modal Kerja Bersih Net Working Capital	1.826.392	163.778	905.391	3.504.910	1.537.524	1.015,16	3,50

TABEL RASIO-RASIO KEUANGAN
 FINANCIAL RATIOS TABLE

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024– 2025 %	CAGR 2021–2025 %
RASIO PROFITABILITAS Profitability Ratios							
Rasio Laba terhadap Jumlah Aset (%) Profit to Total Assets Ratio (%)	1,91%	4,18%	4,41%	10,33%	3,81%	54,46	(12,96)
Rasio Laba terhadap Pendapatan (%) Profit to Revenue Ratio (%)	4,42%	7,90%	8,97%	16,81%	7,31%	44,00	(9,56)
Rasio Laba terhadap Liabilitas (%) Profit to Liabilities Ratio (%)	4,75%	15,52%	13,48%	32,38%	9,91%	69,38	(13,68)
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (%) Liabilities to Total Assets Ratio (%)	40,11%	26,97%	32,74%	31,89%	38,47%	48,72	0,84
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%) Liabilities to Equity Ratio (%)	66,97%	36,93%	48,69%	46,83%	62,53%	81,35	1,38
Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE) (%) Return on Equity (ROE) (%)	3,18%	5,73%	6,56%	17,96%	6,63%	(44,47)	(13,66)
Imbalan Investasi (ROI) (%) Return on Investment (ROI) (%)	8,86%	10,82%	9,53%	18,58%	10,58%	(18,11)	(3,49)
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	8,70%	25,16%	23,69%	62,90%	50,00%	67,98	(30,59)
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	151,94%	105,86%	114,75%	203,82%	153,72%	43,54	(0,23)
Collection Period (hari) Collection Period (days)	12	10	12	10	5	15,38	21,35
Perputaran Persediaan (hari) Inventory Turnover (days)	43	47	71	34	39	(8,69)	2,15
Perputaran Total Aset (TATO) (%) Total Asset Turnover (TATO) (%)	59,19%	63,74%	51,12%	62,09%	52,56%	(7,14)	2,40
Rasio Modal terhadap Total Aset (TMS) (%) Capital to Total Assets Ratio (TMS) (%)	59,89%	73,03%	67,26%	64,34%	59,91%	(17,99)	(0,01)

IKHTISAR OPERASIONAL

OPERATIONAL OVERVIEW

TABEL VOLUME PRODUKSI DAN VOLUME PENJUALAN PUPUK
PRODUCTION VOLUME AND FERTILIZER SALES VOLUME TABLE

(Ton) | (Tons)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024- 2025 %	CAGR 2021-2025 %
PUPUK UREA							
Urea Fertilizer							
Produksi							
Production							
Pabrik Pusri- IB Pusri - IB Plant	372.742	401.122	498.087	465.635	490.760	(7,08)	(5,35)
Pabrik Pusri- IIB Pusri - IIB Plant	960.689	904.612	968.362	973.830	927.347	6,20	0,71
Pabrik Pusri-III Pusri - III Plant	224.471	235.430	277.889	314.277	290.538	(4,65)	(5,03)
Pabrik Pusri- IV Pusri - IV Plant	222.447	316.668	265.941	239.938	356.981	(29,75)	(9,03)
Jumlah Produksi Urea Total Urea Production	1.780.349	1.857.832	2.010.279	1.993.680	2.065.626	(4,17)	(2,93)
PUPUK NPK							
NPK Fertilizer							
Produksi							
Production							
Pabrik NPK Fusion I NPK Fusion I Plant	155.961	181.686	142.226	151.173	120.784	(14,16)	5,24
Pabrik NPK Fusion II NPK Fusion II Plant	217.958	181.698	186.123	195.705	163.302	19,96	5,94
Jumlah Produksi NPK Total NPK Production	373.919	363.384	328.349	346.878	284.086	2,90	5,65
Total Produksi Pupuk Total Fertilizer Production	2.154.268	2.221.216	2.338.628	2.340.558	2.349.712	(3,01)	(1,72)
PENJUALAN PUPUK							
Fertilizer Sales							
Domestik - Subsidi Domestic - Subsidized	1.727.115	1.735.698	1.695.038	1.811.018	1.507.197	(0,49)	2,76
Domestik - Non Subsidi Domestic - Non-subsidized	318.970	380.508	359.335	324.617	644.931	(16,17)	(13,13)
Ekspor Export	104.893	168.784	134.180	145.569	189.877	(37,85)	(11,19)
Jumlah Volume Penjualan Pupuk Total Volume of Fertilizer Sales	2.150.978	2.284.990	2.188.553	2.281.204	2.342.005	(5,86)	(1,69)

TABEL VOLUME PRODUKSI DAN VOLUME PENJUALAN AMONIA
 AMMONIA PRODUCTION VOLUME AND SALES VOLUME TABLE

(Ton) | (Tons)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024- 2025 %	CAGR 2021-2025 %
NON PUPUK - AMONIA							
Non Fertilizer - Ammonia							
Produksi Production							
Pabrik Pusri- IB Pusri - IB Plant	220.862	310.167	397.197	368.869	372.160	(28,79)	(9,91)
Pabrik Pusri- IIB Pusri - IIB Plant	719.967	687.182	715.154	721.401	687.638	4,77	0,92
Pabrik Pusri- IV Pusri - IV Plant	270.203	287.141	221.445	270.752	312.341	(5,90)	(2,86)
Jumlah Produksi Amonia Total Ammonia Production	1.211.032	1.284.490	1.333.796	1.361.022	1.372.139	(5,72)	(2,47)
PENJUALAN AMONIA							
Ammonia Sales							
Dalam Negeri Domestic	35.398	62.067	39.971	73.395	52.655	(42,97)	(7,63)
Ekspor Export	69.879	67.707	65.750	72.529	79.183	3,21	(2,47)
Jumlah Volume Penjualan Amonia Total Volume of Ammonia Sales	105.277	129.774	105.721	145.924	131.838	(18,88)	(4,40)

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN, ASESMEN PENERAPAN GCG, SKOR ASESMEN KINERJA UNGGUL BERBASIS BEF DAN RATING PERUSAHAAN

ASSESSMENT OF COMPANY HEALTH LEVEL, GCG IMPLEMENTATION
ASSESSMENT, BEF-BASED EXCELLENCE PERFORMANCE ASSESSMENT
SCORE, AND COMPANY RATING

Keterangan Description	2025	2024	2023	2022	2021
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN COMPANY SOUNDNESS RATING ASSESSMENT					
Skor Score	_*	_*	_*	96,00	78,00
Kategori Category	AAA" Sangat Sehat Very Healthy	AAA" Sangat Sehat Very Healthy	AAA" Sangat Sehat Very Healthy	AAA" Sangat Sehat Very Healthy	A" Sehat Healthy
ASSESSMENT PENERAPAN GCG ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION					
Skor Score	_***	92,39%	_**	95,50%	92,04%
Kategori Category	_***	Sangat baik Very Good	-	Sangat baik Very Good	Sangat baik Very Good
SKOR ASESMEN KINERJA UNGGUL BERBASIS BEF EXCELLENCE PERFORMANCE ASSESSMENT SCORE BASED ON BEF					
Kategori Category	_****	_****	"Industry Leader"	"Industry Leader"	"Emerging Industry Leader"

* Penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Pasal 81

** Dilakukan Self Assessment dengan menindaklanjuti Area of Improvement (Aol) terhadap hasil Assessment GCG Tahun 2022.

*** Asesmen Penerapan GCG dilakukan pada tahun 2025 untuk pelaksanaan GCG tahun 2024

**** Sesuai arahan dari PT Pupuk Indonesia bahwa penilaian KPKU tidak menjadi mandatory

* Assessment based on Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 Article 81.

** Self-Assessment was conducted by following up on the Areas of Improvement (Aol) identified from the 2022 GCG Assessment results.

*** GCG Implementation Assessment will be conducted in 2025 for GCG implementation in 2024.

**** In accordance with the direction of PT Pupuk Indonesia, the KPKU assessment is not mandatory.

INFORMASI SAHAM

SHARE INFORMATION

Sampai dengan 31 Desember 2025, PUSRI belum mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi harga saham, kapitalisasi pasar saham, dan volume perdagangan saham. Namun demikian, untuk informasi modal saham selama dua tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

As of December 31, 2025, PUSRI has not listed its shares on the stock exchange. Therefore, there is no information regarding share price, market capitalization, or share trading volume. However, information on share capital over the past two years is presented as follows:

2025

Rp Juta | Rp million

5.800.000

Modal Saham

Modal dasar – 15.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham Modal ditempatkan dan disetor – 5.800.000 saham

Share Capital

Authorized capital – 15,000,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share Issued and paid-up capital – 5,800,000 shares

2024

Rp Juta | Rp million

5.800.000

Modal Saham

Modal dasar – 15.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham Modal ditempatkan dan disetor – 5.800.000 saham

Share Capital

Authorized capital – 15,000,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share Issued and paid-up capital – 5,800,000 shares

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI

BOND, SUKUK AND/OR CONVERTIBLE BOND INFORMATION

PUSRI tidak menyajikan informasi terkait penerbitan obligasi, sukuk atau obligasi konversi karena untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan tidak menerbitkan dan mencatatkan obligasi, sukuk maupun obligasi konversi.

PUSRI does not present information related to the issuance of bonds, sukuk, or convertible bonds because for the period ending December 31, 2025, the Company did not issue or list any bonds, sukuk, or convertible bonds.

INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA

OTHER FUNDING SOURCES INFORMATION

PUSRI tidak dapat menyampaikan informasi terkait sumber pendanaan lainnya, mengingat sampai periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan tidak mencatatkan adanya sumber pendanaan lainya yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional.

PUSRI cannot present information regarding other funding sources, considering that for the period ending December 31, 2025, the Company did not record any other sources of funding used to support its operational activities.

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS

Mengingat PUSRI belum mendaftarkan sahamnya di bursa saham, Perseroan tidak melakukan aksi Korporasi terkait dengan aktivitas yang berpengaruh terhadap jumlah saham beredar, mencakup pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham.

As PUSRI has not listed its shares on the stock exchange, the Company has not undertaken any corporate actions related to activities affecting the number of outstanding shares, including stock splits, reverse stock splits, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares.

AKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (*SUSPENSION*) DAN/ ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*)

TRADING SUSPENSION AND/OR DELISTING ACTIONS

Sampai dengan 31 Desember 2025, PUSRI belum menjadi Perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta maupun bursa saham lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*).

As of December 31, 2025, PUSRI has not become a company that lists its shares on the Jakarta Stock Exchange or any other stock exchange. Therefore, there have been no Trading Suspension actions and/or Delisting actions.



PERISTIWA PENTING

KEY EVENTS



12 Februari 2025 | February 12, 2025

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang

Signing of the Cooperation Agreement between the Harbormaster's Office and the Palembang Class I Port Authority

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang merupakan langkah penguatan sinergi dalam mendukung kelancaran operasional kepelabuhanan.

The signing of the Cooperation Agreement with the Harbormaster's Office and the Palembang Class I Port Authority is a step towards strengthening synergy to support smooth port operations.



20 Februari 2025 | February 20, 2025

Penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergi Informasi dan Efisiensi yang disaksikan langsung oleh Direktur Utama Pusri

Signing of the Memorandum of Understanding on Information Synergy and Efficiency, witnessed directly by the President Director of Pusri

Penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergi Informasi dan Efisiensi dilaksanakan sebagai langkah strategis memperkuat kolaborasi dan optimalisasi pertukaran informasi antar pihak.

The signing of the Memorandum of Understanding on Information Synergy and Efficiency was carried out as a strategic step to strengthen collaboration and optimize information exchange between parties.



23 April 2025 | April 23, 2025

Pusri Dukung Gerina, Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Inovasi dan Kolaborasi

Pusri Supports Gerina, Strengthening Food Security Through Innovation and Collaboration

Presiden RI Prabowo Subianto memimpin Gerakan Indonesia Menanam (GERINA) pada 23 April 2025 di Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagai bagian langkah percepatan pencapaian swasembada pangan, didukung pengenalan inovasi penanaman padi terapung (Si Opung) dan penggunaan drone penebar benih yang mampu mempercepat proses tanam secara signifikan.

Indonesian President Prabowo Subianto led the Indonesia Planting Movement (GERINA) on April 23, 2025, in Banyuasin, South Sumatra, as part of efforts to accelerate the achievement of food self-sufficiency. This initiative is supported by the introduction of the floating rice planting innovation (Si Opung) and the use of seed-spreading drones, which significantly accelerate the planting process.



10 Mei 2025 | May 10, 2025

Tanam Perdana Padi Demplot Program Makmur Agrisolution

First Rice Planting in the Makmur Agrisolution Program Demonstration Plot

Pusri Tanam Perdana Padi Demplot Program Makmur Agrisolution di Desa Batu Betumpang, Bangka Selatan sebagai dukungan terhadap Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto,

Pusri planted its first rice planting in the Makmur Agrisolution Program demonstration plot in Batu Betumpang Village, South Bangka, in support of President Prabowo Subianto's vision.



11 Juni 2025 | June 11, 2025

Peresmian Decarbonisation Program “Green Energy for Sustainability”

Inauguration of the Decarbonisation Program “Green Energy for Sustainability”

Pusri meresmikan Decarbonisation Program “Green Energy for Sustainability” yang ditandai dengan peluncuran Renewable Energy Charging Station (RECS) berbasis tenaga surya. Peresmian dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT Pusri Palembang, Daconi Khotob, didampingi Direktur Operasi & Produksi Filius Yuliandi, Direktur Keuangan & Umum Saifullah Lasindrang, serta jajaran manajemen perusahaan. Program ini menjadi wujud nyata komitmen Pusri dalam mendukung target Net Zero Emission Indonesia 2060 melalui pemanfaatan energi terbarukan dan penguatan implementasi prinsip Environmental, Social and Governance (ESG).

Pusri inaugurated the Decarbonisation Program “Green Energy for Sustainability,” marked by the launch of the solar-powered Renewable Energy Charging Station (RECS). The inauguration was carried out directly by the President Director of PT Pusri Palembang, Daconi Khotob, accompanied by Director of Operations & Production Filius Yuliandi, Director of Finance & General Affairs Saifullah Lasindrang, and the company’s management team. This program serves as a tangible manifestation of Pusri’s commitment to supporting Indonesia’s Net Zero Emission 2060 target through the utilization of renewable energy and the strengthening of Environmental, Social and Governance (ESG) principles implementation.



11 Juli 2025 | July 11, 2025

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan

Working Visit of Commission IV of the Indonesian House of Representatives to South Sumatra Province

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan untuk meninjau langsung distribusi pupuk bersubsidi.

Chairperson of Commission IV of the Indonesian House of Representatives, Siti Hediati Soeharto, and her entourage, conducted a working visit to South Sumatra to directly observe the distribution of subsidized fertilizer.



7 Agustus 2025 | August 7, 2025

Panen Raya Demplot Padi Program Makmur

Makmur Program Rice Demonstration Plots’ Big Harvest

Pusri bersama pemerintah daerah, TNI, Bulog, dan para petani merayakan Panen Raya Demplot Padi Program Makmur di Bangka Melalui Program Makmur – Agrosolution.

Pusri, along with the local government, the Indonesian Defense Forces (TNI), Bulog, and farmers, celebrated the Makmur Program Rice Demonstration Plots’ Big Harvest in Bangka through the Makmur – Agrosolution Program.



14 Agustus 2025 | August 14, 2025

Focus Group Discussion Bersama Mitra Integrator/Distributor Pusri Tahun 2025

Focus Group Discussion with Pusri Integrator/Distributor Partners in 2025

Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk mempererat sinergi, memperkuat hubungan kemitraan, serta memberikan apresiasi dan reward kepada Mitra/Distributor Pusri

This activity serves as a strategic platform to strengthen synergies, strengthen partnerships, and provide appreciation and rewards to Pusri Partners/Distributors.



30 September 2025 | September 30, 2025

Bersih Sungai dan Dermaga Dalam rangka memperingati World Cleanup Day 2025

Cleaning the River and Pier in Commemoration of World Cleanup Day 2025

Dalam rangka memperingati World Cleanup Day 2025, Pusri bersama seluruh karyawan/ti melaksanakan kegiatan “Bersih Sungai & Dermaga” di Area Dermaga Graha Pusri, Palembang.

To commemorate World Cleanup Day 2025, Pusri and all employees conducted a “Cleaning the River & Pier” activity at the Graha Pusri Pier in Palembang.



9 Oktober 2025 | October 9, 2025

Heavy Lifting and Slipform Work of Prilling Tower Ceremony

Heavy Lifting and Slipform Work of Prilling Tower Ceremony

Penanda keberhasilan pengangkatan peralatan utama dan dimulainya pekerjaan slipform Prilling Tower. Ini menjadi tahapan penting dalam proyek pembangunan fasilitas produksi, dengan tetap mengedepankan standar K3 serta komitmen perusahaan memperkuat kapasitas produksi pupuk nasional.

This ceremony marks the successful lifting of key equipment and the commencement of slipform work on the Prilling Tower. This marks a crucial milestone in the production facility construction project, while prioritizing OHS standards and the company's commitment to strengthening national fertilizer production capacity.



16 Oktober 2025 | October 16, 2025

Audiensi Direktur Utama Pusri dengan Wakil Gubernur Sumsel

Audience between the President Director of Pusri and the Deputy Governor of South Sumatra

Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara PUSRI dan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya sektor industri dan ketahanan pangan.

This meeting served as a forum for fostering and strengthening synergy between Pusri and the South Sumatra Provincial Government in supporting regional development, particularly in the industrial and food security sectors.



12 November 2025 | November 12, 2025

Audiensi Direksi Pusri dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel

Audience between Pusri's Board of Directors and the Head of the South Sumatra Higher Prosecutor's Office

Pertemuan ini menjadi langkah strategis memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik serta kepatuhan terhadap regulasi. Pusri menegaskan komitmennya menjalankan operasional secara profesional, transparan, dan berintegritas, sekaligus mendukung ketahanan pangan serta pembangunan berkelanjutan di Sumatera Selatan

This meeting is a strategic step to strengthen synergy and coordination in supporting good corporate governance and regulatory compliance. Pusri reaffirmed its commitment to conducting operations professionally, transparently, and with integrity, while also supporting food security and sustainable development in South Sumatra.



29 November 2025 | November 29, 2025

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBT) Antara Pusri dan PT PLN

Signing of a Memorandum of Understanding (MoU) and Power Purchase Agreement (PJBT) between Pusri and PT PLN

Penandatanganan PPJB dengan PT PLN (Persero) UID S2JB dilakukan dalam rangka memastikan pasokan listrik stabil bagi operasional pabrik. Kerja sama ini mencakup penyediaan daya awal 13,8 MVA yang berpotensi meningkat hingga 20 MVA serta dukungan infrastruktur kelistrikan khusus.

The signing of the PPJB with PT PLN (Persero) UID S2JB was carried out to ensure a stable electricity supply for factory operations. This collaboration includes the provision of an initial power of 13.8 MVA, with the potential to increase to 20 MVA, as well as dedicated electricity infrastructure support.



10 Desember 2025 | December 10, 2025

Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama Antara Manajemen Pusri dan Serikat Pekerja Pusri

Signing of the Collective Labor Agreement Between Pusri Management and the Pusri Workers Union

Kesepakatan ini menjadi landasan dalam mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, produktif, dan berkeadilan

This agreement serves as the basis for regulating the rights and obligations of both parties to create a conducive, productive, and equitable work environment.



30 Desember 2025 | December 30, 2025

Risk Culture Campaign 2025

Risk Culture Campaign 2025 merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memperkuat implementasi manajemen risiko di seluruh lini organisasi, bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan insan perusahaan dalam mengidentifikasi serta mengelola risiko secara terstruktur guna mendukung kinerja berkelanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik.

The Risk Culture Campaign 2025 is a form of the company's commitment to strengthening the implementation of risk management across all organizational lines, aiming to improve the understanding and compliance of company personnel in identifying and managing risks in a structured manner to support sustainable performance and good corporate governance.



30 Desember 2025 | December 30, 2025

Pengantongan Akhir 2025 dan Perdana 2026

Final 2025 and Initial 2026 Bagging

Proses pengantongan dan penandatanganan tutup produksi menjadi simbol kesiapan memasuki 2026. Sepanjang 2025, Pusri memperkuat keandalan pabrik, efisiensi, serta pembangunan Pusri III-B, dan berhasil memenuhi target produksi dan penyaluran pupuk subsidi.

The bagging and production closing ceremony symbolized readiness for 2026. Throughout 2025, Pusri strengthened plant reliability and efficiency, as well as the construction of Pusri III-B, successfully meeting subsidized fertilizer production and distribution targets.

One

pretium turpis et arcu
arcu tortor. suscipit eget
rdiet nec. imperdiet
s. ipsum. Sed aliquam
es mauris.

Two

pretium turpis et arcu
arcu tortor. suscipit eget
rdiet nec. imperdiet
s. ipsum. Sed aliquam
es mauris.

Three

pretium turpis et arcu
arcu tortor. suscipit eget
rdiet nec. imperdiet
s. ipsum. Sed aliquam
es mauris.

Four

pretium turpis et arcu
arcu tortor. suscipit eget
rdiet nec. imperdiet
s. ipsum. Sed aliquam
es mauris.





02

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Muhammad Syakir
Komisaris
Commissioner

Siti Nurizka Puteri Jaya
Komisaris Utama Merangkap
Komisaris Independen
President Commissioner
Concurrently Serving as
Independent Commissioner

Arteria Dahlan
Komisaris
Commissioner



Sally Salamah
Komisaris
Commissioner

Fadjar Judisiawan
Komisaris
Commissioner

Bambang Supriyambodo
Komisaris Independen
Independent Commissioner



keterangan | Note:
Dewan Komisaris per 31 Desember 2025

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

SITI NURIZKA PUTERI JAYA

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner, concurrently serving as
Independent Commissioner





Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi beserta seluruh jajaran manajemen atas kerja keras dan dedikasinya sehingga Perusahaan berhasil menunjukkan konsistensinya dalam mendukung pencapaian program swasembada dan ketahanan pangan Pemerintah sekaligus mampu mengatasi kondisi usaha yang penuh tantangan dengan mencatatkan berbagai capaian membesarkan hati, baik pada aspek operasional maupun keuangan.

Hasil tersebut membuat fundamental Perusahaan semakin kokoh dan menjadikan PUSRI lebih siap meraih peluang pertumbuhan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang dengan bekal unit pabrik baru berteknologi terkini yang diproyeksikan segera selesai dan beroperasi sehingga akan memberi dukungan lebih baik bagi peningkatan keberhasilan program kemandirian pangan sekaligus mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan dan peningkatan kemakmuran bangsa.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah yang diberikan kepada kita semua sehingga PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("PUSRI") mampu mengatasi kondisi usaha di tahun 2025 yang bergejolak, penuh tantangan dan ketidakpastian dengan mencatatkan kinerja usaha yang membesarkan hati. Kerja keras, kerja cerdas, kolaborasi yang solid serta disiplin dan dedikasi tinggi oleh seluruh insan Perusahaan terbukti mampu menghasilkan catatan kinerja yang positif, baik pada aspek operasional maupun kinerja keuangan yang semakin menjamin peluang tercapainya pertumbuhan kinerja lebih baik dimasa mendatang. Dewan Komisaris mengapresiasi upaya Direksi beserta seluruh jajaran manajemen dalam menjaga kinerja Perusahaan di tengah kondisi usaha yang penuh tantangan.

Untuk itu mewakili Dewan Komisaris, izinkan saya menyampaikan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2025 dari sudut pandang Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

The Board of Commissioners highly appreciates the performance of the Board of Directors and all levels of management for their hard work and dedication, which enabled the Company to consistently support the Government's food self-sufficiency and food security programs while also overcoming highly challenging business conditions and recording various encouraging achievements, both in operational and financial aspects.

These achievements have further strengthened the Company's fundamentals and positioned PUSRI to better seize future growth opportunities, supported by a new plant unit equipped with the latest technology, which is projected to be completed and operational soon. This development is expected to provide stronger support for the enhancement of national food self-sufficiency programs while also contributing to the achievement of sustainability goals and the improvement of national prosperity.

Dear Shareholders and Stakeholders,

Let us express our praise and gratitude to Almighty God for the blessings bestowed upon us all, enabling PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("PUSRI") to overcome the turbulent, challenging, and uncertain business conditions throughout 2025 and record encouraging business performance. The hard work, smart work, strong collaboration, and discipline and high dedication by all Company personnel have proven capable of delivering positive performance achievements, both operationally and financially, thereby further ensuring the opportunity for stronger performance growth in the future. The Board of Commissioners appreciates the efforts of the Board of Directors and all levels of management in maintaining the Company's performance amid challenging business conditions.

Therefore, on behalf of the Board of Commissioners, allow me to present the Company's Annual Report for the 2025 financial year from the perspective of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function.

KONDISI MAKRO EKONOMI DAN INDUSTRI

Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Perekonomian global di tahun 2025 berkembang dinamis, diwarnai dengan gejolak yang membuat ketidakpastian semakin tinggi karena terdampak oleh terjadinya dua peristiwa utama. Pertama, konflik geopolitik yang berkepanjangan di Kawasan Eropa dan Timur Tengah. Kedua, perselisihan dagang antara Amerika Serikat akibat diberlakukannya tarif impor proteksionis sepihak, dikenal dengan “*Liberation Day*” pada awal kuartal II oleh Pemerintah Amerika Serikat. Pengumuman penerapan kebijakan tersebut memacu meningkatnya indeks ketidakpastian pasar keuangan global yang tercermin dari merosotnya indeks pasar modal di seluruh dunia serta melonjaknya nilai tukar dolar AS, yang kemudian disusul dengan menurunnya pertumbuhan perekonomian dunia di kuartal II 2025.

Pemerintah Amerika Serikat kemudian menunda pemberlakuan kebijakan tersebut hingga awal kuartal III dan membuka ruang negosiasi dengan seluruh negara-negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia, hingga tercapai berbagai kesepakatan bilateral. Perkembangan terakhir tersebut membuat lembaga keuangan global IMF dalam kajiannya *World Economic Outlook* (WEO) Januari 2026, memperkirakan perekonomian global di tahun 2025 akhirnya mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,3%, sama dengan tahun sebelumnya. Kajian tersebut juga mengemukakan tingkat pertumbuhan masing-masing wilayah, maupun negara berbeda-beda, dengan kelompok negara berkembang di Asia rata-rata mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju kawasan lain.

Volume perdagangan dunia, sesuai laporan IMF tersebut, tetap menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari 3,6% menjadi 4,1%. Adapun harga-harga komoditas primer energi, seperti minyak dan batu bara menurun sampai dua digit, namun harga gas alam, yang masih terpengaruh konflik Ukraina-Rusia, justru naik 9% menjadi US\$11,96 per MMBTU dari US\$10,96 per MMBTU pada 2024¹. Ketidakpastian pasar keuangan global yang juga meningkat membuat aliran modal keluar dari Emerging Market, bergeser ke aset yang dianggap aman (*safe haven assets*), khususnya obligasi AS dan emas, membuat nilai tukar dolar AS meningkat, sementara harga emas terus mencatatkan rekor tertinggi baru. Dalam laporan tersebut, IMF juga memprediksi inflasi global 2025 terus menurun menjadi sebesar 4,2% dari 5,8%.

MACROECONOMIC AND INDUSTRY CONDITIONS

Global and National Economic Conditions

The global economy in 2025 developed dynamically and was marked by volatility that heightened uncertainty due to the impact of two major events. First, the prolonged geopolitical conflicts in Europe and the Middle East. Second, trade disputes involving the United States following the implementation of unilateral protectionist import tariffs, known as “*Liberation Day*,” at the beginning of the second quarter by the United States Government. The announcement of this policy implementation triggered a rise in the global financial market uncertainty index, as reflected in declining stock market indices worldwide and the strengthening of the US dollar exchange rate, which was subsequently followed by a slowdown in global economic growth during the second quarter of 2025.

The United States Government subsequently postponed the implementation of the policy until the beginning of the third quarter and opened negotiation channels with all of its trading partner countries, including Indonesia, resulting in the achievement of various bilateral agreements. These latest developments led the International Monetary Fund, in its January 2026 edition of the *World Economic Outlook* (WEO), to project that the global economy would ultimately record growth of 3.3% in 2025, unchanged from the previous year. The report also highlighted varying growth levels across regions and countries, with developing countries in Asia generally recording higher growth than developed countries in other regions.

According to the IMF report, global trade volume continued to show growth improvement, increasing from 3.6% to 4.1%. Prices of primary energy commodities, such as oil and coal, declined by double digits. However, natural gas prices, which continued to be affected by the Ukraine–Russia conflict, increased by 9% to US\$11.96 per MMBTU from US\$10.96 per MMBTU in 2024. The heightened uncertainty in global financial markets also triggered capital outflows from Emerging Markets toward assets considered safe havens, particularly US bonds and gold, resulting in the appreciation of the US dollar, while gold prices continued to reach new record highs. In the same report, the IMF also projected that global inflation in 2025 would continue to decline to 4.2% from 5.8%.

¹Pink Sheet, World Bank.



Penurunan tingkat inflasi global tersebut membuka ruang bagi dilakukannya penurunan suku bunga rujukan oleh bank sentral di berbagai negara. The Fed menurunkan suku bunga rujukan Fed Funds Rate (FFR) secara bertahap dari 4,5% diakhir tahun 2024, menjadi sebesar 3,75%, selanjutnya European Central Bank (ECB) juga menurunkan suku bunga dari kisaran 3,15% menjadi 2,15% di akhir 2025. Kemudian Bank Of England menurunkan suku bunga bertahap dari 5,25% menjadi 3,75% dan Bank Sentral China (People Bank of China/PBOC) juga menurunkan suku bunga dari 3,45% menjadi 3,0% di akhir tahun 2025.

Di tengah dinamisnya gejala perekonomian global tersebut, Dewan Komisaris mengamati Pemerintah dan Bank Indonesia memberikan respon cepat dan menjalankan sinergi penerapan kebijakan makro fiskal maupun moneter dengan prudent, sehingga mampu mendorong tumbuhnya permintaan domestik dengan tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Hasilnya, perekonomian nasional mampu menunjukkan daya tahan dibandingkan negara-negara lain di kawasan, dan sesuai data BPS, mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,11% meningkat dari 5,03% di tahun sebelumnya. Adapun inflasi domestik, sekalipun meningkat ke level 2,92%, masih berada di kisaran target, yakni $2,5\% \pm 1\%$.²

Kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 dari sisi konsumsi adalah permintaan domestik yang semakin kuat, terutama konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 53,88% PDB yang tumbuh 4,98%, menunjukkan daya beli masyarakat relatif terjaga, serta realisasi investasi yang stabil, terutama di sektor infrastruktur. Momentum ini diperkuat dengan kemajuan yang terus berlanjut pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengeluaran fiskal yang tetap kuat. Sementara dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan perekonomian Indonesia didorong terutama oleh tumbuhnya sektor-sektor andalan, seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian dan konstruksi, yang masing-masing berkontribusi sebesar 19,20%, 13,24%, 11,56% dan 10,16% dari nilai PDB nasional, dan masing-masing tumbuh sebesar 5,40%, 6,07%, 5,14% dan 3,89% di tahun 2025. Sedangkan indeks PMI manufaktur, Desember 2025 berada pada posisi 51,2, menunjukkan industri pengolahan Indonesia berada pada fase ekspansif.

The decline in global inflation levels provided room for central banks in various countries to lower their benchmark interest rates. Federal Reserve System gradually reduced the Fed Funds Rate (FFR) from 4.5% at the end of 2024 to 3.75%, while the European Central Bank also lowered its benchmark interest rate from around 3.15% to 2.15% by the end of 2025. Furthermore, the Bank of England gradually reduced its interest rate from 5.25% to 3.75%, while the People's Bank of China also lowered its benchmark interest rate from 3.45% to 3.0% by the end of 2025.

Amid the dynamic volatility of the global economy, the Board of Commissioners observed that the Government and Bank Indonesia responded swiftly and implemented prudent synergy between fiscal and monetary macroeconomic policies, thereby encouraging domestic demand growth while maintaining a balance between stability and growth. As a result, the national economy demonstrated resilience compared to other countries in the region and, based on data from Badan Pusat Statistik, recorded growth of 5.11%, increasing from 5.03% in the previous year. Meanwhile, domestic inflation, although rising to 2.92%, remained within the target range of $2.5\% \pm 1\%$.²

The main contributor to Indonesia's economic growth in 2025 from the expenditure side was stronger domestic demand, particularly household consumption, which contributed 53.88% to GDP and grew by 4.98%, indicating that public purchasing power remained relatively well maintained, as well as stable investment realization, especially in the infrastructure sector. This momentum was further strengthened by continued progress in National Strategic Projects (PSN) and sustained strong fiscal spending. From the business sector perspective, Indonesia's economic growth was mainly driven by the expansion of key sectors such as manufacturing, trade, agriculture, and construction, which contributed 19.20%, 13.24%, 11.56%, and 10.16%, respectively, to national GDP, and each recorded growth of 5.40%, 6.07%, 5.14%, and 3.89% in 2025. Meanwhile, the manufacturing PMI index stood at 51.2 in December 2025, indicating that Indonesia's manufacturing industry remained in an expansionary phase.

² BPS

Realisasi investasi membuat neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus, sehingga cadangan devisa di akhir tahun 2025 meningkat mencapai nilai sebesar US\$156,5 miliar. Perkembangan tersebut membuat nilai tukar rupiah per akhir Desember 2025 tercatat sebesar Rp16.675/USD, terdepresiasi 3,5% dari Rp16.095/USD di akhir 2024. Bank Indonesia kemudian menurunkan suku bunga acuan BI Rate secara bertahap dari kisaran 6,00% di akhir tahun 2024, menjadi sebesar 4,75% pada akhir tahun 2025. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga kestabilan nilai tukar dari gejolak penguatan nilai tukar dolar AS, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan perekonomian nasional.³

Kondisi Industri Pupuk Global dan Nasional

Kapasitas produksi urea global pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 246,0 juta ton per tahun, meningkat dari sekitar 241,9 juta ton pada tahun sebelumnya. Sementara itu, permintaan pupuk urea global diperkirakan berada pada kisaran 180–200 juta ton. Kondisi tersebut menunjukkan pasar urea global tetap berada pada tingkat permintaan yang tinggi di tengah dinamika pasokan dan volatilitas harga energi.

Peningkatan permintaan di pasar global terefleksikan dari harga pupuk urea di pasar global sepanjang tahun 2025 yang selain berfluktuasi, juga cenderung meningkat di kisaran USD346,10–USD474,56 per metrik ton, rata-rata meningkat 13,4% dari kisaran USD333,50 – USD338,24 per metrik ton di tahun 2025. Kenaikan harga urea tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, yakni naiknya harga gas, penurunan produksi global, gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah, larangan ekspor oleh Tiongkok sebagai produsen urea terbesar dan naiknya permintaan global. Adapun rata-rata harga amoniak, juga menurut World Bank – Pink Sheet Commodity Price, meningkat lebih tinggi, 24,9%, karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga gas di pasar global yang masih terpengaruh oleh konflik di kawasan Eropa.

Total kebutuhan pupuk nasional di tahun 2025 diperkirakan sebesar 14,5 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk tersebut Pemerintah Indonesia membantu para petani dengan menyediakan skema *Public Service Obligation* (PSO) atau pupuk bersubsidi, sisanya dipenuhi dengan skema komersial Non-PSO. Penyediaan pupuk bersubsidi dipenuhi oleh pabrik

Investment realization also enabled Indonesia's trade balance to once again record a surplus, resulting in foreign exchange reserves increasing to US\$156.5 billion by the end of 2025. These developments led to the Rupiah exchange rate at the end of December 2025 being recorded at Rp16,675/USD, depreciating by 3.5% from Rp16,095/USD at the end of 2024. Bank Indonesia subsequently gradually reduced the BI Rate benchmark interest rate from around 6.00% at the end of 2024 to 4.75% by the end of 2025. This decision was taken to maintain exchange rate stability amid volatility caused by the strengthening of the US dollar, while also preserving the momentum of national economic growth.³

Global and National Fertilizer Industry Conditions

Global urea production capacity in 2025 was estimated to reach approximately 246.0 million tons per year, increasing from approximately 241.9 million tons in the previous year. Meanwhile, global urea fertilizer demand was estimated to range between 180–200 million tons. These conditions indicate that the global urea market remained at a high level of demand amid supply dynamics and energy price volatility.

The increase in global market demand was reflected in global urea fertilizer prices throughout 2025, which not only fluctuated but also tended to increase within the range of USD346.10–USD474.56 per metric ton, representing an average increase of 13.4% compared to the range of USD333.50–USD338.24 per metric ton in 2024. The increase in urea prices was influenced by several key factors, namely rising gas prices, declining global production, supply disruptions from the Middle East region, export restrictions imposed by China as the world's largest urea producer, and increasing global demand. Meanwhile, according to the World Bank – Pink Sheet Commodity Price report, average ammonia prices increased even more significantly by 24.9%, driven by fluctuations in global gas prices that continued to be affected by conflicts in the European region.

Total national fertilizer demand in 2025 was estimated at 14.5 million tons. To fulfill this fertilizer demand, the Government of Indonesia supported farmers through the Public Service Obligation (PSO) or subsidized fertilizer scheme, while the remaining demand was met through the commercial non-PSO scheme. The provision of subsidized fertilizers was supplied by the national fertilizer

³Bank Indonesia



pupuk nasional, PT Pupuk Indonesia (Persero), termasuk didalamnya adalah PUSRI. Pelaksanaan tugas penyaluran pupuk Urea dan NPK bersubsidi, termasuk penentuan lokasi pemasaran dan harga subsidi dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Menteri Pertanian.

Pada tahun 2025 Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi baru, melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, agar alokasi distribusi pupuk bersubsidi sejumlah 9,5 juta ton dapat mencapai sasaran penerima yang berjumlah sekitar 14 juta petani di seluruh Indonesia. Jenis pupuk yang termasuk dalam skema pupuk bersubsidi pada tahun 2025 dengan jumlah alokasi masing-masing adalah: Urea 4,6 juta ton, NPK 4,2 juta ton, PK Kakao 147 ribu ton, serta pupuk organik 500 ribu ton.

Penyaluran pupuk bersubsidi tersebut diprioritaskan untuk mendukung peningkatan produktivitas sembilan komoditas strategis pertanian, yaitu sub sektor tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, dan kedelai; sub sektor hortikultura yang meliputi cabai, bawang merah, dan bawang putih; serta sub sektor perkebunan rakyat yang meliputi tebu rakyat, kakao, dan kopi. Sebagai bentuk tekad Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi diturunkan sebesar 20%, mulai Oktober 2025.

Untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan penyaluran maupun pencatatan jumlah distribusi pupuk subsidi, PUSRI bersama-sama PI Grup telah menerapkan teknologi digital yang telah terintegrasi dengan seluruh distributor dan kios pupuk untuk mempermudah transaksi dan pencatatan penjualan pupuk. Sementara untuk platform bisnis dalam penjualan/penyaluran pupuk Non PSO, Korporasi, dan Retail, PUSRI bersama-sama PI Grup menggunakan aplikasi Andalan untuk mempermudah proses transaksi penebusan bagi distributor Non PSO, ritel, dan korporasi. Pada penyaluran pupuk non subsidi ini PUSRI, maupun produsen pupuk lain di lingkup PI Grup, juga menyosialisasikan program Makmur, yakni program pendampingan intensif kepada petani dan budi daya pertanian berkelanjutan serta melibatkan rantai pasok dengan tujuan untuk memakmurkan petani Indonesia.

producer, PT Pupuk Indonesia (Persero), including PUSRI. The implementation of subsidized Urea and NPK fertilizer distribution, including the determination of marketing areas and subsidy prices, was carried out in accordance with Indonesian Government regulations through Minister of Agriculture Regulations.

In 2025, the Government of Indonesia implemented a new governance policy for subsidized fertilizer distribution through Presidential Regulation No. 6 of 2025 and Minister of Agriculture Regulation No. 15 of 2025, in order to ensure that the subsidized fertilizer distribution allocation of 9.5 million tons could reach its intended beneficiaries, namely approximately 14 million farmers throughout Indonesia. The types of fertilizers included in the subsidized fertilizer scheme in 2025 and their respective allocation volumes were: 4.6 million tons of Urea, 4.2 million tons of NPK, 147 thousand tons of PK Cocoa fertilizer, and 500 thousand tons of organic fertilizer.

The distribution of subsidized fertilizers was prioritized to support productivity improvement for nine strategic agricultural commodities, namely the food crops subsector consisting of rice, corn, and soybeans; the horticulture subsector consisting of chili, shallots, and garlic; as well as the smallholder plantation subsector consisting of sugarcane, cocoa, and coffee. As a demonstration of the Government of Indonesia's commitment to improving farmers' productivity and welfare, the highest retail price (HET) of subsidized fertilizers was reduced by 20%, effective from October 2025.

To improve transparency, distribution accuracy, and recording of subsidized fertilizer distribution volumes, PUSRI together with the PI Group implemented digital technology integrated with all fertilizer distributors and kiosks to facilitate transaction processing and fertilizer sales recording. Meanwhile, for the business platform supporting the sales/distribution of Non-PSO, Corporate, and Retail fertilizers, PUSRI together with the PI Group utilized the Andalan application to simplify redemption transaction processes for Non-PSO distributors, retail customers, and corporate clients. In the distribution of non-subsidized fertilizers, PUSRI and other fertilizer producers within the PI Group also promoted the Makmur program, an intensive assistance and sustainable agricultural cultivation program involving the supply chain with the objective of improving the prosperity of Indonesian farmers.

Untuk memenuhi kewajiban penyaluran pupuk bersubsidi maupun non subsidi, Pupuk Indonesia Group selaku penyedia pupuk nasional terbesar senantiasa berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk dengan mengoptimalkan kapasitas produksinya. Jumlah kapasitas pabrik urea Pupuk Indonesia Group per tahun 2025 tercatat sebesar 9,36 juta ton atau 200% dari kebutuhan urea sektor pangan nasional. Sementara untuk pupuk NPK, kapasitas Pabrik NPK adalah sebesar 4,6 juta ton atau 105% dari kebutuhan nasional, yaitu 4,4 juta ton.

To fulfill obligations related to the distribution of subsidized and non-subsidized fertilizers, the Pupuk Indonesia Group, as the largest national fertilizer provider, consistently remained committed to maintaining fertilizer availability by optimizing its production capacity. The total urea plant capacity of the Pupuk Indonesia Group in 2025 was recorded at 9.36 million tons, equivalent to 200% of the national food-sector urea demand. Meanwhile, for NPK fertilizer, total NPK plant capacity reached 4.6 million tons, or 105% of the national demand of 4.4 million tons.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi mengacu pada keberhasilan pencapaian target, dan indikator kinerja utama (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolektif maupun individual. Hasil penilaian pencapaian KPI tersebut kemudian disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam RUPS pada Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, setelah pengesahan RKAP.

Berdasarkan capaian KPI tersebut Dewan Komisaris memandang Direksi beserta jajaran Manajemen telah melakukan pengelolaan Perusahaan dengan baik. Dewan Komisaris juga memandang program-program revitalisasi dan penerapan inisiatif operational excellence yang dijalankan oleh Direksi guna mengatasi kendala usia beberapa fasilitas produksi telah berjalan dengan baik, sehingga Perusahaan tetap berhasil menjalankan misi menyediakan pupuk bersubsidi dengan tepat waktu dan tepat jumlah dengan baik.

Ke depan, Dewan Komisaris berharap kinerja yang baik ini terus dijaga dan ditingkatkan, mengingat target produksi pangan di tahun-tahun mendatang telah semakin ditingkatkan demi tercapainya tujuan kemandirian pangan, sehingga kebutuhan pupuk akan meningkat, yang juga berarti terbukanya peluang untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang. Dewan Komisaris meyakini selesainya pembangunan dan beroperasinya unit pabrik baru di masa mendatang, yang progresnya di tahun pelaporan telah lebih baik dari target, akan membuat Perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya dalam mendukung target kemandirian dan ketahanan pangan Pemerintah Indonesia.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

The Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Directors based on the achievement of targets and Key Performance Indicators (KPIs) as stipulated in the Management Contract of the Board of Directors, both collectively and individually. The results of the KPI achievement assessment are subsequently presented by the Board of Commissioners at the General Meeting of Shareholders (GMS) through the Supervisory Report of the Board of Commissioners following the ratification of the RKAP.

Based on the achievement of these KPIs, the Board of Commissioners views that the Board of Directors and the Management team have managed the Company effectively. The Board of Commissioners also considers that the revitalization programs and the implementation of operational excellence initiatives carried out by the Board of Directors to address the aging conditions of several production facilities have been implemented effectively, enabling the Company to continue fulfilling its mission of providing subsidized fertilizers in a timely manner and in the appropriate quantities.

Going forward, the Board of Commissioners expects this positive performance to be maintained and further improved, considering that food production targets in the coming years have been significantly increased in order to achieve food self-sufficiency objectives, thereby increasing fertilizer demand and simultaneously creating opportunities for improved performance in the future. The Board of Commissioners believes that the completion and future operation of the new plant unit, whose progress during the reporting year exceeded the established target, will enable the Company to enhance its performance in supporting the food self-sufficiency and food security targets of the Government of Indonesia.



Mengacu pada hasil audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2025, PUSRI mencatatkan total pendapatan usaha sebesar Rp13,87 triliun, meningkat 2,52% dari senilai 2024 Rp13,53 triliun di tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama dikontribusikan oleh naiknya nilai penjualan pupuk subsidi walaupun kuantitas volume penjualan menurun.

PUSRI membukukan penurunan laba bersih 42,58% pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp613,53 miliar dari sebelumnya senilai Rp1,06 triliun pada tahun 2024. Penurunan laba tahun berjalan tersebut utamanya dikarenakan pada Tahun 2024 terdapat pendapatan atas penyelesaian PKPU Rekin sebesar Rp 226 miliar dan realisasi tonase penjualan Tahun 2025 hanya tercapai sebesar 93% dari Tahun 2024. Sekalipun menurun, laba bersih tahun 2025 tersebut telah sesuai dengan target awal tahun, dengan persentase capaian 100,51%.

Dewan Komisaris mengharapkan agar Direksi dapat secara konsisten dan berkelanjutan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja yang baik tersebut pada semua parameter di masa mendatang, disamping tetap mampu mengemban amanah menyalurkan pupuk subsidi dengan tepat waktu, tepat kualitas dan tepat jumlah. Selain itu Direksi diharapkan senantiasa menjalankan peningkatan pengelolaan risiko dengan cermat dan memitigasi potensial risiko dengan tepat di tengah perkembangan kondisi perekonomian dan kondisi industri yang berkembang dengan dinamis.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi beserta seluruh jajaran manajemen di bawahnya atas berbagai prestasi yang dicapai sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan bahwa eksistensi PUSRI dalam industri pupuk nasional semakin membaik dan mampu menunjukkan konsistensi dalam mendukung pencapaian target kemandirian pangan.

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris senantiasa berupaya meningkatkan fungsi dan kualitas pengawasan terutama dalam mendorong terjadinya perbaikan kualitas kinerja Perusahaan secara keseluruhan antara lain pada aspek: Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), penerapan manajemen risiko yang efektif, pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta penggunaan sistem informasi dan teknologi tepat guna. Selain itu, Dewan Komisaris juga senantiasa memberikan saran dan masukan konstruktif yang disampaikan dalam rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi atau Rapat Pengawasan RKAP dan KPI Korporat.

Based on the audited Financial Statements for Fiscal Year 2025, PUSRI recorded total operating revenue of Rp13.87 trillion, an increase of 2.52% from Rp13.53 trillion in 2024. This increase was primarily driven by the higher value of subsidized fertilizer sales, despite a decline in sales volume.

PUSRI recorded a 42.58% decrease in net profit in 2025 to Rp613.53 billion from Rp1.06 trillion in 2024. The decrease in profit for the year was primarily due to the recognition of income from the settlement of Rekin's Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) amounting to Rp 226 billion in 2024, and the realization of sales tonnage in 2025 reaching only 93% of the 2024 level.. Despite the decrease, the 2025 net profit achievement remained in line with the initial annual target, with an achievement percentage of 100.51%.

The Board of Commissioners expects the Board of Directors to consistently and sustainably maintain and further improve these positive performance achievements across all parameters in the future, while continuing to fulfill its mandate to distribute subsidized fertilizers in a timely manner, with the appropriate quality and quantity. In addition, the Board of Directors is expected to continuously enhance risk management practices prudently and appropriately mitigate potential risks amid dynamically evolving economic and industry conditions.

The Board of Commissioners extends its appreciation to the Board of Directors and all management personnel under its supervision for the various achievements attained throughout 2025, which demonstrate that PUSRI's existence within the national fertilizer industry continues to strengthen and reflects consistent support toward achieving national food self-sufficiency targets.

SUPERVISORY FUNCTION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners continuously strives to enhance the function and quality of supervision, particularly in encouraging improvements in the overall quality of the Company's performance, including in the areas of Occupational Health, Safety, and Environment (OHS&E), the implementation of effective risk management, human capital competency development, as well as the utilization of appropriate information systems and technology. In addition, the Board of Commissioners consistently provides constructive advice and recommendations conveyed during Board of Commissioners meetings attended by the Board of Directors or during RKAP and Corporate KPI Supervisory Meetings.

Dewan Komisaris menempatkan RKAP dan KPI Korporat sebagai salah satu acuan penting dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Dewan Komisaris melalui Laporan Manajemen triwulanan dan Laporan Kinerja bulanan secara berkala melakukan evaluasi atas pencapaian RKAP dalam Rapat Pengawasan.

Dewan Komisaris juga memantau pelaksanaan sistem pengendalian internal dan perkembangan pelaksanaan Risk Based Audit. Secara berkala (triwulanan) Komite Audit melakukan evaluasi atas Laporan Kegiatan Pengawasan Intern (LKPI) dan Laporan Hasil Audit (LHA) dari Satuan Pengawasan Intern, serta mencermati temuan penting atau temuan berulang beserta monitoring tindak lanjutnya.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan melalui pelaksanaan rapat-rapat formal bersama dengan Direksi, maupun secara non-formal melalui berbagai acara diskusi maupun pertemuan non-formal lainnya. Agenda pembahasan dalam setiap rapat adalah pembahasan mengenai langkah-langkah strategis Perusahaan, termasuk penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Di sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menyelenggarakan 15 (lima belas) rapat gabungan dengan Direksi yang di dalamnya juga melibatkan organ pendukung Dewan Komisaris selain melakukan 12 (dua belas) rapat internal Dewan Komisaris. Sejumlah saran dan rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan melalui rapat-rapat gabungan tersebut telah dijalankan dengan baik oleh Direksi. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas komunikasi konstruktif yang telah terjalin dan keterbukaan Direksi sebagai wujud komitmen bersama dalam rangka menjaga keberlangsungan dan meningkatnya pertumbuhan bisnis PUSRI yang semakin berkualitas.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris berpendapat PUSRI harus senantiasa berupaya meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) untuk mencapai standar praktik terbaik, selain menyesuaikan acuan praktik dan prinsip GCG dengan perkembangan terkini. Dewan Komisaris menilai kontinuitas perbaikan sistem GCG yang dilakukan oleh PUSRI berjalan dengan sangat baik dan berkelanjutan. Secara berkala, PUSRI melaksanakan penilaian kualitas penerapan GCG yang melibatkan institusi Independen dan kredibel. Dengan dilakukannya pengukuran kualitas penerapan

The Board of Commissioners regards the RKAP and Corporate KPIs as important references in carrying out its supervisory function. Through quarterly Management Reports and monthly Performance Reports, the Board of Commissioners periodically evaluates the achievement of the RKAP during Supervisory Meetings.

The Board of Commissioners also monitors the implementation of the internal control system and the progress of Risk-Based Audit implementation. On a periodic basis (quarterly), the Audit Committee evaluates the Internal Supervisory Activity Report (LKPI) and Audit Report (LHA) issued by the Internal Audit Unit, while also reviewing significant findings or recurring findings along with the monitoring of follow-up actions.

Frequency and Methods of Providing Advice to the Board of Directors

The Board of Commissioners carries out its supervisory function through formal meetings with the Board of Directors, as well as informally through various discussions and other non-formal meetings. The agenda discussed during each meeting includes strategic steps undertaken by the Company, including the establishment of the Company Work Plan and Budget (RKAP) and the Company Long-Term Plan (RJPP).

Throughout 2025, the Board of Commissioners held 15 (fifteen) joint meetings with the Board of Directors, which also involved supporting organs of the Board of Commissioners, in addition to conducting 12 (twelve) internal meetings of the Board of Commissioners. Various recommendations and suggestions delivered by the Board of Commissioners through these joint meetings were properly implemented by the Board of Directors. The Board of Commissioners expresses its appreciation for the constructive communication that has been established and the openness demonstrated by the Board of Directors as a reflection of the shared commitment to maintaining business sustainability and fostering increasingly quality growth for PUSRI.

VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Commissioners believes that PUSRI must continuously strive to improve the quality of Good Corporate Governance (GCG) implementation in order to achieve best practice standards, while also aligning GCG practices and principles with current developments. The Board of Commissioners considers that the continuity of GCG system improvements undertaken by PUSRI has been implemented very well and sustainably. Periodically, PUSRI conducts assessments of GCG implementation quality involving independent and credible institutions. Through intensive measurement of GCG implementation quality, followed by the implementation of improvement



GCG secara intensif, diikuti pelaksanaan rekomendasi perbaikannya, kualitas penerapan GCG di PUSRI senantiasa mengalami peningkatan. Namun demikian, Dewan Komisaris meyakini, PUSRI akan dapat menjaga disparitas implementasi GCG di setiap level, sehingga implementasi GCG dapat berjalan proporsional dan seimbang.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

PUSRI memiliki 3 (tiga) komite di bawah Dewan Komisaris, yakni: Komite Audit, Komite Investasi dan Manajemen Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris menilai komite-komite tersebut telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga cukup membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perusahaan.

Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal serta memastikan kewajaran dan keandalan laporan keuangan serta informasi keuangan lainnya dalam rangka memastikan kesesuaian dengan standar dan aturan yang berlaku.

Selama tahun 2025 Komite Audit telah melaksanakan tugas sesuai program kerja yang direncanakan, melakukan pembahasan rencana dan hasil audit internal maupun eksternal. Seluruh temuan, catatan dan rekomendasi dari hasil pelaksanaan kegiatan, penelaahan dan analisa Komite Audit telah dikomunikasikan dan didiskusikan dengan Manajemen, Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan auditor eksternal, serta telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan perbaikan dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Komite Investasi dan Manajemen Risiko (KIMR)

Komite Investasi dan Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk menilai dan memberi masukan terhadap penyusunan kebijakan, strategi serta mitigasi yang harus dilakukan dari hasil kajian Risiko Perusahaan, baik terkait dengan aspek risiko potensial maupun kepatuhan terhadap regulasi, serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hasil kajian analisa risiko tersebut. Komite IMR juga bertanggung jawab untuk memberikan masukan terhadap analisis risiko yang dihadapi Perusahaan baik pada kegiatan perencanaan, operasional, investasi maupun evaluasi atas penerapan prinsip Three Lines of Defense dan Enterprise Risk Management yang dijalankan di seluruh unit bisnis PUSRI.

recommendations, the quality of GCG implementation at PUSRI continues to improve. Nevertheless, the Board of Commissioners believes that PUSRI will be able to maintain balanced implementation across all levels, thereby ensuring that GCG implementation is carried out proportionally and consistently.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

PUSRI has three committees under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, the Investment and Risk Management Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners considers that these committees have performed their duties effectively, thereby adequately supporting the supervisory function of the Board of Commissioners over the management of the Company.

Audit Committee

The Audit Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of internal controls implemented by both internal and external auditors, as well as ensuring the accuracy, and reliability of financial statements other financial information in order to ensure compliance with applicable standards and regulations.

Throughout 2025, the Audit Committee carried out its duties in accordance with the planned work program, including discussions on internal and external audit plans and audit results. All findings, notes, and recommendations resulting from the implementation of the Committee's activities, reviews, and analyses were communicated and discussed with Management, the Internal Audit Unit (SPI), and external auditors, and were subsequently reported to the Board of Commissioners for improvement and follow-up actions by the relevant parties.

Investment and Risk Management Committee (KIMR)

The Investment and Risk Management Committee is responsible for assessing and providing input on the formulation of policies, strategies, and mitigation measures arising from the Company's risk assessment, both in relation to potential risk aspects and regulatory compliance, as well as providing recommendations to the Board of Commissioners based on the results of such risk analyses. The IMR Committee is also responsible for providing input regarding risk analyses faced by the Company in planning, operational, and investment activities, as well as evaluating the implementation of the Three Lines of Defense principle and Enterprise Risk Management across all PUSRI business units.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) membantu Dewan Komisaris dalam memantau proses pencalonan kandidat anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat PUSRI di bawah Direksi. KNR juga mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sebagai dasar tinjauan RUPS dalam menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit, Komite Investasi dan Manajemen Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas masing-masing komite sesuai dengan pedoman kerja yang ditetapkan.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas hasil kerja Komite dan optimis kinerja dapat lebih ditingkatkan dan mampu lebih bersinergi dengan unit kerja terkait, sehingga komite Dewan Komisaris mampu memberikan sumbangsih yang lebih besar bagi berkembangnya skala usaha PUSRI.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan keputusan Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang tertuang di dalam Akta Nomor 08 tanggal 22 Agustus 2025, pada tahun 2025, terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris Perusahaan. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugasnya, Sdr. Prahoro Yulijanto Nurtjahyo, Sdr. Ali Jamil Harahap dan Sdr. Bambang Supriyambodo diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Komisaris diiringi ucapan terima kasih dan penghargaan atas sumbangsih tenaga dan pikirannya selama menjalankan tugas.

Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) assists the Board of Commissioners in monitoring the nomination process for candidates for the Board of Commissioners, Board of Directors, and PUSRI officials under the Board of Directors. The NRC also evaluates the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors as a basis for the GMS review in determining the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Reports on the implementation of activities of the Audit Committee, the Investment and Risk Management Committee, and the Nomination and Remuneration Committee are submitted monthly, quarterly, half-yearly and annually to the Board of Commissioners as a form of accountability for the implementation of each committee's duties in accordance with the established work guidelines.

The Board of Commissioners expresses its appreciation for the performance of the committees and remains optimistic that their performance can be further enhanced and strengthened through greater synergy with related work units, thereby enabling the committees under the Board of Commissioners to contribute more significantly to the growth and expansion of PUSRI's business scale.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with the resolution of the PT Pupuk Sriwidjaja Palembang shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang as stipulated in Deed No. 08 dated August 22, 2025, changes occurred in the composition of the Company's Board of Commissioners during 2025. In relation to the expiration of their terms of office, Mr. Prahoro Yulijanto Nurtjahyo, Mr. Ali Jamil Harahap, and Mr. Bambang Supriyambodo were honorably discharged from their positions as Commissioners, accompanied by expressions of gratitude and appreciation for their contributions and dedication during their tenure.



Selanjutnya Keputusan Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mengangkat Sdr. Bambang Supriyambodo sebagai Komisaris Independen, serta mengangkat Sdr. Arteria Dahlan dan Sdr. Muhammad Syakir sebagai Komisaris. Sehingga komposisi Dewan Komisaris PUSRI pada akhir tahun 2025 adalah:

Siti Nurizka Puteri Jaya	: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Bambang Supriyambodo	: Komisaris Independen
Arteria Dahlan	: Komisaris
Muhammad Syakir	: Komisaris
Sally Salamah	: Komisaris
Fadjar Judisiawan	: Komisaris

Pada tanggal 14 April 2026 sebelum ditandatangani dokumen Laporan Tahunan ini, kembali terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris Perusahaan. Sdr. Bambang Supriyambodo diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Komisaris Independen diiringi ucapan terima kasih dan penghargaan atas sumbangsih tenaga serta pikirannya selama menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Nomor 196 Tahun 2026 tanggal 13 April 2026, Nomor 017/AJHK/00302/KPS/2026 tanggal 14 April 2026 dan Nomor 24N/IV/KPS/2026 tanggal 14 April 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang digantikan oleh Sdr. Teddy Gusnaidi sebagai Komisaris Independen.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor 246 Tahun 2026 tanggal 24 April 2026, Nomor 018/A/HK/D0302/KPS/2026 tanggal 25 April 2026 dan Nomor 26/Y/IV/KPS/2026 tanggal 25 April 2026 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, telah ditetapkan pengangkatan Sdr. Mohamad Idris Laena sebagai Komisaris Independen terhitung mulai tanggal 25 April 2026.

Subsequently, pursuant to the Resolution of the Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Mr. Bambang Supriyambodo was appointed as Independent Commissioner, while Mr. Arteria Dahlan and Mr. Muhammad Syakir were appointed as Commissioners. Accordingly, the composition of PUSRI's Board of Commissioners as of the end of 2025 was as follows:

Siti Nurizka Puteri Jaya	: President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner
Bambang Supriyambodo	: Independent Commissioner
Arteria Dahlan	: Commissioner
Muhammad Syakir	: Commissioner
Sally Salamah	: Commissioner
Fadjar Judisiawan	: Commissioner

On April 14, 2026, prior to the signing of this Annual Report, another change occurred in the composition of the Company's Board of Commissioners. Mr. Bambang Supriyambodo was honorably discharged from his position as Independent Commissioner, accompanied by the Company's gratitude and appreciation for his dedication and contributions during his tenure, pursuant to Shareholders' Resolutions No. 196 of 2026 dated April 13, 2026, No. 017/AJHK/00302/KPS/2026 dated April 14, 2026, and No. 24N/IV/KPS/2026 dated April 14, 2026 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. He was replaced by Mr. Teddy Gusnaidi as Independent Commissioner.

Furthermore, based on the Shareholders' Resolutions of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. 246 of 2026 dated April 24, 2026, No. 018/A/HK/D0302/KPS/2026 dated April 25, 2026, and No. 26/Y/IV/KPS/2026 dated April 25, 2026 concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Mr. Mohamad Idris Laena was appointed as Independent Commissioner, effective April 25, 2026.

Dengan pengangkatan Komisaris Independen tersebut, komposisi Dewan Komisaris PUSRI hingga ditandatanganinya dokumen Laporan Tahun 2025 adalah:

Siti Nurizka Puteri Jaya	: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Teddy Gusnaidi	: Komisaris Independen
Mohamad Idris Laena	: Komisaris Independen
Arteria Dahlan	: Komisaris
Muhammad Syakir	: Komisaris
Sally Salamah	: Komisaris
Fadjar Judisiawan	: Komisaris

With the appointment of the Independent Commissioners, the composition of PUSRI's Board of Commissioners up to the signing of the 2025 Annual Report document was as follows:

Siti Nurizka Puteri Jaya	: President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner
Teddy Gusnaidi	: Independent Commissioner
Mohamad Idris Laena	: Independent Commissioner
Arteria Dahlan	: Commissioner
Muhammad Syakir	: Commissioner
Sally Salamah	: Commissioner
Fadjar Judisiawan	: Commissioner

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERUSAHAAN YANG DISUSUN DIREKSI

Dewan Komisaris sependapat dengan pandangan Direksi yang menyatakan keyakinan dan optimisme terhadap prospek usaha PUSRI di tahun mendatang, sekalipun kondisi perekonomian global maupun nasional diperkirakan masih akan terdampak oleh berkepanjangannya dan meningkatnya cakupan konflik geopolitik di Timur Tengah maupun di Eropa, selain masih diwarnai oleh tingginya nilai tukar dolar Amerika. Perlu kami tambahkan kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan permintaan pupuk di pasar global, mengingat pasokan bahan baku maupun pupuk dari area konflik menjadi terhambat, yang akan kembali meningkatkan harga pupuk di pasar global.

Potensi peningkatan permintaan dan harga urea di pasar global tersebut merupakan peluang bagi PUSRI, mengingat pada tahun mendatang diyakini pembangunan pabrik PUSRI IIIB akan selesai dan memasuki tahap operasional, sehingga Perusahaan akan dapat meningkatkan volume produksinya. Permintaan pupuk di dalam negeri juga diperkirakan akan meningkat, sebagai dampak positif dari pemberlakuan kebijakan pemotongan HET di akhir tahun 2025 lalu.

Pada saat bersamaan, Pemerintah Indonesia juga telah secara resmi mengubah skema penggantian subsidi, dari BPP + margin, menjadi marked to market. Dewan Komisaris memandang hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi PUSRI untuk meningkatkan kinerja operasional dan keuangan. Pemberlakuan skema penggantian baru membuat PUSRI harus mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi, yang akan sangat didukung oleh mulai beroperasinya pabrik baru.

VIEWS ON THE COMPANY'S BUSINESS PROSPECTS AS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners concurs with the views of the Board of Directors regarding their confidence and optimism toward PUSRI's business prospects in the coming year, despite the expectation that global and national economic conditions will continue to be affected by the prolonged and expanding geopolitical conflicts in the Middle East and Europe, as well as the persistently strong US dollar exchange rate. In addition, we believe that these conditions also have the potential to increase fertilizer demand in the global market, considering that the supply of raw materials and fertilizers from conflict areas has become constrained, which in turn may once again drive fertilizer prices higher in the global market.

The potential increase in demand and global urea prices represents an opportunity for PUSRI, considering that the construction of the PUSRI IIIB plant is expected to be completed and enter the operational stage in the coming year, thereby enabling the Company to increase its production volume. Domestic fertilizer demand is also expected to rise as a positive impact of the implementation of the reduction in the highest retail price (HET) policy at the end of 2025.

At the same time, the Government of Indonesia has officially changed the subsidy reimbursement scheme from Cost of Goods Sold (BPP) + margin to marked-to-market. The Board of Commissioners views this as both a challenge and an opportunity for PUSRI to improve its operational and financial performance. The implementation of the new reimbursement scheme requires PUSRI to improve production cost efficiency, which will be strongly supported by the commencement of operations of the new plant.



Dewan Komisaris optimis bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Direksi dan seluruh karyawan dalam meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan telah berada pada jalur yang tepat. Mempertimbangkan besarnya peluang pertumbuhan usaha dimasa mendatang tersebut, Dewan Komisaris mengamanatkan agar Direksi beserta seluruh jajaran karyawan dapat meningkatkan kinerjanya, mengeksekusi setiap inisiatif strategis yang telah digariskan dengan disiplin tinggi dan tepat, sehingga PUSRI akan dapat mewujudkan target pencapaian pertumbuhan usaha berkualitas dalam jangka panjang, meningkatkan nilai bagi pemegang saham maupun para pemangku kepentingan lainnya, selain mendukung suksesnya program kemandirian pangan di masa mendatang.

PENUTUP

Secara umum, kami bangga dengan pencapaian Perusahaan sepanjang tahun 2025. Oleh sebab itu, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada manajemen dan karyawan atas dedikasi dan loyalitasnya, mencurahkan tenaga dan pikiran demi peningkatan kinerja PUSRI selama ini. Apresiasi dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh mitra kerja PUSRI atas kontribusinya dalam membantu mewujudkan tujuan serta mendukung tercapainya berbagai target Perusahaan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya sehingga PUSRI dapat terus berkontribusi dalam industri pupuk nasional dengan memberi nilai tambah dan harapan baru baik untuk saat ini maupun di masa depan.

The Board of Commissioners remains optimistic that the various efforts undertaken by the Board of Directors and all employees in driving sustainable growth are on the right track. Considering the significant business growth opportunities in the future, the Board of Commissioners mandates the Board of Directors and all employees to further improve performance and execute every outlined strategic initiative with high discipline and precision, thereby enabling PUSRI to achieve its long-term quality business growth targets, enhance value for shareholders and other stakeholders, and support the success of the national food self-sufficiency program in the future.

CLOSING

Overall, we are proud of the Company's achievements throughout 2025. Therefore, we extend our highest appreciation to management and employees for their dedication and loyalty in devoting their efforts and thoughts toward improving PUSRI's performance. We also express our appreciation and gratitude to all PUSRI business partners for their contributions in helping realize the Company's objectives and supporting the achievement of various Company targets.

Our gratitude is also extended to shareholders and all stakeholders for their trust and support, enabling PUSRI to continue contributing to the national fertilizer industry by creating added value and new hope, both for the present and the future.

PALEMBANG, 31 MEI 2026

PALEMBANG, MAY 31, 2026

ATAS NAMA DEWAN KOMISARIS PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG,
On behalf of the Board of Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang,

Siti Nurizka Puteri Jaya

Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen
President Commissioner Concurrently Serving as Independent Commissioner

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Sholikin

Direktur Operasi dan Produksi
Operation and Production Director

Maryono

Direktur Utama
President Director



R. Eric J. Rachman
Direktur Keuangan dan Umum
Finance and General Director

Panji Winanteya Ruky
Direktur Manajemen Risiko
Risk Management Director



LAPORAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' REPORT

MARYONO

Direktur Utama
President Director



Kami merespons kebutuhan percepatan pencapaian kemandirian pangan nasional dengan menerapkan berbagai inisiatif strategis sesuai saran dan nasehat Dewan Komisaris yang dijalankan dengan penuh disiplin dan dedikasi oleh seluruh jajaran insan PUSRI untuk mengatasi kendala utama, yakni kondisi beberapa unit pabrik yang telah menua, sehingga Perusahaan mampu mencatatkan berbagai kinerja yang membesarkan hati. Selain berhasil mencapai beberapa target kinerja di tengah keterbatasan fasilitas produksi tersebut, kami berhasil mengawal pembangunan unit pabrik baru dengan baik, sehingga kemajuan penyelesaian tercapai lebih baik dari target sehingga diharapkan pembangunan unit baru dapat diselesaikan dan beroperasi sesuai target yang telah ditetapkan.

We responded to the need to accelerate the achievement of national food self-sufficiency by implementing various strategic initiatives in line with the recommendations and advice of the Board of Commissioners, which were carried out with full discipline and dedication by all PUSRI personnel to address the main challenge, namely the condition of several aging plant units. As a result, the Company was able to record various encouraging achievements. In addition to successfully achieving several performance targets amid the limitations of the production facilities, we also succeeded in overseeing the construction of the new plant unit effectively, with project progress exceeding the established target. Accordingly, the new plant unit is expected to be completed and commence operations in accordance with the predetermined schedule.

Penyelesaian unit baru merupakan puncak dari upaya revitalisasi fasilitas produksi yang telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir, yang diyakini akan memperkuat fondasi PUSRI dalam mendukung suksesnya program ketahanan pangan sekaligus mendukung pencapaian berbagai tujuan keberlanjutan memungkinkan diraihnya kinerja terbaik berkelanjutan dalam jangka panjang.

The completion of the new unit represents the culmination of efforts to revitalize production facilities that have been undertaken over the past several years, which is believed to strengthen PUSRI's foundation in supporting the success of the food security program while also contributing to the achievement of various sustainability objectives, thereby enabling the Company to attain sustainable best performance in the long term.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dear Shareholders and Stakeholders,

Tahun 2025 kembali berkembang menjadi tahun penuh gejolak, penuh tantangan dan ketidakpastian bagi perekonomian Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi industri pupuk. Namun demikian Direksi bersama seluruh jajaran menjalankan berbagai inovasi dan insiatif strategis yang dirancang dan dijalankan dengan disiplin tinggi serta penuh kehati-hatian sehingga berhasil mengatasi kendala yang ada serta mampu mencatatkan berbagai kinerja optimal di tengah kondisi yang penuh tantangan. Atas nama Direksi, perkenankan saya untuk menyampaikan ringkasan kinerja PUSRI untuk tahun buku 2025.

The year 2025 once again evolved into a year full of turbulence, challenges, and uncertainty for the Indonesian economy in general and for the fertilizer industry in particular. Nevertheless, the Board of Directors together with all employees implemented various innovations and strategic initiatives that were designed and executed with a high level of discipline and prudence, enabling the Company to overcome existing challenges and record optimal performance amid challenging conditions. On behalf of the Board of Directors, allow me to present a summary of PUSRI's performance for the 2025 financial year.

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya PUSRI dapat melalui tahun 2025 yang penuh tantangan dan ketidakpastian ini. Direksi bersama-sama jajaran karyawan telah melaksanakan amanah pengelolaan Perusahaan dengan menjalankan berbagai inisiatif strategis dan program kerja yang telah digariskan sebelumnya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran PUSRI yang telah ditetapkan.

Praise and gratitude be to Almighty God, for by His grace PUSRI was able to navigate the challenges and uncertainties throughout 2025. The Board of Directors together with all employees has carried out the mandate to manage the Company by implementing various strategic initiatives and work programs that had previously been outlined in an effort to achieve the established vision, mission, objectives, and targets of PUSRI.

KONDISI EKONOMI DAN INDUSTRI

Kondisi ekonomi global dan nasional

Kondisi perekonomian global di tahun 2025 berkembang menjadi bergejolak, penuh tantangan dan meningkatnya ketidakpastian akibat dua peristiwa utama, pertama, berkepanjangnya konflik di kawasan Eropa dan Timur Tengah, kedua, perselisihan tarif dagang antara Amerika Serikat dengan seluruh mitra dagangnya, termasuk Indonesia sejak awal kuartal ke II. Sejak akhir kuartal ke II, Amerika Serikat dengan seluruh negara mitra dagangnya kemudian terlibat perundingan intensif, yang membuat tekanan terhadap perekonomian global berkurang. Perkembangan ini membuat International Monetary Fund (IMF) melalui kajian *World Economic Outlook* (WEO) edisi Januari 2026, memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 adalah sebesar 3,3% (*year-on-year/yoy*), sama dengan tahun sebelumnya, namun diwarnai adanya disparitas pertumbuhan perekonomian di berbagai negara besar maupun wilayah ekonomi.

Sementara itu, tingkat inflasi global terus melanjutkan tren penurunan menjadi sebesar 4,1% dari 5,8% di 2024, membuat bank sentral berbagai negara besar memiliki ruang menurunkan suku bunga rujukan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara. European Central Bank menurunkan suku bunga acuannya sebanyak empat kali hingga Desember 2025 menjadi sekitar 2,15%, sedangkan The Fed menurunkan Fed Funds Rate (FFR) secara bertahap, hingga di kisaran 3,5%-3,75% pada Desember 2025 dari kisaran 4,25%-4,5%. Demikian juga dengan berbagai bank sentral negara-negara besar lainnya. Perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2025 tersebut membuat harga beberapa komoditas utama dunia pada umumnya menurun, namun harga gas alam, yang masih terpengaruh konflik Ukraina-Rusia, justru naik 9% menjadi US\$11,96 per MMBTU dari US\$10,96 per MMBTU pada 2024.

Di tengah gejolak perekonomian dunia tersebut, perekonomian nasional relatif berada dalam kondisi lebih baik dan menunjukkan daya tahan dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Di tahun 2025, ekonomi Indonesia, sesuai data BPS, mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,11% meningkat dari 5,03% di tahun sebelumnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni 53,88%, mampu tumbuh 4,98% yoy, menunjukkan daya beli masyarakat relatif terjaga. Adapun inflasi domestik, sekalipun meningkat ke level 2,92%, masih berada di kisaran target, yakni 2,5% $\pm$ 1%.

Kontributor utama pertumbuhan Indonesia pada tahun 2025 dari sisi konsumsi adalah permintaan domestik yang semakin kuat, terutama konsumsi rumah tangga, serta realisasi investasi yang stabil, terutama di sektor

¹ BPS

ECONOMIC AND INDUSTRY CONDITIONS

Global and National Economic Conditions

Global economic conditions in 2025 evolved into a period marked by turbulence, challenges, and heightened uncertainty due to two major events. First, the prolonged conflicts in Europe and the Middle East, and second, the trade tariff disputes between the United States and all of its trading partners, including Indonesia, beginning in the early second quarter. Since the end of the second quarter, the United States and its trading partner countries have engaged in intensive negotiations, which helped ease pressures on the global economy. This development led the International Monetary Fund, through its January 2026 edition of the *World Economic Outlook* (WEO), to project global economic growth for 2025 at 3.3% year-on-year (yoy), unchanged from the previous year, although accompanied by disparities in economic growth among major countries and economic regions.

Meanwhile, global inflation continued its downward trend to 4.1% from 5.8% in 2024, providing central banks in major economies with room to lower benchmark interest rates in order to stimulate economic growth in their respective countries. The European Central Bank reduced its benchmark interest rate four times through December 2025 to approximately 2.15%, while Federal Reserve System gradually lowered the Fed Funds Rate (FFR) to the range of 3.5%-3.75% in December 2025 from the previous range of 4.25%-4.5%. Similar measures were also implemented by the central banks of other major economies. The projected global economic growth in 2025 generally caused prices of several major global commodities to decline. However, natural gas prices, which remained affected by the Ukraine-Russia conflict, increased by 9% to US\$11.96 per MMBTU from US\$10.96 per MMBTU in 2024.

Amid the turbulence in the global economy, the national economy remained relatively better and demonstrated resilience compared to other countries in the region. In 2025, Indonesia's economy, based on data from Badan Pusat Statistik, recorded growth of 5.11%, increasing from 5.03% in the previous year. Household consumption expenditure, which contributed the largest share to Indonesia's GDP at 53.88%, grew by 4.98% yoy, indicating that public purchasing power remained relatively well maintained. Meanwhile, domestic inflation, although rising to 2.92%, remained within the target range of 2.5% $\pm$ 1%.

The main contributors to Indonesia's economic growth in 2025 from the expenditure side were stronger domestic demand, particularly household consumption, as well as stable investment realization, especially in



infrastruktur. Momentum ini diperkuat dengan kemajuan yang terus berlanjut pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengeluaran fiskal yang tetap kuat. Sementara dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan perekonomian Indonesia didorong terutama oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian dan konstruksi, yang masing-masing berkontribusi sebesar 19,20%, 13,24%, 11,56% dan 10,16% dari nilai PDB nasional di tahun 2025. Sedangkan indeks PMI manufaktur, Desember 2025 berada pada posisi 51,2, menunjukkan industri pengolahan Indonesia berada pada fase ekspansif. Sementara itu, neraca perdagangan juga terus mencatatkan surplus, dengan posisi per Desember 2025 adalah sebesar US\$31,05 miliar, naik US\$9,72 miliar dari 2024. Adapun posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2025 tercatat meningkat menjadi US\$156,5 miliar. Dalam rangka menjaga nilai tukar dan mempertahankan momentum pertumbuhan, Bank Indonesia menetapkan suku bunga rujukan BI Rate pada kisaran 4,75% di akhir Desember 2025 dari sebesar 6,00% di tahun sebelumnya.²

Kondisi Industri Pupuk Global dan Nasional

Merujuk pada data Fertecon dan World Bank *Commodity Price* – Januari 2026, harga produk urea dan amoniak internasional di tahun 2025 meningkat masing-masing sebesar 13,4% dan 24,9%. Harga amoniak terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga gas yang masih terpengaruh oleh konflik di kawasan Eropa, sedangkan harga urea dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, yakni naiknya harga gas, penurunan produksi global, gangguan pasokan dari kawasan timur tengah, larangan ekspor oleh Tiongkok sebagai produsen urea terbesar dan naiknya permintaan global.

Adapun permintaan pupuk urea global di tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran 180–200 juta ton, menunjukkan terjadinya peningkatan penyerapan produk di pasar dan mengindikasikan kurangnya kapasitas. Hal ini terefleksikan dari harga pupuk urea di pasar global sepanjang tahun 2025 yang selain berfluktuasi, juga cenderung meningkat di kisaran USD346,10–USD474,56 per metrik ton. Adapun kisaran harga urea global di tahun 2024 adalah USD333,50 – USD338,24 per metrik ton.

Industri pupuk nasional terbagi menjadi dua segmen utama, yaitu *Public Service Obligation* (PSO) atau pupuk bersubsidi dan non-PSO (komersial). Segmen PSO, Segmen PSO merupakan mekanisme intervensi pemerintah yang bertujuan menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani melalui pemberian subsidi harga pupuk, dimana PUSRI bersama BUMN pupuk lainnya yang bergabung dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan tugas untuk menyalurkan pupuk subsidi Urea dan NPK. Adapun total alokasi volume pupuk subsidi nasional di tahun 2025 adalah sejumlah 9,55 juta

² Bank Indonesia

the infrastructure sector. This momentum was further reinforced by the continued progress of National Strategic Projects (PSN) and sustained strong fiscal spending. From the business sector perspective, Indonesia's economic growth was mainly driven by the manufacturing, trade, agriculture, and construction sectors, which contributed 19.20%, 13.24%, 11.56%, and 10.16%, respectively, to national GDP in 2025. Meanwhile, the manufacturing PMI index stood at 51.2 in December 2025, indicating that Indonesia's manufacturing industry remained in an expansionary phase. In addition, the trade balance continued to record a surplus, reaching US\$31.05 billion as of December 2025, an increase of US\$9.72 billion from 2024. Meanwhile, Indonesia's foreign exchange reserves at the end of December 2025 increased to US\$156.5 billion. In order to maintain exchange rate stability and sustain growth momentum, Bank Indonesia set the BI Rate benchmark interest rate at around 4.75% at the end of December 2025, compared to 6.00% in the previous year.²

Global and National Fertilizer Industry Conditions

Referring to data from Fertecon and the World Bank *Commodity Price* report – January 2026 edition, international urea and ammonia prices in 2025 increased by 13.4% and 24.9%, respectively. Ammonia prices were primarily influenced by fluctuations in gas prices, which continued to be affected by the conflict in the European region, while urea prices were driven by several key factors, namely rising gas prices, declining global production, supply disruptions from the Middle East region, export restrictions imposed by China as the world's largest urea producer, and increasing global demand.

Global demand for urea fertilizer in 2025 was estimated to range between 180–200 million tons, indicating increased product absorption in the market and reflecting insufficient production capacity. This was reflected in global urea prices throughout 2025, which not only fluctuated but also tended to increase within the range of USD346.10–USD474.56 per metric ton. Meanwhile, the global urea price range in 2024 stood at USD333.50–USD338.24 per metric ton.

The national fertilizer industry is divided into two main segments, namely *Public Service Obligation* (PSO) or subsidized fertilizer, and non-PSO (commercial fertilizer). The PSO segment represents a government intervention mechanism aimed at ensuring fertilizer availability and affordability for farmers through fertilizer price subsidies. In this regard, PUSRI together with other state-owned fertilizer companies under PT Pupuk Indonesia (Persero) is tasked with distributing subsidized Urea and NPK fertilizers. The total national allocation volume for subsidized fertilizers in 2025 amounted to 9.55

ton. Kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2025 diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 mengenai tata kelola pupuk bersubsidi.

Terkait dengan pupuk bersubsidi ini, tahun 2025 juga ditandai dengan perubahan signifikan industri pupuk nasional, dimana setelah sekitar 20 tahun kebijakan penyediaan pupuk bersubsidi dijalankan, Pemerintah Indonesia secara resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi hingga 20 persen, berlaku mulai 22 Oktober 2025. Penurunan HET pupuk subsidi ini dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional. Pemberlakuan kebijakan ini membuat permintaan pupuk bersubsidi meningkat, termasuk pada area pemasaran pupuk subsidi PUSRI, membuat Perusahaan harus meningkatkan produksinya guna memenuhi lonjakan permintaan dari petani di area distribusinya.

Segmen non-PSO mencakup pasar pupuk komersial yang melayani kebutuhan sektor perkebunan, hortikultura, industri, serta ritel pertanian. Khusus untuk ritel, terdapat program “Makmur” dengan tujuan meningkatkan produktivitas pertanian dalam suatu wilayah. Struktur pasar ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara dukungan terhadap sektor pangan strategis dengan pengembangan pasar pupuk komersial yang lebih luas.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk nasional, Pupuk Indonesia Group selaku penyedia pupuk nasional terbesar berhasil menjaga ketersediaan pupuk dengan mengoptimalkan kapasitas produksinya. Jumlah kapasitas pabrik urea Pupuk Indonesia Group per tahun 2025 tercatat sebesar 9,36 juta ton atau 200% dari kebutuhan urea sektor pangan nasional. Untuk pupuk NPK, kapasitas Pabrik NPK adalah sebesar 4,6 juta ton atau 105% dari kebutuhan nasional, yaitu 4,4 juta ton.

KEBIJAKAN DAN INISIATIF STRATEGIS

Mempertimbangkan kondisi perekonomian, kondisi industri dan mengantisipasi peningkatan permintaan pupuk, Direksi, bersama seluruh pemangku kepentingan, berperan aktif merumuskan kebijakan dan inisiatif strategis untuk mengatasi seluruh kendala maupun tantangan yang ada agar tujuan akhir dari pengembangan industri pupuk, yakni meningkatnya kualitas pencapaian ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha terkait lainnya. Direksi beserta seluruh jajaran Perusahaan kemudian senantiasa berkoordinasi

million tons. The policy governing subsidized fertilizer distribution in 2025 was regulated under Minister of Agriculture Regulation No. 15 of 2025 concerning the Allocation and Highest Retail Price (HET) of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector, which constitutes the implementation of Presidential Regulation No. 6 of 2025 concerning the governance of subsidized fertilizers.

With regard to subsidized fertilizers, 2025 was also marked by a significant transformation in the national fertilizer industry. After approximately 20 years of implementing subsidized fertilizer policies, the Government of Indonesia officially reduced the highest retail price (HET) of subsidized fertilizers by up to 20%, effective from October 22, 2025. This reduction in subsidized fertilizer HET was implemented without increasing subsidy allocations from the State Budget (APBN), but rather through industry efficiency improvements and enhanced governance of the national fertilizer distribution system. The implementation of this policy led to increased demand for subsidized fertilizers, including within PUSRI's subsidized fertilizer marketing areas, requiring the Company to increase production in order to meet the surge in demand from farmers within its distribution areas.

The non-PSO segment comprises the commercial fertilizer market, which serves the needs of the plantation, horticulture, industrial, and agricultural retail sectors. Specifically for the retail sector, there is the “Makmur” program aimed at improving agricultural productivity within a particular region. This market structure reflects the Government's efforts to balance support for the strategic food sector with the development of a broader commercial fertilizer market.

In order to meet national fertilizer demand, the Pupuk Indonesia Group, as the largest national fertilizer provider, successfully maintained fertilizer availability by optimizing its production capacity. The total urea plant capacity of the Pupuk Indonesia Group in 2025 was recorded at 9.36 million tons, equivalent to 200% of the national food-sector urea demand. Meanwhile, NPK fertilizer plant capacity reached 4.6 million tons, or 105% of the national demand of 4.4 million tons.

STRATEGIC POLICIES AND INITIATIVES

Taking into consideration economic conditions, industry conditions, and anticipating increased fertilizer demand, the Board of Directors, together with all stakeholders, played an active role in formulating strategic policies and initiatives to address all existing constraints and challenges in order to achieve the ultimate objective of fertilizer industry development, namely enhancing the achievement of national food security and improving the welfare of farmers and other related business actors. The Board of Directors and all levels of the Company



agar seluruh inisiatif yang telah dirumuskan tersebut dapat terimplementasi dengan baik dan memberikan hasil yang optimal, meningkatkan kinerja PUSRI sekaligus mendukung keberhasilan program ketahanan pangan nasional.

Secara umum, PUSRI menjalankan inisiatif strategis 4C (*cost leadership, competitive to market, competency of employee* dan *clean industry & sustainability*) yang mencakup berbagai aspek terkait, sebagai berikut:

1. Melanjutkan dan mempercepat penyelesaian pembangunan pabrik PUSRI IIIB sebagai bagian tahapan revitalisasi pabrik P-III dan P-IV agar dapat menjawab tantangan permintaan pupuk dimasa mendatang.
2. Menerapkan *Operation & Maintenance Excellence* secara berkelanjutan dengan dukungan aplikasi digital terkini sebagai solusi jangka pendek sebelum PUSRI III B selesai dan operasional.
3. Melaksanakan program *cost reduction* berbasis risiko secara terstruktur dan terukur di seluruh lini bisnis Perusahaan
4. Melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip 7 Tepat (Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Penerima) melalui kolaborasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku koordinator.
5. Melakukan mitigasi atas kinerja Anak Perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja konsolidasi Perusahaan
6. Melaksanakan optimalisasi pendapatan lain-lain (utamanya Jasa Pemeliharaan Pabrik dan aset) guna menunjang pencapaian laba Perusahaan
7. Melanjutkan tahapan implementasi Transformasi SDM PI Group guna membangun budaya kerja *high performing* dan berdaya saing global.
8. Melaksanakan berbagai program dekarbonisasi dan inovasi sosial berkelanjutan guna mendukung target *Net-Zero Emission* Indonesia di tahun 2060 secara bertahap, mencakup antara lain: menginisiasi *technical study* penangkapan CO2 dari *Stack Reformer* (Proses Pembakaran) untuk diolah kembali menjadi pupuk, pemasaran produk Pusri *Diesel Exhaust Fluid* (DEF), pengembangan *community development* Bank Sampah di beberapa area pemasaran Perusahaan

Peran Direksi Dalam Perumusan Strategi

Direksi menetapkan target usaha, anggaran, strategi dan kebijakan strategis dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) mengacu pada gambaran umum kondisi eksternal dan internal terakhir. RKAP disusun secara detail dengan mempertimbangkan

continuously coordinated to ensure that all formulated initiatives could be properly implemented and deliver optimal results, thereby improving PUSRI's performance while supporting the success of the national food security program.

In general, PUSRI implemented the 4C strategic initiatives (*cost leadership, competitive to market, competency of employee, and clean industry & sustainability*), which encompass various related aspects, as follows:

1. Continuing and accelerating the completion of the PUSRI IIIB plant construction as part of the revitalization phase of the P-III and P-IV plants in order to address future fertilizer demand challenges.
2. Implementing sustainable *Operation & Maintenance Excellence* supported by the latest digital applications as a short-term solution prior to the completion and operation of PUSRI III B.
3. Implementing structured and measurable risk-based cost reduction programs across all Company business lines.
4. Carrying out the distribution of Subsidized Fertilizers in accordance with prevailing regulations and the "7 Rights" principle (Right Type, Right Quantity, Right Price, Right Place, Right Time, Right Quality, and Right Recipient) through collaboration with PT Pupuk Indonesia (Persero) as the coordinator.
5. Conducting mitigation measures related to Subsidiaries' performance in order to optimize the Company's consolidated performance.
6. Optimizing other income streams (primarily Plant Maintenance Services and assets) to support the achievement of the Company's profit targets.
7. Continuing the implementation phase of the PI Group Human Capital Transformation to build a high-performing and globally competitive work culture.
8. Implementing various decarbonization programs and sustainable social innovation initiatives to gradually support Indonesia's *Net-Zero Emission* target by 2060, including among others: initiating a technical study on CO2 capture from the Reformer Stack (Combustion Process) to be reprocessed into fertilizer, marketing Pusri Diesel Exhaust Fluid (DEF) products, and developing Waste Bank community development programs in several of the Company's marketing areas.

The Role of the Board of Directors in Strategy Formulation

The Board of Directors establishes business targets, budgets, strategies, and strategic policies in the form of the Company Work Plan and Budget (RKAP) based on the latest overview of external and internal conditions. The RKAP is prepared in detail by considering analyses of both

analisa faktor eksternal dan internal. Kondisi eksternal meliputi proyeksi pertumbuhan ekonomi, indikator makro ekonomi, kondisi sosial, proyeksi harga bahan baku utama serta kondisi pasar dan persaingan usaha. Sedangkan kondisi internal antara lain mencakup data kinerja historis, kesiapan sumber daya manusia, kapasitas produksi, dan data historis penjualan.

Kemudian Direksi melakukan pemaparan RKAP kepada Dewan Komisaris di dalam rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris guna mendapatkan pandangan, rekomendasi serta tanggapan dan saran Dewan Komisaris untuk kemudian disetujui oleh pemegang saham. Berdasarkan RKAP yang telah memperoleh tanggapan dari Dewan Komisaris dan persetujuan pemegang saham tersebut, Direksi dan tim manajemen akan memastikan terlaksananya rencana kerja yang dari masing-masing divisi yang ada di PUSRI sebagai turunan dari sasaran strategis yang bertujuan untuk memenuhi target usaha yang telah ditetapkan.

KINERJA PERUSAHAAN

Kinerja Operasional dan Keuangan

Mengacu pada target dan program yang telah ditetapkan dalam RKAP, PUSRI menjalankan berbagai inisiatif yang telah digariskan dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan tantangan terkini yang harus diatasi, menyesuaikan strategi dengan kondisi dan melakukan evaluasi pencapaian target tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah berikutnya. Secara keseluruhan, pada tahun 2025, Perusahaan mencatatkan kinerja positif ditengah kendala fasilitas produksi yang sebagian telah jauh menua, berbagai indikator menunjukkan kinerja cukup baik, walaupun pada beberapa aspek mencatatkan capaian di bawah target yang ditetapkan.

Realisasi produksi pupuk urea di tahun 2025 sebesar 1.780.349 ton, turun 4,17% dari produksi 1.857.832 ton di 2024. Adapun realisasi produksi pupuk NPK di tahun 2025 adalah sejumlah 373.919 ton, naik 2,9% dari 363.384 ton di tahun sebelumnya. Sehingga total produksi pupuk PUSRI di tahun 2025 adalah 2.154.268 ton, turun 3,01% dari 2.221.216 ton di tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi produksi amoniak PUSRI di tahun 2025 adalah sejumlah 1.211.032 ton, turun 5,7% dari 1.284.490 ton di 2024.

Adapun total volume penjualan pupuk PUSRI pada tahun 2025 adalah sejumlah 2.150.978 ton, terdiri dari 1.763.533 ton pupuk urea dan 387.445 ton pupuk NPK, turun 5,9% dari 2.284.994 ton di tahun 2024. Sementara penjualan amoniak pada tahun 2025 adalah sejumlah 105.277 ton, turun 18,9% dari 129.774 di tahun sebelumnya.

external and internal factors. External conditions include economic growth projections, macroeconomic indicators, social conditions, projections of major raw material prices, as well as market and business competition conditions. Meanwhile, internal conditions include, among others, historical performance data, human capital readiness, production capacity, and historical sales data.

Subsequently, the Board of Directors presents the RKAP to the Board of Commissioners during joint meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners in order to obtain the views, recommendations, responses, and suggestions of the Board of Commissioners before securing approval from the shareholders. Based on the RKAP that has received feedback from the Board of Commissioners and approval from the shareholders, the Board of Directors and management team will ensure the implementation of work plans across each division within PUSRI as a derivative of the strategic objectives aimed at achieving the established business targets.

COMPANY PERFORMANCE

Operational and Financial Performance

Referring to the targets and programs established in the RKAP, PUSRI implemented various initiatives that had been outlined while continuing to consider prevailing conditions and challenges that needed to be addressed, adjusting strategies to current conditions, and evaluating the achievement of these targets as a basis for determining subsequent actions. Overall, in 2025, the Company recorded positive performance amid constraints arising from production facilities, some of which have significantly aged. Various indicators demonstrated relatively good performance, although several aspects recorded achievements below the established targets.

Urea fertilizer production realization in 2025 amounted to 1,780,349 tons, decreasing by 4.17% from production of 1,857,832 tons in 2024. Meanwhile, NPK fertilizer production realization in 2025 amounted to 373,919 tons, increasing by 2.9% from 363,384 tons in the previous year. Accordingly, PUSRI's total fertilizer production in 2025 reached 2,154,268 tons, down 3.01% from 2,221,216 tons in the previous year. Meanwhile, PUSRI's ammonia production realization in 2025 amounted to 1,211,032 tons, decreasing by 5.7% from 1,284,490 tons in 2024.

Total fertilizer sales volume in 2025 amounted to 2,150,978 tons, consisting of 1,763,533 tons of urea fertilizer and 387,445 tons of NPK fertilizer, decreasing by 5.9% from 2,284,994 tons in 2024. Meanwhile, ammonia sales in 2025 amounted to 105,277 tons, decreasing by 18.9% from 129,774 tons in the previous year.



Sekalipun volume penjualan, baik pupuk maupun amoniak menurun, PUSRI mencatatkan total pendapatan tahun 2025 sebesar Rp13,87 triliun, meningkat 2,52% dari senilai Rp13,53 triliun di tahun sebelumnya berkat naiknya nilai penjualan pupuk subsidi dan produk lainnya. PUSRI berupaya mengendalikan beban pokok penjualan maupun beban operasional, namun demikian pada akhir tahun 2025 mencatatkan laba bersih tahun berjalan 2025 sebesar Rp613,53 miliar 42,58% dari senilai Rp1,06 triliun di tahun sebelumnya.

Keberhasilan mencatatkan laba tersebut membuat Ekuitas PUSRI pada tahun 2025 meningkat 3,41% menjadi sebesar Rp19,28 triliun dari Rp18,65 triliun di tahun sebelumnya. Total Liabilitas PUSRI naik 87,5% menjadi sebesar Rp12,91 triliun dari senilai Rp6,890 triliun. Sementara Total Aset pada tahun 2025 naik 26,09% menjadi sebesar Rp32,20 triliun dari senilai Rp25,54 triliun di tahun sebelumnya.

Pencapaian Target Operasional & Keuangan

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2025, kinerja Perusahaan tersebut menunjukkan hasil pengelolaan yang selaras dengan kondisi usaha 2025 yang penuh gejolak, tantangan dan ketidakpastian. Beberapa aspek melampaui target yang telah ditetapkan, namun sebagian menunjukkan pencapaian di bawah RKAP 2025, sebagaimana disampaikan pada tabel berikut.

Despite the decline in sales volumes for both fertilizer and ammonia, PUSRI recorded total revenue in 2025 of Rp13.87 trillion, an increase of 2.52% from Rp13.53 trillion in the previous year, driven by higher sales value of subsidized fertilizers and other products. PUSRI continued its efforts to control cost of goods sold and operating expenses. Nevertheless, at the end of 2025, the Company recorded net profit for the year of Rp613.53 billion, representing 42.58% of the Rp1.06 trillion recorded in the previous year.

The achievement of net profit resulted in PUSRI's Equity increasing by 3.41% in 2025 to Rp19.28 trillion from Rp18.65 trillion in the previous year. PUSRI's Total Liabilities increased by 87.5% to Rp12.91 trillion from Rp6.890 trillion. Meanwhile, Total Assets in 2025 increased by 26.09% to Rp32.20 trillion from Rp25.54 trillion in the previous year.

Achievement of Operational & Financial Targets

When compared to the targets established in the 2025 RKAP, the Company's performance reflected management results that were aligned with the highly volatile, challenging, and uncertain business conditions throughout 2025. Several aspects exceeded the established targets, while others recorded achievements below the 2025 RKAP, as presented in the following table.

Tabel Pencapaian Target RKAP 2025.

Table of 2025 RKAP Target Achievement

Uraian Description	Realisasi 2025 Realization 2025	Target 2025 Target 2025	Pencapaian (%) Achievement (%)
Tonase Produksi Pupuk Fertilizer Production Tonnage	2.154.268	2.350.000	91,67
Tonase Produksi Non Pupuk Non-Fertilizer Production Tonnage	1.211.032	1.310.000	92,45
Tonase Penjualan Pupuk Fertilizer Sales Tonnage	2.150.978	2.250.240	95,59
Tonase Penjualan Non Pupuk Non-Fertilizer Sales Tonnage	105.277	92.600	113,69
Nilai Penjualan Pupuk Fertilizer Sales Value	13.033.450	13.797.155	94,46
Nilai Penjualan Non Pupuk Non-Fertilizer Sales Value	840.872	887.642	94,73
Pendapatan Revenue	13.874.322	14.684.797	94,48
Laba Bersih Tahun Berjalan Profit for the Year	613.527	610.444	100,51
Aset Assets	32.198.389	31.638.816	101,77
Liabilitas Liabilities	12.914.281	12.424.613	103,94
Ekuitas Equity	19.284.108	19.214.203	100,36

KENDALA, TANTANGAN DAN SOLUSI YANG DITEMPUH PERUSAHAAN

PUSRI harus menghadapi berbagai kendala dan tantangan di tahun 2025, yang membuat beberapa target RKAP 2025 tidak dapat tercapai. Beberapa kendala dimaksud dan upaya yang dijalankan untuk mengatasinya, mencakup diantaranya:

1. Terdapat kendala pada pemenuhan bahan baku impor khusus untuk pembuatan pupuk NPK akibat berkepanjangannya konflik Ukraina – Rusia, keduanya merupakan negara penghasil bahan baku pupuk NPK utama dunia. Kendala ini diatasi dengan mencari pemasok bahan baku dari negara lain.
2. Terdapat gangguan operasional fasilitas produksi akibat usia fasilitas yang telah menua. Kendala ini diatasi dengan perbaikan antisipatif, revitalisasi, pembatasan operasional terkendali dan peremajaan peralatan kritis.
3. Terdapat kendala dalam menyalurkan pupuk urea subsidi akibat adanya perubahan metode penyaluran dan harga pupuk sesuai keputusan Menteri Pertanian sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang membuat Perusahaan harus mengatur ulang jalur distribusi. Kendala ini diatasi melalui peningkatan kemitraan dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), selain penggunaan proses digitalisasi sistem *i-pubers* untuk memastikan distribusi yang semakin transparan, efisien dan tepat sasaran.

Untuk memastikan pencapaian target-target kinerja penyaluran pupuk subsidi maupun target penjualan pupuk non subsidi, Pusri senantiasa menjalin kerja sama strategis dengan para *stakeholders*, seperti distributor, kios, pelanggan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, maupun lembaga pemerintah (Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Perdagangan). Salah satu bentuk kerja sama strategis tersebut ialah melalui Program Makmur (“Mari Kita Majukan Usaha Rakyat”) Agrosolution.

PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN TATA KELOLA

Perusahaan berkomitmen penuh untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola sesuai dengan perkembangan terkini yakni menerapkan 4 pilar praktik terbaik GCG: Etika, Transparansi, Akuntabilitas, Keberlanjutan (ETAK), serta 8 prinsip GCG sebagaimana disampaikan dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI). Selain itu, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata

CHALLENGES, CONSTRAINTS, AND SOLUTIONS IMPLEMENTED BY THE COMPANY

PUSRI faced various constraints and challenges throughout 2025, resulting in several 2025 RKAP targets not being achieved. Some of these constraints and the efforts undertaken to address them included the following:

1. Constraints in fulfilling imported raw materials specifically for NPK fertilizer production due to the prolonged Ukraine–Russia conflict, as both countries are among the world’s major producers of key NPK fertilizer raw materials. This challenge was addressed by seeking alternative raw material suppliers from other countries.
2. Operational disruptions in production facilities due to aging infrastructure. This challenge was addressed through preventive maintenance, revitalization, controlled operational restrictions, and rejuvenation of critical equipment.
3. Constraints in distributing subsidized urea fertilizer due to changes in distribution methods and fertilizer prices pursuant to the Minister of Agriculture’s decision as a follow-up to the issuance of Presidential Regulation No. 6 of 2025 concerning the Governance of Subsidized Fertilizers, which required the Company to reorganize its distribution channels. This challenge was addressed through strengthening partnerships with Farmers Group Associations (Gapoktan), in addition to implementing the digitalized *i-pubers* system to ensure increasingly transparent, efficient, and targeted distribution.

To ensure the achievement of subsidized fertilizer distribution performance targets as well as non-subsidized fertilizer sales targets, PUSRI continuously established strategic cooperation with stakeholders, including distributors, kiosks, customers both domestic and international, as well as government institutions (Ministry of Agriculture, Regional Governments, and Ministry of Trade). One form of such strategic collaboration was through the Makmur (“Mari Kita Majukan Usaha Rakyat”) Agrosolution Program.

IMPROVEMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION QUALITY

The Company remains fully committed to continuously improving the quality of its implementation of corporate governance principles in line with current developments by applying the four pillars of GCG best practices: Ethics, Transparency, Accountability, and Sustainability (ETAK), as well as the eight GCG principles as set forth in the Indonesian Corporate Governance Guidelines (Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia/PUG-KI). In



kelola, Perusahaan melakukan asesmen berkala terhadap kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG.

Untuk tahun 2025, PUSRI melakukan *asesmen* periodik tahunan merujuk pada kriteria *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). CGPI merupakan penilaian atas indeks persepsi penerapan tata kelola perusahaan dengan model penilaian yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG). PUSRI memperoleh predikat “*Indonesia Most Trusted Companies*” “sangat terpercaya” dengan skor 86,61. Asesmen GCG tahun buku 2024 yang dilaksanakan pada bulan September s.d. Desember tahun 2025 oleh BPKP Perwakilan Sumsel, skor yang diperoleh 92,397 dengan predikat “Sangat Baik”.

PENGELOLAAN RISIKO DAN INISIATIF KEBERLANJUTAN, SERTA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Merespons semakin menguatnya isi keberlanjutan pada pengelolaan perusahaan, terlebih pada perusahaan yang memberi dampak negatif terhadap lingkungan seperti emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dampak limbah maupun dampak terhadap sumber air, PUSRI telah menyiapkan penerapan praktik bisnis berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ESG di dalam setiap lini bisnis yang dijalankan. PUSRI meyakini penerapan ESG adalah menjalankan kegiatan operasional dengan mempertimbangkan dan memitigasi risiko lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan dan oleh karenanya telah mengadopsi dan memasukkan prinsip-prinsip serta agenda program keberlanjutan ke dalam strategi bisnis, termasuk pengelolaan risiko sosial.

PUSRI berfokus pada penerapan teknologi terkini yang mengedepankan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup; penerapan tata kelola Perusahaan yang baik; serta memberikan nilai tambah kepada stakeholders secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, hal ini tertuang dalam strategi Pusri “*clean industry & sustainability*” dan menjalankan berbagai inisiatif strategis, meliputi:

1. Meningkatkan unjuk kerja fasilitas produksi dalam memaksimalkan produksi urea, mengingat secara natural, pabrik pupuk urea mengonversi gas CO₂, salah satu komponen utama gas rumah kaca (GRK) menjadi produk pupuk yang berguna bagi tanaman.
2. Menginisiasi *technical study* penangkapan CO₂ dari Stack Reformer (Proses Pembakaran) untuk diolah kembali menjadi pupuk urea penyubur tanaman yang akan berkontribusi menyerap CO₂ di udara.

addition, as part of its efforts to improve governance quality, the Company conducts periodic assessments of the quality of GCG principles implementation.

In 2025, PUSRI conducted its annual periodic assessment based on the Corporate Governance Perception Index (CGPI) criteria. CGPI is an assessment of the corporate governance implementation perception index using an evaluation model developed and implemented by The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG). PUSRI received the “Indonesia Most Trusted Companies” award with the “Highly Trusted” designation and a score of 86.61. The GCG Assessment for the 2024 fiscal year, conducted from September to December 2025 by the South Sumatra Representative Office of BPKP, resulted in a score of 92.397 with a “Very Good” designation.

RISK MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY INITIATIVES, AS WELL AS SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

In response to the increasing emphasis on sustainability issues in corporate management, particularly for companies that generate negative environmental impacts such as Greenhouse Gas (GHG) emissions, waste impacts, and impacts on water resources, PUSRI has prepared the implementation of sustainable business practices aligned with ESG principles across all business lines. PUSRI believes that ESG implementation means conducting operational activities by considering and mitigating environmental, social, and corporate governance risks. Accordingly, the Company has adopted and incorporated sustainability principles and program agendas into its business strategy, including social risk management.

PUSRI focuses on the implementation of the latest technologies that prioritize occupational health, safety, and environmental aspects; the implementation of good corporate governance; and the creation of sustainable added value for stakeholders. In practice, this is embodied in PUSRI’s “clean industry & sustainability” strategy and implemented through various strategic initiatives, including:

1. Improving the performance of production facilities in maximizing urea production, considering that naturally, urea fertilizer plants convert CO₂ gas, one of the primary greenhouse gas (GHG) components, into fertilizer products beneficial for plants.
2. Initiating a technical study on CO₂ capture from the Reformer Stack (Combustion Process) to be reprocessed into urea fertilizer that enhances plant growth and contributes to absorbing CO₂ from the atmosphere.

3. Mengintensifkan program Dekarbonisasi melalui *Turn Around* pabrik, *Co-Firing* Biomassa pada STG Boiler Batubara, PLTS, interkoneksi Listrik PLN, kendaraan Listrik, dan Sejuta Pohon;
4. Program TJSL berbasis ESG, SDGs dan *circular economic*;
5. Pemenuhan aspek *Governance, Risk* dan *Compliance, zero fatality* dengan Sistem Manajemen terintegrasi.

Pusri menerapkan strategi keberlanjutan dengan melaksanakan berbagai program yang berlandaskan SDGs/TPB. Sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan harmoni antara pertumbuhan industri dan kesejahteraan masyarakat, PUSRI mengintegrasikan analisis risiko sosial ke dalam seluruh (100%) proses bisnis. Kami meyakini bahwa pengoptimalan dampak positif bagi masyarakat merupakan langkah fundamental dalam transformasi menuju penciptaan nilai bersama (*Creating Shared Value/CSV*). PUSRI kemudian menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan sebagai dokumen tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan, dimana Laporan Keberlanjutan tersebut memberikan gambaran tentang upaya yang dilakukan Perusahaan untuk dapat mencapai visi dan misinya, khususnya dalam mewujudkan agenda keberlanjutan.

Penilaian Komite di Bawah Direksi

Hingga akhir tahun 2025, PUSRI belum memiliki Komite di bawah Direksi dalam perangkat tata kelolanya. Untuk itu, penyajian informasi tersebut belum dapat disampaikan dalam Laporan Direksi, Laporan Tahunan Perusahaan 2025.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkelanjutan

PUSRI konsisten meningkatkan kapasitas, integritas, dan kapabilitas internal karyawan sebagai salah satu aset paling berharga Perusahaan. Pengembangan kompetensi PUSRI dijalankan dengan menerapkan Strategi 4 E, yaitu *Enrichment, Engagement, Empowerment*, dan *Exposure*. Implementasi metode pembelajaran 4E tersebut dapat berupa pelatihan/sertifikasi, proses mentoring /*coaching*, dan melalui mekanisme penugasan khusus, penugasan ke proyek-proyek, dan sebagainya.

PUSRI juga terus menyelaraskan program pengelolaan dan pengembangan kompetensi jajaran karyawannya dengan kebijakan Holding yang tertuang dalam *Human Capital Management Grand Strategy & Roadmap* Pupuk Indonesia Group tahun 2022–2027 dimana salah satunya adalah penggunaan *Single Platform* yang bertujuan untuk menyelaraskan proses-proses SDM antar perusahaan PI Group - PI SMART. PUSRI juga mendukung implementasi

3. Intensifying Decarbonization programs through plant *Turn Around* activities, Biomass *Co-Firing* in Coal Boilers STG, Solar Power Plants (PLTS), PLN electricity interconnection, electric vehicles, and the One Million Trees Program.
4. ESG-, SDGs-, and circular economy-based Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs.
5. Fulfillment of Governance, Risk, and Compliance aspects, as well as achieving zero fatality through an integrated Management System.

PUSRI implements its sustainability strategy by carrying out various programs based on the SDGs/Sustainable Development Goals. As part of its commitment to creating harmony between industrial growth and community welfare, PUSRI integrates social risk analysis into all (100%) business processes. We believe that optimizing positive impacts on society is a fundamental step in the transformation toward Creating Shared Value (CSV). PUSRI subsequently prepares and presents a Sustainability Report as an integral part of the Annual Report, in which the Sustainability Report provides an overview of the Company's efforts to achieve its vision and mission, particularly in realizing its sustainability agenda.

Assessment of Committees Under the Board of Directors

As of the end of 2025, PUSRI had not yet established Committees under the Board of Directors within its governance structure. Therefore, such information cannot yet be presented in the Board of Directors' Report in the Company's 2025 Annual Report.

Sustainable Human Capital Development

PUSRI consistently enhances the capacity, integrity, and internal capabilities of its employees as one of the Company's most valuable assets. PUSRI's competency development is implemented through the 4E Strategy, namely *Enrichment, Engagement, Empowerment*, and *Exposure*. The implementation of the 4E learning method may take the form of training/certification, mentoring/ *coaching* processes, as well as special assignments, project assignments, and other development mechanisms.

PUSRI also continues to align its employee competency management and development programs with the Holding Company's policy as outlined in the *Human Capital Management Grand Strategy & Roadmap* of the Pupuk Indonesia Group for 2022–2027, one of which is the use of a *Single Platform* aimed at harmonizing human capital processes among companies within the PI Group through PI SMART. PUSRI also supports the



program Holding untuk membentuk *competency based career movement* untuk meningkatkan mobilisasi pegawai PI Group melalui program *Talent Mobility* dimana program ini bertujuan untuk memaksimalkan kapabilitas *talent*, *exposure* dan pengalaman.

Sebagai wujud realisasi program pengembangan kompetensi, pada tahun 2025, PUSRI menyelenggarakan 6 jenis kelompok pelatihan dengan total 17,919 *mandays*, naik 10,1% dari 16.269 *mandays* di tahun 2024, didukung anggaran pengembangan SDM sebesar Rp24,27 miliar.

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI

Merujuk pada Pernyataan Keputusan Menteri BUMN, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri (YKKP) selaku Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pada tanggal 5 Agustus 2025 dan tertuang di dalam Akta No. 07 tanggal 22 Agustus 2025, pada tahun 2025, terjadi perubahan komposisi Direksi Perusahaan, sehubungan dengan pengunduran diri Sdr Daconi Khotob dari jabatannya sebagai Direktur Utama sejak tanggal 30 Juni 2025, dan berakhirnya masa tugas anggota Direksi lainnya, yakni Sdr Filius Yuliandi dan Sdr Saifullah Lasindrang.

Sesuai keputusan Para Pemegang Saham tersebut Perusahaan memutuskan mengangkat empat orang personalia Direksi Baru, yakni: Sdr Maryono sebagai Direktur Utama, Sdr Sholikin sebagai Direktur Operasi dan Produksi, Sdr R. Eric Juliana Rachman sebagai Direktur Keuangan dan Umum, kemudian Sdr Panji Winanteya Ruky sebagai Direktur Manajemen Risiko.

Sehingga susunan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pada tahun pelaporan Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Maryono: Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
2. Solikhin: Direktur Operasi & Produksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
3. R. Eric Juliana Rachman: Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
4. Panji Winanteya Ruky: Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

PROSPEK USAHA DAN PROYEKSI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2026

Perekonomian global pada 2026 masih dihadapkan dengan meningkatnya risiko dan ketidakpastian, akibat berkepanjangan dan meningkatnya cakupan konflik geopolitik di Timur Tengah maupun di Eropa, selain masih diwarnai perselisihan perdagangan dan tingginya

implementation of the Holding Company's program to establish competency-based career movement in order to enhance employee mobility within the PI Group through the Talent Mobility program, which aims to maximize talent capabilities, exposure, and experience.

As part of the realization of competency development programs, in 2025, PUSRI organized six categories of training programs totaling 17,919 *mandays*, an increase of 10.1% from 16,269 *mandays* in 2024, supported by a human capital development budget amounting to Rp24.27 billion.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Referring to the Statement of Resolution of the Minister of State-Owned Enterprises, the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero), and the Pusri Employees Welfare Foundation (YKKP) as the Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dated August 5, 2025, as set forth in Deed No. 07 dated August 22, 2025, changes occurred in the composition of the Company's Board of Directors in 2025. These changes were related to the resignation of Mr. Daconi Khotob from his position as President Director effective June 30, 2025, as well as the expiration of the terms of office of the other members of the Board of Directors, namely Mr. Filius Yuliandi and Mr. Saifullah Lasindrang.

Pursuant to the resolution of the EGMS, the Company decided to appoint four new members to the Board of Directors, namely: Mr. Maryono as President Director, Mr. Sholikin as Director of Operations and Production, Mr. R. Eric Juliana Rachman as Director of Finance and General Affairs, and Mr. Panji Winanteya Ruky as Director of Risk Management.

Accordingly, the composition of the Board of Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang as of the reporting period ended December 2025 was as follows:

1. Maryono: President Director of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
2. Sholikin: Director of Operations & Production of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
3. R. Eric Juliana Rachman: Director of Finance & General Affairs of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
4. Panji Winanteya Ruky: Director of Risk Management of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

BUSINESS PROSPECTS AND COMPANY PERFORMANCE PROJECTIONS FOR 2026

The global economy in 2026 is still expected to face increasing risks and uncertainties due to the prolonged and expanding geopolitical conflicts in the Middle East and Europe, in addition to ongoing trade disputes and the strong value of the US dollar. These various

nilai tukar dolar Amerika. Berbagai tantangan tersebut membuat semakin pentingnya upaya pengendalian inflasi, konsolidasi fiskal, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, serta komunikasi kebijakan guna memperkuat stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. IMF dalam *World Economic Outlook* - Januari 2026, memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global di 2026 akan mendatar di kisaran 3,3%, dengan tingkat inflasi global yang semakin terkendali di kisaran 3,8%.

Sementara itu, pertumbuhan perekonomian Indonesia diproyeksikan terus meningkat ke angka 5,4%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia. Inflasi diperkirakan terkendali stabil di kisaran $2,5\% \pm 1\%$. Dalam kondisi tersebut, pemerintah memiliki sasaran pembangunan berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 8% di 2029. Salah satu strategi yang dilakukan ialah mencakup peningkatan produktivitas sektor pertanian dan pengembangan industri hilirisasi berbasis sumber daya alam, dengan tantangan utama adalah produksi pangan yang terkendala perubahan iklim penyusutan area pertanian sehingga menimbulkan risiko penurunan produksi padi.

Adapun upaya yang dilakukan PUSRI dalam mendukung program ketahanan pangan ialah dengan meningkatkan efisiensi pabrik melalui program revitalisasi pabrik, sekaligus mempercepat penyelesaian pembangunan pabrik baru PUSRI IIIB dan mengembangkan pupuk spesifik tanaman untuk meningkatkan produksi pertanian. Beberapa jenis pupuk spesifik PUSRI yang telah memasuki tahap komersialisasi adalah: NPK pupuk singkong 17-6-25, NPK Kopi 18-8-18, mikro majemuk dan pupuk hayati. PUSRI juga tengah melakukan riset pupuk NPK tebu, NPK lada dan biostimulan.

challenges underscore the growing importance of inflation control efforts, fiscal consolidation, coordination between monetary and fiscal policies, as well as effective policy communication to strengthen macroeconomic stability and support economic growth. The International Monetary Fund, in its January 2026 edition of the *World Economic Outlook*, projected that global economic growth in 2026 would remain stable at around 3.3%, with global inflation becoming increasingly controlled at approximately 3.8%.

Meanwhile, Indonesia's economic growth is projected to continue increasing to 5.4%, higher than the global average. Inflation is expected to remain stable within the target range of $2.5\% \pm 1\%$. Under these conditions, the Government has established sustainable development targets with an economic growth target of 8% by 2029. One of the strategies undertaken includes increasing productivity in the agricultural sector and developing downstream industries based on natural resources, with the main challenge being food production constraints caused by climate change and the shrinking of agricultural land, which pose risks of declining rice production.

PUSRI's efforts to support the food security program include improving plant efficiency through plant revitalization programs, while simultaneously accelerating the completion of the new PUSRI IIIB plant construction and developing crop-specific fertilizers to enhance agricultural productivity. Several types of PUSRI's specialized fertilizers that have entered the commercialization stage include: NPK Cassava Fertilizer 17-6-25, NPK Coffee 18-8-18, compound micronutrients, and biofertilizers. PUSRI is also currently conducting research on NPK fertilizers for sugarcane and pepper, as well as biostimulants.



Mempertimbangkan proyeksi Pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 yang mencapai 5,4% dan kemudian secara bertahap diproyeksikan mencapai 8,0%, PUSRI optimis dan berkomitmen untuk berupaya keras meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. PUSRI telah menetapkan target yang realistis untuk peningkatan pendapatan dan laba bersih di tahun-tahun mendatang, didukung oleh berbagai inisiatif dan strategi yang direncanakan dengan matang, serta diselaraskan dengan target pencapaian ketahanan pangan dan proyeksi pertumbuhan perekonomian nasional.

APRESIASI

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, seluruh jajaran Direksi mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, serta mitra bisnis. Apresiasi mendalam khususnya juga ditujukan kepada Dewan Komisaris, komite-komite terkait, serta seluruh karyawan yang turut berkontribusi mendukung tumbuh kembang PUSRI. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah serta masyarakat luas, atas segala dukungan yang senantiasa mendorong kemajuan PUSRI. Berbekal dukungan penuh dari seluruh pihak, PUSRI berkomitmen untuk dapat terus menjadi Perusahaan kebanggaan Indonesia.

Considering the Government's projection for Indonesia's economic growth in 2026 at 5.4%, which is subsequently projected to gradually reach 8.0%, PUSRI remains optimistic and committed to striving for improved performance in the future. PUSRI has established realistic targets for increasing revenue and net profit in the coming years, supported by various well-planned initiatives and strategies aligned with food security achievement targets and projections of national economic growth.

APPRECIATION

With gratitude to Almighty God, the entire Board of Directors extends its deepest appreciation and gratitude to shareholders, stakeholders, and business partners. Special appreciation is also conveyed to the Board of Commissioners, related committees, and all employees who have contributed to supporting the growth and development of PUSRI. We also express our gratitude to the Government and the wider community for all the support that continuously drives PUSRI's progress. With the full support of all parties, PUSRI remains committed to continuing to be a company that Indonesia can be proud of.

PALEMBANG, 31 MEI 2026

PALEMBANG, MAY 31, 2026

ATAS NAMA DIREKSI PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG,
On behalf of the Board of Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang,

Maryono
Direktur Utama
President Director

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Statement by the Members of the Board of Commissioners concerning
Responsibility for the 2025 Annual Report of PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the undersigned, testify that all information in the 2025 Annual Report of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report of the Company.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made here in all truthfulness.

Palembang, 31 Mei 2026

Palembang, May 31, 2026

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Siti Nurizka Puteri Jaya

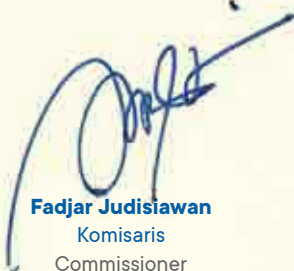
Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen

President Commissioner Concurrently Serving as Independent Commissioner



Sally Salamah

Komisaris
Commissioner



Fadjar Judisiawan

Komisaris
Commissioner



Arteria Dahlan

Komisaris
Commissioner



Muhammad Syakir

Komisaris
Commissioner



Teddy Gusnadi

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Mohamad Idris Laena

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Statement by the Members of the Board of Directors concerning
Responsibility for the 2025 Annual Report of PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the undersigned, testify that all information in the 2025 Annual Report of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report of the Company.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made here in all truthfulness.

Palembang, 31 Mei 2026
Palembang, May 31, 2026

Direksi
Board of Directors

Maryono
Direktur Utama
President Director

Sholikin
Direktur Operasi dan Produksi
Operation and Production Director

R. Eric J. Rachman
Direktur Keuangan dan Umum
Finance and General Director

Panji Winanteya Ruky
Direktur Manajemen Risiko
Risk Management Director





03

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

IDENTITAS PERUSAHAAN

CORPORATE IDENTITY



PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

Nama Perusahaan Company Name	Nama Brand Common Name
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	PUSRI
Tanggal Pendirian dan Beroperasi Komersial Date of Establishment and Commencement of Commercial Operations 12 November 2010 November 12, 2010	Jumlah Karyawan Number of Employees 1.783 Orang People

Informasi Perubahan Nama Information on Name Changes	Sejak berdiri, perusahaan belum pernah mengalami perubahan nama Since its establishment, the company has never undergone a name change.
Dasar Hukum Pembentukan Legal Basis of Establishment	Akta Nomor 14 tanggal 12 November 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 05 tanggal 4 Desember 2024 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta. Deed Number 14 dated November 12, 2010 concerning the Establishment of Limited Liability Company PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, as amended several times and most recently amended by Deed Number 05 dated December 4, 2024 concerning the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.
Status Badan Hukum Legal Status	Perusahaan Terbatas (PT) Limited Liability Company (PT)
Kepemilikan Saham Share Ownership	• 0,00002% Saham Seri A Dwiwarna (Negara Republik Indonesia) • 99,99974% Saham Seri B Dwiwarna (PT Pupuk Indonesia (Persero)) • 0,00024% Saham Seri B Dwiwarna (Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. PUSRI) • 0.00002% Series A Dwiwarna Shares (The Republic of Indonesia) • 99.99974% Series B Dwiwarna Shares (PT Pupuk Indonesia (Persero)) • 0.00024% Series B Dwiwarna Shares (PT PUSRI Employee Welfare Foundation)
Modal Dasar Authorized Capital	Rp15.000.000.000.000 (lima belas triliun rupiah), terbagi atas 15.000.000 (lima belas juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Rp15,000,000,000,000 (fifteen trillion rupiah), divided into 15,000,000 (fifteen million) shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah).
Modal Ditempatkan Issued Capital	Rp5.800.000.000.000 (lima triliun delapan ratus miliar rupiah) atau 5.800.000 (lima juta delapan ratus) lembar saham masing-masing senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah) Rp5,800,000,000,000 (five trillion eight hundred billion rupiah) or 5,800,000 (five million eight hundred thousand) shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah).



Jaringan Usaha dan Produksi Business and Production Network	Pupuk dan Amonia Fertilizer and Ammonia
Entitas Anak dan Asosiasi Subsidiaries and Associated Entities	Entitas Anak Subsidiaries: • PT Pusri Agro Lestari Entitas Asosiasi Associated Entities: • PT Pupuk Indonesia Logistik • PT Pupuk Indonesia Pangan • PT Pupuk Indonesia Utilitas • PT Puspेतindo
Kantor Pusat Head Office	Jl. Mayor Zen Palembang 30118, Indonesia Tel.: +62 711 712222/712111 Fax: +62 711 712100/712020 E-mail: info@pusri.co.id
Kantor Perwakilan Jakarta Jakarta Representative Office	Wisma 101 Jl. Letjen S Parman Kav 101 Grogol Petamburan, Jakarta Barat DKI Jakarta 11410, Indonesia
Kontak Perusahaan Company Contact	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Tel.: +62 711 712222; +62 21 712111 Fax: +62 711 712100; +62 21 712020 E-mail: sekper@pusri.co.id
Situs Web Website	www.pusri.co.id
Surat Elektronik E-mail	admindof@pusri.co.id
Layanan Pelanggan Customer Service	08001008001

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

BRIEF COMPANY HISTORY

Riwayat PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, selanjutnya disebut sebagai “PUSRI” atau “Perusahaan”, bermula dari pendirian Pabrik Urea pertama di Indonesia yang bernama PT Pupuk Sriwidjaja pada akhir tahun 1959 di Palembang, Sumatera Selatan. Entitas ini selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan PUSRI.

Pada kuartal akhir 2010 PUSRI didirikan, yang merupakan bagian dari mekanisme pemisahan tidak murni atau spin off. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang tetap disebut sebagai PUSRI, menjadi anak perusahaan dan beroperasi efektif sejak 1 Januari 2011 sedangkan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) menjadi perusahaan induk. Pendirian tersebut berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 12 November 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 05 tanggal 04 Desember 2024 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta.

Setelah aksi korporasi tersebut, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) kemudian secara resmi berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) yang disebut juga sebagai PTPI sejak tanggal 5 April 2012. Setelah diresmikan, PTPI mulai melakukan restrukturisasi dengan memisahkan aktiva dan pasiva Perusahaan. PTPI berkedudukan di Jakarta Barat Jl. Taman Anggrek-Kemanggisian Jaya, Jakarta Barat. dan membawahi 10 anak usaha yang kemudian dikenal sebagai Pupuk Indonesia Grup.

Sebagai langkah menunjang kinerja operasional jangka panjang, Perusahaan membangun Pabrik Pusri-IIB. Tiang pancang (*ground breaking*) pabrik diresmikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat itu dijabat oleh Dahlan Iskan. Pusri- IIB merupakan pabrik yang dibangun pertama kali atas nama PUSRI dan didesain ramah lingkungan serta hemat energi. Pabrik tersebut mulai berproduksi secara *commissioning* pada akhir tahun 2016.

Sebelum spin off, PUSRI mendapatkan tugas pelaksanaan dan penunjang dari kebijakan serta program pemerintah di bidang industri pupuk dan industri kimia lainnya untuk membantu perekonomian dan pembangunan nasional. PUSRI memiliki 1 (satu) unit pabrik berkapasitas 100 ribu ton urea per tahun. Sepanjang tahun 1972 hingga 1994, Perusahaan mengalami perkembangan pesat yang tercermin dari dibangunnya beberapa pabrik baru untuk meningkatkan kapasitas produksi hingga mencapai kapasitas terpasang 2,33 juta ton urea per tahun.

The history of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, hereinafter referred to as “PUSRI” or the “Company”, began with the establishment of the first Urea plant in Indonesia named PT Pupuk Sriwidjaja at the end of 1959 in Palembang, South Sumatra. This entity later became widely known as PUSRI.

In the final quarter of 2010, PUSRI was established as part of an impure separation mechanism or spin-off. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, which continued to be referred to as PUSRI, became a subsidiary and began effective operations on January 1, 2011, while PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) became the parent company. The establishment was based on Deed Number 14 dated November 12, 2010 concerning the Establishment of Limited Liability Company PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, as amended several times and most recently amended by Deed Number 05 dated December 04, 2024 concerning the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.

Following this corporate action, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) officially changed its name to PT Pupuk Indonesia (Persero), also referred to as PTPI, on April 5, 2012. After the inauguration, PTPI began restructuring by separating the Company’s assets and liabilities. PTPI is domiciled in West Jakarta at Jl. Taman Anggrek-Kemanggisian Jaya, West Jakarta, and oversees 10 subsidiaries that later became known as the Pupuk Indonesia Group.

As a step to support long-term operational performance, the Company built the Pusri-IIB Plant. The ground breaking ceremony of the plant was inaugurated by the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) at the time, Dahlan Iskan. Pusri-IIB was the first plant built under the name of PUSRI and was designed to be environmentally friendly and energy efficient. The plant began commissioning production at the end of 2016.

Before the spin-off, PUSRI was assigned to implement and support government policies and programs in the fertilizer industry and other chemical industries to support the national economy and development. PUSRI had 1 (one) plant unit with a capacity of 100 thousand tons of urea per year. From 1972 to 1994, the Company experienced rapid development reflected in the construction of several new plants to increase production capacity to a total installed capacity of 2.33 million tons of urea per year.



Tidak hanya melakukan pengembangan dari sisi produksi, Perusahaan juga mengubah orientasi dari produksi ke pasar. Hal ini dilakukan sebagai respons dari persaingan industri pupuk mulai ketat, yang ditandai dengan pembangunan pabrik-pabrik baru dan munculnya sejumlah pabrik pupuk lain di Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, PUSRI mulai membangun jaringan distribusi dan pemasaran serta sarana dan prasarana pendukungnya hingga menjangkau segenap pelosok Nusantara. Terlebih, sejak tahun 1979, PUSRI mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mendistribusikan dan memasarkan pupuk bersubsidi ke seluruh wilayah Indonesia yang didukung dengan pembebasan tata niaga pupuk. Kemudian, pada tahun 2003, pemerintah membentuk rayonisasi wilayah pemasaran dan distribusi pupuk bersubsidi.

Setelah dilakukan spin-off pada tahun 2011, PUSRI bertanggung jawab menangani produksi, distribusi, dan pemasaran pupuk dengan wilayah pemasaran Sumatera bagian Selatan, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, dan DKI Jakarta. Pada tahun 2025 wilayah distribusi dan pemasaran pupuk urea subsidi PUSRI adalah Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali, sedangkan wilayah distribusi dan pemasaran NPK subsidi PUSRI adalah Sumatera Selatan dan sebagian Lampung.

Sebagai pelopor perusahaan pupuk di Tanah Air, PUSRI menjadi pemasok tenaga-tenaga ahli perpupukan yang andal bagi perusahaan-perusahaan pupuk lain di Indonesia. PUSRI juga terus melakukan pembinaan sumber daya manusia agar dapat menangani pemeliharaan dan perbaikan pabrik pupuk secara mandiri. Pembinaan juga dilakukan sejalan dengan proses regenerasi sumber daya manusia sehingga PUSRI dapat melakukan alih teknologi secara berkesinambungan.

Sejalan dengan pertumbuhan industri pupuk, PUSRI mengembangkan kegiatan usaha dan produksinya agar bernilai tambah tinggi dengan memanfaatkan teknologi. Salah teknologi yang dimanfaatkan ialah teknologi proses produksi urea ACES 21 yang dikenal efisien dan hemat energi. Teknologi ini merupakan hasil riset dan pengembangan PUSRI bekerja sama dengan Toyo Engineering Corporation (TEC) dari Jepang.

Dengan diadopsinya ACES 21 yang merupakan sebuah inovasi dengan visi jauh ke depan, menjadikan PUSRI sebagai produsen pupuk yang memiliki *technical know-how* dalam pengelolaan dan pemeliharaan pabrik secara efisien. Kombinasi keunggulan di bidang produksi, distribusi, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi menjadikan PUSRI sebagai perusahaan pupuk terkemuka yang diperhitungkan di industri pupuk nasional.

In addition to expanding production, the Company also shifted its orientation from production to the market. This shift was carried out in response to increasingly intense competition in the fertilizer industry, marked by the construction of new plants and the emergence of several other fertilizer manufacturers in Indonesia. Based on these conditions, PUSRI began building distribution and marketing networks as well as supporting facilities and infrastructure reaching all corners of the archipelago. Moreover, since 1979, PUSRI has been assigned by the government to distribute and market subsidized fertilizers throughout Indonesia, supported by the deregulation of fertilizer trade. Subsequently, in 2003, the government established regionalization of marketing and distribution areas for subsidized fertilizers.

After the spin-off in 2011, PUSRI became responsible for handling fertilizer production, distribution, and marketing with marketing areas covering Southern Sumatra, Central Java, the Special Region of Yogyakarta, Banten, and DKI Jakarta. In 2025, the distribution and marketing areas of subsidized urea fertilizer for PUSRI included South Sumatra, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung Islands, Lampung, Central Java, part of East Java, DI Yogyakarta, and Bali. Meanwhile, the distribution and marketing areas for subsidized NPK fertilizer included South Sumatra and part of Lampung.

As a pioneer fertilizer company in Indonesia, PUSRI has become a supplier of reliable fertilizer experts for other fertilizer companies in Indonesia. PUSRI also continuously develops Human Capital so they can independently handle the maintenance and repair of fertilizer plants. This development is carried out alongside the regeneration process of Human Capital so that PUSRI can continuously transfer technology.

In line with the growth of the fertilizer industry, PUSRI has expanded its business and production activities to generate higher added value by utilizing technology. One of the technologies utilized is the ACES 21 urea production process technology, known for its efficiency and energy-saving capabilities. This technology is the result of research and development conducted by PUSRI in collaboration with Toyo Engineering Corporation (TEC) of Japan.

By adopting ACES 21, an innovation with a long-term vision, PUSRI has become a fertilizer producer with technical know-how in managing and maintaining plants efficiently. The combination of advantages in production, distribution, marketing, Human Capital, and technology has positioned PUSRI as a leading fertilizer company recognized within the national fertilizer industry.

JEJAK LANGKAH

MILESTONES

1959

PT Pupuk Sriwidjaja didirikan tanggal 24 Desember 1959
PT Pupuk Sriwidjaja was established on December 24, 1959

1961

14 Agustus 1961, Pembangunan pabrik Pusri-I
August 14, 1961, Construction of the Pusri-I plant

1963

Pusri-I mulai beroperasi dengan kapasitas terpasang sebesar 100.000 ton per tahun
Pusri-I began operations with an installed capacity of 100,000 tons per year

1964

4 Juli 1964, pabrik Pusri-I diresmikan oleh Presiden Soekarno
July 4, 1964, the Pusri-I plant was inaugurated by President Soekarno

1974

8 Agustus 1974, Pabrik Pusri- II diresmikan oleh Presiden Soeharto, kapasitas 380.000 ton
August 8, 1974, the Pusri-II plant was inaugurated by President Soeharto, capacity of 380,000 tons

1976

29 Desember 1976, Pabrik Pusri-III diresmikan Presiden Soeharto, kapasitas 570.000 ton
December 29, 1976, the Pusri-III plant was inaugurated by President Soeharto, capacity of 570,000 tons

1998

- Pemberlakuan Insentif Gas Domestik (Subsidi Harga Gas) Pembatasan lingkup penyaluran produsen hingga Lini II, Lini III-IV peran distributor
- 1 Desember 1998, Penghapusan subsidi pupuk
- Implementation of Domestic Gas Incentives (Gas Price Subsidy), limitation of producers' distribution scope up to Line II, Lines III-IV assigned to distributors
- December 1, 1998, elimination of fertilizer subsidies

1997

Pemerintah menetapkan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) sebagai induk perusahaan (Holding Company)
The Government designated PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) as the holding company (Holding Company)

1994

22 Desember 1994, Pabrik Pusri-IB diresmikan Presiden Soeharto, kapasitas 570.000 ton, PUSRI I dihentikan operasinya
December 22, 1994, the Pusri-IB plant was inaugurated by President Soeharto, capacity of 570,000 tons, and Pusri-I operations were discontinued

1979

Penetapan PUSRI sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran seluruh jenis pupuk
Designation of PUSRI as the company responsible for the procurement and distribution of all types of fertilizer

1977

26 November, Pabrik Pusri-IV diresmikan Presiden Soeharto, kapasitas 570.000 ton
November 26, the Pusri-IV plant was inaugurated by President Soeharto, capacity of 570,000 tons



2003

Rayonisasi Pupuk
Fertilizer regionalization

2006

Perubahan pola subsidi harga gas
menjadi subsidi harga jual ke petani
Change in subsidy scheme from gas price subsidy
to fertilizer selling price subsidy to farmers

2011

1 Januari, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mulai beroperasi
January 1, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang began operations

2013

Ground breaking Pabrik Pusri-IIB
Ground breaking of the Pusri-IIB plant

2016

- 28 Januari 2016, Pabrik NPK Fusion I beroperasi, kapasitas 100.000 ton
- Pengoperasian Pabrik Pusri- IIB sebagai hasil revitalisasi Pusri-II
- January 28, 2016, the NPK Fusion I plant began operations, capacity of 100,000 tons
- Operation of the Pusri-IIB plant as part of the revitalization of Pusri-II

2018

Ground breaking Pabrik NPK
Fusion II (2x100.000 ton)
Ground breaking of the NPK
Fusion II plant (2x100,000 tons)

2019

Performance Test Pabrik
PUSRI NPK Fusion II
Performance Test of the
PUSRI NPK Fusion II plant

2020

28 Februari 2020, Pabrik PUSRI NPK
Fusion II mulai beroperasi
February 28, 2020, the PUSRI NPK
Fusion II plant began operations

2025

- Peresmian *Renewable Energy Charging Station (RECS)* sebagai bagian dari program "*Green Energy for Sustainability*".
- Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pusri III-B
- Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBT) Antara Pusri dan PT PLN, mengantisipasi peningkatan kebutuhan daya dari 13,8 MVA menjadi hingga 20 MVA
- Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama Antara Manajemen Pusri dan Serikat Pekerja Pusri
- Inauguration of the Renewable Energy Charging Station (RECS) as part of the "Green Energy for Sustainability" program.
- Implementation of the Pusri III-B Development Project
- Signing of a Memorandum of Understanding (MoU) and Power Purchase Agreement (PJBT) between Pusri and PT PLN, anticipating an increase in power demand from 13.8 MVA to 20 MVA.
- Signing of a Collective Labor Agreement between Pusri Management and the Pusri Workers Union.

2024

- Pelaksanaan Proyek Pembangunan PUSRI III-B
- Pemerintah Indonesia menjadi salah satu Pemegang Saham PUSRI melalui kepemilikan 1 saham seri A Dwiwarna
- Implementation of the PUSRI III-B Development Project
- The Government of Indonesia became one of the shareholders of PUSRI through ownership of 1 Series A Dwiwarna share

2023

Ground Breaking Pabrik Pusri-III B
Ground Breaking of the Pusri-III B plant

2022

Persiapan Proyek Pembangunan PUSRI III-B
Preparation of the PUSRI III-B Development Project

2021

Persiapan Proyek Pembangunan PUSRI III-B
Preparation of the PUSRI III-B Development Project

VISI, MISI, DAN TATA NILAI PERUSAHAAN

VISION, MISSION, AND CORPORATE VALUES

VISI I VISION

**Menjadi Produsen
Agrokimia Unggul di Asia
To Become a Leading
Agrochemical Producer in Asia**

MISI I Mission

1. Menyediakan produk dan layanan yang berkualitas prima, inovatif dan efisien sesuai kebutuhan pelanggan.	1. Provide high-quality, innovative, and efficient products and services in accordance with customer needs.
2. Menjalankan bisnis dengan menerapkan teknologi terkini yang mengedepankan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup.	2. Conduct business by implementing the latest technology that prioritizes occupational safety, health, and environmental sustainability.
3. Menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik, manajemen risiko dan compliance.	3. Implement good Corporate Governance, risk management, and compliance.
4. Meningkatkan Keunggulan kompetensi SDM melalui nilai budaya AKHLAK.	4. Enhance the excellence of Human Capital competencies through AKHLAK cultural values.
5. Memberikan nilai tambah kepada stakeholders secara berkelanjutan.	5. Provide sustainable added value to stakeholders.



Visi dan Misi telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor:SK/DIR/454/2024 tanggal 03 Oktober 2024 tentang Visi, Misi, *Core Values*, dan Kompetensi Inti PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang merupakan perubahan Visi dan Misi sebelumnya sesuai Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/391/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Visi, Misi, *Core Values*, dan Kompetensi Inti PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

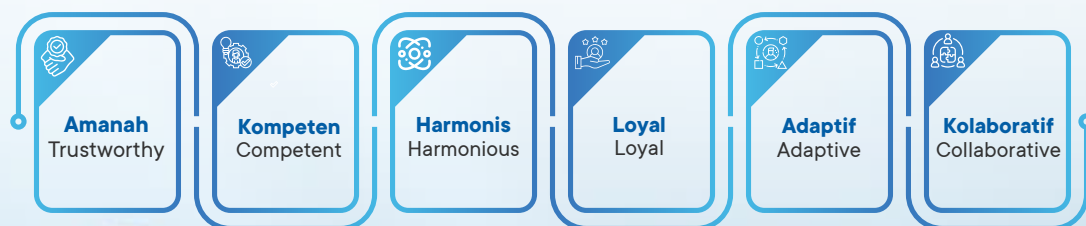
The Vision and Mission were established through the Board of Directors Decree Number: SK/DIR/454/2024 dated October 03, 2024 concerning the Vision, Mission, Core Values, and Core Competencies of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, which constitutes a revision of the previous Vision and Mission in accordance with the Board of Directors Decree No. SK/DIR/391/2020 dated November 30, 2020 regarding the Vision, Mission, Core Values, and Core Competencies of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

NILAI UTAMA PERUSAHAAN

Mengacu pada Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 setiap BUMN wajib menerapkan nilai-nilai utama (*core values*) SDM BUMN AKHLAK menjadi Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) yang dijadikan dasar pembentukan karakter SDM. Sebagai bagian dari BUMN, PUSRI juga menerapkan AKHLAK sebagai nilai Perusahaan. Berikut adalah uraian dari AKHLAK.

CORE CORPORATE VALUES

Referring to the Circular Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SE-7/MBU/07/2020, every state-owned enterprise (BUMN) is required to implement the core values of BUMN Human Capital, namely AKHLAK, as the Corporate Culture, which serves as the foundation for shaping the character of Human Capital. As part of a BUMN, PUSRI also adopts AKHLAK as its corporate values. The following is an explanation of AKHLAK.



NILAI UTAMA PERUSAHAAN

Mengacu pada Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 setiap BUMN wajib menerapkan nilai-nilai utama (*core values*) SDM BUMN AKHLAK menjadi Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) yang dijadikan dasar pembentukan karakter SDM. PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai salah satu BUMN, yang merupakan entitas Induk PUSRI, telah menerbitkan Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) No.08/A/KK/S22/SE/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Implementasi Nilai-nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menjadi Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*).

Direksi telah menerbitkan Surat Keputusan No.SK/DIR/391/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Visi, Misi, Core Values, dan Kompetensi Inti PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang kemudian diperbaharui melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/DIR/454/2024 tanggal 03 Oktober 2024 tentang Visi, Misi, Core Values, dan Kompetensi Inti PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Berikut adalah uraian dari AKHLAK.

CORE CORPORATE VALUES

Referring to the Circular Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SE-7/MBU/07/2020, every state-owned enterprise (BUMN) is required to implement the core values of BUMN Human Capital, namely AKHLAK, as the Corporate Culture, which serves as the foundation for shaping the character of Human Capital. PT Pupuk Indonesia (Persero), as one of the state-owned enterprises and the parent entity of PUSRI, has issued Circular Letter No. 08/A/KK/S22/SE/2020 dated August 4, 2020 concerning the Implementation of the Core Values of Human Capital of State-Owned Enterprises as Corporate Culture.

The Board of Directors has issued Decree No. SK/DIR/391/2020 dated November 30, 2020 concerning the Vision, Mission, Core Values, and Core Competencies of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, which was later updated through Board of Directors Decree Number: SK/DIR/454/2024 dated October 03, 2024 concerning the Vision, Mission, Core Values, and Core Competencies of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. The following is an explanation of AKHLAK.

A

AMANAH

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Panduan Perilaku:

1. Memenuhi janji dan komitmen;
2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan;
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

Trustworthy

Upholding the trust that has been given

Behavioral Guidelines:

1. Fulfill promises and commitments.
2. Be responsible for tasks, decisions, and actions taken
3. Adhere firmly to moral and ethical values.

K

KOMPETEN

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Panduan Perilaku:

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2. Membantu orang lain belajar;
3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

Competent

Continuously learn and develop capabilities

Behavioral Guidelines:

1. Improve personal competencies to respond to constantly changing challenges.
2. Help others learn.
3. Complete tasks with the best quality.

H

HARMONIS

Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Panduan Perilaku:

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
2. Suka menolong orang lain;
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Harmonious

Care for one another and respect differences

Behavioral Guidelines:

1. Respect everyone regardless of their background.
2. Be willing to help others.
3. Build a conducive work environment.

L

LOYAL

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

Panduan Perilaku:

1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara;
2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;
3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

Loyal

Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State

Behavioral Guidelines:

1. Maintain the good reputation of fellow employees, leaders, BUMN, and the State.
2. Be willing to make sacrifices to achieve greater goals.
3. Comply with leadership as long as it does not conflict with laws and ethics.

A

ADAPTIF

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

Panduan Perilaku:

1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik;
2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi;
3. Bertindak proaktif.

Adaptive

Continuously innovate and be enthusiastic in driving or facing change.

Behavioral Guidelines:

1. Quickly adapt to become better.
2. Continuously make improvements in line with technological developments.
3. Act proactively.

K

KOLABORATIF

Membangun Kerjasama yang sinergis.

Panduan Perilaku:

1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Collaborative

Build synergistic cooperation

Behavioral Guidelines:

1. Provide opportunities for various parties to contribute
2. Be open to collaboration to create added value.
3. Mobilize the utilization of various resources for shared objectives.



BRAND/LOGO PERUSAHAAN

CORPORATE BRAND/LOGO



PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG



Lambang Pusri yang berbentuk huruf U melambangkan singkatan "Urea".
Lambang ini telah terdaftar sebagai merk Dagang (Paten) dengan nomor. 98659.
Pusri's logo, shaped like the letter U, symbolizes the abbreviation for "Urea".
This logo has been registered as a Trademark (Patent) with the number 98659.



Setangkai padi dengan jumlah butiran 24, melambangkan tanggal akta pendirian PT Pusri.
A stalk of rice with 24 grains, symbolizing the date of PT Pusri's deed of establishment.



Butiran-butiran urea berwarna putih sejumlah 12, melambangkan bulan Desember pendirian PT Pusri.
12 white urea grains, symbolizing December as the month of PT Pusri's establishment.



Setangkai kapas yang mekar dari kelopaknya. Butir kapas yang mekar berjumlah 5 buah Kelopak yang pecah berbentuk 9 retakan ini, melambangkan angka 59 sebagai tahun pendirian PT Pusri (1959).
A cotton branch blooming from its petals. There are 5 blooming cottons. The petals are split into 9 cracks, symbolizing the number 59 as the year of the PT Pusri's establishment (1959).



Perahu Kajang merupakan ciri khas kota Palembang yang terletak di tepian Sungai Musi.
The Kajang Boat is a distinctive feature of Palembang city, located on the banks of the Musi River.



Kuncup teratai yang akan mekar, merupakan imajinasi pencipta akan prospek perusahaan di masa datang.
A lotus bud that is about to bloom, represents the creator's imagination of the company's prospects in the future.



Komposisi warna lambang kuning dan biru benhur dengan dibatasi garis-garis hitam tipis (untuk lebih menjelaskan gambar) yang melambangkan keagungan, kebebasan cita-cita, serta kesuburan, ketenangan, dan ketabahan dalam mengejar dan mewujudkan cita-cita itu.
The color composition of the emblem, with yellow and benhur blue surrounded by thin black lines (to clarify the image), symbolizes grandeur, freedom of ideals, as well as fertility, tranquility, and resilience in pursuing and realizing those dreams.

KEGIATAN USAHA

BUSINESS ACTIVITIES



Mengacu pada pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Kegiatan usaha Perusahaan adalah:

1. Industri Pupuk (KBLI 20121, 20122, 20123, 20124, 20125, 20126, 20127, 20129, 20112, 20114, 20115, 20111, 20117, 20118, 20213, 20214)

Mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan-bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan pupuk, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan bahan kimia lainnya, serta mengolah bahan pokok tersebut menjadi berbagai jenis pupuk dan hasil kimia lainnya beserta produk-produk turunannya.

2. Perdagangan (KBLI 46651, 46652, 47763, 47773, 47919, 47222, 46699, 46599, 46900, 46591)

Menyelenggarakan kegiatan distribusi dan perdagangan, baik di dalam maupun di luar negeri yang berhubungan dengan produk-produk tersebut di atas dan produk-produk lainnya yang berhubungan dengan perpupukan, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan bahan kimia lainnya, serta kegiatan impor barang-barang yang antara lain berupa bahan baku, bahan penolong/pembantu, peralatan produksi dan bahan kimia lainnya.

Referring to Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's business activities are as follows:

1. Fertilizer Industry (KBLI 20121, 20122, 20123, 20124, 20125, 20126, 20127, 20129, 20112, 20114, 20115, 20111, 20117, 20118, 20213, 20214)

Processing certain raw materials into essential materials required for the production of fertilizers, petrochemicals, agrochemicals, agroindustry products, and other chemicals, as well as processing these materials into various types of fertilizers and other chemical products along with their derivative products.

2. Trading (KBLI 46651, 46652, 47763, 47773, 47919, 47222, 46699, 46599, 46900, 46591)

Conducting distribution and trading activities, both domestically and internationally, related to the products mentioned above and other products associated with fertilizers, petrochemicals, agrochemicals, agroindustry, and other chemicals, as well as importing goods such as raw materials, auxiliary materials/supporting materials, production equipment, and other chemicals.



3. Jasa (KBLI 01611, 01612, 01614, 01619)

Melaksanakan studi penelitian, pendidikan, pengembangan, desain *engineering*, pengantongan (*bagging station*), konstruksi manajemen, pengoperasian pabrik, perbaikan, reparasi, pemeliharaan, konsultasi (kecuali konsultasi bidang hukum) dan jasa teknik lainnya dalam sektor industri pupuk, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan bahan kimia lainnya serta jasa dalam bidang pertanian dan perkebunan.

4. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis (KBLI 71101, 71102, 71203, 71202, 71204, 71205, 71209, 741, 74909, 78421)

Melaksanakan kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (*agronomist*), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa dilibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publisher, produser dan lain-lain.

5. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (KBLI 78200, 77391, 68111, 55120, 93231, 82302, 73100, 68112)

Melakukan kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.

6. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (KBLI 72105)

Melakukan usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu pertanian, peternakan, dan kehutanan.

3. Services (KBLI 01611, 01612, 01614, 01619)

Carrying out research studies, education, development, engineering design, bagging station operations, construction management, plant operation, repair, maintenance, consulting services (excluding legal consulting), and other technical services in the fertilizer, petrochemical, agrochemical, agroindustry, and chemical sectors, as well as services in the agriculture and plantation sectors.

4. Professional, scientific, and technical activities (KBLI 71101, 71102, 71203, 71202, 71204, 71205, 71209, 741, 74909, 78421)

Carrying out professional, scientific, and other technical activities not classified elsewhere, such as agricultural science consulting services (*agronomist*), environmental consulting, other engineering consulting, and consulting services other than architectural, engineering, and management consulting. This category also includes the recovery of valuable objects from shipwreck cargo. It also covers activities conducted by agents or representatives on behalf of individuals commonly involved in motion picture production, theater or other entertainment productions, sports attractions, and the placement of books, performances (drama, music, and others), works of art, photography, and others with publishers, producers, and others.

5. Rental and operational leasing activities without option rights (KBLI 78200, 77391, 68111, 55120, 93231, 82302, 73100, 68112)

Conducting rental and operational leasing activities without option rights for industrial machinery and equipment without operators, which are generally used as capital goods by companies, such as textile machinery, metal and wood processing machines, printing machines, and electric welding machines. This also includes machine tools, equipment for the production of measuring and inspection instruments, and other scientific, commercial, and industrial machines.

6. Research and development of science (KBLI 72105)

Conducting systematic research and development activities carried out by private entities related to agricultural, livestock, and forestry sciences.

7. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (KBLI 35111, 35112, 35113, 35301) Melakukan usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Memproduksi dan mendistribusikan uap dan air panas untuk pemanasan, pembangkit tenaga dan penggunaan lainnya seperti produksi, pengumpulan dan distribusi uap dan air panas untuk pemanas, energi dan kegunaan lain dan kegiatan produksi dan distribusi udara dingin.	7. Electricity, gas, steam/hot water, and air conditioning supply (KBLI 35111, 35112, 35113, 35301) Conducting activities to produce electricity through power generation using various energy sources. Producing and distributing steam and hot water for heating, power generation, and other uses, including the production, collection, and distribution of steam and hot water for heating, energy, and other purposes, as well as the production and distribution of cooled air.
8. Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi (KBLI 36001, 36002, 36003, 37011, 37012, 37021, 37022, 38120, 38220) Melakukan usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran).	8. Water supply, wastewater management, waste management and recycling, and remediation activities (KBLI 36001, 36002, 36003, 37011, 37012, 37021, 37022, 38120, 38220) Conducting water extraction directly from springs and groundwater, purification of surface water from water sources, and distribution of drinking water directly from water terminals through pipelines or tanker trucks (provided the tanker trucks remain under the same administrative management as the water utility company) to be sold to consumers or customers such as households, government institutions/agencies, social organizations, state-owned enterprises, and private businesses including hotels, processing industries, and retail shops. Conducting the collection and transportation of hazardous industrial wastewater or domestic wastewater through wastewater networks, wastewater collectors, and other transportation facilities (waste transportation vehicles).
9. Pengangkutan dan pergudangan (KBLI 49300, 52101, 52222, 52221, 42914) Menjalankan kegiatan-kegiatan usaha dalam bidang angkutan, ekspedisi dan pergudangan serta kegiatan lainnya yang merupakan sarana perlengkapan guna melancarkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.	9. Transportation and warehousing (KBLI 49300, 52101, 52222, 52221, 42914) Conducting business activities in transportation, expedition services, and warehousing, as well as other activities that serve as supporting facilities to facilitate and implement such activities.
10. Industri pengolahan (KBLI 20211, 20212, 11051, 33111, 33119, 33121, 33122, 33141, 33149, 33190, 33200, 25120, 28113, 33131, 33142, 25920, 71206) Melakukan kegiatan-kegiatan usaha di bidang industri pengolahan bahan aktif pemberantas hama dan formulasi, industri air kemasan, reparasi, instalasi/pemasangan, komponen/suku cadang, serta jasa industri lainnya.	10. Manufacturing industry (KBLI 20211, 20212, 11051, 33111, 33119, 33121, 33122, 33141, 33149, 33190, 33200, 25120, 28113, 33131, 33142, 25920, 71206) Conducting business activities in the manufacturing of active ingredients for pest control and formulation, bottled water industry, repair services, installation/assembly, components/spare parts, and other industrial services.



- 11.** Pertanian dan perkebunan (KBLI 01111, 01220, 01270, 01262, 01283, 01291, 01494, 02209)

Menjalankan usaha dalam bidang pertanian dan perkebunan serta industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.

- 12.** Perikanan budidaya (KBLI 03221, 03226)

Menjalankan usaha dalam bidang budidaya perikanan mencakup kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, mollusca, crustacea, katak dan biota air tawar lainnya. Melakukan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar).

- 13.** Informasi dan komunikasi (KBLI 61919, 43212, 61200)

Menjalankan kegiatan nilai tambah teleponi, pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena. Melakukan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

- 14.** Konstruksi (KBLI 43212, 43905, 42923)

Melakukan kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung, penyewaan alat konstruksi dengan operatornya dan konstruksi bangunan sipil fasilitas pengolahan produk kimia, petrokimia, farmasi dan industri lainnya.

- 11.** Agriculture and plantations (KBLI 01111, 01220, 01270, 01262, 01283, 01291, 01494, 02209)

Conducting business activities in agriculture and plantations as well as the processing industry of agricultural and plantation products.

- 12.** Aquaculture (KBLI 03221, 03226)

Conducting aquaculture activities including the cultivation, rearing, and harvesting of finfish, mollusks, crustaceans, frogs, and other freshwater organisms. This also includes hatchery activities (production of broodstock, eggs, larvae, and fry ready for stocking).

- 13.** Information and communication (KBLI 61919, 43212, 61200)

Conducting value-added telephony services, installation of telecommunication infrastructure in buildings for residential and non-residential purposes, such as antenna installation. Operating networks that provide mobile telecommunications using cellular technology on the earth's surface.

- 14.** Construction (KBLI 43212, 43905, 42923)

Conducting telecommunication installation activities in buildings, leasing of construction equipment with operators, and civil construction for facilities for processing chemical, petrochemical, pharmaceutical, and other industrial products.

KEGIATAN USAHA DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

BUSINESS ACTIVITIES CONDUCTED DURING THE FISCAL YEAR

Throughout 2025, the Company carried out business activities in accordance with the Company's Articles of Association.



PRODUK DAN JASA

PRODUCTS AND SERVICES

Perusahaan membagi produk usahanya dalam 3 (tiga) kategori, yakni Produk Pupuk, Produk Non Pupuk, dan Produk Samping. Produk Pupuk terdiri dari Pupuk Urea dan Pupuk NPK. Produk Non Pupuk berupa Amonia. Ketiga jenis produk tersebut diproduksi oleh empat pabrik utama yakni Pusri-IB, IIB, III, dan IV. Serta Produk Samping yang merupakan hasil samping dari kegiatan produksi.

Sementara yang termasuk dalam Produk Samping ialah CO₂ cair, CO₂ padat atau *Dry Ice* serta Nitrogen dan Oksigen. Selain itu, PUSRI juga memproduksi dan menjual produk-produk hasil inovasi antara lain pupuk hayati dan pupuk mikro.

The Company classifies its business products into three categories, namely Fertilizer Products, Non-Fertilizer Products, and By-Products. Fertilizer Products consist of Urea Fertilizer and NPK Fertilizer. Non-Fertilizer Products consist of Ammonia. These three types of products are produced by four main plants, namely Pusri-IB, Pusri-IIB, Pusri-III, and Pusri-IV. By-Products are generated as secondary outputs from production activities.

The By-Products include liquid CO₂, solid CO₂ or Dry Ice, as well as Nitrogen and Oxygen. In addition, PUSRI also produces and sells innovative products including biofertilizers and micronutrient fertilizers.

PRODUK PUPUK DAN NON PUPUK

Pupuk Urea

PUSRI memproduksi pupuk urea yang merupakan salah satu jenis pupuk kimia yang terbentuk dari reaksi antara Amonia dengan karbon dioksida melalui proses kimia. Produk urea standar yang dihasilkan PUSRI berbentuk butiran curah (*urea prill*) berukuran 6–8 mesh dengan kandungan utama Nitrogen minimum 46%, Biuret maksimum 1% dan kandungan air maksimum 0.5%. Pupuk urea yang mengandung kadar Nitrogen tinggi sangat diperlukan tanaman sebagai penyedia zat hara. Urea bersubsidi berwarna pink dipasarkan dengan merek dagang Pupuk Indonesia, sedangkan urea non subsidi yang berwarna putih dipasarkan dengan merek dagang Nitrea.

Pupuk NPK

Pupuk NPK merupakan pupuk majemuk yang mengandung unsur hara N (Nitrogen), P (Phospat), dan K (Kalium) yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. PUSRI Palembang memproduksi jenis NPK yakni NPK Fusion dengan keunggulan teknologi pabrik yang lebih fleksibel untuk dapat memproduksi berbagai macam formula pupuk NPK dengan biaya investasi yang rendah. Di sektor subsidi, Produk pupuk NPK produksi PUSRI adalah NPK Formula 15–10–12 sedangkan di sektor non subsidi formula yang diproduksi adalah formula 15–15–15 yang dipasarkan secara umum, dan formula lainnya sesuai dengan permintaan pasar.

FERTILIZER AND NON FERTILIZER PRODUCTS

UREA FERTILIZER

PUSRI produces urea fertilizer, which is a type of chemical fertilizer formed from the reaction between Ammonia and carbon dioxide through a chemical process. The standard urea product produced by PUSRI is in the form of bulk granules (*urea prill*) measuring 6–8 mesh with a minimum Nitrogen content of 46%, maximum Biuret content of 1%, and maximum moisture content of 0.5%. Urea fertilizer with high Nitrogen content is essential for plants as a source of nutrients. Subsidized urea is pink in color and marketed under the Pupuk Indonesia brand, while non-subsidized urea, which is white in color, is marketed under the Nitrea brand.

NPK Fertilizers

NPK fertilizer is a compound fertilizer containing the nutrients N (Nitrogen), P (Phosphate), and K (Potassium), which are highly required by plants. PUSRI Palembang produces NPK fertilizer in the form of NPK Fusion, which has the advantage of flexible plant technology that allows the production of various NPK fertilizer formulas with relatively low investment costs. In the subsidized sector, PUSRI produces NPK Formula 15–10–12, while in the non-subsidized sector the formula produced is 15–15–15, which is generally marketed, as well as other formulas based on market demand.

Amonia

Amonia merupakan bahan baku utama dalam pembuatan pupuk urea. Untuk keperluan komersial, jenis Amonia yang diproduksi dan dijual adalah Amonia anhidrat yang tidak mengandung air. PUSRI memproduksi Amonia anhidrat dalam bentuk cair pada temperatur -33°C . Amonia tersebut memiliki kandungan Nitrogen minimum 99,5%, kadar air maksimum 0,5%, dan kandungan minyak maksimum 5 ppm.

Ammonia

Ammonia is the main raw material used in the production of urea fertilizer. For commercial purposes, the type of Ammonia produced and sold is anhydrous Ammonia, which does not contain water. PUSRI produces anhydrous Ammonia in liquid form at a temperature of -33° . This Ammonia contains a minimum Nitrogen content of 99.5%, maximum water content of 0.5%, and maximum oil content of 5 ppm.

PRODUK SAMPING

CO₂ cair dan CO₂ Padat

PUSRI memproduksi CO₂ cair dan CO₂ padat atau es kering sejak tahun 1983, dengan kapasitas masing-masing sebanyak 55 ton CO₂ per hari dan 4,8 ton CO₂ padat per hari. Bahan baku produksi CO₂ cair dan es kering diperoleh dari kelebihan produksi CO₂ gas di Pabrik Amonia. Produk CO₂ cair umumnya digunakan oleh industri minuman dan *blanket*. Sementara itu, produk es kering yang dijual PUSRI memiliki manfaat dalam pengawetan hasil pertanian dan perikanan untuk mengurangi persentase kerusakan produk.

BY PRODUCTS

Liquid CO₂ and Solid CO₂

PUSRI has been producing liquid CO₂ and solid CO₂ or dry ice since 1983, with capacities of 55 tons of CO₂ per day and 4.8 tons of solid CO₂ per day, respectively. Raw materials for the production of liquid CO₂ and dry ice are obtained from the excess production of gaseous CO₂ at the ammonia plant. Liquid CO₂ products are commonly used by the beverage and blanket industries. Meanwhile, dry ice products sold by PUSRI have benefits in preserving agricultural and fishery products to reduce the percentage of product damage.

Oksigen (O₂) dan Nitrogen (N₂)

Oksigen dan Nitrogen dapat digunakan untuk keperluan pabrik, maupun dijual sebagai Oksigen cair, Oksigen gas, Nitrogen cair, dan Nitrogen gas. PUSRI memproduksi Oksigen dan Nitrogen dari udara menggunakan prinsip fraksinasi. Proses tersebut dilakukan dalam unit Air Separation di pabrik dengan teknologi dari *Process System Incorporated*.

Oxygen (O₂) dan Nitrogen (N₂)

operations or sold as liquid Oxygen, gaseous Oxygen, liquid Nitrogen, and gaseous Nitrogen. PUSRI produces Oxygen and Nitrogen from air using the fractional distillation principle. This process is carried out in the Air Separation unit at the plant using technology from *Process System Incorporated*.



Demineralized Water (Air Demineral)

Air Demineral (Air Demin) merupakan air yang hampir seluruh ion mineralnya telah dihilangkan melalui proses yang demineralisasi. Selain digunakan untuk keperluan pabrik, Air demineral sangat penting dalam berbagai aplikasi industri dan rumah sakit di mana dibutuhkan air dengan kemurnian tinggi.

Demineralized Water (Demin Water)

Demineralized Water (Demin Water) is water from which almost all mineral ions have been removed through a demineralization process. In addition to being used for plant operations, demineralized water is essential in various industrial and hospital applications where high-purity water is required.

RAGAM MEREK DAN PRODUK PUSRI

VARIOUS PUSRI BRANDS AND PRODUCTS

Produk Product	Merk Brand	Keunggulan dan Manfaat Advantages and Benefits
	• Urea Pupuk Indonesia Holding Company (untuk produk subsidi) • Nitrea Pupuk Indonesia (untuk produk subsidi) • Urea Pupuk Indonesia Holding Company (for subsidized products) • Nitrea Pupuk Indonesia (for subsidized products)	• Mengandung 46% N. • Mendukung pertumbuhan yang optimal pada titik – titik apikal tanaman, seperti akar, batang dan daun (tanaman akan lebih tinggi, muncul tunas baru dan warna daun lebih hijau). • Memperkuat akar dan batang tanaman (menjadi lebih kokoh). • Meningkatkan kandungan protein dalam tanaman. • Dapat digunakan untuk semua jenis tanaman. • Contains 46% N. • Supports optimal growth at plant apical points, such as roots, stems, and leaves (the plant will be taller, new shoots will appear, and the leaf color will be greener). • Strengthens the roots and stems of the plant (becomes firmly rooted). • Increases the protein content in plants. • Can be used for all types of plants.
	• Phonska Pupuk Indonesia Holding Company (untuk produk subsidi) • NPK 15-15-15 PUSRI (untuk produk non subsidi) • Phonska Pupuk Indonesia Holding Company (for subsidized products) • NPK 15-15-15 PUSRI (for non-subsidized products)	• Pupuk majemuk dengan komposisi 15% N, 10% P₂O₅ dan 12% K₂O (untuk subsidi). • Pupuk majemuk dengan komposisi 15% N, 15% P₂O₅ dan 15% K₂O (untuk non subsidi). • Pemupukan lebih efektif. • Mempercepat pembentukan bunga dan pematangan biji. • Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama dan penyakit. • Mengefisiensikan penggunaan pupuk. • Disarankan untuk tanaman hortikultura dan pangan. • Dosis dapat disesuaikan sesuai hasil analisa tanah. • Compound fertilizers with a composition of 15% N, 10% P₂O₅, and 12% K₂O (for subsidies). • Compound fertilizers with a composition of 15% N, 15% P₂O₅, and 15% K₂O (for non-subsidized). • Fertilizing is more effective. • Accelerates flower formation and seed ripening. • Increases plant resistance to pests and diseases. • Efficient use of fertilizers. • It is recommended for horticultural and food crops. • The dose can be adjusted according to the results of the soil analysis.



Produk Product	Merk Brand	Keunggulan dan Manfaat Advantages and Benefits
	Phonska Plus	- Pupuk majemuk dengan komposisi 16% N, 16% P₂O₅ dan 16% K₂O. - Pemupukan lebih efektif. - Mempercepat pembentukan bunga dan pematangan biji. - Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama dan penyakit. - Mengefisiensikan penggunaan pupuk. - Disarankan untuk tanaman buah, hias dan obat. - Dosis dapat disesuaikan sesuai hasil analisa tanah.
	Phonska Plus	- Compound fertilizer with a composition of 16% N, 16% P₂O₅, and 16% K₂O. - Fertilization is more effective. - Accelerates flower formation and seed ripening. - Increases plant resistance to pests and diseases. - Efficient use of fertilizer. - It is recommended for fruity, ornamental, and medicinal crops. - The dose can be adjusted according to the results of the soil analysis
	Pupuk Hayati Bioripah	- Mempercepat perkecambahan pada biji - Memperkuat vigor bibit tanaman muda - Mendukung pertumbuhan bulu akar dan memperkuat perakaran. - Meningkatkan ketersediaan hara N,P, K dalam tanah. - Meningkatkan ketahanan tanaman dari hama dan penyakit. - Mengandung bakteri bermanfaat bagi tanah dan tanaman. - Aplikasi mudah.
	Bioripah Biofertilizer	- Accelerates germination in seeds - Strengthens the vigor of young plant seedlings - Supports the growth of root feathers and strengthens rooting. - Increase the availability of nutrients N, P, and K in the soil. - Increases plant resistance to pests and diseases. - Contains beneficial bacteria for soil and plants. - Easy application.
	Pupuk Mikro Nutremag	- Meningkatkan kualitas pada hasil panen tanaman. - Bersifat <i>slow release</i>. - Cocok digunakan pada tanah masam. - Dosis rendah. - Aplikasi mudah. - Pupuk Mikro Nutremag mengandung 17% Zinc (Zn), 3% Copper (Cu), 0,7% Boron (B), 0,6% Manganese (Mn), 0,01% Molybdenum (Mo)
	Microfertilizer Nutremag	- Improve the quality of crop yields. - Slow release. - Suitable for use on acidic soils. - Low dose. - Easy application. - Nutremag Micro Fertilizer contains 17% Zinc (Zn), 3% Copper (Cu), 0.7% Boron (B), 0.6% Manganese (Mn), 0.01% Molybdenum (Mo)

Produk Product	Merk Brand	Keunggulan dan Manfaat Advantages and Benefits
	NPK PUSRI Kopi TBM (Tanaman Belum Menghasilkan)	• Mengandung 18% N, 8% P₂O₅ dan 8% K₂O. • Pemupukan lebih efektif. • Mengefisienkan penggunaan pupuk. • Memenuhi kebutuhan nutrisi makro untuk tanaman kopi belum menghasilkan (usia 0–3 tahun). • Mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman kopi. • Dosis dapat disesuaikan sesuai hasil analisa tanah.
	NPK PUSRI Coffee TBM (Immature Plants)	• Contains 18% N, 8% P₂O₅ and 8% K₂O. • Fertilizing is more effective. • Efficient use of fertilizers. • Meet the needs of macronutrients for immature coffee plants (aged 0–3 years). • Supports the vegetative growth of coffee plants. • The dose can be adjusted according to the results of the soil analysis.
	NPK PUSRI Kopi TM (Tanaman Menghasilkan)	• Mengandung 18% N, 8% P₂O₅ dan 18% K₂O. • Pemupukan lebih efektif. • Mengefisienkan penggunaan pupuk. • Memenuhi kebutuhan nutrisi makro untuk tanaman kopi menghasilkan (usia >3 tahun). • Mendukung pertumbuhan generatif tanaman kopi (mampu meningkatkan produktivitas dan menyeragamkan petik merah). • Dosis dapat disesuaikan sesuai hasil analisa tanah.
	NPK PUSRI Coffee TM (Mature Plants)	• Contains 18% N, 8% P₂O₅ and 18% K₂O. • Fertilizing is more effective. • Efficient use of fertilizers • Meet the needs of macronutrients for coffee-producing plants (age >3 years). • Supports the generative growth of coffee plants (able to increase productivity and homogenize red picking). • The dose can be adjusted according to the results of the soil analysis.
	NPK PUSRI Singkong Selanjutnya akan dibranding menjadi NPK 17–25 karena tidak terbatas untuk tanaman singkong	• Mengandung 17% N, 6% P₂O₅ dan 25% K₂O. • Pemupukan lebih efektif. • Mengefisienkan penggunaan pupuk. • Memenuhi kebutuhan nutrisi makro untuk tanaman umbi umbian, khususnya singkong • Mendukung perkembangan dan kualitas umbi. • Dosis dapat disesuaikan sesuai hasil analisa tanah.
	NPK PUSRI Cassava It will subsequently be rebranded as NPK 17–6–25 because its use is not limited to cassava crops	• Contains 17% N, 6% P₂O₅ and 25% K₂O. • Fertilizing is more effective. • Efficient use of fertilizers. • Meet the needs of macronutrients for root crops, especially cassava. • Supports the development and quality of tubers. • The dose can be adjusted according to the results of the soil analysis.

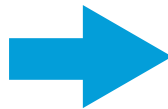


Produk Product	Merk Brand	Keunggulan dan Manfaat Advantages and Benefits
	NPK PUSRI 12-12-17-2	- Pupuk majemuk dengan komposisi 12%N, 12% P₂O₅, 17% K₂O, dan 2% MgO. - Pemupukan lebih efektif. - Mengefisienkan penggunaan pupuk. - Digunakan untuk tanaman kelapa sawit TBM. - Memacu pertumbuhan vegetatif tanaman, meningkatkan tinggi batang dan merangsang pembentukan akar dan daun.
	NPK PUSRI 12-12-17-2	- Compound fertilizers with a composition of 12% N, 12% P₂O₅, 7% K₂O, and 2% MgO. - Fertilizing is more effective. - Efficient use of fertilizers. - Used for oil palm TBM plants. - Spurs the vegetative growth of plants, increases stem height, and stimulates the formation of roots and leaves.
	NPK PUSRI 13-6-27-4+0.65B	- Pupuk majemuk dengan komposisi 13%N, 6% P₂O₅, 27% K₂O, 4% MgO dan 0,65% B. - Digunakan untuk tanaman kelapa sawit TM. - Merangsang perkembangan generatif tanaman, memacu pembentukan bunga dan buah. - Meningkatkan rasio minyak kelapa sawit terhadap tandan - Mengefisienkan penggunaan pupuk serta memudahkan aplikasi pemupukan
	NPK PUSRI 13-6-27-4+0.65B	- Compound fertilizers with a composition of 13% N, 6% P₂O₅, 27% K₂O, 4% MgO, and 0.65% B. - Used for TM oil palm plantations. - Stimulates the generative development of plants and spurs the formation of flowers and fruits. - Increase the ratio of palm oil to bunches. - Streamlining the use of fertilizers and facilitating fertilization applications

SINGLE BRANDING PUPUK INDONESIA

PRODUCT KNOWLEDGE

UREA UREA



SINGLE BRANDING

Sebagai upaya memberikan kemudahan akses bagi pelanggan khususnya petani untuk mendapatkan produk retail di seluruh wilayah Indonesia, PT Pupuk Indonesia (Persero) memberlakukan *single branding* pada pupuk urea putih non subsidi menjadi Nitrea.

As an effort to provide easier access for customers, especially farmers, to obtain retail products throughout Indonesia, PT Pupuk Indonesia (Persero) has implemented single branding for non-subsidized white urea fertilizer under the Nitrea brand.

PROFIL PRODUK NPK 16-16-16 NPK PRODUCT PROFILE 16-16-16



SINGLE BRANDING

Sebagai upaya penyeragaman produk dalam rangka memudahkan akses pelanggan khususnya petani untuk mendapatkan produk retail, PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan *single branding* pada pupuk NPK 16-16-16 menjadi pupuk NPK Phonska Plus.

As part of product standardization to facilitate customer access, especially for farmers in obtaining retail products, PT Pupuk Indonesia (Persero) has implemented single branding for NPK 16-16-16 fertilizer under the NPK Phonska Plus brand.



PRODUK INOVASI PUSRI

PUSRI INNOVATION PRODUCTS



PROFIL PRODUK UREA COATING INHIBITOR PRODUCT PROFILE UREA COATING INHIBITOR

Pupuk berwarna biru muda dan berbentuk prill yang dilapisi dengan urease inhibitor dan nitrification inhibitor yang dapat menghambat laju rilis pupuk urea hingga 30 hari. Pupuk ini mengandung 46% nitrogen dan inhibitor pelapis max 5000 ppm.

Pupuk ini diformulasikan khusus untuk komoditas perkebunan yang memiliki fase tumbuh yang relatif lebih lama seperti kelapa sawit. Pupuk ini mampu memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman perkebunan secara berkala dan terus menerus. Lapisan inhibitor membuat urea tidak mudah menguap dan tidak mudah *leaching*.

The fertilizer is light blue in color and in prill form, coated with a urease inhibitor and a nitrification inhibitor that can delay the release rate of urea fertilizer for up to 30 days. This fertilizer contains 46% nitrogen with a maximum coating inhibitor content of 5000 ppm.

This fertilizer is specially formulated for plantation commodities that have relatively longer growth phases, such as oil palm. It is able to meet the nutritional needs of plantation crops periodically and continuously. The inhibitor coating prevents the urea from easily volatilizing and reduces leaching.

PRODUK RAMAH LINGKUNGAN

Pupuk Urea Coating Inhibitor ini mampu mengurangi emisi CO₂ di udara dan juga mampu meningkatkan efisiensi pemupukan karena pupuk bersifat lebih banyak terserap tanaman dan tidak terbuang ke lingkungan.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTS

This Urea Coating Inhibitor fertilizer is able to reduce CO₂ emissions in the air and also improve fertilization efficiency, as more of the fertilizer is absorbed by plants and less is lost to the environment.



PROFIL PRODUK UREA COATING HUMIC ACID PRODUCT PROFILE UREA COATING HUMIC ACID

Pupuk berwarna coklat kehitaman dan berbentuk prill ini dilapisi dengan *coating agent* yang ditambah humic acid berfungsi untuk memperbaiki kualitas tanah. Pupuk ini mengandung 46% nitrogen dan asam humat 4000 ppm.

Pupuk diciptakan dalam upaya pemenuhan nutrisi tanaman dengan prinsip pemupukan berimbang (pupuk organik dan pupuk anorganik) yang memperhatikan pentingnya menjaga kesehatan tanah namun juga menjaga produktivitas tanaman tetap meningkat. Pupuk ini dikomersialkan untuk sektor urban farming, hortikultura, dan perkebunan.

This fertilizer is dark brown to black in color and in prill form, coated with a coating agent enriched with humic acid that functions to improve soil quality. The fertilizer contains 46% nitrogen and 4000 ppm humic acid.

This fertilizer was developed to meet plant nutritional needs based on the principle of balanced fertilization (organic fertilizer and inorganic fertilizer), which emphasizes maintaining soil health while sustaining and increasing crop productivity. This fertilizer is commercialized for the urban farming, horticulture, and plantation sectors.

PRODUK RAMAH LINGKUNGAN

Urea humat merupakan pupuk urea yang dilapisi oleh asam humat. Asam humat memiliki manfaat positif bagi kesehatan tanah di antaranya:

- Peningkatan kualitas tanah seperti agregasi dan struktur tanah,
- Penyediaan nutrisi bagi tanaman,
- Mampu meningkatkan kapasitas tanah dalam menahan air,
- Mampu merangsang pertumbuhan akar,
- Membantu memulihkan tanah yang terdegradasi akibat penggunaan pupuk kimia berlebih.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTS

Urea humate is a urea fertilizer coated with humic acid. Humic acid provides positive benefits for soil health, including:

- Improving soil quality such as soil aggregation and structure.
- Supplying nutrients for plants.
- Increasing the soil's capacity to retain water.
- Stimulating root growth.
- Helping restore degraded soil caused by excessive use of chemical fertilizers.



PROFIL PRODUK PUPUK PUSRI HYDRO

PUSRI HYDRO FERTILIZE PRODUCT PROFILE

- Merupakan formula nutrisi lengkap yang dibutuhkan tanaman agar dapat tumbuh dengan baik di media air atau sistem hidroponik
- Memasok semua unsur penting baik unsur makro maupun mikro
- Larut seluruhnya dalam air

Pupuk PUSRI HYDRO merupakan pupuk majemuk yang cocok digunakan untuk budidaya tanaman hidroponik terutama untuk sayuran daun. Pupuk ini mengandung hara makro dan mikro esensial yang mudah larut dan diserap oleh tanaman seperti N total $\geq 10\%$, $P_2O_5 \geq 6\%$, $K_2O \geq 20\%$ dan dilengkapi hara mikro yaitu Cu, Zn, Mn, B, dan Fe. Pupuk berbentuk butiran padat berwarna merah, coklat kekuningan, dan putih ini dipasarkan dalam bentuk kemasan 1,9 kg.

Meningkatnya tren *urban farming* dan juga tantangan keterbatasan lahan membuat masyarakat mencari alternatif budidaya tanaman. Budidaya hidroponik merupakan salah satu kegiatan yang dapat dikembangkan. Masih terbatasnya ketersediaan pupuk paket lengkap khusus untuk hidroponik di pasar mendorong PUSRI untuk mengembangkan pupuk khusus hidroponik ini.

- A complete nutrient formula required for plants to grow well in water media or hydroponic systems.
- Supplies all essential elements, both macro and micro nutrients.
- Fully soluble in water.

PUSRI Hydro fertilizer is a compound fertilizer suitable for hydroponic plant cultivation, especially for leafy vegetables. This fertilizer contains essential macro and micro nutrients that are easily dissolved and absorbed by plants, such as total N $\geq 10\%$, $P_2O_5 \geq 6\%$, and $K_2O \geq 20\%$, and is supplemented with micronutrients including Cu, Zn, Mn, B, and Fe. This fertilizer, which is in the form of solid granules colored red, yellowish brown, and white, is marketed in 1.9 kg packaging.

The increasing trend of urban farming and the challenge of limited land availability have encouraged communities to seek alternative methods of plant cultivation. Hydroponic cultivation is one activity that can be developed. The limited availability of complete fertilizer packages specifically for hydroponics in the market has encouraged PUSRI to develop this specialized hydroponic fertilizer.



PROFIL PRODUK PUPUK PUSRI DEF

PUSRI DEF FERTILIZER PRODUCT PROFILE

Diesel Exhaust Fluid (DEF), juga dikenal sebagai AUS 32 (Aqueous Urea Solution 32,5%), adalah cairan larutan urea yang digunakan untuk mengurangi polusi udara dari mesin diesel yang terletak pada SCR (*Selective Catalytic Reduction*) sesuai dengan regulasi EURO 6. Larutan ini juga dikenal sebagai merek dagang AdBlue dari VDA Jerman.

DEF dikonsumsi sebanyak 3–7% dari penggunaan bahan bakar diesel. Produk ini juga tersedia dalam berbagai kemasan, mulai dari botol 1 liter. Di Eropa, regulasi EURO 6 telah diadopsi secara luas dengan produk yang dijual oleh perusahaan pupuk, seperti YARA. Sementara di Indonesia kita baru mulai mengadopsi regulasi EURO 4.

KOMPOSISI:

Berdasarkan ISO 22241-2:2019, DEF terdiri dari 32,5% urea dan 67,5% larutan air demineralisasi. Di PUSRI, kami mengembangkan DEF menggunakan urea berkualitas rendah biuret dan air demineralisasi (untuk mencegah pertumbuhan bakteri mikro) dari fasilitas pabrik pemeliharaan. Dua komponen utama tersebut diproduksi oleh pabrik yang memangkas biaya dan memberi kami kesempatan untuk menjadi pemimpin pasar lokal dalam hal harga. Selain itu, terdapat juga ISO 18611 (Agen reduksi NOx untuk Kelautan AUS 40) dan agen reduksi NOx untuk Industri DEF/AUS 50 (contoh: Boiler, dll).

Diesel Exhaust Fluid (DEF), also known as AUS 32 (Aqueous Urea Solution 32.5%), is a urea solution used to reduce air pollution from diesel engines through SCR (Selective Catalytic Reduction) systems in accordance with EURO 6 regulations. This solution is also widely known under the trademark AdBlue from VDA Germany.

DEF consumption is approximately 3–7% of diesel fuel usage. This product is available in various packaging sizes, starting from 1-liter bottles. In Europe, EURO 6 regulations have been widely adopted, with products marketed by fertilizer companies such as YARA. In Indonesia, however, EURO 4 regulations have only recently begun to be adopted.

COMPOSITION:

Based on ISO 22241-2:2019, DEF consists of 32.5% urea and 67.5% demineralized water solution. At PUSRI, DEF is developed using low-biuret urea and demineralized water (to prevent microbial bacterial growth) from our plant maintenance facilities. These two main components are produced by our own plants, which reduces costs and provides an opportunity for PUSRI to become a local market leader in terms of pricing. In addition, there are also ISO 18611 standards (NOx reduction agent for marine AUS 40) and NOx reduction agents for industrial DEF/AUS 50 applications (for example boilers and others).

WILAYAH OPERASI DAN PASAR YANG DILAYANI

OPERATIONAL AREAS AND SERVED MARKETS

Cakupan wilayah operasi dan pasar yang dilayani oleh PUSRI terbagi menjadi domestik dan internasional melalui ekspor. Penjualan produk PUSRI di pasar domestik ditetapkan oleh entitas induk, PT Pupuk Indonesia (Persero). Rayon Subsidi Pupuk Urea mencakup Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Kep Bangka Belitung, Lampung, Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali. Sedangkan Rayon Subsidi Produk NPK mencakup wilayah Sumatera Selatan dan sebagian Lampung.

The operational coverage and markets served by PUSRI are divided into domestic and international markets through exports. Sales of PUSRI products in the domestic market are determined by the parent entity, PT Pupuk Indonesia (Persero). The Urea Fertilizer Subsidy Zone covers South Sumatra, Bengkulu, Jambi, the Bangka Belitung Islands, Lampung, Central Java, parts of East Java, Yogyakarta Special Region, and Bali. The NPK Product Subsidy Zone covers South Sumatra and parts of Lampung.

Pada bulan Maret 2025 terdapat perubahan rayon subsidi pupuk NPK di Provinsi Lampung yang semula Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat merupakan rayon PT Pupuk Sriwidjaja Palembang beralih ke PT Petrokimia Gresik, sedangkan Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro merupakan Rayon PT Petrokimia Gresik beralih ke PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

In March 2025, there was a shift in the NPK fertilizer subsidy zone in Lampung Province where previously, West Lampung and Pesisir Barat Regencies were under the control of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, and moved under the control of PT Petrokimia Gresik. Meanwhile, Central Lampung and Metro City Regencies previously under the control of PT Petrokimia Gresik, had moved under the control of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

PT Pupuk Indonesia (Persero) dan kelompok usahanya, termasuk PUSRI mendapatkan penugasan dari Pemerintah Indonesia untuk bertanggung jawab melakukan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia. Penugasan penyaluran Pupuk Bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO) ini mengacu pada:

PT Pupuk Indonesia (Persero) and its business groups, including PUSRI, were assigned by the Indonesian government to be responsible for fulfilling subsidized fertilizer needs throughout Indonesia. The assignment to distribute subsidized fertilizer or Public Service Obligation (PSO) refers to:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah sebagian terakhir melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah sebagian melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
1. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 70 of 2003, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4297), as amended several times, most recently by Law Number 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 162 of 2025, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 7097);
2. Law Number 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 131 of 2013, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5433), as partially amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, becoming Law;



3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah sebagian melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
8. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10); sebagaimana telah diubah sebagian melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
3. Law Number 22 of 2019 concerning Sustainable Agricultural Cultivation Systems (State Gazette of the Republic of Indonesia 2019 Number 201, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6412), as amended in part by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia 2003 Number 41, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856);
4. Law Number 62 of 2024 concerning the State Budget for the 2025 Fiscal Year (State Gazette of the Republic of Indonesia 2024 Number 226, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6995);
5. Government Regulation Number 8 of 2001 concerning Plant Cultivation Fertilizers (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 14 of 2001, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4079);
6. Presidential Regulation Number 201 of 2024 concerning Details of the State Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2025 (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 398 of 2024);
7. Presidential Regulation Number 192 of 2024 concerning the Ministry of Agriculture (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 389 of 2024);
8. Presidential Regulation Number 6 of 2025 concerning the Governance of Subsidized Fertilizer (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 10 of 2025); as partially amended by Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 113 of 2025 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 6 of 2025 concerning the Governance of Subsidized Fertilizer (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 175 of 2025);
9. Regulation of the Minister of Industry Number 19/M-IND/PER/2/2009 concerning the Mandatory Implementation of the Indonesian National Standard (SNI) for Fertilizer (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2009);
10. Regulation of the Minister of Industry Number 16/M-IND/PER/3/2013 concerning the Coloring of Subsidized Fertilizer (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 480 of 2013);

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 670) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/11/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1782) sebagaimana telah dicabut sebagian melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 73 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Urea Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 865);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pupuk Nitrogen, Fosfor dan Kalium Padat Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 95);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1278) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 195);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk sebagaimana telah diubah sebagian melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 542);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 188) sebagaimana telah diubah sebagian melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
11. Minister of Industry Regulation Number 26/M-IND/PER/4/2013 concerning the Mandatory Implementation of the Indonesian National Standard (SNI) for Single Inorganic Fertilizers (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 670 of 2013), as amended by Minister of Industry Regulation Number 106/M-IND/PER/11/2015 of 2015 concerning Amendments to Minister of Industry Regulation Number 26/M-IND/PER/4/2013 concerning the Mandatory Implementation of the Indonesian National Standard for Single Inorganic Fertilizers (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1782 of 2015), as partially revoked by Minister of Industry Regulation Number 73 of 2024 concerning the Mandatory Implementation of the Indonesian National Standard (SNI) for Urea Fertilizer (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 865 of 2024);
12. Regulation of the Minister of Industry Number 11 of 2025 concerning the Mandatory Implementation of Indonesian National Standards for Solid Nitrogen, Phosphorus, and Potassium Fertilizers (State Gazette of the Republic of Indonesia 2025 Number 95);
13. Minister of Industry Regulation Number 69/M-IND/PER/8/2015 concerning the Use of Single-Brand Bags for Subsidized Fertilizer (State Gazette of the Republic of Indonesia 2015 Number 1278) as amended several times, most recently through Minister of Industry Regulation Number 8 of 2021 concerning the Third Amendment to Minister of Industry Regulation Number 69/M-IND/PER/8/2015 concerning the Use of Single-Brand Bags for Subsidized Fertilizer (State Gazette of the Republic of Indonesia 2021 Number 195);
14. Minister of Finance Regulation Number 68/PMK.02/2016 concerning Procedures for the Provision, Disbursement, and Accountability of Fertilizer Subsidy Funds, as partially amended by Minister of Finance Regulation Number 47 of 2025 concerning Amendments to Minister of Finance Regulation Number 68/PMK.02/2016 concerning Procedures for the Provision, Disbursement, and Accountability of Fertilizer Subsidy Funds (State Gazette of the Republic of Indonesia 2015 Number 542);
15. Regulation of the Minister of Finance Number 62 of 2023 concerning Budget Planning, Budget Implementation, and Financial Accounting and Reporting (State Gazette of the Republic of Indonesia 2023 Number 188), as partially amended by Regulation of the Minister of Finance Number 107 of 2024 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Finance Number 62 of 2023 concerning Budget Planning, Budget Implementation, and Financial Accounting and Reporting (State Gazette of the Republic of Indonesia 2024 Number 1082);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR.10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471) sebagaimana telah diubah sebagian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 879);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1154);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 343);
20. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 801/Kpts./SR.310/M/09/2025 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 323/Kpts./RC.210/B/12/2025 tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1359/Kpts./HK.150/M/12/2025 tentang Jenis dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
16. Regulation of the Minister of Agriculture Number 36/PERMENTAN/SR.10/2017 concerning Registration of Inorganic Fertilizers (State Gazette of the Republic of Indonesia 2017 Number 1471), as amended in part by Regulation of the Minister of Agriculture Number 28 of 2021 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Agriculture Number 19 of 2020 concerning Handling of Business Licensing in the Agricultural Sector Affected by the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic (State Gazette of the Republic of Indonesia 2021 Number 879);
17. Regulation of the Minister of Agriculture Number 28 of 2020 concerning Components of the Cost of Goods Sold of Subsidized Fertilizer for the Agricultural Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia 2020 Number 1154);
18. Regulation of the Minister of Agriculture Number 02 of 2025 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Agriculture (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 14 of 2025);
19. Regulation of the Minister of Agriculture Number 15 of 2025 concerning the Implementing Regulations of Presidential Regulation Number 6 of 2025 concerning the Governance of Subsidized Fertilizer (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 343 of 2025);
20. Decree of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 801/Kpts./SR.310/M/09/2025 concerning the Determination of the Temporary Cost of Goods Sold for Subsidized Fertilizer in the Agricultural Sector for Fiscal Year 2025;
21. Decree of the Minister of Agriculture Number 323/Kpts./RC.210/B/12/2025 concerning the Reallocation of Subsidized Fertilizers in the Agricultural Sector for the 2025 Fiscal Year;
22. Decree of the Minister of Agriculture Number 1359/Kpts./HK.150/M/12/2025 concerning the Types and Highest Retail Prices of Subsidized Fertilizers in the Agricultural Sector;

Negara Tujuan Ekspor Pupuk :

Export Destination Countries for Fertilizer:

No	Buyer	Jumlah Total
1	Philippines	51.458,2
2	Thailand	12.266,7
3	Australia	219,0
4	Malaysia	10.330,6
5	South Africa	280,0
6	Vietnam	18.938,9
7	India	10.999,4
8	Singapore	400,0
		104.892,8



Area Pemasaran Pupuk Bersubsidi (PSO)
Marketing Area of Subsidized Fertilizer (PSO)



Negara Tujuan Ekspor Pupuk
Countries of Fertilizer Export Destination



Philippines



South Africa



Malaysia



Singapore



Australia



India



Thailand



Vietnam



Profil Perusahaan

Company Profile



ANMAR
(URMA)

LAOS

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

CAMBODIA

PHILIPPINES

BRUNEI

MALAYSIA

SINGAPORE

I N D O N E S I A

EAST TIMOR
(TIMOR-LESTE)

A U S T R A L I A

DAFTAR ALAMAT ENTITAS ANAK, KANTOR CABANG, SERTA KANTOR PERWAKILAN

LIST OF ADDRESSES OF SUBSIDIARIES, BRANCH OFFICES, AND
REPRESENTATIVE OFFICES

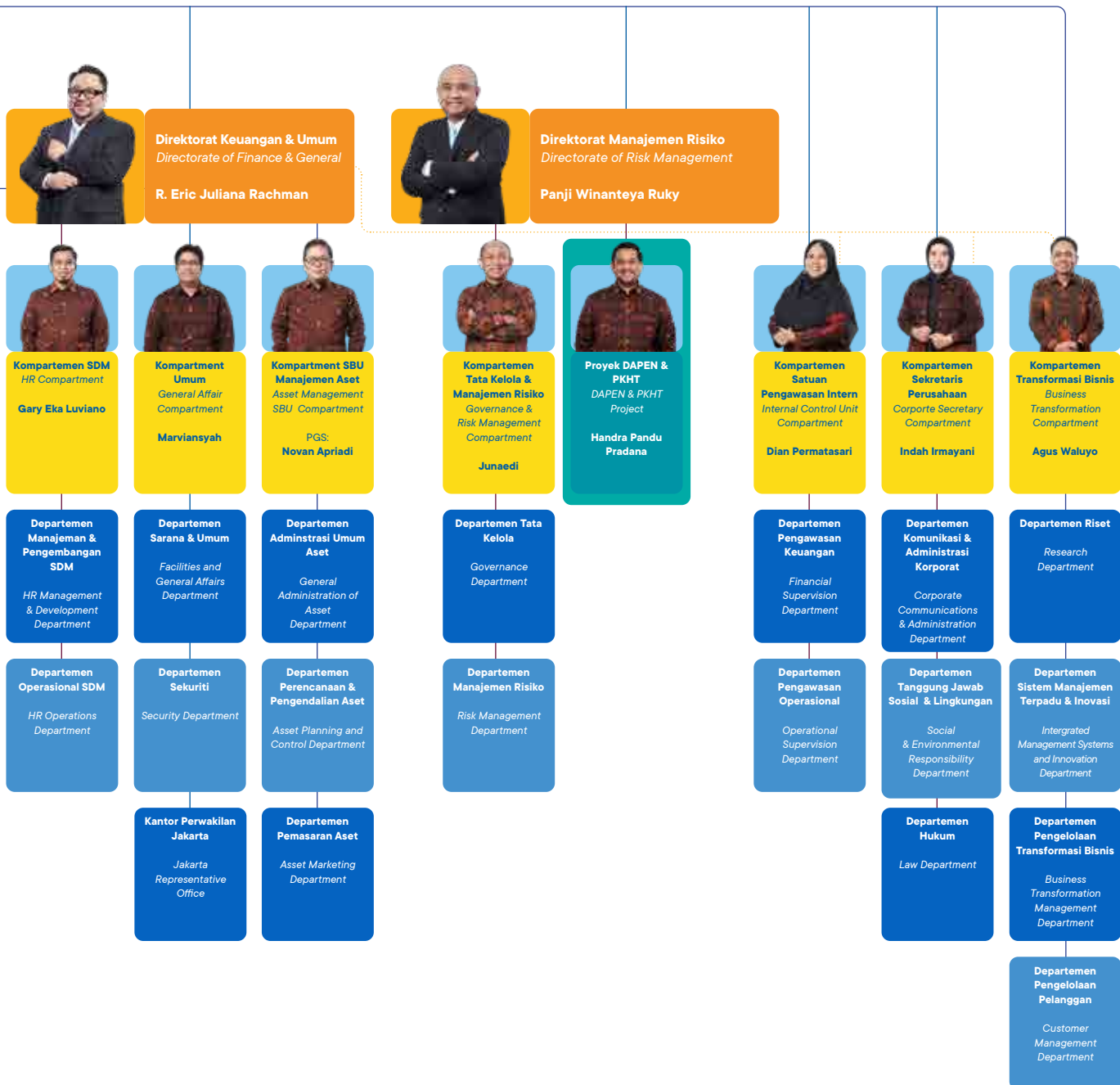
KANTOR PUSAT PUSRI Pusri Head Office	E-mail Web Tel. Fax	Jl. Mayor Zen Palembang 30118 : humas@pusri.co.id : http://www.pusri.co.id : 0711 – 712 111; 712 222 : 0711 – 712 100; 712 020
Kantor Perwakilan Jakarta Jakarta Office Representatives		Wisma 101 Jl. Letjen S Parman Kav 101 Grogol Petamburan, Jakarta Barat DKI Jakarta 11410, Indonesia
ENTITAS ANAK Subsidiaries		
PT Pusri Agro Lestari		Kawasan Industri Karawang Sukses Makmur, Dusun Sukamaju, Desa Telukjambe, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat 41361 E-mail : pusriagrolestari@gmail.com Web : www.pusriagro.co.id
ENTITAS ASOSIASI Associated Entities		
PT Pupuk Indonesia Logistik		Wisma 101, lantai 2 & 3 Jl. LetJend S. Parman Kav. 101 Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440 E-mail : info@pi-logistik.com Tel. : 021 – 2263 1881; 2263 1882; 22631883 Web : www.pi-logistik.com
PT Pupuk Indonesia Utilitas		Alamanda Tower Lt 26, Jl. T.B. Simatupang No 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430 E-mail : info@pi-utilitas.com Tel. : 021 – 2966 1630 Web : www.pi-utilitas.com
PT Pupuk Indonesia Pangan		Gedung Rekayasa Industri (PT Pupuk Indonesia Pangan) Gd. ROB-1, Lt. 1 Jl. Kalibata Timur I No.36, Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740 Tel. : 021-2286665 E-mail : info@pi-pangan.com Web : www.pi-pangan.com
PT Puspetindo		Desa Roomo, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61151, PO Box 172 Tel. : 031-99103048 E-mail : info@puspetindo.com Web : www.puspetindo.com

Kantor Penjualan PUSRI Daerah (PPD)	
PUSRI Regional Sales Office (PPD)	
PPD Jambi	Jl. H. Agus Salim Kota Baru Jambi 36122 E-mail : jambi@pusri.co.id Tel. : 0741 – 444 145 Fax. : 0741 – 441 46
PPD Bengkulu	Jl. Pangeran Natadirdja No.93A Bengkulu 38225 E-mail : Bengkulu@pusri.co.id Tel. : 0736 – 213 97 Fax. : 0736 – 213 26
PPD Sumatera Selatan	Jl. Naskah Km 7 Palembang 30152 E-mail : ppdsmsel@pusri.co.id Tel. : 0711 – 417 530; 411 079; 417 876 Fax. : 0711 – 410 185
PPD Bangka Belitung	Jl. Raden Abdullah No. 188, RT/RW 004/001 Desa Opas Indah Kec. Taman Sari, Pangkal Pinang E-mail : ppd-babel@pusri.co.id Tel. : 0717 – 424 942 Fax. : 0717 – 433 448
PPD Lampung	Jl. Dr. Susilo No. 57 Bandar Lampung 35214 E-mail : lampung@pusri.co.id Tel. : 0721 – 262 166; 262 786 Fax. : 0721 – 250 444; 261 112
PPD D.I Yogyakarta	Jl. Arteri Ringroad Maguwoharjo, Sleman Yogyakarta 55282 E-mail : yogya@pusri.co.id Tel. : 0274 – 489 063 Fax. : 0274 – 488 4376
PPD Jawa Tengah	Jl. Imam Bonjol No. 208 Semarang 50132 E-mail : Jateng@pusri.co.id Tel. : 024 – 354 7702; 356 5071; 351 8208; 354 5810 Fax. : 024 – 354 4150w
PPD Jawa Timur	Jl. Genteng Kali No. 55–57 Surabaya 60275 E-mail : Jatim@pusri.co.id Tel. : 031 – 532 2567; 532 2568; 534 0281 Fax. : 031 – 5346 240; 547 1608
PPD Bali	Jl. Bypass Ngurah Rai, Denpasar Bali E-mail : ppdbali@pusri.co.id
Unit Pengantongan Pupuk UPP	
Fertilizer Packaging Unit (UPP)	
UPP Cilacap	Jl. DI Panjaitan No. 58, Cilacap 53213 E-mail : upp_cilacap@pusri.co.id Tel. : 0282 – 534 505; 533 768 Fax. : 0282 – 536 327
UPP Meneng	Jl. Raya Situbondo, Lkr.Kp.Baru, Ketapang Kec. Kalipuro, Banyuwangi E-mail : upp_meneng@pusri.co.id Tel. : 0333 – 510011; Fax. : 0333 – 510014

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE





Keterangan | Description

..... Garis putus-putus sebagai garis koordinasi
Dotted lines as coordination lines

Proyek
Project

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

CORPORATE GROUP STRUCTURE



— Pemegang Saham Utama Pengendali
Major Controlling Shareholder

— Pemegang Saham
Shareholder

— Entitas Anak
Subsidiary

— Entitas Asosiasi
Associate

DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI

LIST OF MEMBERSHIP IN ASSOCIATION

Pada tahun 2025, PUSRI bergabung dalam asosiasi berikut: In 2025, PUSRI joined the following associations:

No	No Asosiasi/Perhimpunan Association	Skala Scale	Posisi Position
1	Responsible Care Indonesia (RCI)	Nasional National	Pendiri Founder
2	International Fertilizer Association (IFA)	Internasional International	Anggota Member
3	Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) Indonesian Fertilizer Producers Association (APPI)	Nasional National	Anggota Member

PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE REASONS FOR SUCH CHANGES

Pada tahun 2025, berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri BUMN, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri (YKKP) selaku Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor : SK-221/MBU/08/2025 - 010/A/HK/D0302/KPS/2025 - 12/SK/YKKP/VIII/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pada tanggal 5 Agustus 2025, terjadi perubahan komposisi keanggotaan Dewan Komisaris PT Pusri Palembang dengan pengangkatan Sdr. M. Syakir sebagai Komisaris dan Sdr. Arteria Dahlan sebagai Komisaris, menggantikan Sdr. Ali Jamil dan Sdr. Prahoro Julianto Nurtjahjo.

In 2025, based on the Statement of Resolution of the Minister of State-Owned Enterprises, the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero), and the Pusri Employees Welfare Foundation (YKKP) as the Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK-221/MBU/08/2025 - 010/A/HK/D0302/KPS/2025 - 12/SK/YKKP/VIII/2025 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dated August 5, 2025, changes occurred in the composition of the Board of Commissioners of PT Pusri Palembang through the appointment of Mr. M. Syakir and Mr. Arteria Dahlan as Commissioners, replacing Mr. Ali Jamil and Mr. Prahoro Julianto Nurtjahjo.

Selanjutnya berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor 196 Tahun 2026 tanggal 13 April 2026, Nomor 017/A/HK/D0302/KPS/2026 tanggal 14 April 2026 dan Nomor 24/Y/IV/KPS/2026 tanggal 14 April 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, telah ditetapkan Sdr. Teddy Gusnaldi sebagai Komisaris Independen PT Pusri Palembang menggantikan Sdr. Bambang Supriyambodo.

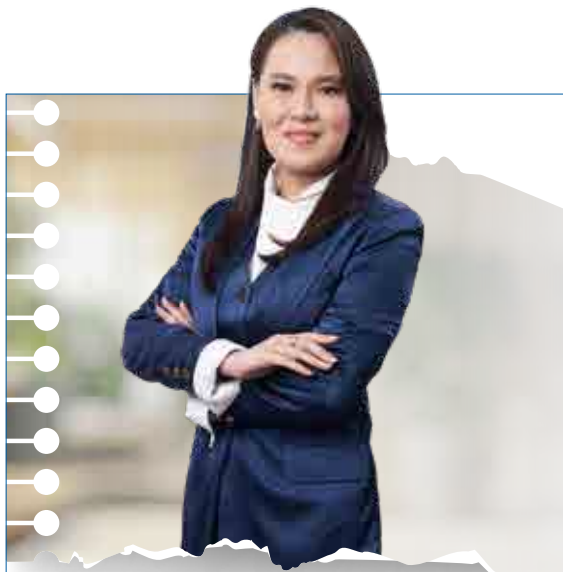
Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor 246 Tahun 2026 tanggal 24 April 2026, Nomor 018/A/HK/D0302/KPS/2026 tanggal 25 April 2026 dan Nomor 26/Y/IV/KPS/2026 tanggal 25 April 2026 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, telah ditetapkan pengangkatan Sdr. Mohamad Idris Laena sebagai Komisaris Independen PT Pusri Palembang.

Adapun profil Dewan Komisaris periode tahun 2025 dan penetapan melalui Keputusan Para Pemegang Saham pada bulan April 2026 sebagai berikut:

Subsequently, based on the Statement of Resolution of the Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. 196 of 2026 dated April 13, 2026, No. 017/A/HK/D0302/KPS/2026 dated April 14, 2026, and No. 24/Y/IV/KPS/2026 dated April 14, 2026 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Mr. Teddy Gusnaldi was appointed as Independent Commissioner of PT Pusri Palembang, replacing Mr. Bambang Supriyambodo.

Furthermore, based on the Statement of Resolution of the Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. 246 of 2026 dated April 24, 2026, No. 018/A/HK/D0302/KPS/2026 dated April 25, 2026, and No. 26/Y/IV/KPS/2026 dated April 25, 2026 concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Mr. Mohamad Idris Laena was appointed as Independent Commissioner of PT Pusri Palembang.

The profiles of the Board of Commissioners for the 2025 period and the appointments made through the Shareholders' Resolutions in April 2026 are as follows:



Siti Nurizka Puteri Jaya

Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen
President Commissioner Concurrently Serving as Independent Commissioner

Kelahiran | Date and Place of Birth

Jakarta, 6 Desember 1987

Jakarta, December 6, 1987

Usia | Age

38 Tahun | Years old

Kewarganegaraan | Nationality

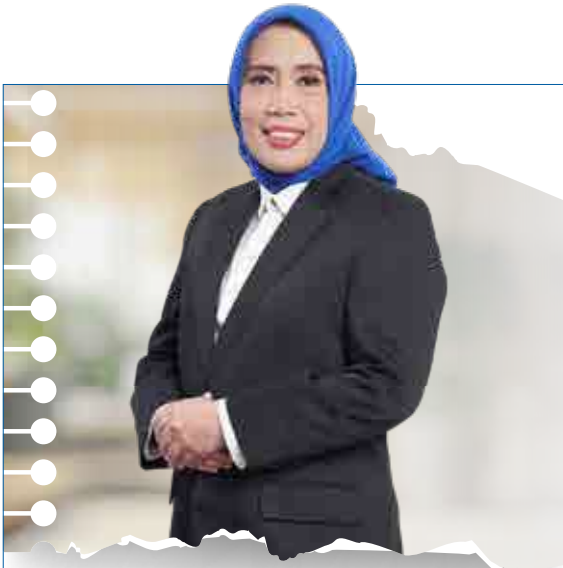
Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili | Domicile

Jakarta

Periode Jabatan Term of Office	10 Juni 2024–sekarang June 10, 2024 – present
Riwayat Penunjukan Appointment History	<i>Pertama kali menjabat Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 10 Juni 2024 yang dikuatkan dengan Akta No. 10 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta.</i> <i>First appointed as Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated June 10, 2024, as formalized in Deed No. 10 dated June 10, 2024 drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.</i>
Riwayat Pendidikan Education	• Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada (2009 – 2011) • Sarjana Hukum, Universitas Trisakti (2005 – 2009) • Master of Law, Gadjah Mada University (2009 – 2011) • Bachelor of Law, Universitas Trisakti (2005 – 2009)
Keahlian Expertise	Hukum Law
Pengalaman Kerja Work Experience	• PT Medco Power Indonesia • PT Indonesia Comnets Plus di Divisi Hukum • Direktur Pelaksana Kantor Hukum ABRAZQA (2015) • Ketua Asosiasi Sepak Bola Indonesia di Sumatera Selatan yang berafiliasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia (2015) • Kepala Bagian Hukum II di Ikatan Keluarga Alumni Militer (IKAM) Jogja (2016) • Dewan Pembina Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (FKPPI) Sumatera Selatan 2022 • Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Komisi 3 (Hukum, HAM & Keamanan) (2019 – 2024) • PT Medco Power Indonesia • PT Indonesia Comnets Plus, Legal Division • Managing Director, ABRAZQA Law Office (2015) • Chair of, Indonesian Soccer Speak Association in South Sumatra affiliated with the Ministry of Youth and Sports of Indonesia (2015) • Head of Legal Division II, Military Academy Alumni Family Association (IKAM) Yogyakarta (2016) • Advisory Board Member, Communication Forum of Sons and Daughters of Retired Military and Police Personnel (FKPPI) South Sumatra (2022) • Member of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI), Commission III (Law, Human Rights & Security) (2019–2024)
Penugasan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris Assignments related to the Board of Commissioners	• Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (10 Juni 2024–sekarang) • President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (June 10, 2024 – present)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak Ada None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Tidak Ada None
Kepemilikan Saham PUSRI PUSRI Share Ownership	Tidak Ada None



Sally Salamah

Komisaris
Commissioner

Kelahiran | Date and Place of Birth
Cirebon, 20 April 1967
Cirebon, April 20, 1967

Usia | Age
58 Tahun | Years old

Kewarganegaraan | Nationality
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili | Domicile
Jakarta
Jakarta

Periode Jabatan Term of Office	12 Juni 2021–sekarang June 12, 2021 – present
Riwayat Penunjukan Appointment History	<i>Pertama kali menjabat Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 12 Juni 2021 yang dikuatkan dengan Akta No.11 tanggal 12 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta</i> <i>First appointed as Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated June 12, 2021, as formalized in Deed No. 11 dated June 12, 2021 drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.</i>
Riwayat Pendidikan Education	- Doktor Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung (2020) - Magister di Bidang Akuntansi Profesional, University of Queensland (1999) - Sarjana Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1994) - Doctorate in Development Economics, Universitas Lampung (2020) - Master's Degree in Professional Accounting, University of Queensland (1999) - Bachelor's Degree in Accounting, State College of Accountancy (STAN) (1994)
Keahlian Expertise	Akuntansi, Audit Keuangan dan Manajemen Risiko Accounting, Financial Audit, and Risk Management
Pengalaman Kerja Work Experience	- Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (2025–sekarang) - Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara (2020–sekarang) - Kepala Pusdiklatwas BPKP (2019–2020) - Kepala Biro SDM BPKP (2019) - Kepala Biro Keuangan BPKP (2018–2019) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung (2016–2018) - Deputy Head of BPKP for Supervision of Government Institutions in the Areas of Politics, Security, Law, Human Development, and Culture (2025–present) - Deputy Head of BPKP for State Accountant Affairs (2020–present) - Head of the Education and Training Center for Supervision, BPKP (2019–2020) - Head of Human Resources Bureau, BPKP (2019) - Head of Finance Bureau, BPKP (2018–2019) - Head of BPKP Representative Office for Lampung Province (2016–2018)
Penugasan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris Assignments related to the Board of Commissioners	- Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan - Head of BPKP for Supervision of Government Institutions in the Areas of Politics, Security, Law, Human Development, and Culture.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	<i>Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</i> <i>Deputy Head of BPKP for State Accountant Affairs, Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)</i>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<i>Memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada BPKP. Rangkap jabatan ini merupakan bagian dari representasi manajerial dalam Pupuk Indonesia Grup. Selain itu, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.</i> <i>Has an affiliation with the Main/Controlling Shareholder through his position at BPKP. This concurrent position represents managerial representation within the Pupuk Indonesia Group. Other than that, she has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.</i>
Kepemilikan Saham PUSRI PUSRI Share Ownership	Tidak Ada None



Fadjar Judisiawan

Komisaris

Commissioner

Kelahiran | Date and Place of Birth

Surabaya, 9 Mei 1971

Surabaya, May 9, 1971

Usia | Age

55 Tahun | Years old

Kewarganegaraan | Nationality

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili | Domicile

Tangerang Selatan, Banten

South Tangerang, Banten

Periode Jabatan Term of Office	4 Maret 2024 – sekarang March 4, 2024 – present
Riwayat Penunjukan Appointment History	<i>Pertama kali menjabat Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 4 Maret 2024 yang dikuatkan dengan Akta No.02 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta.</i> <i>First appointed as Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated March 4, 2024, as affirmed by Deed No. 02 dated March 4, 2024, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.</i>
Riwayat Pendidikan Education	• Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada (UGM) (2002) • Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) (1995) • Master of Management, Universitas Gadjah Mada (UGM) (2002) • Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) (1995)
Keahlian Expertise	Proses Bisnis dan Tata Kelola Perusahaan Business Process and Corporate Governance
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Fasilitas dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Energi BP BUMN (Februari 2026 – sekarang) • Asisten Deputi Industri Kesehatan, BP BUMN (Januari 2024 – Februari 2026) • Direktur Keuangan & Umum, PT Patra Jasa (Maret 2022 – Januari 2024) • Direktur Strategi Bisnis & Pengembangan Usaha, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (Mei 2018 – Desember 2021) • Direktur Keuangan, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (Sept 2017– Mei 2018) • Pjt Deputi Konstruksi, Sarana dan Prasarana, KBUMN (Juni 2017 – Sept 2017) • Asisten Deputi Konstruksi, Sarana dan Prasarana 1, KBUMN (2015–2017) • Asisten Deputi Usaha Jasa Konstruksi, KBUMN (2014–2015) • Asisten Deputi Riset & Penyajian Informasi, KBUMN (2013–2014) • Director of Development Facilitation and Synergy for Energy Security, Ministry of State-Owned Enterprises (February 2026 – present) • Assistant Deputy for the Health Industry, Ministry of State-Owned Enterprises (January 2024 – February 2026) • Director of Finance & General Affairs, PT Patra Jasa (March 2022 – January 2024) • Director of Business Strategy & Development, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (May 2018 – December 2021) • Director of Finance, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (September 2017 – May 2018) • Acting Deputy for Construction, Facilities and Infrastructure, Ministry of State-Owned Enterprises (June 2017 – September 2017) • Assistant Deputy for Construction, Facilities and Infrastructure I, Ministry of State-Owned Enterprises (2015–2017) • Assistant Deputy for Construction Services Business, Ministry of State-Owned Enterprises (2014–2015) • Assistant Deputy for Research & Information Presentation, Ministry of State-Owned Enterprises (2013–2014)
Penugasan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris Assignments related to the Board of Commissioners	• Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (4 Maret 2024 – sekarang) • Komisaris PT Pelindo 2 (Persero) (2016 – 2017) • Komisaris PT Pelindo 3 (Persero) (2014 – 2016) • Komisaris PT Petrokimia Gresik (2012 – 2014) • Komisaris PT PNIM (2011 – 2012) • Komisaris PT SIER (Persero) (2009 – 2011) • Komisaris Utama PT Atmindo (2008–2010) • Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (March 4, 2024 – present) • Commissioner of PT Pelindo 2 (Persero) (2016 – 2017) • Commissioner of PT Pelindo 3 (Persero) (2014 – 2016) • Commissioner of PT Petrokimia Gresik (2012 – 2014) • Commissioner of PT PNIM (2011 – 2012) • Commissioner of PT SIER (Persero) (2009 – 2011) • President Commissioner of PT Atmindo (2008–2010)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	• Asisten Deputi Industri Kesehatan – KBUMN (Januari 2024 – Maret 2026) • Direktur Fasilitas dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Energi BP BUMN (Maret 2026 – sekarang) • Assistant Deputy for the Health Industry, Ministry of State-Owned Enterprises (January 2024 – March 2026) • Director of Development Facilitation and Synergy for Energy Security, BP BUMN (March 2026 – present)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	<i>Memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada BP BUMN. Rangkap jabatan ini merupakan bagian dari representasi manajerial dalam Pupuk Indonesia Grup. Selain itu, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.</i> <i>Has an affiliated relationship with the Main/Controlling Shareholder through his position at BP BUMN. This concurrent position is part of the managerial representation within the Pupuk Indonesia Group. Other than that, he has no affiliated relationship with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.</i>
Kepemilikan Saham PUSRI PUSRI Share Ownership	Tidak Ada None



Muhammad Syakir

Komisaris
Commissioner

Kelahiran | Date and Place of Birth **Usia | Age**
Watampone, 17 November 1958 **67 Tahun | Years old**
 Watampone, November 17, 1958

Kewarganegaraan | Nationality **Domisili | Domicile**
Warga Negara Indonesia **Bogor, Jawa Barat**
 Indonesian Citizen **Bogor, West Java**

Periode Jabatan Term of Office	5 Agustus 2025–sekarang August 5, 2025–present
Riwayat Penunjukan Appointment History	<i>Pertama kali menjabat Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan Keputusan Menteri BUMN, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri Nomor: SK–221/MBU/08/2025 – 010/A/HK/DO302/KPS/2025 – 12/SK/YKKP/VIII/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota – Anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tanggal 5 Agustus 2025 yang dikuatkan dengan Akta No. 08 tanggal 22 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta.</i> <i>First appointed as Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the Resolution of the Minister of State-Owned Enterprises, the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero), and the Pusri Employees Welfare Foundation under No. SK–221/MBU/08/2025 – 010/A/HK/DO302/KPS/2025 – 12/SK/YKKP/VIII/2025 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dated August 5, 2025, as affirmed by Deed No. 08 dated August 22, 2025, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.</i>
Riwayat Pendidikan Education	- Doktor di Institut Pertanian Bogor (2005) - Magister di Institut Pertanian Bogor (1990) - Sarjana di Bidang Pertanian dari Universitas Hasanuddin (1983) - Doctorate from Bogor Agricultural University (2005) - Master's Degree from Bogor Agricultural University (1990) - Bachelor's Degree in Agriculture from Hasanuddin University (1983)
Keahlian Expertise	Peneliti utama dan pakar rempah-rempah yang juga memimpin berbagai penelitian pertanian tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Food Crops, Horticulture and Estate Crops). <i>A principal researcher and spice expert who also leads various research projects in food crops, horticulture, and plantations (Food Crops, Horticulture, and Estate Crops).</i>
Pengalaman Kerja Work Experience	- Tenaga Ahli Menteri Bidang Pengembangan Budidaya dan Pasca Panen, Kementerian Pertanian (2023–sekarang) - Peneliti Utama Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan, BRIN (2022 – sekarang) - Kepala Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian (Eselon IA) (2015–2018) - Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian (2008–2015) - Kepala Balai Penelitian Tanaman Obat (2006–2008) - Ministerial Expert for Cultivation and Post-Harvest Development, Ministry of Agriculture (2023–present) - Principal Researcher, Horticulture and Plantation Research Center, BRIN (2022–present) - Head of the Agricultural Research and Development Agency, Ministry of Agriculture (Echelon IA) (2015–2018) - Head of the Plantation Research and Development Center, Agricultural Research and Development Agency, Ministry of Agriculture (2008–2015) - Head of the Medicinal Plants Research Center (2006–2008)
Penugasan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris Assignments related to the Board of Commissioners	- Komisaris PTPN III Holding (2017–2020) - Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2025–sekarang) - Commissioner of PTPN III Holding (2017–2020) - Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2025–present)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tenaga Ahli Kementerian Pertanian <i>Expert Staff at the Agriculture Ministry</i>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali melalui jabatan pada Kementerian Pertanian sebagai entitas pemilik akhir Perusahaan. Rangkap jabatan ini merupakan bagian dari representasi manajerial dalam Pupuk Indonesia Grup. Selain itu, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi. <i>He has an affiliated relationship with the Major/Controlling Shareholder through his position at the Ministry of Agriculture, the ultimate owner of the Company. This concurrent position represents his managerial representation within the Pupuk Indonesia Group. He also has no affiliations with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.</i>
Kepemilikan Saham PUSRI PUSRI Share Ownership	Tidak Ada None



Bambang Supriyambodo

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kelahiran | Date and Place of Birth
Klaten, 12 Januari 1961
Klaten, January 12, 1961

Usia | Age
65 Tahun | Years old

Kewarganegaraan | Nationality
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili | Domicile
Jakarta

Periode Jabatan Term of Office	25 Agustus 2020– 5 Agustus 2025 5 Agustus 2025 – 14 April 2026 August 25, 2020 – August 5, 2025 August 5, 2025 – April 14, 2026
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Agustus 2020 yang dikuatkan dengan Akta No. 08 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tanggal 5 Agustus 2025, RUPSLB menetapkan sebagai Komisaris Independen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan No. 08 tanggal 22 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta dan berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Independen sesuai Keputusan Pemegang Saham Nomor 196 Tahun 2026 tanggal 13 April 2026, Nomor 017/AJHK/00302/KPS/2026 tanggal 14 April 2026 dan Nomor 24/Y/IV/KPS/2026 tanggal 14 April 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dikuatkan dengan Akta No. 04 tanggal 11 Mei 2026 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta First appointed as Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated August 25, 2020, as affirmed by Deed No. 08 dated August 25, 2020, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta. On August 5, 2025, the EGMS appointed him as Independent Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, as set forth in Deed No. 08 dated August 22, 2025, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta. His term of office as Independent Commissioner ended pursuant to Shareholders' Resolution No. 196 of 2026 dated April 13, 2026, No. 017/AJHK/00302/KPS/2026 dated April 14, 2026, and No. 24/Y/IV/KPS/2026 dated April 14, 2026 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, as affirmed by Deed No. 04 dated May 11, 2026, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.
Riwayat Pendidikan Education	• Sarjana Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1987) • Bachelor's Degree in Forestry, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1987)
Keahlian Expertise	Kehutanan Forestry
Pengalaman Kerja Work Experience	• Komisaris Utama PT Rakabu Sejahtera (2016–sekarang) • Direktur Operasional PT ITCIKU (2008–2009) • Manajer Pengurusan Hutan PT ITCIKU (2005–2006) • Ka Unit Pengelolaan Hutan PT ITCIKU (2004–2005) • Manager Rehabilitasi Hutan dan Nursery PT ITCIKU (1999–2004) • President Commissioner of PT Rakabu Sejahtera (2016–present) • Operational Director of PT ITCIKU (2008–2009) • Forest Management Manager of PT ITCIKU (2005–2006) • Head of Forest Management Unit of PT ITCIKU (2004–2005) • Forest Rehabilitation and Nursery Manager of PT ITCIKU (1999–2004)
Penugasan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris Assignments related to the Board of Commissioners	• Komisaris Independen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2025–2026) • Komisaris Independen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2020–2025) • Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur (2016–2020) • Independent Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2025–2026) • Independent Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2020–2025) • Commissioner of PT Pupuk Kalimantan (2016–2020)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak Ada None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or with the Main and Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham PUSRI PUSRI Share Ownership	Tidak Ada None



Arteria Dahlan

Komisaris
Commissioner

Kelahiran | Date and Place of Birth

Jakarta, 7 Juli 1975
Jakarta, July 7, 1975

Usia | Age

50 Tahun | Years old

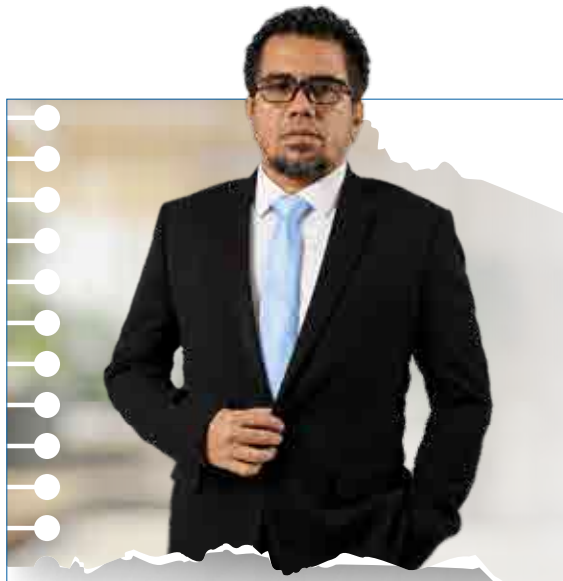
Kewarganegaraan | Nationality

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili | Domicile

Jakarta

Periode Jabatan Term of Office	5 Agustus 2025–sekarang August 5, 2025–present
Riwayat Penunjukan Appointment History	<i>Pertama kali menjabat Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan Keputusan Menteri BUMN, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri Nomor: SK-221/MBU/08/2025 – 010/A/HK/DO302/KPS/2025 – 12/SK/YKKP/VIII/2025 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota – Anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tanggal 5 Agustus 2025 yang dikuatkan dengan Akta No. 13 tanggal 27 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta.</i> <i>First appointed as Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the Resolution of the Minister of State-Owned Enterprises, the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero), and the Pusri Employees Welfare Foundation under No. SK-221/MBU/08/2025 – 010/A/HK/DO302/KPS/2025 – 12/SK/YKKP/VIII/2025 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dated August 5, 2025, as affirmed by Deed No. 13 dated December 27, 2021, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.</i>
Riwayat Pendidikan Education	- Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga (2022–2025) - Magister Ilmu Hukum Ketatanegaraan, Universitas Indonesia (2012–2014) - Ilmu Hukum Universitas Trisakti (1994–1999) - Sarjana Teknik Elektro Universitas Trisakti (1993–1999) - Doctor of Laws, Airlangga University (2022–2025) - Master of Constitutional Law, University of Indonesia (2012–2014) - Law, Trisakti University (1994–1999) - Bachelor of Electrical Engineering, Trisakti University (1993–1999)
Keahlian Expertise	Hukum Law
Pengalaman Kerja Work Experience	- Anggota Komisi XI DPR RI, A–216, Periode 2019 – 2024, Fraksi PDI Perjuangan - Anggota Komisi III DPR RI, A–216, Periode 2019 – 2024, Fraksi PDI Perjuangan - Anggota Badan Legislasi DPR RI, Periode 2019 – 2024 - Anggota Badan Sosialisasi MPR RI, Periode 2019 – 2024 - Pemilik Arteria Dahlan Lawyers (2009–sekarang) - Member of Commission XI of the Indonesian House of Representatives, A–216, 2019–2024, PDI-P Faction - Member of Commission III of the Indonesian House of Representatives, A–216, 2019–2024, PDI-P Faction - Member of the Legislative Body of the Indonesian House of Representatives, 2019–2024 - Member of the Socialization Body of the Indonesian People's Consultative Assembly, 2019–2024 - Owner of Arteria Dahlan Lawyers (2009–present)
Penugasan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris Assignments related to the Board of Commissioners	- Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2025–sekarang) - Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2025–present)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak Ada None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or with the Main and Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham PUSRI PUSRI Share Ownership	Tidak Ada None



TEDDY GUSNAIDI

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kelahiran | Date and Place of Birth
Manado, 13 Agustus 1976
Manado, August 13, 1976

Usia | Age
50 Tahun | Years old

Kewarganegaraan | Nationality
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Domisili | Domicile
Depok, Jawa Barat
Depok, West Java

Periode Jabatan Term of Office	14 April 2025–sekarang April 14, 2025–present
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat Komisaris Independen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Nomor 196 Tahun 2026 tanggal 13 April 2026, Nomor 017/AJHK/00302/KPS/2026 tanggal 14 April 2026 dan Nomor 24/Y/IV/KPS/2026 tanggal 14 April 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dikuatkan dengan Akta No. 04 tanggal 11 Mei 2026 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta <i>First appointed as Independent Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on Shareholders' Resolution No. 196 of 2026 dated April 13, 2026, No. 017/AJHK/00302/KPS/2026 dated April 14, 2026, and No. 24/Y/IV/KPS/2026 dated April 14, 2026 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, as affirmed by Deed No. 04 dated May 11, 2026, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.</i>
Riwayat Pendidikan Education	• Sarjana Hukum, Universitas Bung Karno Jakarta (2025) • Bachelor of Laws, Bung Karno University, Jakarta (2025)
Keahlian Expertise	Kebijakan Publik dan Hukum Tata Negara, Teknologi Informasi dan Sistem Informasi <i>Public Policy and Constitutional Law, Information Technology and Information Systems</i>
Pengalaman Kerja Work Experience	• Komisaris PT ABN Sejahtera Mandiri (2025–sekarang) • Direktur PT Hoekel Bangun Abadi (2018 - 2024) • Direktur PT Pasopati Media (2017 - 2020) • System Analyst PT Jamintara, Perusahaan IT (2002 - 2010) • Mailing Division Standart Chartered Bank (1997 - 2002) • Commissioner of PT ABN Sejahtera Mandiri (2025–Present) • Director of PT Hoekel Bangun Abadi (2018–2024) • Director of PT Pasopati Media (2017–2020) • System Analyst of PT Jamintara, IT Companys (2002–2010) • Mailing Division of Standard Chartered Bank (1997–2002)
Penugasan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris Assignments related to the Board of Commissioners	• Komisaris PT ABN Sejahtera Mandiri (2025 - sekarang) • Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2026 - sekarang) • Commissioner of PT ABN Sejahtera Mandiri (2025–Present) • Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2026–Present)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Komisaris PT ABN Sejahtera Mandiri (2025 - sekarang) <i>Commissioner of PT ABN Sejahtera Mandiri (2025–Present)</i>
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali. Rangkap jabatan di perusahaan swasta. Selain itu, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi. <i>Does not have any affiliated relationship with the Main/Controlling Shareholder. Holds a concurrent position in a private company. Other than that, does not have any affiliated relationship with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.</i>
Kepemilikan Saham PUSRI PUSRI Share Ownership	Tidak Ada <i>None</i>



MOHAMAD IDRIS LAENA

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kelahiran | Date and Place of Birth **Usia | Age**
Riau, 12 Januari 1961 61 Tahun | Years old
Riau, January 12, 1961

Kewarganegaraan | Nationality **Domisili | Domicile**
Warga Negara Indonesia Jakarta
Indonesian Citizen Jakarta

Periode Jabatan Term of Office	25 April 2026–sekarang April 25, 2026 – present
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat Komisaris Independen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Nomor 246 Tahun 2026 tanggal 24 April 2026, Nomor 018/A/HK/DO302/KPS/2026 tanggal 25 April 2026 dan Nomor 26/Y/IV/KPS/2026 tanggal 25 April 2026 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dikuatkan dengan Akta No. 07 tanggal 19 Mei 2026 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta First appointed as Independent Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on Shareholders' Resolution No. 246 of 2026 dated April 24, 2026, No. 018/A/HK/DO302/KPS/2026 dated April 25, 2026, and No. 26/Y/IV/KPS/2026 dated April 25, 2026 concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, as affirmed by Deed No. 07 dated May 19, 2026, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.
Riwayat Pendidikan Education	- Doktor Ilmu Hukum, Universitas Borobudur (2023) - Magister di Bidang Hukum, Universitas Borobudur (2018) - Sarjana Teknik & Perencanaan, Universitas Trisakti (1994) - Doctorate in Law, Borobudur University (2023) - Master's Degree in Law, Borobudur University (2018) - Bachelor's Degree in Engineering & Planning, Trisakti University (1994)
Keahlian Expertise	Hukum, Sosial, dan Manajemen Law, Social, and Management
Pengalaman Kerja Work Experience	- Anggota DPR/MPR RI (2004–2024) - Pendiri Alexandria Islamic School – Bekasi (2012–Sekarang) - CEO - Laenaco Group – Jakarta (2002–2004) - Komisaris Utama Laena Money Changer – Jakarta (2002–2004) - Direktur Laenaco Network SDN.BHD – Malaysia (2002 – 2004) - Direktur Laenaco Network PTE.LTD – Singapore (2002–2004) - Advisor Bestwell Hongkong Limited – Hongkong (2001–2002) - Komisaris Utama Laenaco Utama – Jakarta (2000–2004) - Advisor MEGABUANA Company – Jakarta 1997–2000) - Komisaris MLP – Jakarta (1996–2004) - Direktur Utama MBCM – Jakarta (1992–1996) - Member of the House of Representatives/People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (2004–2024) - Founder of Alexandria Islamic School, Bekasi (2012–Present) - CEO, Laenaco Group, Jakarta (2002–2004) - President Commissioner, Laena Money Changer, Jakarta (2002–2004) - Director, Laenaco Network SDN. BHD, Malaysia (2002–2004) - Director, Laenaco Network PTE. LTD, Singapore (2002–2004) - Advisor, Bestwell Hongkong Limited, Hong Kong (2001–2002) - President Commissioner, Laenaco Utama, Jakarta (2000–2004) - Advisor, MEGABUANA Company, Jakarta (1997–2000) - Commissioner, MLP, Jakarta (1996–2004) - President Director, MBCM (1992–1996)
Penugasan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris Assignments related to the Board of Commissioners	- Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2026–sekarang) - Komisaris Utama Laena Money Changer (2002–2004) - Komisaris Utama PT Laenaco Group (2002–2004) - Komisaris Utama PT Leanaco Utama (2000–2004) - Komisaris PT MLP (1996–2004) - Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2026–present) - President Commissioner of Laena Money Changer (2002–2004) - President Commissioner of PT Laenaco Group (2002–2004) - President Commissioner of PT Leanaco Utama (2000–2004) - Commissioner of PT MLP (1996–2004)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan Does not hold concurrent positions.
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or with the Main and Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham PUSRI PUSRI Share Ownership	Tidak Ada None

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROFILE

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Atas dasar kebijakan penyegaran organisasi, di tahun 2025 Pemegang Saham memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Anggota Direksi melalui Pernyataan Keputusan Menteri BUMN, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri (YKKP) selaku Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor : SK-220/MBU/08/2025 - 011/A/HK/DO302/KPS/2025 - 11/SK/YKKP/VIII/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tertanggal 5 Agustus 2025, dengan keputusannya adalah:

1. Menyetujui pengunduran diri Sdr Daconi Khotob terhitung sejak 30 Juni 2025.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr Filius Yuliandi sebagai Direktur Operasi dan Produksi maupun sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama.
3. Memberhentikan Sdr Saifullah Lasindrang sebagai Direktur Keuangan dan Umum sekaligus Plt Direktur Manajemen Risiko.
4. Mengangkat Sdr Maryono sebagai Direktur Utama, Sdr Sholikin sebagai Direktur Operasi dan Produksi, Sdr R. Eric J. Rachman sebagai Direktur Keuangan dan Umum serta Sdr Panji Winanteya Ruky sebagai Direktur Manajemen Risiko.

Sejak 31 Desember 2025 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Direksi Perusahaan. Sehingga profil Direksi Perusahaan sejak akhir tahun pelaporan 2025 sampai saat ini adalah sebagai berikut.

CHANGES TO THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND REASONS FOR THE CHANGES

Based on the organizational refreshment policy, in 2025 the Shareholders decided to change the composition of the Board of Directors through the Statement of Resolution of the Minister of State-Owned Enterprises, the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero), and the Pusri Employees Welfare Foundation (YKKP) as the Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK-220/MBU/08/2025 - 011/A/HK/DO302/KPS/2025 - 11/SK/YKKP/VIII/2025 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dated August 5, 2025, with the following resolutions:

1. Approved the resignation of Mr. Daconi Khotob, effective June 30, 2025.
2. Honorably discharged Mr. Filius Yuliandi from his position as Director of Operations and Production as well as from his role as Acting President Director.
3. Discharged Mr. Saifullah Lasindrang from his position as Director of Finance and General Affairs as well as Acting Director of Risk Management.
4. Appointed Mr. Maryono as President Director, Mr. Sholikin as Director of Operations and Production, Mr. R. Eric J. Rachman as Director of Finance and General Affairs, and Mr. Panji Winanteya Ruky as Director of Risk Management.

From December 31, 2025 until the signing of this Annual Report, there have been no changes to the composition and membership of the Company's Board of Directors. Accordingly, the profiles of the Company's Board of Directors from the end of the 2025 reporting year to the present are as follows.



Maryono

Direktur Utama
President Director

Kelahiran | Date and Place of Birth

Blora, 19 Januari 1972

Blora, January 19, 1972

Usia | Age

54 Tahun | Years old

Kewarganegaraan | Nationality

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili | Domicile

Palembang, Sumatera Selatan

Palembang, South Sumatra

Periode Jabatan Term of Office	5 Agustus 2025–sekarang August 5, 2025–present
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri selaku Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor: SK-220/MBU/08/2025, Nomor: 011/A/HK/DO302/KPS/2025, Nomor: 11/SK/YKKP/VIII/2025 yang dikuatkan oleh Akta Nomor: 07 tanggal 22 Agustus 2025 yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta. He first served as President Director of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises, President Director of PT Pupuk Indonesia, and the PT Pusri Employee Welfare Foundation as Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Number: SK-220/MBU/08/2025, Number: 011/A/HK/DO302/KPS/2025, Number: 11/SK/YKKP/VIII/2025, which was confirmed by Deed Number: 07 dated August 22, 2025, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.
Riwayat Pendidikan Education	• Magister Management dari STIE Prasetya Mulya Business School Jakarta pada tahun 2015. • Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1997. • Master of Management from STIE Prasetya Mulya Business School Jakarta in 2015. • Bachelor of Chemical Engineering from Gadjah Mada University in 1997.
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja - (2025 - sekarang) • Direktur Utama PT Pupuk Kujang - (2023 - 2025) • Direktur Utama PT Sang Hyang Seri - (2021 - 2023) • Direktur Utama PT Pertani (Persero) - (2020 - 2021) • Direktur Produksi PT Pupuk Kujang - (2016 - 2020) • President Director of PT Pupuk Sriwidjaja (2025–present) • President Director of PT Pupuk Kujang (2023–2025) • President Director of PT Sang Hyang Seri (2021–2023) • President Director of PT Pertani (Persero) (2020–2021) • Director of Production of PT Pupuk Kujang (2016–2020)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak Memiliki Rangkap Jabatan None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali Has no affiliated relationship with other Board of Commissioners, Board of Directors, or with Major and Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham PUSRI PUSRI Share Ownership	Kepemilikan Saham PUSRI Tidak ada. PUSRI juga tidak menerbitkan saham masyarakat, dan PUSRI tidak memiliki program kepemilikan saham oleh Manajemen Has no PUSRI Share Ownership. PUSRI also does not issue public shares, and PUSRI does not have a Management share ownership program.



Sholikin

Direktur Operasi dan Produksi
Operation and Production Director

Kelahiran | Date and Place of Birth

Pati, 7 November 1974

Pati, November 7, 1974

Usia | Age

52 Tahun | Years old

Kewarganegaraan | Nationality

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili | Domicile

Palembang, Sumatera Selatan

Palembang, South Sumatra

Periode Jabatan Term of Office	5 Agustus 2025–sekarang August 5, 2025–present
Riwayat Penunjukan Appointment History	Pertama kali menjabat sebagai Direktur Operasi dan Produksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri selaku Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor: SK-220/MBU/O8/2025, Nomor: 011/A/HK/DO302/KPS/2025, Nomor: 11/SK/YKKP/VIII/2025 yang dikuatkan oleh Akta Nomor: 07 tanggal 22 Agustus 2025 yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta. He first served as Director of Operations and Production at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on Decrees of the Minister of State-Owned Enterprises, President Director of PT Pupuk Indonesia, and the PT Pusri Employee Welfare Foundation as Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Number: SK-220/MBU/O8/2025, Number: 011/A/HK/DO302/KPS/2025, Number: 11/SK/YKKP/VIII/2025, as confirmed by Deed Number: 07 dated August 22, 2025, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.
Riwayat Pendidikan Education	• Sarjana Teknik Kimia Universitas Diponegoro Semarang tahun 1998 • Bachelor of Chemical Engineering, Diponegoro University, Semarang, 1998
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Operasi dan Produksi PT Pusri Palembang (2025 – Sekarang) • SPM Proyek P-III B PT Pusri Palembang (2022 – 2025) • General Manager Operasi PT Pusri Palembang (2019 – 2022) • Director of Operations and Production at PT Pusri Palembang (2025 – Present) • SPM for the P-III B Project at PT Pusri Palembang (2022 – 2025) • General Manager of Operations at PT Pusri Palembang (2019 – 2022)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak Memiliki Rangkap Jabatan None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali Has no affiliated relationship with other Board of Commissioners, Board of Directors, or with Major and Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham PUSRI PUSRI Share Ownership	Kepemilikan Saham PUSRI Tidak ada. PUSRI juga tidak menerbitkan saham masyarakat, dan PUSRI tidak memiliki program kepemilikan saham oleh Manajemen Has no PUSRI Share Ownership. PUSRI also does not issue public shares, and PUSRI does not have a Management share ownership program.



R. Eric J. Rachman

Direktur Keuangan dan Umum
Finance and General Director

Kelahiran | Date and Place of Birth

Bandung, 24 Juli 1979

Bandung, July 24, 1979

Usia | Age

47 Tahun | Years old

Kewarganegaraan | Nationality

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili | Domicile

Palembang, Sumatera Selatan

Palembang, South Sumatra

Periode Jabatan Term of Office	5 Agustus 2025–sekarang August 5, 2025–present
Riwayat Penunjukan Appointment History	<i>Pertama kali menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri selaku Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor: SK-220/MBU/08/2025, Nomor: 011/A/HK/D0302/KPS/2025, Nomor: 11/SK/YKKP/VIII/2025 yang dikuatkan oleh Akta Nomor: 07 tanggal 22 Agustus 2025 yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta.</i> <i>He first served as Director of Finance and General Affairs of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises, President Director of PT Pupuk Indonesia, and the PT Pusri Employee Welfare Foundation as Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Number: SK-220/MBU/08/2025, Number: 011/A/HK/D0302/KPS/2025, Number: 11/SK/YKKP/VIII/2025, as confirmed by Deed Number: 07 dated August 22, 2025, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.</i>
Riwayat Pendidikan Education	- S1 Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (1998 – 2003) - Bachelor of Economics, Faculty of Padjadjaran University (1998 – 2003)
Pengalaman Kerja Work Experience	- Direktur Keuangan & Umum PT Pusri Palembang (2025 – Sekarang) - Kepala SPI PT Pupuk Indonesia (Persero) (2023 – 2025) - Director of Finance & General Affairs at PT Pusri Palembang (2025 – Present) - Head of Internal Audit at PT Pupuk Indonesia (Persero) (2023 – 2025)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak Memiliki Rangkap Jabatan None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali <i>Has no affiliated relationship with other Board of Commissioners, Board of Directors, or with Major and Controlling Shareholders</i>
Kepemilikan Saham PUSRI PUSRI Share Ownership	Kepemilikan Saham PUSRI Tidak ada. PUSRI juga tidak menerbitkan saham masyarakat, dan PUSRI tidak memiliki program kepemilikan saham oleh Manajemen <i>Has no PUSRI Share Ownership. PUSRI also does not issue public shares, and PUSRI does not have a Management share ownership program.</i>



Panji Winanteya Ruky

Direktur Manajemen Risiko
Risk Management Director

Kelahiran | Date and Place of Birth

Bandung, 3 Agustus 1976

Bandung, August 3, 1976

Usia | Age

50 Tahun | Years old

Kewarganegaraan | Nationality

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili | Domicile

Palembang, Sumatera Selatan

Palembang, South Sumatra

Periode Jabatan Term of Office	5 Agustus 2025–sekarang August 5, 2025–present
Riwayat Penunjukan Appointment History	<i>Pertama kali menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri selaku Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor: SK-220/MBU/08/2025, Nomor: 011/A/HK/DO302/KPS/2025, Nomor: 11/SK/YKKP/VIII/2025 yang dikuatkan oleh Akta Nomor: 07 tanggal 22 Agustus 2025 yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta.</i> <i>He first served as Director of Finance and General Affairs of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on Decrees of the Minister of State-Owned Enterprises, President Director of PT Pupuk Indonesia, and the PT Pusri Employee Welfare Foundation as Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Number: SK-220/MBU/08/2025, Number: 011/A/HK/DO302/KPS/2025, Number: 11/SK/YKKP/VIII/2025, as confirmed by Deed Number: 07 dated August 22, 2025, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.</i>
Riwayat Pendidikan Education	• S2 Administrasi Publik Lee Kuan Yew School of Public Policy (2015) • S2 Administrasi Bisnis Institute for Housing and Urban Development Studies (HIS) of Erasmus University Rotterdam (2002) • S1 Ekonomi, Manajemen Keuangan Universitas Indonesia (1998) • Master of Public Administration, Lee Kuan Yew School of Public Policy (2015) • Master of Business Administration, Institute for Housing and Urban Development Studies (HIS) of Erasmus University Rotterdam (2002) • Bachelor of Economics and Financial Management, University of Indonesia (1998)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Manajemen Risiko PT Pusri Palembang (2025 – sekarang) • Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia Persero (2020 – 2025) • Direktur Kemitraan, Komunikasi & Pengembangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2020) • Director of Risk Management at PT Pusri Palembang (2025–present) • Director of Business Transformation at PT Pupuk Indonesia Persero (2020–2025) • Director of Partnership, Communication & Development at the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia (2020)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak Memiliki Rangkap Jabatan None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali <i>Has no affiliated relationship with other Board of Commissioners, Board of Directors, or with Major and Controlling Shareholders</i>
Kepemilikan Saham PUSRI PUSRI Share Ownership	Kepemilikan Saham PUSRI Tidak ada. PUSRI juga tidak menerbitkan saham masyarakat, dan PUSRI tidak memiliki program kepemilikan saham oleh Manajemen <i>Has no PUSRI Share Ownership. PUSRI also does not issue public shares, and PUSRI does not have a Management share ownership program.</i>

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, AUDIT INTERNAL, DAN MANAJEMEN RISIKO

EDUCATION AND/OR TRAINING FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS,
BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, INTERNAL
AUDIT, AND RISK MANAGEMENT

Kebijakan tentang pendidikan dan pelatihan Direksi dan Dewan Komisaris diatur melalui Surat Keputusan Direksi No.SK/DIR/201/2015 tanggal 4 Juni 2015 tentang Pedoman Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (*Competency Based Training*) pasal 6.1a terkait pendidikan dan pelatihan untuk bukan karyawan. Sementara itu, untuk pelatihan dan pendidikan bagi SVP Satuan Pengawasan Intern dan Sekretaris Perusahaan diatur melalui Surat Keputusan yang sama, pasal 3 tentang pendidikan untuk *talent* dan karyawan.

Policies regarding education and training for the Board of Directors and the Board of Commissioners are regulated through the Board of Directors Decree No. SK/DIR/201/2015 dated June 4, 2015 concerning the Guidelines for the Competency Based Training System (CBT), Article 6.1a regarding education and training for non-employees. Meanwhile, education and training for the SVP of the Internal Audit Unit and the Corporate Secretary Secretariat are regulated through the same Decree, Article 3 regarding education for talent and employees.

Perusahaan bertanggung jawab penuh atas pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan SDM, termasuk dalam hal penganggaran dan pembiayaan. Seluruh karyawan, tidak terkecuali Direksi, Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Kepala Satuan Pengawasan Intern, dan karyawan lainnya yang mendapatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan, wajib menyusun laporan dan membagi pengetahuan kepada insan PUSRI lainnya.

The Company is fully responsible for education and training in Human Capital management, including budgeting and financing. All employees, including the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Corporate Secretary, the Head of the Internal Audit Unit, and other employees who receive education and training facilities, are required to prepare reports and share knowledge with other PUSRI personnel.

DAFTAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

COMPETENCY DEVELOPMENT LIST OF BOARD OF COMMISSIONERS

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training and Education	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	Siti Nurizka Puteri Jaya	Komisaris Utama President Commissioner	Pelatihan Training	Onboarding Commissioner Program Angkatan 9 Tahun 2025 Commissioner Onboarding Program Batch 9, 2025	26-27 Februari 2025 February 26- 27, 2025	Kementerian BUMN SOEs Ministry
			Pelatihan Training	IFA 2025 Annual Conference Monaco	12-14 Mei 2025 May 12-14, 2025	International Fertilizer Association (IFA)
			Pelatihan Training	Risk Management Webinar "Dive into Sustainability Disclosure"	11 Juni 2025 June 11, 2025	Bank Negara Indonesia - Forum Manajemen Risiko BUMN Bank Negara Indonesia - State- Owned Enterprises Risk Management Forum
			Pelatihan Training	Seminar & Masterclass GRC Summit	21-22 Agustus 2025 August 21-22, 2025	CRMS Indonesia



No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training and Education	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
2	Bambang Supriyambodo *	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan Training	Developing Audit Observation Tahun 2025 untuk Dewan Komisaris Developing Audit Observations for the Board of Commissioners in 2025	5-6 Agustus 2025 August 5-6, 2025	The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia
			Pelatihan Training	Pelatihan & Sertifikasi Governance, Risk and Compliance (GRC) Professional Training & Certification Governance, Risk, and Compliance (GRC) Professional	11-13 Desember 2025 December 11-13, 2025	WAY ACADEMY
			Pelatihan Training	Pelatihan Artificial Intelligence (AI) for Business Acceleration (Strategic Level) Training Program Training for Artificial Intelligence (AI) for Business Acceleration (Strategic Level) Training Program	4 Desember 2025 December 4, 2025	PT KUNCIE PINTAR NUSANTARA
			Pelatihan Training	Risk Management Webinar "Dive into Sustainability Disclosure"	11 Juni 2025 June 11, 2025	Bank Negara Indonesia - Forum Manajemen Risiko BUMN Bank Negara Indonesia - State- Owned Enterprises Risk Management Forum
			Pelatihan Training	Seminar & Masterclass GRC Summit	21-22 Agustus 2025 August 21-22, 2025	CRMS Indonesia
			Pelatihan Training	Developing Audit Observation Tahun 2025 untuk Dewan Komisaris Developing Audit Observations for the Board of Commissioners in 2025	5-6 Agustus 2025 August 5-6, 2025	The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia
			Pelatihan Training	Pelatihan Artificial Intelligence (AI) for Business Acceleration (Strategic Level) Training Program Artificial Intelligence Training (AI) for Business Acceleration (Strategic Level) Training Program	4 Desember 2025 December 4, 2025	PT KUNCIE PINTAR NUSANTARA

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training and Education	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
3	Sally Salamah	Komisaris	Pelatihan Training	Risk Management Webinar "Dive into Sustainability Disclosure"	11 Juni 2025 June 11, 2025	Bank Negara Indonesia - Forum Manajemen Risiko BUMN Bank Negara Indonesia - State-Owned Enterprises Risk Management Forum
			Pelatihan Training	Seminar & Masterclass GRC Summit	21-22 Agustus 2025 August 21-22, 2025	CRMS Indonesia
			Pelatihan Training	Developing Audit Observation Tahun 2025 untuk Dewan Komisaris Developing Audit Observations for the Board of Commissioners in 2025	5-6 Agustus 2025 August 5-6, 2025	The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia
			Pelatihan Training	Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	29-30 Oktober 2025 October 29-30, 2025	CRMS Indonesia
			Pelatihan Training	Pelatihan & Sertifikasi Governance, Risk and Compliance (GRC) Professional Governance, Risk, and Compliance (GRC) Professional Training & Certification	11-13 Desember 2025 December 11-13, 2025	WAY ACADEMY
4	Fadjar Judisiawan	Komisaris Commissioner	Pelatihan Training	Risk Management Webinar "Dive into Sustainability Disclosure"	11 Juni 2025 June 11, 2025	Bank Negara Indonesia - Forum Manajemen Risiko BUMN Bank Negara Indonesia - State-Owned Enterprises Risk Management Forum
			Pelatihan Training	Seminar & Masterclass GRC Summit	21-22 Agustus 2025 August 21-22, 2025	CRMS Indonesia
			Pelatihan Training	Developing Audit Observation Tahun 2025 untuk Dewan Komisaris Developing Audit Observations for the Board of Commissioners in 2025	5-6 Agustus 2025 August 5-6, 2025	The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia
			Pelatihan Training	Pelatihan Artificial Intelligence (AI) for Business Acceleration (Strategic Level) Training Program Artificial Intelligence Training (AI) for Business Acceleration (Strategic Level) Training Program	4 Desember 2025 December 4, 2025	PT KUNCIE PINTAR NUSANTARA



No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training and Education	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
5	Ali Jamil **	Komisaris Commissioner	Pelatihan Training	Risk Management Webinar "Dive into Sustainability Disclosure"	11 Juni 2025 June 11, 2025	Bank Negara Indonesia - Forum Manajemen Risiko BUMN Bank Negara Indonesia - State-Owned Enterprises Risk Management Forum
6	Arteria Dahlan ***	Komisaris Commissioner	Pelatihan Training	Seminar & Masterclass GRC Summit	21-22 Agustus 2025 August 21-22, 2025	CRMS Indonesia
			Pelatihan Training	Pelatihan & Sertifikasi Governance, Risk and Compliance (GRC) Professional Governance, Risk and Compliance (GRC) Professional Training & Certification	11-13 Desember 2025 December 11-13, 2025	WAY Academy
			Pelatihan Training	Pelatihan Artificial Intelligence (AI) for Business Acceleration (Strategic Level) Training Program Artificial Intelligence (AI) for Business Acceleration (Strategic Level) Training Program	04 Desember 2025 December 4, 2025	PT Kunci Pintar Nusantara
7	Muhammad Syakir ***	Komisaris Commissioner	Pelatihan Training	Seminar & Masterclass GRC Summit	21-22 Agustus 2025 August 21-22, 2025	CRMS Indonesia
			Pelatihan Training	Pelatihan Artificial Intelligence (AI) for Business Acceleration (Strategic Level) Training Program Artificial Intelligence (AI) for Business Acceleration (Strategic Level) Training Program	04 Desember 2025 December 4, 2025	PT Kunci Pintar Nusantara

(*) Masa tugas berakhir 14 April 2026
(**) Masa tugas berakhir 5 Agustus 2025
(***) Masa tugas sejak 5 Agustus 2025
(*) Term of office ended on April 14, 2026.
(**) Term of office ended on August 5, 2025.
(***) Term of office commenced on August 5, 2025.

**DAFTAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI
DIREKSI**
**COMPETENCY DEVELOPMENT LIST OF
BOARD OF DIRECTORS**

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training and Education	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	Daconi Khotob*	Direktur Utama President Director	Pelatihan Training	ARGUS Fertilizer Asia Conference 2025 Bali	22-24 April 2025 April 22-24, 2025	Argus Media Singaporet Group Pte Ltd
			Pelatihan Training	IFA 2025 Annual Conference Monaco	12-14 Mei 2025 May 12-14, 2025	International Fertilizer Association (IFA)
			Pelatihan Training	Risk Management Webinar "Dive into Sustainability Disclosure"	11 Juni 2025 June 11, 2025	Bank Negara Indonesia - Forum Manajemen Risiko BUMN Bank Negara Indonesia - State- Owned Enterprises Risk Management Forum
2	Saifullah Lasindrang**	Direktur Keuangan dan Umum merangkap Plt Direktur Manajemen Risiko Finance & General Director concurrently serving as Risk Management Director	Pelatihan Training	Risk Management Webinar "Dive into Sustainability Disclosure"	11 Juni 2025 June 11, 2025	Bank Negara Indonesia - Forum Manajemen Risiko BUMN Bank Negara Indonesia - State- Owned Enterprises Risk Management Forum
3	Fillius Yuliandi**	Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director	Pelatihan Training	Risk Management Webinar "Dive into Sustainability Disclosure"	11 Juni 2025 June 11, 2025	Bank Negara Indonesia - Forum Manajemen Risiko BUMN Bank Negara Indonesia - State- Owned Enterprises Risk Management Forum
4	R. Eric J Rachman	Direktur Keuangan & Umum Finance & General Affairs Director	Pelatihan Training	Pelatihan Pupuk Indonesia Group Strategic Risk Management & Value Creation Pupuk Indonesia Group Strategic Risk Management & Value Creation Training	12-13 September 2025 September 12-13, 2025	INSEAD
			Pelatihan Training	FHCI Connect Expert Series 6 "Workforce Foresight: Winning Practice for Strategic Workforce Planning with AI"	18 Desember 2025 December 18, 2025	Forum Human Capital Indonesia



No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training and Education	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
5	Sholikin	Direktur Operasi & Produksi Operations & Production Director	Pelatihan Training	Pre-Class Chief Business Development Executive Program (CBDO) Tahun 2025 Pre-Class Chief Business Development Executive Program (CBDO) 2025	13 Agustus 2025 August 13, 2025	INSEAD
			Pelatihan Training	Pelatihan Pupuk Indonesia Group Strategic Risk Management & Value Creation Pupuk Indonesia Group Strategic Risk Management & Value Creation Training	12-13 September 2025 September 12-13, 2025	INSEAD
			Pelatihan Training	Pelatihan & Sertifikasi Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP) Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP) Training & Certification	16-19 September 2025 September 16-19, 2025	CRMS Indonesia
6	Panji Winanteya Ruky	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	Pelatihan Training	Seminar & Masterclass GRC Summit	21-22 Agustus 2025 August 21-22, 2025	CRMS Indonesia
			Pelatihan Training	Pelatihan Pupuk Indonesia Group Strategic Risk Management & Value Creation	12-13 September 2025 September 12-13, 2025	INSEAD

(*) Masa tugas berakhir 30 Juni 2025.

(**) Masa tugas berakhir 5 Agustus 2025.

(*) Term of office ends on 30 June 2025.

(**) Term of office ends on 5 August 2025.

DAFTAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

DAFTAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training and Education	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	Siti Fauziah	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of the Board of Commissioners	Pelatihan Training	Pelatihan Artificial Intelligence (AI) for Business Acceleration (Strategic Level) Training Program Artificial Intelligence (AI) Training Program for Business Acceleration (Strategic Level)	04 Desember 2025 December 04, 2025	PT Kuncie Pintar Nusantara

DAFTAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

LIST OF COMPETENCY DEVELOPMENT ACTIVITIES OF THE NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

No	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	Siti Nurizka Puteri Jaya	Ketua Komite Nominasi & Remunerasi Chair of the Nomination & Remuneration Committee		Sesuai Daftar Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris In accordance with the Board of Commissioners Competency Development List		
2	Bambang Supriyambodo*	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Member of the Nomination & Remuneration Committee		Sesuai Daftar Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris In accordance with the Board of Commissioners Competency Development List		
3	Sally Salamah	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Member of the Nomination & Remuneration Committee		Sesuai Daftar Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris In accordance with the Board of Commissioners Competency Development List		
4	Fadjar Judisiawan	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Member of the Nomination & Remuneration Committee		Sesuai Daftar Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris In accordance with the Board of Commissioners Competency Development List		
5	Arteria Dahlan	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Member of the Nomination & Remuneration Committee		Sesuai Daftar Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris In accordance with the Board of Commissioners Competency Development List		
6	Muhammad Syakir	Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Member of the Nomination & Remuneration Committee		Sesuai Daftar Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris In accordance with the Board of Commissioners Competency Development List		

keterangan | Note
(*) Masa tugas berakhir 14 April 2026
(*) Term of office ended on April 14, 2026.

DAFTAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

LIST OF COMPETENCY DEVELOPMENT OF AUDIT COMMITTEE

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training and Education	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	Sally Salamah	Ketua Komite Audit Chair of the Audit Committee	Pelatihan Training	Sesuai Daftar Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris In accordance with the Board of Commissioners Competency Development List		
			Pelatihan Training			
			Pelatihan Training			
			Pelatihan Training			
			Pelatihan Training			



No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training and Education	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
2	Eddie Sulistiady	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Pelatihan Training	Risk Management Webinar "Dive into Sustainability Disclosure"	11 Juni 2025 June 11, 2025	Bank Negara Indonesia - Forum Manajemen Risiko BUMN Bank Negara Indonesia - State-Owned Enterprises Risk Management Forum
			Pelatihan Training	Seminar & Masterclass GRC Summit	21-22 Agustus 2025 August 21- 22, 2025	CRMS Indonesia
			Pelatihan Training	Developing Audit Observation Tahun 2025 untuk Dewan Komisaris Developing Audit Observations for the Board of Commissioners in 2025	5-6 Agustus 2025 August 5-6, 2025	The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia
			Sertifikasi Certification	Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	29-30 Oktober 2025 October 29- 30, 2025	CRMS Indonesia
			Pelatihan Training	Pelatihan Artificial Intelligence (AI) for Business Acceleration (Strategic Level) Training Program Artificial Intelligence Training (AI) for Business Acceleration (Strategic Level) Training Program	4 Desember 2025 December 4, 2025	PT KUNCIE PINTAR NUSANTARA
3	Bagas Putranto	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Pelatihan Training	Risk Management Webinar "Dive into Sustainability Disclosure" Developing Audit Observations for the Board of Commissioners in 2025	11 Juni 2025 June 11, 2025	Bank Negara Indonesia - Forum Manajemen Risiko BUMN Bank Negara Indonesia - State-Owned Enterprises Risk Management Forum
			Pelatihan Training	Developing Audit Observation Tahun 2025 untuk Dewan Komisaris	5-6 Agustus 2025 August 5-6, 2025	The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia
			Sertifikasi Certification	Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	29-30 Oktober 2025 October 29- 30, 2025	CRMS Indonesia

**DAFTAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI
KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN
RISIKO (IMR)**

**COMPETENCY DEVELOPMENT LIST OF
INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT
(IMR) COMMITTEE**

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training and Education	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	Bambang Supriyambodo	Ketua Komite Investasi & Manajemen Risiko	Sesuai Daftar Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris In accordance with the Board of Commissioners Competency Development List			
2	Ida Zuraida	Anggota Komite IMR Member of IMR Committee	Pelatihan Training	Risk Management Webinar "Dive into Sustainability Disclosure"	11 Juni 2025 June 11, 2025	Bank Negara Indonesia - Forum Manajemen Risiko BUMN Bank Negara Indonesia - State-Owned Enterprises Risk Management Forum
			Pelatihan Training	Seminar & Masterclass GRC Summit	21-22 Agustus 2025 August 21-22, 2025	CRMS Indonesia
			Pelatihan Training	Developing Audit Observation Tahun 2025 untuk Dewan Komisaris Developing Audit Observations for the Board of Commissioners in 2025	5-6 Agustus 2025 August 5-6, 2025	The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia
			Sertifikasi Certification	Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	29-30 Oktober 2025 October 29-30, 2025	CRMS Indonesia
3	Sara Dewi	Anggota Komite IMR Member of IMR Committee	Pelatihan Training	Seminar & Masterclass GRC Summit	21-22 Agustus 2025 August 21-22, 2025	CRMS Indonesia
			Sertifikasi Certification	Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	29-30 Oktober 2025 October 29-30, 2025	CRMS Indonesia

DAFTAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN, SPI DAN TATA KELOLA & MANAJEMEN RISIKO

COMPETENCY DEVELOPMENT LIST OF CORPORATE SECRETARY, SPI, AND GOVERNANCE & RISK MANAGEMENT

No.	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Judul Pelatihan Name of Training
1	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Pelatihan Training	Workshop Raker RKAP 2025
		Pelatihan Training	Workshop Penyusunan Grand Design & Roadmap ESG for Executive Workshop Drafting for Grand Design & Roadmap ESG for Executive
		Pelatihan Training	Program Leaders Short Course Batch 1
		Pelatihan Training	Pelatihan Counseling BOD-1 Pupuk Indonesia Group Counseling BOD-1 Pupuk Indonesia Group Training
		Pelatihan Training	Pelatihan Certification of Business Management Certification of Business Management Training
		Pelatihan Training	Pelatihan Risk Management Essentials Risk Management Essentials Training
2	SVP SPI	Pelatihan Training	Workshop Raker RKAP 2025 2025 Work Plan and Budget Working Meeting Workshop
		Pelatihan Training	Workshop Penyusunan Grand Design & Roadmap ESG for Executive Workshop Drafting for Grand Design & Roadmap ESG for Executive
		Pelatihan Training	Workshop Innovation Strategy Alignment for BoD-1 & BoD-2
		Pelatihan Training	Program Leaders Short Course Batch 3
		Pelatihan Training	Risk Management Webinar "Dive into Sustainability Disclosure"
		Sertifikasi Certification	Pelatihan & Sertifikasi Certified Audit Committee Professional (CACP) Batch 59 Training and Certification for Certified Audit Committee Professional (CACP) Batch 59
		Pelatihan Training	Pelatihan Counseling BOD-1 Pupuk Indonesia Group ounseling BOD-1 Pupuk Indonesia Group Training
		Pelatihan Training	Wisuda "Certification in Audit Committee Practices (CACP)" Batch 59 dan Seminar "Driving Enterprise Value Through Strategic Risk Oversight: The Critical Role Of Oversight Boards and Internal Audit In Strengthening Risk Governance and Portfolio Management" Graduation of "Certification in Audit Committee Practices (CACP)" Batch 59 and Seminar "Driving Enterprise Value Through Strategic Risk and Oversight: the Critical Role of Oversight Boards and Internal Audit in Strengthening Risk Governance and Portfolio Management"
		Pelatihan Training	GRC Summit Seminar & Masterclass "Resilience to Sustainability: Leading Through GRC in the Post-Digital Era"
		Pelatihan Training	Workshop Environmental, Social, and Governance (ESG) Tim Evaluasi ESG PT Pusri Palembang Environmental, Social, and Governance (ESG) Workshop by the ESG Evaluation Team PT Pusri Palembang
		Pelatihan Training	Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Corruption Crime Handling Training
		Pelatihan Training	Pelatihan Certification of Business Management Certification of Business Management Training

No.	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Judul Pelatihan Name of Training
3	SVP Tata Kelola & Manajemen Risiko Governance & Risk Management SVP	Pelatihan Training	Seminar "Peran Dewan Komisaris dalam Aspek Hukum Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perusahaan" dan Wisuda "Certification in Audit Committee Practices (CACP)" Seminar "The Role of the Board of Commissioners in the Legal Aspects of Financial Statements and Annual Reports" and Graduation Ceremony "Certification in Audit Committee Practices (CACP)"
		Pelatihan Training	Workshop & Seminar Business Judgement Rule (BJR) & ESGRC UU BUMN 2025
		Pelatihan Training	Workshop Innovation Strategy Alignment for BoD-1 & BoD-2
		Pelatihan Training	New Corporate Leadership Program 2025 : Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long-term Value Creation
		Pelatihan Training	Program Leaders Short Course Batch 2
		Pelatihan Training	Risk Management Webinar "Dive into Sustainability Disclosure"
		Pelatihan Training	Pelatihan Counseling BOD-1 Pupuk Indonesia Group Counseling BOD-1 Pupuk Indonesia Group Training
		Pelatihan Training	Seminar "Driving Enterprise Value Through Strategic Risk Oversight: The Critical Role Of Oversight Boards and Internal Audit In Strengthening Risk Governance and Portfolio Management"
		Pelatihan Training	GRC Summit Seminar & Masterclass "Resilience to Sustainability: Leading Through GRC in The Post-Digital Era"
		Pelatihan Training	Pelatihan Pupuk Indonesia Group Strategic Risk Management & Value Creation Training of Pupuk Indonesia Group Strategic Risk Management & Value Creation
		Pelatihan Training	Pelatihan Certification of Business Management Training Of Certification of Business Management
		Pelatihan Training	Risk Beyond International Conference on Enterprise Risk Management 2025

PROFIL KARYAWAN

EMPLOYEE PROFILE

Hingga 31 Desember 2025, jumlah karyawan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tercatat sebanyak 1.783 karyawan, turun 1% dari jumlah tahun lalu yang sebanyak 1.790 karyawan.

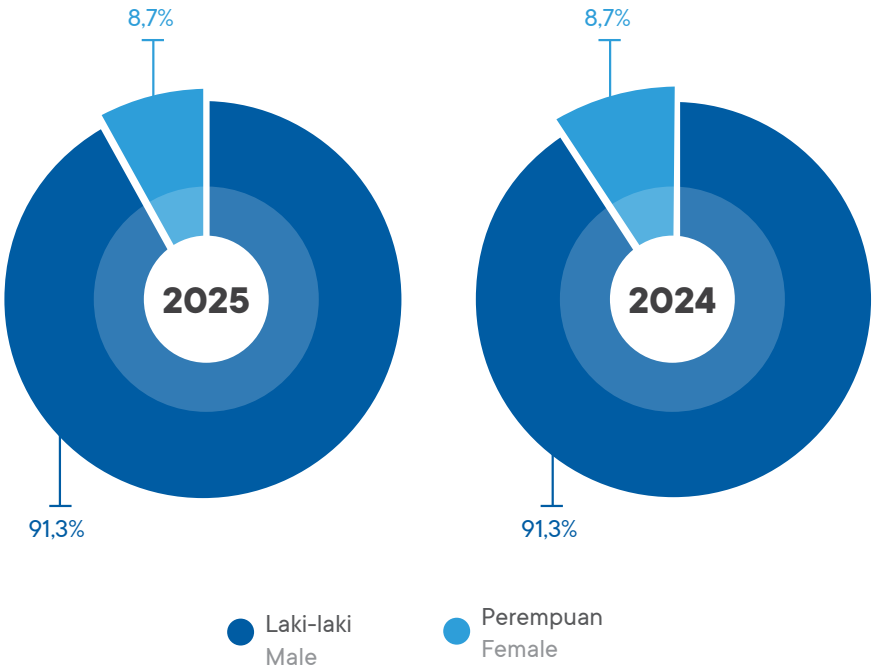
Adapun rincian demografi karyawan berdasarkan gender, level organisasi/jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status kepegawaian diuraikan dalam tabel dan grafis di bawah ini.

As of December 31, 2025, the total number of employees of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang was recorded at 1.783 employees, a decrease of 1% compared to the previous year's total of 1,790 employees.

The details of employee demographics by gender, organizational level/position, age, educational attainment, and employment status are presented in the tables and charts below.

Demografi Karyawan berdasarkan Gender
Employee Demographics by Gender

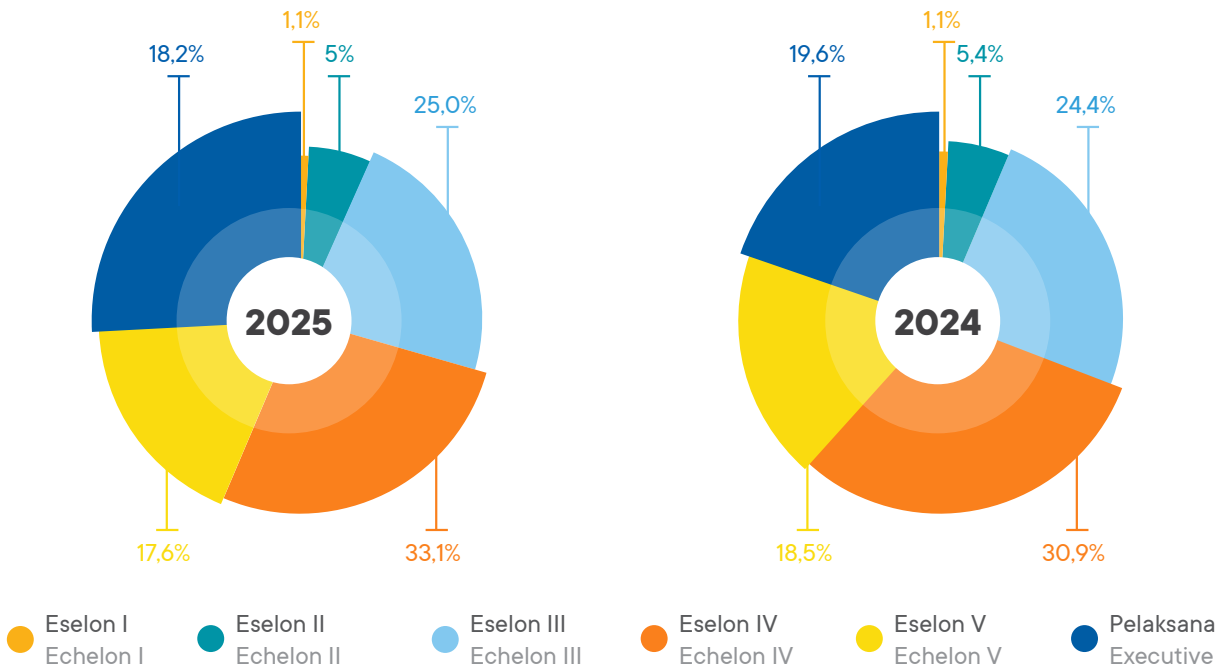
Gender	2025		2024		Pertumbuhan Growth	
	Orang People	% Komposisi Composition	Orang People	% Komposisi Composition	Orang People	%
Laki-laki Male	1.628	91,3%	1.634	91,3%	(6)	(0,4%)
Perempuan Female	155	8,7%	156	8,7%	(1)	(0,6%)
Jumlah Total	1.783	100,0%	1.790	100,0%	(7)	(0,4%)



Demografi Karyawan berdasarkan Level Organisasi / Tingkat Jabatan

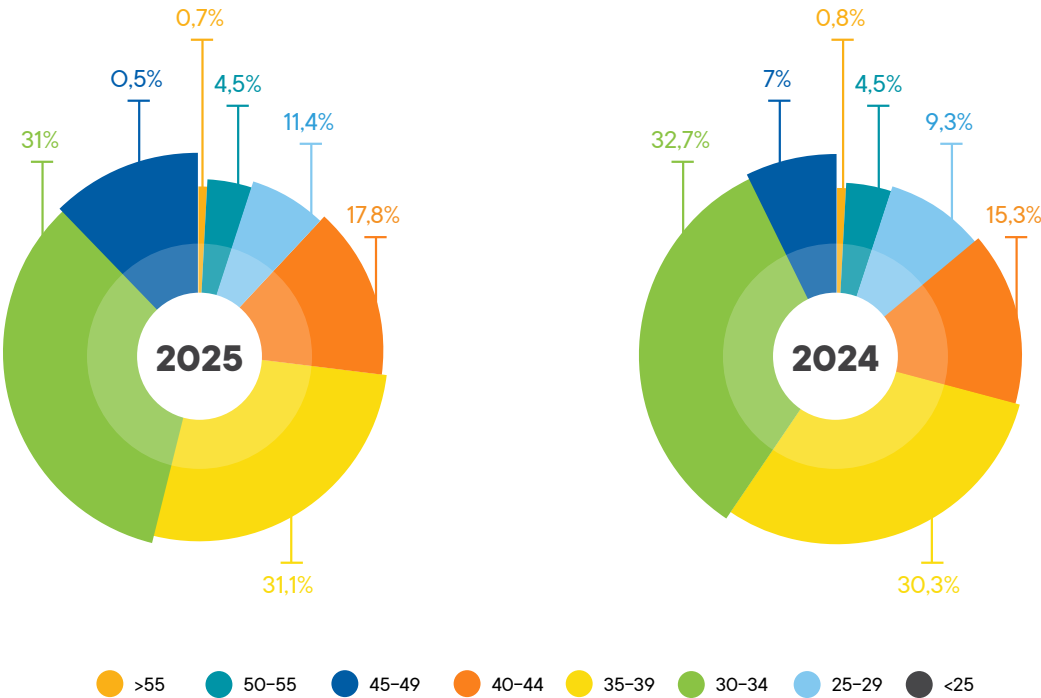
Employee demographics by organisational level / job grade

Tingkat Jabatan Position Level Level	2025				2024				Pertumbuhan Growth	
	Wanita Female	Pria Male	Jumlah Total	% Komposisi Composition	Wanita Female	Pria Male	Jumlah Total	% Komposisi Composition	Orang People	%
Eselon I Echelon I	3	17	20	1,1%	3	16	19	1,1%	1	5,0%
Eselon II Echelon II	22	68	90	5,0%	23	74	97	5,4%	(7)	(7,8%)
Eselon III Echelon III	60	385	445	25,0%	57	380	437	24,4%	8	1,8%
Eselon IV Echelon IV	66	524	590	33,1%	67	487	554	30,9%	36	6,1%
Eselon V Echelon V	4	309	313	17,6%	6	326	332	18,5%	(19)	(6,1%)
Pelaksana Executive	0	325	325	18,2%		351	351	19,6%	(26)	(8,0%)
Jumlah Total	155	1.628	1.783		156	1.634	1.790		(7)	(0,4%)



Demografi Karyawan berdasarkan Usia
 Employee Demographics by Age

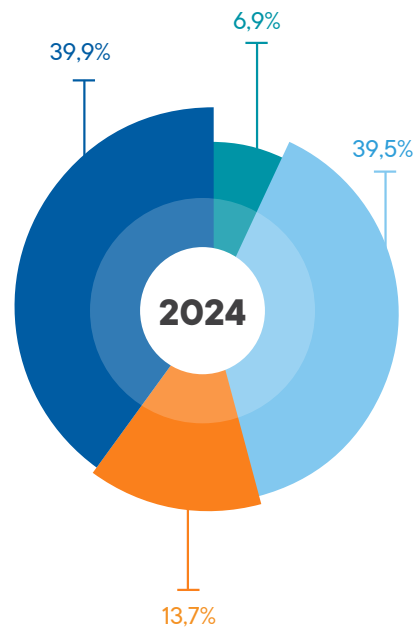
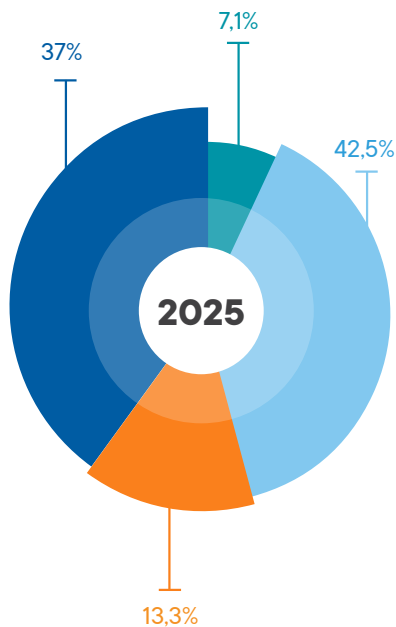
Kelompok Usia Age Group	2025				2024				Pertumbuhan Growth	
	Wanita Female	Pria Male	Jumlah Total	% Komposisi Composition	Wanita Female	Pria Male	Jumlah Total	% Komposisi Composition	Orang People	%
>55	-	12	12	0,7%	0	15	15	0,8%	(3)	(25,0%)
50-55	1	80	81	4,5%	1	79	80	4,5%	1	1,2%
45-49	20	184	204	11,4%	16	151	167	9,3%	37	18,1%
40-44	36	281	317	17,8%	25	248	273	15,3%	44	13,9%
35-39	51	504	555	31,1%	53	490	543	30,3%	12	2,2%
30-34	44	508	552	31,0%	55	531	586	32,7%	(34)	(6,2%)
25-29	3	50	53	3,0%	6	120	126	7,0%	(73)	(137,7%)
<25	-	9	9	0,5%	0		0	0,0%	9	100,0%
Jumlah Total	155	1.628	1.783		156	1.634	1.790		(7)	(0,4%)



Demografi Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan

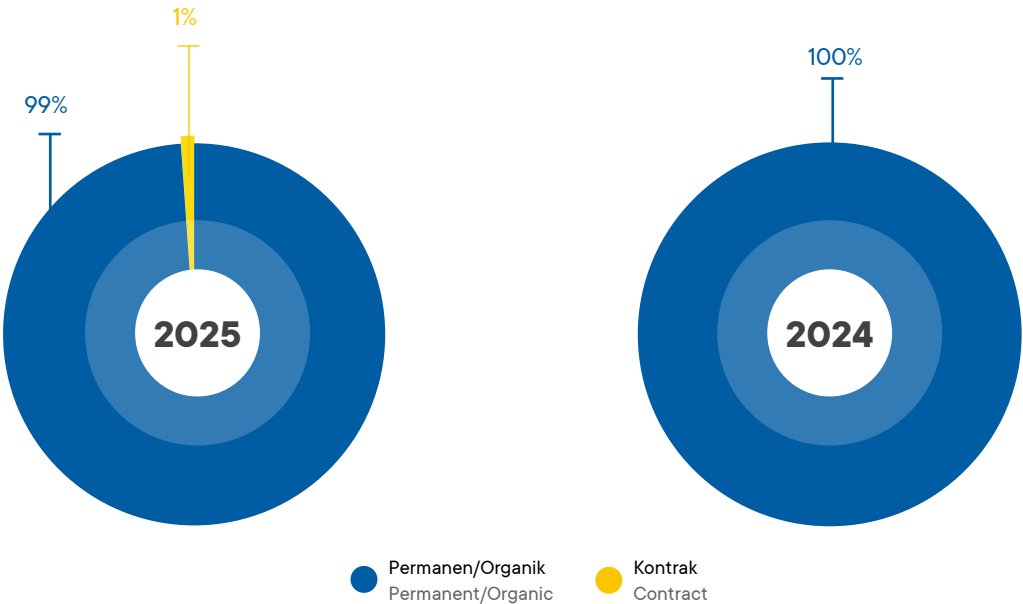
Employee Demographics by Education Level

Tingkat Pendidikan Education Level	2025				2024				Pertumbuhan Growth	
	Wanita Female	Pria Male	Jumlah Total	% Komposisi Composition	Wanita Female	Pria Male	Jumlah Total	% Komposisi Composition	Orang People	%
Strata 3 Doctorate Degree	-	1	1	0,1%	-	1	1	0,1%	-	0,0%
Strata 2 Master Degree	17	110	127	7,1%	14	109	123	6,9%	4	3,1%
Strata 1 Bachelor Degree	103	655	758	42,5%	105	602	707	39,5%	51	6,7%
Diploma Diploma	34	203	237	13,3%	36	209	245	13,7%	(8)	(3,4%)
SLTA High School	1	659	660	37,0%	1	713	714	39,9%	(54)	(8,2%)
SLTP Junior High School	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Jumlah Total	155	1.628	1.783		156	1.634	1.790		(7)	(0,4%)



Demografi Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian
 Employee Demographics by Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2025				2024				Pertumbuhan Growth	
	Wanita Female	Pria Male	Jumlah Total	% Komposisi Composition	Wanita Female	Pria Male	Jumlah Total	% Komposisi Composition	Orang People	%
Permanen/ Organik Permanent/ Organic	155	1.615	1.770	99%	156	1.634	1.790	100%	(20)	(1,1%)
Kontrak Contract	0	13	13	1%	0	0	0	0%	13	100,0%
Jumlah Total	155	1.628	1.783		156	1.634	1.790		(7)	(0,4%)



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDER COMPOSITION

Hingga berakhirnya tahun buku 2025, PUSRI tidak pernah melakukan penawaran umum saham, dan tidak memiliki program kepemilikan saham baik oleh manajemen maupun karyawan. Pusri merupakan anak perusahaan dari PTPI selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

As of the end of the 2025 fiscal year, PUSRI has never conducted a public offering of shares and does not have any share ownership program for either management or employees. PUSRI is a subsidiary of PTPI as a State-Owned Enterprise (SOE).

Pada tahun buku 2024, PUSRI mengalami perubahan komposisi Pemegang Saham sesuai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 04 Desember 2024 yang memutuskan perubahan klasifikasi saham dan memutuskan pemindahan/pengalihan hak atas 1 (satu) lembar saham PUSRI yang dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) kepada Negara Republik Indonesia melalui hibah, yang dikuatkan dengan Akta Nomor 05 tanggal 04 Desember 2024 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta.

In the 2024 fiscal year, PUSRI experienced a change in its shareholder composition in accordance with the General Meeting of Shareholders (GMS) dated December 4, 2024, which resolved a change in share classification and approved the transfer of ownership rights for 1 (one) PUSRI share owned by PT Pupuk Indonesia (Persero) to the Republic of Indonesia through a grant. This was formalized through Deed Number 05 dated December 04, 2024 concerning the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.

Komposisi pemegang saham PUSRI sejak tanggal 04 Desember 2024 adalah Negara Republik Indonesia yang memiliki 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna atau senilai Rp1.000.000 dengan kepemilikan sebesar 0,00002%, PT Pupuk Indonesia (Persero) yang memiliki 5.799.985 lembar saham Seri B atau senilai Rp5.799.985.000.000 dengan kepemilikan sebesar 99,99974%, dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. PUSRI yang memiliki 14 lembar saham Seri B atau senilai Rp14.000.000 dengan kepemilikan sebesar 0,00024%.

The composition of PUSRI shareholders as of December 4, 2024 is as follows: the Republic of Indonesia holds 1 (one) Series A Dwiwarna share with a value of Rp1,000,000 representing 0.00002% ownership; PT Pupuk Indonesia (Persero) holds 5,799,985 Series B shares with a value of Rp5,799,985,000,000 representing 99.99974% ownership; and the PT PUSRI Employee Welfare Foundation holds 14 Series B shares with a value of Rp14,000,000 representing 0.00024% ownership.

Berikut rincian komposisi pemegang saham PUSRI per tanggal 31 Desember 2025.

The following is the detailed composition of PUSRI shareholders as of December 31, 2025.

Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Issued and Fully Paid Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Nilai Nominal Saham : Rp1.000.000/Lembar Saham Nominal Value per Share: Rp1,000,000 per Share			
Negara Republik Indonesia The Republic of Indonesia	1	Hibah dari PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp1.000.000 Grant from PT Pupuk Indonesia (Persero) amounting to Rp1,000,000	0,00002
PT Pupuk Indonesia (Persero)	5.799.985	5.799.985.000.000	99,99974
Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. PUSRI PT PUSRI Employee Welfare Foundation	14	14.000.000	0,00024
Jumlah Total	5.800.000	5.800.000.000.000	100

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PUSRI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025

COMPOSITION OF PUSRI SHAREHOLDERS AS OF DECEMBER 31, 2025

Kelompok Pemegang Saham 5% dan/atau Lebih

Shareholder Group of 5% and/or More

Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
PT Pupuk Indonesia (Persero)	5,799,985	99,99974

Kelompok Pemegang Saham Kurang dari 5%

Shareholder Group of Less than 5%

Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Negara Republik Indonesia The Republic of Indonesia	1	0,00002
Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. PUSRI PT PUSRI Employee Welfare Foundation	14	0,00024

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PUSRI tidak memiliki saham dengan jumlah 5% atau lebih dari modal tersetor pada Perusahaan. Anggota Direksi, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Share Ownership of The Board of Commissioners and Board of Directors

All members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PUSRI do not own shares amounting to 5% or more of the paid-up capital of the Company. Members of the Board of Directors, either individually or jointly, do not own shares exceeding 25% of the paid-up capital in another company, as evidenced by a statement letter.

Pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi

PUSRI bukan merupakan perusahaan terbuka sehingga informasi mengenai hal ini tidak dapat disampaikan.

Shareholders Based on Classification

PUSRI is not a publicly listed company; therefore, information regarding this matter cannot be disclosed.

Pemegang Saham Masyarakat dengan Kepemilikan Saham Masing-masing Kurang dari 5%

PUSRI bukan merupakan perusahaan terbuka sehingga informasi mengenai hal ini tidak dapat disampaikan.

Public Shareholders with Individual Share Ownership of Less Than 5%

PUSRI is not a publicly listed company; therefore, information regarding this matter cannot be disclosed.

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Pemegang saham utama dan pengendali PUSRI ialah PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PTPI") sekaligus entitas induk PUSRI dengan kepemilikan sebesar 99,99974%. Pemilik akhir dari PTPI adalah Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki seluruhnya atau 100,00% saham PTPI. Negara Republik Indonesia yang memiliki 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna PUSRI mempunyai hak-hak istimewa untuk menyetujui :

1. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris.
2. Perubahan anggaran dasar.
3. Perubahan struktur kepemilikan saham.
4. Penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.

MAIN AND CONTROLLING SHAREHOLDER

The main and controlling shareholder of PUSRI is PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PTPI"), which is also the parent entity of PUSRI, with ownership of 99.99974%. The ultimate owner of PTPI is the Government of the Republic of Indonesia, which owns all or 100.00% of PTPI's shares. The Republic of Indonesia, which holds 1 (one) Series A Dwiwarna share of PUSRI, has special rights to approve:

1. Appointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
2. Amendments to the Articles of Association.
3. Changes in the share ownership structure.
4. Merger, consolidation, spin-off, dissolution, and acquisition of the Company by another company.

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ASOSIASI

LIST OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED ENTITIES

ENTITAS ANAK

Hingga berakhirnya tahun buku 2025, Perusahaan memiliki 1 (satu) entitas anak dengan uraian sebagai berikut.

SUBSIDIARIES

As of the end of the 2025 fiscal year, the Company has 1 (one) subsidiary with the following details.

Nama Name	Kegiatan Usaha Line of Business	Tahun Pendirian Year of Establishment	Tahun Beroperasi Komersial Commencement of Commercial Operation	Tahun Penyertaan Modal Year of Inclusion	Domisili Domicile	Status	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)		Total Aset (Rp Juta) Total Assets (Rp million)	
							2025	2024	2025	2024
PT Pusri Agro Lestari	Industri pestisida dan pupuk serta perdagangan bahan kimia lainnya. Pesticide and fertilizer industries and other chemical trade.	2015	2015	2015	Karawang	Beroperasi Operating	51,00	51,00	36.335	36.451

ENTITAS ASOSIASI

Per 31 Desember 2025, Perusahaan memiliki 4 (empat) entitas asosiasi dengan uraian sebagai berikut.

ASSOCIATED ENTITIES

As of December 31, 2025, the Company had 4 (four) associated entities, as described below.

Nama Name	Kegiatan Usaha Line of Business	Tahun Pendirian Year of Establishment	Tahun Beroperasi Komersial Commencement of Commercial Operation	Tahun Penyertaan Modal Year of Inclusion	Domisili Domicile	Status	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)		Total Aset (Rp Juta) Total Assets (Rp million)	
							2025	2024	2025	2024
PT Pupuk Indonesia Logistik	Jasa pelayaran atau jasa angkutan laut Shipping services or sea transportation services	2013	2015	2013	Jakarta	Beroperasi Operating	44,23	44,23	540.504	628.791
PT Pupuk Indonesia Pangan	Agribisnis dan mekanisasi pertanian Agribusiness and agricultural mechanization	2015	2018	2015	Karawang	Beroperasi Operating	10,00	10,00	78.789*	86.514
PT Pupuk PT Utilitas	Jasa Konstruksi serta Penyediaan listrik, gas, uap dan udara Construction Services and the Provision of Electricity, Gas, Steam, and Air	2014	2018	2014	PT	Beroperasi Operating	7,14	7,14	1.640.278	1.709.680
PT Puspetindo	Pabrikasi Peralatan Equipment Manufacturing	1990	1992	1990	Gresik	Beroperasi Operating	2,31	2,31	82.829	72.572

*Tidak diaudit | (Unaudited)

SEKILAS KINERJA ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

PERFORMANCE OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED ENTITIES AT A GLANCE



Tahun Berdiri Year Established	2015
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pusri Agro Lestari No. 1 tanggal 2 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Lumassia, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Keputusan No. AHU-0015102. AH.01.01. tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pusri Agro Lestari tanggal 6 April 2015. The Deed of Establishment of the Limited Liability Company PT Pusri Agro Lestari No. 1 dated March 2, 2015, was executed before Notary Lumassia, SH., a Notary in Jakarta, and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0015102.AH.01.01. Year 2015 concerning the Legalization of the Establishment of the Legal Entity of the Limited Liability Company PT Pusri Agro Lestari dated April 6, 2015.
Profil Perusahaan Company Profile	PAL merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh PUSRI dengan Comeco Gulf W.L.L. yang melakukan kegiatan usaha dibidang industri pestisida, agrokimia dan pupuk serta perdagangan bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebagai bentuk implementasi strategi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam menyediakan sarana produksi pertanian yang terintegrasi. Per 1 Maret 2025, Pemegang Saham memutuskan PAL dalam status dormant. PAL is a joint venture company established by PUSRI and Comeco Gulf W.L.L., engaged in the pesticide, agrochemical, and fertilizer industries, as well as the trade of chemicals and chemical-based products. This initiative serves as part of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang's strategy to provide integrated agricultural production inputs. As of March 1, 2025, Shareholders decided that PAL is in dormant status.
Kepemilikan Saham Share Ownership	PUSRI: 51,00% Comeco Gulf W.L.L: 49,00%
Manajemen Kunci Key Management	Dewan Komisaris Board of Commissioners Junaedi: Komisaris Commissioner Direktur Board of Directors Handra Pandu Pradana: Plt. Direktur Utama Acting President Director

Kinerja Keuangan 2023–2025

Financial Performance 2023–2025

Rp Juta | Rp Million

Keterangan Information	2025	2024	2023
Pendapatan Revenue	1.584	38.107	50.173
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(1.262)	(35.075)	(43.059)
Laba Kotor Gross Profit	322	3.032	7.115
Beban Usaha Operating Expenses	(2.626)	(6.220)	(11.862)
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	(2.304)	(3.188)	(4.747)
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	(2.374)	(8.329)	(4.843)
Aset Assets	36.335	36.451	38.916
Liabilitas Liabilities	24.840	22.582	16.880
Ekuitas Equity	11.495	13.869	22.035



PUPUK INDONESIA LOGISTIK (PIHC Group)

Tahun Berdiri Year Established	2015
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta No. 211 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Nur Isminingsih SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Keputusan No. AHU- 05986.AH.01.01. Tahun 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pupuk Indonesia Logistik tanggal 12 Februari 2014. Act No. 211 dated December 23, 2013 which was made in front of Notary Siti Nur Isminingsih SH, Notary in Jakarta and has been confirmed by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-05986.AH.01.01. 2014 concerning Ratification of the Establishment of the Limited Liability Company Legal Entity PT Pupuk Indonesia Logistik on February 12, 2014.
Profil Perusahaan Company Profile	PILOG bergerak di bidang jasa pelayaran dan angkutan laut yang fokus utamanya mendistribusikan pupuk subsidi dan non subsidi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan mendukung bisnis Pupuk Indonesia Grup. PILOG operates in the shipping and sea transportation services sector whose main focus is distributing subsidized and non-subsidized fertilizers in order to support the national food security program and support the Pupuk Indonesia Group business.
Kepemilikan Saham Share Ownership	PUSRI: 44,23% PT Pupuk Indonesia (Persero): 55,77%
Manajemen Kunci Key Management	Dewan Komisaris Board of Commissioners Andreas Wellman Marbuni: Komisaris Utama President Commissioner Rudi Rusli: Komisaris Commissioner Aridayanto Kusumayuda: Komisaris Commissioner Direktur Board of Directors Budi Mulia Utama Hasibuan: Direktur Utama President Director Priyadhdika: Direktur Administrasi & Keuangan Director of Administration & Finance Hree Shanty Bayu: Direktur Operasional Director of Operations M. Gusri Oktaviandi: Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development

Kinerja Keuangan 2023-2025

Financial Performance 2023-2025

Rp Juta | Rp Million

Keterangan Information	2025	2024	2023
Pendapatan Revenue	662.844	594.451	481.080
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(627.563)	(620.871)	(454.300)
Laba Kotor Gross Profit	35.282	(26.420)	26.780
Beban Usaha Operating Expenses	38.302	(40.914)	(36.917)
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	(3.020)	(67.334)	(10.137)
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	(27.666)	(90.948)	(11.998)
Aset Assets	540.504	628.791	671.510
Liabilitas Liabilities	408.050	468.743	420.941
Ekuitas Equity	132.454	160.048	250.568



Tahun Berdiri Year Established	2015
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta No. 14 tanggal 30 April 2015 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-2438224.AH.01.01 tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015. Deed No. 14 dated April 30, 2015 was made before Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-2438224. AH.01.01 of 2015 dated May 11, 2015.
Profil Perusahaan Company Profile	PIP didirikan untuk melakukan usaha di bidang agribisnis yang terintegrasi untuk meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan ketersediaan pangan, dan mendukung bisnis utama Pupuk Indonesia Group. Usaha Kegiatan agribisnis dilakukan dari hulu ke hilir melalui kluster pangan serta usaha jasa mekanisasi pertanian sehingga berkontribusi terhadap ketersediaan pangan, khususnya beras dalam mendukung ketahanan pangan nasional. PIP was established to conduct an integrated agribusiness business to increase farmers' income, increase food availability, and support the main business of Pupuk Indonesia Group. Business agribusiness activities are carried out from upstream to downstream through food clusters and agricultural mechanization service businesses so as to contribute to food availability, especially rice, and support national food security.
Kepemilikan Saham Share Ownership	PUSRI: 10,00% PT Pupuk Indonesia (Persero): 60,00% PT Pukuk Kalimantan Timur: 10,00% PT Petrokimia Gresik: 10,00% PT Pupuk Kujang Cikampek: 10,00%
Manajemen Kunci Key Management	Dewan Komisaris Board of Commissioners Muhammad Isa Ramli: Komisaris Utama President Commissioner Achmad Suhawi: Komisaris Commissioner Direktur Board of Directors Iwan Daru Sukmana : Direktur Utama President Director Kiki Lukmanul Hakim : Direktur Keuangan Director of Finance

Kinerja Keuangan 2023-2025

Financial Performance 2023-2025

Rp Juta | Rp Million

Keterangan Information	2025*	2024	2023
Pendapatan Revenue	3.746	3.436	77,722
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(4.739)	(5.463)	(79,578)
Laba Kotor Gross Profit	(993)	(2.027)	(1,856)
Beban Usaha Operating Expenses	(7.894)	(18.524)	(18,430)
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	(9.619)	(20.551)	(21,385)
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	(9.209)	(15.204)	(21,385)
Aset Assets	78.789	86.514	87,070
Liabilitas Liabilities	21.378	19.894	5,246
Ekuitas Equity	57.411	66.620	81,824

*Tidak diaudit | Unaudited



Tahun Berdiri Year Established	2015
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Dasar Hukum Pendirian Akta Pendirian No. 11 tanggal 18 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M. Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU23002.40.10.2014 tanggal 3 September 2014. Legal Basis for Establishment Deed of Establishment No. 11 dated August 18, 2014 which was made before Notary Nanda Fauz Iwan, SH, M. Kn., Notary in Jakarta, and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with Decree No. AHU23002.40.10.2014 dated September 3, 2014.
Profil Perusahaan Company Profile	PIU didirikan untuk menjadi perusahaan penyedia utilitas untuk mendukung bisnis utama Pupuk Indonesia Grup beserta anak usahanya. PIU bergerak di bidang konstruksi pembangkit listrik, penyediaan listrik, gas, uap dan udara, treatment air dan limbah. Di samping itu, PIU melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan dalam rangka pemenuhan bahan baku dan bahan penunjang, seperti batu bara dan mineral bahan pupuk. PIU was established to be a utility provider company to support the main business of Pupuk Indonesia Group and its subsidiaries. PIU is engaged in the construction of power plants, supply of electricity, gas, steam and air, water and waste treatment. In addition, PIU carries out business activities in the mining sector in order to fulfill raw materials and supporting materials, such as coal and mineral fertilizers.
Kepemilikan Saham Share Ownership	PUSRI: 7,14% PT Rekayasa Industri: 62,86% PT Pupuk Kalimantan Timur: 10,00% PT Petrokimia Gresik: 10,00% PT Pupuk Kujang: 5,00% PT Pupuk Iskandar Muda: 5,00%
Manajemen Kunci Key Management	Dewan Komisaris Board of Commissioners Sumyana Sukandar: Komisaris Utama President Commissioner Hazmi Fitriyasa : Komisaris Commissioner Monica Desideria Puspapranityati : Komisaris Commissioner Direksi Board of Directors Mochamad Safie : Direktur Utama President Director Nuri Kristiawan : Direktur Keuangan Director of Finance Anis Ernani : Direktur Operasi Director of Operations

Kinerja Keuangan 2023–2025

Financial Performance 2023–2025

Rp Juta | Rp Million

Keterangan Information	2025	2024	2023
Pendapatan Revenue	921.661	938.072	921.720
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(609.138)	(596.283)	(620.790)
Laba Kotor Gross Profit	312.524	341.789	300.930
Beban Usaha Operating Expenses	(91.626)	(93.952)	(91.122)
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	220.897	247.837	209.809
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	145.039	164.424	147.185
Aset Assets	1.640.278	1.709.680	1.665.018
Liabilitas Liabilities	456.503	554.328	625.476
Ekuitas Equity	1.183.775	1.155.352	1.039.542



Tahun Berdiri Year Established	2015
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta Notaris Ardjasmita, S.H., No. 30 tanggal 22 Maret 1990 Notarial Deed of Ardjasmita, S.H., No. 30, dated March 22, 1990
Profil Perusahaan Company Profile	Bergerak di bidang industri mesin-mesin pengolahan logam dan permesinan umum (<i>workshop</i>) antara lain pembuatan tower, bejana tekanan (<i>pressure vessel</i>), dan alat penukar panas (<i>heat exchanger</i>), memasarkan dan atau memperdagangkan hasil-hasil usaha tersebut untuk pasar dalam negeri dan ekspor. Engaged in the industry of metal processing machinery and general machinery (<i>workshop</i>), including the manufacture of towers, pressure vessels, and heat exchangers (<i>heat exchangers</i>), marketing and/or trading the results of these businesses for the domestic market and export.
Kepemilikan Saham Share Ownership	PUSRI: 2,31% PT Petrokimia Gresik: 2,31% PT Rekayasa Industri: 94,32% Babcock Borsig Aktiengesellschaft: 1,06%
Manajemen Kunci Key Management	Dewan Komisaris Board of Commissioners Bachronsyah: Komisaris Utama President Commissioner Wijaya Santoso: Komisaris Commissioner Direksi Board of Directors Joni Kurniawan Siregar: Direktur Director

Kinerja Keuangan 2023–2025

Financial Performance 2023–2025

Rp Juta | Rp Million

Keterangan Information	2025	2024	2023
Pendapatan Revenue	114.432	73.473	79.944
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(101.464)	(64.649)	(68.292)
Laba Kotor Gross Profit	12.968	8.824	11.652
Beban Usaha Operating Expenses	(10.001)	(7.608)	(10.480)
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	2.967	1.216	1.172
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	1.786	1.551	791
Aset Assets	82.829	72.572	82.462
Liabilitas Liabilities	35.357	26.909	38.299
Ekuitas Equity	47.473	45.663	44.164

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

CHRONOLOGY OF SHARE LISTING

PUSRI belum pernah melakukan penawaran saham perdana dan belum tercatat di bursa saham mana pun. Namun demikian pada tahun 2025 Perusahaan menerbitkan 1 saham Dwiwarna A, khusus untuk Pemerintah RI, sedangkan saham Dwiwarna B menjadi representasi kepemilikan saham PT Pupuk Indonesia (Persero) PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri (YKKP). Dengan demikian, Perusahaan hanya dapat menyediakan informasi sebatas terbitnya saham Dwiwarna dimaksud.

PUSRI has never conducted an initial public offering (IPO) and has never been listed on any stock exchange. However, in 2025, the Company issued one Series A Dwiwarna share, held exclusively by the Government of the Republic of Indonesia, while the Series B Dwiwarna shares represent the ownership interests of PT Pupuk Indonesia (Persero) and the PT Pusri Employee Welfare Foundation (YKKP). Accordingly, the Company can only provide information relating to the issuance of the aforementioned Dwiwarna shares.

KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK LAINNYA

CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES LISTING

Hingga 31 Desember 2025, PUSRI tidak melakukan pencatatan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, maupun pencatatan efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah obligasi/ sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/ imbalan, tanggal jatuh tempo, peringkat obligasi/sukuk.

As of December 31, 2025, PUSRI has not listed bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities. Therefore, there is no information available regarding the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest or yield rates, maturity dates, or bond/sukuk ratings.



NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL

NAMES AND ADDRESSES OF CAPITAL MARKET
SUPPORTING INSTITUTIONS

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Nama Name	Alamat Address	Jasa Service	Biaya Fee	Periode Penugasan Assignment Period
KAP Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan	WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 Indonesia	Laporan Keuangan, Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Laporan Lainnya Financial Statements, Financial Statements of the Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (UMK), and Other Reports	Rp2.347.650.000,- (Include PPN 11%)	Mulai tanggal 17 November 2025 sampai dengan Laporan Keuangan, Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Laporan Lainnya terbit. Starting November 17, 2025 until the Financial Statements, Financial Statements of the Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (UMK), and Other Reports are issued.

NOTARIS DAN JASA KONSULTAN HUKUM

NOTARY AND LEGAL CONSULTING SERVICES

No.	Nama Name	Alamat Address
1.	Notaris/PPAT Pasnelyza Karani, S.H., M.Kn Notary/PPAT Pasnelyza Karani, S.H., M.Kn	Jalan Raya Solok Padang KM 5, Koto Baru, Kabupaten Solok.
2.	Notaris/PPAT Imelda Sugiharti, S.H., M.Kn Notary/PPAT Imelda Sugiharti, S.H., M.Kn	Jalan Residen Abdul Rozak Nomor 34, Kota Palembang.
3.	Notaris/PPAT Lumassia, SH., M.Kn Notary/PPAT Lumassia, SH., M.Kn	Jalan Danau Poso Nomor E.II Nomor 84, RT.018, RW.004, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
4.	Notaris/PPAT Ratih Setyowati, S.H., M.Kn. Notary/PPAT Ratih Setyowati, S.H., M.Kn.	Ruko Gatsula Nomor 8, Jalan Jend. Gatot Subroto, Gunung Simpang, Cilacap.
5.	Ertiga Law Firm	Gedung TRIO Lt.2 Suite 207, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 17 EF, Jakarta Selatan.
6.	Balakosa Law Firm	Pelangi Building, Lt. 2 - 3, Jalan Angkatan 45 Nomor P.30, Kota Palembang.
7.	PSHP Law	World Trade Centre 5, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan.
8.	DE-JURIS Law Office	Gedung STC Senayan, Jalan Asia Afrika, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat.

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

INFORMATION ON THE COMPANY'S WEBSITE

PUSRI memiliki situs web resmi dengan alamat www.pusri.co.id yang telah dilengkapi dengan berbagai informasi seputar korporasi. Situs web tersebut menyediakan informasi terkait perusahaan, peristiwa di lingkungan perusahaan, klipring berita media, soft copy Info PUSRI, soft copy data perusahaan (*annual report*, *sustainability report*), pengumuman pelelangan dan beberapa informasi lain yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat di mana pun mereka berada. PUSRI juga menyediakan alamat e-mail: humas@pusri.co.id bagi publik yang ingin menanyakan berbagai hal yang berhubungan dengan PUSRI.

Penyebaran informasi melalui website tersebut kepada semua pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari peningkatan prinsip transparansi informasi yang diharapkan dapat membantu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan persepsi positif tentang PUSRI. Situs web PUSRI menjadi portal digital resmi korporasi yang dapat diakses secara terbuka untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang Perusahaan kepada khalayak luas.

Walaupun PUSRI bukan merupakan perusahaan publik, namun sebagai praktik terbaik, website Perusahaan telah memenuhi ketentuan yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh publik melalui situs www.pusri.co.id yang tersaji dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

PUSRI has an official website at www.pusri.co.id, which provides various information related to the Company. The website offers information about the Company, events within the Company, media news clippings, soft copies of Info PUSRI, soft copies of corporate data (*annual report*, *sustainability report*), tender announcements, and several other types of information that can be easily accessed by the public wherever they are located. PUSRI also provides an email address, humas@pusri.co.id, for the public wishing to inquire about matters related to PUSRI.

The dissemination of information through the website to all stakeholders is an important part of strengthening the principle of information transparency, which is expected to help improve knowledge, understanding, and positive perceptions of PUSRI. The PUSRI website serves as the Company's official digital portal, which can be openly accessed to provide comprehensive information about the Company to the wider public.

Although PUSRI is not a public company, as a best practice the Company's website has complied with the provisions stipulated in Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning the Website of Issuers or Public Companies. All such information can be accessed by the public through the website www.pusri.co.id, which is presented in two languages, namely Bahasa Indonesia and English.

Konten Content	Link
Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	https://www.pusri.co.id/id/tata-kelola
Piagam/Charter Dewan Komisaris Board of Commissioners Charter	GCG - PUSRI Pedoman Komisaris & Direksi
Piagam/Charter Direksi Board of Directors Charter	GCG - PUSRI Pedoman Komisaris & Direksi
Piagam/Charter Komite Audit Audit Committee Charter	Kebijakan Manajemen - PUSRI kebijakan-manajemen/piagam-komite-audit
Piagam/Charter Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Charter	Kebijakan Manajemen - PUSRI
Piagam/Charter Audit Internal Internal Audit Charter	Kebijakan Manajemen - PUSRI
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan & Lingkungan Corporate Social and Environmental Responsibility	https://www.pusri.co.id/id/tjsl





PUPUK S
PALEMBANG



RIWIDJAJA
ANG



04

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analysis & Discussion Management

TINJAUAN MAKRO EKONOMI

MACROECONOMIC REVIEW

EKONOMI GLOBAL

Perekonomian global sepanjang tahun 2025 diwarnai dengan gejolak, penuh tantangan dan meningkatnya ketidakpastian, selain disebabkan oleh berkelanjutannya konflik di kawasan Eropa dan Timur Tengah, juga terutama oleh pemberlakuan tarif perdagangan sepihak oleh Amerika Serikat terhadap seluruh mitra dagang utamanya. Perkembangan ini sempat menekan arus perdagangan global, harga komoditas, serta sentimen investasi, khususnya di negara-negara berbasis sumber daya alam. Seluruh mitra dagang utama Amerika, termasuk Indonesia kemudian mengajukan perundingan bilateral.

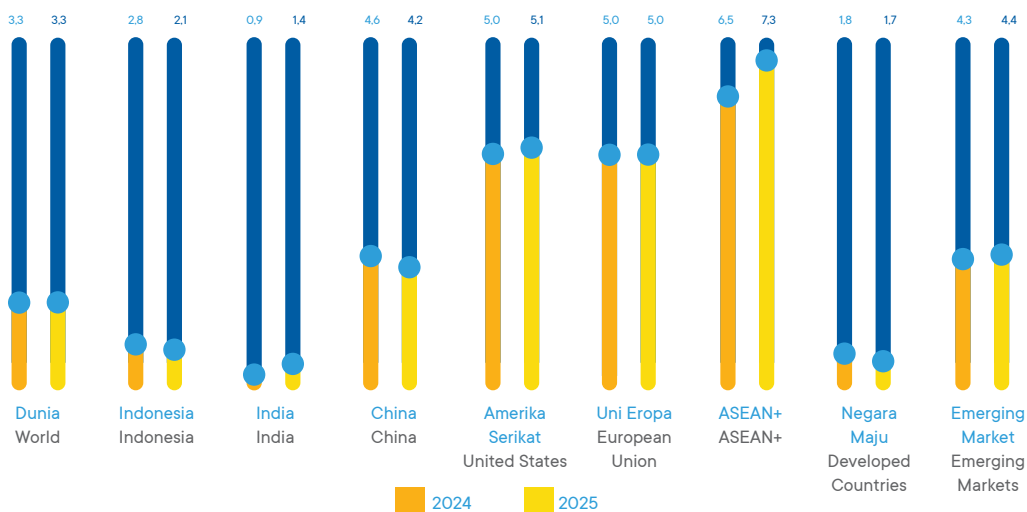
Seiring dengan kemajuan perundingan perdagangan, tekanan tersebut berangsur mereda dan mendukung terjadinya pemulihan kembali perekonomian global. Mencermati terjadinya stabilisasi tersebut, *World Economic Outlook* edisi Januari 2026 yang diterbitkan oleh International Monetary Fund memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 adalah sebesar 3,3% (*year-on-year/yoy*), sama dengan tahun sebelumnya, namun tetap diwarnai adanya disparitas pertumbuhan perekonomian di berbagai negara besar maupun wilayah ekonomi, seperti tampak pada grafik “Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi antar Kawasan & Beberapa Negara berdasarkan GDP” berikut.

GLOBAL ECONOMY

Throughout 2025, the global economy was marked by turbulence, challenges, and increasing uncertainty. In addition to the ongoing conflicts in Europe and the Middle East, these conditions were primarily driven by the imposition of unilateral trade tariffs by the United States on all of its major trading partners. This development temporarily put pressure on global trade flows, commodity prices, and investment sentiment, particularly in countries dependent on natural resources. All major trading partners of the United States, including Indonesia, subsequently initiated bilateral negotiations.

As trade negotiations progressed, these pressures gradually eased and supported a recovery in the global economy. In view of this stabilization, the January 2026 edition of the *World Economic Outlook* published by the International Monetary Fund estimated global economic growth in 2025 at 3.3% (*year-on-year/yoy*), the same as the previous year, although growth disparities among major countries and economic regions remained evident, as illustrated in the chart “Comparison of Economic Growth Across Regions and Selected Countries Based on GDP” below.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi antar Kawasan & Beberapa Negara berdasarkan GDP (%)
Comparison of Economic Growth Across Regions and Selected Countries Based on GDP (%)



Sumber: IMF – WEO Januari 2025, diolah
Source: IMF – WEO January 2025, processed

Kelompok emerging market menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari 4,2% pada tahun 2024 menjadi 4,4% pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan bahwa negara berkembang masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi global, khususnya di kawasan Asia.

Di kawasan ASEAN, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan kinerja yang relatif stabil, termasuk Indonesia yang mencatat peningkatan pertumbuhan dari 5,0% menjadi 5,1%. Kinerja tersebut didukung oleh stabilitas konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi domestik, serta penguatan sektor industri dan hilirisasi sumber daya alam.

Pertumbuhan perekonomian negara maju di tahun 2025 diperkirakan tertekan ke angka 1,7%, lebih rendah dari 1,8% di tahun tahun sebelumnya, sementara pertumbuhan ekonomi negara berkembang justru sedikit meningkat menjadi 4,4% dari 4,3% di tahun sebelumnya. Prospek jangka pendek sangat tergantung pada kemajuan perundingan antara Amerika Serikat dengan para mitra dagangnya. Oleh karenanya pertumbuhan perekonomian global pada akhirnya akan bergantung pada respons masing-masing pemerintahan dan kondisi masing-masing negara.

Inflasi global tetap terkendali dan diperkirakan kembali menurun menjadi sebesar 4,1% dari 5,8% di 2024, membuat bank sentral berbagai negara besar memiliki ruang menurunkan suku bunga rujukan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara. European Central Bank menurunkan suku bunga acuannya sebanyak empat kali hingga Desember 2025 menjadi sekitar 2,15%, The Fed menurunkan Fed Funds Rate secara bertahap sejak September 2025 hingga kisaran 3,5%–3,75% pada Desember 2025, People's Bank of China menurunkan suku bunga pinjaman jangka pendek menjadi 3,0%, sementara Reserve Bank of India menurunkan suku bunga acuannya menjadi 5,25% pada akhir 2025. Di kawasan ASEAN, Thailand menurunkan suku bunga secara agresif untuk mendorong pertumbuhan, sementara Malaysia dan Vietnam mempertahankan suku bunga kebijakan masing-masing sepanjang tahun.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2025 tersebut membuat harga beberapa komoditas utama dunia bervariasi. Harga komoditas energi, seperti gas alam, misalnya (Natural Gas, Europe) yang masih terpengaruh konflik Ukraina-Rusia, 9% menjadi US\$11,96 per MMBTU dari US\$10,96 per MMBTU pada 2024, Sementara itu, rata-rata minyak dunia (Brent) tercatat menurun sebesar 14% dari US\$80,7 per barel pada 2024

The following illustrates economic growth across regions and selected countries based on GDP (in %). The emerging market group recorded an increase in growth from 4.2% in 2024 to 4.4% in 2025. This condition reflects that developing countries continue to be the primary contributors to global economic growth, particularly in the Asian region.

In the ASEAN region, economic growth remained resilient with relatively stable performance, including Indonesia, which recorded an increase in growth from 5.0% to 5.1%. This performance was supported by stable household consumption, increased domestic investment, and the strengthening of the industrial sector and downstream natural resource industries.

Economic growth in advanced economies in 2025 was estimated to decline to 1.7%, lower than 1.8% in the previous year, while growth in developing economies slightly increased to 4.4% from 4.3% in the previous year. Short-term prospects are highly dependent on the progress of negotiations between the United States and its trading partners. Therefore, global economic growth will ultimately depend on the responses of individual governments and the conditions of their respective countries.

Global inflation remained under control and was estimated to decline further to 4.1% from 5.8% in 2024, providing central banks in major economies with room to reduce benchmark interest rates in order to stimulate economic growth in their respective countries. The European Central Bank reduced its benchmark interest rate four times through December 2025 to approximately 2.15%, the Fed gradually lowered the Fed Funds Rate from September 2025 to a range of 3.5%–3.75% by December 2025, the People's Bank of China reduced its short-term lending rate to 3.0%, while the Reserve Bank of India lowered its benchmark rate to 5.25% by the end of 2025. Within the ASEAN region, Thailand aggressively cut interest rates to encourage growth, while Malaysia and Vietnam maintained their respective policy rates throughout the year.

Household consumption expenditure continued to make the largest contribution to Indonesia's GDP, accounting for 53.88%, with growth of 4.98% yoy during the period. This indicates that public purchasing power remained relatively stable. Domestic inflation increased to 2.92% (yoy) in December 2025, mainly influenced by rising food prices as well as higher jewelry gold prices amid the global gold price rally. Nevertheless, the 2025 inflation rate remained within the Government's target range

menjadi US\$69,00 per barel pada 2025. (Januari 2026, Pink Sheet, World Bank).

KONDISI PEREKONOMIAN NASIONAL

Di tengah perekonomian dunia yang bergejolak, penuh tantangan dan ketidakpastian, kondisi perekonomian nasional 2025 relatif berada dalam kondisi lebih baik dan memiliki daya tahan terhadap gejolak perekonomian global dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan. Data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,11% di tahun 2025, meningkat dari 5,03% di tahun sebelumnya. Kinerja tersebut didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga, percepatan realisasi belanja pemerintah, ekspansi sektor manufaktur, serta peningkatan investasi langsung yang memperkuat fundamental ekonomi domestik.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, sebesar 53,88% dengan pertumbuhan sebesar 4,98% yoy pada periode tersebut. Ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap relatif terjaga. inflasi domestik meningkat ke level 2,92% (yoy) pada Desemberr 2025, terutama dipengaruhi terutama oleh naiknya beberapa harga pangan, selain dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan seiring reli harga emas global. Tingkat inflasi 2025 tersebut tetap berada dalam kisaran sasaran Pemerintah, 2,5%+1%. IMF maupun Bank Dunia² memandang Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di kelompok Emerging Market yang mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi diatas 5,0%.

Kontributor utama pertumbuhan Indonesia pada tahun 2025 adalah permintaan domestik yang semakin kuat, terutama konsumsi rumah tangga, serta realisasi investasi yang stabil, terutama di sektor infrastruktur. Momentum ini diperkuat dengan kemajuan yang terus berlanjut pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengeluaran fiskal yang tetap robust. Konsumsi rumah tangga, konsumsi oleh Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR), dan pengeluaran pemerintah tumbuh masing-masing sebesar 5,11%, 5,90%, dan 4,55%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terkait ekonomi Indonesia pada tahun 2025, pertumbuhan dari sisi lapangan usaha/produksi didorong terutama oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian dan konstruksi, yang masing-masing berkontribusi sebesar 19,20%, 13,24%, 11,56% dan 10,16% dari nilai PDB nasional di tahun 2025. Namun demikian pertumbuhan year-on year terbesar dicatatkan oleh empat sektor lain dengan kontribusi antara 2,21% - 6,22% dari PDB.

of 2.5% ± 1%. Both the IMF and the World Bank viewed Indonesia as one of the few Emerging Market countries capable of achieving economic growth above 5.0%.

NATIONAL ECONOMIC CONDITIONS

Amid global economic turbulence, challenges, and uncertainty, Indonesia's economy in 2025 remained relatively stronger and more resilient to global economic shocks compared with other countries in the region. Data from Statistics Indonesia (BPS) showed that Indonesia's economy grew by 5.11% in 2025, up from 5.03% in the previous year. This performance was supported by growth in household consumption, accelerated realization of government spending, expansion in the manufacturing sector, and increased direct investment that strengthened domestic economic fundamentals.

Household consumption expenditure continued to make the largest contribution to Indonesia's GDP, accounting for 53.88%, with growth of 4.98% yoy during the period. This indicates that public purchasing power remained relatively stable. Domestic inflation increased to 2.92% (yoy) in December 2025, mainly influenced by rising food prices as well as higher jewelry gold prices amid the global gold price rally. Nevertheless, the 2025 inflation rate remained within the Government's target range of 2.5% ± 1%. Both the IMF and the World Bank viewed Indonesia as one of the few Emerging Market countries capable of achieving economic growth above 5.0%.

The main contributors to Indonesia's growth in 2025 were strengthening domestic demand, particularly household consumption, and stable investment realization, especially in the infrastructure sector. This momentum was reinforced by continued progress in National Strategic Projects (PSN) and robust fiscal spending. Household consumption, consumption by Non-Profit Institutions Serving Households (NPISH), and government expenditure grew by 5.11%, 5.90%, and 4.55%, respectively.

Based on Statistics Indonesia data regarding Indonesia's economy in 2025, growth from the business field/production perspective was primarily driven by the manufacturing, trade, agriculture, and construction sectors, which contributed 19.20%, 13.24%, 11.56%, and 10.16%, respectively, to national GDP in 2025. However, the highest year-on-year growth was recorded by four other sectors, each contributing between 2.21% and 6.22% of GDP.

Sektor transportasi & Pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,98% sepanjang tahun 2025. Sementara itu, sektor Infokom, jasa keuangan dan jasa sosial masing-masing tumbuh sebesar 8,09%, 7,92%, dan 8,71%. Sedangkan indeks PMI manufaktur, Desember 2025 berada pada posisi 51,2, menunjukkan industri pengolahan Indonesia berada pada fase ekspansif₂

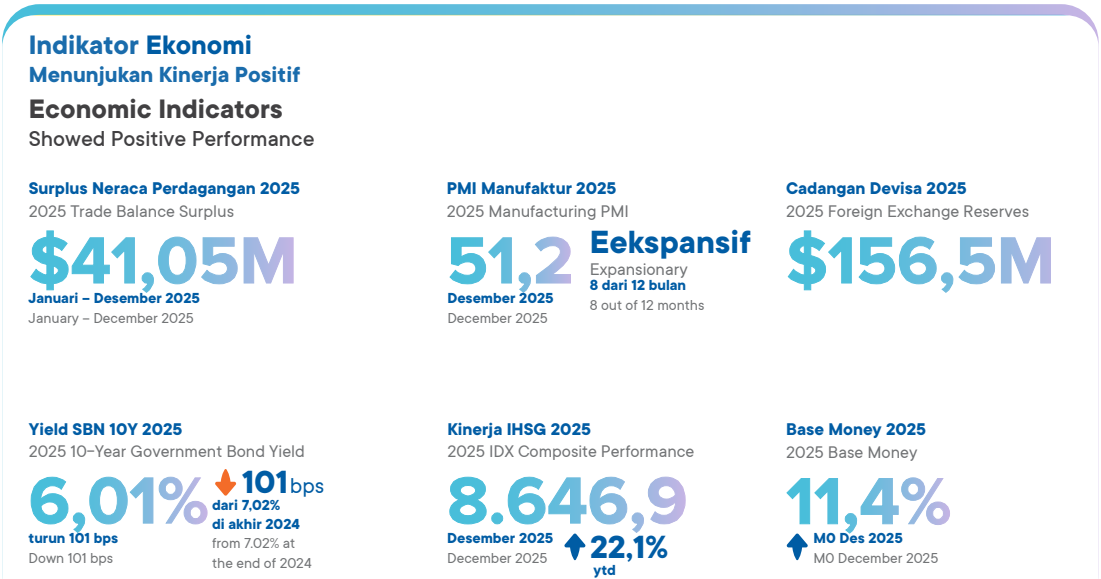
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2025 kembali mencatatkan surplus sehingga mampu mendukung ketahanan eksternal. Sementara itu, neraca perdagangan juga terus mencatatkan surplus, dengan akumulasi hingga per Desember 2025 adalah sebesar US\$41,05 miliar, naik US\$9,72 miliar dari 2024. Adapun posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2025 tercatat meningkat menjadi US\$156,5 miliar.₃

Nilai tukar Rupiah terdepresiasi menjadi senilai Rp16.777 per USD pada akhir Desember 2025. Sementara itu, arus modal asing masih bersifat fluktuatif dengan net outflow portfolio sebesar US\$7,80 miliar hingga Desember 2025, meskipun investasi langsung asing tetap mencatatkan tren yang positif.

The transportation and warehousing sector recorded the highest growth at 8.98% throughout 2025. Meanwhile, the information and communication, financial services, and social services sectors grew by 8.09%, 7.92%, and 8.71%, respectively. The manufacturing PMI index in December 2025 stood at 51.2, indicating that Indonesia's manufacturing industry remained in an expansionary phase.

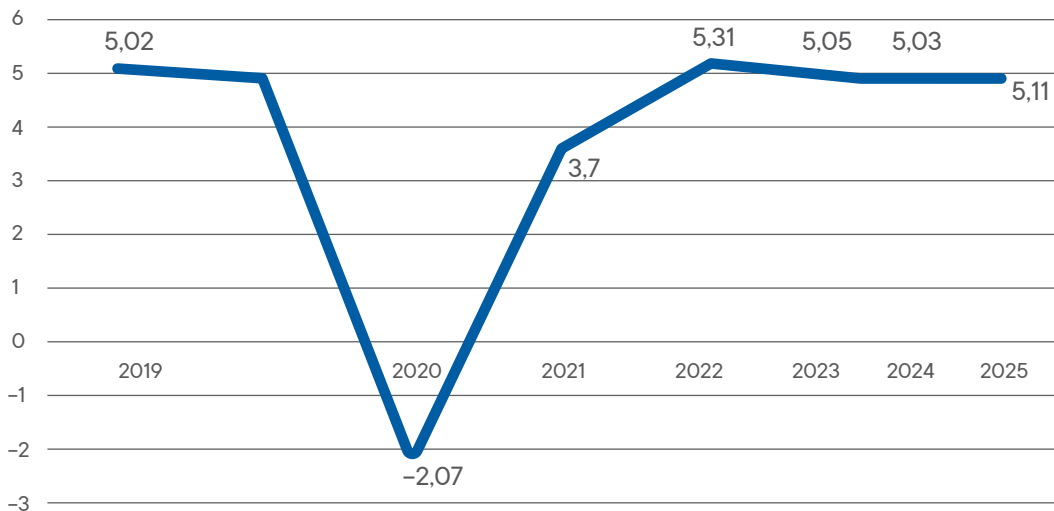
Indonesia's Balance of Payments (BOP) in 2025 once again recorded a surplus, supporting external resilience. Meanwhile, the trade balance also continued to post a surplus, with cumulative surplus through December 2025 reaching US\$41.05 billion, up US\$9.72 billion from 2024. Indonesia's foreign exchange reserves at the end of December 2025 increased to US\$156.5 billion.

The Rupiah depreciated to Rp16.777 per USD at the end of December 2025. Meanwhile, foreign capital flows remained volatile, with portfolio net outflows of US\$7.80 billion through December 2025, although foreign direct investment continued to show a positive trend. From the expenditure side, the primary contributor



Pertumbuhan Ekonomi Indonesia – GDP (%)

Indonesia's Economic Growth – GDP (%)



Dari sisi pengeluaran, kontributor utama pertumbuhan ekonomi berasal dari permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Selain itu, investasi tetap menunjukkan kinerja positif, terutama investasi pada sektor infrastruktur dan konektivitas yang didukung oleh kelanjutan berbagai proyek strategis nasional (PSN) dan berbagai paket stimulus ekonomi di sepanjang tahun 2025 yang mendorong konsumsi domestik.

to economic growth came from domestic demand, particularly strong household consumption. In addition, investment continued to demonstrate positive performance, especially investment in infrastructure and connectivity sectors, supported by the continuation of various National Strategic Projects (PSN) and a range of economic stimulus packages throughout 2025 that encouraged domestic consumption.

Paket Stimulus Ekonomi Economic Stimulus Packages

untuk Menjaga Daya Beli dan
Menopang Pertumbuhan
to Maintain Purchasing Power and
Support Growth

Paket Stimulus 1 Stimulus Package 1

Januari – Desember 2025
January – December 2025

Rp38,3 T

Menjaga daya beli Masyarakat dan dunia usaha, antara lain:

- Diskon listrik
- PPN DTP Perumahan
- PPN DTP tiket pesawat
- Akses KJP
- Pembayaran insentif Padi karya
- Insentif otomotif

To maintain the purchasing power of the public and businesses, including:

- Electricity discounts
- Government-borne VAT (VAT DTP) for housing
- Government-borne VAT (VAT DTP) for airline tickets
- Access to the Jakarta Smart Card (KJP) program
- Payment of labor-intensive program incentives
- Automotive incentives

Paket Stimulus 2 Stimulus Package 2

Juni – Juli 2025
June – July 2025

Rp24,4 T

Mendorong konsumsi dalam negeri, antara lain:

- Diskon tarif transportasi
- Diskon tarif tol
- Penebalan bansos
- Bantuan subsidi upah & bantuan pangan
- Diskon iuran JKK

To encourage economic growth, including:

- Transportation fare discounts
- Toll tariff discounts
- Expansion of social assistance programs
- Wage subsidy assistance and food assistance
- Discounted Work Accident Insurance (JKK) contributions

Paket Stimulus 3 Stimulus Package 1

September 2025
September 2025

Rp15,6 T

Mendorong konsumsi dalam negeri, antara lain:

- Diskon iuran JKK dan JKM
- PPh pasal 21 sektor pariwisata
- Bantuan pangan
- Perpanjangan jangka waktu PPh final 0,5% bagi WP UMKM

To encourage economic growth, including:

- Accident Insurance (JKK) and Death Benefit Insurance (JKM) contributions
- Article 21 Income Tax (PPh 21) incentives for the tourism sector
- Food assistance
- Extension of the 0.5% final income tax period for MSME taxpayers

Paket Stimulus 4 Stimulus Package 4

Oktober – Desember 2025
October – December 2025

Rp37,4 T

Menjaga daya beli, mendorong aktivitas ekonomi dan pemberdayaan generasi muda, antara lain:

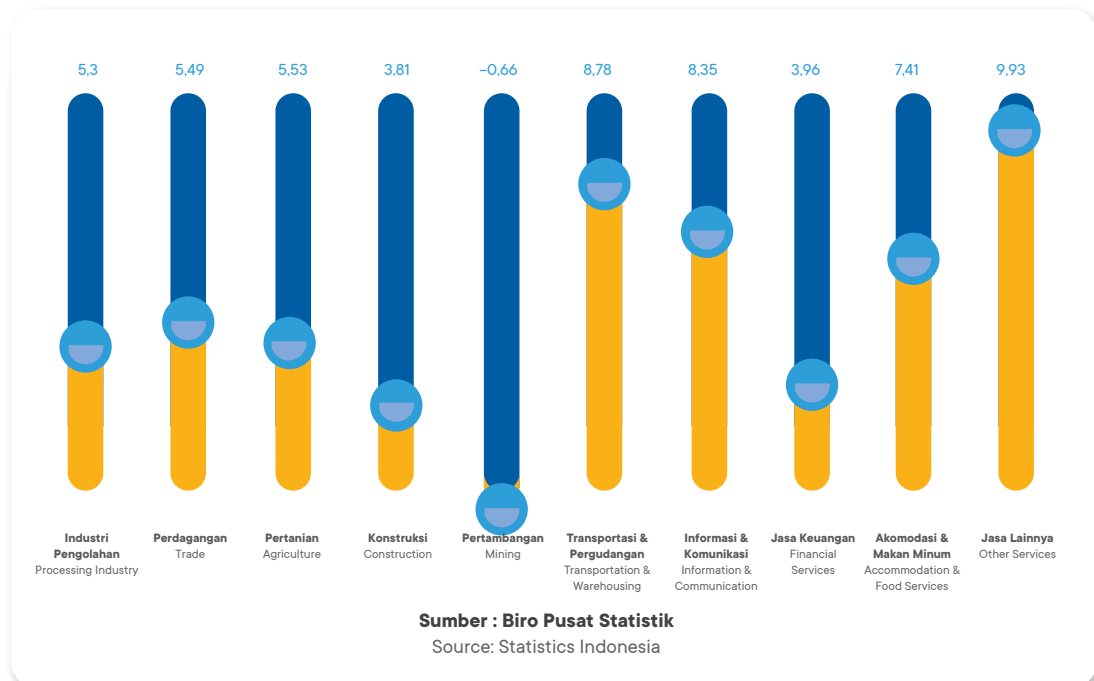
- Program magang
- BLT
- Diskon Tiket Nataru

To maintain purchasing power, encourage economic activity, and empower the younger generation, including:

- Internship programs
- Direct Cash Assistance (BLT)
- Christmas and New Year holiday airfare discounts (Nataru)

Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha – 2025 (%)

GDP Growth by Business Sector – 2025 (%)



TINJAUAN INDUSTRI PUPUK INTERNASIONAL

Merujuk pada data Fertecon dan World Bank Commodity Price – Januari 2026, harga produk urea dan amoniak internasional di tahun 2025 meningkat masing-masing sebesar 13.4% dan 24.9%. Kenaikan harga amoniak terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga gas di pasar global yang masih terpengaruh oleh konflik di kawasan Eropa. Sementara kenaikan harga urea dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, yakni naiknya harga gas, penurunan produksi global, gangguan pasokan dari kawasan timur tengah, larangan ekspor oleh Tiongkok sebagai produsen urea terbesar dan naiknya permintaan global.

Adapun kapasitas urea global di tahun 2025 diperkirakan telah mencapai sekitar 246.0 juta ton per tahun, bertambah 4.41 juta ton dari sekitar 241.9 juta ton di tahun sebelumnya. Sementara permintaan pupuk urea global di tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran 180–200 juta ton. Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan penyerapan produk di pasar dan mengindikasikan kurangnya kapasitas. Hal ini terefleksikan dari harga pupuk urea di pasar global sepanjang tahun 2025 yang selain berfluktuasi, juga cenderung meningkat di kisaran USD346.10–USD474.56 per metric ton. Adapun kisaran harga urea global di tahun 2024 adalah USD333.50 – USD338.24 per metric ton.

INTERNATIONAL FERTILIZER INDUSTRY OVERVIEW

Referring to data from Fertecon and the World Bank Commodity Price Report, January 2026, international urea and ammonia prices in 2025 increased by 13.4% and 24.9%, respectively. The increase in ammonia prices was mainly influenced by fluctuations in global gas prices, which continued to be affected by conflicts in Europe. Meanwhile, the increase in urea prices was driven by several key factors, namely rising gas prices, declining global production, supply disruptions from the Middle East, export restrictions imposed by China as the world's largest urea producer, and increasing global demand.

Global urea capacity in 2025 was estimated to have reached approximately 246.0 million tons per year, an increase of 4.41 million tons from approximately 241.9 million tons in the previous year. Meanwhile, global demand for urea fertilizer in 2025 was estimated to be in the range of 180–200 million tons. This indicates increased market absorption and suggests insufficient capacity. This condition was reflected in global urea fertilizer prices throughout 2025, which not only fluctuated but also generally increased within the range of USD346.10–USD474.56 per metric ton. In comparison, global urea prices in 2024 ranged from USD333.50 to USD338.24 per metric ton.

Sementara kapasitas amoniak global 2025 diperkirakan terus meningkat mencapai sekitar 200,7 juta ton setara Nitrogen (Mt N), terutama dikontribusikan oleh pertambahan kapasitas di Rusia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Penambahan kapasitas ini selaras dengan naiknya kapasitas produksi urea, mengingat sebagian besar amoniak diserap menjadi bahan baku bagi pembuatan urea. Adapun realisasi produksi amoniak di tahun 2025 adalah sekitar 200,4 juta metrik ton, naik dari kisaran 150–180 juta metrik ton di tahun sebelumnya. Tiongkok tetap menjadi produsen sekaligus konsumen amoniak terbesar.

Harga amoniak di pasar global sangat berfluktuasi, dipengaruhi oleh intensitas pasokan yang juga berfluktuasi, disrupsi rantai pasok amoniak, gangguan cuaca maupun hambatan logistik. Namun demikian rata-rata harga amoniak global di tahun 2025 adalah di kisaran USD107,9–131,9 per ton. Harga tersebut lebih tinggi dari harga amoniak di tahun 2024 yang berada di kisaran 98,1–110,7 per ton..

KONDISI INDUSTRI PUPUK NASIONAL TAHUN 2025

Industri pupuk nasional memiliki peran strategis dalam mendukung produktivitas sektor pertanian serta memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, ketersediaan pupuk menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional sekaligus kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengelolaan industri pupuk di Indonesia tidak hanya berorientasi pada aspek komersial, tetapi juga memiliki dimensi penugasan publik dalam rangka mendukung agenda pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Secara struktural, industri pupuk nasional terbagi menjadi dua segmen utama, yaitu Public Service Obligation (PSO) atau pupuk bersubsidi dan non-PSO (komersial). Segmen PSO merupakan mekanisme intervensi pemerintah yang bertujuan menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani melalui skema harga pupuk. Sementara itu, segmen non-PSO mencakup pasar pupuk komersial yang melayani kebutuhan sektor perkebunan, hortikultura, industri, serta ritel pertanian. Struktur pasar ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara dukungan terhadap sektor pangan strategis dengan pengembangan pasar pupuk komersial yang lebih luas untuk menjaga keberlanjutan bisnis industri pupuk nasional.

Meanwhile, global ammonia capacity in 2025 was estimated to continue increasing to approximately 200.7 million tons of nitrogen equivalent (Mt N), primarily contributed by additional capacity in Russia, the United States, and China. This increase in capacity was in line with higher urea production capacity, considering that most ammonia is used as feedstock for urea production. Actual ammonia production in 2025 reached approximately 200.4 million metric tons, up from around 150–180 million metric tons in the previous year. China remained both the largest producer and consumer of ammonia.

Ammonia prices in the global market fluctuated significantly, influenced by fluctuations in supply intensity, ammonia supply chain disruptions, weather disturbances, and logistical constraints. Nevertheless, the average global ammonia price in 2025 ranged from USD107.9 to USD131.9 per ton. This was higher than ammonia prices in 2024, which ranged from USD98.1 to USD110.7 per ton.

NATIONAL FERTILIZER INDUSTRY CONDITIONS

The national fertilizer industry plays a strategic role in supporting the productivity of the agricultural sector while strengthening national food security and self-sufficiency. In the context of national economic development, the availability of fertilizer is one of the key factors in maintaining the stability of the national food supply as well as farmers' welfare. Therefore, the management of the fertilizer industry in Indonesia is not solely oriented toward commercial aspects, but also carries a public service mandate dimension in support of agricultural sector development and national food security agendas.

Structurally, the national fertilizer industry is divided into two main segments, namely Public Service Obligation (PSO) or subsidized fertilizers and non-PSO (commercial) fertilizers. The PSO segment represents a government intervention mechanism aimed at ensuring the availability and affordability of fertilizers for farmers through a fertilizer pricing scheme. Meanwhile, the non-PSO segment encompasses the commercial fertilizer market that serves the needs of plantation, horticulture, industrial, and agricultural retail sectors. This market structure reflects the Government's efforts to strike a balance between supporting strategic food sectors and developing a broader commercial fertilizer market to maintain the sustainability of the national fertilizer industry's business operations.

Dalam rangka menjaga stabilitas produksi pertanian nasional, Pemerintah memberikan penugasan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai holding BUMN pupuk untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2025 diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 mengenai tata kelola pupuk bersubsidi. Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional sebesar 9,55 juta ton yang diperuntukkan bagi sekitar 14 juta petani di seluruh Indonesia.

Jenis pupuk yang termasuk dalam skema pupuk bersubsidi pada tahun 2025 meliputi Urea, NPK, NPK Kakao, ZA, serta pupuk organik. Penyaluran pupuk bersubsidi tersebut diprioritaskan untuk mendukung peningkatan produktivitas sembilan komoditas strategis pertanian, yaitu subsektor tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, dan kedelai; subsektor hortikultura yang meliputi cabai, bawang merah, dan bawang putih; serta subsektor perkebunan rakyat yang meliputi tebu rakyat, kakao, dan kopi. Penetapan komoditas prioritas ini bertujuan memastikan dukungan input produksi secara lebih terarah terhadap komoditas yang memiliki kontribusi penting dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas pupuk bagi petani, Pemerintah juga melakukan penyesuaian kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Penyesuaian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025. Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah menurunkan HET pupuk bersubsidi sekitar 20% yang mulai berlaku efektif sejak 22 Oktober 2025, dengan tujuan meningkatkan keterjangkauan pupuk bagi petani serta memperkuat dukungan terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian. Dukungan kebijakan pupuk bersubsidi tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan produksi pertanian nasional.

Pada tahun 2025, Pemerintah menyatakan bahwa Indonesia berhasil mencapai swasembada beras, yang ditandai dengan kemampuan produksi domestik dalam memenuhi kebutuhan konsumsi nasional tanpa ketergantungan pada impor. Selain itu, produksi jagung nasional juga menunjukkan kondisi surplus sehingga mampu memenuhi kebutuhan domestik. Capaian

To maintain the stability of national agricultural production, the Government has assigned PT Pupuk Indonesia (Persero) as the state-owned fertilizer holding company to procure and distribute subsidized fertilizers to farmers in accordance with allocations determined by the Government. The subsidized fertilizer distribution policy in 2025 is regulated under Minister of Agriculture Regulation No. 15 of 2025 concerning the Allocation and Highest Retail Price (HET) of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector, which serves as the implementation of Presidential Regulation No. 6 of 2025 regarding subsidized fertilizer governance. Through this policy, the Government established a national subsidized fertilizer allocation of 9.55 million tons intended for approximately 14 million farmers throughout Indonesia.

The types of fertilizers included in the subsidized fertilizer scheme in 2025 comprise Urea, NPK, NPK Cocoa, ZA, and organic fertilizers. The distribution of these subsidized fertilizers is prioritized to support productivity improvements for nine strategic agricultural commodities, namely the food crop subsector consisting of rice, corn, and soybeans; the horticultural subsector consisting of chili peppers, shallots, and garlic; and the smallholder plantation subsector consisting of sugarcane, cocoa, and coffee. The determination of these priority commodities is intended to ensure more targeted production input support for commodities that make significant contributions to maintaining the stability of the national food supply.

As part of efforts to improve fertilizer accessibility for farmers, the Government also adjusted the Highest Retail Price (HET) policy for subsidized fertilizers. The adjustment was stipulated through Minister of Agriculture Decree No. 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 concerning Amendments to Minister of Agriculture Decree No. 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 concerning Types, Highest Retail Prices, and Allocations of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector for Fiscal Year 2025. Through this policy, the Government reduced the HET of subsidized fertilizers by approximately 20%, effective October 22, 2025, with the objective of increasing fertilizer affordability for farmers and strengthening support for improving agricultural sector productivity. This subsidized fertilizer policy support also contributed to increased national agricultural production.

In 2025, the Government stated that Indonesia successfully achieved rice self-sufficiency, marked by the ability of domestic production to meet national consumption needs without reliance on imports. In addition, national corn production also recorded a surplus condition, enabling it to meet domestic demand. These achievements serve as important indicators that

tersebut menjadi indikator penting bahwa penguatan kebijakan sektor pertanian, termasuk ketersediaan pupuk yang memadai, memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.

Dari sisi kebutuhan industri, permintaan pupuk nasional pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 4,6 juta ton untuk pupuk urea pada sektor pangan serta sekitar 4,4 juta ton untuk pupuk NPK, seiring dengan meningkatnya intensifikasi pertanian dan upaya peningkatan produktivitas lahan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pupuk Indonesia Group terus mengoptimalkan kapasitas produksinya. Hingga tahun 2025, kapasitas produksi urea Pupuk Indonesia Group tercatat mencapai sekitar 9,36 juta ton per tahun, atau setara dengan lebih dari 200% dari kebutuhan urea sektor pangan nasional. Sementara itu, kapasitas produksi NPK mencapai sekitar 4,6 juta ton per tahun, relatif sebanding dengan kebutuhan nasional. Selain itu, kapasitas produksi amonia mencapai sekitar 7,09 juta ton per tahun, yang sebagian digunakan sebagai bahan baku produksi pupuk serta berbagai industri kimia lainnya.

Sebagai bagian dari Pupuk Indonesia Group, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) memiliki peran strategis dalam mendukung penyediaan pupuk nasional, khususnya untuk jenis pupuk bersubsidi dan wilayah distribusi yang menjadi tanggung jawab sesuai alokasi dari Pupuk Indonesia serta berbagai ketentuan dalam tata kelola pupuk bersubsidi. PUSRI berperan dalam penyediaan pupuk Urea dan NPK pada berbagai wilayah rayon distribusi yang mencakup sebagian besar wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali dan sebagian Jawa Timur untuk kebutuhan pupuk bersubsidi.

Untuk segmen pupuk komersial, PUSRI melaksanakan penjualan sesuai koordinasi Sales & Operation (S&OP) Pupuk Indonesia di seluruh wilayah Indonesia dan pasar ekspor dengan prioritas pemenuhan pasar dalam negeri. Melalui dukungan kapasitas produksi, keandalan operasional pabrik, serta jaringan distribusi yang terintegrasi dengan sistem logistik Pupuk Indonesia Group, PUSRI berkomitmen memastikan ketersediaan pupuk bagi petani dapat terpenuhi secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat, tepat harga, dan tepat sasaran.

strengthened agricultural sector policies, including adequate fertilizer availability, play a strategic role in improving productivity while maintaining the stability of the national food supply.

From the industrial demand perspective, national fertilizer demand in 2025 is estimated to reach approximately 4.6 million tons of urea fertilizer for the food sector and approximately 4.4 million tons of NPK fertilizer, in line with increasing agricultural intensification and efforts to improve land productivity. To meet this demand, the Pupuk Indonesia Group continues to optimize its production capacity. As of 2025, the urea production capacity of the Pupuk Indonesia Group reached approximately 9.36 million tons per year, equivalent to more than 200% of the urea requirements of the national food sector. Meanwhile, NPK production capacity reached approximately 4.6 million tons per year, relatively comparable to national demand. In addition, ammonia production capacity reached approximately 7.09 million tons per year, a portion of which is used as raw material for fertilizer production and various other chemical industries.

As part of the Pupuk Indonesia Group, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) plays a strategic role in supporting the national fertilizer supply, particularly for subsidized fertilizers and distribution areas assigned in accordance with allocations from Pupuk Indonesia and various provisions governing subsidized fertilizer management. PUSRI is responsible for supplying Urea and NPK fertilizers across various distribution zones covering most areas of South Sumatra, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Central Java, the Special Region of Yogyakarta, Bali, and parts of East Java for subsidized fertilizer requirements.

For the commercial fertilizer segment, PUSRI conducts sales in accordance with Pupuk Indonesia's Sales & Operations Planning (S&OP) coordination throughout Indonesia and export markets, with priority given to meeting domestic market demand. Through production capacity support, reliable plant operations, and a distribution network integrated with the logistics system of the Pupuk Indonesia Group, PUSRI is committed to ensuring fertilizer availability for farmers in a timely manner, in the right quantity, type, quality, location, price, and target recipients.

Selain menjalankan peran dalam penyediaan pupuk nasional, PUSRI juga berkontribusi dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani melalui program “Makmur” melalui pendampingan budidaya secara komprehensif, penerapan praktik/teknologi pertanian modern, intensifikasi budidaya modern serta layanan agronomi terintegrasi. Dari aspek keberlanjutan, PUSRI secara konsisten berupaya dalam melaksanakan berbagai inisiatif hijau dan pengurangan emisi karbon (dekarbonisasi) terstruktur secara bertahap. Pada akhir 2025, PUSRI mendapatkan penugasan inkubasi bisnis proyek Green Ammonia dari Pupuk Indonesia dan berkolaborasi dengan mitra strategis internasional, yaitu Toyo Engineering dan Itochu Corporation dari Jepang sebagai bagian dari upaya mendukung dekarbonisasi industri pupuk sekaligus membuka peluang pengembangan pasar clean ammonia di masa depan.

Melalui berbagai peran tersebut, PUSRI terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus berpartisipasi dalam transformasi industri pupuk menuju model bisnis yang lebih berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan keandalan operasional, penguatan layanan agronomi, serta pengembangan inisiatif strategis, PUSRI berkomitmen untuk terus memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian nasional, mendukung program swasembada pemerintah sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan.

In addition to its role in supplying fertilizers nationally, PUSRI also contributes to improving farmer productivity and welfare through the “Makmur” program by providing comprehensive cultivation assistance, implementing modern agricultural practices and technologies, promoting modern cultivation intensification, and delivering integrated agronomy services. From a sustainability perspective, PUSRI consistently strives to implement various green initiatives and structured, gradual carbon emission reduction (decarbonization) efforts. At the end of 2025, PUSRI was assigned to incubate the Green Ammonia business project by Pupuk Indonesia and collaborated with international strategic partners, namely Toyo Engineering and Itochu Corporation of Japan, as part of efforts to support fertilizer industry decarbonization while opening opportunities for the future development of the clean ammonia market.

Through these various roles, PUSRI continues to strengthen its contribution to supporting national food security while participating in the transformation of the fertilizer industry toward a more sustainable business model. By optimizing operational reliability, strengthening agronomy services, and developing strategic initiatives, PUSRI remains committed to continuously creating added value for the national agricultural sector, supporting the Government’s self-sufficiency programs while advancing the sustainable green economic development agenda.

STRATEGI PERSEROAN

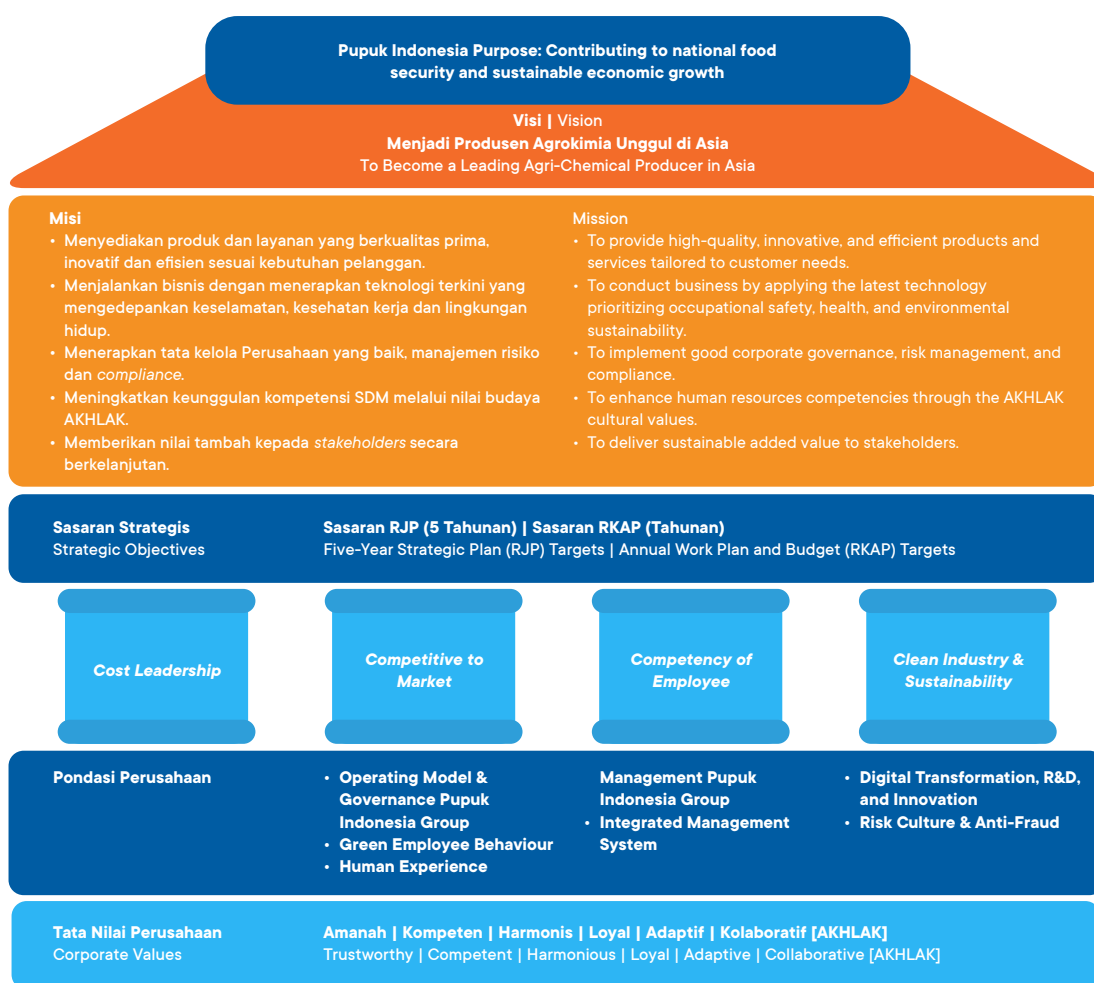
COMPANY STRATEGY

STRATEGIC HOUSE PUSRI

Mempertimbangkan dan mengantisipasi kondisi usaha di tahun 2025 dan tahun-tahun mendatang yang berkembang dinamis penuh tantangan tersebut, PUSRI telah menyiapkan dan mulai menjalankan inisiatif strategis, yang digambarkan dalam Strategic House PUSRI sebagai berikut.

PUSRI STRATEGIC HOUSE

In consideration of and in anticipation of business conditions in 2025 and the years ahead, which continue to evolve dynamically and present significant challenges, PUSRI has prepared and begun implementing strategic initiatives, which are illustrated in the PUSRI Strategic House as follows.



STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PUSRI 2025

Dalam rangka meningkatkan produktivitas kinerja segmen usaha pupuk dan non pupuk, PUSRI menjalankan strategi 4C (*cost leadership, competitive to market, competency of employee dan clean industry & sustainability*) melalui inisiatif strategis di tahun 2025 yang merupakan implementasi “Strategic House” tersebut,, sebagaimana digambarkan pada bagan dan uraian ringkas berikut:

PUSRI BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY 2025

In order to enhance the performance productivity of both the fertilizer and non-fertilizer business segments, PUSRI implements the 4C strategy (*cost leadership, competitive to market, competency of employee, and clean industry & sustainability*) through strategic initiatives in 2025, which represent the implementation of the aforementioned “PUSRI Strategic House,” as illustrated in the following diagram and summarized in the brief description below:

KONSEP STRATEGI 4C PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

4C STRATEGIC CONCEPT OF PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG



Berbagai program strategis yang dijalankan di tahun 2025 sebagai implementasi Inisiatif Strategis 4C tersebut, adalah sebagai berikut:

The various strategic programs implemented in 2025 as part of the execution of these 4C Strategic Initiatives are as follows:

Inisiatif Strategis 4C 4C Strategic Initiative	Program Strategis Strategic Program
Cost Leadership	- Proyek pembangunan pabrik P-IIIB - Inbound logistic excellence - Operational & maintenance excellence - Restrukturisasi Anper sesuai program streamlining PI
Competitive to Market	- P-IIIB plant construction project - Inbound logistics excellence - Operational & maintenance excellence - Anper restructuring in accordance with the PI streamlining program

Inisiatif Strategis 4C 4C Strategic Initiative	Program Strategis Strategic Program
Competency of Employee	1. Implementasi roadmap Transformasi SDM PI Group 2. Implementasi pembelajaran dan pengembangan SDM selaras arah transformasi SDM PI Group 3. Implementasi Respectfull & Employee Wellbeing Policy 4. Program pengembangan budaya AKHLAK berkelanjutan untuk mendorong produktivitas, inovasi, leadership dan high performing culture 1. Implementation of the PI Group Human Capital Transformation roadmap 2. Implementation of learning and human capital development aligned with the PI Group Human Capital Transformation direction 3. Implementation of the Respectful & Employee Wellbeing Policy 4. Sustainable AKHLAK culture development program to drive productivity, innovation, leadership, and a high-performing culture
Clean Industry & Sustainability	1. Program dekarbonsasi sejalan target NZE tahun 2050 2. Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) bernilai tambah berbasis ESG, sustainable development goals (SDGs), dan circular economic 3. Program penguatan aspek K3 Perusahaan secara berkelanjutan. 4. Pelaksanaan penugasan inkubasi bisnis Green Ammonia dari Pupuk Indonesia 5. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi melalui kolaborasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku koordinator 1. Decarbonization program aligned with the Net Zero Emissions (NZE) 2050 target 2. Value-added Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs based on ESG principles, Sustainable Development Goals (SDGs), and the circular economy 3. Continuous strengthening of the Company's Occupational Health and Safety (OHS) aspects 4. Execution of the Green Ammonia business incubation assignment from Pupuk Indonesia 5. Distribution of subsidized fertilizers in accordance with the provisions of Minister of Agriculture Regulation No. 15 of 2025 concerning the Implementing Regulation of Presidential Regulation No. 6 of 2025 on the Governance of Subsidized Fertilizers, through collaboration with PT Pupuk Indonesia (Persero) as coordinator

ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECTS

KEBIJAKAN PEMASARAN

Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai produsen pupuk di Indonesia, Pusri memiliki kebijakan pemasaran yang sangat dipengaruhi oleh regulasi pemerintah, karena pupuk merupakan komoditas penting untuk sektor pertanian yang menopang perekonomian negara. Berikut adalah beberapa aspek kebijakan pemasaran yang diterapkan oleh Pusri:

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 343); yang dijadikan sebagai acuan dalam penyaluran pupuk bersubsidi secara akurat dan tepat sasaran. Pupuk merupakan komoditas yang penting dalam usaha mencapai ketahanan dan produksi pangan nasional

Dalam Permentan 15 Tahun 2025, Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk organik dan anorganik (urea, NPK dan NPK Formula khusus) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai Keputusan Menteri Pertanian No.1359/KPTS/HK.150/M/12/2025 tentang Jenis dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk HET pupuk Organik sebesar Rp 640,-/kg, pupuk Urea dipatok sebesar Rp1.800 /kg, pupuk NPK Rp 1.840,- /kg, pupuk ZA sebesar Rp 1.360,- /kg dan pupuk NPK formula khusus Rp 2.640,- /kg

Kemudian, penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke petani dilakukan berdasarkan data e-RDKK dengan batas alokasi per kecamatan yang ditetapkan melalui SK Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten. Alokasi pupuk bersubsidi dirinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah pupuk, dan sebaran wilayah. Sedangkan pertimbangan penetapan alokasi e-RDKK dan rincian alokasi per wilayah dengan mempertimbangkan luas baku sawah dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Adapun petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus tergabung ke dalam Kelompok Tani (Poktan) dan terdaftar dalam e-RDKK dan SIMLUHTAN, pendataan petani penerima melalui e-RDKK dapat dievaluasi 4 bulan sekali pada tahun berjalan, sehingga data petani penerima dan kebutuhan dapat dilakukan pembaharuan ketika sistem e-RDKK dibuka. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu), Hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), dan Perkebunan (Tebu rakyat, kakao, kopi) dengan luas lahan yang diusahakan oleh petani maksimal

MARKETING POLICY

In fulfilling its obligations as a fertilizer producer in Indonesia, PUSRI's marketing policy is heavily influenced by government regulations, as fertilizer is an essential commodity for the agricultural sector that supports the national economy. The following are several aspects of the marketing policies implemented by PUSRI:

Minister of Agriculture Regulation No. 15 of 2025 concerning the Implementing Regulation of Presidential Regulation No. 6 of 2025 on the Governance of Subsidized Fertilizers (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025 No. 343) serves as the reference for the accurate and targeted distribution of subsidized fertilizers. Fertilizer is a critical commodity in efforts to achieve national food security and food production.

Under Minister of Agriculture Regulation No. 15 of 2025, subsidized fertilizers consist of organic and inorganic fertilizers (urea, NPK, and special-formula NPK) with Highest Retail Prices (HET) established pursuant to Minister of Agriculture Decree No. 1359/KPTS/HK.150/M/12/2025 concerning the Types and Highest Retail Prices of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector. The HET for organic fertilizer is Rp640/kg, urea fertilizer is set at Rp1,800/kg, NPK fertilizer at Rp1,840/kg, ZA fertilizer at Rp1,360/kg, and special-formula NPK fertilizer at Rp2,640/kg.

Furthermore, the distribution of subsidized fertilizers from retail kiosks to farmers is carried out based on e-RDKK data, subject to allocation limits for each district established through decrees issued by Provincial/Regency Agricultural Offices. Subsidized fertilizer allocations are detailed by fertilizer type, quantity, and geographic distribution. The determination of e-RDKK allocations and regional allocation details takes into account the area of established rice fields and Sustainable Food Agricultural Land (LP2B).

Farmers eligible to receive subsidized fertilizers must be members of a Farmer Group (Poktan) and be registered in both the e-RDKK and SIMLUHTAN systems. Data on beneficiary farmers through e-RDKK may be evaluated every four months during the current year, enabling updates to beneficiary data and fertilizer requirements whenever the e-RDKK system is opened. Subsidized fertilizers are intended for farmers engaged in the Food Crops subsector (rice, corn, soybeans, cassava), Horticulture subsector (chili peppers, shallots, garlic), and Plantation subsector (smallholder sugarcane, cocoa, and coffee), with a maximum cultivated land area of 2 (two)

2(dua) hektare setiap musim tanam dan diutamakan petani kecil yang melakukan usaha tani dengan lahan maksimal 0,5 hektare

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Adapun pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN melalui produsen, distributor, dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing sesuai kemampuan produksi dengan prinsip efisien dan efektif.^{1,2}

PUSRI juga memanfaatkan PUD dan PPTS dalam rantai pasokan produknya sehingga dapat mencapai petani maupun pengguna akhir produk lainnya, khususnya untuk pupuk bersubsidi yang ada di wilayah rayon tahun 2025.

hectares per planting season, while priority is given to small farmers cultivating a maximum of 0.5 hectares of land.

The procurement and distribution of subsidized fertilizers are carried out in accordance with Minister of Agriculture Regulation No. 15 of 2025 concerning the Implementing Regulation of Presidential Regulation No. 6 of 2025 on the Governance of Subsidized Fertilizers. The provision of subsidized fertilizers is undertaken in accordance with assignments from the Minister of State-Owned Enterprises through producers, distributors, and retailers within their respective areas of responsibility, based on production capabilities and guided by the principles of efficiency and effectiveness.

PUSRI also utilizes PUD and PPTS within its product supply chain, enabling it to reach farmers and other end users of its products, particularly for subsidized fertilizers within its designated distribution zones in 2025.

Distributor dan Pengecer / Kios PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Distributor and Retailers / Kiosks of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

No	Provinsi Province	Distributor	Kios Kiosk
1	Sumatera Selatan South Sumatra	42	536
2	Lampung	66	1.464
3	Bengkulu	8	371
4	Jambi	10	283
5	Kepulauan Babel Bangka-Belitung Islands	1	42
6	Jawa Tengah Central Java	169	1.873
7	DIY D.I. Yogyakarta	19	170
8	Jawa Timur East Java	72	2.579
9	Bali	8	142
Total		395	7.460

PUSRI memandang kepuasan pelanggan sebagai kunci untuk mengembangkan usaha di masa depan dan oleh karenanya Perusahaan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai bentuk pelayanan yang fundamental. Untuk menjaga kepuasan pelanggan salah satu Langkah yang dilakukan Perseroan adalah menjaga kualitas produk, serta melakukan proses bisnis dengan menjalankan prosedur operasi yang terakreditasi. Pusri selalu mengutamakan kepuasan pelanggan secara profesional melalui peningkatan standar mutu produk dan pelayanan sesuai dengan prinsip "7 Tepat", yaitu: Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Penerima.

PUSRI views customer satisfaction as the key to developing its business in the future and, therefore, places customer satisfaction as a fundamental aspect of its service. To maintain customer satisfaction, one of the measures undertaken by the Company is to maintain product quality and conduct its business processes in accordance with accredited operating procedures. PUSRI consistently prioritizes customer satisfaction in a professional manner through continuous improvement of product quality standards and services in line with the "7 Rights" principle, namely: Right Type, Right Quantity, Right Price, Right Place, Right Time, Right Quality, and Right Recipient.

1. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240430/12/1761750/kementan-tetapkan-het-pupuk-subsidi-terbaru-2024-ini-perinciannya>
2. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240430/12/1761750/kementan-tetapkan-het-pupuk-subsidi-terbaru-2024-ini-perinciannya>

Dasar prinsip “7 Tepat” tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tepat Jenis

1. Pendistribusian pupuk ke wilayah kerja masing-masing produsen sesuai jumlah per jenis pupuk yang telah ditetapkan dalam SK Menteri Pertanian yang berlaku
2. Melakukan kawalan teknologi agar petani melaksanakan pemupukan berimbang

Tepat Jumlah

1. Memenuhi alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai SK Menteri Pertanian yang berlaku.
2. Memenuhi ketentuan stok sesuai Peraturan Menteri Pertanian yang berlaku.
3. Melakukan distribusi pupuk ke Lini II/III sesuai dengan kebutuhan dengan mengoptimalkan fungsi sarana distribusi (ekspediter, dan kapal) dan memperhatikan stok dan alokasi masing-masing wilayah.
4. Melakukan perencanaan dan evaluasi pengadaan melalui rapat koordinasi minimal 1 bulan sekali atau sesuai kebutuhan

Tepat Harga

1. Harga jual di tingkat pengecer sesuai dengan HET

Tepat Tempat

1. Pendistribusian pupuk sesuai dengan wilayah kerja pertanian yang telah ditetapkan per produsen pupuk.
2. Tersedianya kios pengecer resmi di sentra lokasi pertanian.
3. Menyiapkan sarana gudang sesuai kebutuhan di Kabupaten.

Tepat Waktu

1. Tersedianya pupuk di Lini IV pengecer saat dibutuhkan oleh petani.

Tepat Mutu

1. Pengawasan terhadap mutu pupuk sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ISO 9001 dan Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Pelaksanaan uji mutu oleh surveyor, baik untuk pupuk produksi sendiri dan impor di setiap lini.

Tepat Penerima

The basis of the “7 Right Principles” is Presidential Regulation Number 6 of 2025, enacted on January 30, 2025, with the following description:

Right Type

1. Distribution of fertilizers to the designated working areas of each producer according to the quantity and type of fertilizer stipulated in the applicable Minister of Agriculture Decree.
2. Providing technological guidance to ensure farmers implement balanced fertilization practices.

Right Quantity

1. Fulfilling subsidized fertilizer allocation requirements in accordance with the applicable Minister of Agriculture Decree.
2. Complying with stock requirements as stipulated under the applicable Minister of Agriculture Regulations.
3. Distributing fertilizers to Line II/III facilities according to demand by optimizing the functions of distribution infrastructure (freight forwarders and vessels) while taking into account stock levels and allocations for each region.
4. Conducting procurement planning and evaluation through coordination meetings at least once a month or as required.

Right Price

1. Ensuring retail selling prices comply with the Highest Retail Price (HET).

Right Place

1. Distributing fertilizers in accordance with the agricultural service areas assigned to each fertilizer producer.
2. Ensuring the availability of authorized retail kiosks in agricultural production centers.
3. Providing warehouse facilities as needed at the regency level.

Right Time

1. Ensuring fertilizers are available at Line IV retail outlets when needed by farmers.

Right Quality

1. Monitoring fertilizer quality in accordance with the requirements set forth in ISO 9001 and the Indonesian National Standard (SNI).
2. Conducting quality testing by surveyors for both domestically produced and imported fertilizers at every distribution line.

Right Recipient

STRATEGI PEMASARAN

Perusahaan mengembangkan kegiatan pemasaran melalui berbagai strategi dan kegiatan sebagai berikut:

1. *Customer Centric Model*, melalui *Customer Centric Model*, perusahaan memperkuat hubungan Kerja sama dengan Distributor dan *Retailer*, mengadakan pendekatan serta memberikan solusi kepada petani dengan menerapkan *Key Account Management* dengan penetapan harga yang terkoordinasi
2. Program Makmur merupakan program khusus untuk pendampingan intensif kepada para petani dalam budidaya pertanian yang berkelanjutan dengan melibatkan rantai pasok yang didukung teknologi berbasis *Triple Bottom-Line 3P (People, Planet, Profit)* untuk memakmurkan Petani Indonesia. Adapun manfaat yang ditawarkan kepada para petani dengan bergabung di dalam program Makmur antara lain:
 - a. Membantu meningkatkan produktivitas pertanian
 - b. Membantu peningkatan keuntungan petani
 - c. Adopsi praktik pertanian unggul.
 - d. Mendorong penggunaan pupuk non-subsidi
3. Program Peningkatan Produktivitas Pangan Metode edukasi berupa pendampingan dan kawalan teknologi budidaya pertanian kepada petani atau kelompok tani yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten dan Penyuluh Pertanian tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian.
4. Pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan
 - a. Mengembangkan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman.
 - b. Mengembangkan *agrisolution services* untuk memastikan *customer stickiness*.
 - c. Mengembangkan riset institute dan melakukan riset pasar serta advokasi *policy development*.
 - d. Melakukan *market intelligent* terhadap kebutuhan pupuk oleh pihak perkebunan dan industri.
 - e. Memanfaatkan jaringan distributor dan pengecer eksisting dalam mencapai target penjualan sektor pangan, hortikultura dan perkebunan rakyat.
 - f. Aktif melakukan penawaran kepada pembeli baru, baik dalam negeri maupun ekspor dengan jaminan *supply*.
 - g. Melakukan rekrutmen tenaga penjualan (asisten lapangan) yang berkompeten dalam bidang penjualan maupun agronomis.
 - h. Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi dan pengetahuan dibidang penjualan.

MARKETING STRATEGY

The Company develops its marketing activities through various strategies and activities as follows:

1. Customer Centric Model Through the Customer Centric Model, the Company strengthens cooperative relationships with distributors and retailers, conducts engagement, and provides solutions to farmers by implementing Key Account Management with coordinated pricing.
2. Makmur Program The Makmur Program is a special program aimed at providing intensive assistance to farmers in sustainable agricultural cultivation by involving a supply chain supported by Triple Bottom-Line technology based on the 3P principle (People, Planet, Profit) to improve the welfare of Indonesian farmers. The benefits offered to farmers participating in the Makmur Program include:
 - a. Helping increase agricultural productivity.
 - b. Helping improve farmers' profitability.
 - c. Adoption of best agricultural practices.
 - d. Encouraging the use of non-subsidized fertilizers.
3. Food Productivity Improvement Program Educational methods through mentoring and technological support in agricultural cultivation for farmers or farmer groups in collaboration with Regency Agricultural Offices and subdistrict-level agricultural extension officers in order to increase agricultural productivity.
4. Marketing to Increase Sales Volume
 - a. Developing products that can meet plant nutritional requirements.
 - b. Developing agrisolution services to ensure customer stickiness.
 - c. Developing a research institute and conducting market research as well as policy development advocacy.
 - d. Conducting market intelligence on fertilizer demand from plantation and industrial sectors.
 - e. Utilizing existing distributor and retailer networks to achieve sales targets in the food, horticulture, and smallholder plantation sectors.
 - f. Actively offering products to new buyers, both domestic and export markets, with supply guarantees.
 - g. Recruiting competent sales personnel (field assistants) in both sales and agronomy.
 - h. Providing training to improve competency and knowledge in the sales field.

- i. Peningkatan layanan dalam penjualan.
- j. Menghilangkan penggunaan gancu baik di lini I, II dan III.
- k. Survei dan Pemetaan terhadap kebutuhan pupuk.
- l. Membangun *branding* produk melalui maskot produk.

- i. Improving sales services.
- j. Eliminating the use of hooks (gancu) in Lines I, II, and III.
- k. Conducting surveys and mapping fertilizer demand.
- l. Building product branding through product mascots.

PANGSA PASAR

Hingga saat ini, kebutuhan pupuk subsidi secara nasional sekitar 24 juta ton. Sedangkan kebutuhan non subsidi juga terus berkembang, baik untuk persawahan, perkebunan maupun industri.

PUSRI sebagai anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang fokus pada bisnis pupuk, memiliki peran strategis untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Khususnya di wilayah yang menjadi area bisnis Perusahaan, sehingga pangsa pasarnya menjadi dominan.

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI/PUPUK PSO

Pemerintah memberikan penugasan atau Public Service Obligation (PSO) kepada produsen pupuk untuk melakukan pengadaan dan penyaluran pupuk sampai ke tangan petani dengan prinsip '7 (tujuh) Tepat', yakni Tepat Waktu, Tepat Harga, Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Tempat, Tepat Mutu, dan dan Tepat Sasaran Penerima PT Pupuk Indonesia (Persero) menerima penugasan dari Pemerintah mengenai pengadaan dan pendistribusian pupuk PSO melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Sebagai bagian dari rantai pasok pupuk, PUSRI bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di setiap lini distribusi. Oleh karena itu, PUSRI melakukan perencanaan untuk pengadaan yang dimulai dari ketersediaan stok di lini I, kesiapan armada kapal dan truk, bongkar muat di pelabuhan tujuan, sampai dengan kesiapan sarana pergudangan..

MARKET SHARE

To date, national demand for subsidized fertilizers is approximately 24 million tons. Meanwhile, demand for non-subsidized fertilizers continues to grow for rice farming, plantation, and industrial sectors.

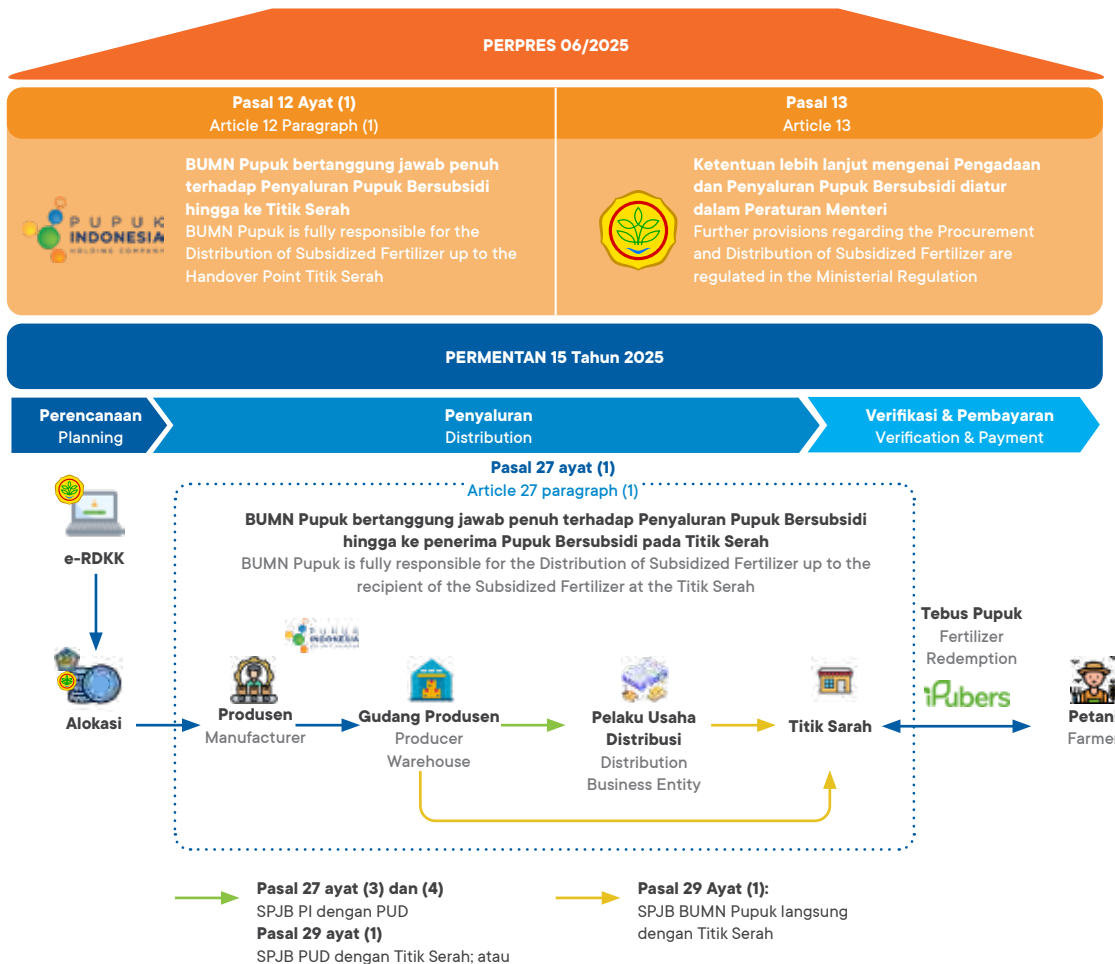
As a subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero) focused on the fertilizer business, PUSRI plays a strategic role in meeting this market demand, particularly in the regions that constitute the Company's business areas, where its market share is consequently dominant.

DISTRIBUTION OF SUBSIDIZED FERTILIZER/PSO FERTILIZER

The Government assigns a Public Service Obligation (PSO) to fertilizer producers to procure and distribute fertilizer to farmers based on the principle of the "7 Rights," namely Right Time, Right Price, Right Type, Right Quantity, Right Place, Right Quality, and Right Recipient Target. PT Pupuk Indonesia (Persero) receives assignments from the Government regarding the procurement and distribution of PSO fertilizer through Minister of Agriculture Regulation Number 15 of 2025 concerning the Implementing Regulation of Presidential Regulation Number 6 of 2025 on the Governance of Subsidized Fertilizer. As part of the fertilizer supply chain, PUSRI is responsible for ensuring the availability of subsidized fertilizer stock at every distribution line. Therefore, PUSRI conducts procurement planning starting from stock availability at Line I, vessel and truck fleet readiness, loading and unloading activities at destination ports, and warehouse facility readiness.

Skema Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Subsidized Fertilizer Distribution Governance Scheme



Sesuai bagan di atas, PUSRI memiliki skema alur distribusi pupuk yang menjadi panduan bagi Perusahaan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

Mengacu pada surat No. 25756/A/PJ/C72/ET/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Pelaksanaan Sentralisasi Pelaporan dan Penagihan Pupuk Subsidi serta addendum kontrak PT PI – Kementan yang disetujui per tanggal 03 Juli 2023, maka mulai bulan Juli 2023 dan seterusnya untuk wewenang, tanggung jawab, proses penyaluran dan penagihan piutang atas pupuk subsidi diambil alih oleh PT Pupuk Indonesia.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. PT Pupuk Indonesia (Persero) mengatur pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional mulai dari lini I hingga PPTS sesuai dengan prinsip '7 (tujuh) Tepat'. Produsen

As illustrated in the diagram above, PUSRI has established a fertilizer distribution flow scheme that serves as a guideline for the Company. The explanation is as follows.

Referring to Letter No. 25756/A/PJ/C72/ET/2022 dated December 30, 2022 regarding the Implementation of Centralized Reporting and Billing of Subsidized Fertilizer, as well as the addendum to the contract between PT Pupuk Indonesia and the Ministry of Agriculture approved on July 3, 2023, beginning in July 2023 and thereafter, the authority, responsibility, distribution process, and receivables collection related to subsidized fertilizers were transferred to and assumed by PT Pupuk Indonesia.

In accordance with Minister of Agriculture Regulation No. 15 of 2025 concerning the Implementing Regulation of Presidential Regulation No. 6 of 2025 on the Governance of Subsidized Fertilizers, PT Pupuk Indonesia (Persero) regulates the procurement and distribution of subsidized fertilizers nationwide for the agricultural sector, from

wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip tersebut dan memiliki/menguasai gudang di lini III pada wilayah tanggung jawabnya.

1. BUMN Pupuk bertanggung jawab penuh terhadap Penyaluran Pupuk Bersubsidi hingga ke Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah (PPTS).
2. BUMN Pupuk wajib memenuhi penebusan Pupuk Bersubsidi oleh penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi.
3. Penyaluran Pupuk kepada PPTS dimulai dari pengajuan secara berjenjang mulai dari PPTS sampai ke Produsen.

Guna menjamin distribusi pupuk urea bersubsidi dan mencegah terjadinya penyimpangan penyaluran di lapangan, PUSRI menerapkan sistem penyaluran tertutup dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi menggunakan RDKK yang disusun oleh kelompok tani di lini empat pengecer. Adapun manfaat dari sistem distribusi tertutup tersebut adalah:

1. Mempermudah pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.
2. Memenuhi kebutuhan dan ketersediaan pupuk bagi petani sesuai kebutuhannya.
3. Menciptakan penyaluran pupuk yang lebih efektif.

Dengan sistem distribusi tertutup, para petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi diharuskan membuat kelompok-kelompok serta menyusun rencana kebutuhan pupuk bagi kelompoknya. Rencana tersebut dituangkan dalam form RDKK yang diketahui oleh petugas Dinas Pertanian setempat. Dari RDKK inilah penyaluran pupuk PSO dilakukan. Kelengkapan dan keakuratan data menjadi kunci keberhasilan aplikasi sistem RDKK.

DIGITALISASI PROSES PRODUKSI DAN DISTRIBUSI PUPUK PUSRI

Dalam rangka memonitoring perencanaan dan pengendalian operasional produksi berbasis digital, PT Pusri mengembangkan aplikasi *Integrated Plant Management System* (IPMS) yang menyediakan informasi secara menyeluruh dari hulu ke hilir. IPMS berfungsi untuk memantau performa operasi pabrik dengan mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada di lingkungan operasi dan produksi. Selain itu, guna mendukung optimasi pemeliharaan serta monitoring kesehatan, peralatan, dikembangkan pula aplikasi Asset

Line I facilities through to PPTS, based on the "7 Rights" principle. Producers are required to ensure the smooth distribution of subsidized fertilizers in accordance with this principle and must own and/or control Line III warehouses within their respective areas of responsibility.

1. The State-Owned Fertilizer Enterprise (SOE Fertilizer Company) is fully responsible for the distribution of subsidized fertilizers up to the Subsidized Fertilizer Recipient at the Point of Delivery (PPTS).
2. The SOE Fertilizer Company is required to fulfill the redemption of subsidized fertilizers by eligible recipients at the Point of Delivery (PPTS) in accordance with the allocated subsidized fertilizer quota.
3. The distribution of fertilizers to the Point of Delivery (PPTS) begins through a tiered submission process, starting from the PPTS and proceeding through the distribution chain to the Producer.

To ensure the distribution of subsidized urea fertilizer and prevent irregularities in field distribution, PUSRI implements a closed distribution system in distributing subsidized fertilizers using the RDKK prepared by farmer groups at Line IV retailers. The benefits of this closed distribution system include:

1. Facilitating supervision of subsidized fertilizer distribution.
2. Meeting farmers' fertilizer needs and ensuring availability according to their requirements.
3. Creating a more effective fertilizer distribution process.

Through the closed distribution system, farmers as consumers of subsidized fertilizers are required to form groups and prepare fertilizer requirement plans for their groups. These plans are documented in the RDKK form acknowledged by local Agricultural Office officials. The distribution of PSO fertilizers is carried out based on the RDKK. The completeness and accuracy of the data are key factors for the successful implementation of the RDKK system.

DIGITALIZATION OF PUSRI FERTILIZER PRODUCTION AND DISTRIBUTION PROCESSES

To monitor planning and operational control of production through a digital-based system, PT Pusri has developed the Integrated Plant Management System (IPMS) application, which provides comprehensive information from upstream to downstream. IPMS functions to monitor plant operational performance by integrating all applications within the operations and production environment. In addition, to support maintenance optimization and equipment health monitoring, the Asset Performance Management (APM) application has

Performance Management (APM) untuk pengelola aset pabrik sehingga proses produksi semakin efektif dan efisien.

PUSRI juga memiliki Sistem informasi *Stock Opname* untuk percepatan dalam persiapan, pelaksanaan dan pelaporan *stock opname*. Selanjutnya ACIST PASTI Crawler merupakan teknologi pemeriksaan *Non Distruction Test* dengan menggunakan *Robotic Crawler* dan *Metode Phased Array* pada tube Katalis Reformer dan Analisis Data oleh AI ACIST. Serta *Interactive Process Display (IPD)* & *Smart Display Information (SDI)* yang merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan data dari *multi platform control* yang ada di proses produksi ke dalam IoT.

Saat ini *Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data*, dan *Connectivity* adalah hal yang sangat fundamental. Terlebih dalam bisnis untuk meraih potensi pertumbuhan terbaik dari berkembangnya ekosistem transaksi digital di Perusahaan.

Sampai dengan saat ini PT Pusri telah melaksanakan program kerja yang diturunkan dari ITMP 2020–2024 mencakup digitalisasi, infrastruktur, *cyber security* dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi sebanyak 17 Aplikasi
2. Peningkatan Infrastruktur dengan implementasi Backup Server, sewa Cloud DRC (*Disaster Recovery Center*), penggantian SAN Storage, penggantian infrastruktur kabel *Fiber Optic* di Gedung Utama dan pergantian *manageable switch*.
3. Peningkatan kapabilitas *Cyber Security*.

Selain itu, PUSRI juga telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen yang meliputi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & SMK3, ISO 17025 (Laboratorium Kalibrasi & Laboratorium Pengujian), ISO 17043, ISO 50001, ISO 37001, ISO 22301, SMP (Sistem Manajemen Pengamanan), DUKS (Sertifikat Dermaga untuk Kepentingan Sendiri) dan ISO 27001.

SISTEM PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI

Salah satu aspek penting dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kepada distributor mitra ialah ketepatan dan kecepatan waktu penyaluran pupuk bersubsidi. PUSRI memenuhi tantangan tersebut dengan menyempurnakan mekanisme penebusan melalui sistem dalam jaringan (*daring*).

Melalui sistem tersebut, PUSRI bekerja sama dengan bank-bank mitra secara *host-to-host* untuk sistem transaksi di bank dengan sistem penebusan pupuk bersubsidi di PUSRI.

been developed for plant asset management so that the production process becomes more effective and efficient.

PUSRI also has a Stock Opname Information System to accelerate the preparation, implementation, and reporting of stock-taking activities. Furthermore, ACIST PASTI Crawler is a Non-Destructive Test inspection technology using a robotic crawler and the Phased Array method on Reformer Catalyst tubes with data analysis by ACIST AI. Additionally, Interactive Process Display (IPD) and Smart Display Information (SDI) are systems that integrate data from multiple control platforms in the production process into the Internet of Things (IoT).

Currently, Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, and Connectivity are fundamental elements, particularly in business, to capture the best growth potential from the development of the Company's digital transaction ecosystem.

To date, PT Pusri has implemented work programs derived from the ITMP 2020–2024 covering digitalization, infrastructure, and cyber security, with the following details:

1. Development of 17 applications.
2. Infrastructure improvements through the implementation of Backup Servers, leasing of Cloud DRC (Disaster Recovery Center), replacement of SAN Storage, replacement of fiber optic cable infrastructure in the Main Building, and replacement of manageable switches.
3. Enhancement of cyber security capabilities.

In addition, PUSRI has also developed and implemented management systems including ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & SMK3, ISO 17025 (Calibration Laboratory & Testing Laboratory), ISO 17043, ISO 50001, ISO 37001, ISO 22301, SMP (Security Management System), DUKS (Jetty Certificate for Own Use), and ISO 27001.

SUBSIDIZED FERTILIZER REDEMPTION SYSTEM

One important aspect of improving service quality to distributor partners is the timeliness and speed of subsidized fertilizer distribution. PUSRI addresses this challenge by refining the redemption mechanism through an online system.

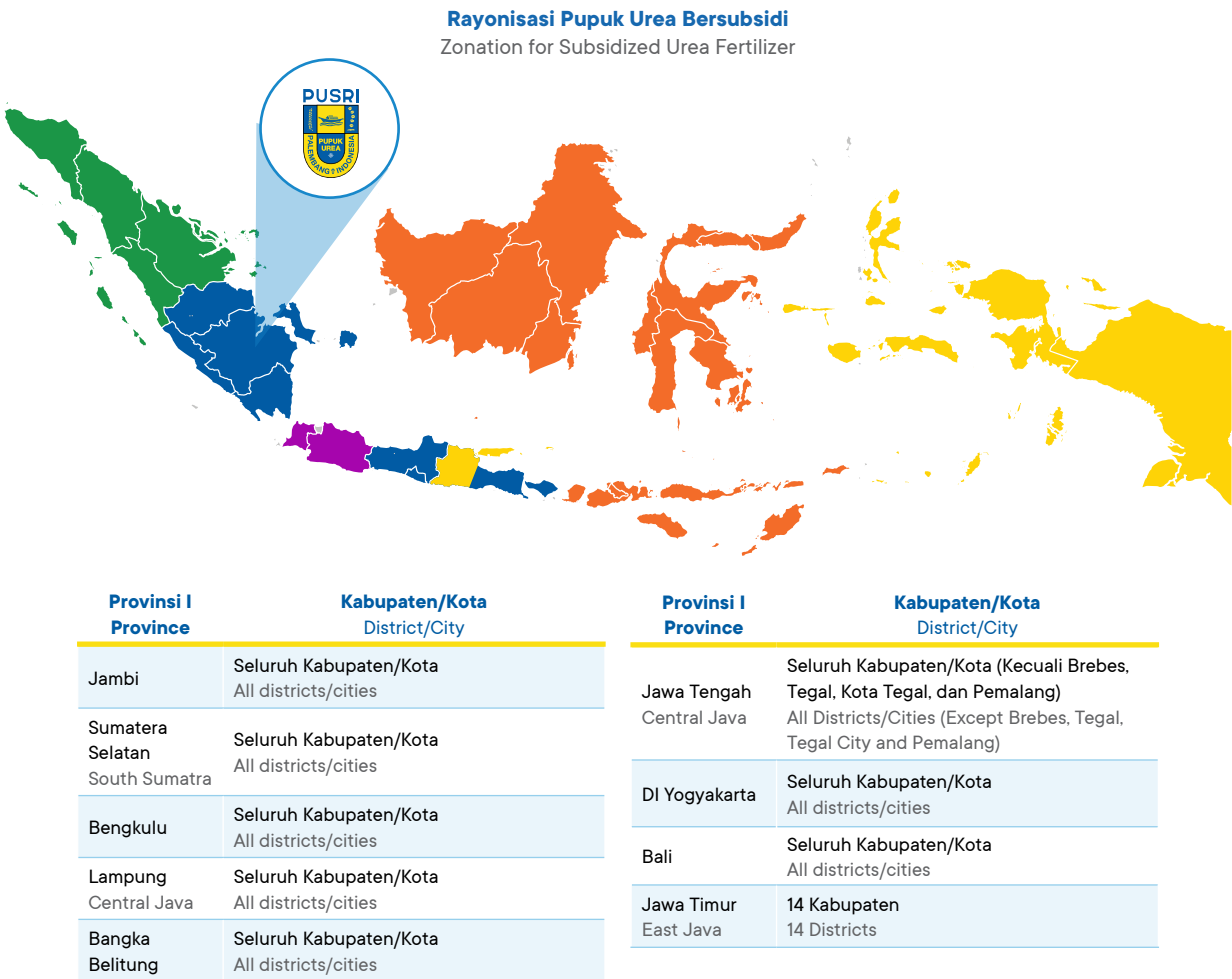
Through this system, PUSRI collaborates with partner banks on a host-to-host basis for bank transaction systems integrated with the subsidized fertilizer redemption system at PUSRI.

RAYONISASI DAN ALOKASI PUPUK SUBSIDI

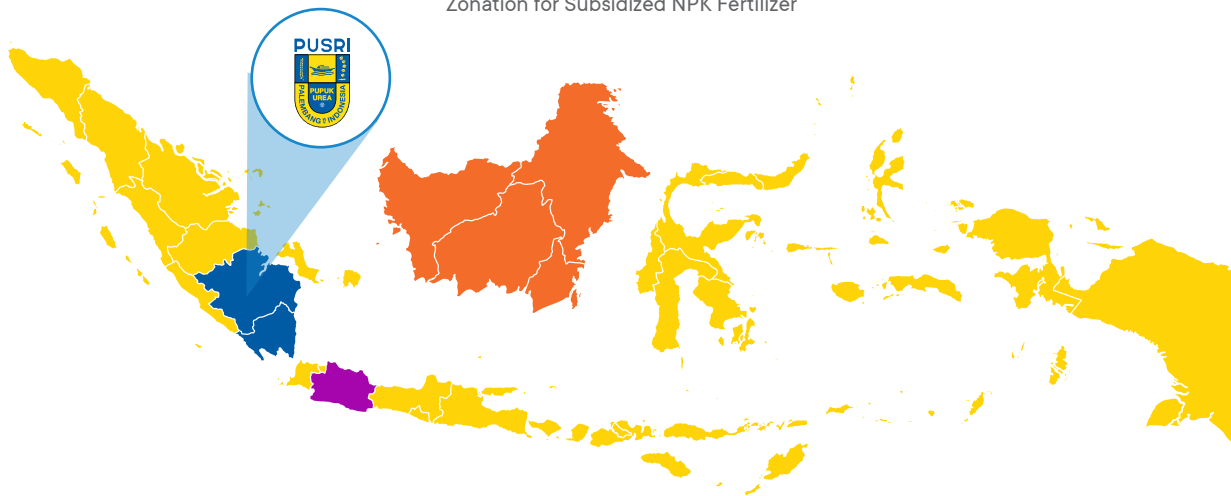
PUSRI menyalurkan dua jenis pupuk bersubsidi, yakni Urea dan NPK. Untuk Urea, Rayon Subsidi mencakup Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, sebagian Jawa Timur, dan Bali. Sedangkan untuk NPK ialah Sumatera Selatan dan sebagian Lampung.

SUBSIDIZED FERTILIZER RAYONIZATION AND ALLOCATION

PUSRI distributes two types of subsidized fertilizers, namely Urea and NPK. For Urea, the Subsidy Rayon covers Jambi, Bengkulu, South Sumatra, Bangka Belitung Islands, Lampung, Central Java, DI Yogyakarta, parts of East Java, and Bali. Meanwhile, for NPK fertilizers, the coverage area includes South Sumatra and parts of Lampung.



Rayonisasi Pupuk NPK Bersubsidi Zonation for Subsidized NPK Fertilizer



Provinsi I Province I	Kabupaten/Kota District/City	
Sumatera Selatan South Sumatra	Seluruh Kabupaten/Kota All districts/cities	
Lampung	7 Kabupaten: Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, Kota Metro	7 districts: Central Lampung District North Lampung District Mesuji District Tulang Bawang District West Tulang Bawang District Way Kanan District Metro City

- PT PUPUK ISKANDAR MUDA
- PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
- PT PUPUK KUJANG
- PT PUPUK PETROKIMIA GRESIK
- PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Target Distribusi Pupuk Bersubsidi PUSRI - 2025

PUSRI Subsidized Fertilizer Distribution Target - 2025

Provinsi Province	Urea	NPK
Jambi	18.558	-
Sumatera Selatan South Sumatra	165.033	196.607
Bengkulu	31.867	-
Lampung	348.701	188.309
Bangka Belitung	2.384	-
Jawa Tengah Central Java	647.543	-
DI Yogyakarta	39.003	-
Bali	36.558	-
Jawa Timur East Java	306.928	-
Jumlah Total	1.596.575	384.916

PROSPEK USAHA DAN STRATEGI KE DEPAN

BUSINESS OUTLOOK AND FORWARD STRATEGY

PROSPEK PEREKONOMIAN DAN PERMINTAAN PUPUK NASIONAL

Peningkatan aktivitas perekonomian Indonesia diperkirakan akan terus berlanjut dengan proyeksi pertumbuhan meningkat menjadi sebesar 5,4% (yoy) di 2026. Dari sisi produksi, pertumbuhan perekonomian diperkirakan masih akan bertumpu pada lima lapangan usaha seperti pada tahun 2025, yaitu: industri pengolahan/manufaktur, pertanian, konstruksi, pertambangan dan perdagangan. Aktivitas manufaktur yang dicerminkan oleh Purchasing Managers Index (PMI) mengindikasikan sektor tersebut terus berekspansi. Kebijakan yang diberlakukan antara lain tetap mendorong pembangunan infrastruktur dan kemudahan iklim berinvestasi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan kontribusi terhadap PDB Indonesia dikisaran angka sebesar 53,00%–54,04% di tahun 2025, diharapkan tetap dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 seiring dengan pulihnya aktivitas perekonomian. Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 adalah sebesar 5,11% dengan penggerak utama bersumber dari peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.

Industri pupuk diyakini masih akan menjadi industri yang prospektif mengingat pupuk merupakan komoditas yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan global maupun nasional. Hal ini tergambar dari tekad Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produktivitas tanaman sebagai bagian dari program kedaulatan pangan. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk urea dan NPK Subsidi serta jenis pupuk subsidi lainnya untuk Pupuk Indonesia sebesar 9,55 juta ton, dengan PUSRI mendapatkan alokasi penyaluran subsidi total sejumlah 1,98 juta ton.

Disamping penjualan dari alokasi subsidi, Perusahaan juga memanfaatkan peluang penjualan pupuk ke lahan sektor perkebunan dan hortikultura yang tidak masuk subsidi oleh pemerintah. Tanaman perkebunan yang menjadi target market antara lain sawit, kopi dan singkong. Mengacu pada data statistik BPS tahun 2025, luas lahan untuk kelapa sawit di Indonesia adalah 17,12 juta hektar dan luas kebun kopi berkisar antara 1,25–1,27 hektar dengan lebih dari 95% dikelola dalam bentuk perkebunan rakyat.

Berkaitan dengan pemasaran amonia di pasar domestik, sehubungan dengan telah beroperasinya pabrik amonia baru, yakni PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN), maka pemasok kebutuhan amoniak sebagai bahan baku urea akan bertambah. Hal ini akan menjadikan Perusahaan mendapatkan alternatif pasokan bahan baku, manakala produksi amonia dari fasilitas sendiri mengalami kendala.

ECONOMIC OUTLOOK AND NATIONAL FERTILIZER DEMAND

Indonesia's economic activity is expected to continue improving, with projected growth increasing to 5.4% (yoy) in 2026. From the production side, economic growth is expected to remain driven by the same five business sectors as in 2025, namely manufacturing/processing industries, agriculture, construction, mining, and trade. Manufacturing activity, as reflected by the Purchasing Managers' Index (PMI), indicates that the sector continues to expand. Government policies continue to encourage infrastructure development and a favorable investment climate. Household consumption expenditure, which contributed approximately 53.00% to 54.04% of Indonesia's GDP in 2025, is expected to remain a key driver of national economic growth in 2026 as economic activities continue to recover. For reference, national economic growth in 2025 was approximately 5.11%, primarily driven by increased household consumption and investment.

The fertilizer industry is expected to remain highly promising, considering that fertilizer is a critical commodity for maintaining both global and national food security. This is reflected in the Indonesian Government's commitment to increasing crop productivity as part of its food sovereignty program. To achieve this target, the Government has established an allocation of 9.55 million tons of subsidized urea, NPK, and other subsidized fertilizers for Pupuk Indonesia, with PUSRI receiving a total subsidized distribution allocation of 1.98 million tons.

In addition to sales from subsidized allocations, the Company also seeks opportunities to sell fertilizers to plantation and horticultural land not covered by government subsidies. Target plantation crops include oil palm, coffee, and cassava. Based on Statistics Indonesia (BPS) data for 2025, Indonesia's oil palm plantation area reached 17.12 million hectares, while coffee plantation areas ranged between 1.25 and 1.27 million hectares, with more than 95% managed as smallholder plantations.

Regarding ammonia marketing in the domestic market, the commencement of operations at a new ammonia plant, PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN), has increased the number of suppliers of ammonia requirements as a raw material for urea production. This provides the Company with an alternative source of raw material supply should ammonia production from its own facilities encounter disruptions.

RENCANA JANGKA PANJANG

Dalam melaksanakan inisiatif strategis tahun 2025 PUSRI mengacu pada arah strategis Perusahaan yang dijabarkan dalam suatu rancangan Rencana Jangka Panjang (RJP) Perusahaan tahun 2025–2029. Rancangan RJP tersebut disusun sebagai penunjang dalam memastikan pencapaian bertahap Visi Perusahaan. Potensi isu dan tantangan usaha Perusahaan periode 2025–2029, antara lain:

1. Perubahan kebijakan pupuk bersubsidi (HET, skema penetapan harga dan tata kelola)
2. Keandalan operasional yang berdampak signifikan pada efisiensi korporat
3. Fluktuasi harga komoditas di pasar internasional
4. Jaminan pasokan bahan baku utama produksi (gas bumi dan bahan baku NPK)
5. Aspek K3 dalam operasional pabrik dengan tingkat risiko sistemik A
6. Tahapan program Transformasi Bisnis PI Group (restrukturisasi dan *streamlining*)
7. Pendapatan lain-lain dari Jasa Pemeliharaan Pabrik, aset dan komersialisasi produk hasil riset/inovasi belum optimal
8. Tren industri hijau dan kemajuan teknologi pertanian guna mendukung target *Net-Zero Emissions* Indonesia di tahun 2060

Secara umum, RJP periode 2025–2029 disusun sebagai panduan dalam meningkatkan pertumbuhan dan kinerja Perusahaan secara berkelanjutan guna menunjang pencapaian target konsolidasi PI Group yang lebih baik. Berikut aksi korporasi strategis pada rancangan RJP 2025–2029:

1. Melanjutkan pembangunan pabrik Pusri IIIB
2. Melaksanakan penambahan pabrik NPK secara bertahap
3. Melaksanakan program efisiensi pabrik secara berkelanjutan pada pabrik eksisting
4. Melaksanakan program restrukturisasi dan *streamlining* PI Group

Dalam rangka mendukung peningkatan efisiensi korporat dan keandalan pabrik, PUSRI melanjutkan tahap konstruksi revitalisasi pabrik Pusri-III dan Pusri-IV menjadi pabrik Pusri-IIIB. Kondisi saat ini, efisiensi produksi pabrik Pusri-III dan PUSRI IV relatif kurang kompetitif jika dibandingkan dengan pabrik pesaing dengan teknologi lebih modern dan berpengaruh signifikan terhadap daya saing PUSRI di peta persaingan industri pupuk kawasan Asia. Hal ini menjadi penting mengingat dalam beberapa tahun terakhir, faktor internal dan tekanan eksternal dalam lingkungan bisnis Perusahaan begitu kuat terhadap kinerja dan pencapaian tahunan Perusahaan, terutama keandalan pabrik dan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Semester II 2025 yang berimplikasi pada peningkatan signifikan permintaan pupuk bersubsidi.

LONG-TERM PLAN

In implementing its strategic initiatives for 2025, PUSRI refers to the Company's strategic direction as outlined in the 2025–2029 Long-Term Plan (RJP). The RJP has been prepared to support the gradual achievement of the Company's Vision. Potential business issues and challenges for the 2025–2029 period include:

1. Changes in subsidized fertilizer policies (HET, pricing schemes, and governance).
2. Operational reliability, which has a significant impact on corporate efficiency.
3. Commodity price fluctuations in international markets.
4. Assurance of key production raw material supplies (natural gas and NPK raw materials).
5. Occupational Health and Safety (OHS) aspects in plant operations with a systemic risk level of A.
6. Phases of the PI Group Business Transformation program (restructuring and streamlining).
7. Other income from Plant Maintenance Services, asset utilization, and commercialization of research/innovation products that has not yet been optimized.
8. Green industry trends and advances in agricultural technology to support Indonesia's Net-Zero Emissions target by 2060.

In general, the 2025–2029 Long-Term Plan has been prepared as a guideline for improving the Company's growth and performance on a sustainable basis while supporting the achievement of stronger consolidated PI Group targets. The strategic corporate actions outlined in the 2025–2029 Long-Term Plan include:

1. Continuing the construction of the Pusri IIIB plant.
2. Gradually expanding NPK plant capacity.
3. Continuously implementing plant efficiency programs at existing facilities.
4. Carrying out the PI Group restructuring and streamlining program.

To support improvements in corporate efficiency and plant reliability, PUSRI continues the revitalization construction phase of the Pusri III and Pusri IV plants into the Pusri IIIB plant. Currently, the production efficiency of the Pusri III and Pusri IV plants is relatively less competitive compared to competing plants utilizing more modern technology, significantly affecting PUSRI's competitiveness within the Asian fertilizer industry landscape. This has become increasingly important given the strong internal factors and external pressures affecting the Company's business environment in recent years, particularly plant reliability issues and the reduction in the Highest Retail Price (HET) during the second half of 2025, which resulted in a significant increase in demand for subsidized fertilizers.

Tahun 2025 merupakan masa transisi perubahan kebijakan harga pupuk bersubsidi dengan konsep cost plus yang akan berganti menjadi skema Marked-To-Market (MTM) dengan mengacu pada harga pasar. Dalam rangka mengurangi dampak dari berbagai kondisi dalam lingkungan usaha, Perusahaan memitigasi dengan melakukan komersialisasi secara bertahap terhadap produk non sentralisasi dan hasil inovasi/riset, terutama Jasa Pemeliharaan Pabrik / digitalisasi lini produksi disamping optimalisasi berbagai aset Perusahaan sebagai sumber pendapatan lain-lain dalam menjaga stabilitas pencapaian kinerja.

Pada aspek *Human Capital*, sejalan dengan program Transformasi SDM PI group periode 2022–2027, PUSRI juga secara berkelanjutan melaksanakan inisiatif pembelajaran dan pengembangan SDM dengan pondasi program budaya AKHLAK dalam mendorong produktivitas, inovasi, *leadership* dan high performing culture di insan PUSRI.

Pada aspek *sustainability*, Perusahaan juga secara konsisten dan teratur melaksanakan insiatif program pengurangan emisi (dekarbonisasi) sebagai sumbangsih dalam menunjang pencapaian target *Net-Zero Emission* Indonesia di tahun 2060. Selain itu, berbagai inovasi sosial dan program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) terus didorong untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat lingkungan dalam kerangka *Environmental Social Governance* (ESG), *sustainable development goals* (SDGs), dan *circular economic*. Untuk faktor *safety*, Perusahaan terus berbenah dengan melaksanakan program penguatan aspek K3 Perusahaan secara berkelanjutan. Di tahun 2025, Perusahaan juga menindaklanjuti penugasan PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam melaksanakan inkubasi bisnis *Clean Ammonia* dengan berbagai mitra strategis dari Jepang, baik sebagai licensor maupun calon *off-taker*.

Berbagai program yang dirancang diharapkan menunjang *milestone* pencapaian visi PUSRI, akselerasi kinerja usaha dan menunjang keberlanjutan usaha.

The year 2025 represents a transition period for subsidized fertilizer pricing policy, moving from a cost-plus concept to a Marked-to-Market (MTM) scheme based on market prices. To mitigate the impact of various business environment conditions, the Company is gradually commercializing non-centralized products and innovation/research outputs, particularly Plant Maintenance Services and production line digitalization, while also optimizing various Company assets as sources of other income to maintain stable performance achievements.

In the Human Capital aspect, in line with the PI Group Human Capital Transformation program for the 2022–2027 period, PUSRI continuously implements learning and human capital development initiatives founded on the AKHLAK cultural values program to foster productivity, innovation, leadership, and a high-performing culture among PUSRI personnel.

From the sustainability perspective, the Company consistently and systematically implements emission reduction (decarbonization) initiatives as a contribution toward achieving Indonesia's Net-Zero Emissions target by 2060. In addition, various social innovation initiatives and Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs continue to be promoted to create added value for surrounding communities within the framework of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles, the Sustainable Development Goals (SDGs), and the circular economy. In terms of safety, the Company continues to strengthen its Occupational Health and Safety (OHS) programs on an ongoing basis. In 2025, the Company also followed up on the assignment from PT Pupuk Indonesia (Persero) to undertake Clean Ammonia business incubation with various strategic partners from Japan, both as licensors and prospective off-takers.

The various programs that have been designed are expected to support milestones toward achieving PUSRI's vision, accelerate business performance, and strengthen business sustainability.

TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

BUSINESS SEGMENT OPERATIONAL REVIEW

Perekonomian global sepanjang tahun 2025, dibayangi kondisi penuh tantangan risiko ketidakpastian dari sengketa tarif dagang yang diberlakukan sepihak oleh Amerika Serikat. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya berbagai dampak negatif bagi perekonomian berbagai negara besar seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat maupun kawasan Amerika, negara-negara kawasan Eropa, mempengaruhi pertumbuhan negara-negara besar di Asia seperti Tiongkok, India maupun Jepang maupun negara-negara kawasan Asia Tenggara disertai terjadinya gejolak harga komoditas primer, baik komoditas energi maupun pangan yang menjadi semakin *volatile*. Seluruh kondisi tersebut mempengaruhi kinerja PUSRI, sebagaimana disampaikan pada uraian berikut.

TINJAUAN OPERASIONAL

PUSRI mengoperasikan 3 (tiga) Pabrik Ammonia dan 4 (empat) Pabrik Urea serta Pabrik Utilitas di tahun 2025. Pusri tidak mengoperasikan Pabrik Ammonia Pusri III pada tahun 2025. PUSRI memiliki 4 (empat) unit pabrik urea dengan masing-masing pabrik terdiri atas beberapa bagian, yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Throughout 2025, the global economy was overshadowed by uncertainty and challenges arising from trade tariff disputes imposed unilaterally by the United States. These conditions resulted in various negative impacts on the economies of major countries, including slower economic growth in the United States and the broader Americas region, European countries, major Asian economies such as China, India, and Japan, as well as countries across Southeast Asia. These developments were accompanied by increasing volatility in primary commodity prices, including both energy and food commodities. All of these conditions affected PUSRI's performance, as described below.

OPERATIONAL REVIEW

PUSRI operated 3 (three) Ammonia Plants, 4 (four) Urea Plants, and a Utilities Plant in 2025. PUSRI did not operate the Pusri III Ammonia Plant during 2025. PUSRI has 4 (four) urea plant units, each consisting of several sections, as explained in the following table.

No	Pabrik Plant	Uraian Description
1	Pabrik Amonia Ammonia Plant	Pabrik Amonia PUSRI menghasilkan Amonia dengan produksi mencapai 1,21 juta ton per tahun. Bahan baku pembuatan Amonia adalah gas alam, uap air (<i>steam</i>), dan udara. Secara garis besar, proses di pabrik Amonia dibagi menjadi 4 (empat) unit dengan urutan sebagai berikut: 1. Unit <i>Feed Treating</i> Gas Alam yang masih mengandung kotoran (<i>impurities</i>) harus dibersihkan dahulu di unit ini, agar tidak menimbulkan keracunan pada katalis di unit <i>Reforming</i>. 2. Unit <i>Reforming</i> Gas Alam yang sudah bersih direaksikan dengan steam di <i>Primary Reformer</i> kemudian dengan udara di <i>Secondary Reformer</i> pada temperatur tinggi. Hasil reaksi berupa gas hidrogen, dengan hasil samping gas karbon dioksida dan nitrogen. 3. Unit Purifikasi & Metanasi Karbon dioksida hasil reaksi yang terbawa dalam gas proses, dipisahkan di unit ini karena berpotensi membentuk karbamat dan meracuni katalis di reaktor Amonia. 4. Unit <i>Compression Synloop & Refrigerant</i> Gas proses direaksikan dengan tekanan tinggi di reaktor Amonia sehingga terbentuk gas Amonia. Gas Amonia ini kemudian masuk ke unit <i>Refrigerant</i> sehingga diperoleh Amonia dalam fasa cair The PUSRI Ammonia Plant produces ammonia with an annual production capacity of 1.21 million tons. The raw materials used in ammonia production are natural gas, steam, and air. Broadly, the ammonia plant process is divided into 4 (four) units as follows: 1. Feed Treating Unit Natural gas that still contains impurities must first be purified in this unit to prevent catalyst poisoning in the Reforming Unit. 2. Reforming Unit The purified natural gas is reacted with steam in the Primary Reformer and then with air in the Secondary Reformer at high temperatures. The reaction produces hydrogen gas, with carbon dioxide and nitrogen as by-products. 3. Purification & Methanation Unit Carbon dioxide carried in the process gas stream is separated in this unit because it has the potential to form carbamate and poison the catalyst in the Ammonia Reactor. 4. Compression Synloop & Refrigerant Unit The process gas is reacted under high pressure in the Ammonia Reactor to produce ammonia gas. The ammonia gas is then sent to the Refrigerant Unit, where liquid ammonia is obtained.

No	Pabrik Plant	Uraian Description
2	Pabrik Urea Urea Plant	Produksi pabrik urea PUSRI mencapai 1,86 juta ton per tahun. Proses pembuatan urea menggunakan bahan baku Amonia cair dan gas karbon dioksida yang disuplai dari pabrik Amonia. Proses pembuatan urea ini terbagi menjadi enam unit, yaitu: 1. Unit Sintesa Unit ini berfungsi membentuk larutan urea dengan mereaksikan Amonia cair dan gas karbon dioksida pada tekanan 175 kg/ cm G. Hasil samping dari reaksi ini adalah amonium karbamat. 2. Unit Purifikasi Amonium karbamat yang tidak terkonversi dan kelebihan Amonia di unit Sintesa diuraikan dan dipisahkan dengan cara penurunan tekanan dan pemanasan. 3. Unit Kristaliser Larutan urea dari unit purifikasi dikristalkan di bagian ini secara vakum dengan pemanasan, kemudian kristal ureanya dipisahkan di centrifuge. 4. Unit Prilling Kristal urea keluaran centrifuge dikeringkan sampai kandungan air 0,2% berat dan dikirimkan ke bagian atas <i>Prilling Tower</i> untuk dilelehkan dan didistribusikan merata ke seluruh distributor. Dari distributor, lelehan urea dijatuhkan ke bawah sambil didinginkan oleh udara dari bawah <i>tower</i> sehingga menghasilkan produk urea butiran (<i>prill</i>). 5. Unit Recovery Gas Amonia dan gas karbon dioksida yang dipisahkan di bagian purifikasi diambil kembali dengan dua langkah absorpsi kemudian <i>direcycle</i> kembali ke unit sintesa. 6. Unit Process Kondensat <i>treatment</i> sejumlah kecil urea, Amonia, dan karbon dioksida yang terbawa kondensat di <i>crystallizer</i> diolah dan dipisahkan di <i>stripper</i> dan <i>hydrolizer</i>. Gas karbon dioksida dan gas Amonia tersebut dikirim kembali ke bagian purifikasi untuk <i>directcovery</i>, sedangkan air kondensatnya dikirim ke utilitas. The production capacity of the PUSRI Urea Plant reaches 1.86 million tons per year. The urea production process uses liquid ammonia and carbon dioxide gas supplied by the Ammonia Plant. The process is divided into six units: 1. Synthesis Unit This unit functions to form a urea solution by reacting liquid ammonia and carbon dioxide gas at a pressure of 175 kg/cm²G. Ammonium carbamate is produced as a by-product of this reaction. 2. Purification Unit Unconverted ammonium carbamate and excess ammonia from the Synthesis Unit are decomposed and separated through pressure reduction and heating. 3. Crystallizer Unit The urea solution from the Purification Unit is crystallized under vacuum conditions with heating, after which the urea crystals are separated using a centrifuge. 4. Prilling Unit Urea crystals discharged from the centrifuge are dried until their moisture content reaches 0.2% by weight and are sent to the top of the Prilling Tower, where they are melted and evenly distributed through distributors. From the distributors, the molten urea falls downward while being cooled by air flowing upward from the bottom of the tower, producing granular urea (<i>prill</i>) products. 5. Recovery Unit Ammonia gas and carbon dioxide gas separated in the Purification Unit are recovered through a two-stage absorption process and then recycled back to the Synthesis Unit. 6. Process Unit Condensate containing small amounts of urea, ammonia, and carbon dioxide carried over from the crystallizer is processed and separated in the stripper and hydrolyzer. The carbon dioxide gas and ammonia gas are returned to the Purification Unit for recovery, while the condensate water is sent to the Utilities Plant.

No	Pabrik Plant	Uraian Description
3	Pabrik Utilitas Utilities Plant	Merupakan pabrik yang menghasilkan bahan-bahan pembantu maupun energi yang dibutuhkan oleh pabrik Amonia dan pabrik urea PUSRI. Produk yang dihasilkan dan diolah dari pabrik utilitas ini antara lain sebagai berikut: 1. Air bersih 2. Air pendingin 3. Air demin 4. Udara pabrik dan instrumen 5. Listrik 6. Steam This plant produces supporting materials and energy required by the PUSRI Ammonia and Urea Plants. Products generated and processed by the Utilities Plant include: 1. Clean water 2. Cooling water 3. Demineralized water 4. Plant air and instrument air 5. Electricity 6. Steam
4	Pabrik NPK NPK Plant	Pabrik NPK fusion PUSRI menggunakan teknologi <i>steam fused granulation</i> dengan kapasitas produksi sebesar 300.000 ton per tahun. Bahan baku utama yang digunakan adalah urea produksi PUSRI, <i>Diammonium Phosphate</i> (DAP), dan <i>Kalium Clorida</i> (KCl). Pengoperasian pabrik NPK dilakukan secara kontinyu. Bahan baku diumpankan menggunakan <i>weight feeder</i> untuk kemudian digranulasi, dikeringkan, didinginkan dan diayak sesuai ukuran produk. Selanjutnya, produk NPK dilapisi <i>coating oil</i> sebelum dikantongi. The PUSRI Fusion NPK Plant utilizes steam fused granulation technology with a production capacity of 300,000 tons per year. The primary raw materials used are PUSRI-produced urea, Diammonium Phosphate (DAP), and Potassium Chloride (KCl). The NPK plant operates continuously. Raw materials are fed through weight feeders, then undergo granulation, drying, cooling, and screening according to product specifications. The NPK product is subsequently coated with coating oil before being bagged.

Kapasitas Terpasang Pabrik PUSRI

Installed Capacity of PUSRI Plants

No	Pabrik PUSRI PUSRI Plant	Kapasitas Terpasang Urea (ton/tahun) Installed Urea Capacity (tons/year)	Kapasitas Terpasang Amonia (ton/tahun) Installed Ammonia Capacity (tons/year)	Nilai Investasi Pabrik Plant Investment Value	Mulai Beroperasi Start of Operations
1	Pusri-III	285.000	330.000*	USD85.734.452	Desember 1976 December 1976
2	Pusri-IV	570.000	330.000	USD192.000.000	November 1977 November 1977
3	Pusri-IB	570.000	446.000	USD326.883.626	Desember 1994 December 1994
4	Pusri-IIB	908.000	660.000	USD657.091.278	Oktober 2016 October 2016

*) Tidak dioperasikan lagi

* No longer in operation

No.	Pabrik PUSRI PUSRI Plant	Kapasitas Terpasang Urea (ton/tahun) Installed Urea Capacity (tons/year)	Nilai Investasi Pabrik Plant Investment Value	Mulai Beroperasi Produksi Start of Production Operations
1	Pusri NPK-I	100.000	Rp169.691.059.202	Januari 2016 January 2016
2	Pusri NPK-II	200.000	Rp484.478.573.137	Februari 2020 February 2020

The fertilizer production process at PUSRI is illustrated in the following chart.

Fertilizer Production Process at PUSRI



PRASARANA PENUNJANG

PUSRI memiliki perangkat dan sarana untuk menyalurkan pupuk hingga ke pelanggan. Rantai pasokan tersebut terdiri dari kantor perwakilan, dermaga/pelabuhan, unit pengantongan, gudang lini I/II, serta distributor dan pengecer.

1. Kantor Perwakilan

PUSRI memiliki kantor perwakilan di setiap ibu kota provinsi di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali, yang disebut dengan Kantor PUSRI Penjualan Daerah (PPD). Kantor perwakilan berfungsi sebagai pelaksana teknis dalam penjualan produk dan mewakili kepentingan perusahaan di daerah.

2. Dermaga/Pelabuhan

Untuk mendukung proses pendistribusian produk baik domestik maupun ekspor, PUSRI memiliki 7 (tujuh) dermaga yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna mengeluarkan hasil produksi di lini I pabrik selain menggunakan jalur darat (via truk). Dermaga tersebut juga dapat digunakan sebagai pelabuhan bongkar untuk bahan baku, maupun batu bara apabila dibutuhkan. Adapun dermaga dan kapasitas muat adalah sebagai berikut:

Dermaga 1 Dock 1	Pupuk in bag <1.000 ton & NH ₃ Bagged fertilizer < 1,000 tons and NH ₃ (ammonia)
Dermaga 2 Dock 2	Pupuk curah Bulk fertilizer
Dermaga 3 Dock 3	Pupuk in bag >1.000 ton Bagged fertilizer > 1,000 tons
Dermaga 4 Dock 4	Pupuk in bag >1.000 ton Bagged fertilizer > 1,000 tons
Dermaga 5 Dock 5	Pupuk curah Bulk fertilizer
Dermaga 6 Dock 6	Bongkar muat STG batu bara Loading and unloading of coal STG
Dermaga 7 Dock 7	Pupuk in bag Bagged fertilizer

3. Unit Pengantongan

Sebagai upaya menjaga kualitas produk, PUSRI melakukan pengiriman pupuk curah dari Palembang yang selanjutnya akan disuplai ke unit pengantongan yang ada di beberapa daerah dengan rincian:

SUPPORTING INFRASTRUCTURE

PUSRI possesses the facilities and infrastructure necessary to distribute fertilizers to customers. This supply chain consists of representative offices, wharves/ports, bagging units, Line I/II warehouses, as well as distributors and retailers.

1. Representative Offices

PUSRI maintains representative offices in every provincial capital within Sumatra, Java, and Bali, known as Regional Sales Offices (PPD). These representative offices function as technical implementing units for product sales and represent the Company's interests in their respective regions.

2. Wharves/Ports

To support the distribution of products for both domestic and export markets, PUSRI owns 7 (seven) wharves used for its own operational purposes to transport production output from Line I plant facilities, in addition to utilizing land transportation (via trucks). These wharves may also be used as unloading ports for raw materials and coal when required. The wharves and their loading capacities are as follows:

3. Bagging Units

As part of its efforts to maintain product quality, PUSRI ships bulk fertilizer from Palembang, which is subsequently supplied to bagging units located in several regions, as detailed below:

Lini I (2D, BS 2 & BS 3/4) Line I (2D, BS 2 & BS 3/4)	Kapasitas 1.460.000 ton/tahun Capacity: 1,460,000 tons/year
Lini II (UPP Semarang, UPP Cilacap, UPP Meneng) Line II (UPP Semarang, UPP Cilacap, UPP Meneng)	Kapasitas 1.600.000 ton/tahun Capacity: 1,600,000 tons/year

4. Gudang Lini II/III

Dalam rangka menjalankan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, PT Pupuk Indonesia (Persero) mengatur pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional mulai dari lini I sampai dengan lini IV sesuai dengan prinsip '7 (tujuh) Tepat' yaitu: tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran penerima.

Selain itu, produsen wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dengan memiliki/menguasai gudang lini III pada wilayah tanggung jawabnya. Berdasarkan kondisi tersebut, saat ini gudang yang dioperasikan oleh PUSRI untuk wilayah subsidi dan non subsidi, baik gudang milik maupun sewa adalah sebagai berikut:

Milik (35 gudang yang digunakan oleh PUSRI)
Owned (35 warehouses used by PUSRI)

Sewa (39 gudang)
Leased (39 warehouses)

4. Line II/III Warehouses

In implementing Minister of Agriculture Regulation No. 15 of 2025 concerning the Implementing Regulation of Presidential Regulation No. 6 of 2025 on the Governance of Subsidized Fertilizers, PT Pupuk Indonesia (Persero) regulates the procurement and distribution of subsidized fertilizers nationwide for the agricultural sector, from Line I through Line IV, in accordance with the "7 Rights" principle, namely: the right type, right quantity, right price, right place, right time, right quality, and right recipient.

In addition, producers are required to ensure the smooth distribution of subsidized fertilizers by owning and/or controlling Line III warehouses within their respective areas of responsibility. Based on these requirements, the warehouses currently operated by PUSRI for both subsidized and non-subsidized areas, whether owned or leased, are as follows:

Stockholder dan pengelola TKBM oleh pihak ketiga
Stockholder and TKBM operator managed by third parties

Stockholder dan pengelola TKBM oleh pihak ketiga
Stockholder and TKBM operator managed by third parties

5. Distributor dan Pengecer

PUSRI juga memanfaatkan distributor dan pengecer dalam rantai pasokan produknya sehingga dapat mencapai petani maupun pengguna akhir produk lainnya, khususnya untuk pupuk bersubsidi yang ada di wilayah rayon. Untuk tahun 2025 terdapat 395 Distributor (PUD) dan 7.460 PPTS (kios, koperasi, gapoktan) sebagai rantai pasok yang mendukung kegiatan distribusi pupuk subsidi PUSRI di wilayah rayon yang dikelola, sebagaimana disampaikan pada uraian "Kebijakan Pemasaran".

5. Distributors and Retailers

PUSRI also utilizes distributors and retailers within its product supply chain to ensure that its products reach farmers and other end users, particularly for subsidized fertilizers distributed within its designated service areas. In 2025, there were 395 Distributors (PUD) and 7,460 PPTS outlets (kiosks, cooperatives, and farmer group associations) serving as supply chain partners supporting PUSRI's subsidized fertilizer distribution activities within the distribution zones under its management, as described in the "Marketing Policy" section.

TINJAUAN KINERJA PER SEGMENT USAHA

BUSINESS SEGMENT PERFORMANCE REVIEW

PUSRI membagi kinerja segmen usahanya menjadi 3 (tiga) bagian, yakni pupuk, non pupuk, dan lain-lain. Dua dari tiga produk tersebut, yakni pupuk dan non pupuk dilakukan segmentasi berdasarkan pasar, yakni dalam negeri dan ekspor serta berdasarkan hubungan dengan pelanggan yakni sektor subsidi dan non-subsidi. Informasi lebih lanjut mengenai kinerja masing-masing segmen usaha dibahas sebagai berikut.

PUPUK

Segmen usaha pupuk mencakup kegiatan produksi, distribusi dan penjualan produk, yaitu urea dan NPK. Produk pupuk tersebut merupakan hasil dari produksi pabrik Perusahaan yang dijual ke sektor Public Service Obligation (PSO) dan non PSO (dalam negeri dan ekspor).

Produk urea dihasilkan dari Pabrik P-IB, Pabrik P-III, Pabrik P-IV dan Pabrik P-IIB. Pabrik-pabrik tersebut memiliki penilaian dan tingkat kesehatan pabrik bidang produksi. Sedangkan produk NPK dihasilkan dari Pabrik NPK Fusion yang dimiliki dan dikelola oleh PUSRI.

ASPEK PRODUKSI PUPUK

Pada tahun 2025, total produksi pupuk PUSRI adalah sejumlah 2.154.268 ton, menurun 3,01% dari realisasi tahun 2024 yang sebesar 2.221.216 ton. Penurunan ini, terutama disebabkan oleh tingginya frekuensi downtime pabrik akibat durasi pelaksanaan Turn Around (TA) Pusri-IB dan Pabrik Amoniak P-IV melebihi target RKAP serta terjadinya unscheduled shutdown sampai dengan periode Desember 2025. Penyebab utama terjadinya unscheduled shutdown antara lain ialah gangguan pada peralatan statis dan rotating di Pabrik Amonia selama 109,66 hari serta gangguan sistem kelistrikan di Pabrik Amonia dan Urea selama total 19,87 hari.

Produksi urea sepanjang tahun buku tercatat 1.780.349 ton, menurun 4,17% dari realisasi produksi tahun 2024 yang sebesar 1.857.832 ton. Sedangkan produksi NPK naik 2,90% dari posisi tahun 2024 yang sebesar 363.384 ton, menjadi 373.919 per 31 Desember 2025. Kenaikan tersebut selaras dengan naiknya permintaan dan terpenuhinya suplai bahan baku.

Selama tahun 2025 PUSRI mendapatkan pasokan gas alam dari PHE Jambi Merang, menurun dari volume di tahun sebelumnya, sesuai realisasi produksi pupuk. Berikut gambaran pasokan bulanan gas alam total tahun 2024 dan 2025.

PUSRI divides the performance of its business segments into 3 (three) categories, namely fertilizer, non-fertilizer, and other businesses. Two of these three categories, namely fertilizer and non-fertilizer businesses, are further segmented based on market destination, namely domestic and export markets, as well as based on customer relationships, namely subsidized and non-subsidized sectors. Further information regarding the performance of each business segment is discussed below.

FERTILIZER

The fertilizer business segment encompasses the production, distribution, and sale of fertilizer products, namely urea and NPK. These fertilizer products are produced by the Company's plants and sold to both the Public Service Obligation (PSO) sector and the non-PSO sector (domestic and export markets).

Urea products are produced by the P-IB Plant, P-III Plant, P-IV Plant, and P-IIB Plant. These plants are subject to production-related plant performance and health assessments. Meanwhile, NPK products are produced by the Fusion NPK Plant owned and operated by PUSRI.

FERTILIZER PRODUCTION ASPECTS

In 2025, PUSRI's total fertilizer production amounted to 2,154,268 tons, a decrease of 3.01% from the 2024 realization of 2,221,216 tons. This decline was primarily attributable to the high frequency of plant downtime resulting from the duration of the Turn Around (TA) activities at Pusri-IB and the P-IV Ammonia Plant exceeding the RKAP target, as well as the occurrence of unscheduled shutdowns through December 2025. The main causes of these unscheduled shutdowns included disruptions to static and rotating equipment at the Ammonia Plant for 109.66 days, as well as electrical system disturbances at the Ammonia and Urea Plants totaling 19.87 days.

Urea production during the fiscal year reached 1,780,349 tons, representing a decline of 4.17% from the 2024 production realization of 1,857,832 tons. Meanwhile, NPK production increased by 2.90%, from 363,384 tons in 2024 to 373,919 tons as of December 31, 2025. This increase was in line with rising demand and the fulfillment of raw material supply requirements.

Throughout 2025, PUSRI received natural gas supplies from PHE Jambi Merang, with volumes lower than those of the previous year, in accordance with the realization of fertilizer production. The following illustrates the monthly natural gas supply totals for 2024 and 2025.

Tabel Pasokan Gas Alam Bulanan PUSRI - 2024-2025
Table of Monthly Natural Gas Supply of PUSRI – 2024-2025

2025							Jumlah Total
Bulan Month	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	59.104.098,8673
Satuan Unit	MMBTU	4.624.213,3166	3.249.138,5713	5.831.231,2722	5.673.148,7514	4.535.748,7674	
Bulan Month	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
Satuan Unit	MMBTU	5.581.258,0456	4.962.148,9218	4.223.587,7983	4.863.091,7427	5.459.757,4605	
2024							Jumlah Total
Bulan Month	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	60.816.599,3921
Satuan Unit	MMBTU	3.431.958,0677	4.433.605,2298	5.101.166,1398	5.130.334,6606	5.226.723,8198	
Bulan Month	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
Satuan Unit	MMBTU	5.240.478,8728	5.673.205,0261	5.491.159,9417	5.101.345,1436	5.354.771,5075	

Tabel Realisasi Produksi Pupuk (Urea & NPK) 2024-2025
Table of Fertilizer Production Realization (Urea & NPK) 2024-2025

Keterangan Description	Realisasi 2025 Realization 2025	Realisasi 2024 Realization 2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	%
Urea				
Pabrik Pusri- IB (ton) Pusri Plant IB (tons)	372.742	401.122	(28.380)	(7,08)
Pabrik Pusri- IIB (ton) Pusri Plant IIB (tons)	960.689	904.612	56.077	6,20
Pabrik Pusri-III (ton) Pusri Plant III (tons)	224.471	235.430	(10.959)	(4,65)
Pabrik Pusri- IV (ton) Pusri Plant IV (tons)	222.447	316.668	(94.221)	(29,75)
Jumlah Tonase Produksi (ton) Total Production Tonnage (tons)	1.780.349	1.857.832	(77.483)	(4,17)
Kapasitas Produksi (ton) Production Capacity (tons)	2.333.000	2.333.000	-	0,00
Rasio Gas Bumi (MMBTU/ ton) Natural Gas Ratio (MMBTU/ton)	30.14	31.07	(0.93)	(2,99)
Biaya Produksi (Rp/ton) Production Cost (Rp/ton)	4.612.135	4.170.627	441.508	10,59
NPK				
Pabrik NPK Fusion I (ton) NPK Fusion Plant I (tons)	155.961	181.686	(25.725)	(14,16)
Pabrik NPK Fusion II (ton) NPK Fusion Plant II (tons)	217.958	181.698	36.260	19,96
Jumlah Tonase Produksi (ton) Total Production Tonnage (tons)	373.919	363.384	10.535	2,90
Kapasitas Produksi (ton/ tahun) Production Capacity (tons/year)	300.000	300.000	-	0,00
Rasio Konsumsi Bahan Baku (Bahan Baku/ ton) Raw Material Consumption Ratio (Raw Material/ton)	1.431	1.494	(0.06)	(4,22)
Biaya Produksi (Rp/ton) Production Cost (Rp/ton)	6.119.803	5.541.827	577.976	10,43
Jumlah Tonase Produksi Pupuk (ton) Total Fertilizer Production Tonnage (tons)	2.154.268	2.221.216	(66.948)	(3,01)

REALISASI PENJUALAN PUPUK

Sepanjang tahun 2025, PUSRI berhasil menjual pupuk Urea dan NPK total sejumlah 2.150.978 ton, turun 5,9% dari realisasi penjualan tahun sebelumnya yang sebesar 2.284.990 ton.

Sekalipun terdapat sedikit penurunan tonase penjualan tersebut, nilai penjualan pupuk tetap mencatatkan kenaikan menjadi sebesar Rp13,03 triliun, meningkat 3,35% dari realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp12,61 triliun. Kenaikan nilai penjualan pupuk ini terutama dikontribusikan oleh bertambahnya nilai subsidi dari Pemerintah ditengah berkurangnya volume penjualan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

FERTILIZER SALES REALIZATION

Throughout 2025, PUSRI successfully sold a total of 2,150,978 tons of Urea and NPK fertilizers, representing a decrease of 5.9% from the previous year's sales realization of 2,284,990 tons.

Despite the slight decline in sales tonnage, fertilizer sales value still increased to Rp13.03 trillion, up 3.35% from the 2024 realization of Rp12.61 trillion. This increase was primarily contributed by higher subsidy value from the Government despite lower sales volume compared with the previous year.

Tabel Realisasi Penjualan Pupuk, 2024–2025

Table of Fertilizer Sales Realization, 2024–2025

Keterangan Description	Realisasi 2025 Realization 2025	Realisasi 2024 Realization 2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	%
Tonase Penjualan (ton) Sales Tonnage (tons)				
Subsidi Subsidized	1.727.115	1.735.698	(8.582)	(0,49)
Non Subsidi Non-Subsidized	423.863	549.292	(125.430)	(22,83)
Total Tonase Penjualan (Ton) Total Sales Tonnage (tons)	2.150.978	2.284.990	(134.012)	(5,86)
Nilai (Rp Juta) Value (Rp Million)				
Pupuk Subsidi (PSO) Subsidized Fertilizer (PSO)	2.801.547	3.088.860	(287.313)	(9,30)
Nilai Subsidi Subsidy Value	7.622.553	6.557.432	1.065.121	16,24
Pupuk Non Subsidi Non-Subsidized Fertilizer	2.609.350	2.964.312	(354.962)	(11,97)
Total Nilai Penjualan Pupuk Total Fertilizer Sales Value	13.033.450	12.610.604	422.846	3,35

Tabel Realisasi Penjualan Pupuk Urea Subsidi Perbulan 2024–2025

Table of Monthly Realization of Subsidized Urea Fertilizer Sales 2024–2025

2025								Jumlah Total
Bulan Month		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
Satuan Unit	Ton	102.815,2000	93.020,5000	92.219,9500	100.114,5500	135.255,0500	112.217,1000	1.371.988,8890
Bulan Month		Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
Satuan Unit	Ton	104.954,5500	95.768,1000	123.716,9390	142.719,3500	162.303,8000	106.883,8000	

2024								Jumlah Total
Bulan Month		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	1.340.555,9000
Satuan Unit	Ton	73.192,2500	105.134,5000	101.871,7500	90.656,0000	144.467,1000	120.652,1500	
Bulan Month		Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
Satuan Unit	Ton	118.090,9000	96.909,9500	105.824,8000	138.872,9500	142.041,7000	102.841,8500	

Tabel Realisasi Penjualan Pupuk Urea Non Subsidi Perbulan 2024–2025
 Table of Monthly Realization of Non-Subsidized Urea Fertilizer Sales 2024–2025

2025								Jumlah Total
Bulan Month		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	391.543,4790
Satuan Unit	Ton	21.475,8820	15.757,8170	18.985,5110	38.648,2900	39.161,2740	26.326,1790	
Bulan Month		Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
Satuan Unit	Ton	51.494,4240	47.494,2200	33.143,8430	44.342,5670	41.143,4920	13.569,9800	
2024								Jumlah Total
Bulan Month		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	543.223,4560
Satuan Unit	Ton	24.480,0220	32.174,1740	46.650,6630	41.766,1720	49.039,4360	73.292,1070	
Bulan Month		Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
Satuan Unit	Ton	68.688,4800	48.376,6890	43.145,8080	56.328,3490	18.301,2790	40.980,2770	

Tabel Realisasi Penjualan Pupuk Urea Total Perbulan 2024–2025
 Table of Monthly Realization of Total Urea Fertilizer Sales 2024–2025

2025								Jumlah Total
Bulan Month		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	1.763.532,3680
Satuan Unit	Ton	124.291,0820	108.778,3170	111.205,4610	138.762,8400	174.416,3240	138.543,2790	
Bulan Month		Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
Satuan Unit	Ton	156.448,9740	143.262,3200	156.860,7820	187.061,9170	203.447,2920	120.453,7800	
2024								Jumlah Total
Bulan Month		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	1.883.779,3560
Satuan Unit	Ton	97.672,2720	137.308,6740	148.522,4130	132.422,1720	193.506,5360	193.944,2570	
Bulan Month		Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
Satuan Unit	Ton	186.779,3800	145.286,6390	148.970,6080	195.201,2990	160.342,9790	143.822,1270	

PENJUALAN BERDASARKAN SEKTOR

Penjualan pupuk berdasarkan sektor untuk tahun 2025 didominasi oleh sektor pangan bersubsidi dengan kontribusi sebesar 80,29% (2024: 75,96%) atau sejumlah 1.727.115 ton. Angka tersebut menurun 0,5% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yakni 1.735.698 ton. Penurunan tersebut dikontribusikan oleh berkurangnya jumlah alokasi penyaluran pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, selain oleh berkurangnya total produksi pupuk PUSRI karena terkendala oleh usia fasilitas produksi. Pada sektor pangan tersebut, volume penjualan produk Urea meningkat sebesar 2,3% yaitu menjadi sebesar 1.371.989 ton dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 1.340.556 ton. Sementara itu, volume penjualan produk NPK mencatatkan penurunan sebesar 10,1% menjadi sejumlah 355.126 ton pada tahun 2025, dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 395.142 ton.

Total penjualan pupuk PUSRI pada tahun 2025 adalah sebesar 2.150.978 ton, menurun 5,86% dari total penjualan pupuk di tahun 2024 yang sebesar 2.284.990 ton.

SALES BY SECTOR

Fertilizer sales by sector in 2025 were dominated by the subsidized food sector, which contributed 80.29% (2024: 75.96%) of total sales, equivalent to 1,727,115 tons. This figure decreased by 0.5% compared to the previous year's realization of 1,735,698 tons. The decline was attributable to a reduction in the subsidized fertilizer distribution allocation established by the Ministry of Agriculture, in addition to lower total fertilizer production by PUSRI due to constraints associated with the age of its production facilities. Within the food sector, sales volume of Urea products increased by 2.3% to 1,371,989 tons, compared to 1,340,556 tons in 2024. Meanwhile, sales volume of NPK products recorded a decline of 10.1%, totaling 355,126 tons in 2025, compared to 395,142 tons in 2024.

PUSRI's total fertilizer sales in 2025 amounted to 2,150,978 tons, representing a decrease of 5.86% from total fertilizer sales of 2,284,990 tons in 2024.

Tabel Penjualan Urea & NPK Menurut Sektor

Table of Urea & NPK Sales by Sector

Keterangan Description	Realisasi 2025 Realization 2025	Realisasi 2024 Realization 2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	%
Sektor Pangan				
Food Sector				
Urea	1.371.989	1.340.556	31.433	2,34
NPK	355.126	395.142	(40.016)	(10,13)
Jumlah Penjualan Sektor Pangan (Ton) Total Sales in Food Sector (tons)	1.727.115	1.735.698	(8.583)	(0,49)
Sektor Komersial				
Commercial Sector				
Urea				
Kebun Plantation	167.327	245.024	(77.697)	(31,71)
Industri Industry	40.752	7.285	33.467	459,40
Ritel Retail	78.572	122.130	(43.558)	(35,67)
Ekspor Export	104.893	168.784	(63.891)	(37,85)
Jumlah Penjualan Urea Sektor Komersial (Ton) Total Urea Sales in Commercial Sector (tons)	391.544	543.223	(151.679)	(27,92)
NPK	32.319	6.069	26.250	432,53
Jumlah Penjualan Pupuk Sektor Komersial (Ton) Total Fertilizer Sales in Commercial Sector (tons)	423.863	549.292	(125.429)	(22,83)
Total Penjualan Pupuk (Ton) Total Fertilizer Sales (tons)	2.150.978	2.284.990	(134.012)	(5,86)

PENJUALAN PUPUK BERDASARKAN PASAR
FERTILIZER SALES BY MARKET

PUSRI juga membagi penjualan pupuk Urea dan NPK berdasarkan pasar, yakni domestik dan ekspor. Secara volume, penjualan pupuk domestik tahun 2025 turun sebesar 3,31% menjadi 2.046.085 ton dari tahun sebelumnya, sebesar 2.116.206 ton. Penurunan tersebut dikontribusikan oleh berkurangnya jumlah alokasi penyaluran pupuk bersubsidi.

Sementara itu penjualan ekspor sepanjang tahun 2025 juga mengalami penurunan, yakni turun 37.85%, dari 168.784 ton pada tahun 2024 menjadi 104.893 ton. Penurunan volume penjualan ekspor tersebut dikontribusikan oleh keberhasilan Perusahaan memanfaatkan dinamika meningkatnya permintaan pupuk di pasar global, ditengah keterbatasan pasokan.

Secara nilai, penjualan di dalam negeri tercatat mencapai nilai sebesar Rp12,35 triliun, naik 5,59% dari tahun 2024 yang sebesar Rp11,70 triliun. Adapun nilai penjualan ekspor pada tahun 2025 adalah sebesar Rp682,578 miliar, naik 25,31% dari capaian tahun sebelumnya yang senilai Rp913,91 miliar. Selain dikontribusikan oleh naiknya tonase penjualan, dinamisnya harga jual komoditi Urea dan Amonia secara global dibandingkan tahun lalu turut memberikan dampak terhadap bertambahnya nilai penjualan.

PUSRI also categorizes Urea and NPK fertilizer sales based on market destination, namely domestic and export markets. In terms of volume, domestic fertilizer sales in 2025 decreased by 3.31% to 2,046,085 tons, compared to 2,116,206 tons in the previous year. This decline was attributable to the reduction in the subsidized fertilizer distribution allocation.

Meanwhile, export sales during 2025 also declined, decreasing by 37.85% from 168,784 tons in 2024 to 104,893 tons. The decline in export sales volume was attributable to the Company’s prioritization of meeting domestic demand amid increasing fertilizer demand and limited supply conditions.

In terms of value, domestic sales reached Rp12.35 trillion, up 5.59% from Rp11.70 trillion in 2024. Meanwhile, the value of export sales in 2025 stood at Rp682.578 billion, an increase of 25.31% from the previous year’s figure of Rp913.91 billion. In addition to being driven by an increase in sales volume, the dynamic global pricing of urea and ammonia compared to the previous year also contributed to the rise in sales value.

Tabel Penjualan Pupuk Urea dan NPK Berdasarkan Pasar

Table of Urea and NPK Fertilizer Sales by Market

Keterangan Description	Realisasi 2025 Realization 2025	Realisasi 2024 Realization 2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	%
Tonase Penjualan (ton) Sales Tonnage (tons)				
Domestik Domestic	2.046.085	2.116.206	(70.121)	(3,31)
Subsidi Subsidized	1.727.115	1.735.698	(8.583)	(0.49)
Non Subsidi Non-Subsidized	318.970	380.508	(61.538)	(16.17)
Ekspor Export	104.893	168.784	(63.891)	(37.85)
Total Tonase Penjualan (Ton) Total Sales Tonnage (tons)	2.150.978	2.284.990	(134.012)	(5.86)
Nilai (Rp Juta) Value (Rp Million)				
Domestik Domestic	12.350.872	11.696.690	654.182	5.59
Subsidi Subsidized	10.424.100	9.646.292	777.808	8.06
Non Subsidi Non-Subsidized	1.926.772	2.050.398	(123.626)	(6,03)

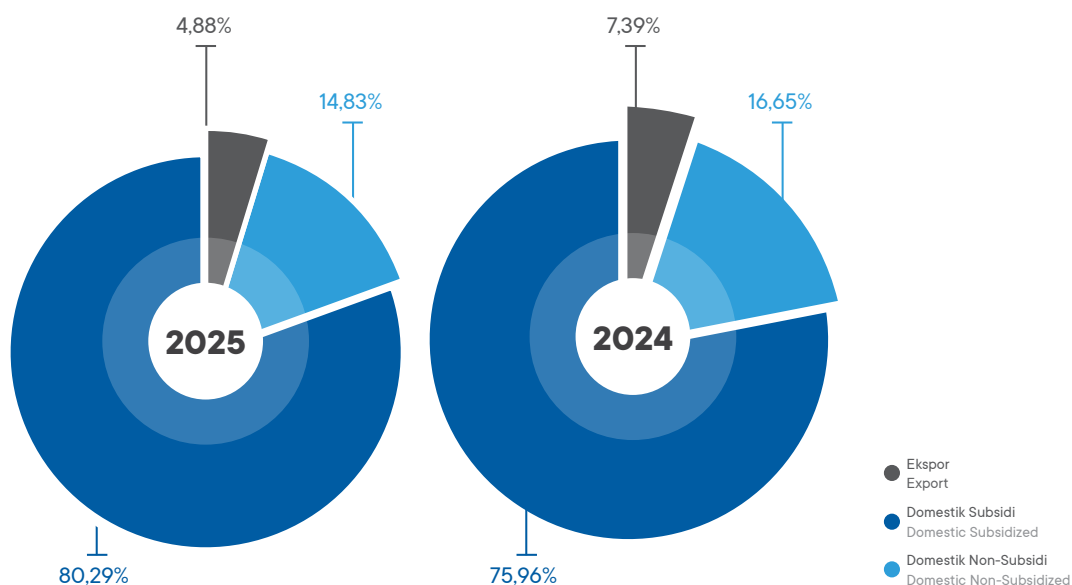
Tabel Penjualan Pupuk Urea dan NPK Berdasarkan Pasar

Table of Urea and NPK Fertilizer Sales by Market

Keterangan Description	Realisasi 2025 Realization 2025	Realisasi 2024 Realization 2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	%
Ekspor Export	682.578	913.914	(231.336)	(25.31)
Total Nilai Penjualan Pupuk Total Fertilizer Sales Value	13.033.450	12.610.604	422.846	3,35

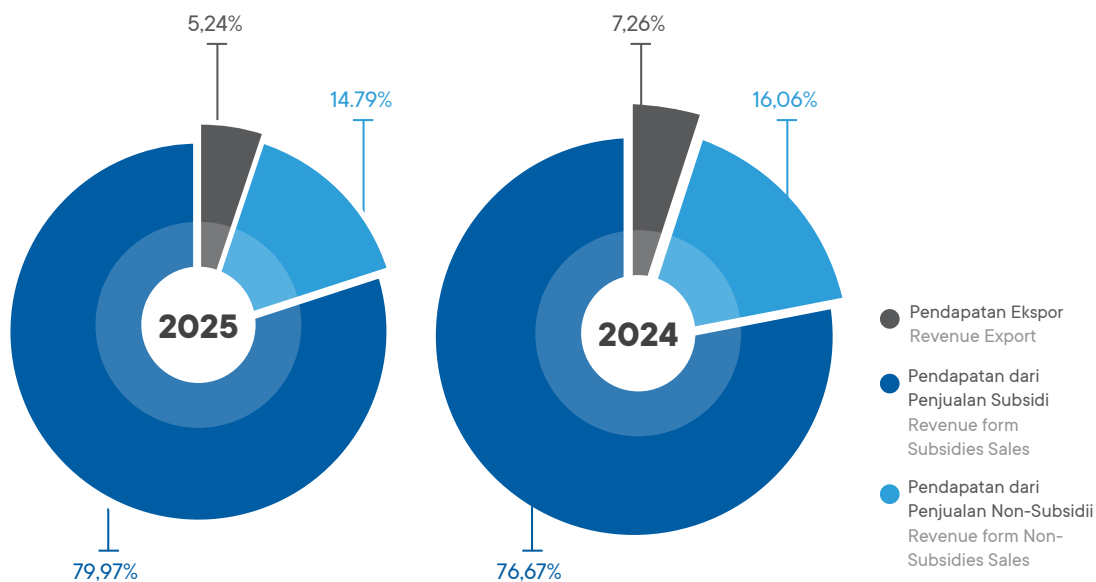
Komposisi Volume Penjualan Pupuk Urea dan NPK dalam 2 Tahun Terakhir

Composition of Urea and NPK Fertilizer Sales Volume Over the Past Two Years

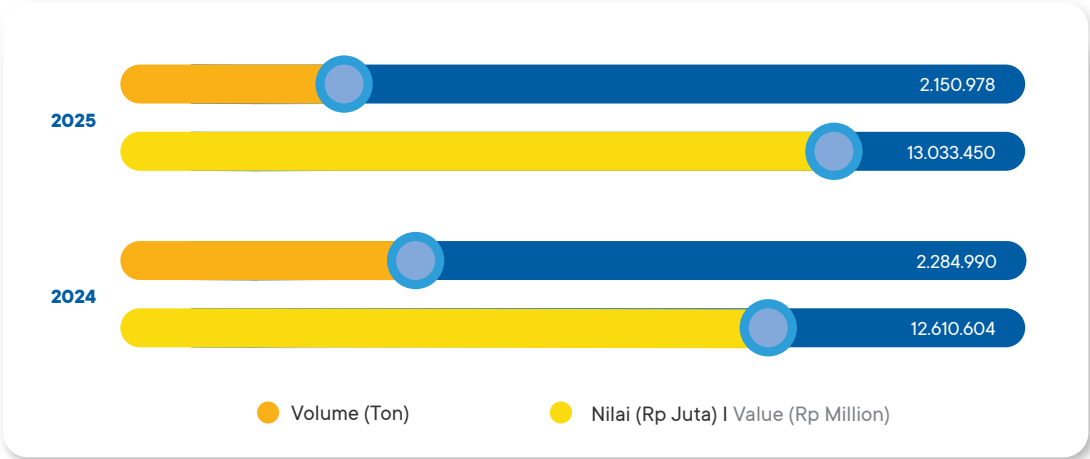


Komposisi Pendapatan Pupuk Urea dan NPK dalam 2 Tahun Terakhir

Composition of Urea and NPK Fertilizer Revenue Over the Past Two Years



Volume dan Nilai Penjualan Pupuk Urea dan NPK dalam 2 Tahun Terakhir
Sales Volume and Value of Urea and NPK Fertilizers Over the Past Two Years



PENJUALAN BERDASARKAN SEGMENTASI PELANGGAN

Produk Perusahaan diserap oleh 3 (tiga) jenis pelanggan, yaitu Pemerintah Republik Indonesia, Pihak-pihak Berelasi (sesuai PSAK 7 tentang Pihak-pihak Berelasi) yang terdiri dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan entitas dalam kelompok usahanya, serta Pihak Ketiga baik distributor sebagai mitra Perusahaan dalam memasarkan produk yang dimiliki Perusahaan, maupun pelanggan pengguna akhir.

PEMERINTAH

PT Pupuk Indonesia (Persero) dan kelompok usahanya di mana Perusahaan menjadi salah satu entitas mendapatkan penugasan dari Pemerintah Indonesia untuk bertanggung jawab melakukan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia. Perusahaan mendapatkan wilayah tanggung jawab pupuk urea untuk daerah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Sebagian Jawa Timur, Jambi, DI Yogyakarta, & Bali dengan alokasi tahun 2025 sebanyak 1.596.575 ton (2024: 1.629.697 ton).

Perusahaan juga mendapatkan wilayah tanggung jawab distribusi pupuk NPK subsidi untuk daerah Sumatera Selatan dan Sebagian Lampung dengan alokasi tahun 2025 sebanyak 384.916 ton (2024: 428.488 ton)

- Pihak Berelasi**
Untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi maupun non subsidi di sektor Nasional dilakukan sinergi antar anak usaha dari Pupuk Indonesia Group dengan tujuan pemenuhan sektor pupuk untuk kebutuhan Nasional. Di tahun 2025 Perusahaan berperan penting melakukan sinergi antar anak usaha Pupuk Indonesia Group khususnya di sektor penjualan.

SALES BY CUSTOMER SEGMENTATION

The Company's products are absorbed by 3 (three) types of customers, namely the Government of the Republic of Indonesia, Related Parties (in accordance with PSAK 7 concerning Related Parties), consisting of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) and entities within its business group, as well as Third Parties, including distributors that serve as the Company's partners in marketing its products and end-user customers.

GOVERNMENT

PT Pupuk Indonesia (Persero) and its group of companies, of which the Company is one entity, have received an assignment from the Government of Indonesia to be responsible for fulfilling subsidized fertilizer requirements throughout Indonesia. The Company has been assigned responsibility for urea fertilizer distribution in the regions of South Sumatra, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Central Java, parts of East Java, Jambi, the Special Region of Yogyakarta, and Bali, with an allocation of 1,596,575 tons in 2025 (2024: 1,629,697 tons).

The Company has also been assigned responsibility for the distribution of subsidized NPK fertilizer in South Sumatra and parts of Lampung, with an allocation of 384,916 tons in 2025 (2024: 428,488 tons).

- Related Parties**
To meet national demand for both subsidized and non-subsidized fertilizers, synergy is carried out among subsidiaries within the Pupuk Indonesia Group with the objective of fulfilling national fertilizer requirements. In 2025, the Company played an important role in fostering synergy among Pupuk Indonesia Group subsidiaries, particularly in the sales sector.

2. Pihak Ketiga

Selain dari Pemerintah Indonesia dan Pihak Berelasi, proses penyerapan produk Perusahaan juga bekerja sama dengan distributor. Saat ini distributor Perusahaan berperan aktif dalam mewujudkan terlaksananya proses penyaluran produk Perusahaan, baik pupuk subsidi maupun non subsidi. Perusahaan juga melayani proses pembelian langsung dari end user atau pengguna akhir produk PUSRI.

2. Third Parties

In addition to the Government of Indonesia and Related Parties, the distribution of the Company's products is also carried out in cooperation with distributors. Currently, the Company's distributors play an active role in ensuring the successful distribution of the Company's products, both subsidized and non-subsidized fertilizers. The Company also serves direct purchases from end users or final consumers of PUSRI products.

Tabel Realisasi Penjualan Pupuk Menurut Pelanggan (Ton)

Table of Fertilizer Sales Realization by Customer (tons)

Keterangan Description	Realisasi 2025 Realization 2025	Realisasi 2024 Realization 2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	%
Pemerintah Government				
Urea	1.371.989	1.340.556	31.433	2,34
NPK	355.126	395.142	(40.016)	(10,13)
Penjualan Sektor Pangan Sales in Food Sector	1.727.115	1.735.698	(8.583)	(0,49)
Pihak Berelasi Related Parties	231.123	252.598	(21.475)	(8,50)
Pihak Ketiga Third Parties	192.740	296.694	(103.954)	(35,04)
Penjualan Non Pangan Non-Food Sector Sales	423.863	549.292	(125.430)	(22,83)
Total Volume Penjualan Total Sales Volume	2.150.978	2.284.990	(134.013)	(5,86)

Pendapatan dari segmen usaha pupuk menyumbang 93,94% terhadap total pendapatan Perusahaan pada tahun 2025. Kontribusi tersebut meningkat 0,81% dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 93,19%. Peningkatan proporsi pendapatan penjualan pupuk disebabkan oleh menurunnya kontribusi penjualan non pupuk, sementara kontribusi penjualan pupuk subsidi terhadap penjualan pupuk mengalami kenaikan menjadi 79,98% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 76,49%.

Revenue from the fertilizer business segment contributed 93.94% of the Company's total revenue in 2025. This contribution increased by 0.81% from the previous year's realization of 93.19%. The increase in the proportion of fertilizer sales revenue was attributable to the declining contribution of non-fertilizer sales, while the contribution of subsidized fertilizer sales to total fertilizer sales increased to 79.98%, compared to 76.49% in 2024.

Tabel Realisasi Pendapatan Segmen Usaha Pupuk dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Perusahaan

Table of Realization of Fertilizer Business Segment Revenue and Its Contribution to Company Revenue

Keterangan Description	Realisasi 2025 Realization 2025	Realisasi 2024 Realization 2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	%
Pendapatan Pupuk (Rp Juta) Fertilizer Revenue (Rp Million)	13.033.450	12.610.604	422.846	3,35
Kontribusi terhadap Pendapatan (%) Contribution to Revenue (%)	93,94	93,19	0,75	
Subsidi (%) Subsidized (%)	79,98	76,49	3,49	
Non Subsidi (%) Non-Subsidized (%)	20,02	23,51	(3,49)	

Adapun realisasi penjualan pupuk Urea bersubsidi serta pupuk NPK bersubsidi pada 2025 adalah 1.371.973 ton dan 355.126 ton atau masing-masing sebesar 85,93% dan 92,26% dari *Supply Agreement* dengan Kementerian Pertanian.

The realization of subsidized Urea fertilizer sales and subsidized NPK fertilizer sales in 2025 amounted to 1,371,973 tons and 355,126 tons, respectively, representing 85.93% and 92.26% of the Supply Agreement allocation with the Ministry of Agriculture..

Target dan Realisasi Penjualan Urea Bersubsidi 2024–2025 (Ton)

Target and Realization of Subsidized Urea Sales 2024–2025 (tons)

Provinsi Province	2025			2024		
	Target Menteri Pertanian Minister of Agriculture Target	Realisasi PUSRI PUSRI Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Target Menteri Pertanian Minister of Agriculture Target	Realisasi PUSRI PUSRI Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)
Lampung	348.701	277.706	79,64	349.531	279.363	79,93
Sumatera Selatan South Sumatra	165.033	132.185	80,09	142.954	111.544	78,03
Bangka Belitung	2.384	1.715	71,93	1.990	1.322	66,43
Jambi	18.558	12.005	64,69	17.701	13.620	76,94
Bengkulu	31.867	23.139	72,61	26.286	20.606	78,39
Jawa Tengah Central Java	647.543	582.526	89,96	705.090	593.095	84,12
DI Yogyakarta Special Region of Yogyakarta	39.003	34.281	87,89	49.280	29.790	60,45
Bali	36.558	26.033	71,20	37.109	25.730	69,34
Jawa Timur East Java	306.928	282.384	92,00	299.756	265.487	88,57
Jumlah Total	1.596.575	1.371.973	85,93	1.629.697	1.340.557	82,26

Target dan Realisasi Penjualan NPK Bersubsidi Ton

Target and Realization of Subsidized NPK Sales (tons)

Provinsi Province	2025			2024		
	Target Menteri Pertanian Minister of Agriculture Target	Realisasi PUSRI PUSRI Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Target Menteri Pertanian Minister of Agriculture Target	Realisasi PUSRI PUSRI Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)
Lampung	188.309	162.745	86,42	260.010	244.703	94,11
Sumatera Selatan South Sumatra	196.607	192.381	97,85	168.478	150.439	89,29
Jumlah Total	384.916	355.126	92,26	428.488	395.142	92,22

PROFITABILITAS

Laba bruto segmen pupuk pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 1,51 triliun, meningkat 17,88% dari capaian tahun 2024 yang sebesar Rp1,28triliun. Peningkatan tersebut terutama dikontribusi oleh naiknya pendapatan subsidi dari pemerintah dan naiknya rata-rata harga produk pupuk komersial.

PROFITABILITY

Gross profit from the fertilizer segment in 2025 amounted to Rp1.51 trillion, representing an increase of 17.88% from the 2024 achievement of Rp1.28 trillion. The increase was primarily driven by higher government subsidy revenue and an increase in the average selling price of commercial fertilizer products.

Realisasi Profitabilitas Segmen Usaha Pupuk 2024–2025

Realization of Profitability of the Fertilizer Business Segment 2024–2025

Keterangan Description	Realisasi 2025 Realization 2025	Realisasi 2024 Realization 2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	%
Laba Bruto (Rp Juta) Gross Profit (Rp Million)	1.513.365	1.283.803	229.562	17,88
Margin Laba Kotor (%) Gross Profit Margin (%)	11,61	10,18	1,43	

NON PUPUK: AMONIA

Segmen usaha non pupuk adalah produk amonia. Kegiatan pada segmen ini mencakup kegiatan produksi, distribusi dan penjualan produk. Produk Amonia merupakan bahan baku utama dalam memproduksi Urea. Amonia yang dijual merupakan kelebihan produksi (ekses produksi), yang kemudian dijual di pasar dalam negeri (dalam bentuk botol dan tangki) dan ekspor.

NON-FERTILIZER: AMMONIA

The non-fertilizer business segment consists of ammonia products. Activities within this segment include the production, distribution, and sale of ammonia. Ammonia is the primary raw material used in the production of urea. The ammonia sold by the Company represents excess production, which is then marketed domestically (in cylinders and tanks) and internationally through exports.

KINERJA SEGMENT AMONIA TAHUN 2025

Aspek Produksi Amonia

Untuk tahun 2025, realisasi produksi Amonia PUSRI adalah sejumlah 1.211.032 ton, menurun 5,72% dari realisasi tahun 2024 yang sebesar 1.284.490 ton. Target realisasi produksi Amonia belum tercapai disebabkan oleh adanya beberapa gangguan pabrik, dan adanya gangguan pasokan gas alam pada semester 1 sehingga *on stream days* lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Performance of the Ammonia Segment in 2025

Ammonia Production Aspect

In 2025, PUSRI's ammonia production realization amounted to 1,211,032 tons, representing a decrease of 5.72% from the 2024 realization of 1,284,490 tons. The ammonia production target was not achieved due to several plant disruptions, as well as interruptions in natural gas supply during the first semester, resulting in fewer on-stream operating days compared to the previous year.

Realisasi Produksi Amonia, 2024–2025

Realization of Ammonia Production, 2024–2025

Keterangan Description	Realisasi 2025 Realization 2025	Realisasi 2024 Realization 2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	%
Pabrik Pusri- IB (ton) Pusri Plant IB (tons)	220.862	310.167	(89.305)	(28,79)
Pabrik Pusri- IIB (ton) Pusri Plant IIB (tons)	719.967	687.182	32.785	4,77
Pabrik Pusri- IV (ton) Pusri Plant IV (tons)	270.204	287.141	(16.937)	(5,90)
Jumlah Tonase Produksi (ton) Total Production Tonnage (tons)	1.211.032	1.284.490	(73.458)	(5,72)

Realisasi Produksi Amonia, 2024–2025
Realization of Ammonia Production, 2024–2025

Keterangan Description	Realisasi 2025 Realization 2025	Realisasi 2024 Realization 2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	%
Kapasitas Produksi (ton) Production Capacity (tons)	1.393.000	1.393.000	-	0,00
Rasio Gas Bumi (MMBTU/ ton) Natural Gas Ratio (MMBTU/ton)	36,53	36,71	(0,18)	(0,49)
Biaya Produksi (Rp/ton) Production Cost (Rp/ton)	5.187.756	4.647.853	539.904	11,62

Realisasi Produksi Amonia Perbulan, 2024–2025
Monthly Realization of Ammonia Production, 2024–2025

2025								Jumlah Total
Bulan Month		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	1.211.032,0000
Satuan Unit	Ton	94.268,0000	64.180,0000	123.041,0000	124.866,0000	95.975,0000	90.811,0000	
Bulan Month		Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
Satuan Unit	Ton	112.267,0000	108.481,0000	91.994,0000	90.835,0000	114.527,0000	99.787,0000	
2024								Jumlah Total
Bulan Month		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	1.284.490,0007
Satuan Unit	Ton	54.408,0000	93.442,0000	109.453,0000	112.571,0000	114.980,0000	113.976,0000	
Bulan Month		Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
Satuan Unit	Ton	111.014,0000	126.920,0002	114.082,0000	107.242,0005	109.248,0000	117.154,0000	

Aspek Penjualan Amonia

Volume penjualan Amonia dalam negeri pada tahun 2025 mencapai 35.398 ton, turun 42,97% dari tahun 2024 yang sebesar 62.067 ton. Sedangkan ekspor Amonia sepanjang tahun buku 2025 meningkat 3,21%, menjadi 69.878 ton dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 67.707 ton. Penurunan volume penjualan tersebut lebih disebabkan oleh terbatasnya produksi Perusahaan, yang lebih memprioritaskan penggunaan amoniak untuk memproduksi urea, sekalipun permintaan amoniak di pasar dalam negeri terus meningkat sehubungan dengan berkembangnya berbagai sektor industri penggunaanya yang terus berkembang.

Dari kinerja penjualan tersebut, nilai penjualan Amonia di pasar dalam negeri tercatat mencapai Rp239,97 miliar, turun 37,99% dari pembukuan tahun 2024 yang sebesar Rp386,96 miliar. Di pasar ekspor, nilai penjualan justru naik 8,86% menjadi sebesar Rp433,07 miliar dari realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp397,81 miliar.

Ammonia Sales Aspect

Domestic ammonia sales volume in 2025 reached 35,398 tons, a decrease of 42.97% from 62,067 tons in 2024. Meanwhile, ammonia exports during the 2025 fiscal year increased by 3.21% to 69,878 tons, compared to 67,707 tons in the previous year. The decline in domestic sales volume was primarily attributable to the Company's limited production capacity, as it prioritized the use of ammonia for urea production, despite continued growth in domestic ammonia demand driven by the expansion of various ammonia-consuming industries.

As a result of this sales performance, ammonia sales revenue in the domestic market amounted to Rp239.97 billion, down 37.99% from Rp386.96 billion recorded in 2024. In contrast, export sales revenue increased by 8.86% to Rp433.07 billion, compared to Rp397.81 billion in 2024.

Realisasi Penjualan Amonia Berdasarkan Target Pasar 2024–2025

Realization of Ammonia Sales by Target Market, 2024–2025

Keterangan Description	Realisasi 2025 Realization 2025	Realisasi 2024 Realization 2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	%
Tonase Penjualan (ton) Sales Volume (tons)				
Dalam Negeri Domestic	35.398	62.067	(26.669)	(42,97)
Ekspor Export	69.879	67.707	2.171	3,21
Jumlah Total	105.277	129.774	(24.498)	(18,88)
Nilai Penjualan (Rp Juta) Sales Value (Rp million)				
Dalam Negeri Domestic	239.969	386.961	(146.992)	(37,99)
Ekspor Export	433.066	397.812	35.254	8,86
Jumlah Total	673.035	784.773	(111.738)	(14,24)

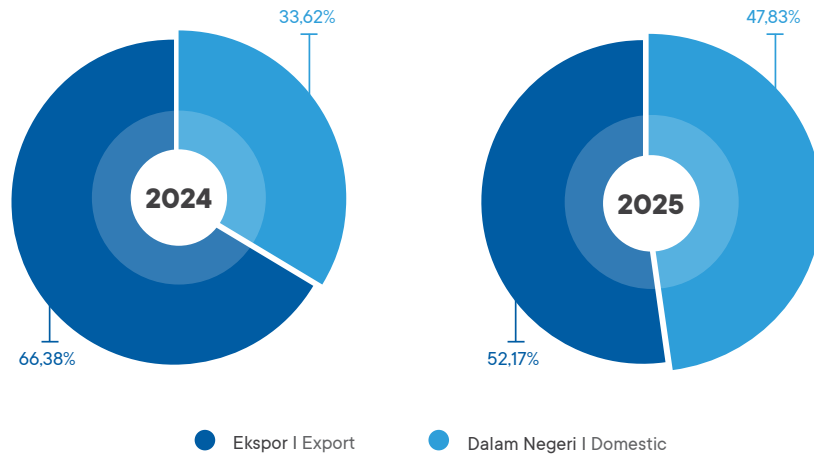
Realisasi Penjualan Amonia Perbulan, 2024–2025

Monthly Realization of Ammonia Sales, 2024–2025

2025								Jumlah Total
Bulan Month		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
Satuan Unit	Ton	7.207,8140	6.405,9250	6.391,0540	11.315,7710	10.565,0850	8.490,1550	105.276,8630
Bulan Month		Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
Satuan Unit	Ton	2.738,4970	7.242,4080	3.743,4450	9.000,4140	14.865,8960	17.310,3990	
2024								Jumlah Total
Bulan Month		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	129.774,3160
Satuan Unit	Ton	7.166,0480	11.430,5130	8.331,7270	7.180,7930	10.793,1880	11.913,0300	
Bulan Month		Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
Satuan Unit	Ton	13.545,4970	19.211,7750	14.240,5770	6.016,6390	5.711,5720	14.232,9570	

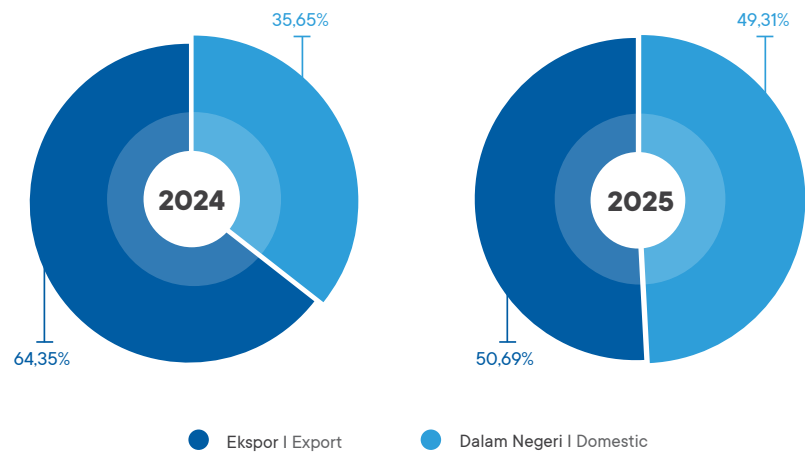
Komposisi Volume Penjualan Amonia dalam 2 Tahun Terakhir

Composition of Ammonia Sales Volume Over the Past Two Years



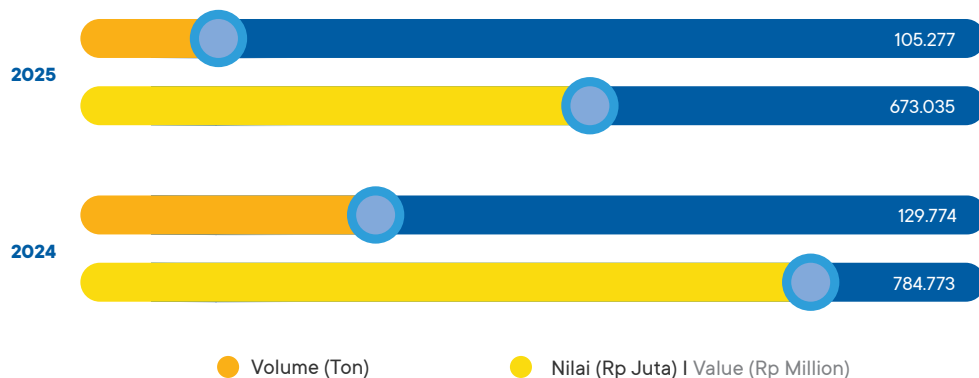
Komposisi Nilai Penjualan Amonia dalam 2 Tahun Terakhir

Composition of Ammonia Sales Value Over the Past Two Years



Volume dan Nilai Penjualan Amonia dalam 2 Tahun Terakhir

Ammonia Sales Volume and Value in the Last Two Years



Kontribusi penjualan Amonia terhadap total pendapatan Perusahaan sepanjang tahun 2025 adalah sebesar 4,85%, menurun dibandingkan kontribusi tahun 2024 yang sebesar 5,80%.

The contribution of ammonia sales to the Company's total revenue in 2025 was 4.85%, a decrease from its contribution of 5.80% in 2024.

Realisasi Pendapatan Segmen Usaha Non Pupuk (Amonia) serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Perusahaan 2024–2025

Realization of Non-Fertilizer (Ammonia) Segment Revenue and Its Contribution to Company Revenue, 2024–2025

Keterangan Description	Realisasi 2025 Realization 2025	Realisasi 2024 Realization 2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	%
Pendapatan Non Pupuk (Rp Juta) Non-Fertilizer Revenue (Rp million)	673.035	784.773	(111,738)	(14,24)
Kontribusi terhadap Pendapatan (%) Contribution to Revenue (%)	4,85	5,80	(0,95)	

Profitabilitas Segmen Non-Pupuk (Amonia)

Laba bruto non pupuk (Amoniak) pada tahun 2025 sebesar Rp 167,863 miliar, menurun 27,16% dari posisi tahun 2024 yang sebesar Rp230,468 miliar. Hal tersebut dikarenakan penurunan volume penjualan tahun 2025 dibandingkan 2024.

Profitability of the Non-Fertilizer (Ammonia) Segment

Gross profit from the non-fertilizer segment (ammonia) in 2025 amounted to Rp167.863 billion, representing a decrease of 8.92% from Rp230.468 billion in 2024. This decline was attributable to the lower sales volume recorded in 2025 compared to 2024.

Realisasi Profitabilitas Segmen Usaha Non Pupuk (Amonia) 2024–2025

Realization of Profitability of the Non-Fertilizer (Ammonia) Business Segment, 2024–2025

Keterangan Description	Realisasi 2025 Realization 2025	Realisasi 2024 Realization 2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	%
Laba Bruto (Rp Juta) Gross Profit (Rp million)	167.863	230.468	(62.605)	(27,16)
Margin Laba Kotor (%) Gross Profit Margin (%)	24,94	29,37	(4,43)	

PERKEMBANGAN HARGA JUAL PUPUK PUSRI

Kinerja keuangan PUSRI terutama sangat dipengaruhi oleh dua variabel, yakni volume penjualan produk dan rata-rata harga jual produk. Harga jual produk Perusahaan mengikuti dua variabel utama, yakni harga pasar untuk produk-produk komersial non subsidi, dan harga PSO yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Perhitungan harga jual produk pupuk subsidi ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, dengan formulasi perhitungan yang ditinjau secara periodik.

DEVELOPMENT OF PUSRI FERTILIZER SELLING PRICES

PUSRI's financial performance is primarily influenced by two variables: product sales volume and average selling price. The Company's product selling prices are determined by two main factors, namely market prices for non-subsidized commercial products and PSO prices established by the Government through the Ministry of Agriculture. The selling price calculation for subsidized fertilizer products is determined by the Ministry of Agriculture using a calculation formula that is reviewed periodically.

Untuk tahun 2025 penetapan formulasi perhitungan harga jual pupuk bersubsidi yang dibayarkan kepada PUSRI telah mengalami perubahan substansial, sebagaimana disebutkan dalam Kepmenpan No.1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 yang menurunkan HET pupuk subsidi sebesar 20% efektif mulai 22 Oktober 2025. Penurunan HET pupuk subsidi pada akhirnya mempengaruhi besaran nilai PSO yang dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada PUSRI. Berikut adalah gambaran rata-rata harga jual produk-produk pupuk PUSRI selama tahun 2024 dan 2025.

In 2025, the formula used to determine the selling price of subsidized fertilizers paid to PUSRI underwent a substantial change, as stipulated in Ministerial Decree No. 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025, which reduced the Highest Retail Price (HET) of subsidized fertilizers by 20%, effective October 22, 2025. The reduction in the subsidized fertilizer HET ultimately affected the amount of PSO compensation paid by the Government of Indonesia to PUSRI. The following presents an overview of the average selling prices of PUSRI fertilizer products during 2024 and 2025.

Tabel Perkembangan Rata-rata Harga Jual Produk Utama PUSRI 2024–2025
Table: Development of the Average Selling Price of PUSRI's Main Products, 2024–2025

No	Nama Produk Product Name	Satuan Unit	Harga Jual Rata-rata Average Selling Price		Perubahan Change	
			2025	2024	Nominal	%
Produk Subsidi Subsidized Product						
1	Urea	Rp Juta/Ton Rp million/ton	1.621.814	1.763.034	(141.220)	(8,01)
2	NPK	Rp Juta/Ton Rp million/ton	1.572.330	1.737.348	(165.018)	(9,50)
Produk Non Subsidi Non-Subsidized Product						
3	Urea	Rp Juta/Ton Rp million/ton	6.028.725	5.377.513	651.212	12,11
4	NPK Kopi NPK Coffee	Rp Juta/Ton Rp million/ton	6.900.989	6.308.572	592.417	9,39
5	NPK Singkong NPK Cassava	Rp Juta/Ton Rp million/ton	7.450.928	7.532.156	(81.228)	(1,08)
6	Amonia Ammonia	Rp Juta/Ton Rp million/ton	6.757.602	6.146.923	610.679	9,93

PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pendapatan lain-lain diperoleh dari penjualan dan pendapatan Perusahaan yang tidak dapat dikategorikan pada pendapatan dari penjualan pupuk dan non pupuk.

KINERJA SEGMENT LAIN-LAIN TAHUN 2025

Penjualan lain-lain terdiri atas pendapatan jasa, sewa, penjualan produk utilitas, dan pendapatan anak Perusahaan PT Pusri Agro Lestari. Pada tahun 2025, pendapatan lain-lain Perusahaan mencapai Rp167,84 miliar, meningkat 22,07% dari tahun 2024 yang sebesar Rp137,49 miliar. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh adanya kenaikan pendapatan sewa di tahun 2025.

OTHER REVENUE

Other revenue is derived from sales and income that cannot be classified as revenue from fertilizer or non-fertilizer sales.

PERFORMANCE OF THE OTHER SEGMENT IN 2025

Other sales consist of service revenue, rental income, utility product sales, and revenue generated by the Company's subsidiary, PT Pusri Agro Lestari. In 2025, the Company's other revenue reached Rp167,84 billion, representing an increase of 22.07% from Rp137.49 billion in 2024. This increase was primarily attributable to an increase in rental income during 2025.

Kontribusi pendapatan dari segmen usaha lain-lain di tahun 2025 mencapai 1,21% dari total pendapatan Perusahaan. Rincian pendapatan pada tahun 2025 tersebut berasal dari:

1. Pendapatan jasa Non-EPC yang didapatkan dari jasa pengantongan, jasa laboratorium, jasa keahlian, dan jasa engineering dengan nilai sebesar Rp13,76 miliar.
2. Pendapatan sewa dari sewa properti, sewa alat berat, dan pabrikasi dengan nilai sebesar Rp86,37 miliar
3. Pendapatan jasa umum yang berupa tagihan joint cost antar Anak Perusahaan Pupuk Indonesia grup dengan nilai sebesar Rp45,68 miliar.
4. Penjualan dari anak perusahaan PT Pusri Agro Lestari sebesar Rp249 juta.
5. Penjualan utilitas yaitu listrik dan air serta penjualan produk lainnya sebesar Rp15,68 miliar.
6. Pendapatan dividen sebesar Rp6,10 miliar.

The contribution of revenue from the other business segment in 2025 reached 1.21% of the Company's total revenue. The breakdown of this revenue in 2025 was as follows:

1. Non-EPC service revenue derived from bagging services, laboratory services, professional services, and engineering services amounting to Rp13.76 billion.
2. Rental income from property rentals, heavy equipment rentals, and fabrication services amounting to Rp86.37 billion.
3. General service revenue in the form of joint-cost billings among subsidiaries within the Pupuk Indonesia Group amounting to Rp45.68 billion.
4. Sales generated by subsidiary PT Pusri Agro Lestari amounting to Rp249 million.
5. Utility sales consisting of electricity and water, as well as sales of other products, amounting to Rp15.68 billion.
6. Dividend income amounting to Rp6.10 billion.

Pendapatan Segmen Lain-lain serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Perusahaan

Other Segment Revenue and Its Contribution to Company Revenue

Keterangan Description	Realisasi 2025 Realization 2025	Realisasi 2024 Realization 2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	%
Pendapatan Segmen lain-lain Other segment revenue	167.837	137.488	30.349	22,07
Kontribusi terhadap Total Pendapatan (%) Contribution to total revenue (%)	1,21	1,02	0,19	

Profitabilitas

Laba bruto pendapatan lain-lain pada tahun 2025 sebesar Rp79,71 miliar menurun (75,98%) dari tahun 2024 yang sebesar Rp331,81 miliar.

Profitability

Gross profit from other revenue in 2025 amounted to Rp79.71 billion, representing an decrease of (75.98%) from Rp331.81 billion in 2024.

Profitabilitas Segmen Usaha Lain-lain

Profitability of the Other Business Segment

Keterangan Description	Realisasi 2025 Realization 2025	Realisasi 2024 Realization 2024	Kenaikan/Penurunan Increase/ (Decrease)	
			Nominal	%
Laba Bruto Segmen Usaha Lain-lain (Rp Juta) Gross Profit of Other Business Segment (Rp million)	79.707	331.805	(252.098)	(75,98)
Margin Laba Kotor Segmen Usaha Lain-lain (%) Gross Profit Margin of Other Business Segment (%)	47,49	241,33	(193,84)	

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW



“Pada tahun 2025 Perseroan berhasil membukukan kenaikan penjualan ditengah terjadinya perubahan kebijakan penetapan harga subsidi. Pada saat bersamaan juga berhasil membukukan kenaikan total aset sebesar Rp32,20 triliun, meningkat 26,09% dari tahun sebelumnya yang senilai Rp25,54 triliun, menunjukkan keberhasilan program revitalisasi dan kemajuan realisasi investasi pembangunan unit pabrik pupuk baru yang terus berjalan dengan baik’.

“In 2025, the Company successfully recorded an increase in sales amid changes in the policy for determining subsidized prices. At the same time, the Company also recorded an increase in total assets to Rp32.20 trillion, representing a 26.09% increase from the previous year’s Rp25.54 trillion, reflecting the continued progress of investment realization in the construction of new fertilizer plant units.”

TINJAUAN KEUANGAN

Uraian Tinjauan Keuangan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("PUSRI"), ("Perusahaan") ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Laporan keuangan konsolidasi tersebut telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan (yang telah berganti nama menjadi Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan) dengan opini wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

ASET

PUSRI membukukan total aset pada akhir tahun buku 2025 sebesar Rp32,20 triliun, meningkat 26,09% dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya yang sebesar Rp25,54 triliun. Kenaikan tersebut terutama dikontribusikan oleh bertambahnya beberapa akun aset tetap pada kelompok aset, disamping adanya kenaikan pada beberapa akun aset lancar, seperti Piutang Subsidi dari Pemerintah RI serta uang muka dan biaya dibayar dimuka.

Aset

Assets

Rp juta | Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	(%)
Kas dan Setara Kas Cash & Cash Equivalents	305.988	703.733	(397.745)	(56,52)
Piutang Usaha: Accounts Receivable:				
Pihak Berelasi Related Parties	163.953	108.630	55.323	50,93
Pihak Ketiga Third Parties	36.147	89.437	(53.290)	(59,58)
Piutang Subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia Subsidy Receivables from Government of the Republic of Indonesia	2.349.248	-	2.349.248	100%
Piutang Subsidi yang Belum Ditagih Unbilled Subsidy Receivables	148.265	108.612	39.653	36,51
Pajak dibayar dimuka: Prepaid Taxes				
Pajak penghasilan badan Corporate income tax	3.515	185.779	(182.264)	(98,11)
Pajak lainnya Other taxes	177.945	100.787	77.158	76,56
Persediaan Inventories	1.418.503	1.507.888	(89.385)	(5,93)
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka Advances and Prepaid Expenses	630.447	74.202	556.245	749,64

FINANCIAL REVIEW

This Financial Review of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("PUSRI") ("the Company") has been prepared based on the Company's Consolidated Financial Statements presented in accordance with the Financial Accounting Standards ("SAK") in Indonesia, including the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK"), for the year ended December 31, 2025. The consolidated financial statements have been audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan (which has changed its name to Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan) with an unqualified opinion in all material respects in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

ASSETS

PUSRI recorded total assets at the end of the 2025 financial year of Rp32.20 trillion, an increase of 26.09% compared to the previous financial year of Rp25.54 trillion. The increase was primarily contributed by additions to several fixed asset accounts within the asset group, in addition to increases in several current asset accounts, such as Subsidy Receivables from the Government of the Republic of Indonesia as well as advances and prepaid expenses.

Aset

Assets

Rp juta | Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	(%)
Piutang lainnya: Other Receivables				
Pihak Berelasi Related Parties	70.884	64.490	6.394	9,91
Pihak Ketiga Third Parties	34.146	9.423	24.723	262,37
Aset Lancar lainnya Other Current Assets	3.446	7.625	(4.179)	(54,81)
Subtotal Aset Lancar Subtotal Current Assets	5.342.487	2.960.606	2.381.881	80,45
Piutang subsidi dari: Subsidy Receivables from:				
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	81.612	43.205	38.407	88,89
Pajak Dibayar Dimuka: Prepaid Taxes;				
Pajak penghasilan badan Corporate Income Tax	152.275	54.019	98.256	181,89
Investasi pada Entitas Asosiasi Investment in Associate Entities	90.753	101.939	(11.186)	(10,97)
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Financial Assets	56.389	45.440	10.949	24,10
Uang Muka dan Biaya Dibayar dimuka Advances and Prepaid Expenses	276.516	643.459	(366.943)	(57,03)
Properti Investasi Investment Property	875.052	884.944	(9.892)	(1,12)
Aset Tetap Fixed Assets	25.290.060	20.780.186	4.509.874	21,70
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	33.245	21.522	11.723	54,47
Subtotal Aset Tidak Lancar Subtotal Non-Current Assets	26.855.902	22.574.714	4.281.188	18,96
Jumlah Aset Total Assets	32.198.389	25.535.320	6.663.069	26,09

ASET LANCAR

Pada akhir tahun 2025, PUSRI mencatatkan aset lancar senilai Rp5,34 triliun, naik 80,45% dari akhir tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,96 triliun. Kenaikan tersebut terutama dikontribusikan oleh bertambahnya saldo piutang subsidi dari Pemerintah RI, uang muka dan biaya dibayar dimuka, piutang subsidi belum ditagih yang jauh lebih besar nilainya dari penurunan beberapa akun lainnya, seperti kas dan setara kas dan aset lancar lainnya.

CURRENT ASSETS

At the end of 2025, PUSRI recorded current assets amounting to Rp5.34 trillion, an increase of 80,45% from Rp2.96 trillion at the end of the previous year. The increase was mainly contributed by higher balances of subsidy receivables from the Government of the Republic of Indonesia, advances and prepaid expenses, and unbilled subsidy receivables, which were significantly greater than the decreases in several other accounts such as cash and cash equivalents and other current assets.

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas PUSRI terdiri atas kas kecil dan kas di bank. Posisi kas dan setara kas Perusahaan pada akhir tahun 2025 adalah senilai Rp305,99 miliar, turun 56,52% dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya yang sebesar Rp703,73 miliar. Penurunan tersebut terutama dikarenakan meningkatnya kebutuhan untuk mendukung aktivitas investasi.

Piutang Usaha

Piutang usaha ialah klaim atau tagihan kepada pihak pelanggan atas transaksi kegiatan operasional utama PUSRI yaitu penjualan produk Pupuk dan Amonia. Piutang usaha terdiri atas piutang kepada pihak ketiga dan berelasi. PUSRI membukukan piutang usaha total pada 2025 sebesar Rp200,10 miliar, naik 1,03% dari tahun 2024 yang senilai Rp198,07 miliar. Kenaikan saldo piutang tersebut terutama dikontribusikan oleh naiknya penjualan yang membuat piutang lancar meningkat dan terdapat pelunasan piutang umur 1-90 hari.

Piutang Subsidi Bagian Lancar dari Pemerintah

Piutang subsidi merupakan tagihan kepada Pemerintah Republik Indonesia atas penyaluran pupuk Urea dan NPK bersubsidi oleh Perusahaan. Pada tahun 2025, saldo piutang subsidi lancar ini adalah sebesar Rp2,35 triliun, naik 100% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp0,0-. Berikut rincian piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia per 31 Desember 2025.

Cash and Cash Equivalents

PUSRI's cash and cash equivalents consist of petty cash and cash in bank. The Company's cash and cash equivalents position at the end of 2025 amounted to Rp305.99 billion, a decrease of 56.52% compared to Rp703.73 billion in the previous year. The decrease was mainly due to increased funding requirements to support investment activities.

Trade Receivables

Trade receivables represent claims against customers arising from PUSRI's core operational activities, namely the sale of fertilizer and ammonia products. Trade receivables consist of receivables from third parties and related parties. PUSRI recorded total trade receivables in 2025 of Rp200.10 billion, an increase of 1.03% from Rp198.07 billion in 2024. The increase in receivables was mainly driven by higher sales accompanied by a decrease in overdue receivables within the 1-90 day range, resulting in an increase in current receivables.

Current Portion of Subsidy

Receivables from the Government Subsidy receivables represent claims against the Government of the Republic of Indonesia for the distribution of subsidized Urea, and NPK fertilizers by the Company. In 2025, the balance of current subsidy receivables amounted to Rp2.35 trillion, an increase of 100% compared to the same period in the previous year which was recorded at Rp0. The following details the subsidy receivables from the Government of Indonesia as of December 31, 2025.

Tabel Piutang Subsidi dari Pemerintah Indonesia

Table of Subsidy Receivables from the Government of Indonesia

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	(%)
Piutang Subsidi Tahun 2020 Subsidy Receivables in 2020	13.063	13.063	-	0,00
Piutang Subsidi Tahun 2022 Subsidy Receivables in 2022	20.928	34.775	(13.847)	(39,82)
Piutang Subsidi Tahun 2024 Subsidy Receivables in 2024	56.479	-	56.479	100%
Estimasi Piutang Subsidi dari Pemerintah - 2025 Estimated Subsidy Receivables from the Government - 2025	2.607.666	-	2.607.666	100%
Sub Total	2.698.136	47.838	2.650.298	5.540.15
PPN Subsidi VAT on Subsidy	(267.276)	(4.633)	(262.643)	5.668.96
Jumlah Piutang Subsidi Total Subsidy Receivables	2.430.860	43.205	(701.946)	5.526.34
Dikurangi bagian lancar Deducted by the Current Portion	(2.349.248)	-	(2.349.248)	0,00

Tabel Piutang Subsidi dari Pemerintah Indonesia

Table of Subsidy Receivables from the Government of Indonesia

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	(%)
Bagian tidak lancar Non-current portion	81.612	43.205	38.407	88,89
Kelebihan subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia ("Utang Subsidi") Tahun 2024 Excess subsidy paid by the Government of the Republic of Indonesia (Subsidy Payables) Year 2024	-	(31.921)	31.921	(100,00)
Piutang subsidi bersih Net Subsidy Receivables	2.430.860	11.284	2.419.576	21442.54

Piutang Subsidi yang Belum Ditagih

Piutang subsidi yang belum ditagih merupakan pendapatan atas penjualan pupuk bersubsidi ke distributor, namun belum tersalur ke petani. Saldo piutang subsidi yang belum ditagih pada tahun 2025 adalah sebesar Rp148,27 miliar, naik 36,51% dari tahun 2024 yang senilai Rp108,61 miliar.

Unbilled Subsidy Receivables

Unbilled subsidy receivables represent revenue from sales of subsidized fertilizers to distributors that have not yet been distributed to farmers. The balance of unbilled subsidy receivables in 2025 amounted to Rp148.27 billion, increased 36.51% from Rp108.61 billion in 2024.

Pajak Dibayar Dimuka

Pajak dibayar dimuka ialah pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya. terdiri atas pajak penghasilan badan dan pajak lainnya. Posisi total pajak dibayar di muka Perusahaan pada akhir tahun 2025 mencapai nilai sebesar Rp181,46 miliar, menurun 36,68% dari realisasi tahun sebelumnya yang senilai Rp286,57 miliar.

Prepaid Taxes

Prepaid taxes consist of income tax (PPH) and other taxes, including corporate income tax and other taxes. The Company's total prepaid tax balance at the end of 2025 reached Rp181.46 billion, a decreased 36.68% from Rp286.57 billion in the previous year. As a result, the prepaid tax balance increased by Rp47.26 billion.

Persediaan

Persediaan yang dimiliki PUSRI terdiri dari persediaan barang jadi, barang setengah jadi, suku cadang dan persediaan lainnya. Pada akhir tahun 2025 PUSRI membukukan penurunan persediaan sebesar 5,93% menjadi senilai Rp1,42 triliun dari saldo tahun 2024 yang sebesar Rp1,51 triliun. Penurunan tersebut terutama dikarenakan berkurangnya persediaan barang jadi.

Inventories

PUSRI's inventories consist of finished goods, work in progress, spare parts, and other inventories. At the end of 2025, PUSRI recorded a decrease in inventories of menurun 36,68% to Rp1.42 trillion from Rp1.51 trillion in 2024. The decrease was mainly due to lower inventories of finished goods.

Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka

Uang muka terdiri atas uang muka kontraktor, uang muka pembelian diantaranya gas bumi, bahan baku lainnya, aset dan lainnya, uang muka operasional serta uang muka non operasional. Sementara biaya dibayar dimuka terdiri atas beban dibayar dimuka asuransi. sewa. dan lainnya. Pada akhir tahun 2025. PUSRI mencatatkan nilai uang muka dan biaya dibayar dimuka sebesar Rp630,45 miliar, melonjak 749,64% dari tahun 2024 yang senilai Rp74,20 miliar.

Advances and Prepaid Expenses

Advances consist of contractor advances; purchase advances, including those for natural gas, other raw materials, assets, and other procurements; operational advances; and non-operational advances. Meanwhile, prepaid expenses include prepaid insurance, rent, andetc. At the end of 2025, PUSRI recorded advances and prepaid expenses amounting to Rp630.45 billion, increasing sharply by 749.64% from Rp74.20 billion in 2024.

Piutang Lain-lain

Piutang lainnya terdiri atas piutang lain-lain kepada pihak ketiga dan pihak berelasi. Saldo piutang lain-lain Perusahaan pada tahun 2025 tercatat naik 42,10% menjadi sebesar Rp105,03 miliar dari pembukuan tahun 2024 yang sebesar Rp73,91 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang lain-lain pihak ketiga.

Other Receivables

Other receivables consist of receivables from third parties and related parties. The Company's other receivables balance in 2025 increased by 42.10% to Rp105.03 billion from Rp73.91 billion in 2024. This increase was mainly due to higher receivables from third parties.

Aset Lancar Lainnya

Aset lancar lainnya merupakan aset lainnya yang diharapkan dapat digunakan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, terdiri dari kas yang dibatasi penggunaannya yang penempatannya di pihak berelasi. Pada akhir tahun buku 2025 aset lancar lainnya tercatat tinggal senilai Rp3,45 miliar, turun 54,81% dari sebesar Rp7,62 miliar di tahun sebelumnya.

ASET TIDAK LANCAR

Aset tidak lancar adalah aset yang diharapkan dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Saldo aset tidak lancar dipengaruhi oleh aktivitas pembayaran pajak, investasi pada entitas asosiasi, aset keuangan tidak lancar lainnya, pembayaran uang muka, investasi properti, investasi aset tetap, serta aset tidak lancar lainnya. Perusahaan membukukan saldo aset tidak lancar pada tahun 2025 sebesar Rp26,86 triliun, meningkat 18,96% dari tahun buku 2024 yang senilai Rp22,57 triliun. Peningkatan tersebut terutama dikontribusikan oleh kenaikan aset tetap progres proyek P-IIIB.

Piutang Subsidi Jangka Panjang

Saldo piutang subsidi jangka panjang dari Pemerintah Indonesia untuk tahun 2025 adalah senilai Rp81,61 miliar, meningkat 88,89% dari tahun sebelumnya yang senilai Rp43,21 miliar.

Pajak Dibayar Dimuka Tidak Lancar

Pajak dibayar dimuka ialah pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya. Posisi saldo pajak dibayar dimuka Perusahaan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp152,28 miliar, meningkat 181,89% dari nilai sebesar Rp54,02 miliar di tahun sebelumnya.

Investasi pada Entitas Asosiasi

Investasi pada entitas asosiasi adalah investasi pada entitas di mana Perusahaan memiliki pengaruh signifikan namun tidak mengendalikan. PUSRI memiliki investasi pada PT Pupuk Indonesia Logistik ("PILOG") dengan kepemilikan sebesar 44,23%. Pada tahun 2025 saldo nilai investasi pada PILOG menurun 10,97% dari sebesar Rp101,94 miliar menjadi senilai Rp90,75 miliar. Penurunan nilai investasi tersebut dikarenakan bagian atas rugi bersih PILOG tahun 2025.

Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya

Aset keuangan tidak lancar lainnya merupakan piutang non usaha jangka panjang kepada pihak ketiga dan penyertaan jangka panjang pada entitas anak dan entitas asosiasi, berupa kepemilikan saham. Perusahaan membukukan aset keuangan tidak lancar lainnya pada 2025 menjadi sebesar Rp56,39 miliar, naik 24,10% dari saldo tahun sebelumnya yang sebesar Rp45,44 miliar. Kenaikan ini dikontribusikan oleh kenaikan nilai wajar investasi pada entitas asosiasi.

Other Current Assets

Other current assets represent other assets expected to be utilized within less than one year, consisting of restricted cash placed with related parties. At the end of the 2025 financial year, other current assets amounted to only Rp3.45 million, decreasing by 54.81% from Rp7.62 billion in the previous year.

NON-CURRENT ASSETS

Non-current assets are assets expected to be utilized for more than one year. The balance of non-current assets is influenced by tax payments, investments in associated entities, other non-current financial assets, advance payments, investment properties, investments in fixed assets, and other non-current assets. The Company recorded non-current assets in 2025 amounting to Rp26.86 trillion, an increase of 18.96% from Rp22.57 trillion in 2024. Increase in fixed assets resulting from the progress of the P-IIIB project.

Long-Term Subsidy Receivables

The balance of long-term subsidy receivables from the Government of Indonesia in 2025 amounted to Rp81.61 billion, an increased of 88.89% from Rp43.21 billion in the previous year.

Non-Current Prepaid Taxes

Prepaid taxes consist of income tax (PPH) and other taxes. The Company's prepaid tax balance in 2025 amounted to Rp152.28 billion, an increased of 181.89% from Rp54.02 billion in the previous year.

Investment in Associated Entities

Investment in associated entities represents investments in entities where the Company has significant influence but does not have control. PUSRI has an investment in PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) with an ownership of 44.23%. In 2025, the investment balance in PILOG decreased by 10.97% from Rp101.94 billion to Rp90.75 billion. The decrease in the investment value was attributable to PILOG's net loss in 2025.

Other Non-Current Financial Assets

Other non-current financial assets consist of long-term non-trade receivables from third parties and long-term investments in subsidiaries and associated entities in the form of share ownership. The Company recorded other non-current financial assets in 2025 amounting to Rp56.39 billion, an increase of 24.10% from the previous year's balance of Rp45.44 billion. Increase in the fair value of investments in associate entities.

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka

Uang muka adalah pembayaran uang kepada pihak lain yang belum memberikan prestasi atau memenuhi kewajiban, yang terdiri dari uang muka kontraktor dan uang muka pembelian aset. Saldo uang muka dan beban dibayar dimuka PUSRI tahun 2025 tercatat senilai Rp276,52 miliar, berkurang sebesar Rp366,94 miliar dari posisi tahun 2024 yang sebesar Rp643,46 miliar. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh adanya realisasi pembayaran tagihan progres pembangunan Proyek Pusri-IIIB.

Advances and Prepaid Expenses

Advances represent payments made to other parties that have not yet delivered performance or fulfilled obligations, consisting of contractor advances, purchase assets advances. The balance of advances and prepaid expenses in 2025 amounted to Rp276.52 billion, decreasing by Rp366.94 billion from Rp643.46 billion in 2024. The decrease was mainly influenced by the realization of progress payments for the construction of the Pusri-IIIB project.

Properti Investasi

Properti investasi adalah properti berupa tanah atau bangunan untuk menghasilkan sewa dan atau kenaikan nilai. Pada tahun 2025, PUSRI membukukan saldo penurunan properti investasi 1,12% atau berkurang sebesar Rp9,89 miliar dari Rp884,94 miliar pada tahun 2024 menjadi senilai Rp875,05 miliar. Berkurangnya nilai saldo properti investasi ini dikontribusikan oleh adanya reklasifikasi dari properti investasi ke aset tetap.

Investment Properties

Investment properties are properties in the form of land or buildings held to earn rental income and/or capital appreciation. In 2025, PUSRI recorded a decrease in investment properties of 1.12% or Rp9.89 billion, from Rp884.94 billion in 2024 to Rp875.05 billion. The decrease in the balance of investment properties was attributable to the reclassification from investment property to fixed assets.

Aset Tetap

Aset tetap PUSRI terdiri dari tanah, bangunan, mesin dan peralatan pabrik, kapal dan sarana, kendaraan dan alat berat, perlengkapan kantor, aset penyangga, aset hak guna, serta aset dalam penyelesaian. Pada akhir tahun buku 2025, Perusahaan mencatatkan saldo aset tetap sebesar Rp25,29 triliun, meningkat 21,70% atau bertambah hingga senilai Rp4,51 triliun dari saldo tahun buku 2024 yang sebesar Rp20,78 triliun. Hal ini utamanya dikontribusikan oleh meningkatnya jumlah perolehan aset tetap dalam penyelesaian proyek PUSRI-IIIB.

Fixed Assets

PUSRI's fixed assets consist of land, buildings, machinery and plant equipment, vessels and facilities, vehicles and heavy equipment, office equipment, supporting assets, right-of-use assets, and assets under construction. At the end of the 2025 financial year, the Company recorded fixed assets amounting to Rp25.29 trillion, an increase of 21.70% or Rp4.51 trillion from Rp20.78 trillion in 2024. This increase was mainly contributed by higher acquisitions of fixed assets under construction related to the PUSRI-IIIB project.

Aset Tetap

Fixed Assets

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	(%)
Tanah Land	7.117.698	6.802.188	315.510	4,64
Bangunan Buildings	995.171	971.750	23.421	2,41
Mesin dan Peralatan Pabrik Machinery and Plant Equipment	15.482.449	14.845.537	636.912	4,29
Kapal dan Sarana Ships and Facilities	1.519	1.519	-	0,00
Kendaraan dan Alat Berat Vehicles and Heavy Equipment	63.679	45.580	18.099	39,71
Perlengkapan Kantor Office Supplies	316.712	284.751	31.961	11,22
Aset Penyangga Supporting Assets	346.589	305.751	40.838	13,36
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets	95.898	72.240	23.658	32,75

Aset Tetap

Fixed Assets

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	(%)
Aset dalam Penyelesaian Assets Under Construction	8.756.131	4.304.126	4.452.005	103,44
Jumlah Aset Tetap Total Fixed Assets	33.175.846	27.633.442	5.542.404	20,06
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation	(7.875.280)	(6.842.750)	(1.032.530)	15,09
Penyisihan Penurunan Nilai Provision for Impairment	(10.506)	(10.506)	-	-
Saldo aset Tetap Fixed Assets Balance	25.290.060	20.780.186	4.509.874	21,70

Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset tidak lancar lainnya adalah aset tidak lancar lainnya yang diharapkan dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1(satu) tahun, yang terdiri dari aset tak berwujud, aset tidak lancar yang akan ditinggalkan dan kas yang dibatasi penggunaannya. Pada akhir tahun buku 2025 saldo aset tidak lancar lainnya tercatat sebesar Rp33,25 miliar, meningkat 54,47% dari tahun 2024 yang senilai Rp21,52 miliar. Penyebab utama peningkatan tersebut ialah terdapat perolehan baru aset tidak berwujud di tahun 2025.

Other Non-Current Assets

Other non-current assets are assets expected to be utilized for more than one year, consisting of intangible assets, non-current assets held for abandonment, and restricted cash. At the end of the 2025 financial year, the balance of other non-current assets amounted to Rp33.25 billion, an increase of 54.47% from Rp21.52 billion in 2024. The increase was primarily attributable to the new acquisition of intangible assets in 2025.

LIABILITAS

Total liabilitas PUSRI pada akhir tahun buku 2025 adalah sebesar Rp12,91 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp6,89 triliun, total liabilitas tersebut naik hingga sebesar 87,53%. Kenaikan tersebut terutama dikontribusikan oleh adanya peningkatan saldo liabilitas jangka panjang maupun jangka pendek.

LIABILITIES

Total liabilities of PUSRI at the end of the 2025 financial year amounted to Rp12.91 trillion. Compared to the same period in the previous year, which stood at Rp6.89 trillion, total liabilities increased by 87.53%. The increase was mainly contributed by higher balances of both long-term and short-term liabilities.

Tabel Liabilitas

Table of Liabilities

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	(%)
Utang Usaha: Trade Payables:				
Pihak Berelasi Related parties	121.296	52.287	69.009	131,98
Pihak Ketiga Third parties	160.951	82.439	78.512	95,24
Kelebihan subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia Excess subsidy paid by the Government of the Republic of Indonesia	-	31.921	(31.921)	(100,00)
Utang Lainnya: Other Payables:				

Tabel Liabilitas

Table of Liabilities

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	(%)
Pihak Berelasi Related parties	69.626	2.958	66.668	2253,82
Pihak Ketiga Third parties	159.886	97.810	62.076	63,47
Liabilitas yg masih harus dibayar Accrued liabilities	2.545.006	2.178.985	366.021	16,80
Utang Pajak Taxes Payable				
Pajak penghasilan badan Corporate income tax	67.562	11.142	56.420	506,37
Pajak Lainnya Other taxes	62.211	84.586	(22.375)	(26,45)
Bagian jangka pendek atas: Current portion of:				
Liabilitas Sewa Lease liabilities	24.338	7.529	16.809	223,26
Pinjaman jangka panjang Long-term loans	7.194	2.804	4.390	156,56
Liabilitas Imbalan Kerja Employee benefits liabilities	298.025	244.367	53.658	21,96
Subtotal Liabilitas Jangka Pendek Subtotal Current Liabilities	3.516.095	2.796.828	719.267	25,72
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred tax liabilities	212.659	303.974	(91.315)	(30,04)
Bagian jangka panjang atas: Long-term portion of:				
Liabilitas sewa Lease liabilities	5.293	3.559	1.734	48,72
Pinjaman jangka panjang Long-term loans	8.134.677	3.168.146	4.966.531	156,76
Liabilitas imbalan kerja Employee benefits liabilities	1.120	4.281	(3.161)	(73,84)
Liabilitas imbalan pascakerja Post-employment benefit liabilities	702.302	476.459	225.843	47,40
Utang retensi: Retention payables:				
Pihak berelasi Related parties	51.277	15.926	35.351	221,97
Pihak Ketiga Third parties	290.858	117.460	173.398	147,62
Subtotal Liabilitas Jangka Panjang Subtotal Long-Term Liabilities	9.398.186	4.089.805	5.308.381	129,80
Total Liabilitas Total Liabilities	12.914.281	6.886.633	6.027.648	87,53

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban PUSRI yang diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Saldo liabilitas jangka pendek dipengaruhi oleh perubahan pada utang bank, utang usaha, utang lain-lain, liabilitas yang masih harus dibayar, utang pajak, bagian jangka pendek atas liabilitas sewa

SHORT-TERM LIABILITIES

Short-term liabilities are obligations of PUSRI expected to be settled within a period of less than one year. The balance of short-term liabilities is influenced by changes in bank loans, trade payables, other payables, accrued liabilities, taxes payable, the current portion of lease liabilities and long-term loans, as well as short-term employee

dan pinjaman jangka panjang, serta liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Pada akhir tahun buku 2025, liabilitas jangka pendek Perusahaan adalah sebesar Rp3,52 triliun, meningkat 25,72% dari tahun buku 2024 yang senilai Rp2,80 triliun. Peningkatan tersebut terutama dikontribusikan oleh bertambahnya saldo utang usaha, utang lainnya dan liabilitas yang masih harus dibayar.

Utang Usaha

Utang usaha merupakan utang terhadap pihak ketiga dan pihak berelasi. Akhir tahun buku 2025, total saldo utang usaha tercatat adalah senilai Rp282,25 miliar, naik 109,50% dari tahun 2024 yang senilai Rp134,73 miliar. Hal ini dikarenakan adanya penambahan beberapa pembelian bahan baku ke pihak berelasi.

Utang lainnya

Utang lainnya terdiri atas utang kepada pihak ketiga dan utang kepada pihak berelasi di luar kegiatan operasional utama PUSRI. Posisi utang lainnya pada akhir tahun 2025 adalah senilai Rp229,51 miliar, meningkat 127,76% dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp100,77 miliar. Kenaikan tersebut terutama akibat meningkatnya uang muka pelanggan.

Liabilitas yang Masih Harus Dibayar

Liabilitas yang masih harus dibayar merupakan beban yang masih harus dibayar yang terdiri atas akrual gas bumi, akrual proyek, distribusi, bunga pinjaman, dan lain-lain. Saldo liabilitas yang masih harus dibayar di akhir tahun 2025 meningkat 16,80% dari posisi akhir tahun 2024 yang senilai Rp2,18 triliun menjadi sebesar Rp2,55 triliun, terutama dikontribusikan antara lain oleh peningkatan akrual dari progress pembangunan proyek PUSRI IIIB di tahun 2025 dan pemakaian gas bumi.

Utang Pajak

Utang pajak terdiri dari PPh Badan PUSRI dan pajak lainnya. Saldo utang pajak Perusahaan pada akhir tahun buku 2025 adalah sebesar Rp129,77 miliar, naik 35,56% dari posisi tahun lalu yang senilai Rp95,73 miliar. Komponen pajak yang mengalami kenaikan tertinggi adalah PPh 25/29 atas penghasilan badan.

Bagian jangka pendek atas liabilitas sewa

Bagian jangka pendek atas liabilitas sewa adalah bagian dari kewajiban atas aset sewa yang akan jatuh tempo di tahun 2025. Bagian lancar atas liabilitas sewa tahun 2025 adalah sebesar Rp24,34 miliar, naik 223,26% dari tahun 2024 yang senilai Rp7,53 miliar.

Bagian jangka pendek atas pinjaman jangka panjang

Bagian jangka pendek atas pinjaman jangka panjang adalah bagian dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo di tahun 2025. Bagian lancar atas pinjaman

benefit liabilities. At the end of the 2025 financial year, the Company's short-term liabilities amounted to Rp3.52 trillion, an increase of 25.72% from Rp2.80 trillion in 2024. The increase was mainly contributed by higher balances of trade payables, other payables, and accrued liabilities.

Trade Payables

Trade payables represent liabilities to third parties and related parties. At the end of the 2025 financial year, total trade payables amounted to Rp282.25 billion, an increase of 109.50% from Rp134.73 billion in 2024. This increase was due to additional purchases of raw materials from related parties.

Other Payables

Other payables consist of payables to third parties and related parties outside PUSRI's main operational activities. The balance of other financial liabilities at the end of 2025 amounted to Rp229.51 billion, increasing by 127.76% from Rp100.77 billion in the previous year. The increase was mainly due to higher advances from customers.

Accrued Liabilities

Accrued liabilities represent expenses that have been incurred but not yet paid, consisting of natural gas accruals, project accruals, distribution accruals, loan interest accruals, and others. The balance of accrued liabilities at the end of 2025 increased by 16.80% from Rp2.18 trillion in 2024 to Rp2.55 trillion, mainly contributed by higher accruals related to the progress of the PUSRI IIIB project development in 2025 and use of natural gas..

Taxes Payable

Taxes payable consist of PUSRI corporate income tax and other taxes. The Company's taxes payable balance at the end of the 2025 financial year amounted to Rp129.77 billion, an increase of 35.56% from Rp95.73 billion in the previous year. The tax component with the highest increase was corporate income tax under Article 25/29.

Current Portion of Lease Liabilities

The current portion of lease liabilities represents the portion of lease obligations due in 2025. The current portion of lease liabilities in 2025 amounted to Rp24.34 billion, increasing by 223.26% from Rp7.53 billion in 2024.

Current Portion of Long-Term Loans

The current portion of long-term loans represents the portion of long-term loans due in 2025. The current portion of long-term loans in 2025 amounted to Rp7.19 billion, increasing by 156.56% from Rp2.80 billion at the

jangka panjang tahun 2025 adalah senilai Rp7,19 miliar, naik 156,56% dari akhir tahun 2024 yang sebesar Rp2,80 miliar, yang disebabkan adanya kenaikan bagian pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu setahun.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek merupakan liabilitas imbalan kerja yang akan dibayarkan di tahun 2025. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Perusahaan di akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp298,03 miliar, naik 21,96% dari senilai Rp244,37 miliar di akhir tahun 2024. Hal ini terutama dikarenakan adanya tambahan liabilitas imbalan kerja dimaksud pada tahun 2025.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban PUSRI yang diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Saldo liabilitas jangka panjang dipengaruhi oleh pinjaman jangka panjang, liabilitas pajak tangguhan, utang retensi, serta liabilitas imbalan pascakerja. Perusahaan mencatatkan liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp9,40 triliun, meningkat 129,80% dari tahun 2024 yang senilai Rp4,09 triliun. Hal tersebut terutama dikarenakan adanya penarikan pinjaman kredit investasi untuk pembangunan proyek PUSRI IIIB.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer pengenaan pajak. Pada akhir tahun buku 2025, PUSRI mencatatkan saldo liabilitas pajak tangguhan senilai Rp212,66 miliar, menurun 30,04% dari sebesar Rp303,97 miliar di tahun sebelumnya.

Bagian Jangka Panjang atas Liabilitas Sewa

Bagian jangka panjang atas liabilitas sewa adalah bagian dari kewajiban atas aset sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun. Bagian jangka panjang atas liabilitas sewa untuk akhir tahun buku 2025 ini adalah sebesar Rp5,29 miliar, naik 48,72% dari saldonya di tahun 2024 yang hanya senilai Rp3,56 miliar.

Bagian Jangka Panjang atas Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman jangka panjang Perusahaan (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun) terdiri atas pinjaman atas kredit investasi (KI), pinjaman kredit modal kerja (KMK) jangka panjang, term loan dan pinjaman dari entitas induk PT Pupuk Indonesia (Persero). Saldo pinjaman jangka panjang Perusahaan di akhir tahun buku 2025 meningkat hingga 156,76% dari posisi akhir tahun 2024 yang senilai Rp3,17 triliun menjadi sebesar Rp8,13 triliun dikarenakan adanya penarikan fasilitas pinjaman

end of 2024, due to a higher portion of long-term loans maturing within one year.

Short-Term Employee Benefits Liabilities

Short-term employee benefits liabilities represent employee benefits payable in 2025. The Company's short-term employee benefits liabilities at the end of 2025 amounted to Rp298.03 billion, increasing by 21.96% from Rp244.37 billion at the end of 2024. This increase was mainly due to additional employee benefit liabilities recognized in 2025.

LONG-TERM LIABILITIES

Long-term liabilities are obligations of PUSRI expected to be settled in more than one year. The balance of long-term liabilities is influenced by long-term loans, deferred tax liabilities, retention payables, and post-employment benefit liabilities. As of December 31, 2025, the Company recorded long-term liabilities of Rp9.40 trillion, an increase of 129.80% from Rp4.09 trillion in 2024. The increase was mainly due to the drawdown of investment credit loans for the development of the PUSRI IIIB project.

Deferred Tax Liabilities

Deferred tax liabilities represent the amount of income tax payable in future periods as a result of temporary differences in tax recognition. At the end of the 2025 financial year, PUSRI recorded deferred tax liabilities amounting to Rp212.66 billion, decreasing by 30.04% from Rp303.97 billion in the previous year.

Long-Term Portion of Lease Liabilities

The long-term portion of lease liabilities represents lease obligations after deducting the portion due within one year. At the end of the 2025 financial year, the long-term portion of lease liabilities amounted to Rp5.29 billion, increasing by 48.72% from Rp3.56 billion in 2024.

Long-Term Portion of Long-Term Loans

The Company's long-term loans (after deducting the portion due within one year) consist of investment credit loans (KI), long-term working capital credit (KMK), term loans, and loans from the parent entity PT Pupuk Indonesia (Persero). The Company's long-term loan balance at the end of the 2025 financial year increased by 156.76% from Rp3.17 trillion in 2024 to Rp8.13 trillion, mainly due to the

jangka panjang baru untuk membiayai pembangunan Proyek PUSRI IIIB.

drawdown of new long-term loan facilities to finance the construction of the PUSRI IIIB Project.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang terdiri atas provisi imbalan kerja untuk program pensiun, manfaat kesehatan pasca kerja, program pesangon, dan program lainnya. Pada akhir tahun buku 2025, Perusahaan membukukan saldo liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp702,30 miliar, meningkat 47,40% dari posisi akhir tahun buku 2024 yang senilai Rp476,46 miliar.

Cost-Employment Benefit Liabilities

Long-term post-employment benefit liabilities consist of provisions for pension programs, post-employment health benefits, severance programs, and other programs. At the end of the 2025 financial year, the Company recorded post-employment benefit liabilities of Rp702,30 billion, an increase of 47.40% from Rp476.46 billion at the end of 2024.

EKUITAS

Ekuitas adalah hak residual atas aset PUSRI setelah dikurangi semua kewajiban. Kinerja ekuitas dipengaruhi oleh ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang terdiri dari modal saham, penyertaan modal dalam proses penerbitan saham, tambahan modal disetor, saldo laba, dan laba komprehensif lain serta ekuitas yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali.

EQUITY

Equity represents the residual interest in PUSRI's assets after deducting all liabilities. Equity performance is influenced by equity attributable to the owners of the parent entity, consisting of share capital, capital contributions in the process of share issuance, additional paid-in capital, retained earnings, and other comprehensive income, as well as equity attributable to non-controlling interests.

Total ekuitas Perusahaan pada akhir tahun buku 2025 adalah sebesar Rp19,28 triliun, meningkat 3,41% dibandingkan dengan akhir tahun buku 2024 yang senilai Rp18,65 triliun. Perubahan itu disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba di tahun 2025.

Total equity at the end of the 2025 financial year amounted to Rp19.28 trillion, an increase of 3.41% compared to Rp18.65 trillion at the end of 2024. The increase was mainly due to higher retained earnings in 2025.

Tabel Ekuitas

Table of Equity

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	(%)
Modal Saham Share Capital	5.800.000	5.800.000	0	0,00
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	(333.876)	(333.876)	0	0,00
Saldo Laba : Retained Earnings:				
Ditentukan penggunaannya Appropriated	6.713.966	5.788.537	925.429	15,99
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	610.677	1.068.450	(457.773)	(42,84)
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	6.487.707	6.303.773	183.934	2,92
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity	19.278.474	18.626.884	651.590	3,50
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interests	5.634	21.803	(16.169)	(74,16)
Jumlah Ekuitas Total Equity	19.284.108	18.648.687	635.421	3,41

Modal Saham

Modal saham merupakan modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai saham biasa yang memberikan hak untuk membawa 1 (satu) suara per saham dan berpartisipasi dalam dividen. Posisi modal saham PUSRI pada 2025 masih sama dengan posisi tahun 2024, yakni sebesar Rp5,8 triliun.

Saldo Laba

Saldo laba terdiri atas saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya dan yang belum ditentukan penggunaannya. Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya pada akhir tahun buku 2025 adalah sebesar Rp6,71 triliun, naik 15,99% dari posisinya di akhir tahun 2024 yang senilai Rp5,79 triliun.

Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya tersebut berasal dari kontribusi laba per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp610,68 miliar, turun 42,84% dari Rp1,07 triliun di akhir 2024.

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain PUSRI terdiri atas cadangan revaluasi aset tanah dan pengukuran kembali imbalan pasca kerja. Laba komprehensif lain akhir tahun buku 2025 tercatat senilai Rp6,49 triliun, naik 2,92% dari akhir tahun buku 2024 yang senilai Rp6,30 triliun. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan adanya penambahan dari hasil surplus revaluasi aset tetap tanah di tahun 2025.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah nilai pemilik mayoritas dari pemegang saham entitas. Pada akhir tahun 2025, PUSRI mencatatkan ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp19,28 triliun, meningkat 3,50% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai Rp18,63 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh naiknya laba tahun 2025.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali

Ekuitas yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali adalah nilai kepentingan non pengendali (minoritas) dari pemegang saham entitas. Pada akhir tahun 2025, Perusahaan mencatatkan ekuitas yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali senilai Rp5,63 miliar, menurun 74,16% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp21,80 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh pengaruh kinerja anak perusahaan PT PAL di tahun 2025.

Share Capital

Share capital represents issued and fully paid ordinary shares that carry the right to one vote per share and participation in dividends. PUSRI's share capital position in 2025 remained the same as in 2024, amounting to Rp5.8 trillion.

Retained Earnings

Retained earnings consist of appropriated and unappropriated retained earnings. Appropriated retained earnings at the end of the 2025 financial year amounted to Rp6.71 trillion, an increase of 15.99% from Rp5.79 trillion at the end of 2024.

Unappropriated retained earnings derived from profit contributions as of December 31, 2025 amounted to Rp610.68 billion, decreasing by 42.84% from Rp1.07 trillion at the end of 2024.

Other Comprehensive Income

PUSRI's other comprehensive income consists of revaluation reserves for land assets and remeasurement of post-employment benefits. Other comprehensive income at the end of the 2025 financial year amounted to Rp6.49 trillion, increasing by 2.92% from Rp6.30 trillion at the end of 2024. The increase was mainly due to additional gains from as a result of the land as a land as a fixed asset revaluation surplus in 2025.

Equity Attributable to Owners of the Parent Entity

Equity attributable to owners of the parent entity represents the majority ownership value of the Company's shareholders. At the end of 2025, PUSRI recorded equity attributable to owners of the parent entity amounting to Rp19.28 trillion, an increase of 3.50% compared to Rp18.63 trillion in the previous year. The increase was driven by higher profit in 2025.

Equity Attributable to Non-Controlling Interests

Equity attributable to non-controlling interests represents the minority shareholders' ownership value in the entity. At the end of 2025, the Company recorded equity attributable to non-controlling interests amounting to Rp5.63 billion, a decrease of 74.16% from Rp21.80 billion in the previous year. The decrease was primarily attributable to the performance of the subsidiary, PT PAL, during 2025.

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**
**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
Tabel Laba-Rugi

Table of Profit or Loss

Rp Juta

Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	(%)
Pendapatan Revenue	13.874.322	13.532.865	341.457	2,52
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(12.113.387)	(11.686.789)	(426.598)	3,65
Laba Bruto Gross Profit	1.760.935	1.846.076	(85.141)	(4,61)
Beban Penjualan Selling Expenses	(300.217)	(321.732)	21.515	(6,69)
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(459.353)	(299.305)	(160.048)	53,47
Laba Usaha Operating Profit	1.001.365	1.225.039	(223.674)	(18,26)
Pendapatan Bunga Interest Income	13.333	61.198	(47.865)	(78,21)
Beban Bunga Interest Expense	(129.156)	(269.817)	140.661	(52,13)
Bagian Laba/(Rugi) dari Entitas Asosiasi Share of Profit/(Loss) of Associates	(11.186)	(40.226)	29.040	(72,19)
Pendapatan (Beban) Lainnya. Neto Other Income (Expenses). Net	(49.933)	423.475	(473.408)	(111,79)
Laba sebelum Pajak Profit Before Tax	824.423	1.399.669	(575.246)	(41,10)
Beban Pajak Tax Expense	(210.896)	(331.134)	120.238	(36,31)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	613.527	1.068.535	(455.008)	(42,58)
Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income/(Loss) for the Year	183.934	(356.810)	540.744	(151,55)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	797.461	711.725	85.736	12,05
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Profit for the Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	629.696	1.068.450	(438.754)	(41,06)
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interests	(16.169)	85	(16.254)	(19122,35)
Jumlah Total	613.527	1.068.535	(455.008)	(42,58)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	813.630	711.640	101.990	14,33
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interests	(16.169)	85	(16.254)	(19122,35)
Jumlah Total	797.461	711.725	85.736	12,05
Laba Tahun Berjalan per Saham (rupiah penuh) Profit for the Year per Share (full Rupiah)	108.568	184.216	(75.647)	(41,06)

Pendapatan

PUSRI berhasil membukukan total pendapatan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp13,87 triliun, naik 2,52% dari tahun buku 2024 yang senilai Rp13,53 triliun. Hal tersebut dikontribusikan oleh adanya kenaikan volume penjualan sektor PSO. menyesuaikan dengan jumlah alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia.

Revenue

PUSRI recorded total revenue of Rp13.95 trillion for the financial year ended December 31, 2025, an increase of 3.08% compared to Rp13.53 trillion in 2024. The increase was mainly contributed by higher sales volumes in the PSO and sectors, in line with the allocation of subsidized fertilizers determined by the Government of the Republic of Indonesia

Tabel Pendapatan PUSRI

Table of PUSRI Revenue

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025		2024		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
	Jumlah Total	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah Total	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah Total	(%)
Pendapatan Pupuk Fertilizer Revenue						
Subsidi Subsidized	10.424.100	75.13	9.646.292	71.28	777.808	8,06
Non Subsidi Non-Subsidized	2.609.350	18.81	2.964.312	21.90	(354.962)	(11,97)
Jumlah Pendapatan dari Pupuk Total Fertilizer Revenue	13.033.450	93.94	12.610.604	93.19	422.846	3,35
Pendapatan Non Pupuk Non-Fertilizer Revenue						
Amonia Ammonia	673.035	4.85	784.773	5.80	(111.738)	(14,24)
Lain-lain Others	167.837	1.21	137.488	1.02	30.349	(22,07)
Jumlah Pendapatan dari Non Pupuk Total Non-Fertilizer Revenue	840.872	6.06	922.261	6.19	(81.389)	(8,82)
Jumlah Pendapatan Total Revenue	13.874.322	100.00	13.532.865	100.00	341.457	2,52

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan terdiri atas beban produksi. bahan baku dan bahan pembantu, biaya penyusutan, gaji dan upah, biaya pemindahan pupuk, biaya pemeliharaan, lain-lain dan persediaan. Pada akhir tahun buku 2025, beban pokok pendapatan PUSRI tercatat sebesar Rp12,11 triliun, meningkat 3,65% dari tahun 2024 yang senilai Rp11,69 triliun. Peningkatan tersebut terutama dikontribusikan oleh meningkatnya beban bahan baku dan bahan pembantu yang naik sejalan dengan kenaikan harga gas dan kurs dibanding 2024.

Cost of Revenue

Cost of revenue consists of production expenses, raw materials and auxiliary materials, depreciation expenses, salaries and wages, fertilizer handling costs, maintenance costs, other expenses, and inventory. At the end of the 2025 financial year, PUSRI recorded cost of revenue amounting to Rp12.11 trillion, an increase of 3.65% compared to Rp11.69 trillion in 2024. The increase was primarily attributable to the rise in raw material and auxiliary material expenses, which increased in line with increases in gas prices and exchange rates compared to 2024.

Tabel Beban Pokok Pendapatan
Table of Cost of Revenue

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	(%)
Bahan Baku dan Bahan Pembantu Raw Materials and Auxiliary Materials	8.575.825	7.835.774	740.051	9,44
Penyusutan Depreciation	1.019.665	1.017.916	1.749	0,17
Gaji, Upah dan Kesejahteraan Karyawan Salaries, Wages and Employee Welfare	891.347	841.766	49.581	5,89
Biaya Pengangkutan Transportation Costs	840.227	832.770	7.457	0,90
Pemeliharaan Maintenance	296.300	317.599	(21.299)	(6,71)
Penyesuaian beban imbalan pascakerja – biaya jasa lalu Adjustment of Post-Employment Benefit Expense – Past Service Cost	-	(331.567)	331.567	(100,00)
Lainnya Others	261.288	318.909	(57.621)	(18,07)
Subtotal	11.884.652	10.833.167	1.051.485	9,71%
Persediaan Barang Jadi dan Setengah Jadi Awal Tahun Beginning Balance of Finished Goods and Work in Progress	1.121.071	1.722.742	(601.671)	(34,93)
Pembelian pupuk NPK Purchase of NPK Fertilizer	-	251.951	(251.951)	100,00
Akhir tahun Year-End Balance	(892.336)	(1.121.071)	228.735	(20,40)
Jumlah Beban Pokok Pendapatan Total Cost of Revenue	12.113.387	11.686.789	426.598	3,65

Laba Bruto

Laba bruto didapat dari akun pendapatan yang diakumulasikan dengan beban pokok pendapatan. Laba bruto tahun buku 2025 adalah sebesar Rp1,76 triliun, turun 4,61% dari tahun 2024 yang senilai Rp1,85 triliun. Hal tersebut dikontribusikan oleh Penurunan tonase penjualan 2025 yang tercapai sebesar 93% dibanding 2024.

Gross Profit

Gross profit is derived from revenue after deducting cost of revenue. Gross profit for the 2025 financial year amounted to Rp1.76 trillion, a decrease of 4.61% compared to Rp1.85 trillion in 2024. This was attributable to the decline in sales tonnage in 2025, which reached 93% of the 2024 level.

Tabel Laba Bruto
Table of Gross Profit

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	(%)
Pendapatan Revenue	13.874.322	13.532.865	341.457	2,52
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(12.113.387)	(11.686.789)	(426.598)	3,65
Laba Bruto Gross Profit	1.760.935	1.846.076	(85.141)	(4,61)

Beban Penjualan

Beban penjualan terdiri atas beban distribusi, gaji dan kesejahteraan, beban sew, beban jasa, beban pemeliharaan, perjalanan dinas, penyusutan, serta beban penjualan lainnya untuk tahun buku 2025, beban penjualan PUSRI tercatat senilai Rp300,22 miliar, turun 6,69% dari tahun buku 2024 yang sebesar Rp321,73 miliar. Penurunan ini terutama dikontribusikan antara lain oleh berkurangnya beban distribusi, beban pelayanan, beban gaji dan beban pemeliharaan di tahun 2025 sebagai hasil implementasi program efisiensi.

Namun demikian, terdapat beberapa akun beban penjualan yang tetap mencatatkan kenaikan, di antaranya adalah akun beban sewa yang meningkat menjadi sebesar Rp10,68 miliar atau naik hingga 89,67% dari senilai Rp5,55 miliar di tahun sebelumnya.

Selling Expenses

Selling expenses consist of distribution expenses, salaries and employee welfare, rental expenses, service expenses, maintenance expenses, business travel expenses, as well as other selling expenses depreciation, and other expenses with values below Rp28.15 billion. In the 2025 financial year, PUSRI recorded selling expenses of Rp300.22 billion, a decrease of 6.69% from Rp321.73 billion in 2024. The decrease was mainly contributed by lower distribution expenses, service expenses, salary expenses, and maintenance expenses, in 2025 as a result of the implementation of efficiency programs.

However, several selling expense accounts still recorded increases, including rental expenses which rose to Rp10.68 billion, an increase of 89.67% from Rp5.55 billion in the previous year.

Tabel Beban Penjualan

Table of Selling Expenses

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	(%)
Beban Pelayanan Service Expenses	111.567	125.830	(14.263)	(11,34)
Gaji dan Kesejahteraan Salaries and Employee Welfare	52.008	55.396	(3.388)	(6,12)
Distribusi Distribution	48.270	83.245	(34.975)	(42,01)
Penyusutan Depreciation	32.522	32.772	(250)	(0,76)
Pemeliharaan Maintenance	15.142	22.302	(7.160)	(32,10)
Beban Sewa Rental Expenses	10.523	5.548	4.975	89,67
Beban Perjalanan dinas Business Travel Expenses	2.035	2.182	(147)	(6,74)
Penyesuaian beban imbalan pascakerja - biaya jasa lalu Adjustment of Post-Employment Benefit Expense - Past Service Cost	-	(29.000)	29.000	100,00
Lainnya Others	28.150	23.457	4.693	20,01
Jumlah Beban Penjualan Total Selling Expenses	300.217	321.732	(21.515)	(6,69)

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi terdiri atas gaji dan kesejahteraan, jasa konsultan dan profesi, listrik, air, dan utilitas, beban pemeliharaan, beban penyusutan, pajak, perjalanan dinas, asuransi, dan beban lain-lain. Akhir tahun buku 2025, PUSRI mencatatkan beban umum dan administrasi sebesar Rp459,35 miliar, naik 53,47% dari tahun 2024 yang senilai Rp299,31 miliar. Kenaikan ini lebih disebabkan oleh tidak adanya lagi penyesuaian

General and Administrative Expenses

General and administrative expenses consist of salaries and employee welfare, consultant and professional service fees, electricity, water and utilities, maintenance expenses, depreciation expenses, taxes, business travel, insurance, and other expenses. At the end of the 2025 financial year, PUSRI recorded general and administrative expenses of Rp459.35 billion, an increase of 53.47% compared to Rp299.31 billion in 2024. The increase

beban imbalan pasca kerja (biaya jasa lalu) pada tahun 2025, selain oleh adanya kenaikan pada beberapa akun.

Adapun akun komponen beban umum dan administrasi yang mencatatkan kenaikan terbesar ialah akun beban listrik, air dan utilitas disusul oleh akun beban penyuluhan, yang bertambah masing-masing senilai Rp6,74 miliar dan Rp5,40 miliar.

was mainly due to the absence of adjustments to post-employment benefit expenses (past service cost) in 2025, in addition to increases in several expense accounts.

The expense components within general and administrative expenses that recorded the largest increases were electricity, water and utility followed by outreach expenses, which increased by Rp6,74 billion and Rp5.40 billion, respectively.

Tabel Beban Umum dan Administrasi

Table of General and Administrative Expenses

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	(%)
Gaji dan Kesejahteraan Salaries and Employee Welfare	265.562	262.728	2.834	1,08
Jasa Konsultan Consultant Services	48.474	48.629	(155)	(0,32)
Beban Penyuluhan Outreach Expenses	35.045	29.649	5.396	18,20
Listrik, Air, dan Utilitas Electricity, Water, and Utilities	30.805	24.066	6.739	28,00
Beban Penyusutan Depreciation Expense	14.027	13.734	293	2,13
Beban pemeliharaan Maintenance Expenses	9.881	6.827	3.054	44,73
Beban Perjalanan Dinas Business Travel Expenses	8.775	9.036	(261)	(2,89)
Beban Pajak Tax Expenses	5.998	3.944	2.054	52,08
Beban Asuransi Insurance Expenses	2.363	1.392	971	69,76
Penyesuaian beban imbalan pascakerja - biaya jasa lalu Adjustment of Post-Employment Benefit Expense - Past Service Cost	-	(164.275)	164.275	(100,00)
Lainnya Others	38.423	63.575	(25.152)	(39,56)
Jumlah Beban Umum dan Administrasi Total General and Administrative Expenses	459.353	299.305	160.048	53,47

Laba Usaha

Laba usaha didapatkan dari akun laba bruto yang diakumulasikan dengan beban penjualan, beban umum dan administrasi. PUSRI membukukan laba usaha tahun 2025 senilai Rp1,00 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp1,23 triliun, laba usaha tersebut turun 18,26%. Hal tersebut sejalan dengan penurunan laba bruto.

Operating Profit

Operating profit is derived from gross profit after deducting selling expenses as well as general and administrative expenses. PUSRI recorded operating profit in 2025 amounting to Rp1.00 trillion. Compared to Rp1.23 trillion in 2024, operating profit decreased by 18.26%. The decline was in line with the decrease in gross profit

Tabel Laba Usaha

Table of Operating Profit

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	%
Laba Bruto Gross Profit	1.760.935	1.846.076	(85.141)	(4,61)
Beban Penjualan Selling Expenses	(300.217)	(321.732)	21.515	(6,69)
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(459.353)	(299.305)	(160.048)	53,47
Jumlah Laba Usaha-Neto Total Operating Profit – Net	1.001.365	1.225.039	(223.674)	(18,26)

Pendapatan Keuangan

Pendapatan Keuangan merupakan pendapatan dari bunga atas jasa giro dan deposito dari penempatan dana pada bank Pemerintah atau bank swasta, serta bunga atas pinjaman yang diberikan kepada entitas lain dalam satu grup. Untuk tahun 2025, PUSRI mencatatkan pendapatan bunga senilai Rp13,33 miliar, turun 78,21% dari tahun 2024 yang sebesar Rp61,20 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya saldo deposito maupun giro Perusahaan yang ditempatkan pada berbagai Bank di tahun 2025.

Financial Income

Financial income represents interest income from current accounts and time deposits placed in state-owned or private banks, as well as interest on loans provided to other entities within the same group. In 2025, PUSRI recorded interest income of Rp13.33 billion, a decrease of 78.21% compared to Rp61.20 billion in 2024. The decrease was mainly due to lower balances of the Company's deposits and current accounts placed in various banks in 2025.

Biaya Keuangan

Biaya Keuangan adalah beban bunga dari kegiatan penggalangan dana perbankan dan pinjaman dalam rangka mendukung kelancaran operasi entitas maupun kegiatan investasi Perusahaan. PUSRI membukukan beban bunga tahun 2025 senilai Rp129,16 miliar, dibandingkan pembukuan tahun 2024 yang sebesar Rp269,82 miliar, jumlah beban bunga tersebut menurun 52,13%. Hal tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya saldo pinjaman Perusahaan di tahun 2025.

Finance Costs

Finance costs represent interest expenses arising from banking fund-raising activities and borrowings undertaken to support the entity's operations and the Company's investment activities. PUSRI recorded interest expenses of Rp129.16 billion in 2025. Compared to Rp269.82 billion in 2024, interest expenses decreased by 52.13%. The decrease was mainly due to the lower outstanding loan balance of the Company in 2025.

Bagian atas laba/(rugi) bersih entitas asosiasi

Bagian atas laba/(rugi) bersih entitas asosiasi adalah pendapatan atas penyertaan PUSRI pada entitas asosiasi. Untuk tahun 2025, PUSRI mencatatkan bagian rugi dari entitas asosiasi sebesar Rp11,19 miliar menurun 72,19% dari tahun 2024 yang mencatatkan rugi sebesar Rp40,23 miliar. Penurunan Kerugian tersebut dikontribusikan oleh rugi PT Pupuk Indonesia Logistik di tahun 2025.

Share of Profit/(Loss) of Associates

The share of profit/(loss) of associates represents income from PUSRI's investment in associated entities. In 2025, PUSRI recorded a share of loss from associates amounting to Rp11.19 billion that decreased by 72.19% compared to 2024, which recorded a loss of Rp40.23 billion. The loss was mainly attributable to the loss of PT Pupuk Indonesia Logistik in 2025.

Pendapatan (Beban) lainnya – bersih

Pendapatan (Beban) lainnya – bersih terdiri dari pendapatan dan beban selisih kurs dan pendapatan dan atau beban lain-lain. Pada akhir tahun buku 2025, PUSRI membukukan beban lainnya sebesar Rp49,93 miliar, menurun 111,79% dari pembukuan pendapatan lainnya hingga sebesar Rp423,48 miliar pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama dikontribusikan oleh adanya rugi selisih kurs bersih yang melonjak hingga

Other Income (Expenses) – Net

Other income (expenses) – net consists of foreign exchange gains or losses and other income and/or expenses. At the end of the 2025 financial year, PUSRI recorded net other expenses of Rp49.93 billion, a decline of 111.79% compared to net other income of Rp423.48 billion recorded in 2024. The decrease was mainly attributable to a surge in net foreign exchange losses, which increased by 322.51% to Rp67.26 billion from

322,51% menjadi senilai Rp67,26 miliar dari sebelumnya senilai Rp15,92 miliar, akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS. Selain juga disebabkan turunnya secara signifikan nilai pendapatan dan klaim hingga 91,09% menjadi senilai Rp24,08 miliar dari sebesar Rp270,17 miliar di tahun sebelumnya.

Rp15.92 billion previously, due to the weakening of the Rupiah against the US Dollar. This was also attributable to a significant decline in income and claims, which fell by 91.09% to Rp24.08 billion from Rp270.17 billion in the previous year.

Tabel Pendapatan (Beban) Lainnya-Bersih

Table of Other Income (Expenses)

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	(%)
Pendapatan Denda dan klaim Penalty and Claim Income	24.083	270.171	(246.088)	(91.09)
Keuntungan/(Kerugian) atas penjualan Aset Tetap Gain/(Loss) on Sale of Fixed Assets	42	44.180	(44.138)	(99.90)
Selisih Kurs Bersih Net Foreign Exchange Gain/(Loss)	(67.255)	(15.918)	(51.337)	322,51
lainnya - bersih Other - Net	(6.803)	125.042	(131.845)	(105,44)
Jumlah Pendapatan/(Beban) Lainnya-Neto Total Other Income/(Expenses) – Net	(49.933)	423.475	(473.408)	(111,79)

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba Sebelum Pajak Penghasilan didapatkan dari akun laba usaha yang diakumulasikan dengan pendapatan dan beban bunga, bagian laba dari entitas asosiasi serta jumlah pendapatan/beban lainnya neto. Laba sebelum pajak Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah senilai Rp824,42 miliar. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,40 triliun, mencatatkan penurunan 41,10%. Penurunan tersebut terutama dikontribusikan oleh penurunan pendapatan lainnya.

Profit Before Income Tax

Profit Before Tax is derived from the operating profit account, accumulated with interest income and expenses, the share of profits from associates, and the net amount of other income/expenses. The Company's profit before tax for the fiscal year ending December 31, 2025, stood at Rp824.42 billion, down 41.10% when compared to the same period in the previous year. This was primarily due to a decrease in other income.

Tabel Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Table of Profit Before Income Tax

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	%
Laba Usaha Operating Profit	1.001.365	1.225.039	(223.674)	(18,26)
Pendapatan dan Beban Bunga Interest Income and Expenses	(115.823)	(208.619)	92.796	(44,48)
Bagian Laba (Rugi) dari Entitas Asosiasi Share of Profit (Loss) of Associates	(11.186)	(40.226)	29.040	(72,19)
Pendapatan lainnya bersih Other Income – Net	(49.933)	423.475	(473.408)	(111,79)
Laba sebelum Pajak Profit Before Tax	824.423	1.399.669	(575.246)	(41,10)

Beban Pajak Penghasilan

Beban Pajak Penghasilan adalah perhitungan akhir atas pajak penghasilan (PPh) pada akhir periode pembukuan. Beban pajak Perusahaan pada tahun buku 2025 adalah

Income Tax Expense

Income tax expense represents the final calculation of corporate income tax (PPh) at the end of the reporting period. The Company's tax expense in the 2025 financial

sebesar Rp210,90 miliar, turun Rp120,24 miliar atau 36,31% dari tahun buku 2024 yang sebesar Rp331,13 miliar. Penurunan beban pajak sejalan dengan berkurangnya perolehan laba perusahaan di tahun 2025.

year amounted to Rp210.90 billion, decreasing by Rp120.24 billion or 36.31% from Rp331.13 billion in 2024. The decrease in tax expense was in line with the decline in the Company's profit in 2025.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan merupakan laba bersih PUSRI yang didapatkan dari laba sebelum pajak yang diakumulasi dengan beban pajak. Pada tahun 2025, PUSRI membukukan laba tahun berjalan senilai Rp613,53 miliar. Dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya yang sebesar Rp1,07 triliun, laba tahun berjalan tersebut turun 42,58%. Turunnya laba tahun berjalan tersebut sejalan dengan berkurangnya laba sebelum pajak di tahun 2025.

Profit for the Year

Profit for the year represents PUSRI's net income derived from profit before tax after deducting income tax expense. In 2025, PUSRI recorded profit for the year amounting to Rp613.53 billion. Compared to Rp1.07 trillion in the previous financial year, profit for the year decreased by 42.58%. The decline was consistent with the decrease in profit before tax in 2025.

Tabel Laba Tahun Berjalan

Table of Profit for the Year

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	%
Laba sebelum Pajak Profit Before Tax	824.423	1.399.669	(575.246)	(41,10)
Beban Pajak Tax Expense	(210.896)	(331.134)	120.238	(36,31)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	613.527	1.068.535	(455.008)	(42,58)

Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan adalah kenaikan aset PUSRI yang dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak berhubungan dengan operasional normal perusahaan, PUSRI mencatatkan pendapatan komprehensif lain tahun berjalan pada tahun buku 2025 sebesar Rp183,93 miliar meningkat 151,55% dari rugi komprehensif tahun buku 2024 yang sebesar Rp356,81 miliar.

Other Comprehensive Income for the Year

Other comprehensive income for the year represents changes in PUSRI's assets arising from items not related to the Company's normal operating activities. In the 2025 financial year, PUSRI recorded other comprehensive income of Rp183.93 billion, improving by 151.55% compared to the comprehensive loss of Rp356.81 billion recorded in 2024.

Tabel Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Table of Other Comprehensive Income for the Year

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	%
Surplus Revaluasi aset Asset Revaluation Surplus	302.881	-	302.881	100
Keuntungan/(kerugian) pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja Remeasurement Gain/(Loss) on Post-Employment Benefits	(166.528)	(461.365)	294.837	(63,91)
Perubahan nilai wajar dari investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Change in Fair Value of Equity Investments Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income	10.945	3.055	7.890	258,27
Pajak Penghasilan Terkait Related Income Tax	36.636	101.500	(64.864)	(63,91)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Total Other Comprehensive Income for the Year	183.934	(356.810)	540.744	151,55

Jumlah Penghasilan Komprehensif

Jumlah penghasilan komprehensif didapatkan dari akun laba tahun berjalan yang diakumulasikan dengan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Pada tahun 2025, PUSRI membukukan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp797,46 miliar. Dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya yang senilai Rp711,73 miliar, mencatatkan kenaikan 12,05%. Hal ini dikontribusikan oleh adanya kenaikan penghasilan komprehensif lain yang lebih besar dan turunnya laba tahun berjalan di tahun 2025.

Total Comprehensive Income

Total comprehensive income is derived from profit for the year combined with other comprehensive income for the year. In 2025, PUSRI recorded total comprehensive income of Rp797.46 billion. Compared to Rp711.73 billion in the previous financial year, this represents an increase of 12.05%. The increase was mainly driven by the significant rise in other comprehensive income despite the decline in profit for the year in 2025

Tabel Jumlah Penghasilan Komprehensif

Table of Total Comprehensive Income

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	613.527	1.068.535	(455.008)	(42,58)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income for the Year	183.934	(356.810)	540.744	(151,55)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	797.461	711.725	85.736	12,05

Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dan Kepentingan Non Pengendali

- Pemilik Entitas Induk**
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perusahaan pada tahun buku 2025 adalah senilai Rp629,70 miliar, turun 41,06% dari tahun buku 2024 yang sebesar Rp1,07 triliun.
- Kepentingan Non Pengendali**
Pada tahun 2025, PUSRI mencatatkan rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali sebesar Rp16,17 miliar, merosot tajam hingga 19,122.35% dari catatan laba periode tahun sebelumnya yang sebesar Rp85 juta.

Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity and Non-Controlling Interests

- Owners of the Parent Entity**
Profit for the year attributable to the owners of the parent entity in the 2025 financial year amounted to Rp629.70 billion, decreasing by 41.06% from Rp1.07 trillion in 2024.
- Non-Controlling Interests**
In 2025, PUSRI recorded a loss for the year attributable to non-controlling interests of Rp16.17 billion, a sharp decline of 19,122.35% compared to a profit of Rp85 million recorded in the previous year.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dan Kepentingan Non-Pengendali

- Pemilik Entitas Induk**
Pada tahun 2025, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perusahaan mencapai nilai sebesar Rp813,63 miliar. Jumlah tersebut naik 14,33% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang senilai Rp711,64 miliar.

Total Comprehensive Income for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity and Non-Controlling Interests

- Owners of the Parent Entity**
In 2025, total comprehensive income for the year attributable to the owners of the parent entity amounted to Rp813.63 billion. This figure increased by 14.33% compared to Rp711.64 billion in the previous year.

2. Kepentingan Non Pengendali

Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali di tahun 2025 adalah senilai Rp16,17 miliar, turun hingga 19,122,35% dari catatan penghasilan tahun buku 2024 yang sebesar Rp85 juta.

Laba per Saham

Laporan keuangan audited PUSRI tidak menyajikan akun laba per saham karena Perusahaan bukan merupakan perusahaan terbuka. PUSRI memberikan informasi ini sebagai bagian dari keterbukaan informasi. Laba per saham dihitung dari pembagian antara laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah saham Perusahaan.

Untuk tahun buku 2025, laba per saham PUSRI tercatat sebesar Rp108,568 per saham, turun 41,06% dari Rp184,216 per saham di tahun 2024.

Tabel Laba Per Saham

Table of Earnings per Share

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	%
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity	629.696	1.068.450	(438.754)	(41,06)
Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	5.800.000	5.800.000	-	0,00
Jumlah Laba Rugi per Saham (rupiah penuh/lembar saham) Earnings per Share (full Rupiah/share)	108.568	184.216	(75.647)	(41,06)

2. Non-Controlling Interests

Total comprehensive loss for the year attributable to non-controlling interests in 2025 amounted to Rp16.17 billion, a decrease of 19,122.35% compared to the comprehensive income recorded in 2024 amounting to Rp85 million.

Earnings per Share

PUSRI's audited financial statements do not present earnings per share because the Company is not a publicly listed entity. However, PUSRI provides this information as part of its transparency commitment. Earnings per share are calculated by dividing profit for the year attributable to the owners of the parent entity by the number of the Company's outstanding shares.

For the 2025 financial year, PUSRI's earnings per share amounted to Rp108,568 per share, decreasing by 41.06% from Rp184,216 per share in 2024.

DAMPAK NILAI MATA UANG ASING TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN

PUSRI telah dan memperkirakan perubahan nilai tukar akan terus memberikan pengaruh terhadap usaha dan arus kas PUSRI. Pembelian bahan baku berupa gas alam diproyeksikan akan terus didenominasi dengan mata uang dolar Amerika Serikat.

Untuk melakukan lindung nilai, PUSRI memiliki kebijakan Prosedur Operasional Baku (POB) transaksi lindung nilai melalui transaksi derivatif meliputi transaksi spot, forward, option, dan swap. Transaksi lindung nilai dilaksanakan dengan tujuan memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar, melindungi aset/kewajiban PUSRI serta tidak diperuntukkan untuk kegiatan spekulasi atau mencari keuntungan dari pergerakan nilai tukar.

IMPACT OF FOREIGN EXCHANGE RATES ON THE COMPANY'S PERFORMANCE

PUSRI has experienced and expects that exchange rate fluctuations will continue to affect its operations and cash flows. The purchase of raw materials, particularly natural gas, is projected to remain denominated in US Dollars.

To hedge against this exposure, PUSRI has established a Standard Operating Procedure (SOP) for hedging transactions through derivative instruments, including spot, forward, option, and swap transactions. These hedging activities are conducted to mitigate the risk of exchange rate volatility, protect PUSRI's assets and liabilities, and are not intended for speculative purposes or to gain profit from exchange rate movements.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN LABA OPERASI

Penjualan

Nilai penjualan Perusahaan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp13,87 triliun atau 2,52% lebih tinggi dari tahun 2024 yang senilai Rp13,53 triliun. Hal tersebut dikontribusikan dari kenaikan pengantian nilai subsidi oleh pemerintah dikarenakan adanya kenaikan harga bahan baku dan kurs.

Laba Operasi

Harga Urea dan Amonia yang meningkat akibat kurangnya pasokan produk Urea dan Amonia di pasar berdampak pada naiknya laba operasi. Laba operasi tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1,00 triliun, 18,26% lebih rendah dari tahun 2024 yang sebesar Rp1,23 triliun lebih disebabkan oleh penurunan tonase penjualan 2025 yang tercapai sebesar 93% dibandingkan 2024.

IMPACT OF PRICE CHANGES ON SALES AND OPERATING PROFIT

Sales

The Company's sales value in 2025 amounted to Rp13.87 trillion, or 2.52% higher than Rp13.53 trillion in 2024. This was primarily attributable to an increase in government subsidy reimbursements, driven by rising raw material prices and exchange rate fluctuations.

Operating Profit

The increase in urea and ammonia prices due to the scarcity of these products in the market has affected operating profit. Operating profit in 2025 was realized at Rp1.00 trillion, a 18.26% decrease than Rp1.23 trillion in 2024, due to a 93% decline in sales tonnage in 2025 compared to 2024.

ARUS KAS

Perusahaan membukukan kas dan setara kas pada akhir tahun buku 2025 senilai Rp305,99 miliar, turun 56,52% dari akhir tahun buku 2024 yang sebesar Rp703,73 triliun. Perubahan tersebut terutama dikontribusikan oleh berkurangnya arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi bersamaan dengan bertambahnya arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi, yakni berkaitan dengan pembangunan proyek PUSRI IIIB di sepanjang tahun 2025.

CASH FLOW

The Company recorded cash and cash equivalents of Rp305.99 billion at the end of the 2025 financial year, a decrease of 56.52% from Rp703.73 billion at the end of 2024. The change was mainly attributable to lower cash flows generated from operating activities along with higher cash outflows for investment activities related to the construction of the PUSRI IIIB project throughout 2025.

Tabel Arus Kas PUSRI

Table of PUSRI Cash Flows

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	(%)
Arus kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	(720.557)	3.350.505	(4.071.063)	(121,51)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(4.215.448)	(1.383.270)	(2.832.178)	204,75
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	4.536.353	(2.712.289)	7.248.641	(267,25)
Kenaikan/(Penurunan) kas dan setara kas bersih Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(399.652)	(745.054)	345.401	(46,36)
Dampak Perubahan Nilai Kurs Terhadap Kas dan Setara Kas Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents	1.907	(5.219)	7.126	(136,54)
Kas dan setara kas awal tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	703.733	1.454.006	(750.272)	(51,60)
Kas dan setara kas akhir tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	305.988	703.733	(397.746)	(56,52)

ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI

Arus kas dari (untuk) aktivitas operasi dipengaruhi oleh penerimaan dari pelanggan, penerimaan dari subsidi, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, penerimaan bunga, pembayaran beban keuangan, pembayaran pajak penghasilan, serta penerimaan restitusi pajak penghasilan.

Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun buku 2025 mencapai nilai sebesar Rp720,56 miliar, menurun 121,51% dari tahun buku 2024 yang mencatatkan perolehan kas dari aktivitas operasi hingga sebesar Rp3,35 triliun. Perubahan tersebut terutama dikontribusikan oleh berkurangnya penerimaan subsidi dari Pemerintah ditengah turunnya nilai penerimaan kas dari pelanggan, selain dipengaruhi oleh naiknya nilai pembayaran kepada pemasok di tahun 2025.

CASH FLOWS FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES

Cash flows from (used in) operating activities are influenced by receipts from customers, subsidy receipts, payments to suppliers, payments to employees, interest receipts, finance cost payments, income tax payments, and income tax refund receipts.

Net cash used in operating activities in the 2025 financial year amounted to Rp720.56 billion, a decrease of 121.51% compared to 2024, which recorded net cash generated from operating activities of Rp3.35 trillion. The change was mainly attributable to lower subsidy receipts from the Government alongside reduced cash receipts from customers, as well as higher payments to suppliers in 2025.

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Table of Cash Flows from Operating Activities

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	(%)
Penerimaan Kas dari Pelanggan Cash Receipts from Customers	6.357.576	6.977.591	(620.015)	(8,89)
Penerimaan dari Subsidi Receipts from Subsidies	5.175.702	7.504.869	(2.329.167)	(31,04)
Pembayaran subsidi pupuk kepada Pemerintah Indonesia Fertilizer Subsidy Payment to the Government of Indonesia	(88.749)	-	(88.749)	(100%)
Pembayaran kepada Pemasok dan lainnya Payments to Suppliers and others	(10.831.971)	(9.573.764)	(1.258.207)	13,14
Pembayaran kepada Karyawan Payments to Employees	(1.082.507)	(1.050.529)	(31.978)	3,04
Penerimaan Bunga Interest Receipts	13.333	66.047	(52.714)	(79,81)
Pembayaran Beban Keuangan Finance Cost Payments	(142.188)	(329.427)	187.239	(56,84)
Penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya Placement of Restricted Cash and Cash Equivalents	-	(1.454)	1.454	(100,00)
Penarikan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya Withdrawal of restricted cash and cash equivalents	3.161	-	3.161	100
Penerimaan restitusi pajak Tax Refund Receipts	72.670	-	72.670	100
Pembayaran Pajak Penghasilan Income Tax Payments	(197.584)	(242.828)	45.244	(18,63)
Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) dari/untuk Aktivitas Operasi Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities	(720.557)	3.350.505	(4.071.063)	(121,51)

Penerimaan Kas dari Pelanggan

Penerimaan Kas dari Pelanggan adalah penerimaan kas atas transaksi penjualan pupuk dan nonpupuk atau pemberian jasa kepada pelanggan. Perusahaan membukukan penerimaan dari pelanggan pada tahun 2025 senilai Rp6,36 triliun, turun 8,89% dari tahun buku 2024 yang sebesar Rp6,98 triliun. Penurunan tersebut dikarenakan penurunan penerimaan piutang dari pemerintah.

Penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia

Penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia merupakan penerimaan kas atas penjualan pupuk subsidi yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2025, PUSRI mencatatkan penerimaan dari subsidi senilai Rp5,18 triliun, menurun 31,04% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp7,50 triliun.

Pembayaran kepada Pemasok

Pembayaran kepada pemasok adalah pembayaran kas kepada pihak berelasi maupun pihak ketiga atas transaksi pembelian barang atau jasa yang digunakan oleh PUSRI. Pada akhir tahun buku 2025, pembayaran kepada pemasok adalah sebesar Rp10,83 triliun, meningkat 13,14% dari tahun buku 2024 yang senilai Rp9,57 triliun, terutama disebabkan oleh naiknya harga bahan baku gas dan terjadinya pelemahan kurs Rupiah.

Pembayaran kepada Karyawan

Pembayaran kepada karyawan adalah pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan. Pembayaran kepada karyawan pada tahun buku 2025 sebesar Rp1,08 triliun, naik 3,04% dari tahun buku 2024 yang senilai Rp1,05 triliun. Kenaikan tersebut terutama dikontribusikan oleh adanya penyesuaian normal gaji dan kesejahteraan karyawan.

Penerimaan Pendapatan Keuangan

Penerimaan Pendapatan Keuangan adalah penerimaan kas dari pendapatan bunga atas jasa giro dan dana deposito yang ditempatkan Perusahaan pada bank Pemerintah atau bank swasta serta bunga atas pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan kepada entitas lain dalam satu grup.

Penerimaan bunga sampai dengan berakhirnya tahun buku 2025 adalah senilai Rp13,33 miliar, berkurang 79,81% dari tahun buku 2024 yang sebesar Rp66,05 miliar. Penurunan tersebut disebabkan berkurangnya nilai deposito pada tahun 2025 dibandingkan nilainya di tahun 2024, selain dikontribusikan oleh turunnya suku bunga deposito.

Cash Receipts from Customers

Cash receipts from customers represent cash received from sales transactions of fertilizer and non-fertilizer products or services provided to customers. The Company recorded customer receipts in 2025 amounting to Rp6.36 trillion, a decrease of 8.89% from Rp6.98 trillion in 2024. The decrease occurred this was due to a decrease in receivables collections from the government.

Subsidy Receipts from the Government of Indonesia

Subsidy receipts from the Government of Indonesia represent cash received from the sale of subsidized fertilizers paid by the Government of the Republic of Indonesia. In 2025, PUSRI recorded subsidy receipts of Rp5.18 trillion, decreasing by 31.04% from Rp7.50 trillion in the previous year.

Payments to Suppliers

Payments to suppliers represent cash payments to related parties and third parties for purchases of goods or services used by PUSRI. At the end of the 2025 financial year, payments to suppliers amounted to Rp10.83 trillion, an increase of 13.14% from Rp9.57 trillion in 2024. The increase was mainly due to higher natural gas raw material prices and the depreciation of the Rupiah exchange rate.

Payments to Employees

Payments to employees represent cash payments made to and for the benefit of employees. Payments to employees in 2025 amounted to Rp1.08 trillion, increasing by 3.04% from Rp1.05 trillion in 2024. This increase was primarily due to normal adjustments to employee salaries and benefits.

Financial Income Receipts

Financial income receipts represent cash received from interest income on current accounts and time deposits placed by the Company in state-owned or private banks, as well as interest on loans provided to other entities within the same group.

Interest receipts up to the end of the 2025 financial year amounted to Rp13.33 billion, decreasing by 79.81% from Rp66.05 billion in 2024. The decline was caused by lower deposit balances in 2025 compared to 2024, in addition to lower deposit interest rates.

Pembayaran Beban Keuangan

Pembayaran beban keuangan merupakan pembayaran kas atas bunga pinjaman yang diterima dari entitas lain dalam satu grup maupun bank swasta dan lembaga keuangan lainnya. Pembayaran beban keuangan pada 2025 tercatat senilai Rp142,19 miliar, turun 56,84%, dari pembayaran periode 2024 yang sebesar Rp329,43 miliar karena terdapat penurunan saldo pinjaman pada tahun 2025.

Finance Cost Payments

Finance cost payments represent cash payments of interest on loans obtained from entities within the same group as well as from private banks and other financial institutions. Finance cost payments in 2025 amounted to Rp142.19 billion, decreasing by 56.84% from Rp329.43 billion in 2024 due to lower outstanding loan balances in 2025.

Pembayaran pajak penghasilan badan

Pembayaran pajak penghasilan badan ialah pembayaran atas beban pajak penghasilan (PPh). Pada tahun 2025, pembayaran pajak penghasilan menurun 18,63% menjadi senilai Rp197,58 miliar dari sebesar Rp242,83 miliar dari tahun 2024. Penurunan tersebut dikarenakan adanya pembayaran utang pajak atas penghasilan badan tahun 2024 yang dibayarkan di tahun 2025.

Corporate Income Tax Payments

Corporate income tax payments represent payments of corporate income tax (PPh). In 2025, income tax payments decreased by 18.63% to Rp197.58 billion from Rp242.83 billion in 2024. The decrease was mainly due to the payment of corporate income tax liabilities for 2024 that were settled in 2025.

ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas dari aktivitas investasi dipengaruhi oleh penerimaan dari penjualan aset tetap dan properti investasi, perolehan aset tak berwujud, serta perolehan aset tetap, penerimaan dividen kas, penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, penempatan deposito berjangka, dan pembayaran uang muka untuk aset dalam penyelesaian.

CASH FLOWS FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES

Cash flows from investing activities are influenced by proceeds from the sale of fixed assets and investment property, acquisition of intangible assets, acquisition of fixed assets, cash dividend receipts, placement of restricted cash and cash equivalents, placement of time deposits, and advance payments for assets under construction.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun buku 2025 adalah sebesar Rp4,21 triliun, meningkat 204,75% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai Rp1,38 triliun. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan dari saldo perolehan aset tetap sebagai hasil kegiatan investasi, selain karena nihilnya dana deposito berjangka di tahun pelaporan.

Net cash used in investing activities in the 2025 financial year amounted to Rp4.21 trillion, increasing by 204.75% from Rp1.38 trillion in the previous year. This increase was mainly due to higher acquisition of fixed assets as part of investment activities, as well as the absence of time deposit placements during the reporting year.

Tabel Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Table: Net Cash Used in Investing Activities

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	(%)
Penerimaan Penjualan Aset Tetap Proceeds from Sale of Fixed Assets	42	44.665	(44.623)	(99,91)
Penerimaan Dividen Dividend Receipts	6.099	2.323	3.776	162,55
Perolehan Aset Tetap Acquisition of Fixed Assets	(4.197.319)	(3.181.258)	(1.016.061)	31,94
Pembelian aset tak berwujud Purchase of Intangible Assets	(24.270)	-	(24.270)	(100,00)
Penarikan deposito berjangka Withdrawal of Time Deposits	-	1.751.000	(1.751.000)	(100,00)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(4.215.448)	(1.383.270)	(2.832.178)	204,75

Penerimaan Penjualan Aset Tetap

Penerimaan penjualan aset tetap adalah penerimaan kas atas transaksi penjualan aset tetap. Pada tahun 2025 PUSRI hanya mencatatkan penerimaan transaksi penjualan aset tetap senilai Rp42 juta, dari sebesar Rp44,66 miliar di tahun sebelumnya.

Penerimaan Dividen

Penerimaan dividen adalah penerimaan dividen dari entitas anak usaha dimana porsi kepemilikan sebagian dimiliki oleh PUSRI. Pada tahun 2025, penerimaan dividen kas kembali melonjak hingga sebesar Rp6,10 miliar, naik 162,55% dari periode sebelumnya yang hanya senilai Rp2,32 miliar, sejalan dengan naiknya nilai pembagian dividen dari laba entitas anak di tahun berjalan.

Perolehan Aset Tetap

Perolehan atau pembelian aset tetap adalah pengeluaran kas untuk memperoleh aset tetap dalam rangka realisasi investasi. Untuk tahun 2025, nilai perolehan aset tetap PUSRI adalah sebesar Rp4,20 triliun. Dibandingkan dengan perolehan tahun 2024 yang senilai Rp3,18 triliun, perolehan aset tetap meningkat 31,94%. Peningkatan tersebut sejalan dengan kemajuan pembangunan Proyek PUSRI IIIB sebagai bagian dari realisasi strategi pengembangan bisnis PUSRI.

Pembelian aset tak berwujud

Pada tahun 2025, PUSRI melakukan pembelian aset tak berwujud sejumlah Rp24,27 miliar dari posisi nihil di tahun sebelumnya.

Penarikan Deposito Berjangka

Pada tahun 2025 PUSRI tidak melakukan penarikan deposito berjangka, sementara pada tahun 2024 PUSRI melakukan penarikan deposito berjangka hingga senilai Rp1,75 triliun.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari aktivitas pendanaan dipengaruhi oleh penerimaan utang bank jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang, pembayaran utang bank jangka pendek, pembayaran pinjaman jangka panjang, tambahan modal disetor pada entitas asosiasi, serta pembayaran dividen kas.

Pada tahun 2025, kas bersih yang diperoleh (digunakan) dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp4,54 triliun, melonjak hingga 267,25% dari kondisi penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan pada periode tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya PUSRI menggunakan kas sebesar Rp2,71 miliar untuk aktivitas pendanaan. Perubahan tersebut dikarenakan

Proceeds from Sale of Fixed Assets

Proceeds from the sale of fixed assets represent cash received from the disposal of fixed assets. In 2025, PUSRI recorded proceeds from the sale of fixed assets amounting to Rp42 million, compared with Rp44.66 billion in the previous year.

Dividend Receipts

Dividend receipts represent dividends received from subsidiaries in which PUSRI holds partial ownership. In 2025, cash dividend receipts increased to Rp6.10 billion, rising 162.55% from Rp2.32 billion in the previous year, in line with higher dividend distributions from subsidiary earnings during the year.

Acquisition of Fixed Assets

Acquisition or purchase of fixed assets represents cash outflows for acquiring fixed assets as part of investment realization. In 2025, PUSRI recorded fixed asset acquisitions of Rp4.20 trillion. Compared with acquisitions in 2024 amounting to Rp3.18 trillion, fixed asset acquisitions increased by 31.94%. This increase was aligned with the progress of the PUSRI IIIB Project construction as part of the Company's business development strategy.

Purchase of intangible assets

In 2025, PUSRI acquired intangible assets amounting to Rp24.27 billion, compared to no acquisitions in the previous year.

Withdrawal of Time Deposits

In 2025, PUSRI did not make any withdrawals of time deposits, whereas in 2024 the Company withdrew time deposits amounting to Rp1.75 trillion.

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Cash flows from financing activities are influenced by proceeds from short-term bank loans, proceeds from long-term borrowings, repayment of short-term bank loans, repayment of long-term borrowings, additional paid-in capital in associated entities, and cash dividend payments.

In 2025, net cash provided by (used in) financing activities amounted to Rp4.54 trillion, representing a 267.25% increase compared to the cash used for financing activities in the previous year. In the prior year, PUSRI used Rp2.71 billion in cash for financing activities. This change was attributable to a significant increase in proceeds from bank loans and other borrowings, which

adanya peningkatan penerimaan pinjaman bank maupun pinjaman lainnya dengan jumlah signifikan yang lebih besar dari total kebutuhan pembayaran pinjaman bank, baik jangka pendek maupun jangka panjang di tahun 2025 yang telah jatuh tempo.

exceeded the total repayments of both short-term and long-term bank loans that matured during 2025.

Tabel Kas Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan

Table: Cash Flows Used in Financing Activities

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	(%)
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek Proceeds from Short-Term Bank Loans	9.230.000	5.480.000	3.750.000	68,43
Penerimaan Pinjaman Bank dan lainnya Jangka Panjang Proceeds from Long-Term Bank and Other Loans	5.512.189	2.381.101	3.131.088	131,50
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek Repayment of Short-Term Bank Loans	(9.230.000)	(6.080.000)	(3.150.000)	51,81
Pembayaran Pinjaman Bank dan Lainnya Jangka Panjang Repayment of Long-Term Bank and Other Loans	(775.000)	(4.118.417)	3.343.417	(81,18)
Pembayaran Liabilitas Sewa Lease Liability Payments	(38.796)	(31.834)	(6.962)	21,87
Pembayaran Dividen Dividend Payments	(162.040)	(343.139)	181.099	(52,78)
Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities	4.536.353	(2.712.289)	7.248.641	(267,25)

Penerimaan pinjaman bank jangka pendek

Penerimaan pinjaman bank jangka pendek adalah penerimaan kas dari pinjaman bank jangka pendek. PUSRI membukukan penerimaan pinjaman jangka pendek pada akhir tahun buku 2025 sebesar Rp9,23 triliun, meningkat 68,43% dari tahun buku 2024 yang senilai Rp5,48 triliun. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penarikan kredit modal kerja yang lebih tinggi di tahun 2025.

Proceeds from Short-Term Bank Loans

Proceeds from short-term bank loans represent cash received from short-term borrowings from banks. PUSRI recorded proceeds from short-term loans at the end of 2025 amounting to Rp9.23 trillion, an increase of 68.43% from Rp5.48 trillion in 2024. The increase was mainly due to higher drawdowns of working capital credit facilities during 2025.

Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Panjang

Penerimaan pinjaman jangka panjang adalah penerimaan kas dari pinjaman bank jangka panjang. PUSRI membukukan penerimaan pinjaman bank sebesar Rp5,51 triliun pada tahun buku 2025, meningkat 131,50% dari penerimaan pinjaman jangka panjang senilai Rp2,38 triliun di tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya kebutuhan pinjaman Kredit Investasi untuk mendanai kegiatan proyek.

Proceeds from Long-Term Bank Loans

Proceeds from long-term loans represent cash received from long-term bank borrowings. In 2025, PUSRI recorded proceeds from long-term loans amounting to Rp5.51 trillion, increasing by 131.50% compared with Rp2.38 trillion in the previous year. The increase was driven by the need for investment credit to finance project activities.

Pembayaran Pinjaman Bank Jangka pendek

PUSRI juga membukukan pembayaran pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp9,23 triliun pada tahun buku 2025, sementara pada tahun buku 2024 PUSRI membukukan pembayaran pinjaman jangka pendek senilai Rp6,08 triliun, naik 51,81%. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya sebagian pinjaman bank jangka pendek yang jatuh tempo.

Repayment of Short-Term Bank Loans

PUSRI also recorded repayments of short-term bank loans totaling Rp9.23 trillion in 2025. In 2024, the Company recorded repayments of Rp6.08 trillion, reflecting an increase of 51.81%. The increase occurred due to the maturity of several short-term bank loan facilities.

Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Panjang

PUSRI membukukan pembayaran pinjaman bank jangka panjang senilai Rp775 miliar pada tahun buku 2025, menurun 81,18% dari tahun buku 2024 yang membukukan pembayaran pinjaman jangka panjang hingga sebesar Rp4,12 triliun. Penurunan tersebut dikarenakan berkurangnya jumlah pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo.

Pembayaran liabilitas sewa

Pembayaran liabilitas sewa merupakan pembayaran sewa atas biaya pembiayaan-pembiayaan yang menjadi fasilitas PUSRI. Pada tahun 2025 Perusahaan melakukan pembayaran sewa pembiayaan senilai Rp38,80miliar, sementara pada tahun 2024 PUSRI melakukan pembayaran sewa pembiayaan senilai Rp31,83 miliar, yang berarti ada kenaikan sebesar 21,87%.

Pembayaran Dividen

Pembayaran dividen adalah pembayaran dividen yang dilakukan PUSRI kepada pemegang saham sesuai keputusan RUPS. Pada tahun buku 2025, pembayaran dividen kas tercatat senilai Rp162,04 miliar, sementara pembayaran dividen kas kepada pemegang saham pada tahun buku 2024 adalah sebesar Rp343,14 miliar, menunjukkan penurunan sebesar 52,78%

Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Setara Kas Bersih Tahun Buku 2025

Dengan demikian, pada akhir tahun buku 2025, PUSRI mencatatkan penurunan bersih kas dan setara kas senilai Rp399,65 miliar, turun 46,36% dari posisi yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan penurunan sebesar Rp745,05 miliar.

Saldo kas dan Setara Kas Akhir tahun

Di akhir tahun buku 2025, PUSRI juga mencatatkan pertambahan perubahan nilai kurs terhadap kas dan setara kas sebesar Rp1,91 miliar, Sehingga setelah diperhitungkan dengan saldo kas dan setara kas awal tahun 2025 yang sebesar Rp703,73 miliar, PUSRI membukukan nilai saldo kas dan setara kas akhir pada akhir tahun buku 2025 senilai Rp305,98 miliar.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan membayar utang, antara lain dapat direpresentasikan melalui pendekatan *Debt to Equity Ratio* (DER). Pada tahun 2025, DER PUSRI berada pada posisi 66,97%, naik dari 36,91% di tahun sebelumnya atau masih di bawah 100%. Hal ini mengindikasikan kemampuan membayar utang bagi PUSRI masih terjaga dengan baik, karena kemampuan modal masih kuat untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Repayment of Long-Term Bank Loans

In 2025, PUSRI recorded repayments of long-term bank loans amounting to Rp775 billion, a decrease of 81.18% compared with Rp4.12 trillion in 2024. The decrease was mainly due to fewer long-term loan facilities reaching maturity during the year.

Lease Liability Payments

Lease liability payments represent payments related to financing leases used to support PUSRI's operational facilities. In 2025, the Company recorded lease payments amounting to Rp38,80 billion, compared with Rp31.83 billion in 2024, indicating an increased of 21.87%.

Dividend Payments

Dividend payments represent cash dividends distributed by PUSRI to shareholders in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS). In 2025, dividend payments amounted to Rp162.04 billion, compared with Rp343.14 billion in 2024, reflecting a decrease of 52.78%.

Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents for Fiscal Year 2025

At the end of fiscal year 2025, PUSRI recorded a net decrease in cash and cash equivalents of Rp399.65 billion, compared with a net decrease of Rp745.05 billion in the previous year, reflecting a 46.36% reduction.

Ending Balance of Cash and Cash Equivalents

At the end of 2025, PUSRI also recorded an exchange rate impact on cash and cash equivalents amounting to Rp1.91 billion. After taking into account the beginning balance of cash and cash equivalents of Rp703.73 billion, the Company recorded an ending balance of cash and cash equivalents of Rp305.98 billion as of the end of the 2025 financial year.

DEBT REPAYMENT CAPACITY

Debt repayment capacity can be reflected through the Debt to Equity Ratio (DER). In 2025, PUSRI's DER stood at 66.97%, increasing from 36.91% in the previous year but remaining below 100%. This indicates that PUSRI's ability to meet its debt obligations remains well maintained, as the Company's capital base remains strong relative to its liabilities.

Kolektabilitas Piutang

Tingkat kolektabilitas PUSRI berdasarkan rasio Receivable Turn Over untuk periode tahun 2025 adalah selama 6,46 hari berkurang dari 4,91 hari di tahun sebelumnya.

Receivables Collectability

PUSRI's receivables collectability, measured using the Receivable Turnover ratio, was 6.46 days in 2025, improving slightly from 4.91 days in the previous year.

Tabel & Rasio Kolektabilitas PUSRI

PUSRI Collectability Tables & Ratios

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
			Nominal	(%)
Lancar Current	196.513	168.131	28.382	16,88
1-90 hari days	825	29.665	(28.840)	(97,22)
91-120 hari days	350	27	323	1196,30
121-365 hari days	1.323	744	579	77,82
> 365 hari days	98.033	97.308	725	0,75
Cadangan Penurunan Nilai Allowance for Impairment	(96.944)	(97.808)	864	(0,88)
Jumlah Total	200.100	198.067	2.033	1,03
Rasio Kolektabilitas Collectability Ratio				
Debt to Equity Ratio	66.97%	36.93%	30,04	
Recivable turn over ratio	6.46	4.91	1,15	

Tingkat Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan suatu pengukuran terhadap kemampuan aset perusahaan untuk membiayai kewajiban atau utang jangka pendeknya. Rasio likuiditas terdiri dari rasio kas dan rasio lancar.

Liquidity Level

The liquidity ratio is a measurement of a company's ability to use its assets to meet short-term obligations or liabilities. Liquidity ratios generally consist of the cash ratio and the current ratio.

Tabel Likuiditas

Table of Liquidity

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			%	
Rasio Kas (%) Cash Ratio	8.70	25.16	(16,46)	
Rasio Lancar (%) Current Ratio	151.94	105.86	46,09	

Rasio Kas

PUSRI menunjukkan angka rasio kas tahun 2025 sebesar 8,70%, menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 25,16%. Rasio kas digunakan untuk mengukur kemampuan PUSRI dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aset lancar yang lebih likuid (*liquid assets*).

Cash Ratio

PUSRI recorded a cash ratio of 8.70%, in 2025, decreasing from 25.16% in 2024. The cash ratio measures the Company's ability to meet its immediate obligations using the most liquid current assets (*liquid assets*).

Rasio lancar

Rasio lancar pada tahun 2025 menunjukkan angka 151,94%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 105,86%. Rasio lancar yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dan berada diatas angka 100% menunjukkan naiknya kemampuan membayar utang jangka pendek PUSRI.

Current Ratio

The current ratio in 2025 stood at 151.94%, higher than the 105.86% recorded in 2024. The increase in the current ratio compared with the previous year, and its level above 100%, indicates an improvement in PUSRI's ability to meet its short-term liabilities.

Kemampuan Perusahaan Dalam Menghasilkan Keuntungan

Kemampuan PUSRI dalam menghasilkan laba dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yaitu melalui rasio marjin laba bruto atau Gross Profit Margin (GPM), marjin laba usaha atau Operating Profit Margin (OPM), marjin laba bersih atau Net Profit Margin (NPM), tingkat pengembalian aset atau Return On Asset (ROA), tingkat imbalan kepada pemegang saham atau Return On Equity (ROE), dan tingkat imbalan investasi atau Return On Investment (ROI).

Company's Ability to Generate Profit

PUSRI's ability to generate profit can be measured using profitability ratios, including the Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and Return on Investment (ROI). The following ratios illustrate PUSRI's profitability performance in 2025.

Berikut adalah rasio-rasio yang menunjukkan kemampuan PUSRI dalam menghasilkan keuntungan pada tahun 2025.

The following are ratios that show PUSRI's ability to generate profits in 2025.

Rasio Profitabilitas

Profitability Ratios

Dalam %
In %

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease) %
Margin Laba Bruto Gross Profit Margin	12.69	13.64	(0,95)
Margin Laba Usaha Operating Profit Margin	7.22	9.05	(1,83)
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	4.42	7.90	(3,47)
Tingkat Pengembalian Aset (ROA) Return on Assets (ROA)	1.91	4.18	(2,28)
Tingkat Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE) Return on Equity (ROE)	3.18	5.73	(2,55)
Tingkat Imbalan Investasi (ROI) Return on Investment (ROI)	8.86	10.82	(1,96)

STRUKTUR MODAL

Dasar dan Kebijakan Struktur Modal

Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara liabilitas dan ekuitas. Liabilitas ada yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek. sedangkan ekuitas terdiri dari saham disetor dan laba ditahan.

CAPITAL STRUCTURE

Basis and Policy of Capital Structure

Capital structure represents the proportion or comparison between liabilities and equity. Liabilities consist of both long-term and short-term obligations, while equity consists of paid-in capital and retained earnings.

PUSRI senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola permodalan. Untuk itu, Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah serta mengelola permodalan. Dalam mengelola

PUSRI consistently maintains business continuity while maximizing value for shareholders and other stakeholders in managing its capital. To achieve this objective, the Company actively and periodically reviews and manages its capital structure. In managing capital, the Company

modal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan efisiensi penggunaannya berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang. Kebijakan itu bertujuan untuk memastikan struktur modal yang kuat serta pengembalian optimal bagi Pemegang Saham.

considers efficiency of capital utilization based on operating cash flows and capital expenditures, while also taking into account future capital requirements. This policy aims to ensure a strong capital structure and optimal returns for shareholders.

Selain itu, PUSRI juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Pada tahun 2025, tidak ada perubahan pada pendekatan dalam kelompok usaha dalam mengelola permodalannya.

In addition, PUSRI strives to maintain a balance between borrowing levels and equity positions to ensure an optimal capital structure and return profile. In 2025, there were no changes in the Group's approach to capital management.

Rincian Struktur Modal

Komposisi struktur modal tahun 2025 yang dimiliki oleh PUSRI adalah 40,11% berasal dari liabilitas dan 59,89% berupa ekuitas atau permodalan sendiri. Komposisi struktur modal yang berasal dari liabilitas mencatatkan kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, posisi ekuitas PUSRI pada tahun 2025 sedikit melemah.

Details of Capital Structure

The composition of PUSRI's capital structure in 2025 consisted of 40.11% liabilities and 59.89% equity or internal capital. The proportion of capital derived from liabilities recorded a decline compared with the previous year. Consequently, PUSRI's equity position in 2025 became slightly weaker.

Tabel Struktur Modal PUSRI 2024 – 2025

Table: PUSRI Capital Structure 2024–2025

Rp Juta
Rp million

Uraian Description	2025		2024		Kenaikan/Penurunan Increase/(Decrease)	
	(Rp Juta) (Rp million)	(%)	(Rp Juta) (Rp million)	(%)	(Rp Juta) (Rp million)	(%)
Kewajiban Berbunga Interest-Bearing Liabilities						
Pinjaman Jangka Pendek Short-Term Loans	-	0,00	0	0,00	-	0,00
Pinjaman Jangka Panjang Long-Term Loans	8.134.677	25,26	3.168.146	12,41	4.966.531	156,76
Kewajiban Tidak Berbunga Non-Interest-Bearing Liabilities	4.779.604	14,84	3.718.487	14,56	1.061.117	28,54
Jumlah Kewajiban Total Liabilities	12.914.281	40,11	6.886.633	26,97	6.027.648	87,53
Jumlah Ekuitas Total Equity	19.284.108	59,89	18.648.687	73,03	635.421	3,41
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	32.198.389	100,00	25.535.320	100,00	6.663.069	26,09

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Berikut disampaikan ikatan yang material yang dilakukan Perusahaan untuk investasi barang modal yang bukan merupakan permodalan.

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL INVESTMENT

The following are the material commitments made by the Company for capital investment that do not constitute capitalization.

Perikatan Material untuk Pengadaan Gas Bumi #01

Material Commitment for Natural Gas Procurement #01

Pihak 1 Party 1	PUSRI
Pihak 2 Party 2	PT Pertamina EP ("PEP")
Investasi dan Tujuan Ikatan Investment and Purpose of the Commitment	PUSRI melakukan adendum perpanjangan perjanjian jual beli gas bumi dengan PEP pada tahun 2023. Berdasarkan perjanjian tersebut, PEP berkewajiban memasok gas bumi ke PUSRI mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 dengan harga sesuai dengan keputusan Menteri ESDM. PUSRI executed an addendum extending the natural gas sales and purchase agreement with PEP in 2023. Based on the agreement, PEP is obligated to supply natural gas to PUSRI from 2024 through 2028 at prices determined in accordance with the decision of the Minister of Energy and Mineral Resources.
Tanggal ikatan	21 Juni 2024 June 21, 2024
Sumber Dana Source of Funds	Modal sendiri (100% internal) Own capital (100% internal)
Mata Uang Currency	Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Proteksi Risiko Mata Uang Asing Foreign Exchange Risk Protection	Pencadangan dana dan monitoring isu-isu global. Fund reserves and monitoring of global issues.

Perikatan Material untuk Pengadaan Gas Bumi #02

Material Commitment for Natural Gas Procurement #02

Pihak 1 Party 1	PUSRI
Pihak 2 Party 2	PT Tropik Energi Pandan ("TEP")
Investasi dan Tujuan Ikatan Investment and Purpose of the Commitment	PUSRI melakukan penandatanganan perjanjian jual beli gas bumi dengan TEP pada tahun 2018. Berdasarkan perjanjian tersebut, TEP berkewajiban memasok gas bumi ke PUSRI mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2027 dengan harga sesuai dengan keputusan Menteri ESDM. PUSRI signed a natural gas sales and purchase agreement with TEP in 2018. Based on the agreement, TEP is obligated to supply natural gas to PUSRI from 2019 through 2027 at prices determined in accordance with the decision of the Minister of Energy and Mineral Resources.
Tanggal ikatan Commitment Date	4 Mei 2018 May 4, 2018
Sumber Dana Source of Funds	Modal sendiri (100% internal) Own capital (100% internal)
Mata Uang Currency	Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Proteksi Risiko Mata Uang Asing Foreign Exchange Risk Protection	Pencadangan dana dan monitoring isu-isu global. Fund reserves and monitoring of global issues.

Perikatan Material untuk Pengadaan Gas Bumi #03

Material Commitment for Natural Gas Procurement #03

Pihak 1 Party 1	PUSRI
Pihak 2 Party 2	Medco E&P Grissik Ltd. ("MEPGL")

Investasi dan Tujuan Ikatan Investment and Purpose of the Commitment	PUSRI melakukan addendum penandatanganan perjanjian jual beli gas bumi dengan MEPL pada tahun 2023. Berdasarkan perjanjian tersebut. MEPL berkewajiban memasok gas bumi ke PUSRI mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 dengan harga sesuai dengan keputusan Menteri ESDM. PUSRI executed an addendum to the natural gas sales and purchase agreement with MEPL in 2023. Based on the agreement. MEPL is obligated to supply natural gas to PUSRI from 2023 through 2028 at prices determined in accordance with the decision of the Minister of Energy and Mineral Resources.
Tanggal ikatan Commitment Date	20 Desember 2023 December 20, 2023
Sumber Dana Source of Funds	Modal sendiri (100% internal) Own capital (100% internal)
Mata Uang Currency	Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Proteksi Risiko Mata Uang Asing Foreign Exchange Risk Protection	Pencadangan dana dan monitoring isu-isu global. Fund reserves and monitoring of global issues.

Perikatan Material untuk Pengadaan Gas Bumi #04

Material Commitment for Natural Gas Procurement #04

Pihak 1 Party 1	PUSRI
Pihak 2 Party 2	Medco E&P Indonesia ("MEPI")
Investasi dan Tujuan Ikatan Investment and Purpose of the Commitment	PUSRI melakukan penandatanganan perjanjian jual beli gas bumi dengan MEPI pada tahun 2021. Berdasarkan perjanjian tersebut. MEPI berkewajiban memasok gas bumi ke PUSRI mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2033 dengan harga sesuai dengan keputusan Menteri ESDM. PUSRI signed a natural gas sales and purchase agreement with MEPI in 2021. Based on the agreement. MEPI is obligated to supply natural gas to PUSRI from 2021 through 2033 at prices determined in accordance with the decision of the Minister of Energy and Mineral Resources.
Tanggal ikatan	1 Desember 2021 December 1, 2021
Sumber Dana Source of Funds	Modal sendiri (100% internal) Own capital (100% internal)
Mata Uang Currency	Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Proteksi Risiko Mata Uang Asing Foreign Exchange Risk Protection	Pencadangan dana dan monitoring isu-isu global. Fund reserves and monitoring of global issues.

Perikatan Material untuk Pengadaan Gas Bumi #05

Material Commitment for Natural Gas Procurement #05

Pihak 1 Party 1	PUSRI
Pihak 2 Party 2	Medco E&P Indonesia ("MEPI") dan Medco E&P Lematang ("MEPL")

Investasi dan Tujuan Ikatan Investment and Purpose of the Commitment	PUSRI melakukan penandatanganan perjanjian jual beli gas bumi dengan MEPI dan MEPL pada tahun 2023. Berdasarkan perjanjian tersebut. MEPI dan MEPL berkewajiban memasok gas bumi ke PUSRI mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2033 dengan harga sesuai dengan keputusan Menteri ESDM. PUSRI signed a natural gas sales and purchase agreement with MEPI and MEPL in 2023. Based on the agreement. MEPI and MEPL are obligated to supply natural gas to PUSRI from 2023 through 2033 at prices determined in accordance with the decision of the Minister of Energy and Mineral Resources.
Tanggal ikatan Commitment Date	20 September 2023 September 20, 2023
Sumber Dana Source of Funds	Modal sendiri (100% internal) Own capital (100% internal)
Mata Uang Currency	Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Proteksi Risiko Mata Uang Asing Foreign Exchange Risk Protection	Pencadangan dana dan monitoring isu-isu global. Fund reserves and monitoring of global issues.

Perikatan Material untuk Pengadaan Gas Bumi #06

Material Commitment for Natural Gas Procurement #06

Pihak 1 Party 1	PUSRI
Pihak 2 Party 2	PHE Jambi Merang ("PHE JM")
Investasi dan Tujuan Ikatan Investment and Purpose of the Commitment	PUSRI melakukan addendum penandatanganan perjanjian jual beli gas bumi dengan PHE JM pada tahun 2025. Berdasarkan perjanjian tersebut. PHE JM berkewajiban memasok gas bumi ke PUSRI mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2035 dengan harga sesuai dengan keputusan Menteri ESDM PUSRI signed a natural gas sales and purchase agreement with PHE JM in 2024. Based on the agreement. PHE JM is obligated to supply natural gas to PUSRI from 2024 through 2035 at prices determined in accordance with the decision of the Minister of Energy and Mineral Resources.
Tanggal ikatan Commitment Date	8 Desember 2025 December 8, 2025
Sumber Dana Source of Funds	Modal sendiri (100% internal) Own capital (100% internal)
Mata Uang Currency	Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Proteksi Risiko Mata Uang Asing Foreign Exchange Risk Protection	Pencadangan dana dan monitoring isu-isu global. Fund reserves and monitoring of global issues.

Realisasi Investasi Barang Modal

Pada tahun 2025, PUSRI melakukan pembelanjaan barang modal untuk investasi rutin sebesar Rp307,18 miliar dan investasi pengembangan sebesar Rp4,47 triliun, termasuk diantaranya digunakan untuk bangunan dan prasarana, peralatan pabrik, hingga suku cadang penyangga. Realisasi total investasi sejumlah total Rp4,77 triliun tersebut lebih tinggi 36,79% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,49 triliun.

Capital Expenditure Realization

In 2025, PUSRI incurred capital expenditures for routine investment amounting to Rp307,18 billion and development investment amounting to Rp4,47 billion, including expenditures for buildings and infrastructure, plant equipment, and supporting spare parts. The total realized investment of Rp4,77 trillion was 36.79% higher than the previous year's realization of Rp3.49 trillion.

Tabel Realisasi Investasi Barang Modal

Capital Expenditure Realization Table

Jenis Investasi Type of Investment	Nilai Investasi (dalam Rp Juta)		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
	2025	2024	Nominal	%
Investasi Rutin Routine Investment	307.176	155.691	151.485	97,30
Investasi Pengembangan Development Investment	4.467.361	3.334.660	1.132.701	33,97
Total	4.774.537	3.490.351	1.284.186	36,79

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL NERACA

1. Peraturan yang diterbitkan setelah periode pelaporan

Sehubungan dengan diterbitkannya Perpres No. 113 Tahun 2025 tanggal 24 Oktober 2025, yang mengubah Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, peraturan turunan yang diterbitkan pada periode setelah pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. Permentan No. 3 Tahun 2026 diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2026, mengubah Permentan No. 15 Tahun 2025 mengenai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi;
- b. Permentan No. 6 Tahun 2026 yang diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2026 mengenai Prosedur Perhitungan Nilai Komersial dan Komponen Bahan Baku Pupuk Bersubsidi, menggantikan Permentan No. 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi; dan
- c. PMK No. 19 Tahun 2026 yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2026, mengenai Perubahan Kedua atas PMK Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

Peraturan-peraturan ini menjadi dasar bagi mekanisme pengelolaan subsidi pupuk yang berbasis mark-to-market.

2. Penerimaan uang muka dari Pemerintah Indonesia berkaitan dengan implementasi mark-to-market

Berdasarkan Berita Acara Pembayaran No. BA/46/SR.340/B.4/03/2026 dan surat No. 01440/A/KU/B0103/SP/2026 tanggal 31 Maret 2026 terkait pembayaran atas pengadaan bahan baku subsidi pupuk Urea dan NPK. Perusahaan telah menerima uang muka dari Pemerintah Indonesia sehubungan dengan penerapan mekanisme mark-to-market.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS OCCURRING AFTER THE REPORTING DATE

1. Regulations Issued After the Reporting Period

Following the issuance of Presidential Regulation No. 113 of 2025 dated October 24, 2025, which amended Presidential Regulation No. 6 of 2025 concerning the Governance of Subsidized Fertilizers, the implementing regulations issued after the reporting period were as follows:

- a. Minister of Agriculture Regulation No. 3 of 2026, issued on February 20, 2026, amending Minister of Agriculture Regulation No. 15 of 2025 concerning the Implementing Regulation of Presidential Regulation No. 6 of 2025 on the Governance of Subsidized Fertilizers;
- b. Minister of Agriculture Regulation No. 6 of 2026, issued on March 3, 2026, concerning the Procedures for Calculating the Commercial Value and Raw Material Components of Subsidized Fertilizers, replacing Minister of Agriculture Regulation No. 28 of 2020 concerning the Components of the Cost of Goods Sold of Subsidized Fertilizers; and
- c. Minister of Finance Regulation No. 19 of 2026, issued on March 27, 2026, concerning the Second Amendment to Minister of Finance Regulation No. 68/PMK.02/2016 regarding the Procedures for the Provision, Distribution, and Accountability of Fertilizer Subsidy Funds.

These regulations serve as the basis for the implementation of a mark-to-market-based fertilizer subsidy management mechanism.

2. Receipt of Advance Payments from the Government of Indonesia Related to the Implementation of the Mark-to-Market Mechanism

Based on Payment Minutes No. BA/46/SR.340/B.4/03/2026 and Letter No. 01440/A/KU/B0103/SP/2026 dated March 31, 2026, regarding payments for the procurement of raw materials for subsidized Urea and NPK fertilizers, the Company received advance payments from the Government of Indonesia in connection with the implementation of the

masing-masing sebesar Rp3.354.896 untuk Urea dan Rp871.226 untuk NPK (tidak termasuk PPN dan PPh 22).

mark-to-market mechanism amounting to Rp3,354,896 for Urea and Rp871,226 for NPK, respectively (excluding VAT and Article 22 Income Tax).

Dampak Terhadap Kinerja dan Risiko Usaha di Masa Mendatang

Dengan adanya pembayaran atas pinjaman tersebut tidak memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan usaha dan kondisi keuangan PUSRI ke depannya.

Impact on Future Business Performance and Risks

The repayment of the loan does not have an adverse impact on the sustainability of PUSRI's business operations and financial condition going forward.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND INFREQUENT EVENTS

Undang-undang Cipta Kerja

Undang-undang Cipta Kerja ("RUU Cipta Kerja") atau yang biasa dikenal dengan "Undang-undang Omnibus", telah disahkan Presiden pada 2 November 2020. Undang-undang ini berfokus pada peningkatan kemudahan proses usaha di Indonesia diantaranya menyederhanakan proses perizinan, menyederhanakan proses pengadaan tanah, memformalkan zona ekonomi, memberikan lebih banyak insentif untuk zona perdagangan bebas dan mengubah undang-undang ketenagakerjaan.

Job Creation Law

The Job Creation Law ("Job Creation Bill"), commonly referred to as the "Omnibus Law," was enacted by the President on November 2, 2020. This law focuses on improving the ease of doing business in Indonesia, including simplifying the licensing process, streamlining land acquisition procedures, formalizing economic zones, providing more incentives for free trade zones, and amending labor regulations.

PUSRI telah mengikuti pembaruan yang ada pada Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Perpajakan sesuai PMK No.18/ PMK.03/2021 sesuai dengan kondisi transaksi internal terutama dalam menentukan perhitungan kewajiban imbalan kerja karyawan.

PUSRI has complied with the updates under Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation in the Taxation Cluster in accordance with Minister of Finance Regulation No. 18/ PMK.03/2021, in line with internal transaction conditions, particularly in determining the calculation of employee benefit obligations.

Komponen Substansial Atas Pendapatan Dan Beban Lain-lain

Pendapatan dan beban lain-lain terdiri atas pendapatan denda dan klaim, rugi/laba penjualan aset tetap, selisih kurs, pendapatan keuangan, biaya keuangan, dan bagian atas rugi bersih entitas asosiasi. Komponen substansial atas pendapatan lain-lain yaitu pendapatan keuangan dan keuntungan atas pelepasan aset tetap.

Substantial Components of Other Income and Expenses

Other income and expenses consist of penalty and claim income, gain/loss on the sale of fixed assets, foreign exchange differences, financial income, financial expenses, and the share of net loss of associates. The substantial components of other income include financial income and gains from the disposal of fixed assets.

Pendapatan keuangan tercatat sebesar Rp13,33 miliar, menurun 78,21% atau berkurang Rp47,87 miliar dari periode sebelumnya yang sebesar Rp61,20 miliar, Sementara itu, biaya keuangan juga mencatatkan penurunan 52,13% atau berkurang Rp140,66 miliar dari sebesar Rp269,82 miliar menjadi senilai Rp129,16 miliar seiring dengan penurunan saldo pinjaman.

Financial income was recorded at Rp13.33 billion, decreasing by 78.21% or Rp47.87 billion from the previous period of Rp61.20 billion. Meanwhile, financial expenses also declined by 52.13% or reduced by Rp140.66 billion, from Rp269.82 billion to Rp129.16 billion in line with the decrease in loan balances.

Perubahan Kebijakan Penetapan Harga Pupuk Subsidi

Pada tahun 2025 terdapat perubahan peraturan harga jual pupuk subsidi, yakni dikeluarkannya Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Oktober 2025.

Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut harga jual pupuk bersubsidi PUSRI disesuaikan, mengacu pada harga sebagai berikut.

Jeni	Harga Eceran Tertinggi
Pupuk Urea	Rp1.800 per KG
Pupuk NPK	Rp1.840 per KG
Pupuk NPK untuk Kakao	Rp2.640 per KG
Pupuk ZA	Rp1.360 per KG
Pupuk Organik	Rp640 per KG

Perubahan Kebijakan Penggantian Nilai Subsidi Pupuk Bersubsidi

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah mengeluarkan kebijakan baru perihal perhitungan penggantian nilai subsidi pupuk bersubsidi, yakni Keputusan Menteri Pertanian No. 6 Tahun 2026 yang diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2026 mengenai Prosedur Perhitungan Nilai Komersial dan Komponen Bahan Baku Pupuk Bersubsidi, menggantikan Permentan No. 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi.

Perhitungan penggantian biaya subsidi yang sebelumnya menggunakan rumusan harga pokok produksi + selisih margin, digantikan dengan marked to market.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI SERTA PROYEKSI 1 (SATU) TAHUN MENDATANG

Tabel Target VS Realisasi

Target vs Realization Table

Uraian Description	Realisasi 2025 Realization 2025	Target 2025 Target 2025	Pencapaian (%) Achievement (%)
Tonase Produksi Pupuk Fertilizer Production Tonnage	2.154.268	2.350.000	91,67

Changes in the Policy for Determining Subsidized Fertilizer Prices

In 2025, there was a change in the regulations governing the selling prices of subsidized fertilizers through the issuance of the Decree of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia No. 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 concerning Amendments to the Decree of the Minister of Agriculture No. 800/Kpts./SR.310/M/09/2025 on the Types, Maximum Retail Prices, and Allocation of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector for Fiscal Year 2025, dated October 22, 2025.

Following the issuance of the decree, PUSRI adjusted its subsidized fertilizer selling prices in accordance with the prices stipulated therein, as presented below.

Changes to the Policy on the Calculation of Subsidised Fertiliser Subsidies

The Government, through the Ministry of Agriculture, has issued a new policy regarding the calculation of the subsidy value for subsidised fertiliser, namely Minister of Agriculture Decree No. 6 of 2026, issued on 3 March 2026, concerning Procedures for Calculating the Commercial Value and Raw Material Components of Subsidised Fertiliser, replacing Minister of Agriculture Decree No. 28 of 2020 on the Cost of Goods Sold Components for Subsidised Fertiliser.

The calculation of subsidy reimbursement, which previously used the formula of production cost plus margin difference, has been replaced by marked-to-market.

COMPARISON BETWEEN TARGETS AND REALIZATION AS WELL AS PROJECTIONS FOR THE NEXT 1 (ONE) YEAR

Tabel Target VS Realisasi

Target vs Realization Table

Uraian Description	Realisasi 2025 Realization 2025	Target 2025 Target 2025	Pencapaian (%) Achievement (%)
Tonase Produksi Non Pupuk Non-Fertilizer Production Tonnage	1.211.032	1.310.000	92,45
Tonase Penjualan Pupuk Fertilizer Sales Tonnage	2.150.978	2.250.240	95,59
Tonase Penjualan Non Pupuk Non-Fertilizer Sales Tonnage	105.277	92.600	113,69
Nilai Penjualan Pupuk Fertilizer Sales Value	13.033.450	13.797.155	94,46
Nilai Penjualan Non Pupuk Non-Fertilizer Sales Value	840.872	887.642	94,73
Pendapatan Revenue	13.874.322	14.684.797	94,48
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	613.527	610.444	100,51
Aset Assets	32.198.389	31.638.816	101,77
Liabilitas Liabilities	12.914.281	12.424.613	103,94
Ekuitas Equity	19.284.108	19.214.203	100,36

Operasi dan Produksi

Realisasi operasi dan produksi PUSRI pada tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2025 terdapat kendala keterbatasan keandalan fasilitas produksi yang telah menua, sehingga tidak dapat beroperasi dengan kapasitas penuh. Untuk mengatasi kekurangan suku cadang, Perusahaan terpaksa menghentikan satu unit pabrik tertua dan menggunakan beberapa komponen dalam pabrik tersebut sebagai suku cadang pengganti bagi unit pabrik yang masih bisa beroperasi. Oleh karena itulah maka dari target sebesar 2.350.000 ton, realisasi produksi Perusahaan adalah sebesar 2.154.268 ton atau terealisasi 91,67%.

Pemasaran

Pada tahun 2025, PUSRI menyalurkan pupuk sebanyak 2.150.978 ton atau 95,59% dari target RKAP 2025 yang sejumlah 2.250.240 ton. Adapun penyebab tidak tercapainya penjualan produk pupuk, terutama tidak tercapainya penjualan PSO akibat perubahan area pemasaran, sehingga Perusahaan harus melakukan perubahan pola distribusi. Perubahan pola distribusi ini membutuhkan waktu penyesuaian.

Operations and Production

PUSRI's operational and production performance in 2025 did not fully achieve the established targets. During the year, the Company faced constraints related to the limited reliability of its aging production facilities, preventing them from operating at full capacity. To address spare part shortages, the Company was compelled to shut down its oldest plant unit and utilize certain components from that facility as replacement spare parts for other plant units that remained operational. As a result, against the production target of 2,350,000 tons, the Company recorded actual production of 2,154,268 tons, representing an achievement rate of 91.67%.

Marketing

In 2025, PUSRI distributed 2,150,978 tons of fertilizer, representing 95.59% of the 2025 RKAP target of 2,250,240 tons. The shortfall in fertilizer sales was primarily attributable to the underachievement of PSO sales resulting from changes in marketing areas, which required the Company to adjust its distribution pattern. The implementation of this new distribution pattern required a period of adaptation.

Selain itu terdapat kendala lain, seperti adanya keterlambatan terbitnya SK Alokasi pupuk oleh pemerintah daerah dan wacana implementasi kebijakan terkait penyaluran pupuk subsidi langsung ke Gapoktan yang menyebabkan menurunnya minat Distributor dan Kios dalam melakukan pennebusan.

In addition, other challenges included delays in the issuance of Fertilizer Allocation Decrees by regional governments and discussions regarding the implementation of a policy for the direct distribution of subsidized fertilizers to farmer groups (Gapoktan), which reduced the willingness of distributors and kiosks to redeem subsidized fertilizers.

Sementara itu, jumlah tonase penjualan produk non pupuk pada tahun 2025 terealisasi sebesar 105.277 ton, melebihi target RKAP 2025 yaitu 92.500 ton atau tercapai 113,69%.

Meanwhile, sales volume of non-fertilizer products in 2025 reached 105,277 tons, exceeding the 2025 RKAP target of 92,500 tons and achieving 113.69% of the target.

Pendapatan dan Laba (Rugi) Konsolidasi

PUSRI mencatatkan nilai penjualan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp13,87 triliun tercapai sebesar 94,48% dari RKAP 2025 yang sebesar Rp14,68 triliun. Sedangkan realisasi laba tahun berjalan 2025 sebesar Rp613,53 miliar atau 100,51% dari target sebesar Rp610,44 miliar.

Consolidated Revenue and Profit (Loss)

PUSRI recorded sales revenue of Rp13.87 trillion in 2025, achieving 94.48% of the 2025 RKAP target of Rp14.68 trillion. Meanwhile, profit for the year amounted to Rp613.53 billion, representing 100.51% of the target of Rp610.44 billion.

Realisasi pendapatan tidak tercapai karena penurunan harga jual dan volume penjualan tidak tercapai. Adapun target laba tercapai, sebagai hasil penerapan program efisiensi yang dijalankan dengan disiplin tinggi.

Revenue realization fell short of the target due to lower selling prices and sales volumes that did not meet expectations. Nevertheless, the profit target was achieved as a result of the disciplined implementation of efficiency programs.

Posisi Keuangan Konsolidasi

Aset PUSRI tahun 2025 sebesar Rp32,20 triliun lebih besar dari target yang telah ditetapkan yakni Rp31,64 triliun, yang berarti tercapai sebesar 101,77%. Kemudian, liabilitas PUSRI pada akhir tahun buku 2025 adalah sebesar Rp12,91 triliun atau 103,94 % dari target yang telah ditetapkan yakni senilai Rp12,42 triliun. Adapun ekuitas pada tahun 2025 juga tercapai sedikit diatas target yang ditetapkan yakni sebesar 100,36 % dari target atau senilai Rp19,28 triliun dari target sebesar Rp19,21 triliun.

Consolidated Financial Position

PUSRI's assets in 2025 amounted to Rp32.02 trillion, higher than the predetermined target of Rp31.64 trillion, representing an achievement of 101.77%. Meanwhile, PUSRI's liabilities at the end of the 2025 financial year amounted to Rp12.91 trillion or 103.94% of the predetermined target of Rp12.42 trillion. Equity in 2025 also slightly exceeded the target, reaching 100.36% of the target, amounting to Rp19.28 trillion compared to the target of Rp19.21 trillion.

PROYEKSI TAHUN BUKU 2026

Proyeksi yang ditetapkan oleh PUSRI telah memperhitungkan kondisi yang akan datang serta realisasi pada masa sebelumnya. Rinciannya disampaikan dalam tabel di bawah ini.

PROJECTION FOR THE 2026 FINANCIAL YEAR

The projections established by PUSRI have taken into account future conditions as well as realizations in previous periods. The details are presented in the table below.

Tabel Proyeksi Kinerja PUSRI 2026

PUSRI Performance Projection Table 2026

Uraian Description	Realisasi 2025 Realization 2025	Target 2026 Target 2026	Perubahan (%) Change (%)
Tonase Produksi Pupuk (ton) Fertilizer Production Tonnage (tons)	2.154.268	2.213.000	102,73
Tonase Produksi Non Pupuk (ton) Non-Fertilizer Production Tonnage (tons)	1.211.032	1.312.000	108,34
Tonase Penjualan Pupuk (ton) Fertilizer Sales Tonnage (tons)	2.150.978	2.233.465	103,83
Tonase Penjualan Non Pupuk (ton) Non-Fertilizer Sales Tonnage (tons)	105.277	196.200	186,37
Nilai Penjualan Pupuk (Rp juta) Fertilizer Sales Value (Rp million)	13.033.450	15.479.853	118,77
Nilai penjualan non pupuk dan lainnya (Rp juta) Non-Fertilizer and Other Sales Value (Rp million)	840.872	1.351.221	160,69
Pendapatan (Rp juta) Revenue (Rp million)	13.874.322	16.831.074	121,31
Laba Tahun Berjalan (Rp juta) Profit for the Year (Rp million)	613.527	1.497.142	244,02
Aset (Rp juta) Assets (Rp million)	32.198.389	34.223.551	106,29
Liabilitas (Rp juta) Liabilities (Rp million)	12.914.281	13.477.085	104,36
Ekuitas (Rp juta) Equity (Rp million)	19.284.108	20.746.466	107,58

KEBIJAKAN DIVIDEN

DIVIDEND POLICY



PUSRI akan membagikan dividen kepada pemegang saham apabila mencatatkan laba bersih pada tahun berjalan dan saldo laba tercatat positif. Adapun besaran dividen yang akan dibagikan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

Sesuai dengan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2025 dengan agenda pertanggungjawaban manajemen atas kinerja PUSRI untuk tahun 2024, Pemegang Saham menyetujui dan menetapkan penggunaan laba tahun berjalan konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk PUSRI untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp1.068,45 miliar digunakan untuk Dividen sebesar Rp162,04 miliar, sedangkan sebesar Rp906,41 miliar sisanya ditetapkan sebagai cadangan.

Adapun riwayat pembagian dividen PUSRI dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

PUSRI will distribute dividends to shareholders if it records a net profit for the year and has a positive retained earnings balance. The amount of dividends to be distributed is determined by the General Meeting of Shareholders.

DIVIDENDS DISTRIBUTED

In accordance with the Annual GMS held on June 24, 2025, which included the agenda of management accountability for PUSRI's 2024 performance, the Shareholders approved and resolved the appropriation of the consolidated profit for the year attributable to owners of the parent entity of PUSRI for the financial year ended December 31, 2024, amounting to Rp1.06845 trillion. Of this amount, Rp162.04 billion was distributed as dividends, while the remaining Rp906.41 billion was appropriated as reserves.

The history of PUSRI's dividend distribution over the past five years is presented in the following table.

Tabel Riwayat Pembagian Dividen PUSRI

PUSRI Dividend Distribution History Table

Tahun Dividen Dividend Year	Tahun Dibagikan Dividen Year Dividend Distributed	Tanggal Pengumuman Announcement Date	Tanggal Pembayaran Payment Date	Jumlah Dividen (Rp Miliar) Total Dividend (Rp Billion)	Dividen per Saham (Rp) Dividend per Share (Rp)	Payout Ratio (%)
2024	2025	24 Juni 2025 June 24, 2025	Tahap I (Pupuk Indonesia & YKKP): 18 Juli 2025 Tahap II (Pupuk Indonesia): 15 Agustus 2025 Tahap III (Pupuk Indonesia): 18 September 2025 Tahap IV (Pemegang Saham Seri A-Dwiwarna): 03 Desember 2025 Stage I (Pupuk Indonesia & YKKP): July 18, 2025 Stage II (Pupuk Indonesia): August 15, 2025 Stage III (Pupuk Indonesia): September 18, 2025 Stage IV (Pemegang Saham Seri A-Dwiwarna): December 3, 2025	162.04	27.938	26,41
2023	2024	22 Juli 2024 July 22, 2024	Tahap I: 16 Agustus 2024 Tahap II: 13 September 2024 Tahap III: 16 Oktober 2024 Stage I: August 16, 2024 Stage II: September 13, 2024 Stage III: October 16, 2024	343.14	59.162	28,62
2022	2023	8 Juni 2023 June 8, 2023	Tahap I: 3 Juli 2023 Tahap II: 2 Agustus 2023 Tahap III: 1 September 2023 Stage I: July 3, 2023 Stage II: August 2, 2023 Stage III: September 1, 2023	375.00	64.655	31,28
2021	2022	30 Juni 2022 June 30, 2022	25 Juli 2022 July 25, 2022	136.9	23.603	15
2020	2021	30 Juni 2021 June 30, 2021	-	-	-	-
2019	2020	6 Agustus 2020 August 6, 2020	Tahap I: 1 September 2020 dan 27 Oktober 2020 Tahap II: 1 Oktober 2020 Tahap III: 27 Oktober 2020 Stage I: September 1, 2020 and October 27, 2020 Stage II: October 1, 2020 Stage III: October 27, 2020	151.42	26.106	30

Tabel Riwayat Pembagian Dividen PUSRI
PUSRI Dividend Distribution History Table

Tahun Dividen Dividend Year	Tahun Dibagikan Dividen Year Dividend Distributed	Tanggal Pengumuman Announcement Date	Tanggal Pembayaran Payment Date	Jumlah Dividen (Rp Miliar) Total Dividend (Rp Billion)	Dividen per Saham (Rp) Dividend per Share (Rp)	Payout Ratio (%)
2018	2019	21 Mei 2019 May 21, 2019	Tahap I: 13 Juni 2019 dan 8 Agustus 2019 Tahap II: 12 Juli 2019 Tahap III: 14 Agustus 2019 Stage I: June 13, 2019 and August 8, 2019 Stage II: July 12, 2019 Stage III: August 14, 2019	166	28.616	39

KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA

PUSRI berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah kepatuhan terhadap peraturan terkait perpajakan. Untuk tahun 2025, PUSRI berkontribusi terhadap negara melalui pemenuhan kewajiban pajak dan dividen sebesar Rp2,20 triliun.

CONTRIBUTION TO THE STATE

PUSRI is fully committed to complying with all applicable laws and regulations. One of these is compliance with tax-related regulations. For 2025, PUSRI contributed to the state through the fulfillment of tax obligations and dividends amounting to Rp2.20 trillion

Tabel Kontribusi Pembayaran Pajak dan Dividen
Table of Tax and Dividend Payment Contributions

Keterangan Description	Tahun 2025 Year 2025	Tahun 2024 Year 2024	Rp Juta Rp million
	1	2	% 3=1:2
A. PAJAK TAX			
1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Land and Building Tax (PBB)	28.550	27.678	103
2. Pajak dan Retribusi Daerah Regional Taxes and Levies	7.254	5.639	129
a. Retribusi Air Water Levy	-	-	
b. Pajak Kendaraan di atas air Water Vehicle Tax	-	-	
c. Pajak Kendaraan Bermotor Motor Vehicle Tax	328	245	134
d. Penerangan listrik jalan Street Lighting Tax	3.729	3.729	100
e. Retribusi kebersihan Waste Collection Levy	-	-	
f. Pajak Pembangunan I (Hotel & Rumah Makan) Development Tax I (Hotel & Restaurant)	32	16	204
g. Pajak Sumur Bor & Air Permukaan Borewell & Surface Water Tax	3.018	1.568	193
h. Pajak alat berat Heavy Equipment Tax	4	-	
i. Retribusi Parkir dan Tol Parking and Toll Levy	142	82	174
3. Wajib Pungut Withholding Agent	312.751	360.797	87
a. PPh Pasal 21 (Karyawan) Article 21 Income Tax (Employees)	171.660	204.246	84

Tabel Kontribusi Pembayaran Pajak dan Dividen
Table of Tax and Dividend Payment Contributions

Rp Juta
Rp million

Keterangan Description	Tahun 2025 Year 2025	Tahun 2024 Year 2024	%
	1	2	3=1:2
b. PPh Pasal 22 (WPDN) Article 22 Income Tax (Domestic Taxpayers)	17.445	24.393	72
c. PPh Pasal 23 (WPDN) Article 23 Income Tax (Domestic Taxpayers)	37.647	52.649	72
d. PPh Pasal 26 (WPLN) Article 26 Income Tax (Foreign Taxpayers)	37	103	35
e. PPh Pasal 4 (2) dan Pasal 15 Article 4 (2) and Article 15 Income Tax	85.963	79.406	108
4. Wajib Bayar Payable Taxes	199.252	251.370	79
a. PPh Pasal 22 Article 22 Income Tax	42.887	23.686	181
b. PPh Pasal 22 dipungut oleh WAPU Article 22 Income Tax Collected by WAPU	2.793	5.806	48
c. PPh Pasal 22 dipungut oleh Bendaharawan Subsidi Article 22 Income Tax Collected by Subsidy Treasurer	57.949	114.287	51
d. PPh Pasal 23 Article 23 Income Tax	1.276	680	188
e. PPh Pasal 25 Article 25 Income Tax	88.276	86.147	102
f. PPh Pasal 26 (Fiskal) Article 26 Income Tax (Fiscal)	-	-	-
g. PPh Pasal 29 Article 29 Income Tax	-	-	-
h. Pendapatan Bunga Deposito Deposit Interest Income	560	12.068	5
i. Pendapatan Bunga Jasa Giro Current Account Interest Income	2.773	4.655	60
j. Pendapatan Sewa Tanah/Bangunan Land/Building Rental Income	2.737	4.040	68
k. Pengalihan Hak Tanah/Bangunan Transfer of Land/Building Rights	-	-	-
l. PPh Final Revaluasi Aset Final Income Tax on Asset Revaluation	-	-	-
5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) – Netto Value Added Tax (VAT) - Net	(180.622)	59.987	(301)
6. Bea Masuk Import Duty	-	680	-
7. PPN WAPU VAT WAPU	1.140.481	1.443.890	79
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Duty on the Acquisition of Land and Building Rights	4.597	-	-
9. Pajak Lainnya Other Taxes	524.141	1.376	38.092
a. PPN Masukan tidak dpt dikreditkan Non-creditable Input VAT	513.047	1.358	37.780
b. Surat Tagihan/Ketetapan Pajak Tax Collection/Assessment Letters	11.094	18	61.633
TOTAL PAJAK TOTAL TAX	2.036.404	2.151.418	95

Tabel Kontribusi Pembayaran Pajak dan Dividen
Table of Tax and Dividend Payment Contributions

Rp Juta
Rp million

Keterangan Description	Tahun 2025 Year 2025	Tahun 2024 Year 2024	%
	1	2	3=1:2
B. DIVIDEN DIVIDENDS			
Dividen yang dibayarkan Dividends Paid	162.040	343.139	47
C. PAJAK DAN DIVIDEN TAX AND DIVIDENDS	2.198.445	2.494.557	88

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Hingga berakhirnya tahun buku 2025, PUSRI tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP). PUSRI merupakan entitas anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pupuk Indonesia (Persero), dengan kepemilikan saham seri B sejumlah 99,99974% oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) serta Yayasan Kesejahteraan Karyawan PUSRI sebesar 0,00024% dan saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia sejumlah 0,00002%. PUSRI juga tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat sehingga tidak terdapat kepemilikan publik pada saham PUSRI.

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

As of the end of the 2025 financial year, PUSRI does not have an employee and/or management stock ownership program (ESOP/MSOP). PUSRI is a subsidiary of the State-Owned Enterprise (BUMN) PT Pupuk Indonesia (Persero), with ownership of Series B shares amounting to 99.99974% held by PT Pupuk Indonesia (Persero), while the PUSRI Employee Welfare Foundation holds 0.00024%, and the State of the Republic of Indonesia holds Series A Dwiwarna shares amounting to 0.00002%. PUSRI also does not trade its shares to the public; therefore, there is no public ownership of PUSRI shares.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Sampai dengan 31 Desember 2025, PUSRI tidak melakukan Initial Public Offering (IPO) maupun penawaran efek dalam bentuk apapun. Dengan demikian, informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tidak dapat disampaikan.

REALIZATION OF THE USE OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS

As of December 31, 2025, PUSRI has not conducted an Initial Public Offering (IPO) nor issued securities in any form. Therefore, information regarding the realization of the use of proceeds from public offerings cannot be presented.

INFORMASI MATERIAL TERKAIT DENGAN INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL, TRANSAKSI MATERIAL, TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN TAHUN 2025

MATERIAL INFORMATION RELATED TO INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING, MATERIAL TRANSACTIONS, AFFILIATED TRANSACTIONS, AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS IN 2025

Investasi

PUSRI merealisasikan investasi rutin dan investasi pengembangan selama tahun 2025 dengan dukungan dana total sebesar Rp4,77 triliun terdiri atas investasi rutin sebesar Rp307,18 miliar dan investasi pengembangan sebesar Rp4,47 triliun.

Investment

PUSRI realized business development investments during 2025 with total funding support of Rp4.77 trillion consisting of routine investment amounting to Rp307.18 billion, and development investment amounting to Rp4.47 trillion.

Investasi pengembangan dimaksud terutama direalisasikan dalam bentuk pembangunan unit pabrik baru PUSRI IIIB, yang hingga akhir tahun 2025 sudah memasuki tahap konstruksi dan pemasangan mesin-mesin produksi.

The development investment was primarily realized in the form of the construction of a new PUSRI plant unit, which by the end of 2025 had entered the stage of construction and installation of production machinery.

Ekspansi

PUSRI tidak melakukan ekspansi selama tahun 2025, sehingga informasi mengenai hal ini tidak dapat diungkapkan.

Divestasi

PUSRI tidak melakukan divestasi entitas usaha selama tahun 2025, karena itu rincian informasi tidak dapat disampaikan.

Penggabungan atau Peleburan Usaha

PUSRI tidak melakukan penggabungan maupun peleburan unit usaha selama tahun 2025, sehingga informasi mengenai hal ini tidak dapat diungkapkan.

Akuisisi

PUSRI tidak melakukan akuisisi selama tahun 2025, sehingga informasi mengenai hal ini tidak dapat diungkapkan.

Restrukturisasi

PUSRI tidak melakukan restrukturisasi kewajiban selama tahun 2025. Dengan demikian informasi mengenai hal ini tidak dapat disampaikan.

Expansion

PUSRI did not carry out expansion during 2025; therefore, information regarding this matter cannot be disclosed.

Divestment

PUSRI did not divest any business entities during 2025; therefore, detailed information cannot be presented.

Merger or Consolidation

PUSRI did not carry out any merger or consolidation of business units during 2025; therefore, information regarding this matter cannot be disclosed.

Acquisition

PUSRI did not carry out any acquisitions during 2025; therefore, information regarding this matter cannot be disclosed.

Restructuring

PUSRI did not carry out any restructuring of obligations during 2025. Therefore, information regarding this matter cannot be presented.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI DAN/ATAU BERELASI

Transaksi Benturan Kepentingan

Selama tahun 2025 tidak terdapat adanya transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan, sehingga informasi mengenai hal ini tidak dapat diungkapkan.

TRANSAKSI AFILIASI

Selama tahun 2025 tidak terdapat adanya transaksi afiliasi yang dijalankan oleh PUSRI, sehingga informasi mengenai hal ini tidak dapat diungkapkan.

TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Alasan Transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan normal usaha transaksi-transaksi tersebut terutama berhubungan dengan pemberian beberapa pekerjaan konstruksi, penjualan dan pembelian, sewa-menyewa lahan dan pinjam meminjam dana operasional.

MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED AND/OR RELATED PARTIES

Conflict of Interest Transactions

During 2025, there were no transactions containing elements of conflict of interest; therefore, information regarding this matter cannot be disclosed.

AFFILIATED TRANSACTIONS

During 2025, there were no affiliated transactions carried out by PUSRI; therefore, information regarding this matter cannot be disclosed.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

Reasons for Related Party Transactions

In the normal course of business activities, these transactions mainly relate to the provision of several construction works, sales and purchases, land leasing, and lending and borrowing of operational funds.

Kewajaran dan Mekanisme Reviu atas Transaksi

Kewajaran transaksi dan pemenuhan peraturan atas transaksi pihak berelasi telah melalui proses reviu dan audit oleh pihak auditor internal dan eksternal. PUSRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah sesuai dengan PSAK No. 7 mengenai Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Direksi memandang bahwa transaksi dengan pihak berelasi/ terafiliasi telah memenuhi prosedur memadai serta sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dalam laporan keuangan Perusahaan tahun 2025.

Rujukan Di Laporan Keuangan

Pengungkapan terkait dengan transaksi berelasi ini diuraikan pada Laporan Keuangan yang telah diaudit pada Catatan 28 "Transaksi Dan Saldo Dengan Pihak Berelasi" sebagai bagian Lampiran Laporan Tahunan ini.

Telaah Dewan Komisaris dan Komite Audit serta persetujuan Pemegang Saham atas kewajaran transaksi Transaksi berelasi dengan entitas Perusahaan berelasi pada tahun 2025 salah satunya adalah pinjaman jangka menengah/panjang kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas PUSRI. Berdasarkan pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar PUSRI, tindakan Direksi untuk menerima pinjaman jangka menengah/panjang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris

Direktur Utama PUSRI memohon persetujuan Dewan Komisaris untuk menerima pinjaman jangka menengah/ panjang melalui surat Nomor: 03541/F/KU/F3011/ET/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan Nomor: 03616/F/KU/F3011/ET/2024 tanggal 28 Maret 2024.

Persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris diterima oleh Direksi PUSRI melalui Surat Nomor: S-11/ DEKOM/ PUSRI/ III/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Persetujuan Menerima Pinjaman Jangka Menengah/Panjang Pinjaman Pemegang Saham.

Realisasi Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Pengungkapan realisasi transaksi dengan pihak berelasi disampaikan dalam catatan 28 Laporan Keuangan Audit Konsolidasian PUSRI 2025 yang dilampirkan dalam Laporan ini.

Fairness and Review Mechanism for Transactions

The fairness of the transactions and compliance with regulations regarding related party transactions have undergone review and audit processes by both internal and external auditors. PUSRI conducts transactions with related parties in accordance with PSAK No. 7 regarding Related Party Disclosures.

The Board of Directors views that transactions with related/affiliated parties have complied with adequate procedures and are in line with generally accepted business practices.

Compliance with Regulations and Provisions

Compliance with relevant regulations and provisions, namely the Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, is carried out through disclosure in PSAK 7 (revision 2014) concerning "Related Party Disclosures" in the Company's 2025 financial statements.

Reference in the Financial Statements

Disclosures related to these related party transactions are also described in the audited Financial Statements in Note 28 as contained in the Appendix of this Annual Report.

Review by the Board of Commissioners and Audit Committee and Shareholders' Approval of the Fairness of the Transactions
One of the related party transactions with affiliated companies in 2025 was a medium/long-term loan to PT Pupuk Indonesia (Persero) as the majority shareholder of PUSRI. Based on Article 11 paragraph 8 of the Articles of Association of PUSRI, any action by the Board of Directors to receive a medium/long-term loan must obtain written approval from the Board of Commissioners.

The President Director of PUSRI requested approval from the Board of Commissioners to receive the medium/ long-term loan through Letter Number: 03541/F/KU/ F3011/ET/2024 dated March 27, 2024 and Letter Number: 03616/F/KU/F3011/ET/2024 dated March 28, 2024.

Written approval from the Board of Commissioners was received by the Board of Directors of PUSRI through Letter Number: S-11/DEKOM/PUSRI/III/2024 dated March 28, 2024 regarding Approval to Receive Medium/

Long-Term Shareholder Loans.

Realization of Transactions with Related Parties
Disclosure of the realization of transactions with related parties is presented in Note 28 of the Consolidated Audited Financial Statements of PUSRI for 2025, which are attached to this Report.

Tabel Perkembangan Saldo Transaksi Pihak Berelasi

Table of Related Party Transaction Balances

Rp Juta
Rp million

Aset Assets	2025	2024	Persentase dari Jumlah Aset (%) Percentage of Total Assets (%)		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			2025	2024	Jumlah Total	%
Jumlah Kas di Bank Cash in Banks	200.760	251.758	0,62	0,99	(50.998)	(20,26)
Piutang Usaha Trade Receivables	164.020	108.633	0,51	0,43	55.387	50,99
Piutang Subsidi Subsidy Receivables	2.430.860	43.205	7,55	0,17	2.387.655	5526,34
Piutang Subsidi yang Belum Ditagih Unbilled Subsidy Receivables	148.265	108.612	0,46	0,43	39.653	36,51
Aset lancar lainnya Other current assets	-	7.626	0,00	0,03	(7.626)	(100,00)
Piutang Lainnya Other Receivables	71.986	65.519	0,22	0,26	6.468	9,87
Jumlah Aset Total Assets	3.015.891	585.352	9,37	2,29	2.430.539	415,23

Liabilitas Liabilities	2025	2024	Persentase dari Jumlah Aset (%) Percentage of Total Assets (%)		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			2025	2024	Jumlah Total	%
Pinjaman Pemegang Saham Shareholder Loans	-	775.000	0,00	11,26	(775.000)	(100,00)
Utang Usaha Trade Payables	121.296	52.287	0,94	0,76	69.009	131,98
Utang Lain-lain Other Payables	69.626	2.958	0,54	0,04	66.668	2253,82
Pinjaman Jangka Panjang Long-term Loans	4.878.954	2.632.193	37,78	38,22	2.246.761	85,36
Utang Subsidi Subsidy Payables	-	31.921	0,00	0,46	(31.921)	(100)
Utang Retensi Retention Payables	51.277	15.926	0,40	0,23	35.351	221,97
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	5.121.153	3.510.285	39,65	50,97	1.610.868	45,89

Pendapatan Revenue	2025	2024	Persentase dari Jumlah Pendapatan (%) Percentage of Total Cost of Revenue (%)		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			2025	2024	Jumlah Total	%
Jumlah Pendapatan dari Pihak Berelasi Total Revenue from Related Parties	8.541.626	7.512.890	61,56	55,52	1.028.736	13,69
Pendapatan denda dan klaim Penalty and Claim Revenue	-	250.225	0,00	1,85	(250.225)	(100)
Jumlah Pendapatan Total Revenue	8.541.626	7.763.115	61,56	57,36%	778.511	10,03

Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	2025	2024	Persentase dari Jumlah BPP (%) Percentage of Total Cost of Revenue (%)		Kenaikan/Penuruna Increase/Decrease	
			2025	2024	Jumlah Total	%
Jumlah Pembelian dari Pihak Berelasi Total Purchases from Related Parties	4.835.961	4.520.692	39,92	38,68	315.269	6,97
Kompensasi manajemen kunci Key Management Compensation	28.799	38.527	0,24	0,33	(9.728)	(25,25)
Jumlah Beban Pokok Pendapatan Total Cost of Revenue	4.864.760	4.559.219	40,16	39,01	305.541	6,70

Tabel Piutang Usaha Berelasi – 2025

Table of Related Party Trade Receivables – 2025

No	Nama Pihak Party Name	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Objek Transaksi Transaction Object	Nilai (Rp Juta) Amount (Rp million)
1	PT Petrokimia Gresik	Pupuk Indonesia Grup	Non Pupuk Non-Fertilizer	111.096
2	PT Pupuk Iskandar Muda	Pupuk Indonesia Grup	Pupuk Fertilizer	46.828
3	PT Pupuk Indonesia Niaga	Pupuk Indonesia Grup	Pupuk Fertilizer	4.115
4	Lain-lain (di bawah Rp2.500) Others (below Rp2,500)			1.981
Jumlah Total				164.020

Tabel Piutang Subsidi Berelasi – 2025

Table of Related Party Subsidy Receivables – 2025

No	Nama Pihak Party Name	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Objek Transaksi Transaction Object	Nilai (Rp Juta) Amount (Rp million)
1	Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	Pemerintah Government	Pupuk Fertilizer	2.430.860
Jumlah Total				2.430.860

Tabel Piutang Subsidi Berelasi – Belum Ditagih

Table of Related Party Subsidy Receivables – Unbilled

No	Nama Pihak Party Name	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Objek Transaksi Transaction Object	Nilai (Rp Juta) Amount (Rp million)
1	Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	Pemerintah Government	Pupuk Fertilizer	148.265
Jumlah Total				148.265

Tabel Piutang Lain Berelasi – 2025

Table of Other Related Party Receivables – 2025

No	Nama Pihak Party Name	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Nilai (Rp Juta) Value (Rp million)
1	PT Petrokimia Gresik	Pupuk Indonesia Grup	17.678
2	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Pupuk Indonesia Grup	16.955
3	PT Pupuk Iskandar Muda	Pupuk Indonesia Grup	9.743
4	PT Pupuk Kalimantan Timur	Pupuk Indonesia Grup	8.947
5	PT Pupuk Kujang	Pupuk Indonesia Grup	8188
6	PT Rekayasa Industri	Pupuk Indonesia Grup	2.646
7	PT Pupuk Indonesia Logistik	Pupuk Indonesia Grup	746
8	Lain-lain (di bawah Rp500 jt) Others (below Rp500 million)		7.083
Jumlah Total			71.986

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERUSAHAAN

Sebagai perusahaan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan, PUSRI senantiasa memperhatikan perubahan perundangan-undangan untuk diimplementasikan ke dalam kegiatan usahanya. Adapun perubahan peraturan perundangan-undangan yang berpengaruh terhadap perusahaan pada tahun buku 2025 adalah sebagai berikut.

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS AFFECTING THE COMPANY

As a company that complies with applicable laws and regulations, PUSRI continuously monitors changes in legislation to be implemented in its business activities. The changes in laws and regulations affecting the Company in the 2025 financial year are as follows.

No	Peraturan Regulation	Keterangan Description	Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company
1.	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan yang diterbitkan setiap bulan oleh Kementerian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia concerning the Benchmark Metal Mineral Price and Benchmark Coal Price, issued monthly by the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia.	Keputusan tersebut mengatur harga acuan untuk penggunaan mineral logam dan batubara setiap bulannya. The decree regulates the benchmark prices for metal minerals and coal on a monthly basis.	Perusahaan selaku pengguna batubara untuk proses bahan baku industri berkewajiban untuk memenuhi ketentuan harga acuan yang ditetapkan. As a coal user in its industrial production process, the Company is required to comply with the applicable benchmark prices stipulated under the regulation.

No	Peraturan Regulation	Keterangan Description	Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Government Regulation No. 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing	Peraturan tersebut mengatur mengenai kerangka regulasi utama untuk perizinan usaha berbasis risiko. The regulation establishes the primary regulatory framework for risk-based business licensing.	Perusahaan selaku pelaku usaha harus memenuhi perizinan berusaha yang dipersyaratkan oleh Pemerintah, sebelum melakukan kegiatan usaha. As a business entity, the Company is required to obtain and comply with the business licenses mandated by the Government before commencing its business activities.
3.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Minister of Agriculture Regulation No. 15 of 2025 concerning the Implementing Regulation of Presidential Regulation No. 6 of 2025 on the Governance of Subsidized Fertilizers	Peraturan tersebut mengatur mengenai aturan pelaksanaan tata kelola, pengadaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi. The regulation governs the implementation of the governance, procurement, and distribution of subsidized fertilizers.	Pupuk bersubsidi langsung disalurkan kepada penerima pupuk bersubsidi pada titik serah. Subsidized fertilizers are distributed directly to eligible recipients at the designated delivery point.
4.	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, Dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Minister of Industry Regulation No. 13 of 2025 concerning Procedures for the Submission of Industrial Data, Industrial Estate Data, Other Data, Industrial Information, and Other Information through the National Industrial Information System	Peraturan tersebut mengatur mekanisme yang berlaku untuk penyampaian data dan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional ("SIINas"), termasuk proses verifikasi dan validasi data tersebut. The regulation sets out the procedures for the submission of industrial data and information through the National Industrial Information System (SIINas), including the verification and validation processes.	Perusahaan selaku badan usaha industri wajib menyampaikan data industri secara berkala, tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya kepada Pemerintah melalui SIINas. As an industrial business entity, the Company is required to submit industrial data to the Government through SIINas on a regular, timely, accurate, and factual basis.
5.	Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 Tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu Dan Harga Gas Bumi Tertentu Di Bidang Industri. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 76.K/MG.01/MEM.M/2025 concerning the Second Amendment to the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 91.K/MG.01/MEM.M/2023 on Certain Natural Gas Users and Certain Natural Gas Prices in the Industrial Sector	Keputusan tersebut mengatur harga gas bumi tertentu bagi Pengguna gas bumi yang bergerak di bidang industri tertentu. The decree regulates specific natural gas prices applicable to designated natural gas users operating in certain industrial sectors.	Perusahaan selaku pengguna gas bumi mendapatkan kepastian harga dalam penggunaan gas bumi. As a natural gas user, the Company benefits from greater price certainty in the utilization of natural gas
6.	Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyampaian Data Emisi Industri Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Circular Letter of the Minister of Industry No. 2 of 2025 concerning the Submission of Industrial Emissions Data through the National Industrial Information System (SIINas)	Surat edaran tersebut mengatur mekanisme penyampaian data emisi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). The circular letter sets out the procedures for the submission of industrial emissions data through the National Industrial Information System (SIINas).	Perusahaan selaku badan usaha industri wajib menyampaikan data emisi secara berkala, tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya kepada Pemerintah melalui SIINas. As an industrial business entity, the Company is required to submit emissions data to the Government through SIINas on a regular, timely, accurate, and factual basis.

No	Peraturan Regulation	Keterangan Description	Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company
7.	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Pupuk Nitrogen, Fosfor, Dan Kalium Padat Secara Wajib. Minister of Industry Regulation No. 11 of 2025 concerning the Mandatory Implementation of the Indonesian National Standard for Solid Nitrogen, Phosphorus, and Potassium Fertilizers	Peraturan tersebut mengatur mengenai pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium (NPK) padat secara wajib. The regulation mandates the implementation of the Indonesian National Standard (SNI) for solid nitrogen, phosphorus, and potassium (NPK) fertilizers.	Terdapat perubahan nomor SNI pupuk NPK yang semula SNI 2803:2012, menjadi SNI 2803:2024. Pupuk NPK yang diproduksi oleh Perusahaan wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia yang baru. The SNI designation for NPK fertilizers has been updated from SNI 2803:2012 to SNI 2803:2024. Accordingly, the NPK fertilizers produced by the Company must comply with the new Indonesian National Standard.
8.	Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Presidential Regulation No. 6 of 2025 concerning the Governance of Subsidized Fertilizers	Peraturan tersebut mengatur mengenai aturan pelaksanaan tata kelola, pengadaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi. The regulation governs the governance, procurement, and distribution of subsidized fertilizers.	Pupuk bersubsidi langsung disalurkan kepada penerima pupuk bersubsidi pada titik serah. Subsidized fertilizers are distributed directly to eligible recipients at the designated delivery point.
9.	Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyampaian Data Industri Dan Data Kawasan Industri. Circular Letter of the Minister of Industry No. 1 of 2025 concerning the Submission of Industrial Data and Industrial Estate Data	Surat Edaran tersebut mengatur mekanisme yang berlaku untuk penyampaian data dan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional ("SIINas"), termasuk proses verifikasi dan validasi data tersebut. The circular letter sets out the procedures for the submission of industrial data and information through the National Industrial Information System (SIINas), including the verification and validation processes.	Perusahaan selaku badan usaha industri wajib menyampaikan data industri secara berkala, tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya kepada Pemerintah melalui SIINas. As an industrial business entity, the Company is required to submit industrial data to the Government through SIINas on a regular, timely, accurate, and factual basis.
10.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik. Regulation of the Minister of Environment/Environmental Control Agency of the Republic of Indonesia No. 11 of 2025 concerning Wastewater Quality Standards and Wastewater Treatment Technology Standards for Domestic Wastewater	Peraturan tersebut mengatur tentang standar teknologi dan baku mutu air limbah domestik. The regulation establishes the applicable technology standards and wastewater quality standards for domestic wastewater.	Perusahaan selaku pelaku usaha yang dalam proses produksinya menghasilkan air limbah domestik perlu memastikan kembali bahwa proses pengolahan air limbah domestik telah sesuai standar teknologi dan baku mutu air limbah yang berlaku. As a business entity whose operations generate domestic wastewater, the Company must ensure that its domestic wastewater treatment processes comply with the applicable wastewater treatment technology standards and wastewater quality standards.
11.	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan. Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia No. 35 of 2025 concerning Requirements and Procedures for the Certification of Domestic Component Levels and Company Benefit Weighting	Peraturan tersebut mengatur tata cara sertifikasi nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan bobot manfaat Perusahaan. The regulation sets out the requirements and procedures for the certification of Domestic Component Levels (TKDN) and Company Benefit Weighting.	Pelaksanaan perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada proses pengadaan barang dan jasa di Perusahaan harus dilakukan mengacu pada peraturan tersebut. The calculation and implementation of Domestic Component Levels (TKDN) in the Company's procurement of goods and services must be carried out in accordance with this regulation.

No	Peraturan Regulation	Keterangan Description	Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company
12.	Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE 1/MBU/08/2025 tentang Pelaksanaan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) Di Lingkungan BUMN. Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. SE-1/MBU/08/2025 concerning the Implementation of Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) within State-Owned Enterprises	Surat Edaran dimaksud mengatur larangan Over Dimension Over Loading (ODOL) di lingkungan BUMN, dalam rangka menunjang program pemerintah menjaga infrastruktur jalan dari kerusakan yang lebih cepat akibat pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih. The circular letter prohibits Over Dimension Over Loading (ODOL) practices within SOEs as part of the Government's initiative to protect road infrastructure from accelerated deterioration caused by overloading and/or oversized vehicles.	Perusahaan perlu memastikan bahwa mitra logistik (ekspediteur) yang digunakan dalam operasional dan bisnis Perusahaan memenuhi ketentuan pelaksanaan zero ODOL. The Company must ensure that the logistics service providers (freight forwarders) engaged in its operations and business activities comply with the zero-ODOL requirements.
13.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Regulation of the Minister of Environment/Environmental Control Agency of the Republic of Indonesia No. 7 of 2025 concerning the Corporate Performance Rating Assessment Program in Environmental Management (PROPER)	Peraturan tersebut mengatur pedoman pengawasan terhadap kinerja pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. The regulation provides guidelines for monitoring and assessing the environmental management performance of business entities and/or activities.	Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan produksi Perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar Perusahaan terhindar dari peringkat merah atau hitam, dan mendapatkan sanksi dari Pemerintah. The Company's environmental management practices in its production activities must be carried out in accordance with the applicable regulations to avoid receiving a red or black PROPER rating and being subject to sanctions imposed by the Government.
14.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises	Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan definisi BUMN, penambahan pengaturan mengenai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sebagai badan hukum, serta beberapa penambahan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai organ perseroan BUMN. The law revises the definition of State-Owned Enterprises (SOEs), introduces provisions concerning the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency as a legal entity, and establishes additional requirements for appointment as members of SOE corporate organs.	Perusahaan perlu melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan internal perusahaan (antara lain: pedoman, prosedur dan kebijakan internal) sehubungan dengan adanya perubahan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara tersebut. The Company needs to amend its Articles of Association and internal regulations (including guidelines, procedures, and internal policies) to align with the amendments introduced under the revised State-Owned Enterprises Law.
15.	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/KPTS./SR.310/M/10/2025 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 Tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi, Dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025. Decree of the Minister of Agriculture No. 1117/KPTS./SR.310/M/10/2025 concerning the Amendment to Decree of the Minister of Agriculture No. 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 on the Types, Maximum Retail Prices, and Allocation of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector for Fiscal Year 2025	Keputusan tersebut mengatur penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. The decree provides for a reduction in the maximum retail prices of subsidized fertilizers.	Perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi biaya subsidi dengan Kementerian Pertanian RI atas adanya perubahan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. The Company is required to reconcile subsidy costs with the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia following the adjustment to the maximum retail prices of subsidized fertilizers.

No	Peraturan Regulation	Keterangan Description	Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company
16.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Law No. 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises	Peraturan tersebut mengatur perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN, wewenang dan tanggung jawab BPI Danantara, serta pengelolaan Holding BUMN. The law provides for the transformation of the Ministry of State-Owned Enterprises into the State-Owned Enterprises Regulatory Agency, stipulates the authority and responsibilities of the Danantara Investment Management Agency (BPI Danantara), and regulates the management of SOE Holdings.	Perusahaan perlu melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan internal perusahaan (antara lain: pedoman, prosedur dan kebijakan internal) sehubungan dengan adanya perubahan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara tersebut. The Company needs to amend its Articles of Association and internal regulations (including guidelines, procedures, and internal policies) to align with the amendments introduced under the revised State-Owned Enterprises Law.
17.	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Presidential Regulation No. 113 of 2025 concerning the Amendment to Presidential Regulation No. 6 of 2025 on the Governance of Subsidized Fertilizers	Peraturan tersebut mengatur perubahan mekanisme penagihan pupuk bersubsidi yang semula berbasis biaya produksi, menjadi nilai komersial (marked to market). The regulation introduces changes to the subsidy reimbursement mechanism for subsidized fertilizers, shifting from a production cost-based approach to a commercial value (mark-to-market) approach.	Perusahaan selaku produsen pupuk bersubsidi perlu melakukan efisiensi biaya produksi. As a producer of subsidized fertilizers, the Company needs to enhance production cost efficiency to adapt to the new subsidy reimbursement mechanism.
18.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:68/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk. Minister of Finance Regulation No. 47 of 2025 concerning the Amendment to Minister of Finance Regulation No. 68/PMK.02/2016 on the Procedures for the Provision, Disbursement, and Accountability of Fertilizer Subsidy Funds	Peraturan tersebut mengubah penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk yang akan ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan. The regulation revises the provisions regarding the appointment of the Budget User Authority (KPA) for fertilizer subsidies, which will subsequently be determined through a Minister of Finance Decree.	Perusahaan selaku produsen pupuk bersubsidi perlu berkoordinasi dengan Direktur Pupuk dan Pestisida, Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk sebelumnya terkait perubahan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran. As a producer of subsidized fertilizers, the Company needs to coordinate with the Director of Fertilizers and Pesticides of the Ministry of Agriculture, who previously served as the Budget User Authority for fertilizer subsidies, regarding the changes to the appointment of the Budget User Authority.
19.	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Regulation of the Statistics Indonesia (BPS) No. 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI)	Peraturan tersebut mengatur tentang perubahan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economics Activities, Revision 5. The regulation introduces revisions to the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) in alignment with the International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Revision 5.	Perusahaan perlu melakukan penyesuaian Anggaran Dasar, khususnya terkait maksud dan kegiatan usaha Perusahaan, agar sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang baru. The Company needs to amend its Articles of Association, particularly the provisions relating to its purposes and business activities, to ensure compliance with the updated Indonesian Standard Industrial Classification.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tahun 2025, terjadi perubahan kebijakan akuntansi yang rinciannya dijelaskan pada tabel di bawah ini:

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

In 2025, there were changes in accounting policies, the details of which are explained in the table below

Perubahan Kebijakan Changes in Policies	Alasan Perubahan Reasons for Changes	Dampak Terhadap Laporan Keuangan Impact on Financial Statements
1. Amandemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing – Kekurangan Ketertukaran 2. PSAK 117: Kontrak Asuransi. 1. Amendment to PSAK 221: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates – Lack of Exchangeability 2. PSAK 117: Insurance Contracts	Amandemen PSAK 221 mensyaratkan entitas menerapkan pendekatan yang konsisten dalam menilai apakah suatu mata uang dapat dipertukarkan ke mata uang lain, dan, jika tidak, menentukan kurs yang digunakan serta pengungkapan yang diberikan. The amendments to PSAK 221 require entities to apply a consistent approach in assessing whether a currency is exchangeable into another currency and, if it is not, to determine the exchange rate to be used and the disclosures to be provided.	Tidak terdapat dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya. There is no material impact on the amounts reported in the current year or the previous year.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Sebagai entitas anak dari PT Pupuk Indonesia (Persero) yang merupakan BUMN dan sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 bahwa Tingkat Kesehatan BUMN dinilai menggunakan peringkat (rating) yang didasarkan pada Pemeringkatan.

COMPANY HEALTH LEVEL

As a subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero), which is a State-Owned Enterprise (BUMN), and in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023, the Health Level of BUMN is assessed using a rating system based on a formal rating assessment.

Peringkat (rating) yang disampaikan dalam rangka penilaian tingkat Kesehatan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tahun 2025 adalah pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2026 dengan hasil sebagai berikut:

The rating provided for the purpose of assessing the Health Level of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang in 2025 was the rating assigned by PT Pemeringkat Efek Indonesia, which was signed on May 18, 2026, with the following results:

1. Peringkat Berdiri Sendiri (Standalone rating) : idAA-.
2. Peringkat Akhir (Final Rating): idAAA/Stable
3. Dengan demikian, Tingkat Kesehatan untuk PUSRI pada Tahun Buku 2025 adalah Sangat Sehat (AAA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri nomor PER-02/MBU/03/2023.

1. Standalone Rating : idAA-.
2. Final Rating: idAAA/Stable.
3. Accordingly, the Health Level of PUSRI for Fiscal Year 2025 was classified as Very Healthy (AAA) as stipulated in Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/03/2023.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Asesmen Manajemen atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Perusahaan melakukan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) sebagai alat untuk menentukan posisi Perusahaan melalui pendekatan analisis faktor internal, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam Perusahaan serta analisis faktor eksternal, yaitu dengan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Analisis ini dilakukan berkesinambungan.

BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

Management Assessment of Matters Potentially Having a Significant Impact on the Company's Business Continuity

The Company conducts a Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis as a tool to determine the Company's position through an internal factor analysis approach, namely identifying strengths and weaknesses within the Company, as well as external factor analysis by identifying opportunities and threats that may affect the Company's business continuity. This analysis is conducted continuously.

Faktor yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) secara tahunan dievaluasi untuk mengukur efektivitas pencapaian dan kesesuaian arah jangka panjang yang akan dituju oleh Perusahaan. Penentuan nilai dilakukan pada masing-masing faktor dengan cara brainstorming oleh Komite RKAP bersama Direksi.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Asesmen atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan
Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan asesmen antara lain arahan pemegang saham pada RUPS RKAP tahun 2025, pencapaian kinerja tahun 2025, dan isu-isu internal dan eksternal yang dinilai berdampak terhadap pencapaian kinerja tahun 2025.

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan pada Tahun 2025

Berikut ini disampaikan hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha PUSRI pada tahun 2025:

1. Perubahan kebijakan pupuk bersubsidi (HET, skema penetapan harga dan tata kelola)
2. Kecelakaan kerja/sabotase/aksi terorisme di fasilitas vital Perusahaan
3. Keandalan operasional produksi
4. Pasokan gas bumi sesuai kebutuhan produksi dengan kontrak dan harga yang kompetitif.
5. Fluktuasi harga amonia, urea, batubara, dan komoditas lainnya di tengah dinamika perekonomian dan geopolitik global, serta kebijakan negara-negara utama eksportir pupuk.
6. Fluktuasi nilai tukar Rupiah sebagai dampak dinamika perekonomian dan geopolitik global.
7. Pasokan bahan baku pupuk NPK di tengah dinamika geopolitik global.
8. Rencana perubahan kebijakan subsidi pupuk.
9. Progress pembangunan pabrik P-IIIB
10. Rencana streamlining dan restrukturisasi Pupuk Indonesia Group
11. Program dekarbonisasi PI Group dan target pengurangan emisi pemerintah di tahun 2025.
12. Pendangkalan alur pada sungai Musi yang menjadi risiko dalam shipping-out produk Perusahaan dan industri di Sumatera Selatan pada umumnya.

STRATEGI PERBAIKAN PERUSAHAAN

Untuk mendukung pencapaian berbagai sasaran yang telah ditetapkan, PUSRI telah merencanakan strategi 4C (cost leadership, competitive to market, competency of employees, dan clean industry for sustainability) dengan rincian sebagai berikut:

Factors that have been established in the Long-Term Plan (RJP) are evaluated annually to measure the effectiveness of achievement and the suitability of the long-term direction to be pursued by the Company. Scoring is carried out for each factor through brainstorming by the RKAP Committee together with the Board of Directors.

Assumptions Used by Management in Assessing Matters Potentially Having a Significant Impact on the Company's Business Continuity
The assumptions used by management in conducting the assessment include directions from shareholders at the RKAP General Meeting of Shareholders for 2025, the achievement of performance in 2025, and internal and external issues considered to have an impact on the achievement of performance in 2025.

Matters Potentially Having a Significant Impact on the Company's Going Concern in 2025

The following are matters that may have a significant impact on the going concern of PUSRI in 2025:

1. Changes in subsidized fertilizer policies (Maximum Retail Price/HET, pricing schemes, and governance arrangements).
2. Workplace accidents, sabotage, or acts of terrorism affecting the Company's vital facilities.
3. Reliability of production operations.
4. Availability of natural gas supply in accordance with production requirements under contracts and at competitive prices.
5. Fluctuations in the prices of ammonia, urea, coal, and other commodities amid global economic and geopolitical dynamics, as well as policies implemented by major fertilizer-exporting countries.
6. Fluctuations in the Rupiah exchange rate as a result of global economic and geopolitical dynamics.
7. Supply of raw materials for NPK fertilizer production amid global geopolitical dynamics.
8. Plans to change fertilizer subsidy policy.
9. Progress of the P-IIIB plant construction project.
10. The streamlining and restructuring plan of the Pupuk Indonesia Group.
11. The PI Group decarbonization program and the Government's emission reduction targets for 2025.
12. Sedimentation in the Musi River channel, which poses a risk to the shipping-out of the Company's products and industrial activities in South Sumatra in general.

COMPANY IMPROVEMENT STRATEGIES

To support the achievement of its established objectives, PUSRI has formulated the 4C Strategy (Cost Leadership, Competitive to Market, Competency of Employees, and Clean Industry for Sustainability), with the following initiatives:

1. Cost Leadership
 - a. Proyek pembangunan pabrik P-IIIB
 - b. Inbound logistic excellence
 - c. Operational & maintenance excellence
 - d. Restrukturisasi Anper sesuai program streamlining PI
 - e. Cost Reduction Program (CRP) di seluruh lini korporasi
2. Competitive to Market
 - a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan
 - b. Kajian strategis penambahan kapasitas pabrik NPK
 - c. Optimalisasi penjualan produk non sentralisasi
 - d. Program optimalisasi aset berbasis kajian independen
 - e. Riset pengembangan produk/pendampingan pertanian berbasis science dan teknologi prospektif
 - f. Komersialisasi bertahap produk hasil riset / inovasi melalui program inkubasi inovasi dan premarketing
3. Competency of Employee
 - a. Implementasi roadmap Transformasi SDM PI Group
 - b. Implementasi pembelajaran dan pengembangan SDM selaras arah transformasi SDM PI Group
 - c. Implementasi Respectfull & Employee Wellbeing Policy
 - d. Program pengembangan budaya AKHLAK berkelanjutan untuk mendorong produktivitas, inovasi, leadership dan high performing culture
4. Clean Industry for Sustainability
 - a. Program dekarbonsasi sejalan target NZE tahun 2050
 - b. Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) bernilai tambah berbasis ESG, sustainable development goals (SDGs), dan circular economic
 - c. Program penguatan aspek K3 Perusahaan secara berkelanjutan.
 - d. Pelaksanaan penugasan inkubasi bisnis Green Ammonia dari Pupuk Indonesia

1. Cost Leadership
 - a. P-IIIB Plant Construction Project
 - b. Inbound Logistics Excellence
 - c. Operational and Maintenance Excellence
 - d. Subsidiary Restructuring in Line with the PI Streamlining Program
 - e. Cost Reduction Program (CRP) Across All Corporate Functions
2. Competitive to Market
 - a. Distribution of Subsidized Fertilizers in Compliance with Applicable Regulations
 - b. Strategic Study on Increasing NPK Plant Capacity
 - c. Optimization of Non-Centralized Product Sales
 - d. Asset Optimization Program Based on Independent Studies
 - e. Research and Development of Products/ Agricultural Assistance Programs Based on Science and Prospective Technologies
 - f. Gradual Commercialization of Research and Innovation Products Through Innovation Incubation and Premarketing Programs
3. Competency of Employees
 - a. Implementation of the PI Group Human Capital Transformation Roadmap
 - b. Implementation of Learning and Human Capital Development Programs Aligned with the Direction of the PI Group Human Capital Transformation
 - c. Implementation of the Respectful Workplace and Employee Well-being Policy
 - d. Sustainable AKHLAK Culture Development Program to Foster Productivity, Innovation, Leadership, and a High-Performing Culture
4. Clean Industry for Sustainability
 - a. Decarbonization Program in Line with the Net Zero Emissions (NZE) 2050 Target
 - b. Value-Added Social and Environmental Responsibility (TJSL) Programs Based on ESG Principles, the Sustainable Development Goals (SDGs), and the Circular Economy
 - c. Continuous Strengthening of Occupational Health and Safety (OHS) Aspects Across the Company
 - d. Implementation of the Green Ammonia Business Incubation Assignment from Pupuk Indonesia

1. **Dia Imada**
SVP Adm Keuangan
SVP Finance Administration
2. **Handra Pandu Pradana**
SPM Dapen & PKHT
SPM Pension Fund & PKHT
3. **Alfa Widyawan**
SVP Teknologi & K3LH
SVP Technology & HSE

4. **Junaedi**
SVP Tata Kelola & Manajemen Risiko
SVP Governance & Risk Management
5. **Andri Wibawa Syarip**
SVP Teknik & Pengembangan
SVP Engineering & Development
6. **Agus Waluyo**
SVP Transformasi Bisnis
SVP Business Transformation

7. **Novan Apriadi**
Pgs SVP SBU Manajemen Aset
Acting SVP Asset Management SBU
8. **Dian Permatasari**
SVP Satuan Pengawasan Intern
SVP Internal Audit Unit



9. **Gary Eka Luviano**
SVP Sumber Daya Manusia
SVP Human Resources

10. **Bistok Benry A Silalahi**
SVP Operasi
SVP Operations

11. **Marviansyah**
SVP Umum
SVP General Affairs

12. **Agung Prasetyanto Nugroho**
SVP Pemeliharaan
SVP Maintenance

13. **Indah Irmayani**
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

14. **Andri Azmi**
SPM Pusri III-B
SPM Pusri III-B

15. **Dikdik Yuliana**
SVP Jaminan Kualitas Pemeliharaan
SVP Maintenance Quality

16. **Lantip Catur Kadiyanto**
SVP Rantai Pasok
SVP Supply Chain



05

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

Business Support Functions

SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN CAPITAL



PUSRI mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya, melaksanakan program-program strategis yang telah dirancang dengan seksama sebagai bagian penyiapan kader-kader potensial sebagai bagian dari proses suksesi untuk menduduki jabatan strategis, guna menjamin kemampuan mengatasi persaingan bisnis, meningkatkan kinerja dan menjamin keberlangsungan usaha.

PUSRI manages and develops its human resources optimally by implementing strategically designed programs to prepare potential talents for the succession of strategic positions, enabling them to face business competition, enhance performance, and support business continuity.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SDM

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT POLICY AND STRATEGY



PUSRI telah memiliki kebijakan pengelolaan SDM yang diterapkan secara berkesinambungan. Pada prinsipnya, kebijakan tersebut berkenaan dengan peningkatan sikap saling percaya antara PUSRI dengan karyawan serta peningkatan kapabilitas dan kapasitas karyawan dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan.

PUSRI menyadari bahwa salah satu tanggung jawab utama Perusahaan adalah pengelolaan dan peningkatan kompetensi SDM guna menunjang prioritas bisnis lainnya. Oleh sebab itu, strategi pengelolaan dan peningkatan kompetensi SDM PUSRI dilakukan melalui pola pengembangan komprehensif dengan pendekatan *Learning Value Chain*, di mana proses peningkatan kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran organisasi, sebagai fondasi yang handal dalam membangun sistem dan solusi pembelajaran yang efektif guna mendukung implementasi strategi dan operasional perusahaan.

PUSRI has established HC management policies that are implemented on a continuous basis. In principle, these policies relate to strengthening mutual trust between PUSRI and its employees as well as enhancing employee capability and capacity in order to achieve the Company's objectives.

PUSRI recognizes that one of its main responsibilities is managing and improving HC competencies to support other business priorities. Therefore, the strategy for managing and enhancing HC competencies at PUSRI is carried out through a comprehensive development framework using the *Learning Value Chain* approach, where competency improvement processes are aligned with the organization's learning needs. This serves as a reliable foundation for building effective learning systems and solutions that support the implementation of the Company's strategies and operations.

Dalam proses pembelajaran sendiri, PUSRI menerapkan strategi 4E, yaitu *Enrichment*, *Engagement*, *Empowerment*, dan *Exposure*. Implementasi metode pembelajaran 4E tersebut dapat berupa pelatihan/ sertifikasi, proses mentoring / *coaching*, dan melalui mekanisme penugasan khusus, penugasan ke proyek-proyek, dan sebagainya.

Human Capital Management bertanggung jawab menjalankan kegiatan pengembangan SDM PUSRI, didukung oleh berbagai perangkat manajemen SDM yang telah tersedia. Perangkat dimaksud antara lain: kamus kompetensi; kebutuhan kompetensi jabatan; pengukuran kompetensi, dilakukan bekerja sama dengan lembaga yang kompeten di bidangnya; sistem *Learning Experience Platform*, sistem *Knowledge Management* serta *Human Capital Management System* (HCMS). Melalui perangkat-perangkat tersebut diharapkan penilaian kompetensi karyawan akan lebih objektif. Pengembangan SDM di lingkungan PUSRI juga lebih terarah sesuai dengan aspirasi karier dan kompetensinya yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

PUSRI juga mendukung implementasi kebijakan Holding yang tertuang dalam *Human Capital Management Grand Strategy & Roadmap Pupuk Indonesia Group tahun 2022–2027* di mana salah satunya adalah penggunaan *Single Platform* yang bertujuan untuk menyelaraskan proses-proses SDM antar perusahaan PI Group - PI SMART. Adapun PI SMART saat ini tidak hanya digunakan sebagai *tool* untuk pengukuran kinerja karyawan dan *updating* data pribadi menggunakan standar CV BUMN, tetapi juga keterlibatan karyawan dalam kegiatan sosial di Perusahaan.

Tidak hanya itu, PUSRI juga mendukung implementasi program Holding untuk membentuk *competency based career movement* untuk meningkatkan mobilisasi pegawai PI Group melalui program *Talent Mobility* di mana program ini bertujuan untuk memaksimalkan kapabilitas *talent*, *exposure* dan pengalaman.

In its learning process, PUSRI implements the 4E strategy: *Enrichment*, *Engagement*, *Empowerment*, and *Exposure*. The implementation of this learning approach includes training and certification programs, mentoring and coaching, as well as special assignments, project-based tasks, and other developmental initiatives.

Human Capital Management is responsible for implementing HC development activities at PUSRI, supported by various HC management tools that have been established. These tools include: a competency dictionary; job competency requirements; competency assessments conducted in collaboration with competent institutions in their respective fields; a *Learning Experience Platform* system; a *Knowledge Management* system; and the *Human Capital Management System* (HCMS). Through these tools, employee competency assessments are expected to become more objective.

PUSRI also supports the implementation of the Holding's policy outlined in the *Human Capital Management Grand Strategy & Roadmap of Pupuk Indonesia Group 2022–2027*, one of which is the use of a *Single Platform* aimed at aligning HC processes among companies within the PI Group through PI SMART. Currently, PI SMART is not only used as a tool for employee performance measurement and updating personal data using the BUMN CV standard, but also to support employee involvement in social activities within the Company.

In addition, PUSRI supports the implementation of the Holding's program to establish *competency-based career movement* to enhance employee mobility within the PI Group through the *Talent Mobility* program. This program aims to maximize talent capability, exposure, and experience.

PENGELOLAAN SDM

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

SISTEM REKRUTMEN

Pelaksanaan rekrutmen SDM di lingkungan PUSRI mengacu pada proyeksi kebutuhan karyawan untuk tahun berjalan. Sistem rekrutmen juga berpedoman pada standar kompetensi seperti tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan memegang teguh nilai-nilai Perusahaan. Rekrutmen dilakukan secara terbuka sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diperlukan. PUSRI senantiasa berupaya menempatkan orang yang tepat pada fungsi yang tepat sehingga tercipta SDM berkualitas yang akan terus tumbuh dalam jangka waktu yang panjang.

Strategi pemenuhan kebutuhan karyawan dilakukan dengan dua metode utama, yaitu rekrutmen eksternal (berdasarkan SK/DIR/526/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Pedoman Rekrutmen Calon Karyawan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang) dan rekrutmen internal melalui proses promosi, rotasi, ataupun mutasi. Proses rekrutmen karyawan PUSRI juga mempertimbangkan Perencanaan Tenaga Kerja dan Rekrutmen tahun 2023–2027, yang intinya menyatakan bahwa jumlah karyawan yang akan direkrut dari luar Perusahaan maksimal sebesar 70% dari jumlah karyawan yang pensiun di tahun berjalan.

Proses rekrutmen harus bebas kepentingan dan bebas tekanan. Calon karyawan yang direkrut memiliki kompetensi yang telah sesuai dengan kebutuhan PUSRI, karena telah melalui serangkaian seleksi yang ketat, mulai dari seleksi administrasi, *aptitude* test, tes keahlian (untuk jurusan tertentu seperti operator *crane* dan *welder*), psikotes, Tes Potensi Akademik (TPA), Bahasa Inggris dengan standar TOEFL, tes kesehatan, dan wawancara.

Bagi calon karyawan dari lulusan Strata 1 (S1), Direksi secara khusus melakukan wawancara untuk memastikan agar calon karyawan yang diperoleh benar-benar mampu dan memiliki kualitas terbaik. Pada kegiatan rekrutmen eksternal, PUSRI bekerja sama dengan konsultan rekrutmen independen yang dalam penunjukannya telah melalui seleksi *beauty contest*.

RECRUITMENT SYSTEM

The implementation of HC recruitment at PUSRI refers to the projected employee requirements for the current year. The recruitment system also follows competency standards as stated in the Company's Articles of Association while upholding the Company's values. Recruitment is conducted openly based on the required needs and qualifications. PUSRI continuously strives to place the right person in the right function so that quality HC can be developed and sustained over the long term.

The strategy for fulfilling employee needs is carried out through two main methods: external recruitment (based on SK/DIR/526/2021 dated November 12, 2021 concerning the Guidelines for the Recruitment of Prospective Employees of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang) and internal recruitment through promotion, rotation, or transfer processes. The employee recruitment process also considers the Manpower Planning and Recruitment Plan for 2023–2027, which essentially states that the number of employees recruited from outside the Company must not exceed 70% of the number of employees retiring in the current year.

The recruitment process must be free from interests and pressure. Recruited candidates must possess competencies that match PUSRI's needs, having undergone a series of rigorous selection processes including administrative screening, aptitude tests, skill tests (for certain fields such as crane operators and welders), psychological tests, Academic Potential Tests (TPA), English proficiency tests with TOEFL standards, medical examinations, and interviews.

For candidates with a Bachelor's degree (S1), the Board of Directors conducts a special interview to ensure that the selected candidates truly possess the capability and the best qualifications. In external recruitment activities, PUSRI collaborates with independent recruitment consultants who are selected through a beauty contest selection process.

Pemenuhan kebutuhan karyawan melalui sumber internal maupun sumber eksternal, dilakukan dengan program atau jalur sebagai berikut:

- 1. Rekrutmen Umum**
Rekrutmen yang dilakukan secara terbuka melalui media massa dan *online*.
- 2. Rekrutmen Roadshow**
Rekrutmen yang dilakukan langsung ke universitas dan sekolah yang memiliki kualifikasi khusus, misalnya Sekolah Analis Kimia, Sekolah STM Pembangunan.
- 3. Rekrutmen bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) Grup,**
Rekrutmen yang dilakukan bersama-sama dengan anggota *holding* di PT Pupuk Indonesia (Persero) lainnya.
- 4. Rekrutmen bersama Kementerian BUMN (RBB),**

Rekrutmen yang dilakukan bersama-sama dengan seluruh BUMN yang ada di Indonesia.

PUSRI juga memiliki kebijakan untuk menerima tenaga kerja lokal untuk jenis jabatan tertentu dengan tetap melalui proses seleksi agar ada kesamaan dalam kualifikasi dan kompetensi. Tenaga kerja lokal didefinisikan sebagai tenaga kerja yang berasal dari wilayah-wilayah operasional Perusahaan.

Dalam rangka memberdayakan putra daerah, khusus untuk tingkat pendidikan SLTA yang direkrut melalui jalur rekrutmen umum, peserta dibatasi hanya berasal dari Sumatera Selatan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat yang selama ini telah dilaksanakan oleh PUSRI.

Dari Tahun 2021-2024, PUSRI belum melakukan rekrutmen karyawan. Tahun 2025, PUSRI melakukan Rekrutmen Bersama Kementerian BUMN (RBB) untuk level jabatan Operator, dengan tingkat pendidikan minimal SLTA. Adapun peserta yang dinyatakan lulus dalam RBB Kementerian BUMN tersebut untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu tertentu) PT Pusri Palembang, yaitu sebanyak 13 (Tiga belas) orang.

Fulfillment of employee needs through internal or external sources is conducted through the following programs or pathways:

- 1. General Recruitment**
Recruitment conducted openly through mass media and online platforms.
- 2. Roadshow Recruitment**
Recruitment conducted directly at universities and schools with specific qualifications, such as Chemical Analyst Schools and STM Pembangunan schools.
- 3. Joint Recruitment with PT Pupuk Indonesia (Persero) Group**
Recruitment conducted jointly with other holding members within PT Pupuk Indonesia (Persero).
- 4. Joint Recruitment with the Ministry of State-Owned Enterprises (RBB)**
Recruitment conducted collectively with all State-Owned Enterprises in Indonesia.

PUSRI also has a policy of recruiting local workers for certain positions while still requiring them to undergo the same selection process to ensure equal qualifications and competencies. Local workers are defined as workers originating from the Company's operational areas.

In order to empower local communities, recruitment at the senior high school (SLTA) level through the general recruitment pathway is limited to participants from South Sumatra. This initiative is expected to support community empowerment programs that have long been implemented by PUSRI.

From 2021 to 2024, PUSRI did not carry out employee recruitment activities. In 2025, PUSRI participated in the Joint Recruitment Program (RBB) organized by the Ministry of State-Owned Enterprises for Operator positions with a minimum educational requirement of senior high school. A total of 13 participants who successfully passed the RBB program were subsequently appointed as Fixed-Term Employment Contract (PKWT) employees at PT Pusri Palembang.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

PUSRI menjalankan Sistem Manajemen SDM berbasis *human capital* terintegrasi. Pengembangan kompetensi dimulai sejak karyawan masuk sebagai *management trainee* di PUSRI.

PUSRI memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan tanpa membedakan dalam kesempatan pengembangan kompetensi. Kompetensi karyawan dinilai melalui kegiatan *assessment* kompetensi guna mengetahui potensi intelektual, kepemimpinan, serta *soft competency* yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil *assessment* akan dikombinasikan dengan *performance management* melalui Penilaian Prestasi Kerja.

PUSRI mengembangkan kompetensi SDM dengan merealisasikan program-program pelatihan secara komprehensif dengan rincian: 4E, yaitu *Enrichment* (melalui pelatihan, *e-learning*, seminar, *self-study*), *Engagement* (melalui *Project Assignment*), *Empowerment* (melalui proses *mentoring*, *coaching*, *sharing knowledge*), dan *Exposure* (melalui *Talent Mobility*, *Benchmarking*, *Immersion*).

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan mendukung peningkatan kinerja PUSRI, Pengembangan SDM PUSRI mengintegrasikan program pelatihan dan pengembangan SDM dengan strategi PUSRI. Program pendidikan dan pelatihan pegawai memfasilitasi pegawai yang mempunyai kualifikasi program profesional di segala disiplin ilmu, baik dalam negeri maupun internasional, dan merupakan sarana peningkatan kompetensi pegawai guna mencapai pengembangan profesionalisme pegawai.

Adapun program pelatihan yang dilakukan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Managerial & Leadership Eselon 1, 2, 3, 4, dan 5: Bertujuan untuk pemenuhan *soft competency* dan *hard competency* bagi pejabat Eselon 1, 2, 3, 4, dan 5 khususnya terkait kemampuan manajerial dan kepemimpinan.
2. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Inti (KI): Bertujuan untuk pemenuhan *hard competency* di bidang proses bisnis inti Perusahaan yaitu bidang produksi, penjualan, pemasaran, dan distribusi.
3. Pelatihan Purna Tugas: Bertujuan untuk memberikan bekal ilmu dan kesiapan mental bagi karyawan yang akan menghadapi masa pensiun.

COMPETENCY DEVELOPMENT

PUSRI provides equal opportunities to all employees without discrimination in competency development opportunities.

Employee competencies are assessed through competency assessments to identify intellectual potential, leadership capability, and soft competencies required to achieve the expected performance. The results of these assessments are combined with performance management through the Employee Performance Appraisal.

PUSRI develops human resource competencies by implementing comprehensive training programs based on the 4E approach, namely Enrichment (through training, e-learning, seminars, and self-study), Engagement (through project assignments), Empowerment (through mentoring, coaching, and knowledge-sharing processes), and Exposure (through talent mobility, benchmarking, and immersion programs).

To ensure that all programs and activities are carried out effectively, efficiently, and support the improvement of PUSRI's performance, HC Development integrates training and HC development programs with the Company's strategy. Employee education and training programs facilitate employees who meet the qualifications for professional programs across various disciplines, both domestically and internationally, as a means to enhance employee competency and achieve the development of employee professionalism.

Training programs implemented during 2025 include:

1. Managerial & Leadership Training for Echelon 1, 2, 3, 4, and 5. Aimed at fulfilling soft competency and hard competency requirements for officials at Echelon 1–5 levels, particularly in managerial and leadership capabilities.
2. Core Competency (KI) Training and Certification: Aimed at fulfilling hard competency requirements in the Company's core business processes, namely production, sales, marketing, and distribution.
3. Pre-Retirement Trainin: Aimed at providing knowledge and mental preparedness for employees approaching retirement.

Adapun total *mandays* pelatihan yang dicapai Perusahaan di tahun 2025 adalah 17,919 *mandays*, naik 10,1% dari 16.269 *mandays* di tahun 2024, di luar *mandays* Pembimbing KP/Riset. Adapun rata-rata jam pembelajaran karyawan adalah 80,6 (2024: 73) jam/orang/tahun.

The total training *mandays* achieved by the Company in 2025 reached 17,919 *mandays*, representing a 10.1% increase from 16,269 *mandays* in 2024, excluding *mandays* for Internship/Research Supervisors. Meanwhile, the average employee learning hours amounted to 80.6 hours per person per year (2024: 73 hours/person/year).

Selama tahun 2025, PUSRI telah merealisasikan anggaran pengembangan kompetensi karyawan sebesar Rp24,27 miliar, turun 4,7% dari realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp23,28 miliar.

During 2025, PUSRI realized an employee competency development budget of Rp24.27 billion, an decrease of 4.7% compared to the Rp23.28 billion realized in 2024.

Uraian lebih lengkap mengenai program pengembangan kompetensi karyawan PUSRI disampaikan pada Laporan Keberlanjutan PUSRI, dengan sub-judul yang sama.

More detailed information regarding PUSRI's employee competency development programs is presented in the PUSRI Sustainability Report, under the same subheading.

Realisasi Mandays (MD) Pengembangan Kompetensi Karyawan

Realization of Employee Competency Development Mandays (MD)

No	Jenis Pengembangan Type of Development	Realisasi 2025 2025 Realization	Realisasi 2024 2024 Realization	% Perubahan Difference%
		(1)	(2)	(2-1)/1
1	Pelatihan Training	11.045	11.443	(3,5)
2	Sertifikasi Certification	1.865	2.087	(10,6)
3	Sharing	3.126	2.366	32,1
4	Instruktur Pelatihan Training Instructure	1.883	373	404,8
5	Pemateri Sharing Sharing Presenter	29	46	(37,0)
6	Coaching, Mentoring, Feed Back Assessment	-	13	(100,0)
Total		17.919	16.269	10,1

Tabel Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan

Table of Employee Competency Development Cost

(Dalam Rp Juta) | In million Rupiah

Keterangan Description	Realisasi 2025 2025 Realization	Realisasi 2024 2024 Realization	% Perubahan Difference%
Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan Employee Competency Development Costs	24.266	25.469	(4,72%)

PENILAIAN KINERJA

Hasil evaluasi akan diintegrasikan dengan manajemen kinerja melalui penilaian prestasi kerja. Evaluasi kinerja ditingkatkan dengan evaluasi perilaku (integritas, ketergantungan di bawah tekanan, motivasi, penguasaan keterampilan teknis, dan lain-lain) oleh atasan, bawahan, diri mereka sendiri, kolega, dan pelanggan (penilaian 360 derajat). Evaluasi ini didasarkan pada penilaian objektif terhadap kesepakatan kerja antara atasan dan bawahan dalam mencapai KPI individu. Penilaian ini dilakukan setiap enam bulan sekali atau dua kali setahun.

Pada tahun 2025, PUSRI telah melaksanakan program asesmen karyawan, dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga. Program ini telah dilakukan terhadap 270 (2024:142) orang karyawan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

PERFORMANCE APPRAISAL

Evaluation results are integrated into performance management through work performance assessments. Performance evaluation is enhanced through behavioral evaluation (integrity, dependability under pressure, motivation, mastery of technical skills, and others) conducted by superiors, subordinates, self-assessment, colleagues, and customers (360-degree assessment). This evaluation is based on objective assessments of work agreements between superiors and subordinates in achieving individual KPI Individual. The assessment is conducted every six months or twice a year.

In 2025, PUSRI implemented an employee assessment program conducted in collaboration with a third party. This program involved 270 (2024: 142) employees, as described at table below:

Tabel Realisasi Program Asesmen Karyawan

Table of Employee Assessment Program Realization

Deskripsi Golongan Job Level Description	Satuan Unit	Realisasi 2025 2025 Realization	Realisasi 2024 2024 Realization	% Perubahan Difference%
Eselon I Echelon I	Orang People	4	15	(73,3)
Eselon II Echelon II	Orang People	18	67	(73,1)
Eselon III Echelon III	Orang People	67	52	28,8
Eselon IV Echelon IV	Orang People	90	4	2.150,0
Eselon V Echelon V	Orang People	90	4	2.150,0
Eselon VI Echelon VI	Orang People	1	0	100,0
Jumlah Total	Orang People	270	142	90,1

PENGEMBANGAN KARIER

Kebijakan mengenai pengembangan karier di PUSRI diatur dalam SK/DIR/156/2016 tanggal 27 April 2016 tentang Peraturan Rotasi, Mutasi, dan Promosi Karyawan, serta Komite Jabatan dan Komite PSDM.

Dalam rangka promosi untuk mengisi jabatan tertentu dan sebagai bagian dari proses kaderisasi karyawan, Perusahaan menyelenggarakan pelatihan khusus setiap tahun. Program pengembangan karier juga ditujukan untuk mengembangkan kompetensi karyawan dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja yang sejalan dengan kebutuhan bisnis dan pemenuhan target kinerja Perusahaan.

Pada tahap awal, karyawan yang telah diterima di Perusahaan akan mengikuti program *on boarding* berupa *Management Trainee*. Karyawan dikenalkan dengan seluruh proses bisnis Perusahaan, terutama pada pembentukan tata nilai dan budaya Perusahaan. Kompetensinya akan dinilai melalui kegiatan *assessment* kompetensi untuk mengetahui potensi intelektual, kepemimpinan, serta *soft competency* yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Pengembangan karier dan kompetensi karyawan juga dilakukan melalui program *Talent Management* yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor: SK/DIR/407/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Pedoman dan Prosedur PT Pupuk Indonesia (Persero) Bidang SDM di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Pada tahun 2025, PUSRI memiliki total 371 (2024: 350) karyawan yang termasuk kategori *talent* (eselon I, II, III dan IV) terdiri dari 262 (2024: 254) karyawan *talent longlist* dan 109 (2024: 96) karyawan *talent shortlist* atau sekitar 20,93% (2024: 19,53%) dari total karyawan Perusahaan.

Adapun jumlah karyawan yang dipromosikan pada tahun 2025, adalah 200 (2024: 479) karyawan atau 12,24% (2024 : 26,7%) dari total karyawan Perusahaan tahun 2025 yaitu sejumlah 1783 (2024: 1.790) orang. Berikut disampaikan data perkembangan promosi tahun 2024–2025:

Tabel Promosi Karyawan PUSRI, 2024–2025

Table: PUSRI Employee Promotions, 2024–2025

No	Tahun Year	2025	2024
1	Promosi Promotion	200	479
2	Rotasi Rotation	758	482

CAREER DEVELOPMENT

Policies regarding career development at PUSRI are regulated under SK/DIR/156/2016 dated April 27, 2016 concerning Employee Rotation, Transfer, and Promotion Regulations, as well as the Position Committee and HC Development Committee.

To support promotions for certain positions and as part of the employee succession process, the Company organizes special training annually. Career development programs are also aimed at developing employee competencies and motivating employees to improve performance in line with business needs and the achievement of the Company's performance targets.

At the initial stage, newly hired employees participate in an onboarding program in the form of a Management Trainee program. Employees are introduced to the Company's entire business process, particularly the formation of corporate values and culture. Their competencies are assessed through competency assessment activities to identify intellectual potential, leadership ability, and soft competencies required to achieve the expected performance.

Career and competency development is also conducted through the Talent Management program, established through the Board of Directors Decree of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Number SK/DIR/407/2022 dated December 5, 2022 concerning the Implementation of Guidelines and Procedures of PT Pupuk Indonesia (Persero) in the Human Capital Field at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

In 2025, PUSRI had a total of 371 (2024: 350) employees categorized as talent (Echelon I, II, III, and IV), consisting of 262 (2024: 254) longlist talents and 109 (2024: 96) shortlist talents, or approximately 20.93% (2024: 19.53%) of the Company's total employees.

The number of employees promoted in 2025 was 200 (2024: 479) employees, or 12.24% of the Company's total employees in 2025, which amounted to 1783 (2024: 1.790) employees. The following table presents the development of employee promotions in 2024–2025:

REMUNERASI

Untuk setiap unit kerja, Perusahaan telah memenuhi Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/ Kota (UMP/K) yang ditetapkan pemerintah. Program dan fasilitas kesejahteraan karyawan Perusahaan dikompensasi sesuai dengan aturan dan kebijakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, termasuk membayar upah yang sesuai. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2025 - 2027 yang dibentuk pada tanggal 10 Desember 2025 mengatur seluruh kebijakan pengelolaan SDM, kesejahteraan, dan fasilitas Perusahaan.

REMUNERATION

For each work unit, the Company has complied with the Provincial/Regency/City Minimum Wage (UMP/K) established by the government. The Company's employee welfare programs and facilities are compensated in accordance with the rules and policies of the Ministry of Manpower and Transmigration, including the payment of appropriate wages. The Collective Labor Agreement (PKB) 2025 - 2027 established on December 10, 2025 regulates all policies related to HC management, welfare, and facilities.

Tabel Remunerasi dan Tunjangan Karyawan

Table of Employee Remuneration and Benefits

No	Tunjangan Karyawan Employee Benefits	Remunerasi dan Fasilitas Lain Remuneration and Other Facilities
1	Tunjangan Jabatan, yang terdiri dari Tunjangan Pimpinan dan Tunjangan pabrik Position Allowance, consisting of Leadership Allowance and Plant Allowance	Insentif, yang diterima setiap tiga bulan sekali atas pencapaian kinerja Perusahaan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu. Incentives, received every three months based on the achievement of Company performance, work unit performance, and individual performance.
2	Tunjangan Risiko Risk Allowance	Jasa operasi, yang diterima setiap tahunnya atas pencapaian kinerja Perusahaan dan tolak ukur lainnya. Operational services, received annually based on the achievement of Company performance and other benchmarks.
3	Tunjangan Daerah Regional Allowance	Cuti lainnya, seperti cuti hamil dan melahirkan, cuti menikah, cuti menikahkan anak, cuti istri melahirkan, cuti keluarga inti meninggal, cuti haji, cuti khitan/cuti aqiqah/baptis/mepades. Other leave, such as maternity leave, marriage leave, leave for a child's marriage, paternity leave, bereavement leave for immediate family members, hajj leave, and circumcision/qiqah/baptism/mepades leave.
4	Tunjangan Sarana, yang terdiri dari Tunjangan Transport dan Tunjangan Shift Facilities Allowance, consisting of Transportation Allowance and Shift Allowance	Pemeliharaan kesehatan, berupa BPJS Kesehatan dan <i>top-up</i> menggunakan <i>provider</i> asuransi kesehatan. Healthcare maintenance in the form of BPJS Health coverage and top-up through a health insurance provider.
5	Tunjangan <i>Call Out</i> Call Out Allowance	Bantuan lainnya, seperti bantuan pernikahan, bantuan melahirkan, bantuan aqiqah/khitanan, membaptis, <i>mepades</i> , bantuan rekreasi, bantuan ibadah haji dan bantuan kepemilikan rumah pribadi. Other assistance, such as marriage assistance, childbirth assistance, aqiqah/circumcision assistance, baptism assistance, mepades assistance, recreation assistance, hajj pilgrimage assistance, and assistance for personal home ownership.
6	Tunjangan Hari Raya (THR) Religious Holiday Allowance (THR)	Jaminan Kematian (BPJS Ketenagakerjaan) dan Asuransi Kematian Death Benefit (BPJS Employment) and Life Insurance.
7	Tunjangan Kesetiaan Kerja Loyalty Service Allowance	Fasilitas rumah dinas sesuai ketentuan. Official housing facilities in accordance with applicable provisions.
8	Tunjangan Kesejahteraan Hari Tua Old Age Welfare Allowance	Fasilitas pakaian kerja dan kelengkapannya, peralatan kerja, dan pelindung keselamatan kerja. Work clothing and related equipment, work equipment, and occupational safety protective gear.

PROGRAM PENSIUN

Pekerja di PUSRI yang akan segera berusia 56 tahun dan memasuki masa pensiun (MPP) berhak mengikuti Pelatihan Program Pensiun. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan para pekerja informasi yang mereka butuhkan agar bisa mandiri ketika mereka pensiun. Pendidikan dan pelatihan pensiun terdiri dari program keterampilan bisnis mandiri yang dapat diikuti oleh karyawan ketika mereka berusia 50 atau 55 tahun, serta program pelatihan lima hari yang dirancang untuk mempersiapkan karyawan memasuki masa pensiun.

Selain itu, perusahaan juga menawarkan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) sudah dibatasi Pesertanya, yaitu hanya Pekerja yang mulai bekerja sebelum tahun 2007 dengan restriksi Manfaat Pensiun Bulanan. Seluruh Pekerja Perusahaan diikuti dalam program Pensiun Iuran Pasti, dengan pendanaan (iuran bulanan) berasal dari kontribusi Perusahaan maupun kontribusi Pekerja.

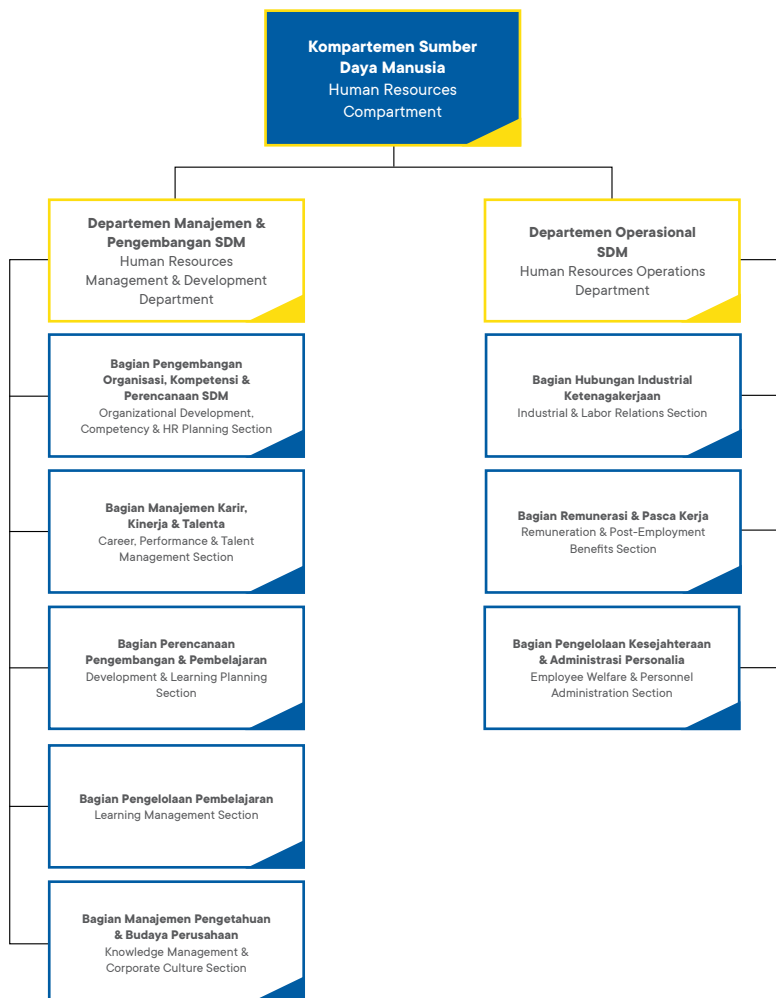
PENSION PROGRAM

Employees at PUSRI who are approaching the age of 56 and entering the pre-retirement period (MPP) are eligible to participate in the Pension Program Training. The objective of this program is to provide employees with the information they need to remain independent after retirement. Retirement education and training consist of an independent business skills program that employees may participate in when they reach the age of 50 or 55, as well as a five-day training program designed to prepare employees for retirement.

In addition, the Company also offers a Defined Benefit Pension Program (PPMP) and a Defined Contribution Pension Program (PPIP). Participation in the Defined Benefit Pension Program (PPMP) is limited only to employees who commenced employment before 2007, with restrictions on monthly pension benefits. All Company employees are enrolled in the Defined Contribution Pension Program, with funding (monthly contributions) originating from both Company contributions and employee contributions.

STRUKTUR PENGELOLA HUMAN CAPITAL

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT STRUCTURE



RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN 2026

Untuk tahun 2026 Perusahaan merencanakan kegiatan pembelajaran karyawan dengan target sebesar 11.760 (2025: 11.613) Mandays pembelajaran, termasuk kegiatan yang terkait dengan penerapan manajemen pengetahuan. Pembelajaran mencakup berbagai jenis kegiatan, seperti pelatihan, sertifikasi, *e-learning*, *sharing knowledge*, *Communities of Practice*, serta *Coaching & Mentoring*. Pembelajaran karyawan meliputi berbagai bidang seperti pembelajaran untuk kepemimpinan, bidang kompetensi inti perusahaan seperti operasi dan pemeliharaan, serta bidang kompetensi penunjang seperti SDM, keuangan, audit, perencanaan strategis, dan lain-lain.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT PLAN 2026

For 2026, the Company plans employee learning activities with a target of 11,760 (2025: 11,613) Mandays of learning, including activities related to the implementation of knowledge management. Learning encompasses various types of activities, such as training, certification, e-learning, knowledge sharing, Communities of Practice, and Coaching & Mentoring. Employee learning encompasses various areas such as leadership learning, core competency areas such as operations and maintenance, and supporting competency areas such as HR, finance, audit, strategic planning, and others.

Tabel Target Mandays Pelatihan 2026

2026 Training Mandays Target Table

No	Keterangan Description	Target MD
		2026
1	Pelatihan <i>Inhouse</i> Inhouse Training	2,940
2	Pelatihan <i>Outplant</i> Outplant Training	2,940
3	<i>E-learning</i>	1,176
4	Sharing Knowledge	1,764
5	Community of Practice Management Forum	1,764
6	Forum Manajemen	1,176
	Pengembangan Development	11,760

RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2026

STRATEGIC PLAN FOR HC DEVELOPMENT IN 2026

PUSRI telah menyiapkan rencana pengelolaan/ pengembangan SDM untuk tahun 2026 yang terdiri dari:

PUSRI has prepared an HC management/ development plan for 2026 consisting of:

Sasaran Target	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Program Kegiatan Activity Program
Tersedianya SDM yang kompeten, berdaya saing, dan berbudaya AKHLAK. Availability of competent, competitive human resources who embody the AKHLAK values.	Sustainability Implementasi Budaya AKHLAK melalui program transformasi budaya sesuai arahan Pupuk Indonesia dan Kementerian BUMN. Implementation of the AKHLAK culture through cultural transformation programs in accordance with directives from Pupuk Indonesia and the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN).	1. Implementasi Program Akhlak <i>Culture Journey</i> Pupuk Indonesia Group. Target: 100% terlaksana sesuai arahan Pupuk Indonesia. 2. Implementasi Program <i>Inclusive Workplace Policy</i>. Target: 100% terlaksana sesuai arahan Pupuk Indonesia. 3. Program peningkatan <i>awareness</i> RWP. Target: 100% terlaksana sesuai arahan Pupuk Indonesia. 4. Pelaksanaan asesmen <i>culture value</i> melalui mekanisme yang relevan. Target: Terlaksana 1 kali sesuai arahan Pupuk Indonesia. 5. Pelaksanaan sosialisasi AKAR (Akhlak Karyawan) Pusri melalui media gamifikasi yang dibuat oleh Tim Budaya Perusahaan custom dengan kasus yang sering terjadi di perusahaan. Target: 1 kali. 6. Melaksanakan pengembangan kanal aduan untuk kasus pelecehan/ diskriminasi. Target: Semester 2 1. Implementation of the AKHLAK Culture Journey Program within the Pupuk Indonesia Group. Target: 100% completion in accordance with Pupuk Indonesia's directives. 2. Implementation of the Inclusive Workplace Policy Program. Target: 100% completion in accordance with Pupuk Indonesia's directives. 3. RWP awareness enhancement program. Target: 100% implementation in accordance with Pupuk Indonesia's directives. 4. Conducting a culture value assessment through relevant mechanisms. Target: Completed once in accordance with Pupuk Indonesia's directives. 5. Implementation of AKAR (Employee Morality) socialization at Pusri via gamification media developed by the Corporate Culture Team, tailored with common company cases. Target: Once. 6. Development of a complaint channel for harassment/discrimination cases. Target: Semester 2.

Sasaran Target	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Program Kegiatan Activity Program
		- Peningkatan kapabilitas leaders melalui pembelajaran terintegrasi berbasis 70-20-10 (<i>classroom, coaching & mentoring, project assignment, dll.</i>). Target: 200 MD pembelajaran terkait <i>Manajerial & Leadership</i>. - Peningkatan kapabilitas Direksi dilakukan melalui program pembelajaran terpadu sesuai prinsip 70-20-10, yang mencakup pelatihan, seminar, sharing session, atau konferensi dengan tema: - Manajemen risiko - Fraud - Bisnis - Kegiatan Usaha Korporasi - Hukum - Kepatuhan - Keuangan - Akuntansi - Audit - Kegiatan korporasi signifikan BUMN dan/atau - Sesuai dengan bidang tugas masing-masing Direksi Target: Seluruh Direksi mengikuti pembelajaran dengan masing-masing minimal total 40 jam pelatihan - Peningkatan kapabilitas Direksi dilakukan melalui program pembelajaran terpadu sesuai prinsip 70-20-10, yang mencakup sertifikasi keahlian dengan tema: - Kegiatan usaha korporasi - Hukum - Manajemen Risiko - Kepatuhan - Keuangan - Akuntansi dan/atau - Sesuai bidang tugas masing-masing direksi Target: Seluruh direksi menyelesaikan minimal 1 sertifikasi atau memiliki minimal 1 sertifikasi yang masih berlaku sesuai tema tersebut diatas - Menyelenggarakan program pembelajaran untuk pengembangan kompetensi dan kapabilitas baik dalam bentuk pelatihan, sertifikasi, ataupun pembelajaran lainnya (Sesuai konsep 70-20-10 dan 4E). Target: 5.000 MD pembelajaran.
	Sustainability Peningkatan kompetensi karyawan berdasarkan model pembelajaran 70-20-10. Enhancement of employee competencies based on the 70-20-10 learning model.	

Sasaran Target	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Program Kegiatan Activity Program
		- Enhancement of leadership capabilities through integrated learning based on the 70-20-10 model (classroom, coaching & mentoring, project assignments, etc.). Target: 200 learning days related to managerial and leadership skills. - Director capability enhancement through integrated learning programs following the 70-20-10 principle, covering themes such as: - Risk Management - Fraud - Business - Corporate Business Activities - Legal - Compliance - Finance - Accounting - Audit - Significant BUMN Corporate activities and/or - According to each director's area of responsibility Target : All directors participate in training with a minimum of 40 hours each. - Director capability enhancement through integrated learning programs following the 70-20-10 principle, including skill certifications with themes such as: - Corporate Business Activities - Legal - Risk Management - Compliance - Finance - Accounting and/or - According to each director's responsibilities Target: All directors complete at least one certification or hold at least one valid certification related to the themes above. - Organize learning programs for competency and capability development, including training, certifications, or other learning methods (aligned with the 70-20-10 and 4E concepts). Target: 5,000 learning days.

Sasaran Target	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Program Kegiatan Activity Program
	Sustainability Pemberdayaan tenaga ahli berpendidikan S2 yang berdaya saing tinggi. Empowerment of highly competitive professionals with Master's degrees.	1. Pelaksanaan Program Tugas Belajar/ Beasiswa Pendidikan S2 bagi karyawan sesuai dengan kebutuhan strategis perusahaan di masa depan. Target: 3 orang menjalankan tugas belajar S2. 2. Pelaksanaan Program Implementasi Hasil Tugas Belajar (PINTAR). Target: 3 orang pasca tugas belajar. 1. Implementation of Study Leave/ Master's Scholarship Program for employees aligned with the company's strategic needs. Target: 3 employees pursuing master's studies. 2. Implementation of the Post-Study Program (PINTAR). Target: 3 employees post-study.
	Sustainability Peningkatan budaya belajar karyawan melalui pemberian wewenang dalam memilih pengembangan secara mandiri sesuai budget dan preferensi media belajar. Promotion of a learning culture among employees by granting authority to select self-directed development activities within budget and preferred learning media.	Pemberian apresiasi di bidang pembelajaran bagi karyawan dalam bentuk award atau penghargaan lainnya (Contoh: LEAP, dan apresiasi lainnya). Target: 3 jenis award atau penghargaan. Recognition for employees in the learning field through awards or other recognitions (e.g., LEAP, and other awards). Target: 3 award types.
	Cost Leadership Implementasi dan optimalisasi penerapan <i>knowledge management</i>. Implementation and optimization of knowledge management practices.	1. Pengelolaan dan pengembangan program <i>Subject Matter Expert</i> (SME) dan atau Instruktur Internal melalui kegiatan sertifikasi keahlian / kompetensi dan pelatihan terkait pembuatan atau penyampaian materi. Target: a. Pembaruan List SME Internal pada triwulan I 2026. b. 2 Kali penyelenggaraan pembelajaran & pengembangan terkait kompetensi sebagai SME dan/atau instruktur internal 2. Peningkatan proses akuisisi dan transfer pengetahuan melalui kegiatan <i>sharing knowledge</i>, forum manajemen, <i>community of practice</i>, <i>benchmarking</i>, dll. Target: Forum manajemen & <i>sharing knowledge</i> 6 Kali dan CoP 24 kali. 1. Management and development of Subject Matter Expert (SME) and/or Internal Instructor programs through certification of skills/competencies and training related to content creation or delivery. Target: a. Update of the internal SME list in Q1 2026. b. Two sessions of learning & development related to competencies as SME and/or internal instructor. 2. Enhance knowledge acquisition and transfer through activities such as knowledge sharing, management forums, communities of practice, benchmarking, etc. Target: 6 management forums & knowledge sharing sessions, and 24 CoP sessions.

Sasaran Target	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Program Kegiatan Activity Program
	Sustainability Penempatan karyawan sesuai dengan hasil asesmen kompetensi dan kebutuhan Perusahaan. Placement of employees in accordance with competency assessments and the company's needs.	1. Identifikasi asesmen kompetensi untuk proses promosi dan suksesi sebanyak 100 orang. Target: Semester 2 2026. 2. Asesmen kompetensi bidang untuk mengidentifikasi gap kompetensi bidang dan kebutuhan pengembangan. Target: Semester 2 2026. 3. Rotasi, mutasi, dan promosi sebanyak 800 karyawan, baik di internal Perusahaan, penugasan ke Pupuk Indonesia, Anper PI Group, maupun Anper serta afiliasi Perusahaan. Target: secara bertahap hingga Semester 2 dan sesuai kebutuhan. 4. Melakukan monitoring terhadap rasio penempatan karyawan pada fungsi core dan supporting. Target: Core : Supporting (65 : 35) atau sesuai arahan Pupuk Indonesia. 5. Proses seleksi dan penetapan <i>talent</i> BOD, eselon I, II, III & IV bersama dengan Pupuk Indonesia. Target: Semester 2 1. Competency assessment identification for promotion and succession processes for 100 employees. Target: Semester 2 2026. 2. Field competency assessment to identify competency gaps and development needs. Target: Semester 2 2026. 3. Rotation, mutation, and promotion of approximately 800 employees within the company, including assignments to Pupuk Indonesia, Anper PI Group, and affiliates. Target: Gradually until Semester 2, based on needs. 4. Monitoring the ratio of employee placement in core and supporting functions. Target: Core : Supporting (65:35) or as per Pupuk Indonesia's directives. 5. Selection and appointment process for BOD, Echelon I, II, III, & IV talent in collaboration with Pupuk Indonesia. Target: Semester 2.
	Sustainability Peningkatan jumlah talenta unggul millennial dan perempuan sesuai ketentuan Pupuk Indonesia. Increase in the number of outstanding millennial and female talents in accordance with Pupuk Indonesia's regulations.	Proses seleksi dan penetapan talent perempuan dan talent millennial/ muda. Target: Semester 2 2026. Selection and appointment process for female talents and millennial/young talents. Target: Semester 2 2026.



Sasaran Target	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Program Kegiatan Activity Program
	Sustainability Peningkatan produktivitas karyawan yang berdampak pada kinerja karyawan. Enhancement of employee productivity to positively impact overall performance.	- Implementasi Pusri Employee Assistance Program (PEAP) dan SI EAP. Target: Semester 2. - Implementasi PI Smart untuk <i>platform</i> operasional SDM di Perusahaan. Target: kontinu dan <i>update</i> fitur sesuai kebutuhan operasional Perusahaan / perbaikan <i>bug</i> - Implementation of the Pusri Employee Assistance Program (PEAP) and SI EAP. Target: Second Semester. - Implementation of PI Smart as the operational HR platform within the Company. Target: Continuous, with feature updates according to the Company's operational requirements and bug fixes.
Tersedianya struktur organisasi yang efektif untuk menjalankan proses bisnis perusahaan sesuai dengan visi, misi, dan strategi perusahaan. Availability of an effective organizational structure to execute the company's business processes in accordance with its vision, mission, and strategy.	Sustainability Penyempurnaan terhadap struktur organisasi secara efektif sesuai kebutuhan perusahaan. Refinement of the organizational structure to ensure effectiveness aligned with the company's needs.	Evaluasi dan penyempurnaan struktur organisasi, tupoksi, dan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) termasuk proyek-proyek lainnya sesuai kebutuhan perusahaan dan sentralisasi PI Group. Target: Semester 2 2026 Evaluation and refinement of organizational structure, job functions, and Job Competency Needs (KKJ), including other projects as required by the company and centralized PI Group. Target: Semester 2 2026.
	Sustainability Perencanaan kebutuhan tenaga kerja (<i>workforce planning</i>) sesuai struktur organisasi. Workforce planning aligned with the organizational structure.	- Perhitungan <i>manpower planning</i> sesuai hasil analisa beban kerja dan kebutuhan penugasan ke PI serta entitas PI Group/afiliasi Perusahaan. Target: Semester 2 2026. - Perencanaan kebutuhan TKNO non borongan (rutin) sesuai dengan perhitungan <i>manpower planning</i> dan mengevaluasi perencanaan jumlah TKNO borongan. Target: Semester 1. - Manpower planning calculation based on workload analysis and assignment needs to PI and PI Group entities/affiliates. Target: Semester 2 2026. - Planning of non-contractual TKNO (routine) needs based on manpower planning calculations, with evaluation of subcontracted TKNO planning. Target: Semester 1.
	Sustainability Mendukung implementasi hasil kajian penyeselarasan sistem <i>grading</i> sesuai arahan pemegang saham. Support for the implementation of grading system alignment studies as per shareholder directives.	Implementasi hasil kajian penyeselarasan sistem <i>grading</i> PI Group sesuai arahan pemegang saham. Target: Sesuai arahan Pupuk Indonesia. Implementation of grading system alignment study results for PI Group as per shareholder directives. Target: As per Pupuk Indonesia's instructions.

Sasaran Target	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Program Kegiatan Activity Program
Tersedianya sistem manajemen kinerja yang sesuai dengan arahan Pupuk Indonesia terkait transformasi SDM. Availability of a performance management system aligned with Pupuk Indonesia's directives concerning HR transformation.	Sustainability Penyusunan KPI Individu sesuai dengan KPI Unit Kerja. Development of individual KPIs in accordance with the KPIs of respective work units.	1. Penyusunan target dan pengisian realisasi KPI Individu dari level BoD-1 (SVP/SPM) sampai dengan pelaksana. Target: Semester 2. 2. Mendorong <i>performance coaching</i> oleh atasan langsung per triwulan terkait realisasi KPI Individu. Target: per Semester. 3. Mendorong pelaksanaan mentoring oleh atasan langsung per bulan terkait IDP. Target: per Semester 1. Development of individual KPI targets and achievement reporting from BoD-1 level (SVP/SPM) to operational staff. Target: Semester 2 2. Encourage performance coaching by direct supervisors quarterly related to individual KPI realization. Target: Per semester. 3. Promote monthly mentoring by direct supervisors regarding Individual Development Plan (IDP). Target: Per semester.
	Sustainability Penilaian 360 berdasarkan kamus kompetensi perilaku 360-degree assessment based on behavioral competency dictionaries.	Penilaian kompetensi perilaku oleh atasan, bawahan dan rekan kerja seluruh karyawan. Target: Semester 2. Behavioral competency assessment by supervisors, subordinates, and colleagues of all employees. Target: Semester 2.
	Sustainability Kalibrasi peringkat kinerja sebagai dasar pembayaran kompensasi & benefit karyawan. Calibration of performance ratings to serve as the basis for employee compensation and benefits.	Penilaian peringkat kinerja berdasarkan capaian KPI Individu serta nilai kompetensi perilaku. Target: Semester 2 2026. Performance rating assessment based on individual KPI achievement and behavioral competency scores. Target: Semester 2 2026.
	Sustainability Penilaian learning agility untuk mengukur kemampuan dan kesiapan untuk belajar dari pengalaman, dan kemudian menerapkan hasil pembelajaran ke dalam pekerjaan. Assessment of learning agility to measure employees' ability and willingness to learn from experiences, and subsequently apply these learnings to their work.	Penilaian <i>learning agility</i> oleh diri sendiri dan atasan. Target: Semester 2 2026. Learning agility assessment by employees themselves and supervisors. Target: Semester 2 2026

TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY

Mengakselerasi kinerja bisnis melalui keunggulan digital dan memperkuat fondasi digital untuk mendukung keunggulan operasional berkelanjutan.

Konsistensi PUSRI melanjutkan proses *improvement* pada sistem Tata Kelola TI membuahkan hasil, yakni kini telah memenuhi target Tingkat Kematangan TI Perusahaan, sesuai arahan Pemegang Saham dan Kementerian BUMN.

Accelerating business performance through digital excellence and strengthening the digital foundation to support sustainable operational excellence

PUSRI's consistency in continuing the improvement process of its IT Governance system has yielded results, as it has now met the Company's IT Maturity Level target, in accordance with the directives of the Shareholder and the Ministry of SOEs.

Pada tahun 2025, fungsi Teknologi Informasi terus memperkuat perannya sebagai enabler bisnis melalui pembangunan fondasi digital yang terintegrasi, andal, dan berkelanjutan guna mendukung kinerja operasional perusahaan.

In 2025, the Information Technology function continued to strengthen its role as a business enabler through the development of an integrated, reliable, and sustainable digital foundation to support the Company's operational performance.

Penguatan tersebut tercermin dari peningkatan tingkat kematangan Teknologi Informasi yang mencapai skor 4.52, sebagai hasil dari implementasi tata kelola TI yang lebih terstruktur dan berorientasi pada nilai bisnis. Dalam mendukung keandalan layanan, perusahaan juga telah mengoperasikan Security Operations Center (SOC) dan Network Operations Center (NOC) guna memastikan pemantauan dan respons yang lebih cepat terhadap potensi gangguan maupun ancaman keamanan siber.

This strengthening was reflected in the improvement of the Information Technology maturity level, which reached a score of 4.52, resulting from the implementation of more structured IT governance oriented toward business value. To support service reliability, the Company has also operated a Security Operations Center (SOC) and a Network Operations Center (NOC) to ensure faster monitoring and response to potential disruptions and cybersecurity threats.

Komitmen terhadap keamanan informasi turut diperkuat melalui pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang telah terdaftar secara resmi pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta pengembangan Disaster Recovery Plan (DRP) untuk menjamin keberlangsungan layanan kritikal perusahaan.

The commitment to information security was further reinforced through the establishment of a Computer Security Incident Response Team (CSIRT), which has been officially registered with the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), as well as through the development of a Disaster Recovery Plan (DRP) to ensure the continuity of the Company's critical services.

Di sisi arsitektur dan pengelolaan data, perusahaan menginisiasi penyusunan Enterprise Architecture (EA) Modeling serta pengembangan single source of truth di lingkungan grup sebagai upaya meningkatkan integrasi sistem dan kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, sentralisasi layanan IT Service Management (ITSM) terus dilakukan mendorong peningkatan efisiensi dan kualitas layanan TI secara menyeluruh.

Tidak hanya pada aspek teknologi, penguatan juga dilakukan pada sisi sumber daya manusia melalui pengembangan digital talent yang telah mencakup 87% karyawan understanding dan 6% karyawan Savvy, sebagai bagian dari upaya membangun budaya digital dan kesiapan organisasi dalam menghadapi dinamika bisnis yang berkelanjutan.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, Teknologi Informasi diharapkan dapat terus mendukung terciptanya operasional yang unggul, aman, dan berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan secara keseluruhan.

PUSRI menyusun tata kelola dan model arsitektur Teknologi Informasi di mana setiap nilai yang dihasilkan dari setiap proses memberikan kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan. Tata kelola dan model ini ditetapkan perusahaan sebagai acuan pengembangan Teknologi Informasi untuk mendukung setiap perubahan bisnis perusahaan ke arah yang lebih baik.

Tata Kelola Teknologi Informasi bertujuan untuk mengontrol penggunaannya dalam memastikan bahwa kinerja teknologi informasi memenuhi dan sesuai dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menyelaraskan teknologi informasi dengan strategi Perusahaan serta realisasi dari keuntungan-keuntungan yang telah dijanjikan dari penerapan teknologi informasi
2. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan perusahaan mengambil peluang-peluang yang ada, serta memaksimalkan pemanfaatan IT dalam memaksimalkan keuntungan dari penerapan IT tersebut.
3. Bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya IT.
4. Manajemen risiko-risiko yang ada terkait teknologi informasi secara tepat.

In terms of architecture and data management, the Company initiated the preparation of Enterprise Architecture (EA) Modeling and the development of a single source of truth across the group environment as an effort to improve system integration and the quality of data-driven decision-making. In addition, the centralization of IT Service Management (ITSM) services has continued to improve efficiency and the overall quality of IT services.

Strengthening efforts were not limited to technology. Human resource development was also enhanced through the development of digital talent, with 87% of employees reaching the understanding level and 6% reaching the savvy level, as part of efforts to build a digital culture and organizational readiness in responding to ongoing business dynamics.

Through these various initiatives, Information Technology is expected to continue supporting the creation of superior, secure, and sustainable operations while delivering added value to the Company as a whole.

PUSRI develops an Information Technology governance framework and architecture model in which every value generated from each process contributes to the decision-making process. This governance framework and model are established by the Company as references for the development of Information Technology to support every business transformation toward better performance.

Information Technology Governance aims to control its utilization to ensure that IT performance meets and aligns with the following objectives:

1. Align Information Technology with the Company's strategy and realize the benefits promised from the implementation of Information Technology.
2. Enable the Company to seize opportunities through the use of Information Technology and maximize IT utilization to optimize the benefits of its implementation.
3. Ensure accountability in the use of IT resources.
4. Manage risks related to Information Technology appropriately.

KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY POLICY AND GOVERNANCE

Pengelolaan TI yang andal harus ditunjang dengan struktur dan fungsi yang jelas. Bidang Teknologi Informasi mengelola sistem teknologi informasi di Perusahaan dalam rangka mendukung pencapaian strategis bisnis PSP sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 083/A/HK/P30/SK/2023 pada tanggal 28 April 2023 tentang Struktur Organisasi Direktorat Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero), yang menjelaskan perihal struktur organisasi, jabatan, dan tugas pokok di Kompartemen Teknologi Informasi PT Pupuk Indonesia (Persero).

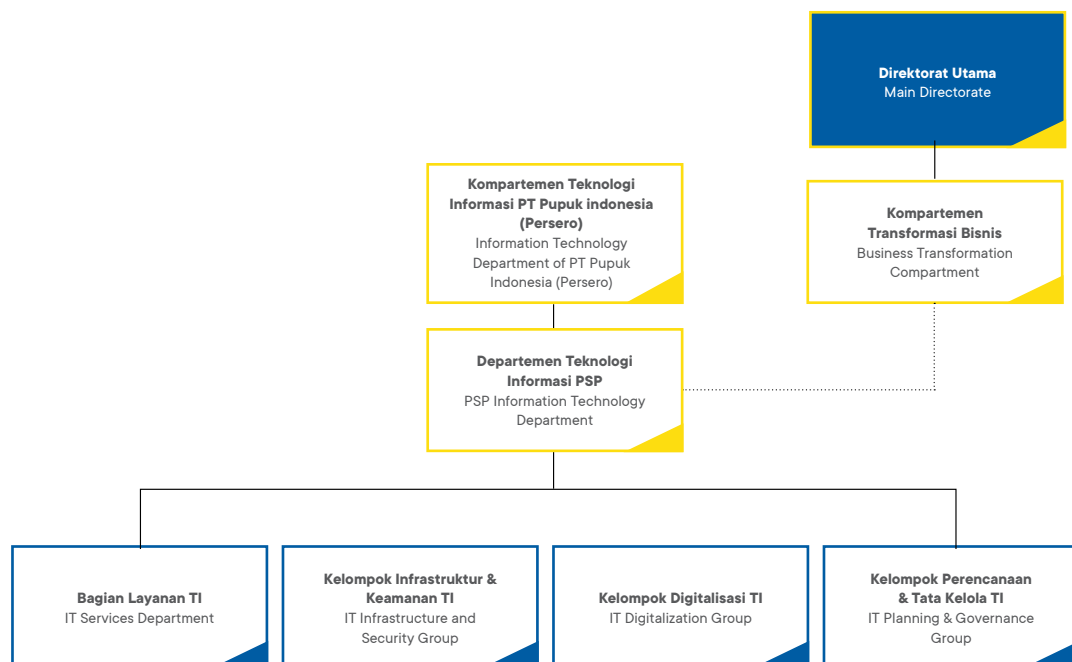
Reliable IT management must be supported by a clear structure and functions. The Information Technology Division manages the Company's information technology systems to support the achievement of PSP's business strategic objectives, as stated in the Board of Directors Decree of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 083/A/HK/P30/SK/2023 dated April 28, 2023 regarding the Organizational Structure of the Business Transformation Directorate of PT Pupuk Indonesia (Persero), which explains the organizational structure, positions, and main duties within the Information Technology Compartment of PT Pupuk Indonesia (Persero).

Pada tanggal 18 Desember 2023 sesuai SK/DIR/474/2023 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi di Lingkungan Kompartemen Transformasi Bisnis Direktorat Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, di mana organisasi TI menjadi Departemen Teknologi Informasi PSP dan memiliki garis koordinasi pekerjaan dengan Kompartemen Transformasi Bisnis.

On December 18, 2023, based on SK/DIR/474/2023 concerning the Improvement of the Organizational Structure within the Business Transformation Compartment of the President Director Directorate of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, the IT organization was established as the Information Technology Department of PSP and has a work coordination line with the Business Transformation Compartment.

Bagan Organisasi Departemen Teknologi Informasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Information and Technology Department Organization Chart of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang



Departemen Teknologi Informasi PSP dikepalai oleh VP Teknologi Informasi PSP, dengan tanggung jawab utama sebagai berikut:

1. Menjadi *point of contact* untuk kebutuhan teknologi informasi di PUSRI.
2. Mendefinisikan, menyusun, dan mengelola *business requirement* pengembangan TI berdasarkan masukan dari fungsi bisnis di PUSRI.
3. Melaksanakan, memonitor dan memastikan keberlangsungan operasional layanan TI dan membantu menyelesaikan isu *user group* di PUSRI.
4. Melakukan pengembangan solusi TI untuk kebutuhan PI Grup (pengembangan bersama) dan pengembangan yang terkait inovasi di PUSRI.
5. Mendukung dan memastikan keberhasilan implementasi sistem aplikasi, baik aplikasi terpusat, aplikasi bersama, maupun aplikasi spesifik anak perusahaan yang diimplementasikan di anak perusahaan.
6. Memberikan usulan anggaran dan investasi RKAP TI, pengelolaan operasional anggaran dan aset TI termasuk administrasi pengadaannya.
7. Bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap, inventaris dan peralatan kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya sehingga tetap terjaga dengan baik.
8. Bertanggung jawab terhadap pembinaan dan peningkatan kompetensi dan kemampuan serta sikap kerja karyawan di unit kerjanya berdasarkan peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan *job description* sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas.
9. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sistem Manajemen Risiko, Kepatuhan Anti Penyuapan, GCG (*Good Corporate Governance*), TQM (*Total Quality Management*), dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) di area unit kerjanya untuk mencapai standar K3 dan standar mutu dalam rangka melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
10. Melakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan melalui penerapan teknologi informasi dan berperan aktif menerapkan sistem manajemen keamanan informasi.

The PSP Information Technology Department is headed by the VP of Information Technology PSP, with the following main responsibilities:

1. Serve as the point of contact for information technology needs at PUSRI.
2. Define, formulate, and manage business requirements for IT development based on input from business functions at PUSRI.
3. Implement, monitor, and ensure the continuity of IT service operations and assist in resolving issues faced by user groups at PUSRI.
4. Develop IT solutions for PI Group needs (joint development) and developments related to innovation at PUSRI.
5. Support and ensure the successful implementation of application systems, including centralized applications, shared applications, and subsidiary-specific applications implemented in subsidiaries.
6. Propose IT RKAP budget and investment plans, manage operational budgets and IT assets including procurement administration.
7. Be responsible for managing fixed assets, inventory, and work equipment under their responsibility to ensure they are properly maintained.
8. Be responsible for fostering and improving the competencies, capabilities, and work attitudes of employees in the unit based on Company regulations, the Collective Labor Agreement (PKB), and job descriptions to produce quality HC.
9. Actively participate in the implementation of the Occupational Health and Safety Management System (OHS), Risk Management System, Anti-Bribery Compliance, GCG (*Good Corporate Governance*), TQM (*Total Quality Management*), and CSR (*Corporate Social Responsibility*) within the work unit area to achieve OHS standards and quality standards as part of continuous improvement.
10. Carry out continuous improvement efforts through the application of information technology and actively implement the information security management system.

TATA KELOLA IT PUSRI

IT GOVERNANCE OF PUSRI



Tata kelola IT PUSRI dilaksanakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Membuat kerangka kerja IT yang sejalan dengan tata kelola perusahaan. Ini dilakukan dengan menjaga keselarasan antara tata kelola IT dengan peraturan dan regulasi yang ada.
2. Membangun pemahaman Pengelola Perusahaan agar memahami pentingnya masalah-masalah strategis IT. Ini dilakukan dengan memperkenalkan potensi-potensi yang dimiliki IT untuk berkontribusi bagi kemajuan perusahaan.
3. Membuat pencapaian kinerja dan nilai tambah yang maksimum. Pengelola IT harus mampu menyediakan nilai tambah maksimum bagi proses bisnis perusahaan dan meyakinkan bahwa usaha yang maksimum telah dilakukan untuk memungkinkan hal tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang tertib pada manajemen proyek dan program kerja yang baik.

PUSRI's IT governance is implemented for the following objectives:

1. Establish an IT framework that aligns with corporate governance. This is achieved by maintaining alignment between IT governance and applicable regulations and policies.
2. Build awareness among Company management regarding the importance of strategic IT issues. This is achieved by introducing IT's potential contributions to the Company's advancement.
3. Achieve maximum performance and value creation. IT management must be able to provide maximum added value to the Company's business processes and ensure that optimal efforts have been made to enable this. This can be achieved through structured approaches to project management and well-organized work programs.

4. Membuat manajemen sumber daya dan manajemen risiko yang baik. Pengelola IT harus dapat melakukan alokasi sumber daya yang baik dan manajemen risiko yang memperhitungkan risiko dalam menjalankan fungsi-fungsi IT. Ini dapat dicapai dengan bantuan *Risk Officer*.

Dari sisi infrastruktur dan aplikasi, PUSRI berfokus untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan sistem yang diharapkan dapat mendorong efisiensi dan optimalisasi proses bisnis yang dijalankan. Seiring hal itu, PUSRI juga konsisten melanjutkan proses *improvement* pada sistem Tata Kelola TI hingga memenuhi target Tingkat Kematangan TI PUSRI, sesuai arahan Pemegang Saham dan Kementerian BUMN.

Terkait hal tersebut, PUSRI dan Pupuk Indonesia telah melaksanakan *Business Impact Analysis Disaster Recovery Plan* dengan tujuan untuk mengidentifikasi proses yang penting, menganalisis persyaratan pemulihan proses bisnis, menganalisis persyaratan pemulihan teknologi informasi, serta menentukan prioritas sumber daya teknologi informasi yang penting, jika suatu bencana terjadi.

Pada bulan Desember tahun 2024 telah dilakukan asesmen tingkat kematangan tata kelola TI (*IT Maturity Level*) yang dilaksanakan oleh pihak eksternal melalui PT Pupuk Indonesia (Persero). *Assessment IT Maturity* dilakukan dengan menggunakan *framework* COBIT 2019 terhadap 16 proses yang dinilai dengan mencatat skor maturitas 4,00 dari 5,00. Sepanjang tahun 2024, PUSRI telah melakukan pemenuhan terhadap 100% dari total *room of improvement* yang ditemukan. Pemenuhan dilakukan meliputi perbaikan proses dan Tata Kelola TI, selain itu terkait kebijakan manajemen keamanan informasi PUSRI telah disusun berdasarkan standar internasional ISO 27001:2022 - Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan pengukuran *cyber security* sedang melakukan penilaian *Cyber Security Maturity* (CSM) oleh BSSN.

4. Ensure effective resource management and risk management. IT management must be able to allocate resources efficiently and manage risks associated with IT functions. This can be supported with the assistance of a Risk Officer.

From the infrastructure and application perspective, PUSRI continues to focus on innovation and system development to support efficiency and optimize business processes. In line with this, PUSRI consistently continued improvements to its IT Governance system until it met the PUSRI IT Maturity Level target, in accordance with the directives of the Shareholder and the Ministry of SOEs.

In relation to this, PUSRI and Pupuk Indonesia have implemented a Business Impact Analysis Disaster Recovery Plan aimed at identifying critical processes, analyzing business process recovery requirements, analyzing information technology recovery requirements, and determining the priority of critical information technology resources in the event of a disaster.

In December 2024, an IT Governance Maturity Level assessment was conducted by an external party through PT Pupuk Indonesia (Persero). The IT Maturity assessment was conducted using the COBIT 2019 framework across 16 evaluated processes, recording a maturity score of 4.00 out of 5.00. Throughout 2024, PUSRI fulfilled 100% of the total room for improvement identified. The fulfillment included improvements in IT processes and governance. In addition, PUSRI's information security management policy has been developed based on the international standard ISO 27001:2022 Information Security Management System (ISMS), and cyber security measurement is currently undergoing Cyber Security Maturity (CSM) assessment by BSSN.

PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 2025

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT PROGRAM 2025

Dalam rangka mendukung kelancaran proses bisnis perusahaan, PUSRI terus mengembangkan aplikasi dan perangkat teknologi informasi, pengembangan yang dilakukan di antaranya:

To support the smooth operation of the Company's business processes, PUSRI continues to develop information technology applications and infrastructure. The developments carried out include:

Tabel Pengembangan dan Inovasi TI pada Tahun 2025

Table of IT Development and Innovation in 2025

No.	Program Kegiatan Program
1	• Pengembangan Plant Maintenance System • Pengembangan Smart Production • Pengembangan Sistem K3 Terintegrasi • Peningkatan Sistem Manajemen Kearsipan & Dokumen • Pengembangan Enterprise Analytic Platform • Implementasi Single Source of Truth • Peningkatan kapasitas & efektivitas storage • Regenerasi Server Operating System • Regenerasi Infrastruktur jaringan • Pembentukan tim Security Operation Center (SOC) • Pembentukan tim Network Operation Center (NOC) • Pembentukan Tim Computer Security Incident Response (CSIRT) • Penyusunan Kebijakan Kepatuhan Terhadap Pelindungan Data Pribadi (PDP) • Peningkatan IT Service Management & Penggunaan ITSM Tools • Pemutakhiran Disaster Recovery Plan (DRP) • Peningkatan IT Maturity Level • Pembuatan Enterprise Architecture (EA) Modelling • Sertifikasi 2nd Surveillance ISO27001
2	Penambahan kapasitas server development & peningkatan keandalan infrastruktur data center. Increase the capacity of development servers and improve the reliability of data center infrastructure.
3	Managed service cyber security & penambahan tool monitoring security system. Managed cyber security services and the addition of security system monitoring tools.
4	Revitalisasi infrastruktur jalur FO gedung utama & kantor pusat dalam rangka peningkatan kualitas jaringan perusahaan. Revitalization of the FO network infrastructure in the main building and head office to improve the quality of the Company's network.
5	Peningkatan kapasitas LAN serta wireless network dalam rangka peningkatan keandalan jaringan perusahaan. Increase the capacity of the LAN and wireless network to improve the reliability of the Company's network.

SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY CERTIFICATION

Teknologi Informasi PUSRI memiliki beberapa sertifikasi, antara lain:

1. EDRP (Ec Council Disaster Recovery Professional), 2 orang karyawan
2. ITIL (Information Technology Infrastructure Library), 1 orang karyawan
3. CND, Certified Network Defender, 1 orang karyawan

PUSRI Information Technology personnel hold several certifications, including:

1. EDRP (EC-Council Disaster Recovery Professional), 2 employees
2. ITIL (Information Technology Infrastructure Library), 1 employee
3. CND (Certified Network Defender), 1 employee

INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT

Pusri secara konsisten berinvestasi di bidang Teknologi Informasi khususnya pada penguatan infrastruktur TI dan keamanan siber. Investasi ini berperan dalam memperkuat model bisnis Perusahaan, mendukung kelancaran operasional serta menjadi bagian dari komitmen Pusri dalam menjaga keberlanjutan usaha.

PUSRI consistently invests in Information Technology, particularly in strengthening IT infrastructure and cybersecurity. These investments play a role in strengthening the Company's business model, supporting operational continuity, and forming part of PUSRI's commitment to maintaining business sustainability.

Berikut adalah uraiannya sepanjang tahun 2025.

The following is a description of these investments throughout 2025.

No.	Akun Account	Item Investasi Investment Item
1	Perlengkapan & Peralatan Supplies & Equipment	END POINT CENTRAL
2	Perlengkapan & Peralatan Supplies & Equipment	NETWORK ACCESS CONTROL
3	Perlengkapan & Peralatan Supplies & Equipment	PCCOMP SWITCH MANAGEABLE
4	Perlengkapan & Peralatan Supplies & Equipment	PCCOMP LAPTOP
5	Perlengkapan & Peralatan Supplies & Equipment	PCCOMP SERVER BACKUP
6	Perlengkapan & Peralatan Supplies & Equipment	PCCOMP SERVER EMAIL

Tabel Investasi Teknologi Informasi PUSRI, 2024-2025

Table of PUSRI Information Technology Investment, 2024-2025

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Persentase (%) Percentage
Investasi Rutin (Capex) Routine Investments (Capex)	4.440.713.660	4.082.727.800	357.985.860	8,77
Biaya Rutin (Opex) Routine Costs (Opex)	27.722.169.850	21.248.580.613	6.473.589.237	30,47

RENCANA KERJA DEPARTEMEN TEKNOLOGI INFORMASI PSP TAHUN 2025

WORK PLAN OF THE PSP INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT FOR 2025

Pupuk Sriwidjaja Palembang telah melakukan penyusunan Rencana Strategis TI (RSTI) periode 2025 - 2029 yang selaras dengan Rencana Strategis TI (RSTI) Pupuk Indonesia Group 2025 - 2029. Program Kerja tahun 2026 telah direncanakan dengan mengacu pada RSTI tersebut.

Pupuk Sriwidjaja Palembang has prepared the Information Technology Strategic Plan (RSTI) for the 2025–2029 period, which is aligned with the Information Technology Strategic Plan (RSTI) of the Pupuk Indonesia Group for 2025–2029. The 2026 Work Program has been planned with reference to the RSTI.

Adapun program kerja strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut ini.

The strategic work programs for 2025 are as follows.

No.	Program Kegiatan Program
1	Pengembangan Plant Maintenance System Development of the Plant Maintenance System
2	Pengembangan Smart Production Development of Smart Production
3	Pengembangan Sistem K3 Terintegrasi Development of an Integrated OHS System
4	Peningkatan Sistem Manajemen Kearsipan & Dokumen Enhancement of the Records and Document Management System
5	Enterprise Analytic Platform
6	Peningkatan Data Governance Improvements in Data Governance
7	Implementasi Data Loss Prevention (DLP) Implementation of Data Loss Prevention (DLP)
8	Implementasi Multi Factor Authentication (MFA)
9	Implementasi Database Encryption Implementation of Database Encryption
10	Implementasi Privilage Access Management (PAM)
11	Penyediaan Contact Center untuk Pengaduan Pelindungan Data Pribadi Establishment of a Contact Centre for Personal Data Protection Complaints
12	Sertifikasi ISO27001 ISO 27001 Certification
13	Peningkatan Keamanan Siber melalui implementasi SOC Enhancing Cyber Security through the implementation of a SOC
14	Digitalisasi dan SSOT di area operasi dan produksi melalui portal2 Digitalisation and SSOT in operations and production via portals





06

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE



“Di tahun 2025 PUSRI secara proaktif meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan agar sejalan dengan tren yang sedang berkembang dan perubahan regulasi di Indonesia. Meyakini pentingnya praktik tata kelola yang kuat, PUSRI memperkuat kepatuhan terhadap regulasi dengan menerapkan kontrol internal yang lebih ketat dan meningkatkan transparansi dalam operasinya. PUSRI juga semakin meningkatkan kualitas penerapan praktik terbaik tata kelola dengan memperkuat manajemen risiko, dan mulai memasukan pemantauan dan mitigasi perubahan iklim dalam pengelolaan risiko terintegrasinya”.

In 2025, PUSRI proactively improved the quality of its corporate governance implementation to align with emerging trends and regulatory changes in Indonesia. Recognizing the importance of strong governance practices, PUSRI strengthened regulatory compliance by implementing stricter internal controls and enhancing transparency in its operations. PUSRI also further improved the quality of its governance best practices by strengthening risk management and began incorporating climate change monitoring and mitigation into its integrated risk management framework.

Bagi PUSRI penerapan praktik terbaik GCG bukanlah semata memenuhi peraturan yang berlaku, tapi merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pertumbuhan usaha yang optimal dan berkelanjutan. Penerapan praktik terbaik GCG juga merupakan bagian dari upaya PUSRI dalam mendukung pertumbuhan perekonomian, membangun dan meningkatkan ketahanan pangan serta berkontribusi maksimal bagi pembangunan bangsa.

PUSRI meyakini pentingnya penerapan praktik terbaik prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dan sarana bagi pencapaian visi, misi dan tujuan Perusahaan. PUSRI juga meyakini penerapan praktik terbaik prinsip-prinsip GCG akan mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Penerapan praktik terbaik GCG juga menjadi bagian penting bagi terciptanya pertumbuhan dan stabilitas skala usaha yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penerapan praktik terbaik prinsip-prinsip GCG merupakan salah satu faktor penting bagi PUSRI dalam menjalankan aktivitasnya dan mewujudkan visi serta misinya. Hal ini diwujudkan dengan menjalankan kegiatan produksi serta memberikan layanan dengan integritas tinggi disertai sikap profesional sebagai bagian Budaya Perusahaan yang senantiasa dijaga oleh seluruh insan PUSRI

Prinsip-prinsip GCG terus berkembang seiring dengan dinamisnya pertumbuhan lingkungan bisnis maupun ekosistem dunia usaha. Oleh karenanya PUSRI Bertekad untuk terus memperbaiki kualitas penerapan praktik terbaik prinsip-prinsip GCG, selain berupaya mengikuti perkembangan terakhir kaidah prinsip-prinsip GCG yang telah disuarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi, sebagai lembaga nasional yang melakukan tugas kajian mengenai perkembangan praktik tata kelola perusahaan terkini baik di tatanan nasional maupun global.

For PUSRI, the implementation of GCG best practices is not merely about complying with applicable regulations, but constitutes a vital component in achieving optimal and sustainable business growth. The implementation of GCG best practices is also part of PUSRI's efforts to support economic growth, build and enhance food security, and contribute maximally to national development.

PUSRI believes in the importance of implementing GCG best practice principles as the foundation and means to achieve the Company's vision, mission, and objectives. PUSRI further believes that implementing GCG best practice principles will encourage fair competition and foster a conducive business climate. The implementation of GCG best practices also plays an essential role in ensuring high-quality and sustainable business growth and stability.

The implementation of GCG best practice principles is one of the key factors enabling PUSRI to carry out its activities and realize its vision and mission. This is reflected in conducting production activities and delivering services with high integrity and professionalism as part of the Company's Culture, consistently upheld by all PUSRI personnel.

GCG principles continue to evolve in line with the dynamic growth of the business environment and corporate ecosystem. Therefore, PUSRI is committed to continuously improving the quality of its implementation of GCG best practice principles, while also keeping pace with the latest developments in GCG standards as advocated by the National Committee on Governance Policy, a national body tasked with studying the latest developments in corporate governance practices at both national and global levels.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

OBJECTIVES OF IMPLEMENTING GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PUSRI menerapkan praktik terbaik prinsip-prinsip GCG yang terintegrasi dengan pengelolaan operasional, manajemen risiko, dan pengendalian internal guna meraih berbagai manfaat dari penerapan praktik terbaik GCG tersebut, antara lain:

1. Memaksimalkan nilai PUSRI agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan tumbuh berkualitas secara berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan;
2. Mendorong terlaksananya pengelolaan PUSRI secara profesional dan mandiri;
3. Mendorong terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ Perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan sekitar;
4. Meningkatkan kontribusi PUSRI dalam perekonomian nasional khususnya bagi berkembangnya ketahanan pangan;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional khususnya di industri Pupuk.

PUSRI implements GCG best practice principles integrated with operational management, risk management, and internal control in order to obtain various benefits from such implementation, including:

1. Maximizing PUSRI's value to ensure strong competitiveness, both nationally and internationally, thereby enabling the Company to sustain its existence and grow sustainably with quality to achieve its purpose and objectives;
2. Encouraging professional and independent management of PUSRI;
3. Promoting decision-making by all Company organs based on high moral values and compliance with applicable laws and regulations, accompanied by awareness of the Company's social responsibility toward stakeholders and environmental sustainability;
4. Increasing PUSRI's contribution to the national economy, particularly in supporting the development of food security;
5. Creating a conducive climate for the development of national investment, particularly in the fertilizer industry.

DASAR HUKUM, LANDASAN, DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN GCG DASAR HUKUM

LEGAL BASIS, FOUNDATION, AND SCOPE OF GCG POLICY LEGAL BASIS

Berbagai ketentuan perundangan, peraturan maupun pedoman praktik nasional yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penerapan praktik terbaik GCG PUSRI, adalah:

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-2/MBU/03/2023 tentang pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi signifikan Badan Usaha Milik Negara

Various laws, regulations, and national practice guidelines forming the legal basis for the implementation of GCG best practices at PUSRI include:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended by Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation, which has been enacted into law under Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation as Law.
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara. 4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-05/MBU/2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Usaha Milik Negara, dengan perubahan terakhirnya yaitu No.PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012. 5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. 6. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara. 7. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.	3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2006 concerning Audit Committees for State-Owned Enterprises. 4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2008 concerning Procurement of Goods and Services in State-Owned Enterprises, as last amended by No. PER-15/MBU/2012 dated September 25, 2012. 5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises. 6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises. 7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises.

Ketentuan lain yang menjadi acuan pelaksanaan praktik-praktik terbaik GCG PUSRI:

1. Ketentuan umum dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
2. *Principles of Corporate Governance oleh Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD).*
3. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI).

LANDASAN PENERAPAN GCG PUSRI

Sebagai pedoman operasional penerapan praktik terbaik GCG, PUSRI kemudian membuat berbagai kebijakan dan pedoman yang mengatur perilaku, fungsi, dan tugas seluruh organ tata kelola dalam melaksanakan GCG di internal Perusahaan dengan mengacu pada berbagai dasar hukum pelaksanaan praktik terbaik GCG tersebut, mencakup:

1. Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Kode Etik.
3. Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual).
4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik.
5. Piagam Komite Audit.
6. Piagam Komite Investasi & Manajemen Risiko
7. Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan
8. Kebijakan Manajemen Anti Penyuapan (Bribery).

Other references guiding the implementation of GCG best practices at PUSRI:

1. General provisions issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG);
2. Principles of Corporate Governance by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD);
3. Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI).

FOUNDATION FOR IMPLEMENTING GCG AT PUSRI

As operational guidelines for implementing GCG best practices, PUSRI has established various policies and guidelines governing the conduct, functions, and duties of all governance organs in implementing GCG internally, referring to the above legal bases, including:

1. Articles of Association.
2. Code of Ethics.
3. Board Manual for the Board of Commissioners and Board of Directors.
4. Good Corporate Governance Guidelines.
5. Audit Committee Charter.
6. Investment and Risk Management Committee Charter
7. Corporate Risk Management Policy
8. Anti-Bribery Management Policy

9. Pedoman Sistem Pengendalian Fraud (Fraud Control System) Nomor: SK/DIR/463/2024 tanggal 17 Oktober 2024. 10. Pemberlakuan Pedoman dan Prosedur PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait Fungsi Tata Kelola & Kepatuhan No. SK/DIR/227/2022 tanggal 20 Juni 2022 11. Pedoman Pelaporan Kekayaan Pejabat (LHKPN) Nomor: SK/DIR/467/2024 tanggal 22 Oktober 2024. 12. Pedoman Penandatanganan Pakta Integritas PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK/ DIR/035/2023 tanggal 27 Februari 2023 13. Pemberlakuan Pedoman PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor PI-SEK-PD-006 Revisi 2 Pengukuran Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT Pusri Palembang No. SK/ DIR/387/2023 tanggal 26 Oktober 2023. 14. Pemberlakuan Pedoman PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing Management System) di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK/ DIR/422/2023 tanggal 02 November 2023. 15. Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor SK/DIR/222/2025 tanggal 28 Juli 2025	9. Fraud Control System Guidelines No. SK/ DIR/463/2024 dated October 17, 2024. 10. Implementation of PT Pupuk Indonesia (Persero) Guidelines related to Governance & Compliance Function No. SK/DIR/227/2022 dated June 20, 2022. 11. State Officials' Wealth Report (LHKPN) Guidelines No. SK/DIR/467/2024 dated October 22, 2024. 12. Integrity Pact Signing Guidelines of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK/DIR/035/2023 dated February 27, 2023. 13. Implementation of PT Pupuk Indonesia (Persero) Guidelines No. PI-SEK-PD-006 Revision 2 on Measurement of Good Corporate Governance Implementation at PT Pusri Palembang No. SK/ DIR/387/2023 dated October 26, 2023. 14. Implementation of PT Pupuk Indonesia (Persero) Guidelines related to Whistleblowing Management System at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK/ DIR/422/2023 dated November 2, 2023. 15. Guidelines for Gratification Control at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Number SK/DIR/222/2025 dated July 28, 2025

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Ruang lingkup kebijakan GCG tersebut adalah untuk memberikan arahan kepada segenap jajaran Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis Perusahaan. Beberapa hal yang diatur dalam kebijakan ini meliputi:

1. Hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham;
2. Fungsi serta peran Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Hubungan antara Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan seperti karyawan, pemasok serta masyarakat; dan
4. Prinsip-prinsip mengenai kebijakan Perusahaan seperti kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, Manajemen Strategis Perusahaan, serta prinsip-prinsip kebijakan Perusahaan lainnya.

SCOPE OF CORPORATE GOVERNANCE POLICY

The scope of this GCG policy is to provide direction to all levels of the Company in conducting its business activities. Matters governed by this policy include:

1. The relationship between the Company and Shareholders;
2. The functions and roles of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
3. The relationship between the Company and Stakeholders such as employees, suppliers, and the community; and
4. Principles regarding Company policies such as Supervision and Internal Control, Risk Management, Corporate Strategic Management, and other Company policy principles.

STRUKTUR TATA KELOLA

GOVERNANCE STRUCTURE

Sesuai dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 Bab I yang kini telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar.
2. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

PUSRI telah memiliki Struktur Tata Kelola yang lengkap khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Dalam pelaksanaannya, PUSRI memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan *soft structure* GCG. Tujuan membangun *soft structure* GCG, antara lain adalah:

1. Melengkapi kebijakan pendukung dalam penerapan GCG
2. Menjadi pedoman bagi PUSRI dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan budaya (*corporate culture*) yang diharapkan
3. Merupakan bentuk komitmen tertulis bagi seluruh jajaran dan tingkatan organisasi PUSRI dalam rangka meningkatkan disiplin dan tanggung jawab organ Perusahaan dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

In accordance with Law No. 40 of 2007 Chapter I, which has been updated by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation as Law, regarding General Provisions Article 1, Company organs consist of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the Board of Commissioners.

1. The General Meeting of Shareholders (GMS) is a Company organ with authority not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits stipulated by law and/or the Articles of Association.
2. The Board of Directors is the Company organ authorized and fully responsible for managing the Company in the interest of the Company, in accordance with its purpose and objectives, and representing the Company both inside and outside court in accordance with the Articles of Association.
3. The Board of Commissioners is the Company organ tasked with conducting general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors.

PUSRI has established a complete Governance Structure, particularly in implementing GCG principles. In practice, PUSRI adopts various policies and guidelines in carrying out its functions and duties, referred to as the GCG soft structure. The objectives of establishing the GCG soft structure include:

1. Complementing supporting policies in implementing GCG;
2. Serving as guidelines for PUSRI in conducting daily activities in accordance with the expected corporate culture;
3. Representing a written commitment for all levels and organizational tiers of PUSRI to enhance discipline and responsibility of Company organs in safeguarding stakeholders' interests in accordance with their respective responsibilities.

SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DI TAHUN 2025

DISSEMINATION OF CORPORATE GOVERNANCE POLICIES IN 2025

PUSRI melakukan kegiatan sosialisasi GCG dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi GCG, *soft structure* dan Infrastruktur GCG, pelaporan *Whistleblowing System*, pencegahan dan pengendalian Gratifikasi serta pelaporan LHKPN.

PUSRI conducts GCG dissemination activities aimed at providing in-depth understanding of GCG implementation, GCG soft structure and infrastructure, Whistleblowing System reporting, prevention and control of gratification, and LHKPN reporting.

Sosialisasi atas komitmen penerapan GCG dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

Dissemination of the commitment to GCG implementation is carried out through several activities as follows:

1. Sosialisasi terkait pengendalian Gratifikasi melalui rangkaian *training*, *social media* Perusahaan, surat DOF, dan *sharing knowledge* dengan pemateri dari KPK RI melalui acara Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA).
2. Sosialisasi mengenai LHKPN dilakukan oleh Departemen Tata Kelola sebagai unit kerja Pengelola LHKPN Perusahaan, sosialisasi dilakukan kepada seluruh Pejabat Wajib Laport LHKPN melalui surat DOF, PA System, dan melakukan asistensi e-LHKPN untuk seluruh wajib laport.
3. Sosialisasi tentang kebijakan dan aturan Perusahaan terkait *Whistleblowing System* melalui *banner* IAM Pusri, materi *fraud* dan pelaporannya pada *training* ERM *Fundamental*, Internalisasi WBS Terintegrasi Pupuk Indonesia Group, dan penayangan video sosialisasi WBS pada kegiatan rapat Perusahaan.
4. Sosialisasi kebijakan dan himbauan terkait penandatanganan pakta integritas *online* yang dilakukan melalui surat DOF, jaringan email internal, *website* Perusahaan, dan PA System.
5. Sosialisasi Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan yang dilaksanakan dalam kegiatan Forum Manajemen Bersama Kajati Sumsel dengan tema Mitigasi Tindak Pidana Korupsi di Perusahaan Negara dan *sharing knowledge* dengan pemateri dari KPK RI melalui acara Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA).
6. Pelaksanaan Audit *Surveillance* Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 dengan perluasan ruang lingkup seluruh unit kerja oleh lembaga Sertifikasi TUV Nord Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 20–22 Oktober 2025.
1. Dissemination related to gratification control through training programs, Company social media, DOF letters, and knowledge sharing sessions with speakers from the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia during World Anti-Corruption Day (HAKORDIA).
2. Dissemination regarding LHKPN conducted by the Governance Department as the Company's LHKPN management unit, addressed to all officials required to submit LHKPN reports through DOF letters, the PA System, and assistance for all mandatory reporters via the e-LHKPN system.
3. Dissemination of Company policies and regulations related to the Whistleblowing System through IAM Pusri banners, fraud and reporting materials in ERM Fundamental training, internalization of the Integrated WBS of Pupuk Indonesia Group, and screening of WBS dissemination videos during Company meetings.
4. Dissemination of policies and appeals related to online integrity pact signing through DOF letters, internal email networks, the Company website, and the PA System.
5. Dissemination of the Conflict of Interest Handling Policy conducted during the Joint Management Forum with the South Sumatra High Prosecutor's Office on the theme of Mitigation of Corruption Crimes in State-Owned Enterprises and knowledge sharing sessions with speakers from the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia during World Anti-Corruption Day (HAKORDIA).
6. Implementation of the Surveillance Audit of the Anti-Bribery Management System (SMAP) SNI ISO 37001:2016 with expanded scope covering all work units by the certification body TUV Nord Indonesia, held on October 20–22, 2025.

PENERAPAN PRINSIP GCG SECARA BERKELANJUTAN

CONTINUOUS IMPLEMENTATION OF GCG PRINCIPLES

Penerapan prinsip GCG dilakukan oleh seluruh Organ Pusri secara terus-menerus, terarah, dan ditetapkan. Inisiatif ini direalisasikan agar dapat meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkungan Pusri. Siklus penerapan GCG secara berkelanjutan tercermin dalam bagan berikut:

The implementation of GCG principles is carried out by all Pusri Organs on an ongoing, systematic, and structured basis. This initiative is undertaken to improve the quality of GCG implementation throughout the Pusri environment. The cycle of continuous GCG implementation is illustrated in the following diagram:



Siklus peningkatan kualitas implementasi penerapan GCG, meliputi sebagai berikut:

1. Penetapan standar kualitas penerapan GCG melalui penetapan soft structure Tata Kelola Perusahaan, penetapan Dokumen Sistem Manajemen (DSM) Pusri.
2. Implementasi GCG, berupa praktik-praktik GCG meliputi aspek tata kelola dan aspek kepatuhan oleh seluruh Insan Pusri.
3. Monitoring penerapan GCG, dilakukan secara terus-menerus oleh Dewan Komisaris dalam tupoksinya melakukan pengawasan jalannya kegiatan operasional Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
4. Pengukuran/assessment GCG, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku guna memastikan konsistensi penerapan GCG guna mendukung keberlanjutan usaha Perusahaan.
5. Peningkatan kualitas implementasi GCG dan *benchmarking*, berdasarkan hasil pengukuran GCG diperoleh rekomendasi-rekomendasi perbaikan termasuk berdasarkan *benchmarking* dari perusahaan lain yang kemudian diadopsi oleh Perusahaan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi penerapan GCG di Perusahaan.

The cycle of improving the quality of GCG implementation consists of the following:

1. Establishment of GCG implementation quality standards through the issuance of the Corporate Governance soft structure and the establishment of Pusri's Management System Documents (MSD).
2. GCG implementation, in the form of GCG practices covering governance and compliance aspects carried out by all Pusri personnel.
3. Monitoring of GCG implementation, conducted continuously by the Board of Commissioners as part of its duties and responsibilities in supervising the Company's operational activities carried out by the Board of Directors.
4. GCG measurement/assessment, conducted in accordance with applicable regulations to ensure the consistent implementation of GCG in support of the Company's business sustainability.
5. Improvement of GCG implementation quality and benchmarking, whereby GCG assessment results generate recommendations for improvement, including those derived from benchmarking against other companies. These recommendations are then adopted by the Company to enhance the effectiveness and efficiency of GCG implementation throughout the organization.

Peningkatan Kualitas Penerapan GCG Berkelanjutan Continuous Improvement of GCG Implementation Quality		
2020-2024		2025-2029
Sasaran Objectives	Tercapainya nilai Assessment GCG sangat baik sebagai parameter penerapan prinsip GCG Achieving a very good GCG Assessment score as a parameter for GCG principle implementation	Budaya GCG guna mendukung pencapaian ESG. GCG culture to support the achievement of ESG objectives.
Kegiatan Activities	1. Penyesuaian kebijakan/peraturan GCG. 2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran terkait penerapan GCG bagi seluruh karyawan & stakeholder. 3. Peningkatan kompetensi SDM pada bidang tata kelola perusahaan. 4. Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016. 5. Pelaksanaan assessment GCG secara periodik dan konsisten terhadap penerapan GCG Perusahaan.	1. Penyesuaian kebijakan/peraturan GCG. 2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran terkait penerapan GCG bagi seluruh karyawan & stakeholder. 3. Peningkatan pengelolaan GCG. 4. Penguatan fraud control system. 5. Peningkatan kompetensi SDM pada fungsi tata kelola. 6. Penilaian penerapan GCG dengan tools yang disepakati di lingkungan PI Group
	1. Adjustment of GCG policies/regulations. 2. Enhancement of understanding and awareness regarding GCG implementation among all employees and stakeholders. 3. Improvement of human resource competencies in corporate governance. 4. Implementation of the Anti-Bribery Management System (SNI ISO 37001:2016). 5. Periodic and consistent GCG assessments to evaluate the company's GCG implementation.	1. Adjustment of GCG policies/regulations. 2. Enhancement of understanding and awareness of GCG among all employees and stakeholders. 3. Improvement of GCG management. 4. Strengthening of the fraud control system. 5. Enhancement of human resource competencies in governance functions. 6. GCG assessment using agreed-upon tools within the PI Group environment.

PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN GCG

IMPROVEMENT OF GCG IMPLEMENTATION QUALITY

PENILAIAN GCG

Pada tahun 2025, Pusri turut serta dalam Penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dan Assessment GCG dengan rincian sebagai berikut:

1. Penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang merupakan ajang *awarding* dan juga merupakan penilaian atas penerapan GCG di Perusahaan Indonesia, dengan capaian nilai 86,61 dengan predikat "Sangat Terpercaya".
2. Hasil *Assesment* Penerapan GCG PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Tahun 2025 untuk asesment GCG Tahun Buku 2024 sebesar 92,397 dengan kategori "Sangat Baik", dengan rincian capaian per Aspek sebagai berikut:

GCG ASSESMENT

In 2025, PUSRI participated in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) assessment and GCG evaluation, with the following details:

1. The CGPI assessment, an awards event and evaluation of GCG implementation in Indonesian companies, achieved a score of 86.61 with the predicate "Very Trustworthy."
2. The GCG implementation assessment of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang for fiscal year 2025 scored 92.397, categorized as "Very Good," with detailed scores per aspect as follows:

Aspek Aspect	Bobot Weight	Skor Score	% Capaian Achievement (%)	Penjelasan Assesment
I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7	6,391	91,303	Sangat Baik Excellent
II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and the General Meeting of Shareholders (GMS)/Capital Owners	9	8,089	89,876	Sangat Baik Excellent
III Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35	32,222	92,063	Sangat Baik Excellent

	Aspek Aspect	Bobot Weight	Skor Score	% Capaian Achievement (%)	Penjelasan Assesment
IV	Direksi Board of Directors	35	32,581	93,088	Sangat Baik Excellent
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9	8,114	90,151	Sangat Baik Excellent
VI	Aspek Lainnya Other Aspects	5	5,000	100	Sangat Baik Excellent
Skor Keseluruhan Overall Score		100	92,397		Sangat Baik Excellent

PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN PRAKTIK TERBAIK GCG

IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF GCG BEST PRACTICE IMPLEMENTATION

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan praktik terbaik GCG di Perusahaan, selama tahun 2025 PUSRI menjalankan berbagai program, meliputi:

1. Melengkapi seluruh *soft structures* yang belum ada dan melakukan kajian bagi penyempurnaan yang sudah ada demi meningkatkan kualitas penerapan GCG.
2. Melakukan monitoring pelaporan secara berkala dan reviu atas penerapan GCG.
3. Meningkatkan peran serta seluruh karyawan dan *stakeholders* agar lebih aktif dalam penerapan dan pengawasan praktik GCG dalam Perusahaan melalui Sosialisasi/Internalisasi GCG & WBS.
4. Turut serta dalam program BUMN bersih, sesuai dengan surat edaran Menteri BUMN No. SE-05/MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih.
5. Melakukan penilaian atas penerapan GCG secara berkala setiap tahun.
6. Memperbaharui infrastruktur GCG (*Code of Conduct, Code of Corporate Governance, Board Manual*) sesuai dengan perkembangan Perusahaan.
7. Berkoordinasi dengan KPK-RI dalam melakukan Sosialisasi tentang Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi.
8. Melakukan Sosialisasi GCG (Gratifikasi & WBS) kepada Anak Perusahaan.
9. Melakukan Sosialisasi GCG (Gratifikasi & WBS) kepada mitra kerja Perusahaan (distributor, pengecer, mitra binaan, dll)
10. Melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap *Whistleblowing System*.
11. Mendorong & memonitor Kepatuhan Insan Perusahaan terkait Pelaporan LHKPN & Penandatanganan Pakta Integritas Online.
12. Melakukan audit internal & *surveillance* atas penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis SNI ISO 37001:2016.

In order to enhance the quality of GCG best practice implementation within the Company, throughout 2024 PUSRI carried out various programs, including:

1. Completing all outstanding GCG soft structures and conducting reviews to refine existing ones in order to improve the quality of GCG implementation.
2. Conducting periodic monitoring of reporting and reviewing the implementation of GCG.
3. Increasing the participation of all employees and stakeholders to be more active in the implementation and supervision of GCG practices within the Company through GCG & WBS socialization/internalization.
4. Participating in the Clean SOE program in accordance with Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-05/MBU/2013 concerning the Roadmap Towards Clean SOEs.
5. Conducting periodic annual assessments of GCG implementation.
6. Updating GCG infrastructure (*Code of Conduct, Code of Corporate Governance, and Board Manual*) in line with Company developments.
7. Coordinating with KPK-RI in conducting socialization on Gratification and submitting Gratification reports.
8. Conducting GCG (Gratification & WBS) socialization for Subsidiaries.
9. Conducting GCG (Gratification & WBS) socialization for Company business partners (distributors, retailers, fostered partners, etc.).
10. Improving and enhancing the *Whistleblowing System*.
11. Encouraging and monitoring Company personnel compliance regarding LHKPN reporting and Online Integrity Pact signing.
12. Conducting internal audits and surveillance of the implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) based on SNI ISO 37001:2016.

13. Memperluas penerapan ruang lingkup Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis SNI ISO 37001:2016.
14. Memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada personil GCG pada topik GRC, ESG, dan penerapan SDGs.

13. Expanding the scope of implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) based on SNI ISO 37001:2016.
14. Providing training and certification for GCG personnel on GRC, ESG, and SDGs implementation topics.

SOSIALISASI PENERAPAN TATA KELOLA DAN ANTI KORUPSI DI LINGKUP PUSRI

Adapun daftar sosialisasi dan internalisasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain:

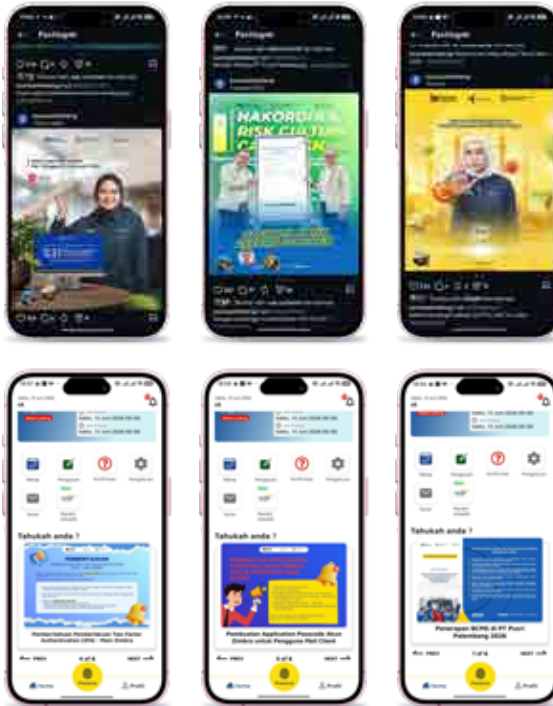
SOCIALIZATION OF GOVERNANCE AND ANTI-CORRUPTION IMPLEMENTATION WITHIN PUSRI

The following are the socialization and internalization activities related to the implementation of Good Corporate Governance conducted within the Company during 2025, including:

Tanggal Date	Acara Event	Media
2025	Sosialisasi melalui IAM PUSRI Sosialisasi melalui Email. Sosialisasi media WBS setiap rapat. Socialization through IAM PUSRI Socialization via Email WBS media socialization in every meeting	Aplikasi IAM PUSRI Email Tayangan video IAM PUSRI Application; Email; Video presentation
19 Februari 2025 February 19, 2025	Sosialisasi "Membangun Integritas Organisasi dengan ISO 37000 Series. Awareness Program on "Building Organizational Integrity in Accordance with ISO 37000 Series Standards."	Workshop
21 Maret 2025 March 21, 2025	Sosialisasi dalam acara media gathering PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Awareness Program conducted during the media gathering event of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Gathering
25 Maret 2025 March 25, 2025	Sosialisasi Anti Gratifikasi melalui sosial media Instagram PUSRI Anti-Gratuity Awareness Campaign through PUSRI's Instagram social media platform.	Instagram
28 Maret 2025 March 28, 2025	Sosialisasi pengendalian gratifikasi dengan merilis Surat Direktur Utama untuk Insan Pusri melakukan penolakan gratifikasi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446H. Awareness Program on Gratuity Control through the issuance of the President Director's Circular Letter, encouraging all PUSRI personnel to reject gratuities during the Eid al-Fitr 1446H holiday period.	Surat Digital Digital Circular Letter
24 Juli 2025 July 24, 2025	Awareness SNI ISO 37001 SMAP kepada Governance Officer. Awareness Program on ISO 37001 Anti-Bribery Management System (ABMS) for Governance Officers.	Workshop

Sosialisasi terkait GCG melalui Media Sosial Perusahaan dan Aplikasi IAM-PUSRI.

Socialization related to GCG through the Company's Social Media and the IAM-PUSRI Application.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, telah memberikan definisi yang jelas terkait peran, fungsi, hak dan kewajiban dari pemegang saham sebagai pihak yang menjadi bagian dari kepemilikan Perusahaan, dimana hal ini diatur melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sebagai salah satu organ Perusahaan, RUPS memiliki fungsi sentral dalam mengambil keputusan strategis. Di samping itu, RUPS merupakan wadah perlindungan dan perlakuan kesetaraan bagi seluruh Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh PUSRI. Melalui forum RUPS, Pemegang Saham dapat menyalurkan haknya untuk menciptakan nilai optimal bagi PUSRI, dimana hak tersebut berlaku secara adil dan proporsional.

RUPS merupakan organ tertinggi Perusahaan yang menjadi sarana bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penyelenggaraan RUPS adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang mengesahkan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan Januari tahun berjalan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan setiap tahun buku selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir.
3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Karena PUSRI bukan merupakan Perusahaan terbuka, RUPS PUSRI dilaksanakan oleh Perusahaan dan tidak dilaksanakan oleh pihak independen.

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak atas Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan dari Badan Pengaturan BUMN (sebelumnya bernama Kementerian BUMN). Hak-hak Pemegang Saham seperti tertuang dalam Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Pemegang Saham Perusahaan baik Pemegang Saham Seri A Dwiwarna maupun Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama, antara lain:

Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation as Law, provides a clear definition of the roles, functions, rights, and obligations of shareholders as parties forming part of the Company's ownership, which are regulated through the General Meeting of Shareholders (GMS).

As one of the Company's governing organs, the General Meeting of Shareholders (GMS) plays a central role in making strategic decisions. In addition, the GMS serves as a forum that ensures the protection of and equal treatment for all Shareholders, organized by PUSRI. Through the GMS, Shareholders are able to exercise their rights to create optimal value for PUSRI, with such rights being applied fairly and proportionately.

The GMS is the highest organ of the Company which serves as a means for Shareholders to make important decisions based on the Articles of Association and applicable laws and regulations.

The GMS is convened as follows:

1. The Annual General Meeting of Shareholders approving the Company's Work Plan & Budget shall be held no later than the end of January of the current year.
2. The Annual General Meeting of Shareholders for each fiscal year shall be held no later than 6 (six) months after the end of the Company's fiscal year.
3. The Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be held at any time as required.

As PUSRI is not a public company, its GMS is organized by the Company and not by an independent party.

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF SHAREHOLDERS IN THE GMS

Shareholders, as providers of capital, possess rights over the Company in accordance with the applicable laws and regulations, including regulations issued by the State-Owned Enterprises Regulatory Agency (previously known as the Ministry of State-Owned Enterprises). Shareholder rights are stipulated in Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. Both Series A Dwiwarna Shareholders and



1. Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;
2. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya;
3. Mengambil keputusan tertinggi pada Perusahaan, khusus bagi pemilik modal Perusahaan. Memperoleh informasi material Perusahaan secara tepat waktu, terukur, dan teratur;
4. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya;
5. Hak lainnya berdasarkan Anggaran Dasar; Beberapa di antara hak-hak Pemegang Saham tersebut, mekanisme pelaksanaannya dilakukan dalam RUPS.

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna juga memiliki hak-hak istimewa, yaitu hak untuk menyetujui:

1. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris;
2. Perubahan Anggaran Dasar;
3. Perubahan struktur kepemilikan saham; dan
4. Penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perseroan oleh perusahaan lain.

Dalam RUPS, Pemegang Saham berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan penting dan strategis Perusahaan, di antaranya terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan jumlah remunerasi dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi
2. Pengesahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan
3. Penilaian kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan
4. Persetujuan penggunaan laba bersih Perusahaan, termasuk di antaranya terkait dividen
5. Seluruh aksi korporasi yang membutuhkan keputusan RUPS sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar Perusahaan

RUPS Tahunan berwenang untuk mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan. PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai Pemegang Saham Pengendali wajib memperhatikan tanggung jawabnya dalam menggunakan haknya, baik saat menggunakan hak suara maupun dalam hal lain.

Series B Shareholders of the Company have equal rights, including the following:

1. Shareholders, either personally or represented by a proxy based on a power of attorney, have the right to attend the GMS and exercise their voting rights in accordance with the number of shares they own;
2. In voting, the votes cast by Shareholders apply to all shares owned by them;
3. To make the highest-level decisions within the Company, specifically as providers of the Company's capital; To obtain material information concerning the Company in a timely, measurable, and regular manner;
4. To receive distributions from the Company's profits allocated to Shareholders in the form of dividends and the remaining assets resulting from liquidation, in proportion to the number of shares owned;
5. Other rights as provided under the Articles of Association.

Series A Dwiwarna Shareholders also possess special rights, namely the right to approve:

1. The appointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
2. Amendments to the Articles of Association;
3. Changes in the share ownership structure; and
4. Mergers, consolidations, spin-offs, dissolutions, and acquisitions of the Company by other companies.

In the GMS, Shareholders are contributing to important and strategic Company decision-making processes, including matters related to:

1. Determination of remuneration and allowances of the Board of Commissioners and Board of Directors;
2. Approval of the Company's Work Plan & Budget;
3. Evaluation of the Company's performance for the relevant fiscal year;
4. Approval of the utilization of the Company's net profit, including dividends;
5. All corporate actions requiring GMS approval as stipulated in the Company's Articles of Association.

The Annual GMS is authorized to approve the Financial Statements and Annual Report. PT Pupuk Indonesia (Persero), as the Controlling Shareholder, must exercise its rights responsibly, whether in voting or in other matters.

Dalam RUPS Tahunan, Dewan Komisaris dan Direksi memaparkan Laporan Tahunan, rekomendasi penggunaan laba bersih, serta hal-hal lain yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

Sebagai anak usaha BUMN, PUSRI tunduk pada Undang-undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mewajibkan Perusahaan untuk melaporkan kinerjanya kepada Pemegang Saham yang dituangkan dalam Laporan Tahunan untuk mendapatkan pengesahan RUPS, paling lambat enam bulan setelah akhir tahun buku.

Selain RUPS pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, Perseroan juga menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

PENYELENGGARA RUPS

Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan. Adapun tugas-tugas pokok penyelenggara RUPS meliputi:

1. Menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dewan Komisaris dan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham serta menyiapkan materi (RUPS Tahunan pengesahan RKAP).
2. Menyiapkan Laporan Keuangan Audited, Laporan hasil audit lainnya dari Kantor Akuntan Publik (KAP), Laporan Manajemen, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk disetujui atau disahkan RUPS Kinerja.
3. Menyajikan materi kinerja tahunan (RUPS Kinerja)
4. Melakukan pemanggilan Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPS melalui surat undangan yang mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat secara detail.
5. Melakukan pendataan Pemegang Saham yang sah dan berhak hadir dalam rapat sesuai dengan buku daftar Pemegang Saham.
6. Memastikan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau diwakili telah memenuhi syarat minimum serta merekapitulasi persentase jumlah persetujuan agenda rapat dari seluruh pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
7. Merekapitulasi kehadiran para pemegang saham dan pengurus Perusahaan.
8. Mengelola proses pemungutan suara atas setiap agenda rapat secara adil

At the Annual GMS, the Board of Commissioners and the Board of Directors present the Annual Report, recommendations on the use of net profit, and other matters requiring shareholder approval at the GMS.

As a subsidiary of a State-Owned Enterprise, PUSRI is subject to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation as Law. These regulations require the Company to report its performance to Shareholders through the Annual Report for approval at the GMS no later than six months after the end of the fiscal year.

In addition to the GMS for the approval of the Financial Statements and Annual Report, the Company also holds an Annual GMS for the approval of the Company's Work Plan and Budget.

GMS ORGANIZER

The Company holds an Annual GMS. The primary duties of the GMS organizer include:

1. Preparing the draft Company Work Plan and Budget (RKAP), the Board of Commissioners' Work Plan and Budget (RKA), and the Social and Environmental Responsibility (TJSL) Work Plan and Budget (RKA) to be submitted to the Board of Commissioners and Shareholders, as well as preparing the materials for the Annual GMS approving the RKAP.
2. Preparing the Audited Financial Statements, other audit reports from the Public Accounting Firm (KAP), the Management Report, and the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners for approval or ratification at the Performance GMS.
3. Presenting annual performance materials at the Performance GMS.
4. Issuing invitations to Shareholders to attend the GMS through invitation letters specifying in detail the day, date, time, venue, and agenda of the meeting.
5. Verifying and registering legitimate Shareholders entitled to attend the meeting in accordance with the Shareholders Register.
6. Ensuring that the number of Shareholders present or represented meets the minimum quorum requirements and compiling the percentage of approvals for each meeting agenda item from all Shareholders attending the meeting.
7. Recording the attendance of Shareholders and Company management.
8. Managing the voting process for each meeting agenda item in a fair manner.

9. Mencatat seluruh jalannya rapat, keberatan dari Pemegang Saham (jika ada) serta hasil keputusan akhir yang disepakati sebagai dokumen pembuktian sah. 10. Menuangkan hasil keputusan rapat dalam risalah RUPS dan/atau dituangkan dalam Berita Acara RUPS yang dikuatkan oleh Notaris.	9. Recording the entire course of the meeting, any objections raised by Shareholders (if any), and the final resolutions agreed upon as valid supporting documentation. 10. Documenting the meeting resolutions in the minutes of the GMS and/or in the GMS Minutes of Meeting, which are formalized by a Notary.

REALISASI RUPS 2025

Di tahun 2025 PUSRI menyelenggarakan 4 (empat) kali RUPS, yang terdiri dari 1 (satu) kali RUPS RKAP dan RKA TJSL Tahun 2025, yakni tanggal 30 Januari 2025 dan 1 (satu) kali RUPS Tahunan Kinerja Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025, serta 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan secara sirkuler pada tanggal 05 Agustus 2025.

2025 GMS REALIZATION

In 2025, PUSRI held 4 (four) GMS meetings, consisting of 1 (one) GMS for the approval of the 2025 RKAP and TJSL Work Plan and Budget, held on January 30, 2025; 1 (one) Annual Performance GMS for Fiscal Year 2024, held on June 24, 2025; and 2 (two) Extraordinary GMS meetings conducted through circular resolutions on August 5, 2025.

RUPS RKAP DAN RKA TJSL TAHUN 2025 PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

Pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja & Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (RKA TJSL) Tahun Buku 2025 dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:

GMS ON RKAP AND RKA TJSL FISCAL YEAR 2025 PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

On Thursday, January 30, 2025, a General Meeting of Shareholders (GMS) was held to approve the Company's Work Plan & Budget (RKAP) and the Work Plan & Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) for Fiscal Year 2025, with the following agenda and resolutions:

RUPS RKAP dan RKA TJSL Tahun 2025 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

2025 RKAP and TJSL Work Plan and Budget GMS of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Date	Agenda	Keputusan Resolution
30 Januari 2025 January 30, 2025	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) serta Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Approval of the 2025 (two thousand twenty-five) Company Work Plan and Budget (RKAP) and the 2025 (two thousand twenty-five) Board of Commissioners Work Plan and Budget of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Mengesahkan dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan rincian sebagai berikut: - Bidang Produksi - Rencana produksi pupuk total sebesar 2.350.000 Ton, dengan rincian pupuk Urea 2.020.000 Ton dan pupuk NPK 330.000 Ton. - Rencana produksi non pupuk (Amoniak) sebesar 1.310.000 Ton. - Rasio pemakaian gas bumi rata-rata untuk Amoniak adalah 36,40 MMBTU/Ton dan untuk Urea adalah 29,57 MMBTU/Ton - Maksimal Hari Turn Around pabrik Urea 70 Hari dan pabrik Amoniak 65 Hari - Maksimal Hari Schedule Downtime pabrik Urea 116 Hari dan pabrik Amoniak 40 Hari - On Stream Days pabrik NPK 831 Hari - Bidang Pemasaran - Target total pemasaran pupuk PSO sebesar 1.858.017 Ton, terdiri dari pupuk Urea 1.577.258 Ton dan NPK 280.759 Ton. - Target penjualan pupuk komersil sebesar 392.223 Ton - Target penjualan non pupuk sebesar 92.600 Ton - Bidang Keuangan - Target bidang keuangan konsolidasi tahun 2025 adalah sebagai berikut: - Laba Tahun Berjalan (setelah pajak) sebesar Rp610.444 miliar - Total Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp31,638 triliun dan Total Liabilitas sebesar Rp12,424 triliun. - Total Anggaran Biaya Operasional sebesar Rp14,455 triliun. - Bidang SDM Anggaran biaya gaji dan kesejahteraan karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp1,220 triliun. - Bidang Investasi Total investasi rutin tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp389,457 miliar dan Total investasi pengembangan sebesar Rp4,292 triliun.

RUPS RKAP dan RKA TJSL Tahun 2025 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

2025 RKAP and TJSL Work Plan and Budget GMS of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Date	Agenda	Keputusan Resolution
		Approved and ratified the 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP) and the Board of Commissioners Work Plan and Budget (RKA) of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang with the following details: - Production Sector - Planned total fertilizer production of 2,350,000 tons, consisting of 2,020,000 tons of Urea fertilizer and 330,000 tons of NPK fertilizer. - Planned non-fertilizer (Ammonia) production of 1,310,000 tons. - Average natural gas consumption ratio for Ammonia of 36.40 MMBTU/ton and for Urea of 29.57 MMBTU/ton. - Maximum turnaround period of 70 days for Urea plants and 65 days for Ammonia plants. - Maximum scheduled downtime of 116 days for Urea plants and 40 days for Ammonia plants. - NPK plant on-stream days of 831 days. - Marketing Sector - Total subsidized fertilizer (PSO) marketing target of 1,858,017 tons, consisting of 1,577,258 tons of Urea fertilizer and 280,759 tons of NPK fertilizer. - Commercial fertilizer sales target of 392,223 tons. - Non-fertilizer sales target of 92,600 tons. - Finance Sector - The consolidated financial targets for 2025 are as follows: - Profit for the Year (after tax) of Rp610.444 billion. - Total Assets as of December 31, 2025 of Rp31.638 trillion and Total Liabilities of Rp12.424 trillion. - Total Operating Expense Budget of Rp14.455 trillion. - Human Resources Sector Budget for salaries and employee welfare, as well as remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners, amounting to Rp1.220 trillion. - Investment Sector Total routine investment target for 2025 of Rp389.457 billion and total development investment target of Rp4.292 trillion.
	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Approval of the 2025 (two thousand twenty-five) Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL Work Plan and Budget) of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.	Mengesahkan dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Tahun 2025 sebesar Rp61,552 miliar dengan rincian sebagai berikut: - Program TJSL PUMK sebesar Rp2 miliar. - Program TJSL Non PUMK, terdiri dari CID sebesar Rp30,240 miliar dan Non CID sebesar Rp29,312 miliar. Approved and ratified the 2025 Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL Work Plan and Budget) of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang amounting to Rp61.552 billion, with the following details: - TJSL PUMK Program amounting to Rp2 billion. - TJSL Non-PUMK Program, consisting of CID amounting to Rp30.240 billion and Non-CID amounting to Rp29.312 billion.

RUPS RKAP dan RKA TJSL Tahun 2025 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

2025 RKAP and TJSL Work Plan and Budget GMS of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Date	Agenda	Keputusan Resolution
	Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target <i>Key Performance Indicators (KPI) Direksi</i> secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) <i>Determination of the 2025 (two thousand twenty-five) Annual Management Contract containing the Key Performance Indicator (KPI) targets for the Board of Directors collectively and the Board of Commissioners.</i>	Mengesahkan dan menyetujui Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target <i>Key Performance Indicators (KPI) Direksi</i> secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut: KPI Direksi Kolegial Tahun 2025 Approved and ratified the Annual Management Contract containing the 2025 Key Performance Indicator (KPI) targets for the Board of Directors collectively and the Board of Commissioners, with the following details:

RUPS RKAP dan RKA TJSL Tahun 2025 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

2025 RKAP and TJSL Work Plan and Budget GMS of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Date	Agenda	Keputusan Resolution				
KPI Direksi Kolegial Tahun 2025 2025 Collective Board of Directors KPI						
No.	KPI	Satuan Unit	Target	ESG*	Polaritas Polarity	Bobot (%) Weight (%)
Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia						65
Finansial Financial						
1.	EBITDA Margin	Persen Percent	15,44	S	Maximize	7
2.	Excess of ROIC – WACC	Persen Percent	0,53	S	Maximize	5
Operasional Operational						
3.	ESG Rating	Skor Score	42,00	ESG	Maximize	5
4.	Plant Utilization	Persen Percent	92,27	S	Maximize	8
5.	Plant Availability	Persen Percent	100,00	S	Maximize	10
6.	Fulfillment of Fertilizer Volume	Persen Percent	100,00	S	Maximize	8
7.	Reduction in Carbon Emission	Ton CO2 e	542.160	E	Maximize	5
8.	Penghematan Biaya Overhead COGM Reduction in COGM Overhead Costs	Persen Percent	100,00	S	Maximize	7
9.	Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)	Rate	0,112	S	Minimize	10
Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation						15
10.	SGA to Sales	Persen Percent	5,69	S	Minimize	5
11.	Rasio Konsumsi Energi Urea Urea Energy Consumption Ratio	MMBTU/ Ton	29,57	S	Minimize	5
12.	Sparepart Management Effectiveness	Persen Percent	100,00	S	Maximize	5
Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership						5
13.	Milestone Pencapaian Inisiatif Digital Digital Initiative Milestone Achievement	Persen Percent	100,00	G	Maximize	5
Peningkatan Investasi Investment Enhancement						7
14.	Plant Development Investment	Persen Percent	100,00	S	Maximize	7
Pengembangan Talenta Talent Development						8
15.	HC Transformation Rasio Talent Diversity Talent Diversity Ratio	Persen Percent	100,00	SG	Maximize	4
	Rasio Produktivitas Operasional Pegawai Employee Operational Productivity Ratio	Persen Percent Ton/Orang Ton/ Person	18,00 1.307			4

*) Keterangan : E: Environment; S: Social; G : Governance Note: E = Environment; S = Social; G = Governance.

RUPS RKAP dan RKA TJSL Tahun 2025 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
 2025 RKAP and TJSL Work Plan and Budget GMS of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Date	Agenda	Keputusan Resolution			
KPI Dewan Komisaris Board of Commissioners KPIs					
No.	Kegiatan Activity	Uraian Description	Pelaksanaan Implementation	Frekuensi Setahun Frequency per Year	Skor Score
1.	Rapat Internal Internal Meetings	Evaluasi kebijakan, laporan manajemen, dan/atau masalah khusus Evaluation of policies, management reports, and/or special issues	Setiap bulan Every month	12 kali times	10
		Evaluasi RKAP dan/atau RJPP Evaluation of the RKAP and/or RJPP	Awal Triwulan IV Beginning of Quarter IV	1 kali times	10
		Jumlah Rapat Internal Total Number of Internal Meetings			13 kali times
2.	Rapat dengan Direksi dan Manajemen Meetings with the Board of Directors and Management	Pembahasan RKAP Discussion of the RKAP	Awal Triwulan IV Beginning of Quarter IV	1 kali times	10
		Pembahasan laporan manajemen (bulanan, triwulanan, semester dan tahunan) Discussion of management reports (monthly, quarterly, semi-annual, and annual)	Setiap bulan Every month	12 kali times	10
		Pembahasan kebijakan dan masalah khusus Discussion of policies and special issues	Setiap Semester Every semester	2 kali times	5
Jumlah Rapat dengan Direksi dan Manajemen Total Number of Meetings with the Board of Directors and Management			15 kali times	25	
3.	Rapat dengan Pemegang Saham dan Direksi Meetings with Shareholders and the Board of Directors	Pembahasan dalam rangka pegesahan RKAP yang dilaksanakan dalam forum RUPS. Discussion for the approval of the RKAP conducted through the GMS forum.	Triwulan I Quarter I	1 kali times	15
		Pembahasan dalam rangka pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan (Audited) dalam forum RUPS. Discussion for the approval of the Annual Report and Audited Annual Financial Statements conducted through the GMS forum.	Triwulan II Quarter II	1 kali times	15

RUPS RKAP dan RKA TJSL Tahun 2025 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

2025 RKAP and TJSL Work Plan and Budget GMS of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Date		Keputusan Resolution			
Agenda					
No.	Kegiatan Activity	Uraian Description	Pelaksanaan Implementation	Frekuensi Setahun Frequency per Year	Skor Score
Jumlah Rapat dengan Pemegang Saham Total Number of Meetings with Shareholders				2 kali times	30
4.	Kunjungan kerja Working Visits	Untuk pemahaman bisnis dilakukan perjalanan ke cabang-cabang atau lokasi-lokasi lain yang dipandang perlu. To gain a better understanding of the business, visits are conducted to branch offices or other locations deemed necessary.	Enam bulanan Semi-annually	2 kali times	3
5.	Pelatihan Training	Untuk meningkatkan kompetensi dilakukan perjalanan dinas ke dalam atau luar negeri untuk menghadiri seminar atau studi banding terkait dengan aspek pengawasan dan/atau manajemen. To enhance competencies, official travel is undertaken domestically or internationally to attend seminars or benchmarking studies related to supervisory and/ or management aspects.	Enam bulanan Semi-annually	2 kali times	2
6.	Masukan saran (nasihat) kepada Direksi Providing Advice and Recommendations to the Board of Directors	Saran lisan yang tertuang dalam notulen rapat atau saran tertulis .Verbal recommendations recorded in meeting minutes or written recommendations.	Setiap bulan Every month	12 saran suggestion	20
Jumlah Skor Total Scores					100
Tindak Lanjut Keputusan Rapat : Follow-up on Meeting Resolutions:		Keputusan Rapat tersebut telah ditindak lanjuti dan telah diselesaikan oleh Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan di tahun pelaporan The resolutions of the meetings have been followed up and completed by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association during the reporting year.			

Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham dalam RUPS Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja & Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (RKA TJSL) Tahun Buku 2025 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Tabel - Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham

Attendance of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP) and the Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget (TJSL Work Plan and Budget) of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Tabel - Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham

Table – Attendance of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders	
Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position
Siti Nurizka Puteri Jaya	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Daconi Khotob	Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang President Director of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Rahmad Pribadi	Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Bambang Supriyambodo	Komisaris Independen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Independent Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Saifullah Lasindrang	Direktur Keuangan dan Umum merangkap Plt. Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Director of Finance and General Affairs concurrently serving as Acting Director of Risk Management of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Guzrizal	Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Vice President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Ali Jamil Harahap	Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Filius Yuliandi	Direktur Operasi dan Produksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Director of Operations and Production of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Bob Indianto	Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Director of Production of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Fadjar Judisiawan	Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang			Wono Budi Tjahyono	Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero) Director of Finance of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Panji Winanteya Ruky	Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) Director of Business Transformation of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Tina Treestiana Kemala Intan	Direktur Sumber Daya Manusia PT Pupuk Indonesia (Persero) Director of Human Resources of PT Pupuk Indonesia (Persero)

Tabel - Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham

Table – Attendance of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders	
Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position
				Tri Wahyudi Saleh	Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Director of Marketing of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Jamsaton Nababan	Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) Director of Portfolio and Business Development of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Ninis Kesuma Adriani	Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero) Director of Risk Management of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Balia Akhmad	Ketua Pengurus YKKP Chairman of the YKKP Management Board
				Ferryzal Riansyah	Sekretaris Pengurus YKKP Secretary of the YKKP Management Board

**RUPS TAHUNAN KINERJA TAHUN BUKU
2024 PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG**

Pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Kinerja Tahun Buku 2024 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:

**ANNUAL GMS PERFORMANCE FOR
FISCAL YEAR 2024 PT PUPUK SRIWIDJAJA
PALEMBANG**

On Tuesday, June 24th 2025, the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) on Performance for Fiscal Year 2024 of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang was convened, with the following agenda and resolutions:

RUPS Tahunan Kinerja Tahun Buku 2024 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for Fiscal Year 2024 Performance of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Tanggal Date	Agenda	Keputusan Resolution
24 Juni 2025	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.	- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024. - Mengesahkan: - Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00851/2.1457/AU.1/04/1784-1/1/V/2025 tanggal 7 Mei 2025 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material". - Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00606/2.1457/AU.2/11/1784-1/0/IV/2025 tanggal 17 April 2025 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material". - Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, seluruhnya untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan Perseroan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 sepanjang: - Tindakan tersebut termuat dalam Laporan Tahunan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP; - Tindak tersebut sesuai dengan prinsip <i>good corporate governance</i>, kehati-hatian dan etika bisnis yang baik; - Tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tidak melanggar ketentuan Anggaran Dasar, arahan Pemegang Saham dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang disajikan tersebut telah memuat hal-hal dan kejadian-kejadian yang sesungguhnya sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi Perseroan di kemudian hari; - Dalam hal Laporan Keuangan maupun hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan d ternyata terbukti tidak benar serta dalam hal tersebut terdapat kerugian Perseroan yang disebabkan karena: - Kerugian terjadi karena kesalahan atau kelalaian; - Tidak melakukan pengurusan dan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan Perseroan; - Mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas pengurusan dan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan - Tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian Perseroan. Maka pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) tersebut dinyatakan tidak berlaku dan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian Perseroan.

RUPS Tahunan Kinerja Tahun Buku 2024 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for Fiscal Year 2024 Performance of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Tanggal Date	Agenda	Keputusan Resolution
June 24, 2025	Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for Fiscal Year 2024, as well as the granting of a full release and discharge of liability (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the management of the Company and to the Board of Commissioners for the supervision of the Company carried out during Fiscal Year 2024.	1. Approved the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report, for Fiscal Year 2024 ending on December 31, 2024. 2. Ratified: a. The Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2024 ending on December 31, 2024, which were audited by Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan as stated in its report No. 00851/2.1457/AU.1/04/1784-1/1/V/2025 dated May 7, 2025, with an opinion of "fair, in all material respects." b. The Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for Fiscal Year 2024 ending on December 31, 2024, which were audited by Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan as stated in its report No. 00606/2.1457/AU.2/11/1784-1/0/IV/2025 dated April 17, 2025, with an opinion of "fair, in all material respects." 3. With the approval of the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, all for Fiscal Year 2024 ending on December 31, 2024, the GMS granted a release and discharge of liability (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision of the Company carried out during Fiscal Year 2024, provided that: a. Such actions are disclosed in the Annual Report or the Financial Statements audited by the Public Accounting Firm (KAP); b. Such actions were carried out in accordance with the principles of good corporate governance, prudence, and sound business ethics; c. Such actions do not constitute criminal acts and do not violate the provisions of the Articles of Association, Shareholder directives, and/or applicable laws and regulations; d. The Annual Report and Financial Statements presented contain the actual facts and events and therefore do not result in losses to the Company in the future; 4. In the event that the Financial Statements or the matters referred to in points a through d are subsequently proven to be inaccurate, and where losses to the Company arise due to: a. Losses resulting from errors or negligence; b. Failure to carry out management and supervisory duties in good faith and with due care in the interests of and in accordance with the objectives of the Company; c. Having a direct or indirect conflict of interest in the management and supervision that results in losses; and d. Failure to take action to prevent the occurrence or continuation of losses to the Company; then the release and full discharge of liability (volledig acquit et de charge) shall be deemed null and void, and the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company may be held legally accountable for the Company's losses.

RUPS Tahunan Kinerja Tahun Buku 2024 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for Fiscal Year 2024 Performance of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Tanggal Date	Agenda	Keputusan Resolution
	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024. Determination of the Allocation of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2024.	Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba tahun berjalan konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp1.068.450.000.000,- (satu triliun enam puluh delapan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: - Dividen sebesar Rp162.040.500.000,- (seratus enam puluh dua miliar empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: - Bagian Dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan sebesar Rp27.938,- (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) dibayarkan secara tunai ke rekening yang akan ditunjuk oleh Menteri BUMN. - Bagian Dividen atas Saham Seri B Perseroan dengan rincian: - Sebesar Rp162.040.080.930,- (seratus enam puluh dua miliar empat puluh juta delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), merupakan dividen bagian PT Pupuk Indonesia (Persero). Dividen tersebut agar dibayar ke rekening Bank Mandiri KCP Pusri Jakarta a.n. PT Pupuk Indonesia (Persero) nomor 116.00.9000.554.8 paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal keputusan ini, kecuali apabila ditentukan lain sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Copy bukti bayar dividen agar disampaikan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) - Sebesar Rp391.132,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah) merupakan dividen bagian Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusri. Dividen tersebut agar dibayar langsung kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusri paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal keputusan ini, kecuali apabila ditentukan lain sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. - Sisanya ditetapkan sebagai cadangan Perseroan. Approved and determined the allocation of the consolidated profit for the year attributable to the owners of the Company's parent entity for the fiscal year ended December 31, 2024, amounting to Rp1,068,450,000,000 (one trillion sixty-eight billion four hundred fifty million rupiah), with the following details: - Dividends amounting to Rp162,040,500,000 (one hundred sixty-two billion forty million five hundred thousand rupiah), consisting of: - The portion of dividends payable to the Company's Series A Dwiwarna Shareholder amounting to Rp27,938 (twenty-seven thousand nine hundred thirty-eight rupiah), to be paid in cash to the account designated by the Minister of State-Owned Enterprises. - The dividend portion for the Company's Series B Shares, consisting of: - Rp162,040,080,930 (one hundred sixty-two billion forty million eighty thousand nine hundred thirty rupiah), representing the dividend entitlement of PT Pupuk Indonesia (Persero). The dividend shall be paid to Bank Mandiri KCP Pusri Jakarta account in the name of PT Pupuk Indonesia (Persero), account number 116.00.9000.554.8, no later than 25 (twenty-five) calendar days from the date of this resolution, unless otherwise stipulated by applicable rules and regulations. A copy of the dividend payment receipt shall be submitted to PT Pupuk Indonesia (Persero). - Rp391,132 (three hundred ninety-one thousand one hundred thirty-two rupiah), representing the dividend entitlement of the Pusri Employee Welfare Foundation. The dividend shall be paid directly to the Pusri Employee Welfare Foundation no later than 25 (twenty-five) calendar days from the date of this resolution, unless otherwise stipulated by applicable rules and regulations. - The remaining amount shall be designated as the Company's reserve.

RUPS Tahunan Kinerja Tahun Buku 2024 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for Fiscal Year 2024 Performance of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Tanggal Date	Agenda	Keputusan Resolution
	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024 dan Penetapan Jasa Operasi Karyawan atas Kinerja Tahun Buku 2024. Determination of Salaries/Honoraria, Including Other Facilities and Benefits, for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2025, as well as Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners Based on Fiscal Year 2024 Performance, and Determination of Employee Operational Service Awards Based on Fiscal Year 2024 Performance.	1. Penetapan tantiem/insentif kerja/insentif khusus Tahun Buku 2024, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2025, akan ditetapkan secara tersendiri oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham mayoritas Perseroan. 2. Menyetujui dan menetapkan Jasa Operasi untuk karyawan atas kinerja tahun buku 2024. Persetujuan dan penetapan mengenai Jasa Operasi tersebut akan diberikan secara terpisah dan tersendiri dalam amplop tertutup pada pelaksanaan RUPS ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RUPS tahunan ini. Jasa Operasi agar diberikan kepada karyawan (termasuk karyawan penugasan) secara proporsional dengan memperhatikan masa kerja, kinerja dan tugas serta tanggung jawab. 1. The determination of tantiem, performance incentives, special incentives for Fiscal Year 2024, salaries for the Board of Directors, and honoraria along with other facilities and benefits for the Board of Commissioners for 2025 shall be determined separately by PT Pupuk Indonesia (Persero) as the Company's majority shareholder. 2. Approved and determined the Operational Service Awards for employees based on Fiscal Year 2024 performance. Approval and determination of the Operational Service Awards shall be provided separately and independently in a sealed envelope during the implementation of this GMS and shall constitute an integral part of this Annual GMS. The Operational Service Awards shall be granted to employees (including seconded employees) proportionally, taking into account length of service, performance, duties, and responsibilities.
	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025 Determination of the Public Accounting Firm to Audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for Fiscal Year 2025.	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha kecil (PUMK) terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual serta Laporan Hasil Evaluasi Komposit Risiko tahun Buku 2025, dilakukan secara tersendiri oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) setelah berkoordinasi dengan PT Danantara Asset Management (Persero) The appointment of the Public Accounting Firm (KAP) that will audit the Consolidated Financial Statements, conduct the PSA 62 Compliance Audit, audit the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) related to the Social and Environmental Responsibility Program, and perform the Agreed-Upon Procedures on the Corporate KPI and Individual KPI Performance Evaluation Reports as well as the Composite Risk Evaluation Report for Fiscal Year 2025, shall be determined separately by PT Pupuk Indonesia (Persero) after coordinating with PT Danantara Asset Management (Persero).
Tindak Lanjut Keputusan Rapat : Follow-up on Meeting Resolutions:	Seluruh butir-butir Keputusan Rapat tersebut diatas telah ditindaklanjuti dan telah diselesaikan oleh Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan All of the meeting resolutions referred to above have been followed up and completed by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.	

Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan Kinerja Tahun Buku 2024 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Attendance of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders at the Annual Performance General Meeting of Shareholders (GMS) for Fiscal Year 2024 of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Tabel - Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham

Table – Attendance of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders	
Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position
Siti Nurizka Puteri Jaya	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Daconi Khotob	Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang President Director of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Rahmad Pribadi	Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Bambang Supriyambodo	Komisaris Independen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Independent Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Saifullah Lasindrang	Direktur Keuangan dan Umum merangkap Plt. Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Director of Finance and General Affairs concurrently serving as Acting Director of Risk Management of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Dwi Satriyo Annurogo	Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia (Persero) Director of Operations of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Sally Salamah	Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Filius Yuliandi	Direktur Operasi dan Produksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Director of Operations and Production of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Wono Budi Tjahyono	Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero) Director of Finance of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Fadjar Judisiawan	Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang			Tina Treestiana Kemala Intan	Direktur Sumber Daya Manusia & Umum PT Pupuk Indonesia (Persero) Director of Human Resources and General Affairs of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Robby Setiabudi Madjid	Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia (Persero) Director of Supply Chain of PT Pupuk Indonesia (Persero)

Tabel - Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham

Table – Attendance of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders	
Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position
				Ninis Kesuma Adriani	Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero) Director of Risk Management of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Tri Wahyudi Saleh	Direktur Manajemen Aset PT Pupuk Indonesia (Persero) Director of Asset Management of PT Pupuk Indonesia (Persero)
				Balia Akhmad	Ketua Pengurus YKKP Chairman of the YKKP Management Board
				Ferryzal Riansyah	Sekretaris Pengurus YKKP Secretary of the YKKP Management Board

RUPS LUAR BIASA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

RUPS Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dilakukan secara sirkuler melalui Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri Selaku Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Nomor : SK-220/MBU/08/2025

Nomor : 011/A/HK/DO302/KPS/2025

Nomor : 11/SK/YKKP/VIII/2025

Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang ditandatangani oleh Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tanggal 05 bulan Agustus tahun 2025 dan diaktakan dengan Akta Notaris Lumassia, Sarjana Hukum, Nomor 07 tanggal 22 Agustus 2025.

RUPS LB PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri Selaku Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS) OF PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang was conducted by circular resolution through the Joint Resolution of the Minister of State-Owned Enterprises, the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero), and the Pusri Employee Welfare Foundation as the Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Number :SK-220/MBU/08/2025

Number :011/A/HK/DO302/KPS/2025

Number : 11/SK/YKKP/VIII/2025

Concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, signed by the Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang on August 5, 2025, and notarized through Notarial Deed No. 07 dated August 22, 2025, by Lumassia, Bachelor of Laws.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS) OF PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

Resolution of the Minister of State-Owned Enterprises, the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero), and the Pusri Employee Welfare Foundation, acting as the Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Tanggal Date	Agenda	Keputusan Resolution
05 Agustus 2025 August 5, 2025	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan Daconi sebagai Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Lumassia, Sarjana Hukum, Nomor 05 tanggal 13 bulan November tahun 2023, terhitung sejak tanggal 30 bulan Juni tahun 2025 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut. 2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang: a. Tuan Filius Yuliandi dari jabatannya sebagai Direktur Operasi & Produksi; b. Tuan Saifullah Lasindrang dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan & Umum; yang masing-masing diangkat berdasarkan Akta Notaris Lumassia, Sarjana Hukum, Nomor 05 tanggal 25 bulan Februari tahun 2021 dan Akta Notaris Lumassia, Sarjana Hukum, Nomor 09 tanggal 25 bulan Agustus tahun 2020 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan-jabatan tersebut. 3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang: a. Tuan Maryono menjadi Direktur Utama; b. Tuan Sholikin menjadi Direktur Operasi & Produksi c. Tuan Raden Eric Juliana Rachman menjadi Direktur Keuangan & Umum; d. Tuan Panji Winanteya Ruky menjadi Direktur Manajemen Risiko 4. Masa jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 5. Bagi anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut. 6. Memberi kuasa kepada Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang. 7. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal Pemegang Saham yang terakhir menandatangani, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Tanggal Date	Agenda	Keputusan Resolution
		1. Ratified the honorable dismissal of Mr. Daconi as President Director of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, who was appointed pursuant to Notarial Deed No. 05 of Lumassia, Bachelor of Laws, dated November 13, 2023, effective June 30, 2025, with appreciation for his contributions, efforts, and dedication during his tenure. 2. Honorably dismissed the following individuals from their positions as members of the Board of Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang: a. Mr. Filius Yulianti from his position as Director of Operations & Production; b. Mr. Saifullah Lasindrang from his position as Director of Finance & General Affairs; Each of whom was appointed pursuant to Notarial Deed No. 05 of Lumassia, Bachelor of Laws, dated February 25, 2021, and Notarial Deed No. 09 of Lumassia, Bachelor of Laws, dated August 25, 2020, respectively, with appreciation for their contributions, efforts, and dedication during their tenure. 3. Appointed the following individuals as members of the Board of Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang: a. Mr. Maryono as President Director; b. Mr. Sholikin as Director of Operations & Production; c. Mr. Raden Eric Juliana Rachman as Director of Finance & General Affairs; d. Mr. Panji Winanteya Ruky as Director of Risk Management. 4. The term of office of the members of the Board of Directors appointed as referred to in the Third Resolution shall be in accordance with the Articles of Association of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time. 5. Any member of the Board of Directors appointed as referred to in the Third Resolution who continues to hold another position prohibited by prevailing laws and regulations from being concurrently held with a directorship in a subsidiary of a State-Owned Enterprise must resign from or be dismissed from such position. 6. Granted authority to the Board of Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, with the right of substitution, to formalize the resolutions contained in this Decision in authentic deed form before a notary or other authorized official. 7. This Decision shall take effect on the date of its determination, namely the date on which the last Shareholder signs it, provided that any errors discovered at a later date shall be corrected as necessary.
Tindak lanjut keputusan RUPSLB Follow-up on Extraordinary GMS Resolutions		Seluruh butir-butir Keputusan Rapat tersebut diatas telah ditindaklanjuti dan telah diselesaikan oleh Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan All of the meeting resolutions referred to above have been followed up and completed by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

Para Pemegang Saham yang menandatangani Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri Selaku Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

The Shareholders who signed the Resolution of the Minister of State-Owned Enterprises, the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero), and the Pusri Employee Welfare Foundation, acting as the Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Para Pemegang Saham

Shareholders

Nama Name	Jabatan Position
Erick Thohir	Menteri Badan Usaha Milik Negara dan bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia Minister of State-Owned Enterprises, acting for and on behalf of the Republic of Indonesia
Dwi Satriyo Annurogo	Direktur Operasi merangkap Plt. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) dan bertindak mewakili Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Director of Operations concurrently serving as Acting President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero), acting on behalf of the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Balia Akhmad	Ketua Pengurus YKKP Chairman of the YKKP Management Board
Ferryzal Riansyah	Sekretaris Pengurus YKKP Secretary of the YKKP Management Board

RUPS LUAR BIASA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

RUPS Luar Biasa selanjutnya dilakukan juga secara sirkuler melalui Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri Selaku Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Nomor : SK-221/MBU/08/2025
 Nomor : 010/A/HK/D0302/KPS/2025
 Nomor : 12/SK/YKKP/VIII/2025

Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang ditandatangani oleh Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tanggal 05 bulan Agustus tahun 2025 dan diaktakan dengan Akta Notaris Lumassia, Sarjana Hukum, Nomor 08 tanggal 22 Agustus 2025.

RUPSLB PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri Selaku Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS) OF PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

A subsequent Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) was also conducted by circular resolution through the Joint Resolution of the Minister of State-Owned Enterprises, the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero), and the Pusri Employee Welfare Foundation, acting as the Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Number : SK-221/MBU/08/2025
 Number : 010/A/HK/D0302/KPS/2025
 Number : 12/SK/YKKP/VIII/2025

Concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, signed by the Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang on August 5, 2025, and notarized through Notarial Deed No. 08 dated August 22, 2025, by Lumassia, Bachelor of Laws.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS) OF PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

Resolution of the Minister of State-Owned Enterprises, the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero), and the Pusri Employee Welfare Foundation, acting as the Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Tanggal Date	Agenda	Keputusan Resolution
05 Agustus 2025 August 5, 2025	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang a. Tuan Prahoro Yulijanto Nurtjahyo dari jabatannya sebagai Komisaris. b. Tuan Ali Jamil Harahap dari jabatannya sebagai Komisaris. yang diangkat masing-masing berdasarkan Akta Notaris Lumassia, Sarjana Hukum, Nomor 01 tanggal 20 bulan April tahun 2020, Akta Notaris Lumassia, Sarjana Hukum, Nomor 13 tanggal 27 bulan Desember tahun 2021, terhitung masing-masing sejak tanggal 20 bulan April tahun 2025 dan tanggal 16 bulan Juni tahun 2025 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan-jabatan tersebut 2. Memberhentikan dengan hormat Tuan Bambang Supriyambodo sebagai Komisaris Independen PT Pupuk Sriwidjaja yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Lumassia, Sarjana Hukum, Nomor 08 tanggal 25 bulan Agustus tahun 2020 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut. 3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang; a. Tuan Bambang Supriyambodo sebagai Komisaris Independen; b. Tuan Arteria Dahlan sebagai Komisaris; c. Tuan Muhammad Syakir sebagai Komisaris. 4. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, tanpa mengurangi hal Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 5. Bagi anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut. 6. Memberi kuasa kepada Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan hal substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang. 7. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal Pemegang Saham yang terakhir menandatangani, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Tanggal Date	Agenda	Keputusan Resolution
		1. Ratified the honorable dismissal of the following individuals as members of the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang: a. Mr. Prahoro Yulijanto Nurtjahyo from his position as Commissioner; b. Mr. Ali Jamil Harahap from his position as Commissioner; each of whom was appointed pursuant to Notarial Deed No. 01 of Lumassia, Bachelor of Laws, dated April 20, 2020, and Notarial Deed No. 13 of Lumassia, Bachelor of Laws, dated December 27, 2021, respectively, effective April 20, 2025, and June 16, 2025, respectively, with appreciation for their contributions, efforts, and dedication during their tenure. 2. Honorably dismissed Mr. Bambang Supriyambodo from his position as Independent Commissioner of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, to which he was appointed pursuant to Notarial Deed No. 08 of Lumassia, Bachelor of Laws, dated August 25, 2020, with appreciation for his contributions, efforts, and dedication during his tenure. 3. Appointed the following individuals as members of the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang: a. Mr. Bambang Supriyambodo as Independent Commissioner; b. Mr. Arteria Dahlan as Commissioner; c. Mr. Muhammad Syakir as Commissioner. 4. The term of office of the members of the Board of Commissioners appointed as referred to in the Third Resolution shall be in accordance with the Articles of Association of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time. 5. Any member of the Board of Commissioners appointed as referred to in the Third Resolution of this Resolution who continues to hold another position prohibited by prevailing laws and regulations from being concurrently held with a position on the Board of Commissioners of a subsidiary of a State-Owned Enterprise must resign from or be dismissed from such position. 6. Granted authority to the Board of Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, with the right of substitution, to formalize the resolutions contained in this Resolution in authentic deed form before a notary or other authorized official. 7. This Resolution shall take effect on the date of its determination, namely the date on which the last Shareholder signs it, provided that any errors discovered at a later date shall be corrected as necessary.
	Tindak lanjut keputusan RUPSLB Follow-up on Extraordinary GMS Resolutions	Seluruh butir-butir Keputusan Rapat tersebut diatas telah ditindaklanjuti dan telah diselesaikan oleh Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan All of the meeting resolutions referred to above have been followed up and completed by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

Para Pemegang Saham yang menandatangani Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri Selaku Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

The Shareholders who signed the Resolution of the Minister of State-Owned Enterprises, the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero), and the Pusri Employee Welfare Foundation, acting as the Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Para Pemegang Saham
Shareholders

Nama Name	Jabatan Position
Erick Thohir	Menteri Badan Usaha Milik Negara dan bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia Minister of State-Owned Enterprises, acting for and on behalf of the Republic of Indonesia
Dwi Satriyo Annurogo	Direktur Operasi merangkap Plt. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) dan bertindak mewakili Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Director of Operations concurrently serving as Acting President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero), acting on behalf of the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero)
Balia Akhmad	Ketua Pengurus YKKP Chairman of the YKKP Management Board
Ferryzal Riansyah	Sekretaris Pengurus YKKP Secretary of the YKKP Management Board

RUPS PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG TAHUN SEBELUMNYA

Di tahun 2024 PUSRI menyelenggarakan 6 (enam) kali RUPS, yang terdiri dari 1 (satu) kali RUPS RKAP dan RKA TJSL Tahun 2024 yakni tanggal 30 Januari 2024 dan 1 (satu) kali RUPS Tahunan Kinerja Tahun Buku 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024, serta 4 (empat) kali RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024, tanggal 10 Juni 2024 sebanyak 2 kali dan tanggal 24 Desember 2024. Berikut adalah Agenda, Keputusan Rapat dan tindak lanjut atas keputusan rapat tersebut.

GMS ON OF PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG IN THE PREVIOUS YEAR

In 2024, PUSRI convened 6 (six) General Meetings of Shareholders (GMS), consisting of: 1 (one) GMS on the Company's Work Plan & Budget (RKAP) and the Work Plan & Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) for Fiscal Year 2024, held on January 30, 2024; 1 (one) Annual GMS on Performance for Fiscal Year 2023, held on July 22, 2024; and 4 (four) Extraordinary GMS meetings, held on March 4, 2024; June 10, 2024 (twice); and December 24, 2024. The following outlines the Meeting Agendas, Resolutions, and the follow-up actions taken in relation to those resolutions.

RUPS Tahun 2024 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
 GMS on Fiscal Year 2024 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Date	Agenda	Keputusan Resolution
January 30, 2024 30 Januari 2024	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 PUSRI dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2024 RUPS RKAP dan RKA TJSL Tahun 2024 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Mengesahkan dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut: - Bidang Produksi - Rencana produksi pupuk total sebesar 2.440.000 ton, dengan rincian pupuk Urea 2.115.000 ton dan pupuk NPK 325.000 ton. - Rencana produksi non pupuk (amoniak) sebesar 1.365.131 ton . - Rasio pemakaian gas bumi rata-rata untuk Amonia adalah 36,19 MMBTU/ton dan untuk Urea adalah 29.03 MMBTU/ ton. - Mempertahankan PROPER Emas. - Bidang Pemasaran - Target total pemasaran pupuk PSO sebesar 1.825.506 ton, terdiri dari pupuk Urea 1.431.490 ton dan NPK 394.016 ton. - Target penjualan pupuk komersil sebesar 490.200 ton. - Target penjualan non pupuk sebesar 80.695 ton. - Bidang Keuangan Target bidang keuangan konsolidasi tahun 2024 adalah sebagai berikut: - Laba Tahun Berjalan (setelah pajak) sebesar Rp687,97 miliar. - Total Aset per 31 Desember 2024sebesar Rp30,53 triliun - Tingkat Kesehatan Perusahaan setelah konsolidasi tahun 2024 dengan kategori Sehat “AA” dengan capaian skor minimal IdAAA/Stable.. - Bidang SDM Anggaran biaya gaji dan kesejahteraan karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp1,179 Triliun. - Bidang Investasi Total investasi tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp2,26 triliun. Adapun target pelaksanaan investasi yaitu tercapai 100% untuk realisasi kegiatan dan tercapai minimal 90% untuk target anggaran sesuai yang tercantum dalam RKAP.

RUPS Tahun 2024 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

GMS on Fiscal Year 2024 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Date	Agenda	Keputusan Resolution
		Approves and ratifies the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for Fiscal Year 2024 as well as the 2024 Work Plan and Budget of the Board of Commissioners with the following details: - Production Sector - Total fertilizer production target of 2,440,000 tons, consisting of 2,115,000 tons of Urea and 325,000 tons of NPK fertilizer. - Non-fertilizer (ammonia) production target of 1,365,131 tons. - Average natural gas consumption ratio of 36.19 MMBTU/ton for Ammonia and 29.03 MMBTU/ton for Urea. - Maintain PROPER Gold rating. - Marketing Sector - Total PSO fertilizer marketing target of 1,825,506 tons, consisting of 1,431,490 tons of Urea and 394,016 tons of NPK. - Commercial fertilizer sales target of 490,200 tons. - Non-fertilizer sales target of 80,695 tons. - Finance Sector Consolidated financial targets for 2024 as follows: - Profit for the Year (after tax) of Rp687.97 billion. - Total Assets as of December 31, 2024 amounting to Rp30.53 trillion. - Corporate Health Level after consolidation in 2024 categorized as "Healthy AA" with a minimum achievement score of IdAAA/Stable. - Human Resources Sector Salary and employee welfare budget, including for the Board of Directors and Board of Commissioners, amounting to Rp1.179 trillion. - Investment Sector Total investment target for 2024 amounting to Rp2.26 trillion, with a target of 100% realization of activities and at least 90% achievement of the budget target as stated in the RKAP. Mengesahkan dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) PUSRI Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut : Approves and ratifies the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) of PUSRI for Fiscal Year 2024 with the following details:

RUPS Tahun 2024 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
 GMS on Fiscal Year 2024 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Tanggal Date	Agenda	Keputusan Resolution	
		Keterangan Description Pilar Sosial Social Pillar Pilar Ekonomi Economic Pillar Pilar Lingkungan Environmental Pillar Pilar Hukum dan Tata Kelola Legal and Governance Pillar Total	Nilai (Rp Juta) 32,665 14,830 11,598 200 59,293
	Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target Key Performance Indicators (KPI) Direksi secara Koligial dan Dewan Komisaris Tahun 2024. Approval and Ratification of the Annual Management Contract containing the collective Key Performance Indicators (KPI) targets of the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2024	Mengesahkan dan menyetujui Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target Key Performance Indicators (KPI) Direksi secara Koligial dan Dewan Komisaris Tahun 2024. Approves and ratifies the Annual Management Contract containing the collective KPI targets of the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2024.	
	Tindak Lanjut Keputusan Rapat : Follow-Up to Meeting Resolutions:	Seluruh Keputusan Rapat tersebut telah ditindak lanjuti dan telah diselesaikan oleh Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan di tahun pelaporan All Meeting resolutions have been followed up and completed by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association on the fiscal year	

RUPS TAHUNAN KINERJA TAHUN BUKU 2023 PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

Pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Kinerja Tahun Buku 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:

ANNUAL GMS ON PERFORMANCE FOR FISCAL YEAR 2023 PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

On Monday, July 22, 2024, the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) on Performance for Fiscal Year 2023 of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang was convened, with the following agenda and resolutions:

RUPS Tahunan Kinerja Tahun Buku 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Annual GMS on Performance for Fiscal Year 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

TANGGAL Date	AGENDA	KEPUTUSAN Resolution
22 Juli 2024	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.	- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023. - Mengesahkan: - Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00513/2.1025/AU.1/04/1122-5/1/III/2024 tanggal 31 Maret 2024 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material. - Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00544/2.1025/AU.2/11/1122-5/1/IV/2024 tanggal 4 April 2024 dengan opini, "wajar, dalam semua hal yang material. - Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK). seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan Perseroan dan pengawasan perusahaan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang: - Tindakan tersebut termuat dalam Laporan Tahunan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP; - Tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tidak melanggar kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Catatan KAP ditindaklanjuti dan diselesaikan secara tuntas; dan - Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang disajikan tersebut telah memuat hal-hal dan kejadian-kejadian yang sesungguhnya sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi Perseroan di kemudian hari. - Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Bilamana di kemudian hari ditemukan penyalahgunaan kewenangan dan/atau bertindak di luar kewenangannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian dan/atau bertentangan dengan kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (volledig acquit et de charge) tersebut dinyatakan tidak berlaku.

RUPS Tahunan Kinerja Tahun Buku 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Annual GMS on Performance for Fiscal Year 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

TANGGAL Date	AGENDA	KEPUTUSAN Resolution
July 22, 2024	Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for Fiscal Year 2023, including the granting of full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for actions taken during Fiscal Year 2023	- Approves the Company's Annual Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2023. - Ratifies: - The Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2023 ended December 31, 2023, audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan as stated in Report No. 00513/2.1025/AU.1/04/1122-5/1/III/2024 dated March 31, 2024, with an opinion of "fair, in all material respects." - The Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for Fiscal Year 2023 ended December 31, 2023, audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan as stated in Report No. 00544/2.1025/AU.2/11/1122-5/1/IV/2024 dated April 4, 2024, with an opinion of "fair, in all material respects." - Following the approval and ratification of the above reports, the GMS grants full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions during Fiscal Year 2023, provided that: - Such actions are reflected in the Annual Report or Financial Statements audited by the KAP; - Such actions do not constitute criminal acts and do not violate the code of ethics and/or applicable laws and regulations; - The KAP's notes have been properly followed up and fully resolved; and - The Annual Report and Financial Statements accurately reflect actual events and conditions so as not to cause future losses to the Company. - If it is later discovered that the financial statements are inaccurate, the members of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be jointly and severally liable to the injured parties. If abuse of authority and/or actions beyond authority are found and cause losses or violate ethical standards or laws and regulations, the full release and discharge shall be declared null and void.

RUPS Tahunan Kinerja Tahun Buku 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Annual GMS on Performance for Fiscal Year 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

TANGGAL Date	AGENDA	KEPUTUSAN Resolution
	Penetapan Penggunaan laba Bersih Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023. Determination of the Use of the Company's Consolidated Net Profit for Fiscal Year 2023	Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba tahun berjalan konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp1.199.016.000.000,- (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar enam belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: - Dividen sebesar Rp343.139.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: - Sebesar Rp343.138.171.000,- (tiga ratus empat puluh tiga miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), merupakan dividen bagian PT Pupuk Indonesia (Persero). Dividen tersebut agar disetor ke rekening Bank Mandiri KCP Pusri Jakarta a.n PT Pupuk Indonesia (Persero) nomor 116.00.9000.554.8 paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal keputusan ini, kecuali apabila ditentukan lain sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Copy bukti setor dividen agar disampaikan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero). - Sebesar Rp829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), merupakan dividen bagian Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusri. Dividen tersebut agar disetor langsung kepada Yayasan tersebut, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal keputusan ini, kecuali apabila ditentukan lain sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Copy bukti setor dividen agar disampaikan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero). - Sisanya ditetapkan sebagai cadangan perseroan. Approves and determines the use of consolidated net profit attributable to owners of the parent entity for the fiscal year ended December 31, 2023, amounting to Rp1,199,016,000,000 (one trillion one hundred ninety-nine billion sixteen million rupiah), as follows: - Dividend amounting to Rp343,139,000,000 (three hundred forty-three billion one hundred thirty-nine million rupiah), with details as follows: - Rp343,138,171,000 as dividend portion of PT Pupuk Indonesia (Persero), to be transferred to Bank Mandiri KCP Pusri Jakarta account under the name of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 116.00.9000.554.8 no later than 25 (twenty-five) calendar days from the date of this resolution, unless otherwise stipulated by applicable regulations. Proof of transfer shall be submitted to PT Pupuk Indonesia (Persero). - Rp829,000 as dividend portion of Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusri, to be transferred directly to the foundation no later than 25 (twenty-five) calendar days from the date of this resolution. Proof of transfer shall be submitted to PT Pupuk Indonesia (Persero). - The remaining amount shall be allocated as Company reserves.

RUPS Tahunan Kinerja Tahun Buku 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Annual GMS on Performance for Fiscal Year 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

TANGGAL Date	AGENDA	KEPUTUSAN Resolution
	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan penetapan Jasa Operasi Karyawan atas Kinerja Tahun Buku 2023. Determination of Salary/Honorarium, Facilities and Allowances for Fiscal Year 2024, Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for Fiscal Year 2023 and/or Long-Term Incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners, and Determination of Employee Operating Service Bonus for Fiscal Year 2023	1. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan ditetapkan kemudian secara terpisah dan tersendiri oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham mayoritas Perseroan. 2. Menyetujui dan menetapkan Jasa Operasi untuk Karyawan atas kinerja tahun buku 2023. Persetujuan dan penetapan mengenai Jasa Operasi tersebut akan diberikan secara terpisah dan tersendiri dalam amplop tertutup pada pelaksanaan RUPS ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RUPS tahunan ini. Jasa Operasi agar diberikan kepada Karyawan (termasuk Karyawan Penugasan) secara proporsional dengan memperhatikan masa kerja, kinerja dan tugas serta tanggung jawab. 1. The determination of salary/honorarium, facilities and allowances for Fiscal Year 2024, as well as tantiem/performance incentive/special incentive for Fiscal Year 2023 and/or long-term incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners, shall be determined separately by PT Pupuk Indonesia (Persero) as the majority shareholder. 2. Approves and determines the Operating Service Bonus for employees for Fiscal Year 2023. The amount shall be provided separately in a sealed envelope during this GMS and constitutes an integral part of this Annual GMS. The bonus shall be distributed proportionally based on length of service, performance, duties, and responsibilities.

RUPS Tahunan Kinerja Tahun Buku 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Annual GMS on Performance for Fiscal Year 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

TANGGAL Date	AGENDA	KEPUTUSAN Resolution
	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024. Appointment of Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the PUMK Financial Statements for Fiscal Year 2024	1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (dahulu bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. 3. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit atau persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan, karena sebab apa pun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. 1. Reappoints the Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (formerly KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and PUMK Financial Statements for Fiscal Year 2024. 2. Grants authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit other periods within Fiscal Year 2024 if necessary. 3. Delegates authority to the Board of Commissioners to determine the audit fee and other terms, and to appoint a replacement KAP if required, including determining audit remuneration and other terms for the replacement firm.

RUPS Tahunan Kinerja Tahun Buku 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Annual GMS on Performance for Fiscal Year 2023 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

TANGGAL Date	AGENDA	KEPUTUSAN Resolution
	Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: 1. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; 2. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dan 3. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Regulation Number: 1. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises; 2. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and 3. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.	Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: 1. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; 2. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan 3. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Ratification of the implementation of Minister of SOE Regulations of the Republic of Indonesia: 1. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and the Social and Environmental Responsibility Program of SOEs; 2. PER-2/MBU/03/2023 concerning Governance and Significant Corporate Activities Guidelines of SOEs; and 3. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of SOEs.
Tindak Lanjut Keputusan Rapat : Follow-Up to Meeting Resolutions:	Seluruh butir-butir Keputusan Rapat tersebut telah ditindak lanjuti dan telah diselesaikan oleh Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan All resolutions of the Meeting have been followed up and completed by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.	

RUPS LUAR BIASA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

Pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:

EXTRAORDINARY GMS OF PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

On Monday, March 4, 2024, an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang was convened with the following agenda and resolutions:

RUPS Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Extraordinary GMS of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

TANGGAL Date	AGENDA	KEPUTUSAN Resolution
04 Maret 2024 March 4, 2024	Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Change in the Composition of the Cwompany's Board of Commissioners	1. Sehubungan dengan wafatnya Tuan Amiruddin Nahrawi pada tanggal 02 (dua) bulan Februari 2024, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (29) huruf a Anggaran Dasar Perseroan maka yang bersangkutan berakhir masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan hal tersebut, dengan ini mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan Amiruddin Nahrawi sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 2 Februari 2024, disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan sumbangsinya terhadap Perseroan selama ini. 2. Mengangkat Tuan Fadjar Yudisiawan sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan dengan ketentuan dapat diberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 3. Menegaskan kembali anggota Anggota Dewan Komisaris Perseroan pada saat ditutupnya rapat, yaitu sebagai berikut : a. Tuan Setya Utama : Komisaris Utama b. Tuan Ali Jamil : Komisaris c. Tuan Prahoro Yulijanto Nurtjahyo : Komisaris d. Nyonya Sally Salamah : Komisaris e. Tuan Fadjar Yudisiawan : Komisaris f. Tuan Bambang Supriyambodo : Komisaris Independen
		1. In connection with the passing of Mr. Amiruddin Nahrawi on February 2, 2024, in accordance with Article 24 paragraph (29) letter a of the Company's Articles of Association, his term of office as a member of the Board of Commissioners of the Company ended. Based on this, the Meeting hereby confirms his honorable dismissal as a member of the Board of Commissioners effective February 2, 2024, with the highest appreciation for his services and contributions to the Company. 2. Appoints Mr. Fadjar Yudisiawan as Commissioner of the Company effective upon the closing of this Meeting, for a term of office in accordance with the Company's Articles of Association, and subject to dismissal at any time in accordance with the provisions of the Articles of Association. 3. Reaffirms the composition of the Company's Board of Commissioners as of the closing of the Meeting as follows: a. Mr. Setya Utama : President Commissioner b. Mr. Ali Jamil : Commissioner c. Mr. Prahoro Yulijanto Nurtjahyo: Commissioner d. Mrs. Sally Salamah : Commissioner e. Mr. Fadjar Yudisiawan : Commissioner f. Mr. Bambang Supriyambodo : Independent Commissioner
Tindak Lanjut Keputusan Rapat : Follow-Up to Meeting Resolutions:		Seluruh butir-butir Keputusan Rapat tersebut telah ditindak lanjuti dan telah diselesaikan oleh Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan All resolutions of the Meeting have been followed up and completed by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:

Subsequently, on Monday, June 10, 2024, an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang was convened with the following agenda and resolutions:

RUPS Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Extraordinary GMS of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

TANGGAL Date	AGENDA	KEPUTUSAN Resolution
10 Juni 2024 June 10, 2024	Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Change in the Composition of the Company's Board of Commissioners	- Menunjuk surat pengunduran diri Tuan Setya Utama tertanggal 15 bulan Mei tahun 2024, dengan ini menerima pengunduran diri dan selanjutnya mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan Setya Utama sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan sumbangsihnya terhadap Perseroan ini. - Mengangkat Nyonya Siti Nurizka Puteri Jaya sebagai Komisaris Utama Perseroan merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan dengan ketentuan dapat diberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. - Menegaskan kembali anggota Anggota Dewan Komisaris Perseroan pada saat ditutupnya rapat, yaitu sebagai berikut : - Nyonya Siti Nurizka Puteri Jaya : Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen - Tuan Ali Jamil : Komisaris - Tuan Prahoro Yulijanto Nurtjahyo : Komisaris - Nyonya Sally Salamah : Komisaris - Tuan Fadjar Yudisiawan : Komisaris - Tuan Bambang Supriyambodo : Komisaris Independen

Tindak Lanjut Keputusan Rapat :
Follow-Up to Meeting Resolutions:

Seluruh butir-butir Keputusan Rapat tersebut telah ditindak lanjuti dan telah diselesaikan oleh Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan

All resolutions of the Meeting have been followed up and completed by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

Setelah dilakukan RUPSLB tanggal 10 Juni 2024 di atas, pada hari yang sama Senin, tanggal 10 Juni 2024 dilakukan kembali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:

Following the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on June 10, 2024, on the same day, Monday, June 10, 2024, another Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang was convened with the following agenda and resolutions:

RUPS Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Extraordinary GMS of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

TANGGAL Date	AGENDA	KEPUTUSAN Resolution
10 Juni 2024 June 10, 2024	Perubahan Nomenklatur Direksi Perseroan Change in the Nomenclature of the Company's Board of Directors	1. Mengubah nomenklatur Direksi Perseroan dengan menambahkan jabatan Direktur Manajemen Risiko Perseroan. 2. Menunjuk Tuan Saifullah Lasindrang untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur Manajemen Risiko Perseroan dengan kekuasaan dan wewenang yang sama sebagai Direktur Manajemen Risiko Perseroan, disamping melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Keuangan dan Umum Perseroan, terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan ditetapkan Direktur Manajemen Risiko Perseroan yang definitif, dengan ketentuan penunjukan tersebut dapat sewaktu-waktu ditarik kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. 1. To change the nomenclature of the Company's Board of Directors by adding the position of Director of Risk Management. 2. To appoint Mr. Saifullah Lasindrang to perform the duties of Director of Risk Management of the Company with the same powers and authority as the Director of Risk Management, in addition to his duties as Director of Finance and General Affairs of the Company, effective from the closing of this Meeting until the definitive Director of Risk Management is appointed, with the provision that such appointment may be revoked at any time by the General Meeting of Shareholders of the Company.
Tindak Lanjut Keputusan Rapat : Follow-Up to Meeting Resolutions:		Seluruh butir-butir Keputusan Rapat tersebut telah ditindak lanjuti dan telah diselesaikan oleh Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan All resolutions of the Meeting have been followed up and completed by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.



DEWAN KOMISARIS DAN KOMISARIS INDEPENDEN

BOARD OF COMMISSIONERS AND INDEPENDENT COMMISSIONERS



Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Pemegang Saham.

Dewan Komisaris senantiasa bertindak secara independen, tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

The Board of Commissioners carries out supervisory duties over management policies and the overall conduct of the Company's management, both concerning the Company and its business activities undertaken by the Board of Directors, and provides advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners is accountable for the execution of its duties at the General Meeting of Shareholders.

The Board of Commissioners must act independently, meaning that it must not have any conflict of interest that could interfere with its ability to perform its duties independently and critically, both in relation to one another and in relation to the Board of Directors.

Dewan Komisaris adalah salah satu organ Perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasehat tersebut terkait dengan pengelolaan Perseroan, termasuk penerapan GCG dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab atas tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris harus dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan dengan Direksi.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Dasar hukum pengangkatan Dewan Komisaris PUSRI adalah:

1. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri BUMN No PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN;
5. Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SE-08/XI/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkungan Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero);
6. Anggaran Dasar Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

The Board of Commissioners is one of the Company's organs tasked with conducting general and/or specific supervision in accordance with the Company's Articles of Association and providing advice to the Board of Directors. Such supervision and advisory functions relate to the management of the Company, including the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and compliance with applicable laws and regulations

The Board of Commissioners is accountable to the Shareholders in carrying out its supervisory duties over management policies and the overall conduct of the Company's management, both concerning the Company and its business activities undertaken by the Board of Directors, as well as in providing advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners is also responsible for supervising the implementation of the Company's Long-Term Plan, the Company's Work Plan and Budget, and compliance with the provisions of the Articles of Association and the resolutions of the General Meeting of Shareholders, in the interest of the Company and in line with its purposes and objectives.

In performing its supervisory duties, the Board of Commissioners must act independently, meaning that it must not have any conflict of interest that could interfere with its ability to carry out its duties independently and critically, both in relation to one another and in relation to the Board of Directors.

LEGAL BASIS FOR APPOINTMENT

The legal basis for the appointment of the Board of Commissioners of PUSRI includes:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, as amended several times, most recently by Law No. 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended several times, most recently by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation as Law.
3. Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Governance and Significant Corporate Activities Guidelines for SOEs.
4. Minister of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of SOEs.
5. Circular Letter of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SE-08/XI/2012 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance within Subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero).
6. Articles of Association of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

KRITERIA DAN PERSYARATAN UNTUK MENJADI DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Calon Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya tidak pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit; dan
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Dewan Komisaris juga wajib memenuhi persyaratan materiil yang meliputi integritas, dedikasi, pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, serta menyediakan waktu yang cukup dan memiliki kemauan yang kuat (antusias) untuk memajukan dan mengembangkan PUSRI.

Persyaratan lain Anggota Dewan Komisaris, yaitu:

1. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan/atau;
2. Tidak sedang menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham dengan mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KETENTUAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

Ketentuan ini juga berlaku untuk Komisaris Independen yang diangkat sesuai keputusan RUPSLB.

PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Jabatan anggota Dewan Komisaris berhenti apabila

1. Meninggal dunia atau berhalangan tetap;

CRITERIA AND REQUIREMENTS TO BECOME A MEMBER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Prospective members of the Board of Commissioners must be individuals legally competent to perform legal acts and, within the last 5 (five) years prior to their appointment, must not have:

1. Been declared bankrupt;
2. Served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners/Supervisory Board who was found guilty of causing an SOE, Subsidiary, and/or other business entity to be declared bankrupt; and
3. Been convicted of a criminal offense causing losses to state finances, SOEs, Subsidiaries, other business entities, and/or related to the financial sector.

Members of the Board of Commissioners must also meet material requirements, including integrity, dedication, understanding of corporate management issues related to one of the management functions, adequate knowledge in the Company's business sector, availability of sufficient time, and strong commitment and enthusiasm to advance and develop PUSRI.

Additional requirements include:

1. Not serving as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board in other State-Owned Enterprises, subsidiaries of SOEs and their affiliates, or regional government-owned enterprises; and/or
2. Not holding any other position in accordance with applicable laws and regulations;

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the Shareholders through a fit and proper test process in accordance with applicable regulations.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The term of office of members of the Board of Commissioners is determined by the General Meeting of Shareholders (GMS).

These provisions also apply to Independent Commissioners appointed pursuant to an Extraordinary GMS resolution.

DISMISSAL OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The position of a member of the Board of Commissioners shall cease when:

1. The member passes away or is permanently incapacitated;

2. Masa jabatannya berakhir; atau diberhentikan sebelum masa berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Komisaris, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit; menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan komisaris/Dewan Pengawas yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai penyebab suatu Perseroan, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit; dan dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/atau tindak pidana lain dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, atau diberhentikan oleh RUPS

2. The term ends; or the member is dismissed before the term expires due to no longer meeting the requirements as a member of the Board of Commissioners, except if within the last 5 (five) years prior to appointment, the individual has been declared bankrupt; has become a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners/ Supervisory Board and, based on a final court decision, is declared a cause for the company, subsidiaries, or other business entities to be declared bankrupt; or has been convicted of committing a criminal offense that harms state finances and/or related to the financial sector, and/or other criminal acts with a minimum penalty of 5 (five) years, or dismissed by the General Meeting of Shareholders.

KOMPOSISI DAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus 2025 berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 22 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta yaitu penggantian Sdr. Ali Jamil dan Sdr. Prahoro Yulijanto Nurtjahyo digantikan oleh Sdr. Muhammad Syakir dan Sdr. Arteria Dahlan. Adapun Sdr. Bambang Supriyambodo diangkat Kembali sebagai Komisaris Independen.

COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2025, there were changes to the composition and membership of the Board of Commissioners based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) held on August 5, 2025, as documented in Deed No. 08 dated August 22, 2025, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta. The changes involved the replacement of Mr. Ali Jamil and Mr. Prahoro Yulijanto Nurtjahyo by Mr. Muhammad Syakir and Mr. Arteria Dahlan. In addition, Mr. Bambang Supriyambodo was reappointed as Independent Commissioner.

Susunan Dewan Komisaris Per 31 Desember 2025

Board of Commissioners Composition as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan dan Periode Menjabat Term of Office and Period Served
Siti Nurizka Puteri Jaya	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Keputusan RUPSLB tanggal 10 Juni 2024 yang dikuatkan dengan Akta No. 02 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated June 10, 2024, formalized by Deed No. 02 dated June 10, 2024, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.	10 Juni 2024 s.d 9 Juni 2029, Periode Pertama June 10, 2024 to June 9, 2029, First Term
Bambang Supriyambodo	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPSLB tanggal 4 Maret 2024 yang dikuatkan dengan Akta No. 02 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated March 4, 2024, formalized by Deed No. 02 dated March 4, 2024, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.	25 Agustus 2020 s.d 24 Agustus 2025, Periode Pertama 5 Agustus 2025 s.d 4 Agustus 2030, Periode Kedua August 25, 2020 to August 24, 2025, First Term August 5, 2025 to August 4, 2030, Second Term

Susunan Dewan Komisaris Per 31 Desember 2025

Board of Commissioners Composition as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan dan Periode Menjabat Term of Office and Period Served
Sally Salamah	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPSLB tanggal 5 Agustus 2025 yang dikuatkan dengan Akta No. 08 tanggal 22 Agustus 2025 yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated August 5, 2025, formalized by Deed No. 08 dated August 22, 2025, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.	12 Juni 2021 s.d 11 Juni 2026, Periode Pertama June 12, 2021 to June 11, 2026, First Term
Fadjar Judisiawan	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPSLB tanggal 5 Agustus 2025 yang dikuatkan dengan Akta No. 08 tanggal 22 Agustus 2025 yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated August 5, 2025, formalized by Deed No. 08 dated August 22, 2025, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.	4 Maret 2024 s.d 3 Maret 2029, Periode Pertama March 4, 2024 to March 3, 2029, First Term
Muhammad Syakir	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPSLB tanggal 10 Juni 2024 yang dikuatkan dengan Akta No. 02 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated June 10, 2024, formalized by Deed No. 02 dated June 10, 2024, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.	5 Agustus 2025 s.d 4 Agustus 2030 Periode Pertama August 5, 2025 to August 4, 2030, First Term
Arteria Dahlan	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPSLB tanggal 5 Agustus 2025 yang dikuatkan dengan Akta No. 08 tanggal 22 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated August 5, 2025, formalized by Deed No. 08 dated August 22, 2020, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta.	5 Agustus 2025 s.d 4 Agustus 2030 Periode Pertama August 5, 2025 to August 4, 2030, First Term

Per 31 Desember 2026 sampai dengan ditandatangani Laporan Tahunan (*Annual Report*) tahun Buku 2025, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris, dimana Komisaris Bambang Supriyambodo digantikan dengan Teddy Gusnaldi dan Mohamad Idris Laena diangkat menjadi Komisaris Independen. Susunan Dewan Komisaris pada saat ditandatangani Laporan Tahunan sebagai berikut:

As of December 31, 2025, and up to the signing of the 2025 Annual Report, there were changes to the composition of the Board of Commissioners. Commissioner Bambang Supriyambodo was replaced by Teddy Gusnaldi, and Mohamad Idris Laena was appointed as Independent Commissioner. The composition of the Board of Commissioners at the time the Annual Report was signed was as follows:

Susunan Dewan Komisaris Per 31 Mei 2026

Composition of the Board of Commissioners as of May 31, 2026

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan dan Periode Menjabat Term of Office and Service Period
Siti Nurizka Puteri Jaya	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	Keputusan RUPSLB tanggal 10 Juni 2024 yang dikuatkan dengan Akta No. 02 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated June 10, 2024, formalized by Deed No. 02 dated June 10, 2024, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta	10 Juni 2024 s.d 9 Juni 2029, Periode Pertama June 10, 2024 to June 9, 2029, First Term
Sally Salamah	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPSLB tanggal 12 Juni 2021 yang dikuatkan dengan Akta No.11 tanggal 12 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated June 12, 2021, formalized by Deed No. 11 dated June 12, 2021, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta	12 Juni 2021 s.d 11 Juni 2026, Periode Pertama June 12, 2021 to June 11, 2026, First Term
Fadjar Judisiawan	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPSLB tanggal 4 Maret 2024 yang dikuatkan dengan Akta No. 02 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated March 4, 2024, formalized by Deed No. 02 dated March 4, 2024, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta	4 Maret 2024 s.d 3 Maret 2029, Periode Pertama March 4, 2024 to March 3, 2029, First Term
Muhammad Syakir	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPSLB tanggal 5 Agustus 2025 yang dikuatkan dengan Akta No. 08 tanggal 22 Agustus 2025 yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated August 5, 2025, formalized by Deed No. 08 dated August 22, 2025, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta	5 Agustus 2025 s.d 4 Agustus 2030 Periode Pertama August 5, 2025 to August 4, 2030, First Term
Arteria Dahlan	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPSLB tanggal 5 Agustus 2025 yang dikuatkan dengan Akta No. 08 tanggal 22 Agustus 2025 yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated August 5, 2025, formalized by Deed No. 08 dated August 22, 2025, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta	5 Agustus 2025 s.d 4 Agustus 2030 Periode Pertama August 5, 2025 to August 4, 2030, First Term
Teddy Gusnadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham Nomor : 196 Tahun 2026, Nomor : 017/A/HK/D0302/KPS/2026, Nomor : 24/Y/IV/KPS/2026 Shareholders' Resolution No. 196 of 2026, No. 017/A/HK/D0302/KPS/2026, No. 24/Y/IV/KPS/2026	14 April 2026 s.d. 13 April 2031 April 14, 2026 to April 13, 2031
Mohamad Idris Laena	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham Nomor : 246 Tahun 2026, Nomor : 018/A/HK/D0302/KPS/2026, Nomor : 26/Y/IV/KPS/2026 Shareholders' Resolution No. 246 of 2026, No. 018/A/HK/D0302/KPS/2026, No. 26/Y/IV/KPS/2026	25 April 2026 s.d. 24 April 2031 Periode Pertama April 25, 2026 to April 24, 2031, First Term

KOMISARIS INDEPENDEN

PUSRI adalah bagian dari Holding BUMN Pupuk yang tidak menawarkan saham ke publik (*non-listed*). Dengan demikian, peraturan yang menjadi acuan Perseroan terkait dengan Komisaris Independen adalah Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Pasal 15 dan Anggaran Dasar yang menyebutkan komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 20% merupakan anggota Dewan Komisaris Independen. Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atas hubungan dengan perusahaan yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Per 31 Desember 2025, PUSRI memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen, yaitu Bambang Supriyambodo yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS LB pada tanggal 25 Agustus 2020 dan Siti Nurizka Puteri Jaya yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS LB pada 10 Juni 2024. Dengan demikian, dari 6 (enam) anggota Dewan Komisaris, lebih dari 30% di antaranya adalah Komisaris Independen, sehingga telah memenuhi jumlah minimal Komisaris Independen yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Sedangkan pada saat Laporan Tahunan ini ditandatangani, PUSRI memiliki 3 Komisaris Independen, yaitu Siti Nurizka Puteri Jaya, Teddy Gusnaidi yang diangkat sesuai Keputusan Para Pemegang Saham Nomor : 196 Tahun 2026, Nomor : 017/A/HK/D0302/KPS/2026, Nomor : 24/Y/IV/KPS/2026, Mohamad Idris Laena yang diangkat sesuai Keputusan Para Pemegang Saham Nomor : 246 Tahun 2026, Nomor : 018/A/HK/D0302/KPS/2026, Nomor : 26/Y/IV/KPS/2026. Dengan demikian, dari 7 (tujuh) anggota Dewan Komisaris, lebih dari 40% diantaranya adalah Komisaris Independen, sehingga telah memenuhi jumlah minimal Komisaris Independen yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

PERSYARATAN KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen sebagaimana disebutkan dalam pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;

INDEPENDENT COMMISSIONERS

PUSRI is part of the State-Owned Fertilizer Holding and does not offer its shares to the public (*non-listed*). Accordingly, the regulations governing the Company with respect to Independent Commissioners refer to Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 Article 15 and the Articles of Association, which stipulate that at least 20% of the Board of Commissioners must consist of Independent Commissioners. An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership, and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or controlling shareholders, or any relationship with the Company that could affect their ability to act independently.

As of December 31, 2025, PUSRI has 2 (two) Independent Commissioners, namely Bambang Supriyambodo, appointed pursuant to the resolution of the Extraordinary GMS on August 25, 2020, and Siti Nurizka Puteri Jaya, appointed pursuant to the resolution of the Extraordinary GMS on June 10, 2024. Accordingly, out of 6 (six) members of the Board of Commissioners, more than 30% are Independent Commissioners, thereby fulfilling the minimum number of Independent Commissioners as required under the applicable regulations.

Meanwhile, as of the signing date of this Annual Report, PUSRI has three Independent Commissioners, namely Siti Nurizka Puteri Jaya and Teddy Gusnaidi, who were appointed pursuant to Shareholders' Decision Number 196 of 2026, Number 017/A/HK/D0302/KPS/2026, and Number 24/Y/IV/KPS/2026, as well as Mohamad Idris Laena, who was appointed pursuant to Shareholders' Decision Number 246 of 2026, Number 018/A/HK/D0302/KPS/2026, and Number 26/Y/IV/KPS/2026. Accordingly, out of seven members of the Board of Commissioners, more than 40% are Independent Commissioners, thereby meeting the minimum requirement under applicable regulations.

REQUIREMENTS FOR INDEPENDENT COMMISSIONERS

As stipulated in the Board of Commissioners and Board of Directors Work Guidelines, an Independent Commissioner must fulfill the following requirements:

1. Must not be an individual who has worked for or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except in the case of reappointment as an Independent Commissioner for the subsequent term;

2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
 3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan
 4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
 5. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
2. Must not own shares in the Company, whether directly or indirectly;
 3. Must not have any affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Company's controlling shareholder; and
 4. Must not have any business relationship, whether directly or indirectly, related to the Company's business activities.
 5. An Independent Commissioner who has served for 2 (two) terms may be reappointed for the subsequent term, provided that the Independent Commissioner declares his or her continued independence to the General Meeting of Shareholders (GMS).

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk mengawasi jalannya pengurusan Perseroan dan usaha Perseroan, Dewan Komisaris PUSRI berpedoman pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang telah ditandatangani pada 10 November 2022. Pedoman tersebut disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa dikaji secara berkelanjutan dan dilakukan penyesuaian dengan dinamika perusahaan dan lingkungan usaha.

Pokok isi dan cakupan *Board Manual* Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Direksi
3. Dewan Komisaris
 - a. Fungsi Dewan Komisaris;
 - b. Konsep Umum Pengawasan Dewan Komisaris;
 - c. Tugas, Wewenang & Kewajiban Dewan Komisaris;
 - d. Etika Jabatan Anggota Dewan Komisaris;
 - e. Pembagian Kerja Dewan Komisaris;
 - f. Rapat Dewan Komisaris;
 - g. Organ Pendukung Dewan Komisaris.
4. Tata Laksana Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
5. Kegiatan Antar Organ Perusahaan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara umum adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan

BOARD OF COMMISSIONERS WORK GUIDELINES

In carrying out its duties, responsibilities, and authority to supervise the management of the Company and its business activities, the Board of Commissioners of PUSRI refers to the Board of Commissioners and Board of Directors Work Guidelines (*Board Manual*), which was signed on November 10, 2022. The guideline is prepared in accordance with prevailing laws and regulations and is continuously reviewed and adjusted in line with the Company's development and the dynamics of the business environment.

The main contents and scope of the Board Manual for the Board of Commissioners are as follows:

1. Introduction
2. Board of Directors
3. Board of Commissioners:
 - a. Functions of the Board of Commissioners;
 - b. General Concept of Supervision by the Board of Commissioners;
 - c. Duties, Authorities, and Obligations of the Board of Commissioners;
 - d. Code of Ethics for Members of the Board of Commissioners;
 - e. Work Division of the Board of Commissioners;
 - f. Meetings of the Board of Commissioners;
 - g. Supporting Organs of the Board of Commissioners.
4. Procedures for the Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors
5. Interactions among Company Organs

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In general, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are to supervise management policies and the overall conduct of the Company's management, both with respect to the Company and its business activities carried out by the Board of Directors, and to provide

nasihat kepada Direksi. Berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dirinci sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
5. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
6. Memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam proses bisnis Perseroan;
7. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern, Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi;
8. Melakukan penilaian atas kinerja Direksi dalam pengelolaan Perseroan dan melaporkannya kepada Pemegang Saham;
9. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

advice to the Board of Directors. Based on the Articles of Association and prevailing laws and regulations, these duties are further detailed as follows:

1. To provide advice to the Board of Directors in managing the Company;
2. To examine, review, and sign the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association;
3. To provide opinions and recommendations to the General Meeting of Shareholders regarding the reasons for signing the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget;
4. To monitor the Company's business developments and provide opinions and recommendations to the General Meeting of Shareholders on any matters deemed significant to the management of the Company;
5. To promptly report to the General Meeting of Shareholders if there are indications of a decline in the Company's performance;
6. To monitor the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles within the Company's business processes;
7. To supervise and provide advice regarding the implementation of Internal Audit, Risk Management, and Integrated Governance functions;
8. To evaluate the performance of the Board of Directors in managing the Company and report the results to the Shareholders; and
9. To perform other obligations in relation to supervisory and advisory duties, provided that such actions do not conflict with prevailing laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders.

TANGGUNG JAWAB KOMISARIS UTAMA

Melakukan koordinasi seluruh pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan merangkap sebagai Ketua Komite Nominasi & Remunerasi.

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Pembagian tugas Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-04/DEKOM/PUSRI/VI/2022 dan diperbaharui melalui keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-09/DEKOM/PUSRI/VIII/2025. Sesuai dengan peran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua dari Komite di bawah Dewan Komisaris, pembagian tugas juga memperhatikan kemampuan, latar belakang dan pengalaman.

RESPONSIBILITIES OF THE PRESIDENT COMMISSIONER

To coordinate the overall execution of the duties of the Board of Commissioners and concurrently serve as Chair of the Nomination & Remuneration Committee.

DIVISION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The division of duties of the Board of Commissioners is stipulated based on the Board of Commissioners' Decree No. KEP-04/DEKOM/PUSRI/VI/2022 and was updated through the Board of Commissioners' Decree No. KEP-09/DEKOM/PUSRI/VIII/2025. In accordance with the respective roles of the members of the Board of Commissioners as Chairpersons of the Committees under the Board of Commissioners, the division of duties also takes into account their capabilities, backgrounds, and experience.

NAMA Name	BIDANG TUGAS Scope of Duties
Siti Nurizka Puteri Jaya	Mengkoordinir seluruh tugas dan fungsi anggota-anggota Dewan Komisaris dan merangkap sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Concurrently serves as Chair of the Nomination & Remuneration Committee and coordinates all duties and functions of the members of the Board of Commissioners.
Muhammad Syakir	Membidangi segala aspek yang berkaitan dengan Bidang Penjualan Produk PSO, Produk Komersil, Distribusi dan Pemasaran. Oversees all aspects related to PSO Product Sales, Commercial Products, Distribution, and Marketing.
Arteria Dahlan	Membidangi segala aspek yang berkaitan dengan Teknik dan Sistem Informasi, Riset dan Pengembangan, serta Proyek Pembangunan Pabrik PUSRI III-B. Oversees all aspects related to Engineering and Information Systems, Research and Development, as well as the PUSRI III-B Plant Construction Project.
Bambang Supriyambodo	Membidangi segala aspek yang berkaitan dengan Bidang Operasi, Teknologi dan Pemeliharaan, Investasi dan Manajemen Risiko dan merangkap sebagai Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko. Concurrently serves as Chair of the Investment & Risk Management Committee and oversees all aspects related to Operations, Technology and Maintenance, Investment, and Risk Management.
Sally Salamah	Membidangi segala aspek yang berkaitan dengan Bidang Keuangan, Pengawasan Internal, dan Tata Kelola dan merangkap sebagai Ketua Komite Audit Concurrently serves as Chair of the Audit Committee and oversees all aspects related to Finance, Internal Supervision, and Governance.
Fadjar Judisiawan	Membidangi segala aspek yang berkaitan dengan Bidang Umum, Pengadaan dan Sumber Daya Manusia. Oversees all aspects related to General Affairs, Procurement, and Human Resources.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris membuat pernyataan independensi setiap awal tahun untuk bersikap independen dan bebas benturan kepentingan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wujud dari pelaksanaan etika jabatan anggota Dewan Komisaris.

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

All members of the Board of Commissioners sign a statement of independence at the beginning of each year, affirming their commitment to act independently and free from conflicts of interest in carrying out their functions and duties, as part of the implementation of the code of ethics for members of the Board of Commissioners.

Nama Name	Pernyataan Sikap Bebas benturan Kepentingan Statement of No Conflict of Interest
Siti Nurizka Puteri Jaya	Bebas benturan kepentingan (Pernyataan telah ditandatangani pada 6 Januari 2025 Free from conflicts of interest (Declaration signed on January 6, 2025)
Muhammad Syakir	Bebas benturan kepentingan (Pernyataan telah ditandatangani pada 5 Agustus 2025 Free from conflicts of interest (Declaration signed on August 5, 2025)
Arteria Dahlan	Bebas benturan kepentingan (Pernyataan telah ditandatangani pada 5 Agustus 2025 Free from conflicts of interest (Declaration signed on August 5, 2025)
Bambang Supriyambodo	Bebas benturan kepentingan (Pernyataan telah ditandatangani pada 5 Agustus 2025 Free from conflicts of interest (Declaration signed on August 5, 2025)
Sally Salamah	Bebas benturan kepentingan (Pernyataan telah ditandatangani pada 6 Januari 2025 Free from conflicts of interest (Declaration signed on January 6, 2025)
Fadjar Judisiawan	Bebas benturan kepentingan (Pernyataan telah ditandatangani pada 6 Januari 2025 Free from conflicts of interest (Declaration signed on January 6, 2025)

HUBUNGAN AFILIASI DAN KEPENGURUSAN DI PERUSAHAAN LAIN

Antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda.

AFFILIATION RELATIONSHIPS AND POSITIONS IN OTHER COMPANIES

There are no blood relationships up to the third degree, either in a direct line or collateral line, nor marital relationships, between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.

Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham dapat dilihat di bagian Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Family relationships among members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors as well as Shareholders can be seen in the section on the Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Kepengurusan Perusahaan lain anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Other company positions held by members of the Board of Commissioners are presented in the following table:

Kepengurusan di Perusahaan Lain

Positions in Other Companies

Nama Name	Sebagai Dewan Komisaris Position as Member of the Board of Commissioners in Other Companies	Sebagai Direksi/Jabatan Lain Position as Director / Other Position	Sebagai Pemegang Saham As a Shareholder
Siti Nurizka Puteri Jaya	-	-	-
Muhammad Syakir	-	Tenaga Ahli Menteri Bidang Pengembangan Budidaya dan Pasca Panen, Kementerian Pertanian (2023–sekarang) Expert Staff to the Minister for Cultivation and Post-Harvest Development, Ministry of Agriculture (2023–present)	-
Arteria Dahlan	-	-	-
Bambang Supriyambodo	-	-	-
Sally Salamah	-	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, BPKP Deputy for Supervision of Government Agencies in the Areas of Politics, Security, Law, Human Development, and Culture, BPKP	-
Fadjar Judisiawan	-	Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan, BP BUMN Assistant Deputy for the Healthcare Industry Sector, BP BUMN	-

RANGKAP JABATAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan Pasal 14 ayat 32 Anggaran Dasar Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap dengan jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

CONCURRENT POSITIONS AND CONFLICT OF INTEREST

Pursuant to Article 14 paragraph (32) of the Company's Articles of Association, members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions that conflict with applicable laws and regulations, including serving as political party officials and/or candidates for legislative office and/or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head.

Selama tahun 2025, tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Throughout 2025, no member of the Board of Commissioners held concurrent positions that were contrary to the provisions of the Company's Articles of Association.

PERTEMUAN/RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain dilaksanakan dalam bentuk pertemuan atau

MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners is carried out, among others,

rapat, baik antar anggota Dewan Komisaris maupun dengan mengundang Direksi dan Komite. Pelaksanaan pertemuan juga menjadi salah satu mekanisme evaluasi pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, termasuk dalam hal pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan pertemuan atau rapat sebanyak 12 (dua belas) kali rapat internal kali, dan 15 (lima belas) kali rapat gabungan, berikut rinciannya:

through meetings, both among members of the Board of Commissioners and jointly with the Board of Directors and Committees. Meetings also serve as a mechanism for evaluating the execution of the Board of Commissioners' duties, authorities, and responsibilities, including in relation to the fulfillment of social and environmental responsibilities.

During 2025, the Board of Commissioners convened a total of 12 (twelve) internal meetings and 15 (fifteen) joint meetings. The details are as follows:

Tingkat Kehadiran rapat Gabungan Dewan Komisaris Direksi Tahun 2025

Attendance Rate at Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2025

Jenis Rapat Type of Meeting	Jumlah Rapat Number of Meetings	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Meetings of the Board of Commissioners	12	93%
Rapat Dewan Komisaris – Direksi Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors	15	91%

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Board Manual Dewan Komisaris PUSRI menyebutkan bahwa Rapat Dewan Komisaris dapat diperluas dengan mengundang Direksi, komite-komite, atau undangan lainnya. Direksi diperkenankan mengikutsertakan/ menugaskan staf Perusahaan. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan pada akhir bulan atau sesuai kesepakatan Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka pembahasan kinerja Perusahaan serta hal-hal yang strategis dan aktual.

Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama melakukan panggilan rapat secara tertulis dan disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak sesuai Anggaran Dasar Perusahaan.

Dalam setiap rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah disusun risalah serta dinamika rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan. Risalah rapat tersebut ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dan didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

JOINT MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The PUSRI Board Manual stipulates that meetings of the Board of Commissioners may be extended by inviting the Board of Directors, committees, or other invitees. The Board of Directors may involve or assign Company staff to attend such meetings. Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors are held at the end of each month or at another time as agreed by both organs, for the purpose of discussing the Company's performance as well as strategic and current matters.

The President Commissioner or a member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner issues a written meeting invitation to members of the Board of Commissioners and the Board of Directors at least 3 (three) days prior to the meeting, or within a shorter period in urgent circumstances in accordance with the Company's Articles of Association.

Minutes of each joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors are prepared, including a record of discussions, dissenting opinions (if any), and resolutions adopted. The minutes are prepared by the Secretary to the Board of Commissioners and the Corporate Secretary, signed by all attending members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and distributed to all members of both organs.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak hadir dalam rapat internal Dewan Komisaris memberikan surat kuasa kepada anggota Dewan Komisaris atau Direksi lainnya agar penerima kuasa dapat bertindak sesuai dengan yang dikuasakan kepadanya.

Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors who are unable to attend an internal meeting of the Board of Commissioners may grant a written power of attorney to another member of the Board of Commissioners or the Board of Directors to act on their behalf in accordance with the authority granted.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2025, rapat gabungan digelar sebanyak 15 (lima belas) kali. Frekuensi dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Frequency and Attendance of Meetings

Throughout 2025, joint meetings were convened 15 (fifteen) times. The frequency and attendance level of the Board of Commissioners and the Board of Directors are presented as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan

Recapitulation of Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors at Joint Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Required Meetings	Jumlah Kehadiran Total Total Attendance	Jumlah Tidak Hadir Absences	Kehadiran (%) Attendance
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
Siti Nurizka Puteri Jaya	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	15	14	1	93
Ali Jamil*	Komisaris Commissioner	6	5	1	83
Prahoru Yulijanto Nurtjahyo**	Komisaris Commissioner	5	3	2	60
Bambang Supriyambodo	Komisaris Independen Independent Commissioner	15	13	2	86
Sally Salamah	Komisaris Commissioner	15	14	1	93
Fadjar Judisiawan	Komisaris Commissioner	15	15	0	100
Muhammad Syakir***	Komisaris Commissioner	5	5	0	100
Arteria Dahlan***	Komisaris Commissioner	5	5	0	100
Direksi Board of Directors					
Daconi Khotob*	Direktur Utama President Director	8	8	0	100
Filius Yuliandi**	Direktur Operasi dan Produksi Director of Operations and Production	9	9	0	100
Saifullah Lasindrang**	Direktur Keuangan dan Umum Director of Finance and General Affairs	9	9	0	100

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Required Meetings	Jumlah Kehadiran Total Total Attendance	Jumlah Tidak Hadir Absences	Kehadiran (%) Attendance
Saifullah Lasindrang **	Plt. Direktur Manajemen Risiko Acting Director of Risk Management	9	9	0	100
Maryono***	Direktur Utama President Director	6	6	0	100
Panji W. Ruky***	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	6	6	0	100
R. Eric J. Rachman***	Direktur Keuangan dan Umum Director of Finance and General Affairs	6	6	0	100
Sholikin***	Direktur Operasi dan Produksi Director of Operations and Production	6	6	0	100
Dewan Komisaris *) Menjabat sampai tanggal 16 Juni 2025 **) Menjabat sampai tanggal 14 April 2025 ***) Menjabat sejak tanggal 5 Agustus 2025 Direksi *) Menjabat sd 30 Juni 2025 **) Menjabat sampai tanggal 5 Agustus 2025 ***) Menjabat sejak tanggal 5 Agustus 2025			Board of Commissioners *) Served until June 16, 2025 **) Served until April 14, 2025 ***) Serving since August 5, 2025 Board of Directors *) Served until June 30, 2025 **) Served until August 5, 2025 ***) Serving since August 5, 2025		

Daftar Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal
Attendance List of the Board of Commissioners at Internal Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Required Meetings	Jumlah Kehadiran Total Total Attendance	Jumlah Tidak Hadir Absences	Kehadiran (%) Attendance
Siti Nurizka Puteri Jaya	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	12	11	1	91
Ali Jamil*	Komisaris Commissioner	5	3	2	60
Prahoro Yulijanto Nurtjahyo**	Komisaris Commissioner	3	1	2	33
Bambang Supriyambodo	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	0	100
Sally Salamah	Komisaris Commissioner	12	11	1	91
Fadjar Judisiawan	Komisaris Commissioner	12	9	3	75
Muhammad Syakir***	Komisaris Commissioner	5	5	0	100

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Required Meetings	Jumlah Kehadiran Total Total Attendance	Jumlah Tidak Hadir Absences	Kehadiran (%) Attendance
Arteria Dahlan***	Komisaris Commissioner	5	5	0	100
*) Menjabat sampai tanggal 16 Juni 2025 **) Menjabat sampai tanggal 14 April 2025 ***) Menjabat sejak tanggal 5 Agustus 2025		*) Served until June 16, 2025 **) Served until April 14, 2025 ***) Serving since August 5, 2025			

PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DAN KUNJUNGAN KE LAPANGAN

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan beberapa hal terkait pelaksanaan tanggung jawab pengawasan dalam beberapa aspek seperti pertemuan atau Rapat Dewan Komisaris - Direksi dalam rangka evaluasi kinerja dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025, sebanyak 15 (lima belas) kali serta rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali.

Selain itu, dalam kurun waktu periode pelaporan, Dewan Komisaris juga telah melakukan kunjungan area kerja Perusahaan. Kunjungan dilakukan untuk melihat perkembangan pelaksanaan pekerjaan sesuai Rencana Kerja, serta mengawasi kegiatan operasi Perusahaan secara faktual. Kunjungan kerja dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF SUPERVISORY DUTIES AND SITE VISITS

Throughout 2024, the Board of Commissioners carried out various supervisory activities in several aspects, including joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors to evaluate performance and the implementation of the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP), which were held 15 (fifteen) times, as well as 12 (twelve) internal meetings of the Board of Commissioners.

During the reporting period, the Board of Commissioners also conducted site visits to the Company's operational areas. These visits were undertaken to observe the progress of work implementation in accordance with the Work Plan and to directly oversee the Company's operational activities. Work visits were carried out by members of the Board of Commissioners as follows:

No	Tanggal Date	Tujuan Location	Agenda
1	11 Januari 2025 January 11, 2025	Kunjungan Kerja ke Palembang Official Visit to Palembang	Peninjauan Proyek Pusri IIIB Project Review of Pusri III-B
2	5 s.d 7 Februari 2025 February 5 to 7, 2025	Kunjungan Kerja ke Banyuwangi dan Probolinggo Official Visit to Banyuwangi and Probolinggo	Peninjauan Aset Pusri Asset Inspection of Pusri
3	6 s.d 12 Mei 2025 May 6–12, 2025	Kunjungan Kerja ke Itali Official Visit to Italy	High Level Management Meeting dan Fabrication Monitoring Visit serta Menghadiri IFA Annual Conference High-Level Management Meeting and Fabrication Monitoring Visit, as well as attending the IFA Annual Conference
4	18 s.d 21 Mei 2025 May 18–21, 2025	Kunjungan Kerja ke Sumatera Selatan Official Visit to South Sumatra	Peninjauan Penyaluran Pupuk Subsidi Review of Subsidized Fertilizer Distribution
5	6 s.d 9 Juli 2025 July 6 to 9, 2025	Kunjungan Kerja ke D.I.Y dan Jawa Tengah Official Visit to D.I.Y and Central Java	Peninjauan Penyaluran Pupuk Subsidi Review of Subsidized Fertilizer Distribution
6	13 Agustus 2025 August 13, 2025	Kunjungan Kerja ke Palembang Official Visit to Palembang	Peninjauan Proyek Pusri IIIB Project Review of Pusri III-B
7	6 September 2025 September 6, 2025	Kunjungan Kerja ke Palembang Official Visit to Palembang	Peninjauan Gudang Kantong Pusri Inspection of Pusri Bag Warehouse
8	24 s.d 27 September 2025 September 24 to 27, 2025	Kunjungan Kerja ke Gresik Official Visit to Gresik	Peninjauan Gudang Persediaan Pupuk (GPP) Inspection of Fertilizer Stock Warehouse (GPP)

No	Tanggal Date	Tujuan Location	Agenda
9	17 s.d 22 November 2025 November 17 to 22, 2025	Kunjungan Kerja Ke Wuhan dan Tokyo Official Visit to Wuhan and Tokyo	Menghadiri Urea License Meeting (ULM) 2025 TOYO di Tokyo, Jepang dan The 3rd Top Management Meeting of PUSRI-III B Project di Wuhan, Cina Attendance at Urea License Meeting (ULM) 2025 TOYO in Tokyo, Japan, and the 3rd Top Management Meeting of PUSRI IIIB Project in Wuhan, China
10	7 s.d 10 November 2025 November 7 to 10, 2025	Kunjungan Kerja ke D.I.Y dan Jawa Tengah Official Visit to D.I.Y and Central Java	Peninjauan Aset Pusri Asset Inspection of Pusri

Pelaksanaan *site visit* proyek Pusri III-B dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 14 Januari 2025 yang berlokasi di Palembang. Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, Dewan Komisaris memperoleh informasi terkait progres proyek serta memberikan arahan kepada manajemen untuk memastikan penyelesaian konstruksi *piling* dan progres *engineering* sesuai target, melakukan identifikasi dan mitigasi risiko secara komprehensif, serta mengevaluasi penggunaan verifikator independen guna menjamin ketepatan pelaporan dan kelancaran penyelesaian proyek Pusri III-B.

The site visit to the Pusri III-B project was conducted from January 11 to January 14, 2025, in Palembang. Based on the results of the visit, the Board of Commissioners obtained information regarding the project's progress and provided directions to management to ensure the completion of piling construction and engineering progress in accordance with the established targets, conduct comprehensive risk identification and mitigation, and evaluate the use of an independent verifier to ensure accurate reporting and the smooth completion of the Pusri III-B project.

Peninjauan gudang pupuk beserta kunjungan langsung ke distributor, pengecer, dan KPL di wilayah Sumatera Selatan dan Lampung dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 20 Mei 2025. Berdasarkan hasil kunjungan kerja tersebut, Dewan Komisaris memperoleh informasi terkait kondisi fisik dan penyaluran pupuk subsidi di lapangan serta memberikan arahan untuk menjaga kualitas maupun manajemen penyimpanan pupuk dan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian termasuk pemangku kepentingan lainnya guna memastikan penyerapan alokasi pupuk subsidi tahun 2025 secara maksimal sebagai bentuk ketahanan pangan.

An inspection of fertilizer warehouses, along with direct visits to distributors, retailers, and KPLs in the South Sumatra and Lampung regions, was conducted on May 19 and May 20, 2025. Based on the results of the working visit, the Board of Commissioners obtained information regarding the physical condition and distribution of subsidized fertilizers in the field and provided directions to maintain fertilizer quality and storage management, as well as strengthen coordination with the Ministry of Agriculture and other stakeholders to ensure the maximum absorption of the 2025 subsidized fertilizer allocation as part of efforts to support food security.

Dewan Komisaris memperoleh informasi bahwa masih terdapat kantong retail yang tersimpan di gudang sejak tahun 2016 dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan kembali (obsolete) serta telah dalam proses penghapusbukuan. Dewan Komisaris memberikan arahan agar proses penghapusbukuan tersebut segera diselesaikan sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan memastikan pendataan jumlah dan masa edar kantong dilakukan secara akurat, serta mendorong manajemen untuk menyampaikan kebutuhan dukungan apabila diperlukan guna mempercepat penyelesaian proses penghapusbukuan tersebut.

The Board of Commissioners also obtained information that there were still retail bags stored in warehouses since 2016 that were damaged and could no longer be used (obsolete), and which were in the process of being written off. The Board of Commissioners directed that the write-off process be completed promptly in accordance with the applicable guidelines, ensuring that the recording of the quantity and circulation period of the bags is carried out accurately, and encouraged management to communicate any support requirements needed to accelerate the completion of the write-off process.

KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan pihak yang posisinya sangat penting dalam menentukan sukses tidaknya Perusahaan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, setiap anggota Dewan Komisaris dituntut untuk memiliki kemampuan

POLICY ON THE BOARD OF COMMISSIONERS DEVELOPMENT PROGRAM

The Board of Commissioners holds a critical position in determining whether the Company is managed effectively. Therefore, each member of the Board of Commissioners is expected to possess the skills and competencies required

dan keahlian (Skill) yang dapat memenuhi kebutuhan Perusahaan. Menyadari peran dan posisi Dewan Komisaris yang sangat penting dalam menentukan sukses tidaknya pengelolaan Perusahaan melalui tugas pengawasan dan penasehatan yang dijalankannya, PUSRI menyediakan program peningkatan pengetahuan dan kompetensi melalui pendidikan informal antara lain: Seminar, Workshop, Studi Banding. Program pengembangan tersebut harus sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan, dan membuat laporan pelaksanaan program pengembangan kepada Pemegang Saham.

Adapun realisasi program pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2025 disajikan bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

PROGRAM PENGENALAN UNTUK ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BARU

Selain menyediakan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi anggota Dewan Komisaris yang telah bertugas, PUSRI juga melaksanakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru. Tujuannya adalah memberikan gambaran terhadap aktivitas bisnis, rencana Perusahaan ke depan, panduan kerja dan lainnya yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan materi kepada anggota Dewan Komisaris yang baru, sesuai dengan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi.

Program pengenalan tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal termasuk Komite Audit.
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Pada Tahun 2025, telah dilaksanakan program pengenalan perusahaan pada tanggal 12 Agustus 2025 kepada Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus 2025 berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 22 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta yaitu penggantian Sdr. Ali Jamil dan Sdr. Prahoro Yulijanto Nurtjahyo yang digantikan oleh Sdr. Muhammad Syakir dan Sdr. Arteria Dahlan.

to meet the Company's needs. Recognizing the strategic role of the Board of Commissioners in overseeing and advising on Company management, PUSRI provides knowledge enhancement and competency development programs through informal education, including seminars, workshops, and benchmarking visits. These development programs must align with the Company's Work Plan and Budget, and reports on their implementation are submitted to the Shareholders.

The realization of training and competency enhancement programs attended by the Board of Commissioners throughout 2025 is presented in the Company Profile section of this Annual Report.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In addition to providing training and competency development programs for existing members, PUSRI also conducts an orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners. The objective is to provide an overview of business activities, future Company plans, work guidelines, and other responsibilities of the Board of Commissioners. The Corporate Secretary is responsible for delivering the orientation materials to newly appointed members, in accordance with the Board of Commissioners and Board of Directors Guidelines.

The orientation program includes:

1. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles within the Company;
2. An overview of the Company's objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short- and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
3. Information regarding delegated authority, internal and external audit functions, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors, including prohibited actions.

In 2025, a company orientation program was conducted on August 12, 2025, for members of the Board of Commissioners who were appointed pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) held on August 5, 2025, as documented in Deed No. 08 dated August 22, 2025, executed before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta. The appointments involved the replacement of Mr. Ali Jamil and Mr. Prahoro Yulijanto Nurtjahyo by Mr. Muhammad Syakir and Mr. Arteria Dahlan.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat pemegang saham melalui RUPS.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dan kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris juga dapat melakukan self-assessment kinerja Dewan Komisaris yang dilakukan secara mandiri sebagai upaya untuk melakukan evaluasi internal Dewan Komisaris mengenai sejauh mana efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris.

Penilaian sendiri dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Penilaian didasarkan pada pencapaian atas target yang ditetapkan dalam indikator-indikator kinerja kunci (KPI), termasuk perihal pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

KRITERIA EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS. Adapun kriteria evaluasi kinerja bagi Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite yang ada.
2. Kontribusi dalam proses pengawasan dan pemberian nasihat terhadap jajaran Manajemen.
3. Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.
5. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan metode *self assessment* untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Penilaian dilakukan secara kolegal oleh anggota Dewan Komisaris berdasarkan pencapaian target yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama (KPI) tahun 2025.

PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In general, the performance of the Board of Commissioners is determined based on the duties and obligations set out in applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and mandates from Shareholders through the GMS.

The evaluation results of the Board's collective performance and the individual performance of each member form an integral part of the compensation and incentive scheme for members of the Board of Commissioners. The results also serve as a basis for Shareholders in deciding on dismissal and/or reappointment. Performance evaluation functions as a tool for assessment and for improving the effectiveness of the Board of Commissioners.

PROCEDURE FOR PERFORMANCE EVALUATION

The Board of Commissioners may conduct a self-assessment of its performance as an internal evaluation mechanism to measure the effectiveness of its supervisory functions and duties.

The self-assessment is conducted individually by each member of the Board of Commissioners and is based on the achievement of targets set out in the Key Performance Indicators (KPI), including the implementation of social and environmental responsibilities.

PERFORMANCE EVALUATION CRITERIA

The evaluation criteria for the Board of Commissioners are determined by the GMS. The criteria for individual members include:

1. Attendance rate at Board of Commissioners meetings and committee meetings;
2. Contribution to supervisory processes and advisory functions to Management;
3. Involvement in specific assignments;
4. Compliance with applicable laws and regulations and Company policies;
5. Commitment to advancing the interests of the Company.

PARTY CONDUCTING THE EVALUATION

The performance evaluation of the Board of Commissioners is conducted using a self-assessment method to evaluate the effectiveness of supervisory duties. The evaluation is carried out collegially by members of the Board of Commissioners based on the achievement of targets set out in the 2025 Key Performance Indicators (KPI).

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Assessment penilaian kinerja Dewan Komisaris PUSRI dilakukan pada tahun 2025. Dalam mengukur kinerja Dewan Komisaris, digunakan 10 (sepuluh) indikator dengan total bobot nilai kinerja maksimum sebesar 100%. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris sesuai dengan kesimpulan deskripsi penilaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

RESULTS OF THE PERFORMANCE EVALUATION

The performance assessment of the PUSRI Board of Commissioners was conducted in 2025. In measuring the performance of the Board of Commissioners, 10 (ten) indicators were used, with a maximum total performance score weighting of 100%. The results of the Board of Commissioners' performance assessment, based on the conclusions of the 2025 performance evaluation description, are as follows:

No	Kegiatan Activity	Frekuensi Frequency		%	Bobot Weight	Skor Score
		Rencana Plan	Realisasi Actual			
1	Rapat Internal Evaluasi kebijakan, laporan manajemen, dan masalah khusus Internal Meetings – Evaluation of policies, management reports, and specific issues	12	12	100	10	10
2	Rapat Internal Evaluasi RKAP Internal Meetings – Evaluation of RKAP	1	2	200	10	20
3	Pembahasan RKAP RKAP Discussion	12	12	100	10	10
4	Pembahasan laporan manajemen (bulanan, triwulanan, semester, tahunan). Discussion of management reports (monthly, quarterly, semester, annual)	2	2	100	5	5
5	Pembahasan kebijakan & masalah khusus. Discussion of policies and specific issues	1	1	100	15	15
6	Pembahasan dalam rangka pengesahan RKAP yang dilaksanakan dalam forum RUPS. Discussion in the context of RKAP approval in the GMS forum	1	1	100	15	15
7	Pembahasan dalam rangka pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan (Audited). Discussion in the context of approval of the Annual Report and Audited Annual Financial Statements	2	10	500	3	15
8	Kunjungan kerja dalam rangka pemahaman bisnis dilakukan perjalanan dinas ke cabang-cabang atau lokasi-lokasi lain yang dipandang perlu. Work visits to enhance business understanding through official visits to branches or other relevant locations	2	8	400	2	8
9	Untuk meningkatkan kompetensi, Dekom menghadiri seminar atau studi banding terkait dengan aspek pengawasan dan atau manajemen. Attendance at seminars or benchmarking activities to enhance supervisory and/or management competencies	12	14	117	20	23
10	Saran lisan yang tertuang dalam notulen rapat atau saran tertulis. Verbal recommendations recorded in meeting minutes or written recommendations	12	12	100	10	10
JUMLAH SKOR TOTAL SCORE					100	131

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

PUSRI melakukan evaluasi kinerja anggota komite baik secara individual maupun secara kolektif, setiap 1 (satu) tahun secara self-assessment dengan menggunakan metode evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris, dan menjadi bahan penilaian perpanjangan masa kerja anggota komite untuk tahun berikutnya.

Indikator penilaian kinerja komite terdiri atas indikator umum dan indikator khusus. Indikator umum di antaranya meliputi kehadiran dalam rapat, kemampuan bekerjasama dan berkomunikasi secara aktif dengan sesama anggota komite, integritas, kemampuan memahami visi misi dan rencana strategis PUSRI. Indikator khusus meliputi kualitas atas saran/rekomendasi yang diberikan terkait program kerja masing-masing komite.

Hasil penilaian kinerja Komite-komite Dewan Komisaris di tahun 2025 dituangkan dalam Tanggapan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Berkala pada Laporan Pengawasan Triwulan IV Tahun 2024, Triwulan I, II, dan III Tahun 2025. Adapun Triwulan IV dan Tahun 2025 disampaikan pada Tahun 2026.

Penilaian Dewan Komisaris atas Kinerja Komite Audit

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Audit selama tahun 2025 dan berdasarkan Hasil Capaian KPI Komite Audit tahun 2025, Dewan Komisaris menilai Kinerja Komite Audit Tahun 2025 adalah "Sangat Baik".

Penilaian Dewan Komisaris atas Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2025 dan berdasarkan Hasil Capaian KPI Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2025, Dewan Komisaris menilai Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025 adalah "Sangat Baik".

Penilaian Dewan Komisaris atas Kinerja Komite Investasi & Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Investasi & Manajemen Risiko selama tahun 2025 dan berdasarkan Hasil Capaian KPI Komite Investasi & Manajemen Risiko tahun 2025, Dewan Komisaris menilai Kinerja Komite Investasi & Manajemen Risiko Tahun 2025 adalah "Sangat Baik".

EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' SUPPORTING COMMITTEES

PUSRI conducts an annual performance evaluation of committee members, both individually and collectively, through a self-assessment mechanism using an evaluation system established under a Board of Commissioners Decree. The evaluation results serve as a basis for considering the extension of committee members' terms for the following year.

The committee performance indicators consist of general and specific indicators. General indicators include attendance at meetings, the ability to collaborate and communicate actively with fellow committee members, integrity, and the ability to understand PUSRI's vision, mission, and strategic plans. Specific indicators include the quality of advice and recommendations provided in relation to each committee's work program.

The performance evaluations of the Board of Commissioners' Committees for 2025 are documented in the Responses and Periodic Supervisory Reports in the Fourth Quarter 2024, and the First, Second, and Third Quarters of 2025. The Fourth Quarter 2024 and the 2025 Annual Supervisory Reports be submitted in 2026.

Evaluation of the Audit Committee

Based on the implementation of its duties and functions during 2025 and the achievement of its 2025 Key Performance Indicators (KPI), the Board of Commissioners assesses the performance of the Audit Committee in 2025 as "Very Good."

Evaluation of the Nomination and Remuneration Committee

Based on the implementation of its duties and functions during 2025 and the achievement of its 2025 KPI, the Board of Commissioners assesses the performance of the Nomination and Remuneration Committee in 2025 as "Very Good."

Evaluation of the Investment & Risk Management Committee

Based on the implementation of its duties and functions during 2025 and the achievement of its 2025 KPI, the Board of Commissioners assesses the performance of the Investment & Risk Management Committee in 2025 as "Very Good."

Penilaian Dewan Komisaris atas Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Komisaris selama tahun 2025, Dewan Komisaris menilai Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2025 adalah "Sangat Baik"

Evaluation of the Secretary to the Board of Commissioners

Based on the implementation of the duties and functions of the Secretariat of the Board of Commissioners during 2025, the Board of Commissioners assesses the performance of the Secretary to the Board of Commissioners in 2025 as "Very Good."

Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Dewan Komisaris Apabila Terlibat Dalam Kejahatan Keuangan

Apabila dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris terlibat dalam kejahatan keuangan, maka tindak lanjut yang dilakukan Perusahaan mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

POLICY REGARDING RESIGNATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN THE EVENT OF INVOLVEMENT IN FINANCIAL CRIMES

If, in the performance of their duties, a member of the Board of Commissioners is involved in a financial crime, the Company shall take follow-up actions in accordance with the provisions set out in the Company's Articles of Association and the applicable laws and regulations.



DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS



Direksi merupakan organ Perseroan yang secara kolektif bertugas memimpin, mengurus dan mengelola usaha demi tercapainya tujuan Perusahaan. Direksi juga mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama setara, dengan tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Direksi memiliki wewenang untuk mengarahkan jalannya operasional Perusahaan, mengambil langkah strategis sesuai ketentuan Anggaran Dasar, dan menetapkan kebijakan yang dianggap perlu untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional Perusahaan.

The Board of Directors is a corporate organ that collectively bears responsibility for leading, managing, and administering the Company's business activities to achieve the Company's objectives. The Board of Directors also represents the Company both inside and outside the court in accordance with applicable laws and regulations, the Articles of Association, and resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS).

The position of each member of the Board of Directors, including the President Director, is equal, with the President Director's role being to coordinate the activities of the Board of Directors. The Board of Directors has the authority to direct the Company's operational activities, take strategic actions in accordance with the provisions of the Articles of Association, and establish policies deemed necessary to ensure the efficiency and effectiveness of the Company's operations.

Direksi adalah organ Perusahaan yang bertugas memimpin, mengurus dan mengelola usaha demi tercapainya tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama setara, dengan tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Direksi dapat mengambil keputusan, termasuk dalam rapat Direksi, dan melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun demikian tanggung jawab kolektif tetap berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Direksi berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi wajib mengerahkan segenap sumber daya dan kompetensinya untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan meningkatkan pencapaian kinerja Perusahaan di tahun pelaporan dan dimasa-masa mendatang.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi wajib memperhatikan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan lainnya, dan harus bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta memperhatikan batasan yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Agar tidak menimbulkan benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap, baik sebagai anggota Direksi pada BUMN lain, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha milik swasta; jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pemilihan dan pengangkatan Direksi PUSRI adalah:

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

The Board of Directors is a Company organ responsible for leading, administering, and managing the Company's business in order to achieve its objectives, and for representing the Company both inside and outside the court in accordance with applicable laws and regulations, the Articles of Association, and resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS).

Each member of the Board of Directors, including the President Director, holds an equal position. The President Director's duty is to coordinate the activities of the Board of Directors. The Board of Directors may adopt decisions, including through Directors' Meetings, and implement such decisions in accordance with the division of duties and authorities. Nevertheless, the principle of collective responsibility remains applicable.

In carrying out its duties and obligations, the Board of Directors operates under the supervision of the Board of Commissioners. The Board of Directors must utilize all available resources and competencies to maintain and improve the Company's performance during the reporting year and in the years ahead.

In performing its duties and authorities, the Board of Directors must prioritize the interests of the Company above other interests and act in accordance with the Company's purposes and objectives, while observing the limitations set out in applicable laws and regulations.

To avoid conflicts of interest, members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as: Members of the Board of Directors of other SOEs, Regional-Owned Enterprises, or private entities; Structural and functional positions within central or regional government institutions; Political party officials and/or legislative candidates/members; and/or Other positions that may create conflicts of interest and/or are prohibited under prevailing laws and regulations.

LEGAL BASIS

The legal basis for the election and appointment of the Board of Directors of PUSRI includes:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended most recently by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation as Law;

2. Peraturan Menteri BUMN No PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN; 3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN; 4. Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SE-08/XI/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkungan Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero); 5. Anggaran Dasar Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	2. Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Governance and Significant Corporate Activities Guidelines for SOEs; 3. Minister of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of SOEs; 4. Circular Letter of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SE-08/XI/2012 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance within Subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero); 5. Articles of Association of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

KRITERIA DIREKSI

Setiap Direksi PUSRI diwajibkan menandatangani surat pernyataan sebagai pembuktian pemenuhan kriteria yang telah ditentukan oleh Perusahaan. Adapun kriteria yang telah diatur oleh Perusahaan sebagai syarat menjadi Direksi. mencakup:

1. Pengalaman atau rekam jejak yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN, anak Perusahaan BUMN, dan atau Perusahaan lainnya.
2. Keahlian dan pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, pemahaman yang baik terhadap manajemen dan tata kelola Perusahaan dan kemampuan untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan.
3. Integritas, dalam artian calon anggota Direksi tersebut tidak pernah terlibat melakukan perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur), perbuatan cedera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan, perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dengan prinsip-prinsip pengurusan Perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
4. Kepemimpinan yang diterjemahkan dengan memiliki kemampuan untuk memformulasikan dan mengartikulasikan visi Perusahaan, membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan agar mampu mewujudkan tujuan Perusahaan.

CRITERIA FOR THE BOARD OF DIRECTORS

Each member of the PUSRI Board of Directors is required to sign a declaration letter as evidence of compliance with the criteria established by the Company. The criteria stipulated by the Company as requirements for becoming a Director include:

1. Experience or a proven track record demonstrating success in managing SOEs, SOE subsidiaries, and/or other companies;
2. Adequate expertise and knowledge in the Company's line of business, a sound understanding of corporate management and governance, and the ability to determine and implement strategic policies for the development of the Company's business;
3. Integrity, meaning that the prospective member of the Board of Directors has never been involved in manipulation or irregular practices at the place where he or she worked prior to nomination (dishonest conduct), breaches of commitment that may be categorized as failure to fulfill agreed commitments at the place where he or she worked prior to nomination, acts that may be categorized as unlawfully providing benefits to himself/herself and/or other parties prior to nomination, or acts that may be categorized as violations of regulations and principles of sound corporate management (improper conduct).
4. Leadership, demonstrated by the ability to formulate and articulate the Company's vision, inspire enthusiasm (provide renewed energy), and motivate executives and employees to achieve the Company's objectives. A strong willingness (enthusiasm) and high level of dedication to advance and develop the Company concerned;

5. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan yang bersangkutan. Persyaratan kepatutan atau syarat formal yang harus dimiliki oleh calon anggota Direksi, yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
- a. Dinyatakan pailit
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, anak Perusahaan dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. BUMN. Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan lainnya.

PROSEDUR PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN DIREKSI

Mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang juga mencakup penetapan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.

Apabila pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan.

Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat umum Pemegang Saham.

MASA JABATAN DIREKSI

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengatur masa jabatan anggota Direksi yakni maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Apabila masa jabatan anggota Direksi berakhir dan Rapat Umum Pemegang Saham belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang tidak terisi tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang tidak terisi.

5. Fit and proper requirements or formal qualifications that must be possessed by prospective members of the Board of Directors include being an individual legally competent to perform legal acts, provided that within the 5 (five) years preceding their appointment, they have not:
- a. Been declared bankrupt;
 - b. Served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners/Supervisory Board found guilty of causing an SOE, subsidiary, and/or other company to be declared bankrupt;
 - c. Been convicted of a criminal offense causing losses to state finances, SOEs, subsidiaries, and/or other companies.

PROCEDURE FOR APPOINTMENT AND DISMISSAL

In accordance with the Articles of Association, members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS, which also determines the effective date of such appointment and dismissal. If the GMS does not specify the effective date, the appointment or dismissal becomes effective upon the closing of the GMS.

If the appointment and dismissal of Board of Directors members are made through shareholders' decisions outside the General Meeting of Shareholders, the effective date of such appointment and dismissal shall be stated in the shareholders' decision. If the shareholders' decision outside the General Meeting does not specify an effective date, the appointment and dismissal shall be effective from the date the shareholders' decision is made.

Members of the Board of Directors are appointed from candidates proposed by the Shareholders, and such nominations are binding upon the GMS.

TERM OF OFFICE

The Articles of Association stipulate that members of the Board of Directors serve a maximum term of 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) additional term. If a Director's term expires and the GMS has not yet appointed a replacement, the duties of the vacant position shall be carried out in accordance with provisions governing the filling of vacant Director positions.

KOMPOSISI DAN SUSUNAN DIREKSI

Pada tahun 2025 terjadi pergantian personalia Direksi sehubungan dengan pengunduran diri Sdr Daconi Khotob dari jabatannya sebagai Direktur Utama sejak tanggal 30 Juni 2025. dan berakhirnya masa tugas anggota Direksi lainnya. yakni Sdr Filius Yuliandi dan Sdr Saifullah Lasindrang. Oleh karenanya pada tanggal 5 Agustus 2025. sesuai Pernyataan Keputusan Menteri BUMN, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri (YKKP) selaku Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor : SK-220/MBU/08/2025 - 011/A/HK/D0302/KPS/2025 - 11/SK/YKKP/VIII/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota- Anggota Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Perusahaan memutuskan mengangkat empat orang personalia Direksi Baru. yakni: Sdr Maryono sebagai Direktur Utama. Sdr Sholikin sebagai Direktur Operasi dan Produksi. Sdr R. Eric Juliana Rachman sebagai Direktur Keuangan dan Umum. kemudian Sdr Panji Winanteya Ruky Winanteya sebagai Direktur Manajemen Risiko.

Dengan demikian hingga berakhirnya tahun 2025 jumlah Direksi menjadi sebanyak 4 (empat) orang. Jumlah anggota Direksi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 mengenai jumlah anggota Direksi Perusahaan. yakni jumlah Direksi minimal 2 (dua) orang.

Berikut susunan anggota Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pada akhir tahun 2025.

COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2025, there was a change in the Board of Directors due to the resignation of Mr. Daconi Khotob from his position as President Director effective June 30, 2025, and the end of the terms of other Board members, namely Mr. Filius Yuliandi and Mr. Saifullah Lasindrang. Therefore, on August 5, 2025, In accordance with the Joint Resolution of the Minister of State-Owned Enterprises, the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero), and the Pusri Employees Welfare Foundation (YKKP), acting as the Shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, No. SK-220/MBU/08/2025 - 011/A/HK/D0302/KPS/2025 - 11/SK/YKKP/VIII/2025 regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang., the Company decided to appoint four new Board members: Mr. Maryono as President Director, Mr. Sholikin as Director of Operations and Production, Mr. R. Eric Juliana Rachman as Director of Finance and General Affairs, and Mr. Panji Winanteya Ruky Winanteya as Director of Risk Management.

As of the end of 2025, the Board of Directors consists of 4 (four) members. This number complies with OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014, which requires a minimum of 2 (two) Directors.

The following is the composition of the Board of Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang as of the end of 2025.

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Menjabat Period Served	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Maryono	Direktur Utama President Director	05 Agustus 2025 - sekarang August 5, 2025 – present	Pertama 1st Term in Office	Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia. dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pusri selaku Para Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor: SK-220/MBU/08/2025. Nomor: 011/A/HK/D0302/KPS/2025. Nomor: 11/SK/YKKP/VIII/2025 yang dikuatkan oleh Akta Nomor: 07 tanggal 22 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Lumassia. S.H.. Notaris di Jakarta. The statement of the decision by the Minister of State-Owned Enterprises. the President Director of the Company (Persero) PT Pupuk Indonesia. and the Welfare Foundation of PT Pusri. as the shareholders of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. under Decree Number: SK-220/MBU/08/2025. Number: 011/A/HK/D0302/KPS/2025. Number: 11/SK/YKKP/VIII/2025. ratified by Notarial Deed Number: 07 dated August 22, 2025. made before Lumassia. S.H.. Notary in Jakarta.
Sholikin	Direktur Operasi dan Produksi Director of Operations and Production	05 Agustus 2025 - sekarang August 5, 2025 – present	Pertama 1st Term in Office	
R. Eric Juliana Rachman	Direktur Keuangan dan Umum Director of Finance and General Affairs	05 Agustus 2025 - sekarang August 5, 2025 – present	Pertama 1st Term in Office	
Panji Winanteya Ruky	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	05 Agustus 2025 - sekarang August 5, 2025 – present	Pertama 1st Term in Office	

RANGKAP JABATAN

PUSRI memberlakukan kebijakan mengenai rangkap jabatan Direksi dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 10 Ayat 34 yang menyatakan bahwa anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau
5. Jabatan lain pada institusi diluar PUSRI yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Adapun informasi mengenai rangkap jabatan Direksi PUSRI pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Nama Name	Jabatan Position	Rangkap Jabatan dan Nama Concurrent Position and Institution
Maryono	Direktur Utama President Director	Tidak memiliki rangkap jabatan Does not hold any concurrent position
R. Eric Juliana Rachman	Direktur Keuangan dan Umum Director of Finance and General Affairs	Tidak memiliki rangkap jabatan Does not hold any concurrent position
Sholikin	Direktur Operasi dan Produksi Director of Operations and Production	Tidak memiliki rangkap jabatan Does not hold any concurrent position
Panji Winanteya Ruky	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	Tidak memiliki rangkap jabatan Does not hold any concurrent position

BOARD MANUAL: PEDOMAN KERJA DIREKSI

PUSRI telah memiliki dan memberlakukan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang telah disahkan melalui pernyataan komitmen bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi yang ditandatangani pada tanggal 4 Agustus 2025 yang merupakan kesepakatan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PUSRI di dalam menjalankan fungsi dan peran jabatannya sebagai pengemban amanat Perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris menjadi acuan Direksi maupun Komisaris dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya masing-masing.

Concurrent Positions

PUSRI implements a policy on concurrent positions of the Board of Directors as stipulated in Article 10 paragraph (34) of the Company's Articles of Association, which states that members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as follows:

1. Member of the Board of Directors of a State-Owned Enterprise, Regional-Owned Enterprise, or private enterprise;
2. Member of the Board of Commissioners/Supervisory Board of a State-Owned Enterprise;
3. Structural or functional positions within central and/or regional government institutions;
4. Other positions as regulated under prevailing laws and regulations, including political party officials and/or legislative candidates/members and/or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head; and/or
5. Other positions in institutions outside PUSRI that may create a conflict of interest.

The information regarding concurrent positions held by members of the PUSRI Board of Directors in 2025 is as follows:

BOARD MANUAL: GUIDELINES FOR THE BOARD OF DIRECTORS

PUSRI has established and implemented the Board Manual for the Board of Directors and the Board of Commissioners, ratified through a joint commitment statement between the Board of Commissioners and the Board of Directors signed on August 4th 2025. This document reflects the mutual agreement of both organs in carrying out their respective functions and roles as fiduciaries of the Company in accordance with prevailing laws and regulations. The Board Manual serves as a reference for both the Directors and Commissioners in performing their duties, authorities, and obligations.

Dokumen tersebut menjadi salah satu perangkat *Good Corporate Governance* (GCG) yang disusun dengan mengacu pada Anggaran Dasar serta dasar-dasar hukum yang berlaku. Penyusunan Board Manual itu bertujuan untuk:

1. Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Menerapkan asas-asas GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran

Ruang lingkup hal yang diatur dalam Board Manual ini secara umum mencakup hal-hal seperti peran dan fungsi masing-masing organ, pembagian tugas, hubungan kerja antar organ, rapat organ dan mekanisme pengambilan keputusan, dan lain-lain. Perusahaan juga menekankan dokumen tersebut merupakan dokumen yang hidup sehingga senantiasa dilakukan penyesuaian dengan dinamika Perusahaan dan lingkungan usaha serta dikaji secara berkelanjutan.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI

PUSRI telah mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Direksi dalam Board Manual. Pada tanggal 27 Oktober 2020, Perusahaan melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan pada Pasal 11 mengenai Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi.

Mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan yang tercantum dalam Akta No.11 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H. tanggal 27 Oktober 2020. Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0405621 tanggal 10 November 2020. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam menjalankan tugasnya Direksi mempunyai kewenangan antara lain:

The document constitutes one of the key instruments of Good Corporate Governance (GCG), prepared with reference to the Articles of Association and applicable legal foundations. The preparation of the Board Manual aims to:

1. Serve as a reference/guideline regarding the main duties and functions of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2. Enhance the quality and effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners.
3. Implement the principles of Good Corporate Governance (GCG), namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

In general, the scope regulated in this Board Manual covers matters such as the roles and functions of each organ, division of duties, working relationships between organs, meetings and decision-making mechanisms, and others. The Company emphasizes that this document is a living document, continuously reviewed and adjusted in line with the Company's dynamics and business environment.

DUTIES, AUTHORITIES, AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

PUSRI regulates the duties, authorities, and obligations of the Board of Directors in the Board Manual. On October 27, 2020, the Company amended Article 11 of its Articles of Association concerning the Duties, Authorities, and Obligations of the Board of Directors.

Referring to the Articles of Association as stated in Deed No. 11 dated October 27, 2020, drawn up before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.03-0405621 dated November 10, 2020, the Board of Directors is responsible for carrying out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with its purposes and objectives, as well as representing the Company inside and outside the court in all matters and events, subject to limitations as regulated in prevailing laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS).

In carrying out its duties, the Board of Directors has the authority to:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dengan ketentuan bahwa Pemegang Saham mayoritas berwenang menetapkan kebijakan untuk bidang-bidang tertentu.
 2. Melaksanakan kepengurusan Perusahaan sesuai dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan bidang-bidang di Perusahaan antara lain:
 - a. Pemasaran dan penjualan.
 - b. Penelitian dan pengembangan.
 - c. *Supply chain management* dan *cost management*.
 - d. Pengadaan barang dan atau jasa.
 - e. Finance dan audit serta manajemen risiko dan kepatuhan.
 - f. Manajemen talenta dan pengembangan sumber daya manusia yang terintegrasi.
 - g. Hukum.
 - h. Bidang lainnya. diatur dan ditetapkan oleh Pemegang Saham mayoritas.
 3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
 4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain. untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
 5. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dengan ketentuan bahwa terhadap penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja, wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham mayoritas.
 6. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan serta membentuk Satuan Pengawasan Intern.
 8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan. mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan. serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian. dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Anggaran Dasar dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham.
1. Establish management policies of the Company, provided that the majority shareholder has the authority to determine policies in certain areas.
 2. Manage the Company, including the administration of the following areas:
 - a. Marketing and sales.
 - b. Research and development.
 - c. Supply chain management and cost management.
 - d. Procurement of goods and/or services.
 - e. Finance and audit, as well as risk management and compliance.
 - f. Talent management and integrated human resource development.
 - g. Legal affairs.
 - h. Other areas as regulated and determined by the majority shareholder.
 3. Delegate the authority of the Board of Directors to one or more Directors to make decisions on behalf of the Board or represent the Company inside and outside the court.
 4. Delegate authority to one or more employees of the Company, individually or jointly, or to other parties to represent the Company inside and outside the court.
 5. Establish employment provisions, including determining salaries, pensions or retirement benefits, and other remuneration for employees in accordance with prevailing laws and regulations, provided that the determination of salaries, pensions, or other income must first obtain written approval from the majority shareholder.
 6. Appoint and dismiss employees in accordance with Company employment regulations and prevailing laws and regulations.
 7. Appoint and dismiss the Corporate Secretary and establish the Internal Audit Unit.
 8. Perform all other actions concerning the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, and represent the Company inside and outside the court in all matters and events, subject to limitations stipulated in laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS resolutions.

Di samping itu, Direksi juga memiliki kewajiban yang mencakup:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham mayoritas.
3. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
4. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
5. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi.
6. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
7. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
8. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang.
9. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
10. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan, dan dokumen Perusahaan lainnya.

In addition, the Board of Directors has the following obligations:

1. Ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with its purposes and objectives.
2. Implement policies established by the majority shareholder.
3. Prepare in a timely manner the Company's Long-Term Plan, Annual Work Plan and Budget, and their amendments, and submit them to the Board of Commissioners and Shareholders for GMS approval.
4. Provide explanations to the GMS regarding the Long-Term Plan and the Annual Work Plan and Budget.
5. Prepare the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, and Minutes of Board of Directors Meetings.
6. Prepare the Annual Report as accountability for the management of the Company, as well as the Company's financial documents as referred to in the Company Documents Law.
7. Prepare Financial Statements in accordance with Financial Accounting Standards and submit them to a Public Accountant for audit.
8. Submit the Annual Report, including the Financial Statements, to the GMS for approval and ratification, as well as reports on Company rights not recorded in the books, including those arising from the write-off of receivables.
9. Provide explanations to the GMS regarding the Annual Report.
10. Submit the Balance Sheet and Profit and Loss Statement approved by the GMS to the Minister in charge of Law and Human Rights in accordance with prevailing laws and regulations.
11. Submit reports on changes in the composition of Shareholders, the Board of Directors, and the Board of Commissioners to the Minister in charge of Law and Human Rights.
12. Maintain the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meetings, Minutes of Board of Directors Meetings, Annual Reports, financial documents, and other Company documents.

13. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham. Daftar Khusus. Risalah RUPS. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi. Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya. 14. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern. terutama fungsi pengurusan. pencatatan. penyimpanan. dan pengawasan. 15. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. 16. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya. 17. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham. 18. Menyusun dan menetapkan <i>blueprint</i> organisasi Perusahaan. 19. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.	13. Keep at the Company's domicile the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meetings, Minutes of Board of Directors Meetings, Annual Reports, financial documents, and other Company documents. 14. Establish an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and internal control principles, particularly regarding management, recording, custody, and supervision functions. 15. Provide periodic reports in accordance with applicable procedures and timelines, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders. 16. Prepare the Company's organizational structure complete with detailed duties. 17. Provide explanations regarding any matters inquired or requested by members of the Board of Commissioners and Shareholders. 18. Develop and establish the Company's organizational blueprint. 19. Perform other obligations as stipulated in the Articles of Association and determined by the GMS in accordance with prevailing laws and regulations.

PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB Masing-Masing ANGGOTA DIREKSI

Secara umum Direksi bertugas secara kolektif dalam melaksanakan pekerjaan. namun tentunya perlu dilakukan pembagian tugas di antara Anggota Direksi sesuai dengan latar belakang dan keahliannya. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi

ALLOCATION OF RESPONSIBILITIES AMONG MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

In general, the Board of Directors performs its duties collectively in carrying out its responsibilities. However, it is necessary to allocate duties among the members of the Board of Directors according to their respective backgrounds and areas of expertise. The following are the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors.

Nama dan Jabatan
Name and Position

Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
Scope of Duties and Responsibilities of Members of the Board of Directors

Maryono
Direktur Utama
President Director

1. Memimpin pengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud, tujuan, dan kegiatan Perusahaan, yaitu menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang:
 - a. industri, yaitu industri pupuk urea, petrokimia dan bahan kimia lainnya.
 - b. perdagangan, yaitu kegiatan distribusi dan perdagangan yang berhubungan dengan produk industri kimia.
 - c. jasa yaitu kegiatan studi penelitian, pengembangan, *engineering design*, pengantongan, konstruksi, pengoperasian pabrik, perbaikan dan pemeliharaan pabrik, konsultasi teknis, dan jasa teknis lainnya, dan
 - d. angkutan, yaitu angkutan perkapalan, ekspedisi lain, dan pergudangan.
2. Menetapkan perencanaan strategis pengembangan Perusahaan melalui usaha-usaha pengembangan kreativitas dan inovasi sumberdaya manusia Perusahaan, pengembangan manajemen, ekspansi pasar, dan cara- cara lain untuk pengembangan investasi dan kekayaan Perusahaan demi kelangsungan hidup ekonomis dan pertumbuhan Perusahaan jangka panjang.
3. Membuat dan menetapkan perencanaan strategis Perusahaan dan manuver atau langkah-langkah untuk memenuhi sasaran Perusahaan, baik untuk dalam pembuatan/penetapan rencana jangka panjang maupun rencana kegiatan dan anggaran Perusahaan jangka pendek/tahunan, yang menyangkut; produksi, kedudukan pasar, laba, produktivitas, inovasi, sarana fisik dan finansial, pengembangan organisasi dan sumberdaya manusia, manajemen risiko Perusahaan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
4. Menetapkan kebijakan-kebijakan Perusahaan dalam memimpin pengelolaan Perusahaan pada berbagai bidang hasil pokok terutama bidang produksi, distribusi dan pemasaran, perekayasa, konstruksi dan pengadaan, anggaran dan keuangan, risiko, sumberdaya manusia, dan pembinaan usaha kecil dan lingkungan, dan menyebarluaskan kebijakan tersebut agar menjadi nilai- nilai operasional.
5. Menetapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis Perusahaan dalam kurun waktu lima tahun, dan menetapkan rancangan rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang, dan mengarahkan rencana strategis tersebut ke seluruh unsur organisasi Perusahaan.
6. Memimpin proses perubahan, memberikan visi dan arahan- arahan selaras dengan perubahan perbaikan yang diinginkan, memberikan sumberdaya yang dibutuhkan, dan mendorong organisasi dan karyawannya kearah perubahan yang positif.
7. Menciptakan iklim kerja yang menyenangkan, kooperatif, dan semangat yang tinggi untuk pencapaian misi dan sasaran Perusahaan, yaitu dengan menentukan dan atau menyebarluaskan visi Perusahaan, etika usaha dan memberikan dorongan dan arahan atas dasar visi yang sama kepada seluruh organisasi Perusahaan mengenai jalan yang akan ditempuh Perusahaan.
8. Menetapkan dan memelihara Sistem Pengendalian Internal Perusahaan untuk mengamankan investasi dan aktiva Perusahaan meliputi pengendalian keuangan, pengendalian operasional, dan mendorong seluruh organisasi untuk memperbaiki proses kerja berdasarkan temuan Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit, termasuk mengendalikan keuangan unit kerja-unit kerja di bawah Direktorat Utama.
9. Menetapkan bagan, struktur dan komposisi organisasi yang efektif, efisien dalam pengambilan keputusan guna menunjang operasional Perusahaan, dan perubahan- perubahannya, setelah melakukan pembahasan bersama direksi lainnya, dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
10. Mengarahkan kebijakan pengelolaan limbah produksi, dan pengelolaan lingkungan hidup di sekitar pabrik untuk menciptakan suasana lingkungan yang minimal bebas dari limbah Perusahaan dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar.
11. Bersama-sama dengan anggota direksi lainnya menetapkan strategi dan ketentuan-ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai pensiun dan jaminan hari tua.
12. Menetapkan besaran penyisihan laba bersih untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat lingkungan setelah mendapat laporan analisis keuangan yang wajar untuk penyisihan laba tersebut dari Direktur Keuangan dan Umum.
13. Mengawasi pengelolaan keuangan yayasan-yayasan dan anak-anak Perusahaan di bawah yayasan-yayasan, agar tercipta pengelolaan keuangan yang sehat, termasuk terhadap Dana Pensiun Karyawan agar tercapai kecukupan dana yang berkelanjutan bagi program pensiun hari tua karyawan.
14. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan, mewakili Perusahaan dalam mengikat Perusahaan dengan pihak lain, mengatur penyerahan kekuasaan direksi untuk mewakili Perusahaan di Perusahaan kerja sama atau patungan, mendelegasikan wewenang direksi kepada karyawan atau pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Perusahaan.

Nama dan Jabatan
Name and Position

Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
Scope of Duties and Responsibilities of Members of the Board of Directors

15. Membangun hubungan baik dengan stakeholders dan atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dengan cara menjalankan fungsi-fungsi pokok Perusahaan diantaranya Public Relation. Investor Relation dan Business Information agar terjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.
 16. Mengarahkan seluruh pengawasan dan pemeriksaan atas seluruh kegiatan unit kerja agar kebijakan Direksi, fungsi-fungsi manajemen dan pengendalian intern di lingkungan perusahaan dengan memperhatikan prinsip 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif).
 17. Mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan program transformasi bisnis PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sesuai arah dan grand design transformasi PT Pupuk Indonesia (Persero).
1. Leading the management of the Company in accordance with its purposes and objectives, namely supporting government policies and programs in the economic and national development sectors, particularly in:
 - a. industry, including urea fertilizer, petrochemical, and other chemical industries;
 - b. trade, including distribution and trading activities related to chemical industry products;
 - c. services, including research and development studies, engineering design, bagging, construction, plant operation, plant maintenance and repair, technical consultancy, and other technical services; and
 - d. transportation, including shipping, expedition services, and warehousing.
 2. Establishing strategic development plans through initiatives that foster creativity and innovation, management development, market expansion, and other investment and asset growth strategies to ensure the Company's long-term sustainability and growth.
 3. Formulating and determining corporate strategic plans and tactical measures to achieve corporate targets, both in long-term planning and short-term/annual work plans and budgets, covering production, market position, profitability, productivity, innovation, physical and financial resources, organizational and human resource development, corporate risk management, and social and environmental responsibility.
 4. Establishing corporate policies in core operational areas including production, distribution and marketing, engineering, construction and procurement, budgeting and finance, risk management, human resources, and small business and community development, and disseminating such policies as operational values.
 5. Establishing the draft five-year Long-Term Plan and the Annual Work Plan and Budget as its annual elaboration, and directing their implementation across all organizational units.
 6. Leading organizational change, providing vision and direction aligned with improvement objectives, allocating necessary resources, and encouraging positive transformation.
 7. Creating a cooperative and motivating work climate aligned with the Company's vision and business ethics.
 8. Establishing and maintaining an Internal Control System to safeguard investments and assets, including financial and operational controls, and ensuring follow-up on findings from the Internal Audit Unit and Audit Committee.
 9. Determining and adjusting organizational structure and composition following consultation with other Directors and approval from the Board of Commissioners.
 10. Directing environmental management and waste treatment policies to maintain compliance and harmonious community relations.
 11. Jointly with other Directors, determining strategies for human resource development, including pension and retirement benefit policies.
 12. Determining allocations of net profit reserves for small business and community development programs based on financial analysis from the Director of Finance and General Affairs.
 13. Supervising financial management of foundations and subsidiary entities under such foundations, including employee pension funds.
 14. Representing the Company inside and outside the court and delegating authority as necessary.
 15. Establishing good relationships with stakeholders and other interested parties by executing the company's core functions, including Public Relations, Investor Relations, and Business Information, to foster harmonious and mutually beneficial relationships.
 16. Direct all supervision and inspections of all work units to ensure that the Board of Directors' policies, management functions, and internal controls within the company adhere to the 3E principles (Economical, Efficient, and Effective).
 17. Guide the formulation and implementation of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang's business transformation program in accordance with the direction and grand design of PT Pupuk Indonesia (Persero)'s transformation.

Nama dan Jabatan Name and Position	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi Scope of Duties and Responsibilities of Members of the Board of Directors
Sholikin Direktur Operasi dan Produksi Director of Operations and Production	1. Memimpin pengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud, tujuan, dan kegiatan Perusahaan di bidang operasi & produksi, yaitu mengolah bahan mentah tertentu menjadi bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan pupuk urea, dan pembuatan bahan kimia lainnya atau produk lain di bidang petrokimia, termasuk penyimpanan, pengemasan (pengantongan), dan pengeluaran produk dari pusat produksi sebelum dipasarkan. 2. Membuat dan menetapkan perencanaan strategis Perusahaan bidang operasi & produksi dan manuver atau langkah-langkah untuk memenuhi sasaran produksi, baik dalam pencapaian sasaran jangka panjang maupun jangka pendek yang menyangkut bahan baku, proses, produk, pemeliharaan pabrik, dan risiko-risiko teknis yang mungkin terjadi melalui pengembangan kreativitas dan inovasi dan pengembangan sistem manajemen, agar tercapai produksi yang berkelanjutan dengan efisiensi yang tinggi. 3. Menetapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis Perusahaan di bidang operasi & produksi dalam kurun waktu lima tahun, dan menetapkan rancangan rencana kerja bidang operasi & produksi tahunan, dan mengarahkan rencana strategis tersebut ke seluruh unsur organisasi Direktorat Operasi & Produksi. 4. Mengarahkan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan di lingkungan Direktorat Operasi & Produksi sebagai suatu strategi menjaga mutu produk melalui pengendalian kualitas bahan baku dan bahan-bahan penunjang, material dan perawatan peralatan, proses, produk, jaminan kualitas, pabrik dan penunjang pabrik, dan aset-aset lain di bawah, termasuk mengendalikan keuangan unit kerja-unit kerja di bawah Direktorat Operasi & Produksi dan mengarahkan tindak lanjut dari hasil audit, antara lain melalui penetapan ukuran-ukuran (<i>benchmark</i>) proses bisnis atau proses manajemen. 5. Mengarahkan kebijakan penyaluran gas alam dan atau bahan baku lainnya sesuai dengan jumlah kebutuhan produksi ke pusat produksi. 6. Menentukan kebijakan Perusahaan mengenai pengelolaan limbah produksi, dan pengelolaan lingkungan hidup di sekitar pabrik untuk menciptakan suasana lingkungan yang minimal bebas dari limbah Perusahaan. 7. Memimpin pengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud, tujuan, dan kegiatan Perusahaan di bidang jasa teknik dan perekayasa teknik, baik untuk penunjang produksi Perusahaan sendiri maupun untuk pihak luar, yaitu pemeliharaan <i>overhaul</i> pabrik (<i>breakdown maintenance</i>), perbaikan dan pabrikasi peralatan pabrik, kapal, pengantongan, gudang dan pekerjaan sipil, melalui kegiatan-kegiatan perekayasa, pengadaan barang teknik, dan manajemen konstruksi. 8. Membuat dan menetapkan perencanaan strategis Perusahaan bidang jasa teknik dan perekayasa teknik dan manuver atau langkah-langkah untuk memenuhi sasaran jasa teknik, baik dalam pencapaian sasaran jangka panjang maupun jangka pendek yang menyangkut perekayasa teknik, pengadaan dan logistik barang teknik, konstruksi, dan risiko-risiko teknis yang mungkin terjadi melalui pengembangan kreativitas dan inovasi dan pengembangan sistem manajemen di Direktorat Operasi & Produksi, agar tercapai keuntungan optimal dan pelayanan memuaskan dalam jasa teknik. 9. Merencanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ledakan, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui jaminan ketersediaan peralatan dan material (termasuk kepada keluarga pekerja & masyarakat lingkungan terdekat pabrik), serta memasukkan aspek HAZOPS ke dalam K-3. 10. Merencanakan dan mengarahkan pelaksanaan aktivitas pengkajian dan evaluasi Pengembangan Usaha secara korporat serta menjajaki kemungkinan pengembangan investasi, alternatif bahan baku, teknologi yang lebih efisien, alternatif sumber bahan baku, bahan baku alternatif, sarana penunjang produksi dan subyek lain yang relevan untuk meningkatkan kinerja korporat.

Nama dan Jabatan Name and Position	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi Scope of Duties and Responsibilities of Members of the Board of Directors
	1. Leading the management of the Company in the field of operations and production in accordance with the Company's purposes and objectives, including processing specific raw materials into primary inputs required for the production of urea fertilizer and other chemical or petrochemical products, including storage, packaging (bagging), and dispatch of products from production centers prior to marketing. 2. Formulating and determining strategic plans in operations and production and establishing measures to achieve production targets, both long-term and short-term, covering raw materials, processes, products, plant maintenance, and potential technical risks through innovation, creativity, and management system development to ensure sustainable and efficient production. 3. Establishing draft five-year strategic plans and annual work plans for operations and production and directing their implementation across all organizational units within the Directorate of Operations and Production. 4. Directing the implementation of the Company's Internal Control System within the Directorate of Operations and Production as a strategy to maintain product quality through control of raw materials, supporting materials, equipment maintenance, processes, product quality assurance, plant facilities, and other assets, including financial control of work units and follow-up on audit findings through benchmarking of business and management processes. 5. Directing policies related to the allocation of natural gas and other raw materials according to production requirements. 6. Establishing Company policies on waste management and environmental management in and around plant facilities to ensure minimal environmental impact. 7. Lead the management of the Company in accordance with its aims, objectives, and activities in the fields of technical services and engineering, supporting both internal production and external clients, including overhaul maintenance, repair and fabrication of plant equipment, ships, packaging, warehouses, and civil works, through engineering activities, procurement of technical goods, and construction management. 8. Develop and establish the Company's strategic plans in the fields of technical services and engineering, including maneuvers or steps to achieve technical service goals, both short-term and long-term, covering engineering, procurement and logistics of technical goods, construction, and potential technical risks. This should be achieved through fostering creativity, innovation, and management system development within the Operations & Production Directorate to ensure optimal profit and satisfactory service in technical engineering. 9. Plan for the prevention and mitigation of fires, explosions, occupational accidents, and work-related illnesses by ensuring the availability of equipment and materials (including for workers' families and nearby community members), and incorporate HAZOPS aspects into Occupational Health and Safety (OHS) procedures. 10. Plan and direct activities related to the assessment and evaluation of Business Development on a corporate basis, as well as explore opportunities for investment expansion, alternative raw materials, more efficient technologies, alternative sources of raw materials, supporting production facilities, and other relevant subjects to enhance corporate performance.

Nama dan Jabatan
Name and Position

Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
Scope of Duties and Responsibilities of Members of the Board of Directors

R. Eric J. Rachman
Direktur Keuangan
dan Umum
Director of Finance
and General Affairs

1. Memimpin pengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud, tujuan, dan kegiatan Perusahaan di bidang keuangan & umum.
2. Membuat dan menetapkan perencanaan strategis Perusahaan dan mendukung kegiatan pemasaran sesuai yang diatur oleh PT Pupuk Indonesia (Persero).
3. Menetapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis Perusahaan di bidang keuangan & umum dalam kurun waktu lima tahun, dan menetapkan rancangan rencana kerja bidang keuangan & umum tahunan, dan mengarahkan rencana strategis tersebut ke seluruh unsur organisasi Direktorat Keuangan & Umum.
4. Mengarahkan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan di lingkungan Direktorat Keuangan & Umum untuk memaksimalkan proses bisnis Perusahaan.
5. Memimpin pengurusan Perusahaan untuk menunjang maksud, tujuan, dan kegiatan Perusahaan dibidang sumberdaya manusia dan masalah-masalah umum, yaitu penyediaan tenaga kerja, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, sistem remunerasi, keamanan, hubungan ketenagakerjaan seperti penyelesaian perselisihan, organisasi dan kelengkapannya, pelayanan umum untuk kelancaran operasional Perusahaan, masalah lingkungan masyarakat sekitar, dan pembinaan industri kecil.
6. Menyebarluaskan kebijakan Perusahaan pada berbagai bidang hasil pokok terutama pada bidang sumberdaya manusia, pelayanan umum, bidang pembinaan industri kecil, dan bidang pembinaan lingkungan untuk pencapaian sasaran Perusahaan pada bidang hasil pokok yang ditentukan, dan menjadikan kebijakan tersebut menjadi nilai-nilai operasional.
7. Membuat dan menetapkan perencanaan strategis Perusahaan bidang pengembangan sumberdaya manusia, administrasi tenaga kerja, hubungan industrial di dalam dan di luar Perusahaan, keamanan dan ketertiban (sekuriti), aset Perusahaan (kecuali aset pabrik dan produksi) pelayanan umum, pembinaan lingkungan sekitar, dan pembinaan industri kecil sekitar, dan manuver atau langkah-langkah untuk memenuhi sasaran bidang-bidang tersebut baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek melalui pengembangan kreativitas dan inovasi dan pengembangan sistem manajemen di Direktorat Keuangan & Umum.
8. Menetapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis Perusahaan di bidang sumberdaya manusia dalam kurun waktu lima tahun, dan menetapkan rancangan rencana kerja bidang sumberdaya manusia tahunan, dan mengarahkan rencana strategis tersebut ke seluruh unsur organisasi Direktorat Keuangan & Umum.
9. Mengarahkan sistem pengendalian internal di lingkungan Direktorat Keuangan & Umum sebagai suatu strategi meningkatkan pengembangan dan kesejahteraan sumber daya manusia, menjaga mutu pelayanan umum, pemeliharaan keamanan, dan pemeliharaan aset-aset di bawah pembinaan Direktorat Keuangan & Umum, termasuk mengendalikan keuangan unit kerja-unit kerja di bawah Direktorat Keuangan & Umum, antara lain melalui penetapan ukuran-ukuran (*benchmark*) proses bisnis atau proses manajemen.
10. Mengarahkan kebijakan pengelolaan yayasan-yayasan dan anak-anak perusahaan di bawah yayasan-yayasan agar yayasan-yayasan dan anak-anak perusahaannya mampu menetapkan perencanaan dan sasaran strategis perusahaan masing-masing perusahaan sehingga tercapai keuntungan optimal dengan penggunaan sumberdaya yang efisien. Mengarahkan kebijakan pengelolaan Dana Pensiun Karyawan agar tercapai kecukupan dana yang berkelanjutan bagi program pensiun hari tua karyawan.
11. Mengarahkan besaran penyisihan laba bersih untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat lingkungan, dengan mempertimbangkan kebutuhan keuangan perusahaan mendatang dan kebutuhan pembinaan masyarakat lingkungan.
12. Mengarahkan kebijakan Perusahaan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat lingkungan, dan mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar melalui program kemitraan dengan usaha kecil, mikro, dan koperasi.
13. Menetapkan kebijakan Perusahaan dalam pembinaan masyarakat sekitar baik sebagai suatu program pembinaan dan pembangunan lingkungan masyarakat sekitar (*community development*) maupun sebagai akibat dari pengelolaan limbah industri yang menimpa masyarakat.
14. Mengelola proses manajemen penyediaan (*Warehouse Management*) antara lain melaksanakan konsep *supply change management* sehingga kebutuhan barang / jasa dapat diterima dan disalurkan kepada unit terkait secara tepat spesifikasi, tepat jumlah, tepat kualitas, serta tepat waktu bila dibutuhkan.
15. Mengarahkan sistem pelayanan umum melalui penyiapan sarana dan prasarana perusahaan di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Jakarta agar kenyamanan dan fasilitas yang dibutuhkan Perusahaan dan karyawan tersedia dengan baik.
16. Mengarahkan pelayanan pengelolaan aset khususnya properti yang menjadi tanggung jawab Kompartemen SBU Manajemen Aset kepada perusahaan, BUMN, Perusahaan terafiliasi BUMN, Pupuk Indonesia Group, Anak Perusahaan Pupuk Indonesia Group, swasta maupun masyarakat luas secara cepat, tepat, optimal dan akuntabel.

Nama dan Jabatan
Name and Position

Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
Scope of Duties and Responsibilities of Members of the Board of Directors

1. Leading the management of the Company in the fields of finance and general affairs.
2. Develop and establish the Company's strategic plans and support marketing activities in accordance with the regulations set by PT Pupuk Indonesia (Persero).
3. Formulate long-term plans that constitute the Company's strategic plans in finance and general affairs over a five-year period. establish annual work plan drafts for finance and general affairs. and direct these strategic plans across all units within the Finance & General Affairs Directorate.
4. Direct the Company's Internal Control System within the Finance & General Affairs Directorate to maximize the company's business processes.
5. Lead the management of the Company to support its mission. objectives. and activities in human resources and general issues. including workforce supply. training and development. remuneration systems. security. labor relations such as dispute resolution. organizational structure. general services for operational smoothness. community environmental issues. and small industry development.
6. Disseminate the Company's policies across key areas. especially in human resources. community services. small industry development. and environmental management. to achieve the Company's targeted objectives and translate these policies into operational values.
7. Develop and establish the Company's strategic plans in human resource development. labor administration. industrial relations internally and externally. security. Company assets (excluding factory and production assets). community services. surrounding environment development. and small industry development around the company; and formulate maneuvers or steps to meet these objectives in both the long-term and short-term by fostering creativity. innovation. and management system development within the Finance & General Affairs Directorate.
8. Establish the long-term strategic plan for human resources over a five-year period. formulate annual work plan drafts for human resources. and direct these strategic plans across all units within the Finance & General Affairs Directorate.
9. Directing the implementation of the Company's Internal Control System within the Directorate of Finance and General Affairs to optimize procurement. distribution. marketing. sales processes. product quality maintenance. distribution infrastructure maintenance such as fertilizer bagging units. warehouses. marketing offices. and financial control (revenues and expenses) of work units. including benchmarking business and management processes.
10. Direct the management policies of foundations and subsidiaries under the foundations to enable them to set strategic plans and targets to achieve optimal profits through efficient resource utilization. Also. oversee policies for managing employee pension funds to ensure sustainable adequacy of pension funds for the employees' retirement programs.
11. Guide the allocation of net profit reserves for small business/cooperative development and community empowerment. considering future financial needs of the company and community development requirements.
12. Direct the Company's policies to foster harmonious relationships with surrounding communities and develop the local economy through partnership programs with small. micro. and cooperative enterprises.
13. Establish the Company's policies on community development. both as programs for community empowerment and environmental development. and as a consequence of industrial waste management impacting the local community.
14. Manage the procurement process (Warehouse Management). including implementing supply chain management concepts to ensure that goods/services are received and distributed to relevant units accurately in specifications. quantity. quality. and timeliness as needed.
15. Direct the public service system by preparing facilities and infrastructure at the Head Office and Jakarta Representative Office to ensure that the comfort and necessary facilities for the Company and employees are adequately available.
16. Guide the asset management services. especially property management under the SBU Asset Management compartment. toward companies. state-owned enterprises. affiliated companies. Pupuk Indonesia Group. subsidiaries. private sector. and the public in a swift. accurate. optimal. and accountable manner.

Nama dan Jabatan Name and Position	Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi Scope of Duties and Responsibilities of Members of the Board of Directors
Panji Winanteya Ruky Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	1. Memimpin pengurusan perusahaan sesuai dengan maksud, tujuan dan kegiatan perusahaan di bidang Manajemen Risiko. 2. Menetapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis perusahaan di bidang Manajemen Risiko dalam kurun waktu lima tahun dan menetapkan rancangan rencana kerja bidang Manajemen Risiko tahunan dan mengarahkan rencana strategis tersebut ke seluruh unsur organisasi Direktorat Manajemen Risiko. 3. Mengarahkan sistem pengendalian internal di lingkungan Direktorat Manajemen Risiko untuk memaksimalkan proses bisnis Perusahaan. 4. Mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas kegiatan utama/core Perusahaan di bidang Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko, dengan menetapkan kebijakan/peraturan perusahaan sesuai lingkup kewenangan selaras dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). 5. Mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan perusahaan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan internal perusahaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas penyusunan dan pengendalian anggaran perusahaan. 7. Mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas pengelolaan risiko secara efektif. 1. Leads the management of the Company in accordance with its purposes, objectives, and business activities in the field of Risk Management. 2. Establishes the draft long-term plan, which serves as the Company's strategic plan in the field of Risk Management for a five-year period, and establishes the annual work plan draft for the Risk Management function, while directing the implementation of the strategic plan throughout all organizational elements within the Risk Management Directorate. 3. Directs the internal control system within the Risk Management Directorate to maximize the Company's business processes. 4. Directs, coordinates, controls, and is responsible for the Company's core activities in the areas of Corporate Governance and Risk Management by establishing corporate policies/regulations within the scope of authority in alignment with the principles of Good Corporate Governance (GCG). 5. Directs, coordinates, controls, and is responsible for the implementation of the Company's activities in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, internal corporate regulations, and applicable laws and regulations. 6. Directs, coordinates, controls, and is responsible for the preparation and control of the Company's budget. 7. Directs, coordinates, controls, and is responsible for the effective management of risks.

TINDAKAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Tindakan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris

Mengacu pada Anggaran Dasar PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Pasal 11 Ayat (8), beberapa tindakan Direksi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, dinyatakan sebagai berikut, "Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris", mencakup :

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/ BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/ BowT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/ BTO*) dengan nilai kerjasama < Rp5 Miliar dengan jangka waktu >3-5 tahun dan nilai kerjasama Rp5-15 Miliar dengan jangka waktu 0-5 tahun.

BOARD ACTIONS REQUIRING APPROVAL AND RECOMMENDATION FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

Board Actions Requiring Approval from the Board of Commissioners

Referring to the Articles of Association of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Article 11 paragraph (8), certain actions of the Board of Directors must first obtain approval from the Board of Commissioners, as stated as follows: "The following actions of the Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners," including:

1. Pledging fixed assets as collateral for short-term credit facilities.
2. Entering into cooperation agreements with business entities or other parties in the form of licensing agreements, management contracts, asset leasing, Joint Operations (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Transfer Operate (BTO) with a cooperation value of < Rp5 billion for a term of >3-5 years and a cooperation value of Rp5-15 billion for a term of 0-5 years.

3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang. 4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati. 5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan lima tahun. 6. Menetapkan struktur organisasi 1 (tingkat) di bawah Direksi.	3. Receiving or granting medium-term/long-term loans. 4. Writing off uncollectible receivables and obsolete inventory from the books. 5. Disposing of movable fixed assets with an economic useful life generally applicable in the industry of up to five years. 6. Establishing the organizational structure one (1) level below the Board of Directors.

Sepanjang tahun 2025, tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Umur Ekonomis sd 5 Tahun PPD Babel.
2. Persetujuan atas Sewa Pakai Lahan Taman Kenten dengan PT Mitra Bangun Sriwijaya Abadi.
3. Persetujuan atas Sewa Pakai Lahan Taman Kenten dengan Ibu Hany Fitasary.
4. Persetujuan Menerima Pinjaman Jangka Menengah/ Panjang Tahun 2025.
5. Persetujuan Tertulis Atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi 1 (Satu) Tingkat di Bawah Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
6. Persetujuan alas sewa pakai lahan Bukit Kenten dengan Bapak Ir. M Kanoviyandri

Throughout 2025, the actions of the Board of Directors that required the approval of the Board of Commissioners were as follows:

1. Approval of the write-off and transfer of fixed assets with an economic life of up to 5 years belonging to PPD Babel.
2. Approval of the lease and use of Taman Kenten land with PT Mitra Bangun Sriwijaya Abadi.
3. Approval of the lease and use of Taman Kenten land with Ms. Hany Fitasary.
4. Approval to obtain medium-term/long-term loans for 2025.
5. Written approval of the proposed changes to the organizational structure one level below the Board of Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
6. Approval of the lease and use of Bukit Kenten land with Mr. Ir. M. Kanoviyandri.

Tindakan Direksi yang Memerlukan Rekomendasi Atau Tanggapan Dewan Komisaris Dan Persetujuan Pemegang Saham

Mengacu pada Anggaran Dasar PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Pasal 11 Ayat (10), beberapa tindakan Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan Persetujuan Pemegang Saham, dinyatakan sebagai berikut. "Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham". mencakup :

1. Menerbitkan obligasi dan surat utang lainnya.
2. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang.
3. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan perseroan lain
4. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
5. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
6. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
7. Mengikat perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*).

Board Actions Requiring Recommendation or Response from the Board of Commissioners and Approval from Shareholders

Referring to the Articles of Association of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Article 11 paragraph (10), certain actions of the Board of Directors may only be undertaken after obtaining written response from the Board of Commissioners and approval from the General Meeting of Shareholders, as stated as follows: "The following actions may only be undertaken by the Board of Directors after obtaining written response from the Board of Commissioners and approval from the General Meeting of Shareholders," including:

1. Issuing bonds and other debt securities.
2. Pledging fixed assets as collateral for medium-term/ long-term credit facilities.
3. Making equity participation in other companies.
4. Establishing subsidiaries and/or joint venture companies.
5. Divesting equity participation in subsidiaries and/or joint venture companies.
6. Carrying out mergers, consolidations, acquisitions, spin-offs, and dissolution of subsidiaries and/or joint venture companies.
7. Binding the Company as a guarantor (*borg* or *avalist*).

8. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerjasama operasional (KSO), bangun serah guna (*Build Transfer Operate/BTO*), bangun milik serah (*Build Own Transfer (BowT)*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dengan nilai kerjasama $\geq$ Rp5 Miliar dengan jangka waktu > 5 tahun dan nilai kerjasama $> Rp15$ Miliar dengan jangka waktu > 5 tahun.
9. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus bukukan.
10. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
11. Menetapkan *blue print* organisasi Perseroan.
12. Menetapkan dan merubah logo Perseroan.
13. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (8) yang belum ditetapkan dalam RKAP.
14. Membentuk yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perseroan yang dapat berdampak pada Perseroan.
15. Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.
16. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS.
8. Entering into cooperation agreements with business entities or other parties in the form of licensing agreements, management contracts, asset leasing, Joint Operations (KSO), Build Transfer Operate (BTO), Build Own Transfer (BOWT), with a cooperation value of $\geq$ Rp5 billion for a term of >5 years and a cooperation value of $>Rp15$ billion for a term of >5 years.
9. Ceasing collection of receivables that have been written off.
10. Disposing of and writing off the Company's fixed assets, except for movable fixed assets with an economic useful life generally applicable in the industry of up to five (5) years.
11. Establishing the Company's organizational blueprint.
12. Establishing and amending the Company's logo.
13. Undertaking other actions and actions as referred to in Article 11 paragraph (8) that have not been stipulated in the RKAP.
14. Establishing foundations, organizations, and/or associations, whether directly or indirectly related to the Company, which may have an impact on the Company.
15. Charging the Company with fixed and routine expenses for foundations, organizations, and/or associations, whether directly or indirectly related to the Company.
16. Proposing Company representatives as candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners in subsidiaries and/or joint venture companies that provide significant contribution to the Company and/or are of strategic value as determined by the GMS.

Sepanjang tahun 2025 tindakan Direksi yang dilakukan dan membutuhkan tanggapan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan Pemegang Saham sebagai berikut

1. Perubahan Keputusan Pemegang Saham tentang Pemberian Kewenangan.
2. Rencana Aksi Korporasi Likuidasi PT Pusri Agro Lestari.

PELAKSANAAN RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi merupakan rapat yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya secara berkala dan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dan dapat dilakukan sewaktu waktu sesuai Anggaran Dasar Perusahaan untuk mendiskusikan pembahasan strategis dan menetapkan kebijakan-kebijakan Perusahaan. Selain itu, Direksi juga melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris secara berkala guna membahas kinerja Perusahaan atau permasalahan terkait lainnya.

Throughout 2025, the following actions undertaken by the Board of Directors required responses or recommendations from the Board of Commissioners and approval from the Shareholders:

1. Amendment to the Shareholders' Resolution on the Delegation of Authority.
2. Corporate Action Plan for the Liquidation of PT Pusri Agro Lestari.

IMPLEMENTATION OF BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Board of Directors Meetings are meetings conducted by the Company's Board of Directors in relation to their duties and functions on a regular basis and at least 1 (one) time per month, and may be held at any time in accordance with the Company's Articles of Association to discuss strategic matters and determine Company policies. In addition, the Board of Directors also holds coordination meetings with the Board of Commissioners on a regular basis to discuss Company performance or other related issues.

Kebijakan Rapat Direksi

Board Manual dan Prosedur Tata Tertib Rapat Direksi No. PSP-STK-PR-015 menegaskan bahwa rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi. Rapat juga dapat diselenggarakan apabila terdapat permintaan tertulis dari seorang atau lebih Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Selain itu rapat Direksi juga dapat dilakukan apabila terdapat perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak signifikan pada usaha dan kinerja Perusahaan.

Mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan yang tercantum pula pada Tata Tertib Rapat Direksi No. PSP-STK-PR-015 panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. Rapat dinyatakan kuorum jika dihadiri oleh lebih dari 50% anggota Direksi. Lebih lanjut mengenai ketentuan kehadiran, mekanisme pengambilan keputusan Direksi, dan lain-lain diatur di dalam *Board Manual* dan Tata Tertib Rapat Direksi No. PSP-STK-PR-015.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Direksi menggelar rapat sepanjang tahun 2025 sebanyak 91 kali. Frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Total Required Meetings	Jumlah Kehadiran Total Total Attendance	Jumlah Tidak Hadir Total Absences	Kehadiran (%) Attendance
Daconi Khotob *)	Direktur Utama President Director	41	41	0	100
Maryono **)	Direktur Utama President Director	41	41	0	100
Saifullah Lasindrang***)	Direktur Keuangan & Umum Director of Finance & General Affairs	48	48	0	100
R. Eric J. Rachman **)	Direktur Keuangan & Umum Director of Finance & General Affairs	40	40	0	100
Filius Yuliandi ***)	Direktur Operasi & Produksi Director of Operations & Production	47	47	0	100

Policy on Board of Directors Meetings

The *Board Manual* and the Rules of Procedure for Board of Directors Meetings No. PSP-STK-PR-015 affirm that meetings of the Board of Directors may be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Directors. Meetings may also be convened upon written request from one or more members of the Board of Commissioners or upon written request from one (1) or more Shareholders collectively representing 1/10 (one-tenth) or more of the total shares with voting rights. In addition, meetings of the Board of Directors may also be held in the event of changes in the business environment and issues that have a significant impact on the Company's business and performance.

Referring to the Company's Articles of Association, as also stipulated in the Rules of Procedure for Board of Directors Meetings No. PSP-STK-PR-015, invitations to Board of Directors Meetings shall be made in writing by a member of the Board of Directors authorized to represent the Company and delivered no later than 3 (three) days prior to the meeting or within a shorter period in urgent circumstances. A meeting shall be declared quorate if attended by more than 50% of the members of the Board of Directors. Further provisions regarding attendance requirements, decision-making mechanisms of the Board of Directors, and others are regulated in the *Board Manual* and the Rules of Procedure for Board of Directors Meetings No. PSP-STK-PR-015.

Meeting Frequency and Attendance

The Board of Directors held 91 meetings throughout 2025. The frequency and attendance rate of the Company's Board of Directors are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Total Required Meetings	Jumlah Kehadiran Total Total Attendance	Jumlah Tidak Hadir Total Absences	Kehadiran (%) Attendance
Sholikin **)	Direktur Operasi & Produksi Director of Operations & Production	36	36	0	100
Saifullah Lasindrang ***)	Plt. Direktur Manajemen Risiko Acting Director of Risk Management	48	48	0	100
Panji Winanteya Ruky **)	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	39	39	0	100
Rata-rata Average					100

Keterangan | Notes:

*) Mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 30 Juni 2025

**) Terhitung tanggal 05 Agustus 2025 mulai menjabat Direksi.

***) Terhitung tanggal 05 Agustus 2025 telah berakhir masa jabatan.

*) Resigned effective June 30, 2025.

**) Appointed as a member of the Board of Directors effective August 5, 2025.

***) Term of office ended effective August 5, 2025.

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DIREKSI

PUSRI memiliki kebijakan untuk terus memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi seluruh sumber daya manusianya. termasuk Direksi. Program pengembangan dimaksudkan sebagai bentuk program untuk menambah wawasan dan pengetahuan Direksi dalam rangka peningkatan kemampuan untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dijalankan di antaranya ialah diklat dalam dan luar negeri dalam bentuk *short course*, seminar, *workshop*, konferensi, dan sertifikasi. Selain itu, apabila dipandang perlu juga dilakukan studi banding ke luar negeri untuk mengetahui perkembangan industri pupuk dunia.

Pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kompetensi diikuti Direksi sepanjang tahun 2025 dapat dilihat pada bab "Profil Perusahaan" dalam laporan tahunan ini.

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

PUSRI memiliki kebijakan program pengenalan bagi anggota Direksi baru yang bertujuan memberikan untuk memberikan pemahaman tentang kondisi terkini Perusahaan sehingga anggota Direksi yang baru mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas Perusahaan baik secara organisasi maupun operasional. Program pengenalan tersebut meliputi:

TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

PUSRI has a policy to continuously provide training and competency development for all of its human resources, including the Board of Directors. These development programs are intended to broaden the insight and knowledge of the Board of Directors in order to enhance their ability to carry out their duties, functions, and responsibilities.

The activities carried out include domestic and international education and training programs in the form of short courses, seminars, workshops, conferences, and certifications. In addition, when deemed necessary, comparative studies abroad are also conducted to observe developments in the global fertilizer industry.

The implementation of training and competency development attended by the Board of Directors throughout 2025 can be seen in the "Company Profile" chapter of this annual report.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW DIRECTORS

PUSRI has an orientation policy for newly appointed members of the Board of Directors aimed at providing an understanding of the Company's current condition so that new Directors gain comprehensive insight into the Company, both organizationally and operationally. The orientation program includes:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan 2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya. 3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal termasuk Komite Audit. 4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.	1. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles by the Company. 2. Overview of the Company concerning its objectives, nature and scope of business activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues. 3. Information related to delegated authorities, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee. 4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as prohibited matters.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan materi kepada Direksi yang baru, sesuai dengan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan.

The Corporate Secretary is responsible for providing materials to newly appointed Directors in accordance with the Guidelines for the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Company orientation program may take the form of presentations, meetings, company visits, document reviews, or other programs deemed appropriate.

Perusahaan telah melakukan program pengenalan Perusahaan sebanyak 2 kali sepanjang tahun 2025 yaitu pada tanggal 07 Agustus 2025 sehubungan dengan adanya pergantian Direksi.

The Company conducted corporate induction programs twice during 2025, namely on August 7, 2025 in connection with changes in the Board of Director.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Penilaian Kinerja Direksi Secara Kolegial melalui KPI

Collegial Performance Assessment of the Board of Directors through KPI

Kinerja Direksi secara Kolegial dinilai serta dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Hasil penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada Pemegang Saham. Penilaian dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan kriteria target pencapaian KPI yang telah disepakati, sebagai berikut.

The collegial performance of the Board of Directors is assessed and evaluated by the Board of Commissioners. The results of the assessment and evaluation are reported to the Shareholders. The assessment and evaluation are conducted based on agreed KPI target achievement criteria, as follows:

Tabel Kinerja KPI Direksi Kolegial

Table of Collegial KPI Performance of the Board of Directors

Perspektif Performance				Target 2025 2025 Target							
				No	KPI	Satuan Unit	Realisasi Actual	Target	Pencapaian (%) Attainment (%)	Bobot (%) Weight (%)	Skor (%)
									1	2	
Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia Economic and Social Values for Indonesia	FIN*	1	% EBITDA Margin	Persen Percent	14,40	15,44	93,26	7,00	6,53		
		2	% Excess of ROIC - WACC	Persen Percent	1,32	0,53	110,00	5,00	5,50		
	OPR*	3	# ESG Rating	Skor	50,00	42,00	105,00	5,00	5,25		
		4	% Plant Utilization	Persen Percent	84,58	92,27	91,67	8,00	7,33		
		5	% Plant Availability	Persen Percent	94,43	100,00	94,43	10,00	9,44		
		6	% Fulfillment of Fertilizer Volume	Persen Percent	100,09	100,00	100,09	8,00	8,01		
		7	# Reduction in Carbon Emission	Ton CO2 e	1.071.876,80	542.160,00	105,00	5,00	5,25		
		8	% Penghematan Biaya Overhead COGM	Persen Percents	110,00	100,00	110,00	7,00	7,70		
		9	# Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)	Rate	0,083	0,112	105,00	10,00	10,50		
Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation	10	% SGA to Sales	Persen	5,47	5,69	104,02	5,00	5,20			
	11	# Rasio Konsumsi Energi Urea	MMBTU/ Ton	30,14	29,57	98,11	5,00	4,91			
	12	% Sparepart Management Effectiveness	Persen Percents	138,41	100,00	100,00	5,00	5,00			
Kepemimpinan Teknologi Leadership and Technology	13	% Milestone Pencapaian Inisiatif Digital	Persen Percents	111,63	100,00	100,00	5,00	5,00			
Peningkatan Investasi Increase in Investment	14	% Plant Development Investment	Persen Percents	129,33	100,00	100,00	7,00	7,00			
Pengembangan Talenta Talent Development	15	% HC Transformation	Persen Percents	102,06	100,00	102,06	8,00	8,16			
Pencapaian Skor KPI KPI Score Achievement									100,78		

PENILAIAN KINERJA DIREKSI SECARA INDIVIDUAL

Pihak Yang Melakukan Penilaian

Kantor Akuntan Publik PwC. sama seperti Auditor LK. Adapun hasil penilaian dan evaluasi KPI Direksi secara individual dilaksanakan berdasarkan kriteria target pencapaian KPI yang telah disepakati. sebagai berikut.

INDIVIDUAL PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Assessing Party

The individual performance assessment of the Board of Directors is conducted by the Public Accounting Firm PwC, which is also the Financial Statement Auditor. The results of the individual KPI assessment and evaluation of the Directors are carried out based on the agreed KPI target achievement criteria, as follows:

Tabel Kinerja KPI Individual Direktur Operasi dan Produksi
 Table of Individual KPI Performance of the Director of Operations and Production

Perspektif Perspective No KPI Satuan Unit				Tahun 2025 2025 Target				
				Realisasi Actual	Target	Pencapaian (%) Achievement (%)	Bobot (%) Weight (%)	Skor (%) Score (%)
				1	2	3	4	5 = 3x4
KPI Bersama Shared KPIs	1	% EBITDA Margin	Persen Pecent	14.40	15.44	93.26	8.00	7.46
	2	% Plant Availability	Persen Pecent	94.43	100.00	94.43	12.00	11.33
	3	# Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)	Rate	0.083	0.112	105.00	11.00	11.55
	4	% HC Transformation	Persen Pecent	102.06	100.00	102.06	9.00	9.19
Subtotal KPI Bersama Subtotal of Shared KPIs							40.00	39.53
KPI Individu - Direktur Operasi dan Produksi Individual KPIs – Director of Operations and Production	1	# ESG Rating	Skor Score	50.00	42.00	105.00	6.00	6.30
	2	% Plant Utilization	Persen Pecent	84.58	92.27	91.67	6.00	5.50
	3	% Fulfillment of Fertilizer Volume	Persen Pecent	100.09	100.00	100.09	8.00	8.01
	4	# Reduction in Carbon Emission	Ton CO2 e	1.071.876.80	542.160.00	105.00	7.00	7.35
	5	% Penghematan Biaya Overhead COGM % Penghematan Biaya Overhead COGM	Persen Pecent	110.00	100.00	110.00	5.00	5.50
	6	# Rasio Konsumsi Energi Urea Urea Energy Consumption Ratio	MMBTU/ Ton	30.14	29.57	98.11	5.00	4.91
	7	% Sparepart Management Effectiveness	Persen Pecent	138.41	100.00	100.00	5.00	5.00
	8	% Milestone Pencapaian Inisiatif Digital % Achievement of Digital Initiative Milestones	Persen Pecent	111.63	100.00	100.00	3.00	3.00

Tabel Kinerja KPI Individual Direktur Operasi dan Produksi

Table of Individual KPI Performance of the Director of Operations and Production

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Tahun 2025 2025 Target				
				Realisasi Actual	Target	Pencapaian (%) Achievement (%)	Bobot (%) Weight (%)	Skor (%) Score (%)
				1	2	3	4	5 = 3x4
	9	% Plant Development Investment	Persen Percent	129.33	100.00	100.00	5.00	5.00
	10	% Implementasi Roadmap SDM % Implementation of the Human Resources Roadmap	Persen Percent	100.00	100.00	100.00	5.00	5.00
	11	% Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan % Completion of Audit Recommendation Follow-Up Actions	Persen Percent	207.10	100.00	100.00	5.00	5.00
Subtotal KPI Individu							60.00	60.57
Subtotal of Individual KPIs								
Total Bobot dan Skor KPI							100.00	100.10
Total KPI Weight and Score								
Pencapaian Skor KPI (%)								100.10
KPI Score Achievement (%)								

Tabel Kinerja KPI Individual Direktur Keuangan dan Umum

Table of Individual KPI Performance of the Director of Finance and General Affairs

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Tahun 2025 2025 Target				
				Realisasi Actual	Target	Pencapaian (%) Achievement (%)	Bobot (%) Weight (%)	Skor (%) Score (%)
				1	2	3	4	5 = 3x4
KPI Bersama Shared KPIs	1	% EBITDA Margin	Persen Percent	14.40	15.44	93.26	8.00	7.46
	2	% Plant Availability	Persen Percent	94.43	100.00	94.43	12.00	11.33
	3	# Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)	Rate	0.083	0.112	105.00	11.00	11.55
	4	% HC Transformation	Persen Percent	102.06	100.00	102.06	9.00	9.19
Subtotal KPI Bersama							40.00	39.53
Subtotal of Shared KPIs								

Tabel Kinerja KPI Individual Direktur Keuangan dan Umum
 Table of Individual KPI Performance of the Director of Finance and General Affairs

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Tahun 2025 2025 Target				
				Realisasi Actual	Target	Pencapaian (%) Achievement	Bobot (%) Weight	Skor (%) Score
						(%)	(%)	(%)
				1	2	3	4	5 = 3x4
KPI Individu - Direktur Keuangan dan Umum Individual KPIs – Director of Finance and General Affairs	1	% Excess of ROIC - WACC	Persen Percent	1.32	0.53	110.00	5.00	5.50
	2	# ESG Rating	Skor Score	50.00	42.00	105.00	5.00	5.25
	3	% Penghematan Biaya Overhead COGM % Overhead COGM Cost Savings	Persen Percent	110.00	100.00	110.00	5.00	5.50
	4	% SGA to Sales	Persen Percent	5.47	5.69	104.02	6.00	6.24
	5	% Sparepart Management Effectiveness	Persen Percent	138.41	100.00	100.00	5.00	5.00
	6	% Plant Development Investment	Persen Percent	129.33	100.00	100.00	5.00	5.00
	7	% Pengelolaan Risiko Selisih Kurs % Management of Foreign Exchange Risk	Persen Percent	162.10	100.00	100.00	6.00	6.00
	8	\$ Rasio Produktivitas Finansial Pegawai \$ Financial Productivity Ratio per Employee	Rp Juta/Orang Rp Million/ Person	1.201.63	1.260.76	95.31	6.00	5.72
	9	% Implementasi Roadmap SDM % Implementation of the Human Resources Roadmap	Persen Percent	100.00	100.00	100.00	6.00	6.00
	10	# Talent Mobility	Jumlah Orang Total People	74.00	42.00	100.00	6.00	6.00
	11	% Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan % Completion of Audit Recommendation Follow-Up Actions	Persen Percent	207.10	100.00	100.00	5.00	5.00
Subtotal KPI Individu Subtotal of Individual KPIs							60.00	61.21
Total Bobot dan Skor KPI Total KPI Weight and Score							100.00	100.74
Pencapaian Skor KPI (%) KPI Score Achievement (%)							100.74	

Tabel Kinerja KPI Individual Direktur Manajemen Risiko

Table of Individual KPI Performance of the Director of Risk Management

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Tahun 2025 2025 Target				
				Realisasi Actual	Target	Pencapaian (%) Achievement (%)	Bobot (%) Weight (%)	Skor (%) Score (%)
				1	2	3	4	5 = 3x4
KPI Bersama Shared KPIs	1	% EBITDA Margin	Persen Percent	14.40	15.44	93.26	8.00	7.46
	2	% Plant Availability	Persen Percent	94.43	100.00	94.43	12.00	11.33
	3	# Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)	Rate	0.083	0.112	105.00	11.00	11.55
	4	% HC Transformation	Persen Percent	102.06	100.00	102.06	9.00	9.19
Subtotal KPI Bersama Subtotal of Shared KPIs							40.00	39.53
KPI Individu - Direktur Manajemen Risiko Individual KPIs – Director of Risk Management	1	# ESG Rating	Skor Score	50.00	42.00	105.00	5.00	5.25
	2	# Reduction in Carbon Emission	Ton CO2 e	1,071,876.80	542,160.00	105.00	4.00	4.20
	3	% Plant Development Investment	Persen Percent	129.33	100.00	100.00	4.00	4.00
	4	% Penurunan Piutang Usaha Konsolidasi % Reduction in Consolidated Trade Receivables	Persen Percent	5.44	15.00	36.27	4.00	1.45
	5	% Pengelolaan Risiko Selisih Kurs % Management of Foreign Exchange Risk	Persen Percent	162.10	100.00	100.00	5.00	5.00
	6	% Pencapaian Skala Risiko Utama % Achievement of Key Risk Scale Targets	Persen Percent	549.00	100.00	105.00	7.00	7.35
	7	% Penanganan Permasalahan Hukum % Resolution of Legal Issues	Persen Percent	100.00	90.00	100.00	7.00	7.00
	8	% Pencapaian Penilaian GCG % Achievement of GCG Assessment Targets	Persen Percent	92.40	90.00	100.00	7.00	7.00
	9	% Tindak Lanjut atas Rekomendasi RMI % Follow-Up on RMI Recommendations	Persen Percent	100.00	100.00	100.00	6.00	6.00



Tabel Kinerja KPI Individual Direktur Manajemen Risiko

Table of Individual KPI Performance of the Director of Risk Management

Perspektif Perspective	No	KPI	Satuan Unit	Tahun 2025 2025 Target				
				Realisasi Actual	Target	Pencapaian (%) Achievement (%)	Bobot (%) Weight (%)	Skor (%) Score (%)
				1	2	3	4	5 = 3x4
	10	# Skor KPMR # KPMR Score	Skor Score	87.00	80.00	100.00	6.00	6.00
	11	% Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan % Completion of Audit Recommendation Follow-Up Actions	Persen Percent	207.10	100.00	100.00	5.00	5.00
KPI Bersama Shared KPIs							60.00	58.25
							100.00	97.78
							97.78	

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Pengelolaan KPI Direksi secara Individual mengacu kepada peraturan pemerintah yang berlaku. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). KPI Direksi Kolegial dan inisiatif strategis/ RKM pada direktorat tersebut. KPI Individu Direktur Utama merupakan *mirroring* dari KPI Direksi Kolegial. Sementara itu, KPI Direksi Individual lainnya merupakan KPI Direktur Utama yang diturunkan kepada masing-masing anggota Direksi sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab anggota Direksi tersebut dalam lingkup direktorat yang dipimpinnya. KPI Direksi secara individual terdiri dari:

Criteria for the Performance Assessment of the Board of Directors

The management of Individual KPIs for the Board of Directors refers to the applicable government regulations, the Long-Term Corporate Plan (RJPP), the Annual Work Plan and Budget (RKAP), the Collegial KPI of the Board of Directors, and the strategic initiatives/Risk Management Plan (RKM) within the respective directorate. The Individual KPI of the President Director mirrors the Collegial KPI of the Board of Directors. Meanwhile, the Individual KPIs of other Directors are derived from the President Director's KPI and cascaded to each member of the Board of Directors in accordance with their respective duties, functions, and responsibilities within the directorate they lead. The Individual KPIs of the Board of Directors consist of:

Perspektif Perspective	Bobot Weight	Skor Score
Direktur Utama President Director	100	100.78
Direktur Operasi dan Produksi Director of Operations and Production	100	100.10
Direktur Keuangan dan Umum Director of Finance and General Affairs	100	100.74
Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	100	97.78

Pencapaian KPI Direksi secara Individual beserta penjelasan capaiannya disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Surat Dinas. Penilaian KPI Direksi secara Individual dilakukan mengacu kepada hasil pengukuran yang dilakukan oleh Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan tahun yang bersangkutan.

The achievement of the Individual KPIs of the Board of Directors, along with explanations of the results, is submitted to the Board of Commissioners through an Official Letter. The Individual KPI assessment of the Board of Directors is conducted based on measurement results carried out by the External Auditor who audits the Company's Financial Statements for the relevant year.

ASESMEN PENERAPAN GCG UNTUK ASPEK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran sentral dalam gerak pertumbuhan Perusahaan. Asesmen atas kedua organ ini menjadi sebuah keharusan, terutama karena Perusahaan merupakan entitas anak BUMN dan adanya kepemilikan negara sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna yang diarahkan untuk menerapkan prinsip GCG pada standar BUMN sekaligus penilaian terhadap penerapan tersebut.

Pada tahun 2025, PUSRI melakukan asesmen periodik tahunan merujuk pada kriteria *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). CGPI merupakan penilaian atas indeks persepsi penerapan tata kelola perusahaan dengan model penilaian yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG). PUSRI memperoleh predikat “Indonesia Most Trusted Companies” “sangat terpercaya” dengan skor 86.61.

Selain itu, pada tahun 2025, PUSRI melakukan asesmen penerapan GCG tahun buku 2024 yang dilaksanakan pada bulan September s.d. Desember tahun 2025 oleh BPKP Perwakilan Sumsel. skor yang diperoleh 92.397 dengan predikat “Sangat Baik”. Khusus untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing meraih nilai perolehan 92.06% dan 93.09%. keduanya dengan predikat “Sangat Baik”.

Sejalan dengan asesmen yang bertujuan memberikan evaluasi dan rekomendasi. Manajemen Perusahaan diharapkan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang muncul dari proses asesmen.

Lebih lanjut tentang metode, proses dan hasil penilaian terkait penerapan GCG untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi, dapat dilihat pada bagian “Penilaian: Evaluasi, Pemantauan, dan Peningkatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik” di awal bab Tata Kelola Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Karena Direksi PUSRI tidak memiliki Komite di bawah Direksi, maka Direksi tidak melakukan evaluasi terhadap Komite-komite Direksi.

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners and the Board of Directors play a central role in driving the Company's growth. Assessment of these two organs is essential, particularly as the Company is a subsidiary of a State-Owned Enterprise (BUMN) and the State holds 1 (one) Series A Dwiwarna share, which mandates the implementation of GCG principles in accordance with BUMN standards as well as evaluation of such implementation.

In 2025, PUSRI conducted its annual periodic assessment based on the Corporate Governance Perception Index (CGPI) criteria. CGPI is an assessment of corporate governance implementation perception using an assessment model developed and administered by The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG). PUSRI received the “Indonesia Most Trusted Companies” distinction with the rating of “Highly Trusted” and a score of 86.61.

In addition, in 2025, PUSRI conducted a GCG implementation assessment for fiscal year 2024, carried out from September through December 2025 by the South Sumatra Representative Office of BPKP, obtaining a score of 92.397 with the rating of “Very Good.” Specifically, the Board of Commissioners and Board of Directors aspects achieved scores of 92.06% and 93.09%, respectively, both receiving a “Very Good” rating.

In line with the purpose of the assessment to provide evaluation and recommendations, the Company's Management is expected to follow up on the recommendations resulting from the assessment process.

Further information regarding the methods, processes, and results of the assessment related to GCG implementation for the Board of Commissioners and Board of Directors aspects can be found in the section “Assessment: Evaluation, Monitoring, and Improvement of Good Corporate Governance Implementation” at the beginning of the Corporate Governance chapter in this annual report.

As the Board of Directors of PUSRI does not have any committees under it, the Board of Directors does not conduct evaluations of Directors' committees.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF

THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Salah satu hal yang dianggap penting oleh Perusahaan dalam efektivitas tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengurusan Perusahaan oleh Direksi ialah keberagaman keahlian, pengalaman, dan latar belakang pendidikan. Seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki kompetensi yang beragam. Sementara ketentuan tentang keberagaman komposisi Direksi dimuat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Perusahaan.

One of the aspects considered important by the Company in ensuring the effectiveness of the supervisory function of the Board of Commissioners and the management of the Company by the Board of Directors is diversity in expertise, experience, and educational background. All members of the Board of Commissioners possess adequate competencies relevant to their respective positions in carrying out their duties and responsibilities, and collectively reflect a range of competencies. Meanwhile, provisions regarding the diversity of the Board of Directors' composition are stipulated in the Company's Board of Directors Guidelines and Code of Conduct.

Hingga akhir tahun 2025, PUSRI belum memiliki kebijakan tertulis yang memuat keberagaman bagi komposisi Dewan Komisaris dan Direksi untuk masing-masing aspek pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sepenuhnya dikelola oleh entitas induk, PT Pupuk Indonesia (Persero).

As of the end of 2025, PUSRI has not yet established a written policy specifically governing diversity in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors in terms of educational background (field of study), work experience, age, and gender. The appointment of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors is fully managed by the parent entity, PT Pupuk Indonesia (Persero).

PUSRI senantiasa berupaya untuk menjaga bauran keahlian dan pengalaman anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagaimana yang diurai dalam tabel berikut.

PUSRI consistently strives to maintain a balanced mix of expertise and experience among members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as described in the following table.

Nama dan Jabatan Name and Position	Kewarga Negaraan Nationality	Latar Belakang Background	Pengalaman Kerja/Keahlian Work Experience / Expertise	Usia Age	Gender
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS					
Siti Nurizka Puteri Jaya (Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner concurrently Independent Commissioner)	Indonesia	Magister dibidang Hukum Master's Degree in Law	Berkeahlian dan memiliki pengalaman sebagai Legal Consultant selama 2 tahun di PT Medco Power Indonesia, Divisi Legal PT Indonesia Comnets selama 3 tahun, Direktur Management di Abrazqa Law Office (2015 s.d sekarang), Anggota DPR RI Komisi III (2019 s.d 2024). Legal expertise with experience as Legal Consultant at PT Medco Power Indonesia for 2 years; Legal Division at PT Indonesia Comnets for 3 years; Managing Director at Abrazqa Law Office (2015–present); Member of the House of Representatives of the Republic of Indonesia Commission III (2019–2024).	38	Perempuan Female

Nama dan Jabatan Name and Position	Kewarga Negaraan Nationality	Latar Belakang Background	Pengalaman Kerja/Keahlian Work Experience / Expertise	Usia Age	Gender
Bambang Supriyambodo* (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)		Sarjana Kehutanan Bachelor's Degree in Forestry	Berpengalaman dan memiliki keahlian dalam bidang kehutanan melalui sejumlah jabatan yang pernah dijalankannya, di antaranya Manager Pengurusan Hutan PT ITCIKU (2005–2006), Direktur Operasional PT ITCIKU (2008–2009), Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur (2016–2020), Komisaris Utama PT Rakabu Sejahtera (2016–sekarang). Extensive experience and expertise in forestry, including Forest Management Manager at PT ITCIKU (2005–2006); Operational Director at PT ITCIKU (2008–2009); Commissioner of PT Pupuk Kalimantan Timur (2016–2020); President Commissioner of PT Rakabu Sejahtera (2016–present).	65	Laki-laki Male
Teddy Gusnaldi ** Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia	Sarjana Hukum Bachelor of Laws	Memiliki keahlian di bidang Kebijakan Publik dan Hukum Tata Negara, Teknologi Informasi dan Sistem Informasi dengan pengalaman profesional diantaranya: Direktur PT Hoekel Bangun Abadi (2018 - 2024), Komisaris PT ABN Sejahtera Mandiri (2025 - sampai sekarang) Possesses expertise in Public Policy and Constitutional Law, Information Technology, and Information Systems, with professional experience including: Director of PT Hoekel Bangun Abadi (2018–2024) and Commissioner of PT ABN Sejahtera Mandiri (2025–present).	50	Laki-laki Male
Mohamad Idris Laena *** Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia	Doktor Doctorate Degree	Memiliki keahlian di bidang Hukum, Sosial dan Manajemen, dengan pengalaman profesional mencakup diantaranya: Direktur Laenaco Network SDN.BHD – Malaysia (2002 – 2004), Direktur Laenaco Network PTE.LTD – Singapore (2002–2004), Advisor Bestwell Hongkong Limited – Hongkong (2001–2002), Komisaris Utama Laenaco Utama – Jakarta (2000–2004), Anggota DPR/MPR RI (2004–2024). Possesses expertise in Law, Social Affairs, and Management, with professional experience including: Director of Laenaco Network SDN. BHD, Malaysia (2002–2004); Director of Laenaco Network PTE. LTD, Singapore (2002–2004); Advisor to Bestwell Hongkong Limited, Hong Kong (2001–2002); President Commissioner of Laenaco Utama, Jakarta (2000–2004); and Member of the House of Representatives/People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (DPR/MPR RI) (2004–2024).	65	Laki-laki Male

Nama dan Jabatan Name and Position	Kewarga Negaraan Nationality	Latar Belakang Background	Pengalaman Kerja/Keahlian Work Experience / Expertise	Usia Age	Gender
Sally Salamah (Komisaris) (Commissioner)		Doktor Ekonomi Pembangunan Doctorate in Development Economics	Memiliki keahlian Akuntansi dan Audit Keuangan, dengan pengalaman Panjang di Badan Pengawasan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan jabatan saat ini sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (2025-sekarang) Expertise in Accounting and Financial Audit, with extensive experience at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), Head of BPKP for the Supervision of Government Agencies in the Areas of Politics, Security, Law, Human Development, and Culture (2025–present)	59	Perempuan Female
Fadjar Judisiawan	Indonesia	Sarjana Teknik Industri dan Magister Manajemen Bachelor of Industrial Engineering and Master of Management	Memiliki keahlian pada proses bisnis dan tata kelola perusahaan, berpengalaman panjang di Kementerian BUMN dengan jabatan Direktur Fasilitas dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Energi BP BUMN (Februari 2026 – sekarang), dan sebagai Asisten Deputi Industri Kesehatan, Kementerian BUMN (Januari 2024 s.d Februari 2025). Pengalaman sebagai Direksi dan Komisaris di beberapa BUMN antara lain PT Pelindo, PT Petrokimia Gresik, PT PNIM, PT SIER dan PT Atmindo sebagai Dewan Komisaris, sedangkan sebagai Direksi berpengalaman di PT Patra Jasa dan PT Semen Indonesia. Possesses expertise in business processes and corporate governance, with extensive experience at the Ministry of State-Owned Enterprises, including serving as Director of Development Facilitation and Synergy for Energy Security at BP BUMN (February 2026–present), and as Assistant Deputy for the Healthcare Industry at the Ministry of State-Owned Enterprises (January 2024 to February 2025). Has experience as both a Director and Commissioner in several State-Owned Enterprises, including serving on the Board of Commissioners of PT Pelindo, PT Petrokimia Gresik, PT PNIM, PT SIER, and PT Atmindo. As a member of the Board of Directors, he has held positions at PT Patra Jasa and PT Semen Indonesia.	55	Laki-laki Male

Nama dan Jabatan Name and Position	Kewarga Negaraan Nationality	Latar Belakang Background	Pengalaman Kerja/Keahlian Work Experience / Expertise	Usia Age	Gender
Muhammad Syakir	Indonesia	Doktor bidang pertanian Doctorate in Agriculture	Memiliki pengalaman di Kementerian Pertanian dan BRIN, dan saat ini sebagai tenaga ahli Kementerian Pertanian. Keahlian sebagai peneliti utama dan pakar rempah-rempah yang juga memimpin berbagai penelitian pertanian tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Food Crops, Horticulture and Estate Crops). Possesses experience at the Ministry of Agriculture and the National Research and Innovation Agency (BRIN), and currently serves as an expert advisor to the Ministry of Agriculture. Has expertise as a principal researcher and spice specialist who has led various agricultural research projects in food crops, horticulture, and estate crops.	67	Laki-laki Male
Arteria Dahlan	Indonesia	Magister Ilmu Hukum Ketatanegaraan dan program doktoral ilmu hukum Master of Constitutional Law and Doctoral Candidate in Law	Memiliki pengalaman sebagai Anggota Komisi XI DPR RI (2019 – 2024), Anggota Komisi III DPR RI (2019 – 2024), Anggota Badan Sosialisasi MPR (2019 – 2024), Anggota Badan Legislasi DPR RI (2019–2024), dan sebagai pemilik lawyer (2025 sd saat ini). Keahlian dibidang kebijakan publik dan hukum. Possesses experience as a Member of Commission XI of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (2019–2024), Member of Commission III of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (2019–2024), Member of the Socialization Agency of the People's Consultative Assembly (MPR) (2019–2024), Member of the Legislative Body of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (2019–2024), and owner of a law practice (2025–present). Has expertise in public policy and law.	50	Laki-laki Male
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS					
Maryono (Direktur Utama) (President Director)	Indonesia	Magister Management Master of Management	Memiliki pengalaman yang panjang di bidang industri pupuk dengan keahlian Manajemen dan Teknik Kimia serta telah berkarir sejak lama dalam beragam jabatan antara lain sebagai Direktur Utama PT Pertani (Persero) – (2020 - 2021), Direktur Utama PT Sang Hyang Seri – (2021 - 2023), Direktur Utama PT Pupuk Kujang – (2023 - 2025) dan Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja - (2025 - sekarang) Possesses extensive experience in the fertilizer industry with expertise in Management and Chemical Engineering. Has held various leadership positions, including President Director of PT Pertani (Persero) (2020–2021), President Director of PT Sang Hyang Seri (2021–2023), President Director of PT Pupuk Kujang (2023–2025), and currently serves as President Director of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2025–present).	54	Laki-laki Male

Nama dan Jabatan Name and Position	Kewarga Negaraan Nationality	Latar Belakang Background	Pengalaman Kerja/Keahlian Work Experience / Expertise	Usia Age	Gender
R Eric J. Rachman (Direktur Keuangan & Umum) (Director of Finance & General Affairs)	Indonesia	Sarjana Ekonomi Bachelor of Economics	Memiliki keahlian dalam bidang ekonomi dan berpengalaman sebagai Kepala SPI PT Pupuk Indonesia (Persero) (2023 – 2025) dengan jabatan saat ini sebagai Direktur Keuangan & Umum PT Pusri Palembang (2025 – Sekarang) Possesses expertise in economics and experience as Head of Internal Audit at PT Pupuk Indonesia (Persero) (2023–2025). Currently serves as Director of Finance & General Affairs of PT Pusri Palembang (2025–present).	47	Laki-laki Male
Sholikin (Direktur Operasi & Produksi) (Director of Operations & Production)	Indonesia	Sarjana Teknik Kimia Bachelor of Chemical Engineering	Memiliki keahlian di bidang Teknik Kimia dan berpengalaman yang panjang dalam industri pupuk. Mulai berkarir di Pusri sejak lama dengan beragam jabatan antara lain sebagai General Manager Operasi PT Pusri Palembang (2019 - 2022), SPM Proyek P-IIIB PT Pusri Palembang (2022 – 2025). Dengan jabatan saat ini sebagai Direktur Operasi dan Produksi PT Pusri (2025 – Sekarang) Possesses expertise in Chemical Engineering and extensive experience in the fertilizer industry. Has built a long career at Pusri, holding various positions including General Manager of Operations of PT Pusri Palembang (2019–2022) and Project Manager of the P-IIIB Project of PT Pusri Palembang (2022–2025). Currently serves as Director of Operations & Production of PT Pusri (2025–present).	52	Laki-laki Male
Panji Winanteya Ruky (Direktur Manajemen Risiko) (Director of Risk Management)	Indonesia	Magister Manajemen Master of Management	Memiliki keahlian di bidang Ekonomi Manajemen dan Administrasi Publik. Berpengalaman memimpin beragam jabatan antara lain sebagai Direktur Kemitraan, Komunikasi & Pengembangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2020), Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia Persero (2020 - 2025) dengan jabatan saat ini sebagai Direktur Manajemen Risiko PT Pusri Palembang (2025 – sekarang) Possesses expertise in Management Economics and Public Administration. Has held various leadership positions, including Director of Partnership, Communication & Development at the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia (2020) and Director of Business Transformation at PT Pupuk Indonesia (Persero) (2020–2025). Currently serves as Director of Risk Management of PT Pusri Palembang (2025–present).	50	Laki-laki Male

(*) Masa tugas berakhir pada tanggal 14 April 2026
 (**) Mulai bertugas tanggal 14 April 2026
 (***) Mulai bertugas tanggal 25 April 2026
 (*) Term of office ended on April 14, 2026.
 (**) Assumed office on April 14, 2026.
 (***) Assumed office on April 25, 2026.

NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

PROSEDUR DAN KEBIJAKAN NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Komisaris

Sebagai entitas bisnis milik negara, proses nominasi anggota Dewan Komisaris Perusahaan dibuat berdasarkan pada ketentuan yang termaktub di Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Secara umum, proses penentuan nominee dan penunjukan anggota Dewan Komisaris diawali dengan pengajuan kandidat oleh Dewan Komisaris kepada RUPS Perusahaan. Kandidat anggota Dewan Komisaris yang diusulkan kemudian harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Pemegang Saham. RUPS akan menentukan pengangkatan mereka yang lulus uji tersebut untuk mengesahkannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

Proses Nominasi dan Pemilihan Direksi

Sementara itu, prosedur pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi nominasi.

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, pemegang saham mempunyai hak istimewa untuk mengusulkan kandidat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam hal ini adalah PT Pupuk Indonesia (Persero).

Kemudian kandidat anggota Direksi PUSRI yang diajukan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam RUPS, dapat berasal dari:

1. Anggota Direksi Perusahaan Anggota Holding, Anak Perusahaan Anggota Holding dan/atau Anak Perusahaan Holding;
2. Pejabat internal Perusahaan Anggota Holding, Anak Perusahaan Anggota Holding dan/atau Anak Perusahaan Holding minimal dua tingkat di bawah Direksi;
3. Sumber lain yang memiliki reputasi baik, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan.

PROCEDURES AND POLICIES FOR THE NOMINATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Nomination and Selection Process for the Board of Commissioners

As a state-owned enterprise entity, the nomination process for members of the Board of Commissioners is based on the provisions set forth in Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

In general, the process of determining nominees and appointing members of the Board of Commissioners begins with the submission of candidates to the General Meeting of Shareholders (GMS). Proposed candidates for the Board of Commissioners must undergo a fit and proper test conducted by the Shareholders. The GMS determines the appointment of those who pass the test and ratifies them as members of the Company's Board of Commissioners.

Nomination and Selection Process for the Board of Directors

The procedures for the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Directors to be proposed to the GMS must take into account recommendations from the Board of Commissioners or the Committee responsible for carrying out the nomination function.

As stipulated in the Company's Articles of Association, the Shareholders hold a special right to propose candidates for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, in this case PT Pupuk Indonesia (Persero).

Candidates for members of the Board of Directors of PUSRI proposed by PT Pupuk Indonesia (Persero) at the GMS may originate from:

1. Members of the Board of Directors of Holding Member Companies, Subsidiaries of Holding Member Companies, and/or Holding Subsidiaries;
2. Internal officials of Holding Member Companies, Subsidiaries of Holding Member Companies, and/or Holding Subsidiaries at least two levels below the Board of Directors;
3. Other sources with good reputation, relevance, and accountability.

Dalam hal kandidat anggota Direksi yang diusulkan berasal dari internal Perusahaan, PT Pupuk Indonesia (Persero) akan melaksanakan Fit and Proper Test. Kandidat anggota Direksi yang diusulkan tersebut merupakan pemangku jabatan 1 (satu) level di bawah Direksi dan telah memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai assessment yang dilakukan oleh lembaga independen.

Kemudian, PT Pupuk Indonesia (Persero) akan mengevaluasi seluruh kandidat yang berasal dari internal Perusahaan maupun dari luar Perusahaan, untuk selanjutnya diajukan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebelum diusulkan dalam RUPS untuk dimintakan persetujuannya.

Kebijakan Suksesi Direksi dan Kebijakan Suksesi Manajemen Kunci

Dalam rangka menjaga kesinambungan usahanya, PUSRI diharapkan memiliki pimpinan yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang tinggi. Untuk itu, Perusahaan telah merancang kebijakan suksesi anggota Direksi guna memastikan transisi di level Direksi berjalan lancar dan berdampak positif pada kelangsungan usaha dan operasional Perusahaan.

Ketentuan mengenai usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS mengacu pada ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Kebijakan Suksesi Manajemen Kunci

Kebijakan suksesi untuk manajemen kunci Perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Direksi akan melakukan reviu terhadap seluruh Manajemen Kunci (BOD-1) dan memilih talent sebanyak 20% dari total Manajemen Kunci.
2. Parameter yang dinilai pada setiap Talent berupa KPI selama 3 Tahun terakhir, Capacity (Kompetensi, Learning Agility), Performance (Result, Behaviour AKHLAK Values).
3. Melakukan validasi dan kalibrasi oleh Cluster Talent Committee.
4. Nominasi 20% terpilih dikirim masuk ke dalam database Kementerian BUMN.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan dengan basis formula yang ditetapkan oleh RUPS serta telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris melalui pendalaman yang dilakukan oleh pemegang saham. Keputusan penetapan remunerasi Dewan

If the proposed candidate originates from within the Company, PT Pupuk Indonesia (Persero) conducts a Fit and Proper Test. Such candidates must hold a position one (1) level below the Board of Directors and meet qualification requirements based on an assessment conducted by an independent institution.

PT Pupuk Indonesia (Persero) evaluates all candidates, both internal and external, before submitting them to the Ministry of State-Owned Enterprises and subsequently proposing them at the GMS for approval.

Board of Directors Succession Policy and Key Management Succession Policy

To maintain business continuity, PUSRI is expected to have leadership of high quality and competence. Therefore, the Company has designed a succession policy for members of the Board of Directors to ensure smooth transitions at the Board level and a positive impact on business sustainability and operations.

Provisions regarding proposals for the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Directors to the GMS refer to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Key Management Succession Policy

The succession policy for the Company's key management is as follows:

1. The Board of Directors conducts a review of all Key Management (BOD-1) and selects talent amounting to 20% of the total Key Management.
2. Parameters assessed for each Talent include KPI performance over the past three years, Capacity (Competency and Learning Agility), and Performance (Results and Behavior in accordance with AKHLAK values).
3. Validation and calibration are conducted by the Cluster Talent Committee.
4. The selected 20% nominees are submitted to the Ministry of State-Owned Enterprises database.

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined based on a formula established by the GMS and reviewed by the Board of Commissioners through an in-depth evaluation conducted by the Shareholders. The determination of remuneration is

Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS Tahunan. Besarnya gaji/ honorarium bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS setiap tahun dengan daya laku selama 1 (satu) tahun buku Perusahaan terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dalam bentuk gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Pemberian penghasilan juga mengacu kepada penghasilan profesional di bidang/ industri yang sama untuk memberikan penghargaan yang seimbang dengan tanggung jawab yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, guna meningkatkan kinerja Perusahaan agar mampu bersaing dengan entitas usaha lain di bidang atau industri yang sama.

KEBIJAKAN PENGHASILAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penghasilan (remunerasi) bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, serta faktor relevan lainnya. Besarnya Gaji bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS setiap tahun, dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun buku terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.

Komponen penghasilan bagi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari unsur yang bersifat tetap dan variabel, meliputi:

1. Gaji (untuk Direksi) atau Honorarium (untuk Dewan Komisaris).
2. Tunjangan, yang mencakup tunjangan hari raya, tunjangan perumahan (Direksi), tunjangan transportasi (Dewan Komisaris), dan asuransi purna jabatan.
3. Fasilitas, yang mencakup kendaraan, kesehatan, dan bantuan hukum.
4. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus, yang bersifat variabel (merit rating) berdasarkan capaian kinerja dan tingkat kesehatan Perusahaan.

Pemberian penghasilan ini juga memperhatikan tingkat penghasilan atau remunerasi profesional yang berlaku umum dalam industri sejenis guna memberikan penghargaan yang setara dengan tanggung jawab, sekaligus memotivasi organ tersebut untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah Perusahaan.

approved through the Annual GMS. The amount of salary/ honorarium for the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined annually by the GMS and is valid for one (1) financial year of the Company, effective from January of the current year.

Remuneration is provided in the form of salary/honorarium and allowances/facilities, including post-employment benefits, with types and amounts determined by the GMS. Income determination also refers to professional compensation standards in the same field/industry to ensure remuneration is balanced with the responsibilities entrusted to the Board of Commissioners and the Board of Directors, thereby supporting improved Company performance and competitiveness within the industry.

REMUNERATION POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined by the General Meeting of Shareholders (GMS). This determination is made by taking into consideration factors such as the scale of the business, business complexity, inflation rate, the Company's financial condition and capability, as well as other relevant factors. The amount of salary for the Board of Directors and honorarium for the Board of Commissioners is determined by the GMS each year, with a validity period of 1 (one) financial year commencing from January of the current year.

The remuneration components for the Board of Commissioners and the Board of Directors consist of fixed and variable elements, including:

1. Salary (for the Board of Directors) or Honorarium (for the Board of Commissioners).
2. Allowances, including religious holiday allowances, housing allowances (for the Board of Directors), transportation allowances (for the Board of Commissioners), and post-employment insurance.
3. Facilities, including vehicles, healthcare, and legal assistance.
4. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives, which are variable in nature (merit rating) based on performance achievements and the Company's level of financial and operational health.

The provision of such compensation also takes into account the level of professional income or remuneration generally applicable within similar industries in order to provide rewards commensurate with responsibilities, while also motivating these organs to enhance the Company's competitiveness and value creation.

PROSEDUR PENGUSULAN SAMPAI DENGAN PENETAPAN REMUNERASI

Dasar hukum yang menjadi acuan PUSRI dalam menentukan kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yakni Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Proses pengusulan penghasilan mencakup tahapan dari rekomendasi hingga penetapan formal di RUPS. Mekanisme ini diawali dengan koordinasi bersama pemegang saham utama, yakni PT Pupuk Indonesia (Persero), dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Berikut adalah tahapan prosedurnya:

1. Pemegang Saham (Holding): Menetapkan pedoman remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris. anggota grup dengan mempertimbangkan skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, serta tingkat penghasilan profesional yang berlaku umum dalam industri sejenis.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi: Melakukan evaluasi terhadap kebijakan penghasilan, baik unsur yang bersifat tetap (Gaji/Honorarium) maupun variabel (Tantiem/Insentif Kinerja/LTI). Komite juga mengevaluasi usulan Indikator Kinerja Utama (KPI) dan hasil penilaian kinerja sebagai dasar pengusulan besaran penghasilan.
3. Dewan Komisaris: Berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris menyampaikan usulan jenis dan besaran penghasilan Direksi kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan.
4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Selaku organ yang memegang kekuasaan tertinggi, RUPS menetapkan jenis dan besaran penghasilan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara final. Penetapan untuk Gaji dan Honorarium dilakukan setiap tahun dengan masa berlaku 1 (satu) tahun buku terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.

Setelah keputusan diambil dalam RUPS, seluruh dokumen administratif terkait penetapan tersebut, termasuk lampiran format jenis dan jumlah penghasilan, diadministrasikan dan ditatausahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PROCEDURES FOR PROPOSING AND DETERMINING REMUNERATION

The legal basis used by PUSRI in determining the remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors is the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 of 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

The remuneration proposal process includes stages ranging from recommendation to formal determination at the GMS. This mechanism begins with coordination with the principal shareholder, namely PT Pupuk Indonesia (Persero), while continuing to observe the principles of Good Corporate Governance (GCG).

The stages of the procedure are as follows:

1. Shareholders (Holding): Establish remuneration guidelines for members of the Board of Directors and Board of Commissioners within the group, taking into account business scale, business complexity, inflation levels, the Company's financial condition and capability, and the level of professional income generally applicable within similar industries.
2. Nomination and Remuneration Committee: Conducts evaluations of compensation policies, including both fixed components (Salary/Honorarium) and variable components (Tantiem/Performance Incentives/Long-Term Incentives). The Committee also evaluates proposed Key Performance Indicators (KPIs) and performance assessment results as the basis for recommending compensation levels.
3. Board of Commissioners: Based on the review results and recommendations from the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners submits proposals regarding the types and amounts of remuneration for the Board of Directors to the Shareholders for approval.
4. General Meeting of Shareholders (GMS): As the organ holding the highest authority, the GMS makes the final determination regarding the types and amounts of remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The determination of Salaries and Honoraria is made annually and remains valid for one fiscal year, effective from January of the current year.

Following the resolution of the GMS, all administrative documents related to such determinations, including attachments detailing the types and amounts of remuneration, are administered and maintained in accordance with applicable regulations.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dasar Penetapan

Penetapan penghasilan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menentukan besaran penghasilan yang bersifat tetap (Gaji/Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas), RUPS mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Skala usaha
2. Kompleksitas usaha
3. Tingkat inflasi
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan
5. Faktor relevan lainnya, termasuk tingkat penghasilan/remunerasi profesional yang berlaku umum dalam industri sejenis.
6. Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kebijakan penghasilan ini sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yang merupakan kodifikasi dan sinkronisasi dari berbagai peraturan sebelumnya. Selain itu, struktur penghasilan juga memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh pemegang saham utama (Holding).

Struktur dan Komponen Penghasilan Dewan Komisaris

Struktur penghasilan bagi anggota Dewan Komisaris terdiri dari unsur yang bersifat tetap dan variabel, meliputi:

1. Honorarium: Merupakan imbalan tetap bulanan.
2. Tunjangan: Terdiri dari Tunjangan Hari Raya (THR), Tunjangan Transportasi, dan Asuransi Purna Jabatan.
3. Fasilitas: Mencakup Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Bantuan Hukum.
4. Tantiem/Insentif Jangka Panjang (LTI): Merupakan komponen variabel berdasarkan capaian kinerja (KPI) dan tingkat kesehatan perusahaan.
5. Ketentuan Pajak:
 - a. Pajak penghasilan atas Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas ditanggung dan menjadi beban Perusahaan.
 - b. Pajak penghasilan atas Tantiem dan LTI ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Basis of Determination

The remuneration of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) is determined by the General Meeting of Shareholders (GMS). In determining the amount of fixed remuneration (Salary/Honorarium, Allowances, and Facilities), the GMS takes into consideration the following factors:

1. Business scale.
2. Business complexity.
3. Inflation rate.
4. The Company's financial condition and capability.
5. Other relevant factors, including prevailing professional compensation/remuneration levels within comparable industries.
6. Applicable laws and regulations.

This remuneration policy fully refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning State-Owned Enterprise Organs and Human Resources, which serves as a codification and harmonization of various previous regulations. In addition, the remuneration structure also takes into account guidelines established by the principal shareholder (Holding Company).

Remuneration Structure and Components for the Board of Commissioners

The remuneration structure for members of the Board of Commissioners consists of both fixed and variable components, including:

1. Honorarium: Fixed monthly remuneration.
2. Allowances: Consisting of Religious Holiday Allowance (THR), Transportation Allowance, and Post-Term Insurance.
3. Facilities: Including Healthcare Facilities and Legal Assistance Facilities.
4. Tantiem/Long-Term Incentive (LTI): Variable components based on the achievement of Key Performance Indicators (KPIs) and the Company's health level.
5. Tax Provisions:
 - a. Income tax on Honoraria, Allowances, and Facilities is borne by and charged to the Company.
 - b. Income tax on Tantiem and LTI is borne entirely by the respective members of the Board of Commissioners concerned.

Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, dalam menentukan besaran gaji atau honorarium bagi Dewan Komisaris, perhitungan didasarkan sebagai berikut:

1. Perhitungan honorarium bagi Komisaris Utama sebesar 45% dari nilai gaji Direktur Utama.
2. Perhitungan honorarium bagi Wakil Komisaris Utama sebesar 42.5% dari nilai gaji Direktur Utama.
3. Perhitungan honorarium bagi Anggota Komisaris sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.

Struktur dan Komponen Penghasilan Direksi

Sedangkan struktur remunerasi Direksi Perusahaan terdiri dari:

1. Gaji: Merupakan imbalan tetap bulanan.
Tunjangan: Terdiri dari Tunjangan Hari Raya (THR), Tunjangan Perumahan, dan Asuransi Purna Jabatan.
2. Fasilitas: Fasilitas Kendaraan, Fasilitas Kesehatan, dan Fasilitas Bantuan Hukum.
3. Tantiem/ Insentif Jangka Panjang (LTI): Berdasarkan capaian target kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan.
4. Pajak atas penghasilan gaji, tunjangan dan fasilitas ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. Sedangkan pajak atas tantiem/Insentif kinerja Direksi menjadi beban masing-masing Direksi.

Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, dalam menentukan besaran gaji atau honorarium bagi Direksi, perhitungan didasarkan sebagai berikut:

1. Gaji Direktur Utama menjadi acuan dengan porsi 100%.
2. Perhitungan gaji Direktur lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berupa honorarium/gaji, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap. Remunerasi untuk masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat berbeda sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Berikut adalah rincian komposisi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PUSRI beserta penjelasannya.

Meanwhile, in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning State-Owned Enterprise Organs and Human Resources, the determination of salaries or honoraria for the Board of Commissioners is calculated based on the following provisions:

1. The honorarium of the President Commissioner is set at 45% of the President Director's salary.
2. The honorarium of the Vice President Commissioner is set at 42.5% of the President Director's salary.
3. The honorarium of a Commissioner is set at 90% of the President Commissioner's honorarium.

Remuneration Structure and Components for the Board of Directors

The remuneration structure for the Company's Board of Directors consists of the following components:

1. Salary: Fixed monthly remuneration. Allowances: Consisting of Religious Holiday Allowance (THR), Housing Allowance, and Post-Term Insurance.
2. Facilities: Vehicle Facilities, Healthcare Facilities, and Legal Assistance Facilities.
3. Tantiem/Long-Term Incentive (LTI): Based on the achievement of performance targets and the Company's financial capability.
4. Tax on salary, allowances, and facilities is borne by and charged to the Company. Meanwhile, tax on the tantiem/performance incentive of the Board of Directors is borne by each respective Director.

Furthermore, in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023, the determination of salaries or honoraria for the Board of Directors is calculated based on the following provisions:

1. The salary of the President Director serves as the benchmark at 100%.
2. The salary of other Directors is set at 85% of the President Director's salary.

Remuneration Structure of the Board of Commissioners and Board of Directors

The remuneration structure of the Board of Commissioners and the Board of Directors consists of fixed honoraria/ salaries, allowances, and facilities. The remuneration of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors may vary in accordance with applicable laws and regulations. The following presents the detailed composition of the remuneration of PUSRI's Board of Commissioners and Board of Directors, along with explanatory notes.

Uraian Description		Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Gaji Salary		Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi Perusahaan. Adapun ketentuannya yakni: 1. Perhitungan honorarium bagi Dewan Komisaris Utama sebesar 45% dari nilai gaji Direktur Utama 2. Perhitungan honorarium bagi Anggota Komisaris sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama. Fixed income in the form of money received monthly due to their position as members of the Board of Commissioners. Provisions are as follows: 1. The honorarium of the President Commissioner is set at 45% of the President Director's salary. 2. The honorarium of a Commissioner is set at 90% of the President Commissioner's honorarium.	Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi Perusahaan. Adapun ketentuannya yakni: 1. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal dalam kelompok usaha Pupuk Indonesia 2. Perhitungan gaji Direktur lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama Fixed income in the form of money received monthly due to their position as members of the Board of Directors. Provisions are as follows: 1. The President Director's salary is determined based on internal guidelines within the Pupuk Indonesia business group. 2. The salary of other Directors is set at 85% of the President Director's salary.
Tunjangan Allowances		Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Dewan Komisaris selain gaji. Income in the form of money or monetary equivalents received at certain times in addition to salary.	Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Direksi selain gaji. Income in the form of money or monetary equivalents received at certain times in addition to salary.
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance		Diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium setiap tahun. Granted in the amount of 1 (one) time the monthly honorarium per year.	Diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium setiap tahun. Granted in the amount of 1 (one) time the monthly honorarium per year.
Tunjangan Perumahan Housing Allowance		Dewan Komisaris tidak diberikan Tunjangan Perumahan. Not provided to the Board of Commissioners.	Diberikan tunjangan perumahan yang diberikan setiap bulan sebesar Rp.25.000.000,-. Direksi dapat menempati rumah dinas dengan ketentuan potongan sewa rumah dinas. Besaran tarif potongan sewa rumah dinas direksi setiap bulannya diatur sebagai berikut : 1. Rumah dinas Direktur Utama sebesar Rp. 11.000.000,- 2. Rumah dinas Direktur sebesar Rp. 10.000.000,- Housing allowance provided monthly in the amount of Rp25,000,000. Directors may occupy official housing subject to official housing rental deductions. The monthly rental deduction is determined as follows: 1. Official residence of the President Director: Rp11,000,000 2. Official residence of a Director: Rp10,000,000
Tunjangan Transportasi Transportation Allowance / Facility		Dewan Komisaris tidak diberikan fasilitas kendaraan namun diberikan Tunjangan Transportasi. Tunjangan Transportasi ditetapkan untuk setiap bulan paling banyak 20% dari honorarium. No official vehicle facility is provided; instead, a Transportation Allowance is granted, set at a maximum of 20% of the monthly honorarium.	Direksi dapat diberikan fasilitas kendaraan dinas sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas dengan spesifikasi mesin maksimal 3.000 cc beserta biaya pemeliharaan dan operasional yang ditetapkan oleh RUPS atau Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS. Directors may be provided with 1 (one) official vehicle with a maximum engine capacity of 3,000 cc, including maintenance and operational costs as determined by the GMS or a Shareholders' Resolution outside the GMS.
Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance		Diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung Perusahaan paling banyak 25% dari gaji per tahun, termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian. Diberikan setelah berhenti dari jabatan sebagai Komisaris. Provided with a premium borne by the Company up to a maximum of 25% of annual salary, including accident and death insurance premiums. Granted upon completion of term of office as Commissioner.	Diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung Perusahaan paling banyak 25% dari gaji per tahun, termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian. Diberikan setelah berhenti dari jabatan sebagai Direksi. Provided with a premium borne by the Company up to a maximum of 25% of annual salary, including accident and death insurance premiums. Granted upon completion of term of office as Director.

Uraian Description	Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Fasilitas Facilities	Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan. Benefits in the form of means and/or advantages and/or guarantees used by the Board of Commissioners in carrying out their duties, authority, obligations, and responsibilities in accordance with applicable laws and regulations.	Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan. Benefits in the form of means and/or advantages and/or guarantees used by the Board of Directors in carrying out their duties, authority, obligations, and responsibilities in accordance with applicable laws and regulations.
Kesehatan Healthcare	Diberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. Fasilitas kesehatan diberikan kepada Dewan Komisaris beserta seorang istri atau suami dan paling banyak 3 (tiga) orang anak, yang belum mencapai usia 25 tahun, dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Provided in the form of health insurance or medical expense reimbursement. Coverage extends to the Commissioner, one spouse, and up to 3 (three) children under 25 years of age. Children under 25 who are married or employed are not eligible for coverage.	Diberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. Fasilitas kesehatan diberikan kepada Direksi beserta seorang istri atau suami dan paling banyak 3 (tiga) orang anak, yang belum mencapai usia 25 tahun, dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Provided in the form of health insurance or medical expense reimbursement. Coverage extends to the Director, one spouse, and up to 3 (three) children under 25 years of age. Children under 25 who are married or employed are not eligible for coverage.
Perkumpulan Profesi Professional Associations	Dewan Komisaris dapat diikutsertakan sebagai anggota perkumpulan profesi maksimal 2 (dua) perkumpulan. Diberikan hanya berupa uang pangkal (uang pendaftaran) dan iuran tahunan. May be registered as members of a maximum of 2 (two) professional associations. Coverage limited to registration fees and annual dues.	Direksi dapat diikutsertakan sebagai anggota perkumpulan profesi maksimal 2 (dua) perkumpulan. Diberikan hanya berupa uang pangkal (uang pendaftaran) dan iuran tahunan. May be registered as members of a maximum of 2 (two) professional associations. Coverage limited to registration fees and annual dues.
Bantuan Hukum Legal Assistance	Diberikan dalam hal terjadi tindakan atau perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Perusahaan. Dibayarkan sebesar biaya-biaya resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Provided in the event of actions taken in and on behalf of their official capacity related to the Company's purposes and activities. Covers official and legally accountable expenses.	Diberikan dalam hal terjadi tindakan atau perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Perusahaan. Dibayarkan sebesar biaya-biaya resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Provided in the event of actions taken in and on behalf of their official capacity related to the Company's purposes and activities. Covers official and legally accountable expenses.
Fasilitas Club Membership Club Membership Facility	-	Diberikan maksimal 2 (dua) keanggotaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan. Provided for a maximum of 2 (two) memberships, subject to the Company's financial capability.
Fasilitas Biaya Representasi Representation Expense Facility	-	Dalam hal Direksi mewakili Perusahaan. Provided when Directors represent the Company.

Adapun besaran remunerasi masing-masing Dewan Komisaris PUSRI secara nominal diurai dalam tabel berikut:

The remuneration amount of each member of the PUSRI Board of Commissioners, presented in nominal terms, is set out in the following table.

Nama Name	Masa Menjabat Term of Office	Penghasilan per Bulan Monthly Income		Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Jumlah Remunerasi 2025 Total Remuneration 2025
		Honorarium Honorarium	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance		
Siti Nurizka Puteri Jaya	TMT 10-06-2024	✓	✓	✓	1.593.900.000
Sally Salamah	TMT 12 Juni 2021	✓	✓	✓	1.434.510.000
Bambang Supriyambodo	TMT 25-08-2020	✓	✓	✓	1.434.510.000
Fadjar Judisiawan	TMT 04-03-2024	✓	✓	✓	1.434.510.000
Ali Jamil*	TMT 27-12-2021 s.d. 16-06-2025	✓	✓	✓	763.830.000
Prahoru Julianto Nurtjahyo**	TMT 14-04-2020 s.d. 13-04-2025	✓	✓	✓	476.928.000
Arteria Dahlan***	TMT 05/08/2025	✓	✓	-	558.900.000
Muhammad Syakir***	TMT 05/08/2025	✓	✓	-	558.900.000

Keterangan | Notes:

* Menjabat sampai tanggal 16 Juni 2025

** Menjabat sampai tanggal 13 April 2025

*** Menjabat sejak tanggal 5 Agustus 2025

* Served until June 16, 2025

** Served until April 13, 2025

*** Served since August 5, 2025

BONUS KINERJA

Dewan Komisaris juga menerima bonus kinerja berupa tantiem atau insentif kinerja yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Perusahaan dapat memberikan tantiem kepada anggota Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahaan laporan tahunan apabila realisasi *Key Performance Indicators* tercapai 100%.

Tantiem atau insentif kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris. Perhitungan tantiem/insentif kinerja bagi Dewan Komisaris yakni Komisaris Utama sebesar 45% dari tantiem/insentif kinerja Direktur Utama. Sedangkan Dewan Komisaris lainnya sebesar 90% dari tantiem/insentif kinerja Komisaris Utama.

Berikut adalah pendapatan tantiem Dewan Komisaris PUSRI pada tahun 2025 yang merupakan hasil Keputusan RUPS Kinerja Tahun Buku 2024

Nama Name	Jumlah (Rp) Total
Siti Nurizka Puteri Jaya	Belum ada Not yet
Ali Jamil*	Belum ada Not yet

PERFORMANCE BONUS

The Board of Commissioners also receives a performance bonus in the form of tantiem or performance incentives, granted to members of the Board of Commissioners if the Company records a profit and does not experience accumulated losses. The Company may grant tantiem to members of the Board of Commissioners based on a resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) upon approval of the annual report, provided that the realization of Key Performance Indicators reaches 100%.

Tantiem or performance incentives constitute income awarded as a form of appreciation to members of the Board of Commissioners. The calculation of tantiem/performance incentives for the Board of Commissioners is as follows: The President Commissioner receives 45% of the President Director's tantiem/performance incentive. Other Commissioners receive 90% of the President Commissioner's tantiem/performance incentive.

The following is the tantiem income received by PUSRI's Board of Commissioners in 2025, as determined by the GMS resolution on the Company's Fiscal Year 2024 performance.

Nama Name	Jumlah (Rp) Total
Prahoru Yulijanto Nurtjahyo**	Belum ada Not yet
Bambang Supriyambodo	Belum ada Not yet
Sally Salamah	Belum ada Not yet
Fadjar Judisiawan	Belum ada Not yet
Arteria Dahlan***	Belum ada Not yet
Muhammad Syakir***	Belum ada Not yet

Keterangan | Notes:

* Menjabat sampai tanggal 16 Juni 2025

** Menjabat sampai tanggal 13 April 2025

*** Menjabat sejak tanggal 5 Agustus 2025

* Served until June 16, 2025

** Served until April 13, 2026

*** Served since August 5, 2025

HUBUNGAN ANTARA REMUNERASI DIREKSI DENGAN KINERJA PERUSAHAAN

PUSRI menerapkan kebijakan mengaitkan kinerja Perusahaan dengan total remunerasi yang diterima oleh Direksi. Pencapaian usaha Perusahaan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran tantiem dan insentif kinerja Direksi.

Adapun struktur remunerasi masing-masing Direksi PUSRI secara nominal diurai dalam tabel berikut:

RELATIONSHIP BETWEEN DIRECTORS' REMUNERATION AND COMPANY PERFORMANCE

PUSRI implements a policy linking the Company's performance to the total remuneration received by the Board of Directors. The Company's business achievements serve as one of the considerations in determining the amount of tantiem and performance incentives for the Directors.

The nominal remuneration structure of each member of the PUSRI Board of Directors is detailed in the following table:

Nama Name	Masa Menjabat Term of Office	Penghasilan per Bulan Monthly Income	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Jumlah Remunerasi 2025 Total Remuneration 2025
Daconi Khotob*	TMT 13-11-2023 s.d. 30-06-2025	✓	✓	1.694.000.000
Saifullah Lasindrang**	TMT 25-08-2020 s.d. 05-08-2025	✓	✓	1.248.000.000
Filius Yuliandi**	TMT 25-02- 2021 s.d. 05-08-2025	✓	✓	1.248.000.000
Maryono***	TMT 05/08/2025	✓	-	1.220.000.000
R Eric Juliana Rachman***	TMT 05/08/2025	✓	-	1.052.500.000
Sholikin***	TMT 05/08/2025	✓	-	1.052.500.000
Panji Winanteya Ruky***	TMT 05/08/2025	✓	-	1.052.500.000

Keterangan | Notes:

*) Menjabat sampai tanggal 30 Juni 2025

**) Menjabat sampai tanggal 5 Agustus 2025

***) Menjabat mulai tanggal 5 Agustus 2025

*) Served until June 30, 2025

**) Served until August 5, 2025

***) Served from August 5, 2025 onward

BONUS KINERJA

Direksi juga menerima bonus kinerja berupa tantiem dan insentif kinerja yang bersifat variabel (merit system) yang diberikan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan Perusahaan serta faktor-faktor lain yang relevan.

Tantiem adalah penghasilan yang didapat sebagai bentuk penghargaan apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Tantiem dapat diberikan sebagai tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang. Perusahaan dapat memberikan tantiem kepada anggota Direksi berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan apabila realisasi Key Performance Indicators tercapai 100%.

Adapun perhitungan tantiem bagi masing-masing anggota Direksi berbeda-beda yakni untuk Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal dalam kelompok usaha Pupuk Indonesia. Kemudian, tantiem kinerja Direktur lainnya sebesar 90% dari besaran Direktur Utama.

Berikut adalah pendapatan tantiem Dewan Komisaris Pusri pada tahun 2025 yang merupakan hasil Keputusan RUPS Kinerja Tahun Buku 2024:

PERFORMANCE BONUS

The Board of Directors also receives performance bonuses in the form of tantiem and performance incentives that are variable in nature (merit system), granted by taking into account target achievement, the Company's level of soundness, financial capability, and other relevant factors.

Tantiem is income granted as a form of appreciation when the Company records a profit and does not experience accumulated losses. Tantiem may also be provided as an additional Long-Term Incentive. The Company may grant tantiem to members of the Board of Directors based on a resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) upon approval of the annual report, provided that the realization of Key Performance Indicators reaches 100%.

The calculation of tantiem differs for each member of the Board of Directors. The tantiem of the President Director is determined based on internal guidelines within the Pupuk Indonesia business group. Meanwhile, the performance tantiem of other Directors is set at 90% of the President Director's tantiem.

The following is the tantiem income received by PUSRI's Board of Commissioners in 2025, as determined by the GMS resolution on the Company's Fiscal Year 2024 performance:

Nama Name	Jumlah Total
Daconi Khotob*	Belum ada Not yet
Saifullah Lasindrang**	Belum ada Not yet
Filius Yuliandi**	Belum ada Not yet
Maryono***	Belum ada Not yet
Sholikin***	Belum ada Not yet
R. Eric J. Rachman***	Belum ada Not yet
Panji Winanteya Ruky***	Belum ada Not yet

Keterangan | Notes:

*) Menjabat sampai tanggal 30 Juni 2025

**) Menjabat sampai tanggal 5 Agustus 2025

**) Menjabat mulai tanggal 5 Agustus 2025

*) Served until June 30, 2025

**) Served until August 5, 2025

**) Served effective August 5, 2025 onward

JUMLAH REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2025

Berikut jumlah remunerasi yang diberikan oleh Perusahaan untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2025.

TOTAL REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN 2025

The following presents the total remuneration granted by the Company to the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2025.



Uraian Description	(Rp)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration of the Board of Commissioners	9.348.158.565
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration of the Board of Directors	9.775.875.684
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025 Total Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2025	19.124.034.249

RASIO GAJI

Berikut adalah informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perusahaan.

SALARY RATIO

The following presents information regarding the salary ratio of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Company's employees.

Uraian Name	Jumlah Total
Direktur Utama terhadap Direktur President Director to Director	1: 0,86
Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan Komisaris President Commissioner to Member of the Board of Commissioners	1: 0,9
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama President Director to President Commissioner	1: 0,51
Direktur Utama terhadap Karyawan Tertinggi President Director to Highest-Paid Employee	1: 0,26
Direktur Utama terhadap Karyawan Terendah President Director to Lowest-Paid Employee	1: 0,04
Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah Highest-Paid Employee to Lowest-Paid Employee	1: 0,14
Karyawan Terendah terhadap UMP SUMSEL Lowest-Paid Employee to South Sumatra Provincial Minimum Wage (UMP Sumsel)	1: 0,45

Karyawan tertinggi adalah karyawan grade tertinggi dengan *take home pay* tertinggi yaitu Rp63.250.000. Sementara karyawan terendah adalah karyawan dengan grade terendah dengan *take home pay* terendah yaitu Rp9.666.155.

The highest-paid employee is the employee in the highest grade with the highest take-home pay, amounting to Rp63,250,000. Meanwhile, the lowest-paid employee is the employee in the lowest grade with the lowest take-home pay, amounting to Rp9,666,155.

Pengungkapan Bonus Kinerja, Bonus Non Kinerja dan Opsi Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur dan komponen remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi tidak terdapat pemberian bonus non kinerja, dan/atau opsi saham bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi. PUSRI memberikan gaji/honorarium dan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.

Disclosure of Performance Bonuses, Non-Performance Bonuses, and Share Options for the Board of Commissioners and Board of Directors

The remuneration structure and components received by the Board of Commissioners and the Board of Directors do not include non-performance bonuses and/or share options for any member of the Board of Commissioners and Board of Directors. PUSRI provides salary/honorarium and tantiem for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for Financial Year 2025 as determined by the Shareholders' Resolution acting as the General Meeting of Shareholders of the Company.

Kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan jangka panjang

PUSRI belum memiliki kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja, namun PUSRI memiliki Asuransi Purna Jabatan kepada Direksi.

Policy on Rewards/Compensation Based on Long-Term Company Performance

PUSRI does not yet have a policy on long-term performance-based compensation. However, PUSRI provides Post-Employment Insurance to members of the Board of Directors.

ORGAN DAN KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

ORGANS AND COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maupun tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan dengan efektif dan efisien, Dewan Komisaris PUSRI membentuk tiga Komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Investasi dan Manajemen Risiko. Untuk mendukung pelaksanaan tugas koordinasi dan administrasi pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris juga didukung oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

To ensure that the supervisory function and the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are carried out effectively and efficiently, the Board of Commissioners of PUSRI has established three committees under the Board of Commissioners: the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Investment and Risk Management Committee. To support coordination and administrative duties in carrying out supervisory functions, the Board of Commissioners is also supported by the Secretary to the Board of Commissioners.

Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit adalah komite yang membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada manajemen. Komite Audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam kerangka *good corporate governance* (GCG). Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya, melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, serta memastikan review yang memadai atas segala informasi yang dikeluarkan PUSRI.

The Audit Committee is a committee that assists the Board of Commissioners in conducting oversight and providing input to management. The Audit Committee is one of the institutional elements within the framework of Good Corporate Governance (GCG). The Audit Committee assists the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the Company's Internal Control System and the effectiveness of the duties performed by internal and external auditors. It also provides recommendations on improvements to the management control system and its implementation, identifies matters requiring the attention of the Board of Commissioners, and ensures adequate review of all information issued by PUSRI.

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Audit PUSRI dilakukan dengan mengacu pada:

1. Undang-undang No.19 Tahun 2003 tertanggal 19 Juni 2003; dan
2. PER-03/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

LEGAL BASIS

The establishment of the PUSRI Audit Committee refers to:

1. Law No. 19 of 2003 dated June 19, 2003; and
2. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-03/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Komite Audit PUSRI memiliki pedoman kerja, yakni Piagam Komite Audit yang telah disahkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No.KEP-02/DEKOM/PUSRI/XI/2023. Piagam Komite Audit tersebut disusun dengan tujuan untuk membantu terselenggaranya tugas pengawasan dan bimbingan terhadap Direksi PUSRI oleh Dewan Komisaris secara efektif dan komprehensif sesuai dengan garis besar kebijakan pelaksanaan program Perusahaan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta membantu terciptanya interaksi yang lebih komunikatif antara Dewan Komisaris dengan Direksi. Isi Piagam Komite Audit mencakup deskripsi tugas, wewenang, dan kode etik Komite Audit. Dengan isi yang komprehensif tersebut diharapkan akan tercapai standar

AUDIT COMMITTEE CHARTER

The PUSRI Audit Committee has a working guideline, namely the Audit Committee Charter, which was ratified through Board of Commissioners Decree No. KEP-02/DEKOM/PUSRI/XI/2023. The Charter was prepared to support the effective and comprehensive execution of the supervisory and advisory duties of the Board of Commissioners toward the Board of Directors in accordance with the broad policy direction of Company programs established by the General Meeting of Shareholders (GMS). It also aims to foster more communicative interaction between the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Charter contains descriptions of the duties, authorities, and code of ethics of the Audit Committee. With these

kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG serta terlaksananya tugas dan fungsi Komite Audit secara independen, profesional dan berintegritas.

comprehensive provisions, it is expected to achieve high work standards aligned with GCG principles and ensure the independent, professional, and integrity-based execution of the Audit Committee's functions.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris. Berikut deskripsi ringkas Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit.

1. Memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal,
2. Menilai efektivitas pelaksanaan fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan alat manajemen dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara langsung. Penilaian yang dilakukan Komite Audit meliputi penilaian atas perencanaan audit, pelaporan audit dan tindak lanjut oleh Direksi atas rekomendasi hasil audit yang diberikan SPI.
3. Melakukan proses seleksi terhadap calon auditor eksternal, menetapkan auditor eksternal berdasarkan hasil seleksi, melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit yang dilakukan auditor eksternal. Penilaian ini meliputi penelaahan terhadap independensi dan objektivitas auditor eksternal termasuk melakukan koordinasi dengan auditor eksternal dan SPI serta pembahasan segala yang dianggap perlu.
4. Menilai tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
5. Menilai program-program (operasi rutin maupun investasi barang modal) yang akan dan telah dilakukan oleh Perusahaan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta alokasi dan realisasi penggunaan sumber daya pada setiap program tersebut.
6. Menilai proses penyusunan budget maupun penggunaan budget sebagai alat perencana dan pengendalian atas pusat-pusat penghasilan dan biaya yang ada dalam organisasi Perusahaan.
7. Menilai peningkatan efisiensi dan produktivitas kegiatan operasi Perusahaan yang mempengaruhi hasil usaha.
8. Menilai perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihasilkan, maupun kelengkapan dan kecukupan pencatatan informasi akuntansi dari setiap kegiatan operasi dan investasi barang modal Perusahaan.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

As stated in the Audit Committee Charter, the duties and responsibilities of the Audit Committee include providing opinions to the Board of Commissioners regarding reports or matters submitted by the Board of Directors, identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners, and carrying out other tasks related to the supervisory function of the Board of Commissioners. The duties and responsibilities include:

1. Ensuring the effectiveness of the Company's Internal Control System and the effectiveness of internal and external audit functions.
2. Assessing the effectiveness of the Internal Audit Unit (SPI) in performing direct supervisory functions, including audit planning, audit reporting, and follow-up actions by the Board of Directors on audit recommendations.
3. Conducting the selection process for external auditor candidates, determining the external auditor based on the selection results, and assessing the effectiveness of the external audit. This includes reviewing independence and objectivity, coordinating with the external auditor and SPI, and discussing relevant matters.
4. Assessing the Company's compliance with applicable laws and regulations.
5. Assessing programs (routine operations and capital investment) to be or already undertaken by the Company in the short, medium, and long term, including allocation and realization of resources.
6. Assessing the budgeting process and budget utilization as a planning and control tool for revenue and cost centers within the Company's organization.
7. Assessing improvements in operational efficiency and productivity that affect business results.
8. Assessing accounting treatment of financial transactions presented in financial statements and the adequacy and completeness of accounting records for operational and capital investment activities.

9. Menilai proses penyusunan dan penyampaian laporan (internal) hasil analisis manajemen dan informasi keuangan dan non keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan di setiap lini dalam struktur organisasi Perusahaan.
10. Melakukan telaah atas usulan aksi korporasi yang diajukan oleh Direksi
11. Melaksanakan tugas-tugas yang lain diberikan Dewan Komisaris.
12. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya.
13. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
14. Memastikan revidu yang memadai atas segala informasi yang dikeluarkan PUSRI

WEWENANG KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit juga memiliki wewenang meliputi:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan karyawan, sumber daya dan dana serta aset Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Komite Audit dapat menggunakan:
 - a. Laporan atau catatan yang dibuat oleh SPI, akuntan publik, konsultan/ kontraktor proyek.
 - b. Kontrak/surat perjanjian/MoU/notulen/risalah rapat Direksi dan Pemegang Saham.
 - c. Brosur/proyek/forecast keuangan dan ekonomi.
 - d. Laporan keuangan berkala Perusahaan.
 - e. Dokumen korespondensi Direksi dan Pemegang Saham.
 - f. Informasi relevan lainnya termasuk informasi dari pihak ketiga.
3. Dalam setiap penugasan yang berhubungan dengan permintaan data dan informasi ke unit kerja selain SPI, Komite Audit diberikan surat tugas yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris.

KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Komite Audit terdiri dari tiga orang. Salah seorang di antaranya adalah Ketua Komite yang dijabat oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Ketua : Sally Salamah

Anggota :

1. Eddie Sulistiady
2. Bagas Putranto

9. Assessing the preparation and submission process of internal management analysis reports and financial and non-financial information required for decision-making at all organizational levels.
10. Reviewing proposed corporate actions submitted by the Board of Directors.
11. Performing other tasks assigned by the Board of Commissioners.
12. Providing recommendations for improvements to the management control system and its implementation.
13. Identifying matters requiring attention from the Board of Commissioners.
14. Ensuring adequate review of all information issued by PUSRI.

AUTHORITY OF THE AUDIT COMMITTEE

In carrying out its duties, the Audit Committee has the authority to:

1. Obtain full, free, and unrestricted access to employee records, resources, funds, and other Company assets relevant to the execution of its duties.
2. Utilize, among others:
 - a. Reports or records prepared by SPI, public accountants, consultants, or project contractors,
 - b. Contracts, agreements, MoUs, minutes, or records of Board of Directors and Shareholders meetings.
 - c. Brochures, project documents, and financial and economic forecasts.
 - d. Periodic financial reports of the Company.
 - e. Correspondence documents between the Board of Directors and Shareholders.
 - f. Other relevant information, including information from third parties.
3. In assignments requiring data or information from work units other than SPI, receive a formal assignment letter signed by all members of the Board of Commissioners.

MEMBERSHIP OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee consists of three members, one of whom serves as Chairperson and is a member of the Board of Commissioners.

COMPOSITION OF THE AUDIT COMMITTEE

Chairperson : Sally Salamah

Members:

1. Eddie Sulistiady
2. Bagas Putranto

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

PROFILE OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS



SALLY SALAMAH

Ketua Komite Audit
Chair of the Audit Committee

Periode Jabatan Term of Office

Periode Jabatan 14 Juni 2021 – sampai dengan jabatan berakhir sebagai Komisaris
June 14, 2021 – until the end of her term as Commissioner

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia

Profil beliau dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris
Her profile can be found in the profile section of the Board of Commissioners.

Riwayat Pendidikan Educational Background

Diangkat sebagai Ketua Komite Audit PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.08/DEKOM/PUSRI/IV/2021 tanggal 14 Juni 2021
Appointed as Chair of the Audit Committee of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the Decree of the Board of Commissioners No. 08/DEKOM/PUSRI/IV/2021 dated June 14, 2021.



EDDIE SULISTIADY

Anggota Komite Audit

Member of the Audit Committee

Periode Jabatan Term of Office	Periode Jabatan 14 April 2022 – sampai dengan periode berakhir masa jabatan (3 tahun) dan pengangkatan kembali 14 April 2025 dengan masa jabatan 2 (dua) tahun April 14, 2022 – until the end of the term of office (3 years), and reappointed on April 14, 2025 for a term of 2 (two) years
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia Age	64 Tahun years
Tempat & tanggal Kelahiran Place and Date of Birth	Palembang, 28 Oktober 1962 Palembang, October 28, 1962
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Penunjukan Appointment History	Diangkat sebagai anggota Komite Audit PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.KEP-03/ DEKOM/PUSRI/IV/2022 tanggal 14 April 2022 dan diangkat kembali berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-01/DEKOM/PUSRI/IV/2025 tanggal 14 April 2025 Appointed as a Member of the Audit Committee of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-03/DEKOM/PUSRI/IV/2022 dated April 14, 2022 and reappointed based on the Board of Commissioners' Decree No. KEP-01/DEKOM/PUSRI/IV/2025 dated April 14, 2025
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 1986 2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ISM Tahun 2001 (S2) 1. State College of Accountancy, 1986 2. ISM College of Economics, 2001 (Master's Degree)
Pengalaman Kerja Work Experience	1. Tim Evaluasi Proyek-proyek strategis terkendala program investasi PT Angkasa Pura II tahun 2020. 2. Tim Reviu Pengadaan Kapal Pengangkut Batubara (Panamax) oleh PT Bahtera Adhiguna tahun 2020. 3. Tim Reviu Pekerjaan Pengerukan (dredging) pada PLTU oleh PT PJB – Bahtera Adhiguna tahun 2021. 4. Tim Reviu atas pemilihan mitra strategis pengembangan Bandar Udara Kualanamu oleh PT Angkasa Pura II tahun 2021. 5. Sebagai asesor asesmen penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BUMN/ BUMD sejak tahun 2005 sd. 2021. 1. Member of the Evaluation Team for stalled strategic investment projects at PT Angkasa Pura II, 2020. 2. Member of the Review Team for the procurement of coal carrier vessels (Panamax) by PT Bahtera Adhiguna, 2020. 3. Member of the Review Team for dredging works at a steam power plant (PLTU) by PT PJB – Bahtera Adhiguna, 2021. 4. Member of the Review Team for the selection of a strategic partner in the development of Kualanamu International Airport by PT Angkasa Pura II, 2021. 5. Assessor for the implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional-Owned Enterprises (BUMD), 2005–2021.
Sertifikasi Keahlian Professional Certifications	1. Certification in Audit Committee Practices (CACP) 2. Pengawasan Governance, Risk Management, Compliance Organisasi Certified GRC Oversight Professional (CGR COP) 3. Sertifikasi Governance, Risk, and Compliance (GRC) 4. Developing Audit Observations 1. Certification in Audit Committee Practices (CACP) 2. Certified GRC Oversight Professional (CGR COP) in Governance, Risk Management, and Compliance Oversight 3. Governance, Risk, and Compliance (GRC) Certification 4. Developing Audit Observations



BAGAS PUTRANTO

Anggota Komite Audit
 Member of the Audit Committee

Periode Jabatan Term of Office	Periode Jabatan 26 Juni 2022 – sampai dengan periode berakhir masa jabatan (3 tahun) dan pengangkatan kembali 26 Juni 2025 – sampai dengan masa jabatan 2 (dua) tahun April 14, 2022 – until the end of the term of office (3 years), and reappointed on April 14, 2025 for a term of 2 (two) years
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia Age	42 Tahun years
Tempat & tanggal Kelahiran Place and Date of Birth	Jakarta, 5 Februari 1984 Jakarta, February 5, 1984
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Penunjukan Appointment History	Diangkat sebagai anggota Komite Audit PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-06/DEKOM/PUSRI/ VI/2022 tanggal 26 Juni 2022 dan pengangkatan kembali berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor: KEP-03/DEKOM/PUSRI/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025. Appointed as a Member of the Audit Committee of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-06/DEKOM/PUSRI/VI/2022 dated June 26, 2022 and reappointed based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. KEP-03/DEKOM/PUSRI/VI/2025 dated June 26, 2025.
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta (29 Mei tahun 2005); 2. Sarjana Hukum Universitas Indonesia (12 Agustus tahun 2010); 3. Magister Administrasi Publik Universitas Nasional (10 September tahun 2020). 1. Bachelor of Communication Studies, Universitas Muhammadiyah Jakarta, May 29, 2005 2. Bachelor of Law, Universitas Indonesia, August 12, 2010 3. Master of Public Administration, Universitas Nasional, September 10, 2020
Pengalaman Kerja Work Experience	1. Anggota, Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2020; 2. Anggota, Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2021; 3. Liaison Officer (LO), Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023. 1. Member, Assessor Team for the Self-Assessment of Bureaucratic Reform Implementation at the Cabinet Secretariat, 2020 2. Member, Assessor Team for the Self-Assessment of Bureaucratic Reform Implementation at the Cabinet Secretariat, 2021 3. Liaison Officer (LO), Risk Management Team at the Secretariat General of the Judicial Commission, 2023
Sertifikasi Keahlian Professional Certifications	1. Certified Risk Professional (CRP) 2. Certification in Audit Committee Practices (CACP) 3. Certified Governance Oversight Profesional (CGOP); 4. Developing Audit Observations

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang akuntansi, keuangan, dan operasional. Baik ketua maupun anggota Komite Audit adalah independen terhadap Direksi, auditor internal maupun auditor eksternal.

Independensi Ketua dan Anggota Komite Audit dijalankan sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Piagam Komite Audit. Untuk memenuhi syarat independensi, maka anggota Komite Audit tidak ditunjuk dari anggota eksekutif Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau jasa non-audit kepada Perusahaan dalam jangka waktu enam bulan terakhir.

INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

Collectively, the Audit Committee possesses competence and experience in accounting, finance, and operations. Both the Chair and members of the Audit Committee are independent from the Board of Directors, internal auditors, and external auditors.

The independence of the Chair and members of the Audit Committee is implemented in accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and the Audit Committee Charter. To meet independence requirements, members of the Audit Committee are not appointed from executive members of a Public Accounting Firm that has provided audit and/or non-audit services to the Company within the past six months.

Independensi Komite Audit Audit Committee Independence			
Pernyataan Independensi Statement of Independence	Sally Salamah	Eddie Sulistiady	Bagas Putranto
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada PUSRI dalam waktu enam bulan terakhir Not an insider of a Public Accounting Firm, Law Firm, Public Appraisal Firm, or other party providing assurance services, non-assurance services, appraisal services, and/or other consulting services to PUSRI within the past six months.	✓	✓	✓
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PUSRI dalam waktu enam bulan terakhir (kecuali Komisaris Independen) Not a person who has worked or held authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise PUSRI's activities within the past six months (except for an Independent Commissioner).	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PUSRI Does not own shares in PUSRI, either directly or indirectly.	✓	✓	✓
Keluarga tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PUSRI Family members do not own shares in PUSRI, either directly or indirectly.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama PUSRI Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Main Shareholder of PUSRI.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PUSRI Has no direct or indirect business relationship related to PUSRI's business activities.	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/ anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah Does not serve as an official of a political party and/or as a legislative candidate/ member and/or as a candidate for or holder of a regional head/deputy regional head position.	✓	✓	✓
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan di PUSRI Does not hold other positions that may create a conflict of interest in relation to the position held at PUSRI.	✓	✓	✓

RANGKAP JABATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

CONCURRENT POSITIONS OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS

No	Nama Name	Rangkap Jabatan Concurrent Position
1	Eddie Sulistiady	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Main and Controlling Shareholder.
2	Bagas Putranto	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Main and Controlling Shareholder.

RAPAT KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE MEETINGS

Kebijakan Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Audit Committee Meeting Policy

The Audit Committee holds regular meetings at least 1 (one) time per month to carry out its duties and responsibilities.

Realisasi Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 12 kali. Berikut rekapitulasi kehadiran agenda rapat dan kehadiran dalam rapat-rapat yang diselenggarakan tersebut.

Realization of Audit Committee Meetings

Throughout 2025, the Audit Committee held 12 meetings. The following is a summary of meeting attendance.

Jumlah dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Number and Attendance Rate of Audit Committee Meetings

No	Nama Name	Jumlah Wajib Rapat Total Required Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
1	Sally Salamah	12	12	100
2	Eddie Sulistiady	12	12	100
3	Bagas Putranto	12	11	91

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT

SUMMARY REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF AUDIT COMMITTEE ACTIVITIES

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, mencakup: rapat-rapat Komite, baik yang dilakukan Bersama Dewan Komisaris maupun rapat bersama dengan Direksi dan Komisaris, juga beberapa agenda kegiatan Komite Audit lainnya.

Throughout 2025, the Audit Committee carried out its duties in accordance with its functions and responsibilities, including Committee meetings held jointly with the Board of Commissioners, meetings with the Board of Directors and Commissioners, and other Audit Committee agendas.

Selama tahun 2025 Komite Audit telah melaksanakan tugasnya, yaitu:

During 2025, the Audit Committee performed the following duties:

1. Memantau dan memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan
2. Menilai tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
3. Menilai peningkatan efisiensi dan produktivitas kegiatan operasi Perusahaan yang mempengaruhi hasil usaha.
4. Melakukan telaah atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi yang berlaku (SAK).

1. Monitor and ensure the effectiveness of the Company's Internal Control System
2. Assess the Company's level of compliance with applicable laws and regulations
3. Evaluate improvements in the efficiency and productivity of the Company's operational activities that affect business performance
4. Review the Company's accounting policies and the preparation of financial statements in accordance with applicable Accounting Standards (SAK)

5. Menilai perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, kelengkapan dan kecukupan pencatatan informasi akuntansi dari setiap kegiatan operasi dan investasi. 6. Melakukan rapat bulanan Komite Audit bersama Satuan Pengawasan Internal dengan agenda penilaian atas perencanaan audit, pelaporan audit dan tindak lanjut oleh Direksi atas rekomendasi hasil audit yang diberikan SPI, untuk memastikan pelaporan kegiatan SPI sesuai dengan standar yang berlaku dan audit internal telah dilaksanakan secara efektif. 7. Memastikan pelaksanaan pekerjaan Audit eksternal telah dilaksanakan secara efektif/sesuai kontrak, dan terselesaikannya permasalahan-permasalahan yang timbul selama masa audit secara baik dan cepat melalui rapat Progress Meeting Audit PwC Tahun Buku 2024, serta tersajinya draft laporan keuangan perusahaan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. 8. Membuat usulan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan laporan keuangan UMKM tahun buku 2025. 9. Mengikuti rapat pembahasan HPS Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2025. 10. Melakukan telaah atas Kebijakan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024. 11. Melakukan telaah atas kesesuaian Visi Misi Perusahaan. 12. Melakukan telaah atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2024. 13. Melakukan telaah atas Rancangan Dokumen Rencana Jangka Panjang Periode 2025–2029. 14. Melakukan reviu kesesuaian penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI). 15. Mengikuti <i>Closing Meeting General Audit</i> 2024 yaitu pembahasan hasil pelaksanaan General Audit tahun buku 2024. 16. Melakukan evaluasi terhadap Kinerja Eksternal Auditor, evaluasi efektifitas pelaksanaan audit KAP tahun buku 2024. 17. Membahas progres Proyek Pembangunan Pusri-IIIIB dan Kunjungan kerja ke Lokasi Proyek Pusri-IIIIB. 18. Mengikuti rapat entry meeting asesmen GCG. 19. Reviu dokumen persetujuan Dewan Komisaris atas draft Dokumen Rencana Darurat (Contingency Plan) Tahun 2025 20. Reviu dokumen Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris untuk Pekerjaan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 PT PI dan entitas anak.	5. Assess the accounting treatment of financial transactions presented in the financial statements, as well as the completeness and adequacy of accounting records for all operational and investment activities 6. Conduct monthly Audit Committee meetings with the Internal Audit Unit to evaluate audit planning, audit reporting, and follow-up actions by the Board of Directors on audit recommendations provided by Internal Audit, ensuring that reporting complies with applicable standards and that internal audits are carried out effectively 7. Ensure that external audit activities are conducted effectively and in accordance with the contract, and that any issues arising during the audit are resolved properly and promptly through Progress Meetings for the PwC Audit for Fiscal Year 2024, as well as ensuring the timely preparation of draft financial statements 8. Propose the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's consolidated financial statements and MSME financial statements for Fiscal Year 2025 9. Participate in meetings discussing the Owner's Estimate (HPS) for the Public Accounting Firm for Fiscal Year 2025 10. Review the policies and implementation of procurement of goods and services for 2024 11. Review the alignment of the Company's Vision and Mission 12. Review the implementation of Good Corporate Governance (GCG) for 2024 13. Review the draft Long-Term Plan document for the 2025–2029 period 14. Review the alignment with the Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI) 15. Participate in the Closing Meeting of the 2024 General Audit to discuss the audit results for Fiscal Year 2024 16. Evaluate the performance of the external auditor and the effectiveness of the audit conducted by the Public Accounting Firm for Fiscal Year 2024 17. Discuss the progress of the Pusri-IIIIB Development Project and conduct a site visit to the project location 18. Participate in the entry meeting for the GCG assessment 19. Review documents for Board of Commissioners' approval of the draft Contingency Plan for 2025 20. Review the joint agreement document of the Board of Commissioners regarding the audit of financial statements for Fiscal Year 2025 of PT PI and its subsidiaries

- 21.** Telaah atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024.
- 22.** Melakukan telaah atas usulan aksi korporasi yang diajukan oleh Direksi yaitu:
 - a.** Telaah atas Perubahan Keputusan Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tentang Pemberian Kewenangan dan Updating Rancangan RKAP tahun 2025;
 - b.** Telaah atas Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Umur Ekonomis sampai dengan 5 tahun;
 - c.** Telaah atas Kesesuaian Visi dan Misi Perusahaan dengan Perubahan Lingkungan Bisnis.
 - d.** Telaah atas Permohonan Ijin Prinsip Sewa 7 GPP oleh PKC dan PKG;
 - e.** Telaah atas Usulan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Umur Ekonomis sampai dengan 5 (lima) Tahun PPD Bangka Belitung;
 - f.** Telaah izin prinsip sewa lahan Bukit Kenten dengan Bapak Erwing Suparnyoto;
 - g.** Telaah izin prinsip sewa lahan Bukit Kenten dengan PT Mitra Bangun Sriwidjaja Abadi;
 - h.** Telaah izin prinsip sewa lahan Bukit Kenten dengan Ibu Hani Fitasari;
 - i.** Telaah izin prinsip sewa pakai Rooftop Wisma 101 Jakarta;
 - j.** Telaah atas permohonan persetujuan menerima pinjaman jangka menengah panjang 2025;
 - k.** Telaah atas Divestasi Saham PT Pupuk Indonesia Utilitas.
 - l.** Telaah atas Laporan Pelaksanaan GCG PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Semester II Tahun 2024
 - m.** Telaah atas Rancangan RKAP Tahun 2026;
- 23.** Evaluasi terhadap Kinerja operasional PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sampai dengan Triwulan III 2025 bidang produksi, pemasaran, keuangan, investasi pengembangan, sumber daya manusia dan TJSL.
- 24.** Melakukan reviu atas Annual Report Pusri Tahun 2024 khusus section Komite Audit.
- 25.** Menghadiri rapat dalam rangka kunjungan kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- 26.** Mengikuti kegiatan Safari Ramadan Pusri 1446 H pada tanggal 13-14 Maret 2025.
- 27.** Melaksanakan kunjungan kerja peninjauan aset Pusri antara lain:
 - a.** Kunjungan kerja ke Gudang Gasing di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b.** Kunjungan kerja ke Gudang di Kota Martapura;
- 21.** Review compliance with laws and regulations for 2024
- 22.** Review proposed corporate actions submitted by the Board of Directors, including:
 - a.** Review of amendments to the shareholders' resolution of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang regarding the granting of authority and updates to the draft RKAP for 2025;
 - b.** Review of the write-off and disposal of fixed assets with an economic life of up to 5 years;
 - c.** Review of the alignment between the Company's vision and mission and changes in the business environment;
 - d.** Review of the application for principle approval for the lease of 7 GPP by PKC and PKG;
 - e.** Review of the proposed write-off and disposal of fixed assets with an economic life of up to 5 (five) years for PPD Bangka Belitung;
 - f.** Review of the principle approval for the lease of Bukit Kenten land with Mr. Erwing Suparnyoto;
 - g.** Review of the principle approval for the lease of Bukit Kenten land with PT Mitra Bangun Sriwidjaja Abadi;
 - h.** Review of the principle approval for the lease of Bukit Kenten land with Ms. Hani Fitasari;
 - i.** Review of the principle approval for the lease of the rooftop of Wisma 101 Jakarta;
 - j.** Review of the application for approval to obtain medium- to long-term loans in 2025;
 - k.** Review of the divestment of shares in PT Pupuk Indonesia Utilitas;
 - l.** Review of the GCG implementation report of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang for the second semester of 2024;
 - m.** Review of the draft RKAP for 2026.
- 23.** evaluation of the operational performance of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang up to the third quarter of 2025 in the areas of production, marketing, finance, development investment, human resources, and TJSL;
- 24.** review of the 2024 Annual Report of Pusri, specifically the Audit Committee section;
- 25.** attendance at meetings in the context of a working visit by the Vice Chairman of the Regional House of Representatives (DPRD) of South Sumatra Province;
- 26.** participation in the Pusri Ramadan Safari 1446 H activities held on March 13-14, 2025;
- 27.** conducting working visits for the inspection of Pusri assets, including:
 - a.** Working visit to the Gasing Warehouse in Musi Banyuasin Regency;
 - b.** Working visit to the warehouse in Martapura City;

- c. Kunjungan kerja ke Gudang di Kabupaten Lampung Tengah;
 - d. Kunjungan kerja ke Gudang di Provinsi Bangka Belitung;
 - e. Kunjungan kerja ke Gudang di Kabupaten Banyuwangi;
 - f. Kunjungan kerja ke Gudang di Kabupaten Purworejo, Sragen dan Karanganyar Jawa Tengah
 - g. Kunjungan kerja ke Gudang di Jawa Timur (Jember, Malang dan Batu).
- 28.** Melaksanakan tugas-tugas yang lain diberikan Dewan Komisaris, terkait Pending matters & Current Issues, antara lain:
- a. Kinerja PT Pusri Agro Lestari dan Kinerja PT PLOG;
 - b. Rencana opsi-opsi untuk penutupan UPP Meneng;
 - c. Tindak lanjut permasalahan impairment kantong kemasan retail;
 - d. Tindak lanjut permasalahan Pinjam Pakai Lahan Indralaya oleh YKKP;
 - e. Tindak lanjut hasil Joint Audit Penyaluran dan Pengelolaan Stok Pupuk Bersubsidi di Wilayah Jawa Tengah dan DIY.
 - f. Tindak lanjut atas koreksi tidak diakuinya penyaluran uji coba aplikasi REKAN oleh Kementerian Pertanian dan Koreksi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2022 dan 2023 yang belum dapat ditagih kepada Distributor;
 - g. Permasalahan Pinjam Pakai Lahan Indralaya oleh YKKP.
 - h. Tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI atas Aktivitas PBJ di Pusri;
 - i. Permasalahan pengelolaan dana pada PKHT dan Dapensri;
 - j. Permasalahan pendangkalan area Dermaga Sungai Musi.
 - k. Fokus pada 6 Critical Activity Proyek Pusri III B: (1) Instalasi compressor 101-J. (2) Instalasi Catalyst Tube Reformer. (3) Instalasi Piping Above Ground-Wuhuan Scope. (4) Konstruksi Cooling Tower. (5) Instalasi DCS dan (6) Precommissioning.
 - l. Tindak Lanjut Audit Eksternal s.d. Desember 2025.
 - m. Strategi metode mark to market (MTM) tahun 2026.
 - n. Penyelesaian Temuan audit PwC Tahun Buku 2025.
- c. Working visit to the warehouse in Central Lampung Regency;
 - d. Working visit to the warehouse in Bangka Belitung Province;
 - e. Working visit to the warehouse in Banyuwangi Regency;
 - f. Working visits to warehouses in Purworejo, Sragen, and Karanganyar Regencies, Central Java;
 - g. Working visits to warehouses in East Java (Jember, Malang, and Batu).
- 28.** carry out other duties assigned by the Board of Commissioners related to pending matters and current issues, including:
- a. the performance of PT Pusri Agro Lestari and the performance of PT Pupuk Indonesia Logistik
 - b. proposed options for the closure of UPP Meneng;
 - c. follow-up on impairment issues related to retail packaging bags;
 - d. follow-up on the land-use loan issue in Indralaya by YKKP;
 - e. follow-up on the results of the joint audit on the distribution and stock management of subsidized fertilizers in Central Java and the Special Region of Yogyakarta;
 - f. follow-up on corrections regarding the non-recognition of trial distributions using the REKAN application by the Ministry of Agriculture, and corrections to subsidized fertilizer distribution for 2022 and 2023 that have not yet been collectible from distributors;
 - g. issues related to the land-use loan in Indralaya by YKKP;
 - h. follow-up on the Internal Audit Unit (SPI) findings regarding procurement activities (PBJ) at Pusri;
 - i. issues related to fund management at PKHT and Dapensri;
 - j. issues related to sedimentation in the Musi River dock area;
 - k. focus on six critical activities of the Pusri III B Project: (1) installation of compressor 101-J, (2) installation of catalyst tubes in the reformer, (3) above-ground piping installation under the Wuhuan scope, (4) cooling tower construction, (5) DCS installation, and (6) pre-commissioning;
 - l. follow-up on external audit findings up to December 2025;
 - m. strategy for the mark-to-market (MTM) method in 2026;
 - n. resolution of audit findings by PwC for Fiscal Year 2025.

- 29. Penandatanganan Pakta Integritas;
- 30. Membantu penyusunan RKA Dewan Komisaris Tahun 2026;
- 31. Mendampingi Dewan Komisaris pada assessment GCG Tahun 2024.

- 29. signing of the Integrity Pact;
- 30. assisting in the preparation of the Board of Commissioners' Work Plan and Budget (RKA) for 2026;
- 31. accompanying the Board of Commissioners in the GCG assessment for 2024.

PENCAPAIAN KPI KOMITE AUDIT

Penilaian Kinerja Komite Audit oleh Dewan Komisaris

Penilaian atas kinerja Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dasar penilaian yang digunakan adalah rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun buku. Rencana kerja tersebut ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar evaluasi atas kinerja Komite. Atas dasar pertimbangan tersebut, Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Audit pada tahun 2025 masuk kategori “Sangat Baik”.

Selain penilaian dari Dewan Komisaris, Komite Audit juga melakukan penilaian mandiri. Rinciannya disampaikan dalam tabel di bawah ini.

KPI ACHIEVEMENT OF THE AUDIT COMMITTEE

Performance Assessment by the Board of Commissioners

The performance of the Audit Committee is assessed by the Board of Commissioners based on the annual work plan established at the beginning of the financial year. The work plan serves as the basis for evaluation. Based on this assessment, the Board of Commissioners rated the performance of the Audit Committee in 2025 as “Very Good.”

In addition to the assessment by the Board of Commissioners, the Audit Committee also conducted a self-assessment.

Hasil Self-Assessment Kinerja Komite Audit Tahun 2025
Results of the Audit Committee Self-Assessment 2025

No.	Kinerja Performance	Frekuensi Frequency	
		Rencana Plan	Hasil Actual
1	Melakukan rapat kinerja SPI bulanan dengan SVP SPI dan staf Conducted monthly SPI performance meetings with the SVP of SPI and staff	12 kali	12
2	Melakukan rapat kinerja Perusahaan bulanan dengan Para SVP/ VP setingkat Conducted monthly Company performance meetings with SVP/ VP level	12 kali	12
3	Mengikuti Rapat Internal Dewan Komisaris Attended internal meetings of the Board of Commissioners	12 kal	12
4	Menyusun dan menyampaikan laporan evaluasi kinerja Perusahaan bulanan kepada Komisaris Utama Prepared and submitted monthly Company performance evaluation reports to the President Commissioner	12 kali	12
5	Melakukan self assessment kinerja/ aktivitas Komite Audit triwulan IV / tahun 2022 Conducted self-assessment of Audit Committee performance/ activities (Q4/2022)	1 kali	1

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya terkait dengan kebijakan nominasi dan kebijakan remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-09/DEKOM/PUSRI/IX/2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tanggal 14 September 2020 Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan upaya Perusahaan diantaranya untuk menjaga independensi dan keterbukaan/ transparansi dalam sistem Manajemen Talenta serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya, melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta Terseleksi (*selected talent*) untuk menghasilkan daftar Talenta Ternominasi (*nominated talent*), melakukan evaluasi atas usulan KPI individu anggota Direksi, menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PUSRI adalah:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor KEP-06/DEKOM/PUSRI/VIII/2025 dan Nomor: SK/DIR/240/2025 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris & Direksi (*Board Manual*).

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sebagai wujud upaya menjaga independensi setiap anggota Komite, masing-masing anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris memberikan pernyataan independensi. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi menyatakan bahwa mereka:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada PUSRI dalam waktu enam bulan terakhir

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) is a supporting committee of the Board of Commissioners tasked with assisting the Board of Commissioners in supervising the implementation of nomination and remuneration policies for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in accordance with prevailing regulations.

The Board of Commissioners established the Nomination and Remuneration Committee through Board of Commissioners Decree No. KEP-09/DEKOM/PUSRI/IX/2020 concerning the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dated September 14, 2020. The establishment of the Nomination and Remuneration Committee represents the Company's efforts, among others, to maintain independence and transparency in the Talent Management system and to oversee and evaluate its implementation. The Committee also conducts validation and calibration of selected talent to produce a list of nominated talent, evaluates proposed individual KPIs of members of the Board of Directors, and prepares proposals for development programs for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises (SOEs).

LEGAL BASIS

The legal basis for the establishment of PUSRI's Nomination and Remuneration Committee is as follows:

1. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
2. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
3. Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. KEP-06/DEKOM/PUSRI/VIII/2025 and No. SK/DIR/240/2025 concerning the Board of Commissioners and Board of Directors Work Guidelines (*Board Manual*).

INDEPENDENCE OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

As part of efforts to safeguard independence, each member of the Board of Commissioners' Supporting Committees provides a statement of independence. Each member of the Nomination and Remuneration Committee declares that they:

1. Are not affiliated with a Public Accounting Firm, Law Firm, Public Appraisal Service Office, or any other party providing assurance services, non-assurance services, appraisal services, and/or other consulting services to PUSRI within the past six months.

2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PUSRI dalam waktu enam bulan terakhir (kecuali Komisaris Independen) 3. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PUSRI 4. Keluarga tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PUSRI 5. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama PUSRI 6. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PUSRI 7. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah 8. Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan di PUSRI.	2. Have not worked for or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise PUSRI's activities within the past six months (except for Independent Commissioners). 3. Do not hold shares in PUSRI, either directly or indirectly. 4. Have no family members holding shares in PUSRI, either directly or indirectly. 5. Have no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Controlling Shareholder of PUSRI. 6. Have no business relationship, either directly or indirectly, related to PUSRI's business activities. 7. Do not serve as officials of a political party and/or as legislative candidates/members and/or as candidates or holders of regional head/deputy regional head positions. 8. Do not hold any other position that may create a conflict of interest with their position at PUSRI.

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi PUSRI memiliki pedoman kerja berupa Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah disahkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/DEKOM/PUSRI/XII/2023.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi mencakup tentang petunjuk dan pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Risiko serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten. Dengan demikian, diharapkan dokumen tersebut dapat menjadi acuan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan sehingga akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

PUSRI menyusun Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (best practices) Good Corporate Governance. Isi dari Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengatur pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi mencakup:

1. Struktur Organisasi
2. Persyaratan Keanggotaan
3. Tanggung Jawab, Tugas dan Kewenangan
4. Rapat
5. Pendidikan dan Tenaga Penunjang
6. Penilaian Kinerja

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER

PUSRI's Nomination and Remuneration Committee operates under a working guideline in the form of a Nomination and Remuneration Committee Charter, ratified through Board of Commissioners Decree No. KEP-03/DEKOM/PUSRI/XII/2023.

The Charter sets out structured, systematic, clear, and consistently implementable guidance and working procedures for the Committee. The document serves as a reference for the Committee in performing its duties to achieve the Company's Vision and Mission and to ensure high standards of performance aligned with Good Corporate Governance (GCG) principles.

PUSRI formulated the Charter based on corporate law principles, the Articles of Association, prevailing laws and regulations, Shareholder directives, and best practices of Good Corporate Governance. The Charter governing the Committee's duties includes:

1. Organizational Structure
2. Membership Requirements
3. Responsibilities, Duties, and Authorities
4. Meetings
5. Education and Supporting Personnel
6. Performance Evaluation

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengatur tugas dan tanggung jawab Komite sebagai berikut:

Tanggung Jawab

1. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan tahunan pelaksanaan tugas
 - b. Laporan triwulan pelaksanaan tugas
 - c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite
3. Komite bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan baik dari eksternal maupun internal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
4. Laporan Komite ditandatangani Ketua dan Anggota Komite.

Tugas

1. Secara kolektif dalam pelaksanaan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
2. Bersifat mandiri, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Tugas terkait dengan fungsi nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Tugas terkait fungsi remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi Perusahaan, Komisaris dan

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Charter regulates the Committee's duties and responsibilities as follows:

Responsibilities

1. The Committee is accountable to the Board of Commissioners.
2. Accountability is submitted to the Board of Commissioners through:
 - a. Annual implementation report
 - b. Quarterly implementation report
 - c. Report for each special assignment undertaken by the Committee
3. The Committee is responsible for maintaining the confidentiality of Company documents, data, and information, both internal and external, and using them solely for the purpose of carrying out its duties.
4. Committee reports are signed by the Chair and Members of the Committee.

Duties

1. Collectively assist the Board of Commissioners in carrying out its duties.
2. Act independently in performing duties and reporting, and remain accountable to the Board of Commissioners.
3. Duties related to the nomination function:
 - a. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - i. The composition of positions of members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
 - ii. Policies and criteria required in the nomination process.
 - iii. Performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
 - b. Assist the Board of Commissioners in conducting performance assessments of members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners based on established benchmarks.
 - c. Provide recommendations regarding capability development programs for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
 - d. Propose qualified candidates for membership of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS).
4. Duties related to the remuneration function:
 - a. Provide recommendations regarding candidates for members of the Board of Directors of the Company, Commissioners,

Direksi anak Perusahaan kepada Dewan Komisaris.

- b.** Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris.
- c.** Mengevaluasi kebijakan remunerasi.
- d.** Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.
- e.** Melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WEWENANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Risiko juga memiliki wewenang meliputi:

- 1.** Mengakses catatan atau informasi tentang aset dan sumber daya lainnya dan memasuki pekarangan, gedung serta kantor yang digunakan oleh Perusahaan.
- 2.** Berhak mendapatkan dan meminta setiap hasil kajian nominasi dan remunerasi yang dilakukan baik oleh para risk owner, para pejabat struktural terkait, risk champion, SPI maupun Direksi Perusahaan.
- 3.** Meminta penjelasan Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.
- 4.** Dalam melaksanakan kewenangannya, Komite bekerja sama dengan unit kerja terkait, dalam hal ini risk owner, para pejabat struktural terkait SDM, organisasi serta SPI Perusahaan.
- 5.** Melakukan review, memeriksa, melakukan analisis dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya.
- 6.** Mencari dan mendapatkan informasi (akses yang tidak terbatas) yang relevan dari Sistem Informasi Manajemen (SIM), laporan-laporan maupun dari setiap anggota Direksi, karyawan atau individu atau narasumber terkait.
- 7.** Mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat Komite.

KUALIFIKASI ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Mengacu pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, anggota Komite harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1.** Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai di bidang tugas Komite serta memiliki pemahaman tentang lingkup bisnis Perusahaan.
- 2.** Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan.

and Directors of Subsidiaries to the Board of Commissioners.

- b.** Formulate and provide recommendations on systems and procedures for the selection and/ or replacement of the Board of Commissioners and Board of Directors.
- c.** Evaluate remuneration policies.
- d.** Identify matters requiring the Board of Commissioners' attention and perform other duties assigned by the Board.
- e.** Carry out special assignments granted by the Board of Commissioners, provided they do not conflict with prevailing laws and regulations.

AUTHORITY OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

In performing its duties, the Committee also has the authority to:

- 1.** Access records or information regarding assets and other resources and enter Company premises, buildings, and offices.
- 2.** Obtain and request results of nomination and remuneration reviews conducted by risk owners, related structural officials, risk champions, the Internal Audit Unit (SPI), and the Board of Directors.
- 3.** Request explanations from the Board of Directors and/ or other officials regarding any matters related to Company management.
- 4.** Collaborate with relevant work units, including risk owners, HR-related structural officials, organizational units, and SPI.
- 5.** Conduct reviews, examinations, analyses, and provide opinions and recommendations within the scope of its duties.
- 6.** Seek and obtain relevant information (with unrestricted access) from the Management Information System (MIS), reports, members of the Board of Directors, employees, or other relevant individuals or sources.
- 7.** Invite management to attend Committee meetings.

QUALIFICATIONS OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEMBERS

Referring to the Charter, Committee members must meet the following requirements:

- 1.** Possess high integrity, adequate competence, knowledge, and work experience in the Committee's field of duty, and understand the Company's business scope.
- 2.** Have no personal interest or affiliation that may create negative impact or conflict of interest for the Company.

3. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
4. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan secara efektif.

3. Be able to allocate sufficient time to carry out their duties.
4. Be capable of effective cooperation and communication.

MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan Dewan Komisaris adalah mengikuti masa jabatannya sebagai Dewan Komisaris Perusahaan. Sementara itu, apabila terdapat anggota komite yang bukan merupakan Dewan Komisaris diatur sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

TERM OF OFFICE

The term of office of Committee members who are members of the Board of Commissioners follows their term as members of the Board of Commissioners of the Company. Meanwhile, if a Committee member is not a member of the Board of Commissioners, their term is regulated in accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

STRUCTURE AND COMPOSITION OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Siti Nurizka Puteri Jaya	Ketua Chair	KEP-06/DEKOM/PUSRI/VI/2024
Sally Salamah	Anggota Member	KEP-09/DEKOM/PUSRI/VI/2021
Bambang Supriyambodo	Anggota Member	KEP-10/DEKOM/PUSRI/VIII/2025
Fadjar Judisiawan	Anggota Member	KEP-03/DEKOM/PUSRI/III/2024
Arteria Dahlan*	Anggota Member	KEP-10/DEKOM/PUSRI/VIII/2025
Muhammad Syakir*	Anggota Member	KEP-10/DEKOM/PUSRI/VIII/2025
Rifky Zul Fauzan	Anggota Member	KEP-12/DEKOM/PUSRI/XII/2024
Ali Jamil**	Anggota Member	KEP-02/DEKOM/PUSRI/I/2022
Prahoru Yulijanto Nurtjahyo***	Anggota Member	KEP-09/DEKOM/PUSRI/IX/2020

*)Diangkat sebagai Komisaris dan Anggota pada Agustus 2025

**)Diberhentikan sebagai Komisaris dan anggota pada 16 Juni 2025

***Diberhentikan sebagai Komisaris dan anggota pada 14 April 2025

*) Appointed as Commissioner and Member in August 2025

**) Dismissed as Commissioner and Member on June 16, 2025

***) Dismissed as Commissioner and Member on April 14, 2025

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN
 REMUNERASI

PROFILE OF NOMINATION AND
 REMUNERATION COMMITTEE



SITI NURIZKA PUTERI JAYA

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
 Chair of the Nomination and Remuneration Committee

Periode Jabatan
 Term of Office

13 Juni 2024 – sampai dengan jabatan berakhir sebagai Komisaris
 June 13, 2024 – until the end of her tenure as Commissioner

Profil beliau dapat dilihat pada Bab Profile Perusahaan
 Her profile can be found in the Company Profile chapter.

Riwayat Penunjukan
 Appointment Reference

KEP-06/DEKOM/PUSRI/VI/2024 dan KEP-10/DEKOM/PUSRI/VIII/2025



SALLY SALAMAH

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
 Member of the Nomination and Remuneration Committee

Periode Jabatan
 Term of Office

14 Juni 2021 – sampai dengan jabatan berakhir sebagai Komisaris
 June 14, 2021 – until the end of her tenure as Commissioner

Profil beliau dapat dilihat pada Bab Profile Perusahaan
 Her profile can be found in the Company Profile chapter.

Riwayat Penunjukan
 Appointment Reference

KEP-09/DEKOM/PUSRI/VI/2021 dan KEP-10/DEKOM/PUSRI/VIII/2025



BAMBANG SUPRIYAMBODO

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Member of the Nomination and Remuneration Committee

Periode Jabatan Term of Office

14 September 2020 – sampai dengan jabatan berakhir sebagai Komisaris Independen
19 Agustus 2025 – sampai dengan jabatan berakhir sebagai Komisaris Independen
September 14, 2020 – until the end of his term as an Independent Director
August 19, 2025 – until the end of the term as Independent Commissioner

Profil beliau dapat dilihat pada Bab Profile Perusahaan
Her profile can be found in the Company Profile chapter.

Riwayat Penunjukan Appointment Reference

KEP-09/DEKOM/PUSRI/IX/2020
KEP-10/DEKOM/PUSRI/VIII/2025



FADJAR JUDISIAWAN

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Member of the Nomination and Remuneration Committee

Periode Jabatan Term of Office

18 Maret 2024 – sampai dengan jabatan berakhir sebagai Komisaris
March 18, 2024 – until the end of his term as an Independent Director

Profil beliau dapat dilihat pada Bab Profile Perusahaan
Her profile can be found in the Company Profile chapter.

Riwayat Penunjukan Appointment Reference

KEP-03/DEKOM/PUSRI/III/2024 dan KEP-10/DEKOM/PUSRI/VIII/2025



ARTERIA DAHLAN

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
 Member of the Nomination and Remuneration Committee

Periode Jabatan
 Term of Office

19 Agustus 2025 – sampai dengan jabatan berakhir sebagai Komisaris
 August 19, 2025 – until the end of tenure as Commissioner

Profil beliau dapat dilihat pada Bab Profile Perusahaan
 His profile can be found in the Company Profile chapter

Riwayat Penunjukan
 Appointment History

KEP-10/DEKOM/PUSRI/VIII/2025



MUHAMMAD SYAKIR

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
 Member of the Nomination and Remuneration Committee

Periode Jabatan
 Term of Office

19 Agustus 2025 – sampai dengan jabatan berakhir sebagai Komisaris
 August 19, 2025 – until the end of tenure as Commissioner

Profil beliau dapat dilihat pada Bab Profile Perusahaan
 His profile can be found in the Company Profile chapter

Riwayat Penunjukan
 Appointment History

KEP-10/DEKOM/PUSRI/VIII/2025



RIFKY ZUL FAUZAN

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Periode Jabatan Term of Office	10 Desember 2024 – sampai dengan periode berakhir masa jabatan (3 tahun) December 10, 2024 – until the end of the term of office (3 years)
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia Age	38 Tahun years
Tempat & tanggal Kelahiran Place & Date of Birth	Bandung 12 September 1988 Bandung, September 12, 1988
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Penunjukan Appointment History	KEP-03/DEKOM/PUSRI/III/2024
Riwayat Pendidikan Educational Background	Taylors University Malaysia, Business Management
Pengalaman Kerja Work Experience	1. Managing Director Golden Andalas Techno 2. Marketing Manager Visa Worldwide Indonesia 1. Head of PR & Marcomm BRI Insurance 2. Head of Marketing Allyoung International Indonesia
Sertifikasi Keahlian Professional Certifications	1. Circular Economies & Busines Strategies, Cambridge Judge Business School 2. Digital Transformation Organization, Boston Consulting Group 3. Artificial Intelligence for Business Acceleration, Kuncie 1. Dive into Sustainability Disclosure 2. Developing Audit Observations, IHT Internal Audit Course 3. Leadership for Sustainable Impact:GRC,ESG & SDGs, GRC Summit

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PUSRI senantiasa mendorong peningkatan kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Pendidikan dan Pelatihan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun buku disampaikan dalam bab "Profil Perusahaan".

RAPAT DAN KEBIJAKAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala, sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota Komite yang paling senior masa keanggotaannya, apabila Ketua Komite berhalangan hadir. Jika dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite. Setiap rapat komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir. Komite mengadakan rapat koordinasi dengan struktural manajemen SDM dan organisasi sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.

FREKUENSI PERTEMUAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Selama tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan rapat internal Komite sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

PUSRI continuously promotes the enhancement of the competencies of the Nomination and Remuneration Committee through various education and training programs, fully funded by the Company. The education and training activities of the Nomination and Remuneration Committee for the financial year are presented in the "Company Profile" chapter.

MEETINGS AND MEETING POLICY OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Meetings of the Nomination and Remuneration Committee are held periodically, at least in accordance with the minimum meeting requirements applicable to the Board of Commissioners. Committee meetings are chaired by the Chair of the Committee or by the Committee member with the longest tenure if the Chair is unable to attend. If deemed necessary, the Committee may invite relevant members of management to attend the meeting in relation to the agenda items. Each Committee meeting is documented in minutes of meeting signed by all attending Committee members. The Committee also holds coordination meetings with the HR and organizational structural management at least once every three months.

MEETING FREQUENCY OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

During 2025, the Nomination and Remuneration Committee held 13 (thirteen) internal Committee meetings, with the following attendance rate:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Total Required Meetings	Jumlah Kehadiran Total Total Attendance	Jumlah Tidak Hadir Total Absences	Kehadiran (%) Attendance (%)
Siti Nurizka Puteri Jaya	Ketua Chair	13	13	0	100
Bambang Supriyambodo	Anggota Member	13	10	3	76
Sally Salamah	Anggota Member	13	13	0	100
Fadjar Judisiawan	Anggota Member	13	12	1	91
Arteria Dahlan*	Anggota Member	5	5	0	100
M. Syakir*	Anggota Member	5	5	0	100
Rifky Zul Fauzan	Anggota Member	13	13	0	100

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Total Required Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Jumlah Tidak Hadir Total Absences	Kehadiran (%) Attendance (%)
Prahoro Yulijanto Nurtjahyo**	Anggota Member	4	3	1	75
Ali Jamil***	Anggota Member	5	5	0	100

*) Menjabat sejak 19 Agustus 2025

**) Menjabat sampai 14 April 2025

**) Menjabat sampai 16 Juni 2025

*) Served since August 19, 2025

**) Serving until April 14, 2025

**) Serving until June 16, 2025

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2025

Sepanjang 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan fungsi Komite antara lain:

IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE IN 2025

Throughout 2024, the Nomination and Remuneration Committee carried out its functions, including:

No	Kinerja Performance	Frekuensi Frequency		Keterangan Remark
		Rencana Planned	Realisasi Realized	
1	Melaksanakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Conducted Nomination and Remuneration Committee Meetings	12 kali times 12 Times	13 kali times 13 times	Pelaksanaan Rapat: 24 Januari 2025 24 Februari 2025 21 Maret 2025 21 April 2025 22 Mei 2025 27 Mei 2025 19 Juni 2025 18 Juli 2025 19 Agustus 2025 19 September 2025 23 Oktober 2025 26 November 2025 18 Desember 2025 Meeting Implementation: - January 24, 2025 - February 24, 2025 - March 21, 2025 - April 21, 2025 - May 22, 2025 - May 27, 2025 - June 19, 2025 - July 18, 2025 - August 19, 2025 - September 19, 2025 - October 23, 2025 - November 26, 2025 - December 18, 2025

No	Kinerja Performance	Frekuensi Frequency		Keterangan Remark
		Rencana Planned	Realisasi Realized	
2	Mengikuti Rapat Internal Dewan Komisaris Attended Internal Meetings of the Board of Commissioners	12 kali times 12 Times	12 kali times 12 Times	Pelaksanaan Rapat: 1. 24 Januari 2025 2. 24 Februari 2025 3. 25 Maret 2025 4. 28 April 2025 5. 27 Mei 2025 6. 25 Juni 2025 7. 28 Juli 2025 8. 25 Agustus 2025 9. 29 September 2025 10. 23 Oktober 2025 11. 26 November 2025 12. 18 Desember 2025 Meeting Implementation: 1. January 24, 2025 2. February 24, 2025 3. March 25, 2025 4. April 28, 2025 5. May 27, 2025 6. June 25, 2025 7. July 28, 2025 8. August 25, 2025 9. September 29, 2025 10. October 23, 2025 11. November 26, 2025 12. December 18, 2025
3	Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Prepared and Submitted Reports on the Implementation of Duties	4 Laporan Reports	4 Laporan Reports	1. Laporan TW I 2025 2. Laporan TW II 2025 3. Laporan TW III 2025 4. Laporan s/d TW IV 2025 1. Q1 2025 Report 2. Q2 2025 Report 3. Q3 2025 Report 4. Report up to Q4 2025
4	Melakukan evaluasi atas usulan Direksi terkait Nominasi dan Remunerasi Conducted Evaluation of the Board of Directors' Proposals Related to Nomination and Remuneration	100%	100%	Telaah atas Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2024 Review of the 2024 Remuneration Proposal for the Board of Directors and the Board of Commissioners
5	Melakukan evaluasi atas usulan Direksi terkait Nominasi dan Remunerasi Conducted Evaluation of the Board of Directors' Proposals Related to Nomination and Remuneration	100%	100%	Telaah atas Usulan Jasop Karyawan Tahun 2024 Review of the 2024 Employee Performance Incentive (Jasop) Proposal
6	Melakukan Self Assessment Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi Conducted Self-Assessment of the Nomination and Remuneration Committee's Performance	1 kali time	1 kali time	Pelaksanaan Desember 2025 Implemented in December 2025

PENILAIAN KINERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI OLEH DEWAN KOMISARIS

Penilaian atas kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dasar penilaian yang digunakan adalah rencana kerja, terutama berkenaan dengan pembentukan talent management yang

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE BY THE BOARD OF COMMISSIONERS

The performance assessment of the Nomination and Remuneration Committee is conducted by the Board of Commissioners. The assessment is based on the Committee's work plan, particularly with regard to the

oleh Dewan Komisaris dinilai sangat strategis, karena dapat menjaga kelangsungan pengelolaan PUSRI di masa datang. Strategi tersebut merupakan upaya mempersiapkan talenta dalam proses regenerasi pimpinan di berbagai level Atas dasar pertimbangan tersebut, Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2025 masuk kategori "Sangat Baik".

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Mengacu pada peraturan Menteri BUMN No.PER-3/MBU/03/2023 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, PUSRI menerapkan kebijakan suksesi Direksi sebagai langkah mempersiapkan dan melanjutkan regenerasi kepemimpinan di masa depan. Hal ini juga sebagai upaya mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

PUSRI juga memiliki program *Talent Management System* yang bertujuan untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin untuk menempati posisi-posisi kunci di Perusahaan, meningkatkan motivasi karyawan untuk berkompetisi secara sehat, mengembangkan karyawan tepat pada sasaran dan sesuai kebutuhan Perusahaan serta mempertahankan dan memberdayakan talent terbaik. Program *Talent Management System* mempersiapkan Pejabat Eselon I sebagai kandidat Direksi sebagaimana tergambar dalam struktur Program Talent Management System di bawah ini:

establishment of talent management, which the Board of Commissioners considers highly strategic as it ensures the sustainability of PUSRI's management in the future. This strategy is aimed at preparing talent within the leadership regeneration process at various levels. Based on these considerations, the Board of Commissioners assessed the performance of the Nomination and Remuneration Committee in 2025 as falling into the "Very Good" category.

BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY

Referring to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises, PUSRI implements a Board of Directors succession policy as a measure to prepare and continue leadership regeneration in the future. This policy also supports the realization of a transparent, accountable, and responsible process and mechanism for the selection and replacement of members of the Board of Directors.

PUSRI also has a Talent Management System program aimed at preparing future leaders to occupy key positions within the Company, increasing employee motivation to compete in a healthy manner, developing employees in a targeted and needs-based approach aligned with the Company's requirements, and retaining as well as empowering top talent. The Talent Management System program prepares Echelon I Officials as candidates for the Board of Directors, as illustrated in the Talent Management System structure below.



Adapun langkah-langkah *talent management* yang dilakukan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut

1. Perusahaan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan talent pada unit kerja/proyek atau jabatan tertentu berdasarkan:

The talent management steps implemented by the Company are as follows:

1. The Company identifies talent needs within specific work units/projects or positions based on:

- a. Strategi Perusahaan jangka pendek dan jangka panjang.
 - b. Perencanaan Perusahaan dan struktur organisasi.
 - c. Posisi kunci di unit kerja (struktural dan fungsional).
 - d. *Job Family*.
 - e. Usia karyawan.
 2. *Talent Acquisition* merupakan proses rekrutmen dan seleksi karyawan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan karyawan sesuai dengan struktur organisasi dan perencanaan kebutuhan untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Seleksi ini dilakukan dengan cara memetakan penilaian terhadap Kinerja dan *Core Values* dengan Kompetensi dan *Learning Agilities*. Dari seleksi yang dilakukan akan terpilih *Talent Shortlist* dan *Talent Longlist* yang selanjutnya akan mengikuti program pengembangan Talent yang telah ditetapkan oleh perusahaan
 3. Talent Development, dengan cara:
 - a. Penugasan, yaitu program pengembangan yang bertujuan memperkaya pengalaman dan wawasan talent (*enrichment jobs*) dengan menugaskan/ menempatkan talent pada jabatan-jabatan khusus, proyek, tim, penugasan antar anak Perusahaan PIHC, dan penugasan lainnya
 - b. Program pengembangan pengetahuan keterampilan dan wawasan berupa: tugas belajar, bantuan beasiswa, dan/atau program pelatihan khusus talent.
 - c. *Fast-track career-path*, yaitu suatu jalur karier cepat yang disediakan khusus untuk para talen
 4. *Talent Mobility* yang merupakan pergerakan karyawan dari satu *Job Family/Fungsi* ke *Job Family/Fungsi* lainnya dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan
 5. *Talent Retention* merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendorong karyawan agar berkinerja secara maksimal dan memiliki *engagement* yang tinggi serta dapat menurunkan *turn over* karyawan. Talent *retention* diberikan kepada para talent guna meningkatkan motivasi dan loyalitas terhadap Perusahaan yang berupa serangkaian rencana pengembangan.
- a. The Company's short-term and long-term strategies.
 - b. Corporate planning and organizational structure.
 - c. Key positions within work units (structural and functional).
 - d. *Job Family*.
 - e. Employee age.
2. Talent Acquisition is the recruitment and selection process undertaken to fulfill workforce needs in accordance with the organizational structure and manpower planning to support the achievement of corporate objectives. The selection process is carried out by mapping performance and Core Values assessments against competencies and learning agility. From this process, a Talent Shortlist and Talent Longlist are established, whose members will subsequently participate in the Company's designated talent development programs.
 3. Talent Development is conducted through:
 - a. Assignments, namely development programs aimed at enriching the experience and insight of talents (job enrichment) by assigning or placing them in special positions, projects, teams, inter-subsidiary assignments within PIHC, and other assignments.
 - b. Knowledge, skills, and insight development programs in the form of study assignments, scholarship assistance, and/or special training programs for talents.
 - c. A fast-track career path, which is a special accelerated career path provided specifically for talents.
 4. Talent Mobility, which refers to employee movement from one Job Family/Function to another, is carried out in accordance with established guidelines.
 5. Talent Retention is a process undertaken by the Company to encourage employees to perform optimally, foster high engagement, and reduce employee turnover. Talent retention is provided to talents in order to enhance motivation and loyalty to the Company through a series of development plans.

Sementara itu proses seleksi calon Direksi dibagi ke dalam empat tahap yakni pembentukan tim evaluasi, proses penjurian, proses penilaian, dan proses penetapan. Tahapan-tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Meanwhile, the selection process for prospective members of the Board of Directors is divided into four stages: the formation of an evaluation team, the screening process, the assessment process, and the determination process. These stages are explained as follows:

Pembentukan Tim Evaluasi

1. Tim Evaluasi menunjuk tenaga ahli atau lembaga profesional untuk melakukan penilaian, jika diperlukan.
2. Tim Evaluasi melakukan penjangkaran dan penilaian terhadap Calon Direksi.
3. Tim Evaluasi menetapkan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) guna mendapatkan penetapan.
4. Tim Evaluasi menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) guna disampaikan oleh Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) kepada Dewan Komisaris dan/atau Menteri Negara BUMN, jika diperlukan.

Proses Penjangkaran

1. Tim Evaluasi menerima usulan dan mencari informasi bakal calon Direksi dari berbagai sumber.
2. Tim Evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan (CV, dokumen lain, dan informasi yang diterima) untuk menyusun daftar bakal calon (long list) sebanyak minimal 5 (lima) orang calon untuk masing-masing jabatan anggota Direksi.
3. Tim Evaluasi menyerahkan daftar bakal calon (long list) kepada Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk memperoleh persetujuan.

Proses Penilaian

1. Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap CV dan wawancara bakal calon Direksi yang namanya tercantum dalam daftar bakal calon (long list) yang telah disetujui oleh Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai calon Direksi.
2. Tim Evaluasi melakukan menyampaikan daftar calon (short list) kepada Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk menetapkan calon Direksi terpilih.

Proses Penetapan

1. Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan evaluasi akhir atas hasil Penilaian untuk menetapkan 1 (satu) calon Direksi terpilih untuk jabatan anggota Direksi.
2. Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) mengajukan calon Direksi untuk ditetapkan dalam RUPS anak Perusahaan menjadi anggota Direksi.

Keputusan Pemegang Saham baik di dalam RUPS maupun di luar RUPS menetapkan calon Direksi terpilih sebagai anggota Direksi Perusahaan.

Formation of the Evaluation Team

1. The Evaluation Team appoints experts or professional institutions to conduct assessments, if necessary.
2. The Evaluation Team conducts screening and assessment of prospective Directors.
3. The Evaluation Team determines the final evaluation results to be submitted to the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) for approval.
4. The Evaluation Team prepares the final evaluation results that have been approved by the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) to be conveyed to the Board of Commissioners and/or the Minister of State-Owned Enterprises, if necessary.

Screening Process

1. The Evaluation Team receives nominations and gathers information on prospective Directors from various sources.
2. The Evaluation Team conducts selection based on established criteria and administrative requirements (CVs, other documents, and received information) to compile a long list of at least 5 (five) candidates for each position of Director.
3. The Evaluation Team submits the long list to the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) for approval.

Assessment Process

1. The Evaluation Team evaluates the CVs and conducts interviews of prospective Directors listed in the approved long list to obtain the best candidates to be proposed to the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero).
2. The Evaluation Team submits a short list of candidates to the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) for the determination of the selected Director.

Determination Process

1. The Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) conducts a final evaluation of the assessment results to determine 1 (one) selected candidate for the position of Director.
2. The Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) proposes the selected candidate to be appointed at the Subsidiary's General Meeting of Shareholders (GMS) as a member of the Board of Directors.

The Shareholders' Resolution, whether adopted at a GMS or outside a GMS, formally appoints the selected candidate as a member of the Company's Board of Directors.

KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Komite Investasi & Manajemen Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam mengkaji efektivitas penerapan manajemen risiko, serta memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan kepada Dewan Komisaris terkait investasi dan manajemen risiko

The Investment & Risk Management Committee is a committee established by and accountable to the Board of Commissioners to support the execution of its duties and functions in reviewing the effectiveness of risk management implementation, as well as providing recommendations for improvements to the Board of Commissioners regarding investment and risk management.

Komite Investasi dan Manajemen Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-12/DEKOM/ PUSRI/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pembentukan Komite Investasi dan Manajemen Risiko PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

The Investment and Risk Management Committee was established by the Board of Commissioners based on Board of Commissioners Decree No. KEP-12/DEKOM/ PUSRI/II/2012 dated February 28, 2012 concerning the Establishment of the Investment and Risk Management Committee of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Investasi dan Manajemen Risiko berpedoman dan berlandaskan kepada beberapa peraturan, meliputi:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara,
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor KEP-06/DEKOM/PUSRI/VIII/2025 dan Nomor: SK/ DIR/240/2025 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris & Direksi (*Board Manual*).

LEGAL BASIS

The establishment of the Investment and Risk Management Committee refers to and is based on the following regulations:

1. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
2. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
3. Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. KEP-06/DEKOM/PUSRI/VIII/2025 and No. SK/ DIR/240/2025 concerning the Work Guidelines of the Board of Commissioners and the Board of Directors (*Board Manual*).

PIAGAM KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Komite Investasi dan Manajemen Risiko PUSRI memiliki pedoman kerja berupa Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko terbaru yang telah disahkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-4/DEKOM/ PUSRI/ XII/2023. Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko mencakup tentang petunjuk dan pedoman kerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten. Dengan demikian, diharapkan dokumen tersebut dapat menjadi acuan bagi Komite Investasi dan Manajemen Risiko dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan sehingga akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

CHARTER OF THE INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

PUSRI's Investment and Risk Management Committee operates under the latest Investment and Risk Management Committee Charter, ratified through Board of Commissioners Decree No. KEP-4/DEKOM/PUSRI/ XII/2023. The Charter contains guidelines and working procedures for the Committee and describes activity stages in a structured, systematic, clear, and consistently implementable manner. The document serves as a reference for the Committee in carrying out its duties to achieve the Company's Vision and Mission and to ensure high performance standards aligned with Good Corporate Governance (GCG) principles.

PUSRI menyusun Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan

The Charter was prepared based on corporate law principles, the Articles of Association, prevailing laws and regulations, Shareholder directives, and best practices of

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (Good Corporate Governance). Isi dari Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang mengatur pelaksanaan tugas Komite Investasi dan Manajemen Risiko mencakup:

- Tugas, Wewenang, dan Kode Etik
- Rapat Komite
- Tanggung jawab Pelaporan
- Keanggotaan Komite Investasi dan Manajemen Risiko
- Kualifikasi Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko
- Jangka Waktu Masa Jabatan

Good Corporate Governance. The Charter governing the implementation of the Committee's duties includes:

- Duties, Authorities, and Code of Ethics
- Committee Meetings
- Reporting Responsibilities
- Membership of the Investment and Risk Management Committee
- Qualifications of Committee Members
- Term of Office

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Mengacu pada Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko, berikut adalah tugas dan tanggung jawab yang mencakup:

1. Melakukan analisis dan evaluasi rencana investasi dan pengembangan, risiko usaha, dan asuransi Perusahaan.
2. Memberikan kajian secara periodik pelaksanaan kegiatan investasi yang telah dilaksanakan Perusahaan yang meliputi kepatuhan terhadap kebijakan investasi yang telah digariskan dan petunjuk pelaksanaannya termasuk tingkat risiko dari setiap investasi dan mitigasinya
3. Mengevaluasi secara periodik mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan investasi Perusahaan.
4. Menelaah efektivitas pedoman investasi yang telah ditetapkan bagi kegiatan investasi Perusahaan.
5. Monitoring dan memberikan masukan atas penetapan, pembaharuan, penyempurnaan kebijakan manajemen risiko di Perusahaan.
6. Melakukan monitoring atas identifikasi potensi seluruh risiko sehubungan dengan kegiatan Perusahaan dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala
7. Melakukan reviu dan memberikan rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Unit Kerja Manajemen Risiko.
8. Melakukan pengawasan atas kegiatan Unit Kerja Manajemen Risiko dalam memantau pelaksanaan mitigasi risiko.
9. Melakukan pengawasan atas rekomendasi Komite Investasi dan Manajemen Risiko oleh Unit Kerja Manajemen Risiko.
10. Melakukan analisis dan evaluasi atas usulan RKAP dan RJPP termasuk usulan rencana investasi.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Referring to the Charter, the duties and responsibilities include:

1. Conduct analysis and evaluation of investment and development plans, business risks, and Company insurance.
2. Provide periodic reviews of implemented investment activities, including compliance with established investment policies and implementation guidelines, as well as the risk level of each investment.
3. Periodically evaluate the financing and returns of Company investments.
4. Review the effectiveness of established investment guidelines.
5. Monitor and provide input on the establishment, updates, and refinement of the Company's risk management policies.
6. Monitor the identification of all potential risks related to the Company's activities and periodically evaluate the implementation of risk management.
7. Review and provide recommendations on the effectiveness of risk management implementation by the Risk Management Work Unit.
8. Supervise the activities of the Risk Management Work Unit in monitoring risk mitigation implementation.
9. Oversee the follow-up of the Committee's recommendations by the Risk Management Work Unit.
10. Conduct analysis and evaluation of proposed RKAP (Annual Work Plan and Budget) and RJPP (Long-Term Corporate Plan), including proposed investment plans.

11. Melakukan penelaahan atas informasi risiko dan manajemen risiko Perusahaan dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan melalui diskusi bersama dengan manajemen. 12. Melakukan pembahasan atas risiko-risiko penting di lingkungan Perusahaan dalam lingkup kewenangan pengawasan Dewan Komisaris. 13. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. 14. Melakukan telaah atas aksi korporasi yang diusulkan oleh Direksi. 15. Melakukan Tugas Peninjauan aset - aset Pusri di lapangan dan monitoring penyerapan Pupuk PSO oleh Petani. 16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.	11. Review risk and risk management information in reports to be published through discussions with management. 12. Discuss significant risks within the Company under the supervisory authority of the Board of Commissioners. 13. Identify matters requiring the attention of the Board of Commissioners. 14. Review corporate actions proposed by the Board of Directors. 15. Conduct field asset review tasks of PUSRI's assets and monitor the absorption of PSO fertilizer by farmers. 16. Perform other duties assigned by the Board of Commissioners.

WEWENANG KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Investasi dan Manajemen Risiko juga memiliki wewenang meliputi:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan karyawan, sumber daya dan dana serta aset Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Komite Investasi dan Manajemen Risiko dapat menggunakan:
 - a. Laporan atau catatan yang dibuat oleh Unit Kerja Manajemen Risiko, akuntan publik, konsultan/kontraktor proyek.
 - b. Kontrak/surat perjanjian/MoU/notulen/risalah rapat Direksi dan Pemegang Saham.
 - c. Brosur/proyek/forecast keuangan dan ekonomi.
 - d. Laporan keuangan berkala Perusahaan.
 - e. Dokumen korespondensi Direksi dan Pemegang Saham.
 - f. Informasi relevan lainnya termasuk informasi dari pihak ketiga.
3. Dalam setiap penugasan yang berhubungan dengan permintaan data dan informasi ke unit kerja selain Unit Kerja Manajemen Risiko, Komite Investasi dan Manajemen Risiko diberikan surat tugas yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris.

KEANGGOTAAN KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Komite Investasi dan Manajemen Risiko terdiri dari tiga orang. Satu orang Komisaris sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko, serta dua orang anggota Komite.

AUTHORITY OF THE INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

In carrying out its duties, the Committee has the authority to:

1. Obtain full, free, and unrestricted access to employee records, resources, funds, and other Company assets relevant to the execution of its duties.
2. In carrying out its duties, the Investment and Risk Management Committee may utilize:
 - a. Reports or records prepared by the Risk Management Work Unit, public accountants, consultants, or project contractors.
 - b. Contracts, agreements, MoUs, minutes, or records of meetings of the Board of Directors and Shareholders.
 - c. Project brochures and financial and economic forecasts.
 - d. Periodic financial reports of the Company.
 - e. Correspondence documents of the Board of Directors and Shareholders.
 - f. Other relevant information, including information from third parties.
3. In assignments involving requests for data and information from work units other than the Risk Management Work Unit, receive a formal assignment letter signed by all members of the Board of Commissioners.

MEMBERSHIP OF THE INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Investment and Risk Management Committee consists of three members. One Commissioner serves concurrently as Chair of the Committee, and two individuals serve as Committee Members.

Susunan Keanggotaan Komite Manajemen

Ketua:

Bambang Supriyambodo

Anggota:

1. Ida Zuraida
2. Sara Dewi

Composition of the Investment and Risk Management Committee

Chair:

Bambang Supriyambodo

Members:

1. Ida Zuraida
2. Sara Dewi



BAMBANG SUPRIYAMBODO

Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Chair of the Investment and Risk Management Committee

Periode Jabatan Term of Office

14 Juni 2021 – 14 April 2026
June 14, 2021 – April 14, 2026

Profil beliau dapat dilihat pada Bab Profile Perusahaan His profile can be found in the Company Profile chapter.

Riwayat Penunjukan Appointment History

Diangkat sebagai Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP- 04/ DEKOM/PUSRI/ VI/2021 tanggal 14 Juni 2021.
Appointed as Chair of the Investment and Risk Management Committee of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on Board of Commissioners Decree No. KEP-04/DEKOM/ PUSRI/VI/2021 dated June 14, 2021.



IDA ZURAIDA

Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko
 Member of the Investment and Risk Management Committee

Periode Jabatan Term of Office	8 Oktober 2021 – sampai dengan periode berakhir masa jabatan (3 tahun) dan diperpanjang kembali 7 Oktober 2024 – sampai dengan periode berakhir masa jabatan (2 tahun) October 8, 2021 – until the end of the term of office (3 years), and subsequently extended on October 7, 2024 – until the end of the term of office (2 years).
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia Age	68 Tahun Years
Tempat & tanggal Kelahiran Place & Date of Birth	Jakarta 11 Desember 1957 Jakarta, December 11, 1957
Riwayat Penunjukan Appointment History	Diangkat kembali sebagai anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-12/DEKOM/PUSRI/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 dan diangkat kembali berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-10/DEKOM/PUSRI/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024. Reappointed as a Member of the Investment and Risk Management Committee of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on Board of Commissioners Decree No. KEP-12/DEKOM/PUSRI/X/2021 dated October 8, 2021 and reappointed based on the Board of Commissioners' Decree No. KEP-10/DEKOM/PUSRI/X/2024 dated October 7, 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. S1 Ekonomi Akuntansi dari Universitas YAI Jakarta 2. S2 Manajemen SDM Sekolah Tinggi IPWI Jakarta, dan 3. Pendidikan informal lainnya di USA, Hongkong, Singapore, Jepang dll. 1. Bachelor's Degree (S1) in Accounting, Faculty of Economics, Universitas YAI Jakarta 2. Master's Degree (S2) in Human Resource Management, Sekolah Tinggi IPWI Jakarta 3. Other non-formal education programs in the USA, Hong Kong, Singapore, Japan, and others
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan Does not hold any concurrent positions.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Dewan Komisaris atau Direksi Has no affiliation with the Main Shareholder, the Board of Commissioners, or the Board of Directors.
Pengalaman Kerja Work Experience	1. Wakil Ketua Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah (UP3) Departemen Keuangan dan Kepala Divisi Bank Liabilities BPPN 2. Kepala Divisi Bank Liabilities BPPN 3. Staff Ahli Ketua BPPN 4. Kepala Divisi Pengawasan dan Administrasi BPPN. 5. Waka Div Teknologi dan Informasi BAPINDO 6. KaTim Online System BNI 46 7. Staf Ahli Puskaji DPD-RI 8. Dosen STIE Indonesia Banking School LPPI (Akuntansi) 9. Dosen STIE Universitas Dharma Persada (Akt) 10. Komisaris Utama PT E-Depro 11. Ka Keuangan, Ka Penjualan, Ka Penjualan di beberapa swasta 12. Instruktur Keuangan dan Perbankan. 1. Vice Chair of the Government Guarantee Implementation Unit (UP3), Ministry of Finance, and Head of Bank Liabilities Division, BPPN 2. Head of Bank Liabilities Division, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 3. Expert Staff to the Chairman, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 4. Head of Supervision and Administration Division, BPPN 5. Deputy Head of Technology and Information Division, BAPINDO 6. Head of Online System Team, BNI 46 7. Expert Staff, Research Center (Puskaji) of DPD-RI 8. Lecturer, STIE Indonesia Banking School LPPI (Accounting) 9. Lecturer, STIE Universitas Dharma Persada (Accounting) 10. President Commissioner, PT E-Depro 11. Head of Finance and Head of Sales in several private companies 12. Finance and Banking Instructor



SARA DEWI

Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Member of the Investment and Risk Management Committee

Periode Jabatan Term of Office	3 Juli 2023 – sampai dengan periode berakhir masa jabatan (3 tahun). July 3, 2023 – until the end of the term of office (3 years)
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia Age	53 Tahun Years
Tempat & tanggal Kelahiran Place & Date of Birth	Jakarta 25 Mei 1973 Jakarta, May 25, 1973
Riwayat Penunjukan Appointment History	Diangkat sebagai anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP- 01/ DEKOM/PUSRI/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023. Appointed as a Member of the Investment and Risk Management Committee of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on Board of Commissioners Decree No. KEP-01/DEKOM/PUSRI/VII/2023 dated July 3, 2023.
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. S2 Finance Universitas Gadjah Mada (2017) 2. S1 Akuntansi Universitas Indonesia (1998) 1. Master's Degree (S2) in Finance, Universitas Gadjah Mada (2017) 2. Bachelor's Degree (S1) in Accounting, Universitas Indonesia (1998)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	SVP Portofolio PT Pupuk Indonesia (Persero) Senior Vice President of Portfolio, PT Pupuk Indonesia (Persero)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada PT Pupuk Indonesia (Persero). Rangkap jabatan ini merupakan bagian dari representasi manajerial dalam Pupuk Indonesia Grup. Selain itu, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi. Has an affiliation with the Main/Controlling Shareholder through her position at PT Pupuk Indonesia (Persero). This concurrent position represents managerial representation within the Pupuk Indonesia Group. Other than that, she has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.
Pengalaman Kerja Work Experience	1. SVP Tata Kelola & Kepatuhan PT Pupuk Indonesia (2025 – saat ini) 2. SVP Portofolio PT Pupuk Indonesia (2023 - 2025i) 3. SVP Kinerja Korporat PT Pupuk Indonesia (2021– 2023) 4. VP Akuntansi Manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero) (2016–2021) 5. Manager Akuntansi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang d/h PT Pupuk Indonesia (Persero) (2011–2016) 1. SVP Governance & Compliance, PT Pupuk Indonesia (2025 – present) 2. SVP Portfolio, PT Pupuk Indonesia (2023 – 2025) 3. SVP Corporate Performance, PT Pupuk Indonesia (2021 – 2023) 4. VP Management Accounting, PT Pupuk Indonesia (2016 – 2021) 5. Accounting Manager, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (formerly part of PT Pupuk Indonesia (Persero)) (2011 – 2016)

INDEPENDENSI KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Sebagai upaya untuk memastikan independensi setiap anggota Komite, setiap tahunnya masing- masing anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris memberikan pernyataan independensi.

INDEPENDENCE OF THE INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

As part of efforts to ensure the independence of each Committee member, every year each member of the Board of Commissioners' Supporting Committees submits a statement of independence.

Independensi Komite Audit Audit Committee Independence			
Pernyataan Independensi Statement of Independence	Bambang Supriyambodo	Sara Dewi	Ida Zuraida
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada PUSRI dalam waktu enam bulan terakhir. Not affiliated with a Public Accounting Firm, Law Firm, Public Appraisal Service Office, or any other party providing assurance services, non-assurance services, appraisal services, and/or other consulting services to PUSRI within the past six months.			
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PUSRI dalam waktu enam bulan terakhir (kecuali Komisaris Independen). Not a person who has worked for or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise PUSRI's activities within the past six months (except for an Independent Commissioner).			
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PUSRI. Does not hold shares in PUSRI, either directly or indirectly.			
Keluarga tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PUSRI. Has no family members holding shares in PUSRI, either directly or indirectly.			
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama PUSRI. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Main Shareholder of PUSRI.			
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PUSRI. Has no business relationship, either directly or indirectly, related to PUSRI's business activities.			
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah. Does not serve as an official of a political party and/or as a legislative candidate/member and/or as a candidate or holder of a regional head/deputy regional head position.			
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan di PUSRI. Does not hold any other position that may give rise to a conflict of interest related to the position at PUSRI.			

RANGKAP JABATAN ANGGOTA KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

CONCURRENT POSITIONS OF MEMBERS OF THE INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

No	Nama Name	Rangkap Jabatan Concurrent Position
1	Sara Dewi	Memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada PT Pupuk Indonesia (Persero). Rangkap jabatan ini merupakan bagian dari representasi manajerial dalam Pupuk Indonesia Grup. Selain itu, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi. Has an affiliation with the Main/Controlling Shareholder through her position at PT Pupuk Indonesia (Persero). This concurrent position represents managerial representation within the Pupuk Indonesia Group. Other than that, she has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.
2	Ida Zuraida	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or with the Main and Controlling Shareholder.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

PUSRI senantiasa mendorong peningkatan kompetensi Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Pendidikan dan Pelatihan Komite Investasi dan Manajemen Risiko pada tahun buku disampaikan dalam bab “Profil Perusahaan”.

COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

PUSRI continuously promotes the enhancement of the competencies of the Investment and Risk Management Committee through various education and training programs, fully funded by the Company. The education and training activities of the Investment and Risk Management Committee for the financial year are presented in the “Company Profile” chapter.

RAPAT KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan Rapat, Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

Komite Investasi dan Manajemen Risiko menyelenggarakan rapat satu kali dalam setiap bulan atau bilamana diperlukan. Komite Investasi dan Manajemen Risiko dapat mengundang Dewan Komisaris untuk turut serta hadir dalam rapat yang diselenggarakan Komite. Selama tahun 2025, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melaksanakan Rapat sebagai berikut:

1. 12 kali Rapat Internal KIMR
2. 12 kali Rapat dengan Internal Dekom

MEETINGS OF THE INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Meeting Policy, Frequency, and Attendance Rate

The Investment and Risk Management Committee holds meetings once every month or whenever necessary. The Committee may invite the Board of Commissioners to attend meetings organized by the Committee. During 2025, the Investment and Risk Management Committee conducted meetings consisting of:

1. 12 Internal KIMR Meetings
2. 12 Meetings with the Internal Board of Commissioners (Dekom)

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Total Required Meetings	Jumlah Kehadiran Total Total Attendance	Kehadiran (%) Attendance
Bambang Supriyambodo	Komisaris/ Ketua Komite Commissioner / Committee Chair	12	12	100
Sara Dewi	Anggota Komite Committee Member	12	10	90
Ida Zuraida	Anggota Komite Committee Member	12	12	100

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2025

Selama tahun 2025, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Charter Komite Investasi dan Manajemen Risiko serta Program Kerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko 2025. Dalam pelaksanaannya, Komite Investasi dan Manajemen Risiko melakukan Pengawasan/Monitoring pelaksanaan analisis risiko terutama untuk bisnis Perusahaan yang utama sebagai penyangga *cash flow* Perusahaan, serta bisnis dalam Perusahaan yang berpotensi mendatangkan kerugian melalui berbagai upaya mitigasi risiko yang dilakukan bersama-sama dengan Unit Kerja Manajemen Risiko dan seluruh Unit Kerja terkait di PUSRI.

Adapun realisasi pelaksanaan tugas Komite Investasi dan Manajemen Risiko di tahun 2025 di antaranya:

HASIL SELF ASSESSMENT KOMITE INVESTASI & MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2025

Sepanjang 2025, Komite Investasi & Manajemen Risiko telah menjalankan fungsi Komite antara lain:

IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE IN 2025

During 2025, the Investment and Risk Management Committee carried out its duties and responsibilities in accordance with the Investment and Risk Management Committee Charter and the 2025 Work Program of the Investment and Risk Management Committee. In its implementation, the Committee conducted supervision and monitoring of risk analysis execution, particularly for the Company's core businesses that serve as the backbone of the Company's cash flow, as well as business areas with potential loss exposure. These efforts were undertaken through various risk mitigation measures in collaboration with the Risk Management Work Unit and all related work units within PUSRI.

The realization of the Committee's duties in 2025 includes, among others:

RESULTS OF THE 2025 SELF-ASSESSMENT OF THE INVESTMENT & RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Throughout 2025, the Investment & Risk Management Committee carried out its functions, including:

No	Kinerja Performance	Frekuensi Frequency	Rencana Plan	Realisasi Realization	Keterangan Remarks
1	Pengadaan rapat internal KIMR dan Unit Kerja terkait Investasi dan Manajemen Risiko Conducting internal KIMR meetings and meetings with Work Units related to Investment and Risk Management	Bulanan Monthly	12 kali times	100%	Pelaksanaan Rapat 13 Januari 2025 20 Februari 2025 13 Maret 2025 24 April 2025 22 Mei 2025 23 Juni 2025 24 Juli 2025 13 Agustus 2025 22 September 2025 22 Oktober 2025 21 November 2025 16 Desember 2025 January 13, 2025 February 20, 2025 March 13, 2025 April 24, 2025 May 22, 2025 June 23, 2025 July 24, 2025 August 13, 2025 September 22, 2025 October 22, 2025 November 21, 2025 December 16, 2025

No	Kinerja Performance	Frekuensi Frequency	Rencana Plan	Realisasi Realization	Keterangan Remarks
2	Menghadiri rapat Internal Dekom dengan semua Komite. Attending Internal Board of Commissioners (Dekom) meetings with the Committee	Bulanan Monthly	12 kali times	100%	24 Januari 2025 24 Februari 2025 21 Maret 2025 28 April 2025 27 Mei 2025 24 Juni 2025 25 Juni 2025 28 Juli 2025 25 Agustus 2025 29 September 2025 23 Oktober 2025 26 November 2025 18 Desember 2025 January 24, 2025 February 24, 2025 March 21, 2025 April 28, 2025 May 27, 2025 June 24, 2025 June 25, 2025 July 28, 2025 August 25, 2025 September 29, 2025 October 23, 2025 November 26, 2025 December 18, 2025
3	Pembuatan Laporan Progress Investasi dan Pelaksanaan Manajemen Risiko PUSRI Preparation of Investment Progress Reports and Implementation of PUSRI Risk Management	Bulanan/ Triwulan/ Semester Monthly / Quarterly / Semester	12 kali times	100%	Laporan Bulanan Januari sd Desember 2025 Monthly, Quarterly, Semester, and Annual reports
4	Pemantauan pelaksanaan RJPP dan RKAP 2025 melalui rapat bulanan Komite bersama manajemen serta identifikasi adanya permasalahan Monitoring implementation of RJPP and RKAP 2024 through monthly Committee meetings with management and identifying issues	Bulanan Monthly	12 kali times	100%	Dalam rapat tiap bulanan Conducted during monthly meetings
5	Mendorong realisasi atas implementasi Proyek Investasi sesuai dengan rencana awal Encouraging realization of Investment Project implementation in accordance with initial plans	Bulanan Monthly	12 kali times	100%	Dalam rapat tiap bulanan selama ada proyek dan dalam rapat khusus Proyek Pusri PIIIB Conducted in monthly meetings while projects are ongoing
6	Monitoring atas pelaksanaan investasi yang direncanakan dalam tahun 2025 Monitoring planned investment implementation in 2025	Insidentil	Jika ada	100%	Dalam rapat tiap bulanan selama ada proyek Conducted in monthly meetings while projects are ongoing



No	Kinerja Performance	Frekuensi Frequency	Rencana Plan	Realisasi Realization	Keterangan Remarks
7	Identifikasi risiko Perusahaan pada bagian yang signifikan seperti kebijakan dan harga gas bumi, kebijakan distribusi PSO, aspek produksi, pemasaran, dan SDM. Identification of significant Company risks such as natural gas policy and pricing, PSO distribution policy, production aspects, marketing, and Dapensri HR aspects	Insidental Incidental	Jika ada	100%	Monitoring kelangkaan gas sejak triwulan akhir sd akhir tahun 2025 Monitoring ke lapangan terkait adanya isu kelangkaan pupuk Kunjungan ke UPP dan diskusi dengan distributor dll Monitoring gas scarcity from the last quarter through the end of 2024 Field monitoring related to fertilizer scarcity issues Visits to UPP and discussions with distributors
8	Monitoring tingkat pencapaian nilai GCG Perusahaan dengan terus meningkatkan penyempurnaan proses dan pelaporan sebagaimana diperlukan. Monitoring the achievement level of the Company's GCG score by continuously improving processes and reporting as necessary	Tahunan Annual	1 x dalam setahun time	100%	Evaluasi setahun sekali, namun persiapan dilakukan secara insidental setiap kali diperlukan dalam tahun berjalan. Pelaksanaan dilaksanakan pada saat rapat bulanan. Annual evaluation; preparation conducted incidentally as needed throughout the year; implementation carried out during monthly meetings
9	Melakukan Self Assessment Kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko tiap akhir tahun Conducting Self-Assessment of the Investment and Risk Management Committee's Performance each semester	Akhir Tahun Year-end	1 kali time	100%	Pelaksanaan Desember 2025 Implemented at year-end
11	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Komite Investasi dan Manajemen Risiko. Preparing the Annual Work Plan of the Investment and Risk Management Committee	Tahunan Annual	1 kali time	100%	Dilakukan bulan Agustus Sept Conducted in August and September
12	Pelaksanaan Tugas lainnya dari Komisaris. Carrying out other assignments from the Board of Commissioners	Insidental Incidental	Sesuai kebutuhan	100%	Mendampingi Dekom dalam kunjungan lapangan Peninjauan Aset Pusri, pertemuan dengan Distributor, pengecer dan petani, dll Accompanying the Board of Commissioners in field visits for review of PUSRI assets, meetings with distributors, retailers, and farmers Visits to Central Java, Yogyakarta Special Region (DIY), Palembang, Bangka, Makassar, and Bali & Lombok
13	Melaksanakan Training atas suatu topik terkait kebutuhan tugas. Conducting training on topics relevant to task requirements	Insidental Incidental	1 Kali time	100%	Seminar Online terkait Manajemen Risiko Online seminar related to Risk Management

CAPAIAN KPI KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO

Penilaian Kinerja Komite Investasi & Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dasar penilaian yang digunakan adalah rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun buku. Rencana kerja tersebut ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar evaluasi atas kinerja Komite. Atas dasar pertimbangan tersebut, Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Investasi & Manajemen Risiko pada tahun 2025 masuk kategori Sangat Baik. Selain penilaian dari Dewan Komisaris, Komite Investasi & Manajemen Risiko juga melakukan penilaian mandiri (*self assessment*).

KPI ACHIEVEMENT OF THE INVESTMENT & RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The performance evaluation of the Investment & Risk Management Committee is conducted by the Board of Commissioners. The basis for this evaluation is the work plan established at the beginning of the financial year. This work plan is determined by the Board of Commissioners as the benchmark for assessing the Committee's performance. Based on these considerations, the Board of Commissioners assessed the performance of the Investment & Risk Management Committee in 2025 as Very Good. In addition to the evaluation conducted by the Board of Commissioners, the Investment & Risk Management Committee also performs a self-assessment.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris harus membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan dibantu staf Sekretariat Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Sekretariat Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas. Sekretariat Dewan Komisaris juga bertugas sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain. Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners is required to establish a Board of Commissioners Secretariat, led by a Secretary to the Board of Commissioners and supported by Secretariat staff. The Secretary to the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang is appointed and dismissed by the Board of Commissioners in accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The Board of Commissioners Secretariat is tasked with carrying out activities to assist the Board of Commissioners in performing its duties. It also serves as a liaison between the Board of Commissioners and other parties. The Secretariat is led by the Secretary to the Board of Commissioners.

PEDOMAN KERJA DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) yang diuraikan pada bagian berikut.

Tugas dan Tanggung Jawab berdasarkan Board Manual

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;

WORK GUIDELINES AND RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Secretary to the Board of Commissioners has work guidelines set forth in the Board of Directors and Board of Commissioners Guidelines (*Board Manual*) as described below.

Duties and Responsibilities Based on the Board Manual

1. Prepare meetings of the Board of Commissioners, including meeting materials (briefing sheets);
2. Prepare minutes of Board of Commissioners meetings in accordance with the Company's Articles of Association;
3. Administer Board of Commissioners documents, including incoming and outgoing correspondence, meeting minutes, and other documents;
4. Prepare drafts of the Board of Commissioners' Work Plan and Budget;

5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
7. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik

Tugas Lain Sekretaris Dewan Komisaris

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris harus memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di perusahaan yang bersangkutan.

KRITERIA SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretariat Dewan Komisaris harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan BUMN;
2. Memiliki integritas yang baik;
3. Memahami fungsi kesekretariatan;
4. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

MASA JABATAN

Perusahaan telah mengatur masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris yakni 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

PEJABAT SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Pada Tahun 2025 Sdri Neneng Suryatiningsih menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris s.d. 18 Agustus 2025 digantikan oleh Sdri Siti Fauziah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-07/DEKOM/PUSRI/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Berikut profil Sekretaris Dewan Komisaris:

5. Prepare draft reports of the Board of Commissioners;
6. Carry out other duties assigned by the Board of Commissioners;
7. In order to ensure orderly administration and the implementation of good corporate governance, the Board of Commissioners Secretariat must ensure that all documents related to activities are properly maintained and stored.

Specific Responsibilities

1. Ensure that the Board of Commissioners complies with applicable laws and regulations and implements Good Corporate Governance principles.
2. Provide the Board of Commissioners with the necessary information periodically and/or upon request at any time.
3. Coordinate committee members as necessary to facilitate the duties of the Board of Commissioners.
4. Act as liaison officer between the Board of Commissioners and other parties.

To ensure proper administration and effective implementation of good corporate governance, the Secretariat of the Board of Commissioners must ensure that the documentation of activities is properly stored within the respective company.

CRITERIA FOR THE SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Secretariat of the Board of Commissioners is led by an official who must meet the following criteria:

1. Understand the management, supervision, and development system of State-Owned Enterprises;
2. Possess good integrity;
3. Understand secretarial functions;
4. Possess good communication and coordination skills.

TERM OF OFFICE

The Company stipulates that the term of office of the Secretary to the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners for 3 (three) years and may be reappointed for 2 (two) additional years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss the Secretary at any time.

CURRENT SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2025, Ms. Neneng Suryatiningsih served as Secretary to the Board of Commissioners until August 18, 2025, and was succeeded by Ms. Siti Fauziah based on the Board of Commissioners' Decree No. KEP-07/DEKOM/PUSRI/VIII/2025 dated August 19, 2025 concerning the dismissal and appointment of the Secretary to the Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. The profile of the Secretary to the Board of Commissioners is as follows:



SITI FAUZIYAH

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

Periode Jabatan Term of Office	19 Agustus 2025 – saat ini August 19, 2025 – present
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia Age	52 Tahun Years
Tempat & tanggal Kelahiran Place & Date of Birth	Kebumen, 7 September 1973 Kebumen, September 7, 1973
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. S1 Ekonomi Manajemen – Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1997 2. S2 Ekonomi – Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta 2016 1. Bachelor's Degree in Management (Economics) – Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto (1997) 2. Master's Degree in Economics – Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta (2016)
Pengalaman Kerja Work Experience	1. Penata Kelola Perusahaan Negara Madya, BP BUMN (2025–saat ini) 2. Penata Kelola Perusahaan Negara Muda, Kementerian BUMN (2021–2024) 3. Sekretaris Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2025–saat ini) 4. Sekretaris Dewan Komisaris PT Petrokimia Gresik (2021– 2025), 5. Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2018–2021) 6. Sekretaris Dewan Komisaris PT Pegadaian (Persero) (2014–2018) 7. Sekretaris Dewan Pengawas Perum Perhutani (2011–2014) 8. Sekretaris Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (2010–2011) 1. Intermediate State-Owned Enterprise Governance Officer, Ministry of SOEs (2025 – present) 2. Junior State-Owned Enterprise Governance Officer, Ministry of SOEs (2021 – 2024) 3. Secretary to the Board of Commissioners, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2025 – present) 4. Secretary to the Board of Commissioners, PT Petrokimia Gresik (2021 – 2025) 5. Secretary to the Board of Commissioners, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (2018 – 2021) 6. Secretary to the Board of Commissioners, PT Pegadaian (Persero) (2014 – 2018) 7. Secretary to the Supervisory Board, Perum Perhutani (2011 – 2014) 8. Secretary to the Board of Commissioners, PT Surveyor Indonesia (2010 – 2011)

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2025

Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pada Bulan Agustus Tahun 2025 melakukan penggantian Sekretaris Dewan Komisaris dengan mengangkat Sdri Siti Fauziyah menggantikan Sdr. Neneng Suryatiningsih.

Pada Tahun 2025, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan pokok-pokok kegiatan sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris khususnya terhadap rapat internal yang dilaksanakan setiap bulan.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF DUTIES FOR 2025

The Board of Commissioners of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang replaced the Secretary to the Board of Commissioners in August 2025 by appointing Ms. Siti Fauziyah to succeed Ms. Neneng Suryatiningsih.

In 2025, the Board of Commissioners Secretariat carried out its duties with the following main activities:

1. Preparing meetings of the Board of Commissioners, including meeting materials (*briefing sheets*), particularly for monthly internal meetings;

2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan, antara lain:
 - a. Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris s.d. Triwulan IV 2025; dan
 - b. Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi s.d. Triwulan IV 2025.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
4. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2026
5. Menyusun rancangan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris setiap triwulanan s.d. III Triwulan 2025 dan Tahunan (*Audited*):
6. Menyusun rancangan surat tanggapan Dewan Komisaris, antara lain:
 - a. Surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja perusahaan berdasarkan Laporan Manajemen berkala s.d. Desember 2025;
 - b. Surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja perusahaan berdasarkan Laporan Tahunan *Audited* 2024;
 - c. Surat tanggapan Dewan Komisaris atas rancangan kinerja perusahaan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025.
7. Menyusun rancangan surat persetujuan atau rekomendasi atas rencana aksi korporasi Perusahaan, Keputusan Dewan Komisaris dan surat keluar Dewan Komisaris lainnya, antara lain:
8. Mempersiapkan pelaksanaan perjalanan dinas, kunjungan, kegiatan lain yang diikuti oleh Dewan Komisaris, termasuk penyusunan laporan kunjungan kerja s.d. Desember 2025.
9. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
10. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
11. Mengkoordinasikan anggota komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
12. Mengkoordinasikan Staf Dewan Komisaris, Staf Sekretariat Dewan Komisaris dan Staf Administrasi Sekretariat Dewan Komisaris dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
13. Menjalankan fungsi sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
14. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
2. Preparing minutes of Board of Commissioners meetings in accordance with the Company's Articles of Association, including:
 - a. Minutes of internal Board of Commissioners meetings up to Q4 2025; and
 - b. Minutes of joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors up to Q4 2025;
3. Administering Board of Commissioners documents, including incoming and outgoing correspondence, meeting minutes, and other documents;
4. Preparing the draft Work Plan and Budget of the Board of Commissioners for 2026;
5. Preparing draft supervisory reports of the Board of Commissioners on a quarterly basis up to Q3 2025 and annually (*audited*);
6. Preparing draft response letters of the Board of Commissioners, including:
 - a. Responses to the Company's performance based on periodic Management Reports up to December 2025;
 - b. Responses to the Company's performance based on the 2024 audited Annual Report;
 - c. Responses to the Company's performance plan based on the 2025 Work Plan and Budget (RKAP);
7. Preparing draft approval or recommendation letters for the Company's corporate action plans, Board of Commissioners' resolutions, and other outgoing correspondence of the Board of Commissioners;
8. Preparing official travel, visits, and other activities involving the Board of Commissioners, including the preparation of work visit reports up to December 2025;
9. Ensuring that the Board of Commissioners complies with applicable laws and regulations and implements Good Corporate Governance (GCG) principles;
10. Providing information required by the Board of Commissioners on a regular basis and/or upon request;
11. Coordinating committee members, when necessary, to support the Board of Commissioners' duties;
12. Coordinating the staff of the Board of Commissioners, the Secretariat, and administrative staff to ensure the smooth execution of the Board of Commissioners' duties;
13. Acting as a liaison officer between the Board of Commissioners and other parties;
14. Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners.

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS OLEH DEWAN KOMISARIS

Penilaian atas kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dasar penilaian yang digunakan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Komisaris selama tahun 2025. Atas dasar pertimbangan tersebut, Dewan Komisaris menilai kinerja Sekretaris Dewan Komisaris masuk kategori “Sangat Baik”.

EVALUATION AND PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS BY THE BOARD OF COMMISSIONERS

The performance assessment of the Secretary to the Board of Commissioners was conducted by the Board of Commissioners. The assessment was based on the implementation of the duties and functions of the Secretariat of the Board of Commissioners during 2025. Based on this evaluation, the Board of Commissioners assessed the performance of the Secretary to the Board of Commissioners as falling within the category of “Very Good.”

SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG; memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta; sebagai penghubung (*liaison officer*) dengan pihak-pihak pemegang kepentingan di luar PUSRI seperti pemegang saham, stakeholder, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan; dan menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Dalam struktur organisasi Perusahaan, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki koordinasi pekerjaan kepada Direktur Keuangan & Umum serta membawahi Departemen Komunikasi & Administrasi Korporat, Departemen Hukum dan Departemen Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan. Sekretaris Perusahaan mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi utama sebagai pejabat penghubung, legal compliance officer, dan membantu tugas Direksi untuk menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah/notulen rapat Direksi maupun Rapat Umum Pemegang saham

Sekretaris Perusahaan berada serta bertanggung jawab langsung di bawah Direktur Utama. Hal ini merupakan bentuk keseriusan Perusahaan dalam menciptakan implementasi terbaik GCG. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk memelihara dokumen-dokumen penting yang menunjang struktur GCG dalam penerapan prinsip-prinsip GCG Perusahaan.

The Corporate Secretary plays an important role in ensuring that the Company complies with disclosure requirements in line with the implementation of Good Corporate Governance principles; providing information required by the Board of Directors and the Board of Commissioners periodically and or upon request; serving as a liaison officer with external stakeholders such as shareholders and other interested parties; and administering and maintaining Company documents, including but not limited to the Shareholders Register, Special Register, and minutes of meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the General Meeting of Shareholders.

Within the Company's organizational structure, the Corporate Secretary reports directly to the President Director and coordinates functionally with the Director of Finance & General Affairs. The Corporate Secretary oversees the Corporate Communication & Administration Department, the Legal Department, and the Social and Environmental Responsibility Department. The Corporate Secretary carries the mission of consistently and sustainably supporting the creation of a positive corporate image through effective communication programs directed to all stakeholders. The Corporate Secretary's main functions are to act as liaison officer, legal compliance officer, and to assist the Board of Directors in administering and safeguarding Company documents, including but not limited to the Shareholders Register, Special Register, and minutes of meetings of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders.

The Corporate Secretary is positioned directly under and accountable to the President Director. This reflects the Company's commitment to implementing Good Corporate Governance in the best possible manner. The Corporate Secretary is responsible for maintaining important documents that support the GCG structure in the implementation of the Company's GCG principles.

DASAR PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pembentukan, pengangkatan, dan pelaksanaan fungsi serta tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain mengacu pada:

1. Anggaran Dasar PUSRI
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

KEORGANISASIAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Struktur Kompartemen Sekretaris Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan untuk penyempurnaan organisasi. Pada tahun 2024, Struktur Kompartemen Sekretaris Perusahaan disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/ DIR/291/2024 tanggal 01 Juli 2024.

Agar dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, Sekretaris Perusahaan menjadi pimpinan unit kerja Kompartemen Sekretaris Perusahaan, yang terdiri dari: Departemen Komunikasi & Administrasi Korporat, Departemen Hukum, dan Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Departemen Komunikasi & Administrasi Korporat bertanggung jawab atas Bagian Komunikasi Internal, Bagian Komunikasi Eksternal, Bagian Protokol dan Bagian Kesekretariatan & Pelaporan. Sedangkan Departemen Hukum bertanggung jawab atas Bagian Layanan Hukum Korporat dan Kelompok Corporate Lawyer. Sementara Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertanggung jawab atas Bagian Kemitraan, Bagian Administrasi & Keuangan TJSL dan Bagian *Corporate Social Responsibility*.

BASIS FOR THE APPOINTMENT OF THE CORPORATE SECRETARY

The establishment, appointment, and execution of the functions and duties of the Corporate Secretary refer, among others, to:

1. The Articles of Association of PUSRI
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises

ORGANIZATION OF THE CORPORATE SECRETARY

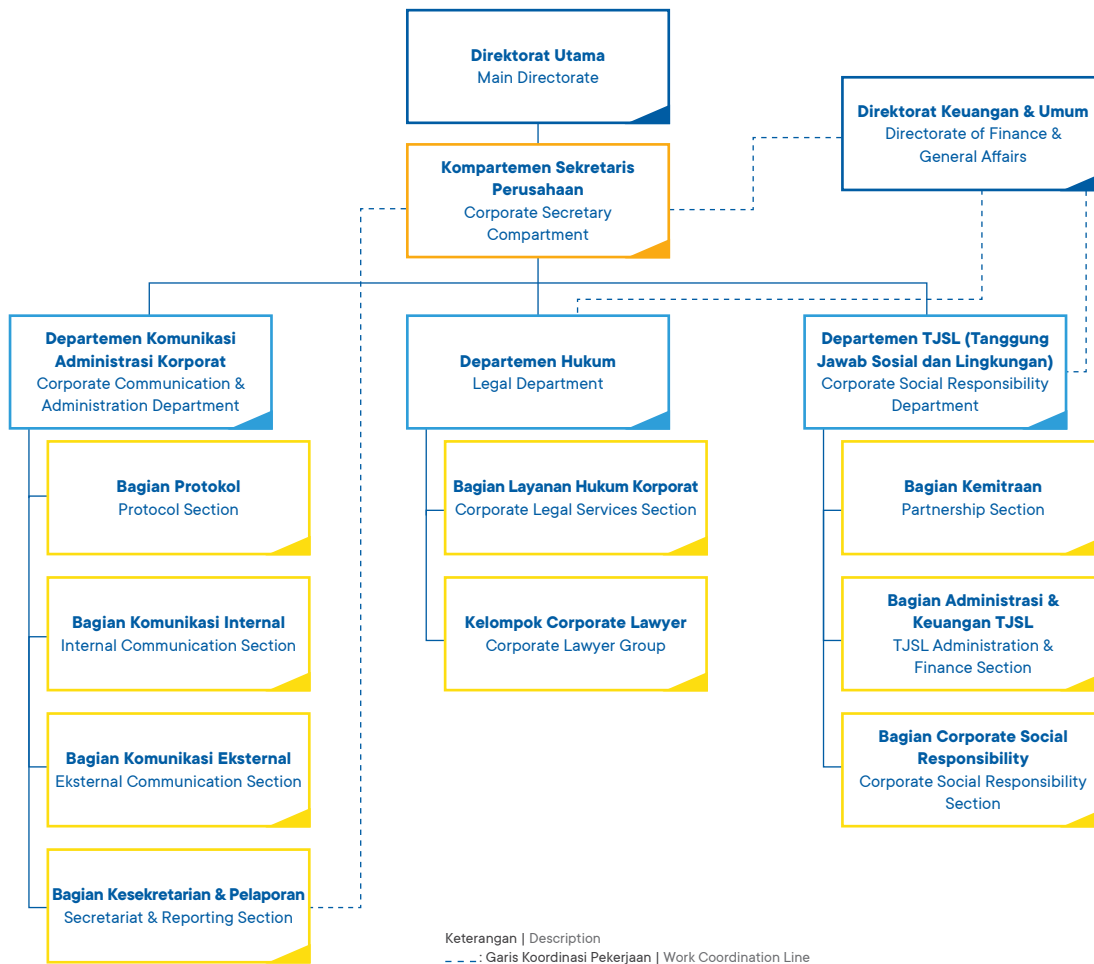
The structure of the Corporate Secretary Compartment has undergone several adjustments for organizational refinement. In 2024, the structure was established based on the Decree of the Board of Directors No. SK/ DIR/291/2024 dated July 1, 2024.

To effectively carry out its activities, the Corporate Secretary leads the Corporate Secretary Compartment, which consists of: Corporate Communication & Administration Department, Legal Department, Social and Environmental Responsibility Department.

The Corporate Communication & Administration Department oversees the Internal Communication Division, External Communication Division, Protocol Division, and Secretariat & Reporting Division. The Legal Department oversees the Corporate Legal Services Division and the Corporate Lawyer Group. The Social and Environmental Responsibility Department oversees the Partnership Division, TJSL Administration & Finance Division, and the Corporate Social Responsibility Division.

Struktur Organisasi Kompartemen Sekretaris Perusahaan

Organizational Structure of the Corporate Secretary Compartment



Per 31 Desember 2025, jumlah karyawan pada Kompartemen Sekretaris Perusahaan adalah 23 karyawan dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2025, the total number of employees in the Corporate Secretary Compartment was 23 employees, with the following details

Posisi Position	Total
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	1
Officer Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Officer	1
Departemen Komunikasi & Administrasi Korporat Corporate Communication & Administration Department	9
Departemen Hukum Legal Department	4
Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility Department	8

PEDOMAN KERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki pedoman kerja yang tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan serta Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dimiliki PUSRI, telah diuraikan secara jelas Sekretaris Perusahaan.

FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan sangat dibutuhkan oleh Perusahaan karena memiliki beberapa fungsi. Pertama, adalah fungsi komunikasi dan pembinaan hubungan baik antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Sekretaris Perusahaan juga menjadi jalur komunikasi dan sumber informasi resmi, seperti menyediakan informasi terbaru melalui website, sehingga beredarnya isu atau informasi palsu yang merugikan Perusahaan dapat dihindari.

Sekretaris Perusahaan juga menjalankan fungsi kehumasan, kesekretariatan maupun penyelenggaraan RUPS, Rapat Direksi, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris, dan kegiatan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks administratif, Sekretaris Perusahaan menyimpan dokumen penting Perusahaan, seperti Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, dan Risalah RUPS.

Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi dan peran strategis, antara lain:

Fungsi

1. Fungsi komunikasi dan pembinaan hubungan baik antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Sekretaris Perusahaan juga menjadi jalur komunikasi dan sumber informasi resmi, seperti menyediakan informasi terbaru melalui website, sehingga beredarnya isu atau informasi palsu yang merugikan Perusahaan dapat dihindari.
2. Fungsi kehumasan, kesekretariatan maupun penyelenggaraan RUPS, Rapat Direksi, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris, dan kegiatan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks administratif, Sekretaris Perusahaan menyimpan dokumen penting Perusahaan, seperti Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, serta Risalah RUPS.
3. Fungsi Hukum dengan memberikan saran/ tindakan hukum kepada Direksi dengan cara aktif menelaah setiap persoalan yang dihadapi perusahaan saat ini dan atau yang akan terjadi di waktu yang akan

WORK GUIDELINES OF THE CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary has work guidelines set out in the Company's Corporate Governance Guidelines as well as in the Board Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Corporate Governance Guidelines of PUSRI clearly describe the role of the Corporate Secretary.

FUNCTIONS, DUTIES, AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary plays a vital role within the Company and performs several key functions. First, the communication function and the fostering of good relationships between the Company and internal and external stakeholders. The Corporate Secretary serves as an official communication channel and source of information, including providing updated information through the Company's website, thereby preventing the circulation of harmful misinformation or false issues.

The Corporate Secretary also performs public relations, secretarial, and meeting management functions, including organizing the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Directors Meetings, joint meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners, and engagements with other stakeholders. From an administrative perspective, the Corporate Secretary maintains important Company documents, such as the Shareholders Register, Special Register, Minutes of Board of Directors Meetings, and Minutes of GMS.

The Corporate Secretary has the following strategic functions and roles:

Functions

1. Communication and relationship management between the Company and internal and external stakeholders, serving as the official communication channel and information source, including through the website.
2. Public relations, secretarial services, and organization of GMS, Board of Directors Meetings, joint meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and stakeholder engagements; including safekeeping of key corporate documents.
3. Legal function, by providing legal advice or actions to the Board of Directors through active review of issues currently faced or potentially arising, to

datang. Agar perusahaan/ Direksi terhindar dari persoalan hukum serta mewakili perusahaan dalam penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Perusahaan.

4. Fungsi dan tanggungjawab atas kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) agar dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Peran Strategis

1. Membantu Direksi dalam menyelenggarakan kegiatan Perusahaan.
2. Menjaga hubungan baik antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, regulator, media massa, dan masyarakat luas.
3. Mengelola informasi terkait aspek bisnis Perusahaan.
4. Melakukan tugas lainnya yang diberikan Direksi sepanjang masih dalam wewenang dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.

Sesuai dengan SK/ DIR/291/2024 tanggal 01 Juli 2024, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Membangun hubungan baik dengan Stakeholders dan atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dengan cara menjalankan fungsi-fungsi pokok Sekretaris Perusahaan yaitu *Compliance Officer*, *Public Relation*, *Investor Relation* dan *Business Information* agar terjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.
2. Membangun hubungan antara kepentingan unit-unit internal Perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di luar Perusahaan dengan cara meningkatkan komunikasi dan pemberian informasi agar masing-masing pihak dapat melaksanakan perannya dengan baik.
3. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
4. Memiliki tanggung jawab dalam penyimpanan dan pengelolaan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
5. Mengembangkan data bisnis Perusahaan dan mengelola dokumen-dokumen penting Perusahaan melalui pemanfaatan teknologi informasi agar lebih mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk kepentingan investasi atau kerja sama bisnis lainnya.
6. Melakukan persiapan RUPS/RUPS-LB, Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi/Pimpinan dan staf baik yang dilakukan di Palembang atau di luar Palembang dengan cara mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan unit kerja terkait agar kegiatan rapat tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

prevent legal exposure and represent the Company in legal matters.

4. Responsibility for Corporate Social Responsibility (CSR) activities to ensure positive impact on the environment and society.

Strategic Roles

1. Assisting the Board of Directors in conducting Company activities.
2. Maintaining good relations with stakeholders, including government, regulators, the media, and the public.
3. Managing information related to the Company's business aspects.
4. Performing other duties assigned by the Board of Directors within the scope of authority and responsibility of the Corporate Secretary.

Duties and Responsibilities (Based on Decree No. SK/ DIR/291/2024 dated July 1, 2024):

1. Establishing good relationships with stakeholders and other interested parties by carrying out the core functions of Compliance Officer, Public Relations, Investor Relations, and Business Information to create harmonious and mutually beneficial relationships.
2. Build relationships between the interests of the Company's internal units and external stakeholders by enhancing communication and information sharing, enabling each party to perform its role effectively.
3. Providing information required by the Board of Directors and Board of Commissioners periodically and or upon request.
4. Managing and safeguarding Company documents, including but not limited to the Shareholders Register, Special Register, and minutes of meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners, and GMS.
5. Developing Company business data and managing important documents through information technology to facilitate access for investment and business cooperation purposes.
6. Preparing and coordinating the implementation of GMS, Extraordinary GMS, Board of Commissioners Meetings, Board of Directors and leadership meetings, both in Palembang and outside Palembang.

7. Mengarahkan kegiatan penyusunan annual report, pengelolaan website Perusahaan, video profil Perusahaan dan media komunikasi lainnya baik media cetak maupun media elektronika sebagai informasi Perusahaan kepada publik. 8. Memiliki tanggung jawab atas kegiatan <i>Corporate Social Responsibilities</i> (CSR) yang dilaksanakan oleh Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) agar pelaksanaannya dapat menghasilkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. 9. Memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengendalian proses (pembinaan/ pengembangan) dan akuntabilitas program kemitraan dari Perusahaan kepada masyarakat lingkungan eksternal, serta dana pembinaan untuk pelatihan, studi banding, penelitian dan promosi/ pameran, secara efektif dan efisien sehingga dapat saling menguntungkan kedua belah pihak serta tetap menjaga akuntabilitas program kemitraan sesuai amanat RUPS. 10. Memberikan saran/pendapat hukum kepada Direksi dengan cara aktif menelaah setiap persoalan yang dihadapi Perusahaan saat ini dan atau yang akan terjadi di waktu yang akan datang agar Perusahaan/ Direksi terhindar dari persoalan hukum. 11. Mewakili Direksi/Perusahaan dalam penyelesaian masalah hukum baik dimuka pengadilan maupun di luar pengadilan dan termasuk menghadapi pihak yang wajib/berwenang seperti: Instansi Pemerintah, Kepolisian dan Kejaksaan melalui Surat Kuasa Hukum agar setiap permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan dapat terselesaikan dengan baik. 12. Merencanakan, mengelola dan mengawasi penggunaan anggaran di Kompartemen. 13. Melakukan pengelolaan risiko (identifikasi, pengukuran dan mitigasi risiko) di unit kerja sebagai upaya memaksimalkan nilai Perusahaan dan membentuk budaya pengelolaan risiko dan berinovasi di unit kerja. 14. Mendorong implementasi tata nilai AKHLAK di lingkup Kompartemen. 15. Merencanakan, menyetujui, mengembangkan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan kebijakan lingkungan, tujuan lingkungan, sasaran lingkungan dan program untuk mencapainya di lingkup Kompartemen.	7. Directing the preparation of the Annual Report, management of the Company website, corporate profile videos, and other print and electronic media communications. 8. Be responsible for Corporate Social Responsibility (CSR) activities implemented by the Social and Environmental Responsibility Department, ensuring that their implementation generates positive impacts on the environment and society. 9. Be responsible for managing and controlling the development and accountability of the Company's partnership programs for external communities, as well as the allocation of development funds for training, benchmarking studies, research, and promotional and exhibition activities. This responsibility must be carried out effectively and efficiently to create mutual benefits for both parties while maintaining the accountability of the partnership programs in accordance with the mandate of the General Meeting of Shareholders (GMS). 10. Provide legal advice and opinions to the Board of Directors by actively reviewing and assessing legal issues currently faced by the Company, as well as potential future legal matters, in order to protect the Company and the Board of Directors from legal risks and disputes. 11. Represent the Board of Directors and/or the Company in resolving legal matters, both in court and out of court, including dealings with competent authorities such as government agencies, the police, and the public prosecutor's office, under a Power of Attorney, to ensure that all legal issues faced by the Company are resolved properly and effectively. 12. Planning, managing, and supervising the use of the Compartment's budget. 13. Conducting risk management activities, including risk identification, measurement, and mitigation, to maximize Company value and foster a risk aware and innovative culture. 14. Promoting implementation of the AKHLAK core values within the Compartment. 15. Planning, approving, developing, communicating, and socializing environmental policies, objectives, targets, and programs within the Compartment.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan PT Pupuk Indonesia (Persero).

APPOINTMENT AND DISMISSAL AUTHORITY

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by a Resolution of the Board of Directors in accordance with the Company's internal mechanism, with the approval of the Board of Commissioners and PT Pupuk Indonesia (Persero).

PROFIL PEJABAT SEKRETARIS PERUSAHAAN

PROFILE OF THE CORPORATE SECRETARY



INDAH IRMAYANI

Sekretaris Perusahaan
Company Secretary

Periode Jabatan Term of Office	5 Januari 2022 January 5, 2022
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia Age	46 Tahun Years
Tempat & tanggal Kelahiran Place & Date of Birth	Palembang 19 Juli 1979 Palembang, July 19, 1979
Domisili Domicile	Palembang, Sumatera Selatan Palembang, South Sumatra
Riwayat Penunjukan Appointment History	Ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/019/2022 tanggal 05 Januari 2022 Appointed based on the Decree of the Board of Directors No. SK/DIR/019/2022 dated January 5, 2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. Sarjana Pertanian Universitas Sriwijaya (2001) 2. Magister Pertanian Universitas Sriwijaya (2025) 1. Bachelor's Degree in Agriculture, Universitas Sriwijaya (2001) 2. Master's Degree in Agriculture, Universitas Sriwijaya (2025)
Keahlian Expertise	Sosial Ekonomi Pertanian Agricultural Socio Economics
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak Memiliki Rangkap Jabatan None
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Dewan Komisaris atau Direksi Has no affiliation with the Major Shareholder or with members of the Board of Commissioners or the Board of Directors
Pengalaman Kerja Work Experience	1. Sekretaris Perusahaan (2024 – Sekarang) 2. SVP Sekretariat Perusahaan & Tata Kelola (2022 – 2024) 3. SVP Umum (2021 – 2022) 4. GM Penjualan Produk Komersial (2020 – 2021) 1. Corporate Secretary (2024 – Present) 2. Senior Vice President of Corporate Secretariat & Governance (2022 – 2024) 3. Senior Vice President of General Affairs (2021 – 2022) 4. General Manager of Commercial Product Sales (2020 – 2021)
Bergabung dengan PUSRI Joined PUSRI	01 April 2004 April 1, 2004

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Dalam rangka mengembangkan kompetensi karyawan dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya, Perusahaan melaksanakan program pengembangan karier untuk seluruh karyawan, tidak terkecuali bagi Sekretaris Perusahaan beserta jajarannya yang dilakukan sejalan dengan kebutuhan bisnis dan pemenuhan target kinerja Perusahaan. Proses pengembangan karier yang dilaksanakan di lingkungan Perusahaan diatur berdasarkan Surat Keputusan SK/DIR/407/2022 tanggal 05 Desember 2022.

COMPETENCY DEVELOPMENT

To develop employee competencies and motivate employees to improve their performance, the Company implements career development programs for all employees, including the Corporate Secretary and her team, in line with business needs and the achievement of the Company's performance targets. The career development process within the Company is regulated under Decree No. SK/DIR/407/2022 dated December 5, 2022.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan beberapa tugas dan kegiatan sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE CORPORATE SECRETARY

Throughout 2025, the Corporate Secretary has carried out the following duties and activities:

No	Aktivitas Activity	Keterangan Description
Bidang Komunikasi dan Administrasi Korporat Field of Corporate Communication & Administration		
1	Aktivitas Kehumasan Public Relations Activities	Melaksanakan acara resmi perusahaan dengan rincian sebagai berikut: 91 acara internal, 71 acara eksternal, 18 government relations, 15 <i>stakeholders</i> relations, 8 community relations, 34 Kegiatan kunjungan tamu perusahaan. Conducted official corporate events with the following details: 91 internal events 71 external events 18 government relations activities 15 stakeholder relations activities 8 community relations activities 34 corporate guest visits
2	Aktivitas Komunikasi Communication Activities	Aktivitas Publikasi dan pemberitaan menghasilkan: 1.424 berita di media cetak dan media online; 68 siaran pers. Aktivitas media sosial telah menghasilkan: 959 konten (All Socmed), 634.099 pengikut (All Socmed), 698.579 <i>account reached</i> (Instagram), 25.415 <i>account engaged</i> (Instagram) Publication and media coverage generated: 1,424 news articles in print and online media 68 press releases Social media activities generated: 959 pieces of content across all social media platforms 634,099 total followers across all social media platforms 698,579 accounts reached on Instagram 25,415 accounts engaged on Instagram

No	Aktivitas Activity	Keterangan Description
3	Special Event	- Menyelenggarakan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) - Menyelenggarakan Raker RKAP PT Pusri Palembang 2025 - Menyelenggarakan Safari Ramadhan 1446 H - Menyelenggarakan Silaturahmi Halal Bilal Manajemen PT Pusri Palembang - Menyelenggarakan Sharing Sessions Bersama Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) - Menyelenggarakan Rakor Dit. Pengembangan & Bisnis PI Grup - Menyelenggarakan Kunjungan Kerja PANJA Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Masa Sidang IV Tahun 2025 - Menyelenggarakan Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 80 tahun 2025 - Menyelenggarakan Silaturahmi Komisaris & Direksi Periode 2025 - Menyelenggarakan Awarding Srinova 2025 - Menyelenggarakan Kunjungan Kerja DPR RI Komisi VI Tahun 2025 - Menyelenggarakan Kunjungan Kerja DPR RI Komisi VII Tahun 2025 - Menyelenggarakan HUT ke-66 Pusri - Working Visit of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero) 2025 RKAP Working Meeting of PT Pusri Palembang - Ramadan Safari 1446 H - Halal Bihalal Gathering of PT Pusri Palembang Management - Sharing Session with the Director of Business Transformation of PT Pupuk Indonesia (Persero) - Coordination Meeting of the Development & Business Directorate of PI Group - Working Visit of the Parliamentary Working Committee (PANJA) on Supervision of Subsidized Fertilizer Distribution, Session IV 2025 80th Anniversary Celebration of the Independence of the Republic of Indonesia in 2025 - Commissioners & Directors Gathering Period 2025 - Srinova Awarding 2025 - Working Visit of the House of Representatives (DPR RI) Commission VI in 2025 - Working Visit of the House of Representatives (DPR RI) Commission VII in 2025 66th Anniversary of Pusri
4	Biaya Kehumasan Public Relations Expenditure	Total biaya kehumasan untuk kegiatan publikasi, kehumasan, dokumentasi, jamuan & representasi, perayaan dan sumbangan & donasi selama tahun 2025 adalah Rp.3.729.326.242,- Total public relations expenditure for publication, public relations activities, documentation, hospitality and representation, celebrations, and donations during 2025 amounted to Rp3,729,326,242.
5	Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi Board Meetings	Rapat Direksi terlaksana sebanyak 91 kali dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi terlaksana sebanyak 15 kali Board of Directors Meetings: 91 meetings Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors: 15 meetings
6	Penyusunan Annual Report & Sustainability Report Preparation of Annual Report & Sustainability Report	- Annual Report dan Sustainability Report tahun 2024 telah terusun dan telah disampaikan kepada Pemegang Saham pada bulan Mei 2025. - Proses tender jasa konsultan untuk penyusunan Annual Report dan Sustainability Report tahun 2025. - The 2024 Annual Report and Sustainability Report have been completed and submitted to the Shareholders in May 2025. - Tender process for consultant services for the preparation of the 2025 Annual Report and Sustainability Report is ongoing.
Bidang Hukum		
Legal Affairs		
1	Advokasi, Pendampingan Hukum dan Penanganan Kasus Advocacy, Legal Assistance, and Case Handling	Sepanjang tahun 2025 telah diselesaikan pelaksanaan advokasi dan pendampingan hukum sebanyak 31 kali. Throughout 2025, 31 advocacy and legal assistance activities were completed.

No	Aktivitas Activity	Keterangan Description
2	Pengurusan Perizinan Perusahaan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Corporate Licensing and Intellectual Property Protection	Sepanjang tahun 2025 telah diselesaikan pengurusan perizinan hak atas tanah milik Perusahaan sebanyak: • 41 (empat puluh satu) Hak Guna Bangunan, • Perizinan yang bersifat korporat sebanyak 8 (delapan) perizinan, dan • Hak kekayaan intelektual Perusahaan sebanyak 5 (lima) hak paten. Throughout 2025, the following were completed: • 41 Building Use Rights (Hak Guna Bangunan) land permits • 8 corporate related permits • 5 intellectual property rights (patents)
3	Reviu atas dokumen dan surat-surat strategis Perusahaan Review of Strategic Documents and Corporate Correspondence	Sepanjang tahun 2025 terlaksana review dokumen: • Pengadaan barang dan jasa sebanyak 138 kali, • Surat Perjanjian dan Addendum Surat Perjanjian sebanyak 140 kali, • Nota Kesepahaman/MoU sebanyak 22 kali, • Surat Kuasa Khusus sebanyak 52 kali, • Surat Keputusan Direksi/Pedoman/ Prosedur sebanyak 49 kali, • Keputusan Direksi di Luar Rapat sebanyak 9 kali, • Legal Opinion dan Legal Advice sebanyak 96 kali, • Keputusan Pemegang Saham sebanyak 3 kali, • Kajian Hukum sebanyak 16 kali • Berita Acara sebanyak 9 kali dan • Dokumen Perusahaan Lainnya sebanyak 41 kali. Throughout 2025, the following reviews were conducted: • procurement of goods and services: 138 instances; • agreements and addenda to agreements: 140 instances; • memoranda of understanding (MoU): 22 instances; • special powers of attorney: 52 instances; • board of directors' decrees/guidelines/procedures: 49 instances; • board of directors' circular resolutions (outside meetings): 9 instances; • legal opinions and legal advice: 96 instances; • shareholders' resolutions: 3 instances; • legal reviews: 16 instances; • minutes of meeting: 9 instances; • other corporate documents: 41 instances.
Bidang Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Social & Environmental Responsibility		
1	Penyaluran TJSL Program Pendanaan UMK (PUMK) TJSL Funding Distribution – MSME Funding Program (PUMK)	Realisasi penyaluran PUMK berkolaborasi dengan PT BRI merupakan salah satu komponen dalam Pilar Ekonomi. • Jumlah dana PUMK yang telah ditransfer ke PT BRI tahun 2023 sd. 2024 sebesar Rp21,3 Miliar • Jumlah dana ditransfer sd. Desember 2025 sebesar Rp2 Miliar. • Total dana ditransfer sebesar Rp23,3 Miliar Darti total dana tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia menyalurkan sebesar 125% atau sebesar Rp31,82 Miliar kepada 871 mitra binaan wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Lampung dan Jawa Tengah. Distribution of PUMK funds in collaboration with PT BRI as part of the Economic Pillar: • Funds transferred to PT BRI from 2023 to 2024: Rp21.3 billion • Funds transferred up to December 2025: Rp2 billion • Total funds transferred: Rp23.3 billion From this total, PT Bank Rakyat Indonesia has distributed 125 percent or Rp31.82 billion to 871 fostered partners in South Sumatra, Lampung, and Central Java.
2	Penerimaan angsuran pinjaman mitra binaan Loan Installment Receipts from Fostered Partners	Hasil Penerimaan angsuran Mitra Binaan termasuk di dalamnya hasil penagihan sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp1.702.695.268 atau 106,78% dari RKA Tahun 2025 sebesar Rp1.594.440.000 Loan installment receipts, including collection results up to December 2025, amounted to Rp1,702,695,268 or 106.78 percent of the 2025 RKA target of Rp1,594,440,000.

No	Aktivitas Activity	Keterangan Description
3	Program TJSL CID (PUMK dan Non PUMK) TJSL CID Program (PUMK and Non PUMK)	Sampai dengan bulan Desember tahun 2025, Program TJSL CID (PUMK dan Non PUMK) yang telah direalisasikan meliputi 3 Pilar yakni : • Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, dan Pilar Lingkungan. Pilar Sosial sebesar Rp18,56 Miliar atau 109% dari RKA tahun 2025 sebesar Rp 16,99 Miliar, • Pilar Ekonomi sebesar Rp4,63 Miliar atau 72% dari RKA 2025 sebesar Rp6,39 Miliar, • Pilar Lingkungan sebesar Rp6,97 Miliar atau 102% dari RKA 2025 sebesar Rp6,85 Miliar. As of December 2025, the TJSL CID Program has been realized across three pillars: • Social Pillar: Rp18.56 billion or 109 percent of the 2025 RKA target of Rp16.99 billion • Economic Pillar: Rp4.63 billion or 72 percent of the 2025 RKA target of Rp6.39 billion • Environmental Pillar: Rp6.97 billion or 102 percent of the 2025 RKA target of Rp6.85 billion

EVALUASI KINERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN

Realisasi pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan selama tahun 2025 telah mencapai target yang direncanakan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tercapainya *Key Performance Indicator* (KPI) Sekretaris Perusahaan yang telah ditetapkan. Berikut tabel penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan:

PERFORMANCE EVALUATION OF THE CORPORATE SECRETARY

The realization of the Corporate Secretary's duties throughout 2025 has achieved the planned targets. This is reflected in the attainment of the Corporate Secretary's established Key Performance Indicators (KPI). The following is the performance evaluation table of the Corporate Secretary:

No	Indikator Kerja Performance Indicator	Target	Realisasi Realization	Nilai Score
1	EBITDA Margin	15,44	15,17	98,25
2	Cost Optimization	100%	115%	110
3	ESG Rating	42	50	105
4	Program CSV	100%	100%	100
5	Stakeholder Management	12	14	100
6	Program TJSL TJSL Program	100%	100%	100
7	Implementasi Program Unggulan TJSL Implementation of TJSL Flagship Program	100%	100%	100
8	Indeks Kepuasan Lingkungan Environmental Satisfaction Index	92,5	92,71	100
9	Pengembalian Dana Program Pendanaan UMK Return of MSME Funding Program	1,5 M	2,19 M	100
10	Penanganan Permasalahan Hukum Handling of Legal Issues	100%	100%	100
11	Pemberian Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan/atau Kajian Hukum Provision of Legal Opinion and/or Legal Study	100%	105%	100
12	Meeting Management	12	81	100
13	Penanganan Piutang Macet Handling of Non Performing Receivables	15	44	100
14	Talent Development Effectiveness	100%	100%	100
Jumlah Total				101,58

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

INTERNAL AUDIT UNIT

SPI memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan jasa *assurance* (audit) dan *consulting* secara independen dan objektif dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan: efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal untuk memberikan *value added* kepada PT Pusri Palembang dalam mencapai tujuannya.

Dalam menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian internal berbasis risiko, Perusahaan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Internal Audit Charter yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direksi No. SK/DIR/180/2024 tanggal 01 April 2024 serta Prosedur Operasional Baku (POB) Audit Internal PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No.SK/DIR/215/2023 tanggal 26 Juni 2023. PT Pusri Palembang terus berupaya meningkatkan penerapan pengendalian internal melalui pengembangan sistem dan prosedur yang aplikatif dan mencegah terjadinya *fraud*.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN SENIOR VICE PRESIDENT (SVP) SPI

SPI dipimpin oleh SVP SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

PROFIL SENIOR VICE PRESIDENT SATUAN PENGAWASAN INTERN

Berdasarkan Surat Keputusan No. SK/DIR/019/2022 tanggal 5 Januari 2022, SVP SPI dijabat oleh Dian Permatasari. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan dan pemberhentian SVP SPI adalah Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Berikut profilnya.

The Internal Audit Unit (SPI) has the role and responsibility to provide independent and objective assurance (audit) and consulting services by applying a systematic and disciplined approach to evaluate and enhance: the effectiveness of governance, risk management, and internal control, in order to deliver added value to PT Pusri Palembang in achieving its objectives.

In implementing a risk-based supervision and internal control system, the Company refers to the Financial Accounting Standards (PSAK) and the Internal Audit Charter established pursuant to Board of Directors Decree No. SK/DIR/180/2024 dated April 1, 2024, as well as the Standard Operating Procedures (SOP) for Internal Audit of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK/DIR/215/2023 dated June 26, 2023. PT Pusri Palembang continues to enhance the implementation of internal controls through the development of applicable systems and procedures and the prevention of fraud.

AUTHORITY TO APPOINT AND DISMISS THE SENIOR VICE PRESIDENT OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The SPI is led by the Senior Vice President of the Internal Audit Unit, who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

PROFILE OF THE SENIOR VICE PRESIDENT OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

Based on Decree No. SK/DIR/019/2022 dated January 5, 2022, the position of SVP of the Internal Audit Unit (SPI) is held by Dian Permatasari. The parties involved in the appointment and dismissal process of the SVP of SPI are the Board of Commissioners and the President Director. Her profile is presented below.



DIAN PERMATASARI

SVP Satuan Pengawasan Intern
SVP, Internal Audit Unit

Usia Age	50 Tahun Years
Tempat & tanggal Kelahiran Place & Date of Birth	Jakarta, 6 September 1976 Jakarta, September 6, 1976
Domisili Domicile	Palembang, Sumatera Selatan Palembang, South Sumatra
Riwayat Penunjukan Appointment History	Ditunjuk sebagai SVP SPI berdasarkan Surat Keputusan Direksi No SK/DIR/019/2022 tanggal 5 Januari 2022. Appointed as SVP of the Internal Audit Unit based on Board of Directors Decree No. SK/DIR/019/2022 dated January 5, 2022.
Riwayat Pendidikan Educational Background	1. Certification in Audit Committee Practices (CACP) 2. Qualified Chief Risk Officer (QCRO). 3. Certified Governance, Risk & Compliance Executive Officer (CGRCEO) 4. Manajemen umum Dana Pensiun (MUDP) 5. Qualified Risk Management Professional (QRMP) 6. Certified Internal Auditor Executive (CIAE). 7. Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) 8. Sarjana Akuntansi, Universitas Lampung – 2000
Pengalaman Kerja Work Experience	1. VP Akuntansi (2021–2022). 2. Manager Keuangan (2018–2021), 3. Manager Pengawasan Keuangan (2016–2018) 4. Manager Program Kemitraan & Bina Lingkungan (April– November 2016), 5. Staf Pengendali Teknis Pengawasan Keuangan (2014–2016) 6. Memulai karier di Pusri, 1 Januari 2004

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SENIOR VICE PRESIDENT SATUAN PENGAWASAN INTERN

Perusahaan telah mengatur tugas dan tanggung jawab Senior Vice President Satuan Pengawasan Intern yang meliputi:

1. Mengoordinasikan seluruh pengawasan dan pemeriksaan atas seluruh kegiatan unit kerja agar kebijakan Direksi, fungsi-fungsi manajemen dan pengendalian intern di lingkungan perusahaan dengan memperhatikan prinsip 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif). Dalam pelaksanaannya, SVP Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
2. Mengoordinasikan seluruh kegiatan audit internal pada seluruh unit kerja yang ada di perusahaan meliputi audit kepatuhan, audit operasional (manajemen audit), audit keuangan (*financial audit*) dan audit khusus/audit investigasi sesuai dengan Standar International Praktik Profesional Audit Internal.
3. Mengoordinasikan kegiatan konsultasi kepada Manajemen perihal penyempurnaan sistem, prosedur, dan kebijakan yang diperlukan bagi tercapainya efisiensi dan efektivitas kegiatan dan pengendalian Manajemen, sehingga selaras dengan misi dan tujuan serta strategi perusahaan.
4. Mengoordinasikan audit dengan auditor dan/atau konsultan eksternal serta menyediakan data & informasi perusahaan untuk kebutuhan tersebut.
5. Memberikan pendapat, rekomendasi & saran perbaikan kepada Direksi dalam mengamankan harta dan kekayaan perusahaan.
6. Memberikan opini atas implementasi Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko untuk keseluruhan perusahaan.
7. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit dalam rangka perencanaan audit internal dan pelaksanaan audit oleh eksternal auditor.
8. Mengembangkan sistem pengawasan dan pemeriksaan berbasis Teknologi Informasi (EDP Audit) dan Manajemen Risiko, sesuai ketentuan pemerintah dan perkembangan bisnis perusahaan.
9. Melakukan pengawasan jalannya perusahaan agar tetap dalam prinsip-prinsip GCG.
10. Mengoordinir KPI, program pelatihan auditor, rencana kerja dan anggaran serta laporan unit kerja SPI untuk disampaikan kepada manajemen dan eksternal.
11. Melaksanakan setiap perintah atasan yang sesuai dengan kebijakan perusahaan.
12. Melakukan pengelolaan risiko (identifikasi, pengukuran dan mitigasi risiko) di unit kerja sebagai upaya memaksimalkan nilai perusahaan dan membentuk budaya pengelolaan risiko dan berinovasi di unit kerja.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SENIOR VICE PRESIDENT OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The Company has stipulated the duties and responsibilities of the Senior Vice President of the Internal Audit Unit as follows:

1. Coordinating all supervisory and inspection activities across all work units to ensure that the Board of Directors' policies, management functions, and internal controls within the Company are implemented in accordance with the 3E principles (Economy, Efficiency, and Effectiveness). In carrying out these duties, the SVP of the Internal Audit Unit reports to the President Director.
2. Coordinating all internal audit activities across all Company work units, including compliance audits, operational audits (management audits), financial audits, and special audits or investigative audits in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.
3. Coordinating consulting activities for Management regarding the improvement of systems, procedures, and policies necessary to achieve efficiency and effectiveness in operational activities and management controls, in alignment with the Company's mission, objectives, and strategy.
4. Coordinating audits with external auditors and/or consultants and providing Company data and information as required.
5. Providing opinions, recommendations, and corrective suggestions to the Board of Directors in safeguarding the Company's assets and property.
6. Providing an opinion on the implementation of Internal Control and Risk Management across the Company.
7. Coordinating with the Audit Committee in relation to internal audit planning and the execution of audits by external auditors.
8. Developing supervision and audit systems based on Information Technology (EDP Audit) and Risk Management in accordance with government regulations and business developments.
9. Supervising Company operations to ensure adherence to Good Corporate Governance (GCG) principles.
10. Coordinating KPIs, auditor training programs, work plans and budgets, as well as SPI unit reports to be submitted to Management and external parties.
11. Carrying out any directives from superiors in accordance with Company policies.
12. Managing risks (risk identification, measurement, and mitigation) within the work unit as an effort to maximize Company value and foster a risk management and innovation culture within the unit.

13. Mendorong implementasi tata nilai AKHLAK di lingkup Kompartemen Satuan Pengawasan Intern.
14. Merencanakan, menyetujui, mengembangkan, mengomunikasikan, dan mensosialisasikan kebijakan lingkungan, tujuan lingkungan, sasaran lingkungan dan program untuk mencapainya di lingkup Kompartemen.

13. Encouraging the implementation of AKHLAK core values within the Internal Audit Unit Compartment.
14. Planning, approving, developing, communicating, and disseminating environmental policies, environmental objectives, environmental targets, and related programs within the Compartment.

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN UNIT SPI

SPI berada langsung di bawah Direktur Utama dan merupakan organisasi audit internal yang bersifat independen dan objektif. Organisasi SPI ditetapkan dalam Surat Keputusan No.SK/DIR/412/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Struktur Organisasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan terakhir diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No.SK/DIR/547/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi di Lingkungan Kompartemen Teknologi & K3LH Direktorat Operasi & Produksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama yang berkedudukan di Kantor Pusat dan membawahi Departemen Pengawasan Keuangan dan Departemen Pengawasan Operasional. Berikut adalah bagan struktur organisasi SPI.



KEANGGOTAAN SPI

Per 31 Desember 2025, jumlah personel Satuan Pengawasan Intern sebanyak 17 karyawan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

STRUCTURE AND POSITION OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The Internal Audit Unit (SPI) reports directly to the President Director and functions as an independent and objective internal audit organization. The SPI organizational structure is established under Decree No. SK/DIR/412/2022 dated December 12, 2022 concerning the Organizational Structure of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang and was most recently amended by Board of Directors Decree of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK/DIR/547/2024 dated December 10, 2024 concerning the Refinement of the Organizational Structure within the Technology & K3LH Compartment under the Directorate of Operations & Production of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

The SPI reports directly to the President Director, who is based at the Head Office, and oversees the Financial Supervision Department and the Operational Supervision Department. The following is the SPI organizational structure chart.

SPI MEMBERSHIP

As of December 31, 2025, the Internal Audit Unit consists of 17 employees. The details are as follows:

Jabatan Position	Formasi Formation	Realisasi Realization
SVP SPI	1	1
Senior Officer Pengawasan Intern Senior Officer, Internal Supervision	2	0
VP Pengawasan Operasional VP, Operational Supervision	1	1
Senior Officer Pengendali Teknis Pengawasan Operasional Senior Officer, Technical Controller for Operational Supervision	2	2
Officer Pengawasan Produksi Officer, Production Supervision	1	1
Officer Pengawasan Teknik Officer, Technical Supervision	1	0
Officer Pengawasan Pemasaran Officer, Marketing Supervision	1	1
Officer Pengawasan Penunjang Officer, Supporting Function Supervision	1	1
Junior Officer Pengawasan Operasional Junior Officer, Operational Supervision	4	3
VP Pengawasan Keuangan VP, Financial Supervision	1	1
Senior Officer Pengendali Teknis Pengawasan Keuangan Senior Officer, Technical Controller for Financial Supervision	2	1
Officer Pengawasan Keuangan Officer, Financial Supervision	1	1
Officer Pengawasan Electronic Data Processing (EDP) Officer, Electronic Data Processing (EDP) Supervision	1	0
Officer Pengawasan Pemeriksaan Khusus (Riksus) Officer, Special Audit (Riksus) Supervision	1	1
Officer Pengawasan Perencanaan & Analisa Officer, Planning & Analysis Supervision	1	1
Junior Officer Pengawasan Keuangan Junior Officer, Financial Supervision	4	2
Jumlah Total	25	17

KOMPETENSI AUDITOR

Perusahaan secara berkesinambungan menyertakan para auditor pada program-program sertifikasi profesi di bidang SPI, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi auditor.

AUDITOR COMPETENCIES

The Company consistently enrolls its auditors in professional certification programs in the field of Internal Audit, both at the national and international levels. This initiative forms part of the Company's strategy to enhance the knowledge and competencies of its auditors.

Sertifikasi Certification	Total	Nama Name
CACP Certification in Audit Committee Practices	2	1. Dian Permatasari 2. Hadi Suyono
CIAE Certified Internal Auditor Executive	1	1. Dian Permatasari

Sertifikasi Certification	Total	Nama Name
QIA Qualified Internal Auditor	17	1. Dian Permatasari 2. Hadi Suyono 3. Nurni Astuti 4. Firman Aji Bayutomo 5. Livia Sarita 6. Nyoman Pramesti 7. M. Iqbal Hakim 8. Abdul Hakim 9. Rosmaida 10. Rully Nugraha 11. R. Zakky Rahman 12. Chandra Herdiputra 13. Mutia Lamora 14. Agus 15. Ginta Ryan Saputra 16. M. Ridho Adriandz 17. Achmad Alba Anjany
CIAO Certified Internal Auditor Officer	3	1. Mutia Lamora 2. Agus 3. M. Ridho Adriandz
QRMP Qualified Risk Managament Professional	4	1. Dian Permatasari 2. Nurni Astuti 3. Hadi Suyono 4. Firman Aji Bayutomo
QRMA Qualified Risk Managament Analyst	12	1. Livia Sarita 2. Nyoman Pramesti 3. Abdul Hakim 4. M. Iqbal Hakim 5. Rully Nugraha 6. R. Zakky Rahman 7. Rosmaida 8. Chandra Herdiputra 9. Mutia Lamora 10. Ginta Ryan Saputra 11. M. Ridho Adriandz 12. Achmad Alba Anjany
CA Chartered Accountant	1	1. Livia Sarita
ERMAP Enterprise Risk Management Associate Professional	2	1. Nyoman Pramesti 2. Rosmaida
MUDP Manajemen Umum Dana Pensiun	8	1. Dian Permatasari 2. Hadi Suyono 3. Nurni Astuti 4. Firman Aji Bayutomo 5. Livia Sarita 6. Abdul Hakim 7. Nyoman Pramesti 8. Agus
Brevet AB	1	1. Abdul Hakim
Brevet C	1	1. Abdul Hakim
CGRCEO Certified Governance, Risk & Complaience Executive Officer	1	1. Dian Permatasari

Sertifikasi Certification	Total	Nama Name
CGRCP Certified Governance, Risk & Compliance Professional	16	1. Nurni Astuti 2. Hadi Suyono 3. Firman Aji Bayutomo 4. Livia Sarita 5. Abdul Hakim 6. Nyoman Pramesti 7. Rosmaida 8. Rully Nugraha 9. M. Iqbal Hakim 10. R. Zakky Rahman 11. Chandra Herdiputra 12. Mutia Lamora 13. Agus 14. Ginta Ryan Saputra 15. M. Ridho Adriandz 16. Achmad Alba Anjany

Selama tahun 2025, PT Pusri Palembang telah menyertakan para auditor dalam berbagai pelatihan, yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kualitas audit. Secara keseluruhan ada 35 kegiatan pelatihan, termasuk pelaksanaan sertifikasi profesi.

During 2025, PT Pusri Palembang enrolled its auditors in various training programs aimed at enhancing competencies and improving audit quality. In total, there were 35 training activities, including professional certification programs

No	Nama Kegiatan Program/Training Activity	Pemberi Sertifikasi/Pelatihan Training / Certification Provider	Tahun Pelaksanaan Year
1	Pelatihan & Sertifikasi <i>Certified Audit Committee Professional</i> (CACP) <i>Batch 59</i> Training & Certification for Certified Audit Committee Professional	PT Mitra Sinergi Internasional	2025
2	Pelatihan & Sertifikasi Petugas Peran Kebakaran (Kelas D) <i>Batch 3</i> Training & Certification for Fire Response Officer (Class D), <i>Batch 3</i>	Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Audit Committee Association	2025
3	<i>Business Masterclass</i> MLDP BOD-2 PI Group : " <i>Mastering Global Business Savvy : Strategies for Retail Success in National and International Markets</i> "	Daya Dimensi Indonesia	2025
4	<i>Leader'S Talk</i> MLDP BOD-2 PI Group : " <i>Driving Corporate Financial Agility: Strategies for Adaptive Cost Management</i> "	PT Pupuk Indonesia - Daya Dimensi Indonesia	2025
5	Workshop Raker RKAP 2025 2025 RKAP Work Meeting Workshop	Deputi BUMN Deputy Ministry for State-Owned Enterprises (BUMN)	2025
6	Workshop Penyusunan <i>Grand Design & Roadmap ESG for Executive</i> Workshop on the Development of an ESG Grand Design & Roadmap for Executives	PT Olahkarsa Inovasi Indonesia	2025
7	Pelatihan English in The Workplace for BOD-1 & BOD-2 Tahun 2025 English in the Workplace Training for BOD-1 & BOD-2, 2025	Gofluent	2025
8	<i>Leader's Talk</i> MLDP BOD-2 PI Group: <i>Unveiling Leadership Traits</i>	Daya Dimensi Indonesia	2025
9	<i>Leader's Talk</i> MLDP BOD-2 PI Group: " <i>Optimizing Operational Execution</i> " & " <i>Breaking Through Stagnation</i> "	Daya Dimensi Indonesia	2025
10	Pelatihan English in The Workplace for BOD-1 & BOD-2 Tahun 2025 English in the Workplace Training for BOD-1 & BOD-2, 2025	Gofluent	2025
11	Pelatihan <i>Budgeting & Cost Control (Capital Budgeting)</i> Budgeting & Cost Control Training (Capital Budgeting)	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	2025
12	Workshop <i>Innovation Strategy Alignment for BoD-1 & BoD-2</i>	PT Intihub Inovasi Indonesia	2025

No	Nama Kegiatan Program/Training Activity	Pemberi Sertifikasi/Pelatihan Training / Certification Provider	Tahun Pelaksanaan Year
13	Program <i>Leaders Short Course Batch 1</i>	PT Eshael Indonesia	2025
14	Program <i>Leaders Short Course Batch 2</i>	PT Eshael Indonesia	2025
15	Program <i>Leaders Short Course Batch 3</i>	PT Eshael Indonesia	2025
16	<i>Development Center - Managerial Leadership Development Program (MLDP) BoD -2 PI Group</i>	PT Daya Dimensi Indonesia	2025
17	Risk Management Webinar "Dive into Sustainability Disclosure"	Bank Negara Indonesia - Forum Manajemen Risiko Bumh Bank Negara Indonesia - BUMN Risk Management Forum	2025
18	Pelatihan <i>Performance Coaching</i> Tahun 2025 2025 Performance Coaching Training	Daya Dimensi Indonesia	2025
19	Seminar Nasional Asosiasi Auditor Internal (AAI) & Pengukuhan Kepengurusan AAI wilayah Sumatera Bagian Selatan National Seminar of the Association of Internal Auditors (AAI) and Inauguration of the AAI Regional Board for Southern Sumatra	Asosiasi Auditor Internal Association of Internal Auditors (AAI)	2025
20	Pelatihan Anti Korupsi Tematik BUMN Batch II Thematic Anti-Corruption Training for State-Owned Enterprises (Batch II)	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK)	2025
21	Workshop Pengembangan Kapasitas CF PSP Capacity Building Workshop	PT Pupuk Indonesia (Persero)	2025
22	Sosialisasi <i>Strategy to Enhance English Communication Skills</i> Socialization Program: Strategy to Enhance English Communication Skills	PT Pupuk Indonesia (Persero)	2025
23	Pelatihan <i>Counseling</i> BOD-1 Pupuk Indonesia Group Counseling Training for BOD-1 of the Pupuk Indonesia Group	PT Insan Performa Consulting	2025
24	Wisuda " <i>Certification in Audit Committee Practices (CACP)</i> " Batch 59 dan Seminar " <i>Driving Enterprise Value Through Strategic Risk Oversight: The Critical Role Of Oversight Boards and Internal Audit In Strengthening Risk Governance and Portofolio Management</i> " Graduation Ceremony for the "Certification in Audit Committee Practices (CACP)" Batch 59 and Seminar on "Driving Enterprise Value Through Strategic Risk Oversight: The Critical Role of Oversight Boards and Internal Audit in Strengthening Risk Governance and Portfolio Management"	Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Audit Committee Association	2025
25	Pelatihan Representatif K3 Batch 3 Occupational Health and Safety (OHS) Representative Training, Batch 3	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	2025
26	GRC Summit Seminar & Masterclass " <i>Resilience to Sustainability: Leading Through GRC in The Post-Digital Era</i> "	CRMS Indonesia	2025
27	Workshop <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)</i> Tim Evaluasi ESG PT Pusri Palembang Environmental, Social, and Governance (ESG) Workshop for the ESG Evaluation Team of PT Pusri Palembang	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Pusat Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) – Central Office	2025
28	Pelatihan <i>Developing Audit Observation</i> Developing Audit Observation Training	The Institute Of Internal Auditors (IIA) Indonesia	2025
29	Pelatihan <i>Integrated IT System for GRC Implementation</i> Integrated IT System for GRC Implementation Training	Proxis Academy & Pihc	2025
30	Pelaksanaan EUT (<i>End User Training</i>) Fase 1 <i>ProcureX Modul SR/MR V2</i> End User Training (EUT) Phase 1	PT Pupuk Indonesia	2025
31	Pelatihan <i>Performance Coaching</i> Batch 3 s.d Batch 8	Daya Dimensi Indonesia	2025

No	Nama Kegiatan Program/Training Activity	Pemberi Sertifikasi/Pelatihan Training / Certification Provider	Tahun Pelaksanaan Year
32	Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Corruption Crime Handling Training	Arsya Yasa Indonesia	2025
33	Pelatihan <i>Enterprise Risk Management (ERM) Fundamental - Batch 2</i> Enterprise Risk Management (ERM) Fundamental Training, Batch 2	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	2025
34	Pelatihan <i>Certification of Business Management</i> Certification of Business Management Training	PT Prasetya Mulya Eli	2025
35	Pelatihan <i>Risk Management Essentials</i> Risk Management Essentials Training	CRMS Indonesia	2025

PROGRAM KERJA SPI

Kegiatan SPI dilakukan sesuai dengan standar dengan memperhatikan setiap risiko dikenali dan dikelola secara tepat, pengendalian internal dilaksanakan secara efektif; segala kebijakan, prosedur dan peraturan ditaati; serta setiap kecurangan telah diantisipasi, diidentifikasi, diinvestigasi, dan diatasi.

Hasil Audit Internal yang berupa rekomendasi untuk perbaikan dilaporkan secara periodik kepada pihak manajemen dan Komite Audit dan implementasinya dimonitor secara berkesinambungan.

SPI WORK PROGRAM

SPI activities are carried out in accordance with applicable standards, ensuring that all risks are properly identified and managed, internal controls are effectively implemented, all policies, procedures, and regulations are complied with, and any fraud is anticipated, identified, investigated, and addressed.

The results of Internal Audits, in the form of recommendations for improvement, are reported periodically to Management and the Audit Committee, and their implementation is continuously monitored.

RAPAT SPI

Sepanjang tahun 2025, SPI menyelenggarakan 12 kali rapat dengan agenda dan tingkat kehadiran masing-masing anggota SPI sebagai berikut:

SPI MEETINGS

Throughout 2025, SPI held 12 meetings. The agenda and attendance rate of each SPI member were as follows:

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance
1	21 Januari 2025 January 21, 2025	Rapat Kinerja Bulan Desember 2024 SPI dan Komite Audit SPI and Audit Committee Performance Meeting for December 2024	100%
2	21 Februari 2025 February 21, 2025	Rapat Kinerja Bulan Januari 2025 SPI dan Komite Audit SPI and Audit Committee Performance Meeting for January 2025	100%
3	14 Maret 2025 March 14, 2025	Rapat Kinerja Bulan Februari 2025 SPI dan Komite Audit SPI and Audit Committee Performance Meeting for February 2025	100%
4	17 April 2025 April 17, 2025	Rapat Kinerja Bulan Maret 2025 SPI dan Komite Audit SPI and Audit Committee Performance Meeting for March 2025	100%
5	22 Mei 2025 May 22, 2025	Rapat Kinerja Bulan April 2025 SPI dan Komite Audit SPI and Audit Committee Performance Meeting for April 2025	100%
6	17 Juni 2025 June 17, 2025	Rapat Kinerja Bulan Mei 2025 SPI dan Komite Audit SPI and Audit Committee Performance Meeting for May 2025	100%
7	18 Juli 2025 July 18, 2025	Rapat Kinerja Bulan Juni 2025 SPI dan Komite Audit SPI and Audit Committee Performance Meeting for June 2025	100%
8	19 Agustus 2025 August 19, 2025	Rapat Kinerja Bulan Juli 2025 SPI dan Komite Audit SPI and Audit Committee Performance Meeting for July 2025	100%
9	17 September 2025 September 17, 2025	Rapat Kinerja Bulan Agustus 2025 SPI dan Komite Audit SPI and Audit Committee Performance Meeting for August 2025	100%
10	20 Oktober 2025 October 20, 2025	Rapat Kinerja Bulan September 2025 SPI dan Komite Audit SPI and Audit Committee Performance Meeting for September 2025	100%

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance
11	20 November 2025 November 20, 2025	Rapat Kinerja Bulan Oktober 2025 SPI dan Komite Audit SPI and Audit Committee Performance Meeting for October 2025	100%
12	16 Desember 2025 December 16, 2025	Rapat Kinerja Bulan November 2025 SPI dan Komite Audit SPI and Audit Committee Performance Meeting for November 2025	100%

KINERJA DAN REALISASI PELAKSANAAN AUDIT 2025

Proses audit dilaksanakan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan, Manajemen Risiko, dan proses Tata Kelola Perusahaan serta melakukan penilaian efisiensi dan efektivitas atas seluruh aktivitas Perusahaan (bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya). Laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI disampaikan kepada Direktur Utama. Selanjutnya, rekomendasi dari hasil audit tersebut diperhatikan dan menjadi referensi dalam pelaksanaan tindak lanjutnya.

Berikut merupakan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SPI:

PERFORMANCE AND REALIZATION OF AUDIT IMPLEMENTATION 2025

The audit process was conducted to evaluate the effectiveness of the implementation of the Company's Internal Control System, Risk Management, and Corporate Governance processes, as well as to assess the efficiency and effectiveness of all Company activities, including finance, operations, human resources, information technology, and other functions. Audit reports issued by the Internal Audit Unit (SPI) were submitted to the President Director. The recommendations resulting from these audits were duly considered and served as references for follow-up actions.

The following outlines the realization of SPI's duties and responsibilities:

Uraian Description	Realisasi Kegiatan SPI s.d. Triwulan IV 2025 Realization of SPI Activities up to Quarter IV 2025		
	Rencana PKPT PKPT Plan	Realisasi Realization	%
Penerbitan Laporan Kegiatan Assurance: Issuance of Assurance Activity Reports:			
Audit	9	10	111
Evaluasi Evaluation	8	30	375
Konsultasi Consulting	9	23	256
Kegiatan Pendampingan (Counterpart) Assistance Activities (Counterpart)	5	13	260
Kegiatan Rapat Komite Audit/Dewan Komisaris Audit Committee / Board of Commissioners Meetings	12	12	100

Selama tahun 2025 SPI PT Pusri Palembang telah merealisasikan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebanyak 10 program pemeriksaan, 30 kegiatan evaluasi, 23 kegiatan konsultasi, serta 13 kegiatan dengan counterpart.

During 2025, the Internal Audit Unit of PT Pusri Palembang realized the Annual Audit Work Program (PKPT) comprising 10 audit programs, 30 evaluation activities, 23 consulting activities, and 13 counterpart activities.

Pemantauan Tindak Lanjut Audit Internal PKPT tahun 2024
 Monitoring of Follow-Up Actions on the 2024 PKPT Internal Audit

No	Objek Audit Audit Object	Rekomendasi PKPT PKPT Recommendations		
		Selesai Completed	Belum Outstanding	%
1	Penilaian Mandiri Kapabilitas SPI Berbasis IACM Internal Audit Capability Self-Assessment Based on the Internal Audit Capability Model (IACM)	2	0	100
2	Evaluasi SPIP Evaluation of the Internal Control System (SPIP)	3	0	100
3	Evaluasi Manajemen Risiko Evaluation of Risk Management	9	0	100
4	Aktivitas Jasa Pemeliharaan Pabrik Plant Maintenance Service Activities	28	0	100
5	Aktivitas Pengadaan Barang & Jasa Procurement of Goods and Services Activities	22	0	100
6	Proyek P-IIIB P-IIIB Project	10	0	100
7	Joint Audit atas Kegiatan Operasional di Unit Pengantongan Pupuk (UPP) Semarang Joint Audit of Operational Activities at the Semarang Fertilizer Bagging Unit (UPP Semarang)	5	0	100
8	Joint Audit atas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (PSO) di Wilayah Jateng 1 Joint Audit of Subsidized Fertilizer Distribution (PSO) in the Central Java I Region	4	0	100
Jumlah Total		83	0	100

Pemantauan Tindak Lanjut Audit Internal PKPT tahun 2025
 Monitoring of Follow-Up Actions on the 2025 PKPT Internal Audit

No	Objek Audit Audit Object	Rekomendasi PKPT PKPT Recommendations		
		Selesai Completed	Belum Outstanding	%
1	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) valuation of the Company's Internal Control System (SPIP)	0	3	0
2	Evaluasi Manajemen Risiko Terintegrasi Evaluation of Integrated Risk Management	0	9	0
3	Pelaksanaan Pemeliharaan Pabrik Implementation of Plant Maintenance	25	3	89
4	UPP Cilacap Cilacap Fertilizer Marketing Unit (UPP Cilacap)	11	6	65
5	Joint Audit Pupuk Curah Bulk Fertilizer Joint Audit	8	6	57
6	Proyek Pembangunan Pusri - IIIB Pusri IIIB Development Project	0	3	0
Jumlah Total		44	30	59

Keterangan | Note:
 Terdapat 30 rekomendasi yang belum melampaui target date dengan status Belum Selesai.
 There are 30 recommendations that have not exceeded the target date with the status Outstanding.

EVALUASI KINERJA KOMPARTEMEN SPI

Kinerja SPI diukur dan dinilai dari pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) secara tahunan dan merupakan bentuk kontrak manajemen dengan Direktur Utama. Untuk dapat memastikan bahwa tindak lanjut atau langkah perbaikan atas hasil audit atau hasil review/evaluasi wajib dilaksanakan oleh auditee dan/atau pihak terkait tertuang dalam laporan hasil audit dan laporan hasil review/evaluasi. Tanggung jawab SPI adalah melakukan pemantauan dan penilaian atas tindak perbaikan yang dilakukan oleh auditee, serta melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, termasuk jika auditee belum dapat melakukan tindak lanjut.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) adalah suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan Perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga jalannya Perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan Perusahaan, mendorong efisiensi serta memastikan dipatuhinya peraturan Perusahaan.

SPIP yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi Top Management untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan PUSRI yang lebih efektif pula.

SPIP berfungsi sebagai pengatur sumber daya yang telah ada untuk dapat difungsikan secara optimal guna memperoleh nilai tambah yang maksimal dengan pendekatan perancangan yang menggunakan asas Cost-Benefit.

Tujuan penerapan SPIP dalam Perusahaan adalah untuk menghindari adanya penyimpangan dari prosedur, laporan keuangan Perusahaan dapat dipercaya dan kegiatan Perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa PUSRI berusaha untuk menghindari risiko dari penerapan sistem.

PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Dalam pelaksanaannya, fungsi pengendalian internal harus selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan Perusahaan, Pemegang Saham, dan Pemangku Kepentingan sesuai dengan kerangka yang digariskan dalam visi, misi dan tujuan Perusahaan.

EVALUATION OF SPI COMPARTMENT PERFORMANCE

The performance of the Internal Audit Unit (SPI) is measured and evaluated annually based on the achievement of Key Performance Indicators (KPIs), which serve as a form of management contract with the President Director. To ensure that follow-up actions or corrective measures arising from audit findings or review/evaluation results are properly implemented, such actions are stipulated in audit reports and review/evaluation reports and must be carried out by the auditee and/or related parties. The responsibility of the Internal Audit Unit is to monitor and assess the corrective actions undertaken by the auditee, and to report the results of such follow-up monitoring to the President Director and the Board of Commissioners, including instances where the auditee has not yet been able to implement the required follow-up actions.

COMPANY INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company's Internal Control System (SPIP) is a business or social system implemented by the Company, consisting of organizational structure, methods, and measures designed to safeguard and direct the Company's operations in alignment with its objectives and programs, while promoting efficiency and compliance with management policies.

A reliable and effective SPIP provides accurate information to Top Management to support sound decision-making and policy formulation in achieving PUSRI's objectives more effectively.

SPIP functions to regulate existing resources so they can be utilized optimally to generate maximum returns (gains), based on a Cost-Benefit approach in its design.

The objective of implementing SPIP within the Company is to prevent deviations from procedures, ensure the reliability of the Company's financial statements, and ensure that Company activities comply with applicable laws and regulations. This demonstrates PUSRI's commitment to mitigating risks arising from system implementation.

IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM

In its implementation, the internal control function must consistently consider the interests of the Company, Shareholders, and Stakeholders in accordance with the framework outlined in the Company's vision, mission, and objectives.

Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dilaksanakan dengan pendekatan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions* (COSO). Tujuan SPIP adalah mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Secara garis besar, SPIP yang dilaksanakan di PUSRI, mencakup:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur.
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha.
3. Aktivitas pengendalian.
4. Sistem informasi dan komunikasi.
5. *Monitoring* dalam implementasi secara operasional dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai kebijakan berupa Pedoman, Petunjuk Operasional, maupun Instruksi Kerja.

PENGENDALIAN ATAS PELAKSANAAN OPERASIONAL DAN PELAPORAN KEUANGAN

Penerapan pengendalian keuangan dan operasional dilakukan secara berjenjang meliputi seluruh elemen yang terdapat di Perusahaan. Pengendalian Keuangan dan Operasional yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah dengan melakukan pengawasan dan penasihatian terkait proses kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit. Sedangkan Direksi menerapkan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan melalui penerapan kebijakan dan prosedur Perusahaan secara konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, antara lain terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan dan manajemen risiko, rencana strategis, pembagian tugas, pendelegasian wewenang serta kebijakan akuntansi yang memadai.

Direksi menetapkan suatu SPIP yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, integritas yang tinggi, nilai etika serta kompetensi pegawai.

SPI merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Saham yang bertanggung jawab di dalam melaksanakan audit internal di Perusahaan, SPI melakukan upaya peningkatan pengendalian internal (*internal control*) dalam pelaporan keuangan berbagai kegiatan operasional Perusahaan. Pengendalian internal di lingkungan Perusahaan senantiasa dievaluasi agar mampu mengikuti perkembangan usaha Perusahaan.

The development of the Company's Internal Control System adopts the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) framework. The objective of SPIP is to safeguard the Company's investments and assets. Broadly, SPIP as implemented at PUSRI includes:

1. A disciplined and structured internal control environment within the Company.
2. Business risk assessment and management.
3. Control activities.
4. Information and communication systems.
5. Monitoring mechanisms, which in operational implementation are further elaborated into various policies such as Guidelines, Operational Instructions, and Work Instructions.

CONTROL OVER OPERATIONAL IMPLEMENTATION AND FINANCIAL REPORTING

The implementation of financial and operational controls is carried out in a tiered manner across all elements of the Company. Financial and operational control exercised by the Board of Commissioners includes supervisory and advisory functions regarding the adequacy and fairness of financial statement preparation and risk management, based on prudential principles, assisted by the Audit Committee. Meanwhile, the Board of Directors implements the Company's Internal Control System through the consistent application of Company policies and procedures and compliance with applicable regulations, including those relating to business activities and risk management, strategic planning, division of duties, delegation of authority, and adequate accounting policies.

The Board of Directors establishes an effective SPIP to safeguard the Company's investments and assets. The internal control environment is implemented in a disciplined and structured manner, with high integrity, ethical values, and employee competence.

SPI forms part of the Company's Internal Control System (SPIP) and was established to assist the President Director in fulfilling obligations to Shareholders. In conducting internal audits, SPI seeks to strengthen internal controls in financial reporting and various operational activities. Internal controls within the Company are continuously evaluated to keep pace with business developments.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

SPIP ini memiliki peran sebagai pengawas atas seluruh aktivitas Perusahaan, memberikan pandangan objektif serta kepastian hasil evaluasi adanya efektivitas dalam menjalankan baik manajemen risiko maupun pelaksanaan manajemen operasional pada setiap unit Kerja.

PUSRI melakukan analisis laporan hasil audit secara periodik tahunan dan mengelompokkan hasil audit sesuai dengan kategori sasaran (objectives) dan komponen dalam kerangka COSO. Dengan demikian, Perusahaan dapat melakukan peningkatan (*improvement*) untuk komponen-komponen yang memerlukannya secara terarah. Analisis hasil audit tersebut juga dilakukan untuk mengukur keefektifan dari pencapaian sasaran Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (operasional, keakurasian/ keandalan laporan-laporan Perusahaan, serta kepatuhan terhadap aturan perundangan yang berlaku).

Kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak. Semua pihak yang terlibat dalam struktur organisasi Perusahaan harus mencerminkan adanya pemisahan fungsi yang jelas sehingga dapat meminimalkan angka risiko penyimpangan. Kegiatan pengendalian pada PUSRI pada tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan Audit terhadap kinerja unit kerja atau aktivitas operasional Perusahaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan di tahun 2025.
2. Melaksanakan evaluasi SPIP secara rutin setiap tahunnya.
3. Melakukan peran konsultasi dan fungsi *counterpart* untuk kegiatan rutin tahunan dan auditor eksternal

SPI menerapkan metodologi audit berbasis risiko. Melalui metodologi ini pelaksanaan audit lebih difokuskan untuk evaluasi dan pemberian rekomendasi terhadap sistem pengendalian intern atas aktivitas bisnis Perusahaan yang berisiko tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi yang berlangsung, pada tahun 2025 SPI telah memberikan rekomendasi perbaikan pengendalian internal kepada manajemen untuk area-area yang masih memerlukan perbaikan, antara lain:

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

SPIP serves as a supervisory mechanism over all Company activities, providing objective insight and assurance regarding the effectiveness of risk management and operational management implementation across each work unit.

PUSRI conducts an annual periodic analysis of audit reports and classifies audit findings according to objectives and components within the COSO framework. This enables the Company to implement targeted improvements for components requiring enhancement. The analysis also measures the effectiveness of achieving SPIP objectives, including operational performance, the accuracy and reliability of Company reports, and compliance with applicable laws and regulations.

Control activities aim to ensure that supervisory mechanisms operate effectively and continuously, involving all relevant parties. All individuals within the Company's organizational structure must reflect a clear segregation of duties to minimize the risk of deviations. Control activities at PUSRI in 2023 included, among others:

1. Conducting audits of work unit performance or operational activities in accordance with the Annual Audit Work Program (PKPT) established in 2025.
2. Performing routine annual evaluations of the Company's Internal Control System (SPIP).
3. Carrying out consulting roles and counterpart functions for annual routine activities and external auditors.

SPI applies a risk-based audit methodology. Through this methodology, audit activities are focused on evaluating and providing recommendations on internal control systems for high-risk business activities.

Based on the evaluation results conducted in 2025, SPI provided recommendations for improvements to internal controls to Management in areas that still require enhancement, including:

Lingkungan Pengendalian

Control Environment

Berdasarkan hasil *review* yang dilakukan terhadap 7 (tujuh) aspek dengan 28 (dua puluh delapan) kriteria dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan ke-tujuh aspek tersebut masuk dalam kategori '**Sangat Baik**' dengan capaian nilai **28,92** dari skor maksimal 30 atau **96,40%**, namun masih terdapat dua kriteria penilaian pada aspek penegakan integritas dan nilai etika serta pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan yang masih perlu ditingkatkan.

Departemen Tata Kelola agar memutakhirkan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang dibubuhi tanda tangan Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat saat ini.

Based on the review conducted on 7 (seven) aspects with 28 (twenty-eight) criteria, it can be concluded that, in general, the implementation of all seven aspects falls into the "**Very Good**" category, achieving a score of **28,92** out of a maximum score of 30, or **96,40%**. However, two assessment criteria under the aspects of enforcing integrity and ethical values, as well as establishing an organizational structure aligned with operational needs, still require improvement.

The Governance Department is advised to update the Code of Ethics and Conduct, duly signed by the currently serving Board of Commissioners and Board of Directors.

Penilaian Risiko

Risk Assessment

Berdasarkan hasil *review* yang dilakukan terhadap 4 (empat) aspek dengan 16 (enam belas) kriteria dapat disimpulkan bahwa penerapan keempat aspek tersebut masuk dalam kategori '**Sangat Baik**' dengan capaian nilai 19,72 dari skor maksimal 20 atau 98,60%, namun demikian, dapat disampaikan bahwa skor dari seluruh aspek tidak mencapai 100% karena:

1. Berdasarkan pengisian kuesioner, terdapat beberapa responden yang menjawab negatif sehingga mengurangi skor penilaian.
2. Berdasarkan *reviu* terhadap dokumen identifikasi risiko (*risk register*) diketahui unit kerja sudah melakukannya dengan baik, namun ada risiko yang belum dipertimbangkan sesuai dengan kriteria penilaian yaitu:
 - a. Risiko yang timbul dari perubahan kebutuhan atau harapan badan legislatif
 - b. Risiko yang timbul dari terorisme

Departemen Manajemen Risiko agar mempertimbangkan risiko yang timbul dari perubahan kebutuhan atau harapan badan legislatif dan risiko terorisme.

Based on the review conducted on 4 (four) aspects with 16 (sixteen) criteria, it can be concluded that the implementation of all four aspects falls into the "**Very Good**" category, achieving a score of 19,72 out of a maximum score of 20, or 98,60%. Nonetheless, it can be conveyed that the scores across all aspects did not reach 100% due to:

1. Based on the questionnaire responses, some respondents provided negative answers, thereby reducing the assessment score.
2. Based on the review of the risk identification documents (*risk register*), it is noted that the work units have performed well; however, certain risks have not been considered in accordance with the assessment criteria, namely:
 - a. Risks arising from changes in the needs or expectations of legislative bodies
 - b. Risks arising from terrorism

The Risk Management Department is advised to consider risks stemming from changes in legislative bodies' needs or expectations, as well as terrorism risks.

Kegiatan Pengendalian

Control Activities

Berdasarkan hasil *review* yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) aspek dengan 21 (dua puluh satu) kriteria dapat disimpulkan bahwa penerapan kesepuluh aspek tersebut masuk dalam kategori '**Sangat Baik**' dengan capaian nilai **19,63** dari skor maksimal 20 atau **98,15%**. Tidak terdapat aspek yang penerapannya memerlukan perbaikan.

Based on the review conducted on 10 (ten) aspects with 21 (twenty-one) criteria, it can be concluded that the implementation of all ten aspects falls into the "**Very Good**" category, achieving a score of 19,63 out of a maximum score of 20, or 98,15%. There are no aspects requiring improvement.

Informasi dan Komunikasi

Information and Communication

Berdasarkan hasil *review* yang dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek dengan 7 (tujuh) kriteria dapat disimpulkan bahwa penerapan ketiga aspek tersebut masuk dalam kategori '**Sangat Baik**' dengan capaian nilai **14,77** dari skor maksimal 15 atau **98,44%**. Tidak terdapat aspek yang penerapannya memerlukan perbaikan.

Based on the review conducted on 3 (three) aspects with 7 (seven) criteria, it can be concluded that the implementation of all three aspects falls into the "**Very Good**" category, achieving a score of **14,77** out of a maximum score of 15, or **98,44%**. There are no aspects requiring improvement.

Pemantauan

Monitoring

Berdasarkan hasil review yang dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek dengan 13 (tiga belas) kriteria dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan ketiga aspek tersebut termasuk kategori 'Sangat Baik' dengan capaian nilai 14,87 dari skor maksimal 15 atau 99,14%, namun dapat disampaikan bahwa skor dari seluruh aspek tidak mencapai 100% karena:

1. Berdasarkan kuesioner, terdapat beberapa responden yang menjawab negatif sehingga mengurangi skor penilaian.
2. Berdasarkan reviu terhadap dokumen, diketahui bahwa SK/DIR/O60/2025 tanggal 23 Februari 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Aset di Lingkungan Kompartemen Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, belum mengatur terkait pengecekan fisik seluruh aset secara berkala dan pelaporannya.

Departemen Sarana dan Umum agar merevisi SK/DIR/O60/2025 tanggal 23 Februari 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Aset di Lingkungan Kompartemen Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dengan mencantumkan aturan terkait pengecekan fisik seluruh aset secara berkala dan pelaporannya.

Based on the review conducted on 3 (three) aspects with 13 (thirteen) criteria, it can be concluded that, in general, the implementation of all three aspects falls into the "Very Good" category, achieving a score of 14,87 out of a maximum score of 15, or 99,14%. Furthermore, it should be noted that the scores across all aspects did not reach 100% because:

1. According to the questionnaires, some respondents answered negatively, thus lowering the evaluation score.
2. Based on the review of the document, it was found that SK/DIR/O60/2025 dated February 23, 2025, concerning the Asset Management Guidelines in the General Department environment of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, does not yet include provisions regarding periodic physical verification of all assets and their reporting.

The Facilities and General Affairs Department is advised to revise SK/DIR/O60/2025 dated February 23, 2025, concerning the Asset Management Guidelines in the General Department environment of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, to include provisions regarding periodic physical verification of all assets and their reporting.

Hasil evaluasi tersebut yang kemudian menjadi dasar evaluasi manajemen terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian internal untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pengelolaan Perusahaan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan.

The evaluation results serve as the basis for Management's assessment of the effectiveness of the implementation of the internal control system, in order to carry out improvements and enhance the quality of Company management, thereby minimizing the occurrence of irregularities.

PERNYATAAN DIREKSI/ DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Dewan Komisaris senantiasa memastikan kecukupan pengendalian internal, perihal tersebut dituangkan dalam Surat Dewan Komisaris kepada Direksi PT Pusri No.S-67/DEKOM/PUSRI/XII/2024 perihal Telaah atas Kebijakan/ Rancangan Sistem Pengendalian Intern Nomor SK/DIR/263/2016 Serta Telaah Pelaksanaan Hasil Evaluasi Atas Efektivitas Pengendalian Intern Pada Tingkat Operasional.

Dalam rangka optimalisasi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, agar dilakukan evaluasi efektivitas penerapan sistem pengendalian internal secara berkesinambungan. Evaluasi dititikberatkan pada aktivitas fungsional dan proses bisnis yang memiliki risiko tinggi baik karena adanya perubahan kondisi internal dan eksternal ataupun terkait perkembangan usaha PUSRI yang terus berjalan.

Berdasarkan evaluasi Dewan Komisaris, Penerapan SPIP PUSRI berada pada tingkat kecukupan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa SPIP yang diterapkan PUSRI telah distandarisasi dan secara periodik dievaluasi, sehingga aspek-aspek setiap komponen dapat terpenuhi atau

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS / BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Commissioners continuously ensures the adequacy of internal controls. This is reflected in the Board of Commissioners' Letter to the Board of Directors of PT Pusri No. S-67/DEKOM/PUSRI/XII/2024 concerning the Review of the Internal Control System Policy/Draft No. SK/DIR/263/2016 and the Review of the Implementation of the Evaluation Results on the Effectiveness of Internal Control at the Operational Level.

In optimizing the implementation of Good Corporate Governance, evaluations of the effectiveness of the internal control system should be conducted on an ongoing basis. The evaluation should focus on functional activities and business processes that carry high risks, whether due to changes in internal and external conditions or in relation to the continuing development of PUSRI's business.

Based on the evaluation conducted by the Board of Commissioners, the implementation of PUSRI's Internal Control System is at an adequate and satisfactory level. This indicates that the SPIP implemented by PUSRI has been standardized and periodically evaluated, so that the

mendekati *best practices* penerapan sistem pengendalian internal. Meskipun pada setiap komponen SPIP masih terdapat penerapan yang memerlukan perbaikan dan peningkatan, antara lain:

1. Karyawan belum seluruhnya mengetahui kode etik mengenai perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.
2. Budaya kerja untuk mencapai tujuan Perusahaan belum seutuhnya dibangun.
3. Perusahaan belum memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh karyawan telah menerima pelatihan yang tepat dan berkesinambungan
4. Dari hasil survei, sebagian karyawan beranggapan pimpinan Perusahaan hanya berorientasi pada pencapaian hasil jangka pendek.
5. Risiko yang timbul dari perubahan kondisi ekonomi dan sosial telah dimitigasi, namun risiko terkait politik dan budaya belum dipertimbangkan.
6. Karyawan yang bertanggung jawab atas catatan pengendalian atas aset belum melaporkan catatan pengendalian aset di unit kerjanya secara rutin/periodik.
7. Belum semua pimpinan unit kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil audit sesuai target waktu yang ditetapkan.

AUDIT EKSTERNAL

Penunjukan Akuntan Publik

Penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) didasarkan pada kebutuhan PUSRI terkait pelaksanaan audit laporan keuangan selama periode tertentu oleh pihak independen. KAP bertugas menguji komponen dalam laporan keuangan untuk memastikan kewajaran dalam perhitungan dan pencatatan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan PUSRI serta memastikan kesesuaiannya dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum dan memberikan pendapat tentang kewajaran dan kesesuaian Laporan Keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

PUSRI mensyaratkan Kantor Akuntan Publik harus terbebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perusahaan, serta Perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan dalam proses audit eksternal sehingga memungkinkan Auditor Publik memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Penggunaan jasa akuntan Publik yang termasuk ke dalam auditor eksternal dibutuhkan untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal material,

aspects of each component are fulfilled or approaching best practices in internal control system implementation. Nevertheless, within each SPIP component there remain areas requiring improvement and enhancement, including:

1. Not all employees are aware of the Code of Ethics concerning acceptable and unacceptable conduct.
2. The work culture to achieve the Company's objectives has not been fully established.
3. The Company does not yet have a mechanism to ensure that all employees receive appropriate and continuous training.
4. Based on survey results, some employees perceive that Company leadership is oriented solely toward short-term results.
5. Risks arising from changes in economic and social conditions have been mitigated; however, risks related to political and cultural factors have not yet been considered.
6. Employees responsible for asset control records have not reported asset control records within their respective work units on a routine or periodic basis.
7. Not all work unit leaders have followed up on audit recommendations within the stipulated target timelines.

EXTERNAL AUDIT

Appointment of Public Accountant

The engagement of a Public Accounting Firm (KAP) is based on PUSRI's need for the audit of its financial statements for a specific period by an independent party. The KAP is responsible for examining the components of the financial statements to ensure the fairness of calculations and financial records presented in PUSRI's financial statements, ensuring compliance with generally accepted financial accounting standards, and providing an opinion on the fairness and conformity of the Financial Statements with generally accepted accounting principles in Indonesia.

PUSRI requires that the Public Accounting Firm be free from the influence of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and any parties with interests in the Company. The Company is obliged to provide all accounting records and supporting data necessary for the external audit process, enabling the Public Accountant to issue an opinion on the fairness, compliance, and conformity of the Company's financial statements with Indonesian Financial Accounting Standards.

The services of a Public Accountant, as an external auditor, are required to express an opinion on whether, in all material respects, the financial position, results

posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pada dasarnya, pernyataan akuntan Publik merupakan pendapat pihak ketiga yang independen mengenai kewajaran laporan Keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham Perseroan maupun *stakeholders* lainnya menyangkut hal-hal yang material yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut.

Kantor akuntan Publik yang memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 ditetapkan melalui Rapat umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite audit.

Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan setiap level pejabat Perseroan.

Tanggung jawab Komite Audit dalam pemberian rekomendasi atas penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal

Komite Audit melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Eksternal Auditor serta mengusulkan penunjukan/pemberhentian Kantor Akuntan Publik.

Pada tahun 2025, Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan ditunjuk sebagai auditor eksternal PT PUSRI Palembang berdasarkan Surat Perjanjian (SP) No. EL202602040002/HWO/HWO & No. 00153/A/PA/A0102/SP/2026 tanggal 04 Februari 2026 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 39809/A/PL/FO202/ET/2025 tanggal 17 November 2025 yang pelaksanaannya terhitung mulai tanggal 17 November 2025 sampai dengan laporan terbit pada tanggal 31 Mei 2026.

Hasil evaluasi /penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit yang dilakukan oleh eksternal auditor Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan) dapat disimpulkan:

- 1.** Pelaksanaan kegiatan audit sejalan dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan menunjukkan independensi serta objektivitas yang tinggi.
- 2.** Finalisasi laporan diselesaikan sesuai jadwal yang disepakati berdasarkan surat perjanjian.
- 3.** Komunikasi Auditor dengan Komite Audit berjalan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Komite Audit mengajukan permohonan persetujuan Pemegang Saham untuk menetapkan kembali KAP Rintis, Jumadi, Rianto

of operations, changes in equity, and cash flows are presented in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia. In essence, the Public Accountant's statement represents the opinion of an independent third party regarding the fairness of the Financial Statements, addressed to the Company's shareholders and other stakeholders concerning material matters disclosed therein.

The Public Accounting Firm appointed to audit the Company's financial statements for fiscal year 2025 was determined through the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), based on the recommendation of the Board of Commissioners and the Audit Committee.

To ensure independence and the quality of audit results, the appointed external auditor must not have any conflict of interest with officials at any level within the Company.

Responsibilities of the Audit Committee in Recommending the Appointment and Dismissal of the External Auditor

The Audit Committee evaluates the effectiveness of the audit conducted by the External Auditor and proposes the appointment or dismissal of the Public Accounting Firm.

In 2025, KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan was appointed as the external auditor of PT PUSRI Palembang based on Agreement Letter (SP) No. EL202602040002/HWO/HWO and No. 00153/A/PA/A0102/SP/2026 dated February 4, 2026, and the Notice to Proceed (SPMK) No. 39809/A/PL/FO202/ET/2025 dated November 17, 2025. The engagement period commenced on November 17, 2025, and continued until the issuance of the audit report on May 31, 2026.

The results of the evaluation/assessment of the effectiveness of the audit conducted by the external auditor, KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, may be summarized as follows:

- 1.** The audit activities were conducted in accordance with Public Accountant Professional Standards (SPAP) and demonstrated a high level of independence and objectivity.
- 2.** The finalization of the audit report was completed according to the agreed schedule as stipulated in the engagement letter.
- 3.** Communication between the Auditor and the Audit Committee was effective.

Based on the above, the Audit Committee requested Shareholder approval to reappoint KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan (now Public Accounting Firm

& Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Laporan Keuangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun Buku 2026 PT Pusri dengan biaya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya atau maksimal sebesar Rp2.115.000.000,00 (termasuk PPN).

Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of Micro and Small Enterprises (UMK) for Fiscal Year 2024 of PT Pusri, at a lower fee than the previous year or at a maximum of Rp2,359,860,000.00 (including VAT).

Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP)

PUSRI menggunakan jasa auditor eksternal untuk memastikan integritas penyajian Laporan Keuangan kepada Pemegang Saham. Penunjukan penugasan KAP sebagai pelaksana audit penyajian Laporan Keuangan PUSRI dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Pada tahun 2025, Perusahaan menunjuk KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan sebagai pelaksana audit eksternal yang melakukan audit laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025

Examination by the Public Accounting Firm (KAP)

PUSRI engages the services of an external auditor to ensure the integrity of the presentation of its Financial Statements to the Shareholders. The appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to conduct the audit of PUSRI's Financial Statements is made based on a resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS). In 2025, the Company appointed KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan as its external auditor to audit the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2025.

Akuntan Publik Tahun 2025

Public Accountant – 2025

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	KAP Rintis, Jumadi, Rianto, dan Rekan
Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm License	Keputusan Menteri Keuangan RI No.315/KM.1/2024 Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.315/KM.1/2024
Izin Usaha Akuntan Publik Public Accountant License	Keputusan Menteri Keuangan RI No. 900/KM.1/2016 Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 900/KM.1/2016
Akuntan Publik Public Accountant	Yanto
Tahun Audit Audit Year	Tahun Buku 2025
Periode Penugasan Engagement Period	2025
Ruang Lingkup Pekerjaan Scope of Work	- Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Pusri Palembang untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. - Laporan Auditor Independen atas Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. - Laporan <i>Management Letter</i> atas Pengendalian Internal pada PT Pusri Palembang untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. - Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang disepakati terhadap Penilaian Tingkat Pencapaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Direksi Kolegial dan Individu Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. - Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (UMK) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. - Independent Auditor's Report on the Financial Statements of PT Pusri Palembang for the year ended December 31, 2025. - Independent Auditor's Report on the Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control for the year ended December 31, 2025. - Management Letter on Internal Control at PT Pusri Palembang for the year ended December 31, 2025 - Independent Accountant's Report on Agreed-Upon Procedures regarding the Assessment of the Achievement Level of the Key Performance Indicators (KPI) of the Collegial Board of Directors and Individual Directors of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang for the year ended December 31, 2025. - Independent Auditor's Report on the Financial Statements for the Implementation of the Micro and Small Enterprise (UMK) Funding Program of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang for the year ended December 31, 2025.

Opini atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Opinion on the Consolidated Financial Statements

Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
Fair in all material aspects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2025, and its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Biaya
Fee

Rp2.115.000.000,- (Include PPN)
(including VAT)

**RIWAYAT PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN
PUBLIK**

**HISTORY OF APPOINTMENT OF PUBLIC
ACCOUNTING FIRMS**

**Jumlah Periode Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik (KAP)**

Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan PUSRI sepanjang tahun 2018–2025, sebagai berikut:

**Number of Engagement Periods of the Public
Accountant and Public Accounting Firm (KAP)**

The Public Accounting Firms that have audited PUSRI's Financial Statements during the period 2018–2025 are as follows:

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Biaya (Rp) Fee (Rp)	Opini Opinion
2025	KAP Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan	Yanto, CPA Izin Praktik Akuntan Publik No. AP 0241	Rp2.115.000.000,-	Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Fairly presented, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2025, as well as its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
2024	KAP Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan	Heryanto, CPA Izin Praktik Akuntan Publik No. AP 1784 Public Accountant Practice License No. AP 1784	Rp2.359.860.000,-	Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian group tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Fairly presented, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2024, as well as its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Biaya (Rp) Fee (Rp)	Opini Opinion
2023	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan	Toto Harsono Izin Praktik Akuntan Publik No. AP 1122 Public Accountant Practice License No. AP 1122	Rp2.354.310.000,-	Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Fairly presented, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, as well as its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
2022	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan	Heryanto, CPA Izin Praktik Akuntan Publik No. AP 1784 Public Accountant Practice License No. AP 1784	2.218.890.000	Wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, Nilai AAA untuk Tingkat Kesehatan Perusahaan Fairly presented, in all material respects, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; AAA rating for Company Health Level.
2021	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan	Toto Harsono Izin Praktik Akuntan Publik No. AP 1122 Public Accountant Practice License No. AP 1122	2.171.400.000	Wajar dalam semua hal yang material, Nilai A untuk Kinerja Perusahaan Fairly presented, in all material respects; A rating for Company Performance.
2020	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan	Yusron Fauzan	2.043.800.000	Wajar dalam semua hal yang material, Nilai A untuk Kinerja Perusahaan Fairly presented, in all material respects; A rating for Company Performance.

Tugas Pokok Audit Eksternal

KAP mempunyai tugas pokok sebagai akuntan publik yang melaksanakan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Audit juga menilai laporan keuangan secara keseluruhan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditentukan. Selain melakukan audit terhadap Laporan Keuangan, KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan juga melakukan jasa reviu Prosedur yang disepakati (*Agreed Upon Procedure*) terkait laporan Komposit Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan.

Primary Duties of the External Auditor

The Public Accounting Firm (KAP) performs its primary duties as a public accountant in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). These standards require public accountants to plan and conduct audits to obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement. The audit also includes an overall assessment to ensure that the financial statements are presented in accordance with the applicable accounting principles. In addition to auditing the Financial Statements, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan (now Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan) also provides Diagnostic services for Internal Control over Financial Reporting (ICoFR).

Hasil Penilaian

Hasil audit keuangan oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan) menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasi PT PUSRI Palembang telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Oleh Akuntan Publik

Komite Audit berkoordinasi dengan Internal Audit melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal untuk memastikan bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ditetapkan untuk meningkatkan kinerja baik keuangan maupun operasional. Manajemen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang telah berupaya menindaklanjuti setiap temuan audit oleh Kantor Akuntan Publik sehingga secara efektif pelaksanaan audit berjalan dengan lancar.

Assessment Results

The financial audit conducted by KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan concluded that the consolidated financial statements of PT PUSRI Palembang present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2025, as well as its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with the Financial Accounting Standards of Indonesia.

Effectiveness of the Audit Implementation by the Public Accountant

The Audit Committee, in coordination with the Internal Audit function, conducts a review of the effectiveness of the external audit implementation to ensure that all findings are followed up in accordance with the established authority, with the objective of improving both financial and operational performance. The Management of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang has made efforts to follow up on each audit finding by the Public Accounting Firm, thereby ensuring that the audit process is carried out effectively and smoothly.

TATA KELOLA & MANAJEMEN RISIKO

GOVERNANCE & RISK MANAGEMENT

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance-GCG*), PUSRI, terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan Manajemen Risiko sebagai salah satu fungsi pengendali atas terjadinya beragam risiko insiden yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan. Untuk itu PUSRI menjalankan proses identifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi seluruh potensi risiko yang ada, dan menjadikannya sebagai *early warning system* dalam memastikan tercapainya sasaran kinerja dan tujuan jangka panjang Perusahaan.

Setiap unit di Perusahaan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pelaporan atas risiko risiko yang berpotensi menyebabkan tidak tercapainya tujuan Perusahaan. Penerapan manajemen risiko yang berkualitas dapat meningkatkan Shareholder value, sekaligus memberikan gambaran komprehensif kepada *stakeholders* maupun pengelola Perusahaan mengenai terdapatnya potensi peluang yang dapat diraih maupun potensi kerugian yang dapat dihindari, sehingga dengan demikian pengambil keputusan dan pembuat kebijakan internal memiliki ketersediaan data dan informasi mengenai kinerja Perusahaan, serta memungkinkan pembuatan keputusan yang lebih efektif dan efisien.

DASAR PELAKSANAAN DAN PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO

Pelaksanaan Manajemen Risiko didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

1. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi (MRT) Nomor: SK/DIR/419/2024 tanggal 01 Oktober 2024.
2. Pedoman Penyusunan Kajian Risiko Aksi Korporasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang SK/DIR/183/2025 Nomor Pedoman: PSP-TKR-PD-010 tanggal 26 Juni 2025.
3. Pedoman Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha/ *Business Continuity Management System* (BCMS) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang SK/DIR/120/2025 Nomor Pedoman : PSP-TKR-PD-008 tanggal 08 April 2025.
4. SK/DIR/111/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Pemberlakuan Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) tentang Penyusunan Rencana Darurat (*Contingency Plan*) Nomor: 135/A/HK/1/DO100/SK/2024 tanggal 03 Desember 2024 di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
5. Prosedur *Business Continuity Plan* (BCP) Nomor : PSP-TKR-PR-004 tanggal 08 April 2025.

In order to improve the quality of the implementation of Good Corporate Governance (GCG), PUSRI continues to enhance the quality of Risk Management implementation as one of the control functions against various risk incidents that may affect the Company's performance. For this purpose, PUSRI carries out processes to identify, measure, monitor, and mitigate all potential risks, and uses them as an early warning system to ensure the achievement of the Company's performance targets and long-term objectives.

Each unit within the Company conducts identification, measurement, monitoring, and reporting of risks that may potentially prevent the achievement of the Company's objectives. The implementation of high-quality risk management can increase shareholder value while providing a comprehensive overview to stakeholders and Company management regarding potential opportunities that can be pursued and potential losses that can be avoided. In this way, decision-makers and internal policy makers have access to data and information on the Company's performance, enabling more effective and efficient decision-making.

BASIS OF IMPLEMENTATION AND RISK MANAGEMENT GUIDELINES

The implementation of Risk Management is based on Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

1. Integrated Risk Management (IRM) Implementation Guidelines No. SK/DIR/419/2024 dated October 1, 2024.
2. Guidelines for the Preparation of Corporate Action Risk Assessment of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK/DIR/183/2025, Guideline No. PSP-TKR-PD-010 dated June 26, 2025.
3. Business Continuity Management System (BCMS) Guidelines of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK/DIR/120/2025, Guideline No. PSP-TKR-PD-008 dated April 8, 2025.
4. Decree No. SK/DIR/111/2025 dated March 24, 2025 concerning the enactment of the Board of Directors' Decree of PT Pupuk Indonesia (Persero) regarding the Preparation of Contingency Plans No. 135/A/HK/1/DO100/SK/2024 dated December 3, 2024 at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
5. Business Continuity Plan (BCP) Procedure No. PSP-TKR-PR-004 dated April 8, 2025.

6. Prosedur Sistem Informasi Manajemen Risiko PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor : PSP-TKR-PR-002 tanggal 02 Januari 2025.
 7. Prosedur Pelaksanaan Manajemen Risiko Proyek Pusri-IIIB PT Pusri Palembang Nomor:PSP-P3B-PR-003 tanggal 31 Desember 2024.
 8. Prosedur *Risk Opportunity Assessment* Sisman Terintegrasi Nomor: PSP-IMS-PR-003 tanggal 13 Februari 2023.
 9. Prosedur *Risk Based Budgeting* (RBB) PT Pusri Palembang Nomor : PSP-STK-PR-059 tanggal 13 Desember 2021.
6. Risk Management Information System Procedure of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. PSP-TKR-PR-002 dated January 2, 2025.
 7. Risk Management Implementation Procedure for the Pusri-IIIB Project of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. PSP-P3B-PR-003 dated December 31, 2024.
 8. Risk Opportunity Assessment Procedure for the Integrated Management System No. PSP-IMS-PR-003 dated February 13, 2023.
 9. Risk-Based Budgeting (RBB) Procedure of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. PSP-STK-PR-059 dated December 13, 2021.

ORGANISASI TATA KELOLA & MANAJEMEN RISIKO

PUSRI membentuk Kompartemen Tata Kelola & Manajemen Risiko sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko yang sejalan dengan semangat akuntabilitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Perusahaan kemudian menunjuk Junaedi sebagai SVP Tata Kelola & Manajemen Risiko. Adapun struktur organisasi Kompartemen Tata Kelola dan Manajemen Risiko digambarkan dalam bagan di bawah ini.

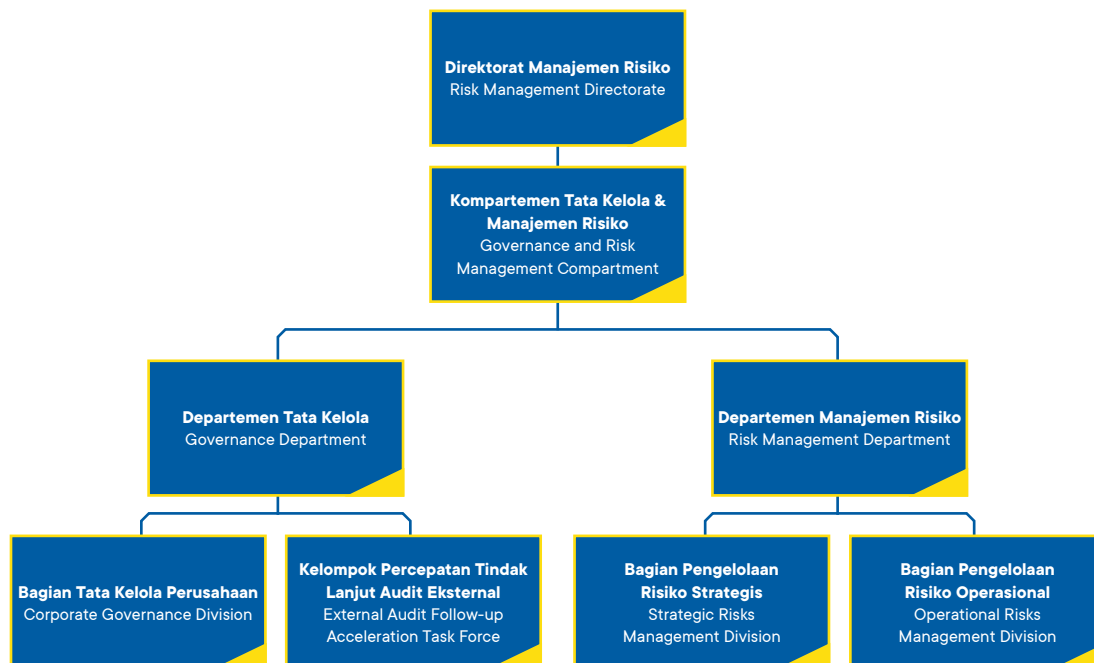
GOVERNANCE & RISK MANAGEMENT ORGANIZATION

PUSRI has established the Governance & Risk Management Compartment as a form of commitment to implementing risk management in line with the spirit of accountability and in accordance with the principles of GCG.

The Company then appointed Junaedi as SVP of Governance & Risk Management. The organizational structure of the Governance & Risk Management Compartment is illustrated in the chart below.

Struktur Organisasi Departemen Tata Kelola & Manajemen Risiko

Organizational Structure of the Governance & Risk Management Department



TUGAS DAN FUNGSI TATA KELOLA & MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan telah mengatur tugas dan fungsi dari Kompartemen Tata Kelola & Manajemen Risiko, sebagai berikut:

1. Menyusun Kebijakan, Pedoman, Prosedur Penerapan Manajemen Risiko, Tata Kelola Perusahaan dan Kesekretariatan
2. Mengelola dan memantau kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Penandatanganan Pakta Integritas Insan PUSRI.
3. Menjalankan program pengendalian gratifikasi.
4. Mengelola sistem pengaduan karyawan & stakeholder (*Whistleblowing System*) bersama dengan Tim Pengelola WBS.
5. Mengelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan *Fraud Control System*.
6. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan asesmen penilaian penerapan GCG.
7. Mengkoordinasikan penyusunan *Annual Report & Sustainability Report*.
8. Penentuan Ambang Batas Risiko Perusahaan.
9. Melakukan identifikasi risiko utama Perusahaan berdasarkan perhitungan kontributor laba per sektor RKAP.
10. Melaksanakan proses asesmen risiko dengan cara melakukan proses identifikasi, pengelolaan dan pengendalian risiko.
11. Mengelola Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMANIS) dan Pengelolaan Risiko Utama Perusahaan (*Risk That Matters/RTM*) dan pencatatan kerugian yang terjadi di Perusahaan, telah digunakan fitur *Loss Event Database (LED)* pada sistem informasi PRISMA yang dikelola oleh PT Pupuk Indonesia (Persero).
12. Pelaporan pemantauan risiko tinggi dan strategis Perusahaan.
13. Pelaksanaan Klinik Risiko dengan unit kerja.
14. Melakukan penyusunan Kajian Analisis Risiko Aksi Korporasi Perusahaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO

1. Menyusun dan mengusulkan kebijakan Manajemen Risiko, pedoman dan prosedur penerapan Manajemen Risiko kepada Direksi.
2. Menyusun dan mengusulkan risk appetite dan risk tolerance yang digunakan sebagai ukuran kriteria level risiko.
3. Memastikan pelaksanaan proses identifikasi, pengelolaan dan pemantauan risiko pada setiap unit kerja berjalan dengan baik.
4. Melakukan kompilasi risiko setiap unit kerja menjadi profil risiko Perusahaan secara keseluruhan.

DUTIES AND FUNCTIONS OF GOVERNANCE & RISK MANAGEMENT

The Company has established the duties and functions of the Governance & Risk Management Compartment as follows:

1. Formulating policies, guidelines, and procedures for the implementation of Risk Management, Corporate Governance, and Secretariat functions.
2. Managing and monitoring compliance with the submission of the State Officials' Wealth Report (LHKPN) and the signing of the Integrity Pact by PUSRI personnel.
3. Implementing the gratuity control program.
4. Managing the employee and stakeholder complaint system (*Whistleblowing System*) together with the WBS Management Team.
5. Managing the Anti-Bribery Management System and the Fraud Control System.
6. Preparing and coordinating the assessment of GCG implementation.
7. Coordinating the preparation of the Annual Report and Sustainability Report.
8. Determining the Company's risk threshold.
9. Identifying the Company's key risks based on the calculation of profit contribution by sector in the RKAP.
10. Conducting the risk assessment process through risk identification, management, and control processes.
11. Managing the Risk Management Information System (SIMANIS) and the management of the Company's Key Risks (*Risk That Matters/RTM*), as well as recording losses incurred by the Company. The Loss Event Database (LED) feature in the PRISMA information system managed by PT Pupuk Indonesia (Persero) has been used for this purpose.
12. Reporting the monitoring of the Company's high and strategic risks.
13. Conducting Risk Clinics with work units.
14. Preparing the Risk Analysis Study for the Company's Corporate Actions

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT DEPARTMENT

1. Formulating and proposing Risk Management policies, guidelines, and procedures for Risk Management implementation to the Board of Directors.
2. Preparing and proposing risk appetite and risk tolerance to be used as criteria for determining risk levels.
3. Ensuring that the processes of risk identification, management, and monitoring in each work unit are implemented effectively.
4. Compiling risks from each work unit into the overall Company risk profile.

5. Menyusun top risks Perusahaan yang sesuai dengan kondisi Perusahaan saat itu. 6. Memetakan dan menyusun risiko korporat/Perusahaan, melakukan revidi atas strategi dan pengendalian risiko korporat/Perusahaan dan menyusun Laporan Profil Manajemen Risiko. 7. Melakukan pemantauan bersama perwakilan fasilitator/key person/pemilik risiko unit kerja terhadap posisi risiko secara keseluruhan. 8. Memperhatikan perkembangan implementasi Manajemen Risiko berdasarkan masukan dari Laporan Hasil Audit (LHA) yang dilakukan oleh SPI.	5. Preparing the Company's top risks in accordance with the Company's current conditions. 6. Mapping and preparing corporate/Company risks, reviewing corporate/Company risk strategies and controls, and preparing the Risk Management Profile Report. 7. Conducting monitoring together with representatives of facilitators/key persons/risk owners from work units regarding the overall risk position. 8. Monitoring the development of Risk Management implementation based on input from Audit Result Reports (LHA) conducted by the Internal Audit Unit (SPI).



JUNAEDI

Senior Vice President Tata Kelola dan Manajemen Risiko
Senior Vice President of Governance and Risk Management

Usia Age	51 Tahun Years
Tempat & tanggal Kelahiran Place & Date of Birth	Demak / 23 Maret 1975 Demak / March 23, 1975
Domisili Domicile	Palembang
Riwayat Penunjukan Appointment History	Ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/DIR/292/2024 tanggal 08 Juli 2024 Appointed based on the Board of Directors Decree No. SK/DIR/292/2024 dated July 08, 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	1998, S1. Teknik Kimia, Universitas Diponegoro 2017, S2. Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung 1998, Bachelor's Degree (S1) in Chemical Engineering, Diponegoro University 2017, Master's Degree (S2) in Chemical Engineering, Bandung Institute of Technology
Pengalaman Kerja Work Experience	- SVP Tata Kelola & Manajemen Risiko, 2024 - sekarang - SVP Rantai Pasok, 2023-2024 - SVP Teknik & Rantai Pasok, 2022-2023 - SVP Pengembangan, 2021-2022 - SVP Governance & Risk Management, 2024 - Present - SVP Supply Chain, 2023 - 2024 - SVP Engineering & Supply Chain, 2022 - 2023 - SVP Development, 2021 - 2022

SERTIFIKASI DAN KUALIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sebagai upaya peningkatan kompetensi manajemen risiko, PUSRI melakukan program pengembangan kompetensi melalui sertifikasi profesi manajemen risiko. Daftar karyawan Kompartemen Tata Kelola & Manajemen Risiko yang telah mengikuti program sertifikasi adalah sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION AND QUALIFICATIONS

As part of efforts to enhance risk management competencies, PUSRI conducts competency development programs through professional risk management certification. The list of employees from the Governance & Risk Management Compartment who have participated in the certification program is as follows:

No.	Nama Karyawan Employee Name	Jabatan Position	Sertifikat yang dimiliki Certificate Held	Masa Berlaku Sertifikat Certificate Validity
1	Junaedi	SVP Tata Kelola & Manrisk SVP Governance & Risk Management	QCRO	s.d Januari 2028 Until December 2027
			CERG	sd Januari 2028
2	Amir Hamzah	VP Manajemen Risiko VP Risk Management	QCRO	s.d Februari 2027 Until February 2027
			QRMA	s.d Juli 2026 Until July 2026
			CGRCP	s.d Des 2025 Until December 2025
3	Ade Lia D. Safitri	AVP Pengel. Risiko Strategis AVP Strategic Risk Management	CFRM	s.d November 2028
			ERMCP	s.d Agustus 2025 Until August 2025
			QRMP	s.d Des 2026 Until December 2026
4	Nurhadi	Officer Pengel. Risiko Operasional	CGRCP	s.d Des 2025 Until December 2026
			ERMCP	s.d September 2028
5	Heru Prasetyo	Sr Administrator Pengel. Risiko Operasional Sr. Administrator Operational Risk Management	QRMA	s.d Mei 2027 Until May 2027
Jumlah Total			11	

Jumlah karyawan Direktorat Manajemen Risiko yang memiliki sertifikasi profesi di bidang manajemen risiko adalah sebanyak 5 orang.

The Risk Management Directorate has 5 personnel who hold professional certifications in the field of risk management.

Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan level sertifikasi manajemen risiko mulai dari SVP dan juga VP yang merupakan *risk owner* serta *risk officer*. Secara bertahap, sertifikasi akan dilakukan untuk seluruh risk owner (SVP/VP) dan *risk officer* unit kerja yang melakukan pengelolaan risiko utama Perusahaan yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian laba. Hingga akhir tahun 2025 terdapat 39 Personil yang telah tersertifikasi sebagai berikut:

The Company is committed to continuously enhancing risk management certification levels, starting from SVPs and VPs who serve as risk owners, as well as risk officers. Gradually, certification will be extended to all risk owners (SVP/VP) and risk officers in work units responsible for managing the Company's key risks that directly impact profit achievement. As of the end of 2025, a total of 39 personnel have been certified, as follows:

Personil tersertifikasi sampai dengan Tahun 2025

Certified Personnel up to 2025

No.	Nama Karyawan Employee Name	Jabatan Position	Sertifikat yang dimiliki Certificate Held	Masa Berlaku Sertifikat Certificate Validity
1	Marviansyah	SVP Umum	CGRCEO	s.d Desember 2025* Until December 2025
2	Alfa Widyawan	SVP Teknologi & K3LH	CGRCEO	s.d Desember 2025* Until December 2025
3	Sholikin	SPM P-IIIB	CGRCEO	s.d Desember 2025* Until December 2025
4	Andri Azmi	SVP Operasi	CGRCEO	s.d Desember 2025* Until December 2025
5	Dian Permatasari	SVP SPI	QRMP	s.d November 2026 Until November 2026
			CGRCEO	s.d Desember 2025* Until December 2025
6	Agung Prasetyo Nugroho	SVP Pemeliharaan	QRMP	s.d April 2026 Until April 2026
7	Indah Irmayani	Sekretaris Perusahaan	CGRCEO	s.d Oktober 2028 Until October 2028
8	Dia Imada	SVP Administrasi Keuangan	QCRO	s.d November 2028 Until November 2028
9	Novan Apriadi	VP Adm. Umum Aset VP General Administration of Assets	QRMP	s.d April 2026 Until April 2026
10	Arma Wijaya	Jr Officer & Umum	QRMP	s.d April 2026 Until April 2026
11	Niekla Dwi A.	SPM Manajemen Piutang SPM Receivables Management	QRMP	s.d April 2026 Until April 2026
12	Nurni Astuti	VP Pengawasan Operasional VP Operational Supervision	QRMP	s.d September 2025* Until September 2025
			CGRCP	s.d September 2026 Until September 2026
13	Hadi Suyono	VP Pengawasan Keuangan VP Financial Supervision	QRMP	s.d September 2025* Until September 2025
			CGRCP	s.d September 2026 Until September 2026
14	Livia Sarita	Sr Officer Pengendali Teknis Was Keuangan Sr Officer Technical Controller Financial Supervision	QRMA	s.d November 2027 Until Nov 2027
15	Lantip Catur Kadiyanto	SVP Rantai Pasok	CGRCEO	s.d Juli 2028 Until July 2028
16	Abdul Hakim	Officer Peng. Teknis Was Operasional Officer Technical Control Operational Supervision	CGRCP	s.d November 2027 Until November 2027
17	Nyoman Pramesti	Officer Pengawasan Perencanaan & Analisa Officer Supervision Planning & Analysis	QRMA	s.d September 2025* Until September 2025
			CGRCP	s.d November 2027 Until November 2027
18	Rosmaida	Officer Pengawasan Pemasaran Officer Marketing Supervision	QRMA	s.d Februari 2026 Until February 2026
			CGRCP	s.d September 2026 Until September 2026
			ERMAP	s.d Februari 2025 Until February 2025

Personil tersertifikasi sampai dengan Tahun 2025

Certified Personnel up to 2025

No.	Nama Karyawan Employee Name	Jabatan Position	Sertifikat yang dimiliki Certificate Held	Masa Berlaku Sertifikat Certificate Validity
19	M. Iqbal Hakim	Officer Pengawasan Riksus Officer Special Investigation Supervision	QRMA	s.d Oktober 2026 Until October 2026
			CGRCP	s.d September 2026 Until September 2026
20	Rully Nugraha	Officer Pengawasan Keuangan Officer Financial Supervision	QRMA	s.d Oktober 2026 Until October 2026
			CGRCP	s.d September 2026 Until September 2026
21	R. Zakky Rahman	Officer Pengawasan Produksi Officer Production Supervision	QRMA	s.d Oktober 2026 Until October 2026
			CGRCP	s.d September 2026 Until September 2026
22	Ginta Ryan S	Associate Officer Pengawasan Operasional Associate Officer Operational Supervision	QRMA	s.d Oktober 2026 Until October 2026
			CGRCP	s.d September 2026 Until September 2026
23	Mutia Lamora	Jr Officer Pengawasan Keuangan Jr Officer Financial Supervision	QRMA	s.d Oktober 2026 Until October 2026
			CGRCP	s.d Desember 2026 Until December 2026
24	Chandra Herdiputra	Jr Officer Pengawasan Unit Penunjang Jr Officer Supporting Unit Supervision	QRMA	s.d Oktober 2026 Until October 2026
			CGRCP	s.d September 2026 Until September 2026
25	Muhammad Ridho Adrianz	Sr Administrator Pengawasan Operasional Sr Administrator Operational Supervision	QRMA	s.d Oktober 2026 Until October 2026
			CGRCP	s.d Desember 2026 Until December 2026
26	Achmad Alba Anjany	Sr Administrator Pengawasan Operasional Sr Administrator Operational Supervision	QRMA	s.d Oktober 2026 Until October 2026
			CGRCP	s.d September 2026 Until September 2026
27	M. Reza Pahlevi	Officer Project Control & Risk Mgmt P-IIIB	ERMCP	s.d Sept 2026 Until September 2026
			QRMP	s.d Juli 2025* Until July 2025*
28	Agus	Ass. Off.Pengawasan Keuangan Associate Officer Financial Supervision	CGRCP	s.d Sept 2026 Until September 2026
29	M. Natsir Hakiki	Engineer Koord Pengend. Mat. Produksi Engineer Coordinator Production Material Control	QRMA	s.d Juli 2025* Until July 2025
30	Inggit Inaheirtika	Officer Kawalan Teknologi Sumbagsel Officer Technology Escort Sumbagsel	QRMA	s.d Juli 2025* Until July 2025
31	Amancik	AVP Kesekretariatan & Pelaporan AVP Secretariat & Reporting	QRMA	s.d. April 2026 Until April 2026
32	Septy Handayani	AVP Tata Kelola	QRMA	s.d. April 2026
33	Putra Zaman	Jr Engineer Pengembangan Sistem Jr Engineer System Development	QRMA	s.d. April 2026 Until April 2026
34	Wily Priya Adi	Jr Engineer Planner	QRMA	s.d. April 2026 Until April 2026

Personil tersertifikasi sampai dengan Tahun 2025

Certified Personnel up to 2025

No.	Nama Karyawan Employee Name	Jabatan Position	Sertifikat yang dimiliki Certificate Held	Masa Berlaku Sertifikat Certificate Validity
35	Andri Sutendi	Sr Admin Kawalan Teknologi Sumbagsel Sr Administrator Product Premarket Supervision Research & Innovation	QRMA	s.d November 2027 Until November 2027
36	Suhartono	Engineer Koord. Pernc & Pelap Produksi	QRMA	s.d Juni 2026 Until June 2026
37	Firman Aji	Officer Peng. Teknis Was Operasional	CGRCP	s.d September 2026 Until September 2026
			QRMP	s.d September 2025* Until September 2025*
38	Abraham Arif	Ast Manager Urea P-IIIB	QRMA	s.d Agustus 2028 Until August 2028
39	Ria Ramad Kurniawan	Officer Peny Anggaran Produksi & Inv	QRMA	s.d Agustus 2028 Until August 2028
Jumlah Total			55	

*Ket: Sertifikat sedang dalam proses perpanjangan
*The certificate is currently undergoing the renewal process.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko telah menjadi bagian dalam proses perencanaan strategis yang dilaksanakan pada saat penentuan rencana kerja ke depan. PUSRI telah merancang framework dalam menganalisis dan pengelolaan risiko Perusahaan, sehingga manajemen risiko PUSRI lebih terstruktur dan efektif.

Perusahaan menerapkan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan sistem manajemen lainnya sejak 2006 guna mendukung terwujudnya tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). PUSRI telah mengimplementasikan Manajemen Risiko berbasis SNI ISO 31000:2018 pada 2020.

Selain itu dalam menyusun anggaran investasi, Perusahaan juga menerapkan risk-based budgeting dan menggunakan quantitative risk analysis.

Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan kerangka strategis proses Manajemen Risiko PUSRI yang mengacu pada SNI ISO 31000:2018.

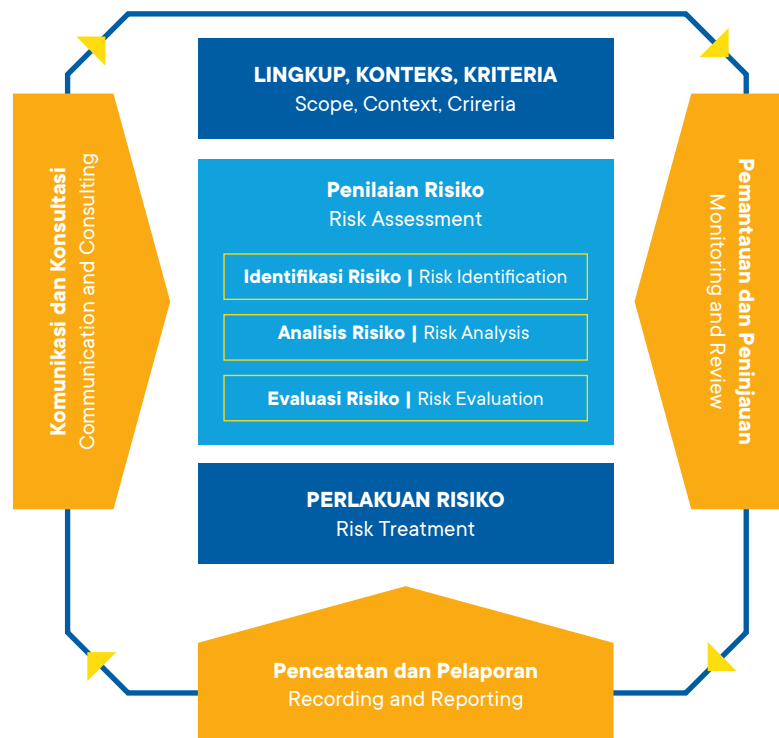
RISK MANAGEMENT SYSTEM

The risk management process has become part of the strategic planning process carried out when determining future work plans. PUSRI has designed a framework for analyzing and managing the Company's risks so that its risk management is more structured and effective.

The Company has implemented Risk Management integrated with other management systems since 2006 to support the realization of Good Corporate Governance (GCG). PUSRI implemented Risk Management based on SNI ISO 31000:2018 in 2020.

In addition, when preparing the investment budget, the Company also applies risk-based budgeting and uses quantitative risk analysis.

The following diagram illustrates the strategic framework of PUSRI's Risk Management process, which refers to SNI ISO 31000:2018.



ROADMAP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

PUSRI menyusun Roadmap Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2025–2027 yang menggambarkan *milestone* menuju pengelolaan Manajemen Risiko yang konsisten sebagai langkah strategis dalam menunjang pengelolaan risiko PUSRI. Roadmap tersebut merupakan serangkaian tahapan proses dan target dalam pengelolaan risiko yang menjadi bagian dari kegiatan operasional Perusahaan.

Ke depan, PUSRI berupaya memantapkan infrastruktur manajemen risiko dalam mendukung Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dan mendorong budaya sadar dan peduli akan pengelolaan risiko Perusahaan sehingga dapat meningkatkan jaminan terhadap upaya pencapaian tujuan Perusahaan secara menyeluruh.

RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION ROADMAP OF PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

PUSRI has prepared a Risk Management Implementation Roadmap for 2025–2027 that outlines milestones toward consistent risk management as a strategic step in supporting the management of PUSRI's risks. The roadmap represents a series of process stages and targets in risk management that form part of the Company's operational activities.

Going forward, PUSRI aims to further strengthen its risk management infrastructure in support of the Company's Internal Control System and to promote a culture of awareness and concern for corporate risk management, thereby increasing assurance in achieving the Company's overall objectives.

Tahun Year	Penerapan manajemen risiko Risk Management Implementation
2025	- Melaksanakan <i>Internal control testing</i> dan <i>stress testing</i> berkala oleh lini kedua (Penyelarasan dengan PIHC). - Memastikan kebijakan, SOP, Instruksi Kerja (IK) dilakukan pengkajian ulang secara rutin minimal sekali dalam dua tahun untuk relevansi dan efektivitas penerapannya. - Melakukan pemenuhan atas Pemenuhan Komposisi Organ Pengelola Risiko sesuai klasifikasi Risiko Individu Sistemik A dalam PER 2/MBU/03/ 2023. - Conduct periodic internal control testing and stress testing by the second line (aligned with PIHC). - Ensure that policies, SOPs, and Work Instructions (IK) are reviewed regularly at least once every two years to maintain their relevance and effectiveness. - Fulfill the composition requirements of Risk Management Organs in accordance with the classification of Systemic Individual Risk A under PER-2/MBU/03/2023.

Tahun Year	Penerapan manajemen risiko Risk Management Implementation
2026	- Melakukan penguatan budaya risiko di Perusahaan agar menjadi bagian integral dari budaya Perusahaan serta sebagai strategi dalam membangun Keunggulan Kompetitif melalui Manajemen Risiko Terintegrasi. - Meningkatkan kualitas fungsi kepatuhan di Perusahaan dan penguatan tata kelola tiga lini. - Menetapkan mekanisme terstruktur atas penyusunan, pemantauan, serta tindak lanjut ambang batas strategi risiko, termasuk kaji ulangnya dalam upaya peningkatan peran MR terhadap sasaran strategi. - Meningkatkan mekanisme pelaporan risiko secara <i>real time</i>. - Mengembangkan Kerangka ERM dengan Analisis Risiko ESG yang terstruktur. - Menetapkan taksonomi risiko yg merujuk kepada regulasi/arahan pemegang saham terkini berkaitan dengan Manajemen Risiko dengan penyelarasan kepada <i>Holding</i> untuk kebutuhan agregasi, yang mencakup risiko berkaitan dengan emerging risk yang mungkin dihadapi Perusahaan - Melakukan upaya peningkatan kapabilitas manajemen risiko untuk Organ Pengelola Risiko & non organ pengelola risiko. - Memastikan adanya penegakan peran tim audit khusus untuk pengawasan yang berkelanjutan. - Melakukan penyelarasan dan penguatan transformasi ERM untuk PI Group (Induk dan Anak) yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. - Memutakhirkan proses dan kontrol risiko yang mencakup emerging risk dan forward looking untuk mengidentifikasi dan menilai risiko utama perusahaan. - Memastikan adanya penguatan mekanisme <i>self-assurance/self checking</i> oleh Lini Pertama. - Mengintegrasikan risiko ESG/iklim dalam Kerangka Kerja ERM dan menjalankan transformasi ESG.
2027	- Strengthen the Company's risk culture so that it becomes an integral part of corporate culture and a strategy for building competitive advantage through Integrated Risk Management. - Enhance the quality of the compliance function and strengthen governance across the three lines of defense. - Establish a structured mechanism for the formulation, monitoring, and follow-up of risk appetite thresholds, including periodic reviews to strengthen the role of risk management in achieving strategic objectives. - Improve real-time risk reporting mechanisms. - Develop the Enterprise Risk Management (ERM) framework with structured ESG risk analysis. - Establish a risk taxonomy aligned with the latest shareholder regulations/directives on risk management and harmonized with the Holding for aggregation purposes, including risks related to emerging risks that may be faced by the Company. - Enhance risk management capabilities for both Risk Management Organs and non-risk management personnel. - Ensure the enforcement of a dedicated audit team's role for continuous oversight. - Align and strengthen the ERM transformation across the PI Group (parent and subsidiaries) in a clear and actionable manner. - Update risk processes and controls to incorporate emerging and forward-looking risks in identifying and assessing the Company's key risks. - Ensure strengthened self-assurance/self-checking mechanisms by the first line of defense. - Integrate ESG/climate risks into the ERM framework and implement ESG transformation initiatives.

STRATEGI RISIKO PERUSAHAAN

Berikut merupakan *Risk Appetite Statement* atau Pernyataan Selera Risiko Perusahaan tahun 2025 yang diselaraskan dengan Risk Appetite Statement PT Pupuk Indonesia (Persero) yakni:

COMPANY RISK STRATEGY

The following is the Company's Risk Appetite Statement for 2024, which has been aligned with the Risk Appetite Statement of PT Pupuk Indonesia (Persero), as follows:

Tabel Risk Appetite Statement (RAS)

Tabel Risk Appetite Statement (RAS)

No	Kategori Risiko ¹ Risk Category	Risk Appetite Statement (RAS) ²	Sikap ² Stance
1	Strategis Strategic	PT Pusri Palembang memiliki sikap strategis terhadap risiko terkait transformasi bisnis yang mencakup restrukturisasi, pengembangan usaha termasuk di dalamnya pengembangan proyek strategis, investasi penyertaan, serta inisiatif strategis lainnya. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah transformasi didukung oleh analisis risiko yang komprehensif dan perencanaan yang matang, serta berupaya mendorong dilakukannya R&D dan inovasi untuk bisnis, operasi, dan back-office demi mendukung pertumbuhan jangka panjang dan adaptasi terhadap perubahan pasar. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang adopts a strategic stance toward risks related to business transformation, including restructuring, business development, strategic projects, equity investments, and other strategic initiatives. The Company is committed to ensuring that each transformation step is supported by comprehensive risk analysis and thorough planning, while encouraging R&D and innovation across business, operations, and back-office functions to support long-term growth and adaptability to market changes.	Strategis Strategic
2	Pasar dan Makroekonomi Market and Macroeconomic	PT Pusri Palembang memiliki sikap moderat terhadap pengelolaan risiko pasar dan makroekonomi. Perusahaan akan fokus pada penggunaan strategi mitigasi dan instrumen keuangan untuk menghadapi fluktuasi kurs mata uang. Perusahaan juga akan secara aktif menyesuaikan operasional perusahaan untuk mengurangi dampak perubahan kebijakan dan kondisi ekonomi demi mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan, sejalan dengan komitmen dalam mendukung program penunjang swasembada pangan. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang adopts a moderate stance toward managing market and macroeconomic risks. The Company focuses on mitigation strategies and financial instruments to address exchange rate fluctuations and actively adjusts operations to reduce the impact of policy changes and economic conditions, in line with its commitment to supporting national food self-sufficiency programs.	Moderat Moderate
3	Keuangan Financial	PT Pusri Palembang memiliki sikap konservatif terhadap risiko terkait keuangan, seperti risiko yang terkait pemenuhan kewajiban keuangan, struktur keuangan, dan termasuk di dalamnya risiko subsidi, risiko pendanaan, serta risiko keuangan lainnya. Perusahaan berupaya untuk mengelola sumber pendanaan melalui manajemen keuangan yang kompeten serta berupaya untuk melakukan optimalisasi dan monetisasi aset korporat demi menjaga kelancaran bisnis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka Panjang. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang adopts a conservative stance toward financial risks, including those related to financial obligations, capital structure, subsidies, funding, and other financial exposures. The Company manages funding sources through competent financial management and seeks to optimize and monetize corporate assets to ensure business continuity in both the short and long term.	Konservatif Conservative
4	Hukum, Reputasi, dan Kepatuhan Legal, Reputation, and Compliance	PT Pusri Palembang memiliki sikap tidak toleran terhadap risiko terkait etika bisnis, fraud, tata kelola, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Perusahaan berkomitmen untuk memitigasi risiko bisnis dengan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi yang relevan serta uji tuntas yang komprehensif. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang adopts a zero-tolerance stance toward risks related to business ethics, fraud, governance, and regulatory compliance. The Company is committed to mitigating risks by ensuring adherence to applicable laws and regulations and conducting comprehensive due diligence.	Tidak Toleran Zero Tolerance
5	Proyek Project	PT Pusri Palembang memiliki sikap konservatif terhadap risiko terkait proyek, baik perencanaan, eksekusi, hingga kualitas proyek guna mendukung pertumbuhan perusahaan ke depannya. Perusahaan akan mengupayakan perencanaan proyek yang menyeluruh dengan prosedur pengawasan dan kontrol yang ketat untuk memastikan seluruh elemen proyek terealisasi sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan, serta berupaya untuk melakukan optimalisasi kapasitas dan pengembangan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang adopts a conservative stance toward project-related risks, including planning, execution, and quality, to support future growth. The Company emphasizes comprehensive project planning with strict supervision and control procedures to ensure alignment with established plans, while optimizing capacity and development to enhance competitiveness and sustainability.	Konservatif Conservative

Tabel Risk Appetite Statement (RAS)

Tabel Risk Appetite Statement (RAS)

No	Kategori Risiko ¹ Risk Category	Risk Appetite Statement (RAS) ²	Sikap ² Stance
6	Teknologi Informasi dan Keamanan Siber (1) Information Technology and Cybersecurity (1)	PT Pusri Palembang memiliki postur konservatif terhadap risiko yang berkaitan dengan teknologi informasi. PT Pusri Palembang berkomitmen untuk menerapkan pengelolaan sistem informasi yang efektif guna memastikan availability and reliability serta mendorong penguatan kapasitas digital dan transformasi digital untuk mendukung aktivitas operasional dan bisnis yang efisien. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang adopts a conservative posture toward IT-related risks. The Company is committed to implementing effective information system management to ensure availability and reliability, while strengthening digital capabilities and transformation to support efficient operations and business activities.	Konservatif Conservative
7	Teknologi Informasi dan Keamanan Siber (2) Information Technology and Cybersecurity (2)	PT Pusri Palembang memiliki postur tidak toleran terhadap risiko yang berkaitan dengan keamanan siber dan perlindungan data pribadi. PT Pusri Palembang tidak akan menoleransi risiko yang mengancam integritas data pribadi dan akan terus berkomitmen untuk menerapkan kontrol keamanan siber yang ketat demi memastikan operasional bisnis yang aman dan terlindungi. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang adopts a zero-tolerance posture toward cybersecurity and personal data protection risks. The Company does not tolerate risks that threaten data integrity and remains committed to implementing strict cybersecurity controls to ensure secure and protected business operations.	Tidak Toleran Zero Tolerance
8	Sosial dan lingkungan Social and Environmental	PT Pusri Palembang memiliki sikap konservatif terhadap risiko yang berkaitan dengan Environment, Social, dan Governance (ESG). Perusahaan akan mengelola risiko terkait lingkungan dengan bertanggung jawab dan mempromosikan kesejahteraan sosial yang baik, serta meningkatkan sustainability melalui dekarbonisasi demi mencapai tujuan berkelanjutan. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang adopts a conservative stance toward ESG-related risks. The Company manages environmental risks responsibly, promotes social well-being, and enhances sustainability through decarbonization efforts to achieve long-term sustainability goals.	Konservatif Conservative
9	Operasional (1) Operational (1)	PT Pusri Palembang memiliki sikap konservatif terhadap risiko operasional yang mencakup operasional pengadaan agar ketersediaan bahan baku selalu terjaga, produksi, pemeliharaan, pengelolaan SDM, dan aspek operasional lainnya dengan tetap mengedepankan efisiensi biaya produksi dan operational excellence. Perusahaan juga berkomitmen untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui implementasi roadmap human experience management guna menciptakan solusi pertanian berkualitas tinggi demi mendukung program ketahanan dan kemandirian pangan nasional. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang adopts a conservative stance toward operational risks, including procurement to ensure raw material availability, production, maintenance, human resource management, and other operational aspects, while maintaining cost efficiency and operational excellence. The Company is also committed to improving human resource quality through a human experience management roadmap to support high-quality agricultural solutions and national food security and independence.	Konservatif Conservative
10	Operasional (2) Operational (2)	PT Pusri Palembang memiliki sikap tidak toleran terhadap risiko terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan menempatkan keselamatan karyawan dan masyarakat sebagai prioritas utama. Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi seluruh standar terkait K3 dan menjamin kepatuhan penuh terhadap peraturan yang berlaku baik dalam operasional pabrik eksisting maupun dalam proyek pengembangan yang sedang berjalan. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang adopts a zero-tolerance stance toward Occupational Health and Safety (OHS) risks, prioritizing the safety of employees and the public. The Company is committed to complying with all OHS standards and ensuring full adherence to applicable regulations in both existing operations and ongoing development projects.	Tidak Toleran Zero Tolerance

SOSIALISASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO

Untuk menimbulkan budaya sadar risiko dilakukan dengan sosialisasi Manajemen Risiko di lingkungan Perusahaan yang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan memperoleh sertifikasi manajemen risiko, upaya yang dilakukan adalah dengan mengikuti pelatihan, workshop, seminar dan lokakarya baik di lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan.

RISK MANAGEMENT SOCIALIZATION AND COMPETENCY DEVELOPMENT

To foster a risk-aware culture, Risk Management socialization is carried out within the Company on a regular and continuous basis. In order to improve competencies and obtain risk management certification, efforts are made through participation in training, workshops, seminars, and forums both within the internal and external environments of the Company.

Selain kegiatan tersebut di atas, pada tahun 2025 telah dilakukan beberapa kegiatan penunjang dalam rangka evaluasi Manajemen Risiko serta meningkatkan mutu dan kompetensi personel Manajemen Risiko melalui kegiatan sebagai berikut:

In addition to the activities mentioned above, in 2025 several supporting activities were conducted to evaluate Risk Management and to improve the quality and competency of Risk Management personnel through the following activities:

No	Nama Kegiatan Activity Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Tempat Pelaksanaan Location	Peserta Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Pemateri Speaker
1	Benchmarking PT Sumsel Energi Gemilang Terhadap Manajemen Risiko PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Benchmarking of PT Sumsel Energi Gemilang against risk management practices of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Senin, 14 Juli 2025 Monday, July 14, 2025	Ruang Rapat Lt 8 Gedung Utama Annex PT Pusri 8th Floor Meeting Room, Main Building Annex, PT Pusri	Tim PT Sumsel Energi Gemilang PT Sumsel Energi Gemilang Team	8 Orang People	Tim Manajemen Risiko PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Risk Management Team of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
2	Sosialisasi Risk Culture Campaign 2025 dengan tema "Sadar Risiko, Jaga Masa Depan" Risk Culture Campaign 2025 with the theme "Risk Awareness, Safeguard the Future"	30 Desember 2025 December 30, 2025	Gedung Diklat (Musi Learning Centre) Musi Learning Centre (Training Center Building)	Seluruh karyawan/karyawati PT Pusri Palembang All employees of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Seluruh karyawan/karyawati PT Pusri Palembang All employees of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Departemen Manajemen Risiko bekerjasama dengan Indonesia Risk Management Professional Association (IRMPA) Risk Management Department in collaboration with Indonesia Risk Management Professional Association (IRMPA)
3	Bimbingan teknis Penyusunan CP (Contingency Plan) Technical Guidance on Contingency Plan (CP) Preparation	29 April 2025 April 29, 2025	Gedung Diklat Training Center Building	Tim Penyusunan CP CP Preparation Team	15 Orang People	E&Y Consultant
4	ERM Fundamental ISO 31000 Batch I 2025	5-6 Mei 2025 May 5-6, 2025	Gedung Diklat Training Center Building	Risk Officer Unit Kerja dan Karyawan Risk Officers and employees	30 Orang People	Tim Manrisk Risk Management Team
5	ERM Fundamental ISO 31000 Batch II 2025	11-12 November 2025 November 11-12, 2025	Gedung Diklat Training Center Building	Risk Officer Unit Kerja dan Karyawan Risk Officers and employees	35 Orang People	Tim Manrisk Risk Management Team
6	Workshop Penyusunan Profil Risiko RKAP 2026 & Internal Control Testing 2025 Workshop on Risk Profile Preparation for RKAP 2026 & Internal Control Testing 2025	2 - 3 Desember 2025 December 2-3, 2025	Gedung Diklat Training Center Building	Risk Officer Unit Kerja dan Karyawan Risk Officers and employees	19 Orang People	Tim Manrisk Risk Management Team

PROFIL DAN MITIGASI RISIKO

Laporan Profil Risiko PUSRI memuat gambaran tentang tingkat risiko yang melekat pada seluruh aktivitas bisnis (inherent risk) dan kecukupan sistem pengendalian risiko. Perusahaan telah melaksanakan risk assessment di beberapa proses bisnis untuk menggali potensi-potensi risiko dan mengklasifikasikan risiko berdasarkan tingkatan risikonya serta merancang upaya penyelesaian (mitigasi) risiko sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan risiko yang muncul dalam proses bisnis di masa yang akan datang.

Pada awal tahun 2025 telah diidentifikasi sebanyak **7** Risiko Utama/*Risk That Matters* (RTM), terdapat 6 RTM Konsolidasi dengan PI dan 1 RTM Non Konsolidasi, dengan rincian **5** *High Risk* dan **2** *Moderate to High Risk*. Sampai dengan akhir tahun 2025 Risiko Utama mengalami perubahan dengan rincian 3 *High Risk*, 1 *Moderate Risk*, 1 *Low to Moderate Risk*, dan 2 *Low Risk*

Risiko-risiko yang dihadapi PUSRI berdasarkan pengelompokannya, dampak dan upaya mitigasinya adalah sebagai berikut:

RISK PROFILE AND MITIGATION

The PUSRI Risk Profile Report provides an overview of the level of risk inherent in all business activities (inherent risk) and the adequacy of the risk control system. The Company has conducted risk assessments across several business processes to identify potential risks, classify them based on their risk levels, and design mitigation measures as a form of anticipation against potential risks in future business processes.

At the beginning of 2025, a total of **7** Key Risks/*Risk That Matters* (RTM) were identified, consisting of 6 consolidated RTMs with PT Pupuk Indonesia (Persero) and 1 non-consolidated RTM, comprising **5** *High Risks* and **2** *Moderate-to-High Risks*. By the end of 2025, the Key Risks had changed to 3 *High Risks*, 1 *Moderate Risk*, 1 *Low-to-Moderate Risk*, and 2 *Low Risks*.

The risks faced by PUSRI, based on their classification, impact, and mitigation efforts, are as follows:

No.	Risiko Risk	Pengendalian/Mitigasi Control/Mitigation
RTM-01	Kesehatan Finansial Menurun Declining Financial Health	1. Monitoring penagihan piutang subsidi 2. Optimalisasi jangka waktu pembayaran 3. Optimalisasi pinjaman yang memberikan bunga paling kompetitif 1. Monitoring the collection of subsidy receivables 2. Optimizing payment terms 3. Optimizing loan utilization to secure the most competitive interest rates
RTM-02	Keterlambatan Proyek Project Delays	1. Menggunakan jasa konsultan teknis untuk membahas kajian teknis Proyek Pusri-III B 2. Melaksanakan konsinering Bersama Kontraktor untuk menyelesaikan approval engineering 3. Koordinasi rutin dengan Kontraktor untuk memastikan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan target 4. Koordinasi rutin dengan Kontraktor untuk memonitor progress fabrikasi peralatan 5. Menggunakan jasa konsultan untuk melakukan inspeksi fabrikasi di workshop vendor 1. Engaging technical consultants to conduct technical reviews of the Pusri-III B Project 2. Holding joint consignment meetings with contractors to complete engineering approvals 3. Conducting regular coordination with contractors to ensure construction execution meets targets 4. Conducting regular coordination with contractors to monitor equipment fabrication progress 5. Engaging consultants to perform fabrication inspections at vendor workshops
RTM-03	Ketidakefisienan Pabrik Plant Inefficiency	1. Pengadaan Expansion Joint 2. Pembersihan Cooling Water (CW) System Amonia IV 3. Optimalisasi Item Pekerjaan TA 4. Upgrade Sistem Informasi Turn Around SI TAMS 5. Adendum Pedoman Barang dan Jasa Internal PSP 1. Procurement of expansion joints 2. Cleaning of the Ammonia IV Cooling Water (CW) system 3. Optimization of turnaround (TA) work items 4. Upgrade of the Turnaround Information System (SI TAMS) 5. Addendum to the internal procurement guidelines (PSP)

No.	Risiko Risk	Pengendalian/Mitigasi Control/Mitigation
RTM-04	Hambatan Bahan Baku Raw Material Constraints	1. Site Visit untuk sumber bahan baku dari pemasok dalam negeri 2. Korespondensi dengan Pemasok Bahan Baku NPK terkait jadwal pengiriman 3. Optimalisasi penyerapan gas sesuai JPH dan JPMT 1. Conducting site visits to domestic suppliers for raw material sourcing 2. Maintaining correspondence with NPK raw material suppliers regarding delivery schedules 3. Optimizing gas offtake in accordance with JPH and JPMT
RTM-05	Kecelakaan Kerja Workplace Accidents	1. Upgrade sistem informasi K3 2. Peremajaan peralatan/fasilitas kebakaran dan keselamatan 3. Penunjukan Pihak Ketiga yang independen sebagai vendor assessor Proyek P-IIIB 1. Upgrading the Occupational Health and Safety (OHS) information system 2. Modernizing fire safety and safety equipment/facilities 3. Appointing an independent third party as a vendor assessor for the P-IIIB Project
RTM-06	Ketidacukupan SDM Insufficient Human Resources	1. Pelaksanaan Pelatihan Manajerial untuk Karyawan Struktural 2. Pemenuhan Kompetensi karyawan berdasarkan job profil pada jabatan struktural 1. Conducting managerial training programs for structural employees 2. Ensuring employees meet competency requirements based on job profiles for structural positions
RTM-07	Rugi Selisih Kurs Foreign Exchange Losses	1. Pelaksanaan Hedging 1. Implementation of hedging strategies

PENGELOLAAN RISIKO PERUSAHAAN

Proses pengelolaan risiko adalah penjabaran dari kerangka kerja pengelolaan risiko dalam rangka mempermudah penerapan prinsip-prinsip pengelolaan risiko, baik di tingkat korporat, di tingkat unit kerja, maupun individu. PUSRI melakukan pengelolaan risiko seluruh unit kerja yang dikelompokkan dalam empat klasifikasi, yaitu Risiko Strategis, Risiko Keuangan, Risiko Operasional, dan Risiko Kepatuhan dan Hukum.

Adapun profil dan peta risiko awal tahun 2025 sebelum tindak lanjut pengendalian risiko yakni sebagai berikut :

COMPANY RISK MANAGEMENT

The risk management process is an elaboration of the risk management framework aimed at facilitating the implementation of risk management principles at the corporate level, work unit level, and individual level. PUSRI manages risks across all work units, which are grouped into four classifications: Strategic Risk, Financial Risk, Operational Risk, and Compliance and Legal Risk.

The risk profile and risk map at the beginning of 2025, prior to the implementation of risk control follow-up actions, are as follows:

No	Fungsi/Bidang Function/Area	Jumlah & Tingkat Risiko Risk Total and Level						Tingkat Risiko Rata-rata Average Risk Level		
		Low	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High	High	Total	L	C	Skala
1	Operasional Operations	0	55	132	76	39	302	3,26	3,33	14,89
2	Keuangan Finance	0	9	12	6	3	30	3,40	3,10	13,93
3	Strategis Strategic	0	4	7	2	3	16	3,31	3,19	14,38
4	Hukum & Kepatuhan Legal & Compliance	0	1	8	4	4	17	3,47	3,65	16,25
Jumlah Total		0	69	159	88	49	365	3,28	3,32	14,88

Peta Risiko Awal Tahun 2025 Sebelum Tindak Lanjut Pengendalian

Risk Map at the Beginning of 2025 Before Control Follow-Up Actions

Likelihood Kemungkinan	Almost Certain Sangat Tinggi	5	1	3	6	9	8
	Likely Tinggi	4		15	35	16	25
	Possible Sedang	3		22	121	63	5
	Unlikely Rendah	2		17	14	3	1
	Almost Never Sangat Rendah	1					1
Jumlah Risiko : 365 Total Risk: 365			1	2	3	4	5
			Minor Sangat Rendah	Moderate Rendah	Sever Sedang	Major Tinggi	Catastrophe Sangat Tinggi
			Consequence Dampak				

Pada periode Semester-II, telah dilakukan pengendalian terhadap 411 risiko yang teridentifikasi.

As of the end of Semester II of 2024, risk control measures have been implemented for 411 risks.

Sehingga pada akhir periode Semester-II tahun 2025, rincian risiko perusahaan adalah sebagai berikut:

- 14 High Risk
- 58 Moderate to High Risk
- 89 Moderate Risk
- 46 Low to Moderate Risk
- 204 Low Risk

The measures resulted in the following risk breakdown at the end of Semester II 2025:

- 14 High Risk
- 58 Moderate to High Risk
- 89 Moderate Risk
- 46 Low to Moderate Risk
- 204 Low Risk

Adapun profil dan peta risiko sesudah tindak lanjut pengendalian risiko Semester-II Tahun 2025 sebagai berikut:

The risk profile and risk map after the implementation of risk control follow-up actions in Semester II of 2025 are as follows:

No	Fungsi/ Bidang Function/Area	Jumlah & Tingkat Risiko Risk Total and Level						Tingkat Risiko Rata-rata Average Risk Level		
		Low	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High	High	Total	L	C	Skala
1	Operasional Operations	165	35	68	48	13	327	2,16	2,55	9,49
2	Keuangan Finance	15	7	6	3	0	31	2,23	2,32	8,45
3	Strategis Strategic	13	2	7	6	1	29	2,45	2,76	10,79
4	Hukum & Kepatuhan Legal & Compliance	13	2	8	1	0	24	2,08	2,38	8,46
Jumlah Total		204	46	89	58	14	411	2,18	2,54	9,44

Peta Risiko Semester-II Setelah Tindak Lanjut Pengendalian

Risk Map for Semester II After Control Follow-Up Actions

Likelihood Kemungkinan	Almost Certain Sangat Tinggi	5	1	4	3	1	
	Likely Tinggi	4		11	17	17	5
	Possible Sedang	3	6	9	67	37	7
	Unlikely Rendah	2	21	15	10	1	
	Almost Never Sangat Rendah	1		177		1	1
Jumlah Risiko : 411 Total Risk: 411			1	2	3	4	5
			Minor Sangat Rendah	Moderate Rendah	Sever Sedang	Major Tinggi	Catastrophe Sangat Tinggi
			Consequence Dampak				

Sehingga tingkat risiko pada akhir periode Semester-II tahun 2025 sebesar 9,44 dengan penurunan skala risiko Perusahaan sebesar 36,54% dengan rincian rata-rata Likelihood sebesar 2,18 dan rata-rata Consequences sebesar 2,54

As a result, the Company's risk level at the end of the second semester of 2025 was 9.44, reflecting a 36.54% reduction in the Company's risk scale, with an average Likelihood score of 2.18 and an average Consequence score of 2.54.

EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2025

Untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan PUSRI, maka setiap tahun dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko melalui pengukuran maturitas manajemen risiko.

Tujuan pengukuran tersebut untuk mengetahui dan memetakan sejauh mana efektivitas penerapan manajemen risiko yang ada di lingkungan PUSRI, serta untuk mengetahui kualitas penerapan manajemen risiko yang ada di lingkungan PUSRI sehingga dapat digunakan sebagai bahan oleh manajemen dalam menyusun strategi dan program-program pengembangan manajemen risiko Perusahaan di masa mendatang.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM IN 2024/2025

To ensure the sustainability of risk management implementation within PUSRI, a review and evaluation of risk management implementation is conducted annually through risk management maturity measurement.

The purpose of this measurement is to determine and map the effectiveness of risk management implementation within PUSRI, as well as to assess the quality of its implementation. The results serve as reference material for management in formulating strategies and programs for the development of the Company's risk management in the future.

Pengukuran maturitas manajemen risiko rutin dilakukan mulai dari tahun 2013. Pengukuran maturitas terakhir yang diadakan PUSRI pada tahun 2025 adalah untuk penilaian tahun buku 2024. Pelaksanaan Penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) Tahun Buku 2024 telah dilaksanakan pada bulan Juli s.d Oktober 2025 oleh pihak Konsultan Deloitte yang dikoordinir PT Pupuk Indonesia (Persero).

Dari hasil pelaksanaan Penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) Tahun Buku 2024 tersebut telah dilaporkan bahwa hasil penilaian untuk skor aspek dimensi maturitas PT Pusri Palembang sebesar 2,8 yakni Berkembang (+) dari indeks dimensi 5.

Berdasarkan hasil pengukuran di atas maka Sistem Manajemen Risiko di PUSRI berjalan dengan cukup efektif dan terus dikembangkan sesuai *road map* Manajemen Risiko PUSRI. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Kesadaran pemilik risiko untuk melakukan *self assessment* risiko.
- Budaya sadar risiko cukup melekat pada pemilik risiko, hal ini ditandai dengan upaya melakukan kajian risiko dalam kegiatan operasional Perusahaan.
- Para pemangku kepentingan di bidang Manajemen Risiko dinilai cukup mampu melakukan kajian risiko secara efektif seperti penggunaan analisis.
- Sumber daya yang tersedia cukup memadai. Terdapat 411 risiko yang teridentifikasi dari seluruh unit kerja kemudian dievaluasi dan diukur berdasarkan nilai kemungkinan dan dampak, sehingga diperoleh prioritas risiko yang harus dikendalikan.
- Transparansi pengelolaan risiko yang dihadapi dan kecepatan dalam merespon diharapkan juga dapat ditingkatkan yang didukung oleh mekanisme pelaporan dan monitoring di seluruh level organisasi.

Sedangkan untuk pengukuran maturitas manajemen risiko atau *Risk Maturity Index* (RMI) untuk kinerja tahun 2025, sesuai arahan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Juknis Kementerian BUMN, maka pelaksanaan pengukuran maturitas manajemen risiko akan dilaksanakan pada semester II tahun 2025 setelah terbit laporan kinerja audited.

Risk management maturity measurement has been conducted regularly since 2013. The most recent maturity measurement carried out by PUSRI in 2025 was for the assessment of the 2024 financial year. The Risk Maturity Index (RMI) assessment for the 2024 financial year was conducted from August to October 2025 by the consulting firm Deloitte, coordinated by PT Pupuk Indonesia (Persero).

Based on the results of the Risk Maturity Index (RMI) assessment for the 2024 financial year, it was reported that the maturity dimension score for PT Pusri Palembang was 2.8, categorized as Developing (+) within the five maturity dimension index levels.

Based on the above measurement results, the Risk Management System at PUSRI is considered to be functioning effectively and continues to be developed in accordance with the PUSRI Risk Management roadmap. This can be demonstrated by the following:

- Risk owners have shown awareness in conducting risk self-assessments.
- A risk-aware culture has been sufficiently embedded among risk owners, as indicated by efforts to conduct risk assessments in the Company's operational activities.
- Stakeholders in the Risk Management area are considered sufficiently capable of conducting effective risk assessments, including the use of analytical methods.
- Available resources are adequate. A total of 409 risks have been identified across all work units and subsequently evaluated and measured based on likelihood and impact values to determine risk priorities that must be controlled.
- Transparency in managing the risks faced and responsiveness in addressing them are expected to continue improving, supported by reporting and monitoring mechanisms across all levels of the organization.

Meanwhile, the measurement of risk management maturity or the Risk Maturity Index (RMI) for the 2024 2025 performance year, in accordance with the direction of PT Pupuk Indonesia (Persero) and the Technical Guidelines of the Ministry of State-Owned Enterprises, will be conducted in Semester II of 2025 after the audited performance report has been issued.

PENILAIAN KINERJA OLEH DIREKSI

Pelaksanaan tugas SVP Tata Kelola & Manajemen Risiko selama tahun 2025 telah mencapai target yang direncanakan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tercapainya KPI SVP Tata Kelola dan Manajemen Risiko sebesar 104,41%.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE INVESTASI & MANAJEMEN RISIKO ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran Perusahaan yang telah ditetapkan, Manajemen berkomitmen dalam implementasi manajemen risiko di Perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Investasi & Manajemen Risiko, secara periodik melakukan pembahasan dengan Kompartemen Tata Kelola & Manajemen Risiko. Pembahasan yang dilakukan diantaranya mengenai perkembangan isu-isu internal dan eksternal Perusahaan, risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan, baik pada level korporasi maupun proyek-proyek strategis Perusahaan, beserta mitigasi- mitigasi yang perlu dilakukan, serta rencana dan realisasi program kerja Manajemen Risiko.

Pada tahun 2025, secara umum Manajemen menilai sistem manajemen risiko di PUSRI telah diimplementasikan dengan baik. Hal tersebut di antaranya dibuktikan dengan diperolehnya berbagai penghargaan yang terkait dengan kematangan pengelolaan risiko di Perusahaan.

PERFORMANCE ASSESSMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS

The duties carried out by the SVP of Governance & Risk Management throughout 2025 achieved the planned targets. This is indicated by the achievement of the KPI of the SVP of Governance & Risk Management at 104.41%.

STATEMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS OR THE INVESTMENT & RISK MANAGEMENT COMMITTEE REGARDING THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

In order to achieve the Company's established objectives, Management is committed to implementing risk management within the Company. The Board of Directors and the Board of Commissioners, through the Investment & Risk Management Committee, periodically hold discussions with the Governance & Risk Management Compartment. These discussions include developments related to internal and external issues affecting the Company, the key risks faced by the Company both at the corporate level and in strategic Company projects, the mitigation measures required, and the plans and realization of Risk Management work programs.

In 2025, in general, Management assessed that the risk management system at PUSRI had been implemented effectively. This is evidenced, among other things, by the various awards received related to the maturity of risk management practices within the Company.

KEPATUHAN DAN PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI KEPATUHAN PADA HUKUM

COMPLIANCE AND LEGAL CASES FACED LEGAL COMPLIANCE

PUSRI senantiasa menaati ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perkara hukum adalah permasalahan hukum yang dihadapi PUSRI selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum di pengadilan.

PUSRI consistently complies with applicable laws and regulations in Indonesia. Legal cases refer to legal issues faced by PUSRI during the reporting year that have been submitted through legal proceedings in court.

Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan di tahun 2025 dibanding tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Legal Issues

The legal issues faced by the Company in 2025 compared to 2024 are as follows:

Permasalahan Hukum Legal Issues	2025		2024	
	Perdata Civil	Pidana Punishment	Perdata Civil	Pidana Punishment
PUSRI				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Completed and Legally Binding	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Dalam proses penyelesaian In the Process of Resolution	3	Nihil None	3	Nihil None
Jumlah Total	3	Nihil None	3	Nihil None
Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Directors				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Completed and Legally Binding	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Dalam proses penyelesaian In the Process of Resolution	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Jumlah Total	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Entitas Anak Subsidiary				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Completed and Legally Binding	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Dalam proses penyelesaian In the Process of Resolution	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Jumlah Total	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Jumlah Keseluruhan Grand Total	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None

Selama tahun 2025 terdapat 3 perkara hukum yang masih dalam proses penyelesaian di yaitu penanganan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia berkaitan dengan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Palembang, gugatan perkara perdata perbuatan melawan hukum dan gugatan perlawanan (derden verzet) di Pengadilan Negeri Banjar. Pada saat penyusunan Laporan Tahunan (Annual Report) tahun 2025 ini perkara-perkara hukum dimaksud sudah selesai.

During 2025, there were three legal cases that were still in the process of resolution, namely a cassation proceeding before the Supreme Court of the Republic of Indonesia related to a breach of contract lawsuit at the Palembang District Court, a civil lawsuit concerning an unlawful act, and an opposition lawsuit (*derden verzet*) at the Banjar District Court. At the time of the preparation of this 2025 Annual Report, all of these legal cases had been resolved.

Perkara yang Dihadapi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2025, tidak ada perkara yang dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Informasi tentang Sanksi Administratif

Selama tahun 2025, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan oleh Kementerian BUMN ataupun otoritas lainnya kepada PUSRI, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan.

KEBIJAKAN INSIDER TRADING

Sebagai Perusahaan tertutup yang tidak memperjual belikan sahamnya di Bursa Efek, PUSRI tidak memiliki risiko insider trading yang akan berdampak pada penjualan saham. Saham Perusahaan dimiliki oleh 3 (tiga) entitas yaitu Negara Republik Indonesia, PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. PUSRI meskipun demikian, PUSRI menetapkan larangan penyalahgunaan jabatan dan pekerjaan Insan PUSRI untuk mengungkapkan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan informasi material. Informasi material adalah informasi yang belum dipublikasikan secara luas yang dapat mendorong seseorang untuk bertindak merugikan Perusahaan.

Dengan demikian, PUSRI tidak memiliki kebijakan insider trading dalam 3 (tiga) tahun terakhir, terhitung tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, tidak pernah terjadi transaksi orang dalam yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, manajemen yang berada di bawah Direksi, dan Karyawan Perusahaan.

KETERBUKAAN INFORMASI DAN AKSES DATA PERUSAHAAN KOMUNIKASI INTERNAL

Majalah Internal

Sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim komunikasi internal yang kondusif dan mendukung pencapaian kinerja, Pusri senantiasa membangun komunikasi dua arah melalui berbagai media, salah satunya adalah majalah internal (Buletin Pusri) yang kini hadir dalam format digital atau e-magazine. Majalah internal ini menjadi salah satu sarana komunikasi penting untuk menyebarkan informasi seputar kegiatan perusahaan, termasuk program, kebijakan manajemen, serta berbagai pencapaian strategis. Karyawan juga didorong untuk berkontribusi aktif melalui pengiriman artikel, saran, dan opini yang membangun kepada tim redaksi.

Cases Faced by Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

During 2025, there were no cases faced by members of the Board of Commissioners and the Board of Directors currently in office.

Information on Administrative Sanctions

During 2025, there were no administrative sanctions imposed by the Ministry of State-Owned Enterprises or other authorities on PUSRI, members of the Board of Commissioners, or the Company's Board of Directors.

INSIDER TRADING POLICY

As a closed company whose shares are not traded on the stock exchange, PUSRI does not face insider trading risks that could affect share trading. The Company's shares are owned by three entities: the Government of the Republic of Indonesia, PT Pupuk Indonesia (Persero), and the Employee Welfare Foundation of PT PUSRI. Nevertheless, PUSRI prohibits the misuse of position and employment by PUSRI personnel to disclose material information that could influence decision-making related to such information. Material information refers to information that has not been widely published and may encourage someone to act in a manner that could harm the Company.

Accordingly, PUSRI has not established a specific insider trading policy. In the past three years, from 2023 to 2025, there have been no insider transactions involving the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Supporting Organs of the Board of Commissioners, management under the Board of Directors, or Company employees.

DISCLOSURE OF INFORMATION AND ACCESS TO COMPANY DATA INTERNAL COMMUNICATION

Internal Magazine

As part of efforts to create a conducive internal communication climate and support performance achievement, PUSRI consistently builds two-way communication through various media, one of which is the internal magazine (Pusri Bulletin), which is now available in digital format as an e-magazine. This internal magazine serves as an important communication channel for disseminating information regarding company activities, including programs, management policies, and various strategic achievements. Employees are also encouraged to actively contribute by submitting articles, suggestions, and constructive opinions to the editorial team.

Event Internal Perusahaan

PUSRI menyediakan sarana komunikasi yang menjadi sarana diskusi bagi pekerja dengan pihak Manajemen. Acara ini digelar secara berkala oleh masing-masing unit kerja baik melalui family gathering, rapat kerja, town hall maupun dalam bentuk-bentuk kompetisi olahraga dan event-event lain yang diselenggarakan Perusahaan.

Komunikasi dengan Pemegang Saham

Keterbukaan informasi serta memberikan informasi yang tepat kepada Pemegang Saham juga menjadi fokus Perusahaan. PUSRI menyediakan media komunikasi dengan Pemegang Saham melalui RUPS, baik yang dilakukan secara sirkuler maupun fisik (pertemuan langsung).

Media komunikasi lain adalah melalui laporan Perusahaan yang disampaikan kepada Pemegang Saham seperti Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Manajemen bulanan. Selain itu, Pemegang Saham juga rutin melaksanakan rapat evaluasi kinerja bulanan, video conference dengan PUSRI guna mengomunikasikan kebijakan atau informasi penting terkait kegiatan usaha Perusahaan.

KOMUNIKASI EKSTERNAL

Website

Website resmi PUSRI berada pada alamat www.pusri.co.id. Website tersebut menyediakan informasi dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Melalui website resmi Perusahaan, pemangku kepentingan dapat menemukan berbagai informasi penting mengenai Perusahaan.

Laporan Tahunan

PUSRI setiap tahunnya menyediakan informasi mengenai pencapaian Perusahaan melalui Laporan Tahunan. Laporan tersebut disusun dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Laporan Tahunan dipublikasikan untuk Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya. Publikasi kepada Pemegang Saham diberikan saat pelaksanaan RUPS Tahunan, sedangkan untuk pemangku kepentingan melalui media website. Laporan Tahunan PUSRI memuat informasi mengenai Ikhtisar Data Keuangan dan Operasi, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, Profil Perusahaan, Sumber Daya Manusia, Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial, dan Laporan Keuangan yang telah diaudit KAP pada tahun buku terkait.

Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan adalah laporan Perusahaan atas program tanggung jawab sosial Perusahaan baik dari sisi ekonomi, tata kelola Perusahaan yang baik, lingkungan,

Internal Company Events

PUSRI provides communication channels that serve as forums for discussion between employees and management. These events are held periodically by each work unit through activities such as family gatherings, work meetings, town hall meetings, sports competitions, and other events organized by the Company.

Communication with Shareholders

Information disclosure and the provision of accurate information to shareholders are also a focus of the Company. PUSRI provides communication channels with shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS), conducted either through circular resolutions or physical meetings.

Other communication channels include corporate reports submitted to shareholders, such as the Annual Report, Sustainability Report, and monthly Management Reports. In addition, shareholders routinely conduct monthly performance evaluation meetings and video conferences with PUSRI to communicate policies or important information related to the Company's business activities.

EXTERNAL COMMUNICATION

Website

PUSRI's official website is available at www.pusri.co.id. The website provides information in two languages, Indonesian and English. Through the official company website, stakeholders can access various important information about the Company.

Annual Report

Each year, PUSRI provides information regarding the Company's achievements through its Annual Report. The report is prepared in two languages, Indonesian and English, and is published for shareholders and other stakeholders. Distribution to shareholders takes place during the Annual General Meeting of Shareholders, while stakeholders can access the report through the website. The PUSRI Annual Report contains information on Financial and Operational Data Highlights, the Report of the Board of Commissioners, the Report of the Board of Directors, Company Profile, Human Resources, Management Discussion and Analysis of the Company's Performance, Corporate Governance, Social Responsibility, and Financial Statements audited by a Public Accounting Firm for the relevant financial year.

Sustainability Report

The Sustainability Report presents the Company's programs related to corporate social responsibility from economic, governance, environmental, labor,

ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta program CSR yang dilakukan selama setahun di PUSRI. Laporan Keberlanjutan disampaikan kepada pemangku kepentingan melalui media *website*.

Siaran Pers

PUSRI secara aktif mempublikasikan berbagai kegiatan dan peristiwa penting perusahaan kepada media massa melalui siaran pers resmi. Publikasi ini disampaikan kepada media cetak maupun media online sebagai bagian dari upaya transparansi dan penyebaran informasi kepada publik serta pemangku kepentingan.

Media Visit

Guna mengoptimalkan pemberitaan mengenai kegiatan dan kinerja Perusahaan PUSRI rutin mengundang media massa untuk mengunjungi dan meliput kegiatan di lokasi operasi dan proyek Perusahaan. Serta manajemen PUSRI juga melaksanakan media visit ke kantor media masa yang ada di Sumatera Selatan. Melalui liputan tersebut diharapkan akan meningkatkan publikasi positif Perusahaan.

Pemberitaan di Media Cetak & Online

Dari seluruh kegiatan publikasi yang dilakukan Perusahaan di berbagai media massa, PUSRI melakukan monitoring pemberitaan seputar kegiatan Perusahaan. Jumlah dan jenis hasil pemberitaan di media cetak dan online sepanjang 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pemberitahuan Type of Coverage	Total	Persentase (%) Percentage
1	Positive	1.310	92,0
2	Netral Neutral	89	6,3
3	Negative	6,3	1,8
Jumlah Total		1.424	100

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL

PUSRI menggunakan sarana media sosial Twitter @pusripalembang, Facebook PUSRI Palembang, dan Instagram @pusripalembang. Sebagai salah satu media komunikasi dengan publik.

Media Sosial Social Media	Konten Content	
	2025	2024
Twitter	446	540
Instagram	240	217
Facebook	148	176
Tiktok	125	103

occupational health and safety, and CSR program perspectives carried out during the year at PUSRI. The Sustainability Report is made available to stakeholders through the Company's website.

Press Releases

PUSRI actively publishes various company activities and important events to the mass media through official press releases. These publications are distributed to both print and online media as part of the Company's commitment to transparency and information dissemination to the public and stakeholders.

Media Visits

To optimize media coverage regarding the Company's activities and performance, PUSRI regularly invites media organizations to visit and cover activities at its operational sites and project locations. PUSRI's management also conducts media visits to media offices in South Sumatra. These activities are expected to enhance positive publicity for the Company.

Coverage in Print and Online Media

From all publication activities carried out by the Company across various mass media outlets, PUSRI monitors media coverage related to the Company's activities. The number and types of media coverage in print and online media throughout 2025 are as follows:

USE OF SOCIAL MEDIA

PUSRI utilizes social media platforms including Twitter @pusripalembang, Facebook PUSRI Palembang, and Instagram @pusripalembang as communication channels with the public.

KODE ETIK DAN PAKTA INTEGRITAS

CODE OF CONDUCT AND INTEGRITY PACT

Bagi PUSRI, Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas yang tinggi merupakan aset yang sangat berharga yang dimiliki, yang diyakini mampu memastikan tercapainya target kinerja dan tujuan jangka panjang Perusahaan. Agar insan PUSRI dapat memiliki integritas yang tinggi dan mencerminkan nilai-nilai korporasi yang dimiliki Perusahaan, PUSRI mengeluarkan Pedoman Kode Etik Perusahaan atau *Code of Conduct* yang ditandatangani pada bulan tanggal 12 Maret 2025 oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Penetapan Kode Etik Perusahaan ini menjadi sebuah pernyataan umum tertulis yang menggambarkan standar etika usaha PUSRI yang harus dilaksanakan oleh seluruh insan PUSRI dalam menjalin hubungan dengan sesama insan PUSRI, pelanggan, pemasok, pemegang saham, pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kode Etik Perusahaan tersebut berlaku bagi seluruh insan PUSRI mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan. Pedoman Perilaku dikembangkan berdasarkan filosofi bisnis dan budaya kerja PUSRI, peraturan perundang-undangan, praktik umum (*common practices*) dalam dunia usaha serta peraturan internal PUSRI yang terkait, termasuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direksi dan Serikat Pekerja serta pedoman tata tertib kerja karyawan.

Kode Etik Perusahaan tidak dimaksudkan untuk mengganti Pedoman tata tertib kerja karyawan ataupun peraturan/pedoman sejenis lainnya, tetapi lebih ditujukan untuk menyempurnakan, sehingga bersifat saling melengkapi antara satu dan lainnya. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku tetap mengacu pada pedoman tata tertib kerja karyawan serta berdasarkan kebijakan Perusahaan.

ISI KODE ETIK PERUSAHAAN

Kode Etik Perusahaan menjelaskan kebijakan berperilaku di PUSRI, jenis-jenis pelanggaran, mekanisme pengaduan pelanggaran maupun sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Kebijakan dalam Pedoman Perilaku mengatur hal-hal yang menjadi tanggung jawab Perusahaan, individu jajaran PUSRI maupun pihak lain yang melakukan hubungan bisnis dengan PUSRI.

For PUSRI, Human Resources with high integrity are a highly valuable asset that the Company possesses, which is believed to be capable of ensuring the achievement of performance targets and the Company's long-term objectives. In order for PUSRI personnel to maintain high integrity and reflect the corporate values upheld by the Company, PUSRI issued the Company's Code of Conduct guidelines or Code of Conduct, which were signed on November 10, 2022 by the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

The establishment of the Company's Code of Conduct serves as a written general statement describing PUSRI's business ethics standards that must be implemented by all PUSRI personnel in building relationships with fellow PUSRI personnel, customers, suppliers, shareholders, the government, the public, and other stakeholders.

The Company's Code of Conduct applies to all PUSRI personnel, starting from the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees. The Code of Conduct guidelines were developed based on PUSRI's business philosophy and work culture, applicable laws and regulations, common practices in the business world, as well as relevant internal PUSRI regulations, including the Collective Labor Agreement (PKB) between the Board of Directors and the Labor Union, as well as employee work discipline guidelines.

The Company's Code of Conduct is not intended to replace employee work discipline guidelines or other similar regulations/guidelines, but rather to complement and refine them, so that they mutually support one another. Provisions regarding the imposition of sanctions for violations of the Code of Conduct guidelines continue to refer to employee work discipline guidelines and are based on Company policy.

CONTENT OF THE COMPANY'S CODE OF CONDUCT

The Company's Code of Conduct explains behavioral policies at PUSRI, types of violations, mechanisms for reporting violations, as well as sanctions for violations that occur. The policies contained in the Code of Conduct guidelines regulate matters that constitute the responsibilities of the Company, individual members of PUSRI, as well as other parties that engage in business relations with PUSRI.

Isi materi Kode Etik Perusahaan terdiri dari 2 (dua) elemen penting, yaitu Etika Kerja dan Etika Usaha. Etika Kerja menjelaskan sikap dan perilaku antar insan PUSRI, baik sebagai atasan, rekan kerja, maupun bawahan. Sedangkan Etika Usaha menjelaskan bagaimana insan PUSRI beretika, bersikap, dan bertindak dalam menjalin hubungan usaha dan interaksi dengan pemangku kepentingan.

The material content of the Company's Code of Conduct consists of 2 (two) important elements, namely Work Ethics and Business Ethics. Work Ethics explains attitudes and behaviors among PUSRI personnel, whether as supervisors, colleagues, or subordinates. Meanwhile, Business Ethics explains how PUSRI personnel demonstrate ethics, attitudes, and conduct when establishing business relationships and interactions with stakeholders.

Standar Etika Usaha Business Ethics Standards	Keterangan Description
Etika Perusahaan dengan Karyawan Company Ethics with Employees	Perusahaan menyadari peran penting karyawan sebagai pelaku dalam upaya mewujudkan visi dan misi Perusahaan serta dalam menghadapi tantangan yang semakin kompetitif. Oleh karena itu Perusahaan senantiasa berupaya untuk menajamkan fokus dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia serta senantiasa menjaga keselarasan dan keseimbangan hubungan dinamis antara Perusahaan dan karyawan. Dalam melaksanakan etika ini, Perusahaan menerapkan praktik-praktik sebagai berikut: 1. Karyawan diperlakukan secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran. 2. Karyawan memperoleh kondisi kerja yang baik dan aman. 3. Karyawan dibebaskan dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan demi keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. 4. Karyawan berhak untuk memilih apakah akan diwakili secara kolektif atau tidak oleh suatu kelompok serikat pekerja yang representatif. 5. Karyawan berhak untuk menikmati keuntungan riil karena peningkatan kinerja sesuai dengan skema remunerasi yang berlaku. 6. Karyawan memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, promosi, mengikuti pendidikan, pelatihan dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan usaha Perusahaan. 7. Karyawan didorong dan memperoleh peluang untuk dan dalam mengembangkan jiwa kreatif dan dalam berinovasi. 8. Karyawan diberikan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk setiap karya, kreasi, dan inovasi yang telah diciptakan dan memberi kontribusi terhadap kemajuan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The Company recognizes the important role of employees as key actors in realizing the Company's vision and mission and in facing increasingly competitive challenges. Therefore, the Company continuously strives to sharpen its focus on developing the quality of human resources while maintaining alignment and balance in the dynamic relationship between the Company and employees. In implementing this ethic, the Company applies the following practices: 1. Employees are treated fairly and free from bias due to differences in ethnicity, origin, gender, religion, and place of birth. 2. Employees receive good and safe working conditions. 3. Employees are protected from all forms of potential hazards in order to ensure occupational safety and health. 4. Employees have the right to choose whether or not to be collectively represented by a representative labor union. 5. Employees have the right to enjoy tangible benefits from performance improvements in accordance with the applicable remuneration scheme. 6. Employees are provided equal opportunities to obtain employment, promotion, education, training, and further development in line with competencies and the Company's business needs. 7. Employees are encouraged and given opportunities to develop creative spirit and innovation. 8. Employees are provided protection of Intellectual Property Rights (IPR) for every work, creation, and innovation that has been produced and contributes to the Company's progress in accordance with applicable laws and regulations.

Standar Etika Usaha Business Ethics Standards	Keterangan Description
Etika Perusahaan dengan Pelanggan Company Ethics with Customers	Perusahaan mengutamakan kepuasan pelanggan secara profesional melalui peningkatan standar mutu produk dan pelayanan sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat, yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Tempat dan Tepat Jenis. Perusahaan berkomitmen memenuhi seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara: 1. Senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas serta mengedepankan standar layanan yang profesional untuk kepuasan pelanggan. 2. Senantiasa memperhatikan kebutuhan para pelanggan dan secara terus menerus memantau, menyempurnakan produk-produk layanan, melalui peningkatan standar kerja yang didukung sistem dan teknologi yang memadai. 3. Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui persyaratan/kontrak yang jelas dan adil. 4. Memperhatikan asas manfaat dan tepat guna bagi peningkatan pelayanan serta kenyamanan kerja dan peningkatan daya saing. 5. Menyediakan layanan pengaduan/pemberian informasi bagi pelanggan yang mudah diakses dan tanpa ada diskriminasi. The Company prioritizes customer satisfaction professionally through improving product and service quality standards in accordance with the principle of the 6 (six) Rights, namely Right Time, Right Quality, Right Price, Right Quantity, Right Place, and Right Type. The Company is committed to fulfilling all agreed provisions in order to enhance customer satisfaction by: 1. Continuously providing good and quality services while prioritizing professional service standards for customer satisfaction. 2. Continuously paying attention to customer needs and consistently monitoring and improving service products through enhanced work standards supported by adequate systems and technology. 3. Respecting the interests of each party through clear and fair requirements/contracts. 4. Paying attention to the principles of usefulness and proper application for improving services, work convenience, and competitiveness. 5. Providing complaint and information services that are easily accessible to customers without discrimination.
Etika Perusahaan dengan Pesaing Company Ethics with Competitors	Perusahaan mendukung sepenuhnya pemberlakuan struktur pasar industri pupuk dan petrokimia yang dicirikan dengan adanya multi-buyers dan multi-sellers atau pasar yang sepenuhnya kompetitif untuk mendorong terciptanya daya saing Perusahaan, dengan cara: 1. Senantiasa melaksanakan usaha dengan memperhatikan kaidah-kaidah persaingan yang sehat dan beretika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Selalu saling menghormati dan menjaga hubungan dengan pesaing. 3. Mendefinisikan posisi pesaing dan menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan kinerja Perusahaan. 4. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengutamakan kualitas produk dan pelayanan. 5. Tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan bisnis yang tidak sehat. The Company fully supports the implementation of a fertilizer and petrochemical industry market structure characterized by multi-buyers and multi-sellers or a fully competitive market to encourage the Company's competitiveness by: 1. Conducting business in accordance with the principles of fair and ethical competition in compliance with applicable laws and regulations. 2. Respecting competitors and maintaining good relations with them. 3. Defining competitors' positions and placing competitors as drivers for improving the Company's performance. 4. Conducting fair competition by prioritizing product and service quality. 5. Not violating laws and regulations related to monopoly and unfair business competition.

Standar Etika Usaha Business Ethics Standards	Keterangan Description
Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa Company Ethics with Goods and Service Providers	Prinsip hubungan Perusahaan dengan penyedia barang dan jasa adalah terwujudnya pengadaan barang dan jasa secara efisien, efektif, transparan, bersaing, serta adil dan wajar sehingga akan diperoleh barang maupun jasa yang memenuhi QCDS (<i>quality, cost, delivery, service</i>) sesuai dengan persyaratan teknis yang diharapkan. Untuk itu, dalam proses pengadaan barang dan jasa, Perusahaan akan menjalankan proses kompetisi secara fair, terbuka dan profesional dengan cara: 1. Menetapkan penyedia barang dan jasa tidak hanya berdasarkan pertimbangan harga, tetapi juga kualitas yang sesuai dengan kebutuhan, waktu yang tepat sesuai kesepakatan, dan kelangsungan hubungan usaha jangka panjang. 2. Memperhatikan kelaziman berusaha yang saling menguntungkan semua pihak serta pemberlakuan sanksi dan penyelesaian perselisihan berdasarkan surat perjanjian dan sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku. 3. Melaksanakan proses pengadaan secara transparan, kompetitif dan adil untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang memenuhi kualifikasi persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Membangun komunikasi dan membina hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai bagian dari market dan competitor intelligence. 5. Menerapkan teknologi informasi pengadaan barang dan jasa untuk meminimalisasi tindak kecurangan (<i>fraud</i>). The principle of the Company's relationship with goods and service providers is to achieve the procurement of goods and services efficiently, effectively, transparently, competitively, fairly, and reasonably so that goods and services fulfilling QCDS (<i>quality, cost, delivery, service</i>) in accordance with expected technical requirements can be obtained. Therefore, in the procurement process of goods and services, the Company will conduct a fair, open, and professional competitive process by: 1. Determining goods and service providers not only based on price considerations but also on quality in accordance with needs, timely delivery according to agreement, and the sustainability of long-term business relations. 2. Observing mutually beneficial business practices and applying sanctions and dispute resolution based on agreements and in accordance with applicable Company provisions. 3. Conducting procurement processes transparently, competitively, and fairly to obtain goods/service providers who meet work qualification requirements and accountable prices. 4. Building communication and maintaining good relations with goods and service providers as part of market and competitor intelligence. 5. Implementing information technology in the procurement of goods and services to minimize fraudulent actions (<i>fraud</i>).
Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja Company Ethics with Business Partners	Perusahaan senantiasa memandang mitra kerja sebagai partner strategis, oleh karena itu pengelolaan kerja sama tidak terlepas dari prinsip GCG dan dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku, antara lain: 1. Menjalani kerja sama yang saling menguntungkan, terpenuhinya hak & kewajiban semua pihak sesuai persyaratan yang telah ditetapkan/disepakati serta menjaga citra atau brand image Perusahaan. 2. Mengusahakan tercapainya hasil terbaik dan optimal sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3. Membangun komunikasi yang intensif dengan mitra kerja dalam rangka koordinasi dan pencapaian solusi terbaik untuk penyelesaian perselisihan. 4. Bertindak adil terhadap semua mitra kerja, tanpa memihak pada seseorang, golongan atau pihak tertentu. The Company always views business partners as strategic partners; therefore, the management of cooperation adheres to GCG principles and is carried out in accordance with prevailing business practices, including: 1. Establishing mutually beneficial cooperation, fulfilling the rights and obligations of all parties according to agreed requirements, and maintaining the Company's image or brand image. 2. Striving to achieve the best and optimal results in accordance with applicable procedures. 3. Building intensive communication with business partners for coordination and achieving the best solutions in resolving disputes. 4. Acting fairly toward all business partners without favoring any individual, group, or certain party.

Standar Etika Usaha Business Ethics Standards	Keterangan Description
Etika Perusahaan dengan Kreditur/ Investor Company Ethics with Creditors/ Investors	Perusahaan melakukan kerja sama dengan kreditur/investor hanya ditujukan untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah Perusahaan dengan cara: 1. Memenuhi kewajiban kepada kreditur sesuai perjanjian dan memberikan laporan tentang penggunaan dana kreditur tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Memberikan informasi yang aktual, prospektif, transparan, akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman. 3. Covenant yaitu Perusahaan menjamin untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan kreditur. 4. Membuat perjanjian yang sah atas pinjaman/ penanaman modal dengan mengedepankan prinsip kewajaran (fairness). 5. Menjajaki peluang bisnis dengan kreditur/ investor untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan yang didasarkan pada peraturan perundangan dan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas. 6. Mengedepankan aspek kredibilitas dan bonafiditas serta legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pemilihan kreditur/investor The Company conducts cooperation with creditors/investors solely for business interests and to increase the Company's added value by: 1. Fulfilling obligations to creditors according to agreements and providing reports on the use of creditor funds in accordance with applicable provisions. 2. Providing information that is current, prospective, transparent, accurate, timely, and accountable both when requesting and using loans. 3. Covenant, namely the Company guarantees to perform or not perform certain actions to protect the interests of creditors. 4. Making valid agreements for loans/investments by prioritizing fairness principles. 5. Exploring business opportunities with creditors/investors to enhance the Company's growth based on laws and regulations and the principles of integrity and accountability. 6. Prioritizing credibility, bona fide status, and accountable legality in selecting creditors/ investors.
Etika Perusahaan dengan Pemerintah Company Ethics with the Government	Perusahaan dalam menjalin hubungan dengan Pemerintah, mempunyai kebijakan antara lain: 1. Menjunjung tinggi kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan usaha dan status Perusahaan. 2. Mengembangkan hubungan baik serta komunikasi efektif dengan setiap jajaran pemerintah dalam batas toleransi sesuai dengan peraturan Perusahaan dan hukum yang berlaku, dan memelihara hubungan tersebut sebagai hubungan yang bersifat arms-length dan harus dihindari terjadinya penyelewengan. In establishing relationships with the Government, the Company has policies including: 1. Upholding compliance with applicable laws, regulations, and legislation related to the Company's business and status. 2. Developing good relationships and effective communication with government institutions within tolerance limits in accordance with Company regulations and applicable law, and maintaining such relationships on an arm's-length basis while preventing any form of misconduct.

Standar Etika Usaha Business Ethics Standards	Keterangan Description
Etika Perusahaan dengan Masyarakat Company Ethics with the Community	Perusahaan menyadari peran penting masyarakat terhadap kelangsungan proses bisnis Perusahaan. Oleh karena itu Perusahaan senantiasa mewujudkan sinergi dengan jalan: 1. Saling menghormati hak dan kewajiban serta menjalin hubungan baik berdasarkan prinsip hidup saling berdampingan dan saling menguntungkan. 2. Meminimalkan potensi konflik melalui dialog dengan wakil masyarakat untuk mencapai kesepahaman bersama serta tercipta hubungan yang kondusif. 3. Senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai luhur budaya masyarakat sekitar. 4. Mengupayakan komitmen jangka panjang terhadap masyarakat sekitar sehingga tatanan sosial dan ekonomi masyarakat akan terlindungi dan apabila mungkin ditingkatkan sepanjang keberadaan operasional Perusahaan di tempat tersebut dan sesudahnya. 5. Mengembangkan sensitivitas, kepekaan Perusahaan terhadap kondisi masyarakat dalam rangka fungsi PSO Perusahaan. The Company recognizes the important role of the community in sustaining the Company's business processes. Therefore, the Company consistently builds synergy by: 1. Respecting rights and obligations and establishing good relations based on the principle of coexistence and mutual benefit. 2. Minimizing potential conflicts through dialogue with community representatives to reach mutual understanding and create conducive relations. 3. Continuously adapting to the development of noble cultural values of the surrounding community. 4. Pursuing long-term commitments to surrounding communities so that their social and economic structures are protected and, if possible, improved throughout the Company's operational presence and afterward. 5. Developing corporate sensitivity and awareness of community conditions in relation to the Company's PSO function.
Etika Perusahaan dengan Media Massa Company Ethics with Mass Media	Perusahaan bermitra dengan media massa untuk membangun citra Perusahaan dengan jalan: 1. Melakukan promosi melalui media massa. 2. Mengundang media massa untuk meliput acara Perusahaan jika diperlukan. 3. Menindaklanjuti kritik-kritik yang disampaikan melalui media massa dengan tetap memperhatikan aspek risiko. 4. Membina hubungan baik dan sekaligus menyampaikan informasi perkembangan Perusahaan dengan media massa melalui silaturahmi ke kantor media massa, press release dan dapat menyelenggarakan ajang penghargaan jurnalistik. 5. Memperhatikan catatan-catatan dan saran media yang sejauh mungkin relevan dengan perlunya langkah penyesuaian oleh Perusahaan. 6. Memperhatikan kebijakan nasional untuk kebebasan informasi publik sesuai UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksanaannya dan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Perusahaan. The Company partners with mass media to build the Company's image by: 1. Conducting promotions through mass media. 2. Inviting mass media to cover Company events when necessary. 3. Following up on criticisms delivered through mass media while considering risk aspects. 4. Maintaining good relations and delivering information about Company developments to mass media through visits to media offices, press releases, and organizing journalism awards. 5. Taking into consideration notes and suggestions from media that are relevant to the need for Company adjustments. 6. Observing national policies on public information freedom in accordance with Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure as regulated in its implementing regulations and adjusted to the Company's conditions.

Standar Etika Usaha Business Ethics Standards	Keterangan Description
Etika Perusahaan dengan Asosiasi Profesi Company Ethics with Professional Associations	Perusahaan menjalin sinergi berkelanjutan dengan asosiasi profesi untuk kepentingan pengembangan usaha dan peluang bisnis, serta penyelesaian masalah yang terjadi dengan tetap memperhatikan: 1. Standar-standar yang ditetapkan asosiasi profesi. 2. Kesetaraan perlakuan terhadap asosiasi profesi. 3. Memperhatikan dan mempelajari pengembangan sistem baru baik sistem industri maupun sistem bisnis yang dapat menjadi referensi bagi Perusahaan. The Company maintains continuous synergy with professional associations for business development and opportunities, as well as for resolving issues, while considering: 1. Standards established by professional associations. 2. Equal treatment toward professional associations. 3. Observing and studying developments in new systems, both industrial and business systems, that may serve as references for the Company.
Etika Kerja Sesama Insan PUSRI Work Ethics Among PUSRI Personnel	Dalam bersikap dan bertindak insan PUSRI: 1. Patuh pada ketentuan hukum dan perundangan serta peraturan Perusahaan. 2. Tidak diperkenankan untuk melakukan penerimaan manfaat atas kekuasaan, jabatan, fungsi dan tugas, baik secara langsung ataupun tidak langsung atas janji, pembayaran, tawaran atau penerimaan suap. 3. Menghindari segala bentuk dan jenis benturan kepentingan. 4. Mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha sejalan dengan undang-undang persaingan usaha serta peraturan pemerintah terkait. 5. Menghindari tindakan ilegal, serta persaingan yang berlebihan tanpa landasan keekonomian dan penggunaan praktik yang tidak fair atau perilaku menyimpang dalam upaya mencari laba. 6. Mengupayakan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku. 7. Dalam hubungan dengan etika kerja sesama Insan PUSRI, dilandasi dengan: 8. Bekerja secara profesional untuk menghasilkan kinerja yang optimal. 9. Jujur dan sopan. 10. Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. 11. Saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. 12. Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan. 13. Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas. 14. Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif secara santun. 15. Menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras dan antar golongan. In attitude and conduct, PUSRI personnel: 1. Comply with legal provisions, legislation, and Company regulations. 2. Are not permitted to receive benefits arising from authority, position, functions, or duties, either directly or indirectly, through promises, payments, offers, or acceptance of bribes. 3. Avoid all forms and types of conflict of interest. 4. Support the principles of business competition in accordance with competition law and related government regulations. 5. Avoid illegal actions and excessive competition without economic basis as well as unfair practices or deviant behavior in pursuing profit. 6. Obtain information through lawful means and store and use it in accordance with applicable business ethics principles. 7. In relations concerning work ethics among PUSRI personnel, the following principles apply: 8. Working professionally to achieve optimal performance. 9. Being honest and courteous. 10. Respecting one another, being open to criticism and suggestions, and resolving problems through deliberation and consensus. 11. Helping, motivating, and cooperating with each other in completing tasks. 12. Communicating new ideas and sharing knowledge and capabilities. 13. Taking initiative and developing competencies in carrying out duties. 14. Courageously discussing inappropriate policies to provide constructive corrections in a respectful manner. 15. Respecting differences in gender, ethnicity, religion, race, and intergroup relations.

Standar Etika Usaha Business Ethics Standards	Keterangan Description
Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan Maintaining the Confidentiality of Company Data and Information	Insan PUSRI memanfaatkan data dan informasi Perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah dan pengambilan keputusan dengan cara: 1. Catatan yang akurat dan andal harus dipelihara setiap waktu. 2. Setiap pembayaran uang, pengalihan kepemilikan, penyelesaian pemberian pelayanan dan transaksi lainnya harus terefleksikan secara penuh dan detail pada sistem akuntansi dan catatan bisnis Perusahaan. 3. Semua pihak harus mengungkapkan semua informasi yang relevan dan bekerja sama sepenuhnya dengan Auditor Internal dan Eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya. 4. Kebijakan Perusahaan melarang insan PUSRI untuk mengungkapkan informasi yang masih bersifat rahasia mengenai Perusahaan atau pelanggan ke luar Perusahaan baik selama masa kerja atau sesudahnya. 5. Perusahaan juga menjaga data khusus milik pelanggan, rekanan dan mitra usaha patungan PUSRI personnel utilize Company data and information to increase added value and support decision-making by: 1. Maintaining accurate and reliable records at all times. 2. Ensuring that every payment, transfer of ownership, completion of services, and other transactions are fully and clearly reflected in the Company's accounting system and business records. 3. Requiring all parties to disclose relevant information and fully cooperate with Internal and External Auditors during compliance audits or other investigations. 4. Observing the Company policy that prohibits PUSRI personnel from disclosing confidential Company or customer information outside the Company during or after employment. 5. Protecting special data belonging to customers, partners, and joint venture partners.
Menjaga Harta Perusahaan Maintaining Company Assets	Perusahaan mengoptimalkan penggunaan harta Perusahaan dengan cara: 1. Bertanggung jawab atas pengelolaan harta Perusahaan dan menghindarkan penggunaannya di luar kepentingan Perusahaan. 2. Mengamankan harta Perusahaan dari kerusakan dan kehilangan. 3. Melakukan penghematan pemakaian energi. The Company optimizes the use of Company assets by: 1. Being responsible for the management of Company assets and avoiding their use outside Company interests. 2. Protecting Company assets from damage and loss. 3. Practicing energy conservation.

Standar Etika Usaha Business Ethics Standards	Keterangan Description
Menjaga Keamanan dan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup Maintaining Security, Occupational Safety, Health, and Environmental Protection	Keamanan dan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu bagian dari tata nilai yang perlu diwujudkan. Untuk mencapai tujuan tersebut Perusahaan bertekad untuk: 1. Membangun landasan kepatuhan sejalan dengan hukum dan peraturan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) dan pelestarian lingkungan serta komitmen sukarela. 2. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai aspek yang berkaitan dengan kinerja K3 dan pelestarian lingkungan. 3. Menetapkan dan pengkajian sasaran, penilaian dan pelaporan kinerja K3 dan pelestarian lingkungan dengan menerapkan best practices yang tepat pada situasi setempat. 4. Memupuk pemahaman yang lebih baik mengenai masalah K3 dan pelestarian lingkungan, terkait dengan aktivitas usaha Perusahaan. 5. Menempatkan K3 dan pelestarian lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan laporan tahunan. 6. Menyertakan partisipasi karyawan sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta pelestarian lingkungan. Security, occupational safety, health, and environmental protection are part of the corporate values that must be realized. To achieve this objective, the Company is committed to: 1. Establishing a foundation of compliance with occupational safety and health (K3) laws and environmental preservation regulations as well as voluntary commitments. 2. Pursuing continuous improvement in aspects related to occupational safety and health performance and environmental preservation. 3. Establishing and reviewing targets, assessing and reporting occupational safety and health performance and environmental preservation by applying best practices suitable to local conditions. 4. Promoting better understanding of occupational safety and health issues and environmental preservation related to the Company's business activities. 5. Integrating occupational safety and health and environmental preservation into the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and annual report. 6. Involving employee participation as part of improving occupational safety and health implementation and environmental preservation.
Mencatat Data Pelaporan Recording Reporting Data	Perusahaan mengelola data secara rapi, tertib, teliti, akurat dan tepat waktu dengan cara: 1. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Menyajikan laporan secara singkat, jelas, tepat, komunikatif untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja. 3. Mengedepankan integritas penyajian laporan dengan tidak menyembunyikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan. 4. Membiasakan untuk melakukan pencatatan kegiatan dalam rangka pengembangan dan penerapan penilaian kinerja perseorangan di lingkungan Perusahaan. The Company manages data in an orderly, systematic, careful, accurate, and timely manner by: 1. Recording data and preparing reports based on correct and accountable sources. 2. Presenting reports concisely, clearly, accurately, and communicatively for decision-making and performance improvement feedback. 3. Prioritizing the integrity of reporting by not concealing data or reports that should be disclosed. 4. Establishing the habit of recording activities for the development and implementation of individual performance assessment within the Company.

Standar Etika Usaha Business Ethics Standards	Keterangan Description
Menerapkan Perilaku Anti <i>Fraud</i> Implementing Anti-Fraud Behavior	Dalam bersikap dan bertindak, Insan PUSRI menerapkan perilaku anti terhadap Fraud (Kecurangan) yaitu dengan tidak melakukan hal-hal yang termasuk Kategori Fraud, antara lain: 1. Korupsi (<i>Corruption</i>) a. Benturan Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>) b. Penyuapan (<i>Bribery</i>) c. Gratifikasi Ilegal (<i>Gratuities</i>) d. Pemerasan Ekonomi (<i>Economic Extortion</i>) 2. Penyalahgunaan Aset a. Penyalahgunaan Kas: i. Pencurian terhadap penerimaan kas yang sudah tercatat (<i>Larceny</i>) ii. Pencurian terhadap penerimaan kas yang belum tercatat (<i>Skimming</i>) iii. Kecurangan Pengeluaran Kas (<i>Fraudulent Disbursement</i>) b. Penyalahgunaan Persediaan dan Aset Lainnya yang dimiliki Perusahaan 3. Kecurangan Laporan a. Kecurangan Laporan Keuangan b. Kecurangan Laporan Non Keuangan In attitude and conduct, PUSRI personnel apply anti-fraud behavior by not committing acts categorized as fraud, including: 1. Corruption a. Conflict of Interest b. Bribery c. Illegal Gratuities d. Economic Extortion 2. Asset Misappropriation a. Cash Misuse: i. Theft of recorded cash receipts (<i>Larceny</i>) ii. Theft of unrecorded cash receipts (<i>Skimming</i>) iii. Fraudulent Disbursement b. Misuse of inventory and other Company assets 3. Fraudulent Reporting a. Financial Statement Fraud b. Non-Financial Report Fraud
Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja Health, Security, and Occupational Safety	Perusahaan menyadari bahwa karyawan merupakan aset tak ternilai bagi Perusahaan, oleh karena itu Perusahaan senantiasa mengelola kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja secara optimal yang bertujuan untuk melindungi karyawan dari risiko pekerjaan demi keberhasilan usaha jangka panjang. Perusahaan selalu berusaha untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan selalu memastikan lokasi usaha, fasilitas, sarana, dan prasarana Perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan dan standar keselamatan kerja yang berlaku. Perusahaan mengelola Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja karyawan dengan cara antara lain : 1. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3). 2. Mempertahankan penghargaan zero accident. 3. Menyertakan partisipasi karyawan sebagai bagian dari implementasi SMK3. 4. Membentuk sistem pengamanan yang dijalankan oleh Biro Pengamanan agar tercipta kondisi kerja yang aman, nyaman, dan terhindar dari gangguan/ ancaman dari luar sehingga karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. The Company recognizes that employees are invaluable assets; therefore, it consistently manages health, security, and occupational safety optimally to protect employees from occupational risks in order to support long-term business success. The Company strives to provide a safe and healthy working environment by ensuring that business locations, facilities, infrastructure, and Company assets comply with applicable laws and occupational safety standards. The Company manages employee health, security, and occupational safety through, among others: 1. Implementing the Occupational Safety and Health Management System (SMK3). 2. Maintaining the zero accident award. 3. Involving employee participation as part of SMK3 implementation. 4. Establishing a security system managed by the Security Bureau to ensure safe and comfortable working conditions and to prevent disturbances or threats from external parties so employees can perform their work properly.

Standar Etika Usaha Business Ethics Standards	Keterangan Description
Menghindari Benturan Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>) dan Penyalahgunaan Jabatan Avoiding Conflict of Interest and Abuse of Authority	Insan PUSRI menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan dengan cara: 1. Selalu mematuhi peraturan, sistem dan prosedur yang ditetapkan Perusahaan. 2. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait. 3. Tidak melakukan aktivitas di luar dinas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan, aktivitas dimaksud tentunya merupakan aktivitas yang dapat bertentangan dengan kinerja jabatan atau yang dapat merugikan Perusahaan. 4. Tidak ada kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung oleh insan PUSRI beserta keluarganya, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, dalam Perusahaan lain yang mengadakan transaksi dengan Perusahaan. 5. Insan PUSRI tidak terlibat dalam jual beli aset Perusahaan (<i>insider trading</i>). 6. Tidak memanfaatkan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 7. Tidak memanfaatkan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 8. Tidak melakukan pekerjaan di luar Perusahaan atau terlibat dalam pengelolaan Perusahaan pesaing. 9. Senantiasa menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap langkah kerja. PUSRI personnel avoid conditions, situations, or impressions of conflict of interest and abuse of authority by: 1. Always complying with Company regulations, systems, and procedures. 2. Not using their position for personal interests or the interests of related parties. 3. Not engaging in external activities that could negatively affect independence and objectivity in decision-making or conflict with job performance or harm the Company. 4. Not holding shares, directly or indirectly, by PUSRI personnel or their families in other companies that conduct transactions with the Company. 5. Not engaging in buying or selling Company assets (<i>insider trading</i>). 6. Not using Company assets for personal or third-party interests. 7. Not using confidential information for personal or third-party interests. 8. Not working outside the Company or participating in the management of competing companies. 9. Always maintaining integrity and accountability in every work step.
Menerima Hadiah/ Cinderamata/ Gratifikasi dan Entertainment Receiving Gifts/Souvenirs/Gratuities and Entertainment	Insan PUSRI tidak menerima hadiah/cinderamata/ gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya, kecuali: 1. Hadiah karena adanya hubungan baik antara Perusahaan dengan pihak lain, tanpa keterikatan perjanjian hingga tidak berdampak merugikan Perusahaan atau sebaliknya tidak merugikan pihak lain. 2. Menerima entertainment dalam bentuk jamuan makan yang wajar. 3. Menerima benda-benda promosi yang mencantumkan logo/nama Perusahaan pemberi. PUSRI personnel do not accept gifts, souvenirs, or gratuities in any form related to their position and work, except: 1. Gifts given as part of good relations between the Company and other parties without contractual obligations and without causing harm to either party. 2. Entertainment in the form of reasonable meals. 3. Promotional items bearing the logo/name of the giving company.

Standar Etika Usaha Business Ethics Standards	Keterangan Description
Memberi Hadiah/ Cenderamata dan Entertainment Giving Gifts/Souvenirs and Entertainment	Insan PUSRI dapat memberikan hadiah/cinderamata dan entertainment kepada pihak lain dengan syarat: 1. Menunjang kepentingan Perusahaan. 2. Tidak dimaksudkan untuk menyuap. 3. Telah dianggarkan oleh Perusahaan. 4. Apabila hadiah/cinderamata berupa benda maka bernilai wajar dan tidak melanggar ketentuan yang tertulis dan harus mencantumkan logo/nama Perusahaan. 5. Hadiah tidak dengan maksud mempengaruhi keputusan pihak lain agar menguntungkan kepentingan insan PUSRI. PUSRI personnel may provide gifts, souvenirs, and entertainment to other parties provided that: 1. It supports Company interests. 2. It is not intended as bribery. 3. It has been budgeted by the Company. 4. If the gift or souvenir is an object, it must have reasonable value, comply with written provisions, and display the Company's logo/name. 5. The gift is not intended to influence the decision of another party to benefit PUSRI personnel.
Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) dan Minuman Keras (Miras) Abuse of Narcotics and Illegal Drugs (Narcotics) and Alcoholic Beverages	1. Insan PUSRI bebas dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan miras 1. PUSRI personnel are free from all forms of abuse of narcotics and alcoholic beverages.
Aktivitas Politik Political Activities	Insan PUSRI bersikap netral terhadap semua partai politik dengan cara: 1. Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan golongan/partai politik tertentu. 2. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif. 3. Tidak membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan. PUSRI personnel maintain neutrality toward all political parties by: 1. Not using Company facilities for the interests of certain groups or political parties. 2. Not holding positions as administrators of political parties and/or members of legislative bodies. 3. Not bringing, displaying, installing, or distributing political party symbols, images, or ornaments within the Company environment.
Etika Penggunaan Media Sosial Ethics of Social Media Use	Insan PUSRI memanfaatkan media sosial bagi kepentingan pribadi maupun kepentingan Perusahaan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi, dengan cara menggunakan pemilihan kata (bahasa) yang tepat, sopan dan layak. 2. Tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan Suku, Agama, dan Ras (SARA). 3. Tidak membuat dan menyebarkan berita bohong (hoax), tidak melakukan pencemaran nama baik, penghinaan, dan ujaran kebencian. 4. Tidak melanggar ketentuan dan Undang-undang Pornografi serta Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU-ITE). PUSRI personnel use social media responsibly for both personal and Company purposes by observing the following: 1. Upholding ethics in communication by using appropriate, polite, and proper language. 2. Not disseminating information related to ethnicity, religion, and race (SARA). 3. Not creating or spreading false information (hoaxes), defamation, insults, or hate speech. 4. Not violating the provisions of the Pornography Law and the Electronic Information and Transactions Law (UU-ITE).

PEMBERLAKUAN KODE ETIK BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Kode etik berlaku untuk seluruh karyawan yang mempunyai hubungan kerja langsung baik karyawan tetap maupun kontrak, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan Kepatuhan terhadap kode etik setiap tahun oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan sebagai bentuk pemberlakuan dan komitmen pelaksanaan kode etik.

SOSIALISASI PEDOMAN KODE ETIK

Kode Etik PUSRI disebarkan kepada semua insan Perusahaan melalui berbagai media. Media sosialisasi penyebaran kode etik antara lain melalui:

1. Website
2. Buku saku
3. Banner & Spanduk

Untuk mewujudkan perilaku yang berlandaskan kode etik tersebut, terdapat sejumlah inisiatif strategis yang dilakukan Perusahaan, antara lain melalui:

1. Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi serta pekerja untuk menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik dalam setiap langkah Perusahaan, yang tertuang dalam Pakta Integritas yang diperbarui setiap awal tahun.
2. Keteladanan Pimpinan dengan memberi contoh sikap dan perilaku yang tidak bertentangan dengan kebijakan dan peraturan Perusahaan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh pekerja Perusahaan yang diperbarui setiap tahun.

UPAYA PENEGAKAN DAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Perusahaan mengatur konsekuensi dari pelanggaran terhadap Pedoman Etika & Perilaku akan diberikan sanksi sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/217/2023 tentang Pemberian Sanksi. Jenis sanksi dibagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

1. Sanksi Ringan, penetapan sanksi:
 - a. Teguran lisan, bersifat internal dari atasan langsung pekerja.
 - b. Teguran tertulis, berlaku untuk seluruh lingkungan unit kerja dan juga mempengaruhi konduite Perusahaan karena merupakan sanksi minimal yang dicatatkan di sistem administratif kepegawaian.
2. Sanksi Sedang, penetapan sanksi:
 - a. Surat peringatan tertulis (Warning Slip) A, berlaku selama 2 bulan
 - b. Surat peringatan tertulis (Warning Slip) B, berlaku selama 4 bulan

IMPLEMENTATION OF THE CODE OF CONDUCT ACROSS ALL ORGANIZATIONAL LEVELS

The Code of Conduct applies to all employees who have a direct employment relationship, both permanent and contract employees, including the Board of Directors and the Board of Commissioners. In addition, a Statement of Compliance with the code of conduct is signed annually by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees as a form of implementation and commitment to enforcing the code of conduct.

DISSEMINATION OF CODE OF CONDUCT GUIDELINES

The PUSRI Code of Conduct is distributed to all Company personnel through various media. The media used for the dissemination of the Code of Conduct include:

1. Website
2. Pocketbook
3. Banners & Spanduk

To realize behavior based on the Code of Conduct, the Company has undertaken several strategic initiatives, including:

1. The commitment of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees to implement good corporate governance in every step of the Company, as stated in the Integrity Pact which is renewed at the beginning of each year.
2. Leadership role models by demonstrating attitudes and behavior that do not conflict with Company policies and regulations regarding Good Corporate Governance.
3. The signing of the Integrity Pact by all Company employees, which is renewed annually.

ENFORCEMENT EFFORTS AND SANCTIONS FOR CODE OF CONDUCT VIOLATIONS

The Company stipulates that violations of the Ethics & Conduct Guidelines will result in sanctions up to and including termination of employment. Based on the Board of Directors Decree No. SK/DIR/217/2023 regarding the Imposition of Sanctions, sanctions are divided into 3 (three) levels, namely:

1. Minor Sanctions, sanction determination:
 - a. Verbal warning, internal in nature from the employee's direct supervisor.
 - b. Written warning, applicable across all work units and also affecting the Company's conduct record because it is the minimum sanction recorded in the administrative employee system.
2. Moderate Sanctions, sanction determination:
 - a. Written warning (Warning Slip) A, valid for 2 months
 - b. Written warning (Warning Slip) B, valid for 4 months

- c. Surat peringatan tertulis (Warning Slip) C, berlaku selama 6 bulan

3. Sanksi Berat, penetapan sanksi: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- c. Written warning (Warning Slip) C, valid for 6 months

3. Major Sanctions, sanction determination: Termination of Employment (PHK)

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK DAN SANKSI YANG DIBERIKAN TAHUN 2025

Berikut uraian jumlah sanksi atas pelanggaran kode etik yang terjadi pada tahun 2025 dan perbandingannya dengan tahun 2024.

NUMBER OF CODE OF CONDUCT VIOLATIONS AND SANCTIONS IMPOSED IN 2025

The following describes the number of sanctions imposed for Code of Conduct violations that occurred in 2024 and a comparison with those in 2023.

Jenis Sanksi Type of Sanction	2025	2024
Sanksi Ringan Minor Sanctions	-	-
Teguran Lisan Verbal Warning	-	-
Teguran Tertulis Written Warning	1	10
Sanksi Sedang Moderate Sanctions	-	-
Surat peringatan tertulis (Warning Slip) A Written Warning Letter (Warning Slip) A	-	-
Surat peringatan tertulis (Warning Slip) B Written Warning Letter (Warning Slip) B	-	-
Surat peringatan tertulis (Warning Slip) C Written Warning Letter (Warning Slip) C	2	2
Sanksi Berat (PHK) Major Sanctions (Termination of Employment)	-	-
Jumlah Total	3	12

EVALUASI PEDOMAN ETIKA DAN TATA PERILAKU

Perusahaan melakukan evaluasi terhadap Kode Etik untuk mengetahui dan mengukur bagaimana kesesuaian Kode Etik dengan kebutuhan Perusahaan serta efektivitas dari program implementasi Kode Etik yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pengembangan terhadap Kode Etik Perusahaan dan perbaikan dari program implementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan.

Pelaksanaan Kode Etik ini diharapkan dapat menjamin Perusahaan melakukan aktivitas bisnis yang beretika baik secara prinsip maupun praktis.

Perubahan Kode Etik Perusahaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kehidupan sosial, adat istiadat, norma, maupun perubahan dan perkembangan bisnis Perusahaan.

Komitmen dan dukungan seluruh Pekerja, Pelanggan dan Mitra Kerja merupakan kunci keberhasilan implementasi Kode Etik dalam aktivitas operasional Perusahaan sehari-hari. Oleh karenanya, Perusahaan menerima berbagai

EVALUATION OF ETHICS AND CODE OF CONDUCT GUIDELINES

The Company conducts evaluations of the Code of Conduct to determine and measure how well the Code of Conduct aligns with the Company's needs and the effectiveness of the Code of Conduct implementation program. Based on the results of the evaluation, improvements to the Company's Code of Conduct and its implementation programs will be carried out continuously.

The implementation of this Code of Conduct is expected to ensure that the Company conducts its business activities ethically, both in principle and in practice.

Amendments to the Company's Code of Conduct are adjusted to applicable laws and regulations, social life, customs, norms, as well as changes and developments in the Company's business.

The commitment and support of all employees, customers, and business partners are key to the successful implementation of the Code of Conduct in the Company's daily operational activities. Therefore,

masuk, kritik dan saran dari pemangku kepentingan terkait.

the Company welcomes input, criticism, and suggestions from relevant stakeholders.

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA PELAKSANAAN

PUSRI memiliki kebijakan pelaporan kepemilikan saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Peraturan ini menegaskan bahwa Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan entitas usaha lain, termasuk setiap perubahannya. Kebijakan yang sama berlaku bagi Direksi dan/atau keluarganya.

Mengingat PUSRI bukanlah perusahaan publik dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia (Persero), tidak ada yang harus dilaporkan mengenai perubahan kepemilikan saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

PUSRI memiliki ketentuan mengenai pengaduan pelanggaran yakni Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Dalam ketentuan ini diatur mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran. Selain itu, diatur juga mengenai tahap penerimaan laporan, tahap penyelidikan sampai kepada tahap pemberian keputusan dan sanksi yang akan diberikan apabila pelanggaran yang dilaporkan terbukti.

Keberadaan WBS merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan. Keberadaan WBS bagi PUSRI diharapkan menjadi sistem yang efektif dalam mengungkap terjadinya berbagai bentuk kecurangan dan mampu menyelesaikannya dalam waktu singkat.

PUSRI telah membangun dan mengimplementasikan Sistem Pengaduan Pelanggaran/WBS melalui aturan internal yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/422/2023 tanggal 02 November 2023 tentang Pemberlakuan Pedoman PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Management System*) di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Penerapan sistem tersebut ditujukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra organisasi.

POLICY ON DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS AND ITS IMPLEMENTATION

PUSRI has a policy regarding the reporting of Company share ownership by the Board of Commissioners and the Board of Directors referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. This regulation stipulates that the Board of Commissioners must report to the State-Owned Enterprise any share ownership held by themselves and/or their families in the Company and other business entities, including any changes. The same policy applies to the Board of Directors and/or their families.

Considering that PUSRI is not a public company and the majority of its shares are owned by PT Pupuk Indonesia (Persero), there are no changes in Company share ownership by the Board of Commissioners and the Board of Directors that need to be reported.

VIOLATION REPORTING SYSTEM

PUSRI has provisions regarding the reporting of violations, namely the Violation Reporting System or *Whistleblowing System* (WBS). These provisions regulate the mechanism for reporting violations. In addition, they regulate the stages of report receipt, investigation, and decision-making, including the imposition of sanctions if the reported violation is proven.

The existence of WBS forms part of the Company's Internal Control System in preventing irregular practices. For PUSRI, the WBS is expected to function as an effective system for revealing various forms of fraud and resolving them promptly.

PUSRI has established and implemented the Violation Reporting System/WBS through internal regulations as stipulated in the Board of Directors Decree No. SK/DIR/422/2023 dated November 2, 2023 concerning the Implementation of PT Pupuk Indonesia (Persero) Guidelines related to the Whistleblowing Management System at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. The implementation of this system aims to create a conducive environment and encourage the reporting of matters that may cause financial or non-financial losses, including actions that may damage the organization's reputation.

RUANG LINGKUP WBS

PUSRI telah mengatur ruang lingkup pengaduan yang ditangani oleh mekanisme WBS, mencakup:

1. Pelanggaran terhadap Kode Etik/Perilaku dan Peraturan Perusahaan
 - a. Pelanggaran Kode Etik/Perilaku merupakan perbuatan yang melanggar kode etik/perilaku dan peraturan relevan lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan.
 - b. Pelanggaran kebijakan/peraturan Perusahaan merupakan pelanggaran terhadap kebijakan/peraturan Perusahaan yang dilakukan secara sengaja dan mengakibatkan adanya kerugian material dan tidak material bagi Perusahaan.
 - c. Perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada:

- a. Bertindak diluar kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang dapat merugikan & merusak/memperburuk citra Perusahaan.
- b. Perbuatan yang melanggar sistem dan prosedur yang diatur dalam Pedoman/Prosedur Perusahaan dan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan;

2. Penipuan.

Perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: melakukan penipuan kepada pihak eksternal dan/atau internal dengan mengatasnamakan Perusahaan, dimana secara riil hal yang disampaikan tidak benar/fiktif dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian Perusahaan/orang yang ditipu;

3. Korupsi

Perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: melakukan mark-up pada proses pengadaan barang dan jasa, penjualan, pembelian dan lainnya untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian Perusahaan;

SCOPE OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM

PUSRI has determined the scope of reports handled by the WBS mechanism, which includes:

1. Violations of the Code of Conduct/Behavior and Company Regulations
 - a. Violations of the Code of Conduct/Behavior are actions that violate the code of conduct/behavior and other relevant regulations established by the Company.
 - b. Violations of Company policies/regulations refer to intentional violations of Company policies or regulations that result in material or non-material losses for the Company.
 - c. Conduct that, based on personal beliefs and social norms, is considered wrong or improper.

Examples of such actions include but are not limited to:

- a. Acting beyond authority for the purpose of benefiting oneself or another party that may harm or damage the Company's reputation.
- b. Actions that violate systems and procedures stipulated in Company Guidelines/Procedures and cause losses to the Company.

2. Fraud

An act committed with the intention of unlawfully benefiting oneself or another person by using a false name or false status, deception, or a series of lies to induce another person to surrender property, extend credit, or waive a debt.

Examples of such conduct include, but are not limited to, deceiving external and/or internal parties by acting in the name of the Company, where the information conveyed is false or fictitious, with the intention of benefiting oneself or another person and causing losses to the Company and/or the deceived party.

3. Corruption

An unlawful act of enriching oneself, another person, or a corporation in a manner that may cause losses to state finances or the national economy.

Examples of such conduct include, but are not limited to, inflating costs (mark-ups) in procurement processes, sales, purchases, and other transactions for the purpose of benefiting oneself or another person, thereby causing losses to the Company.

4. Penyuapan

Tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Tindakan menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: melakukan suap dan/atau memberi suap kepada pihak lain dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Pemerasan

Tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: melakukan pungutan tidak sah dengan unsur paksaan dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain;

6. Gratifikasi yang tidak sah (illegal)

Perbuatan memberi dan/atau menerima dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan Perusahaan.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada:

- a. Menerima hadiah/imbalan dari penyedia jasa sebagai wujud ucapan terima kasih yang melanggar ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.

4. Bribery

The act of giving or promising something to a person with the intention of persuading that person to perform or refrain from performing an act in the course of their duties that is contrary to their authority or obligations and concerns the public interest. It also includes the act of receiving something or a promise while knowing, or reasonably suspecting, that it is intended to induce the recipient to perform or refrain from performing an act in the course of their duties that is contrary to their authority or obligations and concerns the public interest.

Examples of such conduct include, but are not limited to, engaging in bribery and/or giving bribes to other parties in violation of applicable laws and regulations.

5. Extortion

An act of unlawfully benefiting oneself or another person by forcing someone, through violence or threats of violence, to surrender property that wholly or partly belongs to that person or another person, or to incur a debt or relinquish a claim, thereby constituting extortion.

Examples of such conduct include, but are not limited to, collecting unauthorized fees through coercion in any form while performing one's duties for personal, group, or third-party interests.

6. Illegal Gratification

he act of giving and/or receiving, in a broad sense, including money, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, travel tickets, accommodation facilities, leisure trips, free medical treatment, and other facilities, whether received domestically or abroad, and whether conducted through electronic means or otherwise, by Company Personnel in connection with their authority or position within the Company, thereby creating a conflict of interest that may affect their independence, objectivity, or professionalism.

Examples of such conduct include, but are not limited to:

- a. Receiving gifts/rewards from service providers as a form of appreciation in violation of the provisions set forth in the Company's Gratification Control Guidelines.

- b. Menerima janji/hadiah/imbalan dari pihak lain untuk mempengaruhi suatu keputusan yang dapat merugikan Perusahaan melanggar ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan;

- b. Receiving promises, gifts, or rewards from other parties to influence a decision that may be detrimental to the Company, in violation of the provisions set forth in the Company's Gratification Control Guidelines.

7. Kecurangan

Perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat, meliputi penipuan, pemerasan, pemalsuan, menyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, pembuatan dan penggunaan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan atau pihak lain.

7. Fraud

Dishonest acts or deceptive practices, including fraud, extortion, forgery, concealment or destruction of documents/reports, and the creation and use of false documents, committed by an individual or a group that result in potential or actual losses to the Company or other parties.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: membuat dan/ atau menggunakan dan/atau memberikan dan/atau mengubah dan/atau menyalin dan/atau menggandakan data dan/atau keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya sehingga merugikan Perusahaan dan menguntungkan diri sendiri/kelompok;

Examples of such conduct include, but are not limited to, creating, using, providing, altering, copying, and/or reproducing data and/or information that does not reflect actual conditions, thereby causing losses to the Company and benefiting oneself or a group.

8. Pelanggaran Hukum

Tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku.

8. Violation of Law

Actions by an individual or group that violate applicable laws and regulations.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: melakukan hal-hal yang melanggar hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian Perusahaan/orang lain;

Examples of such conduct include, but are not limited to, engaging in unlawful activities with the intention of benefiting oneself or another person, resulting in losses to the Company and/or other parties.

9. Pencurian

Perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

9. Theft

The act of taking property that wholly or partly belongs to another person with the intention of unlawfully possessing it.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: mengambil aset milik Perusahaan dan/atau orang lain/karyawan untuk kepentingan pribadi atau orang lain;

Examples of such conduct include, but are not limited to, taking Company assets and/or assets belonging to another person or employee for personal benefit or for the benefit of another party.

10. Penggelapan

Tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/ harta Perusahaan oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan Perusahaan, dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

10. Embezzlement

A dishonest act involving the concealment of Company property or assets by one or more individuals without the Company's knowledge, with the intention of transferring ownership, exercising control over, or using such assets for other purposes.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: menyalahgunakan atau mengambil tanpa alasan uang, barang, data, dokumen atau barang berharga

Examples of such conduct include, but are not limited to, misappropriating or taking, without justification, money, goods, data, documents, or

lainnya milik Perusahaan dan/atau orang lain yang dikuasakan kepadanya;

11. Kelalaian yang Berdampak Besar

Jenis kesalahan yang terjadi dikarenakan seseorang kurang berhati-hati dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: kelalaian yang dilakukan oleh Insan Perusahaan atas pelaksanaan proses bisnis sehingga memberikan dampak pada terhentinya proses operasional perusahaan dan menyebabkan kerugian Perusahaan baik kerugian finansial dan non finansial;

12. Diskriminasi

Setiap perbedaan, peminggiran (marginalisasi), pembatasan dan/atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung dibuat atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, termasuk status perkawinan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, pilihan politik, disabilitas, yang memiliki dampak atau tujuan pada pengurangan atau penghapusan atas pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan kesempatan atau perbedaan perlakuan atas seseorang atau kelompok orang dalam aktivitas Perusahaan serta dalam interaksi di lingkungan kerja.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: perbedaan perlakuan, pengecualian, atau preferensi dalam hal proses rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, pengupahan dan pemberian manfaat, promosi/demosi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh atasan dengan bawahan, pekerja dengan pekerja, atau kelompok dengan kelompok lain berdasarkan etnis, ras, kebangsaan, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia, disabilitas, atau karakteristik lainnya;

13. Intimidasi

Tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu), gertakan, atau ancaman.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: perbuatan pemaksaan dari atasan kepada bawahan untuk melakukan tugas yang melanggar Peraturan Perusahaan atau hukum;

14. Kekerasan

Setiap tindakan termasuk ancaman yang dilakukan secara sewenang-wenang, terhadap orang lain

other valuables belonging to the Company and/ or other parties that have been entrusted to the individual concerned.

11. Negligence with Significant Impact

A type of error resulting from a person's lack of due care in carrying out actions, which may cause losses to the Company.

Examples of such conduct include, but are not limited to, negligence by Company Personnel in carrying out business processes, resulting in disruptions to the Company's operational activities and causing losses to the Company, whether financial or non-financial.

12. Discrimination

Any distinction, marginalization, restriction, and/ or exclusion, whether direct or indirect, based on religion, ethnicity, race, ethnic origin, group affiliation, social status, including marital status, economic status, gender, language, political preference, or disability, which has the effect or purpose of reducing or eliminating the recognition, exercise, or enjoyment of human rights and fundamental freedoms, thereby resulting in unequal opportunities or differential treatment of individuals or groups within Company activities and workplace interactions.

Examples of such conduct include, but are not limited to, differences in treatment, exclusion, or preference in recruitment and selection processes, performance evaluations, training and development, compensation and benefits, promotion/demotion, and termination of employment, carried out by superiors toward subordinates, among employees, or between groups based on ethnicity, race, nationality, skin color, religion, gender, age, disability, or other characteristics.

13. Intimidation

Acts of frightening, coercing, threatening, or pressuring another person or party, particularly to compel them to do something.

Examples of such conduct include, but are not limited to, coercion by a superior requiring a subordinate to perform tasks that violate Company Regulations or applicable laws.

14. Violence

Any act, including threats, committed arbitrarily against another person in the workplace, whether

di tempat kerja, yang muncul baik secara publik maupun privat, sehingga menyebabkan kerugian fisik, psikologis, maupun seksual.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada: penganiayaan secara fisik/non fisik yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, maupun seksual di lingkungan tempat kerja;

occurring in public or private settings, that causes physical, psychological, or sexual harm.

Examples of such conduct include, but are not limited to, physical or non-physical abuse resulting in physical, psychological, or sexual harm within the workplace environment.

15. Pelecehan

Segala perbuatan di tempat kerja maupun media komunikasi yang tidak sesuai dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang bertujuan mengintimidasi, merendahkan, menghina, mempermalukan seseorang.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada pelecehan fisik, verbal, nonverbal, dan visual serta bentuk pelecehan lainnya;

15. Harassment

Any act in the workplace or through communication media that is inconsistent with laws or regulations concerning human rights and is intended to intimidate, degrade, insult, or humiliate a person.

Examples of such conduct include, but are not limited to, physical, verbal, non-verbal, and visual harassment, as well as other forms of harassment.

16. Penggunaan Dana atau Sumber Daya Publik yang Tidak Sah

Penggunaan dana atau sumber daya publik yang tidak sah oleh Insan Perusahaan sehingga dapat memberikan kerugian bagi internal dan eksternal perusahaan.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada:

penggunaan dana/sumbangan dari partai/pihak eksternal lainnya dalam melaksanakan program kerja perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur Perusahaan;

16. Unauthorized Use of Public Funds or Resources

The unauthorized use of public funds or resources by Company Personnel that may cause losses to the Company, both internally and externally.

Examples of such conduct include, but are not limited to:

The use of funds/donations from political parties or other external parties in carrying out Company work programs in a manner that is inconsistent with the provisions established by the Company.

17. Penyalahgunaan Wewenang

Insan Perusahaan dengan kekuasaan/jabatan yang dimilikinya melakukan penyalahgunaan wewenangnya yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara merugikan Negara dan/atau Perusahaan.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada:

Penyalahgunaan wewenang yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia;

17. Abuse of Authority

Company Personnel who, by virtue of the power or position they hold, abuse their authority for the purpose of benefiting themselves, another person, or a corporation in a manner that causes losses to the State and/or the Company.

Examples of such conduct include, but are not limited to:

Abuse of authority in various forms, such as misuse of authority in decision-making, financial management, or human resource management.

18. Benturan kepentingan

Situasi atau kondisi dimana Insan Perusahaan yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki

18. Conflict of Interest

A situation or condition in which Company Personnel who possess power and authority have, or

atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Contoh perbuatan ini tidak terbatas pada:

- a. Pemberian keputusan penunjukan pihak tertentu sebagai penyedia barang/jasa dengan tidak melalui prosedur yang seharusnya, dimana Insan Perusahaan tersebut memiliki kepentingan ekonomis pada pihak yang ditunjuk tersebut.
- b. Melakukan suatu tindakan/pemberian keputusan yang menguntungkan diri sendiri/orang lain dengan melanggar prosedur Perusahaan; dan

19. Mis-manajemen

Suatu kesalahan/kekeliruan tindakan pada saat proses pemberian bimbingan atau fasilitas-fasilitas manajerial itu berlangsung, atau mismanajemen terjadi karena adanya kesalahan tindakan pada saat proses pencapaian tujuan sedang berlangsung.

Contoh perbuatan ini adalah namun tidak terbatas pada: kesalahan pengambilan keputusan dalam aktivitas bisnis dikarenakan kesalahan/kekeliruan tindakan tanpa ada dasar yang jelas sehingga menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

PUSRI telah mengatur cara penyampaian laporan pelanggaran dengan mengintegrasikan penerapan WBS Perusahaan dengan situs web WBS terintegrasi PT Pupuk Indonesia (Persero) sejak tahun 2023. Hal ini sejalan dengan implementasi GCG menuju proses bisnis yang bersih dan transparan, bebas dari kecurangan (*fraud*), dan melibatkan partisipasi aktif karyawan dalam mencegah kecurangan. Meski pengelolaan WBS masih dilakukan secara internal, Perusahaan memiliki Tim WBS yang bertugas menindaklanjuti laporan dengan melakukan investigasi dan klarifikasi masalah. Pengaduan melalui WBS data dilakukan oleh karyawan atau pemangku kepentingan lainnya yang ditujukan kepada Kesekretariatan WBS Perusahaan.

ALUR PELAPORAN WBS PUSRI

Guna memastikan tindak lanjut atas pengaduan dilakukan dengan baik, proses pemantauan dilakukan Perusahaan secara langsung dan tidak langsung. Pemantauan langsung dilakukan melalui update data di unit terlapor, pertemuan dengan penanggung jawab tindak lanjut, dan wawancara dengan tim yang menangani.

are suspected of having, personal or group interests in the exercise of such power and authority, thereby potentially affecting the quality and performance expected of them.

Examples of such conduct include, but are not limited to:

- a. Making decisions to appoint a particular party as a supplier of goods and/or services without following the proper procedures, where the Company Personnel concerned have an economic interest in the appointed party.
- b. Taking an action or making a decision that benefits oneself and/or another person in violation of Company procedures; and

19. Mismanagement

An error or mistake in action occurring during the process of providing managerial guidance or facilities, or mismanagement arising from errors in action during the process of achieving organizational objectives.

Examples of such conduct include, but are not limited to, errors in decision-making related to business activities resulting from actions taken without a clear basis, thereby causing losses to the Company.

VIOLATION REPORTING MECHANISM

PUSRI has regulated the submission of violation reports by integrating the Company's WBS implementation with the integrated WBS website of PT Pupuk Indonesia (Persero) since 2023. This aligns with the implementation of Good Corporate Governance toward clean and transparent business processes free from fraud while involving active employee participation in preventing fraud. Although the WBS is managed internally, the Company has a WBS Team responsible for following up reports through investigations and clarification processes. Reports through the WBS may be submitted by employees or other stakeholders and are addressed to the Company's WBS Secretariat.

PUSRI WBS REPORTING FLOW

To ensure proper follow-up of complaints, monitoring is conducted both directly and indirectly. Direct monitoring is carried out through updates from the reported unit, meetings with responsible parties handling the follow-up, and interviews with the handling team. Indirect monitoring is conducted through electronic communication and correspondence with related parties.

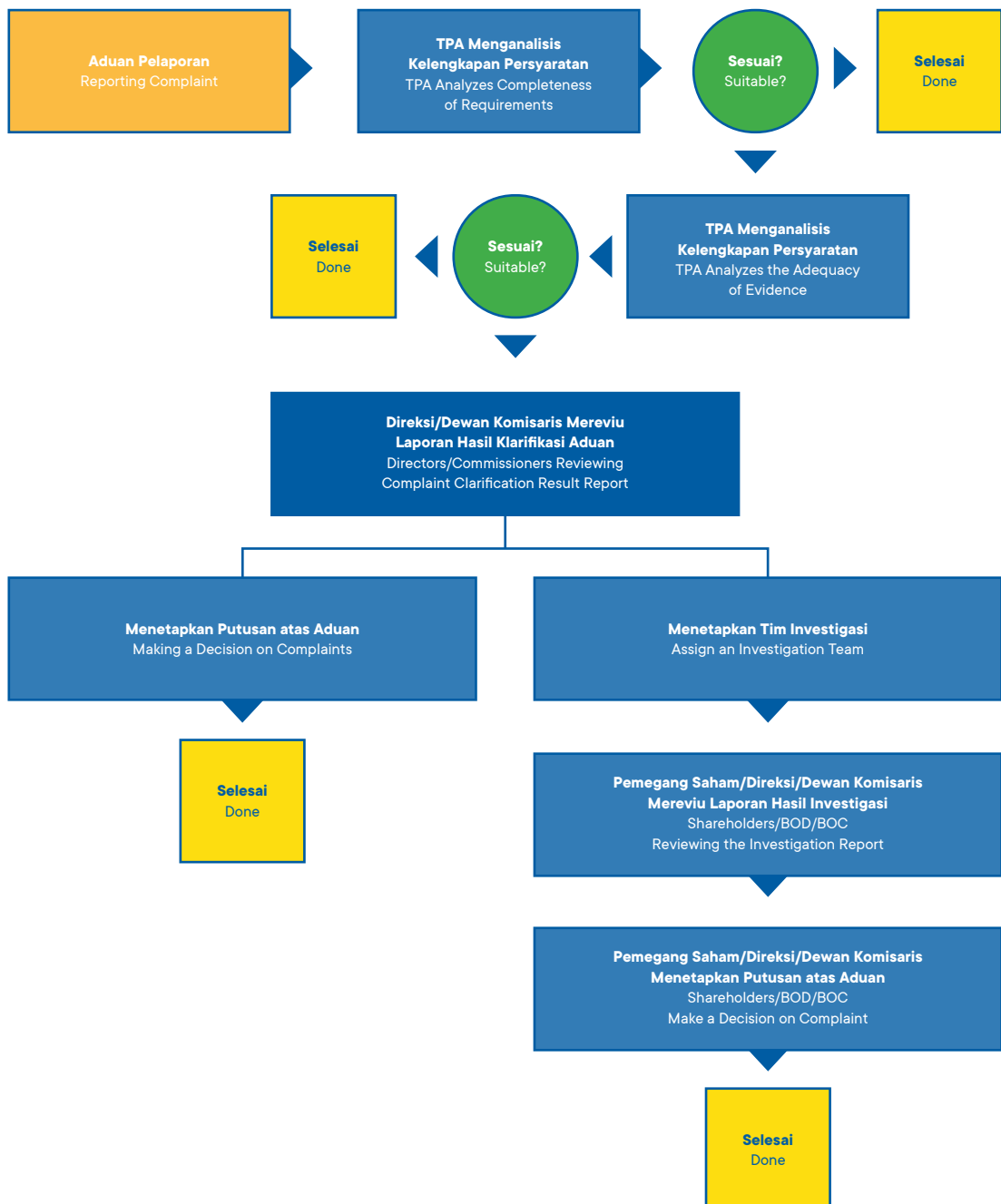
Pemantauan tidak langsung dilakukan dengan komunikasi elektronik dan surat menyurat dengan pihak terkait.

The flow of handling complaints from employees and stakeholders is illustrated in the following diagram.

Adapun alur penanganan pengaduan karyawan dan pihak berkepentingan digambarkan dalam bagan berikut ini.

Flowchart of the Handling of Employee and Stakeholder Complaints

Bagan Alur Penanganan Pengaduan Karyawan dan Pihak Berkepentingan
Flowchart of the Handling of Employee and Stakeholder Complaints



PERLINDUNGAN BAGI BERBAGAI PIHAK TERKAIT

Perusahaan juga memberikan jaminan perlindungan bagi para pelapor, terlapor, petugas terkait, dan pihak berkepentingan lainnya.

- a.** Perlindungan yang diberikan kepada Pelapor dan Petugas Terkait dalam bentuk:
 1. Perlindungan kerahasiaan informasi yang diberikan
 2. Perlindungan atas pengenaan sanksi administrasi/kepegawaian Perusahaan.
 3. Perlindungan dari diskriminasi atau ancaman dari Terlapor dan pihak-pihak terkait penyimpangan yang dilaporkan.
 4. Perlindungan berupa bantuan hukum bagi Pelapor dalam kondisi Pelapor mendabat tuntutan hukum dari pihak yang dilaporkan
 5. Bentuk perlindungan yang diberikan disesuaikan dengan bentuk ancaman/tindakan balasan yang diterima. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di Perusahaan.
 6. Perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan melibatkan pengambilan langkah/upaya untuk mencegah potensi terjadinya kejadian yang merugikan untuk mencegah terjadinya hal yang membahayakan terjadi lebih lanjut.
 7. Dukungan praktis kepada Pelapor dapat berupa dorongan dan meyakinkan Pelapor tentang nilai-nilai pelaporan Pengaduan dan mengambil langkah-langkah untuk membantu kesejahteraan mereka.
 8. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan secara emosional, finansial, hukum, atau reputasi.
- b.** Perlindungan yang diberikan kepada Terlapor yaitu dalam bentuk:
 1. Melindungi identitas:
 2. Melakukan investigasi dengan cara meniaga kerahasiaan dan tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa pihak Terlapor tidak terekspos kemungkinan rusaknya reputasi (informasi dibagikan berdasarkan *need to know basis*)
 3. Memastikan proses penanganan pelaporan termasuk investigasi dan asistensi/pendampingan dilakukan tepat waktu. adil tidak memihak dan rahasia
 4. Memberikan dukungan selama proses berlangsung, termasuk komunikasi secara reguler;
 5. Jika tidak terdapat bukti kesalahan yang ditemukan, tindakan perbaikan dapat dipertimbangkan, misal perbaikan reputasi, keuangan, status pekerjaan.

PROTECTION FOR VARIOUS RELATED PARTIES

The Company also provides protection guarantees for reporters, reported parties, related officers, and other stakeholders.

- a.** Protection provided to Reporters and Related Officers includes:
 1. Protection of the confidentiality of the information provided.
 2. Protection against the imposition of Company administrative/personnel sanctions.
 3. Protection from discrimination or threats from the Reported Party and parties related to the reported misconduct.
 4. Protection in the form of legal assistance for the Reporter if the Reporter faces legal claims from the reported party.
 5. The form of protection provided is adjusted to the nature of the threats or retaliatory actions received. The provision of protection is carried out while observing confidentiality principles and applicable Company regulations.
 6. Protection provided by the Company includes taking steps or measures to prevent potential incidents that may cause harm and to prevent further dangerous situations.
 7. Practical support for the Reporter may include encouragement and assurance regarding the value of reporting complaints and taking steps to support their well-being.
 8. Such support may include emotional, financial, legal, or reputational assistance.
- b.** Protection provided to the Reported Party includes:
 1. Protecting their identity.
 2. Conducting investigations while maintaining confidentiality and taking appropriate actions to ensure that the Reported Party is not exposed to potential reputational damage (information is shared on a need-to-know basis).
 3. Ensuring that the reporting process, including investigation and assistance/support, is conducted in a timely, fair, impartial, and confidential manner.
 4. Providing support during the process, including regular communication.
 5. If no evidence of wrongdoing is found, corrective actions may be considered, such as restoring reputation, financial standing, or employment status.

PENANGANAN PENGADUAN DAN PIHAK PENGELOLA PENGADUAN

PUSRI telah menunjuk Tim Pengelola Pengaduan Karyawan & Stakeholder (Whistleblowing System) yang selanjutnya disebut "Tim Penanganan Aduan" sebagai pihak yang mengelola pengaduan sesuai Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/422/2023 tanggal 02 November 2023 tentang Pemberlakuan Pedoman PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing Management System) di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Tim Penanganan Aduan terdiri dari:

1. Penanggung Jawab: Direktur Pembina
2. Ketua TPA: SVP Tata Kelola & Manajemen Risiko
3. Tim Administrasi Verifikasi: VP Tata Kelola & Tim
4. Tim Investigasi: Satuan Pengawasan Intern

Pengelolaan dan tindak lanjut terhadap pengaduan/pengungkapan yang telah diterima adalah sebagai berikut:

1. Tim pengelola WBS menerima aduan dan memverifikasi terkait pemenuhan persyaratan dan analisis kecukupan bukti aduan.
2. Apabila syarat administratif terpenuhi atau tidak terpenuhi namun dapat diperkaya dengan informasi lebih lanjut maka akan dilakukan penilaian aduan.
3. Apabila syarat administratif tidak terpenuhi dan tidak dapat diperkaya informasinya maka pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti dan diarsipkan.
4. Hasil verifikasi aduan dilaporkan kepada Direktur Utama secara periodik.
5. Jika aduan bukan termasuk tindak pidana korupsi (TPK) maka ditindaklanjuti oleh internal Perusahaan, namun jika termasuk TPK maka dikoordinasikan dengan KPK.

Saluran Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran

CHANNELS FOR SUBMITTING REPORTS OF ALLEGED VIOLATIONS

- ✉ Email : wbs@pusri.co.id
- 🌐 Website : wbs.pupuk-indonesia.com

- ✉ Surat / Mail:
SVP Tata Kelola & Manajemen Risiko
SVP of Governance & Risk Management
Lantai II (Gedung Utama)
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
Jl. Mayor Zen, Palembang 30118

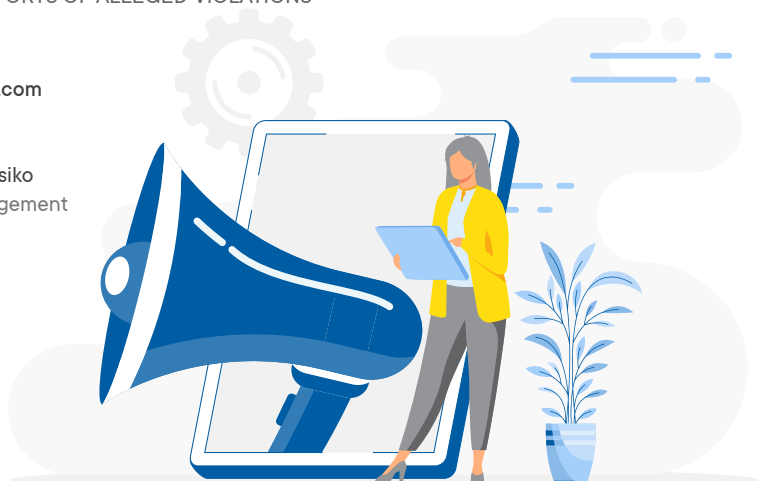
HANDLING OF COMPLAINTS AND COMPLAINT MANAGEMENT PARTIES

PUSRI has appointed the Employee & Stakeholder Complaint Management Team (Whistleblowing System), hereinafter referred to as the "Complaint Handling Team," as the party responsible for managing complaints in accordance with the Board of Directors Decree No. SK/DIR/422/2023 dated November 2, 2023 concerning the Implementation of PT Pupuk Indonesia (Persero) Guidelines related to the Whistleblowing Management System at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. The Complaint Handling Team consists of:

1. Person in Charge: Supervising Director
2. Head of the Complaint Handling Team (TPA): SVP Governance & Risk Management
3. Administrative Verification Team: VP Governance & Team
4. Investigation Team: Internal Audit Unit

The management and follow-up of complaints/disclosures that have been received are carried out as follows:

1. The WBS management team receives complaints and verifies whether the requirements are fulfilled and analyzes the adequacy of the complaint evidence.
2. If the administrative requirements are fulfilled, or if they are not fulfilled but can be supplemented with additional information, an assessment of the complaint will be conducted.
3. If the administrative requirements are not fulfilled and cannot be supplemented with additional information, the complaint cannot be followed up and will be archived.
4. The results of complaint verification are reported periodically to the President Director.
5. If the complaint does not constitute a corruption offense (TPK), it will be handled internally by the Company; however, if it constitutes a corruption offense, it will be coordinated with the Corruption Eradication Commission (KPK).



HASIL PENANGANAN PENGADUAN

Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Tindak Lanjutnya sepanjang tahun 2025,

Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk melalui mekanisme WBS sebanyak 2 (dua) pengaduan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Status	Jumlah Aduan Berdasarkan Saluran Number of Complaints by Channel						Jumlah Aduan Number of Complaints			
		Website		Email		Telepon Telephone		2024		2023	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	Total	%	Total	%
1	Aduan Dugaan Pelanggaran Alleged Violation Complaints	2	1	-	-	-	-	2	100	1	20
2	Bukan Aduan Dugaan Pelanggaran Non-Alleged Violation Complaints	-	4	-	-	-	-	0	0	4	80
Jumlah Total		2	5	-	-	-	-	2	100	5	100

RESULTS OF COMPLAINT HANDLING

Number of Complaints Received and Follow-Up Throughout 2025

The number of violation complaints received through the WBS mechanism amounted to 2 (two) complaints, with the following details:

EVALUASI EFEKTIVITAS WBS

Untuk menjamin efektivitas penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran perlu dilakukan monitoring dan evaluasi Sistem Pelaporan Pelanggaran secara berkala minimal satu tahun sekali. Hal ini dilakukan untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan pada awal dan juga memastikan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan tuntutan bisnis Perusahaan maupun peraturan perundangan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi ini dapat dilakukan sendiri oleh Direksi atau menggunakan pihak luar yang independen. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan Sistem Pelaporan Pelanggaran maupun melakukan pemantauan atas rekomendasi perbaikan. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan kepada Direksi.

EVALUATION OF WBS EFFECTIVENESS

To ensure the effectiveness of the implementation of the Violation Reporting System, monitoring and evaluation of the Violation Reporting System must be conducted periodically at least once a year. This is carried out to achieve the objectives set at the beginning and to ensure that these achievements align with the Company's business demands as well as applicable laws and regulations. Monitoring and evaluation may be conducted internally by the Board of Directors or by an independent external party. The monitoring and evaluation process is carried out to generate recommendations for improving the Violation Reporting System as well as to monitor the implementation of those improvement recommendations. The results of monitoring and evaluation are presented in the form of a report to the Board of Directors.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Hal yang sering terjadi dan tidak bisa dihindari dalam aktivitas suatu bisnis adalah pemberian dan penerimaan gratifikasi. Oleh karena itu, untuk menjaga hubungan bisnis yang tidak bertentangan dengan etika usaha dirasa sangat perlu dibuat aturan mengenai gratifikasi dan tata cara/ mekanisme pelaporannya di PUSRI. PUSRI Bertekad untuk senantiasa berusaha menjalin hubungan bisnis yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan menyusun dan memberlakukan kebijakan pengendalian gratifikasi.

GRATIFICATION CONTROL

One of the occurrences that often arises and cannot be avoided in business activities is the giving and receiving of gratification. Therefore, to maintain business relationships that do not conflict with business ethics, it is considered necessary to establish rules regarding gratification and the procedures/mechanisms for reporting it within PUSRI. PUSRI is committed to consistently fostering business relationships free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) by establishing and implementing a gratification control policy.

Kebijakan pengendalian gratifikasi bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan seluruh Insan PUSRI terhadap ketentuan gratifikasi, membentuk lingkungan PUSRI yang sadar dan paham dalam menangani/mengendalikan segala bentuk gratifikasi, menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya *Good Corporate Governance* di lingkungan PUSRI.

The gratification control policy aims to increase the compliance of all PUSRI personnel with gratification provisions, create an environment within PUSRI that is aware of and understands how to manage/control all forms of gratification, and establish a transparent and accountable environment to support the implementation of *Good Corporate Governance* within PUSRI.

Seluruh Insan PUSRI yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan/ atau keluarga inti (suami/istri, anak) dilarang untuk menerima, meminta, ataupun memberi hadiah berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan segala bentuk gratifikasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh pemangku kepentingan PUSRI.

All PUSRI personnel who, due to their position and contrary to their duties and obligations, as well as their immediate family members (spouse and children), are prohibited from receiving, requesting, or giving gifts in the form of money, parcels, facilities, or any other forms of gratification, either directly or indirectly, from all PUSRI stakeholders.

Unit Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sesuai poin 6.9.1 b. pada Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor SK/DIR/222/2025 tanggal 28 Juli 2025 sebagai berikut:

Gratification Control Unit

The Gratification Control Unit (UPG) of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, in accordance with point 6.9.1(b) of the Gratification Control Guidelines No. SK/DIR/222/2025 dated July 28, 2025, is structured as follows:

Penanggung Jawab : Direktur Manajemen Risiko
Ketua : SVP Tata Kelola & Manajemen Risiko
Sekretaris : VP Tata Kelola

Person in Charge : Director of Risk Management
Chairman : SVP Governance & Risk Management
Secretary : VP Governance

Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

Their duties and responsibilities are as follows:

1. Menyiapkan perangkat aturan terkait penerapan dan pengendalian praktik gratifikasi di lingkungan PUSRI.
2. Menerima, melakukan revidu, dan mengadministrasikan laporan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi dari Insan PUSRI.
3. Menyalurkan laporan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi kepada KPK untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasinya oleh KPK.
4. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan Pedoman Pengendalian Gratifikasi kepada Direksi.
5. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Satuan Pengawasan Intern jika terjadi pelanggaran atas peraturan ini oleh Insan PUSRI.
6. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan PUSRI.
7. Melakukan koordinasi kegiatan diseminasi aturan etika gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal PUSRI.
8. UPG dalam pelaksanaan pekerjaannya dapat mengusulkan dan membuat sistem pengelolaan gratifikasi berbasis teknologi informasi.

1. Preparing regulatory instruments related to the implementation and control of gratification practices within PUSRI.
2. Receiving, reviewing, and administering reports on the receipt, rejection, and provision of gratification from PUSRI personnel.
3. Submitting reports on the receipt, rejection, and provision of gratification to the Corruption Eradication Commission (KPK) for analysis and determination of ownership status.
4. Submitting the results of gratification report management and proposed Gratification Control Guidelines to the Board of Directors.
5. Providing recommendations for follow-up to the Internal Audit Unit if violations of these regulations occur by PUSRI personnel.
6. Conducting assessments of vulnerable areas with potential gratification risks within PUSRI.
7. Coordinating dissemination activities regarding gratification ethics regulations to internal and external parties of PUSRI.
8. In performing its duties, the UPG may propose and develop an information technology-based gratification management system.

Laporan Gratifikasi Tahun 2025

Pengendalian atas penolakan, penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi pada prinsipnya dilakukan oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Seluruh wajib lapor gratifikasi wajib membuat laporan atas penolakan, penerimaan, pemberian, dan permintaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kebijakan ini dan kebijakan tentang penyampaian laporan terkait gratifikasi di lingkungan PUSRI.

Gratification Report in 2025

Control over the rejection, receipt, provision, and request of gratification is principally carried out by the Gratification Control Unit (UPG). All parties obligated to report gratification must prepare reports regarding rejection, receipt, provision, and requests in accordance with the provisions regulated in this policy and in the policy regarding the submission of gratification reports within PUSRI.

Sepanjang tahun 2025, PUSRI tidak menerima laporan mengenai gratifikasi.

Throughout 2025, PUSRI did not receive any reports regarding gratification.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Sesuai dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi mencakup perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/ perekonomian negara (pasal 2); menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/ kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara (pasal 3); kelompok delik penyuapan (pasal 5, 6, dan 11); kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10); delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12); delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7); hingga delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C).

Sejalan dengan hal di atas, Pusri telah menetapkan:

1. Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK/DIR/124/2024 tanggal 04 Maret 2024 tentang Kebijakan Manajemen Terintegrasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
2. Kebijakan Anti Penyuapan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK/DIR/412/2024 tanggal 05 September 2024 tentang Kebijakan Manajemen Anti Penyuapan (*Bribery*) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Secara khusus, pengendalian gratifikasi merupakan upaya Perusahaan untuk melindungi insan PUSRI terhindar dari kemungkinan dijatuhkannya tuduhan tindak pidana suap. Dengan demikian, Perusahaan memiliki komitmen yang tinggi terhadap penegakan anti korupsi, baik dalam pengelolaan operasional dan bisnis Perusahaan, maupun dalam penggunaan jabatan terkait masing-masing insan PUSRI.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dalam rangka mendukung program Pengendalian Gratifikasi, mencegah tindakan korupsi, khususnya mencegah tindakan penyuapan secara berkesinambungan yang selaras dengan Standar ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, PUSRI menerapkan beberapa hal, mencakup:

1. Melarang praktik-praktik penyuapan dan sejenis di lingkungan perusahaan;
2. Mematuhi peraturan perundangan dan peraturan lain yang berlaku terkait anti penyuapan;
3. Menyelaraskan kebijakan anti penyuapan dengan tujuan perusahaan;
4. Memperkuat penerapan tata kelola yang mendukung tercapainya tujuan anti penyuapan di lingkup perusahaan;

ANTI-CORRUPTION POLICY

In accordance with Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, corruption includes unlawful acts that enrich oneself or another person/entity and cause losses to state finances or the national economy (Article 2); abuse of authority due to position that may harm state finances or the national economy (Article 3); bribery offenses (Articles 5, 6, and 11); embezzlement in office offenses (Articles 8, 9, and 10); extortion in office offenses (Article 12); offenses related to procurement (Article 7); and gratification offenses (Articles 12B and 12C).

In line with the above, Pusri has established the following:

1. Anti-Bribery Management System Implementation Policy (ISO 37001) through Board of Directors Decree No. SK/DIR/124/2024 dated March 4, 2024 concerning the Integrated Management Policy of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang;
2. Anti-Bribery Policy through Board of Directors Decree No. SK/DIR/412/2024 dated September 5, 2024 concerning the Anti-Bribery Management Policy of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Specifically, gratification control is an effort by the Company to protect PUSRI personnel from potential allegations of bribery crimes. Therefore, the Company demonstrates a strong commitment to anti-corruption enforcement both in the management of operational and business activities and in the use of authority by each PUSRI personnel.

Anti-Bribery Management System

In order to support the Gratification Control program and prevent corruption, particularly bribery, on an ongoing basis in accordance with ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System standards, PUSRI implements several measures, including:

1. Prohibiting bribery practices and similar actions within the Company;
2. Complying with applicable laws and regulations related to anti-bribery;
3. Aligning anti-bribery policies with Company objectives;
4. Strengthening governance practices that support the achievement of anti-bribery objectives within the Company;

5. Mendorong peningkatan kesadaran anti penyuapan kepada seluruh jajaran terkait.

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Karyawan

Dalam rangka mewujudkan Perusahaan yang bebas dari KKN, PUSRI bekerja sama dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan sosialisasi program dan kebijakan anti korupsi yang rutin dilakukan setiap tahunnya pada hari anti korupsi sedunia (HAKORDIA).

PENGADAAN BARANG DAN JASA

PUSRI mengatur proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan harus memenuhi prinsip-prinsip GCG dan menggunakan cara yang efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan akuntabel untuk mendapatkan barang dan atau manfaat/hasil pekerjaan jasa yang tepat spesifikasi, tepat jumlah, tepat waktu kedatangan/ penyelesaian, tepat ruang lingkup (scope), dan harga yang wajar.

Proses pengadaan barang dan jasa tidak dibenarkan dipecah-pecah menjadi beberapa paket yang besaran nilainya menjadi lebih kecil dengan maksud menghindari proses tender.

Pengadaan barang dan jasa sedapat mungkin memanfaatkan penyedia barang & jasa dalam negeri, dengan memperhatikan usaha kecil, koperasi, anak-anak Perusahaan yang terafiliasi, Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan institusi usaha yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan.

Penyedia jasa yang diundang dalam suatu proses tender/lelang pemilihan penyedia jasa diambil dari vendor database dalam sistem ERP SAP Perusahaan yang disesuaikan dengan kualifikasi kompetensi dan kemampuan finansial dengan mengacu pada sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi jasa terkait atau lembaga sertifikasi serta mempunyai catatan kinerja yang baik dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan proses prakualifikasi. Untuk mencegah terjadinya Kolusi, Korupsi & Nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan barang & jasa, maka calon rekanan yang ikut dalam proses pengadaan diminta untuk menandatangani Pakta integritas.

PEMEMUHAN HAK-HAK POLITIK KARYAWAN DAN KETERLIBATAN PERUSAHAAN DALAM KEGIATAN POLITIK

PUSRI memberikan kebebasan kepada Insan PUSRI untuk menyatakan hak-hak politiknya. Namun Perusahaan memiliki kebijakan untuk melarang keterlibatan individu atas nama Perusahaan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik. Secara tegas, Perusahaan tidak mengizinkan insan PUSRI

5. Encouraging increased awareness of anti-bribery among all relevant personnel.

Anti-Corruption Training/Socialization for Employees

In order to realize a Company free from corruption, collusion, and nepotism (KKN), PUSRI collaborates with the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia to conduct outreach activities regarding anti-corruption programs and policies, which are routinely held every year on International Anti-Corruption Day (HAKORDIA).

PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

PUSRI regulates that the procurement process for goods and services must comply with Good Corporate Governance principles and be conducted in an efficient, effective, competitive, transparent, fair, and accountable manner in order to obtain goods and/or services that meet the correct specifications, correct quantity, correct delivery/completion time, correct scope, and reasonable price.

The procurement process for goods and services must not be divided into several smaller packages with the intention of avoiding the tender process.

Procurement should prioritize domestic goods and service providers while considering small businesses, cooperatives, affiliated companies, subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero), and business institutions that possess the competencies required by the Company.

Service providers invited to participate in tender processes are selected from the vendor database in the Company's ERP SAP system based on competency qualifications and financial capability referring to certificates issued by relevant service associations or certification bodies and must have a good performance record. If necessary, the process may include prequalification. To prevent Collusion, Corruption, and Nepotism (KKN) in procurement processes, prospective partners participating in procurement are required to sign an Integrity Pact.

FULFILLMENT OF EMPLOYEE POLITICAL RIGHTS AND COMPANY INVOLVEMENT IN POLITICAL ACTIVITIES

PUSRI provides freedom for PUSRI personnel to exercise their political rights. However, the Company has a policy prohibiting individuals from participating in political activities on behalf of the Company, including providing political donations. The Company strictly prohibits PUSRI

menggunakan fasilitas atau sumber daya apapun untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik maupun untuk tujuan partisipasi politik, sebagaimana yang telah diatur dalam Kode Etik Perusahaan.

Kode Etik Perusahaan melarang Insan PUSRI terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan melarang Insan PUSRI menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan golongan/partai politik tertentu.
2. Perusahaan melarang Insan PUSRI merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif.
3. Perusahaan melarang Insan PUSRI membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan.

PELAPORAN KEKAYAAN PEJABAT

Prinsip Dasar Pelaporan Kekayaan Pejabat

Sebagai entitas anak dari BUMN yang sepenuhnya dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah Indonesia, PUSRI wajib menaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Pejabat Negara *juncto* perubahannya.

Peraturan tentang Pejabat yang termaksud Wajib Laporan sesuai Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor SK/DIR/467/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan. Hal ini merupakan perluasan Wajib Laporan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan mengacu pada Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-12/MBU/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Serta ratifikasi Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat PT Pupuk Indonesia (Persero).

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang

personnel from using any Company facilities or resources for political campaign purposes, political fundraising, or political participation, as stipulated in the Company's Code of Conduct.

The Company's Code of Conduct prohibits PUSRI personnel from the following:

1. Using Company facilities for the interests of certain groups or political parties.
2. Holding positions as administrators of political parties and/or members of legislative bodies.
3. Bringing, displaying, installing, or distributing symbols, images, or ornaments of political parties within the Company environment.

STATE OFFICIAL ASSET DECLARATION REPORT

Basic Principles of Asset Declaration Reporting

As a subsidiary of a State-Owned Enterprise fully owned by the Government of Indonesia, PUSRI is required to comply with applicable laws and regulations. One such regulation, rooted in the spirit of combating corruption and preventing internal misconduct, is the obligation to submit a State Officials' Asset Declaration (LHKPN).

LHKPN is a comprehensive report of all assets owned by state officials, documented in the LHKPN form issued by the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), as stipulated in KPK Regulation No. 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Assets, along with its amendments.

Regulations concerning officials required to submit such reports are governed by the Board of Directors Decree of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK/DIR/467/2024 dated October 22, 2024 regarding Asset Declaration Reporting Guidelines. This represents an expansion of reporting obligations mandated by Law No. 28 of 1999 concerning State Administration that is Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism, and refers to the Circular Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SE-12/MBU/10/2021 dated October 5, 2021 regarding the obligation for officials within State-Owned Enterprises to submit LHKPN. It also aligns with the ratified Asset Declaration Reporting Guidelines of PT Pupuk Indonesia (Persero).

The examination of LHKPN submitted to the KPK aims to ensure that state officials uphold the general principles

menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap penyelenggara negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai harta kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

Dasar Hukum LHKPN

Perusahaan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Pejabat Negara *juncto* perubahannya;
5. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya;
6. Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-341/MBU/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Pencabutan Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor INS-01/MBU/2009 tentang Penyelenggara Negara yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya;
7. Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor SE-12/MBU/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya;
8. Pedoman Pengelolaan Tata Kelola & Kepatuhan Dokumen: PI-SMT-PD-004 Rev.0 tanggal 3 Oktober 2025;
9. Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor SK/DIR/467/2024 tanggal 22 Oktober 2024.

of good governance and remain free from corruption, collusion, nepotism, and other improper conduct. Each official is required to report their assets truthfully, accurately, and comprehensively using the LHKPN form provided by KPK, enabling the KPK to analyze, evaluate, and assess the completeness, type, and value of the reported assets in a proper, timely, accurate, and accountable manner.

Legal Basis of LHKPN

The Company considers several laws and regulations as the legal basis for implementing LHKPN within the Company environment, namely:

1. Law No. 28 of 1999 concerning State Administration that is Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism in conjunction with Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission;
2. Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption and its amendments;
3. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
4. Regulation of the Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Assets and its amendments;
5. Circular Letter of the Komisi Pemberantasan Korupsi No. 12 of 2017 dated October 13, 2017 concerning Guidelines for the Management of State Officials' Asset Declarations (LHKPN) within State-Owned Enterprises and its amendments;
6. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-341/MBU/10/2021 dated October 5, 2021 concerning the revocation of Instruction of the Minister of State-Owned Enterprises No. INS-01/MBU/2009 regarding State Officials Required to Submit LHKPN within State-Owned Enterprises and its amendments;
7. Circular Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SE-12/MBU/10/2021 dated October 5, 2021 concerning the obligation for officials within State-Owned Enterprises to submit LHKPN and its amendments;
8. Governance & Compliance Management Guidelines Document No. PI-SMT-PD-004 Rev.0 dated October 3, 2025;
9. Asset Declaration Reporting Guidelines of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK/DIR/467/2024 dated October 22, 2024.

Kebijakan LHKPN PUSRI

Sebagai bagian dari penerapan tata kelola Perusahaan yang baik, PUSRI menerapkan kebijakan kepatuhan pelaporan kekayaan pejabat PUSRI yang harus ditaati oleh seluruh pejabat wajib lapor. Kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Pedoman Pelaporan Kekayaan Pejabat PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sesuai dengan SK Direksi No. SK/ DIR/467/2024 tanggal 22 Oktober 2024. Pejabat wajib lapor berkomitmen memenuhi segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaporan kekayaan, serta menyampaikan segala informasi dan data mengenai kekayaan pribadi secara transparan, akuntabel, dan sebenar- benarnya. Adapun yang termasuk pejabat wajib lapor dalam kebijakan LHKPN dimaksud adalah seluruh pejabat di lingkungan Perusahaan yakni Dewan Komisaris, Direksi, Eselon 1, Eselon 2 dan Eselon 3.

Sementara itu, pejabat wajib lapor yang wajib membuat dan menyampaikan laporan kekayaan kepada KPK yaitu pada saat:

1. Pengangkatan sebagai pejabat PUSRI pada saat pertama kali menjabat;
2. Pejabat aktif pada periode per 31 Desember;
3. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai pejabat PUSRI,

Laporan kekayaan disampaikan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; dan bagi wajib lapor yang lalai dalam menyampaikan laporan kekayaan diberikan sanksi sebagai berikut:

1. Teguran secara lisan;
2. Teguran secara tertulis;
3. Penundaan hak atas:
 - a. Pembayaran jasa operasi/bantuan biaya cuti tahunan sejenisnya bagi pejabat aktif, atau
 - b. Pengangkatan definitif bagi pejabat yang mendapatkan promosi jabatan, atau
 - c. Pembayaran pesangon atau sejenisnya bagi pejabat yang pensiun.

Sanksi penundaan hak dapat dicabut setelah kewajiban penyampaian laporan kekayaan telah dilaksanakan. Pengelolaan dan monitoring pelaporan LHKPN di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dilakukan oleh Departemen Tata Kelola c.q. Bagian Tata Kelola Perusahaan di bawah koordinasi SVP Tata Kelola & Manajemen Risiko.

Transparansi LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun Pelaporan 2025

Berikut adalah transparansi penyampaian LHKPN pejabat PUSRI tahun pelaporan 2025 yang dilaporkan di tahun 2026.

PUSRI LHKPN Policy

As part of implementing good corporate governance, PUSRI enforces a compliance policy regarding asset reporting by PUSRI officials which must be adhered to by all reporting officials. This policy is outlined in the Guidelines for Asset Reporting of Officials of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang based on the Board of Directors Decree No. SK/DIR/467/2024 dated October 22, 2024. Reporting officials commit to complying with all applicable laws and regulations related to asset reporting and to submitting all information and data regarding personal assets transparently, accountably, and truthfully. Officials obligated to report under this LHKPN policy include all officials within the Company environment, namely the Company's Board of Commissioners, the Company's Board of Directors, Band 1, Band 2, and Band 3.

Officials required to submit asset reports to the KPK must do so at the following times:

1. Upon appointment as a PUSRI official for the first time;
2. While actively serving, as of December 31 of the reporting period;
3. At the end of their term of office or retirement as a PUSRI official.

Asset reports are submitted through the e-LHKPN application at www.elhkpn.kpk.go.id. Officials who fail to submit asset reports may be subject to the following sanctions:

1. Verbal warning;
2. Written warning;
3. Suspension of rights related to:
 - a. Payment of operational services/annual leave assistance or similar benefits for active officials;
 - b. Definitive appointment for officials receiving promotions;
 - c. Severance payments or similar benefits for retiring officials.

Sanctions in the form of suspension of rights may be revoked once the obligation to submit the asset declaration has been fulfilled. The management and monitoring of LHKPN reporting at PT Pupuk Sriwidjaja Palembang are carried out by the Governance Department, c.q. the Corporate Governance Unit, under the coordination of the SVP Governance & Risk Management.

Transparency of LHKPN of Company Officials for the 2025 Reporting Year

The following is the transparency of the submission of LHKPN by PUSRI officials for the 2025 reporting year, reported in 2026.

No.	Pejabat Officials	Jumlah Wajib Laporan Number Required to Report	Sudah Laporan Submitted Reports	
			Jumlah Total	%
1	Dewan Komisaris Board of Commissioners	6	6	100
2	Direksi Board of Directors	4	4	100
3	Eselon 1	20	20	100
4	Eselon 2	80	80	100
5	Eselon 3	415	415	100
Jumlah Total		525	525	100

PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA

INDONESIAN CORPORATE GOVERNANCE GENERAL GUIDELINES

Sejak akhir tahun 2021 Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) sebagai lembaga resmi di Indonesia yang khusus mensosialisasikan dan mengembangkan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) di Indonesia, telah mengeluarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021, pemutakhiran dari PUGKI yang diterbitkan tahun 2019.

Since the end of 2021, the National Committee on Governance Policy (KNKG), as the official institution in Indonesia dedicated to promoting and developing Good Corporate Governance (GCG) practices, has issued the 2021 Indonesian Corporate Governance General Guidelines (PUGKI 2021), an update to the PUGKI published in 2019.

Pedoman ini dimaksudkan untuk menetapkan praktik governansi korporat berstandar global yang direkomendasikan terutama untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal dan mengelola dana masyarakat guna melindungi kepentingan dan memenuhi harapan para pemegang saham, kreditur, debitur, dan para pemangku kepentingan lain agar tercapai penciptaan nilai korporasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

These Guidelines are intended to establish globally recognized corporate governance practices, particularly recommended for corporations listed on the capital market and managing public funds, in order to protect the interests and meet the expectations of shareholders, creditors, debtors, and other stakeholders, thereby achieving sustainable long-term corporate value creation.

PUGKI ini diharapkan menjadi pedoman bagi setiap korporasi dalam menyusun ketentuan internal governansi korporat dan menerapkannya. Korporasi dapat mengadopsi praktik governansi yang sesuai dengan kebutuhannya, menerapkan praktik dengan mempertimbangkan lingkungan tempat korporasi beroperasi, ukuran dan kompleksitas bisnis, serta sifat risiko dan tantangan yang dihadapi.

PUGKI is expected to serve as a reference for every corporation in formulating and implementing internal corporate governance provisions. Corporations may adopt governance practices appropriate to their needs and apply them by considering the environment in which they operate, the size and complexity of their business, as well as the nature of the risks and challenges they face.

PUGKI 2021, mencakup penyempurnaan berdasarkan perkembangan praktik governansi terkini, mengacu ke global Corporate Governance (CG) Principles, CG Codes dari berbagai negara, termasuk diantaranya G20/OECD Corporate Governance Principles, serta ASEAN Corporate Governance Scorecard.

PUGKI 2021 incorporates refinements based on the latest developments in governance practices, referring to global Corporate Governance (CG) Principles and CG Codes from various countries, including the G20/OECD Corporate Governance Principles and the ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Secara umum PUGKI 2021 terdiri dari delapan prinsip yang dibagi dalam tiga kelompok prinsip:

1. kelompok prinsip pertama yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris,

In general, PUGKI 2021 consists of eight principles divided into three groups:

1. The first group regulates the management and supervisory functions of the corporation, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners.

2. kelompok prinsip kedua yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris,
3. kelompok prinsip ketiga yang mengatur pemilih sumberdaya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat.

Selanjutnya, PUGKI terdiri dari prinsip, rekomendasi dan panduan yang mendorong praktik governansi korporat yang baik. Prinsip-prinsip dalam PUGKI beserta rekomendasi dan panduan di dalamnya dijiwai oleh empat pilar governansi korporat yaitu: perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Keempatnya merupakan pengembangan sesuai dengan perkembangan terkini dari nilai dasar TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness) yang terakhir digunakan pada PUGKI 2019.

ADOPSI PUGKI 2021 OLEH PUSRI

Sebagai salah satu BUMN yang menjunjung tinggi penerapan praktik terbaik GCG, PUSRI bertekad menyesuaikan praktik penerapan governansi di lingkup operasionalnya dengan mengadopsi perkembangan terakhir praktik GCG di tingkat Nasional maupun Global sebagaimana disampaikan oleh KNKG tersebut. Secara gradual, PUSRI bertekad menyesuaikan garis besar nilai dasar prinsip-prinsip GCG dari sebelumnya adalah TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness) menjadi prinsip-prinsip GCG terakhir sebagaimana disebutkan dalam PUGKI 2021 tersebut.

Untuk maksud tersebut, sejak dua tahun terakhir, PUSRI telah mulai menjalankan program adopsi penerapan prinsip-prinsip GCG terbaru tersebut melalui serangkaian kegiatan, yakni

- “Internalisasi Integrated Mindset Dalam Governansi PUSRI” dan
- “Internalisasi Integrated Mindset Dan Keberlanjutan Dalam Strategi Perusahaan”.

Pada tahap-tahap selanjutnya PUSRI menjalankan program *self assesment* secara berkala atas penerapan PUGKI 2021 yang dipublikasikan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tersebut.

KESESUAIAN PENERAPAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

Untuk meningkatkan peningkatan penerapan GCG berbasis praktik terbaik, PUSRI berupaya melakukan penilaian mandiri atau *self assessment* atas penerapan Penerapan PUGKI 2021 yang dipublikasikan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Berikut disampaikan Rekomendasi dan Panduan dalam PUGKI 2021 dan penerapannya oleh Perusahaan.

2. The second group regulates the processes and outputs produced by the Board of Directors and the Board of Commissioners.
3. The third group regulates the providers of resources, who primarily benefit from the implementation of corporate governance.

PUGKI comprises principles, recommendations, and guidance aimed at promoting sound corporate governance practices. The principles in PUGKI, along with their recommendations and guidance, are guided by four pillars of corporate governance: ethical conduct, accountability, transparency, and sustainability. These four pillars represent a development from the foundational TARIF values (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness) last applied in PUGKI 2019.

ADOPTION OF PUGKI 2021 BY PUSRI

As one of the State-Owned Enterprises committed to upholding best GCG practices, PUSRI is determined to align its governance practices within its operational scope by adopting the latest developments in GCG practices at both national and global levels as introduced by KNKG. Gradually, PUSRI is committed to adjusting the fundamental principles of GCG from the previous TARIF framework (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness) to the updated GCG principles as stipulated in PUGKI 2021.

For this purpose, over the past two years, PUSRI has initiated a program to adopt these updated GCG principles through a series of initiatives, namely:

- “Internalization of the Integrated Mindset in PUSRI Governance”
- “Internalization of the Integrated Mindset and Sustainability in Corporate Strategy”

In subsequent stages, PUSRI conducts periodic self-assessments on the implementation of PUGKI 2021 as published by the National Committee on Governance Policy (KNKG).

CONFORMITY WITH THE IMPLEMENTATION OF THE INDONESIAN CORPORATE GOVERNANCE GENERAL GUIDELINES (PUGKI)

To enhance the implementation of GCG based on best practices, PUSRI conducts self-assessments of its implementation of PUGKI 2021 as published by KNKG. Below are the Recommendations and Guidance contained in PUGKI 2021 and their implementation by the Company.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners					
1.1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi Roles and Responsibilities of the Board of Directors					
1.1.1		Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: 1. Berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; 2. Beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; 3. Berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (<i>corporate resilience</i>) In order to achieve sustainable value creation, the Board of Directors carries out its leadership role and seeks to achieve the following governance outcomes: 1. Competitive and focused on long term performance; 2. Ethical and responsible in conducting business; 3. Contributing positively to society and the environment; and capable of enduring and growing (<i>corporate resilience</i>).		✓	
		1.1.1.1	Direksi mewujudkan standar etika bisnis yang tinggi dan memastikan pelaksanaan kode etik yang melahirkan budaya korporasi yang berintegritas. The Board of Directors establishes high standards of business ethics and ensures the implementation of a code of conduct that fosters a corporate culture of integrity.	✓	
		1.1.1.2	Direksi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa karyawan memahami tanggung jawab mereka untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai korporasi dan standar etika bisnis yang tinggi. The Board of Directors cultivates a corporate culture that ensures employees understand their responsibilities to act in accordance with corporate values and high standards of business ethics.	✓	
		1.1.1.3	Direksi memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. Direksi mempunyai perencanaan strategis yang jelas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. The Board of Directors ensures the fulfillment of the corporation's social and environmental responsibilities. The Board of Directors has clear strategic planning in carrying out corporate social and environmental responsibilities.	✓	
		1.1.1.4	Direksi memastikan bahwa korporasi kuat secara finansial dan gesit secara operasional. The Board of Directors ensures that the corporation is financially strong and operationally agile.	✓	
1.1.2		Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporation's mission, vision, objectives, targets, strategy, and annual and medium term plans are consistent with its long term goals, by effectively leveraging innovation and technology.		✓	
		1.1.2.1	Ketika mengembangkan strategi dan rencana, Direksi mempromosikan inovasi dan penggunaan teknologi mutakhir untuk meningkatkan daya saing, menanggapi perhatian dan harapan pemangku kepentingan, serta memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. When developing strategy and plans, the Board of Directors promotes innovation and the use of advanced technology to enhance competitiveness, respond to stakeholder concerns and expectations, and fulfill social and environmental responsibilities.	✓	
		1.1.2.2	Direksi memprioritaskan dan mengedepankan budaya korporasi yang mencakup inovasi dan menyertakan inovasi ke dalam strategi korporasi, perencanaan pengembangan operasional, dan pengawasan operasi. The Board of Directors prioritizes and promotes a corporate culture that embraces innovation and incorporates innovation into corporate strategy, operational development planning, and operational oversight.	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		1.1.2.3.	Direksi mendorong inovasi yang meningkatkan penciptaan nilai jangka panjang untuk bisnis dalam lingkungan yang berubah. Inovasi tersebut dapat mencakup merancang model bisnis, produk dan layanan yang inovatif, mempromosikan riset, meningkatkan proses produksi dan operasi, dan berkolaborasi dengan mitra. The Board of Directors encourages innovation that enhances long term value creation for the business in a changing environment. Such innovation may include designing innovative business models, products, and services, promoting research, improving production and operational processes, and collaborating with partners.	✓	
	1.1.3		Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems aligned with the corporation's vision, mission, objectives, targets, and strategy, and complies with applicable laws and regulations and standards.	✓	
			Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems and the timely and accurate disclosure of all material information concerning the corporation.	✓	
		1.1.4.1	Direksi memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam persiapan dan pengungkapan informasi korporasi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang relevan yang diterbitkan lembaga yang bereputasi. Selain itu, Direksi juga memastikan ketersediaan sumber daya (termasuk karyawan) yang memadai. The Board of Directors ensures that every individual involved in the preparation and disclosure of corporate information possesses relevant knowledge, skills, and experience, reflected among others in relevant professional certifications issued by reputable institutions. In addition, the Board of Directors also ensures the availability of adequate resources, including employees.	✓	
	1.1.4	1.1.4.2	Ketika menyetujui pengungkapan informasi (termasuk untuk pengungkapan informasi keuangan berkala), Direksi mempertimbangkan semua faktor yang berikut ini: - Hasil evaluasi ketepatan desain dan efektivitas implementasi sistem pengendalian internal; - Opini auditor eksternal atas laporan keuangan, pengamatan atas sistem pengendalian internal, dan pengamatan lainnya melalui sumber lain; - Pendapat Komite Audit; - Konsistensi dengan tujuan, strategi, dan kebijakan. When approving information disclosure, including periodic financial disclosures, the Board of Directors considers all of the following factors: - The results of the evaluation of the adequacy of the design and effectiveness of the implementation of the internal control system; - The external auditor's opinion on the financial statements, observations on the internal control system, and other observations from other sources; - The opinion of the Audit Committee; - Consistency with objectives, strategy, and policies.	✓	
		1.1.4.3	Direksi menyampaikan laporan yang mengomentari Laporan Keuangan Triwulanan dan dipublikasikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Triwulanan sehingga bermanfaat bagi investor dan analis yang akan meninjau fundamental dan kinerja keuangan korporasi. The Board of Directors submits a report commenting on the Quarterly Financial Statements and publishes it concurrently with the Quarterly Financial Statements, so that it is useful for investors and analysts reviewing the corporation's fundamentals and financial performance.	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
1.1.5		Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been properly prepared.		✓	
		1.1.5.1	Laporan keberlanjutan disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas korporasi dan memenuhi standar nasional dan atau global The sustainability report is prepared based on a reporting framework appropriate to the size and complexity of the corporation and complies with national and or global standards.	✓	
		1.1.5.2	Pelaporan keberlanjutan korporasi mencerminkan praktik korporasi yang mendukung penciptaan nilai yang berkelanjutan. The corporation's sustainability reporting reflects corporate practices that support sustainable value creation.	✓	
1.1.6		Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors establishes a corporate information technology governance framework aligned with the corporation's business needs and priorities, promotes business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports corporate objectives and strategy.		✓	
		1.1.6.1	Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki kebijakan alokasi sumber daya TI yang memastikan investasi dan alokasi sumber daya TI yang memadai dan optimal. The Board of Directors ensures that the corporation has an IT resource allocation policy that guarantees adequate and optimal investment and allocation of IT resources.	✓	
		1.1.6.2	Direksi memastikan bahwa manajemen risiko korporasi mencakup manajemen risiko TI. The Board of Directors ensures that corporate risk management includes IT risk management.	✓	
		1.1.6.3	Direksi memastikan korporasi memiliki kebijakan dan prosedur keamanan TI, termasuk perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan data. The Board of Directors ensures that the corporation has IT security policies and procedures, including protection of data security and confidentiality.	✓	
1.1.7		Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporations conducting business activities based on Sharia principles, the Board of Directors must ensure sufficient authority and availability of supporting instruments to enable the Sharia Supervisory Board to perform its role effectively.		✗	PUSRI bukan perusahaan yang menerapkan prinsip syariah PUSRI is not a company that applies Sharia principles
1.1.8		Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors Charter is reviewed periodically. The Charter includes, among others, the division of roles of individual Directors, which may be regulated in the Board of Directors Charter or by a Board of Directors' resolution.		✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
1.2 Penilaian Kinerja Direksi dan Anggotanya Performance Evaluation of the Board of Directors and Its Members					
1.2.1		Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur. The Board of Commissioners conducts an objective and independent annual formal evaluation to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual Director.		✓	
		1.2.1.1	Dewan Komisaris menetapkan kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) bagi Direksi untuk menilai kinerja Direksi. Hasil penilaian sendiri disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dinilai dan bila diperlukan disesuaikan dengan penilaian Dewan Komisaris. The Board of Commissioners establishes a self-assessment policy for the Board of Directors to evaluate its performance. The results of the self-assessment are submitted to the Board of Commissioners for review and, if necessary, adjusted in accordance with the Board of Commissioners' evaluation.	✗	Penilaian Direksi dilakukan berdasarkan KPI The performance evaluation of the Board of Directors is conducted based on Key Performance Indicators (KPIs).
		1.2.1.2	Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi dan sebagai dasar penilaian akuntabilitas Direksi mengenai tingkat keberhasilan Korporasi dalam mencapai target-target kinerja. Tolak ukur yang terpilih dicantumkan ke dalam kontrak kesepakatan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris The self-assessment policy or other evaluation policies are based on specific, measurable, achievable, and relevant performance indicators as determined by the Board of Commissioners based on the consideration of the Nomination and Remuneration Committee, and serve as the basis for assessing the accountability of the Board of Directors regarding the level of the Corporation's achievement of its performance targets. The selected performance indicators are included in the work agreement contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners.	✓	
		1.2.1.3.	Skema remunerasi yang berupa saham yang diberikan kepada Direktur, Komisaris, dan karyawan harus mendapat persetujuan dari pemegang saham. Any share-based remuneration scheme granted to Directors, Commissioners, and employees must obtain approval from the shareholders.	✗	PUSRI bukan Perusahaan Terbuka PUSRI bukan Perusahaan Terbuka PUSRI is not a publicly listed company.
		1.2.1.4	Perpanjangan masa jabatan direktur didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya. The extension of a Director's term of office is based on satisfactory performance evaluation results regarding their contribution.	✗	Keputusan atas perpanjangan masa jabatan Direksi merupakan kewenangan Pemegang Saham The decision regarding the extension of the Board of Directors' term of office is the authority of the Shareholders.
1.2.2		Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with consideration of the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.		✓	
		1.2.2.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa evaluasi kinerja Direktur Utama didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang telah dikomunikasikan kepadanya terlebih dahulu. Kriteria atau evaluasi kinerja harus memberi insentif kepada Direktur Utama untuk menjalankan perannya dalam mendukung pencapaian tujuan korporasi dan penciptaan nilai berkelanjutan. The Board of Commissioners ensures that the performance evaluation of the President Director is based on predetermined criteria that have been communicated in advance. The evaluation criteria must incentivize the President Director to perform their role in supporting the achievement of corporate objectives and sustainable value creation.	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		1.2.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi kinerja tahunan terhadap Direktur Utama. Dewan Komisaris atau Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk Dewan Komisaris mengkomunikasikan hasil (termasuk area pengembangan) evaluasi kinerja kepada Direktur Utama. The Board of Commissioners, with consideration of the Nomination and Remuneration Committee, conducts an annual performance evaluation of the President Director. The Board of Commissioners or the Chair of the Nomination and Remuneration Committee appointed by the Board of Commissioners communicates the results, including development areas, of the performance evaluation to the President Director.	✓	
		1.2.2.3	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi menyetujui kriteria evaluasi kinerja anggota Direksi lainnya. Dewan Komisaris memastikan Direktur Utama mengevaluasi kinerja anggota Direksi lainnya secara objektif dan akurat berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. The Board of Commissioners, with consideration of the Nomination and Remuneration Committee, approves the performance evaluation criteria for other members of the Board of Directors. The Board of Commissioners ensures that the President Director evaluates the performance of other members of the Board of Directors objectively and accurately based on predetermined performance evaluation criteria.	✓	
1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris					
Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners					
1.3.1		Dewan Komisaris mereview strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereview, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the corporate mission, vision, and strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, provides advice on, and approves the corporate long term and short term business plans and financial plans. The Board of Commissioners provides advice and monitors the Board of Directors in managing their implementation. The Board of Directors and the Board of Commissioners are involved in decisions that are highly significant to the corporation, as regulated in the corporation's articles of association.	✓		
1.3.2		Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan. The types of decisions requiring approval from the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report.	✓		
1.3.3		Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. Taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and for decision by, the General Meeting of Shareholders the appointment and or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In making such proposals, the Board of Commissioners considers diversity, non-discriminatory elements, and provides equal opportunity without distinction of ethnicity, religion, race, inter-group background, and gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election process of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is formal and transparent.	✓		
1.3.4		Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the Committee performing the nomination function prepares a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors. Each year, the Board of Commissioners reviews the report on the implementation of development and succession plans submitted by the President Director.	✓		

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
	1.3.5	Dewan Komisaris: - Mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; - Secara berkala mereview sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners: - Proposes to the General Meeting of Shareholders, which may be preceded by a proposal from the Committee performing the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners aligned with sustainable corporate development and the long term interests of the corporation and shareholders; - Periodically reviews the remuneration system of the Board of Directors and the Board of Commissioners.		✓	
	1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners oversees the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.		✓	
	1.3.6.1	Dewan Komisaris memastikan dilakukannya evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan governansi korporat baik secara mandiri maupun menggunakan konsultan eksternal independen. The Board of Commissioners ensures that periodic evaluations of the implementation of corporate governance policies are conducted either independently or using independent external consultants.		✓	
	1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems aligned with the corporation's objectives, targets, and strategy and compliant with applicable laws, codes of conduct, and standards.		✓	
	1.3.7.1	Dewan Komisaris memahami sifat dan ruang lingkup risiko utama korporasi, serta secara berkala meninjau dan menyetujui selera risiko (<i>risk appetite</i>) korporasi. The Board of Commissioners understands the nature and scope of the corporation's principal risks and periodically reviews and approves the corporation's risk appetite.		✓	
	1.3.7.2	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa: - Penetapan dan penerapan kebijakan manajemen risiko adalah konsisten dengan tujuan, sasaran, strategi, dan selera risiko (<i>risk appetite</i>) korporasi; - Kebijakan manajemen risiko dapat memberikan sinyal peringatan dini (<i>early warning signals</i>) atas risiko material; - Kebijakan manajemen risiko ditinjau secara berkala, misalnya setiap tahun. The Board of Commissioners monitors and provides input to ensure that: - The establishment and implementation of risk management policies are consistent with the corporation's objectives, targets, strategy, and risk appetite; - Risk management policies provide early warning signals of material risks; - Risk management policies are reviewed periodically, for example annually.		✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		1.3.7.3	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan agar risiko utama teridentifikasi melalui pertimbangan faktor internal dan eksternal. The Board of Commissioners monitors and provides input to ensure that principal risks are identified through consideration of internal and external factors.	✓	
		1.3.7.4	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah dinilai, dan bahwa tersedia strategi dan rencana mitigasi risiko yang tepat. The Board of Commissioners monitors and provides input to ensure that the impact and likelihood of risks have been assessed and that appropriate risk mitigation strategies and plans are available.	✓	
		1.3.7.5	Dewan Komisaris secara teratur memantau efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal korporasi. The Board of Commissioners regularly monitors the effectiveness of risk management and the corporation's internal control systems.	✓	
		Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners oversees and directs the achievement of integrity in the corporate accounting and financial reporting systems and the independence of internal and external audit functions.		✓	
1.3.8		1.3.8.1	Sebelum menyetujui laporan keuangan, Dewan Komisaris menerima pernyataan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan korporasi, bahwa menurut pendapat mereka, catatan keuangan entitas telah dikelola dengan baik dan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan secara wajar tentang posisi dan kinerja keuangan korporasi dan bahwa pendapat mereka tersebut dibentuk berdasarkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang didesain secara tepat dan diimplementasikan secara efektif. Before approving the financial statements, the Board of Commissioners receives a statement from the President Director and the Chief Financial Officer of the corporation that, in their opinion, the entity's financial records have been properly maintained and the financial statements have been prepared in accordance with applicable accounting standards and fairly present the corporation's financial position and performance, and that such opinion has been formed based on risk management and internal control systems that are properly designed and effectively implemented.	✓	
1.3.9		Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews, and approves the Corporation's annual report and sustainability report and ensures their integrity, and oversees the corporate disclosure and communication process.		✓	
1.3.10		Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners Charter is reviewed periodically.		✓	
1.3.11		Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and proven to have committed wrongdoing.		✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
			Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, objektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent Commissioners are highly encouraged to contribute to honest, objective, active, and constructive discussions at meetings of the Board of Commissioners.		
			Jika Komisaris Utama bukan Komisaris Independen, maka Dewan Komisaris menunjuk Komisaris Independen atau Komisaris Independen yang senior (jika Komisaris Independen lebih dari satu orang) untuk menjalankan peran Komisaris Utama untuk tugas-tugas Komisaris Utama yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi. Kriteria dalam menunjuk Komisaris Independen senior yaitu: 1. Mampu menyampaikan pendapat/argumen secara konstruktif kepada Komisaris Utama; 2. Dibandingkan komisaris lainnya, memiliki pengetahuan lebih tentang korporasi, termasuk kinerja, pasar, dan pemangku kepentingannya; 3. Mampu memberikan pandangan/pemikiran yang berimbang terhadap isu dan perhatian dari pemegang saham mayoritas.		
	1.3.12	1.3.12.1	If the President Commissioner is not an Independent Commissioner, the Board of Commissioners appoints an Independent Commissioner or a senior Independent Commissioner, if there is more than one, to perform the role of President Commissioner for duties that have potential conflicts of interest with affiliated parties. The criteria for appointing a senior Independent Commissioner are: 1. Able to express opinions or arguments constructively to the President Commissioner; 2. Compared to other Commissioners, possesses greater knowledge of the corporation, including its performance, market, and stakeholders; 3. Able to provide balanced views and considerations regarding issues and concerns of majority shareholders.		
		1.3.12.2	Dalam menjalankan peran sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris independen agar: 1. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; 2. Memantau benturan kepentingan antara korporasi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali; 3. Memperhatikan secara independen pandangan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya; dan 4. Mendorong dialog antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. In performing their role as a member of the Board of Commissioners, an Independent Commissioner shall: 1. Act in the best interest of the corporation; 2. Monitor conflicts of interest between the corporation and members of the Board of Directors and the Board of Commissioners or controlling shareholders; 3. Independently consider the views of minority shareholders and other stakeholders; and 4. Encourage dialogue between management, shareholders, and other stakeholders.		
		1.3.12.3	Korporasi mengungkapkan alasan berakhirnya tugas Komisaris Independen yang terjadi sebelum masa jabatan berakhir. The corporation discloses the reasons for the termination of an Independent Commissioner's duties occurring before the end of their term of office.		

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
1.3.13			Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner acts as the coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner promotes a culture of openness and constructive dialogue that enables diverse views to be expressed, including coordinating the establishment of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. In addition, there must be an opportunity for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.		
		1.3.13.1	Rincian tugas Komisaris Utama diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web korporasi. The details of the duties of the President Commissioner are disclosed in the annual report and on the corporation's website.		
		1.3.13.2	Komisaris Utama mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris, memimpin rapat Dewan Komisaris dan mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris. The President Commissioner coordinates the division of supervisory roles among members of the Board of Commissioners, leads meetings of the Board of Commissioners, and represents the Board of Commissioners in dealings with parties outside the Board of Commissioners.		
		1.3.13.3	Mantan Direktur Utama dan anggota Direksi yang terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris tidak dapat langsung ditetapkan sebagai Komisaris utama. Perlu ada masa jeda 2 (dua) tahun untuk dapat ditunjuk kembali sebagai Komisaris Utama. Jika Dewan Komisaris memutuskan bahwa mantan Direktur Utama/anggota Direksi perlu menjadi Komisaris utama, maka Dewan Komisaris memberikan alasan dan penjelasan dalam Laporan Tahunan A former President Director and members of the Board of Directors elected as members of the Board of Commissioners cannot be directly appointed as President Commissioner. There must be a cooling-off period of 2 (two) years before they may be reappointed as President Commissioner. If the Board of Commissioners decides that a former President Director or member of the Board of Directors needs to become President Commissioner, the Board of Commissioners shall provide the reasons and explanation in the Annual Report.		
1.4 Pembentukan Komite Establishment of Committees					
1.4.1			Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The corporation has committees under the Board of Commissioners consisting at a minimum of: the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management Monitoring Committee.		
		1.4.1.1	Untuk Komite yang tidak diwajibkan dalam aturan perundangan, jika tidak memiliki Komite, korporasi mengungkapkan fakta tersebut dan mengungkapkan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa fungsi Komite tersebut dilaksanakan Dewan Komisaris sebagaimana mestinya. For committees not required by laws and regulations, if the corporation does not establish such a committee, it shall disclose this fact and disclose the process used to ensure that the committee's functions are properly carried out by the Board of Commissioners.		

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
			Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and that other committees established by the Board of Commissioners are composed of a majority of independent members, and that all committee members possess the competence, commitment, and sufficient authority to perform their roles effectively and independently.		
1.4.2		1.4.2.1	Komite memiliki piagam yang secara jelas menetapkan perannya dan memberikan kepadanya semua wewenang yang diperlukan untuk menjalankan perannya. Wewenang ini antara lain mencakup hak untuk memperoleh informasi, bertemu dengan pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya (dengan atau tanpa kehadiran manajemen), dan meminta nasihat dari konsultan/ahli eksternal independen jika komite menilai diperlukan. Each committee has a charter that clearly defines its role and grants it all necessary authority to perform its duties. Such authority includes, among others, the right to obtain information, meet with relevant parties in connection with the execution of its duties, with or without management present, and seek advice from independent external consultants or experts if deemed necessary by the committee.		
1.4.3			Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan objektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure that the monitoring of the Audit Committee's duties is conducted objectively and independently, the President Commissioner shall not serve as Chair of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances that must be explained in the annual report.		
1.5 Penilaian Kinerja-Dewan Komisaris dan Anggotanya					
Performance Evaluation of the Board of Commissioners and Its Members					
			Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitennya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts an objective annual formal evaluation to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual Commissioner.		
		1.5.1.1	Dewan Komisaris dapat mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja sebagai Dewan secara keseluruhan. The Board of Commissioners may adopt a self-assessment policy to evaluate its performance as a whole.		
1.5.1		1.5.1.2	Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris. The self-assessment policy or other evaluation policies are based on specific, measurable, achievable, and relevant benchmarks or criteria as determined by the Board of Commissioners.		
		1.5.1.3	Perpanjangan masa jabatan Komisaris didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya. The extension of a Commissioner's term of office is based on satisfactory performance evaluation results regarding their contribution.		
		1.5.1.4	Dewan Komisaris melibatkan konsultan eksternal independen secara berkala paling tidak sekali dalam masa jabatan, untuk memfasilitasi evaluasi kinerja Dewan Komisaris yang objektif dan jujur. The Board of Commissioners engages an independent external consultant periodically, at least once during a term of office, to facilitate an objective and honest evaluation of the Board of Commissioners' performance.		

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
1.6. Benturan Kepentingan Conflict of Interest					
1.6.1		Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of the Board of Directors holding concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner must notify the Board of Commissioners and the chair of the committee performing the nomination function before accepting a new appointment as a director or commissioner of a public company, another directorship, or another position with significant time commitment.			
		1.6.1.1	Dewan Komisaris memastikan kebijakan dan pedoman yang jelas bagi anggota Direksi yang menjabat atau ingin menjabat sebagai direktur atau komisaris di korporasi lain. Kebijakan harus menetapkan penunjukan yang diizinkan dan jumlah korporasi yang diizinkan yang di dalamnya mereka dibolehkan untuk secara bersamaan menjabat sebagai direktur atau komisaris. The Board of Commissioners ensures the existence of clear policies and guidelines for members of the Board of Directors who serve or intend to serve as directors or commissioners in other corporations. The policy must specify permitted appointments and the number of corporations in which they are allowed to simultaneously serve as directors or commissioners.	✓	
1.6.2		Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest involving management, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and shareholders, including misuse of corporate assets and abuse in related party transactions. Commissioners who have a conflict of interest shall not participate in monitoring and decision making regarding potential conflicts of interest involving the concerned Commissioner or their affiliates.			
		1.6.2.1	Dewan Komisaris memiliki prosedur untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait (abstain) benturan kepentingan tersebut. The Board of Commissioners has procedures to ensure that members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who have a conflict of interest abstain from related decision making.	✓	
		1.6.2.2	Setiap anggota Dewan Komisaris menginformasikan segera kepada Direksi dan Dewan Komisaris jika ada potensi benturan kepentingan, termasuk sebagai akibat dari kedudukannya sebagai konsultan atau pejabat di perusahaan pelanggan, pemasok, kreditur, atau partner bisnis lainnya. Each member of the Board of Commissioners promptly informs the Board of Directors and the Board of Commissioners of any potential conflict of interest, including those arising from their position as a consultant or officer in a customer, supplier, creditor, or other business partner company.	✓	
		1.6.2.3	Semua anggota Direksi mengungkapkan dengan segera potensi benturan kepercayaannya kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta tidak turut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan. All members of the Board of Directors promptly disclose potential conflicts of interest to the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors and abstain from decision making in matters where they have a conflict of interest.	✓	
		1.6.2.4	Dalam laporannya, Dewan Komisaris menginformasikan kepada RUPS adanya benturan kepentingan material yang terjadi disertai perlakuannya. Benturan kepentingan material yang sifatnya tidak sekadar sementara waktu dapat berakibat pada penghentian jabatan sebagai anggota dewan. In its report, the Board of Commissioners informs the General Meeting of Shareholders of any material conflict of interest that has occurred and the treatment thereof. A material conflict of interest that is not merely temporary may result in termination of position as a board member.	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
1.7 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris					
Competency Development of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners					
1.7.1		Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan.			
		The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and the Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, the characteristics and operations of the corporation, relevant laws and regulations and standards, and other applicable obligations. The Board of Directors, through the corporate secretary, supports all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in updating and refreshing the skills and knowledge necessary to perform their roles on the Board.			
		1.7.1.1	Direksi memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat menerima program pengenalan yang formal dan memadai serta semua informasi yang relevan dengan peran dan tanggung jawab mereka.	✓	
		The Board of Directors ensures that newly appointed members of the Board of Directors and the Board of Commissioners receive a formal and adequate induction program and all relevant information regarding their roles and responsibilities.			
1.7.1.2		Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara teratur menerima program pelatihan dan pengembangan pengetahuan yang relevan, memadai, dan berkelanjutan.			
		Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners regularly receive relevant, adequate, and continuous training and knowledge development programs.			
1.7.1.3		Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara reguler menerima informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas mengenai perkembangan terakhir peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan, kewajiban lain yang berlaku, faktor risiko, dan lingkungan bisnis korporasi.			
		Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners regularly receive accurate, timely, and clear information regarding the latest developments in relevant laws and regulations and standards, other applicable obligations, risk factors, and the corporation's business environment.			
2 Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris					
Composition and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners					
2.1 Komposisi Direksi					
Composition of the Board of Directors					
2.1.1		Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunersi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.			
		In determining candidates for Director, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not rely solely on recommendations from the Board of Commissioners, management, or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee may use independent sources to determine qualified candidates.			
2.1.2		Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi.			
		The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, capability, and expertise required to properly fulfill the role of the Board of Directors, while also taking into account the fulfillment of diversity within the Board of Directors.			

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		2.1.2.1	Informasi tentang calon Direksi harus diungkapkan dalam proses pemilihan/ pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi: 1. identitas calon dan alasan pengangkatan; 2. kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; 3. jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; 4. faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; 5. lama masa jabatan; 6. kehadiran dalam rapat Direksi (kecuali untuk Direktur baru); dan 7. setiap kepemilikan saham dalam korporasi. Information regarding Director candidates must be disclosed during the election or re-election process and must be available from the date of the notice of the General Meeting of Shareholders until the meeting is held and downloadable via the Public Company's website and or e-GMS, including: 1. Identity of the candidate and the reasons for appointment; 2. Core competencies, qualifications, and professional background; 3. Current positions in other corporations and significant roles in nonprofit or charitable organizations; 4. Factors affecting independence, including relationships with controlling shareholders; 5. Length of term of office; 6. Attendance at Board of Directors meetings, except for new Directors; and 7. Any share ownership in the corporation.	✗	PUSRI bukan Perusahaan terbuka sehingga informasi calon Direksi tidak disampaikan dalam situs web As PUSRI is not a publicly listed company, information regarding Board of Directors candidates is not disclosed on the Company's website.
		2.1.2.2	Komposisi Direksi dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi. The composition of the Board of Directors shall be structured so that, collectively, its members reflect diversity in capability, expertise, knowledge, experience, age, cultural background, and gender required to properly fulfill the role of the Board of Directors.	✓	
		2.1.2.3	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi korporasi serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. The determination of the number of members of the Board of Directors takes into account the condition of the corporation and effectiveness in decision making.	✓	
		2.1.2.4	Setidaknya ada satu direktur yang memiliki pengalaman sebelumnya di sektor utama tempat korporasi beroperasi. At least one Director has prior experience in the primary sector in which the corporation operates.	✓	
		2.1.2.5	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi yang diakui pemerintah dan terdaftar sebagai anggota di asosiasi profesi tersebut. A member of the Board of Directors overseeing accounting or finance must possess expertise and or knowledge in accounting, reflected among others by professional certification issued by a government-recognized accounting professional association and registered membership in such association.	✓	
		Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The corporation's diversity policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.		✓	
2.1.3		2.1.3.1	Korporasi melaporkan dalam Laporan Tahunan keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris saat ini, target komposisi yang terukur dan kemajuan yang dicapai dalam mencapai target tersebut. Informasi harus mencakup referensi tentang bagaimana keberagaman dicapai melalui perencanaan suksesi yang tepat di Direksi dan Dewan Komisaris. The corporation reports in the Annual Report the current diversity of the Board of Directors and the Board of Commissioners, measurable composition targets, and progress made in achieving those targets. The information must include reference to how diversity is achieved through proper succession planning within the Board of Directors and the Board of Commissioners.	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent to achieve the desired Board composition. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.		✓	
2.14	2.14.1	2.14.1	Informasi tentang calon Komisaris harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi: 1. identitas calon dan alasan pengangkatan; 2. kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; 3. jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; 4. faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; 5. lama masa jabatan; 6. kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dan komite (kecuali untuk Komisaris baru); dan 7. setiap kepemilikan saham dalam korporasi Information regarding Commissioner candidates must be disclosed during the election or re-election process and must be available from the date of the notice of the General Meeting of Shareholders until the meeting is held and downloadable via the Public Company's website and or e-GMS, including: 1. Identity of the candidate and the reasons for appointment; 2. Core competencies, qualifications, and professional background; 3. Current positions in other corporations and significant roles in nonprofit or charitable organizations; 4. Factors affecting independence, including relationships with controlling shareholders; 5. Length of term of office; 6. Attendance at Board of Commissioners and committee meetings, except for new Commissioners; and 7. Any share ownership in the corporation.	✗	PUSRI bukan Perusahaan terbuka sehingga informasi calon Direksi tidak disampaikan dalam situs web As PUSRI is not a publicly listed company, information regarding Board of Directors candidates is not disclosed on the Company's website.
		2.14.2	Jika Dewan Komisaris menggunakan konsultan eksternal independen dalam proses nominasi, maka informasi relevan mengenai konsultan eksternal independen diungkapkan di laporan tahunan, termasuk informasi mengenai independensi dan benturan kepentingan. If the Board of Commissioners uses an independent external consultant in the nomination process, relevant information regarding the independent external consultant must be disclosed in the annual report, including information on independence and conflicts of interest.	✓	Dalam proses nominasi tidak menggunakan konsultan eksternal The nomination process does not involve external consultants.
2.15		Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners or the Committee performing the nomination function establishes nomination procedures and criteria consistent with the Board of Commissioners' approved skills matrix and ensures that candidate profiles meet the requirements set forth in the skills matrix and nomination criteria.		✓	
2.16		Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners shall be structured so that, collectively, its members reflect diversity in capability, expertise, knowledge, experience, age, cultural background, and gender required to properly fulfill the role of the Board of Commissioners.		✓	
		2.16.1	Setidaknya ada satu Komisaris memiliki pengalaman sebelumnya pengalaman di sektor utama tempat korporasi beroperasi.. At least one Commissioner has prior experience in the primary sector in which the corporation operates.	✓	
		2.16.2	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi korporasi. The determination of the number of members of the Board of Commissioners takes into account the condition of the corporation.	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
2.1.7		Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and to address roles with potential conflicts of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with limited terms of office and disclosure of the duration of Board membership and their independence from the corporation's perspective.			
		2.1.7.1	Mantan Direktur Utama/anggota Direksi dapat masuk ke dalam Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun. A former President Director or member of the Board of Directors may join the Board of Commissioners as an Independent Commissioner only under extraordinary circumstances and must observe a cooling off period of at least 2 (two) years.		
		2.1.7.2	Mantan Komisaris Independen dapat diangkat kembali sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun. A former Independent Commissioner may be reappointed as an Independent Commissioner only under extraordinary circumstances and must observe a cooling off period of at least 2 (two) years.		
		2.1.7.3	Masa jabatan Komisaris Independen tidak boleh melebihi batas waktu 9 (sembilan) tahun. Bagi korporasi dengan masa jabatan 5 (lima) tahun maka tidak boleh melebihi batas waktu 10 (sepuluh) tahun. Setelah sembilan/ sepuluh tahun, seorang Komisaris Independen dapat terus menjabat hanya sebagai Komisaris. The term of office of an Independent Commissioner shall not exceed 9 (nine) years. For corporations with a 5 (five) year term, it shall not exceed 10 (ten) years. After nine or ten years, an Independent Commissioner may continue to serve only as a Commissioner.		
2.1.8		Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris To facilitate effective functioning of the Board of Directors and the Board of Commissioners and to enhance investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, rigorous, and transparent process for the appointment and election of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.			

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		2.1.8.1	Tanggung jawab dan peran Komite Nominasi dan Remunerasi termasuk namun tidak terbatas pada: - Menyusun pedoman untuk memastikan bahwa semua Komisaris mengalokasikan waktu yang cukup kepada korporasi agar dapat menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Pedoman tersebut mencakup di antaranya: - Dalam penunjukan komisaris utama, Komite Nominasi dan Remunerasi menyiapkan uraian spesifikasi pekerjaan, termasuk persyaratan komitmen waktu yang juga mempertimbangkan kebutuhan komitmen waktu pada saat krisis. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada Dewan Komisaris sebelum penunjukan dan diungkapkan dalam laporan tahunan. Perubahan komitmen harus segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan dampaknya dijelaskan dalam laporan tahunan berikutnya; - Dalam penunjukan anggota Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan syarat dan ketentuan penunjukan anggota komisaris. Syarat dan ketentuan ini tersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Komitmen waktu yang diharapkan dicantumkan dalam Surat penunjukan anggota Komisaris dan anggota Komisaris harus memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi komitmen waktu yang diharapkan. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada Dewan Komisaris sebelum penunjukan, beserta indikasi komitmen waktu yang diperlukan dan Dewan Komisaris harus diberitahu jika terdapat perubahan atas komitmen tersebut; - Secara proaktif memimpin dan bertanggung jawab atas pengembangan, implementasi, dan review berkelanjutan atas perencanaan suksesi Direksi dan Dewan Komisaris; - Menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite; - Mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen nominasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultasi. The responsibilities and roles of the Nomination and Remuneration Committee include, but are not limited to: - Preparing guidelines to ensure that all Commissioners allocate sufficient time to the corporation to effectively fulfill their responsibilities. Such guidelines include, among others: - In appointing the President Commissioner, the Nomination and Remuneration Committee prepares a job specification description, including time commitment requirements that also consider time commitments during crisis situations. Any other significant commitments outside the corporation must be disclosed to the Board of Commissioners prior to appointment and disclosed in the annual report. Changes in commitments must be promptly reported to the Board of Commissioners and their impact explained in the subsequent annual report; - In appointing members of the Board of Commissioners, the Nomination and Remuneration Committee determines the terms and conditions of appointment. These terms and conditions are available for inspection. The expected time commitment is stated in the letter of appointment, and members must have sufficient time to meet the expected commitment. Any other significant commitments outside the corporation must be disclosed to the Board of Commissioners prior to appointment, along with an indication of the time commitment required, and the Board of Commissioners must be informed of any changes to such commitments; - Proactively leading and being responsible for the development, implementation, and ongoing review of succession planning for the Board of Directors and the Board of Commissioners; - Upholding the principle of independence in handling conflicts of interest and potential conflicts of interest among committee members in carrying out the Committee's duties; - Considering and being responsible for appointing independent nomination consultants, including their selection and terms of engagement, and disclosing their identity and consultancy fees.		

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
2.2 Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners					
2.2.1			Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure oriented toward sustainable corporate development and encouraging the achievement of long term objectives. The remuneration of the Board of Directors must be proposed, which may be through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners for approval by the General Meeting of Shareholders. The amount of remuneration proposed to the General Meeting of Shareholders is determined by considering the role of each member of the Board of Directors, as well as the economic situation and the corporation's performance.	✓	
		2.2.1.1	Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil, baik dalam struktur maupun besaran, dan ditentukan dalam konteks nilai-nilai korporasi, struktur penghargaan internal, dan mendorong kompetisi dengan tetap peka terhadap harapan pemangku kepentingan dan norma masyarakat. The remuneration policy shall be reasonable and fair, both in structure and amount, and determined within the context of corporate values, internal reward structure, and competitiveness, while remaining sensitive to stakeholder expectations and societal norms.	✓	
		2.2.1.2	Korporasi memiliki kebijakan remunerasi anggota Direksi yang berbasis kinerja dan selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang korporasi, seperti ukuran kinerja sebagai berikut: opsi kepemilikan saham, bonus yang ditangguhkan, provisi pengembalian sebagian atau seluruh bonus/insentif yang telah dibayar (clawback) . The corporation has a performance-based remuneration policy for members of the Board of Directors aligned with the achievement of the corporation's long term interests, such as performance measures including share ownership options, deferred bonuses, and clawback provisions for partial or full repayment of bonuses or incentives already paid.	✓	
		2.2.1.3	Direksi tidak menerima fasilitas lain di luar fasilitas yang sudah diberikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham korporasi. Members of the Board of Directors shall not receive any facilities other than those granted based on the resolution of the corporation's General Meeting of Shareholders.	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
2.2.2		Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Disamping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure oriented toward sustainable corporate development and encouraging the achievement of long term objectives. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners, as well as the economic situation and corporate performance. In addition, consideration must be given to their position as President Commissioner and as chair or member of committees.			Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris belum mempertimbangkan pencapaian tujuan jangka panjang The remuneration policy for the Board of Commissioners has not yet taken into account the achievement of long-term objectives.
		2.2.2.1	Remunerasi Dewan Komisaris harus berupa remunerasi tetap. Jika anggota Dewan Komisaris diberi remunerasi terkait kinerja maka dasar pemberian harus terkait dengan pengembangan jangka panjang korporasi dan berbeda dengan anggota Direksi. Remuneration of the Board of Commissioners shall be fixed remuneration. If performance-related remuneration is granted, the basis must relate to long term corporate development and differ from that of members of the Board of Directors.		Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris belum mempertimbangkan pencapaian tujuan jangka panjang The remuneration policy for the Board of Commissioners has not yet taken into account the achievement of long-term objectives.
		2.2.2.2	Komisaris Independen tidak boleh menerima opsi saham, saham yang dikaitkan dengan kinerja, atau bonus. Independent Commissioners shall not receive share options, performance-linked shares, or bonuses.		PUSRI bukan perusahaan terbuka PUSRI is not a publicly listed company
2.2.3		Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that remuneration packages are determined based on the achievements, qualifications, and competencies of directors and commissioners, taking into account corporate operating performance, individual performance, and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for determining the remuneration policies of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.			

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		2.2.3.1	Dalam menjalankan perannya Komite Nominasi dan Remunerasi: - Menentukan proporsi yang tepat dan seimbang antara komponen remunerasi yang tetap dan yang terkait kinerja, komponen remunerasi yang dibayar langsung atau yang ditangguhkan. Indikator kinerja, termasuk indikator non-keuangan, dipastikan relevan dan dirancang untuk mendukung pencapaian kinerja jangka panjang korporat. Insentif remunerasi dipastikan sesuai dengan kebijakan risiko korporasi. Selain itu, terdapat penetapan batas atas remunerasi dan batas atas tersebut diungkapkan di laporan tahunan; - Mempertimbangkan apakah direktur dan komisaris memenuhi syarat untuk memperoleh bonus tahunan dan/atau tunjangan dengan skema insentif jangka panjang; - Secara hati-hati mempertimbangkan kewajiban kompensasi (termasuk iuran pensiun dan semua komponen lainnya) yang menjadi hak Direktur/ Komisaris jika diberhentikan lebih awal. Tujuannya adalah untuk menghindari pemberian penghargaan atas kinerja yang tidak baik; - Mempertimbangkan konsekuensi kewajiban pensiun dan manfaat jangka panjang lainnya bagi Direktur dan Komisaris bagi korporasi, termasuk dampak kenaikan imbalan kerja tersebut dan perubahan lainnya, terutama untuk Direktur dan Komisaris yang hampir pensiun; - Menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite; - Mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen remunerasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi. In carrying out its role, the Nomination and Remuneration Committee: - Determines an appropriate and balanced proportion between fixed and performance-related remuneration components, and between directly paid and deferred components. Performance indicators, including non-financial indicators, must be relevant and designed to support the achievement of long term corporate performance. Remuneration incentives must be aligned with corporate risk policies. In addition, an upper limit on remuneration is established and disclosed in the annual report; - Considers whether directors and commissioners are eligible to receive annual bonuses and or allowances under long term incentive schemes; - Carefully considers compensation obligations, including pension contributions and all other components, payable to Directors or Commissioners in the event of early termination, to avoid rewarding poor performance; - Considers the implications of pension obligations and other long term benefits for Directors and Commissioners on the corporation, including the impact of increases in such employee benefits and other changes, particularly for those nearing retirement; - Upholds the principle of independence in handling conflicts of interest and potential conflicts of interest among committee members in performing the Committee's duties; - Considers and is responsible for appointing independent remuneration consultants, including their selection and engagement terms, and discloses their identity and consultancy fees.	✓	
3 Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners					
3.1 Sifat Hubungan Kerja Nature of the Working Relationship					
3.1.1			Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There is open discussion between the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as among members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it remains important to maintain confidentiality to prevent leakage of confidential information.	✓	
3.1.2			Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors works together with the Board of Commissioners in formulating the corporation's mission, vision, and strategy and regularly discusses their implementation.	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
	3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary plays an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners and promoting the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.			
		Peran dan tanggung jawab Sekretaris Korporasi mencakup, namun tidak terbatas pada: - Memastikan arus informasi yang baik antara Dewan Komisaris dengan komitennya dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi; - Memantau perkembangan governansi korporat, termasuk memastikan piagam Dewan Komisaris, Direksi, dan komite dilaksanakan sepenuhnya, membantu serta memberikan advis kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam menerapkan praktik governansi korporat untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan; - Mengelola semua keperluan rapat Dewan Komisaris, Direksi, Direksi dengan Dewan Komisaris, komite yang dibentuk Dewan Komisaris, menghadiri dan mencatat risalah semua rapat dan memfasilitasi komunikasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris, termasuk memastikan bahwa pembahasan dan keputusan rapat Direksi dan Dewan Komisaris dicatat secara akurat dalam risalah; - Mengatur dan memfasilitasi orientasi Direktur/Komisaris/anggota komite baru dan pengembangan profesional Direktur/ Komisaris/ anggota komite; - Mengelola aktivitas hubungan investor untuk menjaga dan meningkatkan komunikasi antara korporasi dengan pemegang saham/ investor, baik lokal maupun asing.			
	3.1.3.1	The roles and responsibilities of the Corporate Secretary include, but are not limited to: - Ensuring good information flow between the Board of Commissioners and its committees and between the Board of Commissioners and the Board of Directors; - Monitoring corporate governance developments, including ensuring that the charters of the Board of Commissioners, Board of Directors, and committees are fully implemented, and assisting and advising the Board of Directors and the Board of Commissioners in implementing governance practices to meet stakeholder expectations; - Managing all administrative requirements for meetings of the Board of Commissioners, the Board of Directors, joint meetings, and committees established by the Board of Commissioners, attending and recording minutes of all meetings, and facilitating communication between the Board of Directors and the Board of Commissioners, including ensuring that discussions and decisions are accurately recorded; - Organizing and facilitating orientation programs for new Directors, Commissioners, and committee members and their professional development; - Managing investor relations activities to maintain and enhance communication between the corporation and shareholders or investors, both domestic and foreign.			
	3.1.3.2	Setiap Direktur dan Komisaris dapat berkomunikasi langsung dengan Sekretaris Korporat dan sebaliknya. Each Director and Commissioner may communicate directly with the Corporate Secretary and vice versa.			
	3.1.3.3	Dewan Komisaris memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Korporasi. The Board of Commissioners provides consideration to the Board of Directors regarding the appointment and dismissal of the Corporate Secretary.			

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
3.2 Akses informasi Dewan Komisaris Access to Information by the Board of Commissioners					
3.2.1		Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant, and timely information. The Board of Commissioners ensures that it obtains adequate information. The Board of Directors provides information regularly, without delay, and comprehensively regarding all matters relevant to the corporation. The Board of Commissioners may at any time request additional information.			
		3.2.1.1	Dewan Komisaris memiliki proses yang memungkinkan anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen, dapat memiliki akses ke Direksi dan manajemen senior terkait. The Board of Commissioners has a process enabling its members, including Independent Commissioners, to access the Board of Directors and relevant senior management.		
		3.2.1.2	Direktur Utama atau Sekretaris Korporat segera menginformasikan kepada Dewan Komisaris tentang peristiwa besar yang material dan penting mengenai kondisi dan kinerja serta pengelolaan korporasi. Jika diperlukan, rapat Dewan Komisaris diadakan untuk membahas peristiwa tersebut. The President Director or the Corporate Secretary promptly informs the Board of Commissioners of material and significant events concerning the corporation's condition, performance, and management. If necessary, a Board of Commissioners meeting is held to discuss such events.		
		3.2.1.3	Diantara rapat Dewan, Dewan Komisaris berhubungan secara teratur dengan Direksi agar terus dapat terinformasikan perkembangan korporasi yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Between Board meetings, the Board of Commissioners regularly communicates with the Board of Directors to remain informed of corporate developments requiring the Board's attention, enabling it to perform its duties more effectively.		

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
3.3 Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi					
Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners Regarding the Impact of Ownership Structure					
3.3.1		Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities within the context of the share ownership structure and relationships among the corporation's shareholders that may affect corporate management and operations.			PUSRI bukan perusahaan terbuka PUSRI is not a publicly listed company
		3.3.1.1	Direksi dan Dewan Komisaris memahami struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pengendalian atas korporasi, termasuk perjanjian tertulis dan tidak tertulis keluarga sebagai pemegang saham pengendali, perjanjian antar pemegang saham, atau kebijakan grup bisnis di mana korporasi merupakan bagiannya. The Board of Directors and the Board of Commissioners understand the share ownership structure and relationships among shareholders, and consider their impact on corporate control, including written and unwritten agreements among family controlling shareholders, shareholder agreements, or business group policies of which the corporation is a part.		PUSRI bukan perusahaan terbuka PUSRI is not a publicly listed company
		3.3.1.2	Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi tidak mempengaruhi pelaksanaan peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, (termasuk di antaranya dalam kaitannya dengan rencana suksesi Direksi) demi kepentingan terbaik korporasi. The Board of Directors and the Board of Commissioners ensure that the share ownership structure and relationships among shareholders do not affect the execution of their roles and responsibilities, including succession planning, in the best interest of the corporation.		PUSRI bukan perusahaan terbuka PUSRI is not a publicly listed company
		3.3.1.3	Dewan Komisaris memantau dan Direksi memastikan bahwa informasi diungkapkan dengan benar ketika terdapat kondisi yang berdampak pada pengendalian atas korporasi. The Board of Commissioners monitors and the Board of Directors ensures proper disclosure when conditions arise that impact corporate control.		

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
4 Perilaku Etis dan bertanggung jawab Ethical and Responsible Conduct					
4.1 Pedoman Etika dan Perilaku Code of Ethics and Conduct					
			Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: 1. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; 2. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; 3. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian; 4. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; 5. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; 6. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; 7. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya; 8. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi; 9. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan; 10. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan; 11. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. This statement is set forth in the Code of Conduct and Business Ethics, which clearly expresses the corporation's expectations that each member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees will: 1. Act in the best interest of the corporation; 2. Act honestly and with high integrity; 3. Act independently and on a fully informed basis, in good faith, with due diligence and prudence; 4. Comply with applicable laws and regulations governing the corporation and its operations; 5. Avoid actions that violate laws and regulations or are unethical under the corporate code of ethics; 6. Avoid engaging in activities that create conflicts of interest with the corporation's best interests or negatively impact its reputation; 7. Not derive personal benefit from corporate property or information, other assets, or customer assets that would harm the corporation or its customers; 8. Not misuse their position or opportunities arising from their position for personal gain; 9. Avoid soliciting or accepting from third parties any payment, gratuity, or other benefit for themselves or others that creates a conflict of interest or unlawfully benefits a third party; 10. Respect differing opinions and the rights of each member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and employees; 11. Ensure full, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted to regulators and in other public communications.		
	4.1.1				

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan (anti fraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors establishes policies and practices regarding anti money laundering and counter terrorism financing, anti bribery, anti corruption, anti fraud, and political engagement, with reference to national or international standards.		✓	
		4.1.2.1	Direksi mengembangkan dan menetapkan sistem yang dapat digunakan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti korupsi, penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran atau bujukan-bujukan lainnya untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis. The Board of Directors develops and implements systems to prevent money laundering, terrorism financing, corruption, the offering or acceptance of bribes, and other unlawful or unethical inducements.	✓	
	4.1.2	4.1.2.2	Direksi mengkomunikasikan kebijakan anti pencucian uang, anti suap, dan anti korupsi dengan memberi pelatihan kepada staf serta berupaya memperluas upaya anti pencucian uang, anti suap dan anti korupsi kepada pemangku kepentingan. The Board of Directors communicates anti money laundering, anti bribery, and anti corruption policies through staff training and seeks to extend these efforts to stakeholders.	✓	
		4.1.2.3	Setiap pelanggaran material terhadap kebijakan anti pencucian uang, anti suap, anti korupsi harus diinformasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris. Any material violation of anti money laundering, anti bribery, or anti corruption policies must be reported to the Board of Directors and the Board of Commissioners or its Committee.	✓	
		4.1.2.4	Direksi menetapkan dan meninjau secara teratur kebijakan yang transparan tentang keterlibatan politik, yang mencakup lobi dan donasi untuk tujuan politik atau kandidat jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, dan memastikan bahwa manfaat dan risiko dari pendekatan yang diambil dipahami, dipantau, dan ditinjau secara teratur oleh Dewan Komisaris. The Board of Directors establishes and regularly reviews transparent policies on political engagement, including lobbying and political donations if permitted by law, and ensures that the benefits and risks are understood, monitored, and regularly reviewed by the Board of Commissioners.	✓	
4.2 Nilai-nilai dan Budaya Organisasi Corporate Value and Organization					
			Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi The corporation articulates, fosters, and discloses its corporate culture and values.	✓	
	4.2.1	4.2.1.1	Korporasi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta seluruh karyawan memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawab mereka untuk berperilaku yang sesuai pedoman etika dan perilaku The corporation fosters a corporate culture that ensures all members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and all employees understand and are committed to carrying out their responsibilities in accordance with the code of ethics and conduct.	✓	
		4.2.1.2	Terdapat pelatihan dan sosialisasi yang memadai di level Direksi dan Dewan Komisaris serta seluruh karyawan korporasi yang disebutkan di atas untuk semua aspek yang berkaitan dengan budaya, nilai-nilai dan etika korporasi Adequate training and dissemination programs are provided at the level of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all corporate employees for all aspects relating to corporate culture, values, and ethics.	✓	
		4.2.1.3	Terdapat penilaian dan program pemantauan agar seluruh Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan korporasi memahami kode etik yang relevan dan menerapkannya secara efektif untuk menghindari keterlibatan korporasi dalam perilaku yang tidak tepat. There are assessment and monitoring programs to ensure that all members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all corporate employees understand the relevant code of ethics and implement it effectively to prevent the corporation's involvement in improper conduct.	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
4.3 Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya Communication and Enforcement of Ethical Guidelines, Values, and Culture					
4.3.1		Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The corporation's code of conduct and code of ethics are effectively communicated to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees, integrated into corporate strategy and operations including risk management systems and remuneration structures, and enforced.			
		4.3.1.1	Korporasi memiliki pedoman pelaporan pelanggaran yang dapat digunakan untuk mendorong dilaporkannya perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis, yang di dalamnya mencakup juga suatu pedoman tentang bagaimana korporasi melindungi pelapor yang beritikad baik. The corporation has a whistleblowing guideline that can be used to encourage the reporting of conduct that violates laws and regulations or is unethical, including guidelines on how the corporation protects good faith whistleblowers.		
		4.3.1.2	Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan komite segera diberitahu jika terdapat pelanggaran material pedoman etika dan perilaku. The corporation ensures that the Board of Commissioners and its committees are promptly informed of any material violations of the code of ethics and conduct.		
		4.3.1.3	Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Komite segera diberitahu jika terdapat insiden material yang dilaporkan berdasarkan kebijakan pelaporan pelanggaran. The corporation ensures that the Board of Commissioners and its committees are promptly informed of any material incidents reported under the whistleblowing policy.		
		4.3.1.4	Direksi memastikan bahwa pelanggaran pedoman mengakibatkan tindakan disipliner, termasuk pemecatan Jika terdapat pelanggaran, Direksi wajib mengambil tindakan preventif agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali. The Board of Directors ensures that violations of the guidelines result in disciplinary action, including termination. In the event of a violation, the Board of Directors is required to take preventive measures to ensure that such violations do not recur.		

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
5 Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control and Compliance					
5.1 Pengendalian Internal dan Kepatuhan Internal Control and Compliance					
5.1.1		Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors periodically reviews the adequacy of the design and operational effectiveness of governance, risk management, internal control, and compliance systems and reports the implementation and results of such reviews to shareholders through the corporation's annual report.			
		Reviu berkala yang dilakukan oleh Direksi secara khusus mempertimbangkan: - Adanya perubahan sejak reviu berkala terakhir tentang sifat dan ruang lingkup risiko signifikan dan kemampuan korporasi dalam merespon perubahan bisnis dan lingkungan eksternalnya; - Ruang lingkup dan mutu pemantauan yang sedang berjalan atas risiko dan sistem pengendalian internal, peran fungsi audit internal dan penyedia jasa asuransi lainnya; - Cakupan dan frekuensi komunikasi hasil pemantauan di atas kepada Dewan Komisaris (atau kepada Komite Audit) yang memungkinkan Dewan Komisaris untuk menilai secara menyeluruh tentang kondisi pengendalian internal dan efektivitasnya dalam pengelolaan risiko; - Terjadinya kegagalan atau defisiensi dalam pengendalian internal yang ditemukan dalam periode yang direviu dan luasnya dampak kontinjensi yang telah, dapat, atau mungkin terjadi di masa depan, yang berdampak material atas kondisi atau kinerja keuangan korporasi; dan - Efektivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Such periodic reviews specifically consider: - Changes since the last review in the nature and scope of significant risks and the corporation's ability to respond to changes in business and external environment; - The scope and quality of ongoing monitoring of risks and internal control systems, including the role of internal audit and other assurance providers; - The coverage and frequency of communication of monitoring results to the Board of Commissioners or the Audit Committee; - Failures or deficiencies in internal controls identified during the review period and the extent of actual or potential material impacts on financial condition or performance; - The effectiveness of internal controls relating to financial reporting and compliance with applicable laws and regulations.			
	5.1.1.2	Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki sebuah fungsi yang berperan untuk senantiasa mengikuti perubahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan usahanya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya, serta memiliki sistem untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal korporasi. The Board of Directors ensures that the corporation has a function responsible for monitoring changes in laws and regulations and ensuring compliance with applicable laws and internal regulations.			

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
5.2 Manajemen Risiko Risk Management					
5.2.1		Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi.			
		Strategy and risk are integrated, transparently disclosed, and embedded in the duties and discussions of the Board of Directors and the Board of Commissioners.			
		5.2.1.1	Direksi memimpin penerapan manajemen risiko untuk dimanfaatkan oleh seluruh jajaran manajemen dalam menciptakan dan melindungi nilai bagi korporasi, dengan memberi contoh dan menjadi teladan dalam hal pengendalian dan pengelolaan risiko dalam aktivitas bisnis dan operasional guna menanamkan, memperkuat, dan mengembangkan budaya sadar risiko yang berlandaskan pada kepatuhan dan pengendalian internal yang efektif. The Board of Directors leads the implementation of risk management to create and protect corporate value, sets an example in risk control, and fosters a risk aware culture based on compliance and effective internal control.		
		5.2.1.2	Direksi mengungkapkan: 1. Risiko-risiko utama yang dihadapi korporasi serta pengelolaannya; dan 2. Apakah terdapat eksposur material atas risiko lingkungan atau sosial dan, jika ya, bagaimana mengelola atau intensi dalam mengelola risiko tersebut. The Board of Directors discloses: 1. The principal risks faced by the corporation and their management; and 2. Any material exposure to environmental or social risks and how they are or will be managed.		
		5.2.1.3	Direksi memastikan kesesuaian sistem pengendalian internal dan kerangka kerja manajemen risiko dengan karakteristik kebutuhan dan proses bisnis korporasi sehingga proses pengendalian internal dan pengelolaan risiko terhadap seluruh jenis risiko yang dihadapi korporasi, termasuk di dalamnya komunikasi dan pelaporan tentang risiko, manajemen risiko, pemeriksanaannya, serta efektivitasnya, dapat terlaksanakan secara efektif selaras dengan ekspektasi para pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures that internal control and risk management frameworks align with business characteristics and stakeholder expectations.		
		5.2.1.4	Direksi memastikan proses governansi risiko di Teknologi Informasi termasuk gangguan, keamanan cyber, pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa semua risiko utama diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. The Board of Directors ensures governance processes in Information Technology risk, including disruption, cybersecurity, and disaster recovery, with reporting to the Board of Commissioners.		

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
			Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Monitoring Committee assists the Board of Commissioners by providing transparent and independent oversight of risk management.		
	5.2.2	5.2.2.1	Peran Komite Pemantau Manajemen Risiko termasuk di antaranya: 1. memantau kinerja korporat terhadap kerangka manajemen risiko, termasuk memantau apakah korporasi beroperasi dalam selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; 2. memantau pengendalian terhadap risiko-risiko utama, termasuk risiko utama pelaporan keuangan dan risiko kecurangan (fraud risk); 3. mereview setiap kejadian material yang melibatkan fraud atau kelemahan signifikan dalam pengendalian risiko korporasi, serta pelajaran yang didapat untuk mencegah terulang di masa datang; 4. menerima laporan dari auditor internal tentang hasil review atas kecukupan proses manajemen risiko korporasi; 5. menerima laporan dari manajemen tentang sumber risiko baru dan yang muncul serta pengendalian risiko dan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan Direksi untuk menangani risiko tersebut; 6. menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan perubahan yang harus dilakukan pada kerangka manajemen risiko entitas atau selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; dan 7. mengawasi program asuransi korporasi, dengan memperhatikan bisnis korporat dan risiko yang dapat diasuransikan. The roles of the Risk Management Monitoring Committee include, among others: 1. Monitoring corporate performance against the risk management framework, including monitoring whether the corporation operates within the risk appetite approved by the Board of Commissioners; 2. Monitoring controls over principal risks, including key financial reporting risks and fraud risk; 3. Reviewing any material incidents involving fraud or significant weaknesses in corporate risk controls, as well as lessons learned to prevent recurrence in the future; 4. Receiving reports from internal auditors on the results of reviews regarding the adequacy of the corporation's risk management processes; 5. Receiving reports from management on new and emerging sources of risk, as well as risk controls and mitigation measures undertaken by the Board of Directors to address such risks; 6. Preparing recommendations to the Board of Commissioners regarding changes required to the entity's risk management framework or the risk appetite approved by the Board of Commissioners; and 7. Overseeing the corporate insurance program, taking into account the corporation's business activities and insurable risks.		
		5.2.2.2.	Jumlah anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah memadai dan mayoritas independen; di antara anggotanya memiliki pengetahuan teknis yang diperlukan dan pemahaman yang memadai tentang industri tempat entitas beroperasi, untuk dapat melaksanakan mandat komite secara efektif. The number of members of the Risk Management Monitoring Committee is adequate and the majority are independent; among its members, there is the necessary technical knowledge and sufficient understanding of the industry in which the entity operates to effectively carry out the Committee's mandate.		

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
5.3 Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Integration of Governance, Risk Management and Compliance					
5.3.1			Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors establishes an integrated Governance, Risk Management, and Compliance system to address uncertainties with integrity and ensure corporate objectives are achieved.	✓	
		5.3.1.3	Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen strategi, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar korporasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya. The Board of Directors ensures coordination and capability enhancement among governance, strategy management, performance management, risk management, compliance management, and internal audit systems.	✓	
5.3.2			Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the compliance function does not concurrently perform functions that may create conflicts of interest.	✓	
5.4 Audit Internal Internal Audit					
5.4.1			Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors and ensures that the internal audit function assists the corporation in achieving its objectives by applying an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.	✓	
		5.4.1.1	Audit internal dilakukan secara objektif dan independen dari manajemen korporasi dan dari fungsi yang diauditnya. Dengan demikian, Audit Internal secara fungsional bertanggungjawab dan melapor kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris dan dapat berkomunikasi dan bertemu langsung dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris dengan atau tanpa kehadiran Direksi. Internal audit is conducted objectively and independently from corporate management and from the functions it audits. Accordingly, Internal Audit is functionally accountable and reports to the Board of Commissioners through the Audit Committee, has direct access to the Audit Committee and the Board of Commissioners, and may communicate and meet directly with the Audit Committee and the Board of Commissioners with or without the presence of the Board of Directors.	✓	
		5.4.1.2	Dewan Komisaris melalui komite audit memastikan fungsi audit internal memiliki wewenang, sumber daya dan akses atas informasi yang memadai untuk melaksanakan perannya secara efektif. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, ensures that the internal audit function has adequate authority, resources, and access to information to effectively perform its role.	✓	
		5.4.1.3	Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal, lingkup pekerjaan, dan anggaran untuk fungsi Audit Internal. The Audit Committee recommends to the Board of Commissioners the appointment and dismissal of the Head of Internal Audit, as well as the scope of work and budget of the Internal Audit function.	✓	
		5.4.1.4	Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern dan mengevaluasi kinerja Audit Internal setiap tahun dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris. Setiap tiga tahun sekali, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, Dewan Komisaris menunjuk The Audit Committee reviews the effectiveness of internal audit implementation, evaluates the performance of Internal Audit annually, and reports the results to the Board of Commissioners. Every three years, taking into account the recommendations of the Audit Committee, the Board of Commissioners appoints an independent external party to conduct a quality assessment of the Internal Audit function.	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		5.4.1.5	Audit internal membuat rencana audit, yang melibatkan Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Audit. Rencana audit internal disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Internal Audit prepares an audit plan involving the President Director and the Board of Commissioners with consideration of the Audit Committee. The internal audit plan is submitted to the Board of Directors and the Board of Commissioners for approval.	✓	
		5.4.1.6	Komite Audit memastikan pelaksanaan audit internal dilakukan berdasarkan standar profesional audit internal yang berlaku dan dengan menjunjung tinggi kode etik profesi serta kode etik organisasi. The Audit Committee ensures that internal audit activities are carried out in accordance with applicable professional internal audit standards and uphold the professional code of ethics as well as the organizational code of ethics.	✓	
6 Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency					
6.1 Kebijakan Pengungkapan Disclosure Policy					
	6.1.1		Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi The corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure the disclosure of material information while safeguarding sensitive and confidential corporate information.	✓	
	6.1.2		Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders' rights to regularly and timely obtain relevant material information about the corporation must be fulfilled.	✓	
		6.1.2.1	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan tertulis dalam melaksanakan kewajiban pengungkapan secara terus-menerus/ keterbukaan informasi berdasarkan peraturan berlaku. The corporation has and discloses written policies for implementing continuous disclosure obligations in accordance with applicable regulations.	✓	
6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial and Sustainability Reporting					
			Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The corporation discloses systems and procedures to ensure that interim financial statements not audited or reviewed by an external auditor are materially accurate, complete, and provide investors with appropriate information to make informed investment decisions.	✓	
	6.2.1	6.2.1.1	Pengungkapan sistem dan prosedur paling tidak mencakup: 1. Pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim; 2. Peran fungsi manajemen risiko/kepatuhan/pengawasan manajemen dan fungsi audit internal dalam memastikan integritas laporan keuangan interim; 3. Peran Komite Audit dalam mereviu laporan keuangan interim yang akan dipublikasikan. The disclosure of such systems and procedures includes at least: 1. Internal controls over financial reporting, including interim financial statements; 2. The role of risk management, compliance, management oversight, and internal audit functions in ensuring the integrity of interim financial statements; 3. The role of the Audit Committee in reviewing interim financial statements prior to publication.	✓	



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
6.2.2		Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of financial statement audits conducted by the external auditor. This includes recommending the appointment, reappointment, and, if necessary, dismissal and remuneration of the external auditor.			✓
		6.2.2.1	Proses seleksi auditor eksternal yang melalui tender dilakukan secara transparan sehingga pemegang saham dapat mengamati dan memantau proses jika mereka menginginkannya. The selection process of the external auditor through a tender is conducted transparently so that shareholders may observe and monitor the process if they wish.	✓	
		6.2.2.2	Komite Audit memastikan bahwa dalam kontrak dengan auditor tidak terdapat klausula yang dapat mengganggu independensi atau kompetensi auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan. The Audit Committee ensures that the contract with the auditor does not contain clauses that may impair the auditor's independence or competence in conducting the audit of financial statements.	✓	
		6.2.2.3	Komite Audit melakukan dialog yang memadai dengan auditor eksternal tanpa kehadiran manajemen dan memantau interaksi antara manajemen dan auditor eksternal, termasuk mereviu management letter yang diberikan oleh auditor eksternal dan mengawasi tanggapan manajemen; The Audit Committee conducts adequate dialogue with the external auditor without the presence of management and monitors interactions between management and the external auditor, including reviewing the management letter issued by the external auditor and overseeing management's response.	✓	
		6.2.2.4	Dewan Komisaris, atau Komite Audit, memastikan agar auditor eksternal segera menginformasikan semua temuan dan masalah signifikan yang ditemukan auditor eksternal selama pelaksanaan audit. The Board of Commissioners, or the Audit Committee, ensures that the external auditor promptly informs them of all significant findings and issues identified during the audit.	✓	
6.2.3		6.2.2.5	Komite Audit mereviu setiap jasa nonaudit yang diberikan oleh auditor eksternal dan afiliasinya serta biaya terkait, untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak mengganggu independensi auditor. The Audit Committee reviews any non-audit services provided by the external auditor and its affiliates, as well as the related fees, to ensure that such services do not impair auditor independence.	✓	
		Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. The sustainability report must be prepared and disclosed accurately and in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.			✓
		6.2.3.1	Laporan keberlanjutan diberikan asuransi oleh pihak eksternal yang independen dan kompeten. The sustainability report is assured by an independent and competent external party.	✓	
6.2.4		Perusahaan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan Perusahaan telah memaparkan tentang kinerja keberlanjutan Perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola, yang disajikan dalam perbandingan selama 3 tahun, sehingga diharapkan membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The Company has published a Sustainability Report as an integral and inseparable part of the Annual Report. The Company's Sustainability Report presents the Company's sustainability performance covering economic, social, environmental, and governance aspects, presented in comparison over three years, to assist shareholders and stakeholders in understanding the corporation's strategic objectives and progress in creating sustainable value.			✓

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
6.3 Diseminasi Informasi Information Dissemination					
6.3.1		Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Information dissemination channels must provide equal, timely, and relatively low cost access to relevant information for users.		✓	
	6.3.1.1	Korporasi secara berkala mengadakan pertemuan dengan analis keuangan. The corporation periodically holds meetings with financial analysts.		✓	
	6.3.1.2	Korporasi memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara efektif dan lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. The corporation utilizes information technology effectively and more broadly beyond its website as a medium for information disclosure.		✓	
	6.3.1.3	Korporasi memastikan bahwa informasi yang disebarkan dijaga dan terproteksi keamanannya. The corporation ensures that disseminated information is safeguarded and protected.		✓	
6.3.2		Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun The corporation ensures that the annual statement on the implementation of the Indonesian General Corporate Governance Guidelines, including explanations of the implementation of each Recommendation and Guideline, is available on its website for a minimum period of five years.		✗	Rekomendasi dan panduan penerapan PUGKI belum disampaikan dalam situs web PUSRI Recommendations and guidelines for the implementation of the Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI) have not yet been published on PUSRI's website.
6.3.3		Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur cross listing, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporations listed in capital markets outside their home jurisdiction, applicable corporate governance laws and regulations must be clearly disclosed. In the case of cross listing, the criteria and procedures for cross listing, as well as the criteria and procedures for recognizing listing requirements for primary listing, must be transparent and documented.		✗	PUSRI tidak terdaftar dalam pasar modal PUSRI is not listed on the capital market



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
7. Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Protection of Shareholders' Rights					
7.1 Hak Pemegang Saham Shareholders' Rights					
7.1.1		Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. The corporation has a communication policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation.		✓	
		7.1.1.1	Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, diperbolehkan untuk melakukan konsultasi satu dengan lainnya tentang isu mengenai hak-hak dasar pemegang saham sebagaimana yang ditetapkan dalam Prinsip ini, namun hal ini tidak boleh disalahgunakan. Shareholders, including institutional shareholders, are permitted to consult with one another on issues concerning fundamental shareholder rights as set forth in these Principles, provided that such consultations are not misused.	✓	
		7.1.1.2	Korporasi mendorong adanya dialog konstruktif antara pemegang saham (terutama investor institusional) dengan manajemen. Korporasi menanggapi permintaan dari pemegang saham untuk terlibat dalam dialog untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai korporasi dalam jangka menengah hingga panjang. The corporation encourages constructive dialogue between shareholders, particularly institutional investors, and management. The corporation responds to shareholder requests for engagement to support sustainable growth and enhance corporate value over the medium to long term.	✓	
		7.1.1.3	Korporasi menyediakan wadah atau platform dialog konstruktif antara seluruh pemegang saham dengan manajemen. The corporation provides a forum or platform for constructive dialogue between all shareholders and management.	✓	
		7.1.1.4	Korporasi segera mengungkapkan kepada publik semua fakta baru yang material yang tersedia bagi analis keuangan dan pihak lainnya yang serupa. The corporation promptly discloses to the public all new material facts made available to financial analysts and other similar parties.	✓	
		7.1.1.5	Korporasi mengungkapkan kebijakan komunikasi korporasi dengan pemegang saham atau investor dalam situs web dan laporan. The corporation discloses its communication policy with shareholders or investors on its website and in its reports.	✗	Rekomendasi dan panduan penerapan PUGKI belum disampaikan dalam situs web PUSRI Recommendations and guidelines for the implementation of the Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI) have not yet been published on PUSRI's website.
7.1.2		Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. A corporation that is a parent entity ensures that its corporate governance policy applies to subsidiaries and jointly controlled entities in which the corporation has significant investment.		✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		7.1.2.1	Kerangka kerja dan kebijakan governansi korporat di entitas anak termasuk kebijakan tertulis antara lain mengenai: 1. wewenang untuk menunjuk komisaris dan direktur. Umumnya, untuk entitas anak dengan ukuran relatif besar, Dewan Komisaris perlu dilibatkan dalam penunjukan pengurus di entitas anak. Untuk entitas anak yang lebih kecil, Direksi yang berwenang melaksanakannya; 2. efektivitas sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku; 3. pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas informasi material entitas anak, termasuk informasi keuangan, transaksi dengan pihak berelasi dan informasi material lainnya; dan 4. Jika korporasi memiliki/membentuk entitas berbadan hukum selain perseoran terbatas, korporasi memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas tersebut disesuaikan dengan konteks jenis badan hukumnya. The corporate governance framework and policies at subsidiaries include written policies regarding, among others: 1. Authority to appoint commissioners and directors. Generally, for relatively large subsidiaries, the Board of Commissioners should be involved in appointing management at the subsidiary level. For smaller subsidiaries, the Board of Directors is authorized to do so; 2. Effectiveness of internal control systems and compliance with applicable laws and regulations; 3. Timely and accurate disclosure of material information of subsidiaries, including financial information, related party transactions, and other material information; and 4. If the corporation establishes or owns legal entities other than limited liability companies, it ensures that its corporate governance policies apply to such entities, adjusted to their legal form.		
		7.1.2.2	Untuk investasi di entitas anak yang signifikan namun di bawah mayoritas (seperti kepemilikan antara 20 persen sampai 50 persen saham), Direksi memastikan bahwa terdapat perjanjian pemegang saham atau perjanjian lain yang memungkinkan korporasi memantau kinerja korporasi dan berpartisipasi dalam kepengurusan, termasuk untuk persetujuan transaksi dan keputusan yang signifikan. Hal ini diperlukan antara lain untuk memastikan bahwa korporasi memiliki informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu di entitas anak. For significant minority investments in subsidiaries, such as shareholdings between 20 percent and 50 percent, the Board of Directors ensures that shareholder agreements or other arrangements allow the corporation to monitor performance and participate in management, including approval of significant transactions and decisions. This is necessary to ensure adequate, accurate, and timely information.		
			Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. The corporation has rules and procedures governing acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions such as mergers and substantial asset sales to ensure transparency, fairness, and protection of all shareholders according to their class.		
7.1.3		7.1.3.1	Korporasi secara jelas mengungkapkan aturan dan prosedur tersebut sehingga investor memahami hak-hak mereka dan hak untuk memperoleh kompensasi. These rules and procedures are clearly disclosed so that investors understand their rights and rights to compensation.		
		7.1.3.2	Taktik yang mencegah pengambil alihan (anti-take-over devices) tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan Dewan Komisaris dari akuntabilitas. Anti takeover devices must not be used to shield management and the Board of Commissioners from accountability.		

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
7.2 Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham Equitable Treatment of Shareholders					
7.2.1		Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: - semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara; - pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. The corporation has rules and procedures ensuring: - All shareholders within the same class of shares are treated equally; - Disclosure of capital structure and arrangements that allow certain shareholders to obtain disproportionate control relative to share ownership.			
		7.2.1.1	Untuk memastikan transparansi hak pemegang saham untuk memperoleh bagian dari laba, korporasi mengungkapkan kebijakan dividen yang terukur, misalnya target rasio pembayaran dividen/dividen per saham. To ensure transparency regarding profit distribution rights, the corporation discloses a measurable dividend policy, such as a target dividend payout ratio or dividend per share.		
		7.2.1.2	Para investor memperoleh informasi tentang hak yang melekat pada semua seri maupun kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam nilai ekonomi saham atau hak suara mendapat persetujuan dari kelas saham yang terdampak secara negatif. Investors are informed of rights attached to all share classes before purchase. Any change in economic value or voting rights must receive approval from adversely affected share classes.		PUSRI bukan perusahaan terbuka PUSRI is not a publicly listed company.
		7.2.1.3	Agar pemegang saham dapat mengetahui pemilik manfaat akhir (beneficial owner) korporasi dengan kepemilikan signifikan, korporasi mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham melalui pemegang saham utama dan pengendali serta pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham paling sedikit 5% (lima persen). To enable shareholders to identify ultimate beneficial owners with significant ownership, the corporation discloses beneficial ownership through principal and controlling shareholders and any beneficial ownership of at least 5 percent.		PUSRI bukan perusahaan terbuka PUSRI is not a publicly listed company.
		7.2.1.4	Korporasi mengungkapkan: - Perjanjian antar pemegang saham; - Voting cap; - Multiple voting rights; - Perikatan lain yang memungkinkan pemegang saham tertentu memiliki hak suara di atas kepemilikannya di korporasi. The corporation discloses: - Shareholder agreements; - Voting caps; - Multiple voting rights; - Other arrangements enabling disproportionate voting rights.		PUSRI bukan perusahaan terbuka PUSRI is not a publicly listed company.
		7.2.1.5	Korporasi menyediakan mekanisme/prosedur yang memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka sesuai dengan aturan perundangan berlaku dengan biaya yang wajar dan tanpa penundaan yang berlebihan. The corporation provides mechanisms or procedures that enable shareholders to have the opportunity to obtain effective remedies for violations of their rights in accordance with applicable laws and regulations, at reasonable cost and without undue delay.		

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The corporation has rules and procedures ensuring that related party transactions are approved and executed in a manner that ensures conflicts of interest are properly managed and protects the interests of the corporation and its shareholders.			✓
		7.2.2.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur operasional baku bahwa transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi adalah adil dan wajar (arm's length transaction). The corporation has policies and standard operating procedures stipulating that related party transactions are conducted in a manner that ensures such transactions are fair and reasonable, on an arm's length basis.	✓	
		7.2.2.2	Transaksi pihak berelasi yang material, termasuk perjanjian jasa konsultasi dan jasa atau pekerjaan lainnya antara direktur/komisaris dan afiliasinya dengan korporasi harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan aturan perundangan berlaku. Selain yang sudah diatur persetujuannya dalam aturan perundangan, transaksi pihak berelasi yang material memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemberian persetujuan. Material related party transactions, including consultancy agreements and other services or work between directors or commissioners and their affiliates and the corporation, must obtain approval in accordance with applicable laws and regulations. In addition to approvals required under laws and regulations, material related party transactions must obtain approval from the Board of Commissioners. Commissioners who have a conflict of interest shall abstain from granting approval.	✓	
7.2.2		7.2.2.3	Korporasi memiliki kebijakan bahwa transaksi yang sudah pasti merugikan pemegang saham publik/minoritas dilarang. Contoh transaksi tersebut: 1. Bantuan/subsidi keuangan kepada Direksi atau Komisaris pada tingkat bunga di bawah kewajaran; walaupun ada pemberian pinjaman harus dilakukan pada tingkat bunga dan syarat wajar dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris; 2. Bantuan/subsidi keuangan kepada entitas selain entitas yang dimiliki sepenuhnya oleh korporasi. The corporation has a policy prohibiting transactions that are clearly detrimental to public or minority shareholders. Examples include: 1. Financial assistance or subsidies to Directors or Commissioners at below market interest rates; if loans are granted, they must be provided at reasonable interest rates and terms and obtain approval from the Board of Commissioners; 2. Financial assistance or subsidies to entities other than entities wholly owned by the corporation.	✓	
		7.2.2.4	Dewan Komisaris mengungkapkan kebijakan proses untuk menyetujui, meninjau dan memantau transaksi pihak berelasi dan setiap konflik kepentingan yang melekat. The Board of Commissioners discloses policies and processes for approving, reviewing, and monitoring related party transactions and any inherent conflicts of interest.	✓	
		7.2.2.5	Kesimpulan kajian Komite Audit atas transaksi pihak berelasi/benturan kepentingan yang signifikan diungkapkan dalam Laporan Tahunan korporasi. The Audit Committee's conclusions on significant related party transactions or conflicts of interest are disclosed in the corporation's Annual Report.	✓	
7.2.3		Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. The corporation has and discloses policies to prevent insider trading. The corporation has clear rules governing any trading of the corporation's shares by directors, commissioners, and insiders to ensure that no person may obtain direct or indirect benefit from information that is not yet available to the market.			PUSRI belum memiliki kebijakan insider trading tersendiri, namun terdapat dalam Kode Etik Perusahaan PUSRI does not yet have a separate insider trading policy; however, provisions regarding insider trading are included in the Company's Code of Ethics



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
7.3 Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders					
7.3.1		Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi The corporation calls the General Meeting of Shareholders with a complete agenda and materials as early as possible, no later than 28 days before the meeting, to provide shareholders with sufficient time and information to properly review the agenda. The meeting invitation and all related information are disclosed through electronic means, such as the corporation's website.			PUSRI bukan perusahaan terbuka sehingga panggilan RUPS paling lambat 14 hari sebelum RUPS As PUSRI is not a publicly listed company, notices for the General Meeting of Shareholders (GMS) are issued no later than 14 days prior to the meeting
		7.3.1.1	Dalam materi atas agenda RUPS, korporasi menyampaikan informasi relevan dan lengkap yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, termasuk penjelasan dan justifikasi (rationale) atas keputusan yang diusulkan untuk disetujui dalam RUPS. In the meeting materials, the corporation provides relevant and complete information necessary for decision making, including explanations and justifications for proposed resolutions to be approved at the General Meeting of Shareholders.		
7.3.2		Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders' effective participation and voting at the General Meeting of Shareholders.			
		7.3.2.1	Korporasi menyediakan infrastruktur yang memungkinkan kehadiran seluruh pemegang saham domestik maupun asing, termasuk investor institusi dalam RUPS. The corporation provides infrastructure that enables the participation of all domestic and foreign shareholders, including institutional investors, at the General Meeting of Shareholders.		
		7.3.2.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners attend the Annual General Meeting of Shareholders.		
		7.3.2.3	Ketua Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta komite lainnya siap memberikan tanggapan yang berarti atas pertanyaan yang ditujukan kepada mereka dalam RUPS. The Chairs of the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Management Monitoring Committee, and other committees are prepared to provide meaningful responses to questions addressed to them at the General Meeting of Shareholders.		
		7.3.2.4	Pemegang saham memiliki kesempatan, dalam batas kewajaran, untuk: 1. Mengajukan pertanyaan dalam RUPS, termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan hasil audit eksternal tahunan; 2. Memasukkan suatu acara ke dalam agenda RUPS; dan 3. Mengajukan usulan resolusi. Shareholders have the opportunity, within reasonable limits, to: 1. Ask questions at the General Meeting of Shareholders, including questions related to the results of the annual external audit; 2. Add items to the meeting agenda; and 3. Propose resolutions.		
		7.3.2.5	Korporasi memiliki cara atau prosedur teknis pemungutan suara (voting) yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham, yaitu: 1. Lokasi RUPS yang mudah diakses sebagian besar pemegang saham; 2. Pemungutan secara tertutup (poll-voting) dan bukan dengan mengacungkan tangan (show of hands); 3. Memastikan tidak ada syarat dan prosedur RUPS yang menghambat The corporation has technical voting procedures that prioritize independence and the interests of shareholders, including: 1. Holding the meeting in a location accessible to most shareholders; 2. Conducting voting by poll rather than by show of hands; 3. Ensuring that no meeting requirements or procedures hinder shareholder participation.		

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
7.3.3		7.3.2.6	Korporasi mengupayakan prosedur pemungutan suara secara elektronik serta mengambil langkah untuk membangun infrastruktur yang memungkinkan pemungutan suara secara elektronik atau menggunakan infrastruktur yang telah tersedia di ekosistem dalam pemungutan suara. The corporation endeavors to implement electronic voting procedures and takes steps to develop infrastructure that enables electronic voting or to utilize existing ecosystem infrastructure for voting.		PUSRI bukan perusahaan terbuka PUSRI is not a publicly listed company.
		7.3.2.7	Setiap pemungutan suara dalam RUPS hanya untuk satu keputusan, tidak ada penggabungan beberapa keputusan ke dalam resolusi yang sama (bundling). Each vote at the General Meeting of Shareholders addresses only one resolution; bundling multiple decisions into a single resolution is not permitted.		
		7.3.2.8	Korporasi menunjuk pihak independen (pengawas/inspektur) untuk menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam RUPS dan mengungkapkannya dalam risalah RUPS. The corporation appoints an independent party, such as a supervisor or inspector, to count and or validate votes at the General Meeting of Shareholders and discloses the results in the meeting minutes.		
		7.3.2.9	Jika resolusi yang disetujui oleh pemegang saham pengendali bertentangan dengan sebagian besar suara pemegang saham nonpengendali, maka pasca RUPS, korporasi mengungkapkan tindakan apa yang diambil untuk memahami dan menanggapi hal yang menjadi perhatian pemegang saham nonpengendali yang menyebabkannya memberikan suara yang berbeda dari pemegang saham pengendali. If a resolution approved by controlling shareholders is contrary to the majority vote of non controlling shareholders, the corporation discloses after the meeting the actions taken to understand and address the concerns of non controlling shareholders that led them to vote differently.		
		Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders effectively participate in determining the appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.			
		7.3.3.1	Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pemeriksaan yang mendalam atas kandidat Direktur dan Komisaris serta menyampaikan semua informasi relevan yang material mengenai kandidat kepada pemegang saham dalam proses pemilihan anggota dewan. Informasi yang diungkapkan termasuk informasi mengenai jabatan Direktur atau Komisaris di korporasi lain, dan apakah mereka dinilai independen dari sudut pandang korporasi. The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, conducts thorough due diligence on Director and Commissioner candidates and provides all material and relevant information regarding candidates to shareholders during the election process. The information disclosed includes positions held as Director or Commissioner in other corporations and whether they are considered independent from the corporation's perspective.		
		7.3.3.2	Direktur dan Komisaris dicalonkan untuk pemilihan setidaknya sekali setiap tiga tahun atau lima tahun bagi korporasi yang peraturannya mengharuskan lima tahun. Akan lebih baik jika pencalonan dilakukan setiap setahun sekali. Directors and Commissioners are nominated for election at least once every three years, or every five years for corporations whose regulations require a five year term. Annual nomination is preferable.		
		7.3.3.3	Pemegang saham melakukan pemungutan suara terpisah untuk tiap-tiap kandidat Direktur dan Komisaris. Shareholders vote separately for each candidate for Director and Commissioner.		PUSRI bukan perusahaan terbuka PUSRI is not a publicly listed company.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
7.3.4		Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporation ensures transparency and accountability of the external auditor at the General Meeting of Shareholders.			✓
		7.3.4.1	Dalam panggilan RUPS, korporasi mengidentifikasi dan menginformasikan calon auditor eksternal yang akan ditunjuk atau ditunjuk kembali dalam RUPS. In the notice of the General Meeting of Shareholders, the corporation identifies and informs shareholders of the proposed external auditor to be appointed or reappointed at the meeting.	✓	
		7.3.4.2	Korporasi memastikan bahwa auditor eksternal menghadiri RUPS dan berkewajiban menjawab pertanyaan dari pemegang saham terkait dengan audit atas laporan keuangan. The corporation ensures that the external auditor attends the General Meeting of Shareholders and is obliged to answer shareholder questions regarding the audit of the financial statements.	✓	
7.3.5		Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. The complete results of voting and a summary of the minutes of the General Meeting of Shareholders are publicly announced on the following business day.			✗ PUSRI bukan perusahaan terbuka PUSRI is not a publicly listed company.
		7.3.5.1	Risalah RUPS diinformasikan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah RUPS. The minutes of the General Meeting of Shareholders are made available to shareholders no later than 30 working days after the meeting.	✗	PUSRI bukan perusahaan terbuka PUSRI is not a publicly listed company.
		7.3.5.2	Risalah RUPS memuat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan oleh pimpinan rapat atau pihak yang menjawab. The minutes include the questions raised by shareholders and the responses provided by the meeting chair or the relevant respondent.	✓	
		7.3.5.3	Penyelenggaraan RUPS, beserta semua materi rapat, laporan dan dokumen terkait yang meliputi antara lain laporan tahunan dan hasil pemungutan suara, termasuk agenda rapat yang bersangkutan dimuat di laman atau media digital komunikasi resmi korporasi dan tersedia selama paling tidak 10 (sepuluh) tahun. The conduct of the General Meeting of Shareholders, together with all meeting materials, reports, and related documents, including the annual report and voting results, as well as the relevant meeting agenda, are published on the corporation's official website or digital communication platform and remain available for at least 10 years.	✗	PUSRI bukan perusahaan terbuka PUSRI is not a publicly listed company.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
8 Pemangku Kepentingan Lainnya Other Stakeholders					
8.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (stakeholder engagement) Key Stakeholder Engagement					
8.1.1		Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. Through the Corporate Secretary, the corporation conducts regular, transparent, and effective communication with key stakeholders and engages them to understand their expectations and grievances, as well as the corporation's impact on them.			
		8.1.1.1	Korporasi mengungkapkan proses dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan kunci yang akan dilibatkan. The corporation discloses the process for identifying and selecting key stakeholders to be engaged.		
		8.1.1.2	Korporasi mengungkapkan pendekatan dan kegiatan dalam menangani keterlibatan pemangku kepentingan kunci termasuk frekuensinya berdasarkan jenis dan kelompok pemangku kepentingan kunci. The corporation discloses its approach and activities in managing key stakeholder engagement, including the frequency of engagement based on the type and group of key stakeholders.		
		8.1.1.3	Korporasi menyediakan saluran yang dapat digunakan para pemangku kepentingan kunci (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll) untuk menyampaikan pendapat dan masukan, menyuarkan keluhan dan/ atau pengaduan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka. The corporation provides channels that may be used by key stakeholders, such as customers, suppliers, the general public, and others, to submit opinions and feedback, and to raise complaints and or grievances regarding possible violations of their rights.		
		8.1.1.4	Korporasi mengungkapkan pandangan, masukan dan keluhan signifikan yang disampaikan para pemangku kepentingan kunci yang diperoleh dari keterlibatan pemangku kepentingan kunci, termasuk: 1. respon korporasi; dan 2. kelompok pemangku kepentingan kunci yang menyampaikan pandangan dan masukan. The corporation discloses significant views, feedback, and grievances submitted by key stakeholders obtained through stakeholder engagement, including: The corporation's response; and The stakeholder groups that submitted such views and feedback.		
8.2 Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis Integration of Sustainability into the Business Model					
8.2.1		Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners together with the Board of Directors is responsible, accountable, and transparent for sustainability governance, including establishing corporate sustainability strategies, priorities, and targets. The Board of Directors and the Board of Commissioners incorporate sustainability considerations in performing their roles, including in the development and implementation of corporate strategy, business plans, key action plans, and risk management.			
		8.2.1.1	Direksi memastikan bahwa strategi, prioritas dan target keberlanjutan korporasi serta kinerja terhadap target ini dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures that corporate sustainability strategies, priorities, targets, and performance against those targets are communicated to stakeholders.		
		8.2.1.2	Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa mengikuti dan memahami masalah keberlanjutan yang relevan bagi korporasi dan bisnisnya. The Board of Directors and the Board of Commissioners continuously monitor and understand sustainability issues relevant to the corporation and its business.		

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		8.2.1.3	Evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris mencakup kinerja mereka dalam mengawasi dan menangani risiko serta peluang yang signifikan tentang keberlanjutan korporasi. The performance evaluation of the Board of Directors and the Board of Commissioners includes their performance in overseeing and managing significant sustainability related risks and opportunities.	✓	
		8.2.1.4	Direksi menunjuk seseorang dalam manajemen yang berperan khusus dalam mengelola secara strategis keberlanjutan, termasuk mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam kegiatan korporasi. The Board of Directors appoints a member of management who has a specific role in strategically managing sustainability, including integrating sustainability considerations into corporate activities.	✓	
8.3 Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan					
			Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the implementation of high ethical, social, and environmental standards throughout the corporation and ensures that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with stakeholders' rights.	✓	
		8.3.1.1	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan tentang tanggung jawab korporasi kepada pelanggan termasuk antara lain mempertimbangkan keamanan informasi pelanggan, etika dan perilaku penjualan, layanan purna jual sesuai dengan umur produk/masa layanan, serta menindaklanjuti tingkat kepuasan pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Iklan dan hubungan masyarakat harus mempromosikan konsumsi yang bertanggung jawab dan dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk menghindari penyesatan pelanggan, atau menyebabkan kesalahpahaman tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh korporasi. The corporation implements and discloses policies regarding corporate responsibility toward customers, including, among others, consideration of customer information security, ethical sales conduct and behavior, after sales service in accordance with product life or service period, and follow up on customer satisfaction levels to improve product and service quality. Advertising and public relations must promote responsible consumption and be conducted responsibly, including avoiding misleading customers or causing misunderstanding regarding products and services offered by the corporation.	✓	
8.3.1		8.3.1.2	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan yang meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok. Korporasi juga memiliki kebijakan yang mendorong dan memantau pemasok untuk menghormati hak asasi manusia, menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, memperlakukan karyawan, staf, dan pekerja mereka secara adil, serta memastikan bahwa pemasok telah menerapkan kebijakan dan prosedur bisnis yang berkelanjutan dan berbasis nilai berkelanjutan. The corporation implements and discloses policies covering supplier selection criteria, transparent procurement mechanisms, supplier capability development efforts, and fulfillment of supplier related rights. The corporation also has policies that encourage and monitor suppliers to respect human rights, implement social and environmental responsibilities, treat their employees, staff, and workers fairly, and ensure that suppliers have implemented sustainable and value based business policies and procedures.	✓	
		8.3.1.3	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman bisnis korporasi untuk mengembangkan dan menghasilkan kegiatan tanggung jawab sosial yang secara kongkrit memberikan nilai tambah bagi masyarakat termasuk mendorong kemandirian masyarakat. The corporation implements and discloses social responsibility by applying its business knowledge and experience to develop and deliver social responsibility activities that concretely provide added value to society, including promoting community self reliance.	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		8.3.1.4	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dengan mencegah, mengurangi, dan mengelola hal-hal berdampak negatif terhadap lingkungan dari semua aspek operasi korporasi, termasuk dalam penggunaan: 1. Bahan baku; 2. Energi; 3. Penggunaan air; 4. Pemanfaatan sumber daya terbarukan; 5. Pemanfaatan serta rehabilitasi keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah dan penurunan dampak gas rumah kaca serta emisi karbon. The corporation implements and discloses environmental responsibility by preventing, reducing, and managing negative environmental impacts arising from all aspects of corporate operations, including in the use of: 1. Raw materials; 2. Energy; 3. Water usage; 4. Utilization of renewable resources; 5. Utilization and rehabilitation of biodiversity, waste management, and reduction of greenhouse gas impacts and carbon emissions.	✓	
		8.3.1.5	Korporasi melaksanakan dan mengungkapkan kebijakan persaingan yang sehat dengan mengedepankan perilaku bisnis yang etis dan tidak melakukan praktik anti persaingan untuk mendapatkan atau melindungi posisi pasar. The corporation implements and discloses fair competition policies by prioritizing ethical business conduct and refraining from anti competitive practices to obtain or protect market position.	✓	
		8.3.1.6	Direksi memiliki kebijakan guna melindungi hak para kreditor. 1. Dewan Komisaris mengawasi dan Direksi memonitor likuiditas dan solvabilitas keuangan korporasi. 2. Direksi memastikan bahwa risiko terhadap posisi keuangan atau kesulitan keuangan segera teridentifikasi, dikelola, dimitigasi serta dilaporkan. Dewan Komisaris memantau penanganan Direksi atas risiko atau kesulitan keuangan dan menerima laporan rutin. The Board of Directors has policies to protect creditors' rights. 1. The Board of Commissioners oversees and the Board of Directors monitors the corporation's financial liquidity and solvency. 2. The Board of Directors ensures that risks to the financial position or financial distress are promptly identified, managed, mitigated, and reported. The Board of Commissioners monitors the Board of Directors' handling of such risks or financial difficulties and receives regular reports.	✓	

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guideline	Uraian Description	Apply	Keterangan Remarks
		Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan The Board of Directors encourages employees to work in the long term interest of the corporation and to prioritize sustainability.			
		8.3.2.1	Korporasi memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan, yang mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan. The corporation has a long term incentive policy for employees that promotes sustainable value creation.		Belum terdapat kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan There is currently no policy regarding the provision of long-term incentives to employees.
		8.3.2.2	Remunerasi berbasis kinerja untuk karyawan harus memperhatikan unsur risiko, termasuk mengukur imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko (risk-adjusted return), untuk memastikan bahwa tidak ada insentif yang diberikan untuk pengambilan risiko yang tidak diinginkan. Performance based remuneration for employees must take risk elements into account, including measuring risk adjusted returns, to ensure that no incentives are provided for undesirable risk taking.		
8.3.2		8.3.2.3	Direksi mengelola dengan baik benturan kepentingan yang mungkin timbul antara karyawan sebagai penerima manfaat dana pensiun dengan korporasi sebagai pengelola dana pensiun. The Board of Directors properly manages conflicts of interest that may arise between employees as beneficiaries of pension funds and the corporation as the pension fund manager.		
		8.3.2.4	Direksi memastikan korporasi memiliki program pengembangan dan manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk memastikan bahwa korporasi memiliki karyawan dalam jumlah yang memadai dan yang berpengetahuan, terampil, dan berpengalaman. The Board of Directors ensures that the corporation has effective human resource development and management programs to ensure that it has a sufficient number of knowledgeable, skilled, and experienced employees.		
		8.3.2.5	Pada saat mengisi posisi manajerial dalam korporasi, Direksi mempertimbangkan unsur keberagaman, nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender. Kebijakan keberagaman tersebut disertai dengan tujuan yang terukur. In filling managerial positions within the corporation, the Board of Directors considers diversity, non discrimination, and equal opportunity for all candidates without distinction of ethnicity, religion, race, group, or gender. Such diversity policy is accompanied by measurable objectives.		

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD (ACGS)

PUSRI telah memenuhi hampir seluruh butir-butir ketentuan dalam ACGS, seperti tampak pada tabel berikut ini: PUSRI has complied with nearly all provisions of the ACGS, as shown in the table below:

No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
A	Hak-Hak Pemegang Saham Shareholders' Rights	
A.1	Hak-hak Dasar Pemegang Saham Basic Shareholder Rights	316
A.1.1	Apakah perusahaan melakukan Pembayaran Dividen (interim maupun final/tahunan) secara adil dan tepat waktu, yaitu seluruh Pemegang Saham diperlakukan dengan sama dan dividen dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari setelah (i) pengumuman dividen interim dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui Pembagian Dividen final. Does the company distribute dividends (interim and/or final/annual) fairly and in a timely manner, whereby all shareholders are treated equally and dividends are paid within 30 days after (i) the declaration of interim dividends and (ii) the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) approves the distribution of final dividends?	256
A.2	Hak untuk Berpartisipasi dalam Keputusan-Keputusan mengenai Perubahan Mendasar perusahaan Apakah Pemegang Saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam: Right to Participate in Decisions Concerning Fundamental Changes in the Company Do shareholders have the right to participate in:	
A.2.1	Perubahan Anggaran Dasar perusahaan? Amendments to the Company's Articles of Association?	317
A.2.2	Otorisasi penambahan modal? Authorization for capital increases?	317
A.2.3	Peralihan seluruh atau sebagian aset, yang menyebabkan penjualan perusahaan? Transfer of all or a substantial portion of assets that results in the sale of the company?	316-317
A.3	Hak untuk Berpartisipasi secara Efektif dan Memberikan Suara dalam RUPS serta Mendapat Informasi mengenai Tata Tertib RUPS, termasuk prosedur Pemungutan Suara Right to Participate Effectively and Vote in the GMS and to Obtain Information on the GMS Rules, Including Voting Procedures	
A.3.1	Apakah Pemegang Saham memiliki kesempatan, yang dibuktikan oleh agenda, untuk menyetujui remunerasi (gaji, tunjangan, tunjangan dalam bentuk benda, dan honorarium lainnya) atau setiap peningkatan remunerasi untuk Direktur/Komisaris non-Eksekutif? Do shareholders have the opportunity, as evidenced by the agenda, to approve remuneration (salary, allowances, benefits in kind, and other honoraria) or any increase in remuneration for non-executive Directors/Commissioners?	317, 327
A.3.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada Pemegang Saham Minoritas untuk menominasikan kandidat Direksi/Dewan Komisaris? Does the company grant minority shareholders the right to nominate candidates for the Board of Directors/Board of Commissioners?	317
A.3.3	Apakah perusahaan memperbolehkan Pemegang Saham untuk memilih Direksi/Komisaris secara individual? Does the company allow shareholders to elect Directors/Commissioners individually?	317
A.3.4	Apakah perusahaan menginformasikan prosedur pemungutan suara yang akan digunakan sebelum Rapat dimulai? Does the company disclose the voting procedures before the meeting begins?	317
A.3.5	Apakah di salah RUPST terakhir tercantum bahwa para Pemegang Saham mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham serta jawaban yang diberikan oleh perusahaan? Do the minutes of the most recent AGMS state that shareholders were given the opportunity to ask questions, including the questions raised and the responses provided by the company?	327-330

No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
A.3.6	Apakah perusahaan menginformasikan hasil pemungutan suara, termasuk suara setuju, tidak setuju dan tidak memberikan suara untuk seluruh keputusan/setiap agenda dari RUPST terakhir? Does the company disclose the voting results, including votes for, against, and abstentions, for all resolutions/agenda items of the most recent AGMS?	N.A. PUSRI Bukan perusahaan publik N.A. PUSRI is not a publicly listed company
A.3.7	Apakah perusahaan menginformasikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menghadiri RUPST terakhir? Does the company disclose which members of the Board of Directors and Board of Commissioners attended the most recent AGMS?	331-332
A.3.8	Apakah perusahaan menginformasikan jika seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta CEO (jika beliau bukan anggota Dewan) menghadiri RUPST terakhir? Does the company disclose whether all members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the CEO (if not a board member) attended the most recent AGMS?	N.A
A.3.9	Apakah perusahaan mengizinkan pemberian suara tanpa kehadiran (voting in absentia)? Does the company allow voting in absentia?	N.A
A.3.10	Apakah perusahaan melakukan pemungutan suara dengan jajak pendapat (bukan dengan cara mengacungkan tangan) untuk semua keputusan pada RUPST terakhir? Did the company conduct poll voting (rather than show of hands) for all resolutions at the most recent AGMS?	N.A
A.3.11	Apakah perusahaan menginformasikan penunjukan pihak ketiga (Pengamat) untuk menghitung dan/ atau memvalidasi penghitungan suara di RUPST? Does the company disclose the appointment of a third party (scrutineer) to count and/or validate votes at the GMS?	N.A
A.3.12	Apakah perusahaan memublikasikan hasil pemungutan suara seluruh keputusan dari RUPST/ RUPSLB terakhir, satu hari kerja setelah RUPS dilaksanakan? Does the company publish the voting results for all resolutions of the most recent AGMS/EGMS within one working day after the meeting?	N.A
A.3.13	Apakah perusahaan melakukan pemanggilan RUPST dan RUPLB 21 hari sebelumnya? Does the company issue the AGMS/EGMS notice 21 days in advance?	N.A
A.3.14	Apakah perusahaan menyampaikan alasan dan penjelasan untuk masing-masing agenda yang memerlukan persetujuan pemegang saham, di dalam panggilan RUPST/edaran dan/atau pernyataan perusahaan? Does the company provide reasons and explanations for each agenda requiring shareholder approval in the AGMS notice/circular and/or company statement?	N.A
A.3.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham untuk mengusulkan agenda RUPST? Does the company provide shareholders with the opportunity to propose agenda items for the AGMS?	N.A
A.4	Pasar harus Diizinkan untuk Mengawasi Perusahaan secara Efisien dan Transparan Markets Should Be Allowed to Monitor the Company Efficiently and Transparently	
A.4.1	Dalam hal penggabungan, akuisisi dan/atau pengambilalihan yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham, apakah Direksi/Dewan Komisaris perusahaan menunjuk Pihak Independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi? In the event of mergers, acquisitions, and/or takeovers requiring shareholder approval, does the Board of Directors/Board of Commissioners appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction value?	N.A
A.5	Pelaksanaan Hak Kepemilikan oleh Pemegang Saham, termasuk Investor Institusi, harus Difasilitasi The Exercise of Ownership Rights by Shareholders, Including Institutional Investors, Should Be Facilitated	
A.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktik-praktik yang dilaksanakan perusahaan untuk mendorong para Pemegang Saham untuk terlibat dengan perusahaan, lebih dari RUPST? Does the company disclose practices undertaken to encourage shareholder engagement with the company beyond the AGMS?	N.A
B	Perlakuan yang Adil Terhadap Pemegang Saham Equitable Treatment of Shareholders	
B.1	Saham dan Hak Voting Shares and Voting Rights	
B.1.1	Apakah setiap saham biasa perusahaan memiliki 1 (satu) hak voting? Does each ordinary share carry one voting right?	N.A

No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
B.1.2	Jika perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham, apakah perusahaan memublikasikan hak voting untuk masing-masing jenis saham (contohnya melalui situs Web Bank/situs Web Bursa Efek/situs Web Regulator)? If the company has more than one class of shares, does it disclose the voting rights for each class (for example through the company website, stock exchange website, or regulator website)?	N.A
B.2	Panggilan RUPST Notice of AGMS	
B.2.1	Apakah setiap keputusan dalam RUPST terakhir hanya untuk 1 (satu) hal, yaitu tidak terdapat penggabungan beberapa hal dalam 1 (satu) keputusan? In the most recent AGMS, was each resolution limited to a single matter, meaning that multiple matters were not combined into one resolution?	331-332
B.2.2	Apakah panggilan RUPST terakhir diterjemahkan ke bahasa Inggris dan dipublikasikan pada hari yang sama dengan versi bahasa lokal? Was the most recent AGMS notice translated into English and published on the same day as the local language version?	N.A
	Apakah panggilan RUPST memiliki detil sebagai berikut: Does the AGMS notice include the following details:	
B.2.3	Apakah terdapat informasi profil Direktur/Komisaris (minimal umur, kualifikasi pendidikan, tanggal penunjukan, pengalaman dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) yang akan dipilih/dipilih kembali? Profiles of Directors/Commissioners to be elected or re-elected (minimum: age, educational qualifications, appointment date, experience, and positions in other public companies)?	N.A
B.2.4	Apakah Auditor yang akan ditunjuk/ditunjuk ulang, teridentifikasi dengan jelas? Clear identification of the auditor to be appointed/reappointed?	N.A
B.2.5	Apakah dokumen surat kuasa tersedia dan mudah didapat? Availability and accessibility of proxy forms?	N.A
B.3	Perdagangan oleh Orang Dalam dan yang tidak sesuai peraturan harus dilarang Insider Trading and Abusive Self-Dealing Should Be Prohibited	
B.3.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan/atau mengatur larangan bagi Direktur/Komisaris maupun pekerjanya untuk memanfaatkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat umum? Does the company have a policy prohibiting Directors/Commissioners and employees from using information not yet available to the public?	N.A
B.3.2	Apakah Direktur/Komisaris perusahaan diwajibkan melaporkan transaksinya atas saham perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja? Are Directors/Commissioners required to report transactions in the company's shares within three working days?	N.A
B.4	Transaksi dengan pihak terkait oleh Direksi dan Senior Manajemen Related Party Transactions by Directors and Senior Management	
B.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan para Direktur/Komisaris untuk menginformasikan kepentingan mereka atas suatu Transaksi dan Benturan Kepentingan lainnya? Does the company have a policy requiring Directors/Commissioners to disclose their interests in transactions and other conflicts of interest?	360-361 374-377
B.4.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan Komite dari Direktur/Komisaris Independen untuk mereview Transaksi Material dengan pihak terkait, untuk menentukan apakah transaksi tersebut untuk kepentingan perusahaan dan Pemegang Saham? Does the company have a policy requiring a committee of independent Directors/Commissioners to review material related-party transactions to determine whether they are in the interest of the company and its shareholders?	N.A
B.4.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi mata acara rapat di mana mereka memiliki kepentingan? Does the company require Directors/Commissioners to abstain from discussions where they have an interest?	307-308
B.4.4	Apakah perusahaan memiliki kebijakan tentang pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris, baik melarang pemberian pinjaman atau meyakinkan bahwa pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan arm's length basis dan dengan tingkat bunga pasar? Does the company have a policy on loans to Directors and Commissioners, either prohibiting such loans or ensuring they are conducted on an arm's length basis and at market interest rates?	N.A



No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
B.5	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang tidak sesuai peraturan Protecting Minority Shareholders from Abusive Actions	
B.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi dengan pihak terkait dilakukan dengan wajar dan berdasarkan arm's length? Does the company disclose that related-party transactions are conducted fairly and on an arm's length basis?	260-261
B.5.2	Dalam hal terdapat transaksi dengan pihak terkait yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham, apakah keputusan diambil oleh Pemegang Saham yang tidak memiliki kepentingan? If related-party transactions require shareholder approval, are the decisions made by disinterested shareholders?	N.A
C	Peran Pemangku Kepentingan Role of Stakeholders	
C.1	Menghormati hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan Respecting Stakeholders' Rights Established by Law or Mutual Agreements	
C.1.1	Keberadaan dan ruang lingkup usaha perusahaan untuk memenuhi kesejahteraan Nasabah? Does the company have programs to support customer welfare?	N.A
C.1.2	Prosedur pemilihan Pemasok/Kontraktor? Are there procedures for selecting suppliers/contractors?	SR 144-145
C.1.3	Usaha perusahaan untuk memastikan bahwa rantai usahanya (value chain) ramah lingkungan atau konsisten dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan? Does the company ensure its value chain is environmentally friendly and promotes sustainable development?	SR 144-146
C.1.4	Usaha perusahaan untuk berinteraksi dengan komunitas-komunitas di mana perusahaan beroperasi? Does the company engage with communities where it operates?	SR 208-221
C.1.5	Program dan prosedur anti korupsi perusahaan? Does the company have anti-corruption programs and procedures?	314, 542-543
C.1.6	Bagaimana hak-hak Kreditor terlindungi? How are creditors' rights protected?	N.A
C.1.7	Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang menguraikan tentang usaha-usaha perusahaan atas isu-isu terkait lingkungan/ekonomi dan sosial? Does the company have a separate report or section on environmental, economic, and social issues?	606-610 Laporan Keberlanjutan
C.2	Dalam hal kepentingan para pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, maka pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapat ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka In cases where stakeholders' interests are protected by law, stakeholders must be given the opportunity to obtain effective remedies for violations of their rights	SR 115-117
C.2.1	Apakah perusahaan menyediakan kontak detail melalui situs web atau Laporan Tahunan perusahaan, sehingga para Pemangku Kepentingan (seperti nasabah, pemasok, masyarakat, dll) dapat menyampaikan masalah dan/atau keluhan atas kemungkinan pelanggaran hak mereka? Does the company provide contact details on its website or in its Annual Report so stakeholders (customers, suppliers, communities, etc.) can report concerns or complaints regarding possible violations of their rights?	84, 530-539 SR 201, 264-265,
C.3	Mekanisme agar pekerja dapat berpartisipasi harus dapat dikembangkan Mechanisms for Employee Participation	
C.3.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik untuk kesehatan, keamanan dan kesejahteraan pekerjanya? Does the company explicitly disclose policies and practices on employee health, safety, and welfare?	SR 246-248 SR 252-254
C.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik-praktik mengenai program pelatihan dan pengembangan pekerjanya? Does the company disclose employee training and development policies and practices?	279-280 SR 227-230
C.3.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan remunerasi/kompensasi yang tidak hanya memperhitungkan kinerja perusahaan jangka pendek? Does the company have a remuneration policy that considers long-term company performance rather than only short-term results?	283-284 SR 232-234

No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
C.4	Para pemangku kepentingan termasuk pekerja secara individu maupun perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengkomunikasikan kekhawatiran mengenai praktik-praktik ilegal atau tidak etis kepada Direksi dan hak-hak mereka tidak dikompromikan karena melakukan hal tersebut Stakeholders, including employees individually or through their representatives, must be able to freely communicate concerns regarding illegal or unethical practices to the Board of Directors, and their rights must not be compromised for doing so	538 SR 240 SR 264-265 SR 335-337
C.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan whistleblowing yang memuat prosedur pengaduan oleh pekerja dan pemangku kepentingan lainnya terkait dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak melalui situs web atau Laporan Tahunan perusahaan? Does the company have a whistleblowing policy that includes procedures for complaints by employees and other stakeholders regarding alleged illegal or unethical conduct and provides contact details through the company's website or Annual Report?	530-539
C.4.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi pekerja yang mengungkapkan perilaku ilegal atau tidak etis dari pembalasan? Does the company have a policy or procedure to protect employees who disclose illegal or unethical conduct from retaliation?	538
D	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	
D.1	Transparansi Struktur Kepemilikan Transparency of Ownership Structure	
D.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas beneficial owners, dengan kepemilikan saham 5% atau lebih? Does the share ownership information disclose the identities of beneficial owners holding 5% or more of the shares?	39, 150-152
D.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan secara langsung/tidak langsung dari Pemegang Saham mayoritas? Does the Company disclose direct and/or indirect ownership by the majority Shareholder?	39,150-152
D.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik langsung/tidak langsung? Does the Company disclose share ownership by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, whether direct or indirect?	151
D.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh Manajemen Senior, baik langsung/ tidak langsung? Does the Company disclose share ownership by Senior Management, whether direct or indirect?	151
D.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan detail perusahaan induk, anak perusahaan, asosiasi, perusahaan patungan (joint ventures) dan special purpose enterprises? Does the Company disclose details of the parent company, subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose enterprises?	118, 114-115
D.2	Kualitas Laporan Tahunan Quality of the Annual Report	
	Apakah Laporan Tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut ini Does the Company's Annual Report disclose the following:	
D.2.1	Tujuan perusahaan Corporate Objectives	94-97
D.2.2	Indikator-indikator kinerja keuangan Financial Performance Indicators	28-35
D.2.3	Indikator-indikator kinerja non-keuangan Non-Financial Performance Indicators	36-37
D.2.4	Kebijakan Dividen Dividend Policy	255-258
D.2.5	Detail biografi (minimum umur, kualifikasi pendidikan, tanggal pengangkatan pertama kali, pengalaman yang relevan dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) dari seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Detailed biographies (at a minimum: age, educational qualifications, date of first appointment, relevant experience, and positions in other public companies) of all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	119-133
D.2.6	Detail kehadiran dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris Detailed attendance records of each member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners at Board of Directors and/or Board of Commissioners meetings.	324-326, 331-332
D.2.7	Total remunerasi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Total remuneration of each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	410-417



No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Corporate Governance Confirmation Statement	
D.2.8	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengkonfirmasi kepatuhan perusahaan terhadap tata kelola perusahaan dan jika terdapat pelanggaran, telah teridentifikasi dan dijelaskan alasan untuk setiap masalah? Does the Annual Report contain a statement confirming the Company's compliance with corporate governance principles and, if there are any deviations, have such issues been identified and the reasons explained?	304-308
D.3	Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Terkait Related Party Transaction Disclosure	
D.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan mengenai review dan persetujuan atas transaksi dengan pihak terkait yang material? Does the Company disclose its policy regarding the review and approval of material related party transactions?	260 -261
D.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan dan sifat serta nilai setiap transaksi dengan pihak terkait yang material? Does the Company disclose the name, relationship, nature, and value of each material related party transaction?	263-264
D.4	Direktur dan Komisaris melakukan transaksi saham perusahaan Directors' and Commissioners' Share Transactions	N.A
D.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan transaksi saham perusahaan oleh orang dalam? Does the Company disclose share transactions conducted by insiders?	N.A
D.5	Eksternal Auditor dan Laporan Auditor External Auditor and Auditor's Report	
	Jika perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang sama untuk jasa audit dan jasa non-audit If the Company appoints the same Public Accounting Firm for both audit and non-audit services:	
D.5.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan? Are audit and non-audit fees disclosed?	488-491
D.5.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit? Do non-audit fees exceed audit fees?	Tidak, 488-491
D.6	Media Komunikasi Communication Media	
	Apakah perusahaan menggunakan media di bawah ini untuk berkomunikasi? Does the Company use the following media to communicate:	
D.6.1	Laporan Triwulan Quarterly Reports	513-515
D.6.2	Situs Web perusahaan Company website	160, 513-515
D.6.3	Analyst meeting Analyst meetings	N.A
D.6.4	Media briefings Media briefings	513-515
D.7	Jadwal Pengeluaran Laporan Tahunan/Kuangan Annual/Financial Report Issuance Schedule	
D.7.1	Apakah Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku? Is the audited Annual Financial Report issued within 120 days from the end of the financial year?	N.A
D.7.2	Apakah Laporan Tahunan dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku? Is the Annual Report issued within 120 days from the end of the financial year?	N.A
D.7.3	Apakah pernyataan bahwa Laporan Keuangan Tahunan telah disajikan secara benar dan wajar, telah dikonfirmasi oleh Dewan Komisaris atau Direksi dan/atau Pejabat terkait dari perusahaan. Is there a statement confirming that the Annual Financial Statements have been fairly presented, as confirmed by the Board of Commissioners and/or the Board of Directors and/or relevant Company officials?	80-81
D.8	Situs Web perusahaan Company Website	
	Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut: Does the Company have a website disclosing up-to-date information on the following:	

No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
D.8.1	Laporan Keuangan (triwulan terakhir) Latest Quarterly Financial Reports	514
D.8.2	Materi yang disampaikan dalam briefing kepada analis dan media Materials presented in analyst and media briefings	514
D.8.3	Laporan Tahunan yang dapat diunduh Downloadable Annual Report	514
D.8.4	Panggilan RUPS dan/atau RUPSLB Notices of GMS and/or Extraordinary GMS (EGMS)	514
D.8.5	Berita Acara RUPST dan/atau RUPSLB Minutes of Annual GMS and/or EGMS	N.A
D.8.6	Konstitusi perusahaan (Undang-undang, nota dan anggaran dasar perusahaan) Company constitution (laws, memorandum, and articles of association)	N.A
D.9	Hubungan Investor Investor Relations	
D.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan e-mail) dari petugas/ institusi yang bertanggung jawab atas hubungan investor? Does the Company disclose contact details (e.g., telephone, fax, and email) of the officer/institution responsible for investor relations?	84-85
E	Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners	
E.1	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Duties and Responsibilities	
	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dan Tata Kelola perusahaan yang jelas Are the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners clearly defined?	358-359, 382- 388
E.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan Tata Kelola perusahaan/Piagam Direksi/Dewan Komisaris? Does the Company disclose its corporate governance policy/Board Charter?	128, 358-359 377-378
E.1.2	Apakah jenis keputusan yang meminta persetujuan Direksi/Dewan Komisaris diungkapkan? Are the types of decisions requiring approval from the Board of Directors/Board of Commissioners disclosed?	388-390
E.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab Direksi/Dewan Komisaris jelas disebutkan? Are the roles and responsibilities of the Board of Directors/Board of Commissioners clearly stated?	358-359 378, 388
	Visi/Misi perusahaan Company Vision and Mission	
E.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan Visi dan Misi yang dimutakhirkan Does the Company have an updated Vision and Mission statement?	90-91
E.1.5	Apakah Direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setiap tahun? Does the Board of Directors play a leading role in the annual development and review of corporate strategy?	70-71, 174-176
E.1.6	Apakah Direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan? Does the Board of Directors have a process to review, monitor, and oversee the implementation of corporate strategy?	71-72
E.2	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris Structure of the Board of Directors and Board of Commissioners	
	Kode Etik atau Pedoman Perilaku Code of Ethics or Code of Conduct	
E.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan? Are details of the code of ethics or conduct disclosed?	516-529
E.2.2	Apakah semua Direktur/Komisaris, Manajemen Senior dan pekerja diharuskan mematuhi kode etik? Are all Directors/Commissioners, Senior Management, and employees required to comply with the code of ethics?	528
E.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku? Does the Company have a process to implement and monitor compliance with the code of ethics or conduct?	528-529



No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
	Struktur dan Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Structure and Composition of the Board	
E.2.4	Apakah komposisi Direktur/Komisaris independen sekurang-kurangnya merupakan 50% dari keseluruhan anggota Direksi/Dewan Komisaris? Do Independent Directors/Commissioners constitute at least 50% of the total members of the Board of Directors/Board of Commissioners?	357-358
E.2.5	Apakah perusahaan memiliki batas waktu masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing-masing lima tahun untuk Direktur/Komisaris Independennya? Does the Company limit the tenure of Independent Directors/Commissioners to nine years or less, or two five-year terms?	357-358
E.2.6	Sudahkah perusahaan menetapkan batas lima kursi Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat dijabat secara serentak oleh seorang Direktur/Komisaris independen/non-Eksekutif? Has the Company set a limit of five board seats that may be held concurrently by an Independent/Non-Executive Director/Commissioner?	N.A
E.2.7	Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat lebih dari dua posisi sebagai Direksi dan Dewan Komisaris di perusahaan publik lain? Does the Company have any Executive Director holding more than two positions as Director/Commissioner in other public companies?	N.A
	Komite Nominasi Nomination Committee	
E.2.8	Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi? Does the Company have a Nomination Committee?	430
E.2.9	Apakah Komite Nominasi sebagian besar terdiri dari Direksi/komisaris Independen? Is the Nomination Committee composed mainly of Independent Directors/Commissioners?	434
E.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi merupakan direktur/komisaris Independen? Is the Chair of the Nomination Committee an Independent Director/Commissioner?	434
E.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi? Does the Company disclose the Nomination Committee's terms of reference/governance framework/charter?	431
E.2.12	Apakah daftar kehadiran Rapat Komite Nominasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Nominasi mengadakan Rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun? Is the attendance record of Nomination Committee meetings disclosed and does the Committee meet at least twice a year?	439
	Komite Remunerasi Remuneration Committee	
E.2.13	Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi? Does the Company have a Remuneration Committee?	430
E.2.14	Apakah Komite Remunerasi sebagian besar terdiri dari Direksi/komisaris Independen? Is the Remuneration Committee composed mainly of Independent Directors/Commissioners?	434
E.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi adalah Direktur/Komisaris Independen? Is the Chair of the Remuneration Committee an Independent Director/Commissioner?	434
E.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi? Does the Company disclose the Remuneration Committee's terms of reference/governance framework/charter?	431
E.2.17	Apakah daftar kehadiran Rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi mengadakan Rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun? Is the attendance record of Remuneration Committee meetings disclosed and does the Committee meet at least twice a year?	439
	Komite Audit Audit Committee	
E.2.18	Apakah perusahaan memiliki Komite Audit? Does the Company have an Audit Committee?	418
E.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non-Eksekutif dengan sebagian besar merupakan Direktur/Komisaris Independen? Is the Audit Committee composed entirely of Non-Executive Directors/Commissioners, with the majority being Independent?	420-421

No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
E.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan Direktur/Komisaris Independen? Is the Chair of the Audit Committee an Independent Director/Commissioner?	420-423
E.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/tata kelola/piagam Komite Audit? Does the Company disclose the Audit Committee's charter/governance framework?	418
E.2.22	Apakah setidaknya salah satu anggota komite dari Direktur/Komisaris Independen memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)? Does at least one independent member have accounting expertise (qualification or experience)?	420-423
E.2.23	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan rapat paling sedikit empat kali sepanjang tahun? Is the attendance record disclosed and does the Audit Committee meet at least four times per year?	425
E.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Auditor Eksternal? Does the Audit Committee have primary responsibility for recommending the appointment and dismissal of the External Auditor?	419-420
E.3	Proses Direksi/Dewan Komisaris Board Processes	
	Rapat dan Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Meetings and Attendance	
E.3.1	Apakah Rapat Direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun buku? Are Board of Directors meetings scheduled before the start of the financial year?	391
E.3.2	Apakah Direksi/Dewan Komisaris mengadakan Rapat paling tidak enam kali sepanjang tahun? Does the Board of Directors/Board of Commissioners meet at least six times per year?	391, 361-362
E.3.3	Apakah masing-masing Direktur/Komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua Rapat Dewan yang diadakan sepanjang tahun? Does each Director/Commissioner attend at least 75% of all Board meetings?	391-, 361-364
E.3.4	Apakah perusahaan memerlukan kuorum minimum paling tidak 2/3 dari jumlah yang hadir untuk pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris? Is a minimum quorum of at least two-thirds required for decision-making?	391-361-364
E.3.5	Apakah Direktur/Komisaris non-Eksekutif perusahaan mengadakan rapat secara terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa kehadiran Eksekutif? Do Non-Executive Directors/Commissioners meet separately at least once a year without Executive presence?	N.A
	Akses ke Informasi Access to Information	
E.3.6	Apakah materi untuk rapat Direksi/Dewan Komisaris diberikan kepada Anggota Dewan paling lambat lima hari kerja sebelum Rapat? Are meeting materials provided at least five working days before Board meetings?	N.A
E.3.7	Apakah Sekretaris Perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya? Does the Corporate Secretary play a key role in supporting the Board?	463-465
E.3.8	Apakah Sekretaris Perusahaan dilatih mengenai praktik hukum, akuntansi atau tugas-tugas Sekretaris Perusahaan dan terus mengikuti perkembangan pengetahuan yang relevan? Is the Corporate Secretary trained in legal, accounting, or company secretarial practices and kept updated?	143, 466-467
	Penunjukan dan Pemilihan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris Appointment and Re-election of Directors and Commissioners	
E.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih Direktur/Komisaris baru? Does the Company disclose the criteria for selecting new Directors/Commissioners?	353, 374-375
E.3.10	Apakah perusahaan menjabarkan proses yang diikuti dalam menunjuk Direktur/Komisaris baru? Does the Company describe the appointment process?	353, 374-375
E.3.11	Apakah semua Direktur/Komisaris dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan yang terdaftar di negara-negara yang memiliki Undang-undang yang mengatur masa jabatan masing-masing 5 tahun? Masa jabatan lima tahun diwajibkan oleh Peraturan per Undang-undangan yang sudah ada sejak diluncurkannya ACGS pada tahun 2011 Are all Directors/Commissioners re-elected every three years; or every five years for companies listed in jurisdictions where the law stipulates a five-year term of office? A five-year term of office is mandated by prevailing laws and regulations that have been in effect since the launch of ACGS in 2011.	353, 375



No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
	Perihal Remunerasi Remuneration Matters	
E.3.12	Apakah perusahaan mengungkapkan Kebijakan/Praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan dan imbalan lainnya) (yaitu penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang dan ukuran kinerja) untuk Direktur Eksekutif dan CEO? Does the Company disclose its remuneration policy/practices for Executive Directors and the CEO, including short- and long-term incentives and performance measures?	410-413
E.3.13	Apakah ada pengungkapan struktur remunerasi bagi Direktur/Komisaris non-Eksekutif? 388-389 Is the remuneration structure for Non-Executive Directors/Commissioners disclosed?	410-413
E.3.14	Apakah pemegang saham atau Direksi menyetujui remunerasi Direktur Eksekutif dan/atau Eksekutif Senior? Is Executive/Senior Executive remuneration approved by shareholders or the Board?	N.A
E.3.10	Apakah perusahaan memiliki standar terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja Direktur Eksekutif dan Eksekutif Senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti ketentuan claw back dan bonus yang ditangguhkan? Does the Company have measurable standards aligning performance-based remuneration with long-term interests, such as clawback provisions or deferred bonuses?	N.A
	Audit Internal Internal Audit	
E.3.16	Apakah perusahaan memiliki fungsi Audit Internal yang terpisah? Does the Company have a separate Internal Audit function?	471, 474
E.3.17	Apakah Kepala Audit Internal diidentifikasi atau, jika di outsource, apakah nama Perusahaan Eksternal diungkapkan? Is the Head of Internal Audit identified or, if outsourced, is the external firm disclosed?	472
E.3.18	Apakah pengangkatan dan pemberhentian Auditor Internal memerlukan persetujuan Komite Audit? Does the appointment and dismissal of the Internal Auditor require Audit Committee approval?	471
	Pemantauan Risiko Risk Monitoring	
E.3.19	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal yang baik/kerangka kerja Manajemen Risiko dan secara berkala meninjau keefektifan kerangka tersebut? Does the Company establish sound internal control procedures/risk management framework and review their effectiveness periodically?	500, 506-509 509-511
E.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan mengungkapkan bahwa Direksi/ Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas Pengendalian Material Perusahaan (termasuk Pengendalian Operasional, Keuangan dan Kepatuhan) dan Sistem Manajemen Risiko? Does the Annual Report state that the Board has reviewed material internal controls and risk management systems?	482-486, 500
E.3.21	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang dihadapi perusahaan secara material (yaitu Keuangan, operasional termasuk TI, Lingkungan, Sosial, Ekonomi)? Does the Company disclose its principal material risks (financial, operational including IT, environmental, social, economic)?	506-509
E.3.22	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan berisi pernyataan dari Direksi/ Dewan Komisaris atau Komite Audit mengenai kecukupan Sistem Pengendalian/Manajemen Risiko Internal Perusahaan? Does the Annual Report include a statement from the Board or Audit Committee regarding the adequacy of internal control/risk management systems?	509-512
E.4	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Board Members	
	Presiden Direktur dan Dewan Komisaris President Director and President Commissioner	
E.4.1	Apakah Presiden Komisaris dan CEO dijabat oleh orang yang berbeda? Are the President Commissioner and CEO separate individuals?	N.A
E.4.2	Apakah Presiden Komisaris merupakan Komisaris Independen? Is the President Commissioner Independent?	354, 356
E.4.3	Apakah ada salah satu Direktur merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir? Has any Director been the Company's CEO within the last two years?	N.A

No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
E.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab Presiden Komisaris diungkapkan? Are the roles and responsibilities of the President Commissioner disclosed? Direktur Independen Senior Senior Independent Director	358-359
E.4.5	Jika Presiden Komisaris tidak Independen, apakah Direksi dan Dewan Komisaris menunjuk Direktur Independen Senior dan apakah perannya telah ditetapkan? If the President Commissioner is not Independent, is a Senior Independent Director appointed and is the role defined? Keahlian dan Kompetensi Expertise and Competence	N.A
E.4.6	Apakah setidaknya satu Direktur/Komisaris non-Eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama yang merupakan bidang operasi perusahaan? Does at least one Non-Executive Director/Commissioner have prior experience in the Company's core industry?	401-404
E.5	Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Performance Pengembangan Direksi Board Development	
E.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk Direktur/Komisaris baru? Does the Company have an orientation program for new Directors/Commissioners?	367, 392-393
E.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong Direktur/Komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesional yang sedang berlangsung atau berkelanjutan? Does the Company encourage continuing professional development? Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif CEO/Executive Management Appointment and Performance	339, 392
E.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana Direksi/Dewan Komisaris merencanakan suksesi CEO/ Managing Director/Presiden Direktur dan Manajemen Senior? Does the Company disclose how succession planning for the CEO/Managing Director/President Director and Senior Management is conducted?	N.A
E.5.4	Apakah Dewan Komisaris/Direksi melakukan penilaian kinerja tahunan CEO/Managing Director/ Presiden Direktur? Does the Board conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President Director?	N.A



No	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Halaman Page
	Penilaian Direksi dan Dewan Komisaris Board Assessment	
E.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Direksi/Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan? Does the Company conduct an annual performance assessment of the Board and disclose the criteria and process?	368-369, 393-399
	Penilaian Direksi Individual Director Assessment	
E.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing Direktur/ Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan? Does the Company conduct annual performance assessments of individual Directors/Commissioners and disclose the criteria and process?	368-369 393-399
	Penilaian Komite Committee Assessment	
E.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan Komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang ditetapkan? Does the Company conduct annual performance assessments of Committees under the Board and disclose the criteria and process?	429, 441-442, 456





07

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Social and Environmental
Responsibility

PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA

INDONESIAN CORPORATE GOVERNANCE GENERAL GUIDELINES



Sebagai pelaku manufaktur dalam industri pupuk dan kimia, kami menyadari bahwa kegiatan yang dijalankan memiliki dampak yang besar terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk bagi lingkungan hidup baik di sekitar lokasi pabrik maupun lingkungan hidup. Oleh karenanya, PUSRI menjalankan kegiatan operasional dengan tetap memperhatikan dan mempersiapkan dengan seksama langkah-langkah mitigasi yang dilaksanakan untuk mengatasi dampak operasional Perusahaan terhadap kondisi sosial maupun lingkungan hidup sekitarnya. Untuk itu, PUSRI menjalankan program TJSL dengan mengacu pada kaidah praktik terkini, yakni menerapkan pendekatan mitigasi lingkungan sosial dan tata kelola (Environment, Sosial & Government), dan melaporkan pada aspek-aspek ekonomi, lingkungan dan sosial secara berimbang dalam Laporan Keberlanjutan.

Informasi kegiatan PUSRI mengenai pelaksanaan program dan kinerja tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) disampaikan pada Laporan Keberlanjutan 2025, yang diterbitkan dalam buku terpisah dan dalam waktu yang bersamaan dengan Laporan Tahunan ini, sesuai dengan ketentuan SEOJK 16/SEOJK.04/2021.

As a fertilizer and chemical manufacturer, we acknowledge that our activities significantly affect stakeholders and the surrounding environment. Therefore, PUSRI conducts its operations while carefully considering and preparing mitigation measures to address the impacts of the Company's operations on the surrounding social and environmental conditions. To this end, PUSRI implements its Social and Environmental Responsibility (TJSL) program in accordance with current practices, namely implementing an Environmental, Social, and Government mitigation approach, and reporting on economic, environmental, and social aspects in a balanced manner in its Sustainability Report.

Information on PUSRI's activities regarding the implementation of its Social and Environmental Responsibility (TJSL) program and performance is presented in the 2025 Sustainability Report, which is published separately and concurrently with this Annual Report, in accordance with SEOJK 16/SEOJK.04/2021.



Penyajian secara terpisah tersebut dilakukan, selain dalam memenuhi ketentuan peraturan OJK tersebut, juga dimaksudkan agar masing-masing laporan dapat disajikan secara lebih ringkas, sehingga pembaca dapat lebih fokus pada masing-masing subjek bahasan yang disampaikan pada masing-masing Laporan. Namun demikian, perlu disampaikan bahwa informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan ini dan dalam Laporan Keberlanjutan 2025 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi.

The separate presentations are intended not only to comply with OJK regulations but also to enhance the clarity and coherence of each report, allowing readers to focus more closely on the individual topics covered. However, the Annual Report and the 2025 Sustainability Report remain inseparable and complementary.

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

Dalam rangka memberi gambaran ringkas mengenai kinerja dari berbagai program yang dijalankan dalam memitigasi dampak ekonomi, lingkungan maupun sosial dari program-program yang diuraikan dalam Laporan Keberlanjutan, berikut disampaikan Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan.

SUSTAINABILITY PERFORMANCE SUMMARY

The Sustainability Performance Summary below presents an overview of program performance in mitigating the economic, environmental, and social impacts outlined in the Sustainability Report.

Tabel Ikhtisar Kinerja Aspek Ekonomi [OJK B.1]

Overview of Economic Aspect Performance

Deskripsi Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Jumlah Produksi Pupuk Urea Total Urea Fertilizer Production	Ton Tonnes	1.780.349	1.857.832	2.010.279
Jumlah Produksi Pupuk NPK Total NPK Fertilizer Production	Ton Tonnes	373.919	363.384	328.349
Jumlah Produksi Pupuk (Urea dan NPK) Total NPK Fertilizer Production	Ton Tonnes	2.154.268	2.221.216	2.338.628
Total Produksi Amoniak Total Ammonia Production	Ton Tonnes	1.211.032	1.284.490	1.333.796
Total Pendapatan Total Revenue	Rp Juta Rp Million	13.874.322	13.532.865	13.371.676
Laba Bersih Net Profit	Rp Juta Rp Million	613.527	1.068.535	1.199.859
Laba Komprehensif Comprehensive Profit	Rp Juta Rp Million	797.461	711.725	1.149.823
Jumlah Pemasok yang Melakukan Kerja Sama dengan PUSRI Number of Suppliers Collaborating with PUSRI	Pemasok Suppliers	144	128	120
Produk Ramah Lingkungan Environmentally Friendly Products	PUSRI memproduksi produk-produk hasil inovasi yang lebih ramah lingkungan, antara lain pupuk hayati Bioripah dan pupuk dengan coating yang berfungsi untuk menghambat pelepasan unsur hara ke dalam tanah. Pada tahun 2025, PUSRI juga mengembangkan <i>Diesel Exhaust Fluid</i> (DEF), produk turunan urea yang berfungsi sebagai cairan reduksi emisi gas buang kendaraan diesel. PUSRI produces innovative products that are more environmentally friendly, including Bioripah biofertilizer and coated fertilizers designed to inhibit the release of nutrients into the soil. In 2025, PUSRI also developed Diesel Exhaust Fluid (DEF), a urea-derived product that functions as an exhaust emission reduction fluid for diesel vehicles.			

Ikhtisar Kinerja Aspek Lingkungan [OJK B.1]

Overview of Environmental Aspect Performance

Deskripsi Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Biaya Pengelolaan Lingkungan Environmental Management Expenditure	Rp Juta Rp Million	9.597	8.444	7.175
Penggunaan Energi Terbarukan Renewable Energy Use				
Listrik dari Tenaga Surya Electricity from Solar Power	GJ	773	480	26
Penggunaan Energi Tak Terbarukan Non-Renewable Energy Use				
Gas Alam Natural Gas	GJ	62.165.633	64.021.095	64.286.542
Batu Bara Coal	GJ	9.941.015	9.684.292	10.676.004
Jumlah Penggunaan Energi Total Energy Usage	GJ	72.107.421	73.705.867	74.962.572
Intensitas Energi untuk Produksi Pupuk (Urea dan NPK) Energy Intensity for Fertilizer (Urea and NPK) Production	GJ/Ton GJ/Tonnes	33,47	33,18	32,05
Intensitas Energi untuk Produksi Amonia Energy Intensity for Ammonia Production	GJ/Ton GJ/Tonnes	59,54	57,38	56,20
Emisi GRK GHG Emissions				
Jumlah Emisi GRK Cakupan 1 Total Scope 1 GHG Emissions	Ton CO2eq	2.914.652,42	3.001.242,41	2.969.381,53
Jumlah Emisi GRK Cakupan 3 Total Scope 3 GHG Emissions	Ton CO2eq	15.666	17.530,26	81.188,57
Jumlah Emisi GRK Total GHG Emissions	Ton CO2eq	2.930.318,42	3.018.772,72	3.050.570,1
Intensitas Emisi GRK untuk Produksi Pupuk (Urea dan NPK) GHG Emissions Intensity for Fertilizer (Urea and NPK) Production	Ton CO2eq	1,35	1,35	1,30
Intensitas Emisi GRK untuk Produksi Amonia GHG Emissions Intensity for Ammonia Production	Ton CO2eq	2,41	2,35	2,28
Penggunaan Air Water Usage				
Pengambilan Air dari Sungai Musi Water Intake from Musi River	ML	26.591	24.137	22.697
Pembuangan Air Water Discharge	ML	1.866	1.282	1.091
Konsumsi Air Water Consumption	ML	24.725	22.855	21.606



Ikhtisar Kinerja Aspek Lingkungan [OJK B.1]

Overview of Environmental Aspect Performance

Deskripsi Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Limbah Waste				
Limbah B3 yang Dihasilkan Generated Hazardous Waste		1.276,27	1.130,58	807,02
Limbah B3 yang Dialihkan dari Pembuangan Akhir Hazardous Waste Diverted from Disposal		1.276,27	1.130,58	807,02
Limbah Non-B3 yang Dihasilkan Generated Non-Hazardous Waste		896,01	841,59	825,87
Limbah Non-B3 yang Dialihkan dari Pembuangan Akhir Non-Hazardous Waste Diverted from Disposal		545,89	412,82	361,30
Limbah Non-B3 yang Dikirimkan ke Pembuangan Akhir Non-Hazardous Waste Directed to Disposal		350,12	428,77	464,57

Pelestarian Keanekaragaman Hayati
Biodiversity Conservation

PUSRI mengelola kawasan konservasi keanekaragaman hayati seluas total 111,92 Ha yang terdiri dari *Green Barrier* (28,2 Ha), Area Tanaman Langka (1,5 Ha), Area Penangkaran Satwa (2 Ha), dan Area Hijau Perumahan & Perkantoran (80,22 Ha). Program konservasi mencakup penanaman tumbuhan lokal dan endemik, penangkaran Rusa Sambar (*Rusa unicolor*) dengan status *Vulnerable* IUCN, Taman Anggrek Endemik Sumatera dengan koleksi 16 jenis anggrek endemik, serta Area Tanaman Langka dengan 37 jenis flora. Seluruh kawasan dikelola bekerja sama dengan BKSDA dan dipantau oleh konsultan independen menggunakan indeks keanekaragaman (Shannon-Wiener), indeks kekayaan (Margalef), dan indeks pemerataan (Pielou).

PUSRI manages a biodiversity conservation area covering a total of 111.92 hectares, consisting of the Green Barrier (28.2 Ha), Rare Plant Area (1.5 Ha), Wildlife Breeding Area (2 Ha), and Residential and Office Green Area (80.22 Ha). Conservation programs include the planting of local and endemic plant species, breeding of the Sambar Deer (*Rusa unicolor*) classified as *Vulnerable* by the IUCN, the Sumatran Endemic Orchid Garden with a collection of 16 endemic orchid species, and the Rare Plant Area housing 37 flora species. All areas are managed in collaboration with the Natural Resources Conservation Agency (BKSDA) and monitored by an independent consultant using the species diversity index (Shannon-Wiener), species richness index (Margalef), and species evenness index (Pielou).

Ikhtisar Kinerja Aspek Sosial [OJK B.1]

Overview of Social Aspect Performance

Deskripsi Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Ketenagakerjaan dan K3 Employment and OHS				
Tingkat Turnover Turnover Rate	Persentase Percentage	1,12%	1,62%	0,83%
Biaya Pengembangan Kompetensi Competency Development Cost	Rp Miliar Rp Billion	24,27	25,47	23,28
Promosi karyawan Employee promotion	Orang People	200	476	486
Hasil survei employee experience Employee experience survey result	Persentase Percentage	86,08%	83,73%	82,68%

Ikhtisar Kinerja Aspek Sosial [OJK B.1]

Overview of Social Aspect Performance

Deskripsi Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Jam Kerja Aman Safe Working Hours	Jam Hour	9.355.672	105.838.233	97.396.433
Pelanggan Customer				
Rata-rata Indeks Kepuasan Pelanggan Average of Customer Satisfaction Index	Skor Score	90,81	95,81	94,63
Masyarakat Community				
Pendanaan UMK MSE Financing	Rp Juta Rp Million	11.067	9.924	10.827
Dana Pembinaan Mitra Binaan Funds for Fostered Partner Assistance	Rp Juta Rp Million	1.894	1.884	94
Dana Program TJSL Non PUMK Non-MSE Financing CSR Programs Fund	Rp Juta Rp Million	30.160	28.598	28.999
Mitra Binaan Development Partners	Mitra Partner	248	301	322

Sepanjang tahun 2025, PUSRI merealisasikan program kemasyarakatan dengan total dana TJSL sebesar Rp30,16 miliar, meningkat 5% dari tahun sebelumnya Rp28,60 miliar. Program ini menyentuh ribuan penerima manfaat mencakup peningkatan kesehatan masyarakat melalui Posyandu Sehati 2025 bagi 1.791 peserta di 32 posyandu, bantuan pendidikan melalui Beasiswa PCA kepada mahasiswa dari 8 kelurahan Ring 1, pemberdayaan ekonomi melalui Program PUMK kepada 248 mitra binaan UMK, serta program lingkungan hidup melalui *Community Forest* Kopi Tebat Benawa, Program Pesantren Berdikari, dan pengembangan Bank Sampah Sehati.

Dampak positif terhadap masyarakat juga dirasakan melalui Program Makmur – Agrosolution yang mendampingi 36.131 petani di 118.033 hektar lahan di delapan provinsi Sumatera. Untuk meminimalisir dampak negatif, PUSRI mengintegrasikan analisis risiko sosial ke dalam 100% proses bisnis dan mengelola seluruh potensi dampak lingkungan operasional, antara lain kebisingan, kualitas udara, air permukaan, air limbah, serta limbah B3 dan non-B3 secara ketat sesuai regulasi yang berlaku. Sepanjang tahun pelaporan, tidak terdapat sanksi administratif maupun denda terkait pelanggaran lingkungan, dan seluruh pengaduan lingkungan dari masyarakat telah ditangani dengan tingkat kepatuhan 100%.

Throughout 2025, PUSRI realized community programs with a total CSR fund of Rp30.16 billion, an increase of 5% from the previous year's Rp28.60 billion. These programs reached thousands of beneficiaries, encompassing community health improvement through the Posyandu Sehati 2025 program for 1,791 participants across 32 integrated health posts, educational assistance through PCA Scholarships for students from 8 Ring 1 urban villages, economic empowerment through the PUMK Program for 248 fostered MSE partners, and environmental programs through the Kopi Tebat Benawa Community Forest, the Pesantren Berdikari Program, and the development of Sehati Waste Bank.

Positive impacts on communities were also delivered through the Makmur Program – Agrosolution, which provided assistance to 36,131 farmers across 118,033 hectares of land in eight Sumatran provinces. To minimize negative impacts, PUSRI integrates social risk analysis into 100% of its business processes and rigorously manages all potential operational environmental impacts — including noise, air quality, surface water quality, wastewater, and hazardous and non-hazardous waste — in strict compliance with applicable regulations. Throughout the reporting period, no administrative sanctions or fines were imposed for environmental violations, and all environmental complaints from the community were handled with a 100% compliance rate.



REFERENSI SILANG SE-OJK 16-21 – AR PUSRI 2025

CROSS REFERENCE TO OJK CIRCULAR LETTER

NO. 16-21 – PUSRI ANNUAL REPORT 2025

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
UMUM GENERAL		
Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris The annual report is presented in proper and correct Indonesian language and is also encouraged to be presented in English.		V
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca The annual report is printed in good quality and uses font types and sizes that are easy to read.		V
Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf. The Annual Report presented in the form of an electronic document copy is an Annual Report converted into PDF format.		V
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas The annual report clearly states the company's identity.	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka 2. Samping 3. Sampul belakang 4. Setiap halaman. The company name and year of the annual report are displayed on: 1. Front cover 2. Spine 3. Back cover 4. Every page.	V
Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan, mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir. The annual report is displayed on the company's website, including the latest annual report and at least the previous 4 years' reports.		V



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING SUMMARY OF IMPORTANT FINANCIAL DATA		
Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: The Summary of Important Financial Data contains financial information presented in comparative form for 3 (three) financial years or since the commencement of operations if the Issuer or Public Company has been operating for less than 3 (three) years, at minimum including:	Informasi paling sedikit memuat antara lain: The information includes at least:	
	1. Pendapatan/penjualan; Revenue/sales;	28
	2. Laba bruto; Gross profit;	28
	3. Laba (rugi); Profit (loss);	29
	4. jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; Total profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non- controlling interests;	29
	5. total laba (rugi) komprehensif; Total comprehensive profit (loss);	29
	6. jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; Total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non- controlling interests;	29
	7. laba (rugi) per saham; Earnings (loss) per share;	29
	8. jumlah aset; Total assets;	29
	9. jumlah liabilitas; total liabilities;	31
	10. jumlah ekuitas; total equity;	32
	11. rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; ratio of profit (loss) to total assets;	32
	12. rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; ratio of profit (loss) to equity;	35
	13. rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan; ratio of profit (loss) to revenue/ sales;	35
	14. rasio lancar; current ratio	35
	15. rasio liabilitas terhadap ekuitas; ratio of liabilities to equity;	35
	16. rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan ratio of liabilities to total assets; and	35
	17. informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya; other financial information and ratios relevant to the Issuer or Public Company and its industry type.	35
INFORMASI SAHAM SHARE INFORMATION		
	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Share information for a Public Company should at least contain:	39
	Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: Shares issued for each quarterly period were presented in the form of a comparison for the last 2 (two) financial years, at least containing:	39
	Jumlah saham yang beredar; Number of outstanding shares;	39

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
	Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; Market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares were listed;	39
	Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan The highest, lowest and closing share prices were based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and	39
	Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. Trading volume on the stock exchange where the shares are listed.	39
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on the stock exchange;	39
	Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan In the event of a corporate action causing changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock, dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) should be added with at least an explanation regarding:	39
	Tanggal pelaksanaan aksi korporasi; The date of implementation of the corporate action;	39
	Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; The ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares;	39
	Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; Number of outstanding shares before and after the corporate action;	39
	Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan Number of conversion effects executed (if any); and	39
	Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; Share prices before and after corporate actions;	39
	Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan In the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting of shares in the financial year, the should be explained; and	39



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
	Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/ atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut. In the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/ or the delisting process was still ongoing until the end of the Annual Report period, it explained the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/ or cancellation of the share listing (delisting).	39
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir Information on bonds, sukuk or convertible bonds that were still outstanding in the last 2 (two) financial years.	Informasi memuat: Information contained:	40
	Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); Number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds;	40
	Tingkat bunga/imbalan; Interest rate/yield;	40
	Tanggal jatuh tempo; dan Due date; and	40
	Peringkat obligasi/sukuk tahun 2020 dan 2021. Bond/sukuk ratings for 2020 and 2021.	40
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/ obligasi konversi, agar diungkapkan. Note: if the company did not have bonds/sukuk/ convertible bonds, it had to be disclosed.	40
LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI		
Laporan Direksi Board of Directors' Report	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report should at least contain a brief description of:	
	Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: Performance of Issuers or Public Companies, at least containing:	
	Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; Issuer's or Public Company's strategy and strategic policies;	70-71
	Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; The role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	71-72
	Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; The process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	72
	Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan Comparison between the results achieved with those targeted by the Issuer or Public Company; and	73
	Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; Constraints faced by Issuers or Public Companies;	74
	Perkembangan perekonomian dan target pasar; Economic development and target market;	68-70

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
	Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Human resources include the number, level of education, training, and human resource development.	76-77, 145-149
	Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan Description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and	77-79
	Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. Implementation of the governance of Issuers or Public Companies.	74-76
	Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. Changes in the composition of the members of the Board of Directors (if any) and the reasons for the changes.	77
Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The report of the Board of Commissioners should at least contain a brief description about:	
	Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; Assessment of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	56-57
	Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan Views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	62-63
	Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik Views on the implementation of the governance of the Issuer or Public Company.	58-59
	Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reasons for the changes.	60-61



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Tanda tangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Signatures of members of the Board of Directors and Board of Commissioners	Memuat hal-hal sebagai berikut: Contains the following:	
	Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; Signatures are written on a separate sheet;	V
	Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; Statement that the Board of Commissioners and Board of Directors are fully accountable for the validity of the contents of the annual report;	80-81
	Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors by mentioning their names and positions; and	80-81
	Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. A written explanation in a separate letter from the concerned person in the event that there are members of the Board of Commissioners or Board of Directors who do not sign the annual report, or a written explanation in a separate letter from other members in the event that there is no written explanation from the concerned person.	N.A
PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE		
Nama dan alamat lengkap perusahaan Company name and full address	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: Access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that allowed the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including:	
	Alamat; Address;	85
	Nomor telepon; Telephone number;	85
	Alamat surat elektronik; dan Electronic mail address; and	85
	Alamat situs web; Website address;	85
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; Brief history of the Issuer or Public Company	Mencakup antara lain: tanggal/ tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan It included: date/year of establishment, name, change of company name (if any), and effective date of change of company name.	84
	Catatan Note: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan if the company had never changed its name, it should be disclosed.	84

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission and Corporate Culture	Mencakup: It included:	
	Visi perusahaan; Company vision;	90
	Misi perusahaan; Company mission;	90
	Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan Information that the vision and mission had been reviewed and approved by the Board of Directors/Board of Commissioners for the financial year; and	91
	Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki Perusahaan. A statement regarding the corporate culture of the Company.	91
Bidang usaha Business fields	Uraian mengenai antara lain: It described:	91-92
	Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; The company's business activities according to the latest articles of association;	94-97
	Kegiatan usaha yang dijalankan; dan Business activities carried out; and	97
	Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. Products and/or services produced.	98-107
Wilayah Operasional Operational Area	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. Operational area of Issuer or Public Company; operational area was the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities.	108-113
Struktur Organisasi Organizational structure	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan. The organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions.	116-117
Keanggotaan Asosiasi Association Member	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. List of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance.	119
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: Profile of the Board of Commissioners, at least contained:	120-128
	Nama dan jabatan; Name and position;	120-128
	Foto terbaru; Recent photos;	120-128
	Usia; Age;	120-128
	Kewarganegaraan; Citizenship;	120-128
	Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; Educational history and/or certification;	120-128



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
	Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:	
	Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; Legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners;	120-128
	Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; The legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who was an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;	120-128
	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners did not have concurrent positions, then this should be disclosed;	120-128
	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	120-128
	Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers, either directly or indirectly, to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners had no affiliation, the Issuer or Public Company should disclose this matter;	120-128
	Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan Statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner had served more than 2 (two) terms; and	120-128
	Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there was no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter should be disclosed;	119-120

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Profil Direksi Board of Directors Profile	Profil Direksi, paling sedikit memuat: Profile of the Board of Directors, at least contained:	
	Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; Name and position in accordance with the duties and responsibilities;	130-133
	Foto terbaru; Recent photos;	130-133
	Usia; Age;	130-133
	Kewarganegaraan; Citizenship;	130-133
	Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; Educational history and/or certification;	130-133
	Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:	130-133
	Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; The legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;	130-133
	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan Concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this was disclosed; and	130-133
	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	130-133
	Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors had no affiliation, the Issuer or Public Company should disclose this matter; and	130-133
	Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there was no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter should be disclosed;	129



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan Number of employees and data on employee competency development.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/ contracted) in the financial year;	145-149
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information could be presented in tabular form.	V
Komposisi pemegang saham Composition of shareholders	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: Name of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the financial year consisted of information regarding:	150-151
	Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; Shareholders owning 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company;	150-151
	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/ atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners owning shares of Issuers or Public Companies. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners did not own shares, then this matter should be disclosed;	151
	Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Percentage of indirect ownership of shares of Issuers or Public Companies by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;	151
	Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners did not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter should be disclosed.	151

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
	Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Community shareholder group, namely the group of shareholders who each owned less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company;	151
	Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi; Number of shareholders and percentage of ownership at the end of the financial year based on classification:	151
	Kepemilikan institusi lokal; Ownership of local institutions;	151
	Kepemilikan institusi asing; Ownership of foreign institutions;	151
	Kepemilikan individu lokal; dan Local individual ownership; and	151
	Kepemilikan individu asing; Foreign individual ownership;	151
	Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel The above information could be presented in tabular form.	151
Pemegang saham utama dan pengendali Major and controlling shareholders	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; Information regarding the main and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, to the individual owners presented in the form of a scheme or chart;	151
Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi List of subsidiaries and/or associated entities	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. The name of the subsidiary, associated company, joint venture company where the Issuer or Public Company had joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company.	152-153
	Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. For a subsidiary, information about the address of the subsidiary was added.	114-115



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Name and address of the subsidiary and/or branch office or representative office (if any)	Memuat informasi antara lain: It contained information including:	
	Nama dan alamat entitas anak; dan Name and address of the subsidiary; and	114–115
	Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Name and address of branch/representative office.	114–115
	Catatan: Note: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan. if the company did not have a subsidiary, branch office, and representative office, it should be disclosed.	114–115
Struktur grup perusahaan Company group structure	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV) Company group structure in the form of a chart depicting parent entities, subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose vehicles (SPV).	118
Kronologi pencatatan saham Share listing chronology	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); Chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the financial year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company were listed, including stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	118
Kronologi penerbitan efek (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. Chronology of securities issuance (including private placement) and/or share listing from the initial issuance to the end of the financial year.	Informasi pencatatan efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); Other securities listing information that had not matured in the financial year at least included the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and rating of securities (if any);	118

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) Information on the use of public accountants (AP) and public accounting firms (KAP)	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliannya meliputi: Information on the use of public accounting services (AP) and public accounting firms (KAP) and their networks/associations/ allies included:	
	Nama dan alamat; Name and address;	159
	Periode penugasan; Assignment period;	159
	Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; Information on audit and/or non-audit services provided;	159
	Biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing- masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan Audit and/or non-audit fees for each assignment given during the financial year; and	159
	Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliannya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut. In the event that AP and KAP and their networks/associations/allies, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed.	159
	Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliannya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/allies could be presented in tabular form.	V
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang Name and address of supporting institutions and/or professions	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP. Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.	159
Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional Awards received in the last financial year and/or certifications that are still valid in the last financial year both on a national and international scale	Informasi memuat antara lain: It contained information in the following:	14-21
	Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; Name of award and/or certification;	14-21
	Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; Year of award and/or certification;	14-21
	Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan The awarding and/or certification body; and	14-21
	Masa berlaku (untuk sertifikasi) Validity period (for certification).	18-21
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN I MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON COMPANY PERFORMANCE		
Tinjauan operasi per segmen usaha Operational review by business segment	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: Operational review per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:	
	Penjelasan masing-masing segmen usaha. Explanation of each business segment.	190-192
	Kinerja per segmen usaha, antara lain: Performance per business segment, including:	



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
	Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; Production, which includes the process, capacity, and development;	190–192, 193,197
	Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; Increase/decrease in production capacity;	192, 197, 206
	Penjualan/pendapatan usaha; dan Sales/ operating income; and	226–227
	Profitabilitas Profitability	226, 233
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Description of the company's financial performance	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: Financial performance analysis which included a comparison between the financial performance of the year concerned with the previous year and the causes of an increase/ decrease in an account (in the form of narratives and tables), including regarding:	
	Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; Current assets, non-current assets, and total assets;	214–220
	Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; Short-term liabilities, long-term liabilities and total liabilities;	220–224
	Ekuitas; Equity;	224–225
	Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; Sales/operating income, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and comprehensive income for the current period;	226–235
	Arus kas; Cash flow;	236–243
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan Discussion and analysis of abilities To pay debts and the collectibility level of the company's receivables, by presenting the relevant ratio calculations according to the type of company industry	Penjelasan tentang; Explanation of:	
	Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan Ability to pay debts, both short term and long term and	243
Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy) Discussion on capital structure and management of capital structure policy	Tingkat kolektibilitas piutang. The level of collectibility of receivables	
	Penjelasan atas; The explanation consisted of:	243
	Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan Details of the capital structure consisting of interest- based debt/ sukuk and equity; and	245–246
	Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan Management policies on capital structure (capital structure policies); and	245
	Dasar pemilihan kebijakan manajemen Basis for selecting management policy	245

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir Discussion on material commitments for capital goods investment (not funding commitments) in the last financial year	Penjelasan tentang: It explained:	
	Nama pihak yang melakukan ikatan; The name of the party making the bond;	246-249
	Tujuan dari ikatan tersebut; The purpose of the bond;	246-249
	Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan- ikatan tersebut; The expected source of funds to fulfill these commitments;	246-249
	Mata uang yang menjadi denominasi; dan Currency to be denominated; and	246-249
	Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Measures planned by the company to protect the risk from the related foreign currency position.	246-249
	Catatan Note: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan. if the company did not have a commitment related to investment in capital goods in the last financial year, it should be disclosed.	246-249
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir Discussion on investment in capital goods realized in the last financial year	Penjelasan tentang: It explained:	
	Jenis investasi barang modal; Types of investment in capital goods;	249
	Tujuan investasi barang modal; dan The purpose of investment in capital goods; and	249
	Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. The investment value of capital goods issued in the last financial year.	249
	Catatan Note: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan. if there was no realization of capital goods investment, it should be disclosed.	249



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang. Comparison information between the target at the beginning of the financial year with the results achieved (realization), and the targets or projections to be achieved for the coming year.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: Comparison between targets/projections at the beginning of the year book with the results achieved (realization), regarding:	
	Pendapatan/penjualan; Revenue/sales;	252
	Laba (rugi); Profit (loss);	252-253
	Struktur modal (capital structure); Capital structure;	252
	Pemasaran; Marketing;	253
	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Other matters deemed important to the Issuer or Public Company.	253
	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: Targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year.	
	Pendapatan/penjualan; Revenue/sales;	254
	Laba (rugi); Profit (loss);	254
	Struktur modal (capital structure); Capital structure;	254
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Material information and facts occurring after the date of the accountant's report	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Description of significant events after the date of the accountant's report including their impact on future business performance and risks.	249-250
	Catatan Note: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan agar diungkapkan. if there was no significant event after the date of the accountant's report, it should be disclosed.	249-250
	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. The business prospects of the Issuer or Public Company are related to industrial conditions, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources.	187-188
	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar. The marketing aspect of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share.	177-186

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Description of dividends for the last 2 (two) financial years	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: Description of dividends for 2 (two) financial years last, at least:	255-257
	Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; Dividend policy contained information of the percentage of total dividends distributed to net income;	256-257
	Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; Date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;	255-257
	Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); Total dividends per share (cash and/or non-cash);	255-257
	Jumlah dividen per tahun yang dibayar. The amount of dividends per year paid	255-257
	Catatan Note: Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. if there was no dividend payment in last two consecutive years, the reasons should be disclosed.	
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) Realization of the use of proceeds from the public offering (in the event that the company was still required to submit a report on the realization of the use of funds)	Memuat uraian mengenai: It contained a description of:	
	Total perolehan dana; Total proceeds;	259
	Rencana penggunaan dana; Plan for the use of funds;	259
	Rincian penggunaan dana; Details of the use of funds;	259
	Saldo dana; dan Fund balance; and	259
	Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). The date of approval of the GMS/RUPO for changes in the use of funds (if any).	259
Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/ modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku Material information (if any), including regarding investments, expansion, divestment, merger/ consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict-of-interest transactions occurring during the financial year.	Catatan Note: dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan. if the company did not have information on the realization of the use of proceeds from the public offering, it should be disclosed.	259
	Memuat uraian mengenai: Contains a description regarding	



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
	Tanggal, nilai, dan objek transaksi; Transaction date, value, and object;	259-260
	Nama pihak yang melakukan transaksi; Name of the party conducting the transaction;	259-260
	Sifat hubungan afiliasi (jika ada); The nature of the affiliation relationship (if any);	259-260
	Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; Explanation of the fairness of the transaction;	259-260
	Pemenuhan ketentuan terkait; Fulfillment of related provisions;	259-260
	Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 5), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: In the event that there was an affiliation relationship, in addition to disclosing the information as referred to in number 1) to number 5), the Issuer or Public Company also disclosed information:	260
	Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan Statement of the Board of Directors that affiliated transactions had gone through adequate procedures to ensure that affiliated transactions were carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle; and	260
	Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions were carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, is carried out by complying with the arms-length principle;	260

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
	Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. For affiliated transactions or material transactions which became business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation was added that the affiliated transactions or material transactions were business activities carried out in order to generate operating income and run regularly, repeatedly, and/or continuously; In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements was added.	260
	Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;	260
	Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that there was no affiliated transaction and/ or conflict of interest transaction, this matter should be disclosed.	260



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir A description of changes in the laws and regulations of the company in the last financial year	Uraian memuat antara lain: The description included:	
	Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan The name of the legislation undergoing changes; and	264-268
	Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. The impact (quantitative and/or qualitative) on the company (if significant) or a statement that the impact is not significant.	264-268
	Catatan Note: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. if there were no changes to the laws and regulations in the last financial year, the matters should be disclosed.	264-268
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir A description of the changes in accounting policies adopted by the company in the last financial year	Uraian memuat antara lain: The description included:	
	Perubahan kebijakan akuntansi; Changes in accounting policies;	269
	Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan Reasons for changes in accounting policies; and	269
	Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Quantitative impact on financial statement	269
TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE		
Rapt Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year before the financial year included:	
	keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year before the financial year are realized in the financial year; and	327-337, 341-350
	keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; resolutions of the GMS for the financial year and 1 (one) year before the financial year that have not been realized and the reasons for not realizing them;	N.A
	dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed	N.A

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Direksi Directors	Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors	358-360
	Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form.	V
	Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; A statement that the Board of Directors had guidelines or charter for the Board of Directors;	377-378
	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Directors at the meeting of the Board of Directors, the meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS can be presented in tabular form	390-391
	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi; Training and/or competency improvement of members of the Board of Directors;	
	Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan Policy on training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	391-392
	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the financial year (if any);	138-139
	Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: The Board of Directors' assessment of the performance of the committees supporting the implementation of the Board of Directors' duties for the financial year shall at least contain:	N.A
	prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	N.A
	kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used were performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and	N.A



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
	dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. in the event that the Issuer or Public Company did not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, then this should be disclosed.	400
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	
	Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; A statement that the Board of Commissioners had guidelines or charter for the Board of Commissioners;	358
	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Policy and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings, including attendance at the GMS.	362-365 331-332
	Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	V
	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris; training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners;	
	kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan policies on training and/or improving the competence of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	366-367
	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the financial year (if any);	134-137
	Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: Performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:	

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
	prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; performance appraisal implementation procedures;	368, 393
	kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used were performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and	368, 394-399
	pihak yang melakukan penilaian; dan the party conducting the assessment; and	368, 394
	Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: The assessment of the Board of Commissioners on the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the financial year includes:	
	prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	370, 429, 441, 456
	kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; the criteria used are performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings;	370, 429, 441, 456
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners	Paling sedikit memuat: At least it contained:	
	Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris; dan The nomination procedure, including a brief description of the nomination policies and processes for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	406-407
	Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, including:	406-407
	prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	409
	struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and	410-413, 415
	besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners;	413-414, 415-416 416-417
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	V



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Komite audit Audit committee	Paling sedikit memuat: At least it contained:	
	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; Name and position in committee membership;	122, 422-423
	Usia; Age;	122, 422-423
	Kewarganegaraan; Nationality;	122, 422-423
	Riwayat pendidikan; Educational history;	122, 422-423
	Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:	122, 422-423
	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; Legal basis for appointment as committee member;	122, 422-423
	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan Concurrent positions, either as a member of the board of commissioners, member of the board of directors, and/or committee member and other positions (if any); and	122, 422-423, 425
	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;	122, 422-423
	Periode dan masa jabatan anggota komite audit; Period and term of office of audit committee members;	122, 422-423
	Pernyataan independensi komite audit; Statement of independence of the audit committee;	424
	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); Training and/or competency improvement that have been followed in the financial year (if any);	136, 140-141
	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan Policy and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members at the meeting; and	425
	Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; Implementation of the audit committee's activities for the financial year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	425-429

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Komite SDM, Nominasi dan Remunerasi Committee HRD Nomination and Remuneration	Paling sedikit memuat: At least it contained	
	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; Name and position in committee membership;	434, 438, 119-128
	Usia; Age;	434, 438, 119-128
	Kewarganegaraan; Nationality;	434, 438, 119-128
	Riwayat pendidikan; Educational history;	434, 438, 119-128
	Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:	434, 438, 119-128
	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; Legal basis for appointment as committee member;	434, 438, 119-128
	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan Concurrent positions, either as a member of the board of commissioners, member of the board of directors, and/or committee member and other positions (if any); and	434, 438, 119-128
	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;	434, 438, 119-128
	Periode dan masa jabatan anggota komite; Period and term of office of audit committee members;	434, 438, 119-128
	Pernyataan independensi komite; Statement of independence of the audit committee;	434, 438, 119-128
	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); Training and/or competency improvement that have been followed in the financial year (if any);	134-137, 140
	Uraian tugas dan tanggung jawab; Description of duties and responsibilities;	43 2-433
	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); A statement of having a guideline or charter (charter);	431
	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; Policies and implementation of meeting frequency and attendance rates of members at such meetings;	439-440
	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan A brief description of activities carried out during the financial year; and	440-441
	dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf 9) sampai dengan huruf 12) dan mengungkapkan: In the event that a nomination and remuneration committee is not established, the Issuer or Public Company is only required to disclose the information referred to in points 9) through 12) and disclose:	N.A
	alasan tidak dibentuknya komite; dan The reasons for not establishing the committee; and	N.A
	pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi The party performing the nomination and remuneration functions.	N.A



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Komite Tata Kelola dan Manajemen Risiko Governance and Risk Management Committee	Paling sedikit memuat: At least it contained	
	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; Name and position in committee membership;	125, 448– 451
	Usia; Age;	125, 448– 451
	Kewarganegaraan; Nationality;	125, 448– 451
	Riwayat pendidikan; Educational history;	125, 448– 451
	Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:	125, 448– 451
	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; Legal basis for appointment as committee member;	125, 448– 451
	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan Concurrent positions, either as a member of the board of commissioners, member of the board of directors, and/or committee member and other positions (if any); and	125, 448– 452
	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;	125, 448– 451
	Periode dan masa jabatan anggota komite; Period and term of office of audit committee members;	125, 448– 451
	Pernyataan independensi komite; Statement of independence of the audit committee;	125, 451
	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); Training and/or competency improvement that have been followed in the financial year (if any);	135, 142, 452
	Uraian tugas dan tanggung jawab; Description of duties and responsibilities;	446–447
	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); A statement of having a guideline or charter (charter);	446

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Sekretaris perusahaan Company secretary	Paling sedikit memuat: At least it contained	466
	Nama; Name;	466 466
	Domisili; Domicile;	
	Riwayat jabatan, meliputi: Position history, including:	466
	Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan Legal basis for appointment as company secretary; and	466
	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;	466
	Riwayat pendidikan; Educational history;	466
	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan Training and/or competency improvement that was followed in the financial year; and	143
	Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; A brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the financial year;	467-470
Unit Audit Internal Internal Audit Unit	Paling sedikit memuat: At least it contained	472
	Nama kepala unit audit internal; Name of the head of the internal audit unit;	472
	Riwayat jabatan, meliputi: Position history, including:	472
	Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan Legal basis for appointment as company secretary; and	472
	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;	472
	Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); Qualification or certification as an internal audit profession (if any);	472
	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; Training and/or competency improvement that was followed in the financial year;	143
	Struktur dan kedudukan unit audit internal; The structure and position of the internal audit unit;	474
	Uraian tugas dan tanggung jawab; Description of duties and responsibilities;	473-474
	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan A statement that the internal audit unit had a guideline or charter; and	471
	Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/ atau komite audit; A brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the financial year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the board of directors, board of commissioners, and/ or audit committee;	480-481



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Akuntan Publik Public Accountant	Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; Name and year of the public accountant who audited the annual financial statements for the last 5 years	159, 489-491
	Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; Name and year of the Public Accounting Firm that audited the annual financial statements for the last 5 years;	159, 489-491
	Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan The amount of the fee for each type of service provided by the Public Accounting Firm in the last financial year; and	159, 490
	Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Other services provided by Public Accounting Firms and public accountants other than auditing services for annual financial statements in the last financial year.	491-492
	Catatan Note: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan. if there was no other service, it should be disclosed	491
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal Control) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik. A description of the internal control system implemented by the issuer or public company.	Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; Financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;	482-484
	Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; an Review of the effectiveness of the internal control system; and	484-486
	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	486-487
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik The risk management system implemented by the Issuer or Public Company	Paling sedikit menjelaskan: At least explained	
	Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; General description of the risk management system of the Issuer or Public Company;	500-502
	Jenis risiko dan cara pengelolaannya; Types of risks and how to manage them;	506-509
	Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan Overview of the effectiveness of the risk management system Issuer or Public Company; and	509-510
	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	510

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada). Legal cases that have a material impact faced by the issuer or public company, subsidiaries, members of the board of directors and members of the board of commissioners (if any).	Pokok perkara/gugatan; Principal case/lawsuit;	512
	Status penyelesaian perkara/gugatan; dan Status of settlement of cases/claims; and	512
	Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik; The effect on the condition of the issuer or public company;	512
Informasi tentang sanksi administratif/ sanksi yang Dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota dewan komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada) Information on administrative sanctions/ sanctions imposed on issuers or public companies, members of the board of commissioners and members of the board of directors, by the financial services authority and other authorities in the financial year (if any)		513
Akses informasi dan data perusahaan: Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya. Information on administrative sanctions/ sanctions imposed on issuers or public companies, members of the board of commissioners and members of the board of directors, by the financial services authority and other authorities in the financial year (if any)		513-514
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik Information regarding the code of conduct of the Issuer or Public Company	Paling sedikit menjelaskan: At least explained	
	Pokok-pokok kode etik; The points of the code of ethic	516-527
	Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; Disclosure that the code of ethics applied to all levels of the organization;	528
	Penyebarluasan kode etik; Dissemination of the code of ethics;	528
	Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan Sanctions for each type of violation stipulated in the code of ethics (normative); and	516-527
	Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. The number of violations of the code of ethics along with the sanctions given in the last financial year.	528-529
	Catatan Note: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. if there is no violation of the code of ethics in the last financial year, it must be disclosed.	N.A



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten Atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen management stock ownership program/msop dan/ atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (employee Stock ownership program/esop);	Paling sedikit menjelaskan: At least explained	
	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (management stock Ownership program/ MSOP) dan/atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock Ownership program/ ESOP), maka dijelaskan A brief description of the policy of providing long-term performance- based compensation to management and/or employees owned by the issuer or public company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or stock ownership program by employees (employee Stock ownership program/ESOP), then explained:	414, 416, 530
	Jumlah saham dan/atau opsi; Number of shares and/or options;	N.A
	Jangka waktu pelaksanaan; Implementation period;	N.A
	Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan Requirements for eligible employees and/or management; and	N.A
Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi Brief description of Information disclosure policy	Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan. Exercise price or determination of the exercise price.	N.A
	Paling sedikit menjelaskan: At least explained	
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik Description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company	Kepemilikan saham anggota direksi dan anggota Dewan komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka; dan Share ownership of members of the board of directors and members of the board of commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a public company; and	513
	Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; Implementation of the policy;	513, 514-515, 530
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik Description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company	Paling sedikit menjelaskan: At least explained	
	Cara penyampaian laporan pelanggaran; How to submit a violation report;	536-537
	Perlindungan bagi pelapor; Protection for whistleblowers;	538
	Penanganan pengaduan; Handling of complaints;	539
	Pihak yang mengelola pengaduan; dan The party managing the complaint; and	539
	Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: The results of the handling of complaints, at least:	
	Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Dalam tahun buku; dan Number of complaints received and processed in the financial year; and	540
	Tindak lanjut pengaduan; Follow-up on complaints;	540
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik Description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company	Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the issuer or public company did not have a whistleblowing system, then this should be disclosed.	N.A

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik Description of the Issuer's or Public Company's anti-corruption policy	Paling sedikit menjelaskan: At least explained	
	Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), Fraud, suap dan/ atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan Programs and procedures implemented in overcoming the practice of corruption, kickbacks, fraud, bribery and/ or gratuities in Issuers or Public Companies; and	541-543
	Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; Anti-corruption training/socialization for employees of Issuers or Public Companies;	314, 543
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak Dimilikinya kebijakan dimaksud. In the event that the Issuer or Public Company did not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy should be explained.	N.A
Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik Implementation of Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies	Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau Statement of recommendations that had been implemented; and/or	N.A
	Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternative pelaksanaannya (jika ada). Explanation of recommendations that had not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any).	N.A
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	N.A
Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2021 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi GCG Implementation Assessment for the financial year 2020 which included at least aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors	Paling sedikit menjelaskan: At least explained	
	Kriteria yang digunakan dalam penilaian Criteria used in the assessment	312-313
	Pihak yang melakukan penilaian The party conducting the assessment	312
	Skor penilaian masing-masing kriteria The assessment score of each criterion	312-313
	Rekomendasi hasil penilaian Recommended assessment results	313-314
	Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Reasons for not yet/not implemented recommendations.	N.A



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK		
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK		
	1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: - penjelasan strategi keberlanjutan; - ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); - profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; - penjelasan Direksi; - tata kelola keberlanjutan; - kinerja keberlanjutan; - verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; - lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan - tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; 1. The information disclosed in the social and environmental responsibility section shall constitute a Sustainability Report as referred to in Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, which shall at a minimum contain: - an explanation of the sustainability strategy; - a summary of sustainability aspects (economic, social, and environmental); - a brief profile of the Issuer or Public Company; - a statement from the Board of Directors; - sustainability governance; - sustainability performance; - written verification from an independent party, if any; - a feedback form for readers, if any; and - the response of the Issuer or Public Company to feedback on the previous year's report;	606-610
	Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; The Sustainability Report as referred to in point 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as set out in Appendix II, which forms an integral and inseparable part of this Financial Services Authority Circular Letter;	V

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
	Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan, namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan; The Sustainability Report as referred to in point 1) constitutes an integral and inseparable part of the Annual Report but may be presented separately from the Annual Report;	V
	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must: contain all information as referred to in point 1); and be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as set out in Appendix II, which forms an integral and inseparable part of this Financial Services Authority Circular Letter; the social and environmental responsibility section shall contain information stating that information regarding social and environmental responsibility has been disclosed in a Sustainability Report presented separately from the Annual Report; and be submitted simultaneously with the submission of the Annual Report.	V
Informasi Keuangan Financial Information		
Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Statement Letter of the Board of Directors and/or Board of Commissioners regarding Responsibility for Financial Statements	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Compliance with related regulations regarding Responsibility for Financial Statements.	654
Opini auditor independen atas laporan keuangan Independent auditor's opinion on financial statements		
Deskripsi Auditor Independen di Opini Description of Independent Auditor in Opinion	Deskripsi memuat tentang: The description contained about:	
	Nama dan tanda tangan; Name and signature;	658
	Tanggal Laporan Audit; dan Date of the Audit Report;	658
	Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. KAP license number and Public Accountant license number.	658



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Laporan keuangan yang lengkap Complete financial reports	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan; It completely contained the elements of the financial statements;	
	Laporan posisi keuangan; Statement of financial position;	659-661
	Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; Statement of profit or loss and other comprehensive income;	662
	Laporan perubahan ekuitas; Statement of changes in equity;	661, 663
	Laporan arus kas; Cash flow statement;	664
	Catatan atas laporan keuangan; Notes to financial statements;	665-742
	Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan Comparative information about the previous period; and	659-664
	Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membupenyajian kembali pos- pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). Statement of financial position at the beginning of the previous period when the entity applies an accounting policy retrospectively or restates financial statement items, or when the entity reclassifies items in its financial statements (if relevant).	743-749
Perbandingan tingkat profitabilitas Profitability level comparison	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya Comparison of performance/profit (loss) for the current year with the previous year	662
Laporan Arus Kas Cash flow statement	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: It should meet the following conditions:	
	Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; Grouping into three categories of activities: operating, investing, and financing;	664
	Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; Using the direct method to report cash flows from operating activities;	664
	Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan Separation of presentation between cash receipts and or cash disbursements during the year in operating, investing and financing activities; and	664
	Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Disclosure of non- cash transactions must be included in the notes to the financial statements.	664

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Accounting Policy Overview	Meliputi sekurang-kurangnya: It included at least:	
	Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; Statement of compliance with SAK;	668
	Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; Basis of measurement and preparation of financial statements;	669
	Pajak penghasilan; Income tax;	691-692
	Imbalan kerja; dan Work benefits; and	684-686
	Instrumen Keuangan. Financial Instruments.	674-677
Pengungkapan transaksi pihak berelasi Disclosure of related party transactions	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: The things that were disclosed included:	
	Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; Name of the related party, as well as the nature and relationship with the related party	727
	Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan Transaction value and its percentage to the total related revenues and expenses; and	263, 729
	Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait. Total balance and its percentage to the total related assets or liabilities.	261-262 728-729
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan Disclosures related to taxation	Hal-hal yang harus diungkapkan: The things that were disclosed included:	
	Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; Fiscal reconciliation and calculation of current tax burden;	713
	Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; Explanation of the relationship between tax expense (income) and accounting profit;	691-692
	Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; A statement that the reconciled Taxable Profit (LKP) was used as the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return;	691-692, 697
	Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan Details of deferred tax assets and liabilities recognized in the statement of financial position for each presentation period, and the amount of deferred tax expense (income) recognized in profit or loss if the amount was not reflected in the amount of deferred tax assets or liabilities recognized in the statement of position. finance; and	714
	Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. Disclosure of whether or not there is a tax dispute.	715
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap Disclosures relating to fixed assets	Hal-hal yang harus diungkapkan: The things that were disclosed included:	



Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
	Metode penyusutan yang digunakan; The depreciation method used;	681-683
	Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi an model biaya; A description of the accounting policy chosen between the revaluation model and the cost model;	681, 698
	Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan The significant methods and assumptions used in estimating the fair value of property, plant and equipment (for the revaluation model) or the disclosure of the fair value of property, plant and equipment (for the cost model); and	681
	Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. Reconciliation of gross carrying amount and accumulated depreciation of property, plant and equipment at the beginning and end of the period by showing: addition, subtraction and reclassification.	706 -708
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi Disclosures relating to operating segments	Hal-hal yang harus diungkapkan; The things that were disclosed included:	
	Informasi umum meliputi faktor-faktor penetapan segmen usaha General information covering the factors used to identify the reported segments;	N.A
	Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; Information on the reported segment's profit or loss, assets and liabilities;	N.A
	Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan Reconciliation of total segment revenue, reported segment profit or loss, segment assets, segment liabilities, and other material segment elements to the related amounts within the entity; and	N.A
	Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. Disclosure at the entity level, which included information about products and/or services, geographic areas and key customers.	N.A

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan Disclosures relating to Financial Instruments	Hal-hal yang harus diungkapkan: The things that were disclosed included:	
	Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; Details of financial instruments owned based on their classification;	N.A
	Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; Fair values and their hierarchy for each group of financial instruments;	N.A
	Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; Explanation of risks associated with financial instruments: market risk, credit risk and liquidity risk;	N.A
	Kebijakan manajemen risiko; dan Risk management policy; and	732-737
	Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. Analysis of the risks associated with financial instruments quantitatively	734-735
Penerbitan laporan keuangan Issuance of financial statements	Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan The date on which the financial statements were authorized for issue; and	742
	Pihak yang memerintahkan penerbitan dan penanda tangan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian The party instructing the issuance and the signatory of the Consolidated Audited Financial Statements.	742







08

LAPORAN KEUANGAN

Financial Reports

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

**PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

31 DESEMBER/*DECEMBER* 2025



PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG



PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN
ENTITAS ANAK ("Grup")

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG AND
SUBSIDIARY ("The Group")

SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE
RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR
THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

Nama : Maryono
Alamat Kantor : Jl. Mayor Zen, Palembang 30118 - Indonesia
Alamat Domisili (sesuai KTP atau kartu identitas lain) : Jl. Perum Pesona Merapi RT 007 RW 0034, Kelurahan Sardonoharjo Ngaglik
Nomor Telepon : +62815 1834191
Jabatan : Direktur Utama/President Director

Name
Office Address
Residential Address
(as in identity card or other
qualifier)
Telephone
Position

Nama : R. Eric J. Rachman
Alamat Kantor : Jl. Mayor Zen, Palembang 30118 -Indonesia
Alamat Domisili (sesuai KTP atau kartu identitas lain) : Komplek Alam Sutera Winona II No.16 RT 002 RW 002, Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang
Nomor Telepon : +62811 1339332
Jabatan : Direktur Keuangan dan Umum/
Finance and General Director

Name
Office Address
Residential Address
(as in identity card or other
qualifier)
Telephone
Position

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup.

1. Responsible for the preparation and presentation of the Group's consolidated financial statements;
2. The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in the Group's consolidated financial statements have been disclosed in complete and truthful manner; and
b. The Group's consolidated financial statements do not contain any incorrect material information or facts and do not omit material information or facts;
4. Responsible for the Group's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Palembang, 06 Mei/May 2026

Direktur Utama/
President Director

Direktur Keuangan dan Umum/
Finance and General Director

Maryono

R. Eric J. Rachman



Laporan/Report No. 00878/2.1457/AU.1/04/0241-1/1/V/2026

Laporan auditor independen
Kepada para Pemegang Saham

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian" pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

*Independent auditors' report
To the Shareholders of*

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang and its subsidiary (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2025, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2025, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901/3119 2901
F: +62 (21) 5290 5555/5290 5050

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Merencanakan dan melaksanakan audit grup untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau unit bisnis dalam grup sebagai basis untuk merumuskan opini atas laporan keuangan grup. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan penelaahan atas pelaksanaan pekerjaan audit untuk tujuan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Jakarta,
6 Mei/May 2026



Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP.0241

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Plan and perform the group audit to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business units within the group as a basis for forming an opinion on the group financial statements. We are responsible for the direction, supervision and review of the audit work performed for purposes of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.



Pupuk Schwedje Palembang
00876/2.1457/AU.1/04/0241.1/1/V/2026

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 1/1 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION**

AS AT 31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4	305,988	703,733	Cash and cash equivalents
Piutang usaha:	5			Trade receivables:
- Pihak berelasi		163,953	108,630	Related parties -
- Pihak ketiga		36,147	89,437	Third parties -
Piutang subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia	6a	2,349,248	-	Subsidy receivables from the Government of Republic Indonesia
Piutang subsidi yang belum ditagih	6c	148,265	108,612	Unbilled subsidy receivables
Pajak dibayar di muka:	17a			Prepaid taxes:
- Pajak penghasilan badan		3,515	185,779	Corporate income tax -
- Pajak lainnya		177,945	100,787	Other taxes -
Persediaan	7	1,418,503	1,507,888	Inventories
Uang muka dan biaya dibayar di muka	8	630,447	74,202	Advances and prepayments
Piutang lainnya:	9			Other receivables:
- Pihak berelasi		70,884	64,490	Related parties -
- Pihak ketiga		34,146	9,423	Third parties -
Aset lancar lainnya		3,446	7,625	Other current assets
Jumlah aset lancar		5,342,487	2,960,606	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia	6a	81,612	43,205	Subsidy receivables from the Government of Republic Indonesia
Pajak dibayar di muka:	17a			Prepaid taxes:
- Pajak penghasilan badan		152,275	54,019	Corporate income tax -
Investasi pada entitas asosiasi	10	90,753	101,939	Investment in associate
Aset keuangan tidak lancar lainnya		56,389	45,440	Other non-current financial assets
Uang muka dan biaya dibayar di muka	8	276,516	643,459	Advances and prepayments
Properti investasi		875,052	884,944	Investment properties
Aset tetap	11	25,290,060	20,780,186	Fixed assets
Aset tidak lancar lainnya	12	33,245	21,522	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar		26,855,902	22,574,714	Total non-current assets
JUMLAH ASET		32,198,389	25,535,320	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 1/2 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION**

AS AT 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha:	13			Trade payables:
- Pihak berelasi		121,296	52,287	Related parties -
- Pihak ketiga		160,951	82,439	Third parties -
Kelebihan subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia	6b	-	31,921	Excess subsidy paid by the Government of Republic of Indonesia
Utang lainnya:	14			Other payables:
- Pihak berelasi		69,626	2,958	Related parties -
- Pihak ketiga		159,886	97,810	Third parties -
Liabilitas yang masih harus dibayar	15	2,545,006	2,178,985	Accrued liabilities
Utang pajak:	17b			Taxes payable:
- Pajak penghasilan badan		67,562	11,142	Corporate income tax -
- Pajak lainnya		62,211	84,586	Other taxes -
Bagian jangka pendek atas:				Current portion of:
- Liabilitas sewa		24,338	7,529	Lease liabilities -
- Pinjaman jangka panjang	16	7,194	2,804	Long-term loans -
- Liabilitas imbalan kerja	18a	298,025	244,367	Employee benefits liabilities -
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>3,516,095</u>	<u>2,796,828</u>	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan	17d	212,659	303,974	Deferred tax liabilities
Bagian jangka panjang atas:				Non-current portion of:
- Liabilitas sewa		5,293	3,559	Lease liabilities -
- Pinjaman jangka panjang	16	8,134,677	3,168,146	Long-term loans -
- Liabilitas imbalan kerja	18a	1,120	4,281	Employee benefits liabilities -
Liabilitas imbalan pascakerja	18c	702,302	476,459	Post-employment benefits liabilities
Utang retensi:				Retention payables:
- Pihak berelasi	28	51,277	15,926	Related party -
- Pihak ketiga		290,858	117,460	Third party -
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>9,398,186</u>	<u>4,089,805</u>	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>12,914,281</u>	<u>6,886,633</u>	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 1/3 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2025**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham - modal dasar 15.000.000 lembar saham; ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 5.799.999 saham biasa Seri B dengan nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	19	5,800,000	5,800,000	Share capital - authorised 15,000,000 shares; issued and fully paid - 1 Class A Dwiwarna share and 5,799,999 Class B shares at a par value of Rp1,000,000 (full amount) per shares
Tambahan modal disetor	20	(333,876)	(333,876)	Additional paid-in-capital
Saldo laba:				Retained earnings:
- Ditentukan penggunaannya		6,713,966	5,788,537	Appropriated -
- Belum ditentukan penggunaannya		610,677	1,068,450	Unappropriated -
Penghasilan komprehensif lain		<u>6,487,707</u>	<u>6,303,773</u>	Other comprehensive income
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		19,278,474	18,626,884	Total equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		<u>5,634</u>	<u>21,803</u>	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		<u>19,284,108</u>	<u>18,648,687</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>32,198,389</u>	<u>25,535,320</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 2 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025**
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
Pendapatan	22	13,874,322	13,532,865	Revenue
Beban pokok pendapatan	23	(12,113,387)	(11,686,789)	Cost of revenues
LABA BRUTO		1,760,935	1,846,076	GROSS PROFIT
Beban penjualan	24	(300,217)	(321,732)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	25	(459,353)	(299,305)	General and administrative expenses
Biaya keuangan	26	(129,156)	(269,817)	Finance costs
Pendapatan keuangan		13,333	61,198	Finance income
Bagian atas rugi bersih entitas asosiasi	10	(11,186)	(40,226)	Shares of net loss of associate
(Beban)/pendapatan lainnya - bersih	27	(49,933)	423,475	Other (expense)/income - net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		824,423	1,399,669	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	17c	(210,896)	(331,134)	Income tax expenses
LABA TAHUN BERJALAN		613,527	1,068,535	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Surplus revaluasi aset		302,881	-	Assets revaluation surplus
Pengukuran kembali kerugian imbalan pascakerja	18c	(166,528)	(461,365)	Remeasurement of loss on post-employment benefits
Perubahan nilai wajar dari investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		10,945	3,055	Changes in the fair value of equity investment at fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait	17d	36,636	101,500	Related income tax
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain, setelah pajak		183,934	(356,810)	Other comprehensive income income/(loss), net of tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		797,461	711,725	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		629,696	1,068,450	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		(16,169)	85	Non-controlling interest
		613,527	1,068,535	
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		813,630	711,640	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		(16,169)	85	Non-controlling interest
		797,461	711,725	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 3 Schedule

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

FOR THE YEAR ENDED

31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah)

Distribusikan kepada pemilik entitas induk/Attributable to owner of the parent entity										
		Saldo laba/ Retained earnings			Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income					

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 4 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025**
(Expressed in millions of Rupiah)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	6,357,576	6,977,591	Receipts from customers
Penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia	5,175,702	7,504,869	Receipts of fertiliser subsidy from the Government of Indonesia
Pembayaran subsidi pupuk kepada Pemerintah Indonesia	(88,749)	-	Payments of fertiliser subsidy to the Government of Indonesia
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(10,831,971)	(9,573,764)	Payment to suppliers and others
Pembayaran kepada karyawan	(1,082,507)	(1,050,529)	Payment to employees
Penerimaan pendapatan keuangan	13,333	66,047	Receipts of finance income
Pembayaran biaya keuangan	(142,188)	(329,427)	Payment of finance costs
Penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	-	(1,454)	Placement of restricted cash and cash equivalents
Penarikan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	3,161	-	Withdrawal of restricted cash and cash equivalents
Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan	72,670	-	Receipt of corporate income tax refund
Pembayaran pajak penghasilan badan	(197,584)	(242,828)	Payment of corporate income taxes
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi	<u>(720,557)</u>	<u>3,350,505</u>	Net cash flows (used in)/ generated from operating activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI			INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan penjualan aset tetap	42	44,665	Proceeds from sale of fixed assets
Penerimaan dividen	6,099	2,323	Proceeds of dividends
Pembelian aset tetap	(4,197,319)	(3,181,258)	Purchase of fixed assets
Pembelian aset tak berwujud	(24,270)	-	Purchase of intangible assets
Penarikan deposito berjangka	-	1,751,000	Withdrawal of time deposits
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(4,215,448)</u>	<u>(1,383,270)</u>	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS			CASH FLOWS FROM
PENDANAAN			FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek	9,230,000	5,480,000	Proceeds of short-term bank loans
Penerimaan pinjaman bank dan lainnya jangka panjang	5,512,189	2,381,101	Proceeds of long-term bank and other loans
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek	(9,230,000)	(6,080,000)	Repayments of short-term bank loans
Pembayaran pinjaman bank dan lainnya jangka panjang	(775,000)	(4,118,417)	Repayments of long-term bank and other loans
Pembayaran liabilitas sewa	(38,796)	(31,834)	Payment of lease liabilities
Pembayaran dividen	(162,040)	(343,139)	Payment of dividends
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	<u>4,536,353</u>	<u>(2,712,289)</u>	Net cash flows generated from/(used in) financing activities
PENURUNAN BERSIH			NET DECREASE IN CASH
KAS DAN SETARA KAS	(399,652)	(745,054)	AND CASH EQUIVALENTS
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas	<u>1,907</u>	<u>(5,219)</u>	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
SALDO KAS DAN SETARA KAS			CASH AND CASH EQUIVALENTS
PADA AWAL TAHUN	<u>703,733</u>	<u>1,454,006</u>	AT THE BEGINNING
SALDO KAS DAN SETARA KAS			CASH AND CASH EQUIVALENTS
PADA AKHIR TAHUN	<u>305,988</u>	<u>703,733</u>	AT THE END OF THE YEAR

Tambahan informasi aktivitas yang tidak mempengaruhi di arus kas disajikan pada Catatan 33.

Additional information of non-cash activities is presented in Note 33.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/1 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("Perusahaan") didirikan dengan akta notaris Fathiah Helmi, S.H., No.14 tanggal 12 November 2010. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 13 Desember 2010 No. AHU-57993.AH.01.01 tahun 2010. Pendirian Perusahaan merupakan hasil pemisahan (*spin-off*) dari PT Pupuk Indonesia (Persero) (dahulu PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Desember 2010. Pengalihan hak dan kewajiban sehubungan dengan *spin-off* berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011.

Anggaran Dasar tersebut telah diubah beberapa kali, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. 11 tanggal 27 Oktober 2020 oleh Notaris Lumassia, S.H., tentang Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat penerimaan persetujuan No. AHU-AH.01.03.0405621 tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020.

Berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 4 Desember 2024 oleh Notaris Lumassia, S.H. tentang perubahan kepemilikan dan komposisi pemegang saham atas 1 lembar saham Perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) kepada Negara Republik Indonesia berupa saham Dwiwarna. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat penerimaan persetujuan No. AHU-AH.01.03-0224489 tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang industri, perdagangan, jasa dan angkutan.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Mayor Zen, Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini Perusahaan mempunyai kegiatan operasi utama yaitu memproduksi pupuk urea, amoniak, NPK, utilitas maupun produk sampingan. Perusahaan mempunyai empat unit pabrik pupuk urea dan amoniak, yaitu pabrik IB, IIB, III, dan IV serta dua pabrik NPK yaitu NPK Fusion I dan NPK Fusion II.

1. GENERAL

a. The Company's establishment

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (the "Company") was established by notarial deed Fathiah Helmi, S.H., No. 14 dated 12 November 2010. The Company's Articles of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in a Decision Letter dated 13 December 2010 No. AHU-57993.AH.01.01 year 2010. The establishment of the Company is a result of the separation (*spin-off*) of PT Pupuk Indonesia (Persero) (formerly PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)) based on General Meeting of Extraordinary Shareholders dated 24 December 2010. The transfer of rights and obligations with respect to the *spin-off* became effective starting on 1 January 2011.

The Company's Articles of Association has been amended several times, based on Deed Statements of Shareholders Resolution No. 11 dated 27 October 2020 by Notary Lumassia, S.H., concerning change of Article 3 of the Company's Articles of Association of Purposes and Objectives and Business Activities. The changes were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through an approval letter No. AHU-AH.01.03.0405621 year 2020 dated 27 October 2020.

Based on Notarial Deed No. 5 dated 4 December 2024 by Notary Lumassia, SH, concerning the change in ownership and composition of shareholders of 1 shares of the Company previously owned by PT Pupuk Indonesia (Persero) to Government of Indonesia in the form of Dwiwarna share. The changes were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through an approval letter No. AHU-AH.01.03-0224489 year 2024 dated 19 December 2024.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities comprises executing and supporting the Government's policies and programmes in the areas of economy and national development in general, especially in industry, trading, services and transportation.

The Company and its head office is located in Jalan Mayor Zen, Palembang, South Sumatera. Currently, the Company's main activities are producing urea fertiliser, ammonia, NPK, utilities and by-product. The Company has four ammonia and urea plants, namely, the IB, IIB, III, and IV and two NPK plants, namely NPK Fusion I and NPK Fusion II.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/2 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Entitas induk Perusahaan adalah PT Pupuk Indonesia (Persero), perusahaan yang didirikan di Indonesia dan pemegang saham utama adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

a. The Company's establishment (continued)

The Company's parent entity is PT Pupuk Indonesia (Persero), a company that is incorporated in Indonesia and the Company's ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

The composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as at 31 December 2025 and 2024 were as follows:

31 Desember/December 2025

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris

Siti Nurizka Puteri Jaya
Bambang Supriyambodo
Arteria Dahlan
Muhammad Syakir
Sally Salamah
Fadjar Judisiawan

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Direksi

Direktur Utama
Direktur Operasi dan Produksi
Direktur Keuangan dan Umum
Direktur Manajemen Risiko

Maryono
Sholikin
R.Eric J. Rachman
Panji Winanteya Ruky

Board of Directors

President Director
Production and Operation Director
Finance and General Director
Risk Management Director

31 Desember/December 2024

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris

Siti Nurizka Puteri Jaya
Bambang Supriyambodo
Prahoro Yulijanto Nurtjahyo
Ali Jamil Harahap
Sally Salamah
Fadjar Judisiawan

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Direksi

Direktur Utama
Direktur Operasi dan Produksi
Direktur Keuangan dan Umum
Direktur Manajemen Risiko

Daconi Khotob
Filius Yuliandi
Saifullah Lasindrang
Saifullah Lasindrang (Plt.)*)

Board of Directors

President Director
Production and Operation Director
Finance and General Director
Risk Management Director

*) Ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dan telah resmi tertuang pada Akta No. 3 oleh Notaris Lumassia S.H. tanggal 10 Juni 2024.

*) Appointed as Acting Director as officially stated in Notarial Deed No. 3 by Notary Lumassia S.H. dated 10 June 2024.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/3 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

2025 dan/and 2024

Komite Audit

Ketua	Sally Salamah
Anggota	Eddie Sulistiady
Anggota	Bagas Putranto

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing 1.785 dan 1.790 karyawan tetap (tidak diaudit).

b. Struktur Grup

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, struktur Perusahaan dan entitas anak (secara bersama-sama disebut "Grup") adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

a. The Company's establishment (continued)

The Company's Audit Committee as at 31 December 2025 and 2024 were as follows:

Audit Committee

Chairman
Member
Member

As at 31 December 2025 and 2024, the number of employees of the Company were 1,785 and 1,790 permanent employees (unaudited), respectively.

b. Group structure

As at 31 December 2025 and 2024, the structure of the Company and its subsidiary (collectively referred to as the "Group") were as follows:

Entitas/ Entity	Kegiatan usaha/ Nature of business	Kedudukan/ Domicile	Persentase kepemilikan saham/ Percentage of ownership		Jumlah aset (sebelum eliminasi)/Total assets (before elimination)	
			2025	2024	2025	2024
Dimiliki langsung oleh Perusahaan/Held directly by the Company						
PT Pusri Agro Lestari ("PAL")*)	Perdagangan pestisida dan bahan senyawa nitrogen/Trading of pesticide and nitrogen compound material	Jakarta	51.00%	51.00%	36,335	55,480

*) Berdasarkan keputusan pemegang saham tanggal 24 Desember 2025, Perusahaan dan PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyetujui rencana untuk likuidasi PAL. Perusahaan sedang dalam proses diskusi dengan pemegang saham PAL lainnya terkait rencana likuidasi tersebut.

*) Based on the Decision of Shareholders dated 24 December 2025, the Company and PT Pupuk Indonesia (Persero) have agreed on the plan for the liquidation of PAL. The Company is in the process of discussion with the other shareholder of PAL regarding this liquidation plan.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/4 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi terkait revaluasi tanah (aset tetap), dan aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian juga mengharuskan manajemen untuk menggunakan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan atau kompleksitas yang tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian, diungkapkan di Catatan 3.

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS").

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost basis, as modified for revaluation of land (fixed assets), and financial assets and liabilities at fair value through profit or loss and other comprehensive income, and using the accrual basis except for the consolidated statement of cash flows.

The consolidated statement of cash flow is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements, are disclosed in Note 3.

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with those of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2024, which conform to Indonesian Financial Accounting Standards.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan pada PSAK dan ISAK

Penerapan dari standar baru, amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau sebelumnya:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi;
- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran.

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026, tapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan.

Penerapan dari standar baru berikut berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Penerapan retrospektif diwajibkan, sehingga informasi komparatif untuk tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2026 akan disajikan ulang sesuai dengan standar ini.

- PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

(i) Entitas anak

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak. Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui pengendalian atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Grup kehilangan pengendalian.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

Changes to the SFAS and IFAS

The implementation of the following new standards, amendments and annual improvements which are effective from 1 January 2025 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods:

- SFAS 117: Insurance Contracts;
- Amendment of SFAS 221: Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability.

New standards, amendments and interpretations issued but only effective for financial years beginning on or after 1 January 2026, but early adoption is permitted, is as follows:

- Amendments to SFAS 109 and SFAS 107: Classification and Measurement of Financial Instruments.

The adoption of the new standard is effective beginning 1 January 2027. Retrospective application is required, and so the comparative information for the financial year ending 31 December 2026 will be restated in accordance with this standard.

- SFAS 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements.

As at the issuance date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards and amendments on the Group's consolidated financial statements.

b. Principles of consolidation

(i) Subsidiary

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiary. Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. The subsidiary is fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. It is deconsolidated from the date on which that control ceases.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(i) Entitas anak (lanjutan)

Transaksi, saldo, dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset bersih pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi atas pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi melalui laba rugi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

(i) Subsidiary (continued)

Intercompany transactions, balances and unrealised gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. When necessary, amounts reported by the subsidiary have been adjusted to conform to the Group's accounting policies.

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination achieved in stages, at the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(i) Entitas anak (lanjutan)

Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat sesuai dengan PSAK 109, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah imbalan yang dialihkan, kepentingan non-pengendali yang diakui, dan kepentingan yang sebelumnya dimiliki pengakuisisi lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui dalam laba rugi.

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

(i) Subsidiary (continued)

Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that are deemed to be an asset or liability are recognised in accordance with SFAS 109, in profit or loss. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previously held interest in the acquiree over the fair value of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of consideration transferred, non-controlling interest recognised and previously held interest measured is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss, or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(ii) Entitas asosiasi

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Investasi Grup pada entitas asosiasi juga termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasikan ke laba rugi.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laba rugi dan bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada perusahaan asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada "bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama" di laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

(ii) Associates

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained at the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment is initially recognised at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of profit or loss. The Group's investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

The Group's share of post-acquisition profits or losses is recognised in profit or loss, and its share of post acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends from associates are recognised as reduction in the carrying amount of the investment.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the difference to "share of net profit of associates and joint ventures" in profit or loss. Unrealised losses are eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure the consistency with the policies adopted by the Group.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(ii) Entitas asosiasi (lanjutan)

Laba dan rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi.

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul pada investasi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi.

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK 224: Pengungkapan pihak-pihak berelasi.

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi disajikan dalam Catatan 28.

d. Penjabaran mata uang asing

(i) Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas di dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

Untuk tujuan konsolidasi, untuk entitas anak Grup yang memiliki mata uang fungsional berbeda, maka aset dan liabilitas entitas anak Grup ditranslasikan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode pelaporan. Sementara itu, pendapatan dan beban ditranslasikan dengan kurs rata-rata dari kurs tengah Bank Indonesia selama periode laporan laba rugi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

(ii) Associates (continued)

Profits and losses resulting from upstream and downstream transactions between the Group and its associates are recognised in the Group's consolidated financial statements only for the portion of other investors' interest in the associates.

Dilution gains and losses arising in investments in associates are recognised in profit or loss.

c. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined under SFAS 224: Related party disclosures.

The details of significant balances and transactions entered into with related parties are presented in Note 28.

d. Foreign currency translation

(i) Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the entities within the Group are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rupiah which is the functional currency of the Company and presentation currency of the Group.

For consolidation purposes, for the Group's subsidiaries that have different functional currency, the Group's subsidiaries' assets and liabilities are translated using the Bank of Indonesia middle rate at the end of each reporting period. Revenue and expenses are translated using the average of the Bank of Indonesia middle rate during profit or loss period.

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

d. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

(ii) Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada setiap tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah disesuaikan untuk mencerminkan kurs penutup. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui di dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal pelaporan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut (nilai penuh):

	2025	2024	
Dollar Amerika Serikat ("USD")	16,782	16,162	United States Dollar ("USD")

e. Aset keuangan

Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam dua kategori sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
- (ii) Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual ketika menentukan apakah arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang bukan termasuk dimiliki untuk diperdagangkan, tergantung apakah Grup telah melakukan pemilihan yang tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal untuk instrumen ekuitas yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

d. Foreign currency translation (continued)

(ii) Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rate prevailing at the date of the transactions.

At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

As at the reporting dates, the exchange rates used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, were as follows (full amount):

e. Financial assets

Classifications, recognition and measurement

The Group classifies its financial assets into the following two categories:

- (i) Financial assets at amortised cost; and
- (ii) Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL") or fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

The classification depends on the Group's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification that is made after initial recognition.

For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at FVOCI.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

e. Aset keuangan (lanjutan)

Grup melakukan reklasifikasi instrumen utang jika dan hanya jika terdapat perubahan model bisnis atas aset keuangan tersebut.

Saat pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi, dalam hal aset keuangan diukur dengan nilai wajar tidak melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada akuisisi aset keuangan. Biaya transaksi atas aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup memiliki aset keuangan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Terdapat tiga kategori pengukuran dalam mengklasifikasikan instrumen utang:

- (i) Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual, dimana arus kas tersebut merupakan pembayaran pokok dan bunga, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam pendapatan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan disajikan dalam pendapatan/(beban) lainnya. Penurunan nilai aset keuangan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

e. Financial assets (continued)

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at FVTPL, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets. Transaction costs of financial assets carried at FVTPL are expensed in profit or loss.

As at 31 December 2025 and 2024, the Group had financial assets measured at amortised cost and FVOCI.

Debt instruments

The subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the group classifies its debt instruments:

- (i) *Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows, where those cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at amortised cost. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Any gain or loss arising on derecognition is recognised directly in profit or loss and presented in other income/(loss). Impairment losses are presented as separate line item in the profit or loss.*

Lampiran 5/12 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

e. Aset keuangan (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

- (ii) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual dan untuk penjualan keuangan aset, dimana arus kas aset merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Mutasi dalam jumlah tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs, yang diakui dalam laporan laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi pada pendapatan/(beban) lainnya. Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam pendapatan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan pada pendapatan/(beban) lainnya, dan penurunan nilai disajikan pada bagian terpisah dalam laporan laba rugi.
- (iii) Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi dan disajikan bersih di dalam pendapatan/(beban) lainnya dalam periode keterjadiannya.

Instrumen ekuitas

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari investasi ekuitas pada penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi selanjutnya atas keuntungan dan kerugian dari nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi. Dividen dari investasi tersebut terus diakui dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan. Kerugian penurunan nilai (dan pembalikan kerugian penurunan nilai) pada investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajarnya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

e. Financial assets (continued)

Debt instruments (continued)

- (ii) FVOCI: Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where the assets' cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through OCI, except for the recognition of impairment gains or losses, interest income and foreign exchange gains and losses, which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income/(expenses). Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other income/(expenses), and impairment expenses are presented as separate line item in the statement of profit or loss.
- (iii) FVTPL: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at FVTPL. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at FVTPL and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss and presented net in profit or loss within other income/(loss) in the period in which it occurs.

Equity instruments

The Group subsequently measures all equity investments at fair value where the Group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in OCI, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established. Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from changes in fair value.

Lampiran 5/13 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

e. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

f. Penurunan nilai aset keuangan

Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian ("KKE"). Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajiban serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

e. Financial assets (continued)

Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all risks and rewards of assets ownership.

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and their net amount is reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

f. Impairment of financial assets

The Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of the expected credit losses ("ECL"). To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

f. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur KKE yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup berdasarkan basis *forward-looking* untuk saldo piutang usaha. Selain untuk seluruh piutang usaha, Grup menerapkan pendekatan umum untuk mengukur KKE.

Grup menilai berdasarkan basis *forward-looking* untuk mengukur KKE terhadap instrumen utang yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan.

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas.

Deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari tiga bulan dan tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya disajikan pada akun "aset lancar lainnya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

h. Piutang

(i) Piutang usaha dan piutang lainnya

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Piutang lainnya merupakan saldo piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

f. Impairment of financial assets (continued)

The Group applies the "simplified approach" to measure the ECL which uses a lifetime expected loss allowance on a forward-looking basis for all trade receivables. Other than the trade receivables, the Group applies a general model to measure the ECL.

The Group assesses on a forward-looking basis the ECL associated with its debt instruments carried at FVOCI. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

g. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or not restricted.

Cash and cash equivalents which have been restricted for a certain purpose, or which cannot be used freely are not defined as cash and cash equivalents.

Time deposits with original maturity of more than three months and not exceed one year at the time of placement and which are not used as collateral nor restricted are presented as "other current assets" in the consolidated statement of financial position.

h. Receivables

(i) Trade and other receivables

Trade receivables are amounts due from customers for goods sold or services performed in the ordinary course of business. Other receivables are receivables arising from transactions outside of the ordinary course of business. If collection of the trade receivables is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Lampiran 5/15 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**h. Piutang** (lanjutan)**(i) Piutang usaha dan piutang lainnya**
(lanjutan)

Piutang usaha dan piutang lainnya pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi cadangan atas penurunan nilai.

Kolektabilitas piutang usaha dan piutang lainnya ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun provisi piutang digunakan untuk mencatat dampak KKE, menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

Jumlah kerugian penurunan nilai dibebankan pada laba rugi dan disajikan sebagai "Beban umum dan administrasi". Ketika piutang usaha dan piutang lainnya, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun provisi. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, diakui sebagai "(Rugi)/pendapatan lainnya - bersih" pada laba rugi.

(ii) Piutang subsidi dan piutang subsidi yang belum ditagih dari Pemerintah Indonesia

Piutang subsidi merupakan saldo piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia atas penyaluran pupuk urea dan NPK yang bersubsidi.

Piutang subsidi dari Pemerintah Indonesia diakui berdasarkan harga pupuk bersubsidi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK-RI") dan estimasi kuantitas yang disalurkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan, yang didasarkan pada kuantitas penyaluran bulanan yang telah diverifikasi oleh Kementerian Pertanian. Kuantitas pupuk bersubsidi yang disalurkan merupakan subjek audit oleh BPK-RI, yang biasanya diselesaikan pada periode setelah penyelesaian laporan keuangan.

Piutang subsidi yang belum ditagih merupakan pendapatan atas penjualan pupuk subsidi ke pelaku usaha distribusi ("PUD") namun belum tersalurkan ke petani.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**h. Receivables** (continued)**(i) Trade and other receivables** (continued)

Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any reserve for impairment.

Collectibility of trade and other receivables are reviewed on an ongoing basis. Receivables which are known to be uncollectible are written-off by reducing the carrying amount directly. A provision account is used to record impact from the ECL, using exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Cash flow relating to short-term receivables is not discounted if the effect of discounting is immaterial.

The amount of the impairment loss is charged to profit or loss as "General and administrative expenses". When a trade and other receivable for which an impairment allowance had been recognised becomes uncollectible in a subsequent period, it is written-off against the provision account. Subsequent recoveries of amounts previously written-off are recognised as "Other (loss)/income - net" in profit or loss.

(ii) Subsidy receivables and unbilled subsidy receivables from the Government of Indonesia

Subsidy receivables represent the subsidy receivables balance from the Government of Indonesia for the distribution of subsidised urea and NPK.

Subsidy receivables from the Government of the Republic of Indonesia are recognised based on the subsidised fertiliser price audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia ("BPK-RI") and the estimated quantities distributed as stated in the Minutes of the Audit Result, which are based on monthly distribution quantities verified by the Ministry of Agriculture. The quantity of subsidised fertiliser distributed is subject to audit by BPK-RI, which is typically completed in the period following the completion of the financial statements.

Unbilled subsidy receivables arise from the sales of subsidised fertiliser to distribution operator ("PUD") which have not yet distributed to the farmers.

Lampiran 5/16 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**i. Persediaan**

Persediaan dicatat pada nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersihnya. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, suku cadang dan bahan pembantu. Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja serta alokasi biaya *overhead* langsung maupun tidak langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi beban penjualan.

Penurunan nilai atas persediaan dan suku cadang yang usang dan perputarannya lambat, jika ada, ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap umur persediaan dan kondisi persediaan pada akhir periode laporan. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

j. Properti investasi

Properti investasi merupakan tanah, bangunan, dan prasarana yang dimiliki untuk disewakan dalam jangka panjang atau untuk kenaikan harga atau keduanya dan yang tidak ditempati oleh entitas di dalam Grup konsolidasian. Properti investasi juga termasuk properti yang sedang dikonstruksi atau pembangunan untuk penggunaan di masa yang akan datang sebagai properti investasi.

Properti investasi dalam bentuk tanah dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Properti investasi lainnya diakui sebesar biaya perolehan dan disusutkan sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis properti investasi yaitu 20 tahun.

Masa manfaat ekonomis dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**i. Inventories**

Inventories are stated at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined by the weighted-average method for raw materials, work in process, finished goods, spareparts and supporting materials. The cost of finished goods and work in process comprises materials, labour and an appropriate proportion of directly attributable fixed and variable overheads. Net realisable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business less applicable selling expense.

The impairment of obsolete and slow moving inventories and spare parts, if any, is determined based on a review of the inventories aging and physical condition of the inventories at the end of reporting period. Any reversal of decline in value of inventories due to an increase in net realisable value is recognised as a reduction in the amount of inventory expenses in the period in which the recovery occurs.

j. Investment properties

Investment properties represent land, buildings and infrastructure that are held for long-term rental yields or for capital appreciation or both and that are not occupied by the companies in the consolidated Group. Investment properties also include property that is being constructed or developed for future use as investment properties.

Investment properties in form of land is presented at acquisition cost and not depreciated.

Other investment property is recognised at cost and depreciated over the estimated economic life. Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets which is 20 years.

The estimated useful lives and depreciation method are reviewed at each year-end and the effect of any changes in estimate being accounted for on a prospective basis.

Lampiran 5/17 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**j. Properti investasi (lanjutan)**

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi. Properti investasi yang tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok properti investasi berikut akumulasi penyusutan dan penurunan nilainya, jika ada. Keuntungan atau kerugian dari penjualan properti investasi tersebut dibukukan dalam laba rugi pada tahun penjualan terjadi.

Manajemen melakukan penilaian atas properti investasi secara berkala untuk memastikan ada tidaknya penurunan nilai permanen yang material.

k. Aset tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi dalam periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Tanah dinyatakan berdasarkan model revaluasi dan tidak disusutkan. Aset tetap yang tidak digunakan dinyatakan sebesar jumlah terendah antara jumlah tercatat atau jumlah terpulihkan.

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat kejadian atau transaksi ekonomi yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 116: Sewa. Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 216: Aset tetap.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**j. Investment properties (continued)**

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred. Expenditures which extend the useful lives of the property or result in increasing future economic benefits such as an increase in capacity and improvement in the quality of output or standard of performance, are capitalised. When the property is unused or otherwise disposed of, the carrying value and accumulated impairment losses, if any, are removed from the investment property account. Gains or losses from the sale of investment property are recorded in profit or loss in the year of sale.

Management performs valuation of investment properties regularly to ensure whether there is a material permanent impairment.

k. Fixed assets

Fixed assets are initially recognised at cost, which comprises its acquisition cost and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance costs are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Land is stated at revaluation model and not depreciated. Unused fixed assets are stated at the lower of carrying value or recoverable amount.

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS 116: Leases. If land rights are substantially similar with land purchases, the Group applies SFAS 216: Fixed assets.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/18 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

k. Aset tetap (lanjutan)

Penilaian terhadap tanah tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala (3 tahun sekali) untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada penghasilan komprehensif lainnya dan disajikan sebagai "Surplus revaluasi aset" di ekuitas. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya dicatat atas aset yang sama dibebankan di penghasilan komprehensif lainnya dan didebitkan terhadap "Surplus revaluasi aset" di ekuitas; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

Penyusutan aset tetap lainnya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan sampai dengan nilai sisanya selama masa manfaat yang diestimasi, sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Bangunan	10 - 20
Mesin dan peralatan pabrik	8 - 20
Kapal dan sarana	10 - 35
Kendaraan dan alat berat	4 - 8
Perlengkapan kantor	4
Aset penyangga	8 - 20

Keuntungan atau kerugian bersih dari pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan hasil bersih pelepasan dengan nilai tercatat dan diakui dalam "(Rugi)/pendapatan lainnya - bersih" di laba rugi.

Masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

k. Fixed assets (continued)

Valuation of land performed by external independent appraisers which are registered at Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Valuations are performed regularly (once in 3 years) to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of land are credited to other comprehensive income and shown as "Asset revaluation surplus" in equity. Decreases that offset previous increases of the same asset are charged in other comprehensive income and debited against "Asset revaluation surplus" in equity; all other decreases are charged to profit or loss.

Depreciation on other fixed assets is calculated using the straight-line method to allocate their cost to their residual values over their estimated useful lives, as follows:

Buildings
Machinery and plant
Ships and facilities
Vehicles and heavy equipment
Office supplies
Supporting assets

Net gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognised within "Other (loss)/income - net" in profit or loss.

The asset's useful life and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss, when the changes arise.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

k. Aset tetap (lanjutan)

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat terpulihkan (Catatan 2I).

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya pinjaman yang dikapitalisasi yang terjadi selama masa pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Kapitalisasi biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian. Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian telah selesai.

I. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya, kecuali *goodwill*, ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi di antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam rangka mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

k. Fixed assets (continued)

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 2I).

Construction in progress is carried at cost including any capitalised borrowing costs that are incurred during the construction period of the assets. The accumulated costs are transferred to the respective fixed assets accounts when the construction is substantially completed and ready for its intended use. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

Capitalisation of borrowing costs

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans that have been either directly or indirectly used to finance the construction of a qualifying asset, are capitalised until the date when the construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost that has been incurred during the period, less any income that has been earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount that has been expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs that are applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings that have been made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset. An entity shall cease capitalising borrowing costs when substantially all of the activities necessary to prepare the qualifying asset are complete.

I. Impairment of non-financial assets

Fixed assets and other non-current assets, excluding goodwill, are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, which is the higher of an asset's fair value less cost of disposal and value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

l. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Goodwill sebagai bagian dari investasi di asosiasi diuji penurunan nilainya bersamaan dengan investasi di asosiasi sebagai satu unit penghasil kas.

m. Imbalan kerja

(i) Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

(ii) Imbalan pensiun, imbalan pascakerja lainnya, dan imbalan jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan manfaat pasti sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), yang jumlahnya lebih besar dibanding dengan imbalan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Karena peraturan ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan peraturan ketenagakerjaan atau PKB adalah program pensiun imbalan pasti.

Program pensiun imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung beberapa faktor, misalnya usia, masa kerja dan kompensasi.

Liabilitas imbalan pensiun merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan imbal hasil pasar atas obligasi korporasi berkualitas tinggi pada akhir periode pelaporan. Jika tidak ada pasar yang aktif dan stabil bagi obligasi korporasi berkualitas tinggi dalam mata uang Rupiah, maka imbal hasil pasar (pada akhir periode pelaporan) atas obligasi pemerintah jangka panjang pada akhir periode pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sesuai dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan harus digunakan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

l. Impairment of non-financial assets (continued)

Goodwill as part of investment in associates is assessed for impairment together with investment in associate as one cash generating unit.

m. Employees benefits

(i) Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when accrued to the employees.

(ii) Pension benefits, other post-employment benefits and other long-term benefits

The Group provides defined benefits in accordance with the Collective Labour Agreement ("CLA"), which are higher than those required under prevailing regulations related to manpower. Since manpower regulations and the CLA set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the manpower regulations or the CLA represent defined benefit plans.

Defined benefit pension plan program defines an amount at pension benefit that an employee will receive on retirement, usually depending on factors such as age, years of service and compensations.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the yield at the end of the reporting period on high quality corporate bonds. If there is no deep market in such high quality corporate bonds denominated in Rupiah, the market yields (at the end of the reporting period) on long-term government bonds denominated in Rupiah in which the benefits will be paid and that have terms to maturity similar to the related pension obligation shall be used.

Lampiran 5/21 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**m. Imbalan kerja** (lanjutan)**(ii) Imbalan pensiun, imbalan pascakerja lainnya dan imbalan jangka panjang lainnya** (lanjutan)

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya dan imbalan jangka panjang lainnya seperti uang penghargaan, santunan kematian, penghargaan pengabdian, dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Santunan kematian diberikan bila pegawai dan anggota keluarga tertentu meninggal dunia. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada peraturan Perusahaan atau PKB. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas pada pos penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya, kecuali imbalan jangka panjang lainnya dimana keuntungan dan kerugian aktuarial diakui langsung sebagai beban pada laba rugi.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amendemen atau kuartilmen program diakui sebagai beban pada laba rugi pada saat terjadinya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**m. Employees benefits** (continued)**(ii) Pension benefits, other post-employment benefits and other long-term benefits** (continued)

The Group also provides other post-employment benefits and other long-term benefits such as long service reward, death allowance, jubilee rewards, and separation reward. The long service reward is paid when the employees reach their retirement age. Death allowance is paid when the employee or the qualified family members pass away. The value of benefits provided to the employee is based on the Company Regulation or the CLA. The separation reward benefit is paid to employees in the event of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit or loss.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise, except for other long-term benefits where actuarial gains and losses are directly recognised as expenses in profit or loss.

Past service costs arising from amendment or curtailment program are recognised as expense in profit or loss when incurred.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

n. Sewa

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomis aset pendasar.

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup mempertimbangkan apakah:

- (i) Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- (ii) Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang penentuan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 - Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

n. Leases

The Group as a lessor

When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the underlying asset.

The Group as a lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group considers whether:

- (i) *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- (ii) *The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing the determination of how and for what purpose the asset is used and:*
 - *The Group has the right to operate the asset; or*
 - *The Group has designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose it will be used.*

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

Lampiran 5/23 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

n. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- (i) pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- (ii) pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- (iii) harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- (iv) penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

n. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- (i) fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;
- (ii) variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- (iii) the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and
- (iv) penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Lampiran 5/24 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**n. Sewa** (lanjutan)**Grup sebagai penyewa** (lanjutan)

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna dalam "aset tetap" dan liabilitas sewa di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Sewa jangka pendek

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sewa aset bernilai rendah

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban.

o. Utang usaha dan utang lainnya

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang lainnya terdiri atas utang kepada karyawan, utang pembelian aset tetap dan lain-lain. Utang usaha dan utang lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lainnya pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**n. Leases** (continued)**The Group as a lessee** (continued)

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "lease liabilities". The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets in the "fixed assets" and lease liabilities in the consolidated statement of financial position.

Short-term leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Low-value assets leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for low-value assets. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense.

o. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables consist of payable to employees, payable for purchase of fixed assets and others. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Lampiran 5/25 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**p. Provisi**

Provisi diakui apabila Grup mempunyai kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan. Ketika terdapat beberapa kewajiban yang serupa, kemungkinan penyelesaian mengakibatkan arus kas keluar ditentukan dengan mempertimbangkan kelas kewajiban secara keseluruhan.

q. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan konsolidasian ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non-kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya atau biaya keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**p. Provision**

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (either legal or constructive) as a result of past events, it is more likely than not than an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and the obligation can be reliably estimated. Provision is not recognised for future operating losses. Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole.

q. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawdown. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawdown, the fee is capitalised as a prepayment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are removed from the consolidated statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised in profit or loss as other income or finance costs.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has a right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

r. Pengakuan pendapatan dan beban

(i) Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi:

- Grup telah memindahkan kontrol kepemilikan barang;
- Grup tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Grup; dan
- biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal.

Terpenuhinya kondisi tersebut tergantung persyaratan penjualan dengan setiap pelanggan. Secara umum pengendalian atas barang dianggap telah berpindah ke pelanggan ketika terjadi transfer kepemilikan dan risiko.

(ii) Subsidi pupuk Pemerintah

Subsidi pupuk Pemerintah diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

Pendapatan subsidi dari Pemerintah dicatat berdasarkan harga pupuk bersubsidi yang telah diaudit oleh BPK-RI dan estimasi kuantitas yang disalurkan, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan, yang didasarkan pada kuantitas penyaluran bulanan yang telah diverifikasi oleh Kementerian Pertanian.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

r. Revenue and expenses recognition

(i) Sales of goods

Revenue from sale of goods are recognised when all of the following conditions are fulfilled:

- the Group has transferred control of the goods to the buyer;
- the Group retains neither continuing managerial involvement nor effective control over the goods sold;
- the amount of revenue can be measured reliably;
- it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Group; and
- the costs incurred or to be incurred with respect to the sales transaction can be measured reliably.

The fulfilment of these conditions depends upon the terms of the sales with individual customers. Generally, the control over the goods are considered to be transferred to the customer when the title and risk are transferred.

(ii) Government's fertiliser subsidy

The Government's fertiliser subsidy is recognised as revenue on an accrual basis which is calculated in accordance with the provisions that are stipulated in the Decrees of the Minister of Finance, the Minister of Agriculture, and the Minister of Trade of the Republic of Indonesia.

Revenue from the Government subsidy is recorded based on the subsidised fertiliser price, audited by BPK-RI and the estimated quantities distributed, as stated in the Minutes of the Audit Result, which are based on the monthly distribution quantities verified by the Ministry of Agriculture.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

r. Pengakuan pendapatan dan beban

(iii) Pendapatan jasa

Bila suatu transaksi pendapatan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal pada saat terpenuhinya seluruh kondisi berikut:

- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Grup;
- tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- biaya yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Bila hasil transaksi pendapatan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui hanya sebesar beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

s. Pajak penghasilan kini dan tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu berkaitan dengan kejadian atau transaksi yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya atau secara langsung dicatat ke ekuitas. Pada kasus ini, masing-masing beban pajak juga diakui pada penghasilan komprehensif lainnya atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

r. Revenue and expenses recognition

(iii) Rendering of services

When the outcome of a transaction involving the rendering of services can be estimated reliably, the revenue that is associated with the transaction is recognised with reference to the stage of completion of the transaction as at the consolidated statement of financial position date.

The outcome of a transaction can be estimated reliably when all of the following conditions are met:

- the amount of revenue can be measured reliably;
- it is probable that the economic benefits that are associated with the transaction will flow to the Group;
- the stage of completion of the transaction at the end of the reporting period can be measured reliably; and
- the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.

When the outcome of a transaction involving the rendering of services cannot be estimated reliably, revenue is recognised only to the extent of the recognised expenses that are recoverable.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

s. Current and deferred income tax

The tax expense for the year comprises current and deferred tax. The tax expense is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted at the end of the reporting period. Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation with the current tax regulation. If necessary, management establishes a provision, where appropriate on the basis of the amounts that are expected to be paid to the tax authorities.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**s. Pajak penghasilan kini dan tangguhan
(lanjutan)**

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer yang berasal dari selisih antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal goodwill. Pajak penghasilan tangguhan juga tidak diperhitungkan jika pajak penghasilan tangguhan tersebut timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak. Penghasilan pajak tangguhan ditentukan menggunakan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Atas perbedaan temporer dalam investasi pada entitas anak dan asosiasi, dibentuk pajak penghasilan tangguhan, kecuali untuk liabilitas pajak tangguhan di mana saat pembalikan perbedaan temporer dikendalikan oleh Grup dan sangat mungkin perbedaan temporer tidak akan dibalik di masa mendatang.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

s. Current and deferred income tax

Deferred income tax is provided in full, using the liability method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill. Deferred income tax is also not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantially enacted at the start of the reporting period and that are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available to be compensated by the temporary differences that can be utilised.

Deferred income tax is provided on temporary differences arising on investments in subsidiaries and associates, except for deferred tax liabilities, where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Group and it is probable that the temporary difference will not be reversed in the foreseeable future.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

t. Modal saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak. Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor.

u. Distribusi dividen

Distribusi dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup pada periode dimana dividen dideklarasikan dan telah disetujui oleh pemegang saham Perusahaan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

t. Share capital

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issuing of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax from the proceeds. Share issuance costs are presented as a deduction from the additional paid-in capital account.

u. Dividend distributions

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognised as a liability in the Group's consolidated financial statements in the period in which the dividends are declared and approved by the Company's shareholders.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Estimates, assumptions, and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group reported in future years.

Lampiran 5/30 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**a. Estimasi masa manfaat aset tetap dan properti investasi**

Grup mengestimasi masa manfaat aset tetap berdasarkan ekspektasi utilisasi aset yang sesuai dengan rencana dan strategi usaha setelah mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Di samping itu, estimasi dari masa manfaat aset tetap juga mempertimbangkan penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sejenis. Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbaharui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan keterbatasan hukum atau pembatasan lainnya atas penggunaan dari aset. Namun, ada kemungkinan, hasil operasi di masa depan dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Biaya perolehan aset tetap dan properti investasi disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi 4 sampai dengan 35 tahun. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset tetap dan properti investasi.

Nilai tercatat atas aset tetap pada tanggal-tanggal pelaporan masing-masing diungkapkan dalam Catatan 11.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**a. Estimated the useful lives of fixed assets and investment properties**

The Group estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilisation as supported by business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behaviour. In addition, the Group's collective assessment of industry practice, an internal technical evaluation and experience with similar assets are also considered when estimating the useful lives of fixed assets. The estimated useful lives are reviewed at least each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates caused by changes in the factors mentioned above.

The costs of fixed assets and investment properties are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful life. Management estimates the useful life of these fixed assets and investment properties to be within 4 to 35 years. Changes in the expected level of usage and technological development could have an impact on the economic useful life and the residual values of these fixed assets and investment properties.

The net carrying amounts of the Group's fixed assets at reporting dates are disclosed in Note 11.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN
ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Imbalan pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun bersih mencakup tingkat diskonto, kenaikan gaji di masa datang dan kenaikan biaya kesehatan. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pascakerja.

Grup menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pascakerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pascakerja yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 18.

**c. Provisi atas kerugian kredit ekspektasian
piutang usaha dan piutang lainnya**

Grup menghitung KKE, piutang usaha dan piutang lainnya. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

Grup menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah KKE paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 5.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Post-employment benefits

The present value of the post-employment benefits liabilities depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future salary increase and future medical costs. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of post-employment benefits liabilities.

The Group determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the post-employment benefits liabilities. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related post-employment benefits liabilities.

Other key assumptions for post-employment benefit liabilities are based in part on current market conditions. Additional information is disclosed in Note 18.

**c. Provision for expected credit losses of trade
and other receivables**

The Group calculates ECLs for trade receivables and other receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics.

The Group adjusts the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period/year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates and forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of expected credit losses is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future. Further details are disclosed in Note 5.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/32 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN
ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

d. Pengakuan pendapatan dan piutang subsidi

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi pupuk melalui Grup berdasarkan Peraturan Presiden ("Perpres") No. 6 Tahun 2025, bersama dengan Peraturan Menteri Pertanian ("Permentan") No. 15 Tahun 2025. Subsidi pupuk diberikan sesuai dengan kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian, dan terdiri dari Urea, NPK serta pupuk bersubsidi lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

Tata cara perhitungan, penyelesaian, dan pertanggungjawaban pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 68/PMK.02/2016 yang telah diperbaharui dengan PMK No. 47 tahun 2025 dan PMK No. 19 tahun 2026. Besaran subsidi pupuk dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan pupuk bersubsidi dan harga eceran tertinggi. Pendapatan dari subsidi yang telah diaudit oleh BPK-RI dan estimasi kuantitas yang disalurkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan, yang didasarkan pada kuantitas penyaluran bulanan yang telah diverifikasi oleh Kementerian Pertanian. Kuantitas pupuk bersubsidi yang disalurkan merupakan objek audit oleh BPK-RI, yang umumnya diselesaikan pada periode setelah penyelesaian laporan keuangan. Apabila terdapat selisih kuantitas antara hasil audit BPK-RI dan jumlah yang digunakan sebagai dasar pengakuan pendapatan subsidi pada tahun berjalan, selisih tersebut akan disesuaikan dan dicatat sebagai beban lain-lain di periode ketika penyelesaian final ditetapkan.

Estimasi atas kuantitas penyaluran pupuk bersubsidi yang belum disalurkan pada akhir periode pelaporan keuangan dilakukan dengan menggunakan data rekonsiliasi manajemen yang didukung dengan berita acara verifikasi bulanan yang telah divalidasi oleh Kementerian Pertanian.

Klasifikasi piutang subsidi menjadi bagian lancar dan tidak lancar ditentukan berdasarkan estimasi dan pertimbangan manajemen, dengan mempertimbangan ketersediaan sisa anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") dan pos-pos anggaran lainnya untuk tahun berikutnya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan piutang subsidi, serta konfirmasi dari Kementerian Pertanian pada tanggal neraca.

e. Provisi atas penurunan nilai persediaan

Grup melakukan pencadangan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang akan digunakan pada masa datang dan kondisi dari persediaan. Ketidakpastian terkait dengan faktor-faktor ini dapat menyebabkan nilai realisasi yang berbeda dengan nilai tercatat dari persediaan.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

**d. Revenue and receivable recognition of
subsidy**

The Government of the Republic of Indonesia provides a fertiliser subsidy through the Group based on Presidential Regulation ("Perpres") No. 6 of 2025, together with Minister of Agriculture Regulation ("Permentan") No. 15 of 2025. Fertiliser subsidies are provided in accordance with the needs of farmer groups and/or farmers in the agricultural sector, and consist of Urea, NPK, and other subsidised fertilisers as stipulated by the Ministry of Agriculture.

The procedure for the calculation, settlement and accountability of subsidised fertiliser is stipulated by the Minister of Finance Regulation ("PMK") No. 68/PMK.02/2016 which has been updated with PMK No. 47 year 2025 and PMK No. 19 year 2026. The fertiliser subsidy amount is calculated based on the difference between subsidised cost of goods sold and the highest retail price. Revenue from the government subsidy is recorded in accordance with the subsidised fertiliser price audited by BPK-RI and the estimated distributed quantities as stated in the Minutes of the Audit Result, which are based on the monthly distributed quantities that have been verified by the Ministry of Agriculture. The quantity of subsidised fertiliser distributed is subject to audit by BPK-RI, which is typically completed in the period following the completion of the financial statements. If there is a difference in quantity between the BPK-RI audit results and the amounts used as the basis for recognising subsidy revenue in the current year, the difference will be adjusted and recorded as other expenses in the period in which the final resolution is reached.

The estimation of the quantity of subsidised fertiliser that has not been distributed at the end of the financial reporting period is based on management's data, supported by monthly verification minutes that have been validated by the Ministry of Agriculture.

The classification of subsidy receivables into current and non-current portions is determined based on management's estimates and judgement, taking into consideration the availability of the remaining budget under the Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") and other budget items for the following year available to settle subsidy receivables, as well as confirmation from the Ministry of Agriculture as of the balance sheet date.

e. Provision for impairment of inventories

The Group provides provision for impairment of inventories based on estimated future usage and the condition of the inventories. Uncertainty associated with these factors may result in the realisable amount being different from the reported carrying amount of the inventories.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN
ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

**e. Provisi atas penurunan nilai persediaan
(lanjutan)**

Estimasi nilai realisasi bersih berdasarkan bukti yang paling andal yang tersedia pada saat estimasi dibuat, pada jumlah persediaan yang diharapkan untuk terealisasi. Estimasi ini mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya secara langsung terkait dengan peristiwa yang terjadi setelah akhir periode dimana peristiwa tersebut menyatakan kondisi yang terjadi pada akhir periode.

f. Pajak penghasilan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan besaran pengurang investasi (*capital allowance*) dan pengurangan beban tertentu untuk tujuan fiskal selama proses estimasi atas perhitungan beban pajak penghasilan masing-masing perusahaan dalam Grup. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan Grup melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Banyaknya transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak selama bisnis normal.

Pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, besaran *capital allowance* dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Sama seperti "penurunan nilai aset nonkeuangan" asumsi atas laba kena pajak masa depan yang dapat dihasilkan sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas dan lain-lain, yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga terdapat kemungkinan perubahan keadaan akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

g. Take or Pay

Dalam menentukan tingkat pemulihan terkait dengan pembayaran *take or pay*, manajemen membuat kajian perhitungan yang melibatkan sejumlah estimasi yang signifikan. Estimasi yang digunakan manajemen dalam menentukan perhitungan tersebut bergantung pada volume pemakaian gas masa depan. Perubahan dalam estimasi ini akan berdampak pada asumsi terkait dengan pemulihan atas uang muka dari pembayaran *Take or Pay*.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

**e. Provision for impairment of inventories
(continued)**

Estimates of net realisable value are based on the most reliable evidence available at the time the estimates are made of the amount the inventories are expected to realise. These estimates take into consideration fluctuations of price or cost directly relating to events occurring after the end of the period to the extent that such events confirm conditions existing at the end of the period.

f. Income taxes

Judgements and assumptions are required to determine the capital allowances and deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income tax expenses for each company within the Group. In particular, the calculation of the Group's income tax expenses involves the interpretation of applicable tax laws and regulations. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

Judgements and estimates taken by management as discussed above may be challenged by the Directorate General of Taxation ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group, can take several years to complete and in some cases, it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the period in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward, capital allowances and other temporary differences, are recognised only where it is considered probable that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Similar to "impairment of non-financial assets", assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by management's estimates and assumptions regarding expected production levels, sales volumes, commodity prices, etc., which are subject to risk and uncertainty, and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

g. Take or Pay

In determining the the recoverability related to take-or-pay payments, management conducts a calculation assessment that involves a number of significant estimates. The estimates used by management in making this calculation depend on the future volume of gas consumption. Changes in these estimates will affect the assumptions regarding the recovery of advances from take-or-pay payments.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/34 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN
ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

**h. Nilai wajar aset tetap yang menggunakan
model revaluasi**

Tanah dinyatakan berdasarkan nilai wajar. Penentuan nilai wajar dilakukan oleh penilai publik independen.

Dalam proses penilaian, manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

**h. Fair value of fixed assets that use revaluation
model**

Land is stated at fair value. The determination of the fair value was performed by an independent public appraiser.

Management, with the assistance of an independent public appraiser, determines the data inputs and assumptions, assesses the valuation methods and holds discussions with the appraisers as part of the valuation process. The approaches and methods that are used in the revaluation depend upon the group of assets. While it is believed that the Group's data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs, or significant changes in assumptions, may materially affect the value of the assets that use the revaluation model.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Kas			Cash on hand
Rupiah	<u>1,270</u>	<u>1,450</u>	Rupiah
Kas di bank			Cash in banks
Pihak berelasi (Catatan 28)	200,760	251,758	Related parties (Note 28)
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("Bank BJB")	101,502	447,362	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("Bank BJB")
PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBCI")	709	47	PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBCI")
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ("Bank Sumsel Babel")	557	440	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ("Bank Sumsel Babel")
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	119	1,095	PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
Deutsche Bank AG ("Deutsche Bank")	119	119	Deutsche Bank AG ("Deutsche Bank")
PT Bank Panin Tbk	35	216	PT Bank Panin Tbk
Lainnya	70	56	Others
USD			USD
Bank BJB	676	1,002	Bank BJB
Lainnya	<u>171</u>	<u>188</u>	Others
Jumlah	<u>304,718</u>	<u>702,283</u>	Total
Jumlah kas dan setara kas	<u>305,988</u>	<u>703,733</u>	Total cash and cash equivalents

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/35 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Pihak berelasi (Catatan 28)	164,020	108,633	<i>Related parties (Note 28)</i>
Provisi penurunan nilai	<u>(67)</u>	<u>(3)</u>	<i>Provision for impairment</i>
	<u>163,953</u>	<u>108,630</u>	
Pihak ketiga	133,024	187,242	<i>Third parties</i>
Provisi penurunan nilai	<u>(96,877)</u>	<u>(97,805)</u>	<i>Provision for impairment</i>
	<u>36,147</u>	<u>89,437</u>	
Jumlah - bersih	<u>200,100</u>	<u>198,067</u>	Total - net

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging of these trade receivables is as follows:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Lancar	196,513	168,131	<i>Current</i>
Sudah jatuh tempo:			<i>Overdue:</i>
1 - 90 hari	825	29,665	<i>1 - 90 days</i>
91 - 120 hari	350	27	<i>91 - 120 days</i>
121 - 365 hari	1,323	744	<i>121 - 365 days</i>
>365 hari	<u>98,033</u>	<u>97,308</u>	<i>>365 days</i>
	297,044	295,875	
Provisi penurunan nilai	<u>(96,944)</u>	<u>(97,808)</u>	<i>Provision for impairment</i>
Jumlah - bersih	<u>200,100</u>	<u>198,067</u>	Total - net

Mutasi provisi atas penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in provision for impairment are as follows:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Saldo awal	97,808	88,485	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	1,132	12,019	<i>Addition</i>
Pemulihan	<u>(1,996)</u>	<u>(2,696)</u>	<i>Recovery</i>
Saldo akhir	<u>96,944</u>	<u>97,808</u>	Ending balance

Lampiran 5/36 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Grup menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang secara individual dilakukan untuk pelanggan yang telah mengalami kesulitan pembayaran sesuai dengan periode yang telah ditentukan dan pelanggan yang umumnya memiliki peringkat kredit.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang secara kolektif dilakukan untuk pelanggan yang secara nilai tidak signifikan dan ada kemungkinan gagal bayar. Perhitungan ini mempertimbangkan tren pembayaran piutang yang dilakukan oleh konsumen, informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi.

Karena jatuh temponya yang pendek, nilai wajar piutang usaha kurang lebih sama dengan jumlah tercatatnya.

Berdasarkan hasil penelaahan atas piutang masing-masing dan kolektif pelanggan pada akhir tahun, manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai provisi atas penurunan nilai telah memadai untuk menutup potensi kerugian atas piutang usaha tidak tertagih.

Lihat Catatan 28 untuk informasi mengenai pihak berelasi.

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

The Group applies the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

Allowance for impairment losses for individual receivables are provided for customers that have difficulties in fulfilling their obligations according to the defined period and generally have credit ratings.

Allowance for impairment losses for collective receivables are provided for customers that have insignificant balances and with possibilities of payment default. This calculation considers trends of payment made by customers, relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions.

Due to the short-term nature, the fair value of the trade receivables approximates their carrying amount.

Based on the review of the status of the individual and collective customers at the end of the year, the Group's management believes that the provision for the impairment of trade receivables is adequate to cover potential losses from uncollectible trade receivables.

See Note 28 for related parties information.

6. PIUTANG SUBSIDI DARI/(KELEBIHAN SUBSIDI YANG DIBAYAR OLEH) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

a. Piutang subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia

Akun ini merupakan piutang subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia yang timbul dari penyaluran pupuk bersubsidi (urea dan NPK) oleh Perusahaan. Berikut ini adalah rincian dari piutang subsidi:

	2025	2024
Tahun:		
2024	56,479	-
2022	20,928	34,775
2020	13,063	13,063
Estimasi piutang subsidi dari Pemerintah - 2025	2,607,666	-
	<u>2,698,136</u>	<u>47,838</u>
Dikurangi:		
Utang Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") keluaran atas subsidi yang belum dibayarkan	(267,276)	(4,633)
Jumlah	<u>2,430,860</u>	<u>43,205</u>
Dikurangi:		
Bagian lancar	<u>(2,349,248)</u>	-
Bagian tidak lancar	<u>81,612</u>	<u>43,205</u>

6. SUBSIDY RECEIVABLES FROM/(EXCESS SUBSIDY PAID BY) THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDONESIA

a. Subsidy receivables from the Government of Republic of Indonesia

This account represents the subsidy receivables from the Government of the Republic of Indonesia arising from the distribution of subsidised fertilisers (urea and NPK) by the Company. The details of the subsidy receivables are as follows:

Year:
2024
2022
2020
Estimates of subsidy receivable from the Government - 2025

Less:
Value Added Tax ("VAT") out payable from unpaid subsidy receivables

Total

Less:
Current portion

Non-current portion

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/37 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**6. PIUTANG SUBSIDI DARI/(KELEBIHAN SUBSIDI
YANG DIBAYAR OLEH) PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA (lanjutan)**

**a. Piutang subsidi dari Pemerintah Republik
Indonesia (lanjutan)**

Piutang subsidi dari Pemerintah merupakan penyaluran pupuk subsidi untuk tahun 2025 dan 2024 yang ditentukan berdasarkan hasil audit oleh BPK-RI yang tertuang pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 30 April 2026 (untuk tahun 2025) dan 5 Mei 2025 (untuk tahun 2024), dikurangi jumlah subsidi yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selama tahun 2025 dan 2024. Untuk jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan, manajemen menggunakan total kuantitas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPK-RI AKN VII, yang masih akan diaudit oleh BPK-RI AKN IV di kemudian hari.

Pada tahun 2025, terdapat pembebanan atas saldo piutang subsidi terkait penyaluran tahun 2022 sebesar Rp12.475 berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan pihak Kementan RI. Selain itu, terdapat penyesuaian subsidi sebesar Rp7.972 yang merupakan nilai koreksi atas penyaluran tahun subsidi 2024 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh BPK-RI tertanggal 7 Mei 2025. Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan masih dalam proses tindak lanjut atas koreksi ini.

Mutasi saldo neto piutang subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Saldo awal	12,406	1,170,394
Penyesuaian	(20,447)	(887)
Pembayaran kepada Pemerintah	88,749	-
PPN atas pembayaran	9,762	-
Subsidi Pemerintah (Catatan 22)	7,582,900	6,576,723
PPN subsidi tahun berjalan	834,119	723,440
Penerimaan dari Pemerintah	(5,175,702)	(7,504,869)
Penerimaan dari PPN subsidi	(575,702)	(838,107)
PPH 22 atas penerimaan	<u>(57,949)</u>	<u>(114,288)</u>
	2,698,136	12,406
Dikurangi:		
Utang PPN keluaran atas piutang subsidi belum dibayarkan	<u>(267,276)</u>	<u>(1,122)</u>
Saldo akhir	<u>2,430,860</u>	<u>11,284</u>

**6. SUBSIDY RECEIVABLES FROM/(EXCESS
SUBSIDY PAID BY) THE GOVERNMENT OF
REPUBLIC OF INDONESIA (continued)**

**a. Subsidy receivables from the Government of
Republic of Indonesia (continued)**

Estimated subsidy receivables from the Government related to distribution of subsidised fertiliser in 2025 and 2024 which were determined based on the audit result by BPK-RI as stated on Minutes of Audit Result dated on 30 April 2026 (for the year 2025) and 5 May 2025 (for the year 2024), deducted with the amount of subsidy paid by the Government during 2025 and 2024. For the quantity of subsidised fertiliser distributed, management used the total quantity stated in the BPK-RI AKN VII Minutes of Audit Result, which remains subject to audit by BPK-RI AKN IV at a later time.

In 2025, an adjustment was made to the balance of subsidy receivables related to the 2022 distribution amounting to Rp12,475, based on the results of reconciliation with the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia. Aside from that, there has also been an adjustment of subsidy amounting to Rp7,972 represents the correction of the 2024 subsidy distribution based on the Minutes of Audit Results issued by BPK-RI dated 7 May 2025. As at the date of these consolidated financial statements, the Company is still in the process of following up on these corrections.

The movements of the net subsidy receivables from the Government of Indonesia are as follows:

Beginning balance
Adjustment
Payment to Government
VAT out payment
Government subsidy (Note 22)
Current year subsidy VAT
Receipt from the Government
Receipt from VAT subsidy
Income tax article 22 related to settlements
Less:
VAT out payable from unpaid subsidy receivables
Ending balance

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/38 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG SUBSIDI DARI/(KELEBIHAN SUBSIDI YANG DIBAYAR OLEH) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (lanjutan)

a. Piutang subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia (lanjutan) (lanjutan)

Utang PPN keluaran atas subsidi yang belum dibayarkan merupakan utang PPN atas penjualan subsidi yang penyelesaiannya akan dilakukan melalui saling hapus dengan porsi PPN dari pelunasan piutang subsidi.

Secara umum, tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang di atas. Risiko kredit pada piutang subsidi pupuk dianggap dapat diabaikan, sebab pihak debitur merupakan Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan memperoleh penggantian bunga atas keterlambatan pelunasan piutang subsidi ini.

b. Kelebihan subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia

Akun ini merupakan utang kepada Pemerintah Republik Indonesia sebesar nil (2024: Rp31.921) yang timbul dari kelebihan penerimaan atas penyaluran pupuk bersubsidi (urea dan NPK) oleh Perusahaan.

c. Piutang subsidi yang belum ditagih

Piutang subsidi yang belum ditagih adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Piutang subsidi yang belum ditagih	164,574	120,559
Dikurangi:		
Utang PPN keluaran atas piutang subsidi belum ditagih	(16,309)	(11,947)
Jumlah	148,265	108,612

Piutang subsidi yang belum ditagih merupakan pendapatan atas penjualan pupuk bersubsidi ke distributor namun belum tersalurkan ke petani.

6. SUBSIDY RECEIVABLES FROM/(EXCESS SUBSIDY PAID BY) THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDONESIA (continued)

a. Subsidy receivables from the Government of Republic of Indonesia (continued)

VAT out payable from unpaid subsidy receivables is VAT payable from subsidy sales which settlement will be performed by offsetting VAT portion from settlement of subsidy receivables.

In general, no impairment loss has been recorded in relation to the receivables mentioned above. The credit risk on receivables from the fertiliser subsidy is considered negligible, since the counterparty is the Government of Republic of Indonesia and the Company is compensated with interest reimbursement as a result of late payment of subsidy's receivables.

b. Excess subsidy paid by the Government of Republic of Indonesia

This account represents payables to the Government of the Republic of Indonesia amounting to nil (2024: Rp31,921) arising from the excess of receipt for the distribution of subsidised fertilisers (urea and NPK) by the Company.

c. Unbilled subsidy receivables

Unbilled subsidy receivables were as follows:

Less:
VAT out payable from unbilled subsidy receivables

Unbilled subsidy receivables represent sales to distributors of subsidised fertilisers which have not yet been distributed to farmers.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/39 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERSEDIAAN

7. INVENTORIES

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Barang jadi	772,074	1,063,920	<i>Finished goods</i>
Suku cadang	467,364	387,695	<i>Spare parts</i>
Bahan pembantu	194,498	163,748	<i>Supporting materials</i>
Bahan baku	127,048	104,281	<i>Raw materials</i>
Barang dalam proses	<u>120,262</u>	<u>57,151</u>	<i>Work in process</i>
	<u>1,681,246</u>	<u>1,776,795</u>	
Provisi penurunan nilai	<u>(262,743)</u>	<u>(268,907)</u>	<i>Provision for impairment</i>
Jumlah	<u>1,418,503</u>	<u>1,507,888</u>	Total

Mutasi provisi penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

The movements of provision for impairment of inventories is as follows:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Saldo awal	268,907	266,333	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	17,900	22,518	<i>Addition</i>
Pemulihan	<u>(24,064)</u>	<u>(19,944)</u>	<i>Recovery</i>
Saldo akhir	<u>262,743</u>	<u>268,907</u>	Ending balance

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari persediaan usang atau penurunan nilai.

Management believes that the above provision is adequate to cover any losses from obsolescence or impairment of inventories.

Pada tanggal 31 Desember 2025, persediaan barang jadi diasuransikan terhadap risiko kerugian, gempa bumi, kebakaran dan risiko lainnya (*all risks*) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1.188.922 (2024: Rp1.988.305).

As at 31 December 2025, finished goods are covered by insurance against the risk of losses, earthquake, fire and other risks (all risks) with total sum insured of Rp1,188,922 (2024: Rp1,988,305).

8. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

8. ADVANCES AND PREPAYMENTS

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Uang muka			Advances
Uang muka pembelian bahan baku	572,036	-	<i>Advances for purchases of raw materials</i>
Uang muka pembayaran proyek	230,007	603,049	<i>Advances for project payment</i>
Uang muka pembelian suku cadang	57,655	58,104	<i>Advances for purchases of spare parts</i>
Uang muka operasional	<u>14,667</u>	<u>18,710</u>	<i>Advances for operation</i>
	<u>874,365</u>	<u>679,863</u>	
Biaya dibayar di muka			Prepayments
Sewa	15,954	17,468	<i>Rental</i>
Asuransi	14,996	15,027	<i>Insurance</i>
Lainnya	<u>1,648</u>	<u>5,303</u>	<i>Others</i>
	<u>32,598</u>	<u>37,798</u>	
Jumlah	<u>906,963</u>	<u>717,661</u>	Total
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Bagian lancar	<u>(630,447)</u>	<u>(74,202)</u>	<i>Current portion</i>
Bagian tidak lancar	<u>276,516</u>	<u>643,459</u>	<i>Non-current portion</i>

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/40 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**8. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA
(lanjutan)**

Uang muka pembelian bahan baku sebagian besar merupakan kelebihan atas pembayaran gas kepada PT Pertamina EP dan PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang sebesar Rp362.692 yang disebabkan oleh perubahan harga gas dan sisanya sebesar Rp195.795 merupakan uang muka terkait kewajiban *take or pay* pembelian gas ke PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Medco EP Grissik Ltd dan PT Pertamina EP di tahun 2025. Sedangkan uang muka pembayaran proyek adalah untuk proyek Pabrik Pusri IIIB.

8. ADVANCES AND PREPAYMENTS (continued)

Advances for purchases of raw material mainly represent excess payments for gas for PT Pertamina EP and PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang amounting to Rp362,692, arising from changes in gas prices. The remaining balance of Rp195,795 relates to advances for gas make up paid to PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Medco EP Grissik Ltd and PT Pertamina EP in 2025. Meanwhile, advances for project payment relates to the Pusri IIIB Plant project.

9. PIUTANG LAINNYA

9. OTHER RECEIVABLES

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Pihak berelasi (Catatan 28)	71,986	65,519	Related parties (Note 28)
Provisi penurunan nilai	<u>(1,102)</u>	<u>(1,029)</u>	Provision for impairment
	<u>70,884</u>	<u>64,490</u>	
Pihak ketiga	75,842	49,846	Third parties
Provisi penurunan nilai	<u>(41,696)</u>	<u>(40,423)</u>	Provision for impairment
	<u>34,146</u>	<u>9,423</u>	
Jumlah	<u>105,030</u>	<u>73,913</u>	Total

Mutasi provisi penurunan nilai piutang lainnya adalah sebagai berikut:

The movements of provision for impairment of other receivables are as follows:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Saldo awal	41,452	15,361	Beginning balance
Penambahan	3,193	26,117	Addition
Pemulihan	<u>(1,847)</u>	<u>(26)</u>	Recovery
Saldo akhir	<u>42,798</u>	<u>41,452</u>	Ending balance

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai atas piutang lainnya adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Management believes that the allowance for impairment of other receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/41 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

10. INVESTMENT IN ASSOCIATE

<u>Nama perusahaan/ Name of company</u>	<u>Nilai tercatat awal tahun /Carrying value at the beginning of the year</u>	<u>Bagian atas rugi bersih/ Share of net loss</u>	<u>Nilai tercatat akhir tahun/ Carrying value at the end of the year</u>
31 Desember/December 2025 PT Pupuk Indonesia Logistik	<u>101,939</u>	<u>(11,186)</u>	<u>90,753</u>
31 Desember/December 2024 PT Pupuk Indonesia Logistik	<u>142,165</u>	<u>(40,226)</u>	<u>101,939</u>

Ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi, dimana entitas asosiasi tersebut merupakan perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk sahamnya adalah sebagai berikut:

The summary of the associate's entity financial information, which the associate is an unlisted private company and there is no quoted market price available for its shares is as follows:

<u>Nama perusahaan/ Name of company</u>	<u>Negara domisili/ Country of domicile</u>	<u>Aset lancar/ Current assets</u>	<u>Aset tidak lancar/ Non-current assets</u>	<u>Liabilitas jangka pendek/ Current liabilities</u>	<u>Liabilitas jangka panjang/ Non-current liabilities</u>	<u>Pendapatan/ Revenues</u>	<u>Rugi bersih/ Net loss</u>	<u>Rugi komprehensif lain/Other comprehensive loss</u>	<u>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership</u>
31 Desember/ December 2025 PT Pupuk Indonesia Logistik	Indonesia	<u>215,498</u>	<u>333,689</u>	<u>302,683</u>	<u>102,992</u>	<u>662,844</u>	<u>(25,290)</u>	<u>-</u>	<u>44,23%</u>
31 Desember/ December 2024 PT Pupuk Indonesia Logistik	Indonesia	<u>219,843</u>	<u>408,948</u>	<u>264,500</u>	<u>204,243</u>	<u>594,451</u>	<u>(90,948)</u>	<u>427</u>	<u>44,23%</u>

Rekonsiliasi atas ringkasan informasi keuangan yang disajikan terhadap nilai buku dari kepentingan entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The reconciliation of the summarised financial information presented to the carrying amounts of the interests in associate is as follows:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Aset bersih			Net assets
Pada awal tahun	230,474	321,422	<i>At the beginning of the year</i>
Rugi tahun berjalan	<u>(25,290)</u>	<u>(90,948)</u>	<i>Loss for the year</i>
Pada akhir tahun	<u>205,184</u>	<u>230,474</u>	<i>At the end of the year</i>
Bagian atas aset bersih entitas asosiasi	<u>90,753</u>	<u>101,939</u>	<i>Share in net assets of associate</i>

Pada tanggal 31 Desember 2025, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas investasi di PT Pupuk Indonesia Logistik.

As at 31 December 2025, there were no other indicators of investment impairment in PT Pupuk Indonesia Logistik.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/42 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

31 Desember/December 2025							
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai revaluasi							Revaluation value
Tanah	6,802,188	-	-	12,629	302,881	7,117,698	Land
Biaya perolehan							Acquisition cost
Bangunan	971,750	7,738	-	15,683	-	995,171	Buildings
Mesin dan peralatan pabrik	14,845,537	102,646	-	534,266	-	15,482,449	Machinery and plant
Kapal dan sarana	1,519	-	-	-	-	1,519	Ships and facilities
Kendaraan dan alat berat	45,580	18,099	-	-	-	63,679	Vehicle and heavy equipment
Perlengkapan kantor	284,751	31,694	(3)	270	-	316,712	Office supplies
Aset penyangga	305,751	40,838	-	-	-	346,589	Supporting assets
Aset dalam penyelesaian	4,304,126	5,023,673	-	(571,668)	-	8,756,131	Assets under construction
Aset hak-guna	72,240	57,339	(33,681)	-	-	95,898	Right-of-use assets
Jumlah	27,633,442	5,282,027	(33,684)	(8,820)	302,881	33,175,846	Total
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Bangunan	(356,056)	(49,148)	-	-	-	(405,204)	Buildings
Mesin dan peralatan pabrik	(5,988,807)	(923,184)	-	-	-	(6,911,991)	Machinery and plant
Kapal dan sarana	(663)	(66)	-	-	-	(729)	Ships and facilities
Kendaraan dan alat berat	(34,853)	(3,484)	-	-	-	(38,337)	Vehicle and heavy equipment
Perlengkapan kantor	(243,460)	(20,999)	3	-	-	(264,456)	Office supplies
Aset penyangga	(179,075)	(27,283)	-	-	-	(206,358)	Supporting assets
Aset hak-guna	(39,836)	(42,050)	33,681	-	-	(48,205)	Right-of-use assets
Jumlah	(6,842,750)	(1,066,214)	33,684	-	-	(7,875,280)	Total
Penyisihan penurunan nilai							Provision for impairment
Mesin dan peralatan pabrik	(10,506)	-	-	-	-	(10,506)	Machinery and plant
Jumlah	(10,506)	-	-	-	-	(10,506)	Total
Nilai tercatat neto	20,780,186					25,290,060	Net carrying value

31 Desember/December 2024							
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification		Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai revaluasi							Revaluation value
Tanah	6,869,522	-	-	(67,334)		6,802,188	Land
Biaya perolehan							Acquisition cost
Bangunan	924,185	3,181	-	44,384		971,750	Buildings
Mesin dan peralatan pabrik	14,276,841	312,551	-	256,145		14,845,537	Machinery and plant
Kapal dan sarana	1,519	-	-	-		1,519	Ships and facilities
Kendaraan dan alat berat	41,247	4,333	-	-		45,580	Vehicle and heavy equipment
Perlengkapan kantor	260,734	22,262	-	1,755		284,751	Office supplies
Aset penyangga	268,511	37,480	-	(240)		305,751	Supporting assets
Aset dalam penyelesaian	1,022,905	3,585,165	-	(303,944)		4,304,126	Assets under construction
Aset hak-guna	92,201	14,670	(34,631)	-		72,240	Right-of-use assets
Jumlah	23,757,665	3,979,642	(34,631)	(69,234)		27,633,442	Total
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Bangunan	(308,813)	(47,243)	-	-		(356,056)	Buildings
Mesin dan peralatan pabrik	(5,053,280)	(935,527)	-	-		(5,988,807)	Machinery and plant
Kapal dan sarana	(597)	(66)	-	-		(663)	Ships and facilities
Kendaraan dan alat berat	(32,571)	(2,282)	-	-		(34,853)	Vehicle and heavy equipment
Perlengkapan kantor	(226,234)	(17,226)	-	-		(243,460)	Office supplies
Aset penyangga	(153,828)	(25,247)	-	-		(179,075)	Supporting assets
Aset hak-guna	(37,636)	(36,831)	34,631	-		(39,836)	Right-of-use assets
Jumlah	(5,812,959)	(1,064,422)	34,631	-		(6,842,750)	Total
Penyisihan penurunan nilai							Provision for impairment
Mesin dan peralatan pabrik	-	(10,506)	-	-		(10,506)	Machinery and plant
Jumlah	-	(10,506)	-	-		(10,506)	Total
Nilai tercatat neto	17,944,706					20,780,186	Net carrying value

Lampiran 5/43 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tahun 2025, sejalan dengan perubahan fungsi dari aset tetap terkait, Grup melakukan reklasifikasi dari aset tetap ke properti investasi dengan harga perolehan sebesar Rp40.622 dan reklasifikasi dari properti investasi ke aset tetap sebesar Rp52.470.

Pembebanan penyusutan atas aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Beban pokok pendapatan (Catatan 23)	1,019,665	1,017,916
Beban penjualan (Catatan 24)	32,522	32,772
Beban umum dan administrasi (Catatan 25)	<u>14,027</u>	<u>13,734</u>
Jumlah	<u>1,066,214</u>	<u>1,064,422</u>

Aset tetap dan properti investasi Grup diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dengan nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar USD785.153.129 dan Rp1.579.917 (2024: USD785.153.129 dan Rp1.880.549).

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, nilai aset dalam penyelesaian sebagian besar merupakan proyek pembangunan Pabrik Pusri IIIB dengan tahapan penyelesaian sebesar 80,79% (2024: 40,3%) dan diperkirakan selesai pada tahun 2027.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Bunga pinjaman	310,520	140,028

Biaya pinjaman dikapitalisasi pada tingkat bunga rata-rata tertimbang dari pinjaman umum dan spesifik adalah sebesar 6,35% pada tahun 2025 (2024: 8,25%).

Pada tahun 2025, Grup melakukan revaluasi atas aset tanah. Revaluasi dilakukan atas dasar penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik ("KJPP") Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan No. 01200/2.0027-00/PI/11/0196/1/XI/2025 tanggal 4 November 2025 dimana telah dikonfirmasi melalui surat No. 053/MBPRV-JKT/E/MTQ/II/2026 tanggal 26 Februari 2026 bahwa tidak ada perbedaan dengan revaluasi per 31 Desember 2025.

Standar Penilaian yang digunakan adalah Standar Penilaian Indonesia edisi VII - 2018, dengan menggunakan pendekatan pasar untuk revaluasi tanah di tahun 2025.

11. FIXED ASSETS (continued)

In 2025, in line with changes of the function of its fixed assets, the Group reclassified from fixed assets to investment properties with acquisition cost amounting to Rp40,622 and reclassification from investment properties to fixed assets amounting to Rp52,470.

Depreciation of fixed assets were allocated as follows:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
	1,019,665	1,017,916	Cost of revenues (Note 23)
	32,522	32,772	Selling expenses (Note 24)
	<u>14,027</u>	<u>13,734</u>	General and administrative expenses (Note 25)
Jumlah	<u>1,066,214</u>	<u>1,064,422</u>	Total

The fixed assets and investment properties of the Group are insured against fire and other risks under insurance package policies coverage as at 31 December 2025 amounting to USD785,153,129 and Rp1,579,917 (2024: USD785,153,129 and Rp1,880,549).

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the fixed assets insured.

As at 31 December 2025, the balance of assets under construction primarily consists of the construction project of Pusri IIIB Plant, with a completion stage of 80.79% (2024: 40.3%) and is expected to be completed in 2027.

Borrowing costs which were capitalised to assets under construction as follows:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
	310,520	140,028	Interest expense

Borrowing costs were capitalised at the weighted average rate of general and specific borrowings of 6.35% in 2025 (2024: 8.25%).

In 2025, the Group performed revaluation of its land. The revaluation was carried out on the basis of valuation performed by Independent Public Appraisers ("KJPP") Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan No. 01200/2.0027-00/PI/11/0196/1/XI/2025 dated 4 November 2025 in which it has been confirmed through letter No. 053/MBPRV-JKT/E/MTQ/II/2026 dated 26 February 2026 that there is no difference with the revaluation as at 31 December 2025 through letter.

The Assessment Standards used were the Indonesian Appraisal Standards VII Edition - 2018, using the market approach for the land revaluation in 2025.

Lampiran 5/44 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Pendekatan pasar yang digunakan untuk mengukur nilai wajar tanah mempertimbangkan penjualan dari aset sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada dasarnya, properti yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan properti yang sebanding, baik dari transaksi yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli, yang disesuaikan untuk perbedaan pada sifat, lokasi dan kondisi dari tanah yang dinilai. Nilai revaluasi tanah yang menggunakan pendekatan pasar pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp7.117.698.

Secara total kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi kelompok aset yang direvaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset" pada tahun 2025 adalah sebesar Rp302.881.

Surplus revaluasi telah dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain.

Keuntungan atas pelepasan aset tetap untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Nilai jual	42	44,665
Nilai buku	<u>-</u>	<u>(485)</u>
Keuntungan bersih	<u>42</u>	<u>44,180</u>

Aset tetap berupa tanah dan pabrik dalam konstruksi Pusri IIIB digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka panjang (Catatan 16).

Berdasarkan penelaahan manajemen pada akhir tahun, tidak terdapat indikator penurunan nilai atas aset tetap milik Grup, selain penurunan nilai aset tetap sebesar Rp10.506 terkait pabrik Pusri II.

11. FIXED ASSETS (continued)

The market approach used to measure the fair value of land considers the sales of similar assets or replacement assets and related market information, which provides value estimation by means of a comparison process. Generally, the properties being valued (the valuation objects) are properties that are compared to other similar properties that have either completed the transaction process or been offered for sale, adjusted for differences in the nature, location or condition of the specific land. The revaluation value of land using the market approach as at 31 December 2025 is amounting to Rp7,117,698.

The total increase in the carrying amounts of the class of revalued assets has been recorded as the "Assets Revaluation Surplus" in 2025 amounting to Rp302,881.

The revaluation surplus was credited to other comprehensive income.

Gain on disposal of fixed assets for the years ended 31 December 2025 and 2024 were as follows:

Fixed assets such as land and Pusri IIIB plant in construction are used as collateral for long-term loans (Note 16).

Based on management's evaluation at the end of the year, there was no impairment indicator identified on fixed assets of the Group, other than impairment of fixed assets amounting to Rp10,506 for Pusri II plant.

12. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

12. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Aset tak berwujud, setelah amortisasi	31,575	16,200
Kas yang dibatasi penggunaannya, porsi tidak lancar	1,120	4,414
Lainnya	<u>550</u>	<u>908</u>
Jumlah	<u>33,245</u>	<u>21,522</u>

Intangible assets, net amortisation
Restricted cash,
non-current portion
Others

Total

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/45 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. UTANG USAHA

13. TRADE PAYABLES

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Pihak berelasi (Catatan 28)	121,296	52,287	<i>Related parties (Note 28)</i>
Pihak ketiga	<u>160,951</u>	<u>82,439</u>	<i>Third parties</i>
Jumlah	<u>282,247</u>	<u>134,726</u>	Total

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Details of trade payable by currency are as follows:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Rupiah	282,034	134,726	<i>Rupiah</i>
USD	<u>213</u>	<u>-</u>	<i>USD</i>
Jumlah	<u>282,247</u>	<u>134,726</u>	Total

14. UTANG LAINNYA

14. OTHER PAYABLES

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Pihak berelasi (Catatan 28)	69,626	2,958	<i>Related parties (Note 28)</i>
Pihak ketiga	<u>159,886</u>	<u>97,810</u>	<i>Third parties</i>
Jumlah	<u>229,512</u>	<u>100,768</u>	Total

Utang lainnya sebagian besar merupakan uang muka dari pelanggan sebesar Rp120.976 (2024: Rp75.883) dan sisanya merupakan utang kepada karyawan dan utang lainnya.

Other payables mainly consist of advances from customers amounting to Rp120,976 (2024: Rp75,883) and the remaining are payable to employees and other liabilities.

15. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR

15. ACCRUED LIABILITIES

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Akrual proyek	1,309,226	1,230,095	<i>Accrual project</i>
Gas bumi	748,191	524,918	<i>Natural gas</i>
Distribusi	222,404	213,529	<i>Distribution</i>
Kompensasi atas perubahan harga eceran tertinggi	61,883	-	<i>Compensation on the change of highest retail price</i>
Bahan pembantu	36,735	21,109	<i>Supporting material</i>
Batu bara	23,567	45,467	<i>Coal</i>
Bunga pinjaman	2,428	15,460	<i>Interest from loan</i>
Bahan baku NPK	7,286	7,870	<i>NPK raw material</i>
Lainnya	<u>133,286</u>	<u>120,537</u>	<i>Others</i>
Jumlah	<u>2,545,006</u>	<u>2,178,985</u>	Total

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/46 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG

16. LONG-TERM LOANS

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Pihak berelasi (Catatan 28)			Related parties (Notes 28)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	2,157,809	569,347	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	1,160,136	546,873	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	540,341	254,232	PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	527,193	254,710	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")
PT Bank Tabungan Negara Tbk ("BTN")	486,281	229,227	PT Bank Tabungan Negara Tbk ("BTN")
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusri ("YKKP")	7,194	2,804	Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusri ("YKKP")
PT Pupuk Indonesia (Persero)	-	775,000	PT Pupuk Indonesia (Persero)
Pihak ketiga:			Third parties:
SMBCI	2,120,000	-	SMBCI
BCA	540,341	254,710	BCA
Bank BJB	349,599	164,797	Bank BJB
Bank Sumsel Babel	<u>252,977</u>	<u>119,250</u>	Bank Sumsel Babel
Jumlah pinjaman	<u>8,141,871</u>	<u>3,170,950</u>	Total loans
Dikurangi: bagian jangka pendek	<u>(7,194)</u>	<u>(2,804)</u>	Less: current portion
Bagian jangka panjang	<u><u>8,134,677</u></u>	<u><u>3,168,146</u></u>	Non-current portion

Informasi mengenai pinjaman jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Information related to long-term loans as at 31 December 2025 were as follows:

<u>Kreditur/ Creditors</u>	<u>Jenis fasilitas/ Facilities type</u>	<u>Jumlah fasilitas/ Facilities amount</u>	<u>Periode jatuh tempo/ Maturity period</u>	<u>Tingkat suku bunga per tahun/ Annual interest rates</u>	<u>Jaminan/ Collateral</u>
YKKP	- Pinjaman pemegang saham/ Shareholder loan	Rp7,200	28 April/ April 2026	10.00%	Tanah/ Land
BNI	- Kredit Modal Kerja/Working Capital Loan	Rp500,000	20 September/ September 2027	Compounded Indonesia 3 bulan/ months + 1,25%	Negative Pledge
BNI	- Kredit Modal Kerja/Working Capital Loan	Rp500,000	20 September/ September 2027	Sesuai bunga/ money market line	Negative Pledge
SMBCI	- Kredit Modal Kerja/Working Capital Loan	Rp3,990,000	31 Oktober/ October 2027	Sesuai bunga/ money market line	Negative Pledge

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/47 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

16. LONG-TERM LOANS (continued)

Pinjaman sindikasi

Syndicated loans

Informasi mengenai pinjaman sindikasi pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Information related to syndicated loans as at 31 December 2025 were as follows:

<u>Kreditur/ Creditors</u>	<u>Jenis fasilitas/ Facilities type</u>	<u>Jumlah fasilitas/ Facilities amount</u>	<u>Periode jatuh tempo/ Maturity period</u>	<u>Tingkat suku bunga per tahun/ Annual interest rates</u>	<u>Jaminan/ Collateral</u>
<u>Pinjaman sindikasi</u>			<u>Syndicated loans</u>		
Bank Mandiri	- Kredit investasi/ <i>Investment loan</i>	Rp1,825,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIB/ Pusri IIIB Plant
	- <i>Investment During Contract ("IDC")</i>	Rp325,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIB/ Pusri IIIB Plant
BNI	- Kredit investasi/ <i>Investment loan</i>	Rp1,900,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIB/ Pusri IIIB Plant
	- IDC	Rp350,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIB/ Pusri IIIB Plant
BCA	- Kredit investasi/ <i>Investment loan</i>	Rp850,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIB/ Pusri IIIB Plant
	- IDC	Rp150,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIB/ Pusri IIIB Plant
BRI	- Kredit investasi/ <i>Investment loan</i>	Rp850,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIB/ Pusri IIIB Plant
	- IDC	Rp150,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIB/ Pusri IIIB Plant
BTN	- Kredit investasi/ <i>Investment loan</i>	Rp765,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIB/ Pusri IIIB Plant
	- IDC	Rp135,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIB/ Pusri IIIB Plant
BSI	- Kredit investasi/ <i>Investment loan</i>	Rp900,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIB/ Pusri IIIB Plant
BJB	- Kredit investasi/ <i>Investment loan</i>	Rp550,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIB/ Pusri IIIB Plant
	- IDC	Rp100,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIB/ Pusri IIIB Plant
Bank Sumsel Babel	- Kredit investasi/ <i>Investment loan</i>	Rp398,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIB/ Pusri IIIB Plant
	- IDC	Rp69,000	13 Oktober/ October 2034	JIBOR 3 bulan +2,3%/ JIBOR 3 months +2,3%	Pabrik Pusri IIIB/ Pusri IIIB Plant

Pada tanggal 13 Oktober 2023, Perusahaan sebagai peminjam, mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi dengan beberapa bank ("Pemberi Pinjaman"), yang terdiri dari Bank Mandiri, BNI, BCA, BRI, BTN, BSI, BJB dan Bank Sumsel Babel. Pemberi Pinjaman sepakat untuk memberikan fasilitas untuk membiayai pembangunan pabrik Pusri IIIB. Beban keuangan atas pinjaman ini dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian.

On 13 October 2023, the Company as the borrower entered into a syndicated loan facility agreement with several banks (the "Lenders") which consist of Bank Mandiri, BNI, BCA, BRI, BTN, BSI, BJB and Bank Sumsel Babel. The Lenders agreed to provide an investment credit facility which was used to finance the construction of Pusri IIIB plant. The finance costs of these loans are capitalised to assets under construction.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/48 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman, Grup diharuskan untuk menjaga beberapa rasio keuangan tertentu, dimana telah ditaati oleh Grup pada tanggal 31 Desember 2025. Grup juga diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai Anggaran Dasar, kegiatan usaha, dividen, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya. Grup telah memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut.

16. LONG-TERM LOANS (continued)

In accordance with the loan agreements, the Group is required to maintain certain financial ratios, which the Group was in compliance as at 31 December 2025. The Group is also required to comply with certain terms and conditions in relation to its Articles of Association, the nature of its business, dividends, corporate actions, financing activities and other matters. The Group has complied with the relevant terms and conditions.

17. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Pajak penghasilan badan:		
2024	54,640	54,019
2023	3,515	88,144
2019	<u>97,635</u>	<u>97,635</u>
	<u>155,790</u>	<u>239,798</u>
Pajak lainnya:		
PPN	<u>177,945</u>	<u>100,787</u>
	<u>177,945</u>	<u>100,787</u>
Jumlah	<u>333,735</u>	<u>340,585</u>
Dikurangi:		
Bagian lancar	<u>(181,460)</u>	<u>(286,566)</u>
Bagian tidak lancar	<u>152,275</u>	<u>54,019</u>

17. TAXATION

a. Prepaid taxes

Corporate income taxes:
2024
2023
2019

Other taxes:
VAT

Total

Less:
Current portion

Non-current portion

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/49 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Pajak penghasilan badan:			Corporate income tax:
Pasal 25/29	<u>67,562</u>	<u>11,142</u>	Article 25/29
Pajak lainnya:			Other taxes:
Pasal 21	24,416	7,818	Article 21
PPN WAPU	18,229	71,901	VAT WAPU
Pasal 4(2)	16,898	445	Article 4(2)
Pasal 23	1,803	2,202	Article 23
Pasal 22	808	1,502	Article 22
Pasal 15	<u>57</u>	<u>718</u>	Article 15
Jumlah	<u>62,211</u>	<u>84,586</u>	Total

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expenses

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Perusahaan:			The Company:
Pajak kini	249,618	187,735	Current tax
Pajak tangguhan	(54,679)	133,368	Deferred tax
Penyesuaian tahun lalu	<u>15,957</u>	<u>9,982</u>	Prior year adjustments
	<u>210,896</u>	<u>331,085</u>	
Entitas anak:			Subsidiary:
Pajak kini	<u>-</u>	<u>49</u>	Current tax
	<u>-</u>	<u>49</u>	
Konsolidasian:			Consolidated:
Pajak kini	249,618	187,784	Current tax
Pajak tangguhan	(54,679)	133,368	Deferred tax
Penyesuaian tahun lalu	<u>15,957</u>	<u>9,982</u>	Prior year adjustments
	<u>210,896</u>	<u>331,134</u>	

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dan jumlah pajak teoritis atas laba Grup sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense and the theoretical tax amount on the Group's profit before income tax is as follows:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	824,423	1,399,669	Profit before income tax
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	181,373	307,927	Income tax calculated at applicable tax rate
Beban yang tidak dapat dikurangkan	36,843	26,689	Non-deductible expenses
Pendapatan dikenakan pajak final	(23,277)	(13,464)	Income subject to final tax
Penyesuaian tahun lalu	<u>15,957</u>	<u>9,982</u>	Prior year adjustments
Jumlah beban pajak penghasilan konsolidasian	<u>210,896</u>	<u>331,134</u>	Consolidated income tax expenses

Lampiran 5/50 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

d. Pajak tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan beda waktu antara nilai tercatat dari total aset dan liabilitas yang dicatat berdasarkan laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas. Rincian aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

d. Deferred tax

Deferred tax is calculated based on temporary differences between the carrying value of the total assets and liabilities recorded on the financial statements and the tax bases of assets and liabilities. Details of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:

31 Desember/December 2025					
		(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ (Charged)/ credited to other comprehensive income	(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ (Charged)/ credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
	Saldo awal/ Beginning balance	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ (Charged)/ credited to profit or loss	(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ (Charged)/ credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
					Deferred tax (liabilities)/assets
(Liabilitas)/aset pajak tangguhan					(liabilities)/assets
Liabilitas imbalan pascakerja	115,251	20,897	36,636	172,784	Post-employment benefits liabilities
Cadangan atas penurunan nilai persediaan	59,159	(1,356)	-	57,803	Allowance for impairment of inventories
Cadangan atas penurunan nilai piutang usaha dan piutang lainnya	32,608	310	-	32,918	Allowance for impairment of trade receivables and other receivables
Penyusutan aset tetap	(561,967)	32,729	-	(529,238)	Depreciation of fixed assets
Bonus, insentif dan tantiem	42,241	2,815	-	45,056	Bonus, incentives and tantiem
Provisi penurunan nilai aset tetap	2,311	-	-	2,311	Provision for impairment of fixed assets
Lainnya	6,423	(716)	-	5,707	Others
Jumlah	(303,974)	54,679	36,636	(212,659)	Total
31 Desember/December 2024					
		(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ (Charged)/ credited to profit or loss	(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ (Charged)/ credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
	Saldo awal/ Beginning balance	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ (Charged)/ credited to profit or loss	(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ (Charged)/ credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
					Deferred tax (liabilities)/assets
(Liabilitas)/aset pajak tangguhan					(liabilities)/assets
Liabilitas imbalan pascakerja	148,477	(134,726)	101,500	115,251	Post-employment benefits liabilities
Cadangan atas penurunan nilai persediaan	58,593	566	-	59,159	Allowance for impairment of inventories
Cadangan atas penurunan nilai piutang usaha dan piutang lainnya	22,846	9,762	-	32,608	Allowance for impairment of trade receivables and other receivables
Penyusutan aset tetap	(579,330)	17,363	-	(561,967)	Depreciation of fixed assets
Bonus, insentif dan tantiem	71,316	(29,075)	-	42,241	Bonus, incentives and tantiem
Provisi penurunan nilai aset tetap	-	2,311	-	2,311	Provision for impairment of fixed assets
Lainnya	5,992	431	-	6,423	Others
Jumlah	(272,106)	(133,368)	101,500	(303,974)	Total

Lampiran 5/51 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Administrasi pajak

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan dan entitas anak yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

f. Surat Ketetapan Pajak ("SKP")

Entitas/ Entity	Jenis pajak/ Type of taxes	Tahun pajak dan status pada 31 Desember 2025 /Fiscal year and status as at 31 December 2025
Perusahaan/ The Company	PPH badan/Corporate income tax	2019 (Banding/ Appeal)
Perusahaan/ The Company	PPH badan/Corporate income tax	2023 (Keberatan/ Objection)

PPH Badan 2019

Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas pajak penghasilan badan tahun 2019 pada November 2022. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, sengketa pajak masih dalam proses banding oleh pengadilan pajak. Manajemen berkeyakinan bahwa sengketa pajak tersebut tidak akan memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi keuangan dan arus kas Perusahaan.

PPH Badan 2023

Pada tanggal 7 Mei 2025, Perusahaan telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") untuk PPh badan tahun 2023 sebesar Rp88.144 dan telah menerima pengembalian atas lebih bayar pajak penghasilan badan tahun 2023 sebesar Rp72.670 pada tanggal 21 Mei 2025. Atas sisanya, Perusahaan telah membebaskan Rp11.765 sebagai penyesuaian tahun lalu dan mengajukan banding sebesar Rp3.515.

g. Aturan model OECD pilar dua

Entitas Induk Utama Grup berada dalam ruang lingkup model aturan OECD Pilar Dua dan telah menerapkan pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan aset dan liabilitas pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua sejak 1 Januari 2025. Peraturan Pilar Dua telah disahkan di Indonesia, tempat Grup beroperasi. Berdasarkan penilaian Entitas Induk Utama, tarif pajak efektif Grup di Indonesia melebihi 15%. Oleh karena itu, Grup tidak wajib membayar pajak penghasilan tambahan berdasarkan Pilar Dua.

17. TAXATION (continued)

e. Tax administration

Under the Indonesian taxation laws, the Company and its subsidiary, which are domiciled in Indonesia, calculate and pay tax on the basis of self assessment. DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax become due.

f. Tax assessment letters ("SKP")

Nilai sengketa/ Amount of disputes	Pajak dibayar di muka/ Prepaid tax	Pengembalian dana pajak/ Tax refund	Dibebankan ke laba rugi/ Charged to profit or loss
97,635	97,635	-	-
3,515	3,515	-	-

2019 CIT

The Company has submitted appeal to Tax Court on corporate income tax for fiscal year 2019 in November 2022. As at 31 December 2025, the tax dispute is still in appeal process by the tax court. Management is of the opinion that the ongoing tax disputes will not have a material adverse impact on the Company's financial position and cash flows.

2023 CIT

On 7 May 2025, the Company has received a Tax Overpayment Decision Letter ("SKPLB") for the corporate income tax year 2023 amounting to Rp88,144 and received the refund for the 2023 corporate income tax overpayments amounting to Rp72,670 on 21 May 2025. For the remaining amount, the Company has charged Rp11,765 as a prior year adjustment and filed an appeal amounting to Rp3,515.

g. OECD pillar two model rules

The Group's Ultimate Parent Entity is within the scope of the OECD Pillar Two model rules and has applied the exception from recognising and disclosing deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two income taxes from 1 January 2025. Pillar Two legislation has been enacted in Indonesia, where the Group operates. Based on the Ultimate Parent Entity's assessment, the Group's effective tax rate in Indonesia exceeds 15%. Therefore, the Group is not required to pay additional income tax under Pillar Two.

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

a. Liabilitas imbalan kerja

a. Employee benefits liabilities

	2025	2024	
Gaji, insentif dan bonus	212,681	199,883	Salaries, incentives and bonuses
Liabilitas imbalan kerja	83,306	47,634	Employee benefit liabilities
Lainnya	3,158	1,131	Others
Jumlah	299,145	248,648	Total
Dikurangi:			Less:
Bagian lancar	(298,025)	(244,367)	Current portion
Bagian tidak lancar	1,120	4,281	Non-current portion

b. Program imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

b. Post-employment benefit plans and other long-term employee benefits

Grup menyelenggarakan program imbalan pasca kerja ("IPK") dan imbalan kerja jangka panjang lainnya ("IJPL"), sebagai berikut:

The Group provides post-employment benefits ("PEB") and other long-term employee benefits ("OLTEB") plans as follows:

1. Program imbalan pascakerja

1. Post-employment benefit plans

i. Program pensiun

i. Pension plan

Grup memberikan Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP") kepada karyawannya yang dikelola oleh Dana Pensiun PPIP-Pusri. Pendirian Dana Pensiun telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui KEP-3077/NB.1/2014 pada tanggal 17 September 2014.

The Group provides a Defined Contribution Pension Plan ("DCPP") to its employees managed by the Dana Pensiun DCPP-Pusri. The establishment of the Pension Fund has been approved by the Financial Services Authority through KEP-3077/NB.1/2014 dated 17 September 2014.

Grup juga menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") untuk karyawan yang bekerja sebelum periode tahun 2007, dimana peserta dijamin dengan manfaat panjang bulanan seumur hidup dengan kenaikan otomatis sebesar 6% setiap tahun. Iuran program ini seluruhnya ditanggung oleh Grup.

The Group also provides a Defined Benefit Pension Program ("DBPP") for employees who work before the period of 2007. Under this plan, participants are guaranteed a lifetime pension benefit with 6% automatic increase every year. The total contribution of this program is borne by the Group.

Pada Juni 2024, terdapat perubahan atas kenaikan manfaat pensiun. Kenaikan yang sebelumnya sebesar 6% setiap tahun untuk periode 2003 hingga 2024 berubah menjadi 2% per tahun untuk periode 2025 hingga 2027.

In June 2024, there was change in the increase of pension benefits. The increase, which was previously 6% annually for the period from 2003 to 2024, was changed to 2% annually for the period from 2025 to 2027.

ii. Imbalan pascakerja lainnya

ii. Other post-employment benefits

Grup memberikan imbalan kerja lainnya dalam bentuk manfaat pesangon.

The Group provides other employee benefits in the form of terminations benefits.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/53 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

b. Program imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

2. Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan cuti besar dan penghargaan bakti kerja sesuai Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") antara Grup dan serikat pekerja.

c. Liabilitas imbalan pascakerja

Liabilitas imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen. Tabel berikut menyajikan ikhtisar liabilitas imbalan pascakerja sebagaimana tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Perusahaan		
IPK	2,840,109	2,647,597
IJPL	<u>119,993</u>	<u>83,191</u>
	<u>2,960,102</u>	<u>2,730,788</u>
Nilai wajar aset program	<u>(2,174,719)</u>	<u>(2,206,920)</u>
Jumlah - Perusahaan	<u>785,383</u>	<u>523,868</u>
Imbalan pascakerja - entitas anak	<u>225</u>	<u>225</u>
Jumlah liabilitas imbalan pascakerja	<u>785,608</u>	<u>524,093</u>
Dikurangi:		
Liabilitas imbalan pascakerja bagian jangka pendek (Catatan 18a)	<u>(83,306)</u>	<u>(47,634)</u>
Liabilitas imbalan pascakerja bagian jangka panjang	<u>702,302</u>	<u>476,459</u>

18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)

b. Post-employment benefit plans and other long-term employee benefits (continued)

2. Other long-term employee benefits

The Group provides long service leave and long service award in accordance with Collective Labour Agreement ("CLA") between the Group and the labor union.

c. Post-employment benefits liabilities

The employee benefits liabilities are calculated by independent actuaries. The table below presents a summary of the post-employment benefits liabilities reported in the consolidated statement of financial position:

The Company
PEB
OLTEB
<i>Fair value of plan assets</i>
<i>Total - the Company</i>
<i>Post-employment benefit liability - subsidiary</i>
Total post-employment benefits liabilities
<i>Less:</i>
<i>Short-term portion of post-employment benefits liabilities (Note 18a)</i>
<i>Long-term portion of post-employment benefits liabilities</i>

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/54 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

**18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES
(continued)**

c. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

c. Post-employment benefits liabilities (continued)

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

The movements of Company's post-employment benefits liabilities were as follows:

	31 Desember/December 2025				
	IPK/PEB	Nilai wajar aset program/ Fair value of plan assets	IJPL/OLTEB	Nilai kini kewajiban/ Present value of obligations	
	Nilai kini kewajiban/ Present value of obligations		Nilai kini kewajiban/ Present value of obligations	Jumlah/ Total	
Pada 1 Januari 2025	(2,647,597)	2,206,920	(83,191)	(523,868)	As at 1 January 2025
Biaya jasa kini	(49,608)	-	(36,024)	(85,632)	Current service cost
Biaya jasa lalu	7,253	-	(6,023)	1,230	Past service cost
Biaya bunga bersih	(170,968)	-	(5,035)	(176,003)	Net interest cost
Pendapatan bunga	(10,134)	145,385	-	135,251	Interest income
Imbalan di luar provisi	(1,250)	-	-	(1,250)	Excess benefit
Kerugian aktuarial bersih yang diakui	-	-	(8,375)	(8,375)	Net actuarial loss
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	(224,707)	145,385	(55,457)	(134,779)	Balance recognised in profit or loss
Pengukuran kembali: Imbal hasil aset program non-bunga - bersih	-	82,403	-	82,403	Remeasurements: Return on plan assets excluding interest income - net
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(50,579)	-	-	(50,579)	Actuarial loss from change in financial assumptions
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	-	-	-	-	Actuarial loss from change in demographic assumptions
Kerugian aktuarial dari penyesuaian pengalaman	(134,047)	-	-	(134,047)	Actuarial loss from experience adjustment
Perubahan dampak batas atas aset (tidak termasuk bunga atas dampak batas aset)	(64,305)	-	-	(64,305)	Change in effect of asset ceiling excluding interest
Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(248,931)	82,403	-	(166,528)	Balance recognised in other comprehensive income
Pembayaran dari program:					Payments from plans:
Pembayaran iuran	-	1,665	-	1,665	Contribution payments
Imbalan yang dibayar	281,126	(261,654)	18,655	38,127	Benefit payments
Liabilitas imbalan pascakerja pada 31 Desember 2025	(2,840,109)	2,174,719	(119,993)	(785,383)	Post-employment benefit liabilities as at 31 December 2025

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/55 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

**18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES
(continued)**

c. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

c. Post-employment benefits liabilities (continued)

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The movements of Company's post-employment benefits liabilities were as follows: (continued)

31 Desember/December 2024					
	IPK/PEB		IJPL/OLTEB		
	Nilai kini kewajiban/ <i>Present value of obligations</i>	Nilai wajar aset program/ <i>Fair value of plan assets</i>	Nilai kini kewajiban/ <i>Present value of obligations</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Pada 1 Januari 2024	(2,795,906)	2,192,875	(71,866)	(674,897)	As at 1 January 2024
Biaya jasa kini	(39,925)	-	(29,153)	(69,078)	Current service cost
Biaya jasa lalu	535,784	-	-	535,784	Past service cost
Biaya bunga bersih	(178,504)	-	(3,939)	(182,443)	Net interest cost
Pendapatan bunga	(4,712)	143,002	-	138,290	Interest income
Imbalan di luar provisi	(732)	-	-	(732)	Excess benefit
Kerugian aktuarial bersih yang diakui	-	-	(9,119)	(9,119)	Net actuarial loss
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	311,911	143,002	(42,211)	412,702	Balance recognised in profit or loss
Pengukuran kembali: Imbal hasil aset program non-bunga - bersih	-	(11,920)	-	(11,920)	Remeasurements: Return on plan assets excluding interest income - net
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(136,393)	-	-	(136,393)	Actuarial loss from change in financial assumptions
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	(163,457)	-	-	(163,457)	Actuarial loss from change in demographic assumptions
Kerugian aktuarial dari penyesuaian pengalaman	(83,975)	-	-	(83,975)	Actuarial loss from experience adjustment
Perubahan dampak batas atas aset (tidak termasuk bunga atas dampak batas aset)	(65,620)	-	-	(65,620)	Change in effect of asset ceiling excluding interest
Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(449,445)	(11,920)	-	(461,365)	Balance recognised in other comprehensive income
Pembayaran dari program:					Payments from plans:
Pembayaran iuran	-	145,383	-	145,383	Contribution payments
Imbalan yang dibayar	285,843	(262,420)	30,886	54,309	Benefit payments
Liabilitas imbalan pascakerja pada 31 Desember 2024	(2,647,597)	2,206,920	(83,191)	(523,868)	Post-employment benefit liabilities as at 31 December 2024

Pada tanggal 31 Desember 2025, nilai wajar aset program manfaat pasti pascakerja yang terbentuk pada Dana Pensiun Pusri adalah sebesar Rp2.174.719 (2024: Rp2.206.920).

Sebagian besar aset program ditempatkan dalam bentuk investasi deposito berjangka dan obligasi.

As at 31 December 2025, the fair value of plan assets in Dana Pensiun Pusri were amounting to Rp2,174,719 (2024: Rp2,206,920).

These plan assets were mainly placed in the form of investments in time deposits and bonds.

Lampiran 5/56 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES
(continued)

d. Asumsi-asumsi aktuarial

d. Actuarial assumptions

Provisi imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") Steven & Mourits, aktuaris independen, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya masing - masing tertanggal 16 Februari 2026 dan 6 Januari 2025.

Provision for employee benefits as at 31 December 2025 and 2024 were calculated by Actuarial Consulting Office ("KKA") Steven & Mourits, an independent actuary, as stated in its reports dated 16 February 2026 and 6 January 2025, respectively.

Asumsi-asumsi aktuarial signifikan yang diterapkan dalam perhitungan liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk Grup adalah sebagai berikut:

Significant actuarial assumptions applied in the calculation of post-employment benefit obligations and other long-term employment benefits for the Group are as follows:

	2025	2024	
Tingkat diskonto per tahun	4.90% - 6.60%	6.95% - 7.15%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji:			Salary growth rate:
Penghasilan dana pensiun	1.00%	1.00%	Pension fund
Manfaat pensiun	6.00%	6.00%	Pension benefit
Imbalan pascakerja lainnya	6.00%	6.00%	Other post-employment benefits
Program pensiun	7.00%	7.00%	Pension program
Tabel mortalitas	TMI 2019	TMI 2019	Mortality table
Usia pensiun normal (dalam tahun)	56	56	Normal retirement age (in years)

Analisa sensitivitasSensitivity analysis

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the post-employment benefits and other long-term benefits liabilities to changes in the principal actuarial assumptions is as follow:

	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1.00%	Penurunan sebesar/ Decrease by 6,00%	Kenaikan sebesar/ Increase by 5,97%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1.00%	Kenaikan sebesar/ Increase by 1,80%	Penurunan sebesar/ Decrease by 2,24%	Salary growth rate

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode projected unit credit di akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban imbalan pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The sensitivity analysis is based on a change in one assumption while holding all of the other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligations to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied for calculating the defined benefit obligations that are recognised within the consolidated statement of financial position.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/57 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

d. Asumsi-asumsi aktuarial (lanjutan)

Grup terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada risiko yang timbul dari perubahan tingkat pengembalian obligasi pemerintah. Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto dengan mengacu pada tingkat pengembalian obligasi pemerintah. Penurunan tingkat pengembalian obligasi pemerintah akan meningkatkan liabilitas program.

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES
(continued)

d. Actuarial assumptions (continued)

The Group is exposed to a number of risks through its defined post-employment benefits and other long-term benefits plans, which include but are not limited to the risk from the movements of the government bond yield. The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields. A decrease in government bond yield will increase the plan liabilities

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits is as follow:

	2025				Jumlah/ Total	
	Kurang dari 1 tahun/ Less than a year	Antara 1 sampai 2 tahun/ Between 1-2 years	Antara 2 sampai 5 tahun/ Between 2-5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years		
IPK	263,732	258,527	724,977	1,993,921	3,241,157	PEB
IJPL	83,306	70,937	284,616	4,681,677	5,120,536	OLTEB
	347,038	329,464	1,009,593	6,675,598	8,361,693	

19. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut:

19. SHARE CAPITAL

As at 31 December 2025 and 2024, the composition of the shareholders were as follows:

Pemegang saham	Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh/ Number of share issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Jumlah/ Amount	Shareholders
Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Republik Indonesia	1	0,0000	1	Class A Dwiwarna share The Government of the Republic of Indonesia
Saham Seri B PT Pupuk Indonesia (Persero) YKKP	5,799,985 14	99,9998 0,0002	5,799,985 14	Class B shares PT Pupuk Indonesia (Persero) YKKP
Jumlah	5,800,000	100	5,800,000	Total

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/58 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pemegang saham Seri A memperoleh hak istimewa tertentu sebagai tambahan atas hak yang diperoleh pemegang saham Seri B. Hak istimewa tersebut antara lain mencakup hak menyetujui penunjukkan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

19. SHARE CAPITAL (continued)

The holder of series A shares has certain special rights in addition to the rights held by the holders of series B shares. Those special rights among others include the rights to approve the appointment and dismissal of members of the Boards of Commissioners, and Directors and amendments to the Articles of Association of the Company.

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

20. ADDITIONAL PAID-IN-CAPITAL

The additional paid-in-capital as at 31 December 2025 and 2024 were as follows:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Selisih nilai transaksi <i>spin-off</i> dengan PT Pupuk Indonesia (Persero)	(404,668)	(404,668)	<i>Excess of proceeds spin-off with PT Pupuk Indonesia (Persero)</i>
Perbedaan jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi pada PT Pupuk Indonesia Logistik	<u>70,792</u>	<u>70,792</u>	<i>Difference between the purchase consideration and the carrying value of investment in PT Pupuk Indonesia Logistik</i>
	<u><u>(333,876)</u></u>	<u><u>(333,876)</u></u>	

Berdasarkan laporan konsultan independen, saldo awal *spin-off* laporan posisi keuangan Grup per 1 Januari 2011 adalah sebesar Rp77.817.

Based on independent consultant report, the spin-off opening balance on the statement of financial position of the Group as at 1 January 2011 was amounting to Rp77,817.

Berdasarkan keputusan pemegang saham Grup di luar Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tentang tindak lanjut atas keputusan RUPS pemisahan (*spin-off*) PT Pupuk Indonesia (Persero) dan RUPS PT Pupuk Indonesia (Persero) tentang persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2010 tertanggal 28 Juni 2010 dan berita acara rekonsiliasi liabilitas perpajakan antara PI dengan Grup tertanggal 29 Desember 2011, uang muka dividen sebesar Rp126.098, *pooling of funds* sebesar Rp54.967, Pendanaan Program Usaha Mikro dan Kecil ("PPUMK") sebesar Rp8.890 serta pajak sebelum *spin-off* sebesar Rp111.127 merupakan liabilitas yang dibebankan kepada Grup.

Based on the decision of the Group's shareholders outside the General Meeting of Shareholders ("GMS"), regarding the GMS decision about spin-off of PT Pupuk Indonesia (Persero) and GMS of PT Pupuk Indonesia (Persero) on the approval of annual reports and ratification of the 2010 financial statements dated 28 June 2010 and the minutes of tax liability reconciliation between PI and the Group dated 29 December 2011, the advance of dividend amounted to Rp126,098, pooling of funds amounted to Rp54,967, Funding of the Partnership Program Micro and Small Business ("PPUMK") amounted to Rp8,890 and taxes before spin-off amounting to Rp111,127 were obligations charged to the Group.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Aset pajak tangguhan sebelum spin-off sebesar Rp25.769 timbul sebagai akibat dari penyerahan aset dari PI kepada Perusahaan yang memakai nilai buku dari aset tersebut sehingga saldo pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan metode penyusutan aset tetap antara akuntansi dan perpajakan (komersial dan fiskal) harus dihapuskan karena nilai aset yang diserahkan ke Perusahaan merupakan nilai perolehan awal aset Perusahaan sehingga tidak ada akumulasi penyusutan dari aset tersebut.

Pada tahun 2015, Grup melakukan transaksi dengan entitas sepengendali PT Pupuk Indonesia Logistik sehingga terdapat perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "tambahan modal disetor" sejumlah Rp70.792.

20. ADDITIONAL PAID-IN-CAPITAL (continued)

Deferred tax assets before spin-off amounting to Rp25,769 were incurred as a result of assets transfer from PI to the Company using book value of the assets thus the deferred tax balances which are derived from the difference between accounting and taxation depreciation method (commercial and fiscal) should be eliminated because the value of the assets given to the Company is an acquisition value of the Company's assets so there were no accumulated depreciation of the assets.

In 2015, the Group entered into a transaction with an entity under common control PT Pupuk Indonesia Logistik so there was a difference between the purchases consideration and the carrying value of investments obtained from this transaction which was recorded in "additional paid-in-capital" amounting to Rp70,792.

21. PENCADANGAN SALDO LABA DAN DIVIDEN

Mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, perusahaan diwajibkan untuk menyisihkan cadangan wajib dari keuntungan paling sedikit sebesar 20% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan RUPS Kinerja Tahun Buku 2024 tanggal 24 Juni 2025 dan RUPS Kinerja Tahun Buku 2023 tanggal 22 Juli 2024, Perusahaan mencadangkan saldo laba masing-masing sebesar Rp915.771 dan Rp855.877 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024. Cadangan yang telah ditentukan penggunaannya (*appropriated*) meliputi cadangan terkait pemenuhan kewajiban sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas dan cadangan umum lainnya.

Sebagaimana telah diputuskan dalam RUPS mengenai pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2024 berdasarkan Akta Notaris No. 6 oleh Notaris Lumassia S.H. tanggal 24 Juni 2025, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp162.040.

Sebagaimana telah diputuskan dalam RUPS mengenai pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2023 berdasarkan Akta Notaris No. 11 oleh Notaris Lumassia S.H. tanggal 22 Juli 2024, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp343.139.

21. APPROPRIATIONS OF RETAINED EARNINGS AND DIVIDEND

Under Indonesian Limited Company Law, the company is required to set up a statutory reserve from profits amounting to at least 20% of issued and fully paid share capital.

Based on the GMS for the Financial Year 2024 dated 24 June 2025 and GMS for the Financial Year 2023 dated 22 July 2024, the Company had appropriated retained earnings of Rp915,771 and Rp855,877 for the years ended 31 December 2025 and 2024, respectively. The reserves that have been designated for specific use (*appropriated*) include reserves related to fulfilling obligation in accordance with the Indonesian Limited Company Law and other general reserves.

As resolved during the GMS concerning the approval of the Consolidated Financial Statements for the year 2024 based on Notarial Deed No. 6 by Notary Lumassia S.H. dated 24 June 2025, the shareholders approved cash dividend of Rp162,040.

As resolved during the GMS concerning the approval of the Consolidated Financial Statements for the year 2023 based on Notarial Deed No. 11 by Notary Lumassia S.H. dated 22 July 2024, the shareholders approved cash dividend of Rp343,139.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/60 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PENDAPATAN

22. REVENUE

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Penjualan pupuk			Fertiliser sales
Subsidi			Subsidy
Urea sektor pangan	2,243,876	2,398,770	Urea food sector
Non-urea sektor pangan	557,671	690,090	Nonurea food sector
Subsidi Pemerintah			Government subsidy
(Catatan 6a)	7,582,900	6,576,723	(Note 6a)
Mutasi pendapatan subsidi yang belum ditagih (Catatan 6c)	<u>39,653</u>	<u>(19,291)</u>	Movement of unbilled subsidy income (Note 6c)
	<u>10,424,100</u>	<u>9,646,292</u>	
 Non-subsidi			 Non-subsidy
Urea sektor perkebunan	953,692	1,298,640	Urea plantation sector
Urea sektor industri	923,139	953,454	Urea industry sector
Urea sektor retail	474,314	670,320	Urea retail sector
Non-urea sektor industri	189,944	-	Non-urea industry sector
Non-urea sektor retail	65,905	39,910	Non-urea retail sector
Non-urea sektor perkebunan	<u>2,356</u>	<u>1,988</u>	Non-urea plantation sector
	<u>2,609,350</u>	<u>2,964,312</u>	
 Pendapatan non-pupuk			 Non-fertiliser revenue
Amonia	673,035	784,773	Ammonia
Lainnya	<u>167,837</u>	<u>137,488</u>	Others
	<u>840,872</u>	<u>922,261</u>	
 Jumlah	<u>13,874,322</u>	<u>13,532,865</u>	 Total
Rincian penjualan berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:			Details of the sales, based on the customers were as follows:
	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Pemerintah Republik Indonesia (Catatan 28)	<u>7,622,553</u>	<u>6,557,432</u>	Government of the Republic of Indonesia (Note 28)
Pihak berelasi (Catatan 28)			Related parties (Note 28)
Penjualan pupuk:			Fertiliser sales:
- Subsidi	90,790	190,973	Subsidy -
- Non-subsidi	472,725	292,229	Non-subsidy -
Penjualan non-pupuk	233,627	379,010	Non-fertiliser sales
Lainnya	<u>121,931</u>	<u>93,246</u>	Others
	<u>919,073</u>	<u>955,458</u>	
 Pihak ketiga			 Third parties
Penjualan pupuk:			Fertiliser sales:
- Subsidi	2,710,757	2,897,887	Subsidy -
- Non-subsidi	2,136,628	2,672,083	Non-subsidy -
Penjualan non-pupuk	455,333	426,486	Non-fertiliser sales
Lainnya	<u>29,978</u>	<u>23,519</u>	Others
	<u>5,332,696</u>	<u>6,019,975</u>	
 Jumlah	<u>13,874,322</u>	<u>13,532,865</u>	 Total

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/61 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan berdasarkan kegiatan operasi Grup adalah sebagai berikut:

23. COST OF REVENUES

The details of cost of revenues based on the Group's operations are as follows:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Beban produksi			Cost of production
Bahan baku dan bahan pembantu	8,575,825	7,835,774	<i>Raw materials and supporting materials</i>
Beban penyusutan (Catatan 11)	1,019,665	1,017,916	<i>Depreciation expenses (Note 11)</i>
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	891,347	841,766	<i>Salaries, wages and employees welfare</i>
Biaya pengangkutan	840,227	832,770	<i>Transportation expenses</i>
Biaya pemeliharaan	296,300	317,599	<i>Maintenance expenses</i>
Penyesuaian beban imbalan pascakerja - biaya jasa lalu	-	(331,567)	<i>Adjustment of post-employment benefit expense - past service cost</i>
Lainnya	261,288	318,909	<i>Others</i>
	<u>11,884,652</u>	<u>10,833,167</u>	
 Persediaan barang jadi dan barang dalam proses:			 <i>Finished goods and work in process inventories:</i>
Awal tahun	1,121,071	1,722,742	<i>Beginning of the year</i>
Pembelian pupuk NPK	-	251,951	<i>Purchase of NPK fertiliser</i>
Akhir tahun	<u>(892,336)</u>	<u>(1,121,071)</u>	<i>End of the year</i>
Jumlah	<u>12,113,387</u>	<u>11,686,789</u>	Total

24. BEBAN PENJUALAN

24. SELLING EXPENSES

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Beban pelayanan	111,567	125,830	<i>Services expenses</i>
Gaji dan kesejahteraan karyawan	52,008	55,396	<i>Salaries and employees welfare</i>
Distribusi	48,270	83,245	<i>Distribution</i>
Beban penyusutan (Catatan 11)	32,522	32,772	<i>Depreciation expenses (Note 11)</i>
Beban pemeliharaan	15,142	22,302	<i>Maintenance expenses</i>
Beban sewa	10,523	5,548	<i>Rent expenses</i>
Beban perjalanan dinas	2,035	2,182	<i>Travel expenses</i>
Penyesuaian beban imbalan pascakerja - biaya jasa lalu	-	(29,000)	<i>Adjustment of post-employment benefit expense - past service cost</i>
Lainnya	28,150	23,457	<i>Others</i>
Jumlah	<u>300,217</u>	<u>321,732</u>	Total

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/62 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	265,562	262,728	<i>Salaries and employees welfare</i>
Jasa konsultan	48,474	48,629	<i>Consulting services</i>
Beban penyuluhan	35,045	29,649	<i>Counselling expenses</i>
Listrik, air dan utilitas	30,805	24,066	<i>Electricity, water and utilities</i>
Beban penyusutan (Catatan 11)	14,027	13,734	<i>Depreciation expenses (Note 11)</i>
Beban pemeliharaan	9,881	6,827	<i>Maintenance expenses</i>
Beban perjalanan dinas	8,775	9,036	<i>Travel expenses</i>
Beban pajak	5,998	3,944	<i>Tax expenses</i>
Asuransi	2,363	1,392	<i>Insurance</i>
Penyesuaian beban imbalan pascakerja - biaya jasa lalu	-	(164,275)	<i>Adjustment of post-employment benefit expense - past service cost</i>
Lainnya	38,423	63,575	<i>Others</i>
Jumlah	<u>459,353</u>	<u>299,305</u>	Total

26. BIAYA KEUANGAN

26. FINANCE COSTS

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Beban bunga pinjaman	118,444	262,114	<i>Interest expense from borrowings</i>
Biaya keuangan lainnya	10,712	7,703	<i>Other financing costs</i>
Jumlah	<u>129,156</u>	<u>269,817</u>	Total

27. (BEBAN)/PENDAPATAN LAINNYA - BERSIH

27. OTHER (EXPENSE)/INCOME - NET

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Pendapatan denda dan klaim	24,083	270,171	<i>Penalty and claim income</i>
Keuntungan atas penjualan aset tetap	42	44,180	<i>Gain on the sales of fixed assets</i>
Rugi selisih kurs - bersih	(67,255)	(15,918)	<i>Foreign exchange loss - net</i>
Lainnya - bersih	(6,803)	125,042	<i>Others - net</i>
Jumlah	<u>(49,933)</u>	<u>423,475</u>	Total

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/63 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak berelasi, yang terafiliasi dengan Grup melalui kepemilikan langsung dan tidak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama. Harga jual atau beli antara pihak-pihak berelasi ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

28. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Group entered into trade and other transactions with related parties, which are affiliated with the Group through equity ownership, either direct or indirect, and/or under common control. Sales or purchase price among related parties is made based on terms agreed by the parties.

Nature of relationship and accounts/transactions with related parties are as follows:

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan dengan pihak berelasi/Nature of relationship	Sifat transaksi/ Nature of transaction
Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Government of the Republic of Indonesia</i> PT Pupuk Indonesia (Persero)	Pemegang saham utama/ <i>Ultimate parent</i> Entitas induk/ <i>Parent entity</i>	Pendapatan subsidi pupuk dan piutang subsidi/ <i>Subsidy fertiliser revenue and subsidy receivables</i> Sewa, joint cost dan pinjaman jangka panjang/ <i>Lease, joint cost and long-term loan</i>
YKKP	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Pinjaman jangka panjang/ <i>Long-term loan</i>
PT Perkebunan Nusantara IX PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Pertamina Patra Niaga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Syariah Indonesia Tbk PT BGR Logistik Indonesia PT Perkebunan Nusantara I PT Semen Baturaja (Persero) Dinas Pertanian Tanaman Pangan PT Bukit Asam (Persero) Tbk PT Asuransi Jasa Indonesia PT Adhi Karya (Persero) Tbk Direktorat Jenderal Tanaman Pangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PT Pertamina Hulu Energi Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu PT Telekomunikasi Selular PT Sang Hyang Seri PT Pertamina EP, dan/and PT Pertamina Gas	Entitas di bawah kendali Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Entities under control by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Penjualan pupuk, penempatan giro dan deposito, kredit investasi, kredit modal kerja, pembelian bahan baku, kontrak asuransi, penyedia jasa pergudangan dan logistik/ <i>Sales of fertiliser, placement of current accounts and time deposits, investment credit facility, working capital loans facility, purchase of raw material, insurance contract, warehousing provider and logistics service</i>
PT Pupuk Indonesia Niaga PT Pupuk Kujang PT Petrokimia Gresik PT Pupuk Iskandar Muda PT Rekayasa Industri PT Pupuk Indonesia Logistik, PT Pupuk Kalimantan Timur PT Puspetindo Gresik PT Kaltim Industrial Estate PT Sigma Utama PT Tracon Industri PT Graha Sarana Gresik PT Petrosida Gresik, dan/and PT Clariant Kujang Catalysts	Entitas sepengendali/ <i>Under common control entities</i>	Penjualan dan pembelian pupuk, pembelian bahan baku, jasa pengangkutan pupuk, jasa konstruksi, pendapatan denda/ <i>Sales and purchase of fertiliser, purchase of raw material, fertiliser delivery services, construction services, penalty income</i>
Dewan Komisaris dan Direksi/ <i>Boards of Commisioners and Directors</i>	Personil manajemen kunci/ <i>Key management personnel</i>	Gaji dan imbalan kerja/ <i>Salaries and employee benefits</i>

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/64 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**28. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED
PARTIES (continued)**

Rincian transaksi dan saldo

Details of transaction and balances

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Kas di bank		
Rupiah		
Bank Mandiri	95,961	241,005
BSI	25,534	86
BNI	22,653	6,281
BTN	5,062	13
BRI	4,163	3,260
USD		
Bank Mandiri	47,010	854
BNI	285	119
BRI	49	25
BTN	25	97
BSI	18	18
Jumlah	<u>200,760</u>	<u>251,758</u>
Piutang usaha		
PT Petrokimia Gresik	111,096	57,695
PT Pupuk Iskandar Muda	46,828	-
PT Pupuk Indonesia Niaga	4,115	46,954
PT Pupuk Indonesia (Persero)	1,110	120
Lainnya	871	3,864
Jumlah	<u>164,020</u>	<u>108,633</u>
Piutang subsidi		
Pemerintah Republik Indonesia	<u>2,430,860</u>	<u>43,205</u>
Piutang subsidi yang belum ditagih		
Pemerintah Republik Indonesia	<u>148,265</u>	<u>108,612</u>
Piutang lainnya		
PT Petrokimia Gresik	17,678	15,399
PT Pupuk Indonesia (Persero)	16,955	280
PT Pupuk Iskandar Muda	9,743	1,659
PT Pupuk Kalimantan Timur	8,947	7,027
PT Pupuk Kujang	8,188	10,183
PT Rekayasa Industri	2,646	9,702
PT Pupuk Indonesia Logistik	746	13
Lainnya	7,083	21,256
Jumlah	<u>71,986</u>	<u>65,519</u>

**Cash in banks
Rupiah**

Bank Mandiri
BSI
BNI
BTN
BRI

USD

Bank Mandiri
BNI
BRI
BTN
BSI

Total

Trade receivables

PT Petrokimia Gresik
PT Pupuk Iskandar Muda
PT Pupuk Indonesia Niaga
PT Pupuk Indonesia (Persero)
Others

Total

Subsidy receivables

Government of the
Republic of Indonesia

Unbilled subsidy receivables

Government of the
Republic of Indonesia

Other receivables

PT Petrokimia Gresik
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Pupuk Iskandar Muda
PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Kujang
PT Rekayasa Industri
PT Pupuk Indonesia Logistik
Others

Total

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/65 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**28. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED
PARTIES (continued)**

Rincian transaksi dan saldo (lanjutan)

Details of transaction and balances (continued)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Utang usaha		
PT Pupuk Indonesia Logistik	40,865	-
PT Pupuk Indonesia (Persero)	23,567	-
PT Clariant Kujang Catalysts	22,490	-
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	12,587	37,962
PT BGR Logistik Indonesia	5,811	3,546
PT Tracon Industri	3,125	-
Dana Pensiun PPIP-Pusri	3,034	-
PT Semen Baturaja (Persero)	2,547	1,331
PT Perkebunan Nusantara I	-	2,506
Lainnya	7,270	6,942
Jumlah	<u>121,296</u>	<u>52,287</u>
Kelebihan subsidi yang dibayar		
Pemerintah Republik Indonesia	-	31,921
Utang lainnya		
Karyawan	69,229	506
Lainnya	397	2,452
Jumlah	<u>69,626</u>	<u>2,958</u>
Utang retensi		
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	51,277	15,926
Pinjaman pemegang saham		
PT Pupuk Indonesia (Persero)	-	775,000
Pinjaman jangka panjang		
BNi	2,157,809	569,347
Bank Mandiri	1,160,136	546,873
BSI	540,341	254,710
BRI	527,193	254,232
BTN	486,281	229,227
YKKP	7,194	2,804
PT Pupuk Indonesia	-	775,000
Jumlah	<u>4,878,954</u>	<u>2,632,193</u>
Pendapatan		
Pemerintah Republik Indonesia	7,622,553	6,557,432
PT Pupuk Indonesia Niaga	336,457	385,042
PT Petrokimia Gresik	249,610	420,523
PT Pupuk Iskandar Muda	229,677	8,133
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	37,259	48,367
PT Pupuk Indonesia (Persero)	19,427	8,041
PT Pupuk Kalimantan Timur	15,923	1,944
PT Pupuk Kujang	13,251	13,570
PT Petrosida Gresik	-	35,230
PT Sang Hyang Seri (Persero)	-	13,202
Lainnya	17,469	21,406
Jumlah	<u>8,541,626</u>	<u>7,512,890</u>
Pendapatan denda dan klaim		
PT Rekayasa Industri	-	246,565
Lainnya	-	3,660
Jumlah	<u>-</u>	<u>250,225</u>

Trade payables
PT Pupuk Indonesia Logistik
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Clariant Kujang Catalysts
PT Bukit Asam (Persero) Tbk
PT BGR Logistik Indonesia
PT Tracon Industri
Dana Pensiun PPIP-Pusri
PT Semen Baturaja (Persero)
PT Perkebunan Nusantara I
Others
Total
Excess subsidy paid
Government of the Republic of Indonesia
Other payables
Employees
Others
Total
Retention payables
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Shareholder loan
PT Pupuk Indonesia (Persero)
Long-term loans
BNi
Bank Mandiri
BSI
BRI
BTN
YKKP
PT Pupuk Indonesia
Total
Revenue
Government of the Republic of Indonesia
PT Pupuk Indonesia Niaga
PT Petrokimia Gresik
PT Pupuk Iskandar Muda
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Kujang
PT Petrosida Gresik
PT Sang Hyang Seri (Persero)
Others
Total
Penalty and claim income
PT Rekayasa Industri
Others
Total

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/66 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

Rincian transaksi dan saldo (lanjutan)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Pembelian		
PT Pertamina EP	2,875,084	2,695,179
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	745,971	571,293
PT Pertamina Gas	418,850	360,739
PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang	354,211	-
PT Pupuk Indonesia Logistik	301,555	317,242
PT BGR Logistik Indonesia	72,718	45,436
PT Petrokimia Gresik	23,225	364,196
PT Tracon Industri	22,614	-
PT Petrosida Gresik	11,884	-
PT Pupuk Indonesia Niaga	6,128	6,020
PT Pupuk Kujang	3,380	160,425
PT Bhandha Ghara Rekso	341	162
Jumlah	<u>4,835,961</u>	<u>4,520,692</u>

Kompensasi manajemen kunci

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan personil manajemen kunci.

Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Remunerasi	28,799	38,527

**28. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED
PARTIES (continued)**

Details of transaction and balances (continued)

Purchases
PT Pertamina EP
PT Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Pertamina Gas
PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang
PT Pupuk Indonesia Logistik
PT BGR Logistik Indonesia
PT Petrokimia Gresik
PT Tracon Industri
PT Petrosida Gresik
PT Pupuk Indonesia Niaga
PT Pupuk Kujang
PT Bhandha Ghara Rekso

Total

Key management compensation

The Boards of Commissioners and Directors of the Company are considered as key management personnel.

Remuneration for the Boards of Commissioners and Directors of the Company for the years ended 31 December 2025 and 2024 were as follows:

Remuneration

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/67 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

29. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

31 Desember/December 2025			
Jumlah/ Total	Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ Measured at amortised cost	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya/ Measured at fair value through other comprehensive income	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	305,988	305,988	- Cash and cash equivalents
Piutang usaha	200,100	200,100	- Trade receivables
Piutang subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia	2,430,860	2,430,860	- Subsidy receivables from the Government of Republic Indonesia
Piutang subsidi yang belum ditagih	148,265	148,265	- Unbilled subsidy receivables
Piutang lainnya	105,030	105,030	- Other receivables
Aset lancar lainnya	3,446	3,446	- Other current assets
Aset keuangan tidak lancar lainnya	56,389	-	56,389 Other non-current financial assets
Jumlah	3,250,078	3,193,689	56,389 Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang usaha	282,247	282,247	- Trade payables
Utang lainnya	229,512	229,512	- Other payables
Liabilitas yang masih harus dibayar	2,545,006	2,545,006	- Accrued liabilities
Pinjaman jangka panjang	8,141,871	8,141,871	- Long-term loans
Utang retensi	342,135	342,135	- Retention payables
Liabilitas sewa	29,631	29,631	- Lease liabilities
Jumlah	11,570,402	11,570,402	- Total
31 Desember/December 2024			
Jumlah/ Total	Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ Measured at amortised cost	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya/ Measured at fair value through other comprehensive income	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	703,733	703,733	- Cash and cash equivalents
Piutang usaha	198,067	198,067	- Trade receivables
Piutang subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia	43,205	43,205	- Subsidy receivables from the Government of Republic Indonesia
Piutang subsidi yang belum ditagih	108,612	108,612	- Unbilled subsidy receivables
Piutang lainnya	73,913	73,913	- Other receivables
Aset keuangan tidak lancar lainnya	45,440	-	45,440 Other non-current financial assets
Jumlah	1,172,970	1,127,530	45,440 Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang usaha	134,726	134,726	- Trade payables
Utang lainnya	24,885	24,885	- Other payables
Kelebihan subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia	31,921	31,921	- Excess subsidy paid by the Government of Republic of Indonesia
Liabilitas yang masih harus dibayar	2,179,985	2,179,985	- Accrued liabilities
Pinjaman jangka panjang	3,170,950	3,170,950	- Long-term loans
Utang retensi	133,386	133,386	- Retention payables
Liabilitas sewa	11,088	11,088	- Lease liabilities
Jumlah	5,686,941	5,686,941	- Total

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**30. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN**

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Grup terekspos berbagai risiko keuangan diantaranya: risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang asing, risiko tingkat harga komoditas, dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Tujuan dari manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko keuangan dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari ketidakpastian atau perubahan tak terduga dalam kondisi pasar dan kinerja keuangan konsolidasian Grup.

Grup menggunakan berbagai metode untuk mengukur risiko yang dihadapinya. Metode ini meliputi analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga, nilai tukar, risiko harga lainnya dan analisis umur piutang untuk risiko kredit.

a. Risiko pasar

Risiko nilai tukar mata uang asing

Perubahan nilai tukar telah, dan diperkirakan akan terus, memberikan pengaruh terhadap usaha dan arus kas Grup. Beberapa belanja modal dan pembelian bahan baku berupa gas alam diperkirakan akan terus didenominasi dengan mata uang USD.

Pada tanggal 31 Desember 2025, jika Rupiah melemah/menguat 1% terhadap mata uang asing dengan seluruh variabel lain tetap, maka laba sebelum pajak tahun berjalan berkurang/bertambah Rp64.731 pada tahun 2025 (2024: Rp64.052) terutama yang timbul sebagai akibat kerugian selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Risiko harga

Operasi Grup terekspos terhadap risiko pasar yang timbul dari volatilitas harga pupuk dan amonia di pasar global. Namun, aset dan liabilitas keuangan Grup tidak terkena dampak signifikan dari volatilitas tersebut karena penyelesaiannya didasarkan pada harga yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli, yang akan ditentukan pada saat penyerahan.

Grup berkeyakinan bahwa cara mengelola risiko atas harga komoditas yang paling baik adalah dengan menurunkan biaya produksi. Grup memiliki rencana untuk terus melakukan efisiensi yang antara lain dilakukan dengan peremajaan alat-alat produksi. Selain itu, Grup juga memperhitungkan kebutuhan permintaan dan penawaran pupuk dan amonia di pasar dunia.

**30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES**

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks as follows: market risk (including foreign currency exchange rates risk, commodity prices risk and interest rates risk), credit risk and liquidity risk. The objectives of the Group's risk management are to identify, analyse, measure, monitor and manage basic risks in order to safeguard the Group's long-term business continuity and to minimise potential losses arising from uncertainties or unexpected changes in market conditions and the Group's consolidated financial performance.

The Group uses various methods to measure risk to which it is exposed. These methods include sensitivity analysis in the case of interest rate, foreign exchange, other price risks and aging analysis for credit risk.

a. Market risk

Foreign exchange risk

Changes in exchange rates have affected and may continue to affect the Group's operations and cash flows. Some of the Group's capital expenditures and purchases of raw material in the form of natural gas are expected to continue to be denominated in the USD.

As at 31 December 2025, if the Rupiah had weakened/strengthened by 1% against the foreign currency with all other variables held constant, the profit for the year would have been lower/higher by Rp64,731 in 2025 (2024: Rp64,052) mainly as a result of foreign exchange losses on the translation of monetary assets and liabilities denominated in a foreign currency.

Price risk

The Group's operations are exposed to market risk arising from volatility in global fertiliser and ammonia prices. However, its financial assets and liabilities are not significantly affected by this volatility because their settlement is based on prices specified in sales and purchase agreements, which are determined at the time of delivery.

The Group believes that the best way to manage commodity price risk is by decreasing the production cost. The Group has plans to continuously reduce their cost by, among others, revitalising its production facilities. On the other hand, the Group also considered the supply and demand of fertiliser and ammonia in the global market.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**30. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

b. Risiko tingkat suku bunga

Risiko suku bunga Grup terutama timbul dari pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Risiko suku bunga dari kas di bank dan deposito tidak signifikan dan semua instrumen keuangan lainnya tidak dikenakan bunga. Grup memiliki pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga nilai wajar. Grup mengelola risiko dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan bunga mengambang.

Pada tanggal 31 Desember 2025, jika tingkat suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan panjang 100 basis poin lebih tinggi/lebih rendah, dengan asumsi semua variabel lain konstan, beban keuangan untuk tahun berjalan akan menjadi lebih tinggi/lebih rendah sebesar Rp20.583 (2024: Rp95.658).

c. Risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2025, jumlah maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp 3.248.808 (2024: Rp1.171.520). Risiko kredit terutama berasal dari penempatan dana pada bank, piutang usaha, piutang subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia, piutang subsidi yang belum ditagih, piutang lainnya, aset lancar lainnya dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

Semua kas di bank ditempatkan di bank asing dan lokal yang memiliki reputasi. Oleh karena itu Grup berkeyakinan bahwa risiko kredit atas aset keuangan ini adalah minimal.

Risiko kredit pada piutang subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia dan piutang subsidi yang belum ditagihkan dianggap rendah, karena pihak yang bersangkutan merupakan Pemerintah Republik Indonesia.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Grup memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, perjanjian yang mengikat secara hukum untuk penjualan pupuk, nonpupuk dan jasa lainnya yang telah dilakukan dan secara historis mempunyai tingkat yang rendah untuk piutang usaha yang bermasalah.

**30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

b. Interest risk

The Group's interest rate risk arises from short-term borrowings and long-term borrowings. The interest rate risk from cash in bank and deposits is not significant and all other financial instruments are non-interest bearing. The Group has borrowings with fixed and floating interest rates. Borrowings with floating interest rates are exposed to cashflow interest rate risk. Borrowings with fixed rates exposes the Group to fair value interest risk. The Group manages the risk by maintaining an appropriate mix of fixed and floating rate borrowings.

As at 31 December 2025, if interest rates on short-term and long-term borrowings had been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, the finance costs for the year would have been Rp20,583 higher/lower (2024: Rp95,658).

c. Credit risk

As at 31 December 2025, the total maximum exposure from credit risk was Rp3,248,808 (2024: Rp1,171,520). Credit risk arises from cash in banks, trade receivables, subsidy receivables from the Government of the Republic of Indonesia, unbilled subsidy receivables, other receivables, other current assets and other non-current financial assets.

All the cash in banks are placed in reputable foreign and local banks. Consequently, the Group believes the credit risk of such financial assets is minimal.

The credit risk on subsidy receivables from the Government of the Republic of Indonesia and unbilled subsidy receivables is considered low, since the counterparty is the Government of the Republic of Indonesia.

The management is confident in its ability to continue to control and maintain minimal exposure to credit risk, since the Group has clear policies on the selection of customers, legally binding agreements in place for the sale of fertiliser and non-fertiliser and other services rendered, and historically low levels of bad debts.

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**30. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

c. Risiko kredit (lanjutan)

Kebijakan umum Grup untuk penjualan pupuk, non-pupuk, dan jasa lainnya untuk pelanggan yang sudah ada dan pelanggan baru adalah sebagai berikut:

- (i) memilih pelanggan dengan kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik;
- (ii) menerima pelanggan baru dan penjualan pupuk, non-pupuk, dan jasa lainnya yang disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan delegasi kewenangan Grup; dan
- (iii) meminta pembayaran di muka untuk penjualan pupuk dan non-pupuk untuk pelanggan lama dan baru.

Piutang usaha terutama berasal dari pelanggan pihak ketiga dan pihak berelasi yang sudah ada lebih dari 12 bulan yang tersebar merata atas jumlah pelanggan yang besar. Grup juga melakukan evaluasi kredit atas kondisi keuangan pelanggannya secara berkala.

Seluruh piutang usaha Grup tidak mengandung komponen pendanaan yang signifikan sehingga Grup menerapkan 'pendekatan yang disederhanakan' untuk pengukuran kerugian kredit ekspektasian semua piutang usaha. Oleh karena itu, Grup tidak menilai apakah risiko kredit atas piutang telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan mengukur penyisihan kerugian ekspektasian sepanjang umur piutang.

Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, Grup menerapkan kombinasi dari kajian individual dan kajian kolektif. Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang secara individual dilakukan untuk pelanggan yang telah mengalami kesulitan pembayaran sesuai dengan periode yang telah ditentukan.

Untuk kajian kolektif, piutang dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit bersama dan hari lewat jatuh tempo. Tingkat kerugian ekspektasian didasarkan pada profil pembayaran pelanggan selama 36 bulan sebelum 1 Januari 2025 atau 31 Desember 2025 (2024: 36 bulan sebelum 1 Januari 2024 atau 31 Desember 2024) serta kerugian kredit historis yang dialami. Tingkat kerugian historis kemudian disesuaikan untuk mencerminkan informasi terkini dan informasi *forward-looking* mengenai faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk melunasi piutang.

**30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

c. Credit risk (continued)

The Group's general policies for sale of fertiliser, non-fertiliser and other services rendered to new and existing customers are as follows:

- (i) selecting customers with strong financial conditions and good reputations;*
- (ii) acceptance of new customers and sale of fertiliser and non-fertiliser and other services rendered being approved by the authorised personnel according to the Group's delegation of authority policy; and*
- (iii) requesting advance payments for sales of fertiliser and non-fertiliser for recurring and new customers.*

Trade receivables are mostly derived from third party and related party customers that have existed for more than 12 months that is spread over a large number of customers. The Group also performs credit evaluation on the financial condition of its customers on a regular basis.

All of the Group's trade receivables do not contain significant financing component and the Group accordingly applies the 'simplified approach' to measure the expected credit losses for all trade receivables. Therefore, the Group does not assess the significance of a change in the credit risk since initial recognition and measure the lifetime expected credit losses of receivables.

To measure the expected credit losses, the Group applied a combination of individual assessment and collective assessment. Calculation of allowance for impairment losses for individual receivables is provided for customers that have difficulties in fulfilling their obligations according to the defined period.

For the collective assessment, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due. The expected loss rates are based on the profile of payments from customers over a period of 36 months before 1 January 2025 or 31 December 2025 (2024: 36 months before 1 January 2024 or 31 December 2024) and historical credit losses. The historical loss rates are then adjusted to reflect current and forward-looking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the receivables.

Lampiran 5/71 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

d. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul dalam situasi dimana posisi arus kas mengindikasikan bahwa arus kas masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek. Untuk mengatur risiko likuiditas, Grup memonitor dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang diperkirakan cukup untuk mendanai kegiatan operasional Grup dan mengurangi pengaruh fluktuasi arus kas. Manajemen Grup juga secara rutin memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual, termasuk profil jatuh tempo pinjaman, dan secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk kesempatan memperoleh dana.

Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif dimana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (termasuk pembayaran pokok dan bunga).

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

d. Liquidity risk

Liquidity risk is defined as a risk that arises in situations where the cash inflow from short-term revenue is not enough to cover the cash outflow for short-term expenditures. To manage its liquidity risk, the Group monitors its level of cash and cash equivalents and maintains these at a level deemed adequate to finance the Group's operational activities and to mitigate the effect of fluctuations in the cash flow. The Group's management also regularly monitors projected and actual cash flow, including loan maturity profiles and continuously assesses the financial markets for opportunities to raise funds.

The following table analyses the Group's financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all non-derivative financial liabilities instruments for which the contractual maturities are essential for an understanding of the timing of the cash flows. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (including principal and interest payment).

	2025			Jumlah/ Total	
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun/ More than one year and less than five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years		
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha	282,247	-	-	282,247	Trade payables
Utang lainnya	229,512	-	-	229,512	Other payables
Liabilitas yang masih harus dibayar	2,545,006	-	-	2,545,006	Accrued liabilities
Liabilitas sewa	25,316	5,521	-	30,837	Lease liabilities
Pinjaman jangka panjang	1,015,644	7,100,922	4,030,922	12,147,488	Long-term loans
Jumlah	4,097,725	7,106,443	4,030,922	15,235,090	Total

Lampiran 5/72 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

d. Liquidity risk (continued)

	2024			Jumlah/ Total	
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun/ More than one year and less than five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years		
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha	134,726	-	-	134,726	Trade payables
Utang lainnya	24,885	-	-	24,885	Other payables
Kelebihan subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia	31,921	-	-	31,921	Excess of subsidy paid by the Government of Republic of Indonesia
Liabilitas yang masih harus dibayar	2,178,985	-	-	2,178,985	Accrued liabilities
Liabilitas sewa	8,019	3,828	-	11,847	Lease liabilities
Pinjaman jangka panjang	476,686	2,434,953	2,601,963	5,513,602	Long-term loans
Jumlah	2,855,222	2,438,781	2,601,963	7,895,966	Total

e. Estimasi nilai wajar

e. Fair value estimation

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan lainnya mendekati nilai wajarnya karena sifat jangka pendek dari instrumen keuangan.

As at 31 December 2025 and 2024, the carrying amounts of the other financial assets and liabilities approximated their fair values because of the short-term nature of the financial instruments.

Instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan pengukuran nilai wajarnya diungkapkan dengan tingkatan hierarki pengukuran nilai wajar sebagai berikut:

Financial instruments that are measured at fair value at consolidated statement of financial position date and the corresponding fair value are disclosed by level of the following fair value measurement hierarchy:

- Harga dikutip (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1).
- Input selain harga yang dikutip dari pasar yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya turunan dari harga) (Tingkat 2).
- Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1).
- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2).
- Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).

Lampiran 5/73 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

f. Manajemen risiko permodalan

Dalam mengelola permodalannya, Grup senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Grup juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Tidak ada perubahan pada pendekatan Grup dalam mengelola permodalannya selama tahun berjalan.

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

f. Capital risk management

In managing capital, the Group safeguards its ability to continue as a going concern and to maximise benefits to the shareholders and other stakeholders.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the efficiency of capital use based on operating cash flows and capital expenditures and also consideration of future capital needs.

The Group also seeks to maintain a balance between its level of borrowings and equity position in order to ensure the optimal capital structure and return. There were no changes in the Group's approach to capital management during the year.

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN PERIKATAN

i. Penugasan dari Pemerintah

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 15 tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Subsidi.

Pada tanggal 5 Maret 2025 dan 12 September 2025, PT Pupuk Indonesia (Persero) menerbitkan surat No. 08645/A/HM/C0101/ET/2025 dan No. 29494/A/HM/C0101/ET/2025 perihal Rayonisasi Pengadaan Pupuk Bersubsidi yang berlaku masing-masing terhitung sejak 5 Maret 2025 dan 12 September 2025. Atas pupuk bersubsidi yang telah disalurkan dengan menggunakan harga eceran tertinggi lama sebelum surat tersebut terbit, Perusahaan membukukan liabilitas yang masih harus dibayar atas kompensasi kepada para distributor selisih harga eceran tertinggi lama dan baru sebesar Rp61.883 (Catatan 15).

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

i. Public service obligation

Supply and distribution of subsidised fertiliser

Minister of Agriculture Regulation of the Republic of Indonesia No. 15 year 2025 on the Implementation of Presidential Regulation No. 6/2025 concerning the Governance of Subsidised Fertilisers

On 5 March 2025 and 12 September 2025, PT Pupuk Indonesia (Persero) issued letters No. 08645/A/HM/C0101/ET/2025 and No. 29494/A/HM/C0101/ET/2025 concerning the Zoning Policy for the Procurement of Subsidised Fertilisers, effective respectively as at 5 March 2025 and 12 September 2025. For the subsidised fertilisers which have been distributed by using the old highest retail price before the issuance of the letter, the Company has booked an accrued liability for the compensation to the distributors on the difference between the old and new highest retail price amounting to Rp61,883 (Note 15).

Lampiran 5/74 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN PERIKATAN
(lanjutan)

i. Penugasan dari Pemerintah (lanjutan)

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi
(lanjutan)

Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut:

Peraturan Menteri Pertanian/ Decree of the Minister of Agricultural	Tanggal terbit/ Date of issuance	Masa berlaku/ Effective period	Urea per Kilogram/ Urea per Kilogram	NPK per Kilogram/ NPK per Kilogram
Kepmentan No. 644 Tahun 2024	19 November/ November 2024	2025	2,250	2,300
Kepmentan No. 318 Tahun 2025	21 April/ April 2025	2025	2,250	2,300
Kepmentan No. 319 Tahun 2025	08 Juli/ July 2025	2025	2,250	2,300
Kepmentan No. 800 Tahun 2025	04 September/ September 2025	2025	2,250	2,300
Kepmentan No. 321 Tahun 2025	6 Oktober / October 2025	2025	2,250	2,300
Kepmentan No. 1117 Tahun 2025	22 Oktober/ October 2025	2025	1,800	1,840
Kepmentan No. 322 Tahun 2025	17 November/ November 2025	2025	1,800	1,840

ii. Pengadaan gas bumi

Pada tanggal 26 Februari 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") Republik Indonesia No. 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri yang menetapkan mengenai pengguna dan harga gas bumi tertentu untuk beberapa pengguna dengan rekanannya, termasuk Perusahaan.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)

i. Public service obligation (continued)

Supply and distribution of subsidised
fertiliser (continued)

The highest retail prices of subsidised fertilisers are as follows:

ii. Procurement of natural gas

On 26 Februari 2025, the Minister of Energy and Mineral Resources ("ESDM") of the Republic of Indonesia issued a decree No. 76.K/MG.01/MEM.M/2025 regarding Certain Natural Gas Users in the Industrial Sector which stipulates certain users and prices of natural gas for several users and their partners, including the Company.

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/75 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN PERIKATAN
(lanjutan)**

**31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(continued)**

ii. Pengadaan gas bumi (lanjutan)

ii. Procurement of natural gas (continued)

Perusahaan dan pemasok gas menandatangani perubahan perjanjian sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ESDM dengan rincian sebagai berikut:

The Company and gas suppliers entered into amendment of the agreement in accordance with the provisions of the Minister of ESDM with the following details:

Pemasok/ Supplier	Jenis kontrak/Contract type	Kuantitas/ Volume	Periode/ Period
PT Pertamina EP	Perjanjian Jual Beli gas alam antara PT Pertamina EP dan Perusahaan No.374A/SP/DIR/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan penambahan terakhir No.487A/SP/DIR/2024 tanggal 21 Juni 2024 dan perubahannya pada tanggal 8 Januari 2026 yang berlaku secara retrospektif/Sale and purchase of natural gas agreement between PT Pertamina EP and the Company No.374A/SP/DIR/2012 dated 20 Desember 2012 with the latest addition No.487A/SP/DIR/2024 dated 21 June 2024 and its amendments on 8 January 2026 which applied retrospectively.	95 BBTUD	1 Januari/ January 2024 - 31 Desember/ December 2028
PT Pertamina Gas	Perjanjian pengangkutan gas bumi antara PT Pertamina Gas dan Perusahaan No.850A/SP/DIR/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan penambahan terakhir No.532/SP/DIR/2024 tanggal 23 Juli 2024/Freight of natural gas agreement between PT Pertamina Gas and the Company No.850A/SP/DIR/2015 dated 30 Desember 2015 with the latest addition No.532/SP/DIR/2024 dated 23 July 2024.	40.35 – 95 MMSCFD	1 Januari/ January 2019 - 31 Desember/ December 2034
PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang	Perjanjian Jual Beli gas alam antara PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang dan Perusahaan No.588/SP/DIR/2024 tanggal 14 Agustus 2024 dan perubahannya pada tanggal 8 Desember 2025/Sale and purchase of natural gas agreement between PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang and the Company No.588/SP/DIR/2024 dated 14 August 2024 and its amendments dated 8 December 2025.	11 – 57 BBTUD	11 September/ September 2024 - 31 Desember/ December 2035
PT Tropik Energi Pandan	Kesepakatan Bersama Implementasi Kepmen ESDM 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tanggal 19 Juni 2023/Joint Decree on the Implementation of Minister of Energy and Mineral Resources 91.K/MG.01/MEM.M/2023 dated 19 June 2023.	1 – 10 BBTUD	1 September/ September 2019 - 31 Desember/ December 2027
PT Medco E&P Grissik	Perubahan terhadap Surat Perjanjian untuk implementasi atas penyesuaian harga gas bumi tanggal 1 Desember 2021 dan perubahannya pada tanggal 20 Desember 2023 dan perubahan pada tanggal 26 September 2025/Amendments to the Letter of Agreement for the implementation of natural gas prices adjustments dated 1 December 2021 and amendments dated 20 December 2023 and amendments dated 26 September 2025.	52-78 BBTUD	20 Desember/ December 2023 - 31 Desember/ December 2028
PT Medco E&P Indonesia	Perjanjian Jual Beli gas alam antara PT Medco E&P Indonesia dan Perusahaan No.598/SP/DIR/2021 tanggal 1 Desember 2021 dengan penambahan terakhir No.592A/SP/DIR/2022 tanggal 25 November 2022/Sale and purchase of natural gas agreement between PT Medco E&P Indonesia and the Company No.598/SP/DIR/2021 dated 1 December 2021 with the latest addition No.592A/SP/DIR/2022 dated 25 November 2022.	5 - 15 BBTUD	1 Agustus/ August 2021 - 27 November/ November 2033
PT Medco E&P Indonesia dan/and PT Medco E&P Lematang	Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PT Medco E&P Indonesia dan PT Medco E&P Lematang dan Perusahaan No.492A/SP/DIR/2023 tanggal 20 September 2023/ Sale and Purchase Agreement on Natural Gas between PT Medco E&P Indonesia and PT Medco E&P Lematang and the Company No.492A/SP/DIR/2023 dated 20 September 2023.	5 – 17.63 BBTUD	1 Januari/ January 2023 - 27 November/ November 2033
PT Bukit Asam Tbk	Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT Bukit Asam Tbk dan Perusahaan No. 029/SP/DIR/2023 tanggal 17 Januari 2023 dan perubahannya pada tanggal 9 Januari 2026/Coal Sale and Purchase Agreement between PT Bukit Asam Tbk and the Company No. 029/SP/DIR/2023 dated 17 January 2023 and its amendments on 9 January 2026.	580.000 ton untuk 1 tahun dengan deviasi 10%/tons for 1 years with 10% deviation	17 Januari/ January 2023 – 31 Desember/ December 2026

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

Lampiran 5/76 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERJANJIAN SIGNIFIKAN DAN PERIKATAN
(lanjutan)

iii. Perjanjian kontrak konstruksi

Pada tanggal 13 Oktober 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian kontrak konstruksi dengan Wuhuan Engineering Co, Ltd dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk terkait proyek pembangunan Pabrik Pusri-IIIB Amonia dan Urea yang diperkirakan akan selesai pada bulan Maret 2027. Nilai kontrak dengan Wuhuan Engineering Co, Ltd sebesar USD456.255.000 dan Rp1.171.673 dan dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp1.445.857.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(continued)

iii. Construction contracts agreements

On 13 October 2023, the Company entered into construction contract with Wuhuan Engineering Co, Ltd and PT Adhi Karya (Persero) Tbk related to the construction of the Ammonia and Urea Pusri-IIIB Plant, which estimated to be completed in March 2027. The contract price with Wuhuan Engineering Co, Ltd amounting to USD456,255,000 and Rp1,171,673 and with PT Adhi Karya (Persero) Tbk amounting to Rp1,445,857.

32. TRANSAKSI NON KAS

Berikut adalah aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas, sehingga tidak disajikan dalam laporan arus kas konsolidasian:

32. NON CASH TRANSACTIONS

Below are the investing and financing activities that do not require the use of cash and cash equivalents, which are not presented in the consolidated statement of cash flows:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Aktivitas investasi			Investing activities
Penambahan aset tetap melalui akrual	1,309,226	1,230,095	Acquisition of fixed assets through accrual
Penambahan aset tetap melalui liabilitas sewa	57,339	14,670	Acquisition of fixed assets through lease liabilities
Penambahan aset dalam penyelesaian melalui kapitalisasi biaya pinjaman yang belum dibayar	233,732	140,028	Acquisition of assets under construction through capitalisation of unpaid borrowing cost
Penambahan aset dalam penyelesaian melalui uang muka	701,295	172,313	Acquisition of asset under construction through advance settlement
Penambahan aset tetap melalui persediaan	13,211	17,524	Acquisition of fixed assets through inventories

33. REKONSILIASI UTANG BERSIH

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

33. NET DEBT RECONCILIATION

The table below sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2025 and 2024:

	<u>Liabilitas sewa/ Lease liabilities</u>	<u>Pinjaman jangka pendek/ Short-term loans</u>	<u>Pinjaman jangka panjang/ Long-term loans</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
Saldo pada 1 Januari 2024	<u>26,863</u>	<u>600,000</u>	<u>4,799,915</u>	<u>5,426,778</u>	Balance as at 1 January 2024
Arus kas masuk	-	5,480,000	2,381,101	7,861,101	Cash in flows
Arus kas keluar	(30,445)	(6,080,000)	(4,118,417)	(10,228,862)	Cash out flows
Penambahan di tahun berjalan	14,670	-	-	14,670	Addition in current year
Transaksi non kas lainnya	-	-	108,351	108,351	Other non-cash transactions
Saldo pada 31 Desember 2024	<u>11,088</u>	<u>-</u>	<u>3,170,950</u>	<u>3,182,038</u>	Balance as at 31 December 2024
Arus kas masuk	-	9,230,000	5,512,189	14,742,189	Cash in flows
Arus kas keluar	(38,796)	(9,230,000)	(775,000)	(10,043,796)	Cash out flows
Penambahan di tahun berjalan	57,339	-	-	57,339	Addition in current year
Transaksi non kas lainnya	-	-	233,732	233,732	Other non-cash transactions
Saldo pada 31 Desember 2025	<u>29,631</u>	<u>-</u>	<u>8,141,871</u>	<u>8,171,502</u>	Balance as at 31 December 2025

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. KEJADIAN SETELAH PERIODE PELAPORAN**Peraturan yang diterbitkan setelah periode pelaporan**

Sehubungan dengan diterbitkannya Perpres No. 113 Tahun 2025 tanggal 24 Oktober 2025, yang mengubah Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, peraturan turunan yang diterbitkan pada periode setelah pelaporan adalah sebagai berikut:

- Permentan No. 3 Tahun 2026 diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2026, mengubah Permentan No. 15 Tahun 2025 mengenai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi;
- Permentan No. 6 Tahun 2026 yang diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2026 mengenai Prosedur Perhitungan Nilai Komersial dan Komponen Bahan Baku Pupuk Bersubsidi, menggantikan Permentan No. 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi; dan
- PMK No. 19 Tahun 2026 yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2026, mengenai Perubahan Kedua atas PMK Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

Peraturan-peraturan ini menjadi dasar bagi mekanisme pengelolaan subsidi pupuk yang berbasis *mark-to-market*.

Penerimaan uang muka dari Pemerintah Indonesia berkaitan dengan implementasi *mark-to-market*

Berdasarkan Berita Acara Pembayaran No. BA/46/SR.340/B.4/03/2026 dan surat No. 01440/A/KU/B0103/SP/2026 tanggal 31 Maret 2026 terkait pembayaran atas pengadaan bahan baku subsidi pupuk Urea dan NPK, Perusahaan telah menerima uang muka dari Pemerintah Indonesia sehubungan dengan penerapan mekanisme *mark-to-market*, masing-masing sebesar Rp3.354.896 untuk Urea dan Rp871.226 untuk NPK (tidak termasuk PPN dan PPh 22).

34. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD**Regulations issued after the reporting period**

Following the issuance by the Perpres No. 113 of 2025 dated 24 October 2025, which amends Perpres No. 6 of 2025 on the Governance of Subsidised Fertiliser, the derivative regulation issued in the period after reporting as follows:

- Permentan No. 3 of 2026, issued on 20 February 2026, amends Permentan No. 15 of 2025 concerning the implementation Regulation of Presidential Regulation No. 6 of 2025 on the Governance of Subsidised Fertilisers;
- Permentan No. 6 of 2026, issued on 3 March 2026, concerning the Procedure for Calculating the Commercial Value and Raw Material Components of Subsidised Fertilisers, replacing Permentan No. 28 of 2020 regarding the Cost of Goods Sold Components of Subsidised Fertilisers; and
- PMK No. 19 of 2026 issued on 27 March 2026, regarding the Second Amendment to PMK No. 68/PMK.02/2016 on Procedures for Provision, Disbursement and Accountability of Fertiliser Subsidy Funds.

These regulations form the basis for a mark-to-market based mechanism for subsidy fertiliser.

Advance receipt from Government of Indonesia related to *mark-to-market*

Based on Minutes of Payment No. BA/46/SR.340/B.4/03/2026 and Letter No. 01440/A/KU/B0103/SP/2026 dated 31 March 2026 regarding the payment for the procurement of subsidised Urea and NPK fertiliser raw materials, the Company received an advance payment from the Government of Indonesia in connection with the implementation of the mark-to-market mechanism, amounting to Rp3,354,896 for Urea and Rp871,226 for NPK (excluding VAT and income tax article 22).

Lampiran 5/78 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**35. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 6 Mei 2026.

**35. MANAGEMENT RESPONSIBILITY ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

The Group's management is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements that were authorised to be issued by the Board of Directors on 6 May 2026.

36. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Informasi keuangan tambahan pada Lampiran 5/80 sampai dengan Lampiran 5/85 adalah informasi keuangan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (entitas induk saja) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 yang menyajikan investasi Perusahaan pada entitas anak berdasarkan metode biaya dan bukan dengan metode konsolidasi serta investasi Perusahaan pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas.

36. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

The supplementary financial information on Schedule 5/80 up to Schedule 5/85 represents financial information of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (parent entity only) as at and for the years ended 31 December 2025 and 2024 which present the Company's investment in subsidiary under the cost method, as opposed to the consolidation method and investment in associate accounted under the equity method.

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION**PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
ENTITAS INDUK SAJA/PARENT COMPANY ONLY****Lampiran 5/80 Schedule****LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	305,823	703,485	Cash and cash equivalents
Piutang usaha:			Trade receivables:
- Pihak berelasi	164,248	108,630	Related parties -
- Pihak ketiga	34,668	89,437	Third parties -
Piutang subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia	2,349,248	-	Subsidy receivables from the Government of Republic Indonesia
Piutang subsidi yang belum ditagih	148,265	108,612	Unbilled subsidy receivables
Pajak dibayar di muka:			Prepaid taxes:
- Pajak penghasilan badan	3,515	185,779	Corporate income tax -
- Pajak lainnya	177,751	100,787	Other taxes -
Persediaan	1,409,506	1,497,689	Inventories
Uang muka dan biaya dibayar di muka, bagian lancar	630,001	73,672	Advances and prepayments, current portion
Piutang lainnya:			Other receivables:
- Pihak berelasi	70,884	64,490	Related parties -
- Pihak ketiga	34,146	9,423	Third parties -
Aset lancar lainnya	3,446	7,625	Other current assets
Jumlah aset lancar	<u>5,331,501</u>	<u>2,949,629</u>	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Piutang subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia	81,612	43,205	Subsidy receivables from the Government of Republic Indonesia
Pajak dibayar di muka			Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan	152,275	54,019	Corporate income taxes -
Investasi pada entitas anak dan asosiasi	117,532	128,719	Investment in subsidiary and associate
Aset keuangan tidak lancar lainnya	56,389	45,440	Other non-current financial assets
Uang muka dan biaya dibayar di muka	276,516	643,459	Advances and prepayments
Properti investasi	875,052	884,944	Investment properties
Aset tetap	25,265,060	20,755,051	Fixed assets
Aset tidak lancar lainnya	33,193	21,262	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar	<u>26,857,629</u>	<u>22,576,099</u>	Total non-current assets
JUMLAH ASET	<u>32,189,130</u>	<u>25,525,728</u>	TOTAL ASSETS

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION**PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG****ENTITAS INDUK SAJA/PARENT COMPANY ONLY****Lampiran 5/81 Schedule****LAPORAN POSISI KEUANGAN****31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**AS AT 31 DECEMBER 2025***(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

	2025	2024	
LIABILITAS			LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang usaha:			Trade payables:
- Pihak berelasi	121,590	52,291	Related parties -
- Pihak ketiga	143,791	75,226	Third parties -
Kelebihan subsidi yang dibayar oleh Pemerintah Republik Indonesia	-	31,921	Excess subsidy paid by the Government of Republic of Indonesia
Utang lainnya:			Other payables:
- Pihak berelasi	69,626	2,958	Related parties -
- Pihak ketiga	159,886	97,804	Third parties -
Liabilitas yang masih harus dibayar	2,545,006	2,178,985	Accrued liabilities
Utang pajak:			Taxes payable:
- Pajak penghasilan badan	67,562	11,142	Corporate income tax -
- Pajak lainnya	62,211	83,866	Other taxes -
Bagian jangka pendek atas:			Current portion of:
- Liabilitas sewa	24,338	7,529	Lease liabilities -
- Liabilitas imbalan kerja	297,761	244,349	Employee benefits liabilities -
Jumlah liabilitas jangka pendek	<u>3,491,771</u>	<u>2,786,071</u>	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan	212,659	303,974	Deferred tax liabilities
Bagian jangka panjang atas:			Non-current portion of:
- Liabilitas sewa	5,293	3,559	Lease liabilities -
- Pinjaman jangka panjang	8,134,677	3,168,146	Long-term loans -
- Liabilitas imbalan kerja	1,120	4,281	Employee benefits liabilities -
Liabilitas imbalan pascakerja	702,076	476,234	Post-employment benefits liabilities
Utang retensi:			Retention payable:
- Pihak berelasi	51,277	15,926	Related party -
- Pihak ketiga	290,858	117,460	Third party -
Jumlah liabilitas jangka panjang	<u>9,397,960</u>	<u>4,089,580</u>	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS	<u>12,889,731</u>	<u>6,875,651</u>	TOTAL LIABILITIES

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION**PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG****ENTITAS INDUK SAJA/PARENT COMPANY ONLY****Lampiran 5/82 Schedule****LAPORAN POSISI KEUANGAN****31 DESEMBER 2025**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**31 DECEMBER 2025**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
EKUITAS			EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			Equity attributable to owner of the parent entity
Modal saham - modal dasar 15.000.000 lembar saham; ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 5.799.999 saham biasa Seri B dengan nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	5,800,000	5,800,000	Share capital - authorised 15,000,000 shares; issued and fully paid - 1 Class A Dwiwarna shares and 5,799,999 Class B shares at a par value of Rp1,000,000 (full amount) per shares
Tambahan modal disetor	(333,876)	(333,876)	Additional paid-in-capital
Saldo laba:			Retained earnings:
- Ditentukan penggunaannya	6,718,140	5,792,711	Appropriated -
- Belum ditentukan penggunaannya	627,428	1,087,469	Unappropriated -
Penghasilan komprehensif lain	6,487,707	6,303,773	Other comprehensive income
JUMLAH EKUITAS	<u>19,299,399</u>	<u>18,650,077</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>32,189,130</u>	<u>25,525,728</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
ENTITAS INDUK SAJA/PARENT COMPANY ONLY

Lampiran 5/83 Schedule

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Pendapatan	13,873,321	13,493,283	Revenue
Beban pokok pendapatan	(12,112,709)	(11,650,120)	Cost of revenues
LABA BRUTO	1,760,612	1,843,163	GROSS PROFIT
Beban penjualan	(300,163)	(321,728)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(456,777)	(277,511)	General and administrative expenses
Pendapatan lainnya – bersih	(38,380)	423,475	Other income – net
Pendapatan keuangan	13,327	61,198	Finance income
Biaya keuangan	(129,109)	(269,817)	Finance costs
Bagian atas rugi bersih dari entitas asosiasi	(11,186)	(40,226)	Shares of net loss from associates
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	838,324	1,418,554	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	(210,896)	(331,085)	Income tax expenses
LABA TAHUN BERJALAN	627,428	1,087,469	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Surplus revaluasi aset tetap	302,881	-	Asset revaluation surplus
Kerugian pengukuran kembali imbalan pascakerja	(166,528)	(461,365)	Remeasurement loss on post-employment benefits
Perubahan nilai wajar dari investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	10,945	3,055	Changes in the fair value equity investment at fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait	36,636	101,500	Related income tax
	183,934	(356,810)	
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	811,362	730,659	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT PUPUK SRIVIDJAJA PALEMBANG
ENTITAS INDUK SAJA/PARENT COMPANY ONLY

Lampiran 5/84 Schedule

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah)

	Saldo labai/ Retained earnings		Komponen ekuitas lainnya/ Other components of equity				Jumlah ekuitas/ Total equity	
	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in-capital	Ditentukan penggunaan/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaan/ Unappropriated	Surplus revaluasi aset/ Assets revaluation surplus	Pengukuran kembali imbalan pascakerjal/ Remeasurement on post- employment benefits	Aset keuangan tersedia untuk dijual/ Financial assets available for sale	
Saldo pada 1 Januari 2024	5.800.000	(333.876)	4.937.714	1.198.136	7.339.211	(667.417)	(11.211)	18.262.552
Dividen	-	-	-	(343.139)	-	-	-	(343.139)
Cadangan umum	-	-	854.997	(854.997)	-	-	-	-
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	1.087.489	-	(359.865)	3.055	730.659
Saldo pada 31 Desember 2024	5.800.000	(333.876)	5.792.711	1.087.489	7.339.211	(1.027.282)	(8.156)	18.650.072
Dividen	-	-	-	(162.040)	-	-	-	(162.040)
Cadangan umum	-	-	925.429	(925.429)	-	-	-	-
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	627.428	302.881	(129.892)	10.945	811.362
Saldo pada 31 Desember 2025	5.800.000	(333.876)	6.718.140	627.428	7.642.092	(1.157.174)	2.789	19.299.599

Balance as at
31 December 2025

Balance as at
1 January 2024
Dividends
General reserves
Total comprehensive
income for the year
Balance as at
31 December 2024
Dividends
General reserves
Total comprehensive
income for the year

INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
ENTITAS INDUK SAJA/PARENT COMPANY ONLY

Lampiran 5/85 Schedule

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	6,357,397	6,938,515	Receipts from customers
Penerimaan subsidi pupuk dari Pemerintah Indonesia	5,175,702	7,504,869	Receipts of fertiliser subsidy from the Government of Indonesia
Pembayaran subsidi pupuk kepada Pemerintah Indonesia	(88,749)	-	Payments of fertiliser subsidy to the Government of Indonesia
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(10,828,594)	(9,536,135)	Payment to suppliers and others
Pembayaran kepada karyawan	(1,081,286)	(1,048,782)	Payment to employees
Penerimaan pendapatan keuangan	13,327	66,047	Receipts of finance income
Pembayaran biaya keuangan	(142,141)	(329,427)	Payment of finance costs
Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan	72,670	-	Receipt of corporate income tax refund
Penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	-	(1,454)	Placement of restricted cash and cash equivalents
Penarikan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	3,161	-	Withdrawal of restricted cash and cash equivalents
Pembayaran pajak penghasilan badan	(197,571)	(242,780)	Payment of corporate income taxes
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	(716,084)	3,350,853	Net cash flows generated from operating activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI			INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan penjualan aset tetap	42	44,665	Proceeds from sale of fixed assets
Penerimaan dividen	6,099	2,323	Proceeds of dividends
Pembelian aset tak berwujud	(24,270)	-	Purchase of intangible assets
Penarikan deposito berjangka	-	1,751,000	Withdrawal of time deposits
Pembelian aset tetap	(4,197,319)	(3,181,258)	Purchase of fixed assets
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(4,215,448)	(1,383,270)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS			CASH FLOWS FROM
PENDANAAN			FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek	9,230,000	5,480,000	Proceeds of short-term bank loans
Penerimaan pinjaman bank jangka panjang	5,507,799	2,381,101	Proceeds of long-term bank loans
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek	(9,230,000)	(6,080,000)	Repayments of short-term bank loans
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	(775,000)	(4,118,417)	Repayments of long-term bank loans
Pembayaran liabilitas sewa	(38,796)	(31,834)	Payment of lease liabilities
Pembayaran dividen	(162,040)	(343,139)	Payment of dividends
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	4,531,963	(2,712,289)	Net cash flows (used in)/generated from financing activities
PENURUNAN BERSIH			NET DECREASE IN
KAS DAN SETARA KAS	(399,569)	(744,706)	CASH AND CASH EQUIVALENTS
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas	1,907	(5,219)	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
SALDO KAS DAN SETARA KAS			CASH AND CASH EQUIVALENTS AT
PADA AWAL TAHUN	703,485	1,453,410	THE BEGINNING OF THE YEAR
SALDO KAS DAN SETARA KAS			CASH AND CASH EQUIVALENTS
PADA AKHIR TAHUN	305,823	703,485	AT THE END OF THE YEAR

OVERCOMING CHANGE TO GROW HEALTHIER AND MORE COMPETITIVE

Mengatasi Tantangan Perubahan untuk
Tumbuh Semakin Kuat dan Berdaya Saing



**PUPUK SRIWIDJAJA
PALEMBANG**

Kantor Pusat
Head Office

Jl. Mayor Zen Palembang 30118, Indonesia
Tel. : +62 711 712222/712111
Fax. : +62 711 712100/712020
E-mail : info@pusri.co.id

Kantor Perwakilan Jakarta
Jakarta Representative Office

Wisma 101
Jl. Letjen S Parman Kav 101
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
DKI Jakarta, 11410, Indonesia

Layanan Pelanggan
Customer Service

Hallo PUSRI 08001008001

Situs Web
Website

www.pusri.co.id

